DOKUMEN RP3



TAHUN ANGGARAN
2022

PENYUSUNAN DOKUMEN (RP3) RENCANA PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN KABUPATEN PURBALINGGA

Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
Jl. Jambu Karang, Purbalingga, Purbalingga Lor, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53311

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan (RP3) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022 dapat selesai disusun. Dokumen ini berisi tentang pendahuluan, tinjauan kebijakan pembangunan daerah, gambaran umum wilayah, analisis pembangunan dan pengembangan perumahan, kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan, rencana penyediaan kebutuhan perumahan, rencana keterpaduan PSU perumahan, serta indikasi program pembangunan dan pengembangan perumahan Kabupaten Purbalingga.

Penyusun menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam Dokumen ini untuk itu kritik dan saran terhadap penyempurnaan Dokumen ini sangat diharapkan. Semoga dokumen ini dapat memberi maanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maupun bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR xxiii

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum I-2
1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran I-3
1.3.1. Maksud I-3
1.3.2. Tujuan I-3
1.3.3. Sasaran I-3
1.4. Ruang Lingkup I-3
1.4.1. Lingkup Kegiatan I-3
1.4.2. Lingkup Wilayah I-4
1.5. Sistematika Penulisan Laporan I-6

BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH II-1
2.1. Tinjauan Umum Kebijakan Pembangunan II-1
2.1.1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-1
2.1.2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ..... II-3
2.1.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 ..... II-5
2.2. Tinjauan Umum Kebijakan Penataan Ruang II-7
2.2.1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional II-7
2.2.2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 ..... II-9
2.2.3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 ..... II-12
2.3. Tinjauan Umum Kebijakan Sektoral II-17
2.3.1. Rencana Induk SPAM (RI-SPAM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2033 ..... II-17
2.3.2. Strategi Sanitasi Kabupaten Purbalingga (SSK) Tahun 2021-2026 ..... II-19
2.3.3. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Purbalingga (RP2KPKPK) Tahun 2021 ..... II-22

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH III-1
3.1. Kecamatan Purbalingga III-1
3.1.1. Kondisi Fisik Kawasan III-1
3.1.2. Kondisi Kependudukan, Sosial, dan Budaya III-15

3.1.3. Kondisi Perekonomian III-18
3.1.4. Kondisi Perumahan III-19
3.1.5. Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan III-32
3.2. Kecamatan Kalimanah III-40
3.2.1. Kondisi Fisik Kawasan III-40
3.2.2. Kondisi Kependudukan, Sosial, dan Budaya III-55
3.2.3. Kondisi Perekonomian III-59
3.2.4. Kondisi Perumahan III-60
3.2.5. Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan III-73
3.3. Kecamatan Padamara III-80
3.3.1. Kondisi Fisik Kawasan III-80
3.3.2. Kondisi Kependudukan, Sosial, dan Budaya III-94
3.3.3. Kondisi Perekonomian III-97
3.3.4. Kondisi Perumahan III-99
3.3.5. Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan III-111
3.4. Kecamatan Bojongsari III-117
3.4.1. Kondisi Fisik Kawasan III-117
3.4.2. Kondisi Kependudukan, Sosial, dan Budaya III-134
3.4.3. Kondisi Perekonomian III-137
3.4.4. Kondisi Perumahan III-138
3.4.5. Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan III-149
3.5. Kecamatan Kutasari III-155
3.5.1. Kondisi Fisik Kawasan III-155
3.5.2. Kondisi Kependudukan, Sosial, dan Budaya III-172
3.5.3. Kondisi Perekonomian III-175
3.5.4. Kondisi Perumahan III-177
3.5.5. Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan III-186
3.6. Kecamatan Kaligondang III-192
3.6.1. Kondisi Fisik Kawasan III-192
3.6.2. Kondisi Kependudukan, Sosial, dan Budaya III-209
3.6.3. Kondisi Perekonomian III-213
3.6.4. Kondisi Perumahan III-214
3.6.5. Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan III-227
3.7. Kondisi Kelembagaan dan Pembiayaan Pembangunan Perumahan III-233

BAB IV ANALISIS PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN IV-1
4.1. Analisis Implikasi Kebijakan Pembangunan Daerah IV-1
4.1.1. Implikasi Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nasional dan Provinsi IV-1
4.1.1.1. Implikasi Kebijakan Pembangunan Nasional IV-1
4.1.1.2. Implikasi Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah IV-2
4.1.1.3. Implikasi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Purbalingga IV-3
4.1.2. Review Implikasi Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten, dan Kawasan Perkotaan Purbalingga IV-3
4.1.2.1. Implikasi Kebijakan Penataan Ruang Nasional IV-3
4.1.2.2. Implikasi Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah IV-5
4.1.3. Review Implikasi Kebijakan Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten IV-7
4.1.3.1. Implikasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 ..... IV-7
4.1.3.2. Implikasi Rencana Induk SPAM (RI-SPAM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2033 ..... IV-18

4.1.3.3. Implikasi Strategi Sanitasi Kabupaten Purbalingga (SSK) Tahun 2021-2026 ..... IV-20
4.1.4. Kajian Kedudukan dan Peran Satuan Perumahan dalam Rencana Pembangunan Kabupaten IV-22
4.1.4.1. Kedudukan dan Peran Perumahan sesuai Arahan Rencana Struktur Ruang IV-22
4.1.4.2. Kedudukan dan Peran Perumahan sesuai Arahan Rencana Pola Ruang IV-23
4.1.4.3. Kedudukan dan Peran Perumahan sesuai Arahan Rencana Kawasan Strategis IV-25
4.1.5. Identifikasi Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan IV-26
4.2. Analisis Delineasi Satuan Perumahan IV-29
4.2.1. Pendekatan dan Dasar Penentuan Delineasi IV-29
4.2.2. Analisis Pembagian Satuan Perumahan IV-31
4.3. Analisis Fisik Dasar IV-40
4.3.1. Analisis Kemampuan Lahan IV-40
4.3.2. Analisis Daya Tampung Perumahan IV-55
4.3.2.1. Lingkungan Hunian Purbalingga IV-56
4.3.2.2. Lingkungan Hunian Kalimanah IV-58
4.3.2.3. Lingkungan Hunian Padamara IV-60
4.3.2.4. Lingkungan Hunian Bojongsari IV-62
4.3.2.5. Lingkungan Hunian Kutasari IV-64
4.3.2.6. Lingkungan Hunian Kaligondang IV-66
4.4. Analisis Kepadatan dan Proyeksi Penduduk IV-63
4.4.1. Analisis Distribusi dan Kepadatan Penduduk IV-68
4.4.1.1. Lingkungan Hunian Purbalingga IV-68
4.4.1.2. Lingkungan Hunian Kalimanah IV-69
4.4.1.3. Lingkungan Hunian Padamara IV-70
4.4.1.4. Lingkungan Hunian Bojongsari IV-72
4.4.1.5. Lingkungan Hunian Kutasari IV-73
4.4.1.6. Lingkungan Hunian Kaligondang IV-74
4.4.2. Analisis Proyeksi Penduduk IV-75
4.4.3. Analisis Potensi Sosial Budaya Masyarakat IV-79
4.4.4. Analisis Pola Budaya Bermukim Masyarakat IV-80
4.5. Analisis Perekonomian IV-80
4.5.1. Analisis Potensi Ekonomi Dominan dan Unggulan IV-80
4.5.2. Analisis Keterkaitan Kegiatan Ekonomi dengan Penyediaan Perumahan IV-82
4.5.3. Analisis Supply dan Demand Perumahan IV-83
4.6. Analisis Penyediaan dan Kebutuhan Pengembangan Perumahan IV-83
4.6.1. Analisis Kondisi dan Karakteristik Satuan Perumahan IV-83
4.6.2. Analisis Peran dan Fungsi Satuan Perumahan Berdasarkan Karakteristik Kegiatan Kawasan IV-107
4.6.3. Analisis Pengembangan Satuan Perumahan Berdasarkan Proyeksi Penduduk IV-110
4.6.4. Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan (Backlog) Rumah IV-114
4.6.5. Analisis Pencegahan Perumahan Kumuh IV-118
4.6.6. Analisis Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh IV-121
4.6.7. Analisis Pembangunan Perumahan Baru IV-157
4.6.8. Analisis Penataan Perumahan Pada Kawasan Strategis IV-173
4.6.9. Analisis Penanganan Rumah Korban Terdampak Bencana IV-173

4.6.10. Analisis Penanganan Rumah Terkena Relokasi Program Pemerintah IV-178
4.7. Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan PSU Perumahan IV-185
4.7.1. Analisis Kebutuhan Penyediaan PSU Perumahan IV-185
4.7.1.1. Lingkungan Hunian Purbalingga IV-185
4.7.1.2. Lingkungan Hunian Kalimanah IV-204
4.7.1.3. Lingkungan Hunian Padamara IV-223
4.7.1.4. Lingkungan Hunian Bojongsari IV-243
4.7.1.5. Lingkungan Hunian Kutasari IV-263
4.7.1.6. Lingkungan Hunian Kaligondang IV-283
4.7.2. Analisis Keterpaduan PSU Perumahan IV-304
4.7.2.1. Rencana Keterpaduan Penyediaan Prasarana Lingkungan Hunian IV-304
4.7.2.2. Rencana Keterpaduan Penyediaan Sarana Lingkungan Hunian IV-312
4.7.2.3. Rencana Keterpaduan Jaringan Utilitas Lingkungan Hunian IV-318
4.8. Analisis Kelembagaan dan Pembiayaan Pembangunan Perumahan IV-320
4.8.1. Analisis Kapasitas Kelembagaan dan Peran Pelaku Pembangunan Perumahan IV-320
4.8.2. Analisis Kinerja Pembiayaan Pembangunan Perumahan IV-326

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN V-1
5.1. Isu Strategis Pembangunan dan Pengembangan Perumahan V-1
5.2. Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan V-1
5.3. Arahan Pengembangan Kebutuhan Penyediaan Perumahan V-2
5.3.1. Lingkungan Hunian Purbalingga V-2
5.3.2. Lingkungan Hunian Kalimanah V-3
5.3.3. Lingkungan Hunian Padamara V-4
5.3.4. Lingkungan Hunian Bojongsari V-4
5.3.5. Lingkungan Hunian Kutasari V-5
5.3.6. Lingkungan Hunian Kaligondang V-6
5.4. Arahan Pengembangan Keterpaduan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan V-7
5.4.1. Arahan Pengembangan Keterpaduan Prasarana Perumahan V-7
5.4.2. Arahan Pengembangan Keterpaduan Sarana Perumahan V-8
5.4.3. Arahan Pengembangan Keterpaduan Utilitas Perumahan V-9

BAB VI RENCANA PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH VI-1
6.1. Rencana Lingkungan Hunian Purbalingga VI-1
6.2. Rencana Lingkungan Hunian Kalimanah VI-7
6.3. Rencana Lingkungan Hunian Padamara VI-13
6.4. Rencana Lingkungan Hunian Bojongsari VI-19
6.5. Rencana Lingkungan Hunian Kutasari VI-25
6.6. Rencana Lingkungan Hunian Kaligondang VI-31

BAB VII RENCANA KETERPADUAN PSU PERUMAHAN VII-1
7.1. Lingkungan Hunian Purbalingga VII-1
7.1.1. Rencana Keterpaduan Prasarana Perumahan VII-1
7.1.1.1. Rencana Pelayanan Jaringan Jalan VII-1
7.1.1.2. Rencana Pelayanan Jaringan Drainase VII-2
7.1.1.3. Rencana Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum VII-3
7.1.1.4. Rencana Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah VII-6

7.1.1.5. Rencana Pelayanan Sistem Pengolahan Persampahan VII-7
7.1.1.6. Rencana Pelayanan Sistem Proteksi Kebakaran VII-9
7.1.2. Rencana Keterpaduan Sarana Perumahan VII-13
7.1.2.1. Rencana Pelayanan Sarana Pemerintahan VII-13
7.1.2.2. Rencana Pelayanan Sarana Pendidikan VII-14
7.1.2.3. Rencana Pelayanan Sarana Kesehatan VII-16
7.1.2.4. Rencana Pelayanan Sarana Perdagangan VII-20
7.1.2.5. Rencana Pelayanan Sarana Peribadatan VII-22
7.1.2.6. Rencana Pelayanan Sarana Budaya dan Rekreasi VII-25
7.1.2.7. Rencana Pelayanan Sarana Ruang Terbuka Hijau VII-26
7.1.3. Rencana Keterpaduan Utilitas Perumahan VII-29
7.1.3.1. Rencana Pelayanan Jaringan Listrik VII-29
7.1.3.2. Rencana Pelayanan Jaringan Telekomunikasi VII-30
7.2. Lingkungan Hunian Kalimanah VII-33
7.2.1. Rencana Pelayanan Prasarana VII-33
7.2.1.1. Rencana Pelayanan Jaringan Jalan VII-33
7.2.1.2. Rencana Pelayanan Jaringan Drainase VII-34
7.2.1.3. Rencana Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum VII-35
7.2.1.4. Rencana Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah VII-38
7.2.1.5. Rencana Pelayanan Sistem Pengolahan Persampahan VII-40
7.2.1.6. Rencana Pelayanan Sistem Proteksi Kebakaran VII-42
7.2.2. Rencana Pelayanan Sarana VII-45
7.2.2.1. Rencana Pelayanan Sarana Pemerintahan VII-45
7.2.2.2. Rencana Pelayanan Sarana Pendidikan VII-46
7.2.2.3. Rencana Pelayanan Sarana Kesehatan VII-48
7.2.2.4. Rencana Pelayanan Sarana Perdagangan VII-52
7.2.2.5. Rencana Pelayanan Sarana Peribadatan VII-54
7.2.2.6. Rencana Pelayanan Sarana Budaya dan Rekreasi VII-56
7.2.2.7. Rencana Pelayanan Sarana Ruang Terbuka Hijau VII-57
7.2.3. Rencana Pelayanan Utilitas VII-60
7.2.3.1. Rencana Pelayanan Jaringan Listrik VII-60
7.2.3.2. Rencana Pelayanan Jaringan Telekomunikasi VII-61
7.3. Lingkungan Hunian Padamara VII-65
7.3.1. Rencana Pelayanan Prasarana VII-65
7.3.1.1. Rencana Pelayanan Jaringan Jalan VII-65
7.3.1.2. Rencana Pelayanan Jaringan Drainase VII-66
7.3.1.3. Rencana Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum VII-67
7.3.1.4. Rencana Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah VII-70
7.3.1.5. Rencana Pelayanan Sistem Pengolahan Persampahan VII-72
7.3.1.6. Rencana Pelayanan Sistem Proteksi Kebakaran VII-74
7.3.2. Rencana Pelayanan Sarana VII-77
7.3.2.1. Rencana Pelayanan Sarana Pemerintahan VII-77
7.3.2.2. Rencana Pelayanan Sarana Pendidikan VII-78
7.3.2.3. Rencana Pelayanan Sarana Kesehatan VII-80
7.3.2.4. Rencana Pelayanan Sarana Perdagangan VII-84
7.3.2.5. Rencana Pelayanan Sarana Peribadatan VII-86
7.3.2.6. Rencana Pelayanan Sarana Budaya dan Rekreasi VII-88
7.3.2.7. Rencana Pelayanan Sarana Ruang Terbuka Hijau VII-89
7.3.3. Rencana Pelayanan Utilitas VII-92
7.3.3.1. Rencana Pelayanan Jaringan Listrik VII-92
7.3.3.2. Rencana Pelayanan Jaringan Telekomunikasi VII-93
7.4. Lingkungan Hunian Bojongsari VII-96
7.4.1. Rencana Pelayanan Prasarana VII-96

7.4.1.1. Rencana Pelayanan Jaringan Jalan VII-96
7.4.1.2. Rencana Pelayanan Jaringan Drainase VII-97
7.4.1.3. Rencana Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum VII-98
7.4.1.4. Rencana Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah VII-101
7.4.1.5. Rencana Pelayanan Sistem Pengolahan Persampahan VII-103
7.4.1.6. Rencana Pelayanan Sistem Proteksi Kebakaran VII-105
7.4.2. Rencana Pelayanan Sarana VII-108
7.4.2.1. Rencana Pelayanan Sarana Pemerintahan VII-108
7.4.2.2. Rencana Pelayanan Sarana Pendidikan VII-109
7.4.2.3. Rencana Pelayanan Sarana Kesehatan VII-111
7.4.2.4. Rencana Pelayanan Sarana Perdagangan VII-115
7.4.2.5. Rencana Pelayanan Sarana Peribadatan VII-117
7.4.2.6. Rencana Pelayanan Sarana Budaya dan Rekreasi VII-119
7.4.2.7. Rencana Pelayanan Sarana Ruang Terbuka Hijau VII-120
7.4.3. Rencana Pelayanan Utilitas VII-123
7.4.3.1. Rencana Pelayanan Jaringan Listrik VII-123
7.4.3.2. Rencana Pelayanan Jaringan Telekomunikasi VII-123
7.5. Lingkungan Hunian Kutasari VII-128
7.5.1. Rencana Pelayanan Prasarana VII-128
7.5.1.1. Rencana Pelayanan Jaringan Jalan VII-128
7.5.1.2. Rencana Pelayanan Jaringan Drainase VII-129
7.5.1.3. Rencana Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum VII-130
7.5.1.4. Rencana Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah VII-133
7.5.1.5. Rencana Pelayanan Sistem Pengolahan Persampahan VII-134
7.5.1.6. Rencana Pelayanan Sistem Proteksi Kebakaran VII-136
7.5.2. Rencana Pelayanan Sarana VII-139
7.5.2.1. Rencana Pelayanan Sarana Pemerintahan VII-139
7.5.2.2. Rencana Pelayanan Sarana Pendidikan VII-140
7.5.2.3. Rencana Pelayanan Sarana Kesehatan VII-142
7.5.2.4. Rencana Pelayanan Sarana Perdagangan VII-146
7.5.2.5. Rencana Pelayanan Sarana Peribadatan VII-148
7.5.2.6. Rencana Pelayanan Sarana Budaya dan Rekreasi VII-150
7.5.2.7. Rencana Pelayanan Sarana Ruang Terbuka Hijau VII-151
7.5.3. Rencana Pelayanan Utilitas VII-154
7.5.3.1. Rencana Pelayanan Jaringan Listrik VII-154
7.5.3.2. Rencana Pelayanan Jaringan Telekomunikasi VII-155
7.6. Lingkungan Hunian Kaligondang VII-158
7.6.1. Rencana Pelayanan Prasarana VII-158
7.6.1.1. Rencana Pelayanan Jaringan Jalan VII-158
7.6.1.2. Rencana Pelayanan Jaringan Drainase VII-159
7.6.1.3. Rencana Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum VII-160
7.6.1.4. Rencana Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah VII-163
7.6.1.5. Rencana Pelayanan Sistem Pengolahan Persampahan VII-165
7.6.1.6. Rencana Pelayanan Sistem Proteksi Kebakaran VII-167
7.6.2. Rencana Pelayanan Sarana VII-170
7.6.2.1. Rencana Pelayanan Sarana Pemerintahan VII-170
7.6.2.2. Rencana Pelayanan Sarana Pendidikan VII-171
7.6.2.3. Rencana Pelayanan Sarana Kesehatan VII-173
7.6.2.4. Rencana Pelayanan Sarana Perdagangan VII-177
7.6.2.5. Rencana Pelayanan Sarana Peribadatan VII-179
7.6.2.6. Rencana Pelayanan Sarana Budaya dan Rekreasi VII-181
7.6.2.7. Rencana Pelayanan Sarana Ruang Terbuka Hijau VII-182
7.6.3. Rencana Pelayanan Utilitas VII-185

7.6.3.1. Rencana Pelayanan Jaringan Listrik VII-185
7.6.3.2. Rencana Pelayanan Jaringan Telekomunikasi..... VII-187

BAB VIII PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN VIII-1
8.1. Ketentuan Umum VIII-1
8.2. Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan..... VIII-2
8.3. Skenario Pelaksanaan Program..... VIII-3

DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Misi Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 II-2
Tabel II.2. Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 Terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman II-2
Tabel II.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ..... II-3
Tabel II.4. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2018-2023 ..... II-6
Tabel II.5. Rencana Pengembangan SPAM PDAM II-17
Tabel II.6. Rencana Pengembangan SPAM Non PDAM II-18
Tabel II.7. Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Purbalingga II-19
Tabel II.8. Konsep dan Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Kabupaten Purbalingga II-22
Tabel III.1. Luas Wilayah Kecamatan Purbalingga III-1
Tabel III.2. Jenis Tanah di Kecamatan Purbalingga III-3
Tabel III.3. DAS di Kecamatan Purbalingga III-7
Tabel III.4. Rawan Bencana di Kecamatan Purbalingga III-11
Tabel III.5. Luas Penggunaan Lahan di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020 (hektar) III-11
Tabel III.6. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020 ..... III-15
Tabel III.7. Kepadatan Penduduk di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020 ..... III-16
Tabel III.8. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kecamatan Purbalingga Tahun 2020 ..... III-16
Tabel III.9. Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020 ..... III-17
Tabel III.10. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020 ..... III-17
Tabel III.11. Sarana Perekonomian di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020 ..... III-19
Tabel III.12. Sebaran Perumahan di Kecamatan Purbalingga III-20
Tabel III.13. Jumlah Rumah di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020 ..... III-20
Tabel III.14. Perumahan Pengembang di Kecamatan Purbalingga III-22
Tabel III.15. Luas Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana III-24
Tabel III.16. Kekurangan Rumah/ Backlog di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020 ..... III-27
Tabel III.17. Sebaran Jumlah RTLH di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020 ..... III-27
Tabel III.18. Kepadatan Bangunan di Kecamatan Purbalingga III-28
Tabel III.19. Sebaran Kawasan Kumuh di Kecamatan Purbalingga III-28
Tabel III.20. Bank Sampah di Kecamatan Purbalingga III-31
Tabel III.21. Sarana Pendidikan di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020 ..... III-33
Tabel III.22. Sarana Peribadatan di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020 ..... III-34
Tabel III.23. Sarana Kesehatan di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020 ..... III-34
Tabel III.24. Bangunan/ Situs Cagar Budaya di Kecamatan Purbalingga III-35
Tabel III.25. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Kecamatan Purbalingga III-35
Tabel III.26. Jumlah dan Kondisi Lapangan Olahraga di Kecamatan Purbalingga III-36
Tabel III.27. Jumlah Pelanggan Listrik di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020 ..... III-37
Tabel III.28. Jumlah Menara Telekomunikasi dan Kondisi Sinyal Telepon Seluler di Kecamatan Purbalingga III-38

Tabel III.29. Luas Wilayah Kecamatan Kalimanah III-39
Tabel III.30. Jenis Tanah di Kecamatan Kalimanah III-43
Tabel III.31. DAS di Kecamatan Kalimanah..... III-46
Tabel III.32. Rawan Bencana di Kecamatan Kalimanah III-50
Tabel III.33. Luas Penggunaan Lahan di Kecamatan Kalimanah Tahun 2020 (hektar) III-50
Tabel III.34. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Kalimanah Tahun 2020 ..... III-54
Tabel III.35. Kepadatan Penduduk di Kecamatan Kalimanah Tahun 2020..... III-55
Tabel III.36. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kecamatan Kalimanah Tahun 2020 ..... III-55
Tabel III.37. Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kalimanah Tahun 2020..... III-56
Tabel III.38. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kecamatan Kalimanah Tahun 2020 ..... III-57
Tabel III.39. Sarana Perekonomian di Kecamatan Kalimanah Tahun 2020..... III-58
Tabel III.40. Sebaran Perumahan di Kecamatan Kalimanah III-59
Tabel III.41. Jumlah Rumah di Kecamatan Kalimanah Tahun 2020 ..... III-60
Tabel III.42. Perumahan Pengembang di Kecamatan Kalimanah III-62
Tabel III.43. Luas Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana..... III-63
Tabel III.44. Kekurangan Rumah/ Backlog di Kecamatan Kalimanah Tahun 2020..... III-66
Tabel III.45. Sebaran Jumlah RTLH di Kecamatan Kalimanah Tahun 2020..... III-66
Tabel III.46. Kepadatan Bangunan di Kecamatan Kalimanah III-67
Tabel III.47. Sebaran Kawasan Kumuh di Kecamatan Kalimanah..... III-68
Tabel III.48. Bank Sampah di Kecamatan Kalimanah III-70
Tabel III.49. Sarana Pendidikan di Kecamatan Kalimanah Tahun 2020..... III-72
Tabel III.50. Sarana Peribadatan di Kecamatan Kalimanah Tahun 2020 ..... III-72
Tabel III.51. Sarana Kesehatan di Kecamatan Kalimanah Tahun 2020..... III-73
Tabel III.52. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Kecamatan Kalimanah..... III-74
Tabel III.53. Jumlah dan Kondisi Lapangan Olahraga di Kecamatan Kalimanah III-74
Tabel III.54. Jumlah Pelanggan Listrik di Kecamatan Kalimanah Tahun 2020..... III-76
Tabel III.55. Jumlah Menara Telekomunikasi dan Kondisi Sinyal Telepon Seluler di Kecamatan Kalimanah III-76
Tabel III.56. Luas Wilayah Kecamatan Padamara..... III-77
Tabel III.57. DAS di Kecamatan Padamara III-83
Tabel III.58. Rawan Bencana di Kecamatan Padamara..... III-87
Tabel III.59. Luas Penggunaan Lahan di Kecamatan Padamara Tahun 2020 (hektar) III-87
Tabel III.60. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Padamara Tahun 2020 ..... III-91
Tabel III.61. Kepadatan Penduduk di Kecamatan Padamara Tahun 2020 ..... III-92
Tabel III.62. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kecamatan Padamara Tahun 2020 ..... III-92
Tabel III.63. Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kecamatan Padamara Tahun 2020 ..... III-93
Tabel III.64. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kecamatan Padamara Tahun 2020 ..... III-94
Tabel III.65. Sarana Perekonomian di Kecamatan Padamara Tahun 2020 ..... III-95
Tabel III.66. Sebaran Perumahan di Kecamatan Padamara III-96
Tabel III.67. Jumlah Rumah di Kecamatan Padamara Tahun 2020 ..... III-96
Tabel III.68. Perumahan Pengembang di Kecamatan Padamara..... III-98

Tabel III.69. Luas Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana..... III-100
Tabel III.70. Kekurangan Rumah/ Backlog di Kecamatan Padamara Tahun 2020 ..... III-103
Tabel III.71. Sebaran Jumlah RTLH di Kecamatan Padamara Tahun 2020..... III-103
Tabel III.72. Kepadatan Bangunan di Kecamatan Padamara III-104
Tabel III.73. Sebaran Kawasan Kumuh di Kecamatan Padamara III-105
Tabel III.74. Bank Sampah di Kecamatan Padamara..... III-107
Tabel III.75. Sarana Pendidikan di Kecamatan Padamara Tahun 2020 ..... III-109
Tabel III.76. Sarana Peribadatan di Kecamatan Padamara Tahun 2020..... III-109
Tabel III.77. Sarana Kesehatan di Kecamatan Padamara Tahun 2020 ..... III-110
Tabel III.78. Jumlah dan Kondisi Lapangan Olahraga di Kecamatan Padamara III-110
Tabel III.79. Jumlah Pelanggan Listrik di Kecamatan Padamara Tahun 2020 ... III-111
Tabel III.80. Jumlah Menara Telekomunikasi dan Kondisi Sinyal Telepon Seluler di Kecamatan Padamara..... III-112
Tabel III.81. Luas Wilayah Kecamatan Bojongsari III-113
Tabel III.82. Topografi di Kecamatan Bojongsari..... III-114
Tabel III.83. Jenis Tanah di Kecamatan Bojongsari..... III-117
Tabel III.84. Geologi di Kecamatan Bojongsari III-117
Tabel III.85. Hidrogeologi di Kecamatan Bojongsari..... III-121
Tabel III.86. DAS di Kecamatan Bojongsari..... III-121
Tabel III.87. Klimatologi di Kecamatan Bojongsari..... III-122
Tabel III.88. Rawan Bencana di Kecamatan Bojongsari..... III-126
Tabel III.89. Luas Penggunaan Lahan di Kecamatan Bojongsari Tahun 2020 (hektar) III-127
Tabel III.90. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Bojongsari Tahun 2020 ..... III-130
Tabel III.91. Kepadatan Penduduk di Kecamatan Bojongsari Tahun 2020 ..... III-131
Tabel III.92. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kecamatan Bojongsari Tahun 2020 ..... III-131
Tabel III.93. Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kecamatan Bojongsari Tahun 2020..... III-132
Tabel III.94. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kecamatan Bojongsari Tahun 2020..... III-133
Tabel III.95. Sarana Perekonomian di Kecamatan Bojongsari Tahun 2020 ..... III-134
Tabel III.96. Sebaran Perumahan di Kecamatan Bojongsari..... III-135
Tabel III.97. Jumlah Rumah di Kecamatan Bojongsari Tahun 2020..... III-135
Tabel III.98. Perumahan Pengembang di Kecamatan Bojongsari..... III-136
Tabel III.99. Luas Kawasan PKP Pada Kawasan Strategis III-137
Tabel III.100. Luas Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana..... III-139
Tabel III.101. Kekurangan Rumah/ Backlog di Kecamatan Bojongsari Tahun 2020 ..... III-144
Tabel III.102. Sebaran Jumlah RTLH di Kecamatan Bojongsari Tahun 2020 ..... III-144
Tabel III.103. Kepadatan Bangunan di Kecamatan Bojongsari..... III-145
Tabel III.104. Sarana Pendidikan di Kecamatan Bojongsari Tahun 2020 ..... III-149
Tabel III.105. Sarana Peribadatan di Kecamatan Bojongsari Tahun 2020 ..... III-149
Tabel III.106. Sarana Kesehatan di Kecamatan Bojongsari Tahun 2020 ..... III-150
Tabel III.107. Jumlah dan Kondisi Lapangan Olahraga di Kecamatan Bojongsari..... III-150
Tabel III.108. Jumlah Pelanggan Listrik di Kecamatan Bojongsari Tahun 2020 ..... III-151
Tabel III.109. Jumlah Menara Telekomunikasi dan Kondisi Sinyal Telepon Seluler di Kecamatan Bojongsari III-152

Tabel III.110. Luas Wilayah Kecamatan Kutasari III-153
Tabel III.111. Topografi di Kecamatan Kutasari..... III-156
Tabel III.112. Jenis Tanah di Kecamatan Kutasari..... III-156
Tabel III.113. Geologi di Kecamatan Kutasari III-157
Tabel III.114. Hidrogeologi di Kecamatan Kutasari..... III-161
Tabel III.115. DAS di Kecamatan Kutasari..... III-161
Tabel III.116. Klimatologi di Kecamatan Kutasari III-162
Tabel III.117. Rawan Bencana di Kecamatan Kutasari III-166
Tabel III.118. Luas Penggunaan Lahan di Kecamatan Kutasari Tahun 2020 (hektar) III-167
Tabel III.119. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Kutasari Tahun 2020 ..... III-170
Tabel III.120. Kepadatan Penduduk di Kecamatan Kutasari Tahun 2020 ..... III-171
Tabel III.121. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kecamatan Kutasari Tahun 2020 ..... III-171
Tabel III.122. Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kutasari Tahun 2020 ..... III-172
Tabel III.123. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kecamatan Kutasari Tahun 2020 ..... III-173
Tabel III.124. Sarana Perekonomian di Kecamatan Kutasari Tahun 2020..... III-174
Tabel III.125. Sebaran Perumahan di Kecamatan Kutasari..... III-175
Tabel III.126. Jumlah Rumah di Kecamatan Kutasari Tahun 2020..... III-175
Tabel III.127. Perumahan Pengembang di Kecamatan Kutasari III-176
Tabel III.128. Luas Kawasan PKP Pada Kawasan Strategis III-177
Tabel III.129. Luas Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana..... III-179
Tabel III.130. Kekurangan Rumah/ Backlog di Kecamatan Kutasari Tahun 2020 ..... III-184
Tabel III.131. Sebaran Jumlah RTLH di Kecamatan Kutasari Tahun 2020 ..... III-184
Tabel III.132. Kepadatan Bangunan di Kecamatan Kutasari..... III-185
Tabel III.133. Bank Sampah di Kecamatan Kutasari III-186
Tabel III.134. Sarana Pendidikan di Kecamatan Kutasari Tahun 2020..... III-187
Tabel III.135. Sarana Peribadatan di Kecamatan Kutasari Tahun 2020 ..... III-188
Tabel III.136. Sarana Kesehatan di Kecamatan Kutasari Tahun 2020..... III-189
Tabel III.137. Jumlah dan Kondisi Lapangan Olahraga di Kecamatan Kutasari .. III-189
Tabel III.138. Jumlah Pelanggan Listrik di Kecamatan Kutasari Tahun 2020..... III-190
Tabel III.139. Jumlah Menara Telekomunikasi dan Kondisi Sinyal Telepon Seluler di Kecamatan Kutasari III-191
Tabel III.140. Luas Wilayah Kecamatan Kaligondang III-193
Tabel III.141. Topografi di Kecamatan Kaligondang..... III-195
Tabel III.142. Jenis Tanah di Kecamatan Kaligondang III-195
Tabel III.143. Geologi di Kecamatan Kaligondang III-196
Tabel III.144. Hidrogeologi di Kecamatan Kaligondang..... III-200
Tabel III.145. DAS di Kecamatan Kaligondang..... III-200
Tabel III.146. Rawan Bencana di Kecamatan Kaligondang III-205
Tabel III.147. Luas Penggunaan Lahan di Kecamatan Kaligondang Tahun 2020 (hektar) III-206
Tabel III.148. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Kaligondang Tahun 2020 ..... III-209
Tabel III.149. Kepadatan Penduduk di Kecamatan Kaligondang Tahun 2020..... III-210
Tabel III.150. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kecamatan Kaligondang Tahun 2020 ..... III-211
Tabel III.151. Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kaligondang Tahun 2020..... III-211

Tabel III.152. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kecamatan Kaligondang Tahun 2020 ..... III-212
Tabel III.153. Sarana Perekonomian di Kecamatan Kaligondang Tahun 2020.... III-213
Tabel III.154. Sebaran Perumahan di Kecamatan Kaligondang..... III-214
Tabel III.155. Jumlah Rumah di Kecamatan Kaligondang Tahun 2020..... III-215
Tabel III.156. Perumahan Pengembang di Kecamatan Kaligondang III-216
Tabel III.157. Luas Kawasan PKP Pada Kawasan Strategis III-216
Tabel III.158. Luas Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana..... III-218
Tabel III.159. Kekurangan Rumah/ Backlog di Kecamatan Kaligondang Tahun 2020 ..... III-223
Tabel III.160. Sebaran Jumlah RTLH di Kecamatan Kaligondang Tahun 2020 .... III-223
Tabel III.161. Kepadatan Bangunan di Kecamatan Kaligondang..... III-224
Tabel III.162. Sebaran Kawasan Kumuh di Kecamatan Kaligondang..... III-225
Tabel III.163. Sarana Pendidikan di Kecamatan Kaligondang Tahun 2020..... III-229
Tabel III.164. Sarana Peribadatan di Kecamatan Kaligondang Tahun 2020 ..... III-229
Tabel III.165. Sarana Kesehatan di Kecamatan Kaligondang Tahun 2020..... III-230
Tabel III.166. Jumlah dan Kondisi Lapangan Olahraga di Kecamatan Kaligondang III-231
Tabel III.167. Jumlah Pelanggan Listrik di Kecamatan Kaligondang Tahun 2020 ..... III-232
Tabel III.168. Jumlah Menara Telekomunikasi dan Kondisi Sinyal Telepon Seluler di Kecamatan Kaligondang III-232
Tabel III.169. Volume Pekerjaan dan Alokasi Dana Pembiayaan Pembangunan Perumahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 ..... III-239

Tabel IV.1. Implikasi Kebijakan Pembangunan Nasional terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman IV-1
Tabel IV.2. Implikasi Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman IV-2
Tabel IV.3. Implikasi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Purbalingga terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman IV-3
Tabel IV.4. Implikasi Kebijakan Penataan Ruang Nasional terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman IV-4
Tabel IV.5. Implikasi Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman IV-5
Tabel IV.6. Rencana Pengembangan SPAM untuk Mendukung Kawasan Permukiman di Kabupaten Purbalingga IV-18
Tabel IV.7. Strategi Sanitasi untuk Mendukung Kawasan Permukiman di Kabupaten Purbalingga IV-20
Tabel IV.8. Deliniasi Satuan Perumahan Kabupaten Purbalingga IV-31
Tabel IV.9. Luas Perumahan Terhadap Kondisi Topografi di Lingkungan Hunian Purbalingga..... IV-40
Tabel IV.10. Luas Perumahan Terhadap Kondisi Topografi di Lingkungan Hunian Kalimanah..... IV-41
Tabel IV.11. Luas Perumahan Terhadap Kondisi Topografi di Lingkungan Hunian Padamara IV-41
Tabel IV.12. Luas Perumahan Terhadap Kondisi Topografi di Lingkungan Hunian Bojongsari IV-42

Tabel IV.13. Luas Perumahan Terhadap Kondisi Topografi di Lingkungan Hunian Kutasari IV-42
Tabel IV.14. Luas Perumahan Terhadap Kondisi Topografi di Lingkungan Hunian Kaligondang IV-43
Tabel IV.15. Luas Perumahan Terhadap Kondisi Hidrologi di Lingkungan Hunian Purbalingga IV-44
Tabel IV.16. Luas Perumahan Terhadap Kondisi Hidrologi di Lingkungan Hunian Kalimanah IV-45
Tabel IV.17. Luas Perumahan Terhadap Kondisi Hidrologi di Lingkungan Hunian Padamara IV-45
Tabel IV.18. Luas Perumahan Terhadap Kondisi Hidrologi di Lingkungan Hunian Bojongsari IV-46
Tabel IV.19. Luas Perumahan Terhadap Kondisi Hidrologi di Lingkungan Hunian Kutasari IV-47
Tabel IV.20. Luas Perumahan Terhadap Kondisi Hidrologi di Lingkungan Hunian Kaligondang IV-47
Tabel IV.21. Luas Perumahan Terhadap Potensi Rawan Bencana di Lingkungan Hunian Purbalingga IV-48
Tabel IV.22. Luas Perumahan Terhadap Potensi Rawan Bencana di Lingkungan Hunian Kalimanah IV-49
Tabel IV.23. Luas Perumahan Terhadap Potensi Rawan Bencana di Lingkungan Hunian Padamara IV-49
Tabel IV.24. Luas Perumahan Terhadap Potensi Rawan Bencana di Lingkungan Hunian Bojongsari IV-50
Tabel IV.25. Luas Perumahan Terhadap Potensi Rawan Bencana di Lingkungan Hunian Kutasari IV-51
Tabel IV.26. Luas Perumahan Terhadap Potensi Rawan Bencana di Lingkungan Hunian Kaligondang IV-52
Tabel IV.27. Ketidaksesuaian Penggunaan Lahan dengan Rencana Pola Ruang .. IV-53
Tabel IV.28. Ketidaksesuaian Pola Ruang IV-54
Tabel IV.29. Daya Tampung Perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga IV-56
Tabel IV.30. IV-Daya Tampung Perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah ... IV-58
Tabel IV.31. Daya Tampung Perumahan di Lingkungan Hunian Padamara IV-60
Tabel IV.32. Daya Tampung Perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari IV-62
Tabel IV.33. Daya Tampung Perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari IV-64
Tabel IV.34. Daya Tampung Perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang IV-66
Tabel IV.35. Distibusi Penduduk Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2016-2020 ..... IV-68
Tabel IV.36. Kepadatan Penduduk Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2020 ..... IV-69
Tabel IV.37. Distibusi Penduduk Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2016-2020 ..... IV-69
Tabel IV.38. Kepadatan Penduduk Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2020 ..... IV-70
Tabel IV.39. Distibusi Penduduk Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2016-2020 ..... IV-70
Tabel IV.40. Kepadatan Penduduk Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2020 ..... IV-71
Tabel IV.41. Distibusi Penduduk Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2016-2020 ..... IV-72
Tabel IV.42. Kepadatan Penduduk Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2020 ..... IV-72

Tabel IV.43. Distibusi Penduduk Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2016-2020 ....IV-73
Tabel IV.44. Kepadatan Penduduk Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2020 ....IV-74
Tabel IV.45. Distibusi Penduduk Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2016-2020 ....IV-74
Tabel IV.46. Kepadatan Penduduk Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2020 ....IV-75
Tabel IV.47. Proyeksi Penduduk di Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2026-2041 ....IV-76
Tabel IV.48. Proyeksi Penduduk di Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2026-2041 ....IV-76
Tabel IV.49. Proyeksi Penduduk di Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2026-2041 ....IV-77
Tabel IV.50. Proyeksi Penduduk di Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2026-2041 ....IV-77
Tabel IV.51. Proyeksi Penduduk di Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2026-2041 ....IV-78
Tabel IV.52. Proyeksi Penduduk di Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2026-2041 ....IV-78
Tabel IV.53. Potensi Ekonomi di LH Purbalingga IV-80
Tabel IV.54. Keterkaitan Kegiatan Ekonomi dengan Penyediaan Perumahan IV-82
Tabel IV.55. Karakteristik Satuan Perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga....IV-85
Tabel IV.56. Karakteristik Satuan Perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah .IV-89
Tabel IV.57. Karakteristik Satuan Perumahan di Lingkungan Hunian Padamara..IV-93
Tabel IV.58. Karakteristik Satuan Perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari .IV-97
Tabel IV.59. Karakteristik Satuan Perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari ...IV-101
Tabel IV.60. Karakteristik Satuan Perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang IV-105
Tabel IV.61. Peran dan Fungsi Satuan Perumahan IV-107
Tabel IV.62. Kebutuhan Rumah di Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2041 ....IV-110
Tabel IV.63. Kebutuhan Rumah di Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2041 IV-111
Tabel IV.64. Kebutuhan Rumah di Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2041 IV-111
Tabel IV.65. Kebutuhan Rumah di LH Bojongsari Tahun 2041 ....IV-112
Tabel IV.66. Kebutuhan Rumah di LH Kutasari Tahun 2041 ....IV-113
Tabel IV.67. Kebutuhan Rumah di LH Kaligondang Tahun 2041 ....IV-113
Tabel IV.68. Backlog Kepemilikan Rumah di Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2020 ....IV-114
Tabel IV.69. Backlog Kepemilikan Rumah di Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2020 ....IV-115
Tabel IV.70. Backlog Kepemilikan Rumah di Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2020 ....IV-116
Tabel IV.71. Backlog Kepemilikan Rumah di Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2020 ....IV-116
Tabel IV.72. Backlog Kepemilikan Rumah di Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2020 ....IV-117
Tabel IV.73. Backlog Kepemilikan Rumah di Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2020 ....IV-117
Tabel IV.74. Kebutuhan Program Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Terkait Pencegahan Serta Pola Kontribusi Penanganan....IV-118
Tabel IV.75. Program Pencegahan Permukiman Kumuh Baru....IV-121

Tabel IV.76. Program Peningkatan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.....IV-127
Tabel IV.77. Perumusan Program Peningkatan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kawasan Prioritas 1 .....IV-136
Tabel IV.78. Perumusan Program Peningkatan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kawasan Prioritas 2 .....IV-140
Tabel IV.79. Perumusan Program Peningkatan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kawasan Prioritas 3 .....IV-143
Tabel IV.80. Perumusan Program Peningkatan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kawasan Prioritas 4 .....IV-148
Tabel IV.81. Kebutuhan Pembangunan Perumahan Baru di Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2041 .....IV-159
Tabel IV.82. Kebutuhan Pembangunan Perumahan Baru di Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2041 .....IV-161
Tabel IV.83. Kebutuhan Pembangunan Perumahan Baru di Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2041 .....IV-163
Tabel IV.84. Kebutuhan Pembangunan Perumahan Baru di Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2041.....IV-165
Tabel IV.85. Kebutuhan Pembangunan Perumahan Baru di Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2041 .....IV-167
Tabel IV.86. Kebutuhan Pembangunan Perumahan Baru di Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2041 .....IV-169
Tabel IV.87. Arahan Penataan Perumahan pada Kawasan Strategis.....IV-173
Tabel IV.88. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2041 .....IV-186
Tabel IV.89. Proyeksi Air Limbah di Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2041 .....IV-187
Tabel IV.90. Proyeksi Timbulan Sampah Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2041 .....IV-188
Tabel IV.91. Sebaran Daerah Rawan Banjir Lingkungan Hunian Purbalingga ...IV-189
Tabel IV.92. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2041 .....IV-192
Tabel IV.93. Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2041 .....IV-195
Tabel IV.94. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2041 .....IV-197
Tabel IV.95. Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2041 .....IV-199
Tabel IV.96. Proyeksi Kebutuhan Jaringan Listrik Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2041 .....IV-202
Tabel IV.97. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2041 .....IV-205
Tabel IV.98. Proyeksi Air Limbah di Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2041 ....IV-206
Tabel IV.99. Proyeksi Timbulan Sampah Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2041 .....IV-207
Tabel IV.100. Sebaran Daerah Rawan Banjir Lingkungan Hunian Kalimanah IV-208
Tabel IV.101. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2041 .....IV-211

Tabel IV.102. Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2041 ....IV-214
Tabel IV.103. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2041 ....IV-215
Tabel IV.104. Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2041 ....IV-218
Tabel IV.105. Proyeksi Kebutuhan Jaringan Listrik Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2041 ....IV-221
Tabel IV.106. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2041 ....IV-224
Tabel IV.107. Proyeksi Air Limbah di Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2041 ....IV-225
Tabel IV.108. Proyeksi Timbulan Sampah Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2041 ....IV-226
Tabel IV.109. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2041 ....IV-230
Tabel IV.110. Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2041 ....IV-233
Tabel IV.111. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2041 ....IV-235
Tabel IV.112. Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2041 ....IV-237
Tabel IV.113. Proyeksi Kebutuhan Jaringan Listrik Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2041 ....IV-241
Tabel IV.114. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2041 ....IV-244
Tabel IV.115. Proyeksi Air Limbah di Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2041 ....IV-245
Tabel IV.116. Proyeksi Timbulan Sampah Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2041 ....IV-246
Tabel IV.117. Sebaran Daerah Rawan Banjir Lingkungan Hunian Bojongsari....IV-247
Tabel IV.118. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2041 ....IV-250
Tabel IV.119. Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2041 ....IV-253
Tabel IV.120. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2041 ....IV-255
Tabel IV.121. Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2041....IV-257
Tabel IV.122. Proyeksi Kebutuhan Jaringan Listrik Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2041 ....IV-261
Tabel IV.123. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2041 ....IV-264
Tabel IV.124. Proyeksi Air Limbah di Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2041 ..IV-265
Tabel IV.125. Proyeksi Timbulan Sampah Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2041 ....IV-266
Tabel IV.126. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2041 ....IV-270
Tabel IV.127. Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2041 ....IV-273
Tabel IV.128. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2041 ....IV-275

Tabel IV.129. Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2041 ....IV-277
Tabel IV.130. Proyeksi Kebutuhan Jaringan Listrik Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2041 ....IV-281
Tabel IV.131. Proyeksi Kebutuhan Air Minum Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2041 ....IV-284
Tabel IV.132. Proyeksi Air Limbah di Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2041 ....IV-285
Tabel IV.133. Proyeksi Timbulan Sampah Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2041 ....IV-286
Tabel IV.134. Sebaran Daerah Rawan Banjir Lingkungan Hunian Kaligondang ..IV-287
Tabel IV.135. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2041 ....IV-290
Tabel IV.136. Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2041 ....IV-293
Tabel IV.137. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2041 ....IV-295
Tabel IV.138. Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2041 ....IV-298
Tabel IV.139. Proyeksi Kebutuhan Jaringan Listrik Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2041 ....IV-301
Tabel IV.140. Rencana Keterpaduan Jaringan Jalan IV-305
Tabel IV.141. Rencana Keterpaduan Jaringan Drainase IV-306
Tabel IV.142. Sistem Keterpaduan Penyediaan Air Minum Bukan Perpipaan IV-307
Tabel IV.143. Rencana Keterpaduan Sistem Penyediaan Air Minum....IV-308
Tabel IV.144. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)....IV-309
Tabel IV.145. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) IV-309
Tabel IV.146. Rencana Keterpaduan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) IV-310
Tabel IV.147. Rencana Keterpaduan Sistem Pengolahan Persampahan IV-311
Tabel IV.148. Rencana Keterpaduan Sistem Proteksi Kebakaran....IV-312
Tabel IV.149. Rencana Keterpaduan Penyediaan Sarana Pemerintahan IV-313
Tabel IV.150. Rencana Keterpaduan Penyediaan Sarana Pendidikan....IV-314
Tabel IV.151. Rencana Keterpaduan Penyediaan Sarana Kesehatan....IV-315
Tabel IV.152. Rencana Keterpaduan Penyediaan Sarana Perdagangan....IV-316
Tabel IV.153. Rencana Keterpaduan Penyediaan Sarana Peribadatan IV-316
Tabel IV.154. Rencana Keterpaduan Penyediaan Sarana Budaya dan Rekreasi...IV-317
Tabel IV.155. Rencana Keterpaduan Penyediaan Sarana Ruang Terbuka Hijau...IV-318
Tabel IV.156. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman IV-320
Tabel VI.1. Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan Lingkungan Hunian Purbalingga VI-5
Tabel VI.2. Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan Lingkungan Hunian Kalimanah VI-11
Tabel VI.3. Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan Lingkungan Hunian Padamara....VI-17
Tabel VI.4. Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan Lingkungan Hunian Bojongsari....VI-23
Tabel VI.5. Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan Lingkungan Hunian Kutasari VI-28
Tabel VI.6. Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan Lingkungan Hunian Kaligondang VI-35

Tabel VII.1. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Jaringan Jalan di Lingkungan Hunian Purbalingga VII-2
Tabel VII.2. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Jaringan Drainase di Lingkungan Hunian Purbalingga..... VII-3
Tabel VII.3. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2026-2041 ..... VII-4
Tabel VII.4. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Penyediaan Air Minum di Lingkungan Hunian Purbalingga VII-5
Tabel VII.5. Proyeksi Air Limbah Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2026-2041 ..... VII-6
Tabel VII.6. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah di Lingkungan Hunian Purbalingga VII-7
Tabel VII.7. Proyeksi Timbulan Sampah Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2026-2041 ..... VII-8
Tabel VII.8. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Hunian Purbalingga VII-9
Tabel VII.9. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Proteksi Kebakaran di Lingkungan Hunian Purbalingga VII-10
Tabel VII.10. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Pemerintahan di Lingkungan Hunian Purbalingga VII-13
Tabel VII.11. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2026-2041 ..... VII-15
Tabel VII.12. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Pendidikan di Lingkungan Hunian Purbalingga VII-16
Tabel VII.13. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2026-2041 ..... VII-18
Tabel VII.14. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Kesehatan di Lingkungan Hunian Purbalingga VII-20
Tabel VII.15. Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan di Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2026-2041 ..... VII-21
Tabel VII.16. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Perdagangan di Lingkungan Hunian Purbalingga VII-22
Tabel VII.17. Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan di Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2026-2041 ..... VII-23
Tabel VII.18. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Peribadatan di Lingkungan Hunian Purbalingga VII-25
Tabel VII.19. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Budaya dan Rekreasi di Lingkungan Hunian Purbalingga VII-26
Tabel VII.20. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan Hunian Purbalingga..... VII-27
Tabel VII.21. Proyeksi Kebutuhan Listrik Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2026-2041 ..... VII-29
Tabel VII.22. Skenario Pentahapan Pembangunan Jaringan Listrik di Lingkungan Hunian Purbalingga..... VII-30
Tabel VII.23. Skenario Pentahapan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi di Lingkungan Hunian Purbalingga VII-31
Tabel VII.24. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Jaringan Jalan di Lingkungan Hunian Kalimanah VII-34
Tabel VII.25. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Jaringan Drainase di Lingkungan Hunian Kalimanah VII-35
Tabel VII.26. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2026-2041 ..... VII-36

Tabel VII.27. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Penyediaan Air Minum di Lingkungan Hunian Kalimanah VII-37
Tabel VII.28. Proyeksi Air Limbah Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2026-2041 ..... VII-38
Tabel VII.29. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah di Lingkungan Hunian Kalimanah VII-39
Tabel VII.30. Proyeksi Timbulan Sampah Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2026-2041 ..... VII-40
Tabel VII.31. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Hunian Kalimanah VII-41
Tabel VII.32. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Proteksi Kebakaran di Lingkungan Hunian Kalimanah VII-43
Tabel VII.33. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Pemerintahan di Lingkungan Hunian Kalimanah VII-45
Tabel VII.34. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2026-2041 ..... VII-47
Tabel VII.35. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Pendidikan di Lingkungan Hunian Kalimanah VII-48
Tabel VII.36. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2026-2041 ..... VII-50
Tabel VII.37. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Kesehatan di Lingkungan Hunian Kalimanah VII-52
Tabel VII.38. Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan di Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2026-2041 ..... VII-53
Tabel VII.39. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Perdagangan di Lingkungan Hunian Kalimanah VII-54
Tabel VII.40. Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan di Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2026-2041 ..... VII-55
Tabel VII.41. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Peribadatan di Lingkungan Hunian Kalimanah VII-56
Tabel VII.42. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Budaya dan Rekreasi di Lingkungan Hunian Kalimanah VII-57
Tabel VII.43. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan Hunian Kalimanah VII-58
Tabel VII.44. Proyeksi Kebutuhan Listrik Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2026-2041 ..... VII-60
Tabel VII.45. Skenario Pentahapan Pembangunan Jaringan Listrik di Lingkungan Hunian Kalimanah VII-61
Tabel VII.46. Skenario Pentahapan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi di Lingkungan Hunian Kalimanah VII-62
Tabel VII.47. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Jaringan Jalan di Lingkungan Hunian Padamara VII-66
Tabel VII.48. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Jaringan Drainase di Lingkungan Hunian Padamara VII-67
Tabel VII.49. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2026-2041 ..... VII-68
Tabel VII.50. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Penyediaan Air Minum di Lingkungan Hunian Padamara VII-69
Tabel VII.51. Proyeksi Air Limbah Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2026-2041 ..... VII-70
Tabel VII.52. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah di Lingkungan Hunian Padamara VII-71

Tabel VII.53. Proyeksi Timbulan Sampah Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2026-2041 ..... VII-72
Tabel VII.54. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Hunian Padamara VII-73
Tabel VII.55. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Proteksi Kebakaran di Lingkungan Hunian Padamara VII-75
Tabel VII.56. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Pemerintahan di Lingkungan Hunian Padamara VII-77
Tabel VII.57. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2026-2041 ..... VII-79
Tabel VII.58. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Pendidikan di Lingkungan Hunian Padamara VII-80
Tabel VII.59. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2026-2041 ..... VII-82
Tabel VII.60. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Kesehatan di Lingkungan Hunian Padamara VII-84
Tabel VII.61. Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan di Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2026-2041 ..... VII-85
Tabel VII.62. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Perdagangan di Lingkungan Hunian Padamara VII-86
Tabel VII.63. Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan di Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2026-2041 ..... VII-87
Tabel VII.64. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Peribadatan di Lingkungan Hunian Padamara VII-88
Tabel VII.65. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Budaya dan Rekreasi di Lingkungan Hunian Padamara VII-89
Tabel VII.66. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan Hunian Padamara VII-90
Tabel VII.67. Proyeksi Kebutuhan Listrik Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2026-2041 ..... VII-92
Tabel VII.68. Skenario Pentahapan Pembangunan Jaringan Listrik di Lingkungan Hunian Padamara VII-93
Tabel VII.69. Skenario Pentahapan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi di Lingkungan Hunian Padamara VII-94
Tabel VII.70. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Jaringan Jalan di Lingkungan Hunian Bojongsari VII-97
Tabel VII.71. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Jaringan Drainase di Lingkungan Hunian Bojongsari VII-98
Tabel VII.72. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Limngkungan Hunian Bojongsari Tahun 2026-2041 ..... VII-99
Tabel VII.73. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Penyediaan Air Minum di Lingkungan Hunian Bojongsari VII-100
Tabel VII.74. Proyeksi Air Limbah Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2026-2041 ..... VII-101
Tabel VII.75. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah di Lingkungan Hunian Bojongsari VII-102
Tabel VII.76. Proyeksi Timbulan Sampah Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2026-2041 ..... VII-103
Tabel VII.77. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Hunian Bojongsari VII-104
Tabel VII.78. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Proteksi Kebakaran di Lingkungan Hunian Bojongsari VII-105

Tabel VII.79. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Pemerintahan di Lingkungan Hunian Bojongsari VII-108
Tabel VII.80. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2026-2041 ..... VII-110
Tabel VII.81. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Pendidikan di Lingkungan Hunian Bojongsari VII-111
Tabel VII.82. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2026-2041 ..... VII-113
Tabel VII.83. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Kesehatan di Lingkungan Hunian Bojongsari VII-115
Tabel VII.84. Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan di Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2026-2041 ..... VII-116
Tabel VII.85. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Perdagangan di Lingkungan Hunian Bojongsari VII-117
Tabel VII.86. Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan di Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2026-2041 ..... VII-118
Tabel VII.87. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Peribadatan di Lingkungan Hunian Bojongsari VII-119
Tabel VII.88. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Budaya dan Rekreasi di Lingkungan Hunian Bojongsari VII-120
Tabel VII.89. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan Hunian Bojongsari VII-121
Tabel VII.90. Proyeksi Kebutuhan Listrik Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2026-2041 ..... VII-123
Tabel VII.91. Skenario Pentahapan Pembangunan Jaringan Listrik di Lingkungan Hunian Bojongsari VII-124
Tabel VII.92. Skenario Pentahapan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi di Lingkungan Hunian Bojongsari VII-125
Tabel VII.93. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Jaringan Jalan di Lingkungan Hunian Kutasari VII-129
Tabel VII.94. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Jaringan Drainase di Lingkungan Hunian Kutasari VII-130
Tabel VII.95. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2026-2041 ..... VII-131
Tabel VII.96. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Penyediaan Air Minum di Lingkungan Hunian Kutasari VII-132
Tabel VII.97. Proyeksi Air Limbah Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2026-2041 ..... VII-133
Tabel VII.98. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah di Lingkungan Hunian Kutasari VII-134
Tabel VII.99. Proyeksi Timbulan Sampah Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2026-2041 ..... VII-135
Tabel VII.100. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Hunian Kutasari VII-136
Tabel VII.101. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Proteksi Kebakaran di Lingkungan Hunian Kutasari VII-137
Tabel VII.102. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Pemerintahan di Lingkungan Hunian Kutasari VII-139
Tabel VII. 103. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2026-2041 ..... VII-141
Tabel VII.104. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Pendidikan di Lingkungan Hunian Kutasari VII-142

Tabel VII.105. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2026-2041 ..... VII-144
Tabel VII.106. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Kesehatan di Lingkungan Hunian Kutasari VII-146
Tabel VII.107. Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan di Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2026-2041 ..... VII-147
Tabel VII.108. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Perdagangan di Lingkungan Hunian Kutasari VII-148
Tabel VII.109. Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan di Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2026-2041 ..... VII-149
Tabel VII.110. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Peribadatan di Lingkungan Hunian Kutasari VII-150
Tabel VII.111. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Budaya dan Rekreasi di Lingkungan Hunian Kutasari VII-151
Tabel VII.112. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan Hunian Kutasari VII-152
Tabel VII.113. Proyeksi Kebutuhan Listrik Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2026-2041 ..... VII-154
Tabel VII.114. Skenario Pentahapan Pembangunan Jaringan Listrik di Lingkungan Hunian Kutasari VII-155
Tabel VII.115. Skenario Pentahapan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi di Lingkungan Hunian Kutasari VII-156
Tabel VII.116. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Jaringan Jalan di Lingkungan Hunian Kaligondang VII-159
Tabel VII.117. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Jaringan Drainase di Lingkungan Hunian Kaligondang VII-160
Tabel VII.118. Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2026-2041 ..... VII-161
Tabel VII.119. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Penyediaan Air Minum di Lingkungan Hunian Kaligondang VII-162
Tabel VII.120. Proyeksi Air Limbah Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2026-2041 ..... VII-163
Tabel VII.121. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Hunian Kaligondang ... VII-167
Tabel VII.124. Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Proteksi Kebakaran di Lingkungan Hunian Kaligondang VII-168
Tabel VII.125. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Pemerintahan di Lingkungan Hunian Kaligondang VII-170
Tabel VII.126. Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2026-2041 ..... VII-172
Tabel VII.127. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Pendidikan di Lingkungan Hunian Kaligondang VII-173
Tabel VII.128. Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2026-2041 ..... VII-175
Tabel VII.129. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Kesehatan di Lingkungan Hunian Kaligondang VII-177
Tabel VII.130. Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan di Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2026-2041 ..... VII-178
Tabel VII.131. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Perdagangan di Lingkungan Hunian Kaligondang VII-179
Tabel VII.132. Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan di Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2026-2041 ..... VII-180

Tabel VII.133. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Peribadatan di Lingkungan Hunian Kaligondang VII-181
Tabel VII.134. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Budaya dan Rekreasi di Lingkungan Hunian Kaligondang VII-182
Tabel VII.135. Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan Hunian Kaligondang..... VII-183
Tabel VII.136. Proyeksi Kebutuhan Listrik Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2026-2041 ..... VII-185
Tabel VII.137. Skenario Pentahapan Pembangunan Jaringan Listrik di Lingkungan Hunian Kaligondang VII-186
Tabel VII.138. Skenario Pentahapan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi di Lingkungan Hunian Kaligondang VII-187

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Orientasi Lingkup Wilayah Perencanaan I-5
Gambar 2.1. Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Purbalingga II-15
Gambar 2.2. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Purbalingga II-16
Gambar 3.1. Peta Administrasi Kecamatan Purbalingga III-2
Gambar 3.2. Peta Topografi Kecamatan Purbalingga III-4
Gambar 3.3. Peta Jenis Tanah Kecamatan Purbalingga III-5
Gambar 3.4. Peta Geologi Kecamatan Purbalingga III-6
Gambar 3.5. Peta Hidrogeologi Kecamatan Purbalingga III-8
Gambar 3.6. Peta DAS di Kecamatan Purbalingga III-9
Gambar 3.7. Peta Klimatologi Kecamatan Purbalingga III-10
Gambar 3.8. Luas Penggunaan Lahan Kecamatan Purbalingga Tahun 2020 ..... III-12
Gambar 3.9. Peta Rawan Bencana Kecamatan Purbalingga III-13
Gambar 3.10. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Purbalingga III-14
Gambar 3.11. Jumlah Penduduk Kecamatan Purbalingga Tahun 2016-2020 ..... III-15
Gambar 3.12. Piramida Penduduk Kecamatan Purbalingga Tahun 2020 ..... III-17
Gambar 3.13. Perumahan di Kecamatan Purbalingga III-21
Gambar 3.14. Perumahan Pengembang di Kecamatan Purbalingga III-23
Gambar 3.15. Peta Sebaran Perumahan di Kecamatan Purbalingga III-25
Gambar 3.16. Peta Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana III-26
Gambar 3.17. Peta Sebaran Kawasan Kumuh di Kecamatan Purbalingga III-30
Gambar 3.18. Prasarana di Kecamatan Purbalingga III-33
Gambar 3.19. Sarana di Kecamatan Purbalingga III-37
Gambar 3.20. Utilitas di Kecamatan Purbalingga III-39
Gambar 3.21. Peta Administrasi Kecamatan Kalimanah III-41
Gambar 3.22. Peta Topografi Kecamatan Kalimanah III-42
Gambar 3.23. Peta Jenis Tanah Kecamatan Kalimanah III-44
Gambar 3.24. Peta Geologi Kecamatan Kalimanah III-45
Gambar 3.25. Peta Hidrogeologi Kecamatan Kalimanah III-47
Gambar 3.26. Peta DAS Kecamatan Kalimanah III-48
Gambar 3.27. Peta Klimatologi Kecamatan Kalimanah III-49
Gambar 3.28. Luas Penggunaan Lahan Kecamatan Kalimanah Tahun 2020 ..... III-51
Gambar 3.29. Peta Rawan Bencana Kecamatan Kalimanah III-52
Gambar 3.30. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Kalimanah III-53
Gambar 3.31. Jumlah Penduduk Kecamatan Kalimanah Tahun 2016-2020 ..... III-54
Gambar 3.32. Piramida Penduduk Kecamatan Kalimanah Tahun 2020 ..... III-56
Gambar 3.33. Perumahan di Kecamatan Kalimanah III-61
Gambar 3.34. Perumahan Pengembang di Kecamatan Kalimanah III-62
Gambar 3.35. Peta Sebaran Permukiman di Kecamatan Kalimanah III-64
Gambar 3.36. Peta Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana III-65
Gambar 3.37. Peta Sebaran Lokasi Permukiman Kumuh di Kecamatan Kalimanah III-69
Gambar 3.38. Prasarana di Kecamatan Kalimanah III-71
Gambar 3.39. Sarana di Kecamatan Kalimanah III-75
Gambar 3.40. Utilitas di Kecamatan Kalimanah III-77
Gambar 3.41. Peta Administrasi Kecamatan Padamara III-79
Gambar 3.42. Peta Topografi Kecamatan Padamara III-80
Gambar 3.43. Peta Jenis Tanah Kecamatan Padamara III-81
Gambar 3.44. Peta Geologi Kecamatan Padamara III-82
Gambar 3.45. Peta Hidrogeologi Kecamatan Padamara III-84

Gambar 3.46. Peta DAS Kecamatan Padamara III-85
Gambar 3.47. Peta Klimatologi Kecamatan Padamara..... III-86
Gambar 3.48. Luas Penggunaan Lahan Kecamatan Padamara Tahun 2020..... III-88
Gambar 3.49. Peta Rawan Bencana Kecamatan Padamara..... III-89
Gambar 3.50. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Padamara III-90
Gambar 3.51. Jumlah Penduduk Kecamatan Padamara Tahun 2016-2020..... III-91
Gambar 3.52. Piramida Penduduk Kecamatan Padamara Tahun 2020..... III-93
Gambar 3.53. Perumahan di Kecamatan Padamara..... III-97
Gambar 3.54. Perumahan Pengembang di Kecamatan Padamara III-98
Gambar 3.55. Peta Sebaran Permukiman di Kecamatan Padamara..... III-101
Gambar 3.56. Peta Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana III-102
Gambar 3.57. Peta Sebaran Lokasi Kawasan Kumuh di Kecamatan Padamara . III-106
Gambar 3.58. Prasarana di Kecamatan Padamara..... III-108
Gambar 3.59. Sarana di Kecamatan Padamara III-111
Gambar 3.60. Utilitas di Kecamatan Padamara..... III-113
Gambar 3.61. Peta Administrasi Kecamatan Bojongsari III-115
Gambar 3.62. Peta Topografi Kecamatan Bojongsari..... III-116
Gambar 3.63. Peta Jenis Tanah Kecamatan Bojongsari..... III-119
Gambar 3.64. Peta Geologi Kecamatan Bojongsari III-120
Gambar 3.65. Peta Hidrogeologi Kecamatan Bojongsari..... III-123
Gambar 3.66. Peta DAS Kecamatan Bojongsari..... III-124
Gambar 3.67. Peta Klimatologi Kecamatan Bojongsari III-125
Gambar 3.68. Luas Penggunaan Lahan Kecamatan Bojongsari Tahun 2020 .... III-126
Gambar 3.69. Peta Rawan Bencana Kecamatan Bojongsari III-128
Gambar 3.70. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Bojongsari III-129
Gambar 3.71. Jumlah Penduduk Kecamatan Bojongsari Tahun 2016-2020..... III-130
Gambar 3.72. Piramida Penduduk Kecamatan Bojongsari Tahun 2020 ..... III-132
Gambar 3.73. Perumahan di Kecamatan Bojongsari..... III-136
Gambar 3.74. Perumahan Pengembang di Kecamatan Bojongsari..... III-137
Gambar 3.75. Peta Sebaran Permukiman di Kecamatan Bojongsari III-141
Gambar 3.76. Peta Kawasan PKP Pada Kawasan Strategis di Kecamatan Bojongsari III-142
Gambar 3.77. Peta Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana III-143
Gambar 3.78. Peta Sebaran Lokasi Kawasan Kumuh di Kecamatan Bojongsari III-146
Gambar 3.79. Prasarana di Kecamatan Bojongsari..... III-148
Gambar 3.80. Sarana di Kecamatan Bojongsari III-151
Gambar 3.81. Utilitas di Kecamatan Bojongsari..... III-153
Gambar 3.82. Peta Administrasi Kecamatan Kutasari..... III-155
Gambar 3.83. Peta Topografi Kecamatan Kutasari III-158
Gambar 3.84. Peta Jenis Tanah Kecamatan Kutasari III-159
Gambar 3.85. Peta Geologi Kecamatan Kutasari..... III-160
Gambar 3.86. Peta Hidrogeologi Kecamatan Kutasari III-163
Gambar 3.87. Peta DAS Kecamatan Kutasari..... III-164
Gambar 3.88. Peta Klimatologi Kecamatan Kutasari III-165
Gambar 3.89. Luas Penggunaan Lahan Kecamatan Kutasari Tahun 2020 ..... III-166
Gambar 3.90. Peta Rawan Bencana Kecamatan Kutasari III-168
Gambar 3.91. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Kutasari..... III-169
Gambar 3.92. Jumlah Penduduk Kecamatan Kutasari Tahun 2016-2020 ..... III-170
Gambar 3.93. Piramida Penduduk Kecamatan Kutasari Tahun 2020 ..... III-172
Gambar 3.94. Perumahan di Kecamatan Kutasari III-176
Gambar 3.95. Perumahan Pengembang di Kecamatan Kutasari..... III-177
Gambar 3.96. Peta Sebaran Permukiman di Kecamatan Kutasari III-181

Gambar 3.97. Peta Kawasan PKP Pada Kawasan Strategis di Kecamatan Kutasari III-182
Gambar 3.98. Peta Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana III-183
Gambar 3.99. Prasarana di Kecamatan Kutasari III-187
Gambar 3.100. Sarana di Kecamatan Kutasari III-190
Gambar 3.101. Utilitas di Kecamatan Kutasari III-192
Gambar 3.102. Peta Administrasi Kecamatan Kaligondang III-194
Gambar 3.103. Peta Topografi Kecamatan Kaligondang III-197
Gambar 3.104. Peta Jenis Tanah Kecamatan Kaligondang III-198
Gambar 3.105. Peta Geologi Kecamatan Kaligondang..... III-199
Gambar 3.106. Peta Hidrogeologi Kecamatan Kaligondang III-202
Gambar 3.107. Peta DAS Kecamatan Kaligondang III-203
Gambar 3.108. Peta Klimatologi Kecamatan Kaligondang..... III-204
Gambar 3.109. Luas Penggunaan Lahan Kecamatan Kaligondang Tahun 2020..... III-205
Gambar 3.110. Peta Rawan Bencana Kecamatan Kaligondang..... III-207
Gambar 3.111. Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Kaligondang..... III-208
Gambar 3.112. Jumlah Penduduk Kecamatan Kaligondang Tahun 2016-2020 .. III-209
Gambar 3.113. Piramida Penduduk Kecamatan Kaligondang Tahun 2020..... III-211
Gambar 3.114. Perumahan di Kecamatan Kaligondang III-215
Gambar 3.115. Perumahan Pengembang di Kecamatan Kaligondang III-216
Gambar 3.116. Peta Sebaran Permukiman di Kecamatan Kaligondang..... III-220
Gambar 3.117. Peta Kawasan PKP Pada Kawasan Strategis di Kecamatan Kaligondang..... III-221
Gambar 3.118. Peta Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana III-222
Gambar 3.119. Peta Sebaran Lokasi Kawasan Kumuh di Kecamatan Kaligondang..... III-226
Gambar 3.120. Prasarana di Kecamatan Kaligondang..... III-228
Gambar 3.121. Sarana di Kecamatan Kaligondang III-231
Gambar 3.122. Utilitas di Kecamatan Kaligondang III-233
Gambar 3.123. Pelaku Pembangunan III-234
Gambar 3.124. Susunan Keanggotaan Pelaksana Pokja PKP Kabupaten Purbalingga..... III-234
Gambar 3.125. Peran Pokja PKP..... III-235
Gambar 3.126. Susunan Keanggotaan Forum PKP Kabupaten Purbalingga..... III-237
Gambar 4.1. Peta Analisis Kebijakan Pengembangan Wilayah IV-28
Gambar 4.2. Skema Satuan Kawasan Permukiman..... IV-30
Gambar 4.3. Peta Pembagian Perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga .. IV-34
Gambar 4.4. Peta Pembagian Perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah IV-35
Gambar 4.5. Peta Pembagian Perumahan di Lingkungan Hunian Padamara IV-36
Gambar 4.6. Peta Pembagian Perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari IV-37
Gambar 4.7. Peta Pembagian Perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari..... IV-38
Gambar 4.8. Peta Pembagian Perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang . IV-39
Gambar 4.9. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga IV-57
Gambar 4.10. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah IV-59
Gambar 4.11. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Perumahan di Lingkungan Hunian Padamara..... IV-61
Gambar 4.12. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari IV-63
Gambar 4.13. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari IV-65

Gambar 4.14. Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang IV-67
Gambar 4.15. Peta Fungsi Hunian di Lingkungan Hunian Purbalingga IV-86
Gambar 4.16. Peta Fungsi Hunian di Lingkungan Hunian Kalimanah IV-90
Gambar 4.17. Peta Fungsi Hunian di Lingkungan Hunian Padamara IV-94
Gambar 4.18. Peta Fungsi Hunian di Lingkungan Hunian Bojongsari IV-98
Gambar 4.19. Peta Fungsi Hunian di Lingkungan Hunian Kutasari IV-102
Gambar 4.20. Peta Fungsi Hunian di Lingkungan Hunian Kaligondang IV-106
Gambar 4.21. Peta Penyediaan dan Kebutuhan Pengembangan Perumahan Lingkungan Hunian Purbalingga IV-179
Gambar 4.22. Peta Penyediaan dan Kebutuhan Pengembangan Perumahan Lingkungan Hunian Kalimanah IV-180
Gambar 4.23. Peta Penyediaan dan Kebutuhan Pengembangan Perumahan Lingkungan Hunian Padamara IV-181
Gambar 4.24. Peta Penyediaan dan Kebutuhan Pengembangan Perumahan Lingkungan Hunian Bojongsari IV-182
Gambar 4.25. Peta Penyediaan dan Kebutuhan Pengembangan Perumahan Lingkungan Hunian Kutasari IV-183
Gambar 4.26. Peta Penyediaan dan Kebutuhan Pengembangan Perumahan Lingkungan Hunian Kaligondang IV-184
Gambar 4.27. Peta Analisis Prasarana Perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga IV-190
Gambar 4.28. Peta Analisis Sarana Perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga IV-201
Gambar 4.29. Peta Analisis Utilitas Perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga IV-203
Gambar 4.30. Peta Analisis Prasarana Perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah IV-209
Gambar 4.31. Peta Analisis Sarana Perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah IV-220
Gambar 4.32. Peta Analisis Utilitas Perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah IV-222
Gambar 4.33. Peta Analisis Prasarana Perumahan di Lingkungan Hunian Padamara IV-228
Gambar 4.34. Peta Analisis Sarana Perumahan di Lingkungan Hunian Padamara IV-239
Gambar 4.35. Peta Analisis Utilitas Perumahan di Lingkungan Hunian Padamara IV-242
Gambar 4.36. Peta Analisis Prasarana Perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari IV-248
Gambar 4.37. Peta Analisis Sarana Perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari IV-259
Gambar 4.38. Peta Analisis Utilitas Perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari IV-262
Gambar 4.39. Peta Analisis Prasarana Perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari IV-268
Gambar 4.40. Peta Analisis Sarana Perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari IV-279
Gambar 4.41. Peta Analisis Utilitas Perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari IV-282
Gambar 4.42. Peta Analisis Prasarana Perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang IV-288

Gambar 4.43. Peta Analisis Sarana Perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang IV-300
Gambar 4.44. Peta Analisis Utilitas Perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang IV-303
Gambar 4.45. Sistem Keterpaduan Jaringan Jalan IV-304
Gambar 4.46. Sistem Keterpaduan Jaringan Drainase IV-306
Gambar 4.47. Sistem Keterpaduan Penyediaan Air Minum Perpipaan IV-307
Gambar 4.48. Sistem Keterpaduan Pengolahan Persampahan IV-311
Gambar 4.49. Sistem Keterpaduan Jaringan Listrik IV-319
Gambar 4.50. Sistem Keterpaduan Jaringan Telekomunikasi IV-319
Gambar 6.1. Peta Rencana Penyediaan Kebutuhan Perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga VI-6
Gambar 6.2. Peta Rencana Penyediaan Kebutuhan Perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah VI-12
Gambar 6.3. Peta Rencana Penyediaan Kebutuhan Perumahan di Lingkungan Hunian Padamara VI-18
Gambar 6.4. Peta Rencana Penyediaan Kebutuhan Perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari VI-24
Gambar 6.5. Peta Rencana Penyediaan Kebutuhan Perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari VI-30
Gambar 6.6. Peta Rencana Penyediaan Kebutuhan Perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang VI-36
Gambar 7.1. Peta Rencana Keterpaduan Prasarana Perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga VII12
Gambar 7.2. Peta Rencana Keterpaduan Sarana Perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga VII-28
Gambar 7.3. Peta Rencana Keterpaduan Utilitas Perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga VII-32
Gambar 7.4. Peta Rencana Keterpaduan Prasarana Perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah VII-44
Gambar 7.5. Peta Rencana Keterpaduan Sarana Perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah VII-59
Gambar 7.6. Peta Rencana Keterpaduan Utilitas Perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah VII-64
Gambar 7.7. Peta Rencana Keterpaduan Prasarana Perumahan di Lingkungan Hunian Padamara VII-76
Gambar 7.8. Peta Rencana Keterpaduan Sarana Perumahan di Lingkungan Hunian Padamara VII-91
Gambar 7.9. Peta Rencana Keterpaduan Utilitas Perumahan di Lingkungan Hunian Padamara VII-95
Gambar 7.10. Peta Rencana Keterpaduan Prasarana Perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari VII-107
Gambar 7.11. Peta Rencana Keterpaduan Sarana Perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari VII-122
Gambar 7.12. Peta Rencana Keterpaduan Utilitas Perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari VII-127
Gambar 7.13. Peta Rencana Keterpaduan Prasarana Perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari VII-138
Gambar 7.14. Peta Rencana Keterpaduan Sarana Perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari VII-153
Gambar 7.15. Peta Rencana Keterpaduan Utilitas Perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari VII-157

Gambar 7.16. Peta Rencana Keterpaduan Prasarana Perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang.....VII-169
Gambar 7.17. Peta Rencana Keterpaduan Sarana Perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang VII-184
Gambar 7.18. Peta Rencana Keterpaduan Utilitas Perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang VII-189

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor dan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan.

Seiring dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan penduduk akan ruang, terutama ruang untuk perumahan dan kawasan permukiman, pembangunan wilayah yang dilakukan harus sejalan dengan pembangunan di sektor lain. Pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang memperhatikan kepentingan masyarakat dari berbagai kalangan, terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dapat menimbulkan kesenjangan dan kesulitan bagi MBR dalam memperoleh rumah yang layak dan terjangkau. Isu tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah karena penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupater/Kota.

Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai tugas untuk menyusun Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. RP3KP merupakan arahan dan acuan untuk mengatur dan mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dalam perwujudan pemanfaatan pola ruang perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan RTRW kabupaten. Dokumen RP3KP kabupaten terdiri dari penyusunan Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan (RP3).

Penyusunan dokumen RP3KP Kabupaten Purbalingga dilakukan secara bertahap, mulai dari tahap penyusunan Rencana Kawasan Permukiman (RKP) kemudian penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan (RP3). Pada tahun 2021, telah dilakukan tahap penyusunan Rencana Kawasan Permukiman (RKP), yaitu dokumen rencana yang merupakan pedoman dalam memenuhi kebutuhan lingkungan hunian di perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Hasil dari penyusunan Rencana Kawasan Permukiman (RKP) akan menjadi input untuk tahapan selanjutnya yaitu tahap penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan (RP3). Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan terdiri atas kebijakan dan strategi pembangunan pengembangan perumahan, rencana kebutuhan penyediaan rumah, rencana keterpaduan

prasarana, sarana dan utilitas, serta indikasi program. Pada tahun 2022 akan dilakukan tahapan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan (RP3).

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang terkait dengan penyusunan Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan (RP3) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 – 2031.

1.3. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Maksud

Maksud dilaksanakannya kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan (RP3) Kabupaten Purbalingga, adalah menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan (RP3) sebagai salah satu tahapan untuk mewujudkan dokumen RP3KP Kabupaten Purbalingga.

1.3.2. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai melalui pelaksanaan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan (RP3) Kabupaten Purbalingga yaitu tersusunnya dokumen RP3 sebagai arahan kebijakan, strategi, dan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan di Kabupaten Purbalingga.

1.3.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dengan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan (RP3) Kabupaten Purbalingga adalah:

1. Tersedianya profil perumahan di Kabupaten Purbalingga.
2. Tersusunnya analisis pembangunan dan pengembangan perumahan di Kabupaten Purbalingga.
3. Tersusunnya kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan di Kabupaten Purbalingga.
4. Tersusunnya rencana kebutuhan penyediaan rumah di Kabupaten Purbalingga.
5. Tersusunnya rencana keterpaduan prasarana sarana utilitas (PSU) di Kabupaten Purbalingga.
6. Tersusunnya program pembangunan dan pemanfaatan perumahan di Kabupaten Purbalingga.

1.4. Ruang Lingkup

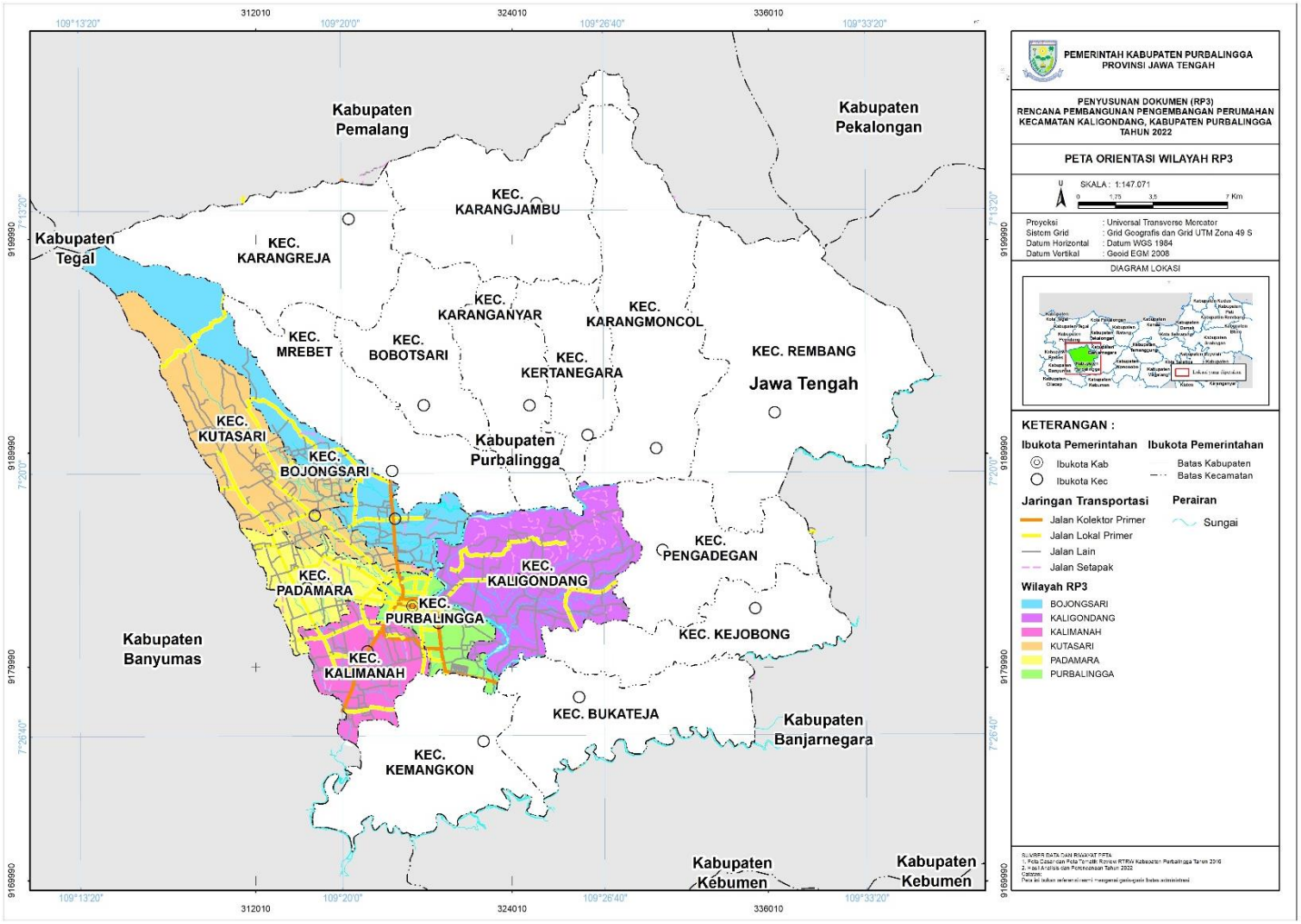
1.4.1. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan (RP3) Kabupaten Purbalingga meliputi:

1. Persiapan
   a. Kajian literatur.
   b. Penyusunan metodologi dan rencana kerja.
2. Pengumpulan data perumahan, baik data primer maupun sekunder.
3. Analisis data kebutuhan pembangunan dan pengembangan perumahan.
4. Penyusunan kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan di Kabupaten Purbalingga.
5. Penyusunan rencana kebutuhan penyediaan rumah di Kabupaten Purbalingga.
6. Penyusunan rencana keterpaduan prasarana sarana utilitas (PSU) di Kabupaten Purbalingga.
7. Penyusunan program pembangunan dan pemanfaatan perumahan di Kabupaten Purbalingga.

1.4.2. Lingkup Wilayah

Kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan (RP3) Kabupaten Purbalingga dilaksanakan di kecamatan prioritas untuk pembangunan dan pengembangan perumahan yang berada di Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Padamara, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Kutasari dan Kecamatan Kaligondang. 6 kecamatan tersebut masuk dalam deliniasi kawasan perkotaan Purbalingga yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Lokal dalam RTRW Kabupaten Purbalingga. Jika dilihat dari karakteristik kawasan perkotaannya, 6 kecamatan tersebut memiliki perkembangan aktivitas dan penggunaan lahan cukup tinggi, kepadatan penduduk tinggi sehingga perkembangan perumahan juga tinggi. Kawasan tersebut juga menunjukkan aglomerasi aktivitas perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Oleh sebab itu perlu menjadi prioritas untuk penanganan, pengelolaan, dan antisipasi dalam penyediaan kebutuhan perumahan ke depannya.



Gambar 1.1.
Peta Orientasi Lingkup Wilayah Perencanaan

1.5. Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Pengembangan Perumahan (RP3) Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, serta sistematika penulisan laporan.

Bab 2 Tinjauan Kebijakan Pembangunan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang kebijakan pembangunan, rencana tata ruang terkait, kebijakan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, serta kebijakan sektoral.

Bab 3 Gambaran Umum Wilayah

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum lokasi perencanaan yang meliputi 6 kecamatan yaitu Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Padamara, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Kutasari dan Kecamatan Kaligondang. Gambaran awal lokasi perencanaan meliputi kondisi fisik,kependudukan, kondisi sosial budaya, kondisi perekonomian, kondisi perumahan dan permukiman, kondisi sarana prasarana dan utilitas perumahan, serta kondisi kelembagaan dan pembiayaan pembangunan perumahan.

Bab 4 Analisis Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Bab ini berisi analisis mengenai impilikasi kebijakan pembangunan daerah, analisis delineasi satuan perumahan, analisis daya dukung dan daya tampung, analisis kepadatan dan proyeksi penduduk, analisis sosial budaya, analisis perekonomian, analisis penyediaan dan kebutuhan pengembangan perumahan, analisis penyediaan dan kebutuhan PSU perumahan, serta analisis kelembagaan dan pembiayaan pembangunan perumahan.

Bab 5 Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Bab ini berisi isu strategis, kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan, arahan pengembangan penyediaan kebutuhan perumahan dan keterpaduan PSU perumahan.

Bab 6 Rencana Penyediaan Kebutuhan Perumahan

Bab ini menjelaskan tentang rencana pengembangan perumahan, rencana pembangunan baru, dan rencana pembangunan kembali perumahan.

Bab 7 Rencana Keterpaduan PSU Perumahan

Bab ini menjelaskan tentang rencana keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.

Bab 8 Indikasi Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Bab ini berisi ketentuan umum, program pembangunan, skenario pengembangan, program pembangunan prioritas, dan indikasi program pembangunan dan pengembangan perumahan.

BAB II
TINJAUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1. Tinjauan Umum Kebijakan Pembangunan

2.1.1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024

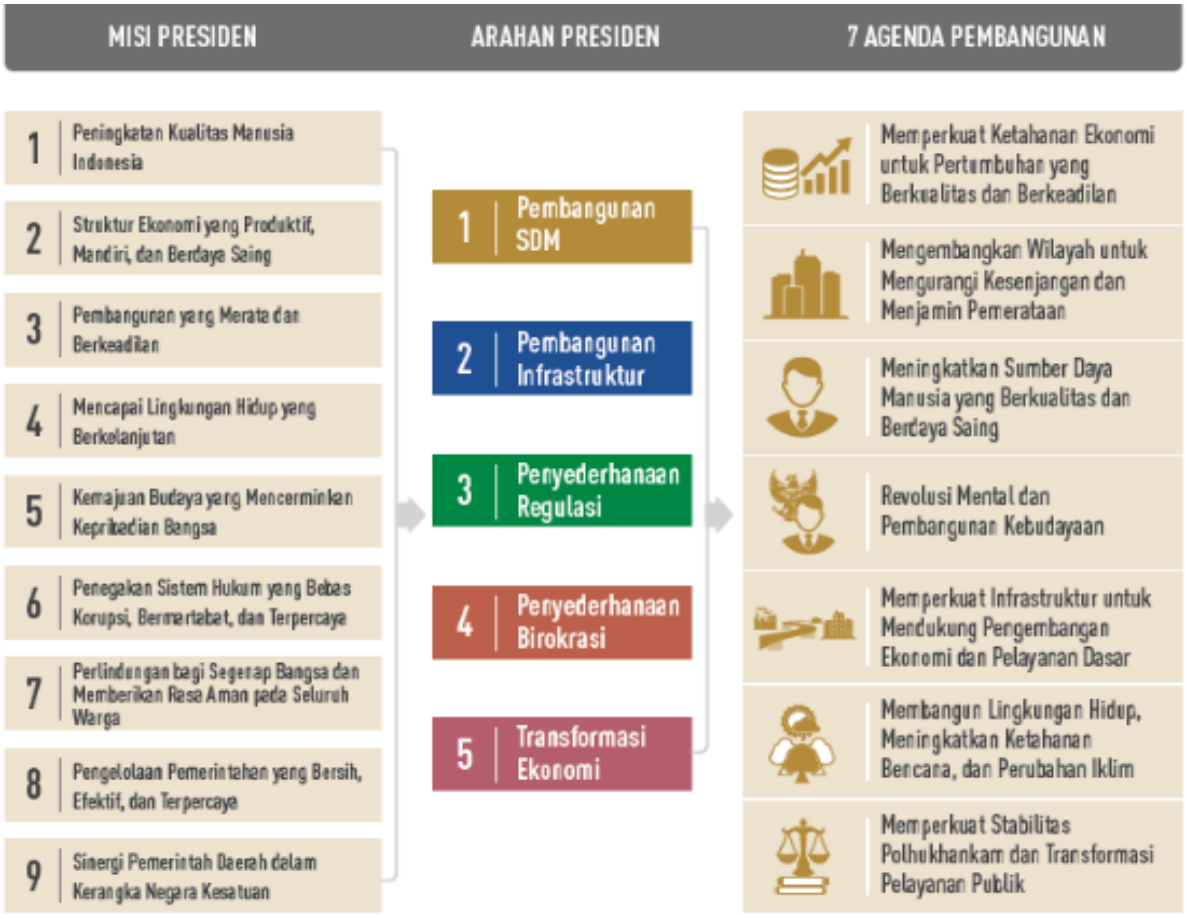
RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Visi Presiden juga menjadi salah satu landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Misi rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Tabel II.1.
Misi Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024



Agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman adalah sebagai berikut:

Tabel II.2.
Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 Terkait Perumahan dan Kawasan Permukiman

Agenda Pembangunan	Program Pembangunan
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang
	Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata
	Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur layanan dasar
	Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
	Pembangunan infrastruktur perkotaan
	Pembangunan energi dan kelistrikan
	Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
	Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim
	Pembangunan rendah karbon

Sumber: RPJM Nasional Tahun 2020-2024

Proyek prioritas strategis RPJMN 2020-2024 terkait perumahan dan kawasan permukiman:

1. Akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (90% rumah tangga).
2. Akses air minum perpipaan (10 juta sambungan rumah).
3. Rumah susun perkotaan (1 juta).
4. Infrastruktur jaringan gas kota untuk 4 juta sambungan rumah.
5. Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.

2.1.2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 adalah Menuju Jawa Tengah Sejahtera Dan Berdikari "Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi".

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota.
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Agar visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 lebih terarah, maka berikut ini adalah penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023.

Tabel II.3.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran
Misi 1: Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia	
Masyarakat Jawa Tengah yang semakin religius, toleran, dan guyup	Terciptanya kohesi sosial masyarakat
Misi 2: Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota	
Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan
	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik

Tujuan	Sasaran
Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	
Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah
	Menurunnya pengangguran terbuka
Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah
Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan	
Sumberdaya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender
Sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan
	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang harus diimplementasikan yaitu:

1. Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji;
3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, **rumah sederhana layak huni;**
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Strategi yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman adalah dalam rangka memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, salah satu strateginya adalah bantuan

pembangunan rumah sederhana layak huni (RSLH) dan perbaikan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh termasuk diantaranya air bersih, sanitasi dan listrik. Bantuan stimulan RSLH untuk menumbuhkan kembali gotong royong masyarakat, memperluas akses pembiayaan, serta sinergi penanganan dengan pusat, provinsi, kabupaten/ kota, CSR, Baznas dan sebagainya.

2.1.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 adalah Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia.

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Agar visi dan misi pembangunan daerah abupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026 lebih terarah, maka berikut ini adalah penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah abupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026.

Tabel II.4.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah
Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran
Misi 1: Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat	
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah
Misi 2: Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	
Meningkatkan kondusifitas wilayah dan masyarakat yang tertib dan toleran	Menurunnya konflik sosial dan pelanggaran Trantibum
Misi 3: Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak	
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat
	Meningkatkan Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Misi 4: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat	
Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia, serta kesetaraan gender	Meningkatnya kualitas pendidikan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Misi 5: Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya dalam industri pengolahan dan manufaktur, pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan peciptaan lapangan kerja	
Meningkatnya daya saing ekonomi daerah	Meningkatnya nilai tambah perekonomian daerah
	Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha
Misi 6: Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa	
Meningkatnya kualitas pengelolaan dan kemandirian desa	Meningkatnya status kemandirian desa
Misi 7: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan	
Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur
	Optimalnya Pemanfaatan Ruang
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sumber: RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 juga didukung dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga tahun 2021-2026 yaitu:

1. Program peningkatan pelayanan publik;
2. Program penurunan pengangguran;
3. Program penurunan kemiskiman;
4. Program bidang pendidikan dan kesehatan;

5. Program bidang ekonomi;
6. Program bidang pembangunan desa;
7. Program bidang infrastruktur.

Program yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman adalah dalam bidang peingkatan infrastruktur, seperti pengembangan ruang terbuka hijau di kecamatan, optimalisasi manajemen persampahan, dan peningkatan akses air bersih.

2.2. Tinjauan Umum Kebijakan Penataan Ruang

2.2.1. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Kebijakan pengembangan yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman, serta jaringan prasarana adalah:

1. Kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional.
2. Kebijakan pengembangan kawasan budidaya.

Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana meliputi:

1. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara,
2. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi,
3. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik,
4. Meningkatkan infrastruktur minyak dan gas bumi nasional yang optimal, dan
5. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.

Kebijakan pengembangan kawasan budidaya meliputi:

1. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya; dan
2. Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya meliputi:

a. Menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah.

b. Mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya.

c. Mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Menetapkan, memanfaatkan, mengembangkan dan mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.

e. Mengembangkan pulau-pulau kecil sebagai sentra ekonomi wilayah yang berbasis kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

f. Mengelola kekayaan sumber daya kelautan di wilayah perairan, wilayah yuridiksi, laut lepas, dan wilayah dasar laut internasional untuk kedaulatan ekonomi nasional, dan

g. Mengembangkan pemanfaatan ruang udara nasional sebagai aset pembangunan dengan tetap menjaga fungsi pertahanan dan keamanan serta keselamatan penerbangan.

Strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup meliputi:

a. Membatasi dan mengendalikan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana dan perubahan iklim,

b. Mengembangkan perkotaan metropolitan dan kota besar dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak,

c. Mengembangkan ruang terbuka hijau dnegan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan.

d. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan metropolitan dan kota besar untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.

e. Mengembangkan kegiatan budidaya yang dapat mempertahankan keberadaan pulau-pulau kecil.

f. Membatasi dan mengendalikan kegiatan budi daya pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi.

g. Menetapkan lokasi rusak dan tercemar untuk dipulihkan.

h. Mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota sedang sebagai kawasan perkotaan penyangga arus urbanisasi desa ke kota.

i. Mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk alokasi lahan pembangunan bagi sektoe non kehutanan dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan, karakater sumber daya alam, fungsi ekolosi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan secara berkelanjutan.

j. Mendorong pembangunan hutan rakyat untuk mendukung kecukupan tutupan hutan khususnya bagi wilayah daerah aliran sungai atau pulau yang tutupan hutannya kurang dari 30%.

k. Mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan bioekoregion yang merupakan bentang alam yang berada di dalam satu atau lebih daerah aliran sungai.

2.2.2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah.

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah, meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang, serta kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis. Kebijakan dan strategi yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman adalah kebijakan pengembangan kawasan budi daya, meliputi:

a. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, dengan strategi meliputi:

   1) Menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis Provinsi untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah.

   2) Mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya.

   3) Mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

   4) Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan/atau nasional.

   5) Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya hutan produksi, perkebunan, peternakan untuk mewujudkan nilai tambah daerah dan/atau nasional.

   6) Mengembangkan industri berbahan baku lokal dan kawasan industri untuk mewujudkan nilai tambah dan meningkatkan perekonomian daerah dan/atau nasional.

   7) Memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang memperhatikan dampak lingkungan.

   8) Mengembangkan destinasi wisata untuk mendorong peningkatan pengelolaan kawasan dan kesejahteraan masyarakat.

9) Mengembalikan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan skala ekonomi pada sektor perikanan dan pariwisata.

10) Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman.

b. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup, dengan strategi meliputi:

1) Mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budi daya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup; b. Mengembangkan secara selektif bangunan fisik di kawasan budi daya yang terdapat potensi bencana berdasarkan kajian teknis untuk

2) Meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana.

3) Mengembangkan kawasan tanah nonproduktif untuk kegiatan pembangunan non pertanian guna mempertahankan lahan pangan berkelanjutan.

4) Membatasi alih fungsi lahan sawah melalui penataan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak sporadis untuk mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.

5) Mengendalikan kegiatan permukiman yang berada di kawasan budi daya yang memiliki potensi bencana alam.

6) Mendorong pengembangan sistem permukiman perkotaan yang kompak untuk menghindari perkembangan secara horizontal (*citywide*).

7) Mengarahkan perkembangan industri ke kawasan peruntukan industri.

Rencana pengembangan struktur ruang wilayah Provinsi meliputi sistem perdesaan, sistem perkotaan, sistem perwilayahan, dan sistem jaringan prasarana wilayah.

Sistem perdesaan dilakukan dengan membentuk pusat-pusat pelayanan desa secara berhierarki pada kawasan-kawasan perdesaan dan kawasan-kawasan selain dari yang telah ditetapkan sebagai kawasan perkotaan. Sistem perdesaan disusun berdasarkan pelayanan perdesaan secara berhierarki, meliputi pusat pelayanan desa, kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan. Pusat pelayanan desa terdapat di seluruh Kabupaten dengan bentuk meliputi pusat pelayanan kawasan dan pusat pelayanan lingkungan. Sedangkan, **kawasan agropolitan** dan **kawasan minapolitan** terdapat di beberapa kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Purbalingga.

Sistem perkotaan terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), meliputi:
   a. Kawasan perkotaan Semarang – Kendal – Demak – Ungaran – Purwodadi (Kedungsepur);
   b. Surakarta, meliputi Kota Surakarta dan sekitarnya; dan
   c. Cilacap, meliputi kawasan perkotaan Cilacap dan sekitarnya.

2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi Purwokerto, Kebumen, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Cepu, Kudus, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Tegal dan Kota Salatiga.
3. **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)** meliputi Kroya, Majenang, Wangon, Ajibarang, Banyumas, **Purbalingga**, Bobotsari, Sokaraja, Banjarnegara, Klampok, Gombong, Karanganyar Kebumen, Prembun, Kutoarjo, Purworejo, Mungkid, Muntilan, Mertoyudan, Borobudur, Secang, Ampel, Sukoharjo, Kartasura, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Jaten, Delanggu, Prambanan, Tawangmangu, Blora, Purwodadi, Gubug, Godong, Rembang, Pati, Juwana, Tayu, Jepara, Pecangaan, Demak, Mranggen, Ungaran, Ambarawa, Temanggung, Parakan, Kendal, Boja, Kaliwungu, Weleri, Sukorejo, Batang, Kajen, Wiradesa, Comal, Purbalingga, Slawi-Adiwerna, Ketanggungan-Kersana, Bumiayu, Brebes.

Sistem Perwilayahan meliputi:

1. Kedungsepur yang meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang (Ungaran), Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan (Purwodadi), dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, Nasional dan Internasional;
2. Juwana-Jepara-Kudus-Pati (Wanarakuti) yang berpusat di Kudus, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi dan Nasional;
3. Surakarta dan sekitarnya (Subosukawonosraten), yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, Nasional dan Internasional;
4. Bregasmalang, yaitu Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Slawi (Kabupaten Tegal), dan Kabupaten Purbalingga, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi dan Nasional;
5. Petanglong yang terdiri dari Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi;
6. **Barlingmascakeb**, meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen dengan **fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi dan Nasional (khusus Cilacap)**;
7. Purwomanggung meliputi Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi;
8. Banglor yang terdiri dari Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora, dengan pusat di Cepu, dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal dan Provinsi.

Sistem jaringan prasarana wilayah meliputi:

a. Rencana sistem jaringan prasarana transportasi;
b. Rencana sistem jaringan prasarana telekomunikasi;

c. Rencana sistem jaringan prasarana sumberdaya air;

d. Rencana sistem jaringan prasarana energi;

e. Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan.

Rencana pengembangan pola ruang wilayah Provinsi meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung, meliputi kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan kawasan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; kawasan lindung geologi; dan kawasan lindung lainnya.

Pola ruang untuk kawasan budidaya, meliputi: kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kawasan peruntukan permukiman, meliputi:

a. Kawasan permukiman perdesaan adalah kawasan yang berada di sekitar kawasan perdesaan.

b. Kawasan permukiman perkotaan adalah kawasan yang berada di kawasan perkotaan.

2.2.3. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031

Berdasarkan potensi dan karakteristik yang dimiliki oleh wilayah Kabupaten Purbalingga serta visi dan misi penataan ruang, maka tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Purbalingga adalah "mewujudkan ruang Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah di bagian Barat-Selatan Jawa Tengah berbasis agrobisnis, industri dan pariwisata yang berkelanjutan".

A. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Kebijakan pengembangan struktur wilayah dilakukan melalui pembagian wilayah pengembangan, peningkatan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah dan pusat pelayanan yang merata di seluruh wilayah Kabupaten, dan pengembangan infrastruktur wilayah guna mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan. Kebijakan pengembangan infrastruktur wilayah guna mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan dilakukan melalui strategi:

a. Meningkatkan akses yang menghubungkan simpul-simpul kawasan produksi dengan kawasan pusat pemasaran;

b. Meningkatkan jangkauan distribusi energi dan pelayanan telekomunikasi dengan mengembangkan sistem jaringan di kawasan perdesaan;

c. Mengembangkan sistem jaringan prasarana distribusi sumber daya air;

d. Mengembangkan sistem jaringan limbah di permukiman perkotaan dan kawasan peruntukan industri;

e. Mengembangkan jalur dan ruang evakuasi bencana alam; dan

f. Mengembangkan sistem sanitasi lingkungan di kawasan permukiman.

Kebijakan pola ruang dilakukan melalui pengembangan kawasan lindung dan budidaya serta penentuan arahan pemanfaatan ruang di masing-masing kawasan tersebut. Kebijakan dan Strategi pelestarian kawasan lindung dilakukan melalui stretegi:

a. Memulihkan fungsi lindung;

b. Mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya di kawasan lindung; dan

c. Menghindari kawasan rawan bencana sebagai kawasan terbangun.

B. Rencana Struktur Ruang

Rencana sistem pusat pelayanan di Kabupaten Purbalingga terdiri atas Rencana Sistem Pusat Kegiatan dan Rencana Sistem Wilayah. Sistem wilayah Kabupaten Purbalingga termasuk dalam pembagian wilayah pengembangan Kawasan Banjarnegara - Purbalingga - Banyumas - Cilacap - Kebumen (Barlingmascakeb). Rencana Sistem Pusat Kegiatan di Kabupaten Purbalingga yang terdiri atas Sistem Perkotaan dan Sistem Perdesaan. Sistem perkotaan Kabupaten Purbalingga meliputi:

1. Pengembangan PKL, pada **Kawasan Perkotaan Purbalingga** dan Kawasan Perkotaan Bobotsari. Pengembangan Pusat Perkotaan Purbalingga didorong menjadi PKW.
2. Pengembangan PPK, pada Kecamatan Bukateja, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kertanegara, **Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Bojongsari**, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Kemangkon, Kecamatan Kejobong, **Kecamatan Kutasari, Kecamatan Padamara**, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Pengadegan, dan Kecamatan Karangjambu.

Sedangkan, sistem perdesaan berupa pengembangan PPL, yakni meliputi Pengembangan PPL, pada PPL Kutawis Kecamatan Bukateja, PPL Makam Kecamatan Rembang, PPL Kutabawa Kecamatan Karangreja, PPL Purbayasa Kecamatan Padamara, PPL Picung Desa Krangean Kecamatan Kertanegara, PPL Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol, PPL Bedagas Kecamatan Pangadegan, dan PPL Bandingan Kecamatan Kejobong.

C. Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang wilayah Kabupaten Purbalingga terdiri atas Kawasan Peruntukan Lindung dan Kawasan Peruntukan Budidaya.

1) **Kawasan Lindung** terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan lindung geologi, kawasan rawan bencana alam, kawasan cagar budaya.

2) **Kawasan Budidaya** terdiri atas, kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, serta kawasan petahanan dan keamanan.

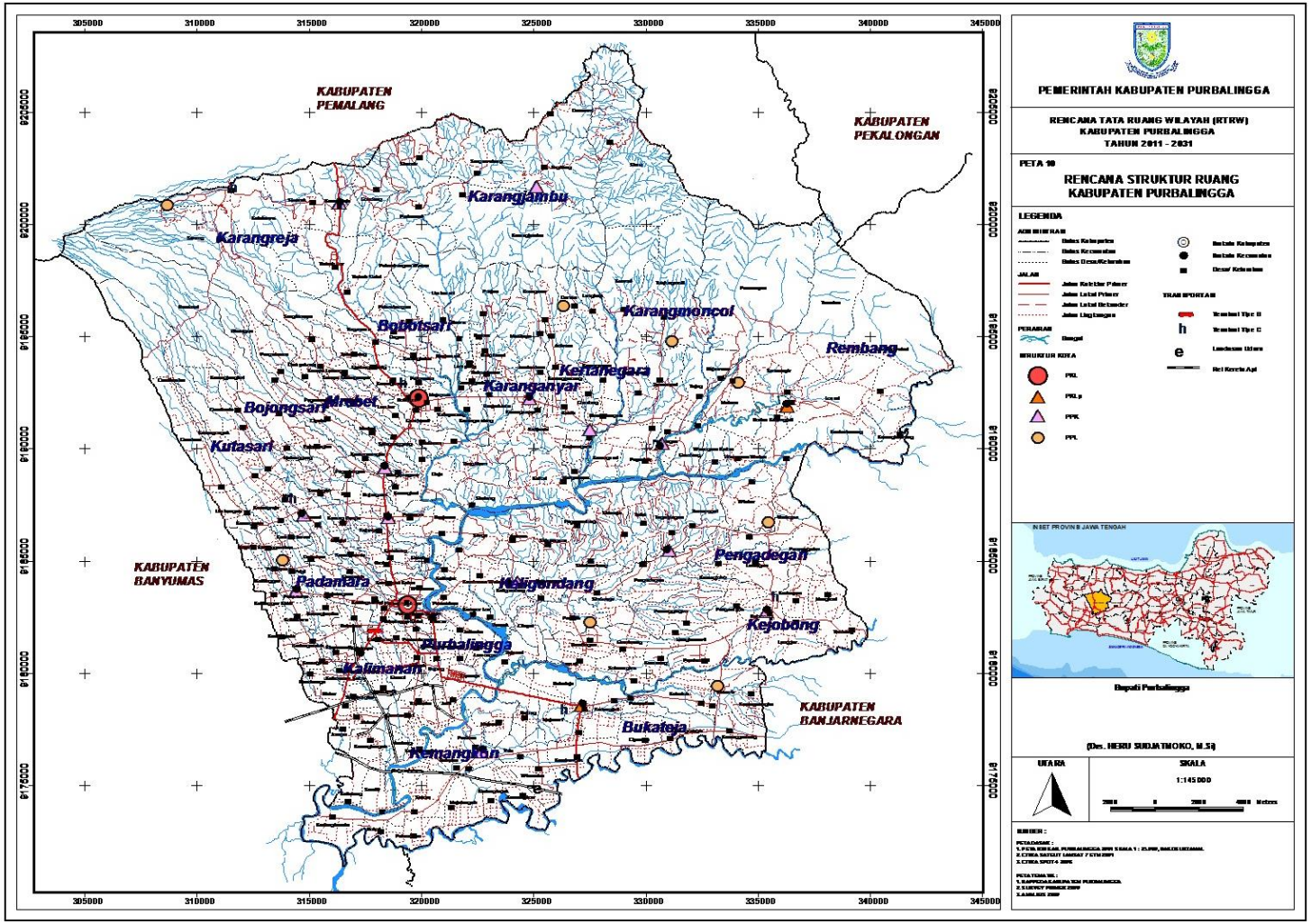
Kawasan peruntukan permukiman terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

- **Kawasan permukiman perkotaan** meliputi Kawasan Perkotaan diseluruh wilayah daerah
- **Kawasan permukiman perdesaan** berada di seluruh Kecamatan dengan penyebaran mengikuti pola perkampungan.

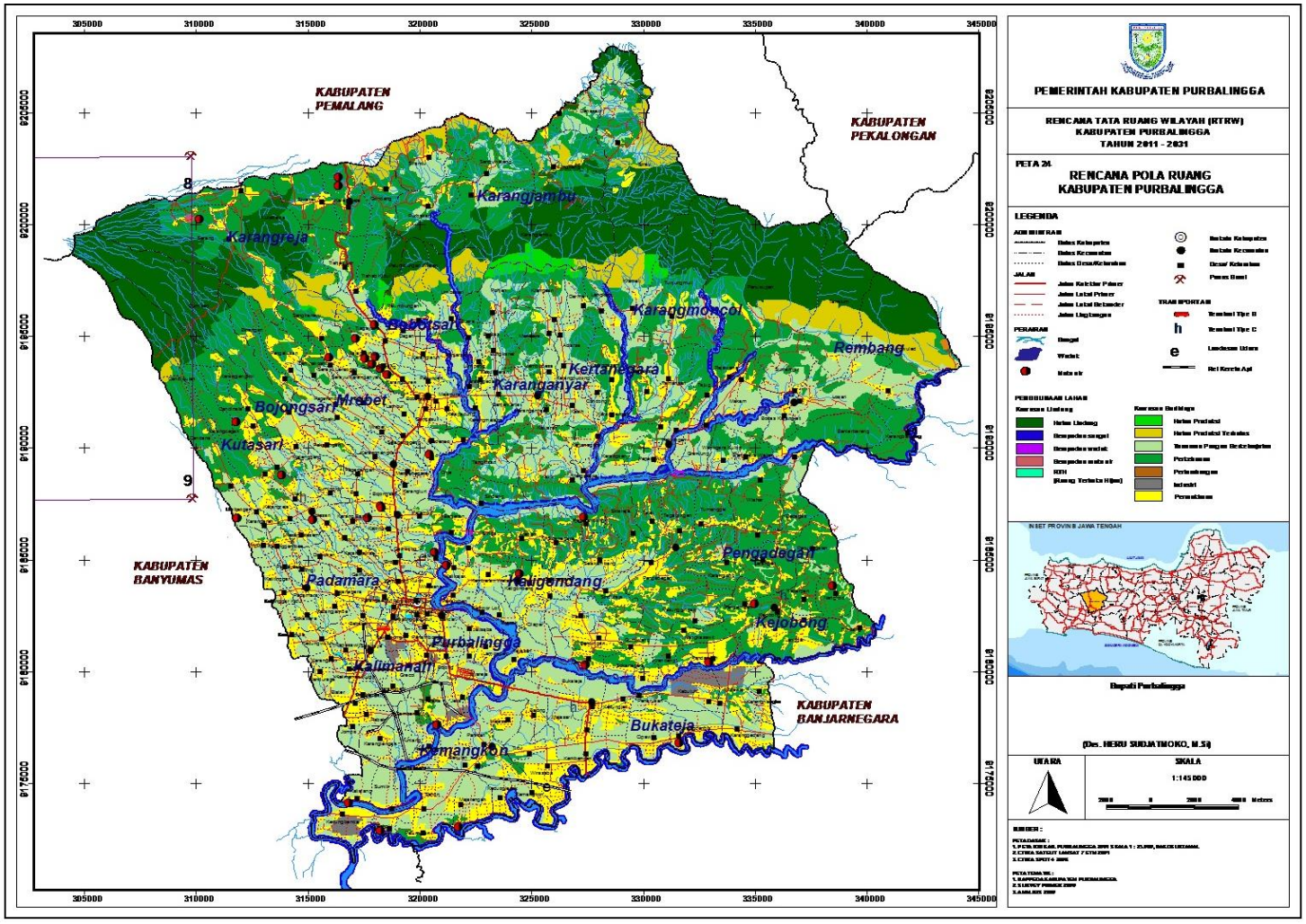
D. Kawasan Strategis

Kawasan strategis wilayah terdiri atas kawasan strategis provinsi di wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten.

1. **Kawasan Strategis Provinsi yang berada di wilayah Kabupaten** berupa Kawasan Agropolitan Mangga Emas (Purbalingga, Purbalingga, Tegal, Brebes, Banyumas).
2. **Kawasan Strategis Kabupaten** meliputi Kawasan Agropolitan Mangga Emas dan Kawasan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba. Kawasan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba berada di sebagian wilayah Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja.



Gambar 2.1.
Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Purbalingga



Gambar 2.2.
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Purbalingga

2.3. Tinjauan Umum Kebijakan Sektoral

Perwujudan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga yang dilaksanakan melalui beberapa misi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Misi terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman, adalah sebagai berikut:

2.3.1. Rencana Induk SPAM (RI-SPAM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2033

Rencana induk SPAM Kabupaten Purbalingga mencakup wilayah pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan dalam dua wilayah pelayanan yaitu wilayah pelayanan perkotaan dan wilayah pelayanan perdesaan. SPAM jaringan perpipaan di Kabupaten Purbalingga dikelola oleh PDAM dan Badan/Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP/KP SPAMS) masing-masing desa yang pernah mendapatkan Program Pamsimas. Secara keseluruhan Kota Purbalingga belum terjangkau pelayanan air minum oleh PDAM. Ketersediaan pelayanan air minum saat ini hanya terdapat di jalan-jalan utama kota. Sedangkan pada daerah di luar perkotaan untuk mendapatkan air bersih dapat diperoleh dari sumur dangkal, sumur artesis maupun mata air.

Rencana pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan dikelompokan sesuai dengan masing-masing pengelola.

Tabel II.5.
Rencana Pengembangan SPAM PDAM

No	Rencana Pengembangan SPAM
Tahun 2022	
1	Penggabungan pengambilan debit air bersih/ air minum dari sumber Mata Air Naga Gombang dan Situ 2 Desa Kajongan ke reservoar Bendung Kemusuk Kabupaten Purbalingga
2	Pengembangan jaringan pelayanan lokasi Bendung Kemusuk s/d Bandara Jenderal Besar Sudirman
3	**Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi dan aksesoris IKK Kaligondang IKK Kaligondang (Desa Kaligondang dan Desa Selanegara)**
4	SR MBR / HAMP Perkotaan
5	Pemanfaatan sumber air baku dari sumur bor dalam eksisting yang ada di Kec. Kejobong, Kec. Bukateja dan Kec. Kemangkon
6	**Optimalisasi pelayanan dengan penambahan debit dari MA Watu Tumpang yang terletak di Desa Karangcegak Kec Kutasari**
7	**Pembangunan sumur bor dalam di wilayah Kecamatan Kalimanah, Purbalingga dan Padamara (3 titik)**
Tahun 2023	
1	**Optimalisasi IKK Kaligondang**, IKK Mrebet, dan **IKK Padamara**
2	Pembangunan SPAM IKK Rembang dari sumber air baku Curug Panyatan
3	**Pembangunan sumur bor dalam di wilayah Kecamatan Kalimanah, Purbalingga dan Padamara (3 titik)**
4	Penambahan sambungan rumah dari sumber Mata Air Nagagombang, pengembangan jaringan Bendung Kemusuk - Desa Bedagas, jaringan Bendung Kemusuk - Bandara Jenderal Besar Sudirman, dan optimalisasi sumber mata Air Watutumpang
Tahun 2024	
1	**SPAM** Kota Pengadegan, Kejobong, dan **Kaligondang**
2	Pembangunan SPAMS dengan memanfaatkan sumber air baku dari Mudal Teleng yang terletak di Desa Tlagayasa Kec Bobotsari

No	Rencana Pengembangan SPAM
3	Pemanfaatan sumber air dari Curug Ciputut yang terletak di Desa Talagening Kec Bobotsari
4	**Pembangunan sumur bor dalam di wilayah Kecamatan Kalimanah, Purbalingga dan Padamara (3 titik)**
5	Penambahan sambungan rumah dari sumber Mata Air Nagagombang, pengembangan jaringan Bendung Kemusuk - Desa Bedagas, jaringan Bendung Kemusuk - Bandara Jenderal Besar Sudirman, dan optimalisasi sumber mata Air Watutumpang
Tahun 2025	
1	Pembangunan SPAMS dengan memanfaatkan sumber air baku dari MA Cilongan yang terletak di Desa Cipaku Kec Mrebet
2	**Penambahan Sambungan Rumah dari Sumur Bor di Wilayah Kecamatan Kalimanah, Purbalingga dan Padamara**, dari Curug Ciputut, sumber Mata Air Nagagombang, pengembangan jaringan Bendung Kemusuk - Desa Bedagas, jaringan Bendung Kemusuk - Bandara Jenderal Besar Sudirman, serta optimalisasi sumber mata Air Watutumpang
Tahun 2026	
1	Pemanfaatan sumber air permukaan dari rencana Bendung Purbanegara
2	Penambahan sambungan rumah dari sumber Mata Air Nagagombang, pengembangan jaringan Bendung Kemusuk - Desa Bedagas, jaringan Bendung Kemusuk - Bandara Jenderal Besar Sudirman, dan optimalisasi sumber mata Air Watutumpang

Sumber: RI-SPAM Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2033

Tabel II.6.
Rencana Pengembangan SPAM Non PDAM

No	Rencana Pengembangan SPAM
Tahun 2022	
1	HAMP Perdesaan
2	DAK air minum perluasan jaringan perpipaan untuk Desa Kutabawa, Panunggalan, Larangan, Bedagas, Karangjoho, Tumanggal, Karanganyar, Pekiringan, Pekalongan, Brakas, Jambudesa, Kabuderan, Bungkanel, Maribaya, Banjarkerta, Lumpang, Ponjen, Bumisari, Wlahar, dan Sumilir
3	DAK air minum peningkatan jaringan perpipaan untuk Desa Karanggedang, Pagedangan, Nangkod, Metenggeng, Gumiwang, Nangkasawit, Pandansari, Sokanegara, Kedarpan, Slinga, Bandingan, Timbang, Tangkisan, Langgar, Binangun, Krenceng, Sindang, Pangempon, Kejobong, dan Majatengah
Tahun 2023	
1	HAMP Perdesaan
2	Perluasan SPAM jaringan perpipaan - tematik penanggulangan kemiskinan DAK di Kecamatan Rembang, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Karangreja, dan Kecamatan Kertanegara
Tahun 2024	
1	HAMP Perdesaan
2	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum pada daerah rawan kekeringan
Tahun 2025	
1	HAMP Perdesaan
2	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum pada daerah rawan kekeringan
Tahun 2026	
1	HAMP Perdesaan
2	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum pada daerah rawan kekeringan

Sumber: RI-SPAM Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2033

2.3.2. Strategi Sanitasi Kabupaten Purbalingga (SSK) Tahun 2021-2026

Visi sanitasi dan misi persubsektor sanitasi di Kabupaten Purbalingga sebagai berikut.

Tabel II.7.
Visi dan Misi Sanitasi Kabupaten Purbalingga

Visi	Misi	Visi Sanitasi	Misi Sanitasi
Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia.	Misi 3: Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Masyarakat Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak. Misi 3 dengan memperhatikan indikator kinerja meliputi: Indeks Ketahanan Pangan, Cakupan Akses Air Minum Layak, Cakupan Sanitasi Layak, Cakupan kawasan permukiman tidak kumuh perkotaan	Mewujudkan Lingkungan Yang Sehat di Kabupaten Purbalingga tahun 2026 dengan Pembangunan Sanitasi Yang Partisipatif dan Berkesinambungan Menuju Masyarakat Sejahtera	Misi Air Limbah Domestik: a. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui pembangunan sarana prasarana air limbah domestik b. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penjaringan aspirasi, pemberdayaan, kesetaraan gender dan kebersamaan dalam pembangunan sarana dan pengelolaan air limbah domestik c. Peningkatan keterpaduan pemangku kepentingan dalam pembangunan air limbah domestik secara terencana dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan
			Misi Persampahan: a. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui pembangunan sarana prasarana persampahan b. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penjaringan aspirasi, pemberdayaan, kesetaraan gender dan kebersamaan dalam pembangunan sarana dan pengelolaan persampahan c. Peningkatan keterpaduan pemangku kepentingan dalam pembangunan persampahan secara terencana dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan
			Misi Drainase: a. Meningkatkan kualitas lingkungan melalui pembangunan sarana prasarana drainase perkotaan b. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penjaringan aspirasi, pemberdayaan, kesetaraan gender dan kebersamaan dalam pembangunan sarana dan pengelolaan Drainase Perkotaan c. Peningkatan keterpaduan pemangku kepentingan dalam pembangunan Drainase Perkotaan secara terencana dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan

Sumber: SSK Kabupaten Purbalingga Tahun 2018-2022

Untuk mewujudkan percepatan pembangunan sanitasi yang mendukung visi dan Misi diperlukan strategi pengembangan sanitasi. Strategi disusun menggunakan analisis *Strength Weakness Opportunity Threat* (SWOT) sesuai matrik analisa SWOT yang terdapat

pada Lampiran 2 pada dokumen pemutakhiran SSK. Strategi tidak hanya mencakup aspek teknis saja tetapi juga aspek non teknis (kelembagaan, pendanaan, komunikasi, partisipasi masyarakat dan dunia usaha serta aspek kesetaraan gender dan keberpihakan pada masyarakat miskin). Untuk melakukan analisa ini berdasarkan isu-isu strategis masing-masing sektor yang terkumpul dibedakan menjadi dua kelompok yaitu faktor external dan faktor internal. Faktor external adalah berasal dari luar berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*), sedangkan faktor internal diperoleh dari dalam yang merupakan kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*).

1. Air Limbah Domestik
    a. Mengoptimalkan akses layanan fasilitas pengolahan air limbah dan melakukan peningkatan pada sistem setempat (*on-site*) maupun sistem terpusat (*off-site*).
    b. Menyediakan Sarana dan Prasarana Air Limbah yang layak bagi Masyarakat MBR/Miskin.
    c. Peningkatan Kapasitas dan Rencana Pembangunan IPLT.
    d. Penyiapan rencana Induk Outline Plan Air Limbah Skala Kawasan.
    e. Penguatan kelembagaan.
    f. Peningkatan kapasitas SDM terkait Pengelolaan Air Limbah Permukiman.
    g. Pengembangan dan Penguatan Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Permukiman.
    h. Peningkatan Peran serta masyarakat dan dunia usaha/pihak swasta dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah.
    i. Peningkatan dan Pengembangan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman.
2. Pengelolaan Persampahan
    a. Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana sesuai dengan Volume timbulan sampah yang ada.
    b. Meningkatkan Kemampuan Manajemen dan Kelembagaan Dalam Sistem Pengelolaan Persampahan dan SDM.
    c. Melakukan Optimalisasi Pendanaan Sub Sektor Persampahan.
    d. Melakukan peningkatan kepedulian dan partisipasi swasta/dunia usaha dalam pengelolaan persampahan.
    e. Peningkatan Implementasi Produk Pengaturan.
    f. Melakukan peningkatan keahlian dan SDM di Masyarakat terkait kesadaran pengelolaan persampahan.
    g. Melakukan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sampah.
3. Drainase Lingkungan

a. Pemantapan keterpaduan penanganan pengendalian banjir dengan sektor/ sub sektor terkait lainnya berdasarkan pertimbangan faktor Klimatologi dan kebencanaan.

b. Pemantapan Keterpaduan penanganan pengendalian banjir dan sektor/sub sektor terkait lainnya berdasarkan Keseimbangan Tata air.

c. Meningkatkan kerjasama dari para stakeholder pembangunan drainase (pemerintah, masyarakat, NGO, swasta/dunia usaha).

d. Penetapan Regulasi dan Pengembangan sistem drainase yang efektif, efisien, dan berkelanjutan dan meminimalkan genangan, polutan dan banjir yang berdampak negatif.

e. Mengembangkan perencanaan sistem drainase kota yang terintegrasi dan komprehensif.

f. Peningkatan pembiayaan untuk penyelenggaraan sistem drainase perkotaan.

Rencana pengembangan sistem pengolahan air limbah di Kabupaten Purbalingga diarahkan untuk dapat menerapkan pembangunan instalasi pengolahan limbah dan bahan berbahaya beracun (B3), pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah industri, pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja dari WC umum terminal, pasar, lokasi sanitasi masyarakat dan rumah tangga perkotaan serta pemantauan ketat terhadap masyarakat yang melakukan pencemaran lingkungan perkotaan dengan limbah tinja. Perencanaan ke depan perlu diantisipasi dengan pembangunan instalasi pengolahan limbah dan bahan berbahaya beracun (B3) khususnya pada Kawasan Perkotaan Purbalingga, Kawasan Perkotaan Bobotsari, Kawasan Perkotaan Bukateja dan Kawasan Perkotaan Rembang serta kawasan ibukota kecamatan lain yang berkembang menjadi kawasan perkotaan. Arahan pengelolaan limbah permukiman perkotaan berupa pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja, WC/ jamban umum dan limbah rumah tangga perkotaan dilakukan dengan pengembangan dan peningkatan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) secara komunal, pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja dari WC/ jamban umum terminal, pasar, lokasi sanitasi masyarakat dan rumah tangga perkotaan; dan pemantauan ketat terhadap masyarakat yang melakukan pencemaran lingkungan perkotaan dengan limbah tinja.

Rencana Program dan kegiatan pengelolaan air limbah domestik tahun 2020 berupa program pengelolaan persampahan dan limbah B3 dalam bentuk cakupan pengelolaan air limbah rumah tangga, Cakupan industri yang memiliki TPS B3, dan Persentase pengurangan timbulan sampah melalui bank sampah. Pengelolaan sistem persampahan di wilayah Kabupaten Purbalingga pada saat ini dibagi ke dalam 2 (dua) sistem, yaitu pengelolaan sampah oleh masyarakat dan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Rencana kedepannya pengelolaan sampah diarahkan dengan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di setiap wilayah secara komunal. Kawasan perkotaan sudah terdapat tempat sampah yang membedakan sampah kering dan basah. Hal ini sangat membantu dalam pemilihan sampah yang kemudian bisa didaur ulang sesuai pemanfaatannya, tetapi pembedaan sampah tersebut hanya terdapat di kecamatan Kota sedangkan di tempat lain belum terdapat. Pembedaan sampah ini harus diterapkan di semua kecamatan agar

sampah lebih mudah dalam pemilahannya, juga membantu dalam pengelolaan sampahnya karena sudah adanya pembagian jenis sampahnya. Sedangkan untuk persampahan di pedesaan direncanakan juga dengan sistem 3R secara komunal untuk setiap wilayah (RT/RW). Ringkasan kebutuhan investasi pengembangan sanitasi (air limbah domestik dan persampahan) lima (5) tahun ke depan baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan PHLN).

2.3.3. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Purbalingga (RP2KPKPK) Tahun 2021

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen rencana penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman perkotaan yang difokuskan pada pola pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan sebagai acuan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang terpadu dan bersinergi sebagai bagian dari kegiatan penanganan yang diatur dalam UU no 23 Tahun 2014.

Lokasi permukiman kumuh di Kabupaten Purbalingga diputuskan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Purbalingga No. 640/212 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Purbalingga. Luas total kawasan kumuh di seluas 344,28 Ha yang tersebar di 8 kecamatan dan 25 kawasan, yaitu Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Padamara, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Bukateja, dan Kecamatan Rembang.

Penanganan kumuh dilakukan berdasarkan luasan kumuh (Pusat > 15 Ha, Propinsi 10 -15 Ha) melalui pendekatan keterpaduan program dan pendanaan dengan melibatkan Pemerintah Pusat dan Propinsi. Sedangkan penanganan kumuh (< 10 Ha) dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota atau memanfaatkan peluang dan skema program yang telah ada.

Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Skala Kabupaten ini diangkat dari kondisi aktual yang ada di Kabupaten Purbalingga disertai isu-isu strategis apa saja yang berpengaruh dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Purbalingga, dengan demikian akan diketahui konsep penanganan dan strategi penanganan sebagai berikut:

Tabel II.8.
Konsep dan Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Kabupaten Purbalingga

Aspek	Rumusan Strategi
Pencegahan Perumahan Kumuh dan Perluasan Permukiman Kumuh	• Sosialisasi peraturan Ijin Menidirikan Bangunan (IMB) • Penerapan rencana penataan bangunan yang terintegrasi dalam rencana tata ruang dan pengelolaan lingkungan yang partisipasif • Pengembalian fungsi kawasan perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam rencana tata ruang yang ada • Pelibatan masyarakat kelompok dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan perumahan dan permukiman

Aspek		Rumusan Strategi
		• Pembinaan terhadap masyarakat dalam kegiatan pembangunan perumahan dan pemukiman melalui pembentukan kelompok-kelompok swadaya masyarakat
Peningkatan Perumahan Kumuh dan Perluasan Permukiman Kumuh	Bangunan Gedung	• Merevitalisasi kawasan permukiman yg kumuh dan padat • Mengenalkan program pemugaran perumahan, terutama pada rumah- rumah yang mempunyai nilai budaya dan sejahtera • Penataan bangunan dan lingkungan kawasan perkotaaan • Perbaikan kualitas lingkungan permukiman • Mengendalikan perkembangan kawasan permukiman baru dengan pembatasan kepadatan dan luasan • Relokasi kawasan permukiman resetlement • Menata kawasan permukiman dengan kepadatan bangunan sedang hingga tinggi
	Jalan Lingkungan	• Penyediaan infrastruktur jalan perkotaan • Perbaikan jaringan jalan perkotaan
	Air Minum	• Penataan sistem jaringan air minum • Penyediaan infrastruktur air bersih konsumsi bagi permukiman
	Drainase Lingkungan	• Penataan sistem jaringan drainase perkotaan • Penyediaan infrastruktur drainase perkotaan permukiman
	Pengelolaan Air Limbah	• Peningkatan sarana-prasarana air limbah lingkungan • Penyediaan infrastruktur pengelolaan air limbah komunal di lingkungan permukiman • Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terpusat di kawasan permukiman • Peningkatan prasarana sanitasi komunal lingkungan permukiman
	Persampahan	• Pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle di kawasan permukiman • Peningkatan sarana-prasarana sistem persampahan • Penyediaan infrastruktur pengelolaan dan sistem persampahan permukiman
	Proteksi Kebakaran	Penyediaan prasarana pendukung sistem proteksi kebakaran di lingkungan permukiman

Sumber: RP2KPKPK Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

BAB III
GAMBARAN UMUM WILAYAH

3.1. Kecamatan Purbalingga

3.1.1. Kondisi Fisik Kawasan

Kecamatan Purbalingga adalah kecamatan yang menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Purbalingga. Batas wilayah Kecamatan Purbalingga secara administratif dapat diuraikan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Bojongsari

Sebelah Timur : Kecamatan Kaligondang dan Kecamatan Bukateja

Sebelah Selatan : Kecamatan Kemangkon

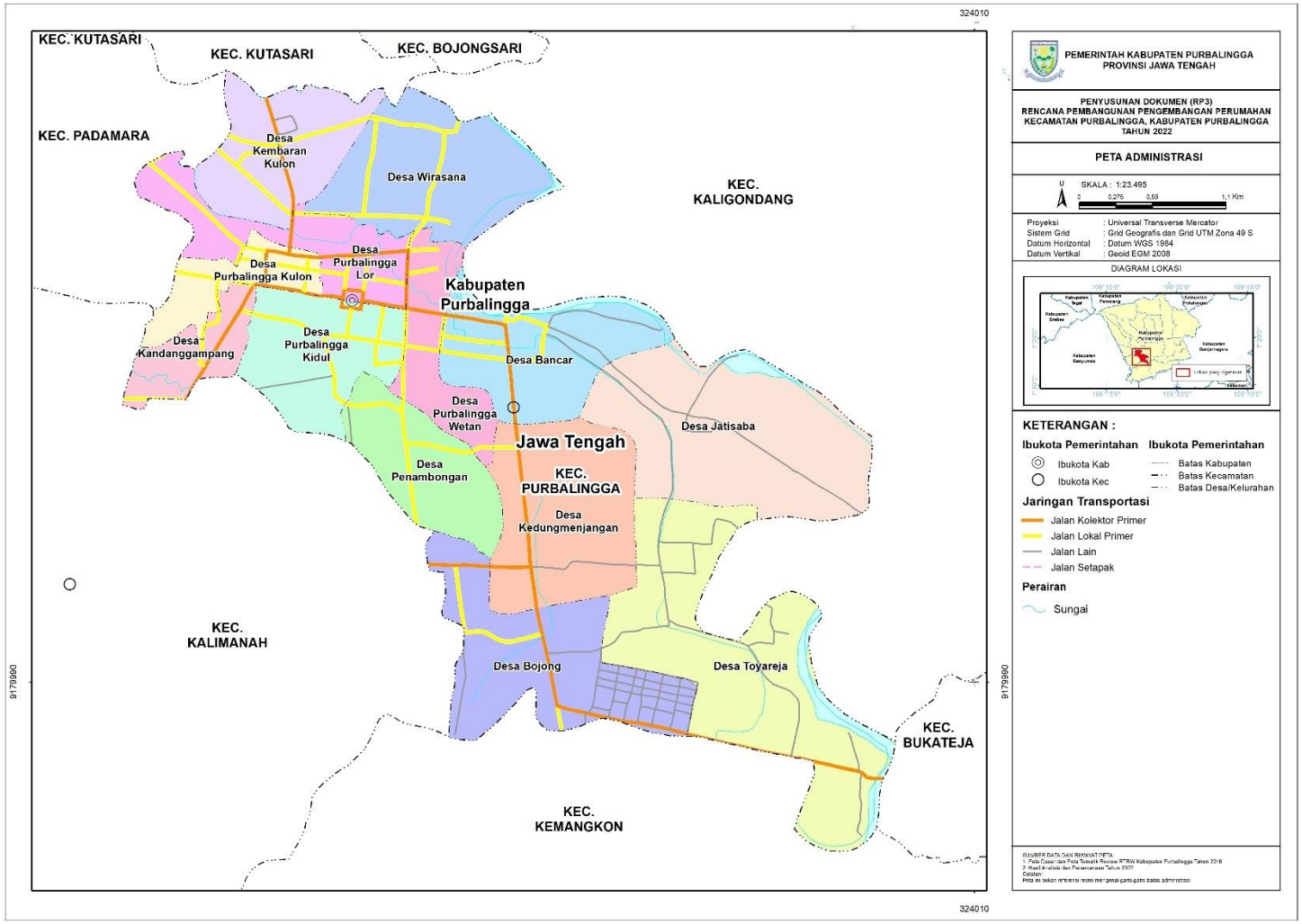
Sebelah Barat : Kecamatan Kalimanah dan Kecamatan Padamara

Wilayah Kecamatan Purbalingga terbagi dalam 13 desa/ kelurahan dengan luas wilayah 1.469,98 Ha atau 1,82% dari luas wilayah Kabupaten Purbalingga. Desa dengan wilayah terluas adalah Desa Toyareja seluas 233,62 Ha. Sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kelurahan Kandang Gampang dengan luas 44,21 Ha. Berikut ini merupakan luas wilayah dan peta administrasi Kecamatan Purbalingga.

Tabel III.1.
Luas Wilayah Kecamatan Purbalingga

No	Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)
1	Bojong	146,47
2	Toyareja	233,62
3	Kedung Menjangan	141,02
4	Jatisaba	199,02
5	Bancar	113,55
6	Purbalingga Wetan	61,17
7	Penambongan	83,28
8	Purbalingga Kidul	94,85
9	Kandang Gampang	44,21
10	Purbalingga Kulon	46,54
11	Purbalingga Lor	79,79
12	Kembaran Kulon	96,01
13	Wirasana	130,44
Jumlah		1.469,98

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020



Gambar 3.1.
Peta Administrasi Kecamatan Purbalingga

Wilayah Kecamatan Purbalingga memiliki ketinggian tempat antara 34 meter – 72 meter dari permukaan laut. Menurut klasifikasi ketinggian wilayah Kecamatan Purbalingga termasuk dataran rendah dengan tingkat kemiringan berkisar antara 0 - 8%. Peta topografi wilayah Kecamatan Purbalingga dapat dilihat pada Gambar 3.2.

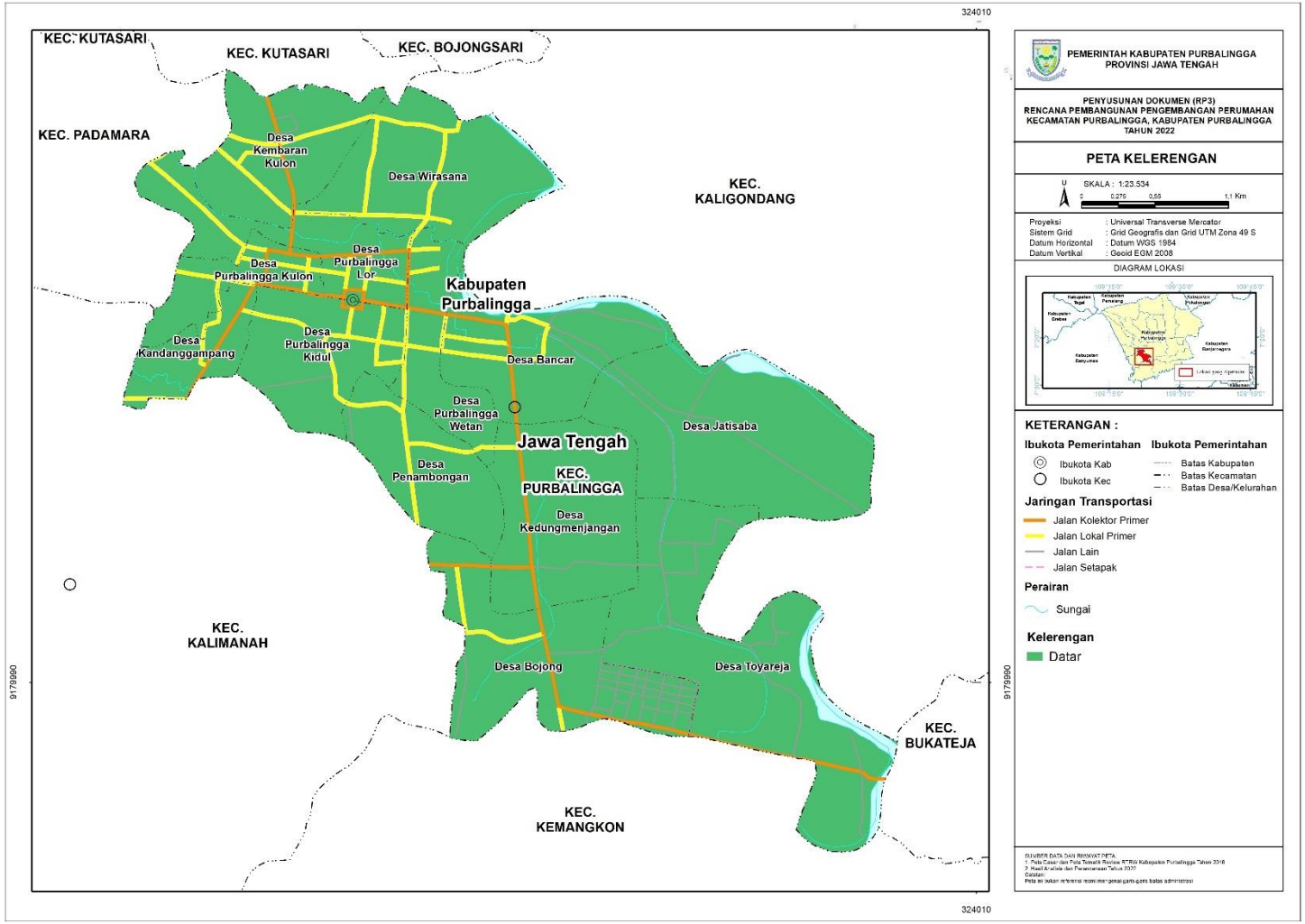
Jenis tanah yang ada di Kecamatan Purbalingga dikategorikan menjadi 2 jenis dengan karakteristik yang berbeda. Jenis tanah dominan di Kecamatan Purbalingga adalah aluvial coklat tua dan latosol coklat tua kemerahan. Jenis tanah di Kecamatan Purbalingga dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.3.

Tabel III.2.
Jenis Tanah di Kecamatan Purbalingga

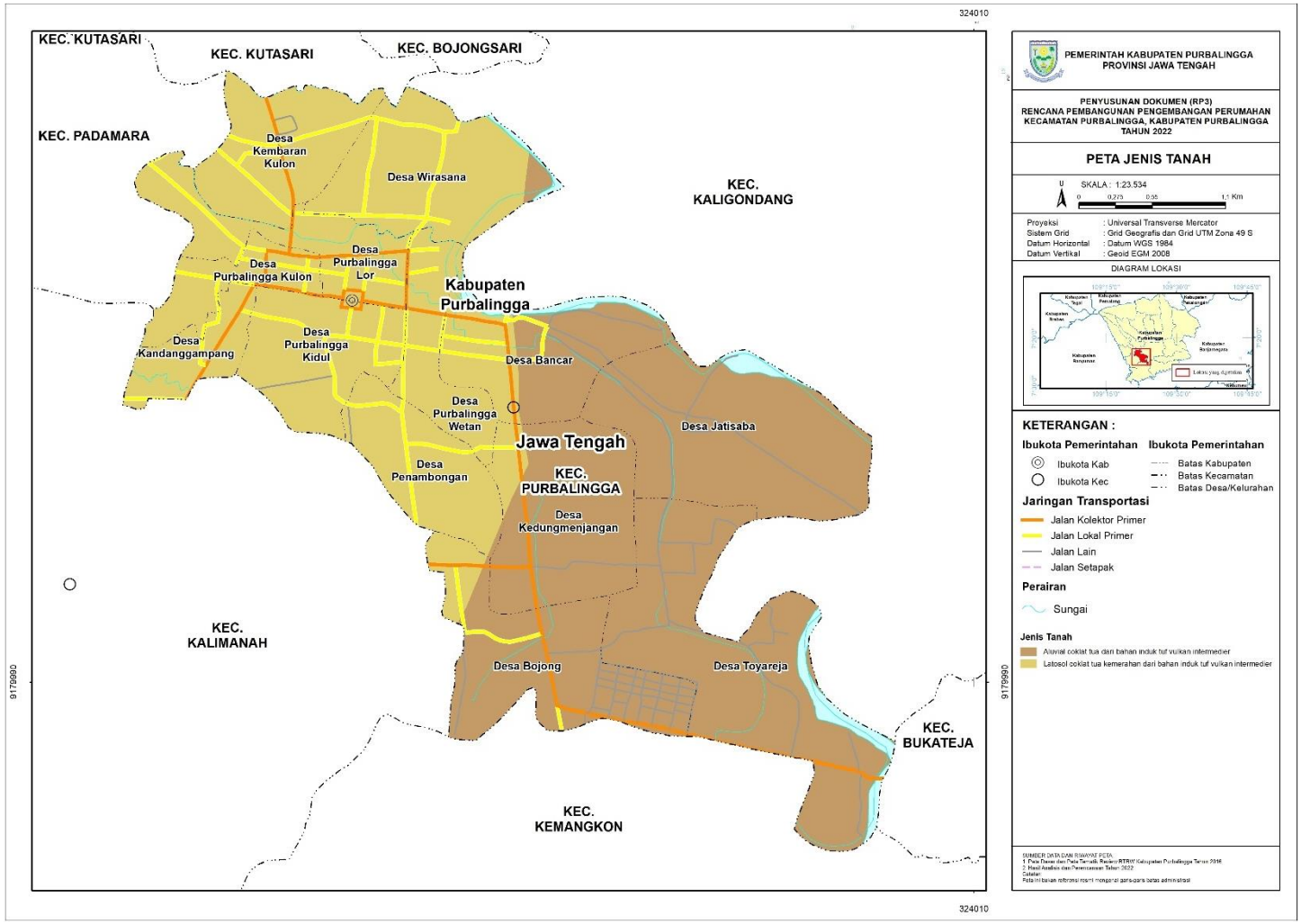
No	Desa/ Kelurahan	Jenis Tanah (Ha)	
		Aluvial Coklat Tua	Latosol Coklat Tua Kemerahan
1	Bojong	128,78	17,70
2	Toyareja	233,62	-
3	Kedung Menjangan	128,19	12,82
4	Jatisaba	199,02	-
5	Bancar	71,33	42,22
6	Purbalingga Wetan	-	61,17
7	Penambongan	0,86	82,43
8	Purbalingga Kidul	-	94,85
9	Kandang Gampang	-	44,21
10	Purbalingga Kulon	-	46,54
11	Purbalingga Lor	-	79,79
12	Kembaran Kulon	-	96,01
13	Wirasana	6,24	124,20
Jumlah		768,03	701,94

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020

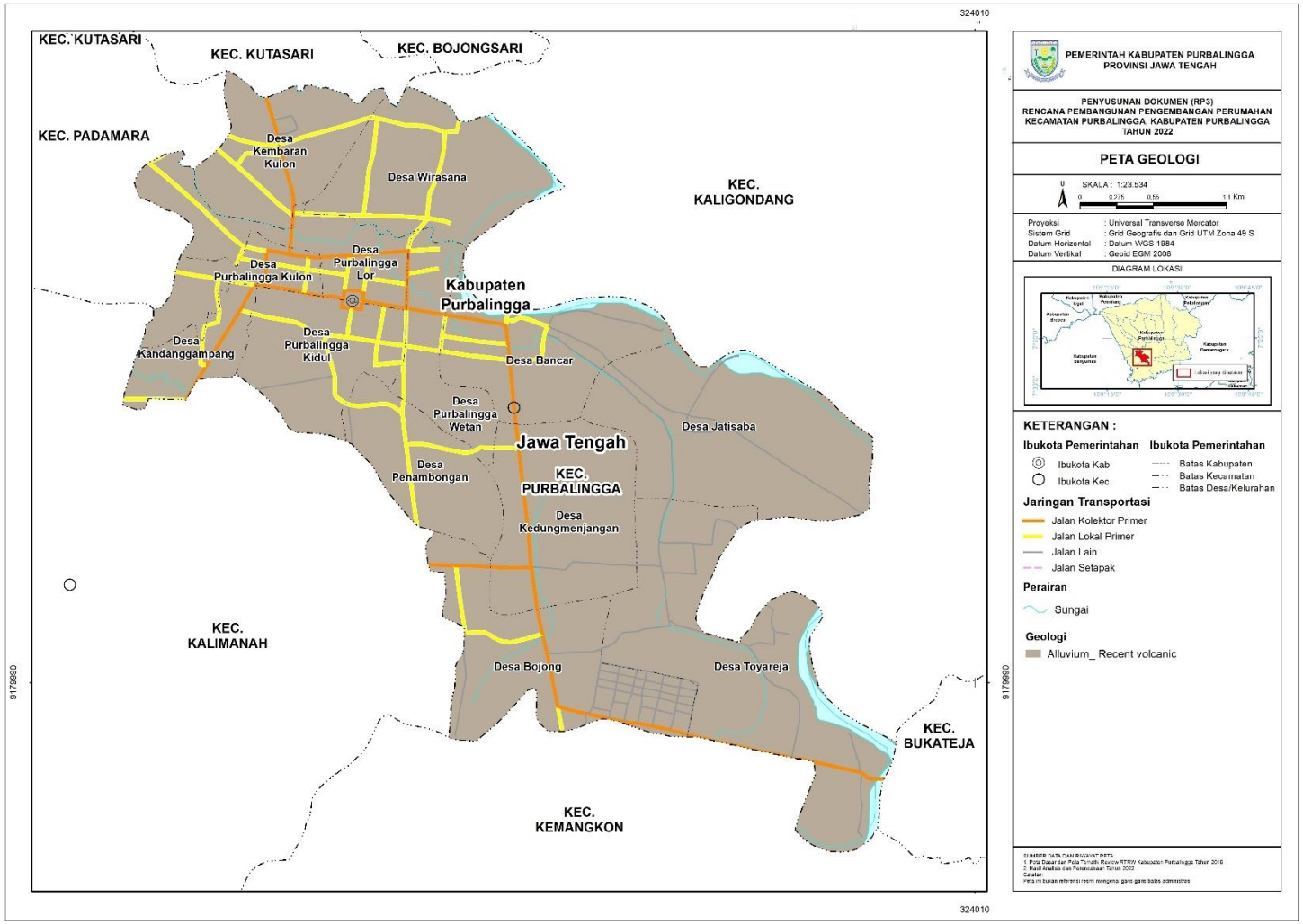
Komposisi litologi batuan yang terdapat di Kecamatan Purbalingga berupa alluvium endapan rawa dan danau, terutama tersusun oleh lempung yang umumnya bersifat kedap air. Peta geologi wilayah Kecamatan Purbalingga dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3.2.
Peta Topografi Kecamatan Purbalingga



Gambar 3.3.
Peta Jenis Tanah Kecamatan Purbalingga



Gambar 3.4.
Peta Geologi Kecamatan Purbalingga

Hidrogeologi yang ada di wilayah Kecamatan Pubalingga berupa akuifer produktivitas tinggi dengan penyebaran luas. Peta hidrogeologi wilayah Kecamatan Purbalingga dapat dilihat pada Gambar 3.5.

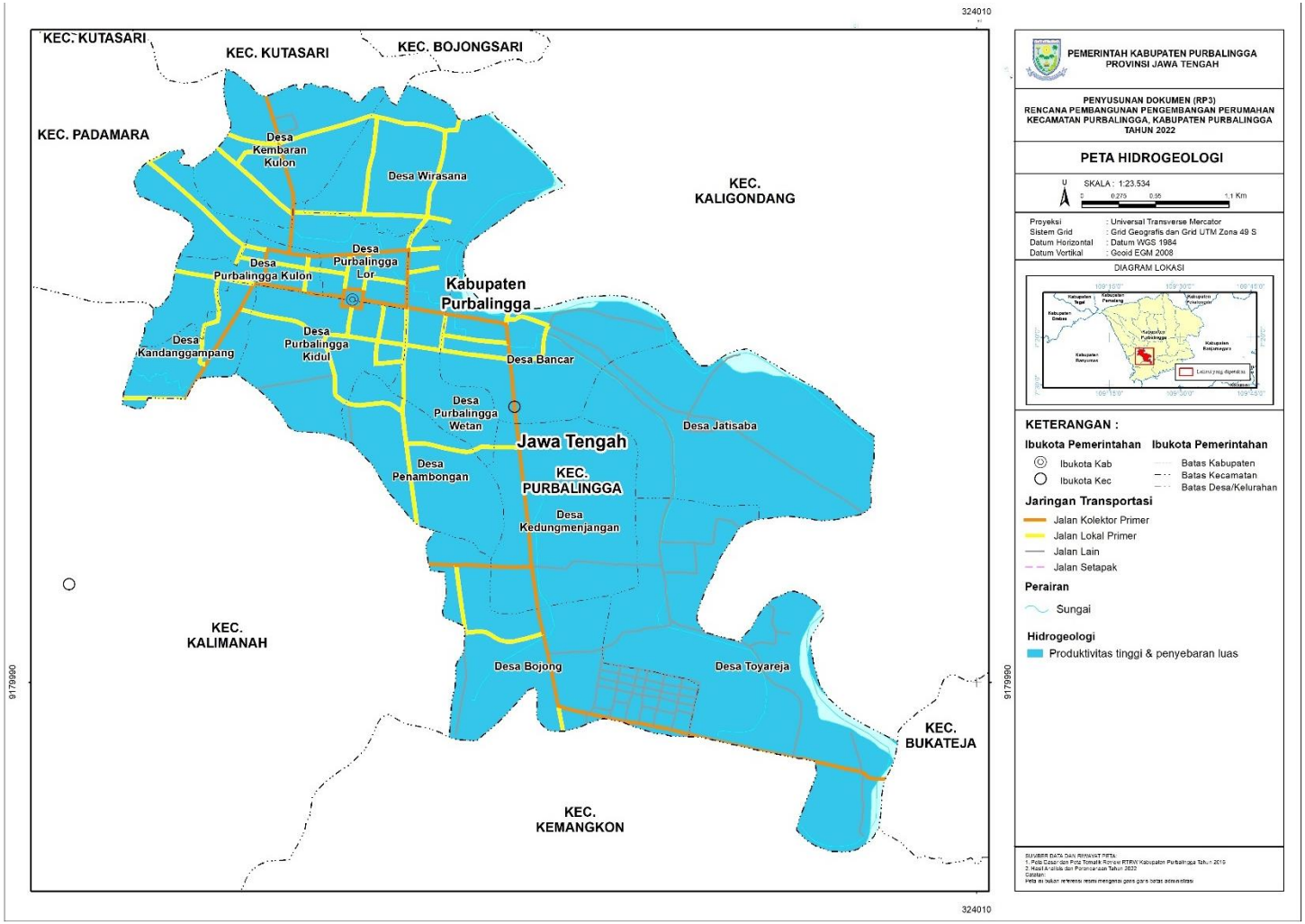
Kecamatan Purbalingga termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu dengan Sub DAS Klawing, Sub DAS Pekacangan, dan Sub DAS Serayu Hilir. Mayoritas wilayah di Kecamatan Purbalingga termasuk dalam Sub DAS Klawing dengan luas 1.274,05 Ha. Sedangkan wilayah Kecamatan Purbalingga yang masuk dalam Sub DAS Pekacangan hanya seluas 3,95 Ha. DAS di Kecamatan Purbalingga dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.6.

Tabel III.3.
DAS di Kecamatan Purbalingga

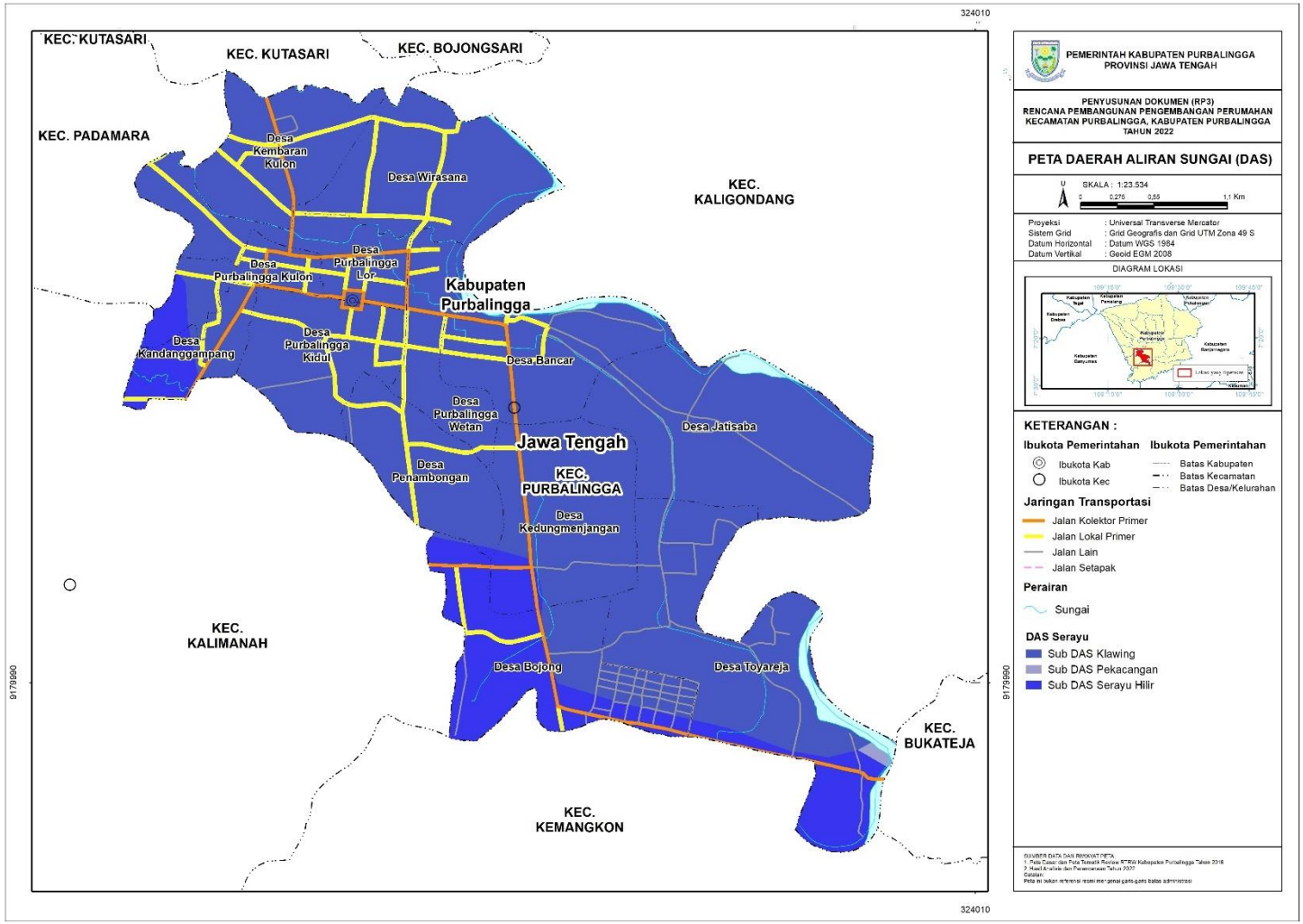
No	Desa/ Kelurahan	DAS Serayu (Ha)		
		Sub DAS Klawing	Sub DAS Pekacangan	Sub DAS Serayu Hilir
1	Bojong	49,09	-	97,38
2	Toyareja	183,23	3,95	46,44
3	Kedung Menjangan	125,39	-	15,63
4	Jatisaba	199,02	-	-
5	Bancar	113,55	-	-
6	Purbalingga Wetan	61,17	-	-
7	Penambongan	82,51	-	0,78
8	Purbalingga Kidul	94,85	-	-
9	Kandang Gampang	22,72	-	21,49
10	Purbalingga Kulon	36,28	-	10,27
11	Purbalingga Lor	79,79	-	-
12	Kembaran Kulon	96,01	-	-
13	Wirasana	130,44	-	-
Jumlah		1.274,05	3,95	191,98

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020

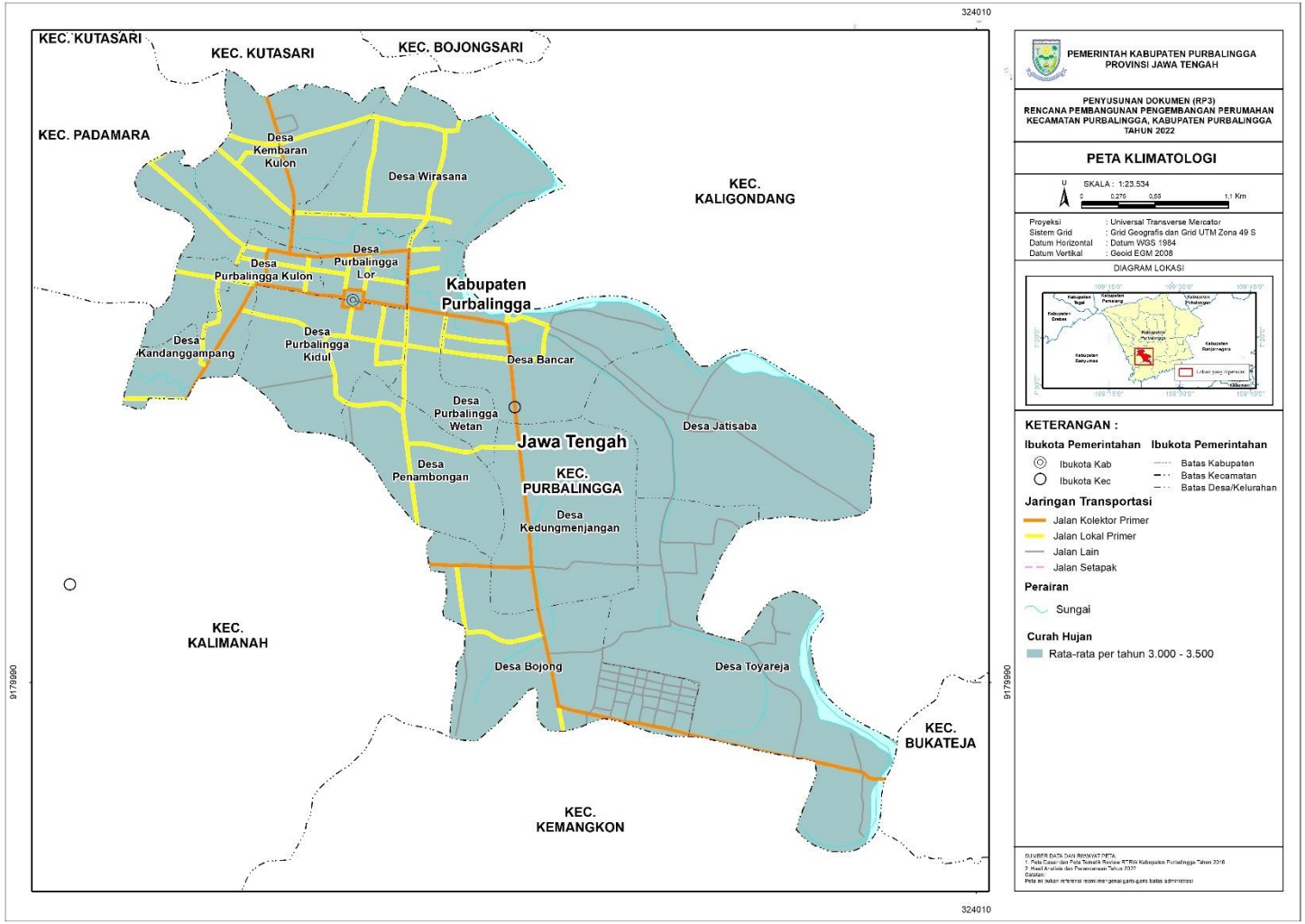
Klimatologi dapat dilihat berdasarkan rata-rata curah hujan per tahun. Curah hujan sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan letak tempat itu sendiri. Tidak terkecuali untuk wilayah Kecamatan Purbalingga yang memiliki iklim tropis yang relatif basah dengan curah hujan rata-rata per tahun sebesar 3.000 – 3.500 mm. Peta Klimatologi Kecamatan Purbalingga dapat dilihat pada Gambar 3.7.



Gambar 3.5.
Peta Hidrogeologi Kecamatan Purbalingga



Gambar 3.6.
Peta DAS di Kecamatan Purbalingga



Gambar 3.7.
Peta Klimatologi Kecamatan Purbalingga

Potensi rawan bencana yang ada di Kecamatan Purbalingga meliputi rawan bencana banjir dan rawan bencana angin ribut. Rawan bencana angin ribut di Kecamatan Purbalingga yaitu Kelurahan Bojong dan Kelurahan Kandang Gampang. Sedangkan, wilayah yang merupakan rawan bencana banjir di Kecamatan Purbalingga yaitu Kelurahan Bojong, Desa Toyareja, Kelurahan Bancar, Kelurahan Purbalingga Wetan, dan Kelurahan Kandang Gampang. Sebaran rawan bencana di Kecamatan Purbalingga dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.9.

Tabel III.4.
Rawan Bencana di Kecamatan Purbalingga

No	Desa/ Kelurahan	Rawan Bencana (Ha)	
		Angin Ribut	Rawan Banjir
1	Bojong	5,58	38,38
2	Toyareja	-	32,50
3	Bancar	-	5,31
4	Purbalingga Wetan	-	0,38
5	Kandang Gampang	15,82	-
Jumlah		21,40	76,57

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020

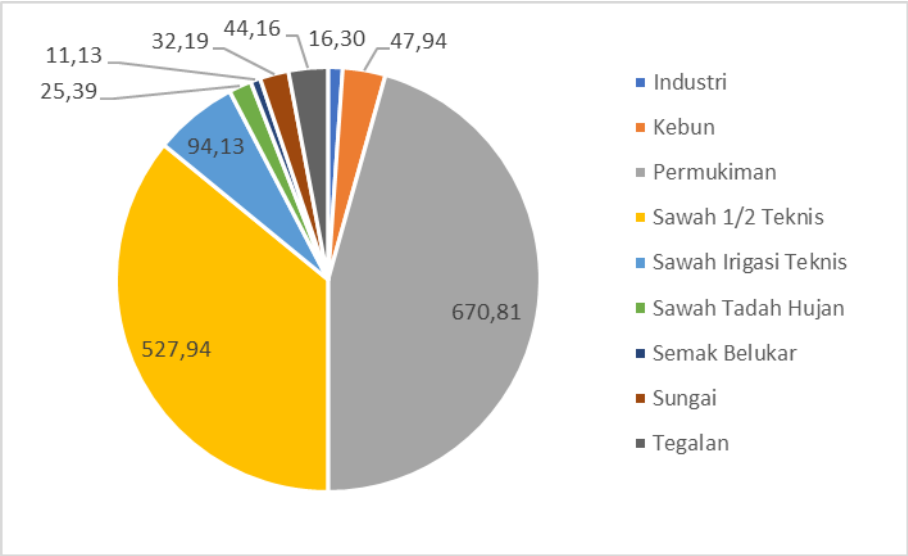
Penggunaan lahan di Kecamatan Purbalingga tahun 2020 berupa lahan industri, kebun, permukiman, lahan sawah setengah teknis, sawah irigasi teknis, sawah tadah hujan, semak belukar, sungai, dan tegalan. Penggunaan lahan di Kecamatan Purbalingga terbesar adalah digunakan sebagai permukiman seluas 670,81 Ha. Penggunaan lahan terbesar kedua di Kecamatan Purbalingga berupa sawah setengah teknis seluas 527,94 Ha. Luas penggunaan lahan di Kecamatan Purbalingga tahun 2020 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel, grafik, dan Gambar 3.10.

Tabel III.5.
Luas Penggunaan Lahan di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020 (hektar)

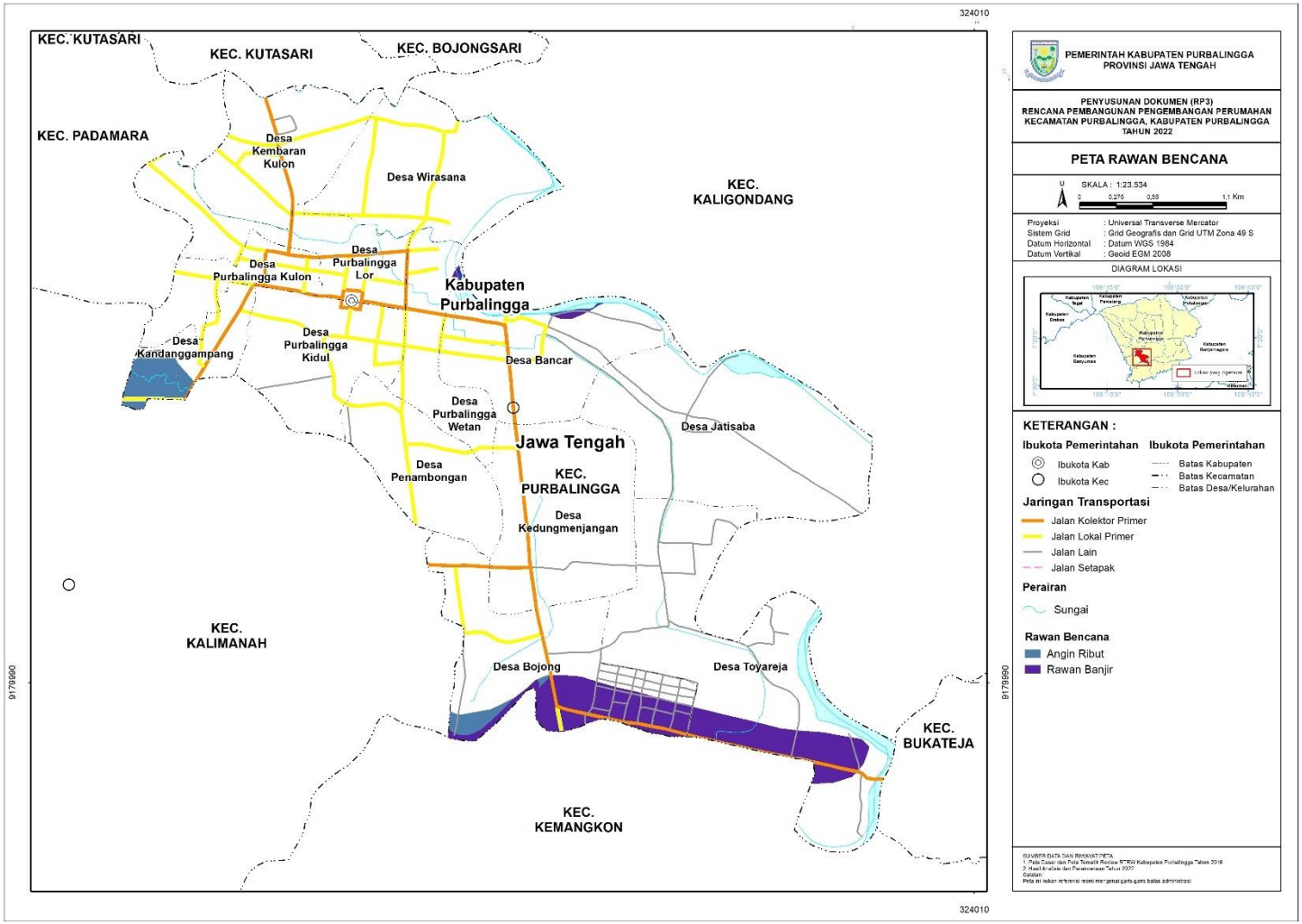
No	Desa/ Kelurahan	Penggunaan Lahan (Ha)								
		Industri	Kebun	Permukiman	Sawah 1/2 Teknis	Sawah Irigasi Teknis	Sawah Tadah Hujan	Semak Belukar	Sungai	Tegalan
1	Bojong	2,15	-	76,30	58,45	-	-	-	-	9,57
2	Toyareja	-	4,80	54,62	137,68	1,05	1,50	9,89	15,34	8,73
3	Kedung Menjangan	2,00	-	39,02	93,06	-	-	0,74	-	6,19
4	Jatisaba	-	11,19	34,99	145,07	-	-	-	5,95	1,82
5	Bancar	-	9,58	55,84	36,35	-	-	-	8,26	3,52
6	Purbalingga Wetan	0,46	3,67	47,68	5,85	-	-	0,16	-	3,36
7	Penambongan	-	-	32,30	48,08	-	-	0,33	-	2,57
8	Purbalingga Kidul	1,98	-	66,99	-	25,88	-	-	-	-
9	Kandang Gampang	6,45	-	28,22	-	9,53	-	-	-	-
10	Purbalingga Kulon	0,07	-	35,33	0,01	11,10	-	-	-	0,04
11	Purbalingga Lor	0,39	-	68,07	3,39	3,06	-	-	-	4,89

No	Desa/ Kelurahan	Penggunaan Lahan (Ha)								
		Industri	Kebun	Permukiman	Sawah 1/2 Teknis	Sawah Irigasi Teknis	Sawah Tadah Hujan	Semak Belukar	Sungai	Tegalan
12	Kembaran Kulon	2,79	-	59,85	-	29,90	-	-	-	3,47
13	Wirasana	-	18,70	71,61	-	13,60	23,89	-	2,63	0,01
Jumlah		16,30	47,94	670,81	527,94	94,13	25,39	11,13	32,19	44,16

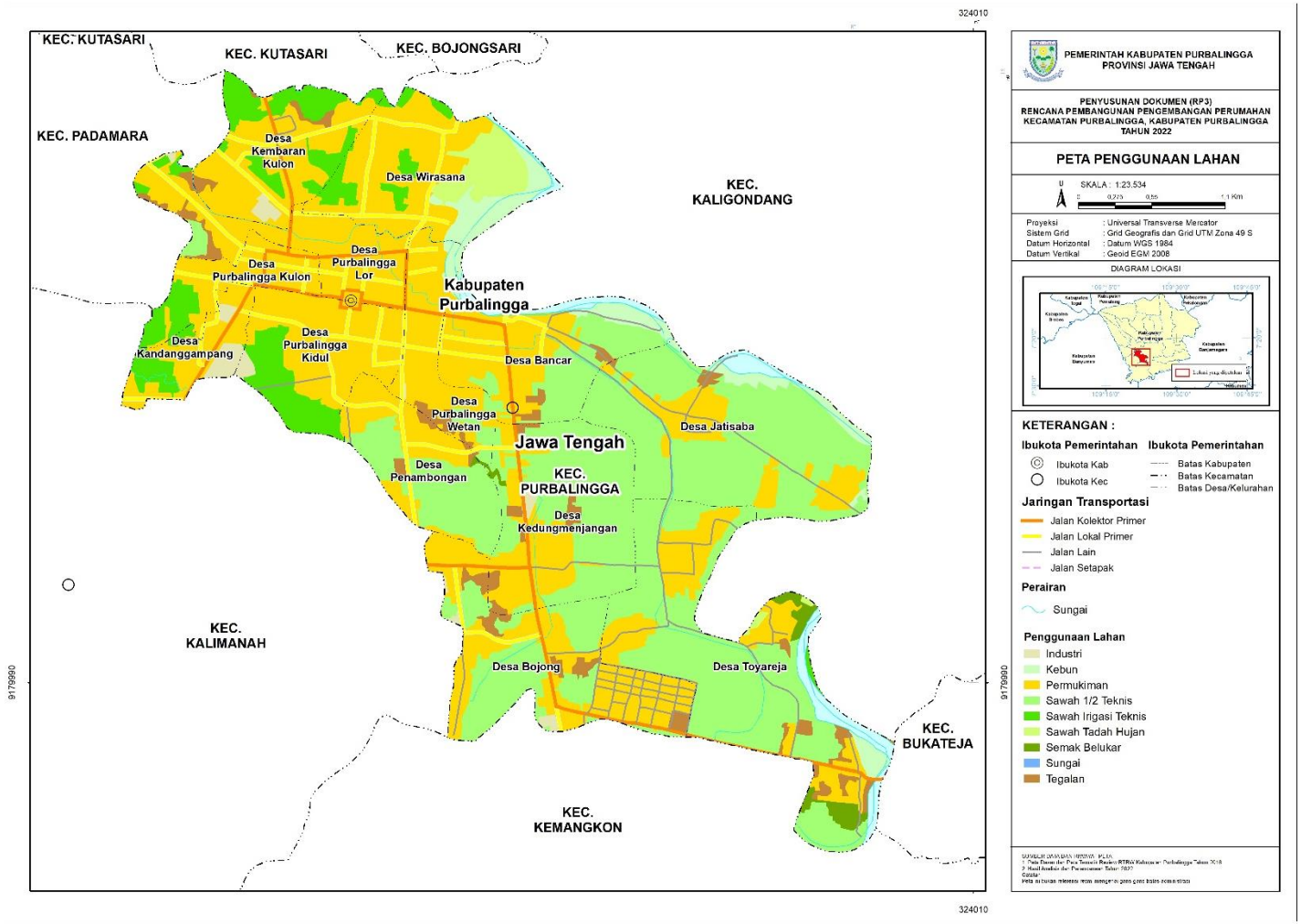
Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020



Gambar 3.8.
Luas Penggunaan Lahan Kecamatan Purbalingga Tahun 2020



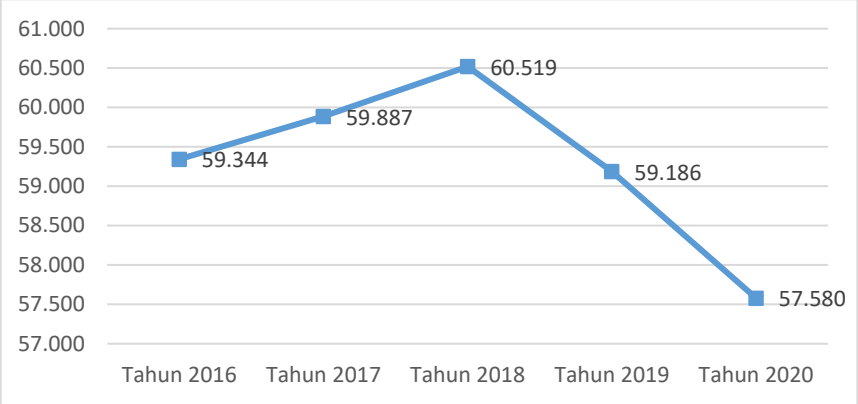
Gambar 3.9.
Peta Rawan Bencana Kecamatan Purbalingga



Gambar 3.10.
Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Purbalingga

3.1.2. Kondisi Kependudukan, Sosial, dan Budaya

Perkembangan jumlah penduduk di Kecamatan Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun terakhir tepatnya tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Jumlah penduduk Kecamatan Purbalingga tahun 2016 sebanyak 59.344 jiwa mengalami peningkatan hingga pada tahun 2018 menjadi sebanyak 60.519 jiwa. Kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi sebanyak 57.580 jiwa. Jumlah penduduk di Kecamatan Purbalingga tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Kecamatan Purbalingga Dalam Angka Tahun 2017-2021

Gambar 3.11.
Jumlah Penduduk Kecamatan Purbalingga Tahun 2016-2020

Jumlah penduduk terbanyak adalah Kelurahan Wirasana sebesar 7.775 jiwa. Penduduk terkecil berada di Kelurahan Purbalingga Kulon dengan jumlah sebanyak 2.575 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk di Kecamatan Purbalingga sebesar 98,39 yang berarti terdapat 98 penduduk laki-laki setiap 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin di Kecamatan Purbalingga yang lebih dari 100 yaitu di Kelurahan Bojong dan Desa Toyareja. Secara rinci jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Purbalingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.6.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
1	Bojong	4.915	105,03
2	Toyareja	2.851	100,7
3	Kedung Menjangan	3.144	97,6
4	Jatisaba	3.500	98,94
5	Bancar	3.790	96,88
6	Purbalingga Wetan	5.119	95,27
7	Penambongan	4.774	99,75
8	Purbalingga Kidul	5.539	97,85
9	Kandang Gampang	2.944	94,05
10	Purbalingga Kulon	2.575	97,77
11	Purbalingga Lor	5.994	97,38
12	Kembaran Kulon	4.660	96,79
13	Wirasana	7.775	99,71
Jumlah		57.580	98,39

Sumber: Kecamatan Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021

Kepadatan penduduk di Kecamatan Purbalingga tahun 2020 terbesar terdapat pada Kelurahan Purbalingga Wetan yaitu sebesar 84 jiwa/Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 5.119 jiwa dan luas wilayah hanya 61,17 Ha. Sedangkan, kepadatan penduduk terkecil terdapat pada Desa Toyareja dengan kepadatan penduduk sebesar 12 jiwa/Ha. Secara rinci kepadatan penduduk di Kecamatan Purbalingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.7.
Kepadatan Penduduk di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas (Ha)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Ha)
1	Bojong	4.915	146,47	34
2	Toyareja	2.851	233,62	12
3	Kedung Menjangan	3.144	141,02	22
4	Jatisaba	3.500	199,02	18
5	Bancar	3.790	113,55	33
6	Purbalingga Wetan	5.119	61,17	84
7	Penambongan	4.774	83,28	57
8	Purbalingga Kidul	5.539	94,85	58
9	Kandang Gampang	2.944	44,21	67
10	Purbalingga Kulon	2.575	46,54	55
11	Purbalingga Lor	5.994	79,79	75
12	Kembaran Kulon	4.660	96,01	49
13	Wirasana	7.775	130,44	60
Jumlah		570.580	1.469,98	39

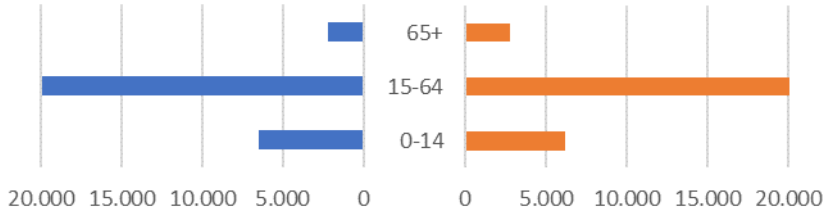
Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Penduduk menurut kelompok umur di Kecamatan Purbalingga terbagi menjadi rentang usia belum produktif (<14 Tahun), usia produktif (15-64 Tahun), dan usia tidak produktif (>64 tahun). Kecamatan Purbalingga memiliki struktur umur yang dominan pada umur 15-64 tahun dimana umur ini merupakan usia produktif. Tingkat ketergantungan Kecamatan Purbalingga tahun 2020 adalah sebesar 44% dengan komposisi usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 39.978 jiwa dan usia tidak produktif (<14 tahun dan >64 tahun) sebanyak 17.602 jiwa. Hal ini berarti sebanyak 100 penduduk usia produktif menanggung 44 penduduk usia tidak produktif.

Tabel III.8.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kecamatan Purbalingga Tahun 2020

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-14	6.458	6.148	12.606
15-64	19.922	20.056	39.978
65+	2.207	2.789	4.996
Jumlah	28.587	28.993	57.580

Sumber: Kecamatan Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021



Sumber: Kecamatan Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 3.12.
Piramida Penduduk Kecamatan Purbalingga Tahun 2020

Berdasarkan piramida penduduk di atas, untuk kelompok umur 15-64 tahun mempunyai panjang batang lebih panjang dibanding kelompok umur lainnya. Kondisi ini menjelaskan struktur penduduk usia produktif cenderung lebih besar. Struktur penduduk di usia tidak produktif lebih kecil dibanding kelompok usia produktif.

Penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat dari jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan utama. Jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan utama di Kecamatan Purbalingga meliputi pekerjaan dalam bidang pertanian, pekerjaan dalam bidang industri, pekerjaan dalam bidang perdagangan, dan lainnya. Lapangan perkerjaan utama di Kecamatan Purbalingga tahun 2020 paling banyak adalah karyawan sebanyak 12.060 jiwa. Sedangkan, lapangan pekerjaan dalam bidang kontruksi hanya sebanyak 29 jiwa.

Tabel III.9.
Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pensiunan	673	420	1.093
PNS/ ABRI/ TNI	1.353	636	1.989
Perdagangan	1.196	1.491	2.687
Pertanian	418	184	602
Industri	65	110	175
Kontruksi	28	1	29
Buruh	2.973	1.223	4.196
Karyawan	6.331	5.729	12.060
Wiraswasta	3.481	1.275	4.756
Lainnya	1.034	853	1.887
Jumlah	17.552	11.922	29.474

Sumber: Kecamatan Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kecamatan Purbalingga tahun 2020 paling banyak adalah pada tingkatan SLTA/ Sederajat sebanyak 15.334 jiwa. Sedangkan, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kecamatan Purbalingga tahun 2020 paling sedikit yaitu pada tingkat pendidikan Strata III sebanyak 10 jiwa.

Tabel III.10.
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/ Belum Sekolah	5.072	4.861	9.933

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Belum Tamat SD/ Sederajat	2.430	2.261	4.691
SD/ Sederajat	5.809	6.743	12.552
SLTP/ Sederajat	4.824	5.089	9.913
SLTA/ Sederajat	8.025	7.309	15.334
Diploma I/ II	128	169	297
Akademi/ Diploma III	607	829	1.436
Diploma IV/ Strata I	1.907	2.080	3.987
Strata II	142	76	218
Strata III	4	6	10

Sumber: Kecamatan Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021

Masyarakat Purbalingga adalah pendukung kebudayaan Jawa dan masyarakatnya terbiasa kontak dengan pendukung budaya lain. Oleh karena itu, masyarakatnya relatif terbuka. Artinya, menerima siapa saja yang datang, berusaha, dan bermukim di daerahnya.

Hubungan antar masyarakat Purbalingga masih memiliki karakteristik guyub ditunjukkan apabila warga mengadakan acara, misalnya pernikahan, khitanan, membangun rumah atau ada yang meninggal dunia, maka masyarakat akan berkunjung dan membantu ke tempat warga tersebut. Disamping itu pula terdapat interaksi sosial yang berbentuk kerjasama yaitu kegiatan gotong-royong, bentuk kerjasama ini dapat diwujudkan berupa tenaga, bahan material ataupun uang. Sedangkan gotong-royong dalam bentuk kerja bakti seperti membersihkan lingkungan dan memperbaiki jalan.

Permukiman di Kecamatan Purbalingga terdiri dari permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan. Karakteristik permukiman perkotaan lebih modern tersedia sarana prasarana pendukung lebih lengkap. Masyarakat permukiman perkotaan berkegiatan bukan pertanian karena sebagian besar lahan terbangun dan bermata pencaharian dalam bidang industri pengolahan dan jasa. Karakteristik permukiman perdesaan berupa hunian dan lingkungan yang bersifat pedesaan. Masyarakat permukiman perdesaan berkegiatan dalam bidang pertanian, karena masih banyak lahan pertanian.

3.1.3. Kondisi Perekonomian

Sektor perekonomian unggulan di Kecamatan Purbalingga yang dapat mendukung pengembangan Kecamatan Purbalingga berasal dari sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan, sektor perikanan, sektor pariwisata, serta sektor industri. Sektor pertanian paling besar berupa produksi tanaman pangan sebanyak 6.230,18 ton padi sawah. Kecamatan Purbalingga juga memiliki komoditas unggulan sayur-sayuran yang berupa bayam dan kangkung dengan jumlah sebanyak 147 kuintal bayam dan 287 kuintal kangkung.

Sektor perkebunan yang terdapat di Kecamatan Purbalingga meliputi kelapa dan tebu. Sedangkan, sektor peternakan yang terdapat di Kecamatan Purbalingga meliputi sapi potong, kuda, kerbau, domba, kambing, ayam kampung, ayam pedaging, itik, itik manila dan angsa. Sektor perikanan juga menjadi sektor ekonomi unggalan di Kecamatan Purbalingga. Jenis perikanan di Kecamatan Purbalingga berupa perikanan budidaya dengan kolam. Jumlah rumah tangga tangga yang mengembangkan

perikanan budidaya kolam sebanyak 364 yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Purbalingga. Sektor pariwisata juga merupakan salah satu sektor ekonomi unggulan yang dapat mendukung pengembangan Kecamatan Purbalingga. Objek wisata yang terdapat di Kecamatan Purbalingga, yaitu Usman Janatin City Park.

Selain itu, di Kecamatan Purbalingga terdapat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri. Industri di Kecamatan Purbalingga terdapat hampir di seluruh wilayah kecuali Desa Toyareja, Desa Jatisaba, Kelurahan Bancar, Kelurahan Penambongan, dan Kelurahan Wirasana. Luas total penggunaan lahan untuk industri di Kecamatan Purbalingga seluas 16,3 Ha dengan luas industri paling besar berada di Kelurahan Kandang Gampang.

Sektor perekonomian unggulan di Kecamatan Purbalingga ditunjang dengan adanya sarana perekonomian. Sarana perekonomian yang terdapat di Kecamatan Purbalingga tahun 2020 berupa kelompok pertokoan, pasar, minimarket/ swalayan, toko/ warung kelontong/ restoran/ rumah makan, warung/ kedai makanan, dan hotel/ hostel/ motel/ losmen/ wisma. Sarana perekonomian berupa toko/ warung kelontong dan warung/ kedai makanan tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Purbalingga. Sedangkan, jumlah sarana perdagangan pasar adalah sebanyak 7 unit.

Tabel III.11.
Sarana Perekonomian di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Pertokoan	Pasar	Minimarket	Toko	Restoran	Warung	Hotel
1	Bojong	1	1	2	28	2	22	-
2	Toyareja	-	-	1	30	-	14	-
3	Kedung Menjangan	2	-	2	37	-	27	1
4	Jatisaba	-	-	-	37	-	19	-
5	Bancar	1	1	4	26	-	29	1
6	Purbalingga Wetan	1	-	4	48	5	29	1
7	Penambongan	-	-	1	27	-	21	-
8	Purbalingga Kidul	3	-	5	72	6	71	2
9	Kandang Gampang	5	2	-	31	1	28	2
10	Purbalingga Kulon	5	1	3	32	5	34	2
11	Purbalingga Lor	1	1	6	74	2	57	1
12	Kembaran Kulon	1	1	4	84	1	73	1
13	Wirasana	-	-	1	50	1	39	-
Jumlah		20	7	33	576	23	463	11

Sumber: Kecamatan Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021

3.1.4. Kondisi Perumahan

3.1.5.1. Sebaran Perumahan

Deliniasi sebaran perumahan didasarkan pada administrasi desa/ kelurahan, sedangkan satuan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang dibatasi oleh batas fisik alam seperti jalan atau sungai.

Tabel III.12.
Sebaran Perumahan di Kecamatan Purbalingga

No	Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)
1	Bojong	46,87
2	Toyareja	17,16
3	Kedung Menjangan	25,93
4	Jatisaba	50,59
5	Bancar	47,91
6	Purbalingga Wetan	43,13
7	Penambongan	28,87
8	Purbalingga Kidul	41,01
9	Kandang Gampang	21,63
10	Purbalingga Kulon	10,43
11	Purbalingga Lor	83,72
12	Kembaran Kulon	52,69
13	Wirasana	36,81
Jumlah		506,75

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021

Perumahan di Kecamatan Purbalingga terdiri dari rumah dan rumah susun. Jumlah rumah di Kecamatan Purbalingga sebanyak 10.209 unit rumah. Sedangkan, jumlah rumah susun (rusun) di Kecamatan Purbalingga sebanyak 58 unit rumah. Tipe fungsi rumah di Kecamatan Purbalingga berfungsi sebagai hunian, sebagian non hunian, dan non hunian. Rumah non hunian berada pada sepanjang jalan kolektor pirmer dan lokal primer serta sekitar Alun-Alun Purbalingga, sedangkan rumah dengan fungsi setengah hunian berada pada pusat-pusat kegiatan kecamatan atau desa dengan bagian depan rumah difungsikan sebagai warung/ toko. Sedangkan, rumah yang berada di sekitar industri sebagian besar difungsikan sebagai kos. Jenis rumah yang terdapat di Kecamatan Purbalingga berupa rumah komersial, rumah umum bagi MBR, rumah swadaya, dan rumah negara. Perumahan di Kecamatan Purbalingga terdapat beberapa jenis rumah mewah yang berada di sekitar Alun-Alun Purbalingga. Bentuk rumah di Kecamatan Purbalingga pada wilayah sekitar perkotaan berupa rumah deret, sedangkan rumah yang berada pada wilayah perdesaan berbentuk rumah tunggal dengan halaman besar.

Tabel III.13.
Jumlah Rumah di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Rumah	Jumlah Rusun
1	Bojong	892	-
2	Toyareja	479	-
3	Kedung Menjangan	561	-
4	Jatisaba	626	-
5	Bancar	725	-
6	Purbalingga Wetan	883	-
7	Penambongan	809	-
8	Purbalingga Kidul	1.074	-
9	Kandang Gampang	535	-
10	Purbalingga Kulon	480	-
11	Purbalingga Lor	1.089	-

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Rumah	Jumlah Rusun
12	Kembaran Kulon	808	58
13	Wirasana	1.248	-
Jumlah		**10.209**	**58**

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga, 2020



(a)



(b)



(c)



(d)



(d)



(e)

(a) Rumah tunggal
(b) Rumah deret
(c) Rumah susun
(d) Rumah negara
(e) Sebagian non hunian
(f) Non hunian

Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.13.
Perumahan di Kecamatan Purbalingga

3.1.5.2. Sebaran Perumahan Developer

Kebutuhan rumah di Kecamatan Purbalingga akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kebutuhan rumah ini dapat dipenuhi secara swadaya maupun oleh developer/pengembang. Perumahan di Kecamatan Purbalingga tersebar di beberapa wilayah. Seiring dengan peningkatan kebutuhan rumah maka jumlah pengembang perumahan yang ada di Kecamatan Purbalingga juga meningkat. Jumlah perumahan developer yang ada di Kecamatan Purbalingga sebanyak 21 perumahan. Namun, hanya 13 perumahan di Kabupaten Purbalingga yang sudah diserahterimakan aset PSUnya. Berdasarkan perumahan developer yang tergabung di dalam persatuan perusahaan Real Estate Indonesia (REI) sebanyak 5 perumahan developer yang dibangun setelah tahun 2016. Sedangkan, berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga, terdapat 8 perumahan developer. Perumahan developer yang ada di Kecamatan Purbalingga rata-rata memiliki tipe MBR, namun terdapat tipe antara 45-70. Berikut ini merupakan perumahan pengembang di Kecamatan Purbalingga berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.

Tabel III.14.
Perumahan Pengembang di Kecamatan Purbalingga

Desa/ Kelurahan	Nama Perumahan Pengembang	Jumlah Rumah	Luas Total Tanah
Bojong	Almira Residence Bojong	132	17.125
Toyareja	Toyareja Permai	54	6.505
Jatisaba	Grand Harmoni Jatisaba	27	4.725
Purbalingga Wetan	Madina Premiere	28	4.507
Purbalingga Lor	Berlian	43	2.409
Wirasana	Taman Mutiara 2	46	10.916
	Grand Taman Mutiara Wirasana	96	14.400
	Permata Wirasana	30	4.475

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga



(a)



(b)



(c)



(d)

(g) Perumahan Almira Residence
(h) Perumahan Grand Menjangan
(i) Perumahan Developer Tipe MBR
(j) Perumahan Developer Baru

Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.14.
Perumahan Pengembang di Kecamatan Purbalingga

3.1.5.3. Kawasan PKP Pada Kawasan Strategis

Kawasan strategis di Kabupaten Purbalingga yaitu kawasan strategis pertumbuhan ekonomi. Namun, sebaran perumahan yang terdapat di Kecamatan Purbalingga tidak termasuk ke dalam kawasan strategis pertumbuhan ekonomi.

3.1.5.4. Kawasan PKP Tidak Sesuai Tata Ruang (Negative List)

Rencana pengembangan kawasan permukiman seharusnya tidak berada di wilayah *negative list* dan harus sesuai dengan peruntukan tata ruang dalam RTRW Kabupaten Purbalingga. Permukiman eksisting di Kecamatan Purbalingga berada pada rencana pola ruang yang telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Purbalingga dan tidak berada pada wilayah *negative list*.

3.1.5.5. Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana

Kecamatan Purbalingga terdapat beberapa perumahan yang berada di daerah rawan bencana. Perumahan yang berada di kawasan rawan bencana alam meliputi perumahan di kawasan rawan bencana gempa bumi, gerakan tanah, angin topan, dan banjir. Menurut data BPBD Kabupaten Purbalingga, terdapat penduduk di Kecamatan Purbalingga yang terancam bencana. Hal tersebut karena permukiman berada di kawasan rawan bencana banjir dan rawan bencana angin puting beliung. Penduduk di Kecamatan Purbalingga yang terancam bencana banjir sebanyak 1.307 KK, sedangkan penduduk yang terancam bencana angin puting beliung sebanyak 13.423 KK.

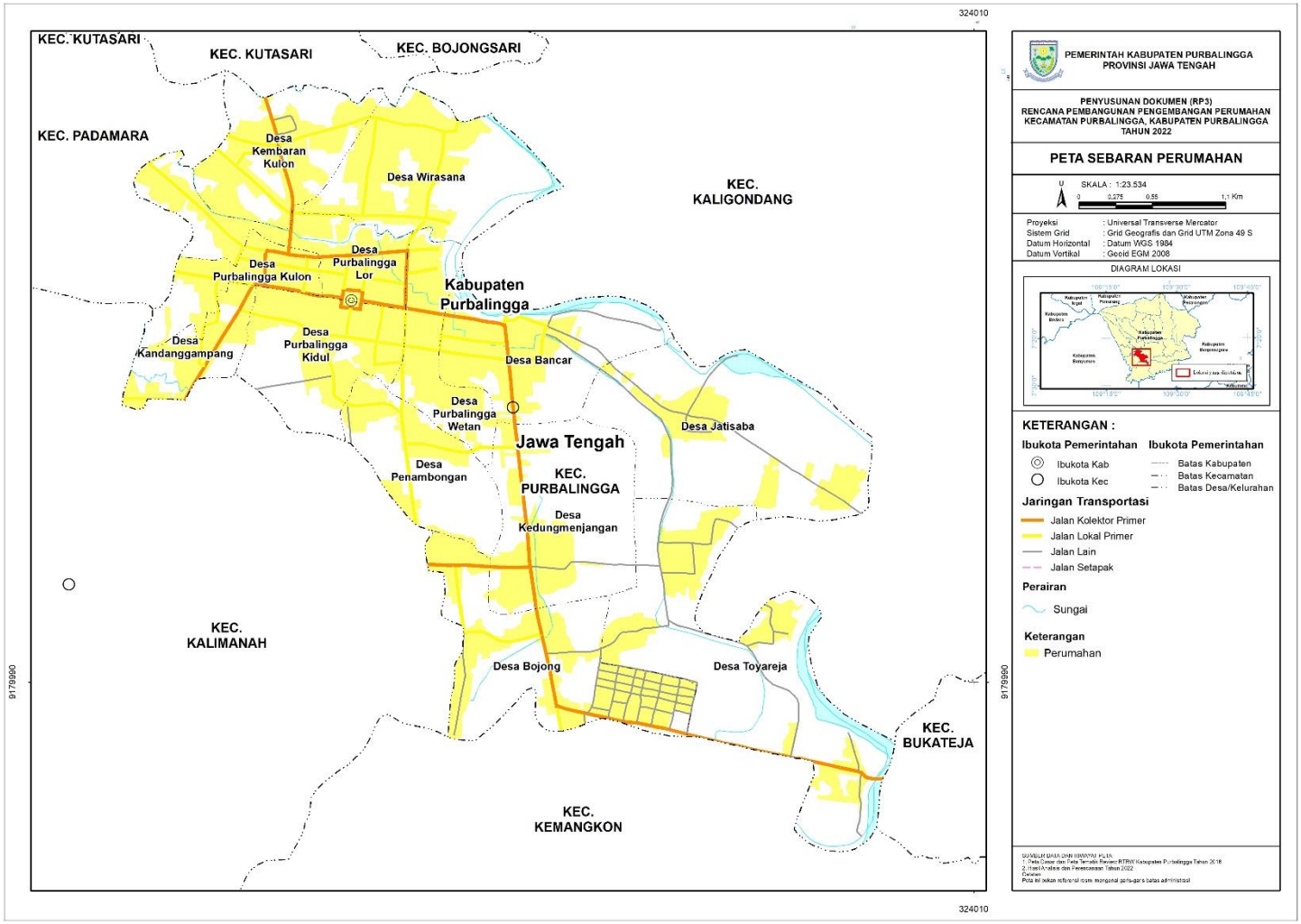
Tabel III.15.
Luas Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana

No	Desa/ Kelurahan	KRB Gempa Bumi Menengah, Gerakan Tanah Sangat Rendah dan Angin Topan	KRB Gempa Bumi Rendah, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	KRB Gempa Bumi Rendah, Gerakan Tanah Sangat Rendah dan Angin Topan	KRB Gempa Bumi Rendah, Gerakan Tanah Sangat Rendah, Angin Topan dan Banjir
1	Bojong	4,44	-	77,45	-
2	Toyareja	-	-	-	52,10
3	Kedung Menjangan	-	-	-	50,78
4	Jatisaba	-	-	85,09	-
5	Bancar	-	-	76,63	-
6	Purbalingga Wetan	-	-	60,65	-
7	Penambongan	-	-	105,30	-
8	Purbalingga Kidul	-	-	60,95	-
9	Kandang Gampang	-	-	-	48,20
10	Purbalingga Kulon	-	-	-	21,79
11	Purbalingga Lor	-	-	110,87	-
12	Kembaran Kulon	-	7,70	74,67	-
13	Wirasana	-	2,01	125,08	-
Jumlah		4,44	9,72	776,69	172,87

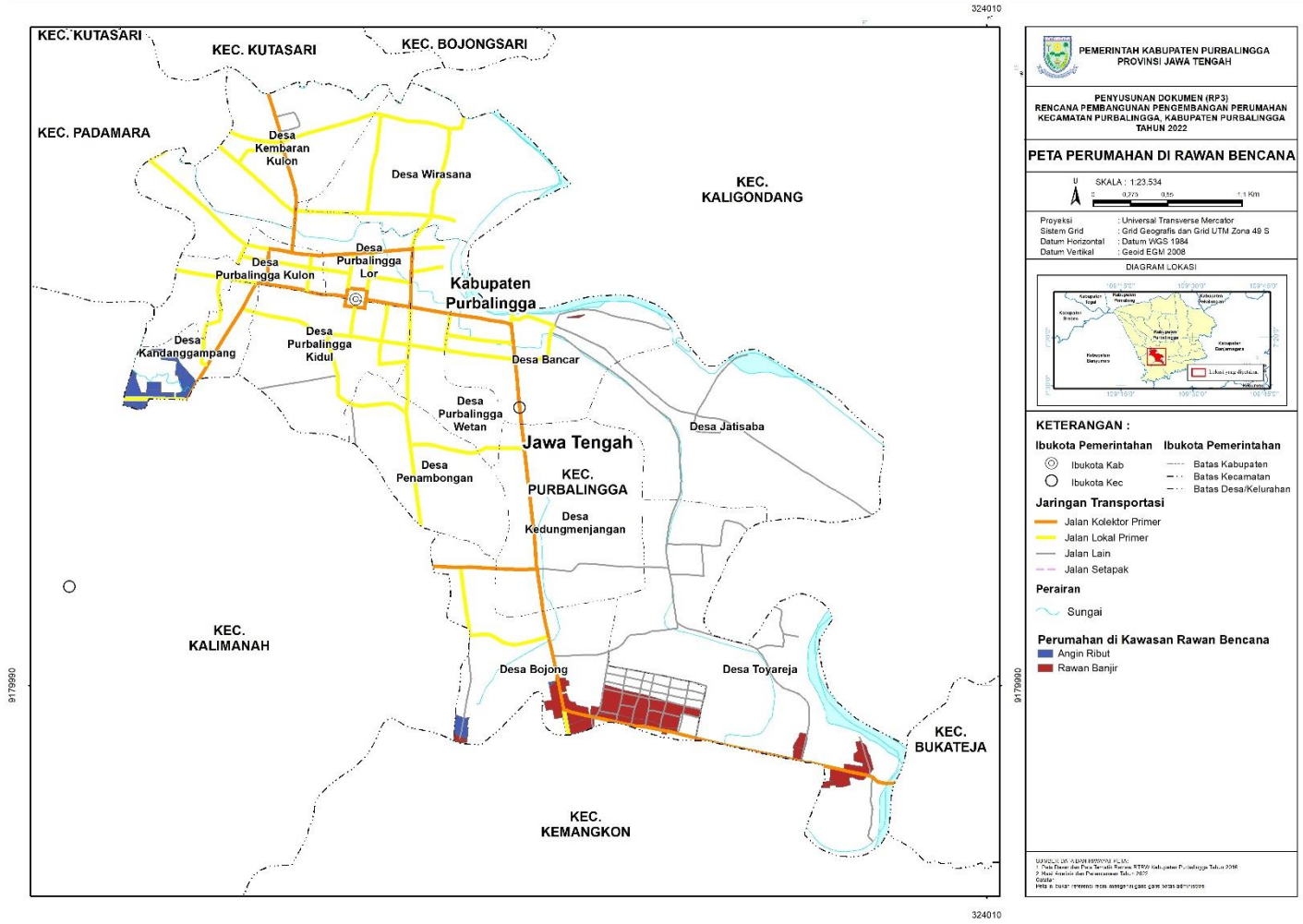
Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021

3.1.5.6. Kawasan PKP Terdampak Program Pembangunan Pemerintah

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan seharusnya tidak berada di wilayah yang terdampak program pembangunan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Perumahan eksisting di seluruh wilayah di Kecamatan Purbalingga tidak berada pada wilayah yang terdampak program pembangunan pemerintah Kabupaten Purbalingga.



Gambar 3.15.
Peta Sebaran Perumahan di Kecamatan Purbalingga



Gambar 3.16.
Peta Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana

3.1.5.7. Jumlah dan Sebaran Kebutuhan Rumah (Backlog)

Kekurangan rumah/ backlog di Kecamatan Purbalingga pada tahun 2020 mencapai 9.963 rumah. Jumlah ini bertambah seiring dengan pertambahan penduduk di Kecamatan Purbalingga. Berikut adalah sebaran backlog di Kecamatan Purbalingga.

Tabel III.16.
Kekurangan Rumah/ Backlog di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah KK	Jumlah Rumah	Backlog Tahun 2020	Total Luas Kebutuhan Permukiman (Ha)
1	Bojong	1.763	892	871	10,36
2	Toyareja	947	479	468	5,57
3	Kedung Menjangan	1.109	561	548	6,52
4	Jatisaba	1.236	626	610	7,26
5	Bancar	1.432	725	707	8,42
6	Purbalingga Wetan	1.744	883	861	10,25
7	Penambongan	1.598	809	789	9,39
8	Purbalingga Kidul	2.123	1.074	1.049	12,48
9	Kandang Gampang	1.058	535	523	6,22
10	Purbalingga Kulon	949	480	469	5,58
11	Purbalingga Lor	2.152	1.089	1.063	12,65
12	Kembaran Kulon	1.596	808	788	9,38
13	Wirasana	2.465	1.248	1.217	14,49
Jumlah		20.172	10.209	9.963	118,56

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021

3.1.5.8. Jumlah dan Sebaran Rumah Tidak Layah Huni (RTLH)

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Purbalingga tahun 2020 adalah sebesar 1.603 unit. Sedangkan, RTLH yang berada di kawasan kumuh sebanyak 636 unit. Jumlah sebaran RTLH di Kecamatan Purbalingga diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel III.17.
Sebaran Jumlah RTLH di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah RTLH	RTLH di Kawasan Kumuh
1	Bojong	133	33
2	Toyareja	131	64
3	Kedung Menjangan	87	36
4	Jatisaba	170	90
5	Bancar	76	27
6	Purbalingga Wetan	86	8
7	Penambongan	138	77
8	Purbalingga Kidul	181	36
9	Kandang Gampang	104	31
10	Purbalingga Kulon	30	15
11	Purbalingga Lor	149	62
12	Kembaran Kulon	146	38
13	Wirasana	172	119
Jumlah		1.603	636

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purbalingga

3.1.5.9. Kepadatan Bangunan Rumah

Kepadatan bangunan di Kecamatan Purbalingga tahun 2020 yaitu sebesar 20,15 rumah/Ha dengan jumlah rumah sebanyak 10.209 rumah dan luas wilayah hanya 506,75 Ha. Kepadatan bangunan di Kecamatan Purbalingga terbesar terdapat pada Kelurahan Purbalingga Kulon yaitu sebesar 46,05 rumah/Ha. Sedangkan, kepadatan bangunan terkecil terdapat pada Kelurahan Wirasana dengan kepadatan bangunan sebesar 2,46 rumah/Ha. Secara rinci kepadatan bangunan di Kecamatan Purbalingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.18.
Kepadatan Bangunan di Kecamatan Purbalingga

No	Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)	Jumlah Rumah	Kepadatan Bangunan (Rumah/ Ha)
1	Bojong	46,87	892	19,04
2	Toyareja	17,16	479	27,92
3	Kedung Menjangan	25,93	561	21,64
4	Jatisaba	50,59	626	12,37
5	Bancar	47,91	725	15,13
6	Purbalingga Wetan	43,13	883	20,46
7	Penambongan	28,87	809	28,01
8	Purbalingga Kidul	41,01	1.074	26,20
9	Kandang Gampang	21,63	535	24,75
10	Purbalingga Kulon	10,43	480	46,05
11	Purbalingga Lor	83,72	1.089	20,67
12	Kembaran Kulon	52,69	808	21,94
13	Wirasana	36,81	1.248	2,46
Jumlah		506,75	10.209	20,15

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021

3.1.5.10. Sebaran Kawasan Kumuh

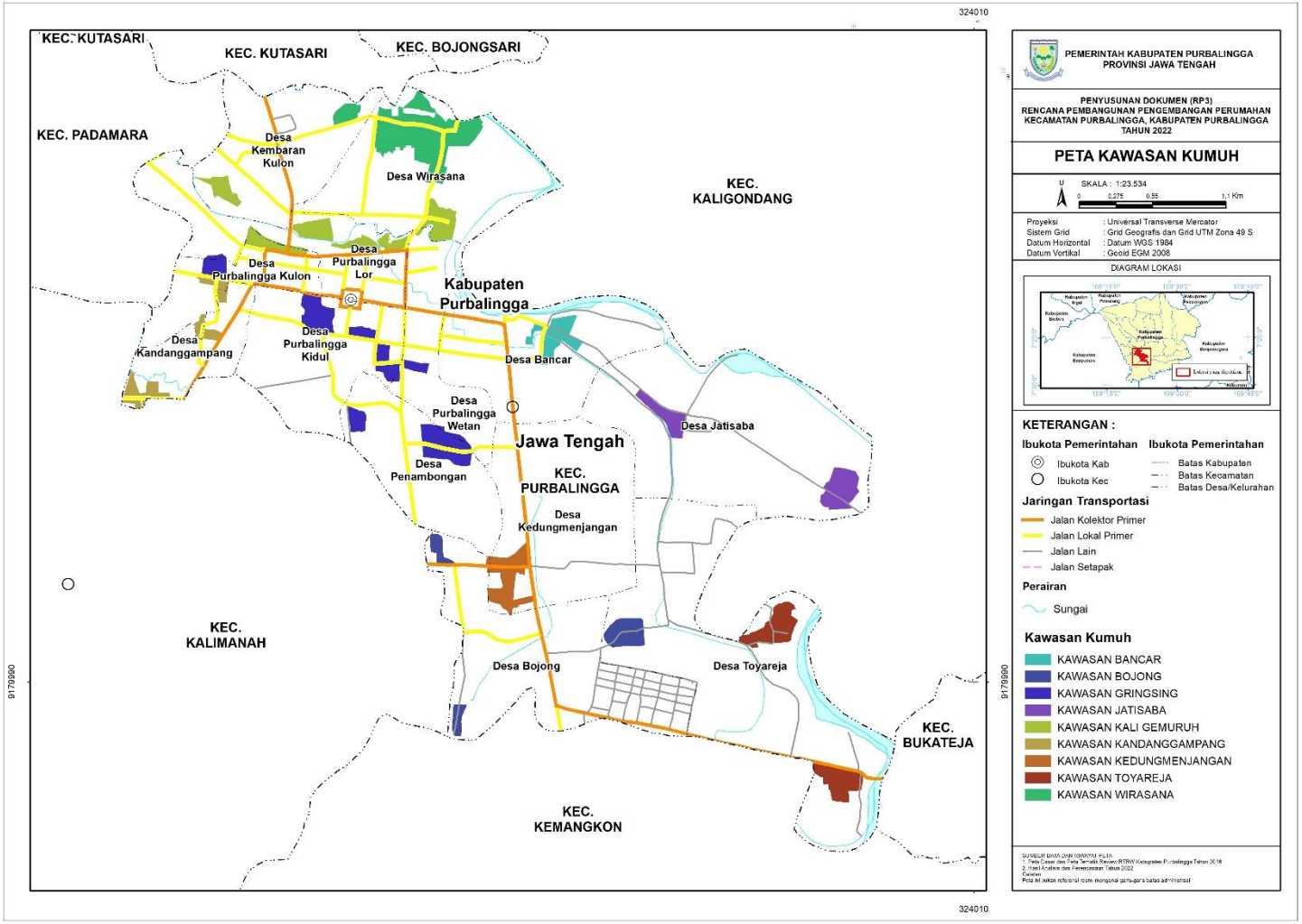
Karakteristik kawasan kumuh dibedakan menjadi 4 kategori kewenangan penangan, yaitu kawasan kumuh kewenangan pusat, kawasan kumuh kewenangan provinsi, dan kawasan kumuh kewenangan kabupaten. Kawasan kumuh di Kecamatan Purbalingga tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga No 640/212 Tahun 2021 berada di 9 kawasan dengan total luasan permukiman yaitu seluas 133,12 Ha. Kawasan yang merupakan permukiman kumuh berada di Kali Gemuruh, Gringsing, Wirasana, Toyareja, Jatisaba, Bojong, Kandanggampang, Bancar, Kedungmenjangan.

Tabel III.19.
Sebaran Kawasan Kumuh di Kecamatan Purbalingga

No	Kawasan Kumuh	Luas (Ha)
1	KAWASAN BANCAR	6,55
2	KAWASAN BOJONG	9,47
3	KAWASAN GRINGSING	26,27
4	KAWASAN JATISABA	11,28

No	Kawasan Kumuh	Luas (Ha)
5	KAWASAN KALI GEMURUH	20,30
6	KAWASAN KANDANGGAMPANG	8,29
7	KAWASAN KEDUNGMENJANGAN	9,51
8	KAWASAN TOYAREJA	13,76
9	KAWASAN WIRASANA	27,69
Jumlah		133,12

Sumber: Keputusan Bupati Purbalingga No 640/212 Tahun 2021



Gambar 3.17.
Peta Sebaran Kawasan Kumuh di Kecamatan Purbalingga

3.1.5. Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan

3.1.6.1. Kondisi Prasarana

Jaringan prasarana yang terdapat di Kecamatan Purbalingga meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan penyediaan air minum, jaringan pengelolaan persampahan, jaringan air limbah, serta sistem proteksi kebakaran. Jaringan jalan yang terdapat di seluruh desa di Kecamatan Purbalingga telah menggunakan jenis permukaan jalan berupa aspal/ beton dan dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Akan tetapi di Desa Toyareja dan Desa Jatisaba terdapat jalan berlubang dan terdapat genangan saat terjadi hujan.

Jaringan drainase di Kecamatan Purbalingga terdiri dari jaringan drainase primer berupa sungai, drainase sekunder berupa drainase di jalan utama, dan jaringan drainase tersier di lingkungan permukiman. Jaringan drainase di Kecamatan Purbalingga berupa drainase terbuka dan drainase tertutup. Jaringan drainase di Kecamatan Purbalingga di beberapa wilayah belum berfungsi optimal, karena sebagian tersumbat oleh sampah. Hal ini dapat dilihat dari munculnya genangan di beberapa wilayah terutama saat hujan. Selain itu beberapa sungai yang ada di Kecamatan Purbalingga mengalami pendangkalan.

Kebutuhan air bersih di Kecamatan Purbalingga dilayani oleh PDAM menggunakan ledeng atau meteran. Wilayah pelayanan air minum menggunakan ledeng atau meteran di Kecamatan Purbalingga meliputi seluruh desa/ kelurahan di Kecamatan Purbalingga.

Jaringan persampahan di Kecamatan Purbalingga sebagian sudah terlayani jaringan pengangkutan sampah dengan pembuangan akhir ke TPA Kalipancur di Kecamatan Pengadegan. Sebelum sampah diangkut ke TPA terdapat tempat pembuangan sementara (TPS) dan TPS 3R. TPS yang terdapat di Kecamatan Purbalingga sebanyak 11 unit yang berlokasi di MI Sambas, Purwodadi, Sayangan, Kauman, Dinnaker, Dinkes, Bappelitbangda, SMP Negeri 5 Purbalingga, dan Rumah Dinas Wakil Bupati. Persampahan yang ada di daerah perkotaan Kecamatan Purbalingga diangkut menggunakan *drum truck* setiap 2 kali dalam seminggu. Sedangkan, TPS 3R di Kecamatan Purbalingga sebanyak 2 unit yang berada di Desa Jatisaba dan Kelurahan Bancar. Persampahan di Desa Jatisaba dikelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang diangkut menggunakan gerobak. Selain itu, di Kecamatan Purbalingga juga terdapat bank sampah sebanyak 10 unit.

Tabel III.20.
Bank Sampah di Kecamatan Purbalingga

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Keterangan
1	Bank Sampah Sami Bangsa (BS Induk)	Dinas Lingkungan Hidup	Aktif
2	Bank Sampah Berkah Limbah	Kembaran Kulon	
3	Bank Sampah Gringsing Djoyo	Kelurahan Penambongan	
4	Bank Sampah Karya Nyata	Kelurahan Bancar	
5	Bank Sampah Mitra Sejahtera	Kelurahan Wirasana	
6	Bank Sampah Runtah Kencana	Kelurahan Purbalingga Wetan	
7	Bank Sampah Sami Maju	Kelurahan Purbalingaa Kidul	
8	Bank Sampah Sejahtera Mandiri	Kelurahan Purbalingga Lor	
9	Bank Sampah Yonif 406 Chandra Kusuma	Kelurahan Bojong	
10	Bank Sampah Ganesha Reka Asri	SMA Negeri 1 Purbalingga	Aktif

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase, tegalan, bahkan di sungai. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya serta perluasan jangkauan pelayanan pengangkutan sampah baik dari pemerintah maupun secara swadaya.

Sistem jaringan sanitasi di Kecamatan Purbalingga berupa air limbah domestik yang dibuang dari permukiman, pada umumnya tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu sehingga berdampak pada penurunan kualitas air pada perairan di wilayah Kecamatan Purbalingga. Sebagian besar keluarga di Kecamatan Purbalingga sudah menggunakan jamban sendiri untuk fasilitas tempat buang air besar. Kecamatan Purbalingga terdapat IPAL komunal di Kelurahan Kembaran Kulon yang melayani kurang lebih pada RT 1 dan RT 2. Akan tetapi, masih terdapat rumah tangga yang mengalirkan limbah domestik ke sungai atau ke drainase.

Sistem proteksi kebakaran di Kabupaten Purbalingga berupa wilayah manajemen kebakaran (WMK) serta sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga. Wilayah manajemen kebakaran (WMK) yang terdapat di Kabupaten Purbalingga berada di Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Bobotsari, dan Kecamatan Rembang. Wilayah manajemen kebakaran yang terdapat di Kecamatan Purbalingga melayani wilayah Karangmoncol, Rembang, Pengadegan, dan Kejobong. Selain itu, di Kecamatan Purbalingga terdapat hidran kebakaran yang berada di sekitar Alun-Alun Purbalingga.



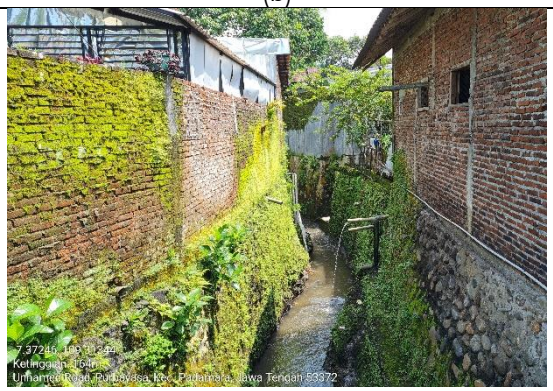
(a)



(b)



(c)



(d)



(e)

(a) Jalan tergenang
(b) Drainase tersier
(c) TPS 3R di Desa Jatisaba
(d) Limbah domestik yang dialirkan ke drainase
(e) Hidran kebakaran

Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.18.
Prasarana di Kecamatan Purbalingga

3.1.6.2. Kondisi Sarana

Sarana yang terdapat di Kecamatan Purbalingga meiputi sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana kebudayaan dan rekreasi, serta sarana ruang terbuka hijau.

Sarana pemerintahan yang terdapat di Kecamatan Purbalingga berupa balai desa, balai kelurahan, kantor desa, dan kantor kelurahan. Jumlah kelurahan di Kecamatan Purbalingga berjumlah 11 kelurahan, sedangan sisanya adalah desa.

Sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Purbalingga terdiri dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD) sederajat, sekolah menengah pertama (SMP) sederajat, sekolah menengah akhir (SMA) sederajat, dan perguruan tinggi. Sarana pendidikan TK dan SD tersebar di seluruh desa/ kelurahan di Kecamatan Purbalingga. Sarana pendidikan perguruan tinggi yang berjumlah 1 unit berada di Kelurahan Penambongan. Secara rinci sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Purbalingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.21.
Sarana Pendidikan di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	TK	SD/ MI	SMP/ MTs	SMA/ SMK/ MA	Perguruan Tinggi
1	Bojong	2	3	-	1	-
2	Toyareja	1	2	-	-	-
3	Kedung Menjangan	1	2	-	-	-
4	Jatisaba	3	3	-	-	-
5	Bancar	3	3	3	1	1
6	Purbalingga Wetan	4	4	1	3	-
7	Penambongan	3	2	1	1	1
8	Purbalingga Kidul	4	1	1	1	-

No	Desa/Kelurahan	TK	SD/ MI	SMP/ MTs	SMA/ SMK/ MA	Perguruan Tinggi
9	Kandang Gampang	1	1	-	-	-
10	Purbalingga Kulon	3	1	-	1	-
11	Purbalingga Lor	4	6	3	1	-
12	Kembaran Kulon	3	4	2	-	-
13	Wirasana	3	3	-	-	-
Jumlah		35	35	11	9	2

Sumber: Kecamatan Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021

Sarana peribadatan yang terdapat di Kecamatan Purbalingga meliputi masjid, mushola, gereja, dan vihara. Sarana peribadatan masjid dan mushola tersebar di seluruh desa/ kelurahan di Kecamatan Purbalingga dengan jumlah sebanyak 71 masjid dan 127 mushola. Sarana peribadatan vihara hanya terdapat di Kelurahan Purbalingga Kulon.

Tabel III.22.
Sarana Peribadatan di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Masjid	Musholla	Gereja	Vihara
1	Bojong	6	9	-	-
2	Toyareja	4	11	-	-
3	Kedung Menjangan	2	11	-	-
4	Jatisaba	4	7	-	-
5	Bancar	4	11	1	-
6	Purbalingga Wetan	6	9	1	-
7	Penambongan	7	12	-	-
8	Purbalingga Kidul	10	11	1	-
9	Kandang Gampang	6	3	3	-
10	Purbalingga Kulon	2	6	2	1
11	Purbalingga Lor	5	7	2	-
12	Kembaran Kulon	7	12	-	-
13	Wirasana	8	18	-	-
Jumlah		71	127	10	1

Sumber: Kecamatan Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021

Sarana kesehatan di Kecamatan Purbalingga cukup lengkap yang terdiri atas rumah sakit, poliklinik/ balai pengobatan, puskesmas, apotek, praktik dokter/ bidan, PKD, dan posyandu. Sarana kesehatan rumah sakit di Kecamatan Purbalingga sebanyak 2 unit yang berada di Kelurahan Purbalingga Lor dan Kelurahan Kembaran Kulon. Sarana kesehatan praktik dokter/ bidan, PKD, dan posyandu di Kecamatan Purbalingga tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Purbalingga. Sementara, sarana kesehatan puskesmas hanya berada di Kelurahan Purbalingga Lor. Berikut ini merupakan jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Purbalingga tahun 2020.

Tabel III.23.
Sarana Kesehatan di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Apotek	Praktik Dokter/ Bidan	PKD	Posyandu
1	Bojong	-	1	-	1	2	1	8
2	Toyareja	-	-	-	-	2	1	5
3	Kedung Menjangan	-	-	-	1	1	1	5
4	Jatisaba	-	-	-	-	-	1	7

No	Desa/Kelurahan	Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Apotek	Praktik Dokter/ Bidan	PKD	Posyandu
5	Bancar	-	1	-	2	2	1	6
6	Purbalingga Wetan	-	-	-	2	2	1	7
7	Penambongan	-	-	-	-	2	1	7
8	Purbalingga Kidul	-	3	-	3	4	1	10
9	Kandang Gampang	-	2	-	2	1	1	5
10	Purbalingga Kulon	-	2	-	2	5	1	5
11	Purbalingga Lor	1	-	1	3	2	1	9
12	Kembaran Kulon	1	-	-	2	4	1	6
13	Wirasana	-	-	-	1	4	1	12
Jumlah		2	9	1	19	31	13	92

Sumber: Kecamatan Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021

Kebudayaan di Kecamatan Purbalingga beraneka ragam, meliputi ujungan, suran, begalan, angguk, aplang/ dames, calung, ebeg/ kuda lumping, lengger, dan lainnya. Kebudayaan tersebut di dukung oleh beberapa organisasi kesenian yang terdapat di Kecamatan Purbalingga. Selain itu, Kecamatan Purbalingga memiliki bangunan/ situs cagar budaya. Berikut ini merupakan bangunan/ situs cagar budaya di Kecamatan Purbalingga tahun 2020.

Tabel III.24.
Bangunan/ Situs Cagar Budaya di Kecamatan Purbalingga

Kecamatan	Bangunan/ Situs Cagar Budaya
Purbalingga	- Rumah Dinas Bupati - Rumah Dinas Wakil Bupati - SMP N 1 Purbalingga - Gedung Bakeuda - Pendopo KH Ahmad Dahlan SMA Muhammadiyah 1 Purbalingga - SD Kristen Bina Harapan - Gedung Pengadilan Negeri - SMP Santo Borromeus - Susteran Notre Dame - Rumah Gan Thian Koeij - Situs Kerkop Purbalingga

Sumber: Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 432/226 Tahun 2018

Sarana ruang terbuka hijau yang terdapat di Kecamatan Purbalingga meliputi ruang terbuka hijau perkotaan, ruang terbuka hijau jalur hijau jalan, dan ruang terbuka hijau fungsi tertentu. Ruang terbuka hijau perkotaan di Kecamatan Purbalingga berupa taman kota, hutan kota, dan taman lingkungan. Berikut ini merupakan ruang terbuka hijau perkotaan di Kecamatan Purbalingga.

Tabel III.25.
Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Kecamatan Purbalingga

No	Nama Taman	Jenis RTH	Lokasi
1	Taman Maerakaca	Taman Kota	Kelurahan Bancar
2	Bundaran Depan Kodim	Taman Kota	Kelurahan Bancar
3	RTH Hijau	Taman Kota	Kelurahan Purbalingga Wetan
4	RTH Bojong	Taman Kota	Kelurahan Bojong
5	Taman Bermain Anak Perumahan	Taman Kota	Kelurahan Bojong
6	Taman Curug Gringsing	Taman Kota	Kelurahan Purbalingga Kidul

No	Nama Taman	Jenis RTH	Lokasi
7	Taman Kota Alun-Alun	Taman Kota	Kelurahan Purbalingga Kidul
8	Usman Janatin City Park	Taman Kota	Kelurahan Kandanggampang
9	Taman Depan Makam Pahlawan	Taman Kota	Kelurahan Kandanggampang
10	Hutan Kota Kerkop	Hutan Kota	Kelurahan Purbalingga Wetan
11	Hutan Kota Kandanggampang	Hutan Kota	Kelurahan Kandanggampang
12	Hutan kota GOR Goentoer Darjono	Hutan Kota	Kelurahan Purbalingga Kidul
13	Hutan Kota Bojong	Hutan Kota	Kelurahan Bojong
14	Taman Perum Sehat Bahagia Bojong	Taman Lingkungan	Kelurahan Bojong
15	Taman Perum Abdi Kencana	Taman Lingkungan	Kelurahan Purbalingga Wetan

Sumber: Kecamatan Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021

Ruang terbuka hijau fungsi tertentu di Kecamatan Purbalingga berupa lapangan olahraga sepak bola tersebar di seluruh desa/ kelurahan di Kecamatan Purbalingga. Berikut ini merupakan jumlah dan kondisi fasilitas/ lapangan olahraga di Kecamatan Purbalingga.

Tabel III.26.
Jumlah dan Kondisi Lapangan Olahraga di Kecamatan Purbalingga

Fasilitas/ Lapangan Olahraga	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Parah
Sepak bola	13	-
Bola voli	5	1
Bulu tangkis	12	-
Bola basket	1	-
Tenis lapangan	3	-
Tenis meja	12	-
Futsal	2	-
Bela diri	2	-
Pusat kebugaran	5	-

Sumber: Kecamatan Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)

(a) SMA N 1 Purbalingga
(b) Klenteng Hok Tek Bio
(c) RSUD Purbalingga
(d) Sentra IKM
(e) Usman Janatin City Park
(f) Alun-Alun Purbalingga

Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.19.
Sarana di Kecamatan Purbalingga

3.1.6.3. Kondisi Utilitas

Jaringan utlitas yang terdapat di Kecamatan Purbalingga meliputi jaringan energi dan kelistrikan, serta jaringan telekomunikasi.

Jaringan energi dan kelistrikan di Kecamatan Purbalingga mempunyai sumber energi listrik utama dari PLN. Jangkauan pelayanan listrik oleh PLN sudah menjangkau di seluruh desa/ kelurahan se-Kecamatan Purbalingga. Jumlah pelanggan listrik di Kecamatan Purbalingga sebanyak 20.704 pelanggan pada tahun 2020. Sedangkan, untuk fasilitas umum, seperti lampu jalan di Kecamatan Purbalingga menggunakan panel surya.

Tabel III.27.
Jumlah Pelanggan Listrik di Kecamatan Purbalingga Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Pengguna PLN
1	Bojong	1.814
2	Toyareja	975
3	Kedung Menjangan	1.139

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Pengguna PLN
4	Jatisaba	1.229
5	Bancar	1.497
6	Purbalingga Wetan	1.804
7	Penambongan	1.642
8	Purbalingga Kidul	2.204
9	Kandang Gampang	1.114
10	Purbalingga Kulon	954
11	Purbalingga Lor	2.215
12	Kembaran Kulon	1.646
13	Wirasana	2.471
Jumlah		20.704

Sumber: Kecamatan Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021

Jaringan telekomunikasi merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi kelancaran informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, keberadaan jaringan telepon di kawasan perencanaan sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas masyarakat. Kebutuhan telekomunikasi masyarakat saat ini dipenuhi dengan adanya jaringan non kabel yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Purbalingga.

Tabel III.28.
Jumlah Menara Telekomunikasi dan Kondisi Sinyal Telepon Seluler di Kecamatan Purbalingga

No	Desa/Kelurahan	Jumlah BTS	Kondisi Sinyal Telepon Seluler
1	Bojong	2	Kuat
2	Toyareja	-	Kuat
3	Kedung Menjangan	2	Kuat
4	Jatisaba	-	Kuat
5	Bancar	1	Kuat
6	Purbalingga Wetan	1	Kuat
7	Penambongan	1	Kuat
8	Purbalingga Kidul	2	Kuat
9	Kandang Gampang	-	Kuat
10	Purbalingga Kulon	2	Kuat
11	Purbalingga Lor	3	Kuat
12	Kembaran Kulon	2	Kuat
13	Wirasana	2	Kuat

Sumber: Kecamatan Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021



Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.20.
Utilitas di Kecamatan Purbalingga

3.2. Kecamatan Kalimanah

3.2.1. Kondisi Fisik Kawasan

Kecamatan Kalimanah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Purbalingga yang berada di bagian barat Kabupaten Purbalingga. Batas wilayah Kecamatan Kalimanah secara administratif dapat diuraikan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Padamara dan Kecamatan Purbalingga

Sebelah Timur : Kecamatan Purbalingga dan Kecamatan Kemangkon

Sebelah Selatan : Kabupaten Banyumas dan Kecamatan Kemangkon

Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas dan Kecamatan Kemangkon

Wilayah Kecamatan Kalimanah terbagi dalam 17 desa dengan luas wilayah 2.237,13 Ha atau 2,77% dari luas wilayah Kabupaten Purbalingga. Desa dengan wilayah terluas adalah Desa Blater seluas 218,17 Ha. Sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kelurahan Karangmanyar dengan luas 52,51 Ha. Berikut ini merupakan luas wilayah dan peta administrasi Kecamatan Kalimanah.

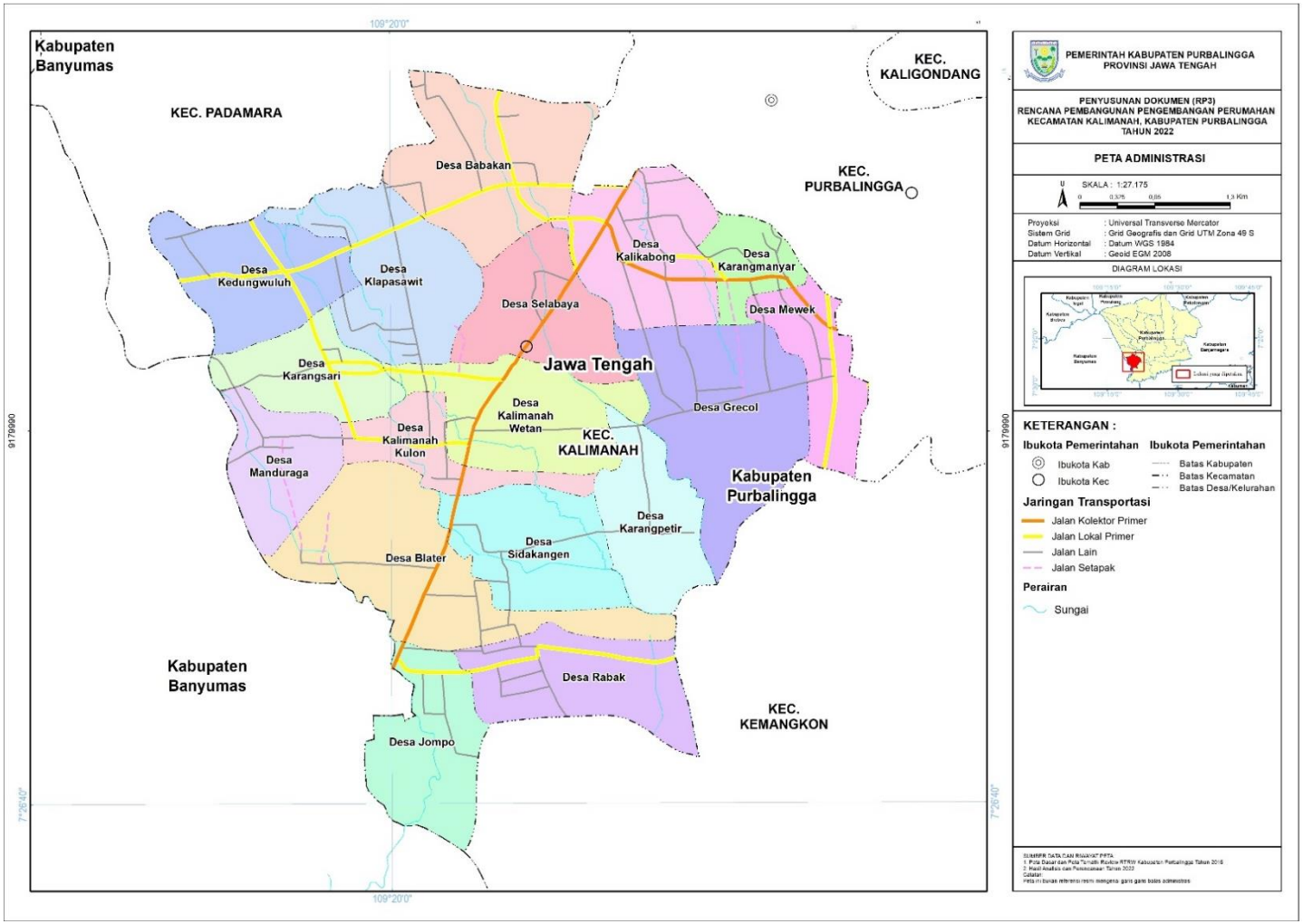
Tabel III.29.
Luas Wilayah Kecamatan Kalimanah

No	Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)
1	Jompo	124,43
2	Rabak	139,45
3	Blater	218,17
4	Sidakangen	132,86
5	Karangpetir	111,04
6	Grecol	212,30
7	Mewek	83,47
8	Karangmanyar	52,51
9	Kalikabong	145,57
10	Selabaya	124,25
11	Kalimanah Wetan	149,48
12	Kalimanah Kulon	71,81

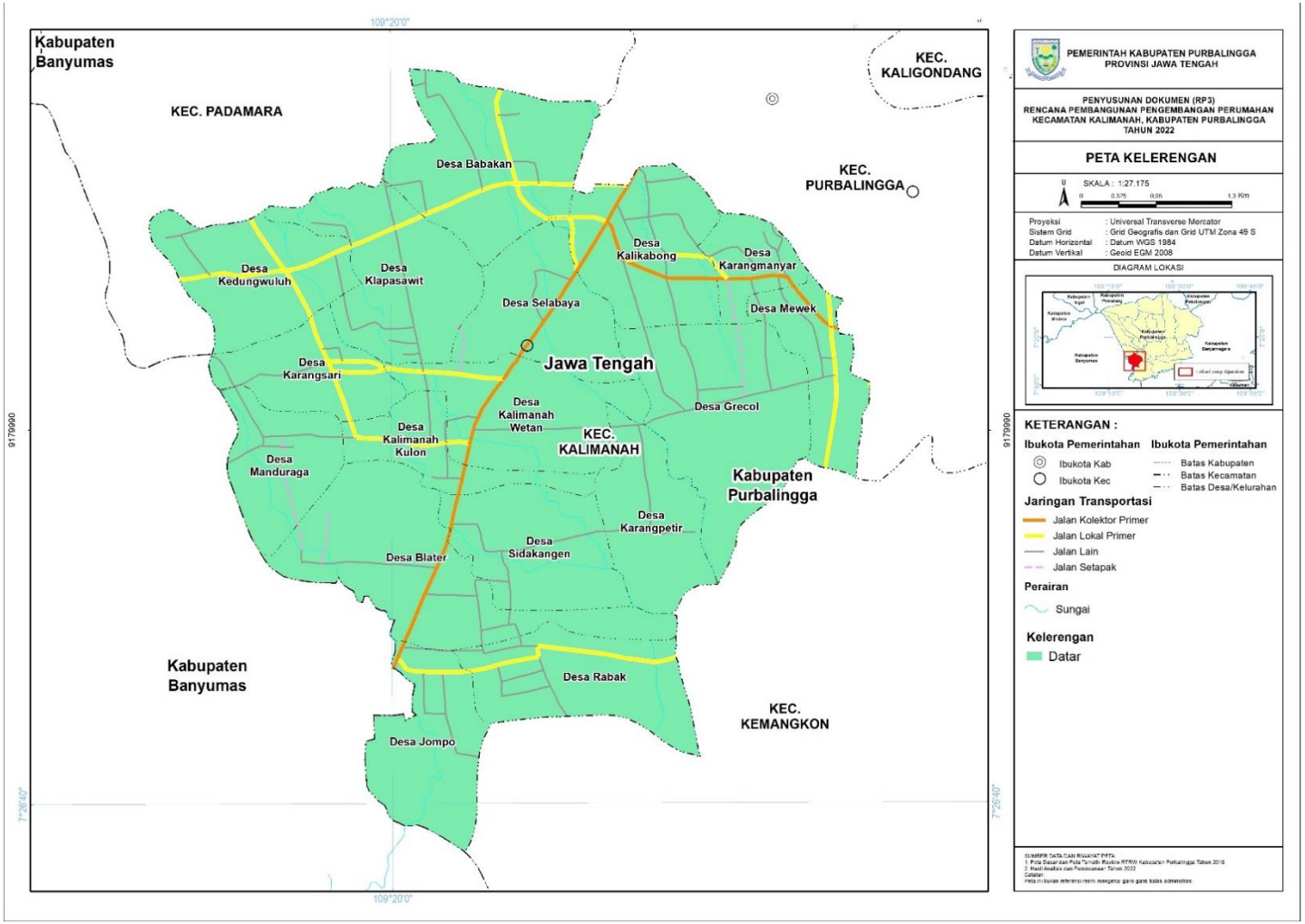
No	Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)
13	Manduraga	94,41
14	Karangsari	92,55
15	Kedungwuluh	136,15
16	Klapasawit	159,46
17	Babakan	189,21
Jumlah		2.237,13

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020

Wilayah Kecamatan Kalimanah memiliki ketinggian tempat antara 36 meter – 75 meter dari permukaan laut. Menurut klasifikasi ketinggian wilayah Kecamatan Kalimanah termasuk dataran rendah dengan tingkat kemiringan berkisar antara 0 - 8%. Peta topografi wilayah Kecamatan Kalimanah dapat dilihat pada Gambar 3.21.



Gambar 3.21.
Peta Administrasi Kecamatan Kalimanah



Gambar 3.22.
Peta Topografi Kecamatan Kalimanah

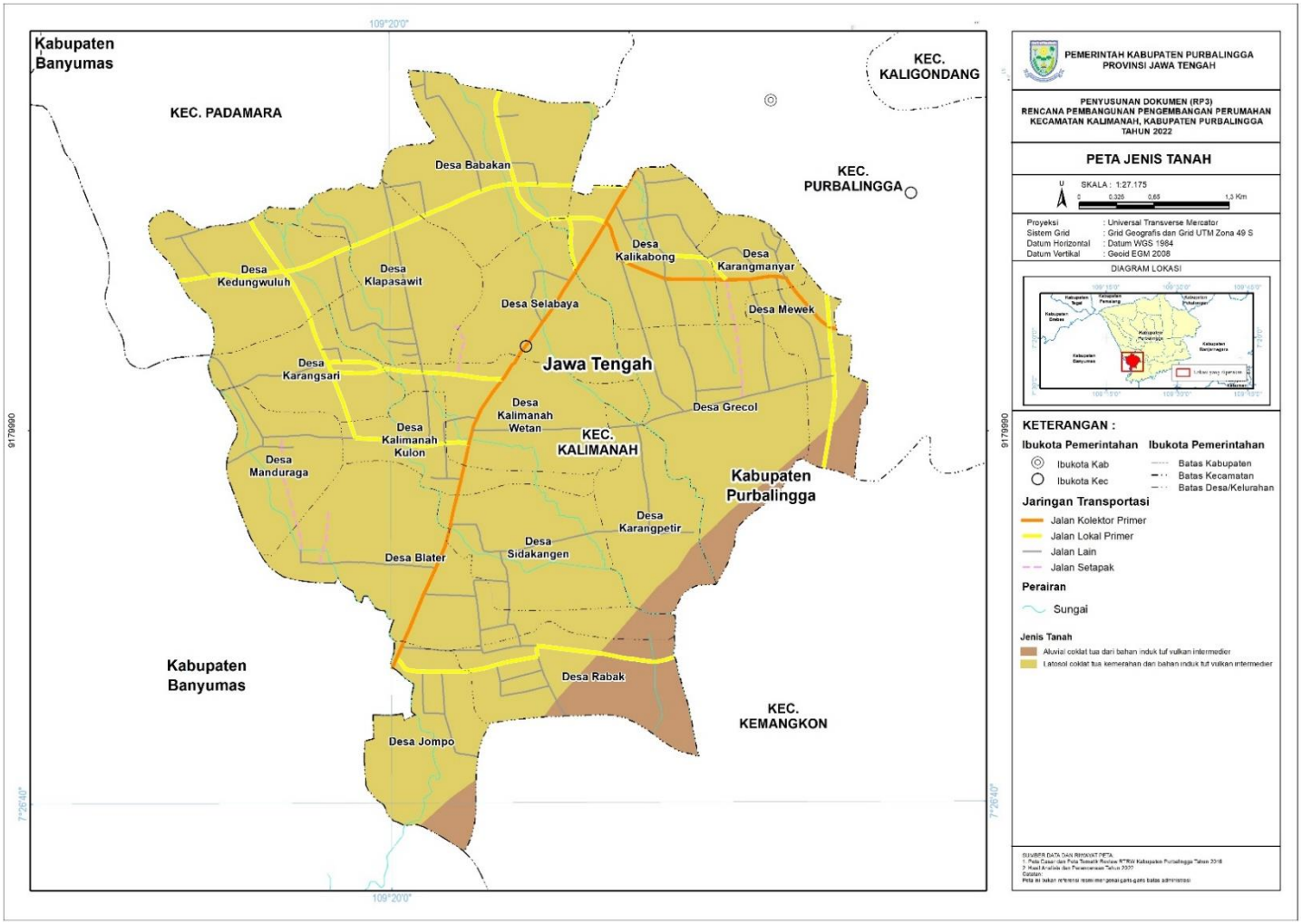
Jenis tanah yang ada di Kecamatan Kalimanah dikategorikan menjadi 2 jenis dengan karakteristik yang berbeda. Jenis tanah dominan di Kecamatan Kalimanah adalah aluvial coklat tua dan latosol coklat tua kemerahan. Jenis tanah Kecamatan Kalimanah dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.22.

Tabel III.30.
Jenis Tanah di Kecamatan Kalimanah

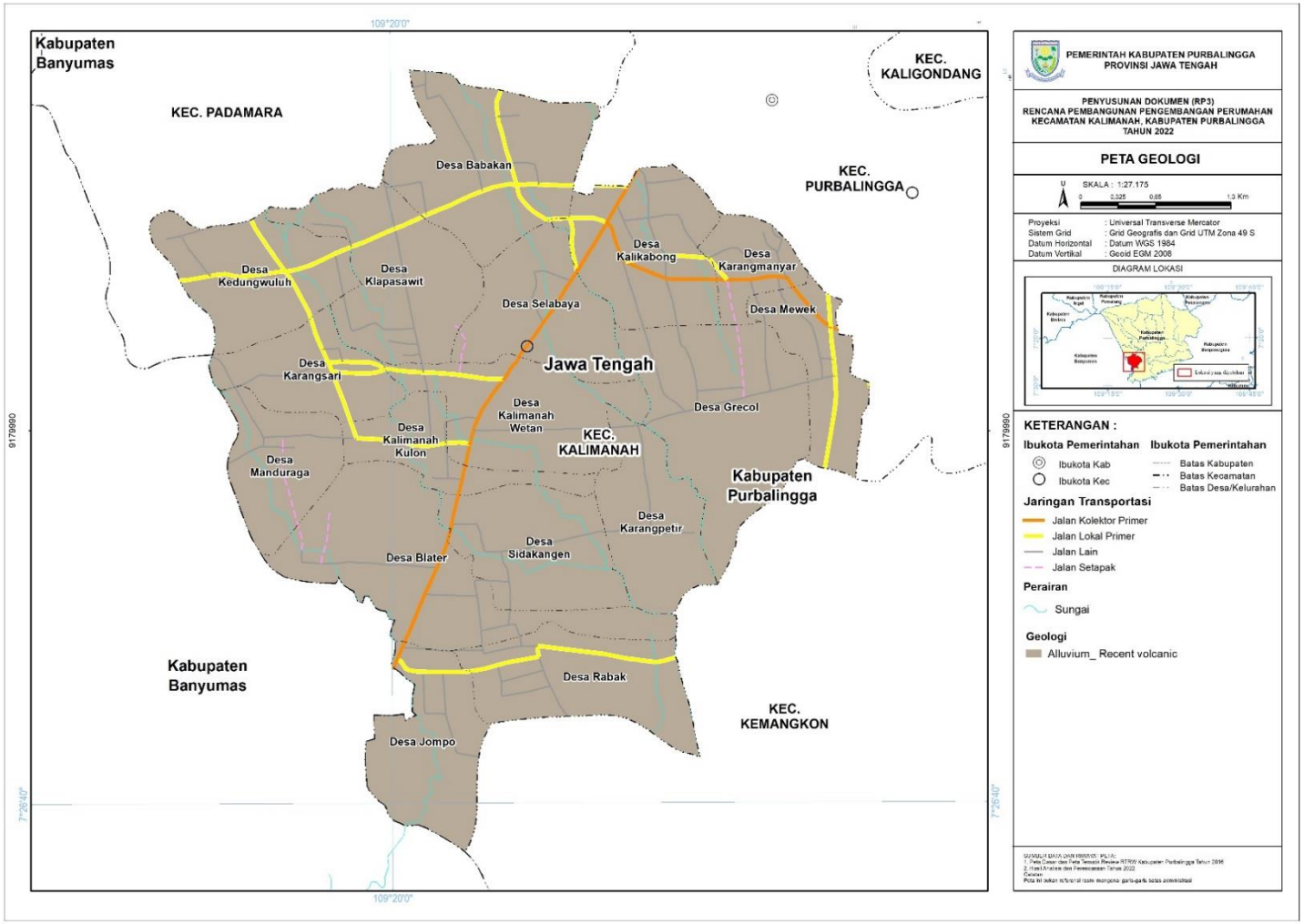
No	Desa/ Kelurahan	Jenis Tanah (Ha)	
		Aluvial Coklat Tua	Latosol Coklat Tua Kemerahan
1	Jompo	15,14	109,29
2	Rabak	70,91	68,54
3	Blater	10,23	207,94
4	Sidakangen	-	132,86
5	Karangpetir	16,36	94,68
6	Grecol	20,67	191,63
7	Mewek	20,39	63,08
8	Karangmanyar	-	52,51
9	Kalikabong	-	145,57
10	Selabaya	-	124,25
11	Kalimanah Wetan	-	149,48
12	Kalimanah Kulon	-	71,81
13	Manduraga	-	94,41
14	Karangsari	-	92,55
15	Kedungwuluh	-	136,15
16	Klapasawit	-	159,46
17	Babakan	-	189,21
Jumlah		153,71	2.083,42

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020

Komposisi litologi batuan yang terdapat di Kecamatan Kalimanah berupa alluvium endapan gunung api, yang terdiri dari bahan-bahan tak mengeras, mengandung bongkah-bongkah batuan gunung api, bergaris tengah 10 – 15 cm, tersusun oleh andesit sampai basalt dengan kelulusan terhadap air rendah sampai tinggi. Peta geologi wilayah Kecamatan Kalimanah dapat dilihat pada Gambar 3.23.



Gambar 3.23.
Peta Jenis Tanah Kecamatan Kalimanah



Gambar 3.24.
Peta Geologi Kecamatan Kalimanah

Hidrogeologi yang ada di wilayah Kecamatan Kalimanah berupa akuifer produktivitas tinggi dengan penyebaran luas. Peta hidrogeologi wilayah Kecamatan Kalimanah dapat dilihat pada Gambar 3.24.

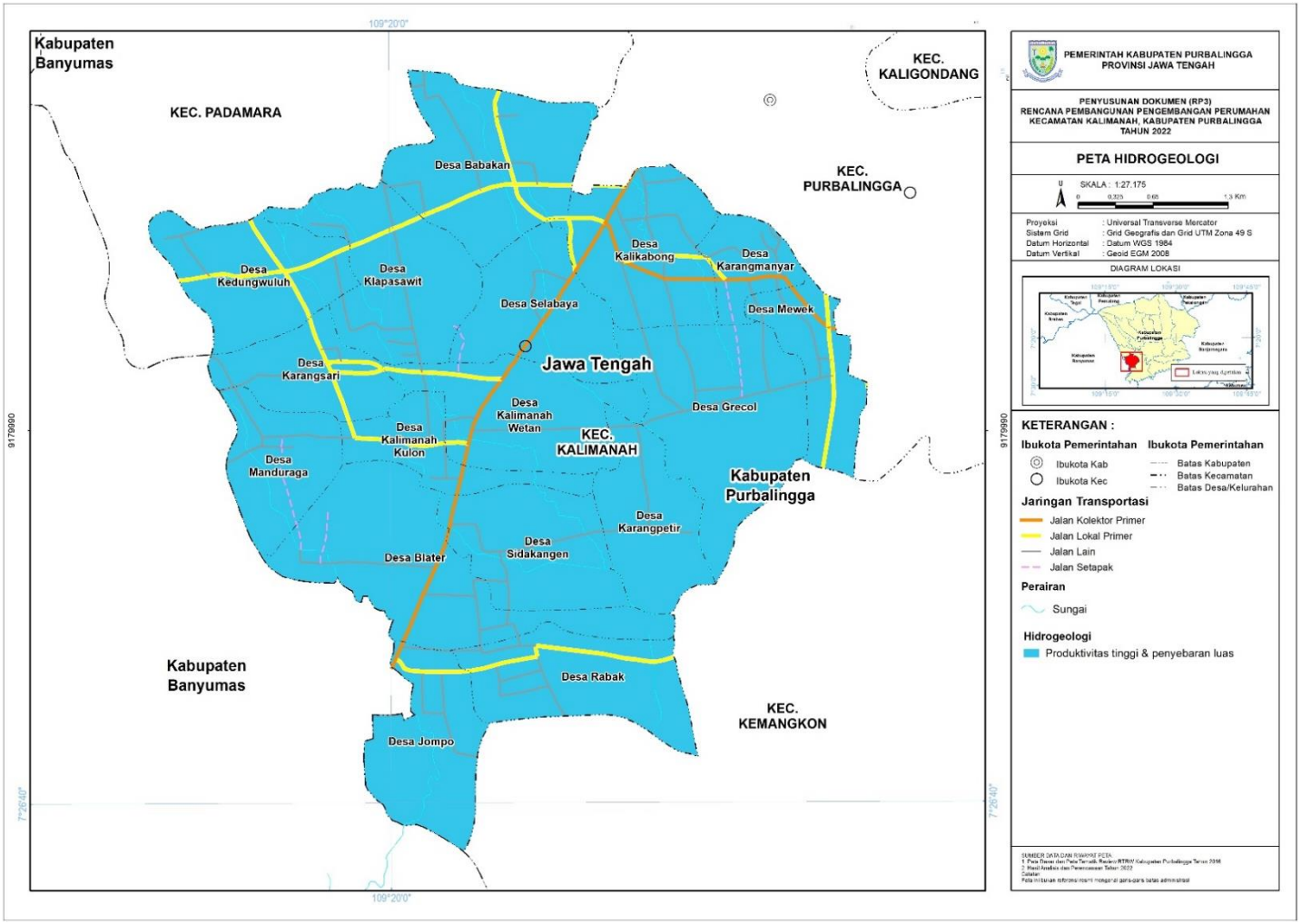
Kecamatan Kalimanah termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu dengan Sub DAS Klawing dan Sub DAS Serayu Hilir. Mayoritas wilayah di Kecamatan Kalimanah termasuk dalam Sub DAS Serayu Hilir dengan luas 2.194,46 Ha. Sedangkan wilayah Kecamatan Kalimanah yang masuk dalam Sub DAS Klawing hanya seluas 42,68 Ha. DAS di Kecamatan Kalimanah dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.25.

Tabel III.31.
DAS di Kecamatan Kalimanah

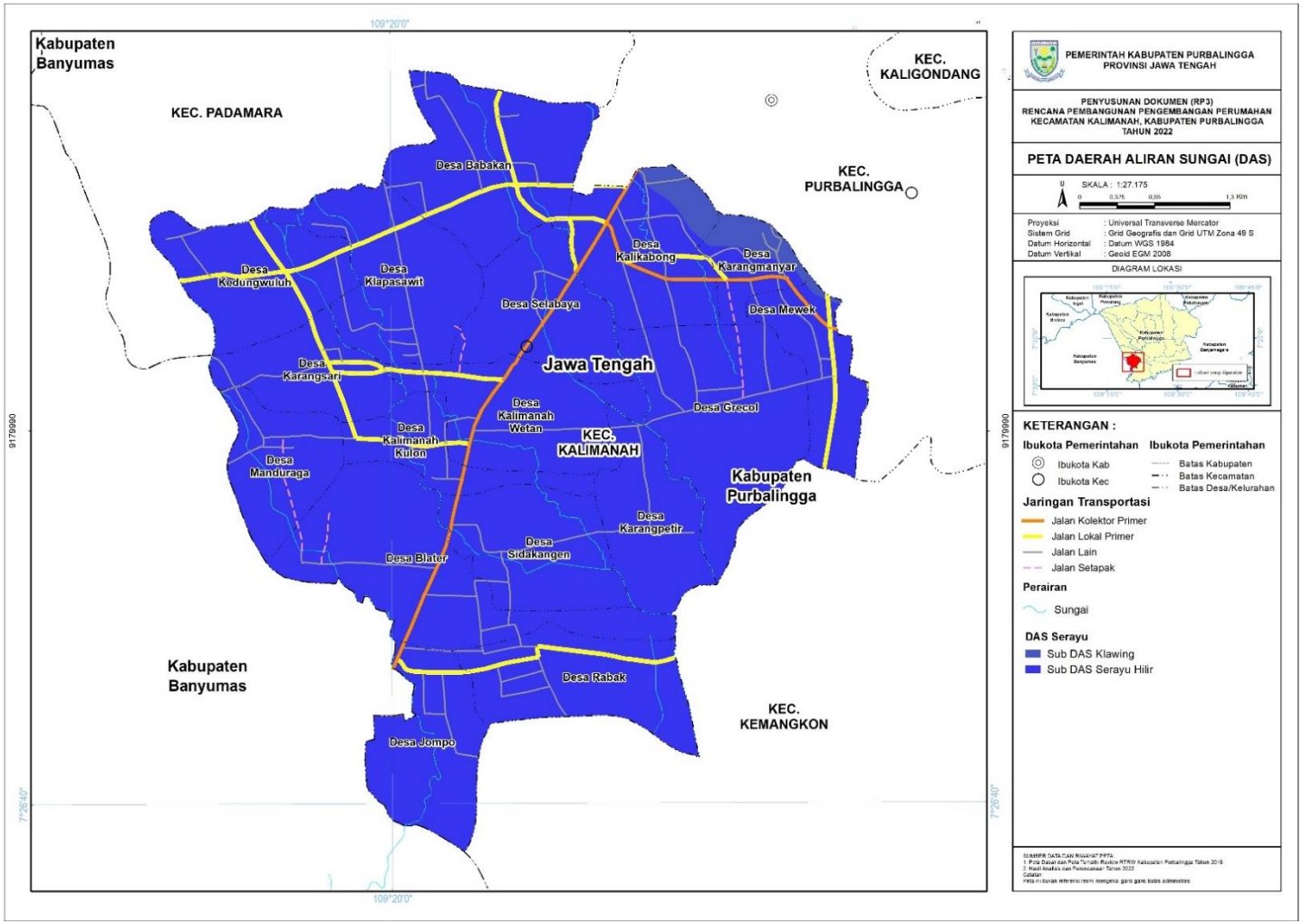
No	Desa/ Kelurahan	DAS Serayu	
		Sub DAS Klawing	Sub DAS Serayu Hilir
1	Jompo	-	124,43
2	Rabak	-	139,45
3	Blater	-	218,17
4	Sidakangen	-	132,86
5	Karangpetir	-	111,04
6	Grecol	-	212,30
7	Mewek	2,18	81,28
8	Karangmanyar	20,22	32,29
9	Kalikabong	20,27	125,30
10	Selabaya	-	124,25
11	Kalimanah Wetan	-	149,48
12	Kalimanah Kulon	-	71,81
13	Manduraga	-	94,41
14	Karangsari	-	92,55
15	Kedungwuluh	-	136,15
16	Klapasawit	-	159,46
17	Babakan	-	189,21
Jumlah		42,68	2.194,46

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020

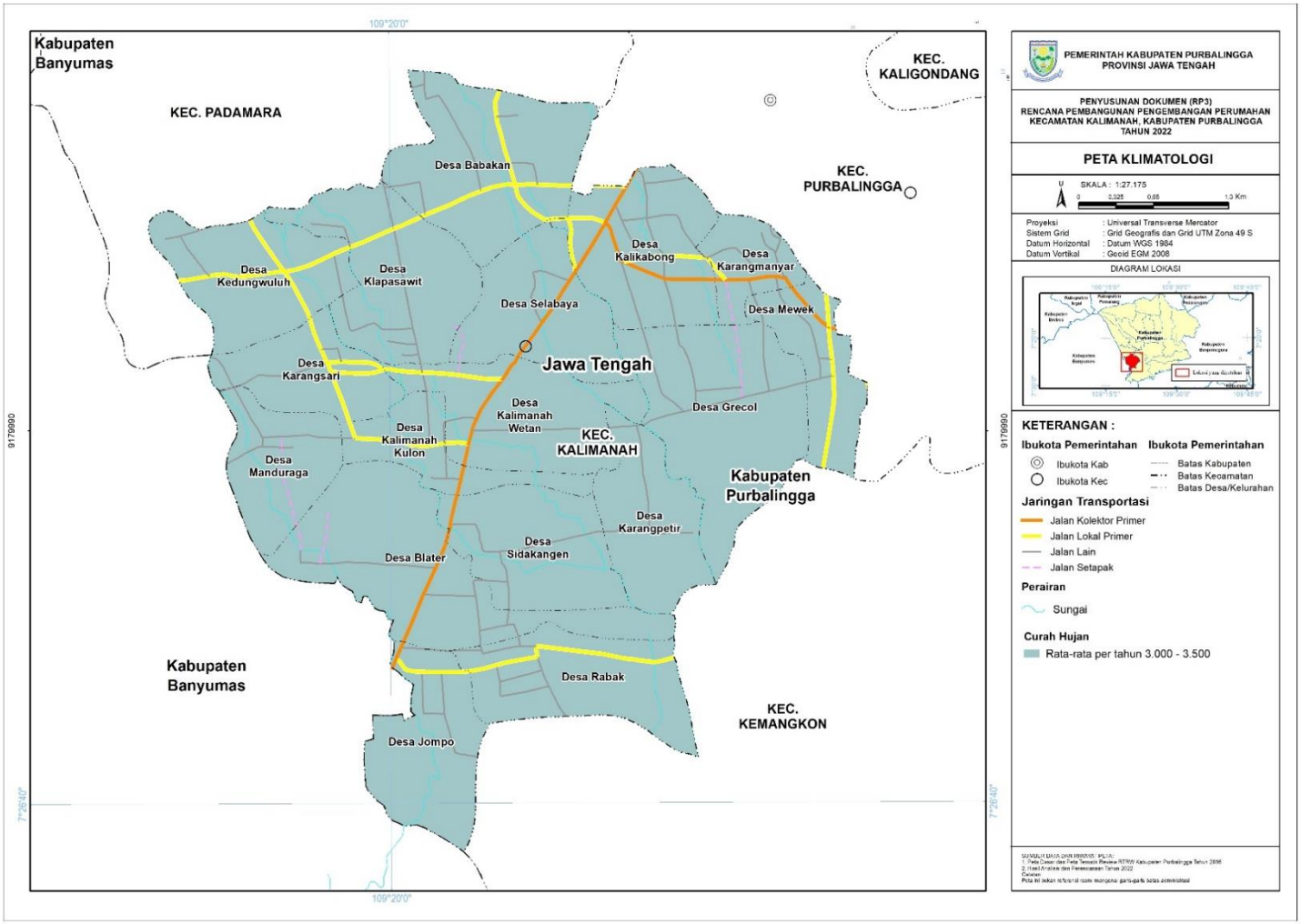
Klimatologi dapat dilihat berdasarkan rata-rata curah hujan per tahun. Curah hujan sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan letak tempat itu sendiri. Tidak terkecuali untuk wilayah Kecamatan Kalimanah yang memiliki iklim tropis yang relatif basah dengan curah hujan rata-rata per tahun sebesar 3.000 – 3.500 mm. Peta Klimatologi Kecamatan Kalimanah dapat dilihat pada Gambar 3.26.



Gambar 3.25.
Peta Hidrogeologi Kecamatan Kalimanah



Gambar 3.26.
Peta DAS Kecamatan Kalimanah



Gambar 3.27.
Peta Klimatologi Kecamatan Kalimanah

Potensi rawan bencana yang ada di Kecamatan Kalimanah meliputi rawan bencana angin ribut, rawan gunung api, dan rawan bencana banjir. Desa/ kelurahan di Kecamatan Kalimanah yang tidak termasuk dalam wilayah rawan bencana adalah Desa Sidakangen. Sebaran rawan bencana di Kecamatan Kalimanah dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.28.

Tabel III.32.
Rawan Bencana di Kecamatan Kalimanah

No	Desa/ Kelurahan	Rawan Bencana		
		Angin Ribut	Gunung Api	Rawan Banjir
1	Jompo	-	12,26	-
2	Rabak	-	12,16	0,51
3	Blater	-	-	5,49
4	Karangpetir	-	-	4,03
5	Grecol	0,08	-	3,75
6	Mewek	46,88	-	2,72
7	Karangmanyar	20,69	-	-
8	Kalikabong	66,51	-	-
9	Selabaya	86,12	-	-
10	Kedungwuluh	-	60,72	-
11	Klapasawit	2,06	5,97	-
12	Babakan	128,98	-	-
Jumlah		351,30	91,12	16,50

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020

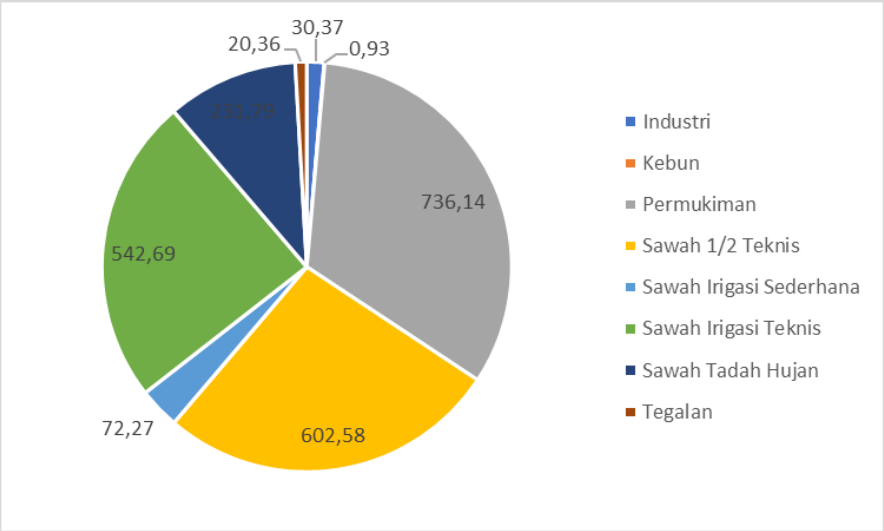
Penggunaan lahan di Kecamatan Kalimanah tahun 2020 berupa lahan industri, kebun, permukiman, lahan sawah setengah teknis, sawah irigasi teknis, sawah tadah hujan, dan tegalan. Penggunaan lahan di Kecamatan Kalimanah terbesar adalah digunakan sebagai permukiman seluas 736,14 Ha. Penggunaan lahan terbesar kedua di Kecamatan Kalimanah berupa sawah setengah teknis seluas 602,58 Ha. Luas penggunaan lahan di Kecamatan Kalimanah tahun 2020 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel, grafik, dan Gambar 3.29.

Tabel III.33.
Luas Penggunaan Lahan di Kecamatan Kalimanah Tahun 2020 (hektar)

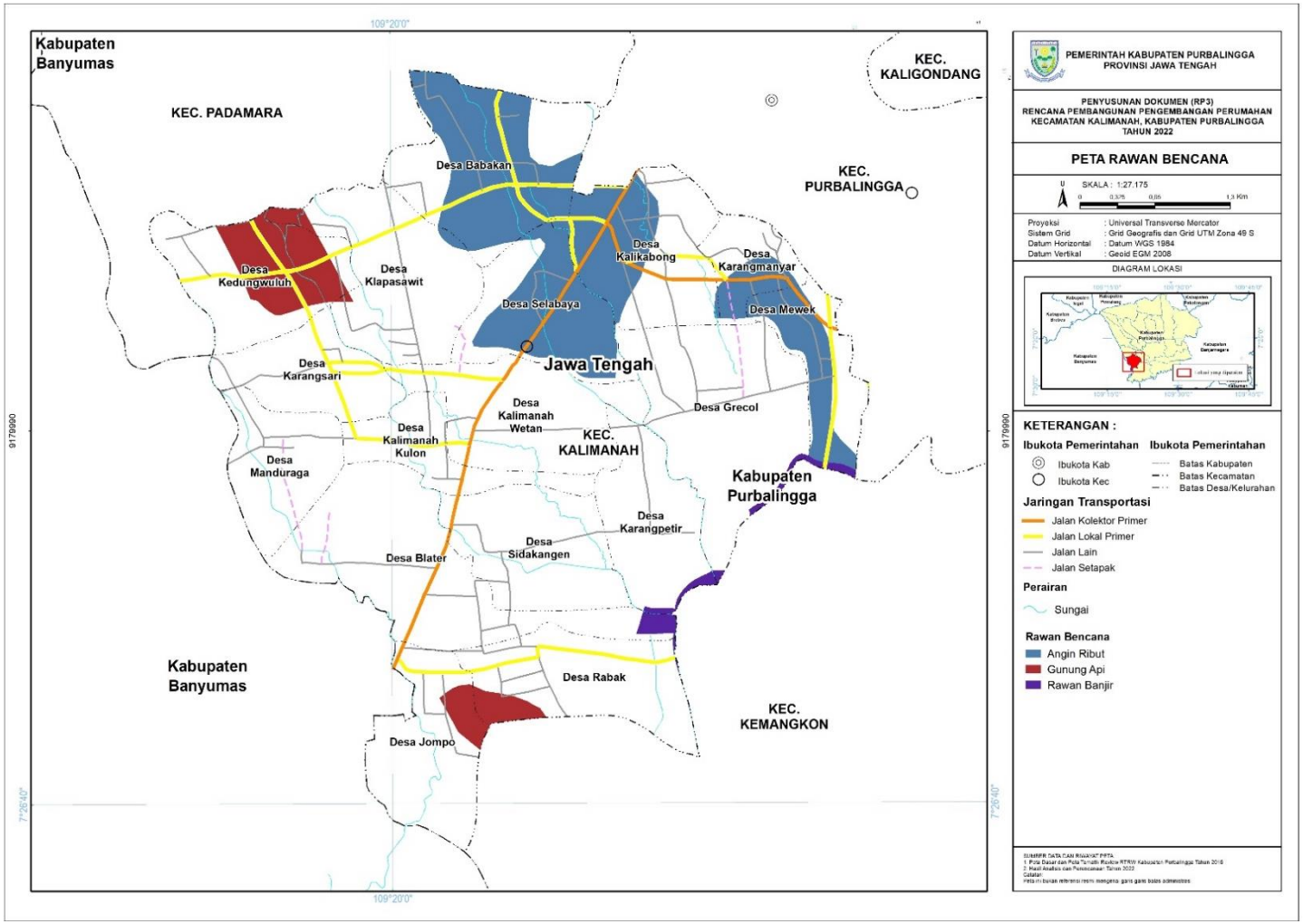
No	Desa/ Kelurahan	Penggunaan Lahan (Ha)							
		Industri	Kebun	Permukiman	Sawah 1/2 Teknis	Sawah Irigasi Sederhana	Sawah Irigasi Teknis	Sawah Tadah Hujan	Tegalan
1	Jompo	-	-	30,63	-	-	93,80	-	-
2	Rabak	-	-	36,90	-	-	102,55	-	-
3	Blater	-	0,93	58,00	130,79	-	27,52	-	0,92
4	Sidakangen	-	-	29,70	0,11	-	102,77	-	0,29
5	Karangpetir	-	-	22,16	4,42	-	84,46	-	-
6	Grecol	3,55	-	66,24	-	-	-	142,51	-
7	Mewek	10,58	-	46,90	25,88	-	-	0,11	-
8	Karangmanyar	-	-	37,81	6,04	-	-	8,66	0,00
9	Kalikabong	12,16	-	78,25	0,58	-	14,85	36,38	3,36
10	Selabaya	0,00	-	36,24	42,74	-	-	41,29	3,99
11	Kalimanah Wetan	3,87	-	48,52	66,34	-	30,69	0,06	-

No	Desa/ Kelurahan	Penggunaan Lahan (Ha)							
		Industri	Kebun	Permukiman	Sawah 1/2 Teknis	Sawah Irigasi Sederhana	Sawah Irigasi Teknis	Sawah Tadah Hujan	Tegalan
12	Kalimanah Kulon	-	-	28,03	18,73	-	18,52	-	6,52
13	Manduraga	-	-	22,14	-	72,27	0,00	-	-
14	Karangsari	-	-	23,16	65,25	-	-	-	4,14
15	Kedungwuluh	-	-	40,91	95,24	-	-	-	-
16	Klapasawit	-	-	38,69	119,32	-	0,31	-	1,14
17	Babakan	0,21	-	91,85	27,15	-	67,22	2,77	-
Jumlah		30,37	0,93	736,14	602,58	72,27	542,69	231,79	20,36

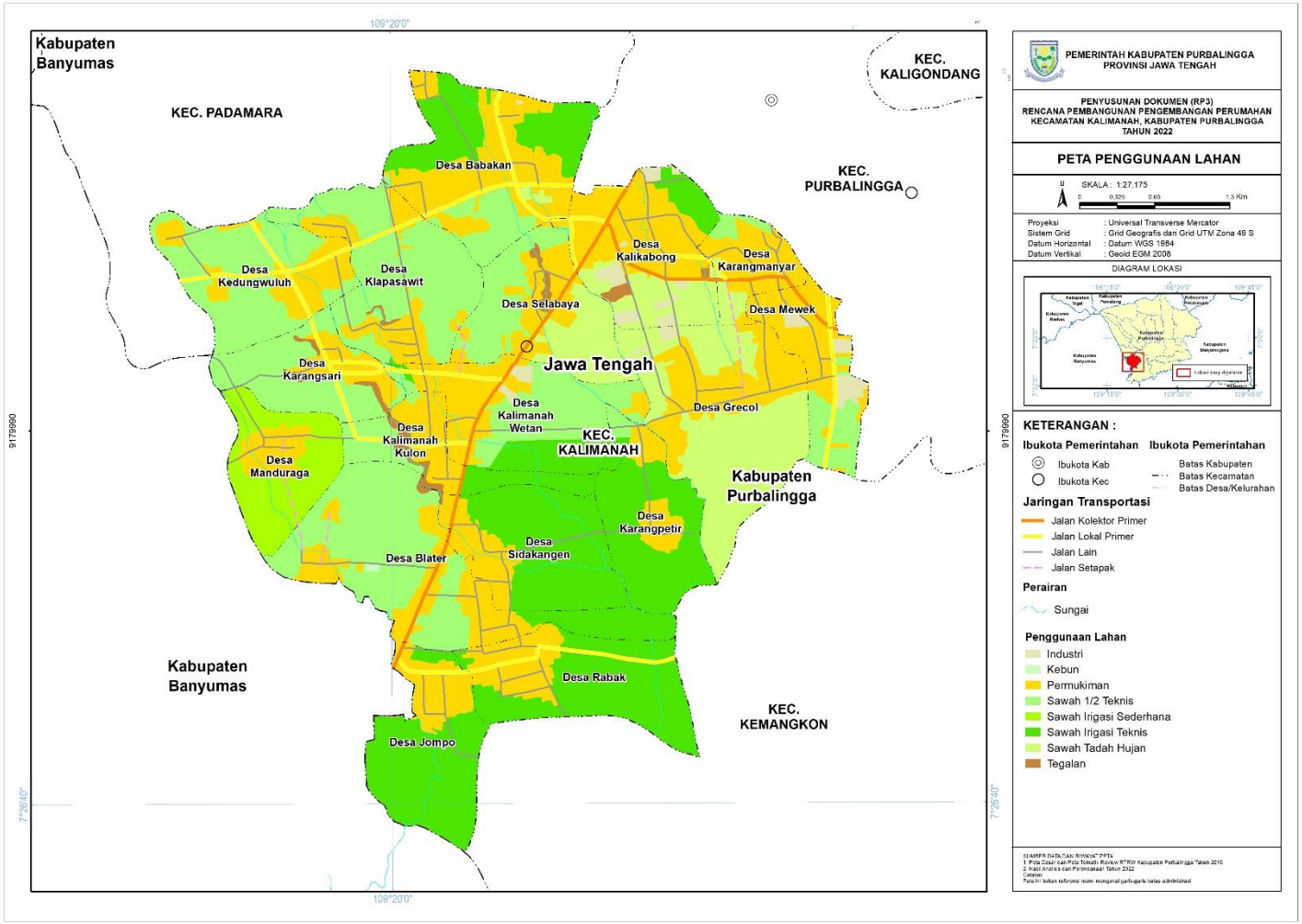
Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020



Gambar 3.28.
Luas Penggunaan Lahan Kecamatan Kalimanah Tahun 2020



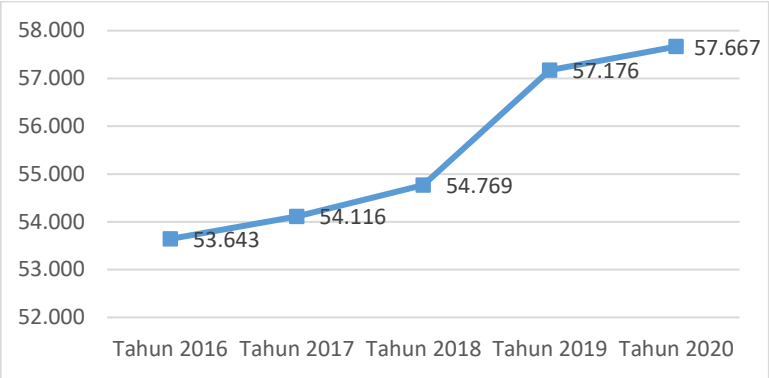
Gambar 3.29.
Peta Rawan Bencana Kecamatan Kalimanah



Gambar 3.30.
Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Kalimanah

3.2.2. Kondisi Kependudukan, Sosial, dan Budaya

Perkembangan jumlah penduduk di Kecamatan Kalimanah dalam kurun waktu lima tahun terakhir tepatnya tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kecamatan Kalimanah tahun 2016 sebanyak 53.643 jiwa mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 menjadi sebanyak 57.667 jiwa. Jumlah penduduk di Kecamatan Kalimanah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Kecamatan Kalimanah Dalam Angka Tahun 2017-2021

Gambar 3.31.
Jumlah Penduduk Kecamatan Kalimanah Tahun 2016-2020

Jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Babakan sebesar 7.478 jiwa. Penduduk terkecil berada di Desa Karangpetir dengan jumlah sebanyak 1.454 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk di Kecamatan Kalimanah sebesar 101 yang berarti terdapat 101 penduduk laki-laki setiap 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin di Kecamatan Kalimanah mayoritas yang lebih dari 100. Secara rinci jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Kalimanah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.34.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Kalimanah Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
1	Jompo	2.102	107,17
2	Rabak	2.971	102,92
3	Blater	3.717	104,9
4	Sidakangen	2.504	101,01
5	Karangpetir	1.454	96,35
6	Grecol	4.140	103,33
7	Mewek	2.585	104,54
8	Karangmanyar	2.635	98,13
9	Kalikabong	6.268	102,58
10	Selabaya	4.146	98,2
11	Kalimanah Wetan	3.379	96,33
12	Kalimanah Kulon	2.194	98,17
13	Manduraga	1.855	100,21
14	Karangsari	1.833	101,33
15	Kedungwuluh	3.251	104,71
16	Klapasawit	5.155	104,85
17	Babakan	7.478	100

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
Jumlah		57.667	101,61

Sumber: Kecamatan Kalimanah Dalam Angka Tahun 2021

Kepadatan penduduk di Kecamatan Kalimanah tahun 2020 terbesar terdapat pada Kelurahan Karangmanyar yaitu sebesar 50 jiwa/Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 2.635 jiwa dan luas wilayah hanya 52,51 Ha. Sedangkan, kepadatan penduduk terkecil terdapat pada Desa Karangpetir dengan kepadatan penduduk sebesar 13 jiwa/Ha. Secara rinci kepadatan penduduk di Kecamatan Kalimanah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.35.
Kepadatan Penduduk di Kecamatan Kalimanah Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas (Ha)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Ha)
1	Jompo	2.102	124,43	17
2	Rabak	2.971	139,45	21
3	Blater	3.717	218,17	17
4	Sidakangen	2.504	132,86	19
5	Karangpetir	1.454	111,04	13
6	Grecol	4.140	212,30	20
7	Mewek	2.585	83,47	31
8	Karangmanyar	2.635	52,51	50
9	Kalikabong	6.268	145,57	43
10	Selabaya	4.146	124,25	33
11	Kalimanah Wetan	3.379	149,48	23
12	Kalimanah Kulon	2.194	71,81	31
13	Manduraga	1.855	94,41	20
14	Karangsari	1.833	92,55	20
15	Kedungwuluh	3.251	136,15	24
16	Klapasawit	5.155	159,46	32
17	Babakan	7.478	189,21	40
Jumlah		57.667	2.237,13	26

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

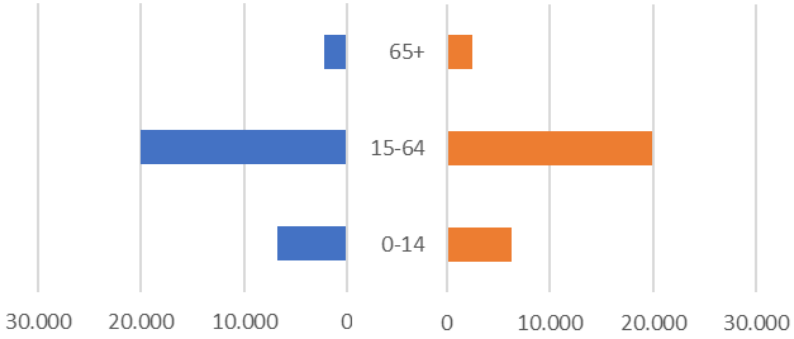
Penduduk menurut kelompok umur di Kecamatan Kalimanah terbagi menjadi rentang usia belum produktif (<14 Tahun), usia produktif (15-64 Tahun), dan usia tidak produktif (>64 tahun). Kecamatan Kalimanah memiliki struktur umur yang dominan pada umur 15-64 tahun dimana umur ini merupakan usia produktif. Tingkat ketergantungan Kecamatan Kalimanah tahun 2020 adalah sebesar 44% dengan komposisi usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 39.960 jiwa dan usia tidak produktif (<14 tahun dan >64 tahun) sebanyak 17.707 jiwa. Hal ini berarti sebanyak 100 penduduk usia produktif menanggung 44 penduduk usia tidak produktif.

Tabel III.36.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kecamatan Kalimanah Tahun 2020

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-14	6.730	6.253	12.983
15-64	20.062	19.898	39.960
65+	2.236	2.488	4.724

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Jumlah	29.028	28.639	57.667

Sumber: Kecamatan Kalimanah Dalam Angka Tahun 2021



Sumber: Kecamatan Kalimanah Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 3.32.
Piramida Penduduk Kecamatan Kalimanah Tahun 2020

Berdasarkan piramida penduduk di atas, untuk kelompok umur 15-64 tahun mempunyai panjang batang lebih panjang dibanding kelompok umur lainnya. Kondisi ini menjelaskan struktur penduduk usia produktif cenderung lebih besar. Struktur penduduk di usia tidak produktif lebih kecil dibanding kelompok usia produktif.

Penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat dari jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan utama. Jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan utama di Kecamatan Kalimanah meliputi pekerjaan dalam bidang pertanian, pekerjaan dalam bidang industri, pekerjaan dalam bidang perdagangan, dan lainnya. Lapangan perkerjaan utama di Kecamatan Kalimanah tahun 2020 paling banyak adalah karyawan sebanyak 12.808 jiwa. Sedangkan, lapangan pekerjaan dalam bidang kontruksi hanya sebanyak 18 jiwa.

Tabel III.37.
Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kalimanah Tahun 2020

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pensiunan	607	247	854
PNS/ ABRI/ TNI	851	547	1.398
Perdagangan	1.417	1.446	2.863
Pertanian	1.121	594	1.715
Industri	48	84	132
Kontruksi	18	-	18
Buruh	3.942	1.413	5.355
Karyawan	6.803	6.005	12.808
Wiraswasta	1.918	534	2.452
Lainnya	885	611	1.496
Jumlah	17.610	11.481	29.091

Sumber: Kecamatan Kalimanah Dalam Angka Tahun 2021

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kecamatan Kalimanah tahun 2020 paling banyak adalah pada tingkatan SD/ Sederajat sebanyak 13.339 jiwa. Sedangkan, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kecamatan Kalimanah tahun 2020 paling sedikit yaitu pada tingkat pendidikan Strata III sebanyak 4 jiwa.

Tabel III.38.
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kecamatan Kalimanah Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/ Belum Sekolah	5.086	4.698	9.784
Belum Tamat SD/ Sederajat	2.677	2.573	5.250
SD/ Sederajat	6.191	7.148	13.339
SLTP/ Sederajat	5.803	5.622	11.425
SLTA/ Sederajat	6.877	5.863	12.740
Diploma I/ II	114	153	267
Akademi/ Diploma III	433	624	1.057
Diploma IV/ Strata I	1.370	1.456	2.826
Strata II	89	53	142
Strata III	4	-	4

Sumber: Kecamatan Kalimanah Dalam Angka Tahun 2021

Masyarakat Purbalingga adalah pendukung kebudayaan Jawa dan masyarakatnya terbiasa kontak dengan pendukung budaya lain. Oleh karena itu, masyarakatnya relatif terbuka. Artinya, menerima siapa saja yang datang, berusaha, dan bermukim di daerahnya.

Hubungan antar masyarakat Purbalingga masih memiliki karakteristik guyub ditunjukkan apabila warga mengadakan acara, misalnya pernikahan, khitanan, membangun rumah atau ada yang meninggal dunia, maka masyarakat akan berkunjung dan membantu ke tempat warga tersebut. Disamping itu pula terdapat interaksi sosial yang berbentuk kerjasama yaitu kegiatan gotong-royong, bentuk kerjasama ini dapat diwujudkan berupa tenaga, bahan material ataupun uang. Sedangkan gotong-royong dalam bentuk kerja bakti seperti membersihkan lingkungan dan memperbaiki jalan.

Kecamatan Kalimanah memiliki desa wisata budaya yang berada di Desa Karangpetir. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya desa tersebut mengadakan pertunjukan kesenian ebeg (kuda lumping) dan terdapat juga beberapa sanggar seni di Desa Karangpetir.

Permukiman di Kecamatan Kalimanah terdiri dari permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan. Karakteristik permukiman perkotaan lebih modern tersedia sarana prasarana pendukung lebih lengkap. Masyarakat permukiman perkotaan berkegiatan bukan pertanian karena sebagian besar lahan terbangun dan bermata pencaharian dalam bidang industri pengolahan dan jasa. Karakteristik permukiman perdesaan berupa hunian dan lingkungan yang bersifat pedesaan. Masyarakat permukiman perdesaan berkegiatan dalam bidang pertanian, karena masih banyak lahan pertanian.

3.2.3. Kondisi Perekonomian

Sektor perekonomian unggulan di Kecamatan Kalimanah yang dapat mendukung pengembangan Kecamatan Kalimanah berasal dari sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan, sektor perikanan, serta sektor industri. Sektor pertanian paling besar berupa produksi tanaman pangan sebanyak 14.661,85 ton padi sawah. Kecamatan Kalimanah juga memiliki komoditas unggulan sayur-sayuran yang berupa cabai besar, cabai rawit, kacang panjang, dan ketimun.

Sektor perkebunan yang terdapat di Kecamatan Kalimanah meliputi kelapa dengan produksi tahun 2020 sebanyak 175,33 ton. Sektor peternakan yang terdapat di Kecamatan Kalimanah meliputi sapi potong, kuda, kerbau, domba, kambing, ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, itik, itik manila, dan angsa. Sektor perikanan juga menjadi sektor ekonomi unggalan di Kecamatan Kalimanah. Jenis perikanan di Kecamatan Kalimanah berupa perikanan budidaya dengan kolam dan sawah. Jumlah rumah tangga tangga yang mengembangkan perikanan budidaya kolam sebanyak 638 yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kalimanah. Sedangkan, perikanan budidaya di sawah hanya berada di Desa Blater.

Selain itu, sektor industri juga merupakan salah satu sektor ekonomi unggulan yang dapat mendukung pengembangan Kecamatan Kalimanah. Terdapat banyak industri besar maupun sedang di Kecamatan Kalimanah. Industri di Kecamatan Kalimanah hanya terdapat di Desa Grecol, Desa Mewek, Kelurahan Kalikabong, Desa Selabaya, Desa Kalimanah Wetan, dan Desa Babakan. Luas total penggunaan lahan untuk industri di Kecamatan Kalimanah seluas 30,37 Ha dengan luas industri paling besar berada di Kelurahan Kalikabong.

Sektor perekonomian unggulan di Kecamatan Kalimanah ditunjang dengan adanya sarana perekonomian. Sarana perekonomian yang terdapat di Kecamatan Kalimanah tahun 2020 berupa kelompok pertokoan, pasar, minimarket/ swalayan, toko/ warung kelontong/ restoran/ rumah makan, warung/ kedai makanan, dan hotel/ hostel/ motel/ losmen/ wisma. Sarana perekonomian berupa toko/ warung kelontong dan warung/ kedai makanan tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kalimanah. Sedangkan, jumlah sarana perdagangan pasar adalah sebanyak 9 unit.

Tabel III.39.
Sarana Perekonomian di Kecamatan Kalimanah Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Pertokoan	Pasar	Minimarket	Toko	Restoran	Warung	Hotel
1	Jompo	1	-	1	15	-	11	-
2	Rabak	-	1	1	28	-	10	-
3	Blater	-	-	3	25	-	20	-
4	Sidakangen	-	1	-	19	-	13	-
5	Karangpetir	-	1	-	12	-	5	-
6	Grecol	1	-	-	36	-	7	-
7	Mewek	1	-	1	25	-	28	-
8	Karangmanyar	-	-	-	28	-	26	-
9	Kalikabong	3	2	5	102	-	102	1
10	Selabaya	1	-	3	40	3	35	1
11	Kalimanah Wetan	-	-	2	21	-	13	-

No	Desa/Kelurahan	Pertokoan	Pasar	Minimarket	Toko	Restoran	Warung	Hotel
12	Kalimanah Kulon	-	1	-	38	-	6	-
13	Manduraga	-	1	-	8	-	5	-
14	Karangsari	-	2	-	5	-	6	-
15	Kedungwuluh	-	-	1	24	-	8	-
16	Klapasawit	-	-	-	33	-	20	-
17	Babakan	1	-	1	24	3	56	-
Jumlah		8	9	18	483	6	371	2

Sumber: Kecamatan Kalimanah Dalam Angka Tahun 2021

3.2.4. Kondisi Perumahan

3.2.5.1. Sebaran Perumahan

Deliniasi sebaran perumahan didasarkan pada administrasi desa/ kelurahan, sedangkan satuan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang dibatasi oleh batas fisik alam seperti jalan atau sungai.

Tabel III.40.
Sebaran Perumahan di Kecamatan Kalimanah

No	Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)
1	Jompo	36,36
2	Rabak	38,89
3	Blater	64,90
4	Sidakangen	30,32
5	Karangpetir	23,31
6	Grecol	50,46
7	Mewek	32,60
8	Karangmanyar	30,03
9	Kalikabong	64,30
10	Selabaya	34,03
11	Kalimanah Wetan	43,48
12	Kalimanah Kulon	31,24
13	Manduraga	23,65
14	Karangsari	27,30
15	Kedungwuluh	43,74
16	Klapasawit	56,55
17	Babakan	68,06
Jumlah		699,23

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021

Jumlah rumah di Kecamatan Kalimanah sebanyak 6.497 unit rumah. Tipe fungsi rumah di Kecamatan Kalimanah berfungsi sebagai hunian, setengah hunian, dan non hunian. Rumah non hunian berada pada sepanjang jalan kolektor primer Jalan Purbalingga – Banyumas, sedangkan rumah dengan fungsi setengah hunian berada pada pusat-pusat kegiatan kecamatan atau desa dengan bagian depan rumah difungsikan sebagai warung/ toko. Sedangkan, rumah yang berada di sekitar industri sebagian besar difungsikan sebagai kos. Jenis rumah yang terdapat di Kecamatan

Kalimanah berupa rumah komersial, rumah umum bagi MBR, dan rumah swadaya. Bentuk rumah di Kecamatan Kalimanah pada wilayah sekitar perkotaan berupa rumah deret, sedangkan rumah yang berada pada wilayah perdesaan berbentuk rumah tunggal dengan halaman besar dan memiliki keunikan yaitu jendela yang menghadap ke atas.

Tabel III.41.
Jumlah Rumah di Kecamatan Kalimanah Tahun 2020

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Rumah
1	Jompo	266
2	Rabak	366
3	Blater	449
4	Sidakangen	298
5	Karangpetir	173
6	Grecol	463
7	Mewek	261
8	Karangmanyar	273
9	Kalikabong	682
10	Selabaya	455
11	Kalimanah Wetan	401
12	Kalimanah Kulon	258
13	Manduraga	227
14	Karangsari	218
15	Kedungwuluh	385
16	Klapasawit	547
17	Babakan	776
Jumlah		**6.497**

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga, 2020


(a)


(b)



(c)


(d)

(a) Rumah tunggal
(b) Rumah deret
(c) Sebagian non hunian
(d) Non hunian

Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.33.
Perumahan di Kecamatan Kalimanah

3.2.5.2. Sebaran Perumahan Developer

Kebutuhan rumah di Kecamatan Kalimanah akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kebutuhan rumah ini dapat dipenuhi secara swadaya maupun oleh developer/pengembang. Perumahan di Kecamatan Kalimanah tersebar di beberapa wilayah. Seiring dengan peningkatan kebutuhan rumah maka jumlah pengembang perumahan yang ada di Kecamatan Kalimanah juga meningkat. Jumlah perumahan developer yang ada di Kecamatan Kalimanah sebanyak 17 perumahan. Namun, hanya 13 perumahan di Kabupaten Kalimanah yang sudah diserahterimakan aset PSUnya. Berdasarkan perumahan developer yang tergabung di dalam persatuan perusahaan Real Estate Indonesia (REI) sebanyak 8 perumahan developer yang dibangun setelah tahun 2016. Sedangkan, berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga, terdapat 4 perumahan developer. Perumahan developer yang ada di Kecamatan Kalimanah rata-rata memiliki tipe MBR, namun terdapat lebih besar dari tipe 45. Berikut ini merupakan perumahan pengembang di Kecamatan Kalimanah berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.

Tabel III.42.
Perumahan Pengembang di Kecamatan Kalimanah

Desa/ Kelurahan	Nama Perumahan Pengembang	Jumlah Rumah	Luas Total Tanah
Selabaya	Graha Bhayangkara	41	4.200
Kalimanah Wetan	Permata Perwira Kalimanah	131	22.403
Klapasawit	Argo Residence Kalimanah	61	6.374
Babakan	Cluster 88	13	1.855

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga



(a)



(b)

(a) Perumahan Graha Bhayangkara
(b) Perumahan Developer Tipe MBR

Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.34.
Perumahan Pengembang di Kecamatan Kalimanah

3.2.5.3. Kawasan PKP Pada Kawasan Strategis

Kawasan strategis di Kabupaten Purbalingga yaitu kawasan strategis pertumbuhan ekonomi. Namun, sebaran perumahan yang terdapat di Kecamatan Kalimanah tidak termasuk ke dalam kawasan strategis pertumbuhan ekonomi.

3.2.5.4. Kawasan PKP Tidak Sesuai Tata Ruang (*Negative List*)

Rencana pengembangan kawasan permukiman seharusnya tidak berada di wilayah *negative list* dan harus sesuai dengan peruntukan tata ruang dalam RTRW

Kabupaten Purbalingga. Permukiman eksisting di Kecamatan Kalimanah berada pada rencana pola ruang yang telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Purbalingga dan tidak berada pada wilayah *negative list*.

3.2.5.5. Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana

Kecamatan Kalimanah terdapat beberapa perumahan yang berada di daerah rawan bencana. Perumahan yang berada di kawasan rawan bencana gempa bumi, gerakan tanah, dan angin topan. Menurut data BPBD Kabupaten Purbalingga, terdapat penduduk di Kecamatan Kalimanah yang terancam bencana. Hal tersebut karena permukiman berada di kawasan rawan bencana angin topan. Penduduk di Kecamatan Kalimanah yang terancam bencana angin topan sebanyak 14.556 KK.

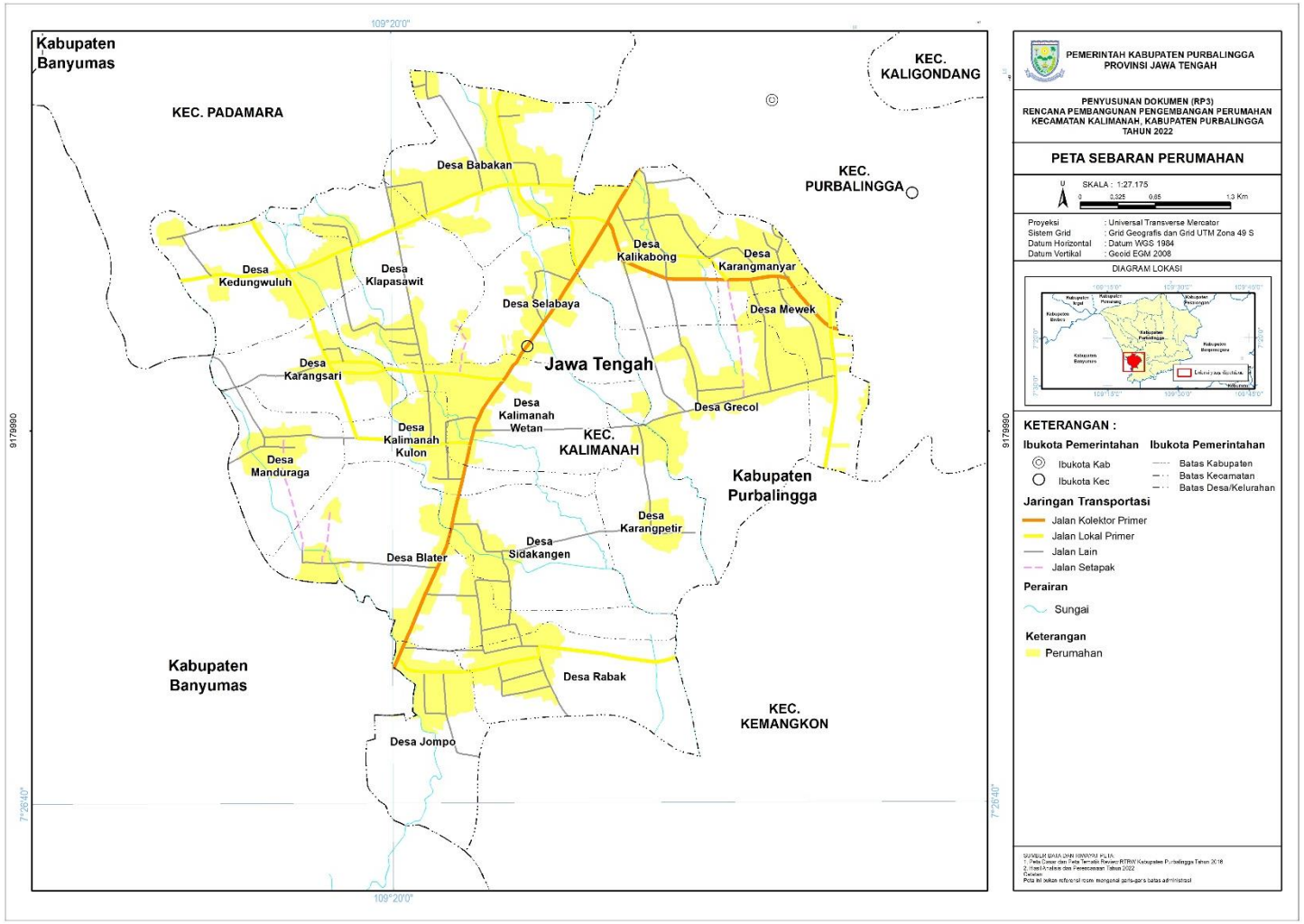
Tabel III.43.
Luas Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana

No	Desa/ Kelurahan	KRB Gempabumi Menengah, Gerakan Tanah Sangat Rendah dan Angin Topan	KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan	KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Sangat Rendah dan Angin Topan
1	Jompo	-	0,01	42,55
2	Rabak	-	-	48,51
3	Blater	-	0,05	109,34
4	Sidakangen	-	-	34,47
5	Karangpetir	-	-	32,10
6	Grecol	-	-	78,08
7	Mewek	3,86	-	63,06
8	Karangmanyar	-	-	47,89
9	Kalikabong	-	-	100,90
10	Selabaya	-	-	86,30
11	Kalimanah Wetan	-	-	97,76
12	Kalimanah Kulon	-	-	42,12
13	Manduraga	-	-	30,03
14	Karangsari	-	-	38,42
15	Kedungwuluh	-	-	57,78
16	Klapasawit	-	-	67,19
17	Babakan	-	-	125,28
Jumlah		3,86	0,06	1.101,79

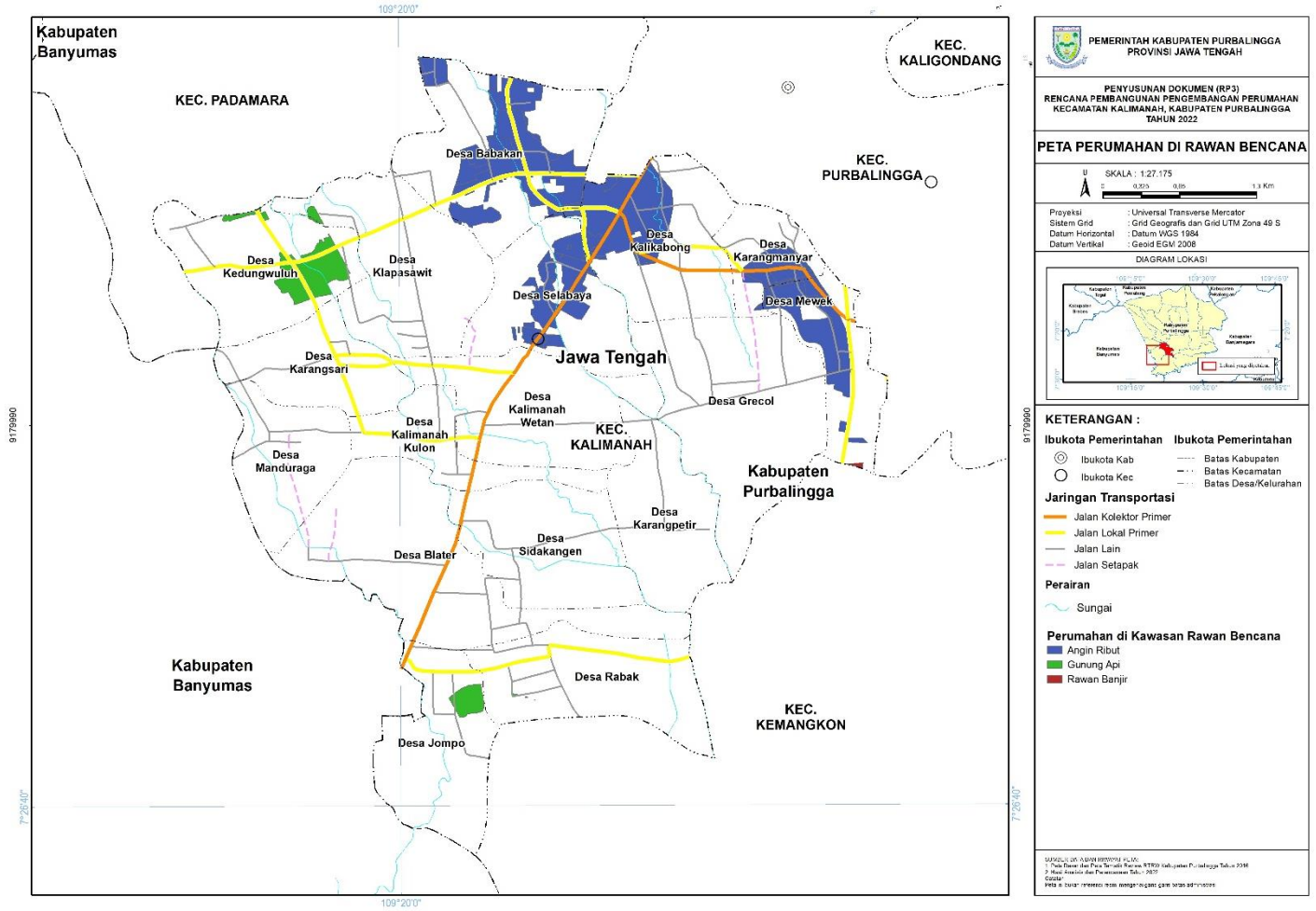
Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021

3.2.5.6. Kawasan PKP Terdampak Program Pembangunan Pemerintah

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan seharusnya tidak berada di wilayah yang terdampak program pembangunan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Perumahan eksisting di seluruh wilayah di Kecamatan Kalimanah tidak berada pada wilayah yang terdampak program pembangunan pemerintah Kabupaten Purbalingga.



Gambar 3.35.
Peta Sebaran Permukiman di Kecamatan Kalimanah



Gambar 3.36.
Peta Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana

3.2.5.7. Jumlah dan Sebaran Kebutuhan Rumah (Backlog)

Kekurangan rumah/ backlog di Kecamatan Kalimanah pada tahun 2020 mencapai 12.882 rumah. Jumlah ini akan bertambah seiring dengan bertambahnya penduduk di Kecamatan Kalimanah. Sebaran backlog di Kecamatan Kalimanah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.44.
Kekurangan Rumah/ Backlog di Kecamatan Kalimanah Tahun 2020

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah KK	Jumlah Rumah	Backlog Tahun 2020	Total Luas Kebutuhan Permukiman (Ha)
1	Jompo	793	266	527	5,76
2	Rabak	1.092	366	726	7,93
3	Blater	1.340	449	891	9,73
4	Sidakangen	889	298	591	6,46
5	Karangpetir	515	173	342	3,74
6	Grecol	1.380	463	917	10,02
7	Mewek	779	261	518	5,66
8	Karangmanyar	814	273	541	5,91
9	Kalikabong	2.033	682	1.351	14,76
10	Selabaya	1.358	455	903	9,86
11	Kalimanah Wetan	1.196	401	795	8,68
12	Kalimanah Kulon	771	258	513	5,60
13	Manduraga	676	227	449	4,91
14	Karangsari	649	218	431	4,71
15	Kedungwuluh	1.148	385	763	8,34
16	Klapasawit	1.632	547	1.085	11,85
17	Babakan	2.314	776	1.538	16,80
Jumlah		19.379	6.497	12.882	140,71

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021

3.2.5.8. Jumlah dan Sebaran Rumah Tidak Layah Huni (RTLH)

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Kalimanah tahun 2020 adalah sebesar 1.995 unit. Sedangkan, RTLH yang berada di kawasan kumuh sebanyak 223 unit. Jumlah sebaran RTLH di Kecamatan Kalimanah diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel III.45.
Sebaran Jumlah RTLH di Kecamatan Kalimanah Tahun 2020

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah RTLH	RTLH di Kawasan Kumuh
1	Jompo	104	-
2	Rabak	101	-
3	Blater	153	-
4	Sidakangen	118	-
5	Karangpetir	100	-
6	Grecol	141	39
7	Mewek	53	26
8	Karangmanyar	42	10
9	Kalikabong	227	53
10	Selabaya	65	19

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah RTLH	RTLH di Kawasan Kumuh
11	Kalimanah Wetan	98	-
12	Kalimanah Kulon	70	-
13	Manduraga	55	-
14	Karangsari	59	-
15	Kedungwuluh	138	-
16	Klapasawit	182	-
17	Babakan	289	76
Jumlah		1.995	223

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purbalingga

3.2.5.9. Kepadatan Bangunan Rumah

Kepadatan bangunan di Kecamatan Kalimanah tahun 2020 yaitu sebesar 9,29 rumah/Ha dengan jumlah rumah sebanyak 6.497 rumah dan luas wilayah hanya 699,23 Ha. Kepadatan bangunan di Kecamatan Kalimanah terbesar terdapat pada Desa Selabaya yaitu sebesar 13,38 rumah/Ha. Kepadatan bangunan terbesar selanjutnya terdapat pada Desa Babakan dengan kepadatan bangunan sebesar 11,4 rumah/Ha. Sedangkan, kepadatan bangunan terkecil terdapat pada Desa Jompo dengan kepadatan bangunan sebesar 7,31 rumah/Ha. Secara rinci kepadatan bangunan di Kecamatan Kalimanah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.46.
Kepadatan Bangunan di Kecamatan Kalimanah

No	Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)	Jumlah Rumah	Kepadatan Bangunan (Rumah/ Ha)
1	Jompo	36,36	266	7,31
2	Rabak	38,89	366	9,41
3	Blater	64,90	449	6,92
4	Sidakangen	30,32	298	9,83
5	Karangpetir	23,31	173	7,41
6	Grecol	50,46	463	9,17
7	Mewek	32,60	261	8,01
8	Karangmanyar	30,03	273	9,09
9	Kalikabong	64,30	682	10,60
10	Selabaya	34,03	455	13,38
11	Kalimanah Wetan	43,48	401	9,22
12	Kalimanah Kulon	31,24	258	8,28
13	Manduraga	23,65	227	9,58
14	Karangsari	27,30	218	7,97
15	Kedungwuluh	43,74	385	8,80
16	Klapasawit	56,55	547	9,68
17	Babakan	68,06	776	11,40
Jumlah		699,23	6.497	9,29

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021

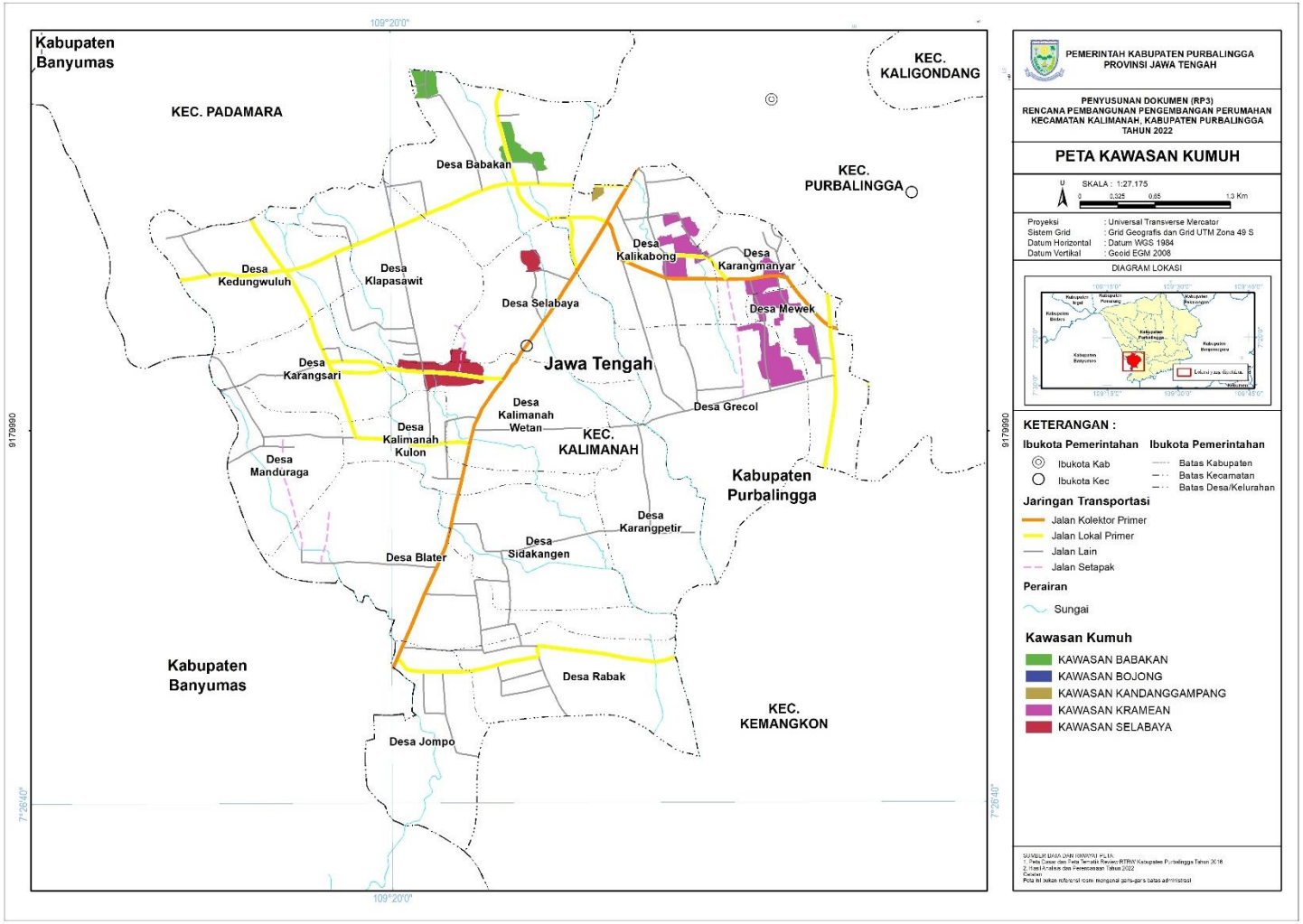
3.2.5.10. Sebaran Kawasan Kumuh

Karakteristik kawasan kumuh dibedakan menjadi 4 kategori kewenangan penangan, yaitu kawasan kumuh kewenangan pusat, kawasan kumuh kewenangan provinsi, dan kawasan kumuh kewenangan kabupaten. Kawasan kumuh di Kecamatan Kalimanah tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga No 640/212 Tahun 2021 berada di 5 kawasan dengan total luasan permukiman yaitu seluas 68,83 Ha. Kawasan yang merupakan permukiman kumuh berada di Babakan, Bojong, Kandang Gampang, Keramean, dan Selabaya.

Tabel III.47.
Sebaran Kawasan Kumuh di Kecamatan Kalimanah

No	Kawasan Kumuh	Luas (Ha)
1	Kawasan Babakan	11,59
2	Kawasan Bojong	0,01
3	Kawasan Kandang Gampang	1,12
4	Kawasan Kramean	39,82
5	Kawasan Selabaya	16,29
Jumlah		68,83

Sumber: Keputusan Bupati Purbalingga No 640/212 Tahun 2021



Gambar 3.37.
Peta Sebaran Lokasi Permukiman Kumuh di Kecamatan Kalimanah

3.2.5. Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan

3.2.6.1. Kondisi Prasarana

Jaringan prasarana yang terdapat di Kecamatan Kalimanah meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan penyediaan air minum, jaringan pengelolaan persampahan, serta jaringan air limbah. Jaringan jalan yang terdapat di seluruh desa/ kelurahan di Kecamatan Kalimanah telah menggunakan jenis permukaan jalan berupa aspal/ beton dan dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Selain itu, di Kecamatan Kalimanah terdapat sarana transportasi berupa terminal bus yang berada di Kelurahan Kalikabong.

Jaringan drainase di Kecamatan Kalimanah terdiri dari jaringan drainase primer berupa sungai, drainase sekunder berupa drainase di jalan utama, dan jaringan drainase tersier di lingkungan permukiman. Jaringan drainase di Kecamatan Kalimanah berupa drainase terbuka dan drainase tertutup. Jaringan drainase di Kecamatan Kalimanah di beberapa wilayah sudah berfungsi optimal.

Kebutuhan air bersih di Kecamatan Kalimanah dilayani oleh PDAM menggunakan ledeng dengan meteran dan sumur. Seluruh wilayah menggunakan PDAM, namun beberapa rumah tangga masih menggunakan sumur sebagai alternatif saat terjadi pemadaman listrik. Kondisi air bersih di Kecamatan Kalimanah lancar dan baik.

Jaringan persampahan di Kecamatan Kalimanah sebagian sudah terlayani jaringan pengangkutan sampah dengan pembuangan akhir ke TPA Kalipancur di Kecamatan Pengadegan. Sebelum sampah diangkut ke TPA terdapat tempat pembuangan sementara (TPS) dan TPS 3R. TPS yang terdapat di Kecamatan Kalimanah sebanyak 9 unit yang berlokasi di Mewek, PT Nina, Blater, Gedung KOPRI, YPT 1 Purbalingga, YPT 2 Purbalingga, SMP Negeri 1 Kalimanah, PT RSE, dan PT Tiga Putra. Sampah pada daerah perkotaan Kecamatan Kalimanah diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup menggunakan drum truck setiap 2 kali dalam seminggu. Sedangkan, TPS 3R di Kecamatan Kalimanah sebanyak 1 unit yang berada di Desa Babakan. Selain itu, di Kecamatan Kalimanah juga terdapat bank sampah sebanyak 10 unit.

Tabel III.48.
Bank Sampah di Kecamatan Kalimanah

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Keterangan
1	Bank Sampah Bestari	Desa Selabaya	Aktif
2	Bank Sampah Anindya Guna	SMP Negeri 1 Kalimanah	Aktif
3	Bank Sampah Jatibersih	Desa Kalimanah Wetan	Aktif
4	Bank Sampah Migunani	Desa Babakan	Aktif
5	Bank Sampah Ngangeni	Desa Sidakangen	Aktif
6	Bank Sampah Bestari Indah	Desa Selabaya RW 5	Aktif
7	Bank Sampah Bestari Jaya	Desa Selabaya RW 1	Aktif
8	Bank Sampah Bestari Makmur	Desa Selabaya RW 4	Aktif
9	Bank Sampah Bestari Sadar	Desa Selabaya RW 6	Aktif
10	Bank Sampah Emut Bestari	Desa Selabaya RW 3	Aktif

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang mengelola sampah dengan dibakar bahkan terdapat masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase, tegalan, atau sungai. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya serta perluasan jangkauan pelayanan pengangkutan sampah baik dari pemerintah maupun secara swadaya.

Sistem jaringan sanitasi di Kecamatan Kalimanah berupa air limbah domestik yang dibuang dari permukiman, pada umumnya tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu sehingga berdampak pada penurunan kualitas air pada perairan di wilayah Kecamatan Kalimanah. Penurunan kualitas air dapat berdampak pada penurunan kualitas air permukaan maupun air tanah. Oleh karena itu maka pengelolaan air limbah yang terpadu sangat perlu dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir dampak yang dapat ditimbulkan. Seluruh keluarga di seluruh wilayah Kecamatan Kalimanah sudah menggunakan jamban sendiri untuk fasilitas tempat buang air besar. Kecamatan Kalimanah terdapat IPAL komunal di Kelurahan Kalikabong yang melayani sebanyak kurang lebih 50 rumah tangga di RT 1. Akan tetapi, masih terdapat rumah tangga yang mengalirkan limbah domestik ke sungai atau ke drainase.



(a)



(b)



(c)



(d)

(a) Jaringan jalan
(b) Pengolahan sampah dengan dibakar
(c) TPS 3R
(d) IPAL Komunal

Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.38.
Prasarana di Kecamatan Kalimanah

3.2.6.2. Kondisi Sarana

Sarana yang terdapat di Kecamatan Kalimanah meiputi sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana kebudayaan dan rekreasi, serta sarana ruang terbuka hijau.

Sarana pemerintahan yang terdapat di Kecamatan Kalimanah berupa balai desa, balai kelurahan, kantor desa, dan kantor kelurahan. Jumlah kelurahan di Kecamatan Kalimanah berjumlah 3 kelurahan, sedangan sisanya adalah desa.

Sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Kalimanah terdiri dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD) sederajat, sekolah menengah pertama (SMP) sederajat, sekolah menengah akhir (SMA) sederajat, dan perguruan tinggi. Sarana pendidikan TK dan SD tersebar di seluruh desa/ kelurahan di Kecamatan Kalimanah. Sarana pendidikan perguruan tinggi yang berjumlah 1 unit berada di Desa Blater.

Tabel III.49.
Sarana Pendidikan di Kecamatan Kalimanah Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	TK	SD/ MI	SMP/ MTs	SMA/ SMK/ MA	Perguruan Tinggi
1	Jompo	1	2	-	-	-
2	Rabak	2	3	-	-	-
3	Blater	2	3	-	-	1
4	Sidakangen	2	1	-	-	-
5	Karangpetir	1	1	-	-	-
6	Grecol	1	3	-	-	-
7	Mewek	1	1	-	-	-
8	Karangmanyar	1	1	-	-	-
9	Kalikabong	2	3	1	-	-
10	Selabaya	1	2	1	4	-
11	Kalimanah Wetan	2	3	1	1	-
12	Kalimanah Kulon	1	1	-	-	-
13	Manduraga	1	1	-	-	-
14	Karangsari	2	2	-	-	-
15	Kedungwuluh	1	1	1	-	-
16	Klapasawit	1	2	-	-	-
17	Babakan	3	3	-	-	-
Jumlah		25	33	4	5	1

Sumber: Kecamatan Kalimanah Dalam Angka Tahun 2021

Sarana peribadatan yang terdapat di Kecamatan Kalimanah meliputi masjid, mushola, dan gereja. Sarana peribadatan masjid dan mushola tersebar di seluruh desa/ kelurahan di Kecamatan Kalimanah dengan jumlah sebanyak 66 masjid dan 184 mushola. Sarana peribadatan gereja hanya terdapat di Kelurahan Kalikabong dan Desa Blater.

Tabel III.50.
Sarana Peribadatan di Kecamatan Kalimanah Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Masjid	Musholla	Gereja
1	Jompo	2	11	-
2	Rabak	2	13	-
3	Blater	5	19	1
4	Sidakangen	5	5	-

No	Desa/Kelurahan	Masjid	Musholla	Gereja
5	Karangpetir	3	3	-
6	Grecol	3	18	-
7	Mewek	3	7	-
8	Karangmanyar	3	5	-
9	Kalikabong	5	16	1
10	Selabaya	8	12	-
11	Kalimanah Wetan	2	17	-
12	Kalimanah Kulon	5	6	-
13	Manduraga	1	7	-
14	Karangsari	2	7	-
15	Kedungwuluh	6	5	-
16	Klapasawit	5	12	-
17	Babakan	6	21	-
Jumlah		66	184	2

Sumber: Kecamatan Kalimanah Dalam Angka Tahun 2021

Sarana kesehatan di Kecamatan Kalimanah cukup lengkap yang terdiri atas rumah sakit, poliklinik/ balai pengobatan, puskesmas, apotek, pustu, praktik dokter/ bidan, PKD, dan posyandu. Sarana kesehatan rumah sakit di Kecamatan Kalimanah sebanyak 3 unit yang berada di Kelurahan Karangmanyar, Kelurahan Kalikabong, dan Desa Babakan. Sarana kesehatan posyandu di Kecamatan Kalimanah tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kalimanah. Sementara, sarana kesehatan puskesmas hanya berada di Desa Kalimanah Wetan. Berikut ini merupakan jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Kalimanah tahun 2020.

Tabel III.51.
Sarana Kesehatan di Kecamatan Kalimanah Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Apotek	Pustu	Praktik Dokter/ Bidan	PKD	Posyandu
1	Jompo	-	-	-	-	-	2	1	5
2	Rabak	-	-	-	-	1	-	1	6
3	Blater	-	-	-	1	-	2	1	4
4	Sidakangen	-	-	-	-	-	-	1	3
5	Karangpetir	-	-	-	-	-	-	1	3
6	Grecol	-	-	-	-	-	2	1	5
7	Mewek	-	-	-	1	1	2	-	2
8	Karangmanyar	1	-	-	-	-	1	1	3
9	Kalikabong	1	3	-	4	-	5	1	5
10	Selabaya	-	1	-	-	-	3	1	4
11	Kalimanah Wetan	-	1	1	2	-	4	-	7
12	Kalimanah Kulon	-	-	-	-	-	1	1	5
13	Manduraga	-	-	-	-	-	-	1	4
14	Karangsari	-	-	-	-	-	1	1	5
15	Kedungwuluh	-	-	-	-	-	1	1	4
16	Klapasawit	-	-	-	-	-	3	1	5
17	Babakan	1	-	-	1	1	1	-	8
Jumlah		3	5	1	9	3	28	14	78

Sumber: Kecamatan Kalimanah Dalam Angka Tahun 2021

Kebudayaan di Kecamatan Kalimanah beraneka ragam, meliputi ujungan, suran, begalan, angguk, aplang/ dames, calung, ebeg/ kuda lumping, lengger, dan lainnya. Kebudayaan tersebut di dukung oleh beberapa organisasi kesenian yang terdapat di Kecamatan Kalimanah. Kecamatan Kalimanah juga memiliki desa wisata budaya yang berada di Desa Karangpetir. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya desa tersebut mengadakan pertunjukan kesenian dan terdapat juga beberapa sanggar seni di Desa Karangpetir. Selain itu, Kecamatan Kalimanah memiliki bangunan/ situs cagar budaya yaitu SMA Santo Agustinus.

Sarana ruang terbuka hijau yang terdapat di Kecamatan Kalimanah meliputi ruang terbuka hijau perkotaan, ruang terbuka hijau jalur hijau jalan, dan ruang terbuka hijau fungsi tertentu. Ruang terbuka hijau perkotaan di Kecamatan Kalimanah berupa taman kota, hutan kota, dan taman lingkungan. Berikut ini merupakan ruang terbuka hijau perkotaan di Kecamatan Kalimanah.

Tabel III.52.
Ruang Terbuka Hijau Perkotaan di Kecamatan Kalimanah

No	Nama Taman	Jenis RTH	Lokasi
1	Taman Jompo	Taman Kota	Desa Jompo
2	Hutan Kota Wasesa	Hutan Kota	Kelurahan Kalikabong
3	Hutan Kota Segamas	Hutan Kota	Kelurahan Kalikabong
4	Taman Perum Puri Babakan	Taman Lingkungan	Desa Babakan
5	Taman RT 2 RW 7 Selabaya	Taman Lingkungan	Desa Selabaya

Sumber: Kecamatan Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021

Ruang terbuka hijau fungsi tertentu di Kecamatan Kalimanah berupa failitas/ lapangan olahraga terdiri dari lapangan sepak bola, lapangan bola voli, lapangan bulu tangkis, fasilitas tenis meja, lapangan futsal, fasilitas renang, dan pusat kebugaran. Berikut ini merupakan jumlah dan kondisi fasilitas/ lapangan olahraga di Kecamatan Kalimanah.

Tabel III.53.
Jumlah dan Kondisi Lapangan Olahraga di Kecamatan Kalimanah

Fasilitas/ Lapangan Olahraga	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Parah
Sepak bola	14	3
Bola voli	10	1
Bulu tangkis	11	2
Tenis meja	15	-
Futsal	2	-
Renang	1	-
Pusat kebugaran	1	-

Sumber: Kecamatan Kalimanah Dalam Angka Tahun 2021



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)

(a) Kantor Kelurahan Kalikabong
(b) Masjid Manarul Ilmi
(c) RSU Harapan Ibu
(d) Pasar Segamas Purbalingga
(e) Bangunan Cagar Budaya SMA Santo Agustinus
(f) Desa Wisata Karangpetir

Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.39.
Sarana di Kecamatan Kalimanah

3.2.6.3. Kondisi Utilias

Jaringan utlitas yang terdapat di Kecamatan Kalimanah meliputi jaringan energi dan kelistrikan serta jaringan telekomunikasi.

Jaringan energi dan kelistrikan di Kecamatan Kalimanah mempunyai sumber energi listrik utama dari PLN. Jangkauan pelayanan listrik oleh PLN sudah menjangkau di seluruh desa/ kelurahan se-Kecamatan Kalimanah. Jumlah pelanggan listrik di Kecamatan Kalimanah sebanyak 19.627 pelanggan pada tahun 2020. Sedangkan, untuk fasilitas umum, seperti lampu jalan di Kecamatan Kalimanah menggunakan panel surya.

Tabel III.54.
Jumlah Pelanggan Listrik di Kecamatan Kalimanah Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Pengguna PLN
1	Jompo	805
2	Rabak	1.132
3	Blater	1.368
4	Sidakangen	886
5	Karangpetir	503
6	Grecol	1.375
7	Mewek	775
8	Karangmanyar	842
9	Kalikabong	2.087
10	Selabaya	1.360
11	Kalimanah Wetan	1.227
12	Kalimanah Kulon	796
13	Manduraga	683
14	Karangsari	651
15	Kedungwuluh	1.162
16	Klapasawit	1.620
17	Babakan	2.355
Jumlah		19.627

Sumber: Kecamatan Kalimanah Dalam Angka Tahun 2021

Jaringan telekomunikasi merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi kelancaran informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, keberadaan jaringan telepon di kawasan perencanaan sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas masyarakat. Kebutuhan telekomunikasi masyarakat saat ini dipenuhi dengan adanya jaringan non kabel yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kalimanah.

Tabel III.55.
Jumlah Menara Telekomunikasi dan Kondisi Sinyal Telepon Seluler di Kecamatan Kalimanah

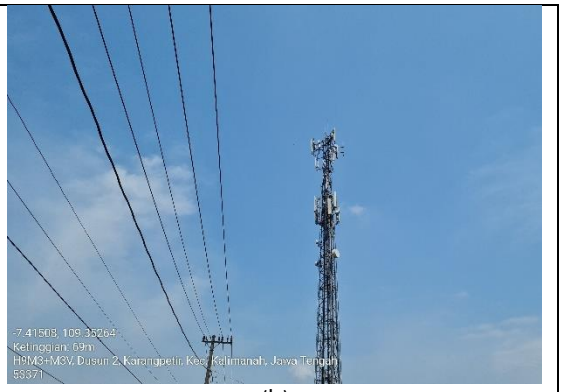
No	Desa/Kelurahan	Jumlah BTS	Kondisi Sinyal Telepon Seluler
1	Jompo	6	Kuat
2	Rabak	6	Kuat
3	Blater	5	Kuat
4	Sidakangen	6	Kuat
5	Karangpetir	6	Kuat
6	Grecol	6	Kuat
7	Mewek	6	Kuat
8	Karangmanyar	5	Kuat
9	Kalikabong	5	Kuat
10	Selabaya	6	Kuat
11	Kalimanah Wetan	5	Kuat
12	Kalimanah Kulon	5	Kuat

No	Desa/Kelurahan	Jumlah BTS	Kondisi Sinyal Telepon Seluler
13	Manduraga	6	Kuat
14	Karangsari	5	Kuat
15	Kedungwuluh	4	Kuat
16	Klapasawit	5	Kuat
17	Babakan	6	Kuat

Sumber: Kecamatan Kalimanah Dalam Angka Tahun 2021



(a)



(b)

(a) Trafo listrik
(b) BTS

Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.40.
Utilitas di Kecamatan Kalimanah

3.3. Kecamatan Padamara

3.3.1. Kondisi Fisik Kawasan

Kecamatan Padamara merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Batas wilayah Kecamatan Padamara secara administratif dapat diuraikan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Kutasari

Sebelah Timur : Kecamatan Purbalingga

Sebelah Selatan : Kecamatan Kalimanah

Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas

Wilayah Kecamatan Padamara terbagi dalam 14 desa dengan luas wilayah 1.912,7 Ha atau 2,37% dari luas wilayah Kabupaten Purbalingga. Desa dengan wilayah terluas adalah Desa Gemuruh seluas 233,21 Ha. Sedangkan luas wilayah terkecil adalah Desa Kalitinggar dengan luas 66,67 Ha. Berikut ini merupakan luas wilayah dan peta administrasi Kecamatan Padamara.

Tabel III.56.
Luas Wilayah Kecamatan Padamara

No	Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)
1	Karangpule	145,24
2	Kalitinggar	121,58

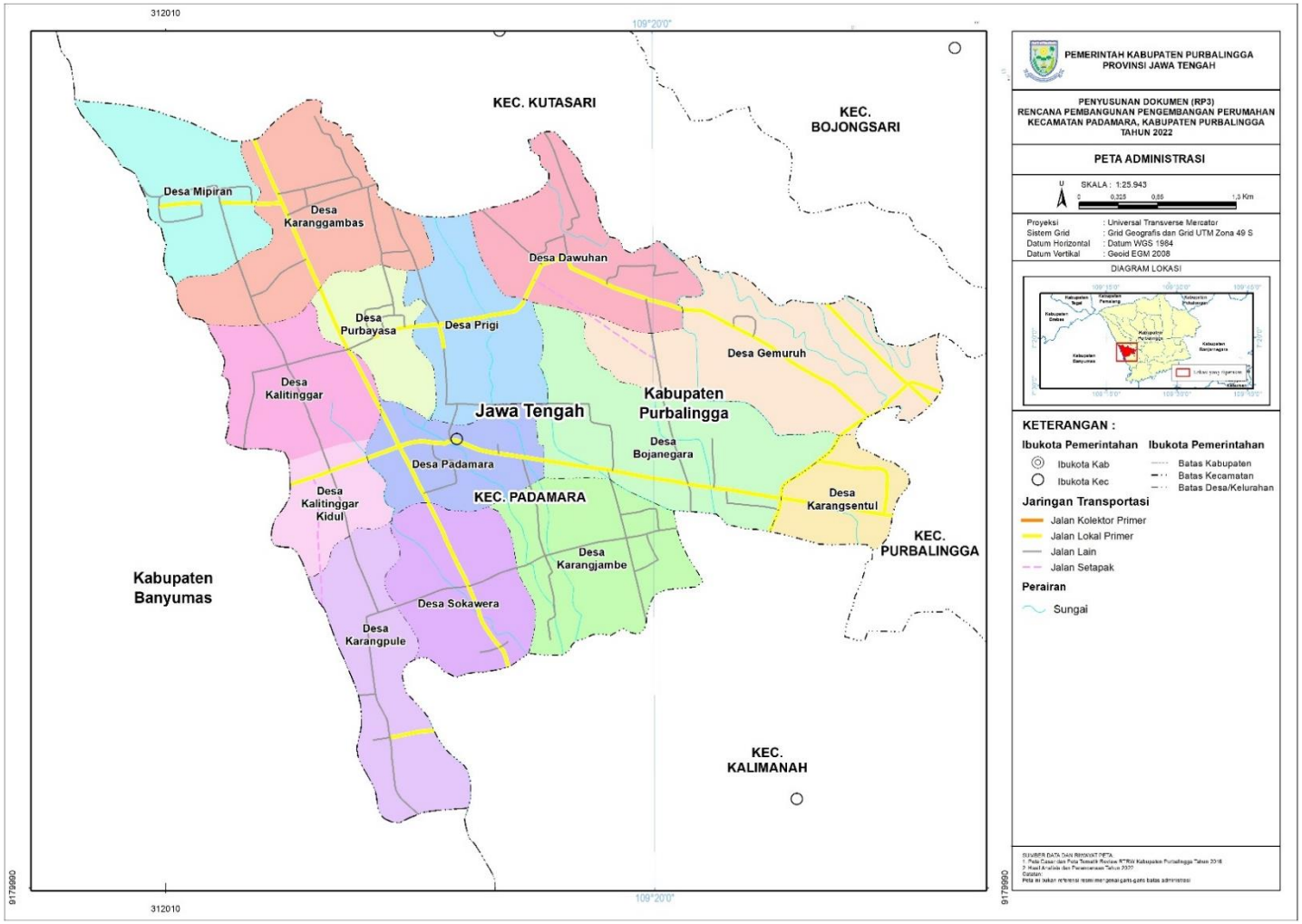
No	Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)
3	Sokawera	133,40
4	Padamara	103,51
5	Karangjambe	161,36
6	Bojanegara	215,01
7	Karangsentul	68,79
8	Gemuruh	233,21
9	Dawuhan	151,25
10	Prigi	126,98
11	Purbayasa	74,18
12	Karanggambas	187,51
13	Mipiran	124,00
14	Kalitinggar Kidul	66,67
Jumlah		1.912,70

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020

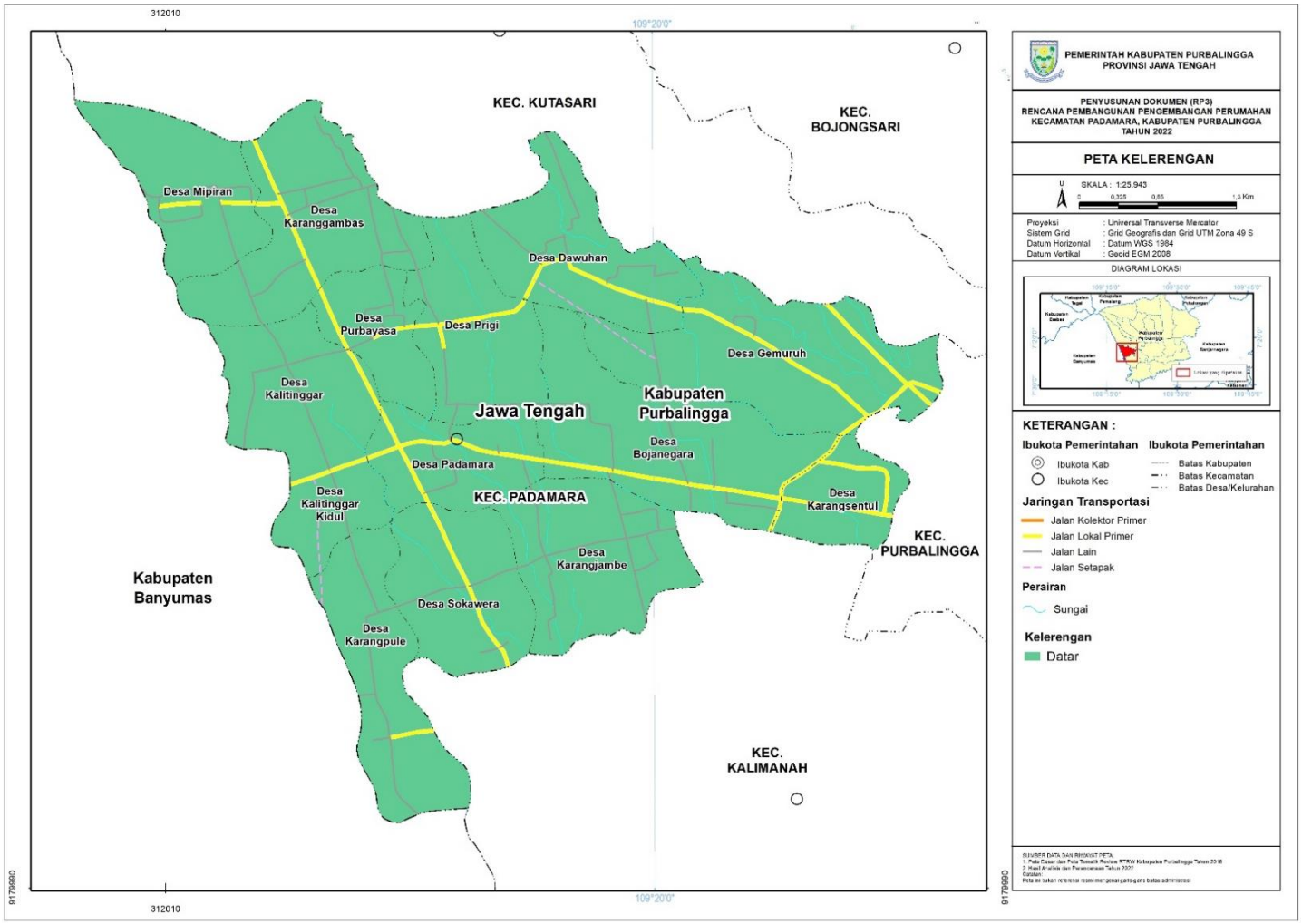
Wilayah Kecamatan Padamara memiliki ketinggian tempat antara 78 meter – 194 meter dari permukaan laut. Menurut klasifikasi ketinggian wilayah Kecamatan Padamara termasuk dataran rendah dengan tingkat kemiringan berkisar antara 0 - 8%. Peta topografi wilayah Kecamatan Padamara dapat dilihat pada Gambar 3.40.

Jenis tanah yang ada di Kecamatan Padamara dikategorikan menjadi 1 jenis berupa latosol coklat tua kemerahan. Peta jenis tanah wilayah Kecamatan Padamara dapat dilihat pada Gambar 3.41.

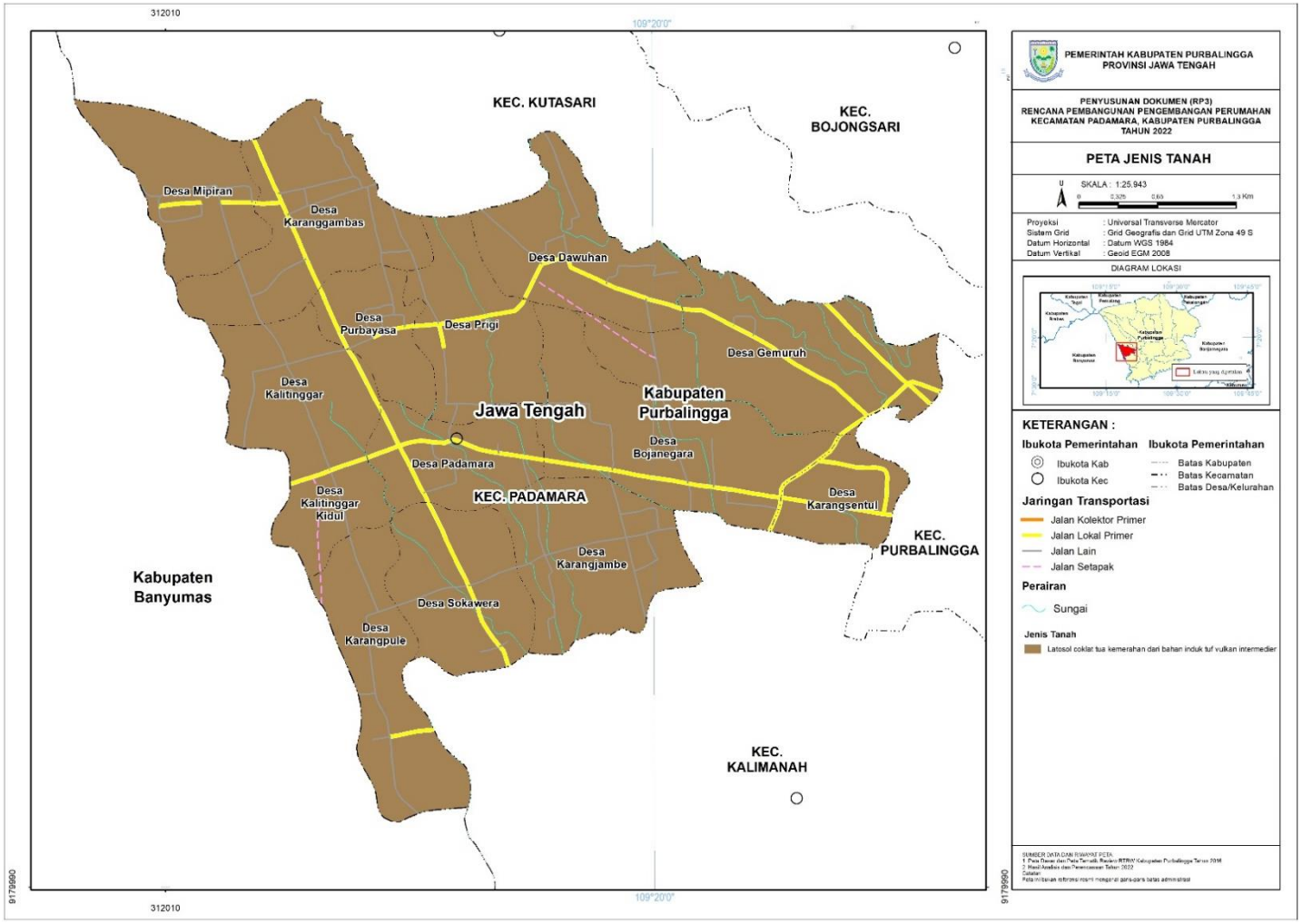
Komposisi litologi batuan yang terdapat di Kecamatan Padamara berupa alluvium endapan gunung api, yang terdiri dari bahan-bahan tak mengeras, mengandung bongkah-bongkah batuan gunung api, bergaris tengah 10 – 15 cm, tersusun oleh andesit sampai basalt dengan kelulusan terhadap air rendah sampai tinggi. Peta geologi wilayah Kecamatan Padamara dapat dilihat pada Gambar 3.42.



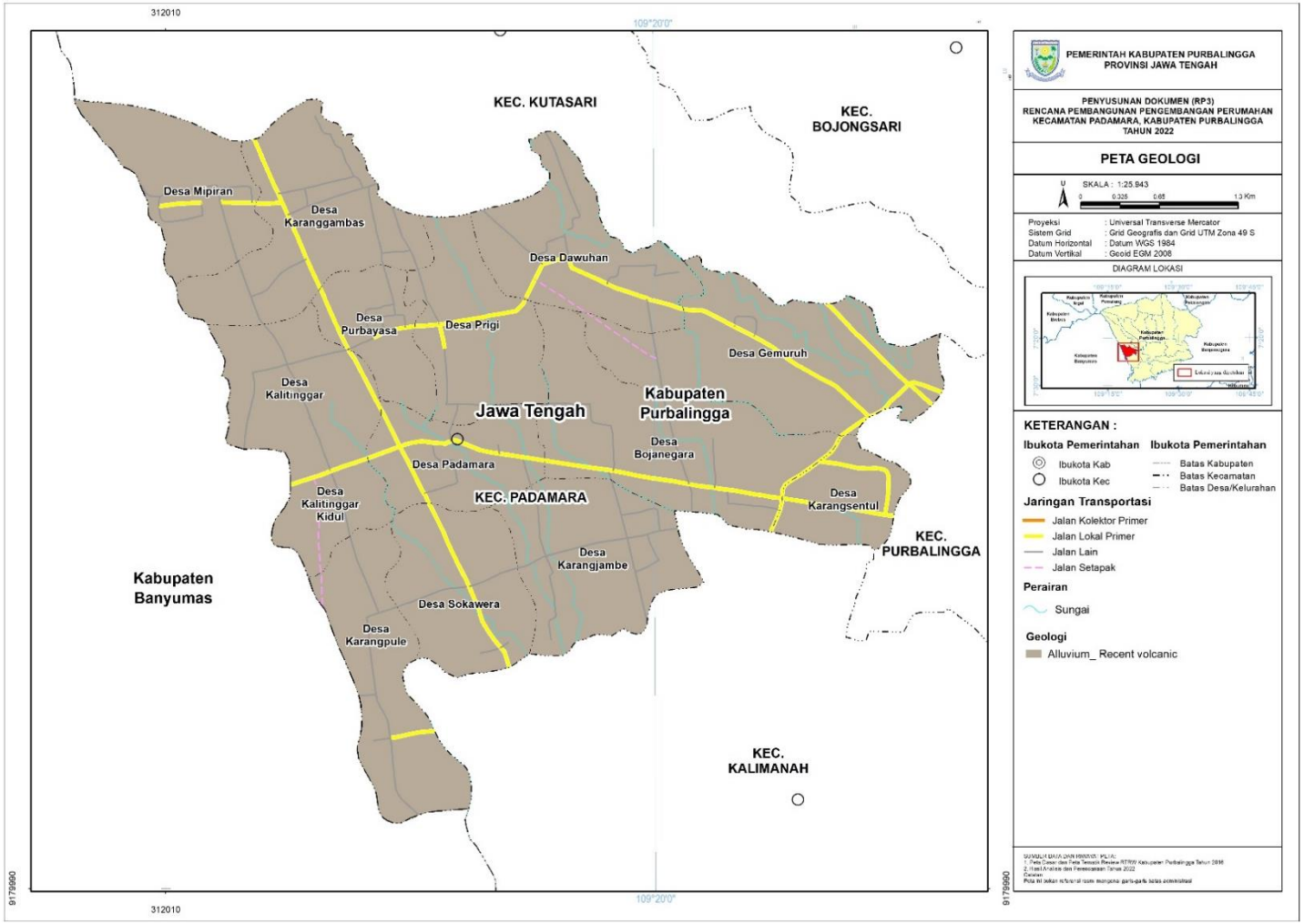
Gambar 3.41.
Peta Administrasi Kecamatan Padamara



Gambar 3.42.
Peta Topografi Kecamatan Padamara



Gambar 3.43.
Peta Jenis Tanah Kecamatan Padamara



Gambar 3.44.
Peta Geologi Kecamatan Padamara

Hidrogeologi yang ada di wilayah Kecamatan Padamara berupa akuifer produktivitas tinggi dengan penyebaran luas. Peta hidrogeologi wilayah Kecamatan Padamara dapat dilihat pada Gambar 3.43.

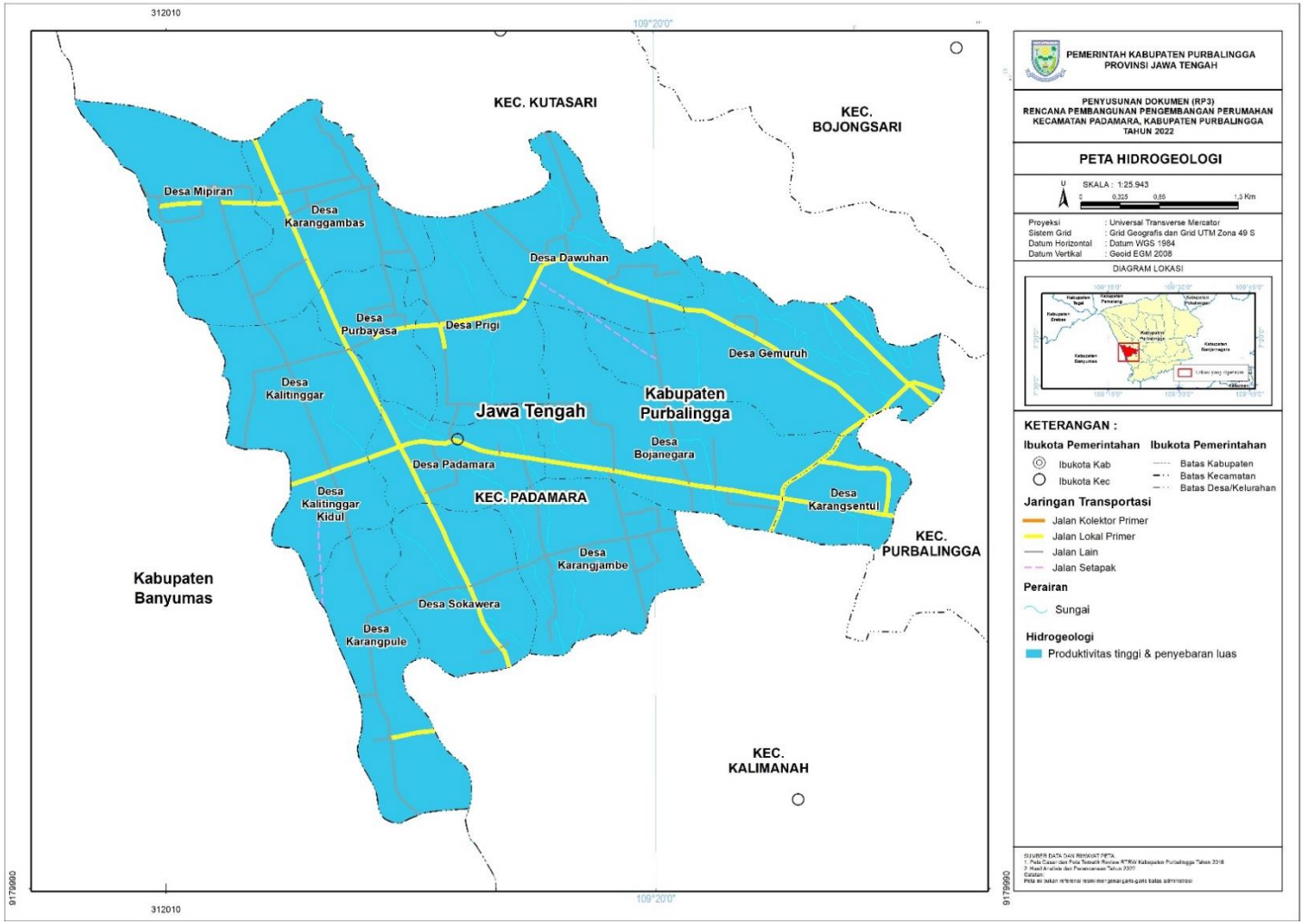
Kecamatan Padamara termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu dengan Sub DAS Klawing dan Sub DAS Serayu Hilir. Mayoritas wilayah di Kecamatan Padamara termasuk dalam Sub DAS Serayu Hilir dengan luas 1.508,16 Ha. Sedangkan wilayah Kecamatan Padamara yang masuk dalam Sub DAS Klawing seluas 404,53 Ha. DAS di Kecamatan Padamara dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.44.

Tabel III.57.
DAS di Kecamatan Padamara

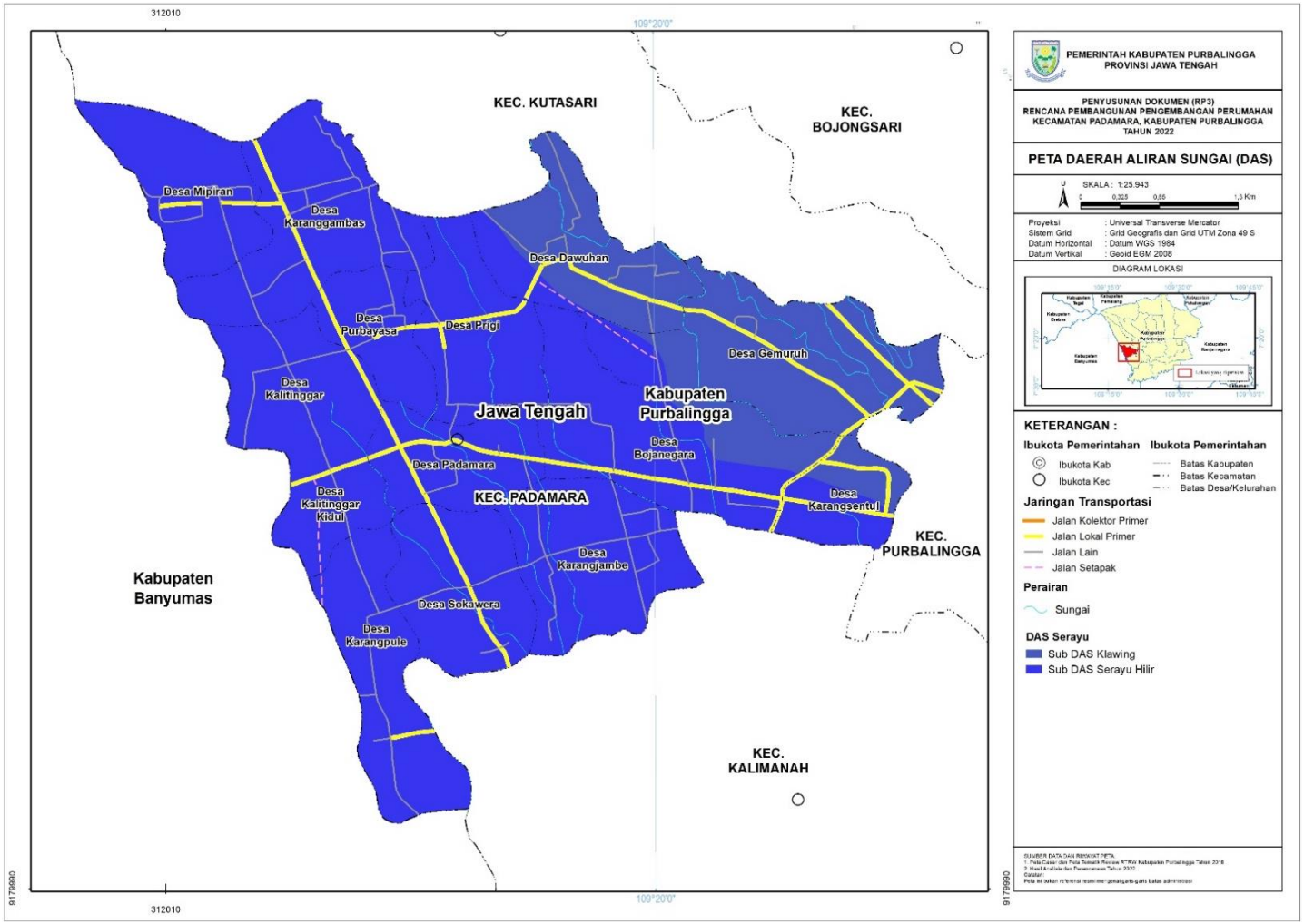
No	Desa/ Kelurahan	DAS Serayu	
		Sub DAS Klawing	Sub DAS Serayu Hilir
1	Karangpule	-	145,24
2	Kalitinggar	-	121,58
3	Sokawera	-	133,40
4	Padamara	-	103,51
5	Karangjambe	-	161,36
6	Bojanegara	44,06	170,96
7	Karangsentul	27,54	41,26
8	Gemuruh	207,62	25,60
9	Dawuhan	125,32	25,92
10	Prigi	-	126,98
11	Purbayasa	-	74,18
12	Karanggambas	-	187,51
13	Mipiran	-	124,00
14	Kalitinggar Kidul	-	66,67
Jumlah		404,53	1.508,16

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020

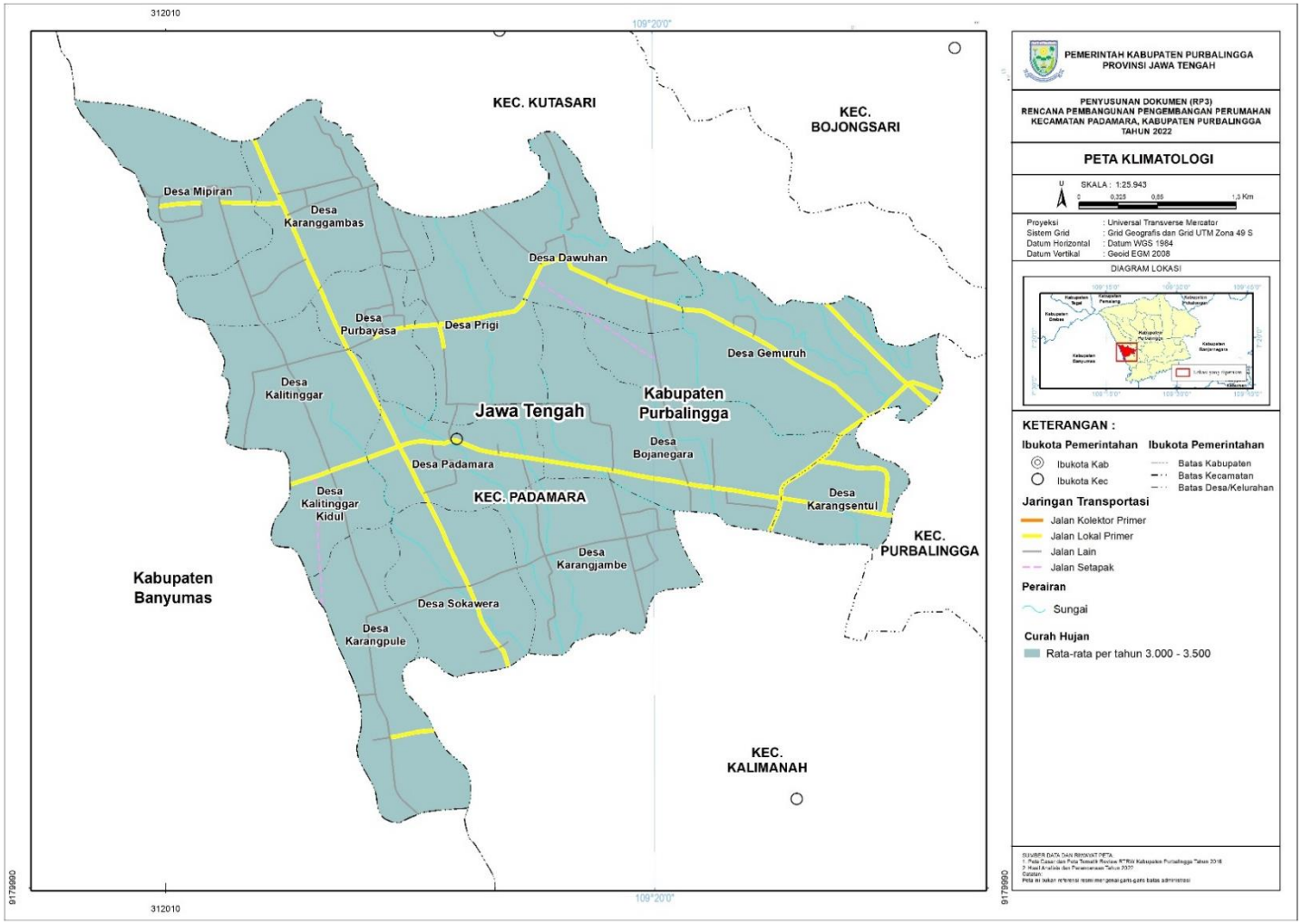
Klimatologi dapat dilihat berdasarkan rata-rata curah hujan per tahun. Curah hujan sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan letak tempat itu sendiri. Tidak terkecuali untuk wilayah Kecamatan Padamara yang memiliki iklim tropis yang relatif basah dengan curah hujan rata-rata per tahun sebesar 3.000 – 3.500 mm. Peta Klimatologi Kecamatan Padamara dapat dilihat pada Gambar 3.45.



Gambar 3.45.
Peta Hidrogeologi Kecamatan Padamara



Gambar 3.46.
Peta DAS Kecamatan Padamara



Gambar 3.47.
Peta Klimatologi Kecamatan Padamara

Potensi rawan bencana yang ada di Kecamatan Padamara meliputi rawan bencana angin ribut dan rawan gunung api. Seluruh wilayah di Kecamatan Padamara termasuk dalam wilayah rawan bencana. Sebaran rawan bencana di Kecamatan Padamara dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.47.

Tabel III.58.
Rawan Bencana di Kecamatan Padamara

No	Desa/ Kelurahan	Rawan Bencana	
		Angin Ribut	Gunung Api
1	Karangpule	-	1,53
2	Kalitinggar	-	73,87
3	Sokawera	-	102,06
4	Padamara	0,27	46,88
5	Karangjambe	1,80	5,30
6	Bojanegara	208,61	-
7	Karangsentul	17,25	-
8	Gemuruh	11,11	-
9	Dawuhan	2,41	-
10	Prigi	4,85	-
11	Purbayasa	50,88	21,26
12	Karanggambas	5,15	46,66
13	Mipiran	-	96,84
14	Kalitinggar Kidul	-	16,36
Jumlah		302,33	410,76

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020

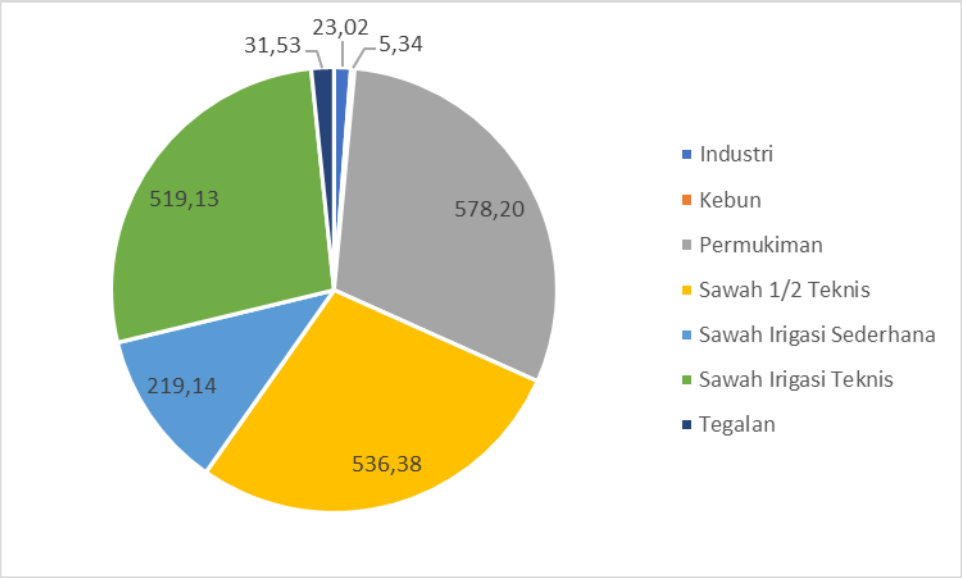
Penggunaan lahan di Kecamatan Padamara tahun 2020 berupa lahan industri, kebun, permukiman, lahan sawah setengah teknis, sawah irigasi sederhana, sawah irigasi teknis, dan tegalan. Penggunaan lahan di Kecamatan Padamara terbesar adalah digunakan sebagai permukiman seluas 578,2 Ha. Penggunaan lahan terbesar kedua di Kecamatan Padamara berupa sawah setengah teknis seluas 536,38 Ha. Luas penggunaan lahan di Kecamatan Padamara tahun 2020 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel, grafik, dan Gambar 3.48.

Tabel III.59.
Luas Penggunaan Lahan di Kecamatan Padamara Tahun 2020 (hektar)

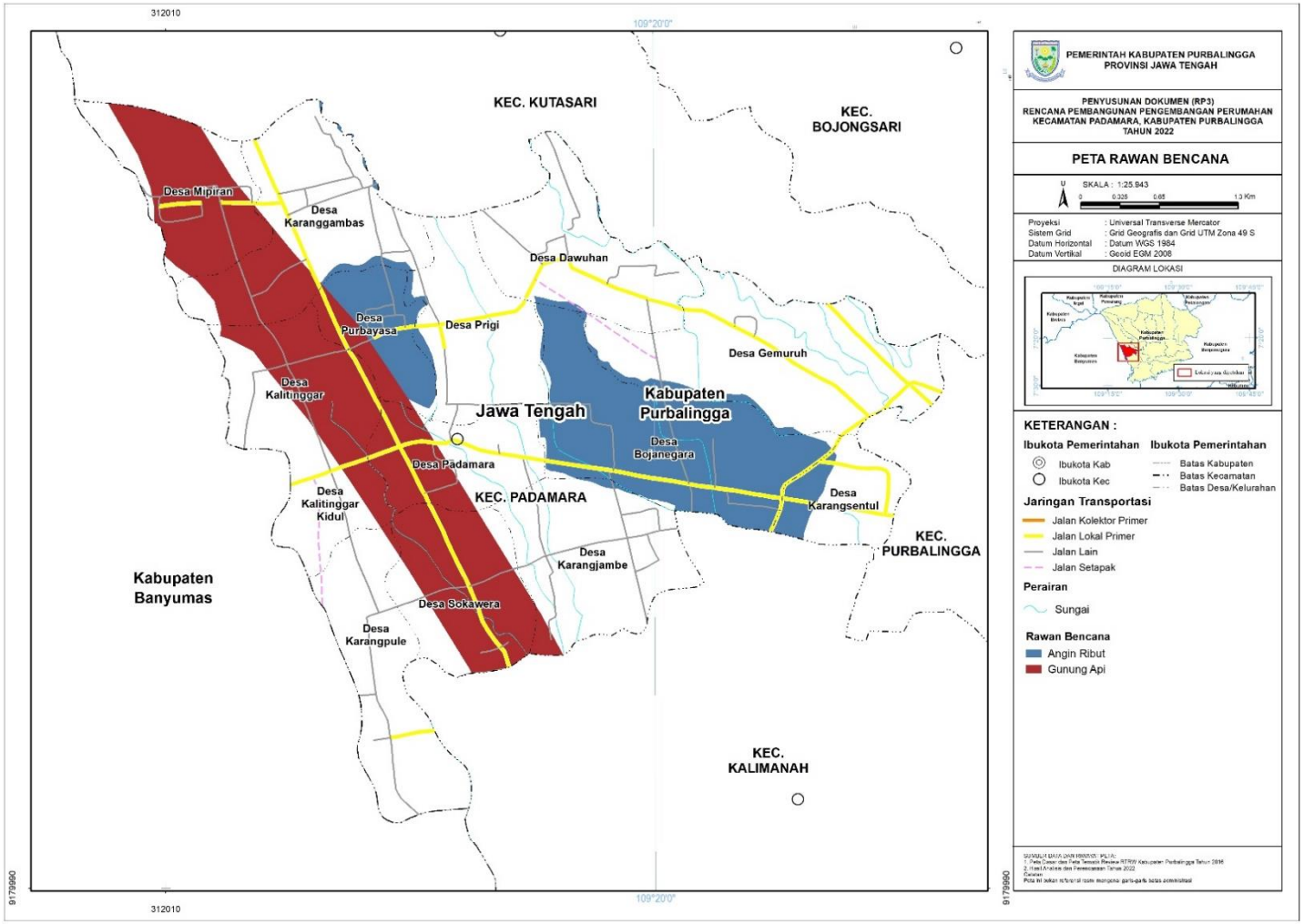
No	Desa/ Kelurahan	Penggunaan Lahan (Ha)						
		Industri	Kebun	Permukiman	Sawah 1/2 Teknis	Sawah Irigasi Sederhana	Sawah Irigasi Teknis	Tegalan
1	Karangpule	-		16,55	-	126,33	-	2,36
2	Kalitinggar	0,13		29,11	-	-	89,31	3,04
3	Sokawera	-		44,51	87,51	-	0,01	1,37
4	Padamara	-		47,99	51,75	0,00	-	3,80
5	Karangjambe	3,45	-	51,59	-	-	102,69	3,62
6	Bojanegara	0,90	-	73,76	125,36	-	9,35	5,65
7	Karangsentul	3,93		42,45	8,30	-	12,37	1,74
8	Gemuruh	4,48		49,59	5,78	-	169,90	3,47
9	Dawuhan	-		50,27	99,53	-	-	1,45
10	Prigi	-		29,94	1,36	92,46	-	3,22

No	Desa/ Kelurahan	Penggunaan Lahan (Ha)						
		Industri	Kebun	Permukiman	Sawah 1/2 Teknis	Sawah Irigasi Sederhana	Sawah Irigasi Teknis	Tegalan
11	Purbayasa	8,23		28,31	22,02	0,35	13,47	1,80
12	Karanggambas	1,90	5,34	62,08	28,70	-	89,48	-
13	Mipiran	-		33,82	57,73	-	32,46	-
14	Kalitinggar Kidul	-		18,23	48,35	-	0,09	-
Jumlah		23,02	5,34	578,20	536,38	219,14	519,13	31,53

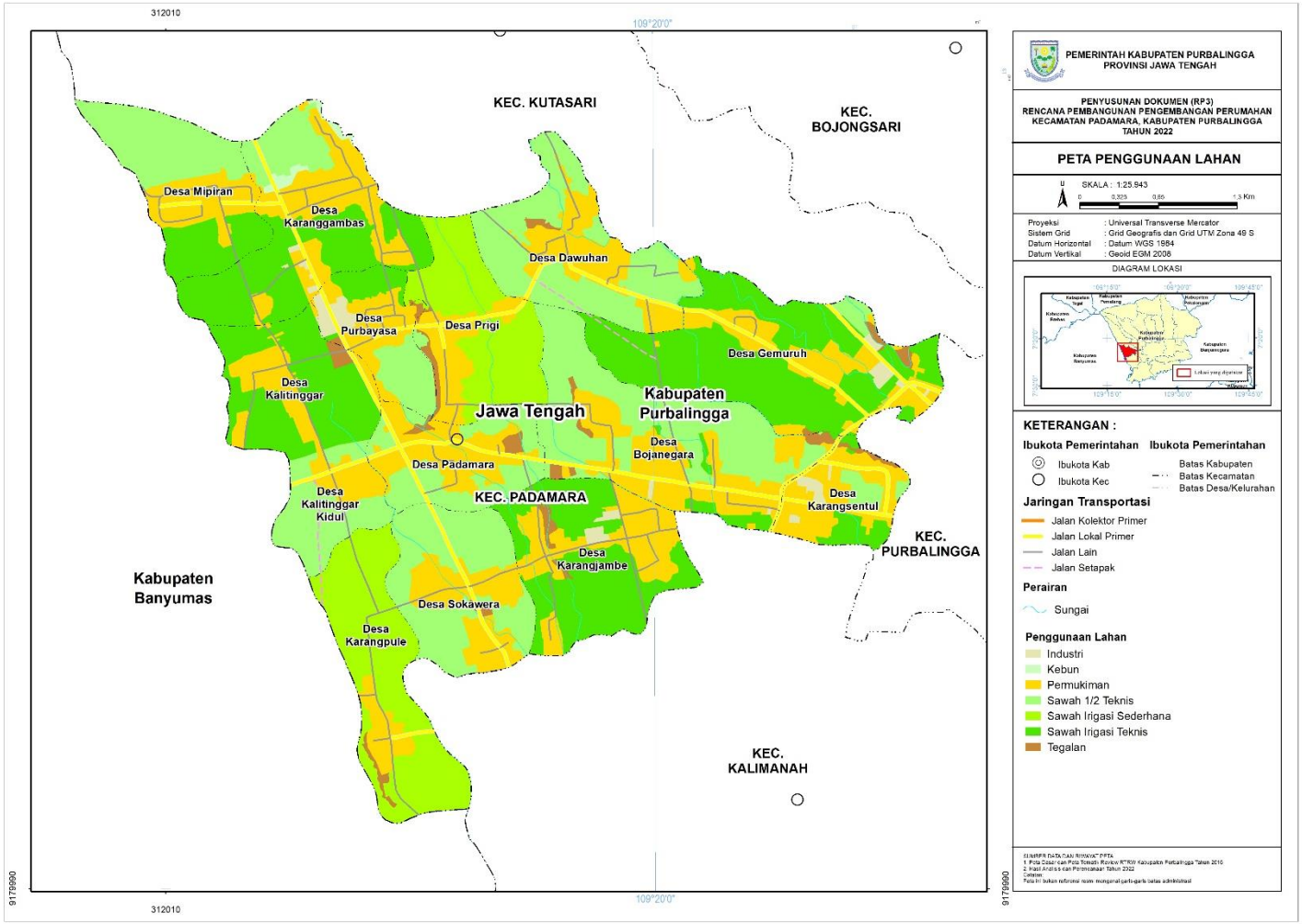
Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020



Gambar 3.48.
Luas Penggunaan Lahan Kecamatan Padamara Tahun 2020



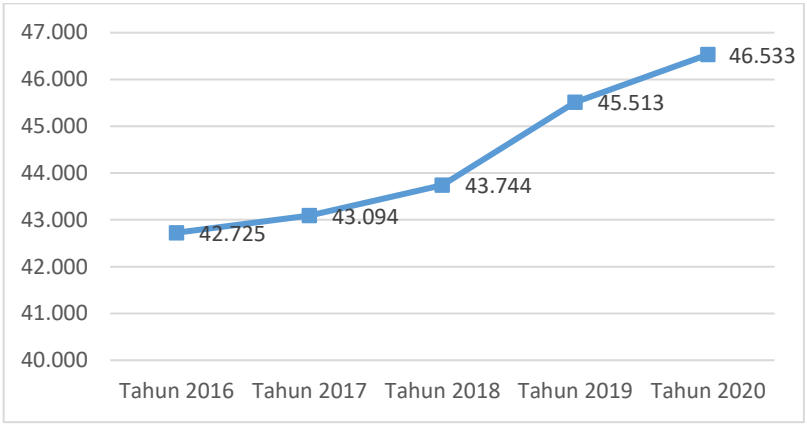
Gambar 3.49.
Peta Rawan Bencana Kecamatan Padamara



Gambar 3.50.
Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Padamara

3.3.2. Kondisi Kependudukan, Sosial, dan Budaya

Perkembangan jumlah penduduk di Kecamatan Padamara dalam kurun waktu lima tahun terakhir tepatnya tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kecamatan Padamara tahun 2016 sebanyak 42.725 jiwa mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 menjadi sebanyak 46.533 jiwa. Jumlah penduduk di Kecamatan Padamara tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Kecamatan Padamara Dalam Angka Tahun 2017-2021

Gambar 3.51.
Jumlah Penduduk Kecamatan Padamara Tahun 2016-2020

Jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Bojanegara sebesar 6.689 jiwa. Penduduk terkecil berada di Desa Karangpule dengan jumlah sebanyak 1.546 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk di Kecamatan Padamara sebesar 101 yang berarti terdapat 101 penduduk laki-laki setiap 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin di Kecamatan Padamara mayoritas yang lebih dari 100. Secara rinci jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Padamara tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.60.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Padamara Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
1	Karangpule	1.546	106,58
2	Kalitinggar	2.664	102,15
3	Sokawera	2.612	101,65
4	Padamara	2.920	96,77
5	Karangjambe	4.170	101,54
6	Bojanegara	6.689	101,3
7	Karangsentul	2.759	99,48
8	Gemuruh	4.341	101,31
9	Dawuhan	4.267	103,99
10	Prigi	3.156	100,9
11	Purbayasa	2.237	100
12	Karanggambas	4.296	101,79
13	Mipiran	3.242	101,15
14	Kalitinggar Kidul	1.634	99,42
Jumlah		46.533	101,27

Sumber: Kecamatan Padamara Dalam Angka Tahun 2021

Kepadatan penduduk di Kecamatan Padamara tahun 2020 terbesar terdapat pada Kelurahan Karangsentul yaitu sebesar 40 jiwa/Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 2.759 jiwa dan luas wilayah hanya 68,79 Ha. Sedangkan, kepadatan penduduk terkecil terdapat pada Desa Karangpule dengan kepadatan penduduk sebesar 11 jiwa/Ha. Secara rinci kepadatan penduduk di Kecamatan Padamara tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.61.
Kepadatan Penduduk di Kecamatan Padamara Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas (Ha)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Ha)
1	Karangpule	1.546	145,24	11
2	Kalitinggar	2.664	121,58	22
3	Sokawera	2.612	133,40	20
4	Padamara	2.920	103,51	28
5	Karangjambe	4.170	161,36	26
6	Bojanegara	6.689	215,01	31
7	Karangsentul	2.759	68,79	40
8	Gemuruh	4.341	233,21	19
9	Dawuhan	4.267	151,25	28
10	Prigi	3.156	126,98	25
11	Purbayasa	2.237	74,18	30
12	Karanggambas	4.296	187,51	23
13	Mipiran	3.242	124,00	26
14	Kalitinggar Kidul	1.634	66,67	25
Jumlah		46.533	2.237,13	21

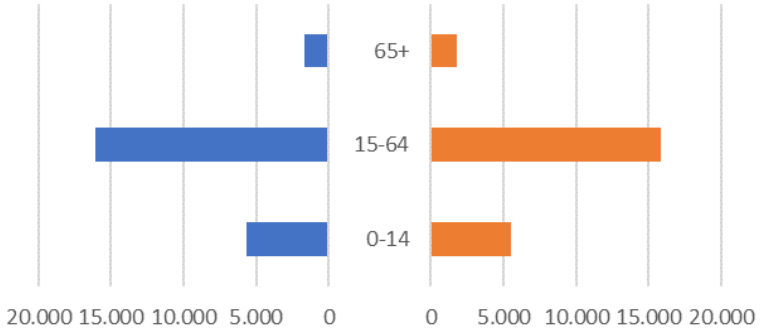
Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Penduduk menurut kelompok umur di Kecamatan Padamara terbagi menjadi rentang usia belum produktif (<14 Tahun), usia produktif (15-64 Tahun), dan usia tidak produktif (>64 tahun). Kecamatan Padamara memiliki struktur umur yang dominan pada umur 15-64 tahun dimana umur ini merupakan usia produktif. Tingkat ketergantungan Kecamatan Padamara tahun 2020 adalah sebesar 46% dengan komposisi usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 31.864 jiwa dan usia tidak produktif (<14 tahun dan >64 tahun) sebanyak 14.669 jiwa. Hal ini berarti sebanyak 100 penduduk usia produktif menanggung 46 penduduk usia tidak produktif.

Tabel III.62.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kecamatan Padamara Tahun 2020

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-14	5.670	5.505	11.175
15-64	16.064	15.800	31.864
65+	1.668	1.826	3.494
Jumlah	23.402	23.131	46.533

Sumber: Kecamatan Padamara Dalam Angka Tahun 2021



Sumber: Kecamatan Padamara Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 3.52.
Piramida Penduduk Kecamatan Padamara Tahun 2020

Berdasarkan piramida penduduk di atas, untuk kelompok umur 15-64 tahun mempunyai panjang batang lebih panjang dibanding kelompok umur lainnya. Kondisi ini menjelaskan struktur penduduk usia produktif cenderung lebih besar. Struktur penduduk di usia tidak produktif lebih kecil dibanding kelompok usia produktif.

Penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat dari jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan utama. Jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan utama di Kecamatan Padamara meliputi pekerjaan dalam bidang pertanian, pekerjaan dalam bidang industri, pekerjaan dalam bidang perdagangan, dan lainnya. Lapangan perkerjaan utama di Kecamatan Padamara tahun 2020 paling banyak adalah karyawan sebanyak 9.752 jiwa. Sedangkan, lapangan pekerjaan dalam bidang kontruksi hanya sebanyak 8 jiwa.

Tabel III.63.
Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kecamatan Padamara Tahun 2020

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pensiunan	296	89	385
PNS/ ABRI/ TNI	614	342	956
Perdagangan	843	877	1.720
Pertanian	1.268	1.312	2.580
Industri	12	17	29
Kontruksi	8	-	8
Buruh	3.393	2.016	5.409
Karyawan	5.296	4.456	9.752
Wiraswasta	1.839	572	2.411
Lainnya	653	420	1.073
Jumlah	14.222	10.101	24.323

Sumber: Kecamatan Padamara Dalam Angka Tahun 2021

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kecamatan Padamara tahun 2020 paling banyak adalah pada tingkatan SD/ Sederajat sebanyak 13.778 jiwa. Sedangkan, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kecamatan Padamara tahun 2020 paling sedikit yaitu pada tingkat pendidikan Strata III sebanyak 4 jiwa.

Tabel III.64.
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kecamatan Padamara Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/ Belum Sekolah	3.900	3.815	7.715
Belum Tamat SD/ Sederajat	2.290	2.064	4.354
SD/ Sederajat	6.460	7.318	13.778
SLTP/ Sederajat	4.732	4.381	9.113
SLTA/ Sederajat	4.290	3.672	7.962
Diploma I/ II	57	76	133
Akademi/ Diploma III	274	387	661
Diploma IV/ Strata I	906	932	1.838
Strata II	50	29	79
Strata III	3	1	4

Sumber: Kecamatan Padamara Dalam Angka Tahun 2021

Masyarakat Purbalingga adalah pendukung kebudayaan Jawa dan masyarakatnya terbiasa kontak dengan pendukung budaya lain. Oleh karena itu, masyarakatnya relatif terbuka. Artinya, menerima siapa saja yang datang, berusaha, dan bermukim di daerahnya.

Hubungan antar masyarakat Purbalingga masih memiliki karakteristik guyub ditunjukkan apabila warga mengadakan acara, misalnya pernikahan, khitanan, membangun rumah atau ada yang meninggal dunia, maka masyarakat akan berkunjung dan membantu ke tempat warga tersebut. Disamping itu pula terdapat interaksi sosial yang berbentuk kerjasama yaitu kegiatan gotong-royong, bentuk kerjasama ini dapat diwujudkan berupa tenaga, bahan material ataupun uang. Sedangkan gotong-royong dalam bentuk kerja bakti seperti membersihkan lingkungan dan memperbaiki jalan.

Permukiman di Kecamatan Padamara terdiri dari permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan. Karakteristik permukiman perkotaan lebih modern tersedia sarana prasarana pendukung lebih lengkap. Masyarakat permukiman perkotaan berkegiatan bukan pertanian karena sebagian besar lahan terbangun dan bermata pencaharian dalam bidang industri pengolahan dan jasa. Karakteristik permukiman perdesaan berupa hunian dan lingkungan yang bersifat pedesaan. Masyarakat permukiman perdesaan berkegiatan dalam bidang pertanian, karena masih banyak lahan pertanian.

3.3.3. Kondisi Perekonomian

Sektor perekonomian unggulan di Kecamatan Padamara yang dapat mendukung pengembangan Kecamatan Padamara berasal dari sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan, sektor perikanan, sektor industri, serta sektor pariwisata. Sektor pertanian paling besar berupa produksi tanaman pangan sebanyak 11.062,49 ton padi sawah. Kecamatan Padamara juga memiliki komoditas unggulan sayur-sayuran yang berupa buncis, cabai besar, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, terung, dan tomat.

Sektor perkebunan yang terdapat di Kecamatan Padamara meliputi kelapa dengan produksi tahun 2020 sebanyak 315,06 ton. Sektor peternakan yang terdapat di Kecamatan Padamara meliputi sapi potong, kuda, kerbau, domba, kambing, ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, itik, itik manila, dan angsa. Sektor perikanan juga menjadi sektor ekonomi unggalan di Kecamatan Padamara. Jenis perikanan di Kecamatan Padamara berupa perikanan budidaya dengan kolam dan lainnya. Jumlah rumah tangga tangga yang mengembangkan perikanan budidaya kolam sebanyak 879 yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Padamara. Sedangkan, perikanan budidaya di lainnya sebanyak 30. Sektor pariwisata juga merupakan salah satu sektor ekonomi unggulan yang dapat mendukung pengembangan Kecamatan Padamara. Objek wisata yang terdapat di Kecamatan Padamara, yaitu Purbasari Pancuran Mas (River World) yang berada di Desa Purbayasa.

Selain itu, sektor industri juga merupakan salah satu sektor ekonomi unggulan yang dapat mendukung pengembangan Kecamatan Padamara. Terdapat banyak industri besar maupun sedang di Kecamatan Padamara. Industri di Kecamatan Padamara hanya terdapat di Desa Kalitinggar, Desa Karangjambe, Desa Bojanegara, Kelurahan Karangsentul, Desa Gemuruh, Desa Purbayasa, dan Desa Karanggambas. Luas total penggunaan lahan untuk industri di Kecamatan Padamara seluas 23,2 Ha dengan luas industri paling besar berada di Desa Purbayasa.

Sektor perekonomian unggulan di Kecamatan Padamara ditunjang dengan adanya sarana perekonomian. Sarana perekonomian yang terdapat di Kecamatan Padamara tahun 2020 berupa kelompok pertokoan, pasar, minimarket/ swalayan, toko/ warung kelontong/ restoran/ rumah makan, dan warung/ kedai makanan. Sarana perekonomian berupa toko/ warung kelontong dan warung/ kedai makanan tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Padamara. Sedangkan, jumlah sarana perdagangan pasar adalah sebanyak 5 unit.

Tabel III.65.
Sarana Perekonomian di Kecamatan Padamara Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Pertokoan	Pasar	Minimarket	Toko	Restoran	Warung
1	Karangpule	-	1	-	15	-	5
2	Kalitinggar	-	-	1	11	-	5
3	Sokawera	-	-	-	17	-	4
4	Padamara	3	1	3	26	1	22
5	Karangjambe	1	-	-	16	-	15
6	Bojanegara	1	1	1	30	2	24
7	Karangsentul	1	-	-	7	5	15
8	Gemuruh	1	-	2	29	-	16
9	Dawuhan	-	-	1	30	1	12
10	Prigi	-	-	-	26	-	13
11	Purbayasa	-	-	-	24	-	28
12	Karanggambas	-	-	1	38	-	16
13	Mipiran	-	2	1	23	-	5
14	Kalitinggar Kidul	1	-	2	13	-	9
Jumlah		8	5	12	305	9	189

Sumber: Kecamatan Padamara Dalam Angka Tahun 2021

3.3.4. Kondisi Perumahan

3.3.5.1. Sebaran Perumahan

Deliniasi sebaran perumahan didasarkan pada administrasi desa/ kelurahan, sedangkan satuan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang dibatasi oleh batas fisik alam seperti jalan atau sungai.

Tabel III.66.
Sebaran Perumahan di Kecamatan Padamara

No	Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)
1	Karangpule	19,64
2	Kalitinggar	32,34
3	Sokawera	44,59
4	Padamara	46,22
5	Karangjambe	54,36
6	Bojanegara	79,76
7	Karangsentul	32,84
8	Gemuruh	52,11
9	Dawuhan	50,83
10	Prigi	38,67
11	Purbayasa	24,76
12	Karanggambas	63,43
13	Mipiran	33,49
14	Kalitinggar Kidul	22,39
Jumlah		595,43

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021

Jumlah rumah di Kecamatan Padamara sebanyak 11.611 unit rumah. Tipe fungsi rumah di Kecamatan Padamara berfungsi sebagai hunian, setengah hunian, dan non hunian. Rumah non hunian berada pada sepanjang jalan lokal primer Jalan Purbalingga - Banyumas, sedangkan rumah dengan fungsi setengah hunian berada pada pusat-pusat kegiatan kecamatan atau desa dengan bagian depan rumah difungsikan sebagai warung/ toko. Sedangkan, rumah yang berada di sekitar industri sebagian besar difungsikan sebagai kos. Jenis rumah yang terdapat di Kecamatan Padamara berupa rumah komersial, rumah umum bagi MBR, dan rumah swadaya. Bentuk rumah di Kecamatan Padamara pada wilayah sekitar perkotaan berupa rumah deret, sedangkan rumah yang berada pada wilayah perdesaan berbentuk rumah tunggal dengan halaman besar dan memiliki keunikan yaitu jendela yang menghadap ke atas. Selain itu, di Kecamatan Padamara terdapat rusun (rumah susun) yang berada di perbatasan Padamara – Kutasari.

Tabel III.67.
Jumlah Rumah di Kecamatan Padamara Tahun 2020

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Rumah
1	Karangpule	397
2	Kalitinggar	687
3	Sokawera	650
4	Padamara	787

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah Rumah
5	Karangjambe	1.002
6	Bojanegara	1.552
7	Karangsentul	677
8	Gemuruh	1.045
9	Dawuhan	1.034
10	Prigi	809
11	Purbayasa	589
12	Karanggambas	1.058
13	Mipiran	864
14	Kalitinggar Kidul	459
Jumlah		**11.611**

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga, 2020



(a)



(b)



(c)

(a) Rumah tunggal
(b) Rumah deret
(c) Sebagian non hunian

Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.53.
Perumahan di Kecamatan Padamara

3.3.5.2. Sebaran Perumahan Developer

Kebutuhan rumah di Kecamatan Padamara akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kebutuhan rumah ini dapat dipenuhi secara swadaya maupun oleh developer/pengembang. Perumahan di Kecamatan Padamara tersebar di beberapa wilayah. Seiring dengan peningkatan kebutuhan rumah maka jumlah

pengembang perumahan yang ada di Kecamatan Padamara juga meningkat. Jumlah perumahan developer yang ada di Kecamatan Padamara sebanyak 16 perumahan dan sudah diserahterimakan aset PSUnya. Berdasarkan perumahan developer yang tergabung di dalam persatuan perusahaan Real Estate Indonesia (REI) sebanyak 5 perumahan developer yang dibangun setelah tahun 2016. Sedangkan, berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga, terdapat 4 perumahan developer. Perumahan developer yang ada di Kecamatan Padamara rata-rata memiliki tipe MBR, namun terdapat lebih besar dari tipe 45. Berikut ini merupakan perumahan pengembang di Kecamatan Padamara berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.

Tabel III.68.
Perumahan Pengembang di Kecamatan Padamara

Desa/ Kelurahan	Nama Perumahan Pengembang	Jumlah Rumah	Luas Total Tanah
Bojanegara	Berlian Karangsentul	66	2.867
Karangsentul	Grand Hayata Karangsentul	30	
Gemuruh	Citra Perwira Gemuruh	50	6.020
	Grand Perwira	140	16.820

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga



(a)



(c)

(a) Perumahan Grand Safira
(b) Perumahan Developer Tipe MBR

Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.54.
Perumahan Pengembang di Kecamatan Padamara

3.3.5.3. Kawasan PKP Pada Kawasan Strategis

Kawasan strategis di Kabupaten Purbalingga yaitu kawasan strategis pertumbuhan ekonomi. Namun, sebaran perumahan yang terdapat di Kecamatan Padamara tidak termasuk ke dalam kawasan strategis pertumbuhan ekonomi.

3.3.5.4. Kawasan PKP Tidak Sesuai Tata Ruang (*Negative List*)

Rencana pengembangan kawasan permukiman seharusnya tidak berada di wilayah *negative list* dan harus sesuai dengan peruntukan tata ruang dalam RTRW Kabupaten Purbalingga. Permukiman eksisting di Kecamatan Padamara berada pada rencana pola ruang yang telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Purbalingga dan tidak berada pada wilayah *negative list*.

3.3.5.5. Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana

Kecamatan Padamara terdapat beberapa perumahan yang berada di daerah rawan bencana. Perumahan yang berada di kawasan rawan bencana gempa bumi, gerakan tanah, angin topan, dan letusan gunung api. Menurut data BPBD Kabupaten Purbalingga, terdapat penduduk di Kecamatan Padamara yang terancam bencana. Hal tersebut karena permukiman berada di kawasan rawan bencana angin topan. Penduduk di Kecamatan Padamara yang terancam bencana angin topan sebanyak 11.203 KK.

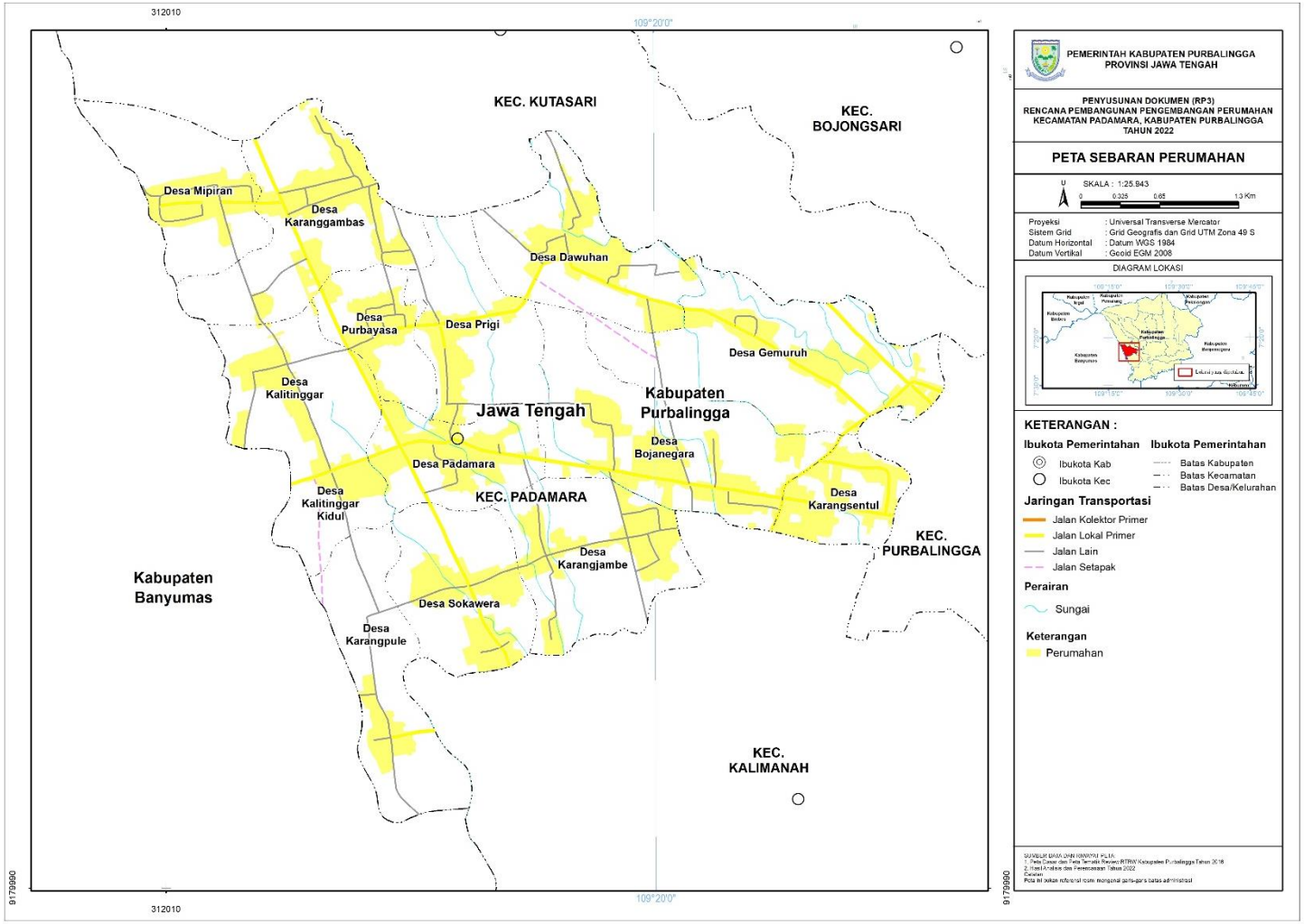
3.3.5.6. Kawasan PKP Terdampak Program Pembangunan Pemerintah

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan seharusnya tidak berada di wilayah yang terdampak program pembangunan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Perumahan eksisting di seluruh wilayah di Kecamatan Padamara tidak berada pada wilayah yang terdampak program pembangunan pemerintah Kabupaten Purbalingga.

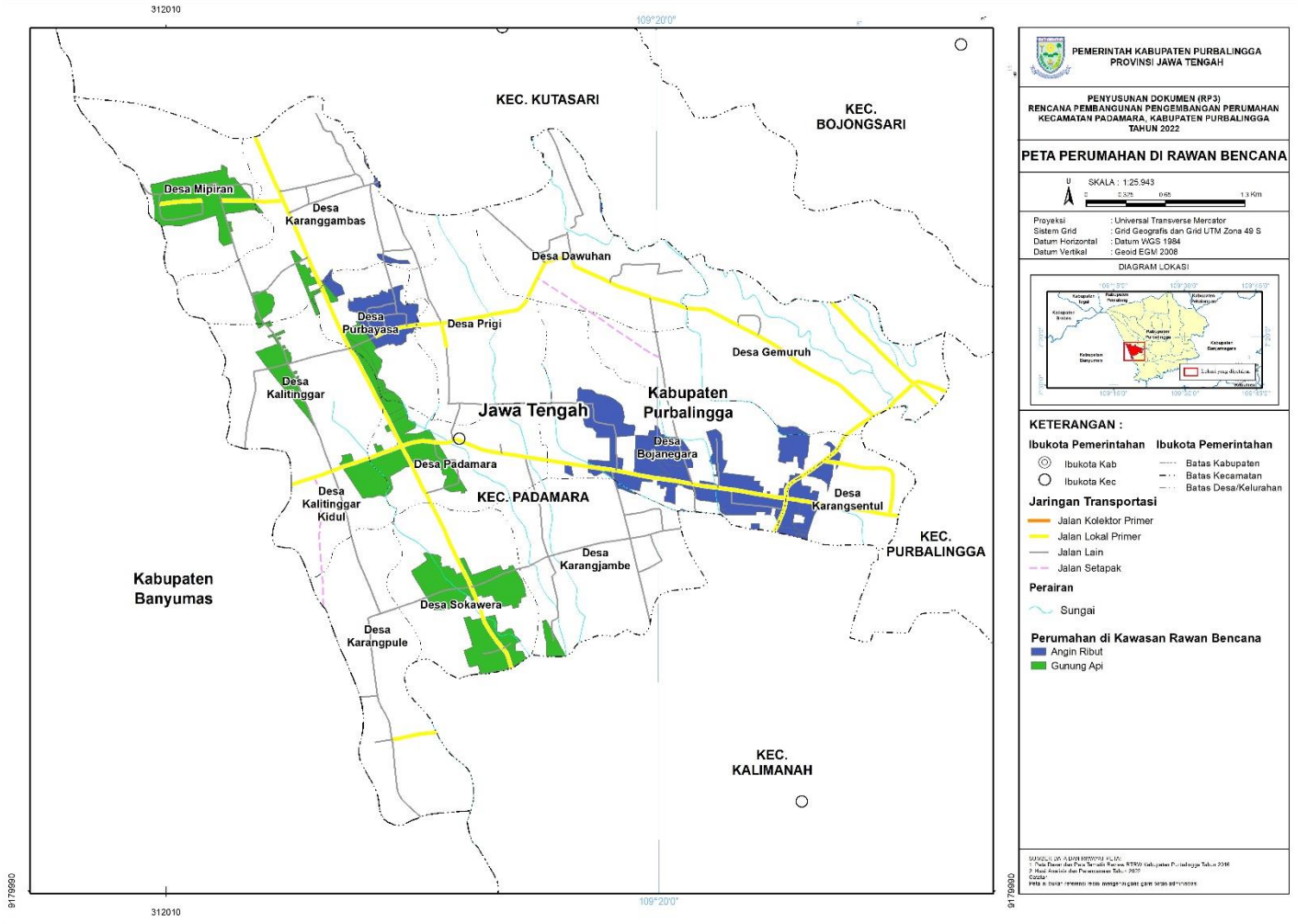
Tabel III.69.
Luas Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana

No	Desa/ Kelurahan	KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Sangat Rendah dan Angin Topan	KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Tinggi dan Angin Topan	KRB I Letusan Gunung Api, Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	KRB I Letusan Gunung Api, Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Sangat Rendah dan Angin Topan
1	Karangpule	-	60,55	-	-	-
2	Kalitinggar	47,53	0,00	2,00	-	-
3	Sokawera	-	55,08	-	-	-
4	Padamara	12,59	38,44	-	0,62	17,82
5	Karangjambe	-	52,23	-	-	14,54
6	Bojanegara	-	135,86	-	-	-
7	Karangsentul	-	64,19	-	-	-
8	Gemuruh	47,08	37,89	-	-	-
9	Dawuhan	54,01	3,36	-	-	-
10	Prigi	21,41	-	-	22,69	0,45
11	Purbayasa	27,79	-	-	2,99	0,21
12	Karanggambas	58,86	-	-	14,58	-
13	Mipiran	34,53	-	-	-	-
14	Kalitinggar Kidul	27,73	3,46	-	-	-
Jumlah		331,52	390,51	2,00	40,88	33,02

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021



Gambar 3.55.
Peta Sebaran Permukiman di Kecamatan Padamara



Gambar 3.56.
Peta Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana

3.3.5.7. Jumlah dan Sebaran Kebutuhan Rumah (Backlog)

Kekurangan rumah/ backlog di Kecamatan Padamara pada tahun 2020 mencapai 3.608 rumah. Jumlah ini akan bertambah seiring dengan bertambahnya penduduk di Kecamatan Padamara. Sebaran backlog di Kecamatan Padamara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.70.
Kekurangan Rumah/ Backlog di Kecamatan Padamara Tahun 2020

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah KK	Jumlah Rumah	Backlog Tahun 2020	Total Luas Kebutuhan Permukiman (Ha)
1	Karangpule	520	397	123	1,35
2	Kalitinggar	901	687	214	2,33
3	Sokawera	852	650	202	2,21
4	Padamara	1.031	787	244	2,67
5	Karangjambe	1.314	1.002	312	3,40
6	Bojanegara	2.034	1.552	482	5,27
7	Karangsentul	888	677	211	2,30
8	Gemuruh	1.370	1.045	325	3,55
9	Dawuhan	1.355	1.034	321	3,51
10	Prigi	1.060	809	251	2,74
11	Purbayasa	772	589	183	2,00
12	Karanggambas	1.387	1.058	329	3,59
13	Mipiran	1.133	864	269	2,93
14	Kalitinggar Kidul	602	459	143	1,56
Jumlah		15.219	11.611	3.608	39,41

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021

3.3.5.8. Jumlah dan Sebaran Rumah Tidak Layah Huni (RTLH)

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Padamara versi BDT tahun 2020 adalah sebesar 2.480 unit. Sedangkan, RTLH yang berada di kawasan kumuh sebanyak 38 unit. Jumlah sebaran RTLH di Kecamatan Padamara diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel III.71.
Sebaran Jumlah RTLH di Kecamatan Padamara Tahun 2020

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah RTLH	RTLH di Kawasan Kumuh
1	Karangpule	79	-
2	Kalitinggar	84	-
3	Sokawera	140	-
4	Padamara	106	-
5	Karangjambe	147	-
6	Bojanegara	251	-
7	Karangsentul	84	38
8	Gemuruh	242	-
9	Dawuhan	261	-
10	Prigi	148	-
11	Purbayasa	87	-

No	Desa/ Kelurahan	Jumlah RTLH	RTLH di Kawasan Kumuh
12	Karanggambas	341	-
13	Mipiran	449	-
14	Kalitinggar Kidul	61	-
Jumlah		2.480	38

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purbalingga

3.3.5.9. Kepadatan Bangunan Rumah

Kepadatan bangunan di Kecamatan Padamara tahun 2020 yaitu sebesar 19,5 rumah/Ha dengan jumlah rumah sebanyak 11.611 rumah dan luas wilayah hanya 595,43 Ha. Kepadatan bangunan di Kecamatan Padamara terbesar terdapat pada Desa Mipiran yaitu sebesar 25,81 rumah/Ha. Sedangkan, kepadatan bangunan terkecil terdapat pada Desa Sokawera dengan kepadatan bangunan sebesar 14,58 rumah/Ha. Secara rinci kepadatan bangunan di Kecamatan Padamara tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.72.
Kepadatan Bangunan di Kecamatan Padamara

No	Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)	Jumlah Rumah	Kepadatan Bangunan (Rumah/ Ha)
1	Karangpule	19,64	397	20,20
2	Kalitinggar	32,34	687	21,26
3	Sokawera	44,59	650	14,58
4	Padamara	46,22	787	17,02
5	Karangjambe	54,36	1.002	18,44
6	Bojanegara	79,76	1.552	19,46
7	Karangsentul	32,84	677	20,63
8	Gemuruh	52,11	1.045	20,06
9	Dawuhan	50,83	1.034	20,34
10	Prigi	38,67	809	20,91
11	Purbayasa	24,76	589	23,79
12	Karanggambas	63,43	1.058	16,68
13	Mipiran	33,49	864	25,81
14	Kalitinggar Kidul	22,39	459	20,51
Jumlah		595,43	11.611	19,50

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021

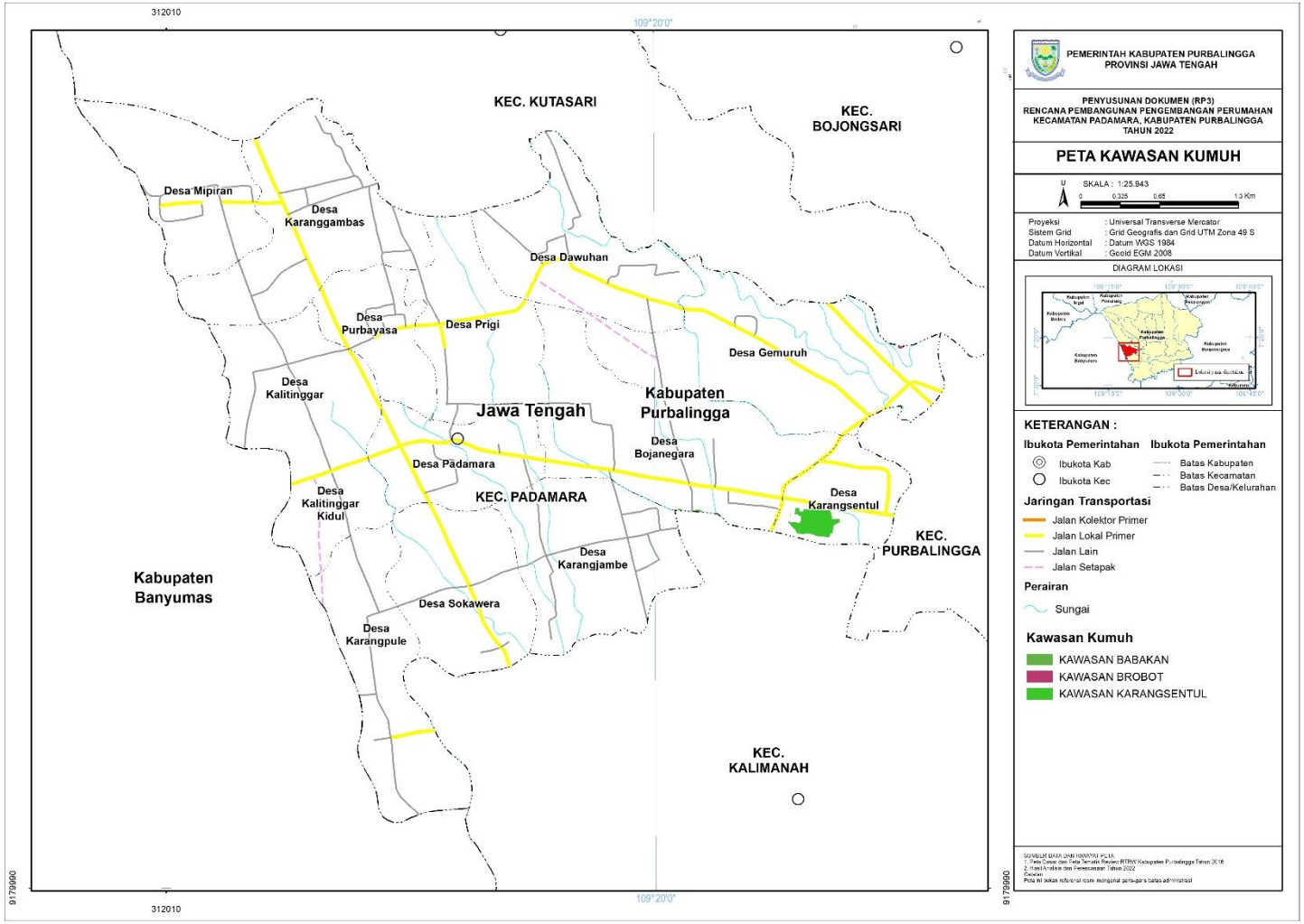
3.3.5.10. Sebaran Kawasan Kumuh

Karakteristik kawasan kumuh dibedakan menjadi 4 kategori kewenangan penangan, yaitu kawasan kumuh kewenangan pusat, kawasan kumuh kewenangan provinsi, dan kawasan kumuh kewenangan kabupaten. Kawasan kumuh di Kecamatan Padamara tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga No 640/212 Tahun 2021 berada di 3 kawasan dengan total luasan permukiman yaitu seluas 6,82 Ha. Kawasan yang merupakan permukiman kumuh berada di Babakan, Brobot, Karangsentul.

Tabel III.73.
Sebaran Kawasan Kumuh di Kecamatan Padamara

No	Kawasan Kumuh	Luas (Ha)
1	Kawasan Babakan	0,19
2	Kawasan Brobot	0,11
3	Kawasan Karangsentul	6,52
Jumlah		6,82

Sumber: Keputusan Bupati Purbalingga No 640/212 Tahun 2021



Gambar 3.57.
Peta Sebaran Lokasi Kawasan Kumuh di Kecamatan Padamara

3.3.5. Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan

3.3.6.1. Kondisi Prasarana

Jaringan prasarana yang terdapat di Kecamatan Padamara meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan penyediaan air minum, jaringan pengelolaan persampahan, serta jaringan air limbah. Jaringan jalan yang terdapat di seluruh desa di Kecamatan Padamara telah menggunakan jenis permukaan jalan berupa aspal/ beton dan dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Akan tetapi di Jalan Purbalingga - Padamara terdapat jalan berlubang dan terdapat genangan saat terjadi hujan.

Jaringan drainase di Kecamatan Padamara terdiri dari jaringan drainase primer berupa sungai, drainase sekunder berupa drainase di jalan utama, dan jaringan drainase tersier di lingkungan permukiman. Jaringan drainase di Kecamatan Padamara berupa drainase terbuka dan drainase tertutup. Jaringan drainase sekunder di wilayah bagian utara Kecamatan Padamara juga difungsikan sebagai jaringan irigasi. Jaringan drainase di Kecamatan Padamara di beberapa wilayah belum berfungsi optimal, karena sebagian tersumbat oleh sampah. Hal ini dapat dilihat dari munculnya genangan di beberapa wilayah terutama saat hujan. Selain itu beberapa sungai yang ada di Kecamatan Padamara mengalami pendangkalan.

Kebutuhan air minum di Kecamatan Padamara dilayani oleh PDAM dan PAMSIMAS menggunakan ledeng dengan meteran dan sumur. Wilayah perdesaan atau bagian utara Kecamatan Padamara menggunakan sistem air bersih perpipaan yang bersumber dari PAMSIMAS. PAMSIMAS yang terdapat di Kecamatan Padamara dapat mengalirkan kurang lebih 2-3 desa. Terdapat juga wilayah yang menggunakan sumur di Kecamatan Padamara yaitu berada di Desa Karangpule. Sedangkan desa/ kelurahan lainnya menggunakan ledeng dengan meteran.

Jaringan persampahan di Kecamatan Padamara sebagian sudah terlayani jaringan pengangkutan sampah dengan pembuangan akhir ke TPA Kalipancur di Kecamatan Pengadegan. Sebelum sampah diangkut ke TPA terdapat tempat pembuangan sementara (TPS) dan TPS 3R. TPS yang terdapat di Kecamatan Padamara sebanyak 1 unit yang berlokasi di Pasar Padamara. Sedangkan, TPS 3R di Kecamatan Padamara sebanyak 1 unit yang berada di Desa Karangpule. Selain itu, di Kecamatan Padamara juga terdapat bank sampah sebanyak 5 unit.

Tabel III.74.
Bank Sampah di Kecamatan Padamara

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Keterangan
1	Bank Sampah Asri Jaya	Desa Prigi	
2	Bank Sampah Nurul Hikmah	Desa Karangpule	Aktif
3	Bank Sampah Mugi Barokah	Desa Sokawera	Aktif
4	Bank Sampah Permata Spensapada	SMP Negeri 1 Padamara	Aktif
5	Bank Sampah Jati Kusuma	Desa Bojanegara	Aktif

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase, tegalan, bahkan di sungai. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat

untuk membuang sampah pada tempatnya serta perluasan jangkauan pelayanan pengangkutan sampah baik dari pemerintah maupun secara swadaya.

Sistem jaringan sanitasi di Kecamatan Padamara berupa air limbah domestik yang dibuang dari permukiman, pada umumnya tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu sehingga berdampak pada penurunan kualitas air pada perairan di wilayah Kecamatan Padamara. Penurunan kualitas air dapat berdampak pada penurunan kualitas air permukaan maupun air tanah. Oleh karena itu maka pengelolaan air limbah yang terpadu sangat perlu dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir dampak yang dapat ditimbulkan. Seluruh keluarga di seluruh wilayah Kecamatan Padamara sudah menggunakan jamban sendiri untuk fasilitas tempat buang air besar. Terdapat juga rumah tangga di Kecamatan Padamara yang memiliki IPAL domestik di setiap rumah tangganya.



(a)



(b)



(c)



(d)

(a) Jaringan jalan
(b) Jaringan drainase dan jaringan irigasi
(c) PAMSIMAS
(d) IPAL Domestik

Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.58.
Prasarana di Kecamatan Padamara

3.3.6.2. Kondisi Sarana

Sarana yang terdapat di Kecamatan Padamara meiputi sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana kebudayaan, serta sarana ruang terbuka hijau. Sarana pemerintahan yang terdapat di Kecamatan Padamara berupa balai desa, balai kelurahan, kantor desa, dan kantor kelurahan. Jumlah kelurahan di Kecamatan Padamara berjumlah 1 kelurahan, sedangan sisanya adalah desa.

Sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Padamara terdiri dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD) sederajat, sekolah menengah pertama (SMP) sederajat, dan sekolah menengah akhir (SMA) sederajat. Sarana pendidikan SD tersebar di seluruh desa/ kelurahan di Kecamatan Padamara. Sarana pendidikan SMP/ Sederajat dan SMA/ Sederajat masing-masing berjumlah 3 unit. Secara rinci sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Padamara tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.75.
Sarana Pendidikan di Kecamatan Padamara Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	TK	SD/ MI	SMP/ MTs	SMA/ SMK/ MA	PT
1	Karangpule	1	1	-	-	-
2	Kalitinggar	1	2	-	-	-
3	Sokawera	2	2	-	-	-
4	Padamara	2	2	1	1	-
5	Karangjambe	1	2	-	-	-
6	Bojanegara	2	2	1	1	-
7	Karangsentul	1	2	-	-	1
8	Gemuruh	1	2	-	1	-
9	Dawuhan	2	2	1	-	-
10	Prigi	1	1	-	-	-
11	Purbayasa	1	2	-	-	-
12	Karanggambas	1	3	-	-	-
13	Mipiran	1	1	-	-	-
14	Kalitinggar Kidul	-	1	-	-	-
Jumlah		17	25	3	3	1

Sumber: Kecamatan Padamara Dalam Angka Tahun 2021

Sarana peribadatan yang terdapat di Kecamatan Padamara meliputi masjid dan mushola. Sarana peribadatan masjid dan mushola tersebar di seluruh desa/ kelurahan di Kecamatan Padamara dengan jumlah sebanyak 32 masjid dan 115 mushola.

Tabel III.76.
Sarana Peribadatan di Kecamatan Padamara Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Masjid	Musholla
1	Karangpule	1	6
2	Kalitinggar	1	11
3	Sokawera	3	5
4	Padamara	3	11
5	Karangjambe	2	7
6	Bojanegara	3	12
7	Karangsentul	4	8
8	Gemuruh	2	10
9	Dawuhan	4	6
10	Prigi	1	6
11	Purbayasa	2	7
12	Karanggambas	3	13
13	Mipiran	2	7
14	Kalitinggar Kidul	1	6
Jumlah		32	115

Sumber: Kecamatan Padamara Dalam Angka Tahun 2021

Sarana kesehatan di Kecamatan Padamara cukup lengkap yang terdiri atas rumah sakit, poliklinik/ balai pengobatan, puskesmas, apotek, pustu, praktik dokter/ bidan, PKD, dan posyandu. Sarana kesehatan rumah sakit di Kecamatan Padamara sebanyak 1 unit yang berada di Kelurahan Karangsentul. Sarana kesehatan posyandu di Kecamatan Padamara tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Padamara. Sementara, sarana kesehatan puskesmas hanya berada di Desa Padamara. Berikut ini merupakan jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Padamara tahun 2020.

Tabel III.77.
Sarana Kesehatan di Kecamatan Padamara Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Apotek	Pustu	Praktik Dokter/ Bidan	PKD	Posyandu
1	Karangpule	-	-	-	-	-	1	1	2
2	Kalitinggar	-	-	-	-	-	1	1	3
3	Sokawera	-	-	-	-	-	-	1	5
4	Padamara	-	-	1	2	-	3	1	5
5	Karangjambe	-	-	-	1	1	-	1	5
6	Bojanegara	-	2	-	1	-	5	1	7
7	Karangsentul	1	-	-	1	1	1	1	3
8	Gemuruh	-	-	-	-	-	1	1	4
9	Dawuhan	-	-	-	-	-	1	1	4
10	Prigi	-	-	-	-	-	1	1	4
11	Purbayasa	-	-	-	-	-	1	1	4
12	Karanggambas	-	-	-	-	1	1	-	4
13	Mipiran	-	-	-	-	-	1	1	3
14	Kalitinggar Kidul	-	-	-	-	-	1	1	2
Jumlah		1	2	1	5	3	18	13	55

Sumber: Kecamatan Padamara Dalam Angka Tahun 2021

Kebudayaan di Kecamatan Padamara beraneka ragam, meliputi ujungan, suran, begalan, angguk, aplang/ dames, calung, ebeg/ kuda lumping, lengger, dan lainnya. Kebudayaan tersebut di dukung oleh beberapa organisasi kesenian yang terdapat di Kecamatan Padamara.

Sarana ruang terbuka hijau yang terdapat di Kecamatan Padamara meliputi ruang terbuka hijau perkotaan, ruang terbuka hijau jalur hijau jalan, dan ruang terbuka hijau fungsi tertentu. Ruang terbuka hijau perkotaan di Kecamatan Padamara berupa taman kota dan hutan kota. Taman kota berada di Kelurahan Karangsentul yaitu Taman Sentul Garden. Hutan kota berada di Desa Gemuruh yaitu Hutan Kota Depan SMK N. Ruang terbuka hijau fungsi tertentu di Kecamatan Padamara berupa fasilitas/ lapangan olahraga terdiri dari lapangan sepak bola, lapangan bola voli, lapangan bulu tangkis, fasilitas tenis meja, dan lapangan futsal. Berikut ini merupakan jumlah dan kondisi fasilitas/ lapangan olahraga di Kecamatan Padamara.

Tabel III.78.
Jumlah dan Kondisi Lapangan Olahraga di Kecamatan Padamara

Fasilitas/ Lapangan Olahraga	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Sedang
Sepak bola	10	4
Bola voli	8	1
Bulu tangkis	7	1

Fasilitas/ Lapangan Olahraga	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Sedang
Tenis meja	3	2
Futsal	1	-

Sumber: Kecamatan Padamara Dalam Angka Tahun 2021



(a)



(b)



(c)



(d)

(a) Masjid Jami Baeturrohmah
(b) SD Negeri 1 Kalitinggar Kidul
(c) Puskesmas Padamara
(d) Pasar Padamara

Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.59.
Sarana di Kecamatan Padamara

3.3.6.3. Kondisi Utilitas

Jaringan utlitas yang terdapat di Kecamatan Padamara meliputi jaringan energi dan kelistrikan serta jaringan telekomunikasi.

Jaringan energi dan kelistrikan di Kecamatan Padamara mempunyai sumber energi listrik utama dari PLN. Jangkauan pelayanan listrik oleh PLN sudah menjangkau di seluruh desa/ kelurahan se-Kecamatan Padamara. Jumlah pelanggan listrik di Kecamatan Padamara sebanyak 15.316 pelanggan pada tahun 2020.

Tabel III.79.
Jumlah Pelanggan Listrik di Kecamatan Padamara Tahun 2020

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Pengguna PLN
1	Karangpule	529

No	Desa/Kelurahan	Jumlah Pengguna PLN
2	Kalitinggar	917
3	Sokawera	863
4	Padamara	1.039
5	Karangjambe	1.312
6	Bojanegara	2.031
7	Karangsentul	889
8	Gemuruh	1.378
9	Dawuhan	1.372
10	Prigi	1.071
11	Purbayasa	770
12	Karanggambas	1.374
13	Mipiran	1.162
14	Kalitinggar Kidul	609
Jumlah		15.316

Sumber: Kecamatan Padamara Dalam Angka Tahun 2021

Jaringan telekomunikasi merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi kelancaran informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, keberadaan jaringan telepon di kawasan perencanaan sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas masyarakat. Kebutuhan telekomunikasi masyarakat saat ini dipenuhi dengan adanya jaringan non kabel di wilayah Kecamatan Padamara dengan sebaran lokasi BTS berada di Desa Padamara, Desa Bojanegara, Kelurahan Karangsentul, Desa Dawuhan, dan Desa Mipiran.

Tabel III.80.
Jumlah Menara Telekomunikasi dan Kondisi Sinyal Telepon Seluler di Kecamatan Padamara

No	Desa/Kelurahan	Jumlah BTS	Kondisi Sinyal Telepon Seluler
1	Karangpule	-	Kuat
2	Kalitinggar	-	Kuat
3	Sokawera	-	Kuat
4	Padamara	4	Kuat
5	Karangjambe	-	Kuat
6	Bojanegara	1	Kuat
7	Karangsentul	2	Kuat
8	Gemuruh	-	Kuat
9	Dawuhan	1	Kuat
10	Prigi	-	Kuat
11	Purbayasa	-	Kuat
12	Karanggambas	-	Kuat
13	Mipiran	3	Sangat Kuat
14	Kalitinggar Kidul	-	Kuat

Sumber: Kecamatan Padamara Dalam Angka Tahun 2021



Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.60.
Utilitas di Kecamatan Padamara

3.4. Kecamatan Bojongsari

3.4.1. Kondisi Fisik Kawasan

Kecamatan Bojongsari merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Kecamatan Bojongsari merupakan hasil pemekaran wilayah Kecamatan Kutasari pada awal tahun 1990-an. Bagian utara wilayahnya merupakan lereng Gunung Slamet. Batas wilayah Kecamatan Bojongsari secara administratif dapat diuraikan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Mrebet

Sebelah Timur : Kecamatan Kaligondang

Sebelah Selatan : Kecamatan Purbalingga

Sebelah Barat : Kecamatan Kutasari

Wilayah Kecamatan Bojongsari terbagi dalam 13 desa dengan luas wilayah 4.359,54 Ha atau 5,4% dari luas wilayah Kabupaten Purbalingga. Desa dengan wilayah terluas adalah Desa Bumisari seluas 2.187,29 Ha. Sedangkan luas wilayah terkecil adalah Desa Beji dengan luas 95,58 Ha. Berikut ini merupakan luas wilayah dan peta administrasi Kecamatan Bojongsari.

Tabel III.81.
Luas Wilayah Kecamatan Bojongsari

No	Desa	Luas (Ha)
1	Brobot	153,18
2	Gembong	111,53
3	Galuh	124,33
4	Banjaran	398,75
5	Patemon	172,16
6	Bojongsari	255,79
7	Kajongan	181,19
8	Karangbanjar	152,61
9	Beji	95,58
10	Pagedangan	143,37
11	Pekalongan	227,49

No	Desa	Luas (Ha)
12	Metenggeng	156,28
13	Bumisari	2.187,29
Jumlah		4.359,54

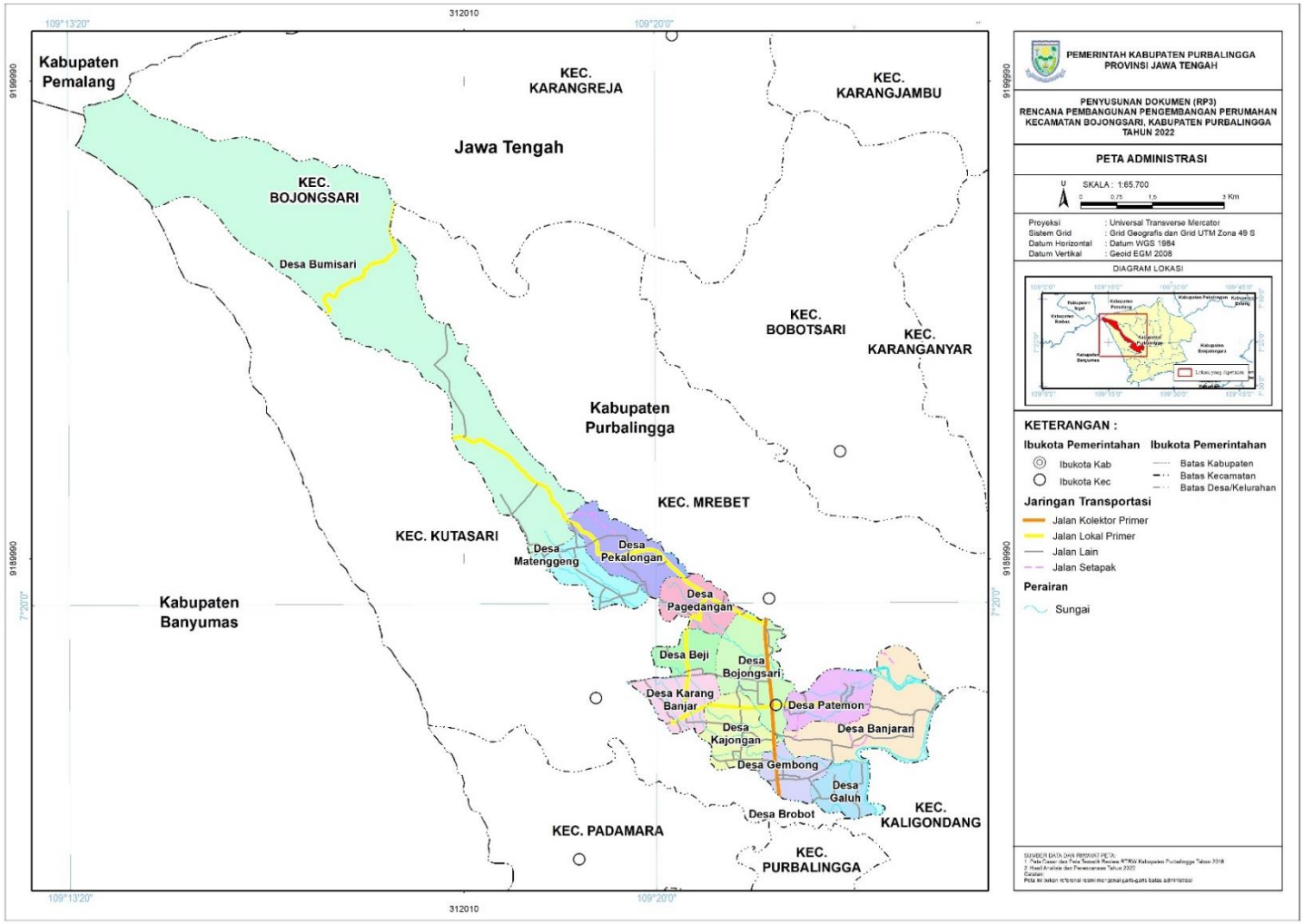
Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020

Wilayah Kecamatan Bojongsari memiliki ketinggian tempat antara 53 meter – 353 meter dari permukaan laut. Menurut klasifikasi ketinggian wilayah Kecamatan Bojongsari termasuk dataran rendah dan dataran tinggi dengan tingkat kemiringan berkisar antara 0 % sampai > 45 %. Topografi di Kecamatan Bojongsari dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.59.

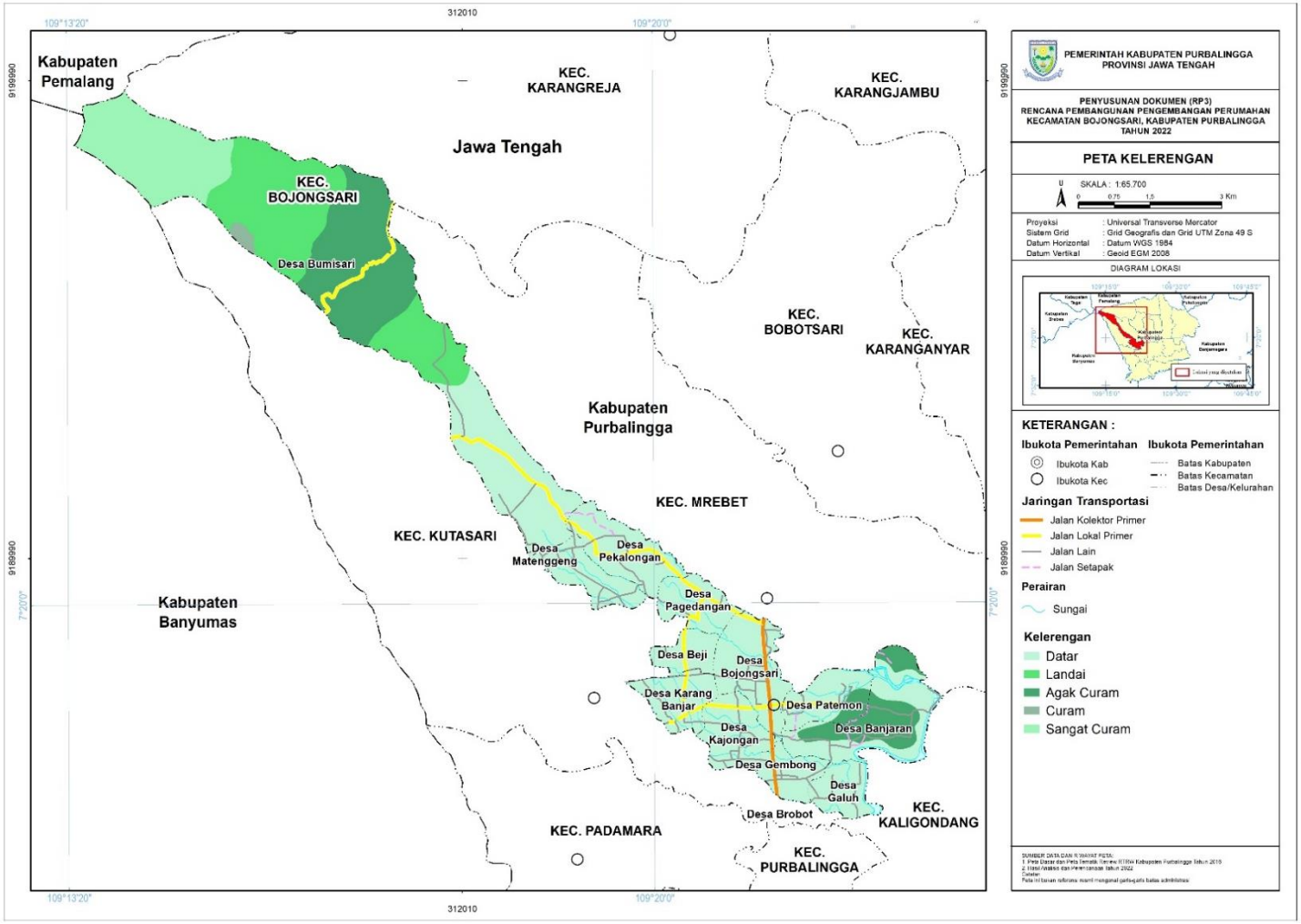
Tabel III.82.
Topografi di Kecamatan Bojongsari

No	Desa	Datar (0 - 8 %)	Landai (8 - 15 %)	Agak Curam (15 - 25 %)	Curam (25 - 45 %)	Sangat Curam (> 45 %)
1	Brobot	153,18	-	-	-	-
2	Gembong	111,53	-	-	-	-
3	Galuh	124,33	-	-	-	-
4	Banjaran	214,21	-	184,54	-	-
5	Patemon	137,78	-	34,37	-	-
6	Bojongsari	255,79	-	-	-	-
7	Kajongan	181,19	-	-	-	-
8	Karangbanjar	152,61	-	-	-	-
9	Beji	95,58	-	-	-	-
10	Pagedangan	143,37	-	-	-	-
11	Pekalongan	227,49	-	-	-	-
12	Metenggeng	156,28	-	-	-	-
13	Bumisari	449,21	704,98	555,32	19,82	457,96
Jumlah		2.402,54	704,98	774,23	19,82	457,96

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020



Gambar 3.61.
Peta Administrasi Kecamatan Bojongsari



Gambar 3.62.
Peta Topografi Kecamatan Bojongsari

Jenis tanah yang ada di Kecamatan Bojongsari dikategorikan menjadi 3 jenis dengan karakteristik yang berbeda. Jenis tanah di Kecamatan Bojongsari berupa aluvial coklat tua, latosol coklat tua kemerahan, serta asosiasi podsolik mereh kuning dan regosol. Jenis tanah di Kecamatan Bojongsari dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.60.

Tabel III.83.
Jenis Tanah di Kecamatan Bojongsari

No	Desa	Jenis Tanah (Ha)		
		Aluvial Coklat Tua	Latosol Coklat Tua Kemerahan	Asosiasi Podsolik Merah Kuning dan Regosol
1	Brobot	-	153,18	-
2	Gembong	-	111,53	-
3	Galuh	0,35	123,98	-
4	Banjaran	63,04	335,71	-
5	Patemon	-	172,16	-
6	Bojongsari	-	255,79	-
7	Kajongan	-	181,19	-
8	Karangbanjar	-	152,61	-
9	Beji	-	95,58	-
10	Pagedangan	-	143,37	-
11	Pekalongan	-	227,49	-
12	Metenggeng	-	156,28	-
13	Bumisari	-	341,91	1.845,38
Jumlah		63,38	2.450,78	1.845,38

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020

Komposisi litologi batuan yang terdapat di Kecamatan Bojongsari terdiri atas:

a. Alluvium endapan rawa dan danau, terutama tersusun oleh lempung, umumnya bersifat kedap air.

b. Endapan alluvium gunung api, terdiri dari bahan-bahan tak mengeras, mengandung bongkah-bongkah batuan gunung api, bergaris tengah 10 – 15 Cm, tersusun oleh andesit sampai basalt dengan kelulusan terhadap air rendah sampai tinggi.

c. Lava andesit berongga asal Gunung Slamet dengan kelulusan terhadap air tinggi sampai sedang.

d. Batu pasir, batu serpih, tufa, breksi dan lempung dengan kelulusan terhadap air rendah.

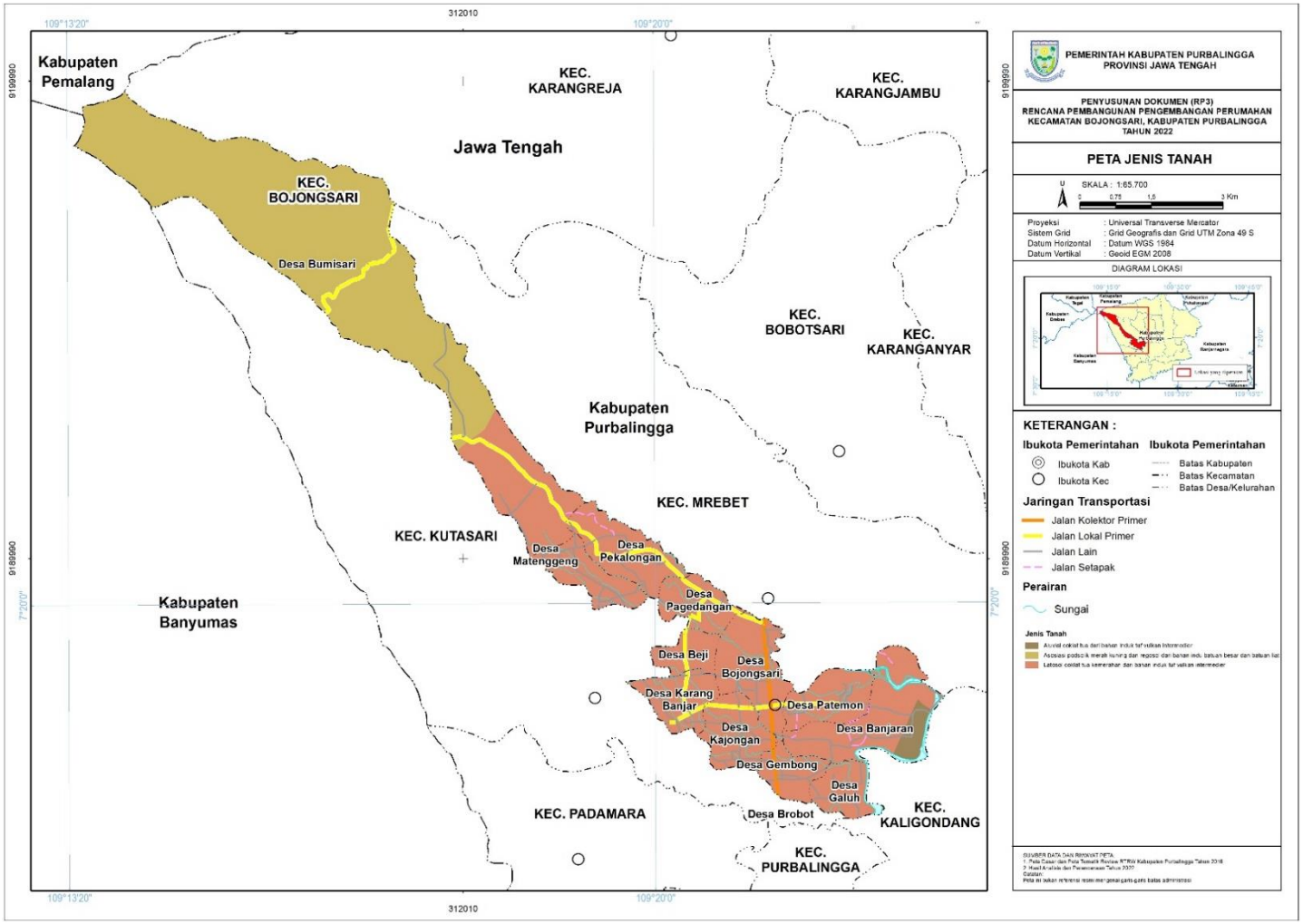
Geologi di Kecamatan Bojongsari dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.61.

Tabel III.84.
Geologi di Kecamatan Bojongsari

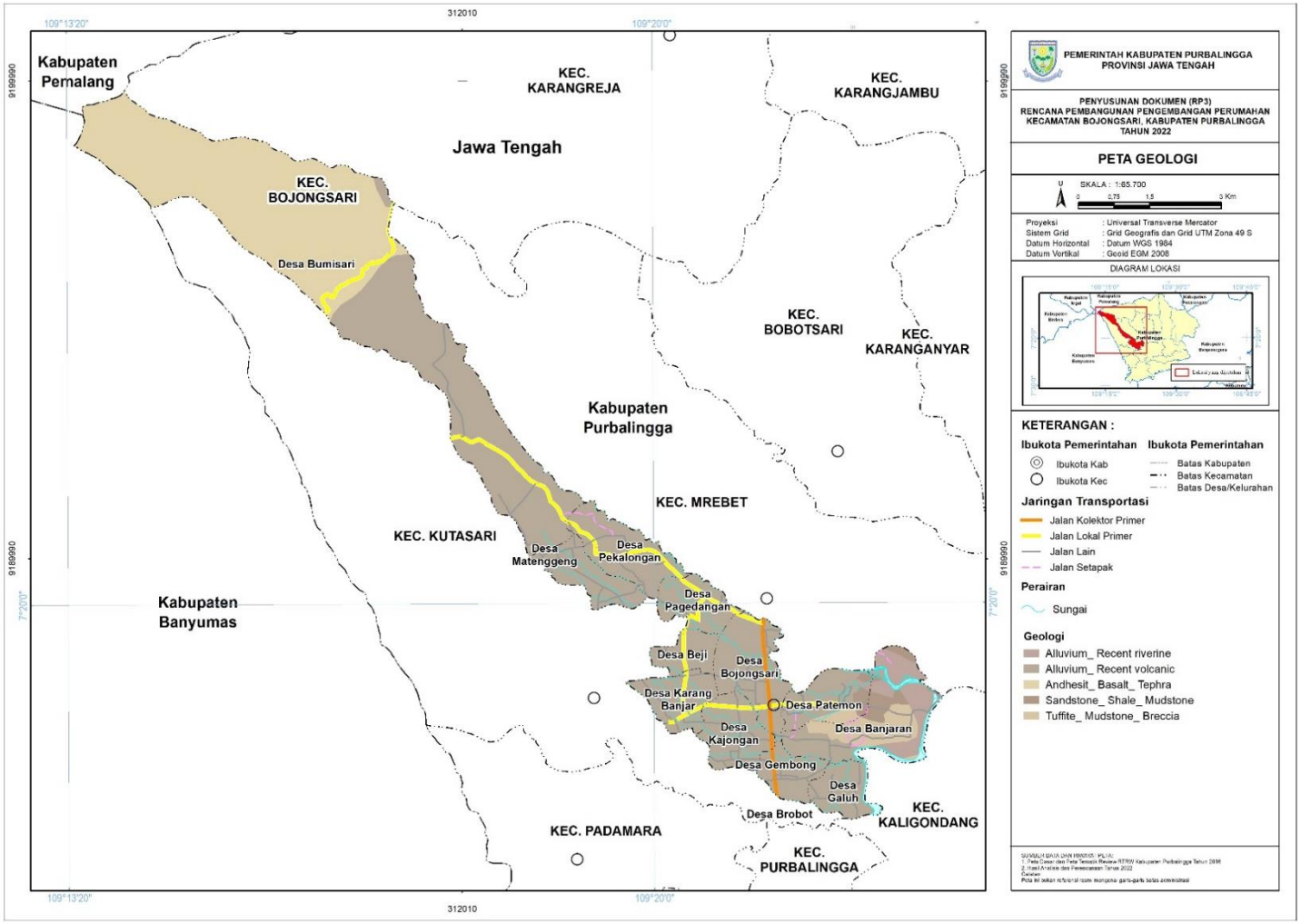
No	Desa	Alluvium Endapan Sungai	Alluvium Endapan Gunung Api	Andhesit	Batu Pasir dan Batu Serpih	Tufa, Breksi dan Lempung
1	Brobot	-	153,18	-	-	-
2	Gembong	-	111,53	-	-	-
3	Galuh	1,09	123,24	-	-	-
4	Banjaran	152,38	78,64	-	45,99	121,74
5	Patemon	6,64	125,12	-	20,42	19,98
6	Bojongsari	-	255,79	-	-	-

No	Desa	Alluvium Endapan Sungai	Alluvium Endapan Gunung Api	Andhesit	Batu Pasir dan Batu Serpih	Tufa, Breksi dan Lempung
7	Kajongan	-	181,19	-	-	-
8	Karangbanjar	-	152,61	-	-	-
9	Beji	-	95,58	-	-	-
10	Pagedangan	-	143,37	-	-	-
11	Pekalongan	-	227,49	-	-	-
12	Metenggeng	-	156,28	-	-	-
13	Bumisari	-	853,21	1.334,08	-	-
Jumlah		160,11	2.657,22	1.334,08	66,41	141,72

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020



Gambar 3.63.
Peta Jenis Tanah Kecamatan Bojongsari



Gambar 3.64.
Peta Geologi Kecamatan Bojongsari

Hidrogeologi yang ada di seluruh wilayah Kecamatan Bojongsari berupa akuifer produktivitas tinggi dengan penyebaran luas, kecuali di Desa Bumisari. Kecamatan Bojongsari masih memiliki daerah dengan kondisi hidrogeologi berupa daerah air langka di Desa Bumisari. Hidrogeologi di Kecamatan Bojongsari dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.62.

Tabel III.85.
Hidrogeologi di Kecamatan Bojongsari

No	Desa	Akuifer dg Prodtvs Sdg dg Penybr Luas	Akuifer Produktif Sedang - Tinggi	Daerah Air Tanah Langka	Kecil, Akuifer Lebih Dalam, Produktif Tinggi	Produktif Sedang dengan Penyebaran Luas	Produktivitas Tinggi & Penyebaran Luas
1	Brobot	-	-	-	-	-	153,18
2	Gembong	-	-	-	-	-	111,53
3	Galuh	-	-	-	-	-	124,33
4	Banjaran	1,88	-	-	-	-	396,87
5	Patemon	-	-	-	-	-	172,16
6	Bojongsari	-	-	-	-	-	255,79
7	Kajongan	-	-	-	-	-	181,19
8	Karangbanjar	-	-	-	-	-	152,61
9	Beji	-	-	-	-	-	95,58
10	Pagedangan	-	-	-	-	-	143,37
11	Pekalongan	-	-	-	146,08	-	81,40
12	Metenggeng	-	-	-	91,38	-	64,90
13	Bumisari	-	1.031,58	368,54	320,75	466,42	-
Jumlah		1,88	1.031,58	368,54	558,21	466,42	1.932,90

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020

Kecamatan Bojongsari termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu dengan Sub DAS Klawing dan Sub DAS Serayu Hilir. Mayoritas wilayah di Kecamatan Bojongsari termasuk dalam Sub DAS Klawing dengan luas 4.182,81 Ha. Sedangkan wilayah Kecamatan Bojongsari yang masuk dalam Sub DAS Serayu Hilir seluas 176,73 Ha. DAS di Kecamatan Bojongsari dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.63.

Tabel III.86.
DAS di Kecamatan Bojongsari

No	Desa	DAS Serayu	
		Sub DAS Klawing	Sub DAS Serayu Hilir
1	Brobot	153,18	-
2	Gembong	111,53	-
3	Galuh	124,33	-
4	Banjaran	398,75	-
5	Patemon	172,16	-
6	Bojongsari	255,79	-
7	Kajongan	181,19	-
8	Karangbanjar	152,61	-
9	Beji	95,58	-
10	Pagedangan	143,37	-
11	Pekalongan	227,49	-

No	Desa	DAS Serayu	
		Sub DAS Klawing	Sub DAS Serayu Hilir
12	Metenggeng	156,28	-
13	Bumisari	2.010,56	176,73
Jumlah		4.182,81	176,73

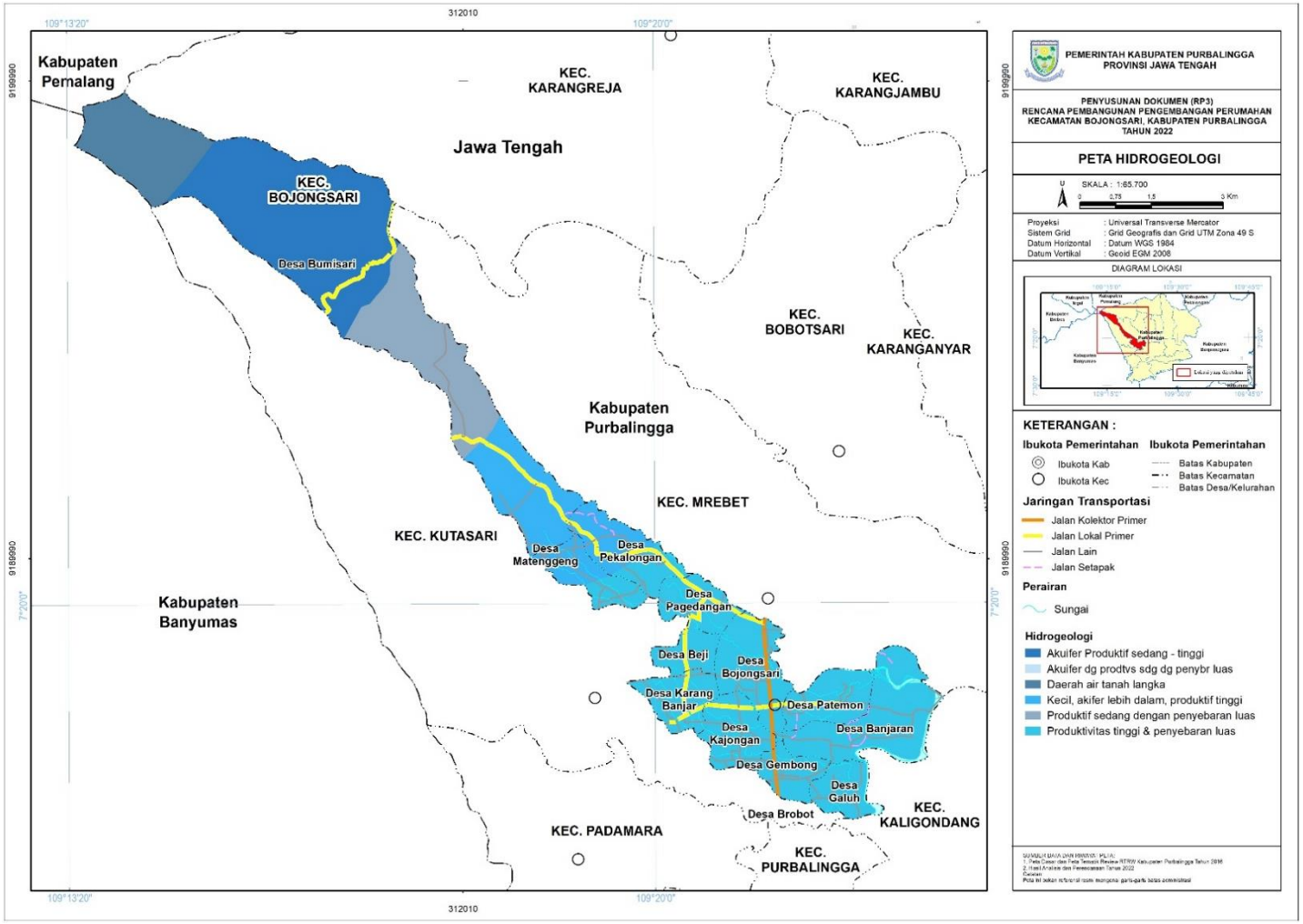
Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020

Klimatologi dapat dilihat berdasarkan rata-rata curah hujan per tahun. Curah hujan sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan letak tempat itu sendiri. Tidak terkecuali untuk wilayah Kecamatan Bojongsari yang memiliki iklim tropis yang relatif basah dengan curah hujan rata-rata per tahun sebesar 3.000 – 5.500 mm. Klimatologi di Kecamatan Bojongsari dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.64.

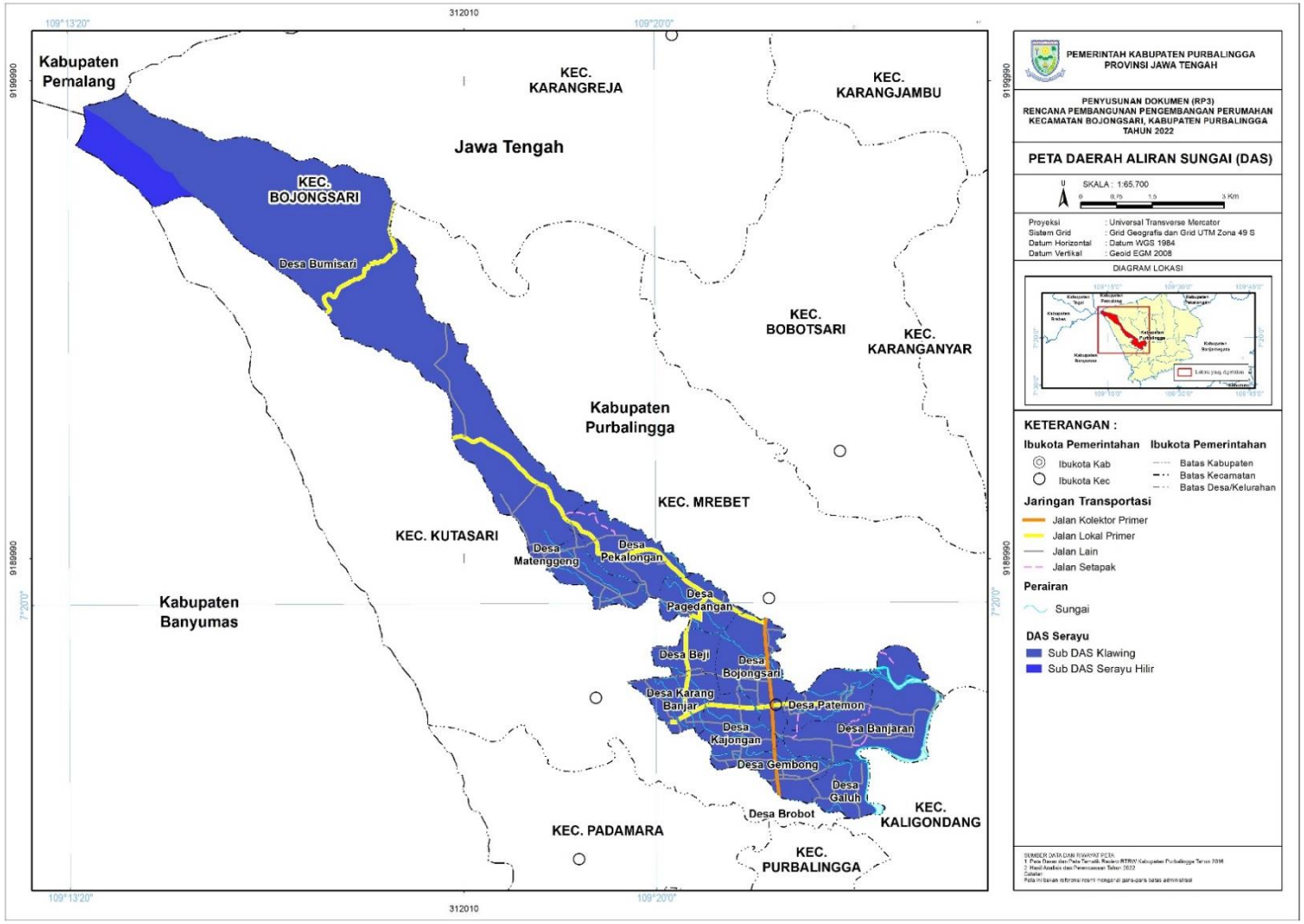
Tabel III.87.
Klimatologi di Kecamatan Bojongsari

No	Desa	Rata-Rata per Tahun 3.000 - 3.500	Rata-Rata per Tahun 3.500 - 4.000	Rata-Rata per Tahun 4.000 - 4.500	Rata-Rata per Tahun 4.500 - 5.000	Rata-Rata per Tahun 5.000 - 5.500
1	Brobot	153,18	-	-	-	-
2	Gembong	111,53	-	-	-	-
3	Galuh	124,33	-	-	-	-
4	Banjaran	398,75	-	-	-	-
5	Patemon	172,16	-	-	-	-
6	Bojongsari	255,79	-	-	-	-
7	Kajongan	181,19	-	-	-	-
8	Karangbanjar	152,61	-	-	-	-
9	Beji	95,58	-	-	-	-
10	Pagedangan	143,37	-	-	-	-
11	Pekalongan	227,49	-	-	-	-
12	Metenggeng	156,28	-	-	-	-
13	Bumisari	335,61	269,23	1.031,46	475,69	75,30
Jumlah		2.507,86	269,23	1.031,46	475,69	75,30

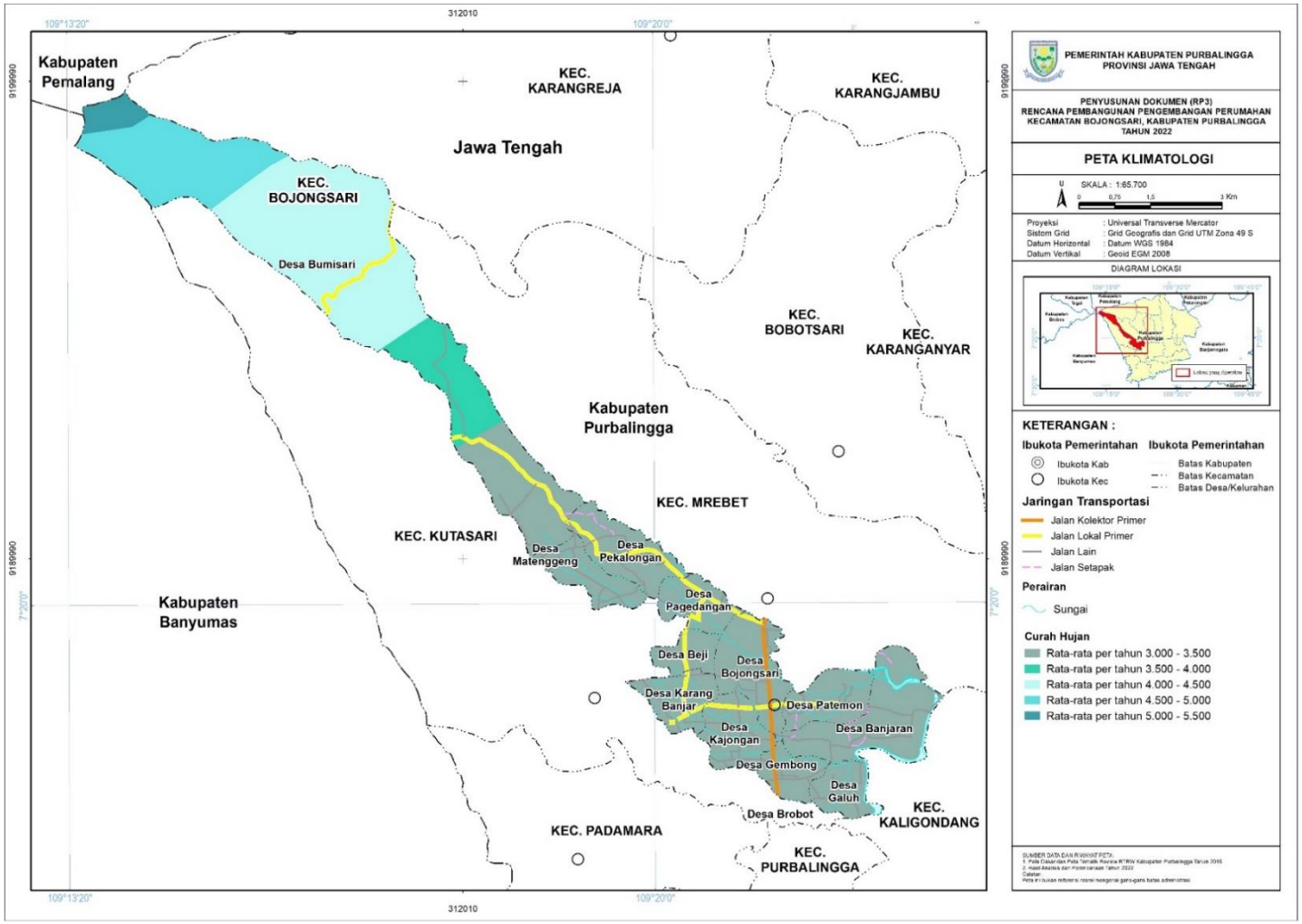
Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020



Gambar 3.65.
Peta Hidrogeologi Kecamatan Bojongsari



Gambar 3.66.
Peta DAS Kecamatan Bojongsari



Gambar 3.67.
Peta Klimatologi Kecamatan Bojongsari

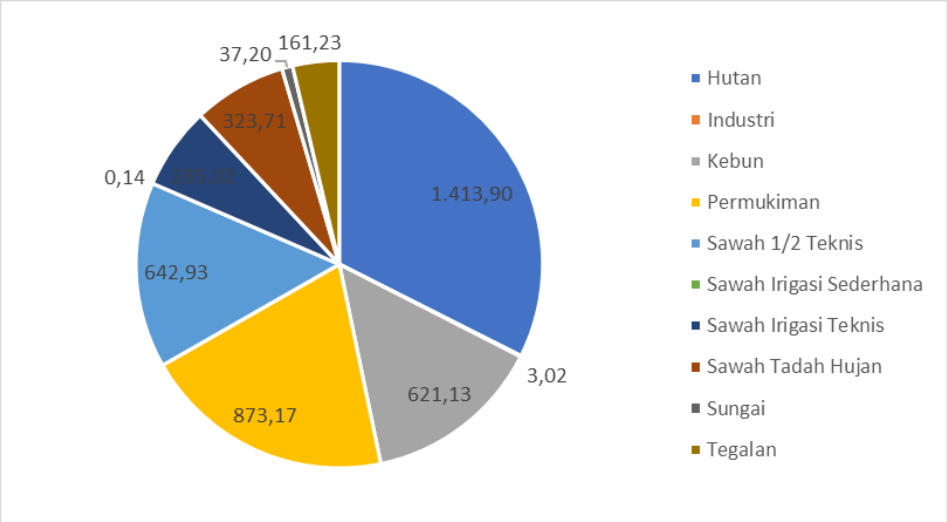
Potensi rawan bencana yang ada di Kecamatan Bojongsari meliputi rawan bencana angin ribut, rawan gunung api, dan rawan banjir. Hanya 7 desa di Kecamatan Bojongsari yang termasuk dalam wilayah rawan bencana. Sebaran rawan bencana di Kecamatan Bojongsari dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.66.

Tabel III.88.
Rawan Bencana di Kecamatan Bojongsari

No	Desa	Rawan Bencana		
		Angin Ribut	Gunung Api	Rawan Banjir
1	Gembong	-	4,40	2,14
2	Galuh	-	-	41,07
3	Banjaran	-	0,16	318,82
4	Patemon	-	33,26	17,37
5	Bojongsari	-	-	0,95
6	Pagedangan	-	11,82	-
7	Bumisari	150,96	44,12	-
Jumlah		150,96	93,76	380,36

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020

Penggunaan lahan di Kecamatan Bojongsari tahun 2020 berupa lahan hutan, industri, kebun, permukiman, lahan sawah setengah teknis, sawah irigasi sederhana, sawah irigasi teknis, sawah tadah hujan, sungai, dan tegalan. Penggunaan lahan di Kecamatan Bojongsari terbesar adalah lahan hutan seluas 1.413,9 Ha. Penggunaan lahan terbesar kedua di Kecamatan Bojongsari digunakan untuk lahan permukiman seluas 873,17 Ha. Luas penggunaan lahan di Kecamatan Bojongsari tahun 2020 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel, grafik, dan Gambar 3.67.

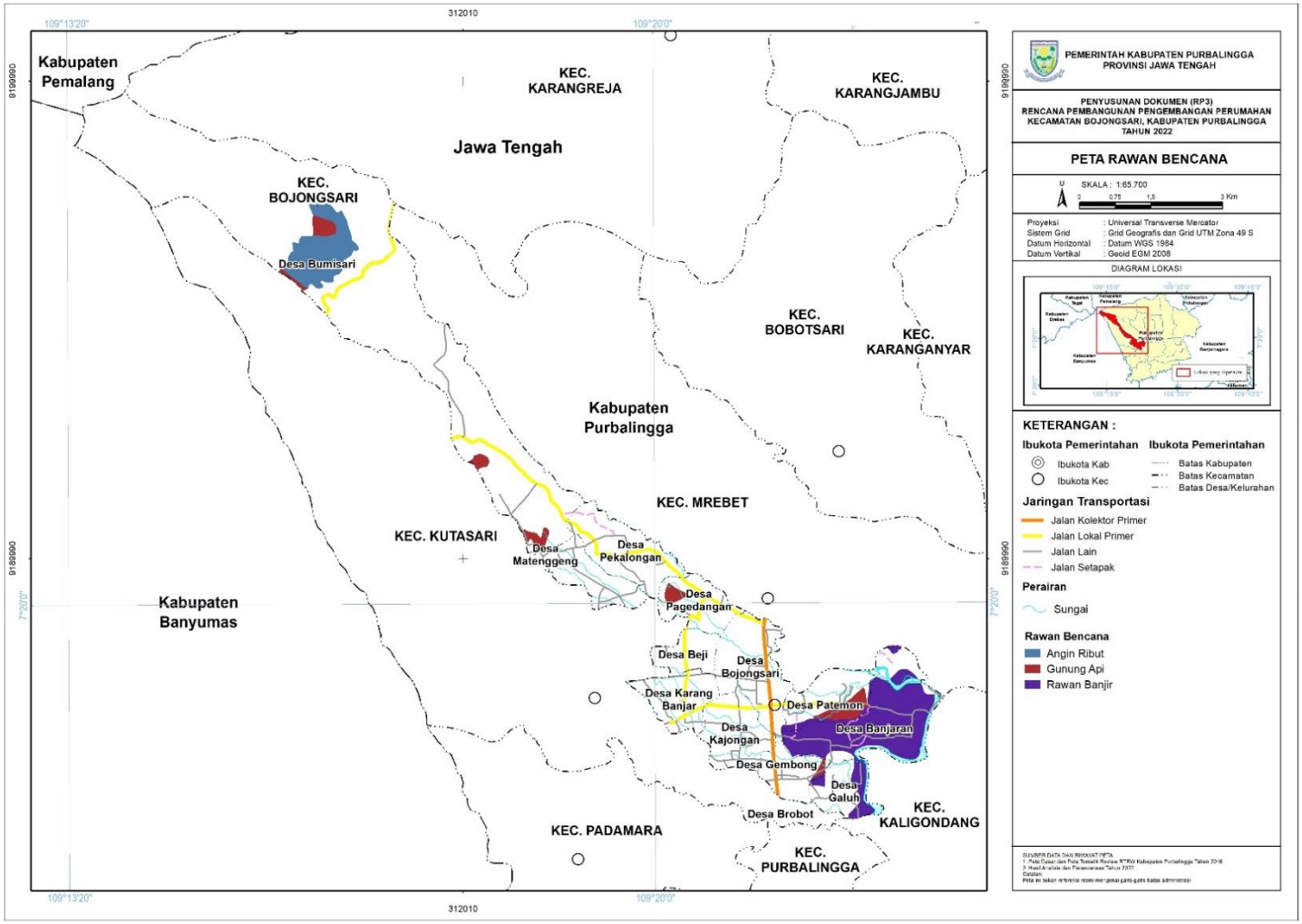


Gambar 3.68.
Luas Penggunaan Lahan Kecamatan Bojongsari Tahun 2020

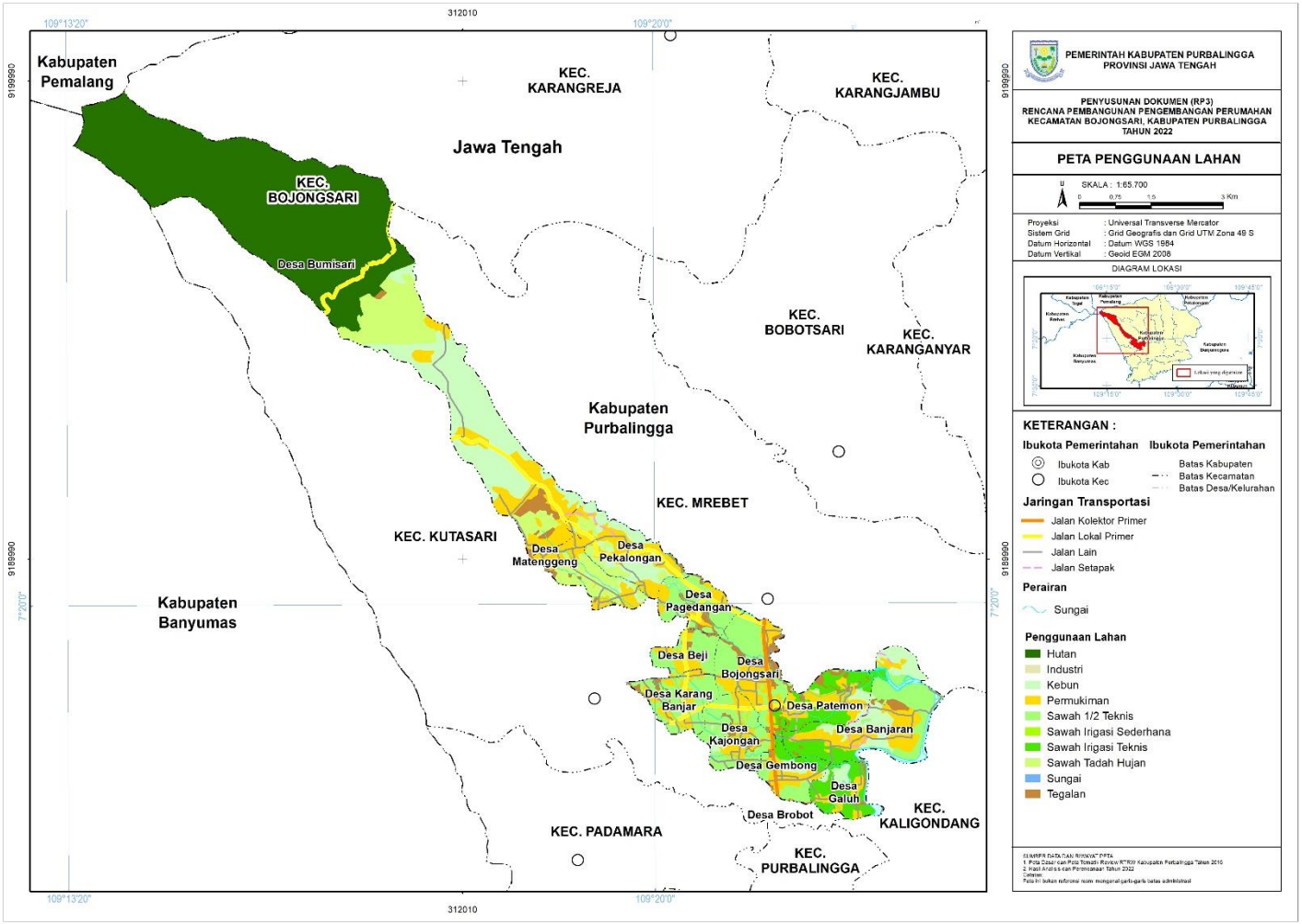
Tabel III.89.
Luas Penggunaan Lahan di Kecamatan Bojongsari Tahun 2020 (hektar)

No	Desa	Penggunaan Lahan (Ha)									
		Hutan	Industri	Kebun	Permukiman	Sawah 1/2 Teknis	Sawah Irigasi Sederhana	Sawah Irigasi Teknis	Sawah Tadah Hujan	Sungai	Tegalan
1	Brobot	-	2,72	-	46,71	57,00	-	35,36	-	-	11,40
2	Gembong	-	-	14,81	37,96	31,58	-	23,55	-	-	3,63
3	Galuh	-	-	18,44	23,25	-	-	70,13	-	7,64	4,87
4	Banjaran	-	-	96,48	107,40	89,45	-	64,36	1,00	28,49	11,57
5	Patemon	-	-	15,01	59,90	1,32	-	81,06	-	1,07	13,80
6	Bojongsari	-	0,30	-	101,52	112,04	-	9,13	-	-	32,80
7	Kajongan	-	-	7,52	58,40	107,41	-	1,42	-	-	6,45
8	Karangbanjar	-	-	-	46,67	97,21	0,14	0,01	-	-	8,57
9	Beji	-	-	1,50	31,97	57,12	-	-	-	-	6,48
10	Pagedangan	-	-	1,64	34,53	88,70	-	-	-	-	18,89
11	Pekalongan	-	-	82,56	105,16	1,11	-	-	35,42	-	3,24
12	Metenggeng	-	-	10,09	61,05	-	-	-	77,88	-	7,26
13	Bumisari	1.413,90	-	373,07	158,64	-	-	-	209,42	-	32,26
Jumlah		1.413,90	3,02	621,13	873,17	642,93	0,14	285,02	323,71	37,20	161,23

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020



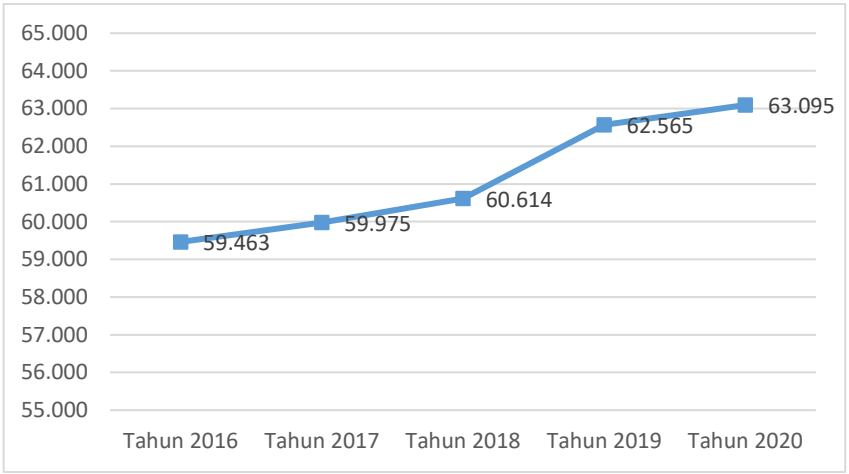
Gambar 3.69.
Peta Rawan Bencana Kecamatan Bojongsari



Gambar 3.70.
Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Bojongsari

3.4.2. Kondisi Kependudukan, Sosial, dan Budaya

Perkembangan jumlah penduduk di Kecamatan Bojongsari dalam kurun waktu lima tahun terakhir tepatnya tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kecamatan Bojongsari tahun 2016 sebanyak 59.463 jiwa mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 menjadi sebanyak 63.095 jiwa. Jumlah penduduk di Kecamatan Bojongsari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Kecamatan Bojongsari Dalam Angka Tahun 2017-2021

Gambar 3.71.
Jumlah Penduduk Kecamatan Bojongsari Tahun 2016-2020

Jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Bumisari sebesar 7.863 jiwa. Penduduk terkecil berada di Desa Galuh dengan jumlah sebanyak 3.199 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk di Kecamatan Bojongsari sebesar 103 yang berarti terdapat 103 penduduk laki-laki setiap 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin di seluruh wilayah Kecamatan Bojongsari lebih dari 100. Secara rinci jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Bojongsari tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.90.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Bojongsari Tahun 2020

No	Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
1	Brobot	4.043	101,6
2	Gembong	3.600	101,7
3	Galuh	3.199	113,7
4	Banjaran	6.027	104
5	Patemon	4.399	108
6	Bojongsari	6.357	103,9
7	Kajongan	5.366	104
8	Karangbanjar	4.308	102,9
9	Beji	3.969	101,4
10	Pagedangan	3.984	104,3
11	Pekalongan	5.736	101,8
12	Metenggeng	4.244	102,5
13	Bumisari	7.863	103,5
Jumlah		63.095	103,90

Sumber: Kecamatan Bojongsari Dalam Angka Tahun 2021

Kepadatan penduduk di Kecamatan Bojongsari tahun 2020 terbesar terdapat pada Desa Beji yaitu sebesar 42 jiwa/Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 3.969 jiwa dan luas wilayah hanya 95,58 Ha. Sedangkan, kepadatan penduduk terkecil terdapat pada Desa Bumisari dengan kepadatan penduduk sebesar 4 jiwa/Ha, dikarenakan sebagian besar wilayah Desa Bumisari merupakan hutan. Secara rinci kepadatan penduduk di Kecamatan Bojongsari tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.91.
Kepadatan Penduduk di Kecamatan Bojongsari Tahun 2020

No	Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas (Ha)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Ha)
1	Brobot	4.043	153,18	26
2	Gembong	3.600	111,53	32
3	Galuh	3.199	124,33	26
4	Banjaran	6.027	398,75	15
5	Patemon	4.399	172,16	26
6	Bojongsari	6.357	255,79	25
7	Kajongan	5.366	181,19	30
8	Karangbanjar	4.308	152,61	28
9	Beji	3.969	95,58	42
10	Pagedangan	3.984	143,37	28
11	Pekalongan	5.736	227,49	25
12	Metenggeng	4.244	156,28	27
13	Bumisari	7.863	2.187,29	4
Jumlah		63.095	4.359,54	14

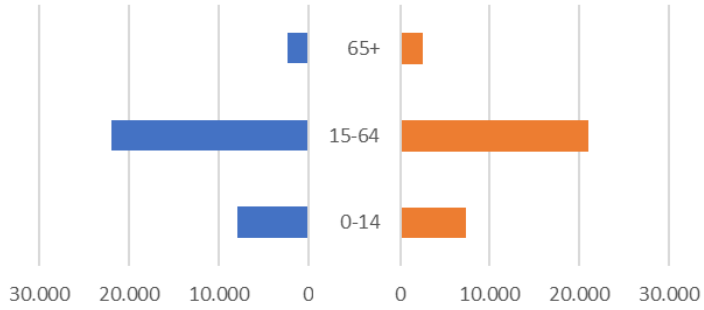
Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Penduduk menurut kelompok umur di Kecamatan Bojongsari terbagi menjadi rentang usia belum produktif (<14 Tahun), usia produktif (15-64 Tahun), dan usia tidak produktif (>64 tahun). Kecamatan Bojongsari memiliki struktur umur yang dominan pada umur 15-64 tahun dimana umur ini merupakan usia produktif. Tingkat ketergantungan Kecamatan Bojongsari tahun 2020 adalah sebesar 46% dengan komposisi usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 42.931 jiwa dan usia tidak produktif (<14 tahun dan >64 tahun) sebanyak 20.164 jiwa. Hal ini berarti sebanyak 100 penduduk usia produktif menanggung 46 penduduk usia tidak produktif.

Tabel III.92.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kecamatan Bojongsari Tahun 2020

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-14	7.870	7.399	15.269
15-64	21.922	21.009	42.931
65+	2.354	2.541	4.895
Jumlah	32.146	30.949	63.095

Sumber: Kecamatan Bojongsari Dalam Angka Tahun 2021



Sumber: Kecamatan Bojongsari Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 3.72.
Piramida Penduduk Kecamatan Bojongsari Tahun 2020

Berdasarkan piramida penduduk di atas, untuk kelompok umur 15-64 tahun mempunyai panjang batang lebih panjang dibanding kelompok umur lainnya. Kondisi ini menjelaskan struktur penduduk usia produktif cenderung lebih besar. Struktur penduduk di usia tidak produktif lebih kecil dibanding kelompok usia produktif.

Penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat dari jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan utama. Jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan utama di Kecamatan Bojongsari meliputi pekerjaan dalam bidang pertanian, pekerjaan dalam bidang industri, pekerjaan dalam bidang perdagangan, dan lainnya. Lapangan perkerjaan utama di Kecamatan Bojongsari tahun 2020 paling banyak adalah karyawan sebanyak 14.508 jiwa. Sedangkan, lapangan pekerjaan dalam bidang kontruksi hanya sebanyak 30 jiwa.

Tabel III.93.
Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kecamatan Bojongsari Tahun 2020

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pensiunan	204	85	289
PNS/ ABRI/ TNI	396	189	585
Perdagangan	1.582	1.710	3.292
Pertanian	2.452	2.377	4.829
Industri	48	41	89
Kontruksi	30		30
Buruh	3.401	2.474	5.875
Karyawan	7.469	7.039	14.508
Wiraswasta	3.311	1.785	5.096
Lainnya	860	354	1.214
Jumlah	19.753	16.054	35.807

Sumber: Kecamatan Bojongsari Dalam Angka Tahun 2021

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kecamatan Bojongsari tahun 2020 paling banyak adalah pada tingkatan SD/ Sederajat sebanyak 22.837 jiwa. Sedangkan, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kecamatan Bojongsari tahun 2020 paling sedikit yaitu pada tingkat pendidikan Strata II sebanyak 30 jiwa.

Tabel III.94.
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kecamatan Bojongsari Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/ Belum Sekolah	7.394	6.783	14.177
Belum Tamat SD/ Sederajat	3.070	2.878	5.948
SD/ Sederajat	11.322	11.515	22.837
SLTP/ Sederajat	5.635	5.706	11.341
SLTA/ Sederajat	4.085	3.274	7.359
Diploma I/ II	85	81	166
Akademi/ Diploma III	170	223	393
Diploma IV/ Strata I	567	591	1.158
Strata II	22	8	30

Sumber: Kecamatan Bojongsari Dalam Angka Tahun 2021

Masyarakat Purbalingga adalah pendukung kebudayaan Jawa dan masyarakatnya terbiasa kontak dengan pendukung budaya lain. Oleh karena itu, masyarakatnya relatif terbuka. Artinya, menerima siapa saja yang datang, berusaha, dan bermukim di daerahnya.

Hubungan antar masyarakat Purbalingga masih memiliki karakteristik guyub ditunjukkan apabila warga mengadakan acara, misalnya pernikahan, khitanan, membangun rumah atau ada yang meninggal dunia, maka masyarakat akan berkunjung dan membantu ke tempat warga tersebut. Disamping itu pula terdapat interaksi sosial yang berbentuk kerjasama yaitu kegiatan gotong-royong, bentuk kerjasama ini dapat diwujudkan berupa tenaga, bahan material ataupun uang. Sedangkan gotong-royong dalam bentuk kerja bakti seperti membersihkan lingkungan dan memperbaiki jalan.

Permukiman di Kecamatan Bojongsari terdiri dari permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan. Karakteristik permukiman perkotaan lebih modern tersedia sarana prasarana pendukung lebih lengkap. Masyarakat permukiman perkotaan berkegiatan bukan pertanian karena sebagian besar lahan terbangun dan bermata pencaharian dalam bidang industri pengolahan dan jasa. Karakteristik permukiman perdesaan berupa hunian dan lingkungan yang bersifat pedesaan. Masyarakat permukiman perdesaan berkegiatan dalam bidang pertanian, karena masih banyak lahan pertanian.

3.4.3. Kondisi Perekonomian

Sektor perekonomian unggulan di Kecamatan Bojongsari yang dapat mendukung pengembangan Kecamatan Bojongsari berasal dari sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan, sektor perikanan, sektor pariwisata, dan sector industri. Sektor pertanian paling besar berupa produksi tanaman pangan sebanyak 9.745,11 ton padi sawah. Kecamatan Bojongsari juga memiliki komoditas unggulan sayur-sayuran yang berupa buncis, cabai besar, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, petsai/sawi terung, dan tomat.

Sektor perkebunan yang terdapat di Kecamatan Bojongsari meliputi kelapa dalam, kelapa deres, kopi, dan tebu. Sektor peternakan yang terdapat di Kecamatan

Bojongsari meliputi sapi perah, sapi potong, kuda, kerbau, domba, kambing, ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, itik, itik manila, dan angsa. Sektor perikanan juga menjadi sektor ekonomi unggalan di Kecamatan Bojongsari. Jenis perikanan di Kecamatan Bojongsari berupa perikanan budidaya dengan kolam, sawah, dan lainnya. Sektor pariwisata juga merupakan salah satu sektor ekonomi unggulan yang dapat mendukung pengembangan Kecamatan Bojongsari. Objek wisata yang terdapat di Kecamatan Bojongsari, yaitu Desa Wisata Karangbanjar dan Obyek Wisata Air Bojongsari (Owabong) yang berada di Desa Bojongsari.

Selain itu, di Kecamatan Bojongsari terdapat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri. Industri di Kecamatan Bojongsari hanya terdapat di Desa Brobot dan Desa Patemon. Luas total penggunaan lahan untuk industri di Kecamatan Bojongsari seluas 3,02 Ha.

Sektor perekonomian unggulan di Kecamatan Bojongsari ditunjang dengan adanya sarana perekonomian. Sarana perekonomian yang terdapat di Kecamatan Bojongsari tahun 2020 berupa kelompok pertokoan, pasar, minimarket/ swalayan, toko/ warung kelontong/ restoran/ rumah makan, warung/ kedai makanan, dan hotel/ hostel/ motel/ losmen/ wisma. Sarana perekonomian berupa toko/ warung kelontong dan warung/ kedai makanan tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Bojongsari. Sedangkan, jumlah sarana perdagangan pasar adalah sebanyak 3 unit, yaitu di Desa Gembong, Desa Bojongsari, dan Desa Beji.

Tabel III.95.
Sarana Perekonomian di Kecamatan Bojongsari Tahun 2020

No	Desa	Pertokoan	Pasar	Minimarket	Toko	Restoran	Warung	Hotel
1	Brobot	-	-	-	60	-	16	-
2	Gembong	1	1	2	19	-	30	-
3	Galuh	-	-	-	27	-	11	-
4	Banjaran	-	-	-	34	-	16	-
5	Patemon	-	-	1	15	-	10	-
6	Bojongsari	2	1	2	140	1	51	10
7	Kajongan	1	-	-	22	2	10	-
8	Karangbanjar	-	-	2	44	-	32	12
9	Beji	-	1	1	25	-	15	-
10	Pagedangan	-	-	-	55	-	10	-
11	Pekalongan	-	-	-	43	-	24	-
12	Matenggeng	-	-	-	37	-	13	-
13	Bumisari	-	-	-	85	-	32	-
Jumlah		4	3	8	606	3	270	22

Sumber: Kecamatan Bojongsari Dalam Angka Tahun 2021

3.4.4. Kondisi Perumahan

3.4.5.1. Sebaran Perumahan

Deliniasi sebaran perumahan didasarkan pada administrasi desa, sedangkan satuan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang dibatasi oleh batas fisik alam seperti jalan atau sungai.

Tabel III.96.
Sebaran Perumahan di Kecamatan Bojongsari

No	Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)
1	Brobot	32,90
2	Gembong	36,92
3	Galuh	27,33
4	Banjaran	107,83
5	Patemon	57,75
6	Bojongsari	100,90
7	Kajongan	57,21
8	Karangbanjar	46,55
9	Beji	31,94
10	Pagedangan	39,65
11	Pekalongan	91,60
12	Matenggeng	55,15
13	Bumisari	142,85
Jumlah		828,59

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021

Jumlah rumah di Kecamatan Bojongsari sebanyak 13.182 unit rumah. Tipe fungsi rumah di Kecamatan Bojongsari berfungsi sebagai hunian, setengah hunian, dan non hunian. Rumah non hunian berada pada sepanjang jalan kolektor primer Jalan Purbalingga – Pemalang, sedangkan rumah dengan fungsi setengah hunian berada pada pusat-pusat kegiatan kecamatan atau desa dengan bagian depan rumah difungsikan sebagai warung/ toko. Sedangkan, rumah yang berada di sekitar industri sebagian besar difungsikan sebagai kos. Jenis rumah yang terdapat di Kecamatan Bojongsari berupa rumah komersial, rumah umum bagi MBR, dan rumah swadaya. Bentuk rumah di Kecamatan Bojongsari pada wilayah sekitar Jalan Purbalingga – Pemalang berupa rumah deret, pada Dusun 2 Desa Pagedangan terdapat beberapa rumah padat penduduk. Sedangkan rumah yang berada pada wilayah perdesaan berbentuk rumah tunggal dengan halaman besar.

Tabel III.97.
Jumlah Rumah di Kecamatan Bojongsari Tahun 2020

No	Desa	Jumlah Rumah
1	Brobot	835
2	Gembong	790
3	Galuh	624
4	Banjaran	1.226
5	Patemon	905
6	Bojongsari	1.334
7	Kajongan	1.116
8	Karangbanjar	935
9	Beji	877
10	Pagedangan	824
11	Pekalongan	1.209
12	Matenggeng	853
13	Bumisari	1.653
Jumlah		**13.182**

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga, 2020



(a)



(b)

(a) Rumah tunggal
(b) Rumah deret

Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.73.
Perumahan di Kecamatan Bojongsari

3.4.5.2. Sebaran Perumahan Developer

Kebutuhan rumah di Kecamatan Bojongsari akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kebutuhan rumah ini dapat dipenuhi secara swadaya maupun oleh developer/pengembang. Perumahan di Kecamatan Bojongsari tersebar di beberapa wilayah. Seiring dengan peningkatan kebutuhan rumah maka jumlah pengembang perumahan yang ada di Kecamatan Bojongsari juga meningkat. Jumlah perumahan developer yang ada di Kecamatan Bojongsari sebanyak 4 perumahan. Namun, hanya 2 perumahan di Kabupaten Bojongsari yang sudah diserahterimakan aset PSUnya. Berdasarkan perumahan developer yang tergabung di dalam persatuan perusahaan Real Estate Indonesia (REI) sebanyak 3 perumahan developer yang dibangun setelah tahun 2016. Sedangkan, berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga, terdapat 1 perumahan developer. Perumahan developer yang ada di Kecamatan Bojongsari rata-rata memiliki tipe MBR. Berikut ini merupakan perumahan pengembang di Kecamatan Bojongsari berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.

Tabel III.98.
Perumahan Pengembang di Kecamatan Bojongsari

Desa/ Kelurahan	Nama Perumahan Pengembang	Jumlah Rumah	Luas Total Tanah
Patemon	Citra Perwira Patemon	81	10.090

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga



(a)



(b)

(a) Perumahan Citra Perwira Patemon
(b) Perumahan Grand Safira

Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.74.
Perumahan Pengembang di Kecamatan Bojongsari

3.4.5.3. Kawasan PKP Pada Kawasan Strategis

Kecamatan Bojongsari terdapat kawasan strategis wilayah kabupaten. Kawasan strategis di Kecamatan Bojongsari meliputi Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi. Perumahan yang berada pada kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Bojongsari seluas 994,04 ha.

Tabel III.99.
Luas Kawasan PKP Pada Kawasan Strategis

Kawasan Strategis	Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)
Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi	Banjaran	115,54
	Beji	40,00
	Bojongsari	133,72
	Brobot	70,50
	Bumisari	186,78
	Galuh	34,74
	Gembong	61,62
	Karangbanjar	62,68
	Metenggeng	61,64
	Pagedangan	45,95
	Patemon	63,24
	Pekalongan	117,62

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021

3.4.5.4. Kawasan PKP Tidak Sesuai Tata Ruang (*Negative List*)

Rencana pengembangan kawasan permukiman seharusnya tidak berada di wilayah *negative list* dan harus sesuai dengan peruntukan tata ruang dalam RTRW Kabupaten Purbalingga. Permukiman eksisting di Kecamatan Bojongsari berada pada rencana pola ruang yang telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Purbalingga dan tidak berada pada wilayah *negative list*.

3.4.5.5. Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana

Kecamatan Bojongsari terdapat beberapa perumahan yang berada di daerah rawan bencana. Perumahan yang berada di kawasan rawan bencana gempa bumi, gerakan tanah, angin topan, dan letusan gunung api. Menurut data BPBD Kabupaten Purbalingga, terdapat penduduk di Kecamatan Bojongsari yang terancam bencana. Hal tersebut karena permukiman berada di kawasan rawan bencana gunung api. Penduduk di Kecamatan Bojongsari yang terancam bencana gunung api sebanyak 20 KK.

3.4.5.6. Kawasan PKP Terdampak Program Pembangunan Pemerintah

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan seharusnya tidak berada di wilayah yang terdampak program pembangunan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Perumahan eksisting di seluruh wilayah di Kecamatan Bojongsari tidak berada pada wilayah yang terdampak program pembangunan pemerintah Kabupaten Purbalingga.

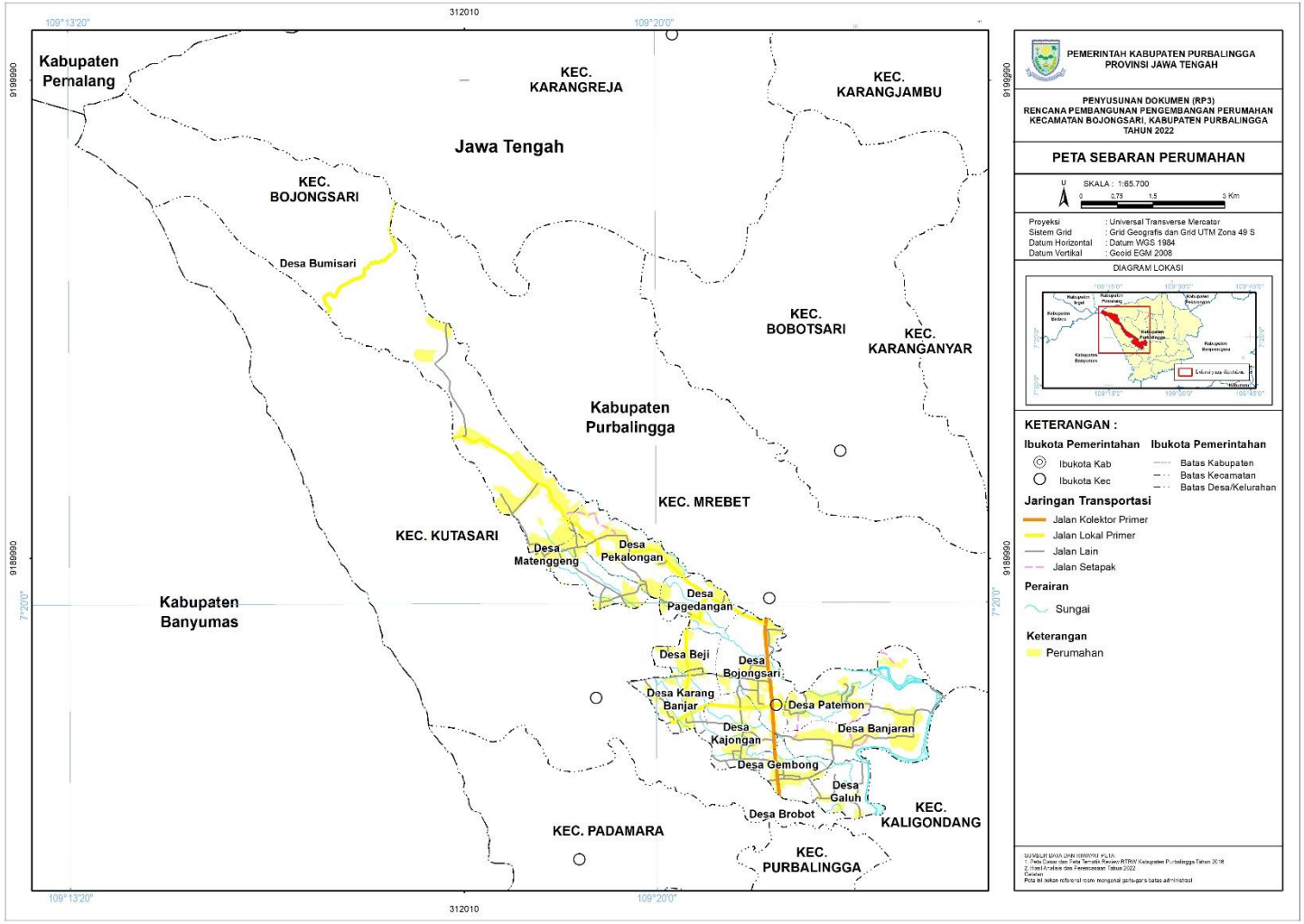
Tabel III.100.
Luas Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana

No	Desa/ Kelurahan	KRB Gempabumi Menengah, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan	KRB Gempabumi Menengah, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan	KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Sangat Rendah dan Angin Topan	KRB Gempabumi Tinggi, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan
1	Brobot	-	-	-	69,68	0,82	-
2	Gembong	-	-	-	61,62	-	-
3	Galuh	-	-	-	26,41	8,32	-
4	Banjaran	-	-	71,68	43,86	-	-
5	Patemon	-	-	38,68	8,18	-	-
6	Bojongsari	-	-	-	124,55	-	-
7	Kajongan	-	-	-	76,63	-	-
8	Karangbanjar	-	-	-	62,68	-	-
9	Beji	-	0,06	-	39,93	-	-
10	Pagedangan	-	36,11	-	0,73	-	-
11	Pekalongan	12,72	98,13	-	-	-	-
12	Matenggeng	-	61,64	-	-	-	-
13	Bumisari	8,82	112,47	-	-	-	33,70
Jumlah		21,53	308,41	110,35	444,60	8,32	33,70

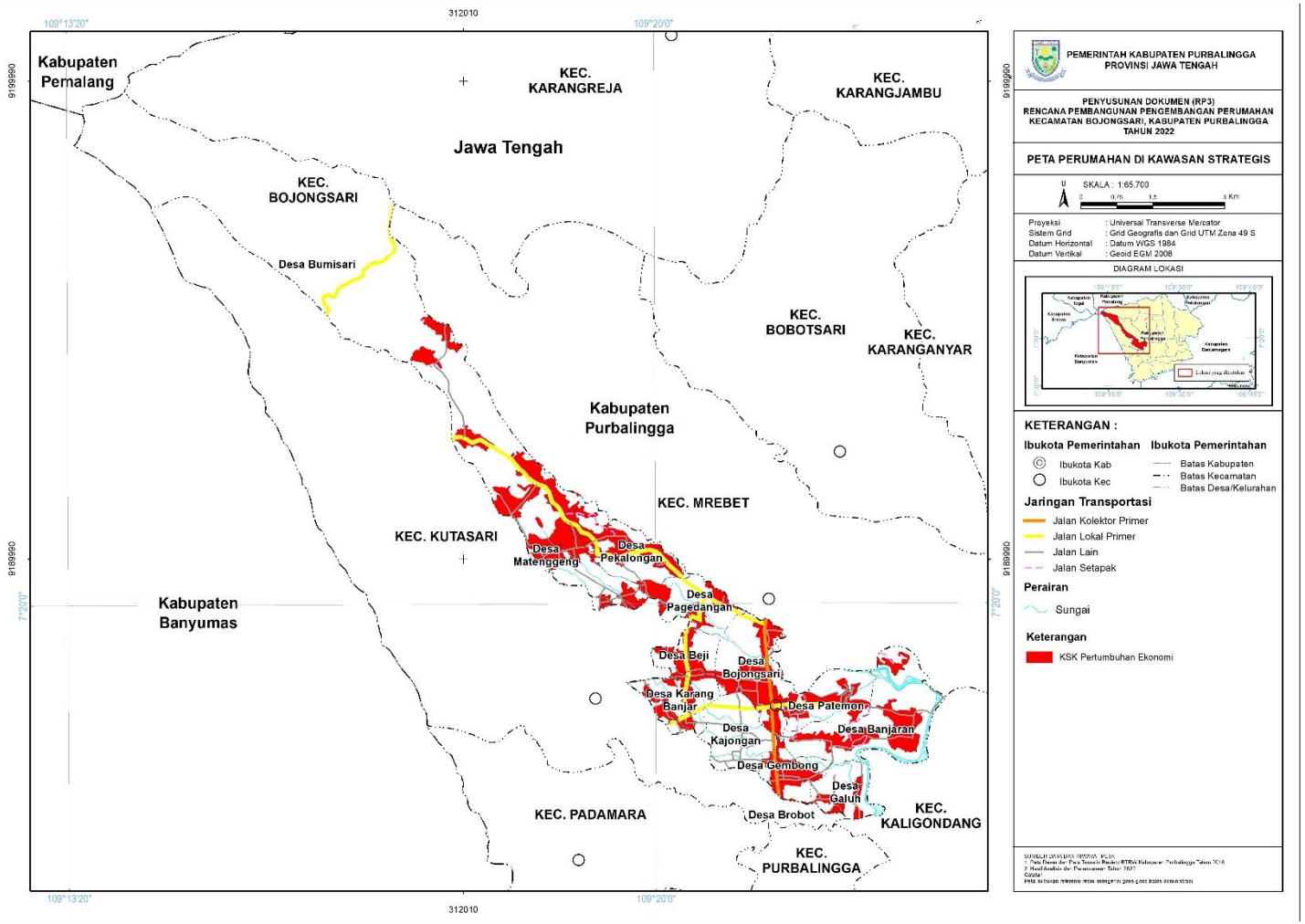
Lanjutan…

No	Desa/ Kelurahan	KRB Gempabumi Tinggi, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	KRB I Letusan Gunung Api, Gempabumi Menengah, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan	KRB I Letusan Gunung Api, Gempabumi Menengah, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	KRB I Letusan Gunung Api, Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan	KRB I Letusan Gunung Api, Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	KRB I Letusan Gunung Api, Gempabumi Tinggi, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan
1	Brobot	-	-	-	-	-	-
2	Gembong	-	-	-	-	-	-
3	Galuh	-	-	-	-	-	-
4	Banjaran	-	-	-	-	-	-
5	Patemon	-	-	-	14,59	1,80	-
6	Bojongsari	-	-	0,62	-	8,55	-
7	Kajongan	-	-	-	-	-	-
8	Karangbanjar	-	-	-	-	-	-
9	Beji	-	-	-	-	-	-
10	Pagedangan	-	-	9,11	-	-	-
11	Pekalongan	-	1,72	5,05	-	-	-
12	Matenggeng	-	-	-	-	-	-
13	Bumisari	17,74	-	8,52	-	-	5,53
Jumlah		17,74	1,72	23,31	14,59	10,35	5,53

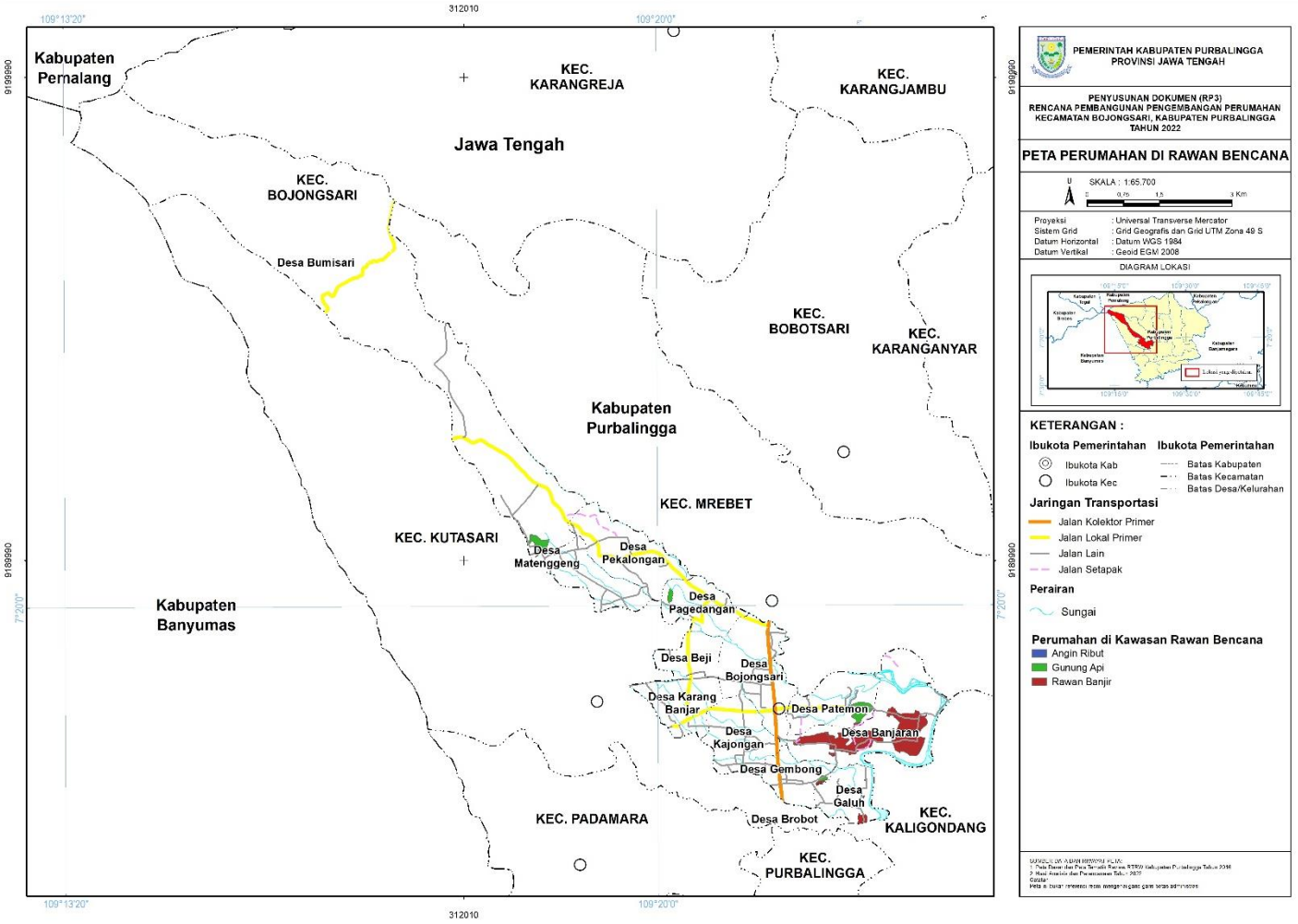
Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021



Gambar 3.75.
Peta Sebaran Permukiman di Kecamatan Bojongsari



Gambar 3.76.
Peta Kawasan PKP Pada Kawasan Strategis di Kecamatan Bojongsari



Gambar 3.77.
Peta Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana

3.4.5.7. Jumlah dan Sebaran Kebutuhan Rumah (Backlog)

Kekurangan rumah/ backlog di Kecamatan Bojongsari pada tahun 2020 mencapai 7.604 rumah. Jumlah ini akan bertambah seiring dengan bertambahnya penduduk di Kecamatan Bojongsari. Sebaran backlog di Kecamatan Bojongsari dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.101.
Kekurangan Rumah/ Backlog di Kecamatan Bojongsari Tahun 2020

No	Desa	Jumlah KK	Jumlah Rumah	Backlog Tahun 2020	Total Luas Kebutuhan Permukiman (Ha)
1	Brobot	1.317	835	482	5,26
2	Gembong	1.246	790	456	4,98
3	Galuh	984	624	360	3,93
4	Banjaran	1.934	1.226	708	7,73
5	Patemon	1.427	905	522	5,70
6	Bojongsari	2.104	1.334	770	8,41
7	Kajongan	1.759	1.116	643	7,03
8	Karangbanjar	1.474	935	539	5,89
9	Beji	1.383	877	506	5,53
10	Pagedangan	1.300	824	476	5,19
11	Pekalongan	1.907	1.209	698	7,62
12	Matenggeng	1.345	853	492	5,37
13	Bumisari	2.606	1.653	953	10,41
Jumlah		20.786	13.182	7.604	83,06

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021

3.4.5.8. Jumlah dan Sebaran Rumah Tidak Layah Huni (RTLH)

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Bojongsari versi BDT tahun 2020 adalah sebesar 4.404 unit. Sedangkan, RTLH di kawasan kumuh sebanyak 26 unit yaitu berada di Desa Brobot. Jumlah Sebaran RTLH di Kecamatan Bojongsari diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel III.102.
Sebaran Jumlah RTLH di Kecamatan Bojongsari Tahun 2020

No	Desa	Jumlah RTLH	RTLH di Kawasan Kumuh
1	Brobot	144	26
2	Gembong	150	-
3	Galuh	137	-
4	Banjaran	362	-
5	Patemon	375	-
6	Bojongsari	320	-
7	Kajongan	392	-
8	Karangbanjar	285	-
9	Beji	385	-
10	Pagedangan	221	-
11	Pekalongan	406	-
12	Matenggeng	401	-
13	Bumisari	826	-

No	Desa	Jumlah RTLH	RTLH di Kawasan Kumuh
Jumlah		4.404	26

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purbalingga

3.4.5.9. Kepadatan Bangunan Rumah

Kepadatan bangunan di Kecamatan Bojongsari tahun 2020 yaitu sebesar 15,91 rumah/Ha dengan jumlah rumah sebanyak 13.182 rumah dan luas wilayah 828,59 Ha. Kepadatan bangunan di Kecamatan Bojongsari terbesar terdapat pada Desa Beji yaitu sebesar 27,46 rumah/Ha. Sedangkan, kepadatan bangunan terkecil terdapat pada Desa Banjaran dengan kepadatan bangunan sebesar 11,37 rumah/Ha. Secara rinci kepadatan bangunan di Kecamatan Bojongsari tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

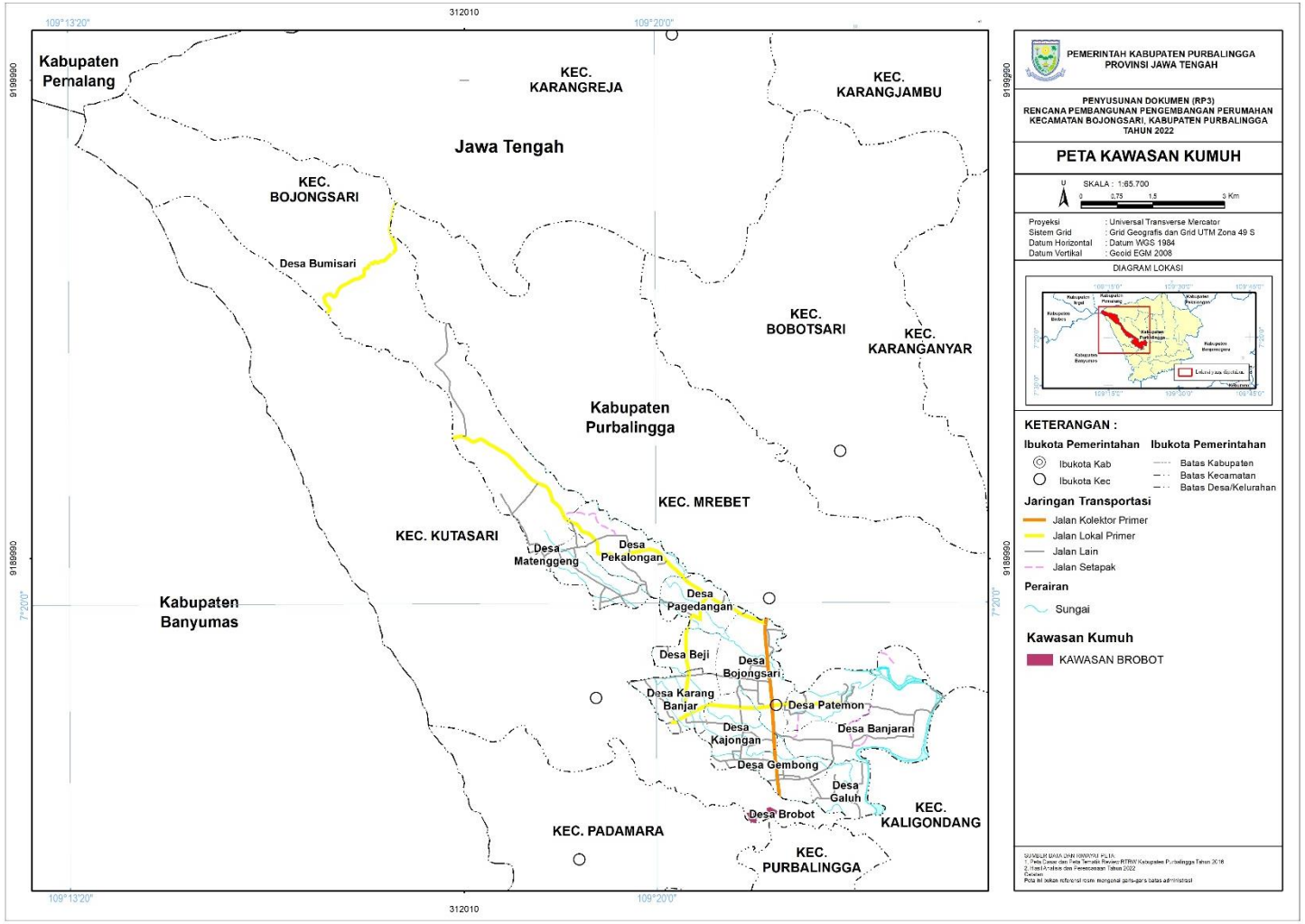
Tabel III.103.
Kepadatan Bangunan di Kecamatan Bojongsari

No	Desa	Luas (Ha)	Jumlah Rumah	Kepadatan Bangunan (Rumah/ Ha)
1	Brobot	32,90	835	25,38
2	Gembong	36,92	790	21,40
3	Galuh	27,33	624	22,83
4	Banjaran	107,83	1.226	11,37
5	Patemon	57,75	905	15,67
6	Bojongsari	100,90	1.334	13,22
7	Kajongan	57,21	1.116	19,50
8	Karangbanjar	46,55	935	20,08
9	Beji	31,94	877	27,46
10	Pagedangan	39,65	824	20,79
11	Pekalongan	91,60	1.209	13,20
12	Matenggeng	55,15	853	15,47
13	Bumisari	142,85	1.653	11,57
Jumlah		828,59	13.182	15,91

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021

3.4.5.10. Sebaran Kawasan Kumuh

Karakteristik kawasan kumuh dibedakan menjadi 4 kategori kewenangan penangan, yaitu kawasan kumuh kewenangan pusat, kawasan kumuh kewenangan provinsi, dan kawasan kumuh kewenangan kabupaten. Kawasan kumuh di Kecamatan Bojongsari tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga No 640/212 Tahun 2021 berada di Kawasan Brobot dengan total luasan permukiman yaitu 7,63 Ha.



Gambar 3.78.
Peta Sebaran Lokasi Kawasan Kumuh di Kecamatan Bojongsari

3.4.5. Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan

3.4.6.1. Kondisi Prasarana

Jaringan prasarana yang terdapat di Kecamatan Bojongsari meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan penyediaan air minum, jaringan pengelolaan persampahan, serta jaringan air limbah. Jaringan jalan yang terdapat di seluruh desa di Kecamatan Bojongsari telah menggunakan jenis permukaan jalan berupa aspal/ beton dan dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Akan tetapi terdapat beberapa jalan rusak pada ruas jalan desa salah satunya di Desa Patemon.

Jaringan drainase di Kecamatan Bojongsari terdiri dari jaringan drainase primer berupa sungai, drainase sekunder berupa drainase di jalan utama, dan jaringan drainase tersier di lingkungan permukiman. Jaringan drainase di Kecamatan Bojongsari berupa drainase terbuka dan drainase tertutup. Jaringan drainase di Kecamatan Bojongsari di beberapa wilayah belum berfungsi optimal, karena sebagian tersumbat oleh sampah. Hal ini dapat dilihat dari munculnya genangan di beberapa wilayah terutama saat hujan. Selain itu beberapa sungai yang ada di Kecamatan Bojongsari mengalami pendangkalan.

Kebutuhan air minum di Kecamatan Bojongsari dilayani oleh ledeng dengan meteran, sumur, dan mata air. Banyaknya wilayah yang menggunakan sumur berupa sumur bor di Kecamatan Bojongsari sebanyak 3 desa. Sedangkan, wilayah yang menggunakan mata air di Kecamatan Bojongsari sebanyak 2 desa yang dilayani oleh PAMSIMAS. Desa lainnya di Kecamatan Bojongsari menggunakan ledeng dengan meteran yang dilayani oleh PDAM.

Jaringan persampahan di Kecamatan Bojongsari sebagian sudah terlayani jaringan pengangkutan sampah dengan pembuangan akhir ke TPA Kalipancur di Kecamatan Pengadegan. Pengolahan sampah yang ada di Kecamatan Bojongsari berupa TPS dan bank sampah. TPS di Kecamatan Bojongsari berada di Pasar Bojongsari. Sedangkan, bank sampah di Kecamatan Bojongsari sebanyak 1 unit yaitu Bank Sampah Sehat Mandiri yang berada di Desa Karangbanjar. Persampahan di Kecamatan Bojongsari masih dikelola dengan dibakar oleh setiap rumah tangga. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase, tegalan, bahkan di sungai. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya serta perluasan jangkauan pelayanan pengangkutan sampah baik dari pemerintah maupun secara swadaya.

Sistem jaringan sanitasi di Kecamatan Bojongsari berupa air limbah domestik yang dibuang dari permukiman, pada umumnya tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu sehingga berdampak pada penurunan kualitas air pada perairan di wilayah Kecamatan Bojongsari. Penurunan kualitas air dapat berdampak pada penurunan kualitas air permukaan maupun air tanah. Oleh karena itu maka pengelolaan air limbah yang terpadu sangat perlu dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir dampak yang dapat ditimbulkan. Seluruh keluarga di seluruh wilayah Kecamatan Bojongsari sudah menggunakan jamban sendiri untuk fasilitas tempat buang air besar.



(a)



(b)



(c)

(a) Jaringan jalan
(b) Jaringan drainase
(c) Bangunan Penampung Air Bersih

Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.79.
Prasarana di Kecamatan Bojongsari

3.4.6.2. Kondisi Sarana

Sarana yang terdapat di Kecamatan Bojongsari meiputi sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana kebudayaan, serta sarana ruang terbuka hijau.

Sarana pemerintahan yang terdapat di Kecamatan Bojongsari berupa balai desa dan kantor desa. Seluruh wilayah di Kecamatan Bojongsari merupakan desa sejumlah 13 desa.

Sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Bojongsari terdiri dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD) sederajat, sekolah menengah pertama (SMP) sederajat, dan sekolah menengah akhir (SMA) sederajat. Sarana pendidikan TK dan SD tersebar di seluruh desa di Kecamatan Bojongsari. Sarana pendidikan SMP/ Sederajat dan SMA/ Sederajat berturut-turut berjumlah 5 unit dan 3 unit. Secara rinci sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Bojongsari tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.104.
Sarana Pendidikan di Kecamatan Bojongsari Tahun 2020

No	Desa	TK	SD/ MI	SMP/ MTs	SMA/ SMK/ MA
1	Brobot	2	2	-	-
2	Gembong	2	2	1	-
3	Galuh	2	1	-	-
4	Banjaran	3	4	-	-
5	Patemon	1	2	-	-
6	Bojongsari	1	3	2	1
7	Kajongan	3	3	-	-
8	Karangbanjar	1	1	-	-
9	Beji	2	2	1	2
10	Pagedangan	2	3	-	-
11	Pekalongan	2	3	-	-
12	Matenggeng	2	3	1	-
13	Bumisari	1	4	-	-
Jumlah		24	33	5	3

Sumber: Kecamatan Bojongsari Dalam Angka Tahun 2021

Sarana peribadatan yang terdapat di Kecamatan Bojongsari meliputi masjid dan mushola. Sarana peribadatan masjid dan mushola tersebar di seluruh desa di Kecamatan Bojongsari dengan jumlah sebanyak 68 masjid dan 201 mushola.

Tabel III.105.
Sarana Peribadatan di Kecamatan Bojongsari Tahun 2020

No	Desa	Masjid	Musholla
1	Brobot	6	12
2	Gembong	3	13
3	Galuh	3	10
4	Banjaran	5	28
5	Patemon	6	13
6	Bojongsari	7	20
7	Kajongan	4	19
8	Karangbanjar	7	3
9	Beji	3	13
10	Pagedangan	4	8
11	Pekalongan	6	23
12	Matenggeng	6	14
13	Bumisari	8	25
Jumlah		68	201

Sumber: Kecamatan Bojongsari Dalam Angka Tahun 2021

Sarana kesehatan di Kecamatan Bojongsari cukup lengkap yang terdiri atas puskesmas, apotek, pustu, praktik dokter/ bidan, PKD, dan posyandu. Sarana kesehatan puskesmas di Kecamatan Bojongsari sebanyak 1 unit yang berada di Desa Bojongsari. Sarana kesehatan posyandu di Kecamatan Bojongsari tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Bojongsari. Sementara, sarana kesehatan pustu hanya sebanyak 3 unit. Berikut ini merupakan jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Bojongsari tahun 2020.

Tabel III.106.
Sarana Kesehatan di Kecamatan Bojongsari Tahun 2020

No	Desa	Puskesmas	Apotek	Pustu	Praktik Dokter/ Bidan	PKD	Posyandu
1	Brobot	-	-	-	2	1	5
2	Gembong	-	-	-	3	1	5
3	Galuh	-	-	-	1	1	4
4	Banjaran	-	-	1	1	-	5
5	Patemon	-	-	-	1	1	5
6	Bojongsari	1	3	-	4	1	5
7	Kajongan	-	-	-	1	1	5
8	Karangbanjar	-	-	1	1	1	6
9	Beji	-	-	-	1	1	5
10	Pagedangan	-	-	-	-	1	5
11	Pekalongan	-	-	1	-	1	5
12	Matenggeng	-	-	-	1	1	5
13	Bumisari	-	-	-	2	1	5
Jumlah		1	3	3	18	12	65

Sumber: Kecamatan Bojongsari Dalam Angka Tahun 2021

Kebudayaan di Kecamatan Bojongsari beraneka ragam, meliputi ujungan, suran, ebeg/ kuda lumping, lengger, dan lainnya. Kebudayaan tersebut di dukung oleh beberapa organisasi kesenian yang terdapat di Kecamatan Bojongsari.

Sarana ruang terbuka hijau yang terdapat di Kecamatan Bojongsari meliputi ruang terbuka hijau jalur hijau jalan dan ruang terbuka hijau fungsi tertentu. Ruang terbuka hijau fungsi tertentu di Kecamtan Bojongsari berupa fasilitas/ lapangan olahraga terdiri dari lapangan sepak bola, lapangan bola voli, lapangan bulu tangkis, fasilitas tenis meja, fasilitas renang, dan fasilitas bela diri. Berikut ini merupakan jumlah dan kondisi fasilitas/ lapangan olahraga di Kecamatan Bojongsari.

Tabel III.107.
Jumlah dan Kondisi Lapangan Olahraga di Kecamatan Bojongsari

Fasilitas/ Lapangan Olahraga	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Sedang
Sepak bola	10	3
Bola voli	4	4
Bulu tangkis	10	2
Tenis meja	12	1
Renang	1	-
Bela diri (pencak silat, karate, dll)	1	-

Sumber: Kecamatan Bojongsari Dalam Angka Tahun 2021


(a)



(b)


(c)


(d)

(a) SMP Negeri 1 Bojongsari
(b) Pasar Kuta Baru
(c) Wisata Owabong
(d) Lapangan Sepak Bola

Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.80.
Sarana di Kecamatan Bojongsari

3.4.6.3. Kondisi Utilitas

Jaringan utlitas yang terdapat di Kecamatan Bojongsari meliputi jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, serta evakuasi bencana.

Jaringan energi dan kelistrikan di Kecamatan Bojongsari mempunyai sumber energi listrik utama dari PLN. Jangkauan pelayanan listrik oleh PLN sudah menjangkau di seluruh desa se-Kecamatan Bojongsari. Jumlah pelanggan listrik di Kecamatan Bojongsari sebanyak 20.734 pelanggan pada tahun 2020.

Tabel III.108.
Jumlah Pelanggan Listrik di Kecamatan Bojongsari Tahun 2020

No	Desa	Jumlah Pengguna PLN
1	Brobot	1.355
2	Gembong	1.264
3	Galuh	983
4	Banjaran	1.936
5	Patemon	1.429
6	Bojongsari	2.086
7	Kajongan	1.737

No	Desa	Jumlah Pengguna PLN
8	Karangbanjar	1.513
9	Beji	1.400
10	Pagedangan	1.283
11	Pekalongan	1.884
12	Metenggeng	1.345
13	Bumisari	2.519
Jumlah		20.734

Sumber: Kecamatan Bojongsari Dalam Angka Tahun 2021

Jaringan telekomunikasi merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi kelancaran informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, keberadaan jaringan telepon di kawasan perencanaan sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas masyarakat. Kebutuhan telekomunikasi masyarakat saat ini dipenuhi dengan adanya jaringan non kabel di seluruh wilayah Kecamatan Bojongsari kecuali di Desa Galuh, Desa Pagedangan, Desa Metenggeng, dan Desa Bumisari.

Tabel III.109.
Jumlah Menara Telekomunikasi dan Kondisi Sinyal Telepon Seluler di Kecamatan Bojongsari

No	Desa	Jumlah BTS	Kondisi Sinyal Telepon Seluler
1	Brobot	1	Sangat Kuat
2	Gembong	1	Kuat
3	Galuh	-	Kuat
4	Banjaran	1	Kuat
5	Patemon	1	Kuat
6	Bojongsari	4	Sangat Kuat
7	Kajongan	2	Kuat
8	Karangbanjar	1	Kuat
9	Beji	1	Kuat
10	Pagedangan	-	Kuat
11	Pekalongan	1	Kuat
12	Metenggeng	-	Kuat
13	Bumisari	-	Kuat

Sumber: Kecamatan Bojongsari Dalam Angka Tahun 2021

Jalur evakusi yang terdapat di Kecamatan Bojongsari berupa jaringan jalan yang ada. Hal ini dikarenakan Kecamatan Bojongsari merupakan daerah rawan bencana gunung api. Kecamatan Bojongsari juga memiliki tempat evakuasi bencana yang berada di sarana fasilitas umum.



(a)



(b)

(a) Gardu listrik dan BTS
(b) Tempat evakuasi

Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.81.
Utilitas di Kecamatan Bojongsari

3.5. Kecamatan Kutasari

3.5.1. Kondisi Fisik Kawasan

Kecamatan Kutasari merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Kecamatan Kutasari merupakan salah satu kecamatan paling barat di Kabupaten Purbalingga yang wilayahnya terletak di lereng Gunung Slamet. Batas wilayah Kecamatan Kutasari secara administratif dapat diuraikan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Bojongsari

Sebelah Timur : Kecamatan Bojongsari

Sebelah Selatan : Kecamatan Padamara

Sebelah Barat : Kecamatan Sumbang dan Kabupaten Banyumas

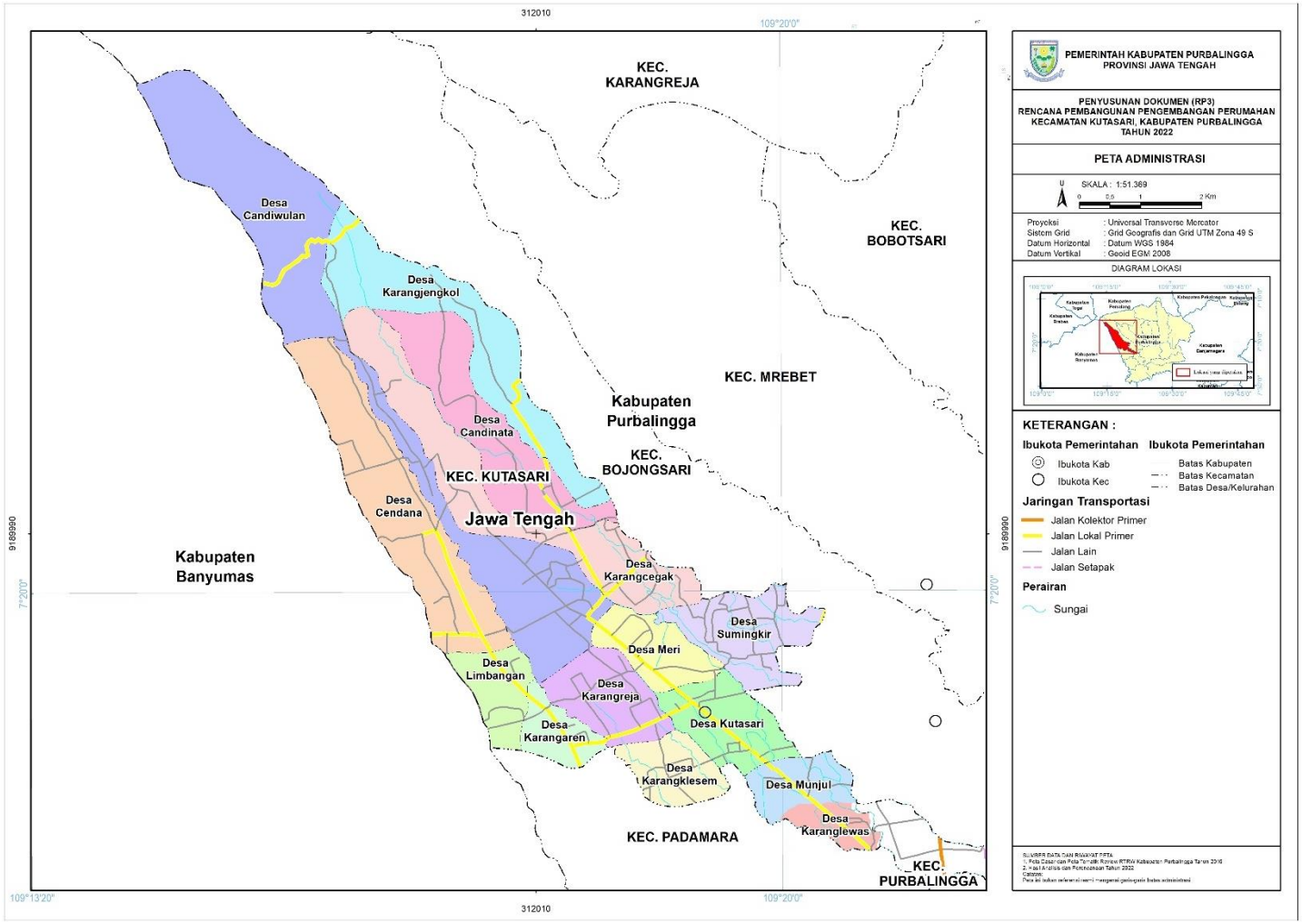
Wilayah Kecamatan Kutasari terbagi dalam 14 desa dengan luas wilayah 4.410,6 Ha atau 5,47% dari luas wilayah Kabupaten Purbalingga. Desa dengan wilayah terluas adalah Desa Candiwulan seluas 1.049,07 Ha. Sedangkan luas wilayah terkecil adalah Desa Karanglewas dengan luas 77,63 Ha. Berikut ini merupakan luas wilayah dan peta administrasi Kecamatan Kutasari.

Tabel III.110.
Luas Wilayah Kecamatan Kutasari

No	Desa	Luas (Ha)
1	Karanglewas	77,63
2	Munjul	132,09
3	Karangklesem	147,19
4	Kutasari	211,82
5	Sumingkir	251,62
6	Meri	165,51
7	Karangreja	210,96
8	Karangaren	108,93
9	Limbangan	141,57

No	Desa	Luas (Ha)
10	Cendana	548,95
11	Candiwulan	1.049,07
12	Karangcegak	496,09
13	Candinata	400,46
14	Karangjengkol	468,71
Jumlah		4.410,60

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020



Gambar 3.82.
Peta Administrasi Kecamatan Kutasari

Wilayah Kecamatan Kutasari memiliki ketinggian tempat antara 73 meter – 441 meter dari permukaan laut. Menurut klasifikasi ketinggian wilayah Kecamatan Kutasari termasuk dataran rendah dan dataran tinggi dengan tingkat kemiringan berkisar antara 0 % sampai > 45 %. Topografi di Kecamatan Kutasari dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.78.

Tabel III.111.
Topografi di Kecamatan Kutasari

No	Desa	Datar (0 - 8 %)	Landai (8 - 15 %)	Agak Curam (15 - 25 %)	Curam (25 - 45 %)	Sangat Curam (> 45 %)
1	Karanglewas	77,63	-	-	-	-
2	Munjul	132,09	-	-	-	-
3	Karangklesem	147,19	-	-	-	-
4	Kutasari	211,82	-	-	-	-
5	Sumingkir	251,62	-	-	-	-
6	Meri	165,51	-	-	-	-
7	Karangreja	210,96	-	-	-	-
8	Karangaren	108,93	-	-	-	-
9	Limbangan	141,57	-	-	-	-
10	Cendana	419,67	100,13	29,15	-	-
11	Candiwulan	413,61	345,19	210,47	5,78	74,02
12	Karangcegak	404,52	91,35	0,23	-	-
13	Candinata	320,49	79,97	-	-	-
14	Karangjengkol	203,54	115,82	149,35	-	-
Jumlah		3.209,14	732,46	389,20	5,78	74,02

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020

Jenis tanah yang ada di Kecamatan Kutasari dikategorikan menjadi 2 jenis dengan karakteristik yang berbeda. Jenis tanah di Kecamatan Kutasari berupa latosol coklat tua kemerahan serta asosiasi podsolik mereh kuning dan regosol. Jenis tanah di Kecamatan Kutasari dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.79.

Tabel III.112.
Jenis Tanah di Kecamatan Kutasari

No	Desa	Jenis Tanah (Ha)	
		Latosol Coklat Tua Kemerahan	Asosiasi Podsolik Merah Kuning dan Regosol
1	Karanglewas	77,63	-
2	Munjul	132,09	-
3	Karangklesem	147,19	-
4	Kutasari	211,82	-
5	Sumingkir	251,62	-
6	Meri	165,51	-
7	Karangreja	210,96	-
8	Karangaren	108,93	-
9	Limbangan	141,57	-
10	Cendana	425,51	123,45
11	Candiwulan	401,88	647,19
12	Karangcegak	364,22	131,88
13	Candinata	222,36	178,09
14	Karangjengkol	101,93	366,78

No	Desa	Jenis Tanah (Ha)	
		Latosol Coklat Tua Kemerahan	Asosiasi Podsolik Merah Kuning dan Regosol
Jumlah		2.963,21	1.447,39

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020

Komposisi litologi batuan yang terdapat di Kecamatan Kutasari terdiri atas:

a. Endapan alluvium gunung api, terdiri dari bahan-bahan tak mengeras, mengandung bongkah-bongkah batuan gunung api, bergaris tengah 10 – 15 Cm, tersusun oleh andesit sampai basalt dengan kelulusan terhadap air rendah sampai tinggi.

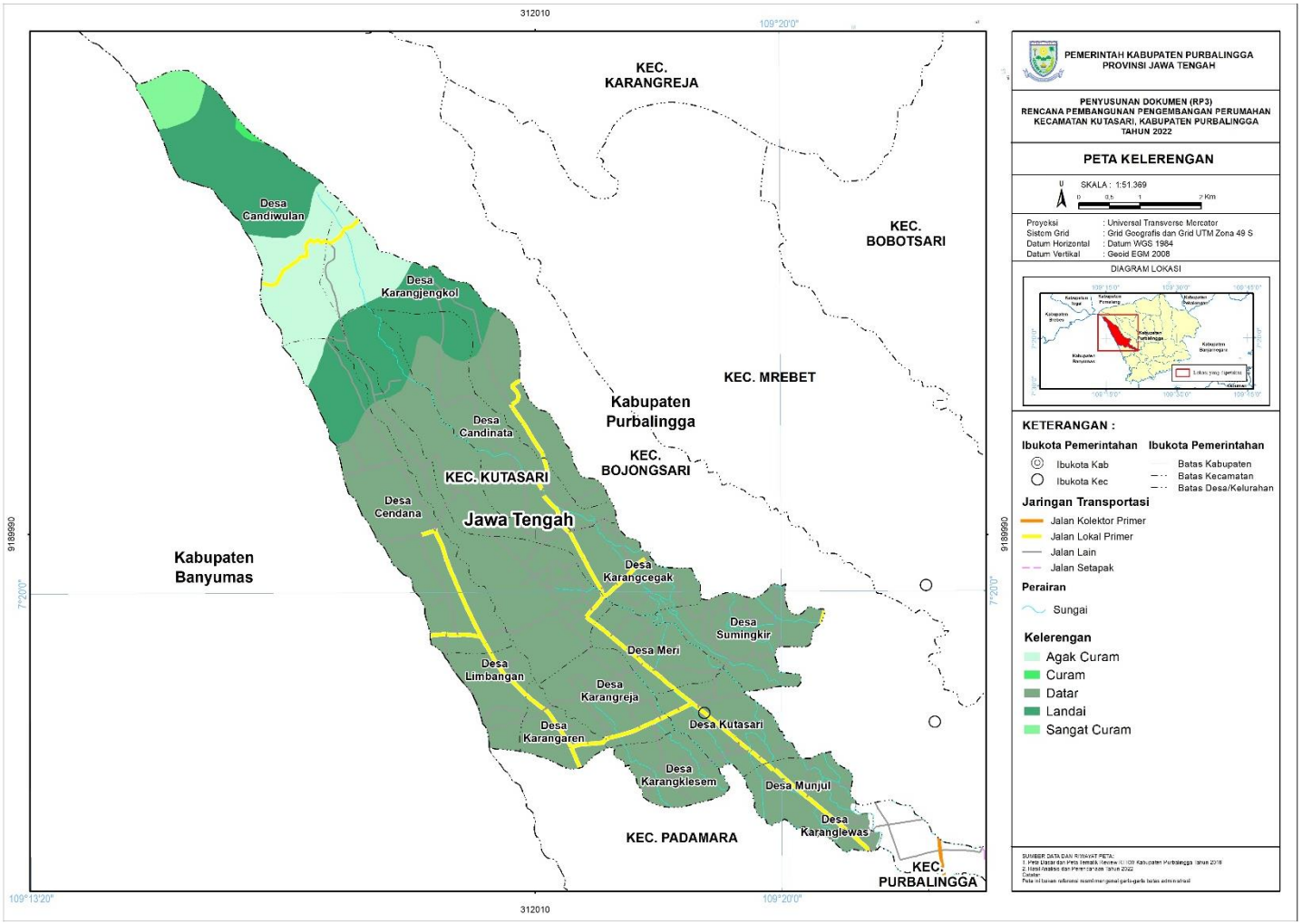
b. Lava andesit berongga asal Gunung Slamet dengan kelulusan terhadap air tinggi sampai sedang.

Geologi di Kecamatan Kutasari dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.80.

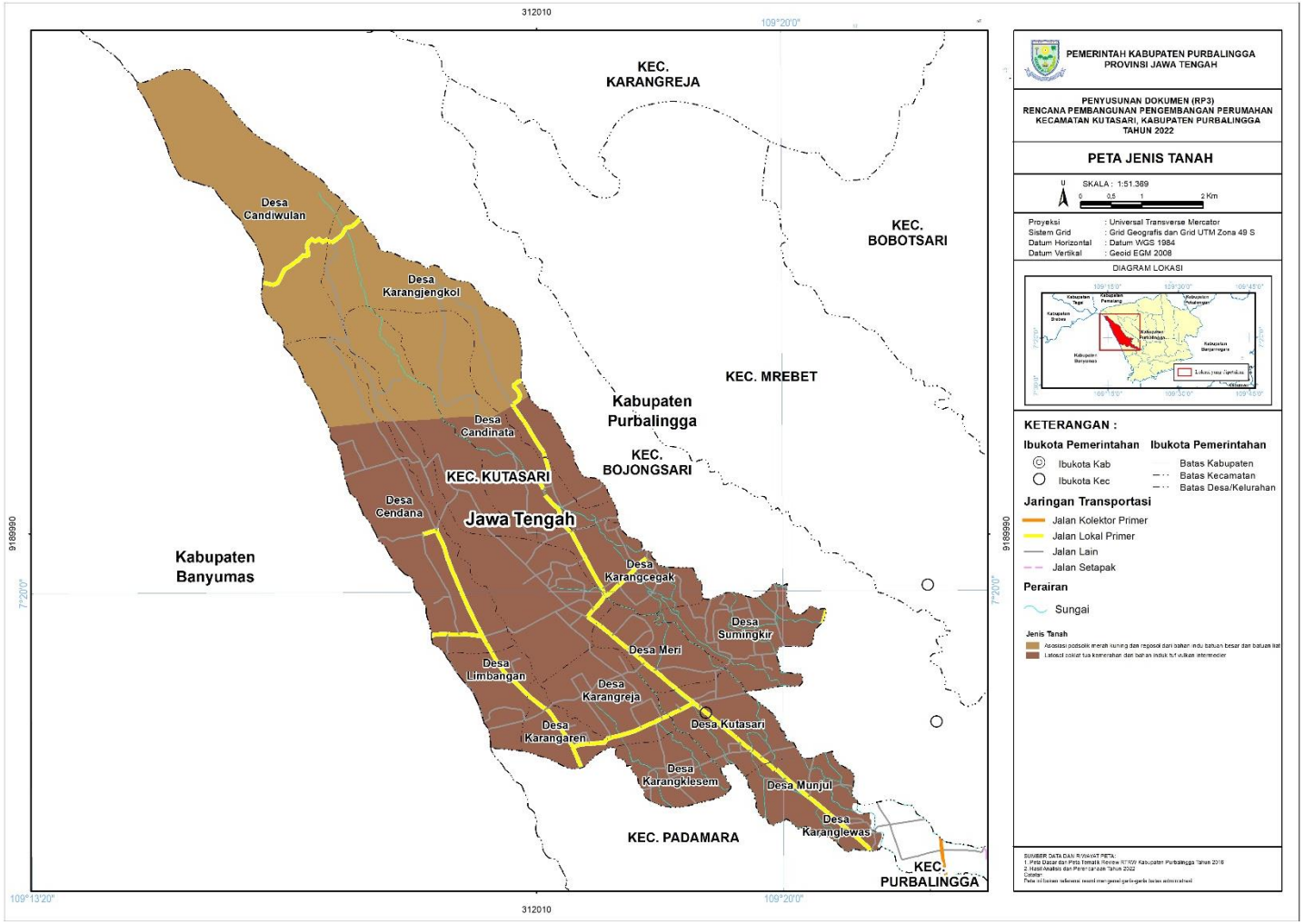
Tabel III.113.
Geologi di Kecamatan Kutasari

No	Desa	Alluvium Endapan Gunung Api	Andhesit
1	Karanglewas	77,63	-
2	Munjul	132,09	-
3	Karangklesem	147,19	-
4	Kutasari	211,82	-
5	Sumingkir	251,62	-
6	Meri	165,51	-
7	Karangreja	210,96	-
8	Karangaren	108,93	-
9	Limbangan	141,57	-
10	Cendana	548,46	0,50
11	Candiwulan	493,37	555,70
12	Karangcegak	496,09	-
13	Candinata	400,46	-
14	Karangjengkol	416,07	52,64
Jumlah		3.801,76	608,84

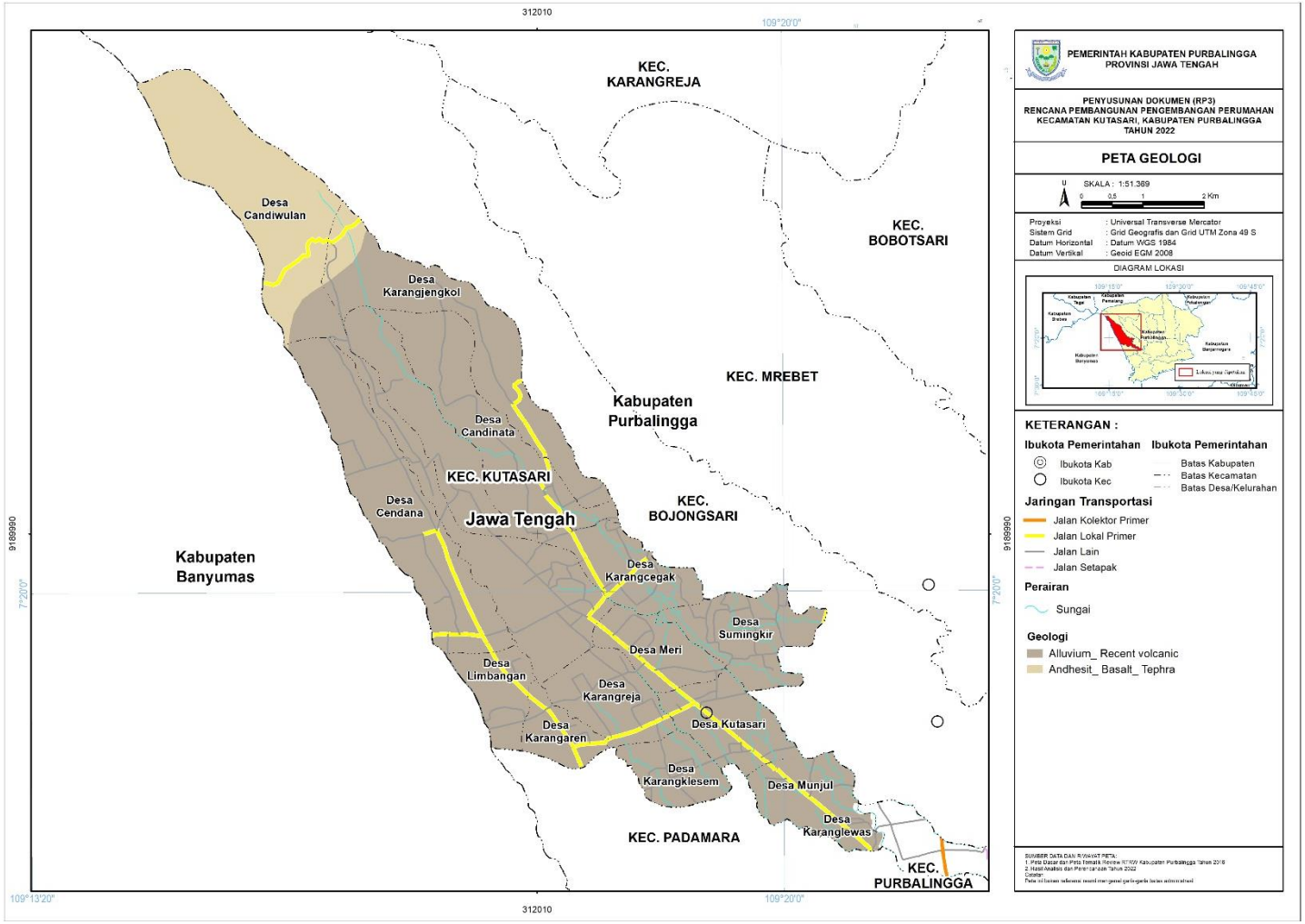
Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020



Gambar 3.83.
Peta Topografi Kecamatan Kutasari



Gambar 3.84.
Peta Jenis Tanah Kecamatan Kutasari



Gambar 3.85.
Peta Geologi Kecamatan Kutasari

Hidrogeologi yang ada di seluruh wilayah Kecamatan Kutasari berupa akuifer produktivitas tinggi dengan penyebaran luas, kecuali di Desa Candinata dan Desa Karangjengkol. Kecamatan Kutasari masih memiliki daerah dengan kondisi hidrogeologi berupa daerah air langka di Desa Candiwulan. Hidrogeologi di Kecamatan Kutasari dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.81.

Tabel III.114.
Hidrogeologi di Kecamatan Kutasari

No	Desa	Akuifer Produktif sedang - tinggi	Daerah air tanah langka	Kecil, akifer lebih dalam, produktif tinggi	Produktif sedang dengan penyebaran luas	Produktivitas tinggi & penyebaran luas
1	Karanglewas	-	-	-	-	77,63
2	Munjul	-	-	-	-	132,09
3	Karangklesem	-	-	-	-	147,19
4	Kutasari	-	-	-	-	211,82
5	Sumingkir	-	-	-	-	251,62
6	Meri	-	-	-	-	165,51
7	Karangreja	-	-	-	-	210,96
8	Karangaren	-	-	-	-	108,93
9	Limbangan	-	-	-	-	141,57
10	Cendana	-	-	219,90	248,46	80,59
11	Candiwulan	588,21	0,41	165,54	94,75	200,16
12	Karangcegak	-	-	235,60	178,56	81,93
13	Candinata	-	-	190,53	209,93	-
14	Karangjengkol	103,36	-	89,16	276,19	-
Jumlah		691,56	0,41	900,73	1.007,89	1.810,01

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020

Kecamatan Kutasari termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu dengan Sub DAS Klawing dan Sub DAS Serayu Hilir. Mayoritas wilayah di Kecamatan Kutasari termasuk dalam Sub DAS Klawing dengan luas 2.819,65 Ha. Sedangkan wilayah Kecamatan Kutasari yang masuk dalam Sub DAS Serayu Hilir seluas 1.590,95 Ha. DAS di Kecamatan Kutasari dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.82.

Tabel III.115.
DAS di Kecamatan Kutasari

No	Desa	DAS Serayu	
		Sub DAS Klawing	Sub DAS Serayu Hilir
1	Karanglewas	77,63	-
2	Munjul	132,09	-
3	Karangklesem	84,07	63,12
4	Kutasari	211,82	-
5	Sumingkir	251,62	-
6	Meri	165,51	-
7	Karangreja	111,84	99,12
8	Karangaren	-	108,93
9	Limbangan	-	141,57
10	Cendana	0,17	548,78
11	Candiwulan	419,64	629,43
12	Karangcegak	496,09	0,00
13	Candinata	400,46	-

No	Desa	DAS Serayu	
		Sub DAS Klawing	Sub DAS Serayu Hilir
14	Karangjengkol	468,71	-
Jumlah		2.819,65	1.590,95

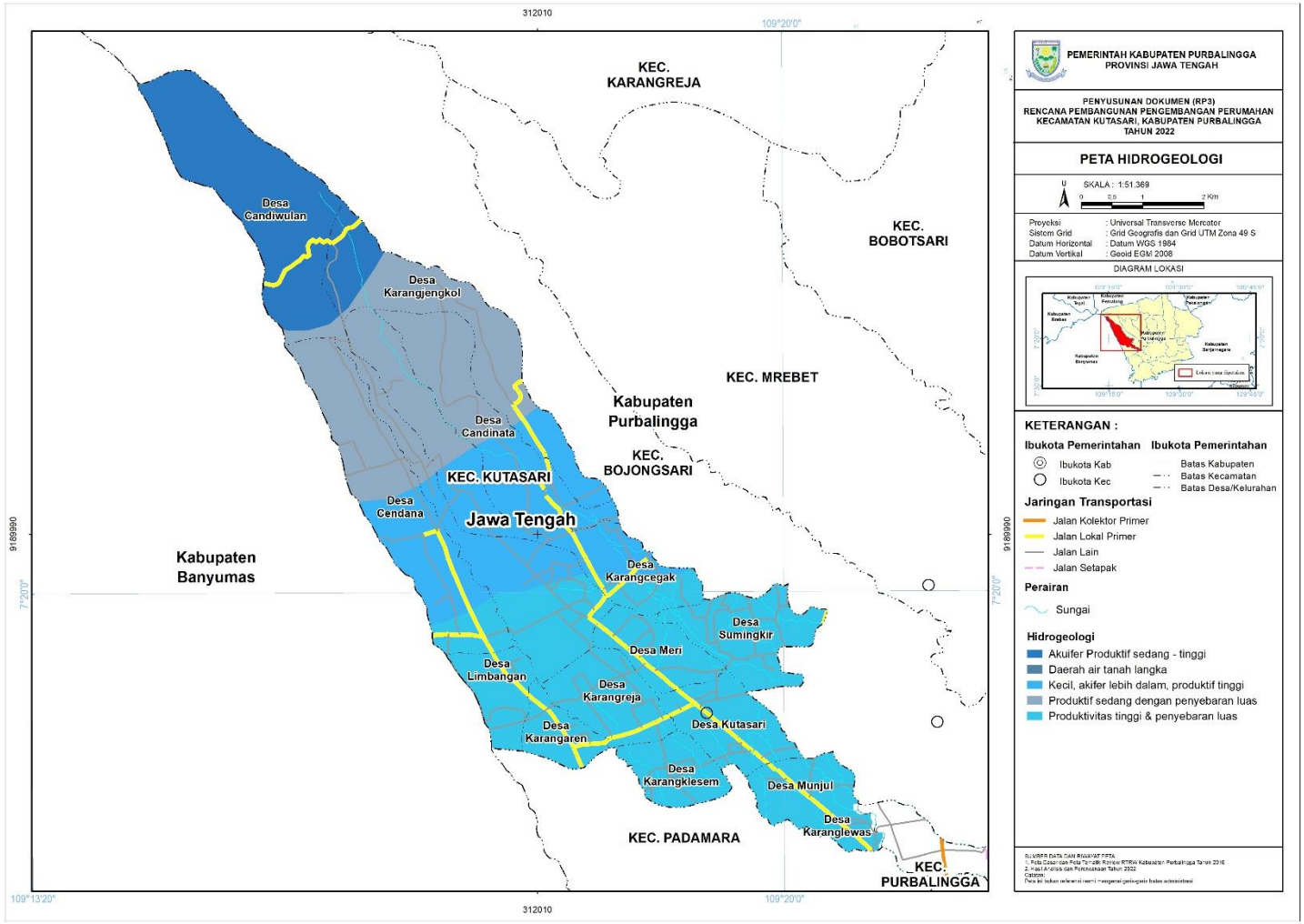
Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020

Klimatologi dapat dilihat berdasarkan rata-rata curah hujan per tahun. Curah hujan sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan letak tempat itu sendiri. Tidak terkecuali untuk wilayah Kecamatan Kutasari yang memiliki iklim tropis yang relatif basah dengan curah hujan rata-rata per tahun sebesar 3.000 – 5.000 mm. Klimatologi di Kecamatan Kutasari dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.83.

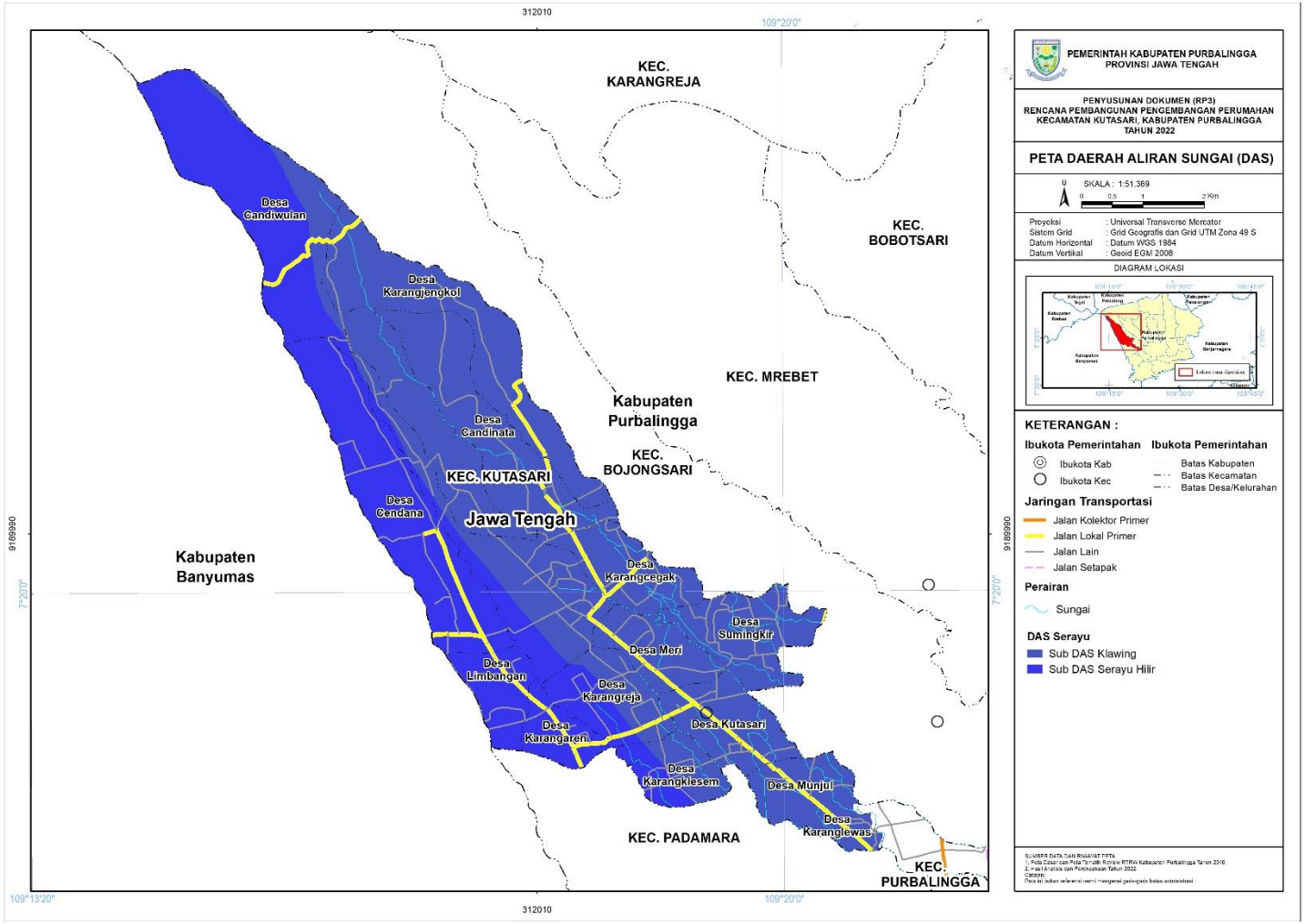
Tabel III.116.
Klimatologi di Kecamatan Kutasari

No	Desa	Rata-Rata per Tahun 3.000 - 3.500	Rata-Rata per Tahun 3.500 - 4.000	Rata-Rata per Tahun 4.000 - 4.500	Rata-Rata per Tahun 4.500 - 5.000
1	Karanglewas	77,63	-	-	-
2	Munjul	132,09	-	-	-
3	Karangklesem	147,19	-	-	-
4	Kutasari	211,82	-	-	-
5	Sumingkir	251,62	-	-	-
6	Meri	165,51	-	-	-
7	Karangreja	210,96	-	-	-
8	Karangaren	108,93	-	-	-
9	Limbangan	141,57	-	-	-
10	Cendana	317,38	197,70	33,88	-
11	Candiwulan	375,76	60,17	553,64	59,50
12	Karangcegak	335,16	144,96	15,97	-
13	Candinata	209,98	189,90	0,58	-
14	Karangjengkol	104,21	200,26	164,24	-
Jumlah		2.789,80	792,99	768,31	59,50

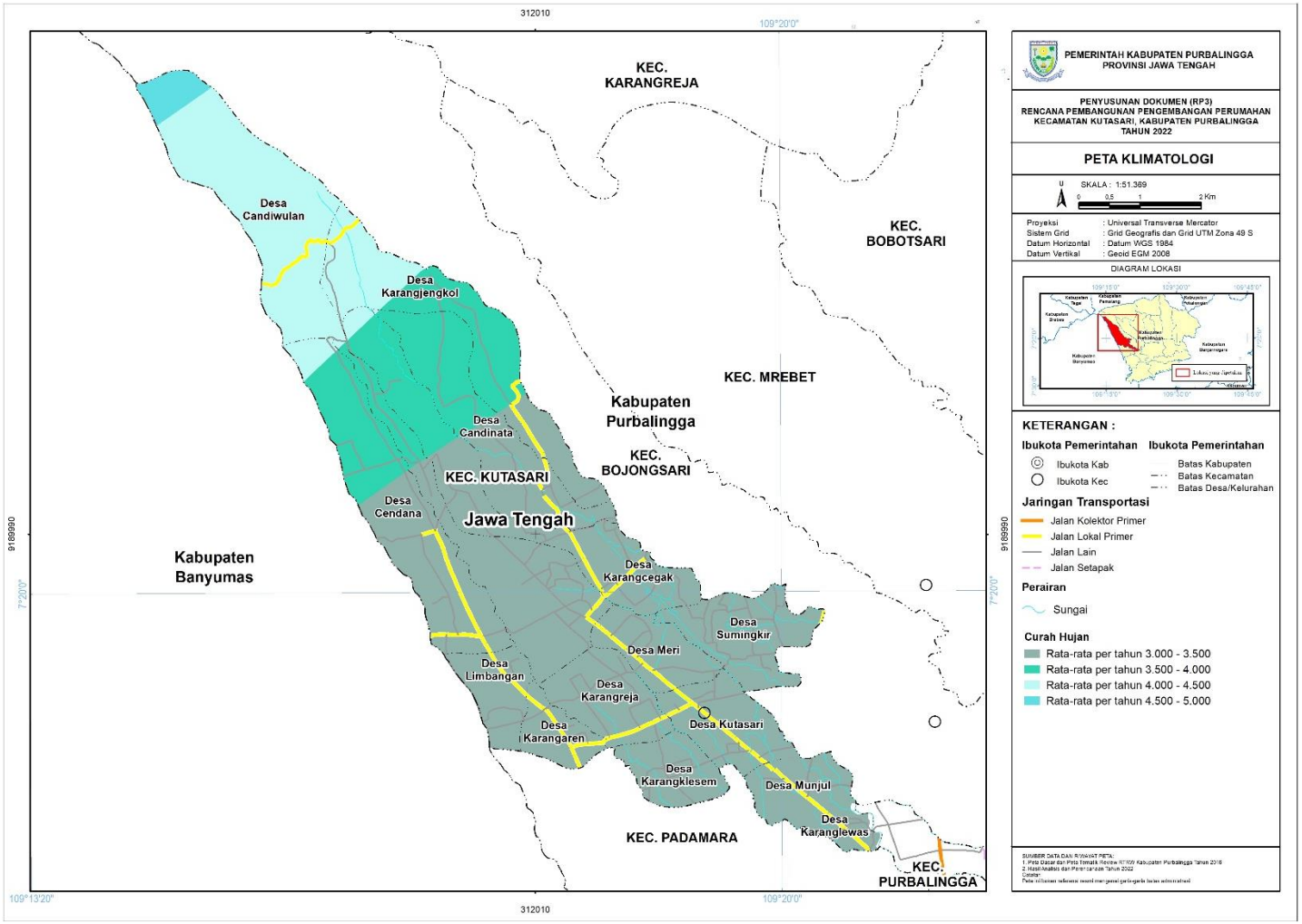
Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020



Gambar 3.86.
Peta Hidrogeologi Kecamatan Kutasari



Gambar 3.87.
Peta DAS Kecamatan Kutasari



Gambar 3.88.
Peta Klimatologi Kecamatan Kutasari

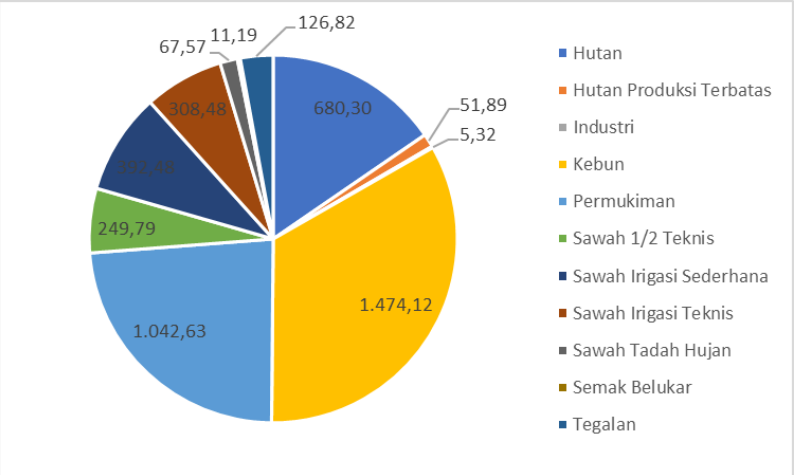
Potensi rawan bencana yang ada di Kecamatan Kutasari meliputi rawan bencana angin ribut dan rawan gunung api. Terdapat 2 desa di Kecamatan Kutasari yang tidak termasuk dalam wilayah rawan bencana, yaitu Desa Sumingkir dan Desa Meri. Sebaran rawan bencana di Kecamatan Kutasari dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.85.

Tabel III.117.
Rawan Bencana di Kecamatan Kutasari

No	Desa	Rawan Bencana	
		Angin Ribut	Gunung Api
1	Karanglewas	7,68	-
2	Munjul	36,64	-
3	Karangklesem	128,09	-
4	Kutasari	0,58	-
5	Karangreja	21,86	-
6	Karangaren	0,03	16,76
7	Limbangan	-	28,71
8	Cendana	4,78	11,17
9	Candiwulan	-	28,72
10	Karangcegak	13,77	-
11	Candinata	-	1,73
12	Karangjengkol	-	14,90
Jumlah		213,44	101,99

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020

Penggunaan lahan di Kecamatan Kutasari tahun 2020 berupa lahan hutan, industri, kebun, permukiman, lahan sawah setengah teknis, sawah irigasi sederhana, sawah irigasi teknis, sawah tadah hujan, sungai, dan tegalan. Penggunaan lahan di Kecamatan Kutasari terbesar adalah lahan hutan seluas 1.413,9 Ha. Penggunaan lahan terbesar kedua di Kecamatan Kutasari digunakan untuk lahan permukiman seluas 873,17 Ha. Luas penggunaan lahan di Kecamatan Kutasari tahun 2020 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel, grafik, dan Gambar 3.86.

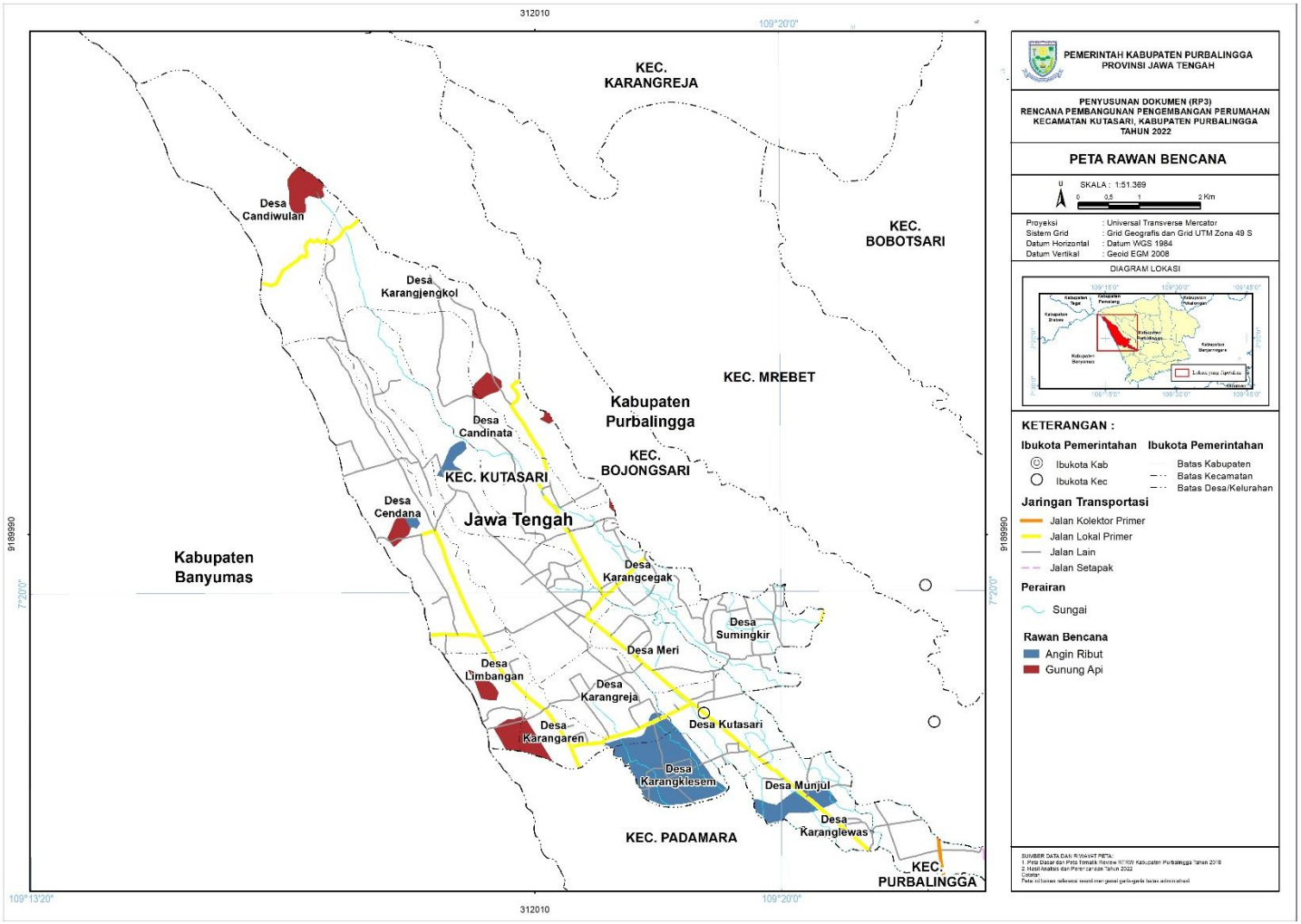


Gambar 3.89.
Luas Penggunaan Lahan Kecamatan Kutasari Tahun 2020

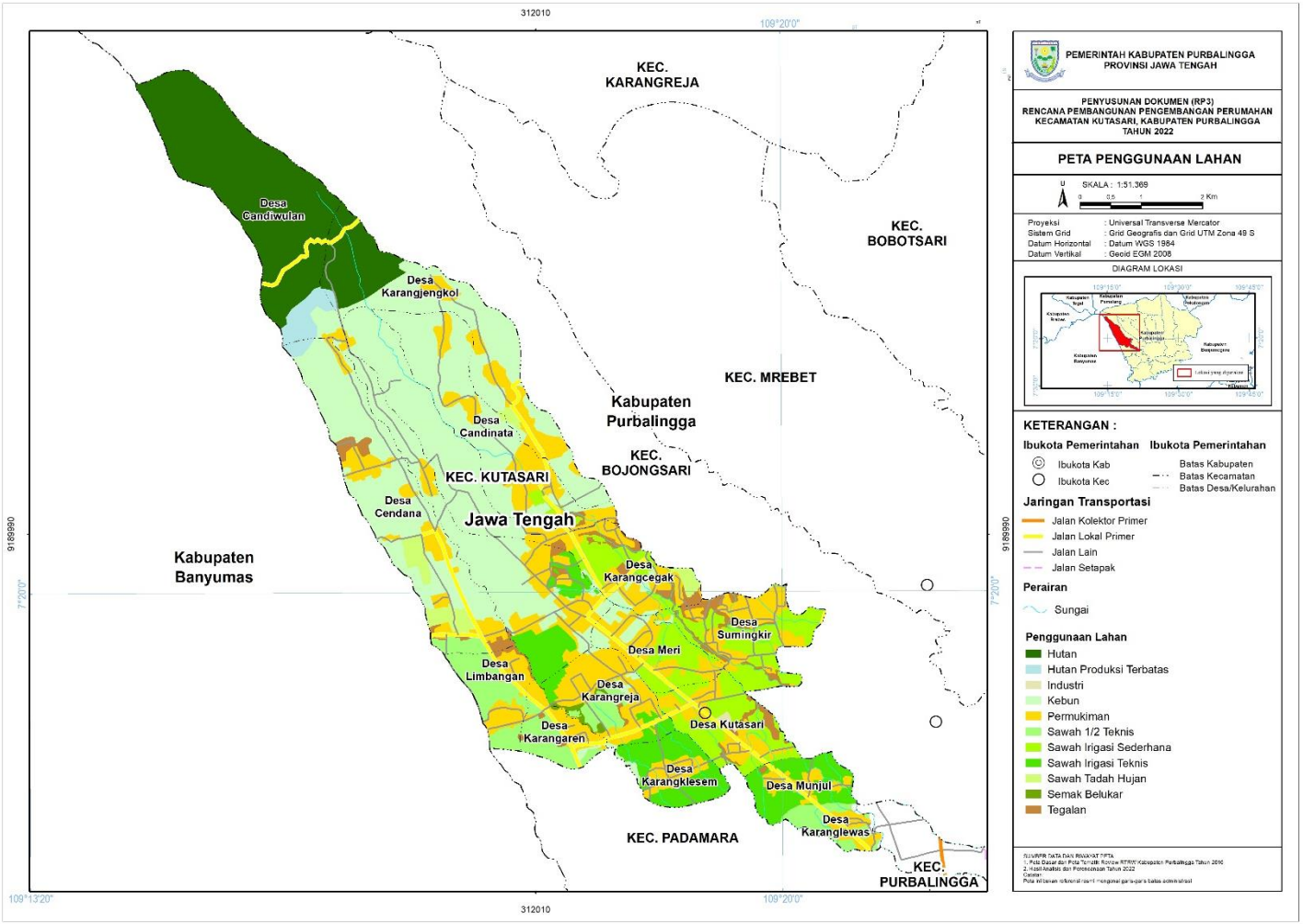
Tabel III.118.
Luas Penggunaan Lahan di Kecamatan Kutasari Tahun 2020 (hektar)

No	Desa	Penggunaan Lahan (Ha)										
		Hutan	Hutan Produksi Terbatas	Industri	Kebun	Permukiman	Sawah 1/2 Teknis	Sawah Irigasi Sederhana	Sawah Irigasi Teknis	Sawah Tadah Hujan	Semak Belukar	Tegalan
1	Karanglewas	-	-	-	-	29,42	47,76	-	-	-	-	0,45
2	Munjul	-	-	-	-	38,54	-	-	92,13	-	-	1,42
3	Karangklesem	-	-	-	4,94	38,74	-	-	103,52	-	-	-
4	Kutasari	-	-	5,32	-	68,84	-	120,82	0,01	-	-	16,84
5	Sumingkir	-	-	-	1,92	87,69	-	129,56	-	-	-	32,45
6	Meri	-	-	-	25,42	70,91	-	69,17	-	-	-	0,00
7	Karangreja	-	-	-	8,86	120,02	38,27	0,00	31,60	-	10,33	1,87
8	Karangaren	-	-	-	3,71	42,75	57,74	-	0,38	-	0,86	3,48
9	Limbangan	-	-	-	-	50,78	85,24	-	0,13	-	-	5,42
10	Cendana	-	9,02	-	355,47	90,60	20,78	-	0,04	47,80	-	25,24
11	Candiwulan	550,66	39,39	-	257,42	115,41	-	-	80,08	-	-	6,11
12	Karangcegak	-	-	-	298,97	92,97	-	61,89	0,59	12,07	-	29,59
13	Candinata	-	-	-	269,24	115,10	-	11,04	-	1,15	-	3,94
14	Karangjengkol	129,64	3,48	-	248,17	80,86	-	-	-	6,56	-	-
Jumlah		680,30	51,89	5,32	1.474,12	1.042,63	249,79	392,48	308,48	67,57	11,19	126,82

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020



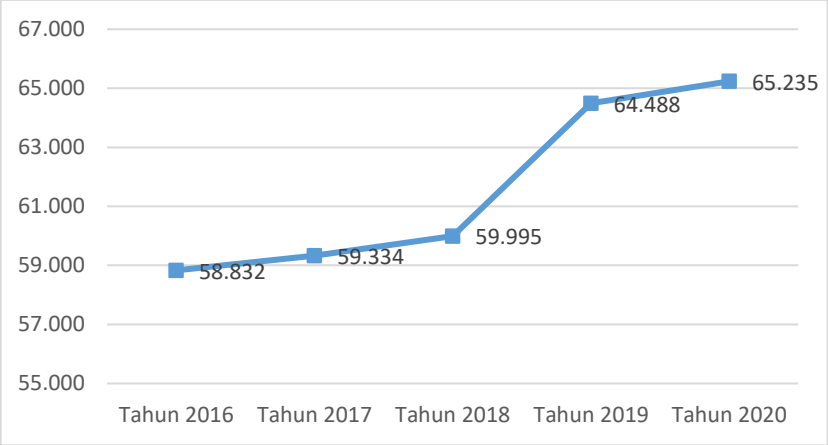
Gambar 3.90.
Peta Rawan Bencana Kecamatan Kutasari



Gambar 3.91.
Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Kutasari

3.5.2. Kondisi Kependudukan, Sosial, dan Budaya

Perkembangan jumlah penduduk di Kecamatan Kutasari dalam kurun waktu lima tahun terakhir tepatnya tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Kecamatan Kutasari tahun 2016 sebanyak 58.832 jiwa mengalami peningkatan hingga pada tahun 2020 menjadi sebanyak 65.235 jiwa. Jumlah penduduk di Kecamatan Kutasari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Kecamatan Kutasari Dalam Angka Tahun 2017-2021

Gambar 3.92.
Jumlah Penduduk Kecamatan Kutasari Tahun 2016-2020

Jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Karangcegak sebesar 7.020 jiwa. Penduduk terkecil berada di Desa Karangaren dengan jumlah sebanyak 1.597 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk di Kecamatan Kutasari sebesar 104 yang berarti terdapat 104 penduduk laki-laki setiap 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin di seluruh wilayah Kecamatan Kutasari lebih dari 100. Secara rinci jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Kutasari tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.119.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Kutasari Tahun 2020

No	Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
1	Karanglewas	2.781	106,08
2	Munjul	3.716	106,5
3	Karangklesem	3.361	99,82
4	Kutasari	5.149	102,49
5	Sumingkir	5.163	102,82
6	Meri	3.997	106,44
7	Karangreja	6.597	101,52
8	Karangaren	1.597	104,64
9	Limbangan	4.488	103,45
10	Cendana	5.253	104,17
11	Candiwulan	5.732	102,99
12	Karangcegak	7.020	104,66
13	Candinata	6.025	107,24
14	Karangjengkol	4.374	105,16
Jumlah		65.253	104,03

Sumber: Kecamatan Kutasari Dalam Angka Tahun 2021

Kepadatan penduduk di Kecamatan Kutasari tahun 2020 terbesar terdapat pada Desa Karanglawas yaitu sebesar 36 jiwa/Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 2.781 jiwa dan luas wilayah hanya 77,63 Ha. Sedangkan, kepadatan penduduk terkecil terdapat pada Desa Candiwulan dengan kepadatan penduduk sebesar 5 jiwa/Ha, dikarenakan sebagian besar wilayah Desa Candiwulan merupakan hutan. Secara rinci kepadatan penduduk di Kecamatan Kutasari tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.120.
Kepadatan Penduduk di Kecamatan Kutasari Tahun 2020

No	Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas (Ha)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Ha)
1	Karanglewas	2.781	77,63	36
2	Munjul	3.716	132,09	28
3	Karangklesem	3.361	147,19	23
4	Kutasari	5.149	211,82	24
5	Sumingkir	5.163	251,62	21
6	Meri	3.997	165,51	24
7	Karangreja	6.597	210,96	31
8	Karangaren	1.597	108,93	15
9	Limbangan	4.488	141,57	32
10	Cendana	5.253	548,95	10
11	Candiwulan	5.732	1.049,07	5
12	Karangcegak	7.020	496,09	14
13	Candinata	6.025	400,46	15
14	Karangjengkol	4.374	468,71	9
Jumlah		65.253	2.237,13	29

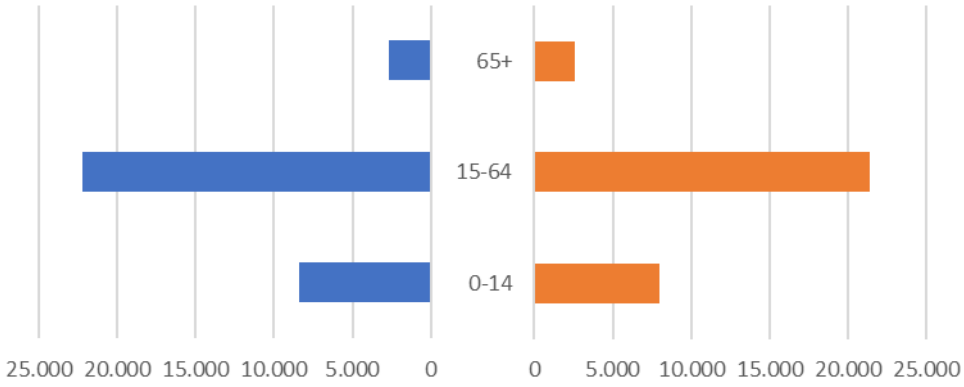
Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Penduduk menurut kelompok umur di Kecamatan Kutasari terbagi menjadi rentang usia belum produktif (<14 Tahun), usia produktif (15-64 Tahun), dan usia tidak produktif (>64 tahun). Kecamatan Kutasari memiliki struktur umur yang dominan pada umur 15-64 tahun dimana umur ini merupakan usia produktif. Tingkat ketergantungan Kecamatan Kutasari tahun 2020 adalah sebesar 49% dengan komposisi usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 43.578 jiwa dan usia tidak produktif (<14 tahun dan >64 tahun) sebanyak 21.657 jiwa. Hal ini berarti sebanyak 100 penduduk usia produktif menanggung 49 penduduk usia tidak produktif.

Tabel III.121.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kecamatan Kutasari Tahun 2020

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-14	8.408	7.983	16.391
15-64	22.178	21.400	43.578
65+	2.647	2.619	5.266
Jumlah	33.233	32.002	65.235

Sumber: Kecamatan Kutasari Dalam Angka Tahun 2021



Sumber: Kecamatan Kutasari Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 3.93.
Piramida Penduduk Kecamatan Kutasari Tahun 2020

Berdasarkan piramida penduduk di atas, untuk kelompok umur 15-64 tahun mempunyai panjang batang lebih panjang dibanding kelompok umur lainnya. Kondisi ini menjelaskan struktur penduduk usia produktif cenderung lebih besar. Struktur penduduk di usia tidak produktif lebih kecil dibanding kelompok usia produktif.

Penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat dari jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan utama. Jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan utama di Kecamatan Kutasari meliputi pekerjaan dalam bidang pertanian, pekerjaan dalam bidang industri, pekerjaan dalam bidang perdagangan, dan lainnya. Lapangan perkerjaan utama di Kecamatan Kutasari tahun 2020 paling banyak adalah karyawan sebanyak 8.897 jiwa. Lapangan perkerjaan utama paling banyak kedua di Kecamatan Kutasari tahun 2020 adalah dalam bidang pertanian sebanyak 8.319 jiwa. Sedangkan, lapangan pekerjaan dalam bidang kontruksi hanya sebanyak 13 jiwa.

Tabel III.122.
Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kutasari Tahun 2020

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pensiunan	198	51	249
PNS/ ABRI/ TNI	276	163	439
Perdagangan	1.313	1.330	2.643
Pertanian	4.528	3.791	8.319
Industri	36	17	53
Kontruksi	13	-	13
Buruh	4.132	1.931	6.063
Karyawan	4.565	4.332	8.897
Wiraswasta	4.851	2.588	7.439
Lainnya	846	248	1.094
Jumlah	20.758	14.451	35.209

Sumber: Kecamatan Kutasari Dalam Angka Tahun 2021

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kecamatan Kutasari tahun 2020 paling banyak adalah pada tingkatan SD/ Sederajat sebanyak 25.761 jiwa. Sedangkan, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kecamatan Kutasari tahun 2020 paling sedikit yaitu pada tingkat pendidikan Strata III hanya sebanyak 1 jiwa.

Tabel III.123.
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kecamatan Kutasari Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/ Belum Sekolah	6.627	6.421	13.048
Belum Tamat SD/ Sederajat	4.276	4.000	8.276
SD/ Sederajat	12.974	12.787	25.761
SLTP/ Sederajat	5.650	5.588	11.238
SLTA/ Sederajat	3.389	2.741	6.130
Diploma I/ II	55	52	107
Akademi/ Diploma III	113	177	290
Diploma IV/ Strata I	429	458	887
Strata II	12	7	19
Strata III	1	-	1

Sumber: Kecamatan Kutasari Dalam Angka Tahun 2021

Masyarakat Purbalingga adalah pendukung kebudayaan Jawa dan masyarakatnya terbiasa kontak dengan pendukung budaya lain. Oleh karena itu, masyarakatnya relatif terbuka. Artinya, menerima siapa saja yang datang, berusaha, dan bermukim di daerahnya.

Hubungan antar masyarakat Purbalingga masih memiliki karakteristik guyub ditunjukkan apabila warga mengadakan acara, misalnya pernikahan, khitanan, membangun rumah atau ada yang meninggal dunia, maka masyarakat akan berkunjung dan membantu ke tempat warga tersebut. Disamping itu pula terdapat interaksi sosial yang berbentuk kerjasama yaitu kegiatan gotong-royong, bentuk kerjasama ini dapat diwujudkan berupa tenaga, bahan material ataupun uang. Sedangkan gotong-royong dalam bentuk kerja bakti seperti membersihkan lingkungan dan memperbaiki jalan.

Permukiman di Kecamatan Kutasari terdiri dari permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan. Karakteristik permukiman perkotaan lebih modern tersedia sarana prasarana pendukung lebih lengkap. Masyarakat permukiman perkotaan berkegiatan bukan pertanian karena sebagian besar lahan terbangun dan bermata pencaharian dalam bidang industri pengolahan dan jasa. Karakteristik permukiman perdesaan berupa hunian dan lingkungan yang bersifat pedesaan. Masyarakat permukiman perdesaan berkegiatan dalam bidang pertanian, karena masih banyak lahan pertanian.

3.5.3. Kondisi Perekonomian

Sektor perekonomian unggulan di Kecamatan Kutasari yang dapat mendukung pengembangan Kecamatan Kutasari berasal dari sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan, sektor perikanan, serta sektor pariwisata. Sektor pertanian paling besar berupa tanaman pangan sebanyak 10.997,2 ton padi sawah. Kecamatan Kutasari juga memiliki komoditas unggulan sayur-sayuran yang berupa cabai besar, cabai rawit, kacang panjang, ketimun, dan terung.

Sektor perkebunan yang terdapat di Kecamatan Kutasari meliputi kelapa dalam, kopi, dan teh. Sektor peternakan yang terdapat di Kecamatan Kutasari meliputi sapi

perah, sapi potong, kuda, kerbau, domba, kambing, babi, ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, itik, itik manila, dan angsa. Sektor perikanan juga menjadi sektor ekonomi unggalan di Kecamatan Kutasari. Jenis perikanan di Kecamatan Kutasari berupa perikanan budidaya dengan kolam. Jumlah rumah tangga tangga yang mengembangkan perikanan budidaya kolam sebanyak 353 yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kutasari, kecuali Desa Cendana dan Desa Karangjengkol. Sektor pariwisata juga merupakan salah satu sektor ekonomi unggulan yang dapat mendukung pengembangan Kecamatan Kutasari. Objek wisata yang terdapat di Kecamatan Kutasari, yaitu Situ Tirta Marta (Sitama), Sanggaluri Park, dan Kolam Pemandian Walik Tirto Asri.

Selain itu, di Kecamatan Kutasari terdapat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri. Industri di Kecamatan Kutasari hanya terdapat di Desa Kutasari. Luas total penggunaan lahan untuk industri di Kecamatan Kutasari seluas 5,32 Ha.

Sektor perekonomian unggulan di Kecamatan Kutasari ditunjang dengan adanya sarana perekonomian. Sarana perekonomian yang terdapat di Kecamatan Kutasari tahun 2020 berupa kelompok pertokoan, pasar, minimarket/ swalayan, toko/ warung kelontong/ restoran/ rumah makan, dan warung/ kedai makanan. Sarana perekonomian berupa toko/ warung kelontong dan warung/ kedai makanan tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kutasari. Sedangkan, jumlah sarana perdagangan pasar adalah sebanyak 9 unit.

Tabel III.124.
Sarana Perekonomian di Kecamatan Kutasari Tahun 2020

No	Desa	Pertokoan	Pasar	Minimarket	Toko	Restoran	Warung
1	Karanglewas	1	1	-	20	-	15
2	Munjul	-	-	1	43	2	10
3	Karangklesem	-	1	1	42	-	19
4	Kutasari	3	3	4	25	1	45
5	Sumingkir	-	-	1	31	-	22
6	Meri	1	-	-	15	-	17
7	Karangreja	-	2	1	30	-	25
8	Karangaren	-	-	-	28	-	31
9	Limbangan	-	-	1	42	-	7
10	Cendana	1	-	-	21	-	7
11	Candiwulan	1	1	-	10	-	27
12	Karangcegak	-	-	-	25	-	10
13	Candinata	-	-	-	21	-	21
14	Karangjengkol	-	1	2	41	-	25
Jumlah		7	9	11	394	3	281

Sumber: Kecamatan Kutasari Dalam Angka Tahun 2021

3.5.4. Kondisi Perumahan

3.5.5.1. Sebaran Perumahan

Deliniasi sebaran perumahan didasarkan pada administrasi desa, sedangkan satuan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang dibatasi oleh batas fisik alam seperti jalan atau sungai.

Tabel III.125.
Sebaran Perumahan di Kecamatan Kutasari

No	Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)
1	Karanglewas	29,42
2	Munjul	38,54
3	Karangklesem	38,73
4	Kutasari	68,58
5	Sumingkir	87,68
6	Meri	69,11
7	Karangreja	107,99
8	Karangaren	42,75
9	Limbangan	43,36
10	Cendana	90,59
11	Candiwulan	109,78
12	Karangcegak	92,97
13	Candinata	115,09
14	Karangjengkol	80,85
Jumlah		1.015,46

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021

Jumlah rumah di Kecamatan Kutasari sebanyak 10.233 unit rumah. Tipe fungsi rumah di Kecamatan Kutasari berfungsi sebagai hunian, setengah hunian, dan non hunian. Rumah non hunian berada pada sepanjang jalan lokal primer dan sekitar jalan kolektor primer Jalan Purbalingga - Pemalang, sedangkan rumah dengan fungsi setengah hunian berada pada pusat-pusat kegiatan kecamatan atau desa dengan bagian depan rumah difungsikan sebagai warung/ toko. Jenis rumah yang terdapat di Kecamatan Kutasari berupa rumah komersial, rumah umum bagi MBR, dan rumah swadaya. Bentuk rumah di Kecamatan Kutasari berupa rumah deret terdapat pada beberapa kawasan perumahan seperti pada Perumahan Cluster Taman Karlin. Sedangkan rumah yang berada pada wilayah perdesaan berbentuk rumah tunggal dengan halaman besar dan memiliki keunikan yaitu jendela yang menghadap ke atas.

Tabel III.126.
Jumlah Rumah di Kecamatan Kutasari Tahun 2020

No	Desa	Jumlah Rumah
1	Karanglewas	441
2	Munjul	597
3	Karangklesem	541
4	Kutasari	838
5	Sumingkir	821
6	Meri	641
7	Karangreja	1.003
8	Karangaren	249
9	Limbangan	688

No	Desa	Jumlah Rumah
10	Cendana	822
11	Candiwulan	882
12	Karangcegak	1.066
13	Candinata	947
14	Karangjengkol	697
Jumlah		**10.233**

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga, 2020



Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.94.
Perumahan di Kecamatan Kutasari

3.5.5.2. Sebaran Perumahan Developer

Kebutuhan rumah di Kecamatan Kutasari akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kebutuhan rumah ini dapat dipenuhi secara swadaya maupun oleh developer/pengembang. Perumahan di Kecamatan Kutasari tersebar di beberapa wilayah. Seiring dengan peningkatan kebutuhan rumah maka jumlah pengembang perumahan yang ada di Kecamatan Kutasari juga meningkat. Jumlah perumahan developer yang ada di Kecamatan Kutasari sebanyak 2 perumahan. Namun, hanya 1 perumahan di Kabupaten Kutasari yang sudah diserahterimakan aset PSUnya. Sedangkan, berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga, terdapat 1 perumahan developer. Perumahan developer yang ada di Kecamatan Kutasari rata-rata memiliki tipe MBR. Berikut ini merupakan perumahan pengembang di Kecamatan Kutasari berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.

Tabel III.127.
Perumahan Pengembang di Kecamatan Kutasari

Desa/ Kelurahan	Nama Perumahan Pengembang	Jumlah Rumah	Luas Total Tanah
Meri	Tamr Village Kutasari	54	6.130

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga



(a)



(b)

(a) Perumahan Cluster Taman Karlin
(b) Perumahan Samara

Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.95.
Perumahan Pengembang di Kecamatan Kutasari

3.5.5.3. Kawasan PKP Pada Kawasan Strategis

Kecamatan Kutasari terdapat kawasan strategis wilayah kabupaten. Kawasan strategis di Kecamatan Kutasari meliputi Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi. Perumahan yang berada pada kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Kutasari seluas 1.175,53 ha.

Tabel III.128.
Luas Kawasan PKP Pada Kawasan Strategis

Kawasan Strategis	Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)
Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi	Candinata	138,21
	Candiwulan	137,80
	Cendana	121,48
	Karangaren	22,31
	Karangcegak	112,54
	Karangjengkol	96,18
	Karangklesem	46,61
	Karanglewas	32,53
	Karangreja	137,81
	Limbangan	81,42
	Meri	83,88
	Munjul	49,79
	Sumingkir	114,98

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021

3.5.5.4. Kawasan PKP Tidak Sesuai Tata Ruang (*Negative List*)

Rencana pengembangan kawasan permukiman seharusnya tidak berada di wilayah *negative list* dan harus sesuai dengan peruntukan tata ruang dalam RTRW Kabupaten Purbalingga. Permukiman eksisting di Kecamatan Kutasari berada pada

rencana pola ruang yang telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Purbalingga dan tidak berada pada wilayah *negative list*.

3.5.5.5. Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana

Kecamatan Kutasari terdapat beberapa perumahan yang berada di daerah rawan bencana. Perumahan yang berada di kawasan rawan bencana gempa bumi, gerakan tanah, angin topan, letusan gunung api, dan banjir. Menurut data BPBD Kabupaten Purbalingga, terdapat penduduk di Kecamatan Kutasari yang terancam bencana. Hal tersebut karena permukiman berada di kawasan rawan bencana gunung api. Penduduk di Kecamatan Kutasari yang terancam bencana gunung api sebanyak 8.168 KK.

3.5.5.6. Kawasan PKP Terdampak Program Pembangunan Pemerintah

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan seharusnya tidak berada di wilayah yang terdampak program pembangunan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Perumahan eksisting di seluruh wilayah di Kecamatan Kutasari tidak berada pada wilayah yang terdampak program pembangunan pemerintah Kabupaten Purbalingga.

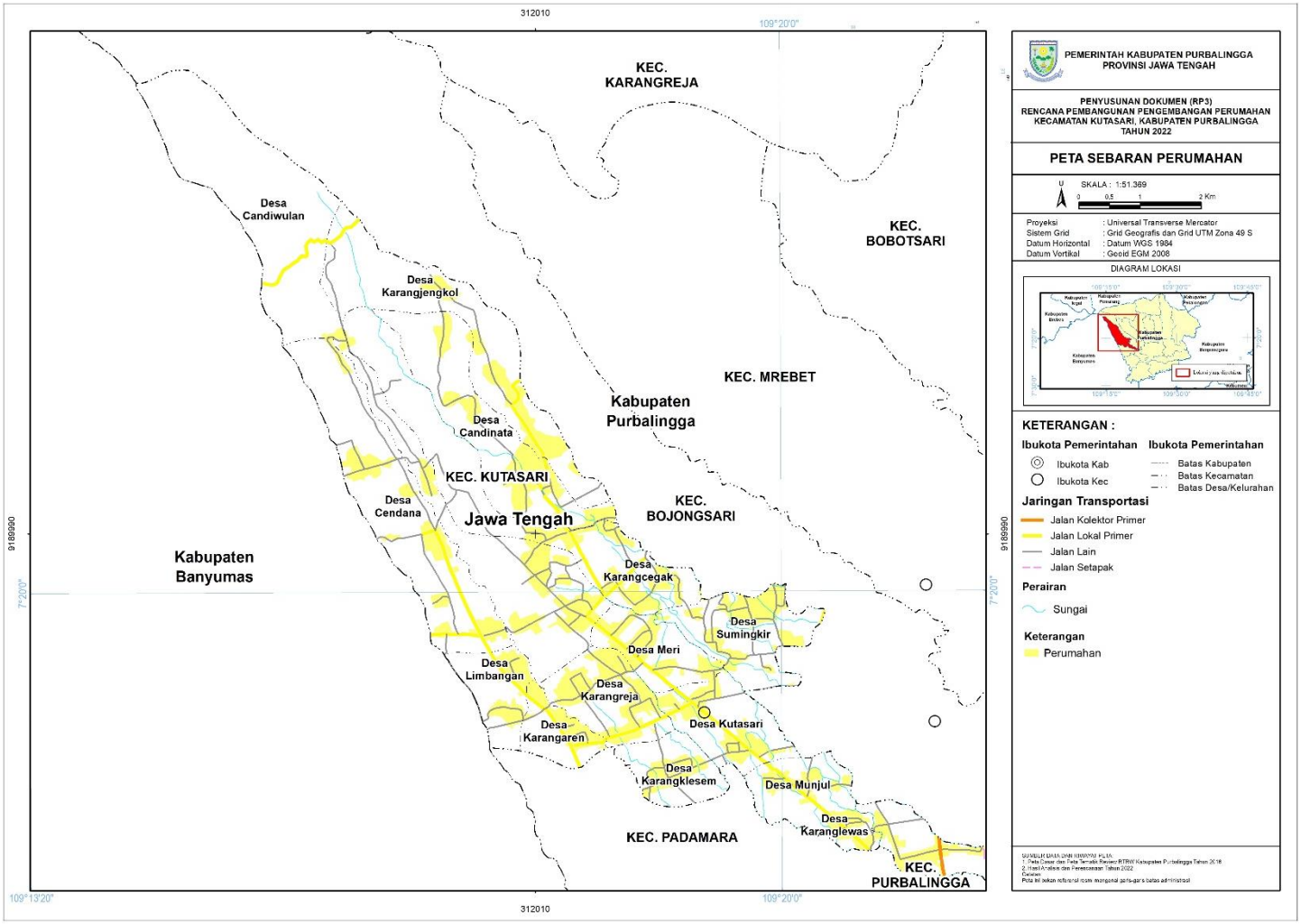
Tabel III.129.
Luas Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana

No	Desa/ Kelurahan	KRB Gempabumi Menengah, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan	KRB Gempabumi Menengah, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	KRB Gempabumi Menengah, Gerakan Tanah Tinggi dan Angin Topan	KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan	KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Rendah, Angin Topan dan Banjir
1	Karanglewas	-	-	-	-	32,53	-
2	Munjul	-	-	-	-	-	49,79
3	Karangklesem	-	-	-	-	38,66	-
4	Kutasari	-	-	-	-	-	88,83
5	Sumingkir	-	80,70	-	-	34,28	-
6	Meri	-	56,72	-	-	27,16	-
7	Karangreja	-	25,97	-	-	96,65	-
8	Karangaren	-	-	-	1,64	17,53	-
9	Limbangan	2,27	17,90	-	1,66	49,38	-
10	Cendana	2,20	105,56	0,18	-	-	-
11	Candiwulan	-	125,26	-	-	-	-
12	Karangcegak	-	101,45	-	-	-	-
13	Candinata	12,08	87,19	-	-	-	-
14	Karangjengkol	21,62	12,83	-	-	-	-
Jumlah		38,18	613,59	0,18	3,29	263,66	138,62

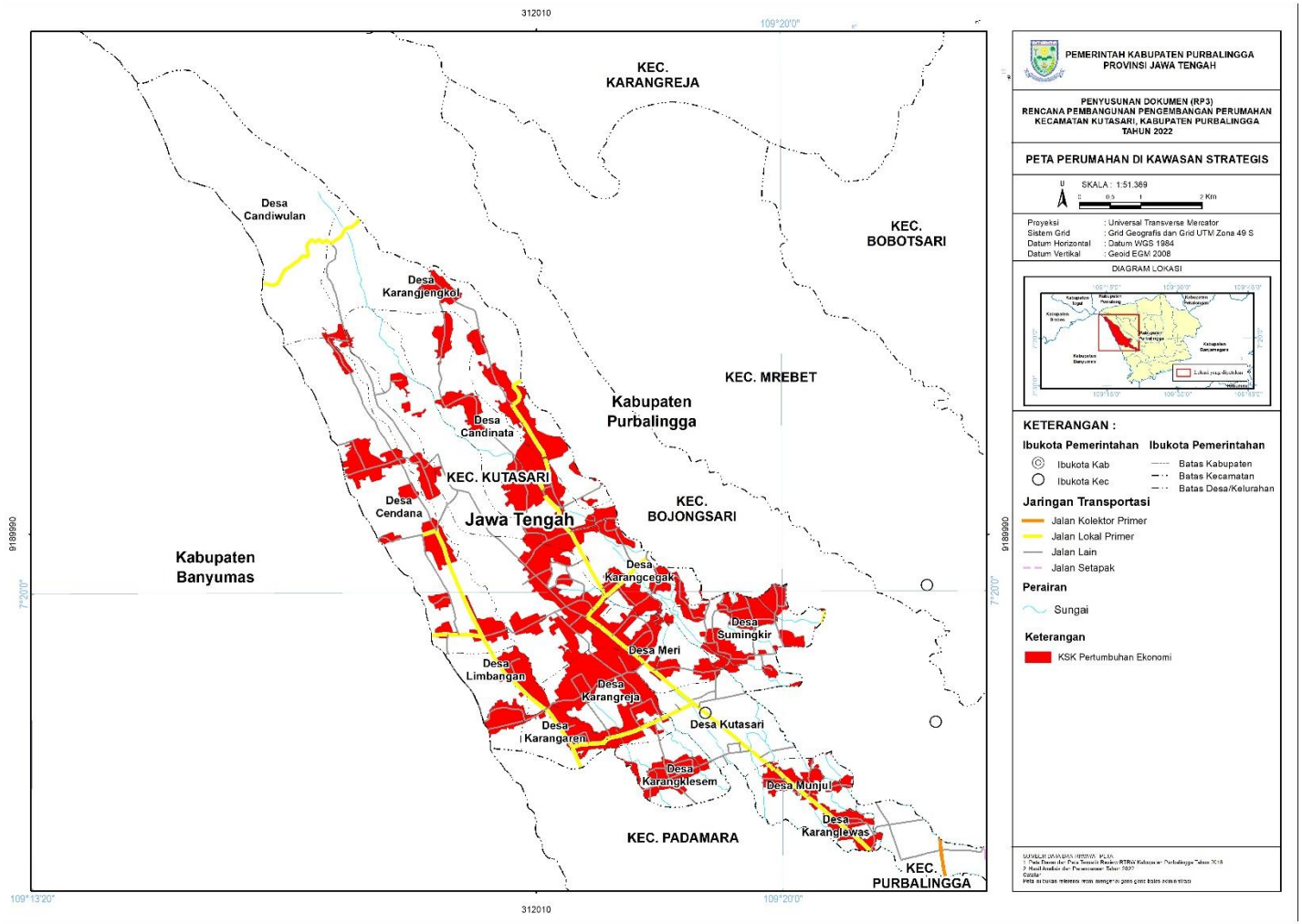
Lanjutan…

No	Desa/ Kelurahan	KRB Gempabumi Tinggi, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan	KRB Gempabumi Tinggi, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	KRB I Letusan Gunung Api, Gempabumi Menengah, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan	KRB I Letusan Gunung Api, Gempabumi Menengah, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	KRB I Letusan Gunung Api, Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan	KRB I Letusan Gunung Api, Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	KRB I Letusan Gunung Api, Gempabumi Tinggi, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan
1	Karanglewas	-	-	-	-	-	-	-
2	Munjul	-	-	-	-	-	-	-
3	Karangklesem	-	-	-	-	-	7,96	-
4	Kutasari	-	-	-	-	-	-	-
5	Sumingkir	-	-	-	-	-	-	-
6	Meri	-	-	-	-	-	-	-
7	Karangreja	-	-	-	-	3,01	12,18	-
8	Karangaren	-	-	-	-	0,39	2,76	-
9	Limbangan	-	-	3,88	0,05	5,75	0,53	-
10	Cendana	6,67	1,00	2,79	2,24	-	-	0,82
11	Candiwulan	0,98	-	1,06	8,81	-	-	1,70
12	Karangcegak	10,71	0,38	-	-	-	-	-
13	Candinata	25,84	13,09	-	-	-	-	-
14	Karangjengkol	39,41	20,45	-	-	-	-	1,86
Jumlah		83,61	34,92	7,72	11,09	9,15	23,43	4,38

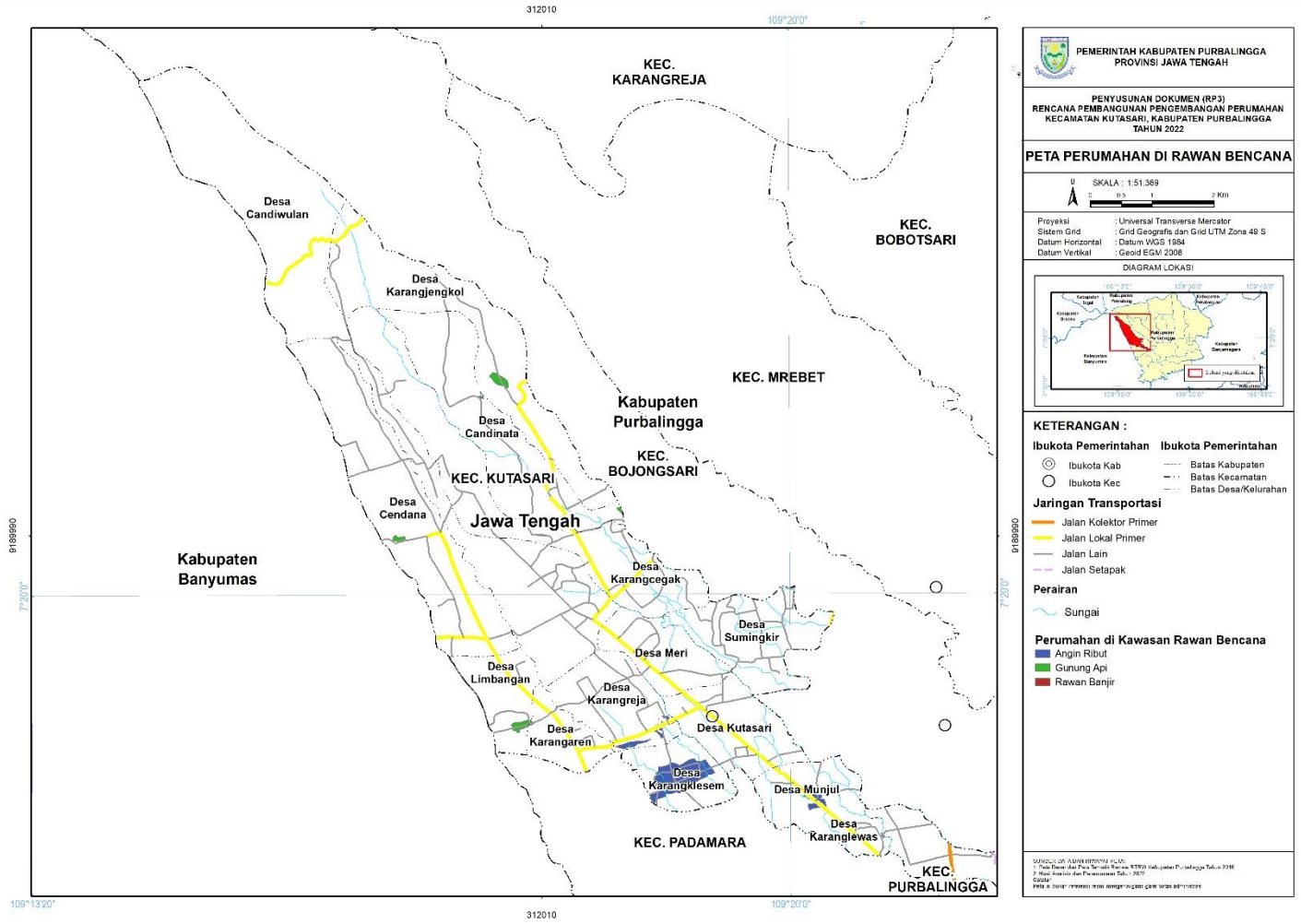
Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021



Gambar 3.96.
Peta Sebaran Permukiman di Kecamatan Kutasari



Gambar 3.97.
Peta Kawasan PKP Pada Kawasan Strategis di Kecamatan Kutasari



Gambar 3.98.
Peta Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana

3.5.5.7. Jumlah dan Sebaran Kebutuhan Rumah (Backlog)

Kekurangan rumah/ backlog di Kecamatan Kutasari pada tahun 2020 mencapai 11.101 rumah. Jumlah ini akan bertambah seiring dengan bertambahnya penduduk di Kecamatan Kutasari. Sebaran backlog di Kecamatan Kutasari dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.130.
Kekurangan Rumah/ Backlog di Kecamatan Kutasari Tahun 2020

No	Desa	Jumlah KK	Jumlah Rumah	Backlog Tahun 2020	Total Luas Kebutuhan Permukiman (Ha)
1	Karanglewas	919	441	478	5,22
2	Munjul	1.244	597	647	7,07
3	Karangklesem	1.128	541	587	6,41
4	Kutasari	1.747	838	909	9,93
5	Sumingkir	1.711	821	890	9,73
6	Meri	1.336	641	695	7,59
7	Karangreja	2.091	1.003	1.088	11,88
8	Karangaren	520	249	271	2,96
9	Limbangan	1.435	688	747	8,16
10	Cendana	1.714	822	892	9,74
11	Candiwulan	1.839	882	957	10,45
12	Karangcegak	2.222	1.066	1.156	12,63
13	Candinata	1.975	947	1.028	11,23
14	Karangjengkol	1.453	697	756	8,26
Jumlah		21.334	10.233	11.101	121,26

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021

3.5.5.8. Jumlah dan Sebaran Rumah Tidak Layah Huni (RTLH)

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Kutasari tahun 2020 adalah sebesar 5.932 unit. Jumlah Sebaran RTLH di Kecamatan Kutasari diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel III.131.
Sebaran Jumlah RTLH di Kecamatan Kutasari Tahun 2020

No	Desa	Jumlah RTLH
1	Karanglewas	170
2	Munjul	227
3	Karangklesem	166
4	Kutasari	379
5	Sumingkir	467
6	Meri	407
7	Karangreja	677
8	Karangaren	127
9	Limbangan	434
10	Cendana	706
11	Candiwulan	551
12	Karangcegak	574
13	Candinata	635
14	Karangjengkol	412

No	Desa	Jumlah RTLH
Jumlah		5.932

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purbalingga

3.5.5.9. Kepadatan Bangunan Rumah

Kepadatan bangunan di Kecamatan Kutasari tahun 2020 yaitu sebesar 10,08 rumah/Ha dengan jumlah rumah sebanyak 10.233 rumah dan luas wilayah 1.015,46 Ha. Kepadatan bangunan di Kecamatan Kutasari terbesar terdapat pada Desa Limbangan yaitu sebesar 15,87 rumah/Ha. Kepadatan bangunan terbesar selanjutnya terdapat pada Desa Munjul dengan kepadatan bangunan sebesar 15,48 rumah/Ha. Sedangkan, kepadatan bangunan terkecil terdapat pada Desa Karangaren dengan kepadatan bangunan sebesar 5,83 rumah/Ha. Secara rinci kepadatan bangunan di Kecamatan Kutasari tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.132.
Kepadatan Bangunan di Kecamatan Kutasari

No	Desa	Luas (Ha)	Jumlah Rumah	Kepadatan Bangunan (Rumah/ Ha)
1	Karanglewas	24,39	441	18,07
2	Munjul	38,32	597	15,57
3	Karangklesem	43,98	541	12,30
4	Kutasari	69,40	838	12,07
5	Sumingkir	104,05	821	7,89
6	Meri	67,85	641	9,45
7	Karangreja	116,26	1.003	8,63
8	Karangaren	20,68	249	12,06
9	Limbangan	79,07	688	8,71
10	Cendana	101,67	822	8,09
11	Candiwulan	106,13	882	8,31
12	Karangcegak	95,54	1.066	11,16
13	Candinata	83,39	947	11,36
14	Karangjengkol	60,84	697	11,46
Jumlah		1.011,55	10.233	10,12

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021

3.5.5.10. Sebaran Kawasan Kumuh

Karakteristik kawasan kumuh dibedakan menjadi 4 kategori kewenangan penangan, yaitu kawasan kumuh kewenangan pusat, kawasan kumuh kewenangan provinsi, dan kawasan kumuh kewenangan kabupaten. Seluruh permukiman di Kecamatan Kutasari berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga No 640/212 Tahun 2021 tidak ada yang termasuk dalam kawasan kumuh.

3.5.5. Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan

3.5.6.1. Kondisi Prasarana

Jaringan prasarana yang terdapat di Kecamatan Kutasari meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan penyediaan air minum, jaringan pengelolaan persampahan, serta jaringan air limbah. Jaringan jalan yang terdapat di seluruh desa di Kecamatan Kutasari telah menggunakan jenis permukaan jalan berupa aspal/ beton dan dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Jaringan drainase di Kecamatan Kutasari terdiri dari jaringan drainase primer berupa sungai, drainase sekunder berupa drainase di jalan utama, dan jaringan drainase tersier di lingkungan permukiman. Jaringan drainase di Kecamatan Kutasari berupa drainase terbuka dan drainase tertutup. Jaringan drainase di Kecamatan Kutasari di beberapa wilayah sudah berfungsi optimal.

Kebutuhan air minum di Kecamatan Kutasari dilayani oleh ledeng dengan meteran, sumur, dan mata air. Banyaknya wilayah yang menggunakan sumur berupa sumur bor sebanyak 4 desa. Sedangkan, desa di Kecamatan Kutasari yang menggunakan ledeng dengan meteran dilayani oleh PDAM.

Jaringan persampahan di Kecamatan Kutasari sebagian sudah terlayani jaringan pengangkutan sampah dengan pembuangan akhir ke TPA Kalipancur di Kecamatan Pengadegan. Pengolahan sampah yang ada di Kecamatan Kutasari berupa TPS dan bank sampah. TPS di Kecamatan Kutasari berada di Pasar Kutasari. Sedangkan, bank sampah di Kecamatan Kutasari sebanyak 6 unit. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase, tegalan, bahkan di sungai. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya serta perluasan jangkauan pelayanan pengangkutan sampah baik dari pemerintah maupun secara swadaya.

Tabel III.133.
Bank Sampah di Kecamatan Kutasari

No	Nama Bank Sampah	Alamat	Keterangan
1	Bank Sampah Maju Jaya	Desa Karanglewas	Aktif
2	Bank Sampah Baresbin	SMK Negeri 1 Kutasari	Aktif
3	Bank Sampah Cendana Resik	Desa Cendana	Aktif
4	Bank Sampah Cinta Bumi	SMA Negeri 1 Kutasari	
5	Bank Sampah Cipta Wulan Indah	Desa Candiwulan	Aktif
6	Bank Sampah Spensaku	SMP Negeri 1 Kutasari	Aktif

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Sistem jaringan sanitasi di Kecamatan Kutasari berupa air limbah domestik yang dibuang dari permukiman, pada umumnya tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu sehingga berdampak pada penurunan kualitas air pada perairan di wilayah Kecamatan Kutasari. Penurunan kualitas air dapat berdampak pada penurunan kualitas air permukaan maupun air tanah. Oleh karena itu maka pengelolaan air limbah yang terpadu sangat perlu dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir dampak yang dapat ditimbulkan. Seluruh keluarga di seluruh wilayah Kecamatan Kutasari sudah menggunakan jamban sendiri untuk fasilitas tempat buang air besar.



(a)



(b)



(c)

(a) Jaringan jalan rusak
(b) Jaringan drainase
(c) PDAM

Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.99.
Prasarana di Kecamatan Kutasari

3.5.6.2. Kondisi Sarana

Sarana yang terdapat di Kecamatan Kutasari meiputi sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana kebudayaan, serta sarana ruang terbuka hijau. Sarana pemerintahan yang terdapat di Kecamatan Kutasari berupa balai desa dan kantor desa. Seluruh wilayah di Kecamatan Kutasari merupakan desa sejumlah 14 desa.

Sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Kutasari terdiri dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD) sederajat, sekolah menengah pertama (SMP) sederajat, dan sekolah menengah akhir (SMA) sederajat. Sarana pendidikan TK dan SD tersebar di seluruh desa di Kecamatan Kutasari. Sarana pendidikan SMP/ Sederajat dan SMA/ Sederajat berturut-turut berjumlah 6 unit dan 2 unit. Secara rinci sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Kutasari tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.134.
Sarana Pendidikan di Kecamatan Kutasari Tahun 2020

No	Desa	TK	SD/ MI	SMP/ MTs	SMA/ SMK/ MA
1	Karanglewas	1	2	-	-

No	Desa	TK	SD/ MI	SMP/ MTs	SMA/ SMK/ MA
2	Munjul	2	2	1	-
3	Karangklesem	2	3	1	-
4	Kutasari	2	4	-	-
5	Sumingkir	1	3	-	-
6	Meri	1	2	1	1
7	Karangreja	4	5	1	1
8	Karangaren	1	1	-	-
9	Limbangan	3	3	-	-
10	Cendana	2	3	1	-
11	Candiwulan	3	4	-	-
12	Karangcegak	1	2	-	-
13	Candinata	2	3	-	-
14	Karangjengkol	1	3	1	-
Jumlah		26	40	6	2

Sumber: Kecamatan Kutasari Dalam Angka Tahun 2021

Sarana peribadatan yang terdapat di Kecamatan Kutasari meliputi masjid, mushola, dan gereja. Sarana peribadatan masjid dan mushola tersebar di seluruh desa di Kecamatan Kutasari dengan jumlah sebanyak 95 masjid dan 151 mushola. Sedangkan, sarana peribadatan gereja di Kecamatan Kutasari sejumlah 1 unit yang berada di Desa Candinata.

Tabel III.135.
Sarana Peribadatan di Kecamatan Kutasari Tahun 2020

No	Desa	Masjid	Musholla	Gereja
1	Karanglewas	4	4	-
2	Munjul	5	9	-
3	Karangklesem	2	8	-
4	Kutasari	4	14	-
5	Sumingkir	6	12	-
6	Meri	6	7	-
7	Karangreja	8	24	-
8	Karangaren	1	5	-
9	Limbangan	7	10	-
10	Cendana	10	7	-
11	Candiwulan	8	12	-
12	Karangcegak	13	16	-
13	Candinata	11	12	1
14	Karangjengkol	10	11	-
Jumlah		95	151	1

Sumber: Kecamatan Kutasari Dalam Angka Tahun 2021

Sarana kesehatan di Kecamatan Kutasari cukup lengkap yang terdiri atas puskesmas, apotek, pustu, praktik dokter/ bidan, PKD, dan posyandu. Sarana kesehatan puskesmas di Kecamatan Kutasari sebanyak 1 unit yang berada di Desa Kutasari. Sarana kesehatan posyandu di Kecamatan Kutasari tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kutasari. Sementara, sarana kesehatan pustu hanya sebanyak 1 unit. Berikut ini merupakan jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Kutasari tahun 2020.

Tabel III.136.
Sarana Kesehatan di Kecamatan Kutasari Tahun 2020

No	Desa	Poliklinik	Puskesmas	Apotek	Pustu	Praktik Dokter/ Bidan	PKD	Posyandu
1	Karanglewas	-	-	-	-	2	1	4
2	Munjul	-	-	-	-	1	1	6
3	Karangklesem	-	-	-	-	1	1	3
4	Kutasari	-	1	2	-	2	-	8
5	Sumingkir	-	-	-	-	2	1	6
6	Meri	1	-	-	-	1	1	5
7	Karangreja	-	-	-	-	1	1	7
8	Karangaren	-	-	-	-	1	1	2
9	Limbangan	-	-	-	-	2	1	7
10	Cendana	-	-	-	-	1	1	6
11	Candiwulan	-	-	1	-	2	1	5
12	Karangcegak	-	-	-	1	1	1	9
13	Candinata	-	-	-	-	1	1	9
14	Karangjengkol	-	-	-	-	1	1	6
Jumlah		1	1	3	1	19	13	83

Sumber: Kecamatan Kutasari Dalam Angka Tahun 2021

Kebudayaan di Kecamatan Kutasari beraneka ragam, meliputi ujungan, suran, ebeg/ kuda lumping, lengger, dan lainnya. Kebudayaan tersebut di dukung oleh beberapa organisasi kesenian yang terdapat di Kecamatan Kutasari. Sarana ruang terbuka hijau yang terdapat di Kecamatan Kutasari meliputi ruang terbuka hijau jalur hijau jalan dan ruang terbuka hijau fungsi tertentu. Ruang terbuka hijau fungsi tertentu di Kecamatan Kutasari berupa fasilitas/ lapangan olahraga terdiri dari lapangan sepak bola, lapangan bola voli, lapangan bulu tangkis, fasilitas tenis meja, lapangan futsal, fasilitas renang, fasilitas bela diri, dan pusat kebugaran. Berikut ini merupakan jumlah dan kondisi fasilitas/ lapangan olahraga di Kecamatan Kutasari.

Tabel III.137.
Jumlah dan Kondisi Lapangan Olahraga di Kecamatan Kutasari

Fasilitas/ Lapangan Olahraga	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Sedang
Sepak bola	11	3
Bola voli	6	1
Bulu tangkis	7	-
Tenis meja	14	-
Futsal	1	-
Renang	1	-
Bela diri (pencak silat, karate, dll)	1	-
Pusat kebugaran	1	-

Sumber: Kecamatan Kutasari Dalam Angka Tahun 2021



(a)



(b)



(c)



(d)

(a) SMP Negeri 2 Kutasari
(b) Klinik NU Kutasai
(c) Pasar Rakyat Tobong
(d) Taman Wisata Sanggaluri

Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.100.
Sarana di Kecamatan Kutasari

3.5.6.3. Kondisi Utilitas

Jaringan utlitas yang terdapat di Kecamatan Kutasari meliputi jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, serta evakuasi bencana.

Jaringan energi dan kelistrikan di Kecamatan Kutasari mempunyai sumber energi listrik utama dari PLN. Jangkauan pelayanan listrik oleh PLN sudah menjangkau di seluruh desa se-Kecamatan Kutasari. Jumlah pelanggan listrik di Kecamatan Kutasari sebanyak 21.247 pelanggan pada tahun 2020.

Tabel III.138.
Jumlah Pelanggan Listrik di Kecamatan Kutasari Tahun 2020

No	Desa	Jumlah Pengguna PLN
1	Karanglewas	938
2	Munjul	1.252
3	Karangklesem	1.139
4	Kutasari	1.779
5	Sumingkir	1.714
6	Meri	1.316
7	Karangreja	2.074

No	Desa	Jumlah Pengguna PLN
8	Karangaren	513
9	Limbangan	1.423
10	Cendana	1.698
11	Candiwulan	1.837
12	Karangcegak	2.211
13	Candinata	1.937
14	Karangjengkol	1.416
Jumlah		21.247

Sumber: Kecamatan Kutasari Dalam Angka Tahun 2021

Jaringan telekomunikasi merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi kelancaran informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, keberadaan jaringan telepon di kawasan perencanaan sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas masyarakat. Kebutuhan telekomunikasi masyarakat saat ini dipenuhi dengan adanya jaringan non kabel hampir di seluruh wilayah Kecamatan Kutasari.

Tabel III.139.
Jumlah Menara Telekomunikasi dan Kondisi Sinyal Telepon Seluler di Kecamatan Kutasari

No	Desa	Jumlah BTS	Kondisi Sinyal Telepon Seluler
1	Karanglewas	1	Sangat Kuat
2	Munjul	1	Sangat Kuat
3	Karangklesem	1	Sangat Kuat
4	Kutasari	2	Sangat Kuat
5	Sumingkir	-	Sangat Kuat
6	Meri	1	Sangat Kuat
7	Karangreja	-	Sangat Kuat
8	Karangaren	-	Sangat Kuat
9	Limbangan	-	Sangat Kuat
10	Cendana	-	Sangat Kuat
11	Candiwulan	1	Sangat Kuat
12	Karangcegak	1	Sangat Kuat
13	Candinata	1	Sangat Kuat
14	Karangjengkol	-	Kuat

Sumber: Kecamatan Kutasari Dalam Angka Tahun 2021

Jalur evakusi yang terdapat di Kecamatan Kutasari berupa jaringan jalan yang ada. Hal ini dikarenakan Kecamatan Kutasari merupakan daerah rawan bencana gunung api. Kecamatan Kutasari juga memiliki tempat evakuasi bencana yang berada di sarana fasilitas umum.



(a)



(b)



(c)



(d)

(a) Gardu listrik
(b) BTS
(c) Jalur evakuasi
(d) Tempat evakuasi

Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.101.
Utilitas di Kecamatan Kutasari

3.6. Kecamatan Kaligondang

3.6.1. Kondisi Fisik Kawasan

Kecamatan Kaligondang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Purbalingga. Batas wilayah Kecamatan Kaligondang secara administratif dapat diuraikan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Karanganyar

Sebelah Timur : Kecamatan Purbalingga

Sebelah Selatan : Kecamatan Pengadegan

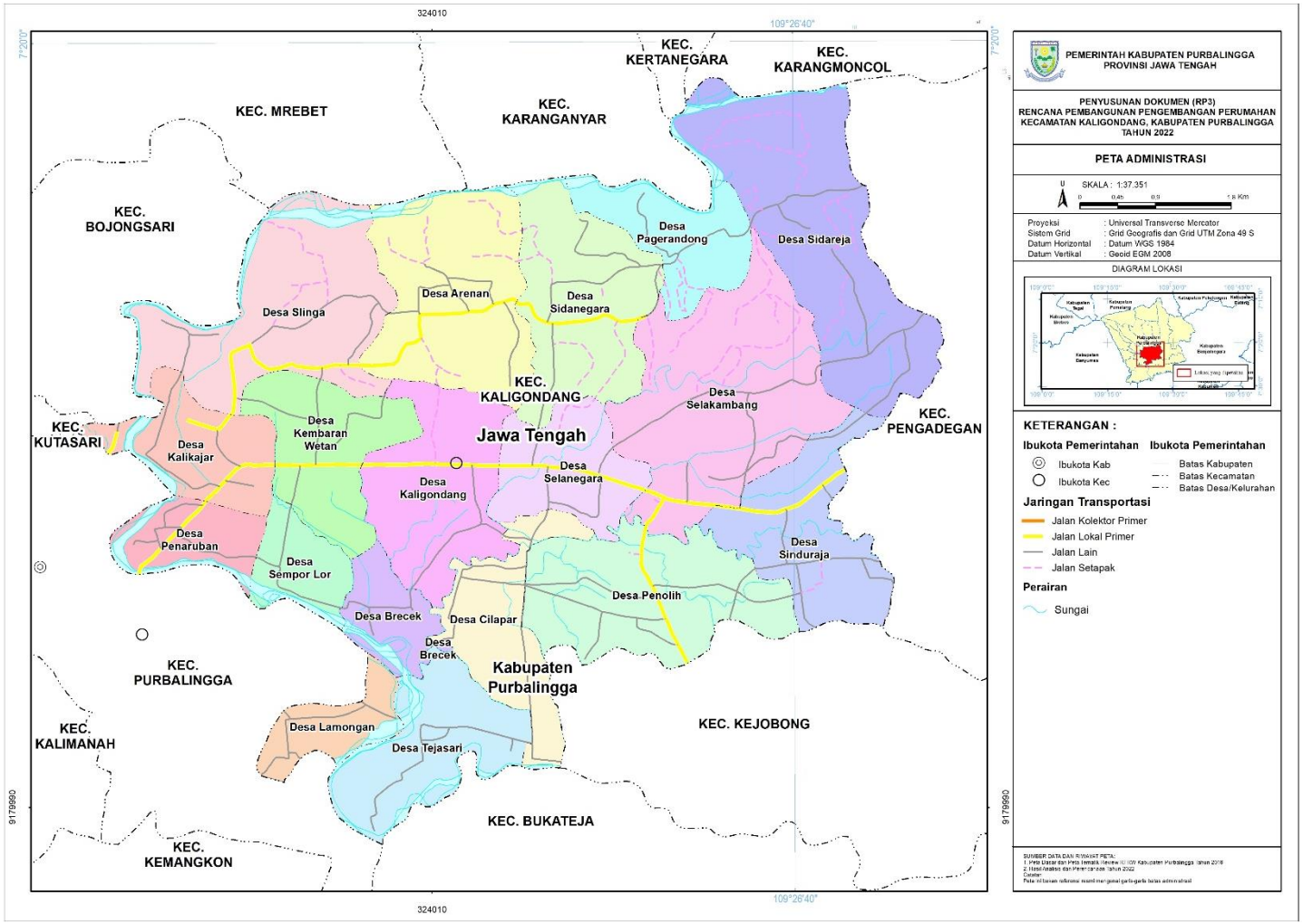
Sebelah Barat : Kecamatan Bojongsari dan Kecamatan Kalimanah

Wilayah Kecamatan Kaligondang terbagi dalam 18 desa dengan luas wilayah 5.159,58 Ha atau 6,39% dari luas wilayah Kabupaten Purbalingga. Desa dengan wilayah terluas adalah Desa Sidareja seluas 563,83 Ha. Sedangkan luas wilayah terkecil adalah Desa Lamongan dengan luas 112,69 Ha. Berikut ini merupakan luas wilayah dan peta administrasi Kecamatan Kaligondang.

Tabel III.140.
Luas Wilayah Kecamatan Kaligondang

No	Desa	Luas (Ha)
1	Lamongan	112,69
2	Tejasari	273,03
3	Cilapar	227,02
4	Penolih	390,77
5	Sinduraja	285,76
6	Selakambang	558,37
7	Selanegara	204,84
8	Kaligondang	316,68
9	Brecek	115,10
10	Sempor Lor	112,93
11	Penaruban	133,21
12	Kalikajar	204,95
13	Kembaran Wetan	248,66
14	Slinga	465,53
15	Arenan	408,24
16	Sidanegara	348,54
17	Pagerandong	189,42
18	Sidareja	563,83
Jumlah		5.159,58

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020



Gambar 3.102.
Peta Administrasi Kecamatan Kaligondang

Wilayah Kecamatan Kaligondang memiliki ketinggian tempat antara 36 meter – 186 meter dari permukaan laut. Menurut klasifikasi ketinggian wilayah Kecamatan Kaligondang termasuk dataran rendah dengan tingkat kemiringan antara 0 % sampai 25 %. Topografi di Kecamatan Kaligondang dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.96.

Tabel III.141.
Topografi di Kecamatan Kaligondang

No	Desa	Datar (0 - 8 %)	Landai (8 - 15 %)	Agak Curam (15 - 25 %)
1	Lamongan	112,69	-	-
2	Tejasari	273,03	-	-
3	Cilapar	227,02	-	-
4	Penolih	390,77	-	-
5	Sinduraja	200,76	69,61	15,39
6	Selakambang	201,20	7,01	350,17
7	Selanegara	158,99	-	45,84
8	Kaligondang	244,37	-	72,30
9	Brecek	115,10	-	-
10	Sempor Lor	112,93	-	-
11	Penaruban	133,21	-	-
12	Kalikajar	204,02	-	0,93
13	Kembaran Wetan	162,11	-	86,55
14	Slinga	132,46	-	333,07
15	Arenan	50,84	-	357,40
16	Sidanegara	17,20	-	331,34
17	Pagerandong	40,16	-	149,26
18	Sidareja	44,15	-	519,68
Jumlah		2.821,01	76,62	2.261,95

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020

Jenis tanah yang ada di Kecamatan Kaligondang dikategorikan menjadi 2 jenis dengan karakteristik yang berbeda. Jenis tanah di Kecamatan Kaligondang berupa aluvial coklat tua dan latosol coklat tua kemerahan. Jenis tanah di Kecamatan Kaligondang dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.97.

Tabel III.142.
Jenis Tanah di Kecamatan Kaligondang

No	Desa	Jenis Tanah (Ha)	
		Aluvial Coklat Tua	Latosol Coklat Tua Kemerahan
1	Lamongan	112,69	-
2	Tejasari	273,03	-
3	Cilapar	160,77	66,24
4	Penolih	57,36	333,42
5	Sinduraja	-	285,76
6	Selakambang	19,50	538,88
7	Selanegara	-	204,84
8	Kaligondang	243,36	73,32
9	Brecek	115,10	-
10	Sempor Lor	112,93	-
11	Penaruban	110,33	22,88
12	Kalikajar	167,27	37,68
13	Kembaran Wetan	248,66	-

No	Desa	Jenis Tanah (Ha)	
		Aluvial Coklat Tua	Latosol Coklat Tua Kemerahan
14	Slinga	364,76	100,78
15	Arenan	267,34	140,90
16	Sidanegara	162,52	186,02
17	Pagerandong	89,02	100,40
18	Sidareja	40,42	523,40
Jumlah		2.545,06	2.614,52

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020

Komposisi litologi batuan yang terdapat di Kecamatan Kaligondang terdiri atas:

a. Alluvium endapan rawa dan danau, terutama tersusun oleh lempung, umumnya bersifat kedap air.

b. Endapan alluvium gunung api, terdiri dari bahan-bahan tak mengeras, mengandung bongkah-bongkah batuan gunung api, bergaris tengah 10 – 15 Cm, tersusun oleh andesit sampai basalt dengan kelulusan terhadap air rendah sampai tinggi.

c. Lava andesit berongga asal Gunung Slamet dengan kelulusan terhadap air tinggi sampai sedang.

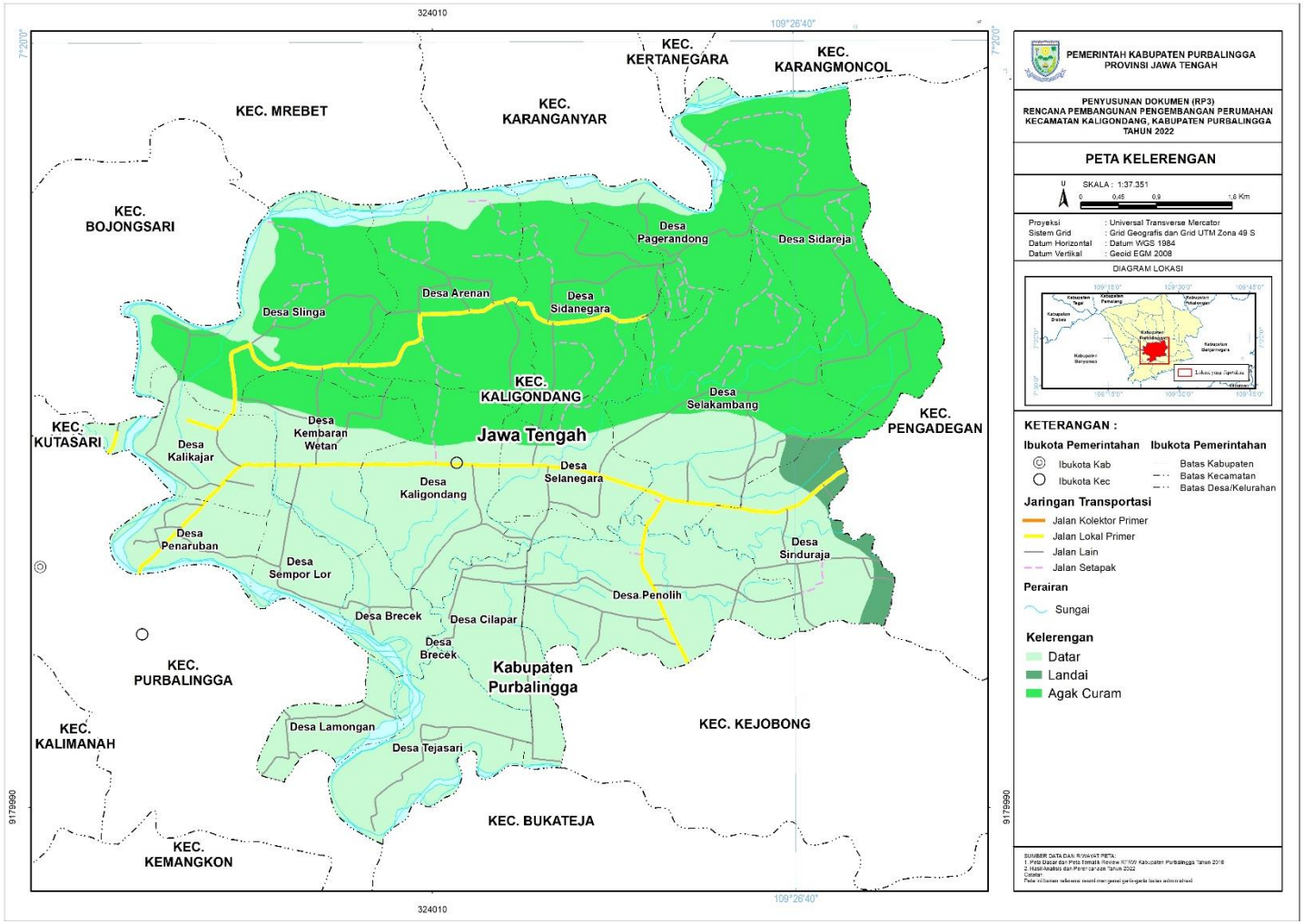
d. Batu pasir, batu serpih, tufa, breksi dan lempung dengan kelulusan terhadap air rendah.

Geologi di Kecamatan Kaligondang dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.98.

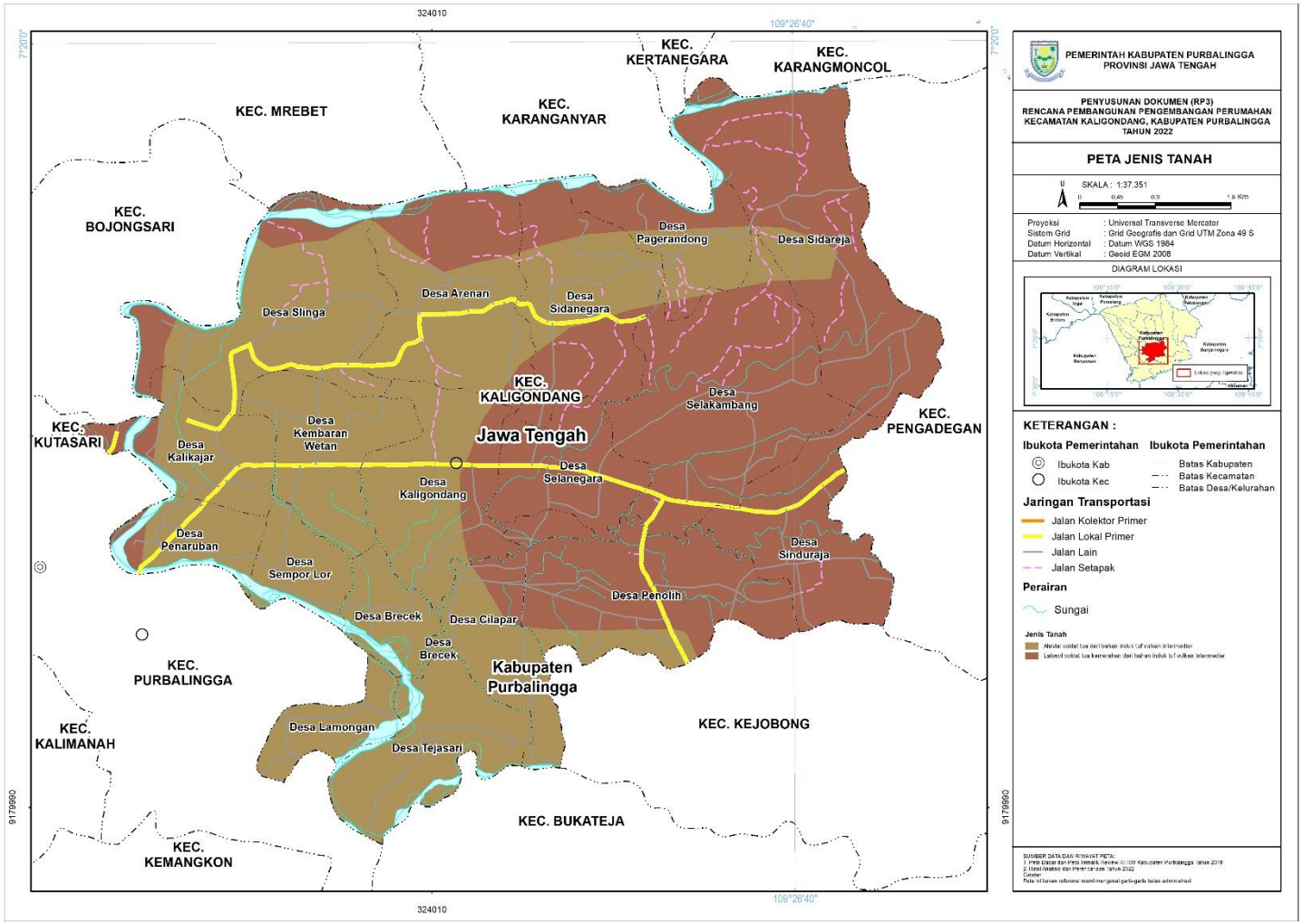
Tabel III.143.
Geologi di Kecamatan Kaligondang

No	Desa	Alluvium Endapan Sungai	Alluvium Endapan Gunung Api	Andhesit	Batu Pasir dan Batu Serpih	Tufa, Breksi dan Lempung
1	Lamongan	-	112,69	-	-	-
2	Tejasari	-	273,03	-	-	-
3	Cilapar	-	227,02	-	-	-
4	Penolih	-	111,92	278,86	-	-
5	Sinduraja	-	-	285,76	-	-
6	Selakambang	-	25,18	200,45	-	332,74
7	Selanegara	-	66,64	77,06	-	61,13
8	Kaligondang	-	239,72	-	-	76,96
9	Brecek	-	115,10	-	-	-
10	Sempor Lor	-	112,93	-	-	-
11	Penaruban	-	133,21	-	-	-
12	Kalikajar	-	204,95	-	-	-
13	Kembaran Wetan	-	200,93	-	-	47,74
14	Slinga	108,91	51,66	-	-	304,96
15	Arenan	50,34	-	-	-	357,91
16	Sidanegara	20,75	-	-	-	327,79
17	Pagerandong	41,19	-	-	-	148,23
18	Sidareja	100,23	-	45,45	9,79	408,35
Jumlah		321,42	1.874,98	887,58	9,79	2.065,81

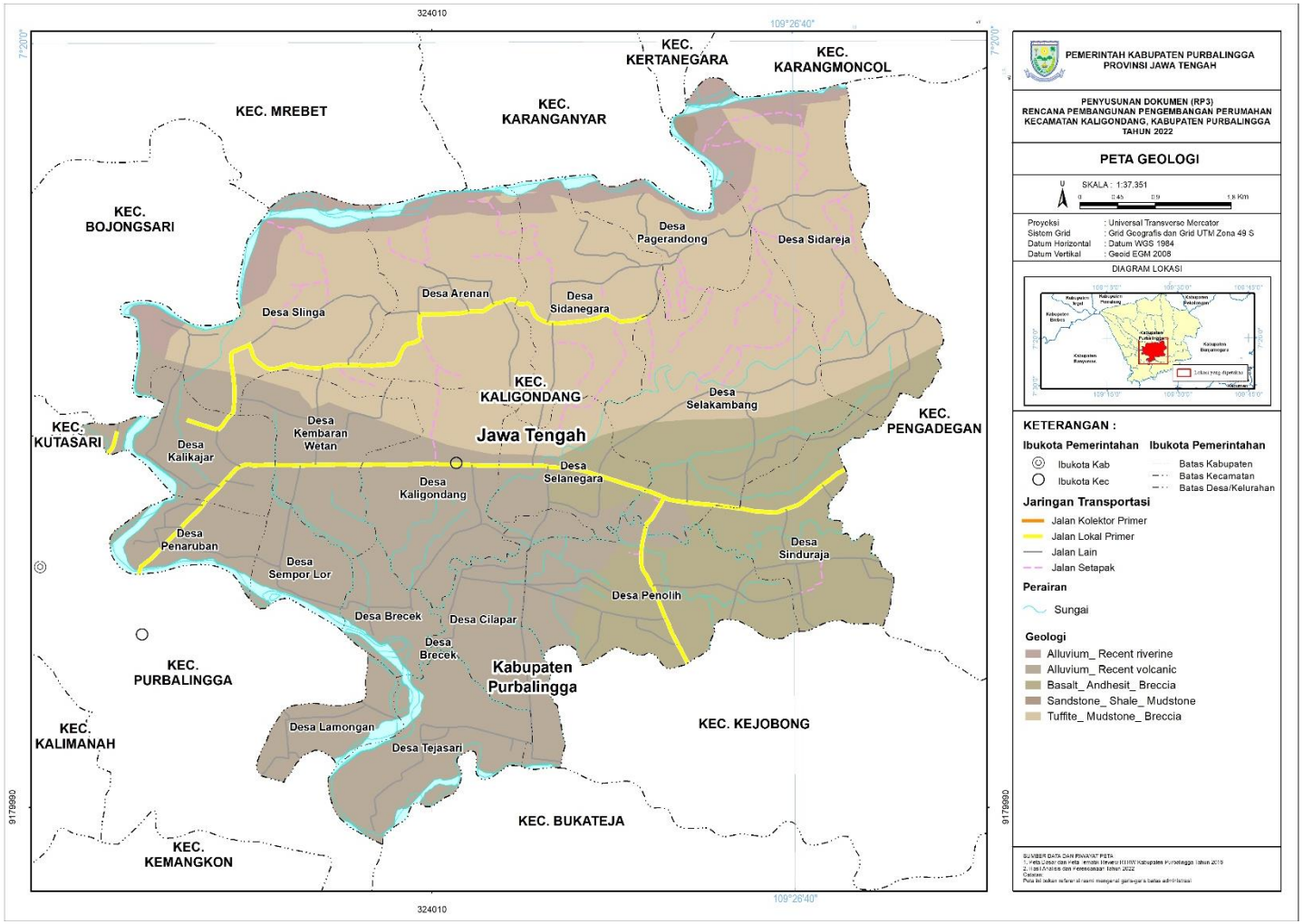
Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020



Gambar 3.103.
Peta Topografi Kecamatan Kaligondang



Gambar 3.104.
Peta Jenis Tanah Kecamatan Kaligondang



Gambar 3.105.
Peta Geologi Kecamatan Kaligondang

Hidrogeologi yang ada di seluruh wilayah Kecamatan Kaligondang berupa akuifer produktivitas tinggi dengan penyebaran luas, kecuali di Desa Pagerandong dan Desa Sidareja. Hidrogeologi di Kecamatan Kaligondang dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.99.

Tabel III.144.
Hidrogeologi di Kecamatan Kaligondang

No	Desa	Akuifer dg prodtvs sdg dg penybr luas	Produktivitas tinggi & penyebaran luas	Setempat berproduktif sedang
1	Lamongan	-	112,69	-
2	Tejasari	-	273,03	-
3	Cilapar	-	227,02	-
4	Penolih	-	344,06	46,71
5	Sinduraja	-	14,95	270,81
6	Selakambang	281,88	150,05	126,45
7	Selanegara	-	204,84	-
8	Kaligondang	13,76	302,91	-
9	Brecek	-	115,10	-
10	Sempor Lor	-	112,93	-
11	Penaruban	-	133,21	-
12	Kalikajar	-	204,95	-
13	Kembaran Wetan	-	248,66	-
14	Slinga	240,35	225,18	-
15	Arenan	391,40	16,84	-
16	Sidanegara	302,67	45,87	-
17	Pagerandong	189,42	-	-
18	Sidareja	433,08	-	130,74
Jumlah		1.852,57	2.732,30	574,71

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020

Kecamatan Kaligondang termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu dengan Sub DAS Klawing dan Sub DAS Pekacangan. Mayoritas wilayah di Kecamatan Kaligondang termasuk dalam Sub DAS Klawing dengan luas 5.068,12 Ha. Sedangkan wilayah Kecamatan Kaligondang yang masuk dalam Sub DAS Pekacangan seluas 91,46 Ha, yaitu hanya Desa Tejasari dan Desa Cilapar. DAS di Kecamatan Kaligondang dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.100.

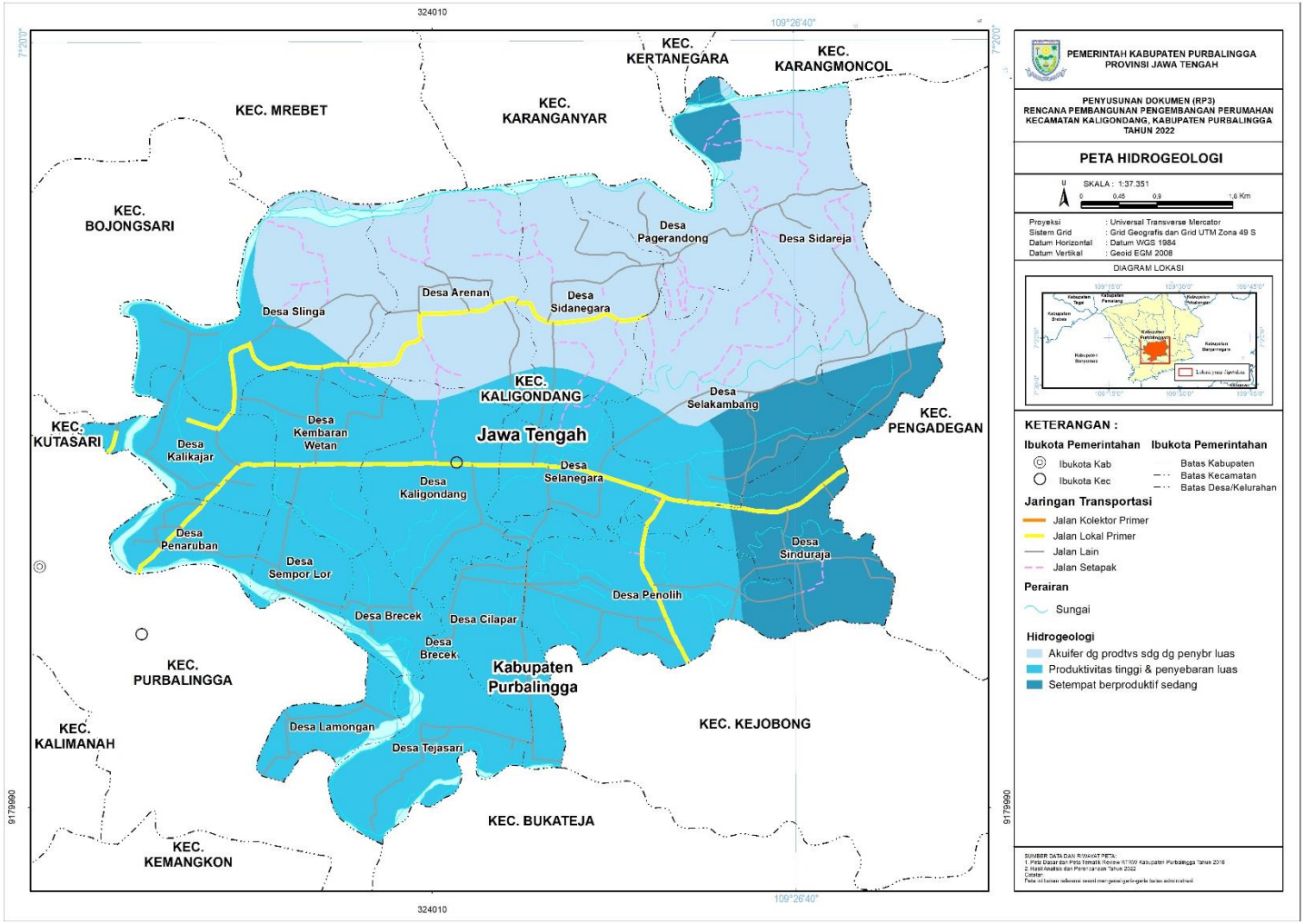
Tabel III.145.
DAS di Kecamatan Kaligondang

No	Desa	DAS Serayu	
		Sub DAS Klawing	Sub DAS Pekacangan
1	Lamongan	112,69	-
2	Tejasari	191,45	81,58
3	Cilapar	217,13	9,88
4	Penolih	390,77	-
5	Sinduraja	285,76	-
6	Selakambang	558,37	-
7	Selanegara	204,84	-
8	Kaligondang	316,68	-
9	Brecek	115,10	-
10	Sempor Lor	112,93	-

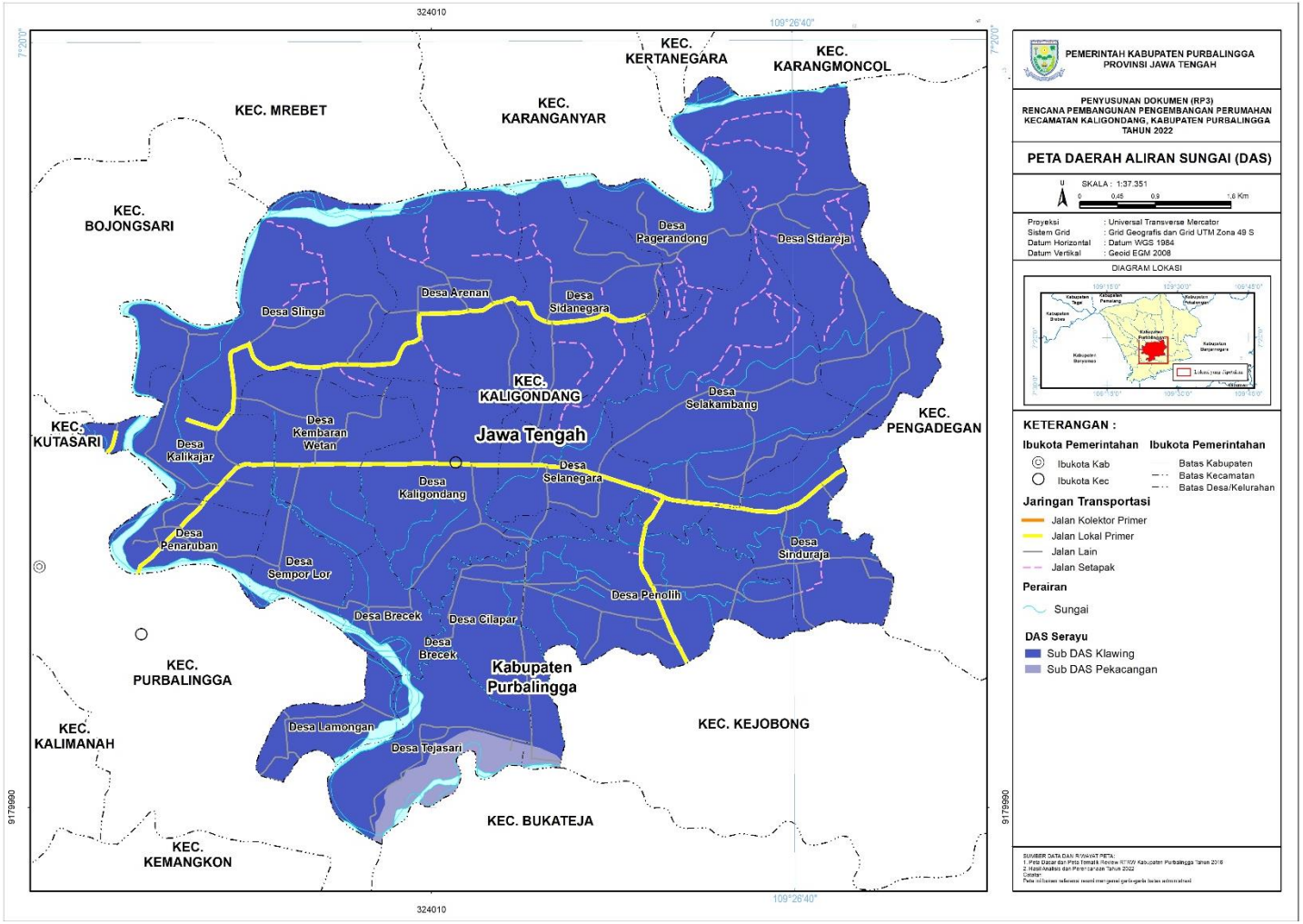
No	Desa	DAS Serayu	
		Sub DAS Klawing	Sub DAS Pekacangan
11	Penaruban	133,21	-
12	Kalikajar	204,95	-
13	Kembaran Wetan	248,66	-
14	Slinga	465,53	-
15	Arenan	408,24	-
16	Sidanegara	348,54	-
17	Pagerandong	189,42	-
18	Sidareja	563,83	-
Jumlah		5.068,12	91,46

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020

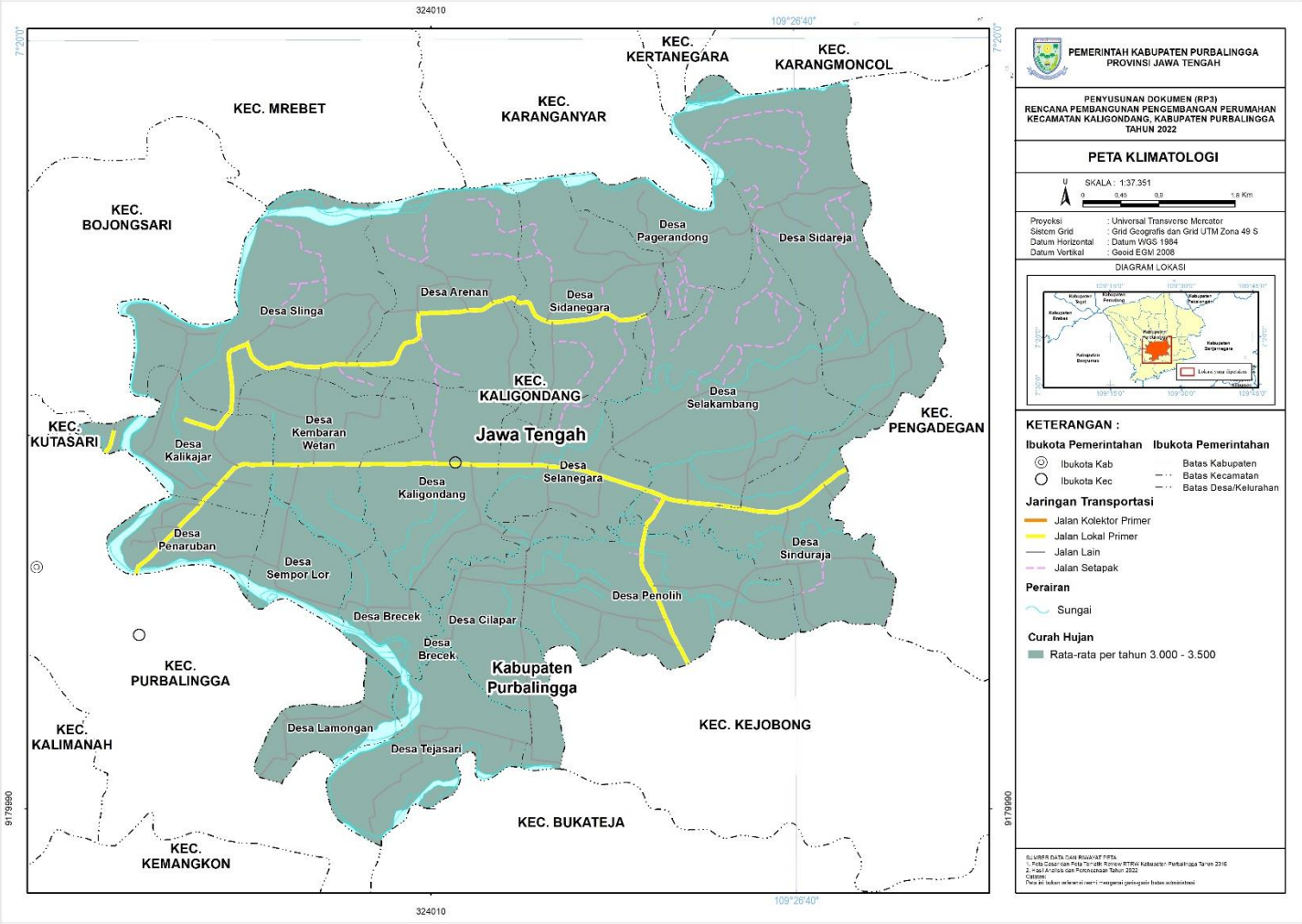
Klimatologi dapat dilihat berdasarkan rata-rata curah hujan per tahun. Curah hujan sangat dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan letak tempat itu sendiri. Tidak terkecuali untuk wilayah Kecamatan Kaligondang yang memiliki iklim tropis yang relatif basah dengan curah hujan rata-rata per tahun sebesar 3.000 – 3.500 mm. Peta klimatologi wilayah Kecamatan Kaligondang dapat dilihat pada Gambar 3.101.



Gambar 3.106.
Peta Hidrogeologi Kecamatan Kaligondang



Gambar 3.107.
Peta DAS Kecamatan Kaligondang



Gambar 3.108.
Peta Klimatologi Kecamatan Kaligondang

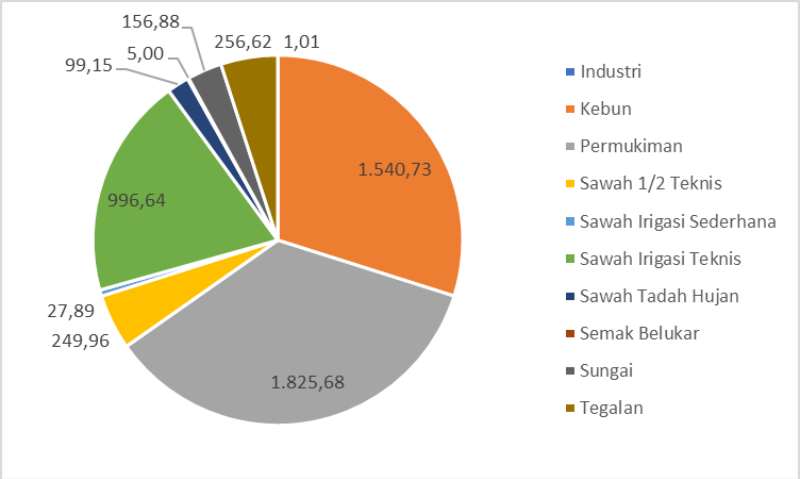
Potensi rawan bencana yang ada di Kecamatan Kaligondang meliputi rawan bencana angin ribut, rawan banjir, dan rawan longsor. Terdapat 6 desa di Kecamatan Kaligondang yang tidak termasuk dalam wilayah rawan bencana. Sebaran rawan bencana di Kecamatan Kaligondang dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan Gambar 3.103.

Tabel III.146.
Rawan Bencana di Kecamatan Kaligondang

No	Desa	Rawan Bencana		
		Angin Ribut	Rawan Banjir	Rawan Longsor
1	Tejasari	7,46	69,52	-
2	Cilapar	2,30	5,12	-
3	Selakambang	-	-	12,31
4	Sempor Lor	1,81	-	-
5	Penaruban	0,55	7,10	-
6	Kalikajar	0,07	8,01	-
7	Kembaran Wetan	6,36	-	-
8	Slinga	0,75	1,63	-
9	Arenan	242,69	-	-
10	Sidanegara	217,37	-	-
11	Pagerandong	174,87	-	6,54
12	Sidareja	3,85	0,15	144,24
Jumlah		658,08	91,53	163,09

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020

Penggunaan lahan di Kecamatan Kaligondang tahun 2020 berupa lahan hutan, industri, kebun, permukiman, lahan sawah setengah teknis, sawah irigasi sederhana, sawah irigasi teknis, sawah tadah hujan, sungai, dan tegalan. Penggunaan lahan di Kecamatan Kaligondang terbesar digunakan untuk lahan permukiman seluas 1.825,68 Ha. Penggunaan lahan terbesar kedua di Kecamatan Kaligondang dadalah kebun seluas 1.540,73 Ha. Luas penggunaan lahan di Kecamatan Kaligondang tahun 2020 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel, grafik, dan Gambar 3.104.

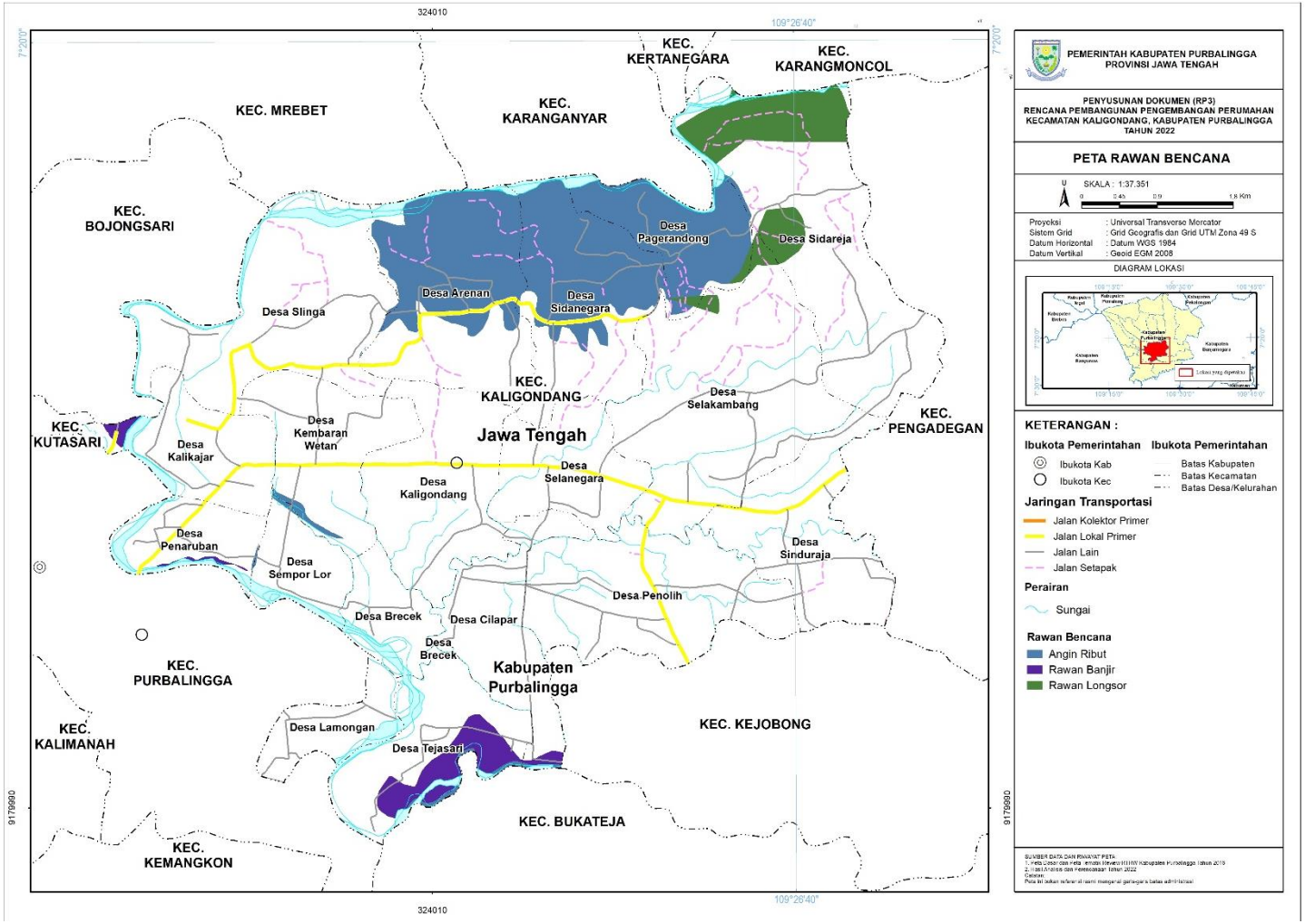


Gambar 3.109.
Luas Penggunaan Lahan Kecamatan Kaligondang Tahun 2020

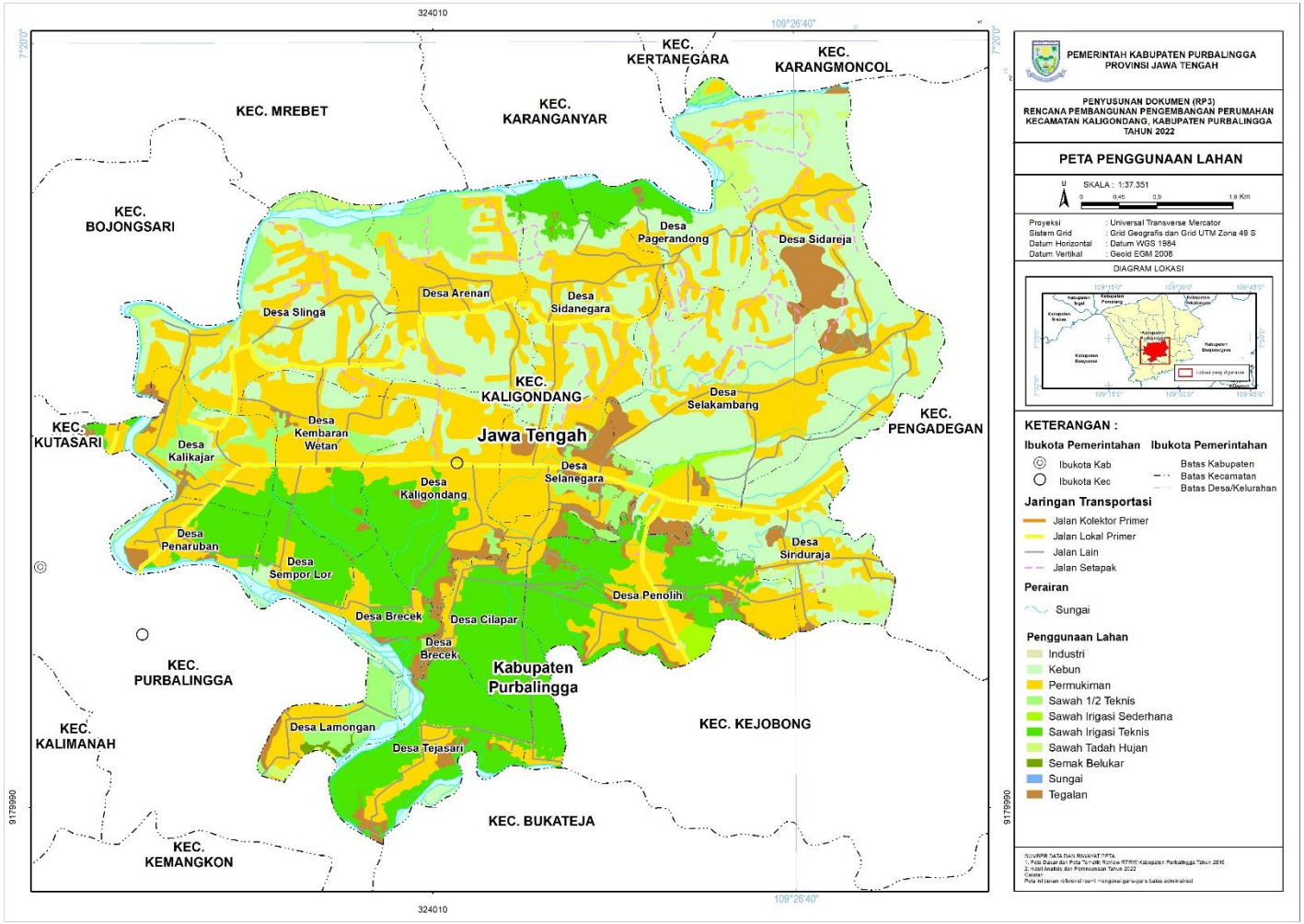
Tabel III.147.
Luas Penggunaan Lahan di Kecamatan Kaligondang Tahun 2020 (hektar)

No	Desa	Penggunaan Lahan (Ha)									
		Industri	Kebun	Permukiman	Sawah 1/2 Teknis	Sawah Irigasi Sederhana	Sawah Irigasi Teknis	Sawah Tadah Hujan	Semak Belukar	Sungai	Tegalan
1	Lamongan	-	3,70	36,66	47,82	-	0,29	5,06	5,00	9,43	4,74
2	Tejasari	-	13,57	40,33	0,00	-	177,74	-	-	20,64	20,75
3	Cilapar	-	-	45,83	-	-	168,64	-	-	1,40	11,15
4	Penolih	1,01	11,63	139,84	-	13,19	192,34	0,89	-	-	31,88
5	Sinduraja	-	163,94	91,51	-	-	-	24,26	-	-	6,05
6	Selakambang	-	330,79	185,99	0,01	14,70	0,20	-	-	-	26,68
7	Selanegara	-	11,32	113,37	38,30	-	-	-	-	-	41,84
8	Kaligondang	-	31,66	157,25	4,78	-	103,10	-	-	-	19,89
9	Brecek	-	6,83	23,90	1,17	-	61,37	-	-	9,60	12,23
10	Sempor Lor	-	7,41	21,16	-	-	72,47	-	-	11,70	0,18
11	Penaruban	-	7,24	49,93	-	-	47,74	-	-	21,10	7,22
12	Kalikajar	-	8,67	108,62	42,20	-	24,36	-	-	11,15	9,96
13	Kembaran Wetan	-	29,42	132,57	15,15	-	66,06	-	-	-	5,46
14	Slinga	-	187,21	186,01	27,18	-	-	30,10	-	33,71	1,33
15	Arenan	-	166,40	164,45	63,36	-	3,71	0,83	-	9,39	0,10
16	Sidanegara	-	140,00	165,95	-	-	35,41	-	-	5,44	1,75
17	Pagerandong	-	86,23	42,16	-	-	43,20	7,94	-	8,41	1,48
18	Sidareja	-	334,71	120,16	9,97	-	0,04	30,06	-	14,91	53,94
Jumlah		1,01	1.540,73	1.825,68	249,96	27,89	996,64	99,15	5,00	156,88	256,62

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga Nomor Tahun 2020



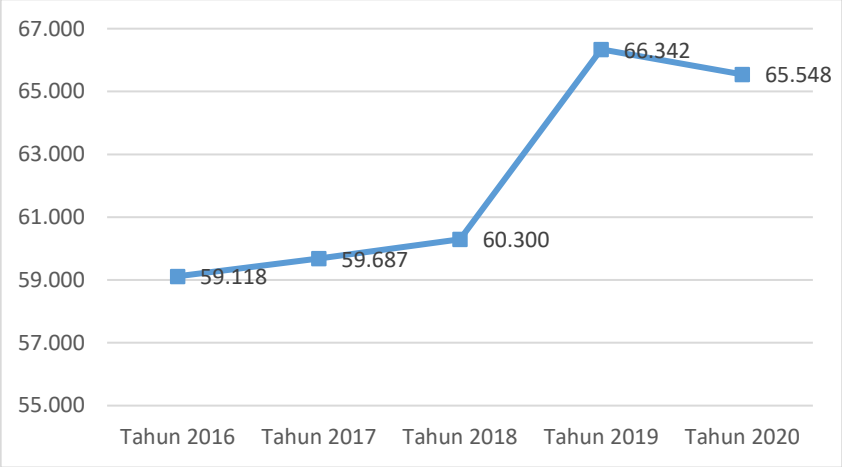
Gambar 3.110.
Peta Rawan Bencana Kecamatan Kaligondang



Gambar 3.111.
Peta Penggunaan Lahan Kecamatan Kaligondang

3.6.2. Kondisi Kependudukan, Sosial, dan Budaya

Perkembangan jumlah penduduk di Kecamatan Kaligondang dalam kurun waktu lima tahun terakhir tepatnya tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Jumlah penduduk Kecamatan Kaligondang tahun 2016 sebanyak 59.118 jiwa mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 menjadi sebanyak 66.342 jiwa. Kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi sebanyak 65.548 jiwa. Jumlah penduduk di Kecamatan Kaligondang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Kecamatan Kaligondang Dalam Angka Tahun 2017-2021

Gambar 3.112.
Jumlah Penduduk Kecamatan Kaligondang Tahun 2016-2020

Jumlah penduduk terbanyak adalah Desa Selakambang sebesar 8.600 jiwa. Penduduk terkecil berada di Desa Sempor Lor dengan jumlah sebanyak 1.272 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk di Kecamatan Kaligondang sebesar 101 yang berarti terdapat 101 penduduk laki-laki setiap 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin di sebagian besar wilayah Kecamatan Kaligondang lebih dari 100. Secara rinci jumlah penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan Kaligondang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.148.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Kaligondang Tahun 2020

No	Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
1	Lamongan	2.669	99,63
2	Tejasari	2.614	104,22
3	Cilapar	2.022	98,82
4	Penolih	3.844	104,47
5	Sinduraja	5.048	103,38
6	Selakambang	8.600	104,42
7	Selanegara	3.408	98,83
8	Kaligondang	3.227	99,69
9	Brecek	1.432	100,84
10	Sempor Lor	1.272	10031
11	Penaruban	4.951	96,7
12	Kalikajar	4.680	100,86
13	Kembaran Wetan	3.207	102,33

No	Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
14	Slinga	5.472	100,81
15	Arenan	3.961	103,23
16	Sidanegara	3.307	106,04
17	Pagerandong	2.139	96,6
18	Sidareja	4.987	104,64
Jumlah		66.840	101,83

Sumber: Kecamatan Kaligondang Dalam Angka Tahun 2021

Kepadatan penduduk di Kecamatan Kaligondang tahun 2020 terbesar terdapat pada Desa Penaruban yaitu sebesar 37 jiwa/Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 4.951 jiwa dan luas wilayah hanya 133,21 Ha. Sedangkan, kepadatan penduduk terkecil terdapat pada Desa Cilapar, Desa Sidanegara, dan Desa Sidareja dengan kepadatan penduduk masing-masing sebesar 9 jiwa/Ha. Secara rinci kepadatan penduduk di Kecamatan Kaligondang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.149.
Kepadatan Penduduk di Kecamatan Kaligondang Tahun 2020

No	Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas (Ha)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Ha)
1	Lamongan	2.669	112,69	24
2	Tejasari	2.614	273,03	10
3	Cilapar	2.022	227,02	9
4	Penolih	3.844	390,77	10
5	Sinduraja	5.048	285,76	18
6	Selakambang	8.600	558,37	15
7	Selanegara	3.408	204,84	17
8	Kaligondang	3.227	316,68	10
9	Brecek	1.432	115,10	12
10	Sempor Lor	1.272	112,93	11
11	Penaruban	4.951	133,21	37
12	Kalikajar	4.680	204,95	23
13	Kembaran Wetan	3.207	248,66	13
14	Slinga	5.472	465,53	12
15	Arenan	3.961	408,24	10
16	Sidanegara	3.307	348,54	9
17	Pagerandong	2.139	189,42	11
18	Sidareja	4.987	563,83	9
Jumlah		66.840	5.160	13

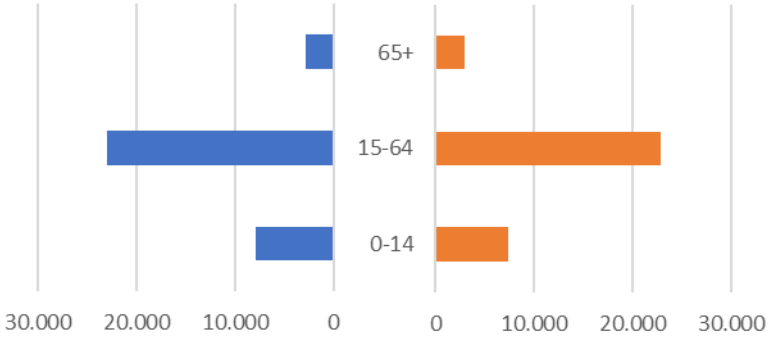
Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Penduduk menurut kelompok umur di Kecamatan Kaligondang terbagi menjadi rentang usia belum produktif (<14 Tahun), usia produktif (15-64 Tahun), dan usia tidak produktif (>64 tahun). Kecamatan Kaligondang memiliki struktur umur yang dominan pada umur 15-64 tahun dimana umur ini merupakan usia produktif. Tingkat ketergantungan Kecamatan Kaligondang tahun 2020 adalah sebesar 45% dengan komposisi usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 45.850 jiwa dan usia tidak produktif (<14 tahun dan >64 tahun) sebanyak 21.020 jiwa. Hal ini berarti sebanyak 100 penduduk usia produktif menanggung 45 penduduk usia tidak produktif.

Tabel III.150.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kecamatan Kaligondang Tahun 2020

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-14	7.856	7.332	15.188
15-64	23.031	22.819	45.850
65+	2.851	2.981	5.832
Jumlah	33.738	33.132	66.870

Sumber: Kecamatan Kaligondang Dalam Angka Tahun 2021



Sumber: Kecamatan Kaligondang Dalam Angka Tahun 2021

Gambar 3.113.
Piramida Penduduk Kecamatan Kaligondang Tahun 2020

Berdasarkan piramida penduduk di atas, untuk kelompok umur 15-64 tahun mempunyai panjang batang lebih panjang dibanding kelompok umur lainnya. Kondisi ini menjelaskan struktur penduduk usia produktif cenderung lebih besar. Struktur penduduk di usia tidak produktif lebih kecil dibanding kelompok usia produktif.

Penduduk menurut mata pencaharian dapat dilihat dari jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan utama. Jumlah penduduk menurut lapangan pekerjaan utama di Kecamatan Kaligondang meliputi pekerjaan dalam bidang pertanian, pekerjaan dalam bidang industri, pekerjaan dalam bidang perdagangan, dan lainnya. Lapangan perkerjaan utama di Kecamatan Kaligondang tahun 2020 paling banyak adalah buruh sebanyak 11.768 jiwa. Lapangan perkerjaan utama paling banyak kedua di Kecamatan Kaligondang tahun 2020 adalah dalam bidang pertanian sebanyak 5.481 jiwa. Sedangkan, lapangan pekerjaan dalam bidang kontruksi hanya sebanyak 23 jiwa.

Tabel III.151.
Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kecamatan Kaligondang Tahun 2020

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Pensiunan	339	101	440
PNS/ ABRI/ TNI	399	223	622
Perdagangan	864	1.065	1.929
Pertanian	3.370	2.111	5.481
Industri	43	122	165
Kontruksi	21	2	23

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Buruh	8.364	3.404	11.768
Karyawan	3.090	2.694	5.784
Wiraswasta	2.920	470	3.390
Lainnya	1.052	525	1.577
Jumlah	20.462	10.717	31.179

Sumber: Kecamatan Kaligondang Dalam Angka Tahun 2021

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kecamatan Kaligondang tahun 2020 paling banyak adalah pada tingkatan SD/ Sederajat sebanyak 22.901 jiwa. Sedangkan, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kecamatan Kaligondang tahun 2020 paling sedikit yaitu pada tingkat pendidikan Strata II hanya sebanyak 36 jiwa.

Tabel III.152.
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kecamatan Kaligondang Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/ Belum Sekolah	6.628	6.243	12.871
Belum Tamat SD/ Sederajat	3.680	3.713	7.393
SD/ Sederajat	11.218	11.683	22.901
SLTP/ Sederajat	6.212	6.193	12.405
SLTA/ Sederajat	4.992	4.146	9.138
Diploma I/ II	87	104	191
Akademi/ Diploma III	207	263	470
Diploma IV/ Strata I	688	777	1.465
Strata II	26	10	36

Sumber: Kecamatan Kaligondang Dalam Angka Tahun 2021

Masyarakat Purbalingga adalah pendukung kebudayaan Jawa dan masyarakatnya terbiasa kontak dengan pendukung budaya lain. Oleh karena itu, masyarakatnya relatif terbuka. Artinya, menerima siapa saja yang datang, berusaha, dan bermukim di daerahnya.

Hubungan antar masyarakat Purbalingga masih memiliki karakteristik guyub ditunjukkan apabila warga mengadakan acara, misalnya pernikahan, khitanan, membangun rumah atau ada yang meninggal dunia, maka masyarakat akan berkunjung dan membantu ke tempat warga tersebut. Disamping itu pula terdapat interaksi sosial yang berbentuk kerjasama yaitu kegiatan gotong-royong, bentuk kerjasama ini dapat diwujudkan berupa tenaga, bahan material ataupun uang. Sedangkan gotong-royong dalam bentuk kerja bakti seperti membersihkan lingkungan dan memperbaiki jalan.

Permukiman di Kecamatan Kaligondang terdiri dari permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan. Karakteristik permukiman perkotaan lebih modern tersedia sarana prasarana pendukung lebih lengkap. Masyarakat permukiman perkotaan berkegiatan bukan pertanian karena sebagian besar lahan terbangun dan bermata pencaharian dalam bidang industri pengolahan dan jasa. Karakteristik permukiman perdesaan berupa lingkungan hunian yang bersifat pedesaan. Masyarakat permukiman perdesaan berkegiatan dalam bidang pertanian, karena masih banyak lahan pertanian.

3.6.3. Kondisi Perekonomian

Sektor perekonomian unggulan di Kecamatan Kaligondang yang dapat mendukung pengembangan Kecamatan Kaligondang berasal dari sektor pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), sektor perkebunan, sektor perikanan, serta sector industri. Sektor pertanian paling besar berupa tanaman pangan sebanyak 12.706,52 ton padi sawah. Kecamatan Kaligondang juga memiliki komoditas unggulan sayur-sayuran yang berupa bayam, cabai besar, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, terung, dan tomat.

Sektor perkebunan yang terdapat di Kecamatan Kaligondang meliputi kelap, karet, dan tebu. Sektor peternakan yang terdapat di Kecamatan Kaligondang meliputi sapi potong, kuda, domba, kambing, ayam kampung, ayam petelur, ayam pedaging, dan itik. Sektor perikanan juga menjadi sektor ekonomi unggalan di Kecamatan Kaligondang. Jenis perikanan di Kecamatan Kaligondang berupa perikanan budidaya dengan kolam. Jumlah rumah tangga tangga yang mengembangkan perikanan budidaya kolam sebanyak 406 yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kaligondang.

Selain itu, di Kecamatan Kaligondang terdapat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan industri. Industri di Kecamatan Kaligondang hanya terdapat di Desa Penolih. Luas total penggunaan lahan untuk industri di Kecamatan Kaligondang seluas 1,01 Ha.

Sektor perekonomian unggulan di Kecamatan Kaligondang ditunjang dengan adanya sarana perekonomian. Sarana perekonomian yang terdapat di Kecamatan Kaligondang tahun 2020 berupa kelompok pertokoan, pasar, minimarket/ swalayan, toko/ warung kelontong/ restoran/ rumah makan, dan warung/ kedai makanan. Sarana perekonomian berupa toko/ warung kelontong dan warung/ kedai makanan tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kaligondang. Sedangkan, jumlah sarana perdagangan pasar adalah sebanyak 3 unit, yaitu berada di Desa Sinduraja, Desa Selanegara, dan Desa Kaligondang.

Tabel III.153.
Sarana Perekonomian di Kecamatan Kaligondang Tahun 2020

No	Desa	Pertokoan	Pasar	Minimarket	Toko	Restoran	Warung
1	Lamongan	-	-	-	23	-	4
2	Tejasari	-	-	-	30	-	6
3	Cilapar	-	-	-	20	-	4
4	Penolih	-	-	-	25	-	4
5	Sinduraja	1	1	3	43	-	44
6	Selakambang	-	-	-	46	-	8
7	Selanegara	-	1	2	44	-	29
8	Kaligondang	1	1	1	35	-	20
9	Brecek	-	-	-	6	-	8
10	Sempor Lor	-	-	-	13	-	8
11	Penaruban	-	-	1	23	1	24
12	Kalikajar	1	-	3	81	1	55
13	Kembaran Wetan	-	-	1	9	-	7
14	Slinga	-	-	1	16	-	11
15	Arenan	-	-	1	25	-	10

No	Desa	Pertokoan	Pasar	Minimarket	Toko	Restoran	Warung
16	Sidanegara	-	-	-	26	-	3
17	Pagerandong	-	-	-	22	-	5
18	Sidareja	-	-	-	21	-	4
Jumlah		3	3	13	508	2	254

Sumber: Kecamatan Kaligondang Dalam Angka Tahun 2021

3.6.4. Kondisi Perumahan

3.6.5.1. Sebaran Perumahan

Deliniasi sebaran perumahan didasarkan pada administrasi desa, sedangkan satuan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang dibatasi oleh batas fisik alam seperti jalan atau sungai.

Tabel III.154.
Sebaran Perumahan di Kecamatan Kaligondang

No	Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)
1	Lamongan	40,85
2	Tejasari	29,92
3	Cilapar	29,75
4	Penolih	80,21
5	Sinduraja	67,40
6	Selakambang	94,70
7	Selanegara	72,39
8	Kaligondang	93,05
9	Brecek	20,56
10	Sempor Lor	16,48
11	Penaruban	33,88
12	Kalikajar	64,94
13	Kembaran Wetan	96,77
14	Slinga	118,08
15	Arenan	119,78
16	Sidanegara	79,54
17	Sidareja	35,69
18	Pagerandong	43,43
Jumlah		1.779,19

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021

Jumlah rumah di Kecamatan Kaligondang sebanyak 17.803 unit rumah. Tipe fungsi rumah di Kecamatan Kaligondang berfungsi sebagai hunian, setengah hunian, dan non hunian. Rumah non hunian berada pada sepanjang jalan lokal primer arah Purbalingga – Pengadegan, sedangkan rumah dengan fungsi setengah hunian berada pada pusat-pusat kegiatan kecamatan atau desa dengan bagian depan rumah difungsikan sebagai warung/ toko. Jenis rumah yang terdapat di Kecamatan Kaligondang berupa rumah komersial, rumah umum bagi MBR, dan rumah swadaya. Bentuk rumah di Kecamatan Kaligondang pada wilayah sekitar jalan lokal primer arah Purbalingga – Pengadegan berupa rumah deret, sedangkan rumah yang berada pada wilayah perdesaan berbentuk rumah tunggal dengan halaman besar.

Tabel III.155.
Jumlah Rumah di Kecamatan Kaligondang Tahun 2020

No	Desa	Jumlah Rumah
1	Lamongan	726
2	Tejasari	727
3	Cilapar	576
4	Penolih	1.039
5	Sinduraja	1.364
6	Selakambang	2.183
7	Selanegara	912
8	Kaligondang	902
9	Brecek	398
10	Sempor Lor	358
11	Penaruban	1.365
12	Kalikajar	1.231
13	Kembaran Wetan	853
14	Slinga	1.438
15	Arenan	1.069
16	Sidanegara	850
17	Sidareja	545
18	Pagerandong	1.267
Jumlah		17.803

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga, 2020



(a)



(b)

(a) Rumah tunggal
(b) Rumah deret

Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.114.
Perumahan di Kecamatan Kaligondang

3.6.5.2. Sebaran Perumahan Developer

Kebutuhan rumah di Kecamatan Kaligondang akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kebutuhan rumah ini dapat dipenuhi secara swadaya maupun oleh developer/pengembang. Perumahan di Kecamatan Kaligonsang tersebar di beberapa wilayah. Seiring dengan peningkatan kebutuhan rumah maka jumlah pengembang perumahan yang ada di Kecamatan Kaligondang juga meningkat. Jumlah perumahan developer yang ada di Kecamatan Kaligondang sebanyak 4 perumahan.

Namun, hanya 3 perumahan di Kabupaten Kaligondang yang sudah diserahterimakan aset PSUnya. Berdasarkan perumahan developer yang tergabung di dalam persatuan perusahaan Real Estate Indonesia (REI) sebanyak 5 perumahan developer yang dibangun setelah tahun 2016. Sedangkan, berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga, terdapat 3 perumahan developer. Perumahan developer yang ada di Kecamatan Kaligondang rata-rata memiliki tipe MBR. Berikut ini merupakan perumahan pengembang di Kecamatan Kaligondang berdasarkan data Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.

Tabel III.156.
Perumahan Pengembang di Kecamatan Kaligondang

Desa/ Kelurahan	Nama Perumahan Pengembang	Jumlah Rumah	Luas Total Tanah
Kalikajar	Griya Asri Syarafana Kalikajar	11	1.580
	Grand Imperium Kalikajar	15	2.443
Kembaran Wetan	Griya Romansa Kembaran Wetan	36	4.216

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga



(a)



(b)

(a) Perumahan Asri Syarafana Kalikajar
(b) Perumahan Gondang Village

Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.115.
Perumahan Pengembang di Kecamatan Kaligondang

3.6.5.3. Kawasan PKP Pada Kawasan Strategis

Kecamatan Kaligondang terdapat kawasan strategis wilayah kabupaten. Kawasan strategis di Kecamatan Kaligondang meliputi Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi. Perumahan yang berada pada kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Kaligondang seluas 1.781,92 ha.

Tabel III.157.
Luas Kawasan PKP Pada Kawasan Strategis

Kawasan Strategis	Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)
Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi	Arenan	123,09
	Brecek	30,18
	Cilapar	50,03

Kawasan Strategis	Desa/ Kelurahan	Luas (Ha)
	Kaligondang	160,18
	Kalikajar	110,51
	Kembaran Wetan	123,66
	Lamongan	45,86
	Pagerandong	43,85
	Penaruban	61,37
	Penolih	148,75
	Selakambang	191,04
	Selanegara	117,55
	Sempor Lor	24,14
	Sidanegara	128,14
	Sidareja	124,18
	Sinduraja	106,02
	Slinga	145,74
	Tejasari	47,62

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021

3.6.5.4. Kawasan PKP Tidak Sesuai Tata Ruang (Negative List)

Rencana pengembangan kawasan permukiman seharusnya tidak berada di wilayah *negative list* dan harus sesuai dengan peruntukan tata ruang dalam RTRW Kabupaten Purbalingga. Permukiman eksisting di Kecamatan Kaligondang berada pada rencana pola ruang yang telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Purbalingga dan tidak berada pada wilayah *negative list*.

3.6.5.5. Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana

Kecamatan Kaligondang terdapat beberapa perumahan yang berada di daerah rawan bencana. Perumahan yang berada di kawasan rawan bencana gempa bumi, gerakan tanah, angin topan, dan banjir. Menurut data BPBD Kabupaten Purbalingga, terdapat penduduk di Kecamatan Kaligondang yang terancam bencana. Hal tersebut karena permukiman berada di kawasan rawan bencana longsor. Penduduk di Kecamatan Kaligondang yang terancam bencana gunung api sebanyak 1.975 KK.

3.6.5.6. Kawasan PKP Terdampak Program Pembangunan Pemerintah

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan seharusnya tidak berada di wilayah yang terdampak program pembangunan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Perumahan eksisting di seluruh wilayah di Kecamatan Kaligondang tidak berada pada wilayah yang terdampak program pembangunan pemerintah Kabupaten Purbalingga.

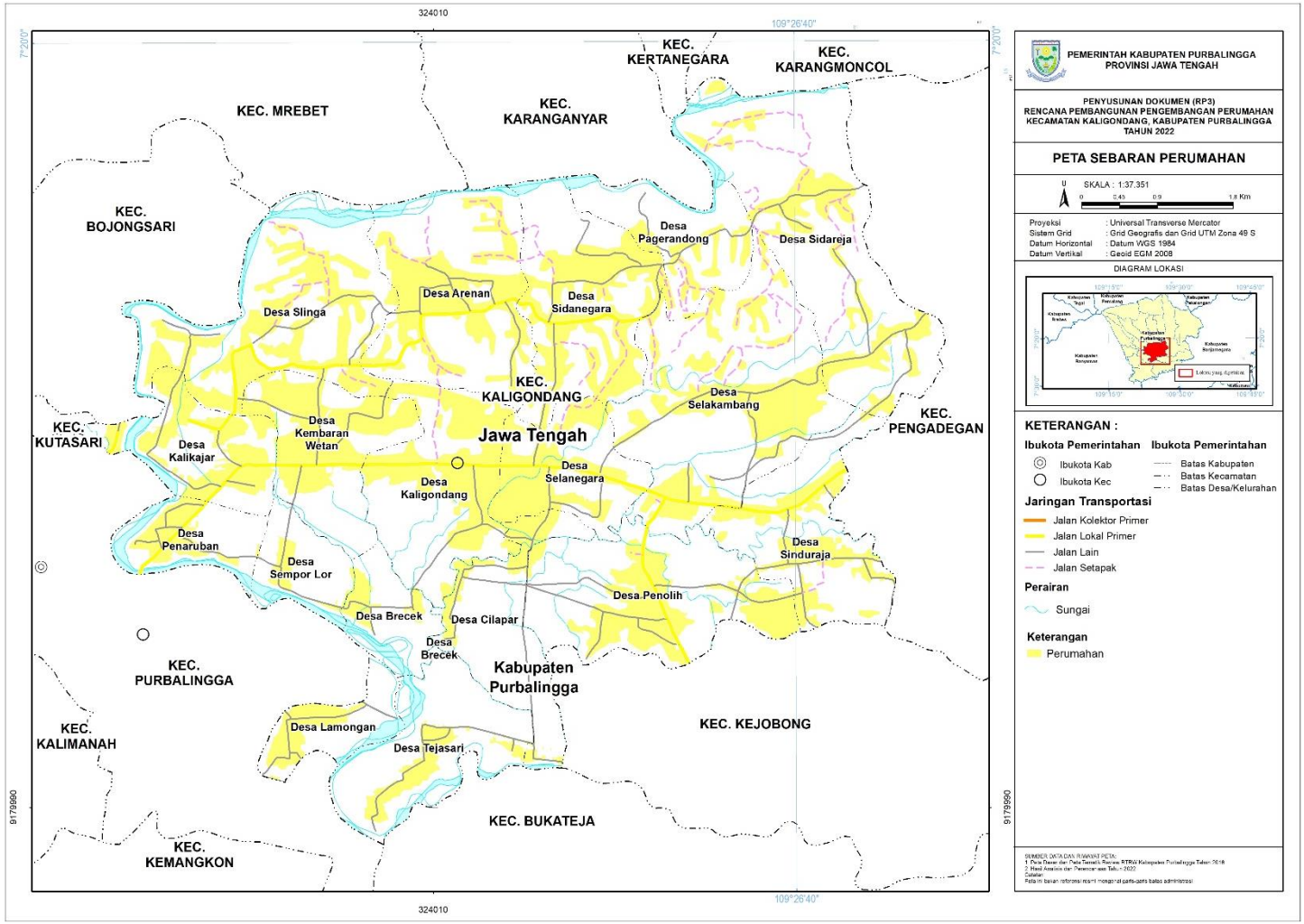
Tabel III.158.
Luas Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana

No	Desa/ Kelurahan	KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan	KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Menengah, Angin Topan dan Banjir	KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Rendah, Angin Topan dan Banjir
1	Lamongan	-	-	-	-
2	Tejasari	-	-	2,43	-
3	Cilapar	-	-	-	43,67
4	Penolih	-	16,70	-	81,89
5	Sinduraja	57,06	-	48,96	-
6	Selakambang	158,86	-	32,18	-
7	Selanegara	-	18,90	-	98,66
8	Kaligondang	-	48,39	-	111,79
9	Brecek	-	-	12,96	-
10	Sempor Lor	-	-	0,03	-
11	Penaruban	-	-	-	-
12	Kalikajar	-	-	16,70	-
13	Kembaran Wetan	44,07	-	67,98	-
14	Slinga	85,14	-	58,23	-
15	Arenan	-	103,07	-	20,02
16	Sidanegara	124,11	-	4,03	-
17	Sidareja	-	90,52	-	4,03
18	Pagerandong	32,91	-	-	-
Jumlah		502,15	277,58	243,51	360,05

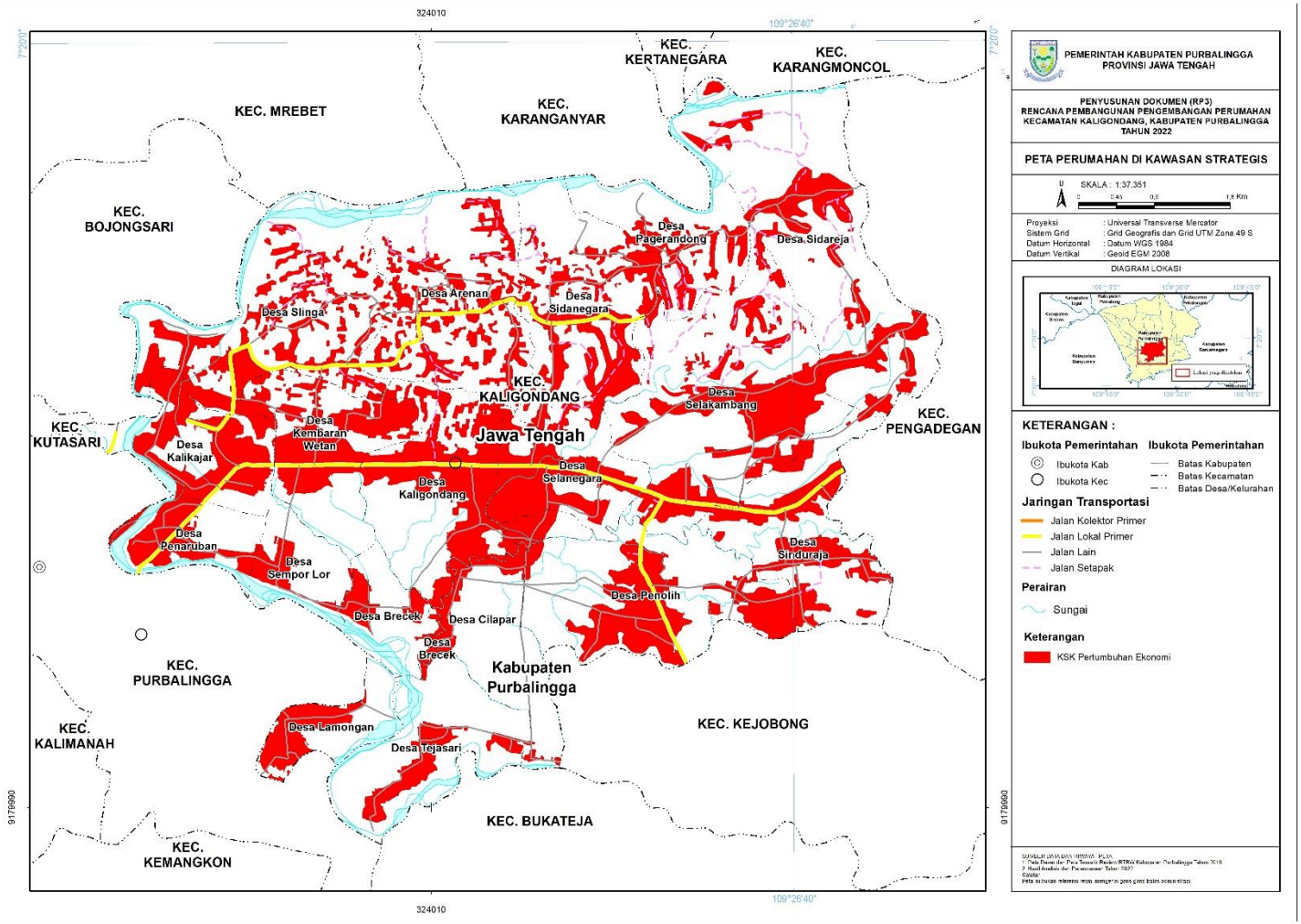
Lanjutan…

No	Desa/ Kelurahan	KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Sangat Rendah dan Angin Topan	KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Sangat Rendah, Angin Topan dan Banjir	KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Tinggi dan Angin Topan	KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Tinggi, Angin Topan dan Banjir
1	Lamongan	45,86	-	-	-
2	Tejasari	45,19	-	-	-
3	Cilapar	-	6,36	-	-
4	Penolih	-	50,16	-	-
5	Sinduraja	-	-	-	-
6	Selakambang	-	-	-	-
7	Selanegara	-	-	-	-
8	Kaligondang	-	-	-	-
9	Brecek	17,21	-	-	-
10	Sempor Lor	24,11	-	-	-
11	Penaruban	61,37	-	-	-
12	Kalikajar	93,81	-	-	-
13	Kembaran Wetan	11,61	-	-	-
14	Slinga	2,37	-	-	-
15	Arenan	-	-	-	-
16	Sidanegara	-	-	-	-
17	Sidareja	-	-	-	29,63
18	Pagerandong	-	-	10,95	-
Jumlah		255,68	56,52	10,95	29,63

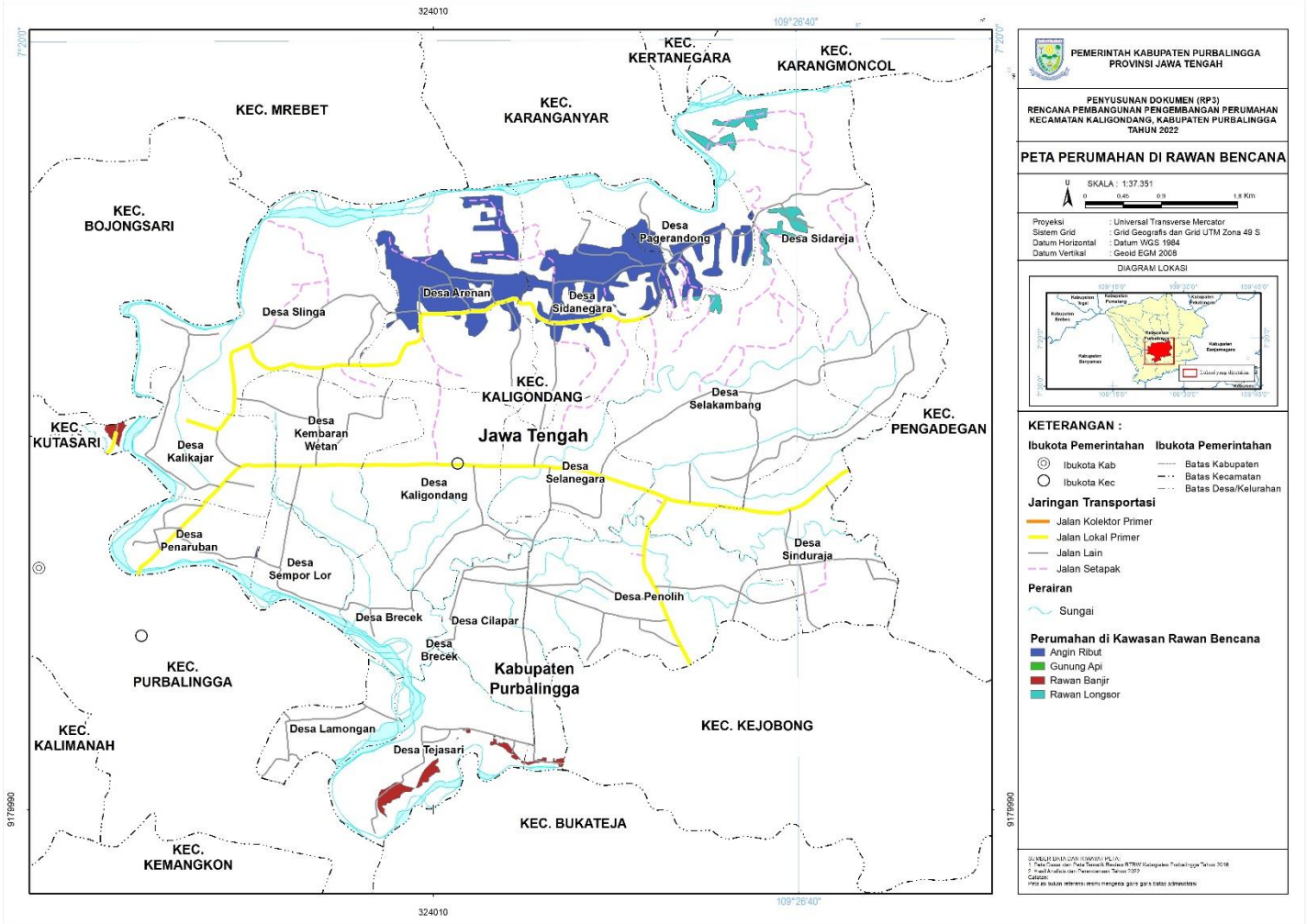
Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021



Gambar 3.116.
Peta Sebaran Permukiman di Kecamatan Kaligondang



Gambar 3.117.
Peta Kawasan PKP Pada Kawasan Strategis di Kecamatan Kaligondang



Gambar 3.118.
Peta Kawasan PKP Pada Wilayah Terdampak Bencana

3.6.5.7. Jumlah dan Sebaran Kebutuhan Rumah (Backlog)

Kekurangan rumah/ backlog di Kecamatan Kaligondang pada tahun 2020 mencapai 4.871 rumah. Jumlah ini akan bertambah seiring dengan bertambahnya penduduk di Kecamatan Kaligondang. Sebaran backlog di Kecamatan Kaligondang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.159.
Kekurangan Rumah/ Backlog di Kecamatan Kaligondang Tahun 2020

No	Desa	Jumlah KK	Jumlah Rumah	Backlog Tahun 2020	Total Luas Kebutuhan Permukiman (Ha)
1	Lamongan	925	726	199	2,17
2	Tejasari	926	727	199	2,17
3	Cilapar	733	576	157	1,72
4	Penolih	1.323	1.039	284	3,10
5	Sinduraja	1.737	1.364	373	4,08
6	Selakambang	2.780	2.183	597	6,52
7	Selanegara	1.162	912	250	2,73
8	Kaligondang	1.149	902	247	2,70
9	Brecek	507	398	109	1,19
10	Sempor Lor	456	358	98	1,07
11	Penaruban	1.738	1.365	373	4,08
12	Kalikajar	1.568	1.231	337	3,68
13	Kembaran Wetan	1.087	853	234	2,55
14	Slinga	1.831	1.438	393	4,30
15	Arenan	1.362	1.069	293	3,20
16	Sidanegara	1.082	850	232	2,54
17	Pagerandong	694	545	149	1,63
18	Sidareja	1.614	1.267	347	3,79
Jumlah		22.674	17.803	4.871	53,21

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021

3.6.5.8. Jumlah dan Sebaran Rumah Tidak Layah Huni (RTLH)

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Kaligondang versi BDT tahun 2020 adalah sebesar 3.979 unit. Sedangkan, RTLH di kawasan kumuh sebanyak 75 unit yang berada di Desa Penaruban dan Desa Kalikajar. Jumlah Sebaran RTLH di Kecamatan Kaligondang diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel III.160.
Sebaran Jumlah RTLH di Kecamatan Kaligondang Tahun 2020

No	Desa	Jumlah RTLH	RTLH di Kawasan Kumuh
1	Lamongan	170	-
2	Tejasari	81	-
3	Cilapar	123	-
4	Penolih	238	-
5	Sinduraja	283	-
6	Selakambang	689	-
7	Selanegara	239	-
8	Kaligondang	174	-

No	Desa	Jumlah RTLH	RTLH di Kawasan Kumuh
9	Brecek	84	-
10	Sempor Lor	41	-
11	Penaruban	145	23
12	Kalikajar	210	52
13	Kembaran Wetan	223	-
14	Slinga	300	-
15	Arenan	272	-
16	Sidanegara	235	-
17	Sidareja	173	-
18	Pagerandong	299	-
Jumlah		3.979	75

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purbalingga

3.6.5.9. Kepadatan Bangunan Rumah

Kepadatan bangunan di Kecamatan Kaligondang tahun 2020 yaitu sebesar 15,65 rumah/Ha dengan jumlah rumah sebanyak 1.267 rumah dan luas wilayah 1.137,4 Ha. Kepadatan bangunan di Kecamatan Kaligondang terbesar terdapat pada Desa Penaruban yaitu sebesar 40,27 rumah/Ha. Sedangkan, kepadatan bangunan terkecil terdapat pada Desa Arenan dengan kepadatan bangunan sebesar 8,93 rumah/Ha. Secara rinci kepadatan bangunan di Kecamatan Kaligondang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.161.
Kepadatan Bangunan di Kecamatan Kaligondang

No	Desa	Luas (Ha)	Jumlah Rumah	Kepadatan Bangunan (Rumah/ Ha)
1	Lamongan	40,85	726	17,78
2	Tejasari	29,92	727	24,30
3	Cilapar	29,75	576	19,35
4	Penolih	80,21	1.039	12,95
5	Sinduraja	67,40	1.364	20,24
6	Selakambang	94,70	2.183	23,05
7	Selanegara	72,39	912	12,60
8	Kaligondang	93,05	902	9,70
9	Brecek	20,56	398	19,36
10	Sempor Lor	16,48	358	21,72
11	Penaruban	33,88	1.365	40,27
12	Kalikajar	64,94	1.231	18,96
13	Kembaran Wetan	96,77	853	8,82
14	Slinga	118,08	1.438	12,18
15	Arenan	119,78	1.069	8,93
16	Sidanegara	79,54	850	10,68
17	Pagerandong	35,69	545	15,27
18	Sidareja	43,43	1.267	29,18
Jumlah		1.137,40	17.803	15,65

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021

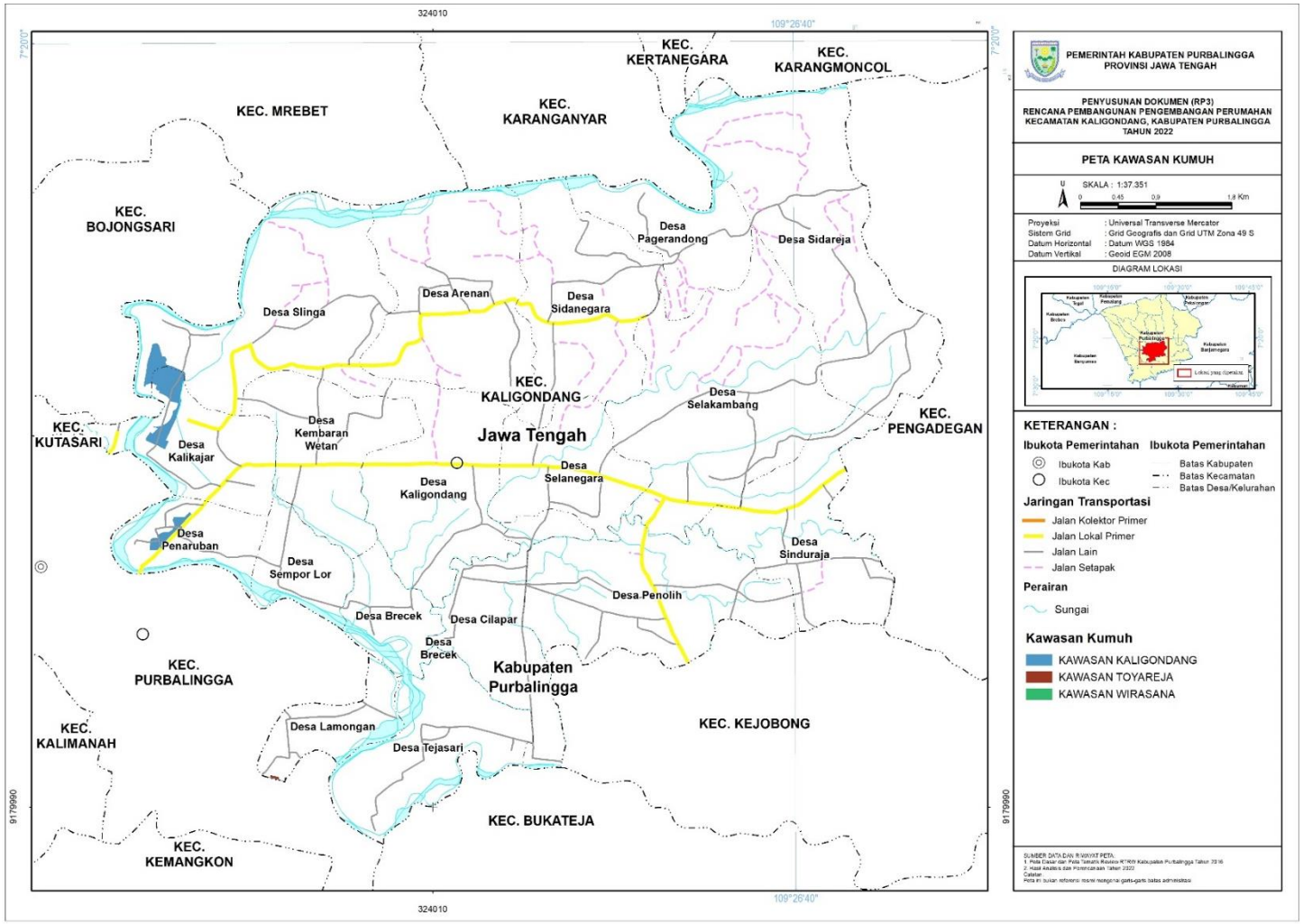
3.6.5.10. Sebaran Kawasan Kumuh

Karakteristik kawasan kumuh dibedakan menjadi 4 kategori kewenangan penangan, yaitu kawasan kumuh kewenangan pusat, kawasan kumuh kewenangan provinsi, dan kawasan kumuh kewenangan kabupaten. Kawasan kumuh di Kecamatan Kaligondang tahun 2021 berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga No 640/212 Tahun 2021 berada di 3 kawasan dengan total luasan permukiman yaitu seluas 32,75 Ha. Kawasan yang merupakan permukiman kumuh berada di Kaligondang, Toyareja, dan Wirasana.

Tabel III.162.
Sebaran Kawasan Kumuh di Kecamatan Kaligondang

No	Kawasan Kumuh	Luas (Ha)
1	Kawasan Kaligondang	32,26
2	Kawasan Toyareja	0,40
3	Kawasan Wirasana	0,09
Jumlah		32,75

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2021



Gambar 3.119.
Peta Sebaran Lokasi Kawasan Kumuh di Kecamatan Kaligondang

3.6.5. Kondisi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan

3.6.6.1. Kondisi Prasarana

Jaringan prasarana yang terdapat di Kecamatan Kaligondang meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan penyediaan air minum, jaringan pengelolaan persampahan, serta jaringan air limbah. Jaringan jalan yang terdapat di seluruh desa di Kecamatan Kaligondang telah menggunakan jenis permukaan jalan berupa aspal/ beton dan dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Akan tetapi terdapat beberapa jalan rusak pada ruas Jalan Wkaersari dan Jalan Wingin Selakambang. Selain itu, di Kecamatan Kaligondang terdapat sarana transportasi berupa terminal bus tipe C yang berada di Desa Kalikajar.

Jaringan drainase di Kecamatan Kaligondang terdiri dari jaringan drainase primer berupa sungai, drainase sekunder berupa drainase di jalan utama, dan jaringan drainase tersier di lingkungan permukiman. Jaringan drainase di Kecamatan Kaligondang berupa drainase terbuka dan drainase tertutup. Jaringan drainase di Kecamatan Kaligondang di beberapa wilayah belum berfungsi optimal, karena sebagian tersumbat oleh sampah. Hal ini dapat dilihat dari munculnya genangan di beberapa wilayah terutama saat hujan. Selain itu beberapa sungai yang ada di Kecamatan Kaligondang mengalami pendangkalan. Kecamatan Kaligondang juga terdapat jaringan irigasi karena untuk menunjang Kecamatan Kaligondang sebagai kawasan agropolitan.

Kebutuhan air minum di Kecamatan Kaligondang dilayani oleh ledeng dengan meteran, sumur, dan lainnya. Banyaknya wilayah yang menggunakan sumur di Kecamatan Kaligondang sebanyak 8 desa. Sedangkan, desa lainnya di Kecamatan Kaligondang menggunakan ledeng dengan meteran atau sumber lainnya.

Jaringan persampahan di Kecamatan Kaligondang sebagian sudah terlayani jaringan pengangkutan sampah dengan pembuangan akhir ke TPA Kalipancur di Kecamatan Pengadegan. Pengolahan sampah yang ada di Kecamatan Kaligondang berupa bank sampah sebanyak 3 unit, yaitu di SMK N 1 Kaligondang, SMP N 1 Kaligondang, dan Desa Sempor Lor. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase, tegalan, bahkan di sungai. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya serta perluasan jangkauan pelayanan pengangkutan sampah baik dari pemerintah maupun secara swadaya.

Sistem jaringan sanitasi di Kecamatan Kaligondang berupa air limbah domestik yang dibuang dari permukiman, pada umumnya tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu sehingga berdampak pada penurunan kualitas air pada perairan di wilayah Kecamatan Kaligondang. Penurunan kualitas air dapat berdampak pada penurunan kualitas air permukaan maupun air tanah. Oleh karena itu maka pengelolaan air limbah yang terpadu sangat perlu dilakukan untuk mencegah dan meminimalisir dampak yang dapat ditimbulkan. Seluruh keluarga di seluruh wilayah Kecamatan Kaligondang sudah menggunakan jamban sendiri untuk fasilitas tempat buang air besar.



(a)



(b)



(c)



(d)

(a) Jaringan jalan rusak
(b) Jaringan drainase yang menggenang
(c) Jaringan irigasi
(d) Bank sampah

Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.120.
Prasarana di Kecamatan Kaligondang

3.6.6.2. Kondisi Sarana

Sarana yang terdapat di Kecamatan Kaligondang meiputi sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana kesehatan, sarana kebudayaan, serta sarana ruang terbuka hijau.

Sarana pemerintahan yang terdapat di Kecamatan Kaligondang berupa balai desa dan kantor desa. Seluruh wilayah di Kecamatan Kaligondang merupakan desa sejumlah 18 desa.

Sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Kaligondang terdiri dari taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD) sederajat, sekolah menengah pertama (SMP) sederajat, dan sekolah menengah akhir (SMA) sederajat. Sarana pendidikan SD tersebar di seluruh desa di Kecamatan Kaligondang. Sarana pendidikan SMP/ Sederajat dan SMA/ Sederajat berturut-turut berjumlah 7 unit dan 1 unit. SMA/ Sederajat di Kecamatan Kaligondang hanya berada di Desa Selanegara. Secara rinci sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Kaligondang tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel III.163.
Sarana Pendidikan di Kecamatan Kaligondang Tahun 2020

No	Desa	TK	SD/ MI	SMP/ MTs	SMA/ SMK/ MA
1	Lamongan	2	2	-	-
2	Tejasari	1	2	-	-
3	Cilapar	-	1	-	-
4	Penolih	4	4	-	-
5	Sinduraja	2	3	-	-
6	Selakambang	4	5	1	-
7	Selanegara	2	2	1	1
8	Kaligondang	1	3	1	-
9	Brecek	1	1	-	-
10	Sempor Lor	1	1	-	-
11	Penaruban	3	3	1	-
12	Kalikajar	2	2	-	-
13	Kembaran Wetan	1	4	-	-
14	Slinga	4	5	1	-
15	Arenan	3	3	1	-
16	Sidanegara	1	3	1	-
17	Pagerandong	1	2	-	-
18	Sidareja	2	3	-	-
Jumlah		35	49	7	1

Sumber: Kecamatan Kaligondang Dalam Angka Tahun 2021

Sarana peribadatan yang terdapat di Kecamatan Kaligondang meliputi masjid, mushola, dan gereja. Sarana peribadatan masjid dan mushola tersebar di seluruh desa di Kecamatan Kaligondang dengan jumlah sebanyak 92 masjid dan 204 mushola. Sedangkan, sarana peribadatan gereja di Kecamatan Kaligondang sejumlah 1 unit yang berada di Desa Penaruban.

Tabel III.164.
Sarana Peribadatan di Kecamatan Kaligondang Tahun 2020

No	Desa	Masjid	Musholla	Gereja
1	Lamongan	4	3	-
2	Tejasari	4	9	-
3	Cilapar	5	10	-
4	Penolih	4	21	-
5	Sinduraja	7	4	-
6	Selakambang	10	14	-
7	Selanegara	5	13	-
8	Kaligondang	4	13	-
9	Brecek	3	6	-
10	Sempor Lor	1	5	-
11	Penaruban	3	13	1
12	Kalikajar	7	12	-
13	Kembaran Wetan	4	15	-
14	Slinga	12	10	-
15	Arenan	7	13	-
16	Sidanegara	3	11	-
17	Pagerandong	2	11	-
18	Sidareja	7	21	-

No	Desa	Masjid	Musholla	Gereja
Jumlah		92	204	1

Sumber: Kecamatan Kaligondang Dalam Angka Tahun 2021

Sarana kesehatan di Kecamatan Kaligondang cukup lengkap yang terdiri atas puskesmas, apotek, pustu, praktik dokter/ bidan, PKD, dan posyandu. Sarana kesehatan puskesmas di Kecamatan Kaligondang sebanyak 2 unit yang berada di Desa Kaligondang dan Desa Kalikajar. Sarana kesehatan posyandu di Kecamatan Kaligondang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Kaligondang. Sementara, sarana kesehatan pustu hanya sebanyak 3 unit. Berikut ini merupakan jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Kaligondang tahun 2020.

Tabel III.165.
Sarana Kesehatan di Kecamatan Kaligondang Tahun 2020

No	Desa	Poliklinik	Puskesmas	Apotek	Pustu	Praktik Dokter/ Bidan	PKD	Posyandu
1	Lamongan	-	-	-	-	1	1	4
2	Tejasari	-	-	-	-	1	1	4
3	Cilapar	-	-	-	-	1	1	4
4	Penolih	-	-	-	-	1	1	6
5	Sinduraja	-	-	2	-	2	1	6
6	Selakambang	-	-	-	1	1	1	10
7	Selanegara	-	-	-	-	1	1	4
8	Kaligondang	-	1	1	-	3	1	5
9	Brecek	-	-	-	-	1	1	2
10	Sempor Lor	-	-	-	-	-	1	2
11	Penaruban	-	-	1	-	3	1	5
12	Kalikajar	1	1	1	-	4	1	5
13	Kembaran Wetan	-	-	-	-	2	1	5
14	Slinga	-	-	-	-	1	1	7
15	Arenan	-	-	-	-	1	1	10
16	Sidanegara	-	-	-	1	1	-	4
17	Pagerandong	-	-	-	-	1	1	4
18	Sidareja	-	-	-	1	1	-	5
Jumlah		1	2	5	3	26	16	92

Sumber: Kecamatan Kaligondang Dalam Angka Tahun 2021

Kebudayaan di Kecamatan Kaligondang beraneka ragam, meliputi ujungan, suran, ebeg/ kuda lumping, lengger, dan lainnya. Kebudayaan tersebut di dukung oleh beberapa organisasi kesenian yang terdapat di Kecamatan Kaligondang. Selain itu, Kecamatan Kaligondang memiliki bangunan/ situs cagar budaya yaitu Fragmen Yoni Selakambang.

Sarana ruang terbuka hijau yang terdapat di Kecamatan Kaligondang meliputi ruang terbuka hijau perkotaan, ruang terbuka hijau jalur hijau jalan, dan ruang terbuka hijau fungsi tertentu. Ruang terbuka hijau perkotaan di Kecamatan Kaligondang berupa hutan kota dan taman lingkungan. Hutan kota berada di Desa Kalikajar yaitu Hutan Kota KPUD. Taman lingkungan berada di Desa Penaruban yaitu Taman RT 2 Penaruban. Ruang terbuka hijau fungsi tertentu di Kecamatan Kaligondang berupa fasilitas/ lapangan olahraga terdiri dari lapangan sepak bola, lapangan bola voli, lapangan bulu tangkis, fasilitas tenis meja,

lapangan futsal, fasilitas renang, fasilitas bela diri, dan pusat kebugaran. Berikut ini merupakan jumlah dan kondisi fasilitas/ lapangan olahraga di Kecamatan Kaligondang.

Tabel III.166.
Jumlah dan Kondisi Lapangan Olahraga di Kecamatan Kaligondang

Fasilitas/ Lapangan Olahraga	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Parah
Sepak bola	8	7	-
Bola voli	8	5	-
Bulu tangkis	12	4	-
Tenis meja	13	3	1
Pusat kebugaran	1	-	-

Sumber: Kecamatan Kaligondang Dalam Angka Tahun 2021



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)

(a) SMK Negeri 1 Kaligondang
(b) GKJ Penaruban
(c) Posyandu
(d) Pasar Rakyat Sinduraja
(e) Taman Gembrung

Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.121.
Sarana di Kecamatan Kaligondang

3.6.6.3. Kondisi Utilitas

Jaringan utlitas yang terdapat di Kecamatan Kaligondang meliputi jaringan energi dan kelistrikan, serta jaringan telekomunikasi.

Jaringan energi dan kelistrikan di Kecamatan Kaligondang mempunyai sumber energi listrik utama dari PLN. Jangkauan pelayanan listrik oleh PLN sudah menjangkau di

seluruh desa se-Kecamatan Kaligondang. Jumlah pelanggan listrik di Kecamatan Kaligondang sebanyak 22.895 pelanggan pada tahun 2020.

Tabel III.167.
Jumlah Pelanggan Listrik di Kecamatan Kaligondang Tahun 2020

No	Desa	Jumlah Pengguna PLN
1	Lamongan	928
2	Tejasari	938
3	Cilapar	728
4	Penolih	1.372
5	Sinduraja	1.748
6	Selakambang	2.766
7	Selanegara	1.189
8	Kaligondang	1.167
9	Brecek	509
10	Sempor Lor	478
11	Penaruban	1.816
12	Kalikajar	1.602
13	Kembaran Wetan	1.108
14	Slinga	1.849
15	Arenan	1.341
16	Sidanegara	1.075
17	Pagerandong	689
18	Sidareja	1.592
Jumlah		22.895

Sumber: Kecamatan Kaligondang Dalam Angka Tahun 2021

Jaringan telekomunikasi merupakan infrastruktur yang sangat penting bagi kelancaran informasi dan komunikasi. Oleh karena itu, keberadaan jaringan telepon di kawasan perencanaan sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas masyarakat. Kebutuhan telekomunikasi masyarakat saat ini dipenuhi dengan adanya jaringan non kabel hampir di seluruh wilayah Kecamatan Kaligondang. Namun, di Kecamatan Kaligondang masih terdapat wilayah dengan kondisi sinyal telepon seluler lemah, yaitu di Desa Kembaran Wetan dan Desa Slinga.

Tabel III.168.
Jumlah Menara Telekomunikasi dan Kondisi Sinyal Telepon Seluler di Kecamatan Kaligondang

No	Desa	Jumlah BTS	Kondisi Sinyal Telepon Seluler
1	Lamongan	2	Kuat
2	Tejasari	-	Kuat
3	Cilapar	-	Kuat
4	Penolih	-	Kuat
5	Sinduraja	2	Kuat
6	Selakambang	2	Kuat
7	Selanegara	-	Kuat
8	Kaligondang	1	Sangat Kuat
9	Brecek	-	Kuat
10	Sempor Lor	-	Sangat Kuat
11	Penaruban	1	Sangat Kuat
12	Kalikajar	1	Kuat

No	Desa	Jumlah BTS	Kondisi Sinyal Telepon Seluler
13	Kembaran Wetan	-	Lemah
14	Slinga	-	Lemah
15	Arenan	-	Kuat
16	Sidanegara	1	Kuat
17	Pagerandong	-	Kuat
18	Sidareja	1	Kuat

Sumber: Kecamatan Kaligondang Dalam Angka Tahun 2021



(a)



(b)

(a) Gardu listrik
(b) BTS

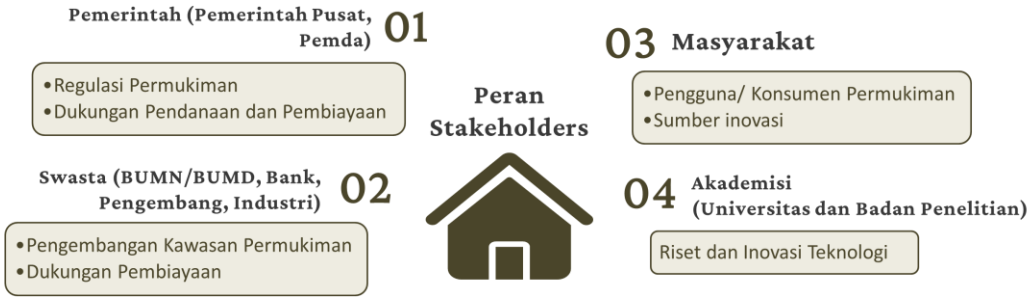
Sumber: Survey Primer, 2022

Gambar 3.122.
Utilitas di Kecamatan Kaligondang

3.7. Kondisi Kelembagaan dan Pembiayaan Pembangunan Perumahan

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan oleh aparat pemerintah yang berwenang sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing seperti tertuang dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Pelaksanaan pembangunan terutama pada pengembangan permukiman di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan oleh beberapa pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan yang terlibat dalam pengembangan permukiman, meliputi pemerintah, swasta, masyarakat dan akademisi. Berikut ini merupakan kontribusi pelaku pembangunan dalam pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Purbalingga.



Gambar 3.123.
Pelaku Pembangunan

Selain Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dinas yang berwenang menangani perumahan dan kawasan permukiman, di Kabupaten Purbalingga juga telah terbentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) kabupaten. Pokja PKP kabupaten ini dibentuk dalam rangka pelaksanaan penanganan perumahan dan kawasan permukiman yang perlu dilakukan antar lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan secara terpadu dan berkesinambungan.

Pembentukan Pokja PKP Kabupaten Purbalingga tercantum dalam Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 050/354 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purbalingga. Berikut ini merupakan susunan keanggotaan pelaksana Pokja PKP Kabupaten Purbalingga.



Sumber: Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 050/354 Tahun 2020

Gambar 3.124.
Susunan Keanggotaan Pelaksana Pokja PKP Kabupaten Purbalingga

Manfaat adanya Pokja PKP adalah:

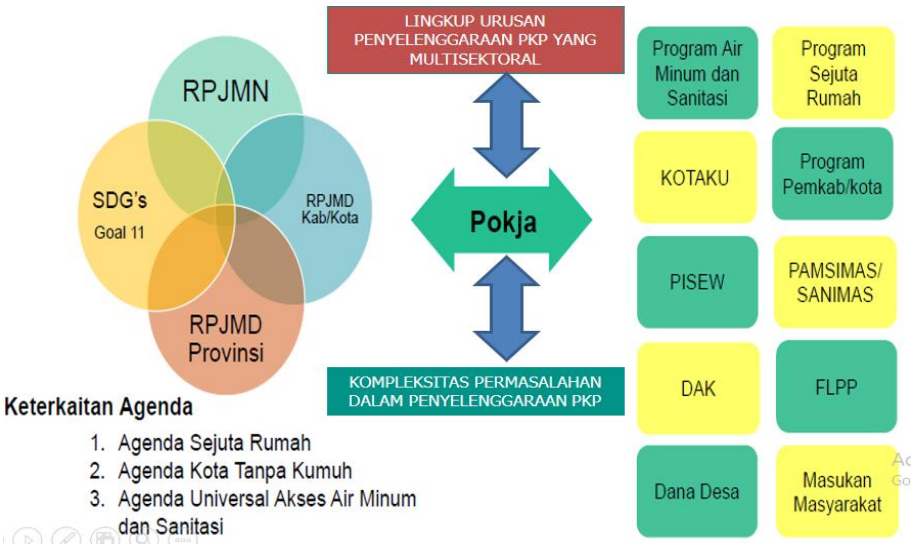
1. Manfaat langsung dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang lebih terkoordinasi, tersinergi dan terarah.
2. Manfaat praktis:
   a. Daerah memiliki rencana PKP yang disepakati bersama, dan masing-masing perangkat daerah memahami arah dan kebijakan pembangunan PKP.

b. Program dan kegiatan terkait dengan perumahan di masing-masing dinas akan selaras dengan rencana PKP yang disepakati.

c. Berkurangnya potensi tumpang tindihnya program perumahan dan kawasan permukiman diantara dinas terkait.

d. Terwujudnya keterpaduan, efisiensi dan efektivitas kegiatan pembangunan bidang PKP.

Peran Pokja PKP dalam lingkup urusan penyelenggaraan PKP yang multsektor dan bersifat kompleks, dengan keterkaitan agenda pencapaian berupa Agenda Sejuta Rumah, Agenda Kota Tanpa Kumuh, Agenda Universal Akses Air Minum dan Sanitasi.



Gambar 3.125.
Peran Pokja PKP

Berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 050/354 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Purbalingga, tugas Pokja PKP terdiri dari beberapa bidang yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan pelaku lainnya;
2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian pengembangan infrastruktur kawasan permukiman antara lain sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan sanitasi, penataan bangunan dan lingkungan, serta penanganan kawasan permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan pelaku lainnya;
3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional dan program provinsi di wilayah kabupaten;

4. Mendukung pengarusutamaan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dalam agenda pembangunan daerah; dan
5. Memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten.

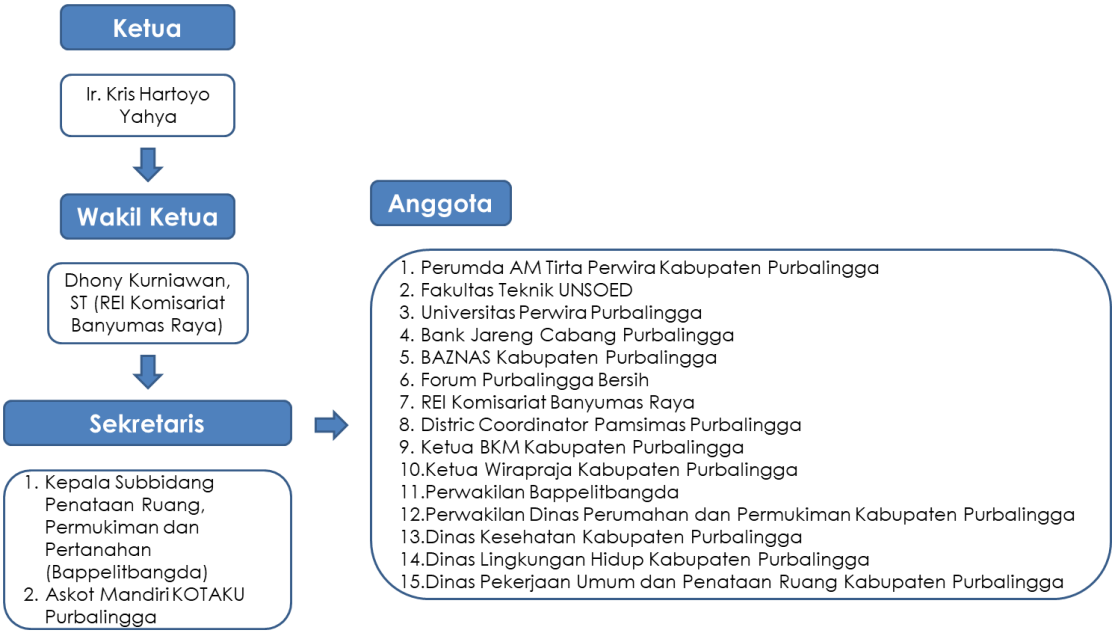
Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja PKP Kabupaten Purbalingga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sentor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
2. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang perumahan dan kawasan permukiman serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Purbalingga;
3. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Purbalingga;
4. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Purbalingga dengan kebutuhan dan perencanaan perumahan dan kawasan permukiman;
5. Koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
6. Koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
7. Koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan pemerintah Kabupaten Purbalingga;
8. Koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
9. Koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi dan program nasional di wilayah Kabupaten Purbalingga;
10. Koordinasi komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antar pemangku kepentingan dan meningkatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Purbalingga; dan
11. Mendukung kebijakan Kabupaten Purbalingga di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga.

Salah satu rencana kerja Pokja PKP adalah memfasilitasi pembentukan Forum PKP. Pembentukan Forum PKP kabupaten ditetapkan oleh Ketua Pokja PKP Kabupaten. Tugas Forum PKP adalah:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Membahas dan merumuskan arah pemikiran penyelenggara PKP.
3. Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat.
4. Memberikan masukan kepada pemerintah.
5. Melakukan peran arbitrase dan mediasi.

Pokja PKP merupakan bagian dari Forum PKP. Unsur keanggotaan Forum PKP Kabupaten Purbalingga tercantum dalam Keputusan Ketua Pelaksana Pokja PKP Kabupaten Purbalingga Nomor 001/POKJA.PKP/VIII/2021 tentang Pembentukan Forum Pengembangan PKP Kabupaten Purbalingga. Berikut ini merupakan susunan keanggotaan Forum PKP Kabupaten Purbalingga.



Sumber: Keputusan Ketua Pelaksana Pokja PKP Kabupaten Purbalingga Nomor 001/POKJA.PKP/VIII/2021

Gambar 3.126.
Susunan Keanggotaan Forum PKP Kabupaten Purbalingga

Forum pengembangan PKP Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Menampung dan menyalurkan dan aspirasi masyarakat.
2. Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan PKP.
3. Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat.
4. Memberikan masukan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
5. Melakukan peran arbitrase dan mediasi bidang penyelenggaraan PKP.

Sedangkan, pembiayaan pembangunan perumahan berperan penting dan saling mempengaruhi dalam perencanaan daerah, sehingga dapat terlaksana dengan adanya ketersediaan dana.

Sumber penerimaan Kabupaten Purbalingga yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan perumahan berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional), APBD Provinsi (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dan APBD Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan data dari Pembangunan Basis Data Perumahan Kabupaten Purbalingga, anggaran kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp 6.469.248.000,00 masing-masing untuk anggaran bidang perumahan dan untuk anggaran urusan perumahan

Alokasi dana pembiayaan pembangunan perumahan digunakan untuk kegiatan/ pekerjaan berupa rehabilitasi RTLH, pembangunan/ rehabilitasi PSU, jalan lingkungan, drainase lingkungan, air minum, air limbah, persampahan, dan proteksi kebakaran. Berikut ini merupakan volume pekerjaan dan alokasi dana pembiayaan pembangunan perumahan Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2021.

Tabel III.169.
Volume Pekerjaan dan Alokasi Dana Pembiayaan Pembangunan Perumahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021

No	Uraian Kegiatan/ Pekerjaan	Volume Pekj (Jumlah/Panjang)						Alokasi Dana (Rupiah)					
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
SUMBER DANA: APBN													
1	Rehab RTLH	-	-	-	138	126	-	-	-	-	2.415.000.000	2.205.000.000	-
2	Pembangunan/ Rehab PSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jalan Lingkungan	1.509	24.476	73	174	-	14.700	245.220.000	1.160.342.600	276.500.000	135.100.000	-	812.605.000
4	Drainase Lingkungan	1.886	2.410	168	1.038	-	4.872	848.892.000	503.572.000	118.500.000	749.064.000	-	277.100.000
5	Air Minum	17	494	501	23	35	-	29.750.000	993.572.000	363.500.000	1.199.064.000	5.410.000.000	-
6	Air Limbah	128	-	-	-	20	53	303.300.000	-	-	-	100.000.000	520.295.000
7	Persampahan	7	4	-	6	-	-	21.000.000	21.000.000	-	110.836.000	-	-
8	Proteksi Kebakaran	10	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-
JUMLAH		**3.557**	**27.385**	**742**	**1.378**	**181**	**19.625**	**1.458.162.000**	**2.678.486.600**	**758.500.000**	**4.609.064.000**	**7.715.000.000**	**1.610.000.000**
SUMBER DANA: APBD PROVINSI													
1	Rehab RTLH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembangunan/ Rehab PSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jalan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Drainase Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Air Minum	-	1	1		1	-	-	2.761.398.000	2.244.000.000	3.000.000.000	-	-
6	Air Limbah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Persampahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Proteksi Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		**3.557**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**2.761.398.000**	**2.244.000.000**	**3.000.000.000**	**0**

No	Uraian Kegiatan/ Pekerjaan	Volume Pekj (Jumlah/Panjang)						Alokasi Dana (Rupiah)					
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
SUMBER DANA: APBD KABUPATEN													
1	Rehab RTLH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembangunan/ Rehab PSU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jalan Lingkungan	-	-	1.258	2.024,6	563,5	-	-	47.500.000	426.557.000	761026000	287.084.000	-
4	Drainase Lingkungan	-	71,6	-	-	-	-	-	-	104.232.000	-	-	-
5	Air Minum	-	5	4	18	11	-	-	1.128.323.000	980.000.000	3.620.000.000	1.597.000.000	-
6	Air Limbah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Persampahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Proteksi Kebakaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		3.557	0	76,6	1.262	2.042,6	574,5	0	0	1.175.823.000	1.510.789.000	4.381.026.000	1.884.084.000

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga

BAB IV
ANALISIS PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN

4.1. Analisis Implikasi Kebijakan Pembangunan Daerah

4.1.1. Implikasi Kebijakan Perumahan dan Kawasan Permukiman Nasional dan Provinsi

Implikasi Kebijakan Pembangunan Nasional

Agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan yang perlu didukung dengan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman; memperkuat infrastruktur untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pelayanan dasar yang diwujudkan dengan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pendukung permukiman yang merata dan berkualitas; serta membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim yang diwujudkan dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tabel IV.1.
Implikasi Kebijakan Pembangunan Nasional terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Agenda Pembangunan	Program Pembangunan RPJM Nasional Tahun 2020-2024	Implikasi Kebijakan
Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ke wilayah yang belum berkembang	Pengembangan kawasan permukiman yang merata ke seluruh wilayah, terutama untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah
	Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pendukung permukiman secara merata
	Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Pembangunan infrastruktur layanan dasar	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pendukung permukiman
	Pembangunan infrastruktur perkotaan	
	Pembangunan energi dan kelistrikan	
	Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Pengembangan jaringan transportasi untuk memudahkan aksesibilitas
	Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital	Pengembangan sistem informasi untuk mendukung program perumahan dan kawasan permukiman
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
	Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim	
	Pembangunan rendah karbon	

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, analisis 2022

Proyek prioritas strategis RPJMN 2020-2024 terkait perumahan dan kawasan permukiman:

1. Akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (90% rumah tangga).
2. Akses air minum perpipaan (10 juta sambungan rumah).
3. Rumah susun perkotaan (1 juta).
4. Infrastruktur jaringan gas kota untuk 4 juta sambungan rumah.
5. Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3.

Implikasi Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah

Misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman adalah pengurangan kemiskinan melalui perbaikan rumah sederhana layak huni, dan mencintai lingkungan.

Tabel IV.2.
Implikasi Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Implikasi Kebijakan
Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran		
Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah	meningkatkan kualitas hidup salah satunya dengan pembangunan rumah sederhana layak huni, peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan		
Sumberdaya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Meningkatkan akses dan kualitas hidup salah satunya dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa papan yang layak huni, didukung dengan PSU
Sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan	Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, seperti kerawanan bencana, ketersediaan jaringan PSU yang ramah lingkungan
	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	

Sumber: RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, analisis 2022

Strategi yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman adalah dalam rangka memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, salah satu strateginya adalah bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni (RSLH) dan perbaikan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh termasuk diantaranya air bersih, sanitasi dan listrik. Bantuan stimulan RSLH untuk menumbuhkan kembali gotong royong masyarakat, memperluas akses

pembiayaan, serta sinergi penanganan dengan pusat, provinsi, kabupaten/ kota, CSR, Baznas dan sebagainya.

Implikasi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Purbalingga

Misi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2026, yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yaitu:

1. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah/ Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Tabel IV.3.
Implikasi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Purbalingga terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tujuan	Sasaran	Implikasi Kebijakan
Misi 3: Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok masyarakat utamanya pangan dan papan secara layak		
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya ketercukupan kebutuhan pokok masyarakat	Pemenuhan kebutuhan papan sebagai kebutuhan pokok masyarakat
Misi 7: Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan		
Meningkatnya infrastruktur wilayah yang berkualitas dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas secara terpadu
	Optimalnya Pemanfaatan Ruang	Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang dan daya dukung lingkungan hidup
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	

Sumber: RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, analisis 2022

Program yang terkait dengan perumahan dan kawasan permukiman adalah dalam bidang peningkatan infrastruktur, seperti pengembangan ruang terbuka hijau di kecamatan, optimalisasi manajemen persampahan, dan peningkatan akses air bersih.

4.1.2. Review Implikasi Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, Kabupaten, dan Kawasan Perkotaan Purbalingga

Implikasi Kebijakan Penataan Ruang Nasional

Kebijakan penataan ruang nasional yang terkait dengan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah Kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional, Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya, dan Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Tabel IV.4.
Implikasi Kebijakan Penataan Ruang Nasional terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kebijakan	Strategi	Implikasi Kebijakan
Kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional	1. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara, 2. Mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi, 3. Meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik, 4. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.	1. penyediaan jaringan transportasi secara terpadu, 2. penyediaan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah, 3. jaringan energi terbarukan, 4. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.
Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya	1. Menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah. 2. Mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya. 3. Mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Menetapkan, memanfaatkan, mengembangkan dan mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. 5. Mengembangkan pemanfaatan ruang udara nasional sebagai aset pembangunan dengan tetap menjaga fungsi pertahanan dan keamanan serta keselamatan penerbangan.	1. mengembangkan kawasan permukiman di sekitar kawasan strategis, kawasan ekonomi unggulan, beserta prasarananya. 2. tidak mengalih fungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 3. menetapkan kawasan KKOP bandara.
Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. Membatasi dan mengendalikan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana serta dampak perubahan iklim untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi	1. Membatasi dan mengendalikan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana

Kebijakan	Strategi	Implikasi Kebijakan
	kerugian akibat bencana dan perubahan iklim, 2. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan. 3. Membatasi dan mengendalikan kegiatan budi daya pada lokasi yang memiliki nilai konservasi tinggi. 4. Menetapkan lokasi rusak dan tercemar untuk dipulihkan. 5. Mengendalikan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kota sedang sebagai kawasan perkotaan penyangga arus urbanisasi desa ke kota. 6. Mengendalikan perubahan peruntukan kawasan hutan untuk alokasi lahan pembangunan bagi sektor non kehutanan dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan, karakater sumber daya alam, fungsi ekolosi, dan kebutuhan lahan untuk pembangunan secara berkelanjutan. 7. Mengembangkan kegiatan budi daya dengan memperhatikan bioekoregion yang merupakan bentang alam yang berada di dalam satu atau lebih daerah aliran sungai.	dan risiko tinggi bencana. 2. Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan. 3. mengembangkan kawasan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Sumber: RTRWN Tahun 2008, analisis 2022

Implikasi Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

Kebijakan penataan ruang Provinsi Jawa Tengah yang terkait dengan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, dan Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup.

Tabel IV.5.
Implikasi Kebijakan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah terhadap Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kebijakan	Strategi	Implikasi Kebijakan
Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya,	1. Menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis Provinsi untuk pemanfaatan sumber daya alam secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah. 2. Mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya.	1. Pengembangan permukiman untuk mendukung kegiatan budidaya unggulan disertai infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan. 2. Mengembangkan kawasan permukiman yang berkualitas dengan mempertimbangkan sumber daya lahan.

Kebijakan	Strategi	Implikasi Kebijakan
	3. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah dan/atau nasional. 4. Mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan untuk meningkatkan kualitas permukiman.	3. Tidak mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup	1. Mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budi daya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup; 2. Mengembangkan secara selektif bangunan fisik di kawasan budi daya yang terdapat potensi bencana berdasarkan kajian teknis untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana. 3. Mengembangkan kawasan tanah nonproduktif untuk kegiatan pembangunan non pertanian guna mempertahankan lahan pangan berkelanjutan. 4. Membatasi alih fungsi lahan sawah melalui penataan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak sporadis untuk mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya. 5. Mengendalikan kegiatan permukiman yang berada di kawasan budi daya yang memiliki potensi bencana alam. 6. Mendorong pengembangan sistem permukiman perkotaan yang kompak untuk menghindari perkembangan secara horizontal (*citywide*).	1. Pengembangan kawasan permukiman sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 2. Mengendalikan kegiatan permukiman pada kawasan rawan bencana, terutama pada kawasan rawan bencana tinggi. 3. Mengalihfungsikan lahan non produktif. 4. Penataaan kawasan terbangun di kawasan perkotaan dan perdesaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak sporadis untuk mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya. 5. Mendorong pengembangan sistem permukiman perkotaan yang kompak untuk menghindari perkembangan secara horizontal (*citywide*).

Sumber: RTRW Prov Jateng Tahun 2009-2029, analisis 2022

Dalam sistem perkotaan Jawa Tengah, Purbalingga berfungsi sebagai **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)** yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Jika dilihat dari sistem perwilayah di Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga masuk dalam sistem perwilayahan **Barlingmascakeb**, meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen dengan **fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi dan Nasional (khusus Cilacap)**. Wilayah pengembangan Barlingmascakeb berpusat di kawasan perkotaan Purwokerto dengan arahan pengembangan meliputi:

a. Memadukan pengembangan kawasan perkotaan Cilacap-Purwokerto-Sokaraja-Purbalingga-Klampok,

b. Pengembangan wilayah yang didasarkan pada sektor unggulan meliputi pertanian, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, perikanan, pertambangan dan panas bumi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Purbalingga dalam skala provinsi hanya berfungsi sebagai pusat pelayanan kegiatan skala kabupaten, dengan potensi unggulan berupa pertanian, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa. Pengembangan pusat pelayanan kegiatan skala kabupaten didukung dengan pembangunan sistem jaringan prasarana wilayah meliputi Rencana sistem jaringan prasarana transportasi; Rencana sistem jaringan prasarana telekomunikasi; Rencana sistem jaringan prasarana sumberdaya air; Rencana sistem jaringan prasarana energi; Rencana sistem jaringan prasarana lingkungan (sistem jaringan persampahan, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, dan jalur evakuasi bencana).

Kawasan peruntukan permukiman di Provinsi Jawa Tengah seluas kurang lebih 776.524 Ha meliputi permukiman perdesaan dan permukiman perkotaan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Purbalingga.

4.1.3. Review Implikasi Kebijakan Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten

Implikasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Visi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Jawa Tengah yaitu:

"Terwujudnya perumahan dan Kawasan permukiman yang layak, berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat Jawa Tengah"

Makna dari "Terwujudnya perumahan dan Kawasan permukiman yang layak, berkeadilan dan berkelanjutan bagi masyarakat Jawa Tengah" yaitu:

1. Perumahan dan kawasan permukiman yang layak, yaitu terciptanya lingkungan perumahan dan kawasan permukiman yang memenuhi persyaratan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara merata di seluruh wilayah di Provinsi Jawa Tengah, serta meningkatkan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang layak.
2. Perumahan dan kawasan yang berkeadilan, yaitu terwujudnya hasil pembangunan dibidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dinikmati secara proporsional bagi seluruh warga negara Indonesia di Provinsi Jawa Tengah.
3. Perumahan dan kawasan yang berkelanjutan, yaitu kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung permukiman Provinsi Jawa Tengah guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Misi yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi penyelenggaraan perumahan dan permukiman di Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan perumahan dan Kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman dengan prinsip keseimbangan yang dapat diakses oleh semua pihak;

3. Menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan, mendukung kegiatan perekonomian dan sosial budaya masyarakat;
4. Menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman pada lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Tujuan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Jawa Tengah merupakan penjabaran dari misi pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman Jawa Tengah yakni meliputi sebagai berikut:

1. Pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan membentuk sistem yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang.
2. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam satu kesatuan sistem yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan sebagaimana yang dituangkan di dalam rencana tata ruang yang mengutamakan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kawasan sebagai pengendalian dan pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Mencegah permukiman baru dan meningkatkan kualitas lingkungan hunian agar layak huni.
4. PKP di KSP Pertumbuhan Ekonomi untuk mendorong pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dikawasan industri, kawasan agropolitan dan kawasan perkotaan.
5. PKP di KSP Sosial Budaya untuk mendukung pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya.
6. PKP di KSP Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan dengan menyesuaikan aspek pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
7. Penyelenggaraan PKP pada lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan yang saling terpadu.

Dalam upaya pelaksanaan misi pembangunan dan pengembangan PKP Jawa Tengah, seluruh program dan kegiatan penyelenggaraan perumahan dan permukiman dititikberatkan untuk dapat mencapai tujuan di atas dengan serta sasaran-sasaran di bawah ini:

1. Pembangunan dan Pengembangan PKP yang berada pada kawasan lintas batas kabupaten/kota yang memiliki potensi tumpang tindih atau inabsensia perencanaan.
2. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tertib.
3. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh baru.
4. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
5. Peningkatan kerja sama, peran masyarakat, dan Kearifan Lokal dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh.

6. Perencanaan, pembangunan dan rehabilitasi perumahan dan kawasan permukiman dengan mempertimbangkan mitigasi bencana dengan mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan masyarakat menghadapi ancaman bencana.
7. Mewujudkan PKP di KSP Pertumbuhan Ekonomi untuk mendorong pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing di kawasan industri.
8. PKP di KSP Sosial Budaya untuk mendukung pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya di kawasan masjid Demak, Kawasan Candi Dieng, Kawasan Gedongsongo, Kawasan candi Cetho – Sukuh dan kawasan Keraton Solo.
9. PKP di KSP Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan dengan menyesuaikan aspek pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup di Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu, Kawasan Dataran Tinggi Dieng, Kawasan Rawa Pening, Kawasan Gunung Sindoro – Sumbing, Kawasan Gunung Lawu Dan Kawasan Gunung Slamet.
10. Keterpaduan penyelenggaraan PKP oleh pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha dengan prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan baik langsung maupun tidak langsung.

Kebijakan pembangunan dan pengembangan PKP Jawa Tengah merupakan turunan dari misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dan pengembangan PKP Jawa Tengah. Kebijakan di bawah ini dapat dikelompokkan dari tiap sasaran.

1. PKP yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
2. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan;
3. Mendorong perwujudan pembangunan dan pengembangan PKP oleh kabupaten/kota dengan karakteristik Pegunungan, Dataran, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Pencegahan melalui pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis; dan kelaikan fungsi;
5. Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
6. Peningkatan kerja sama, peran masyarakat, dan kearifan lokal dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh;
7. Perencanaan perumahan dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana;
8. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana;
9. Pengelolaan permukiman yang sudah terbangun berbasis mitigasi bencana;
10. Penyelenggaraan PKP di KSP Pertumbuhan Ekonomi untuk mendorong pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dikawasan industri, kawasan agropolitan, dan kawasan perkotaan;
11. Penyelenggaran PKP di KSP Sosial Budaya untuk mendukung pelestarian dan peningkatan sosial dan budaya;

12. Penyelenggaraan PKP di KSP Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan dengan menyesuaikan aspek pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam dan melestarikan warisan budaya;
13. Penyelenggaraan PKP yang melibatkan pemerintah, peran masyarakat, dan swasta dalam penyediaan tanah dan pembiayaan PKP.

Strategi Pembangunan dan Pengembangan PKP Provinsi Jawa Tengah adalah:

1. Penyediaan kebutuhan pemenuhan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui perencanaan dan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
2. Keterjangkauan pembiayaan dan pendayagunaan teknologi;
3. Penyelenggaraan PSU skala regional;
4. Pelaksanaan keterpaduan kebijakan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman antar pemangku lintas sektor, lintas batas, dan masyarakat;
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman lintas batas;
6. Peningkatan efisiensi potensi PKP perkotaan dan perdesaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan atau perdesaan;
7. Peningkatan pelayanan PKP perkotaan atau perdesaan;
8. Peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PKP atau perdesaan;
9. Pencegahan terhadap tumbuhnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
10. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya atau perdesaan yang tidak terencana dan tidak teratur;
11. Perencanaan pembangunan PKP baru;
12. Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis dan kelayakan fungsi dilakukan pada tahap perencanaan dan tahap pembangunan Perumahan dan Permukiman.
13. Kesesuaian terhadap kelaikan fungsi dilakukan pada tahap pemanfaatan Perumahan dan Permukiman berdasarkan perizinan;
14. Pencegahan melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pendampingan dan pelayanan informasi;
15. Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
16. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan penyebab kekumuhan kawasan yang meliputi : bangunan gedung; jalan lingkungan; penyediaanair minum; drainase lingkungan; pengelolaan air limbah; pengelolaan persampahan; dan proteksi kebakaran;

17. Kerja sama Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, lembaga nonpemerintah lainnya dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
18. Perencanaan perumahan dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana dengan memperhatikan:
    a. jenis bahaya alam yang berada pada lokasi atau di sekitar perumahan dan kawasan permukiman;
    b. lokasi perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
    c. sesuai standar kualitas lingkungan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
    d. rencana dan rancangan perumahan dan kawasan permukiman tanggap terhada bencana alam terutama yang berlokasi yang rawan bencana; dan peta mikrozonasi bencana alam pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman;
    e. melibatkan peran serta masyarakat dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kemandirian masyarakat dalam mengelola risiko bencana alam.
19. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana harus memperhatikan:
    a. pemilihan lokasi, dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan/atau rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman;
    b. pembatasan intensitas penggunaan lahan melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB) Koefisien Daerah Hijau (KDH), ketinggian bangunan, dan kepadatan bangunan;
    c. struktur konstruksi bangunan, bahan bangunan sesuai dengankearifan lokal dan standar konstruksi;
    d. penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai cakupan layanan yang mendukung tindakan mitigasi dan tanggap darurat terhadap bencana alam; dan
    e. pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai perizinan.
20. Peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai kebutuhan mitigasi bencana alam;
21. Pengaturan dan zonasi kawasan rawan bencana;
22. Pelibatan peran serta masyarakat dalam penentuan risiko bencana alam, mitigasi bencana; dan penyusunan rencana kontijensi berbasis masyarakat;
23. Penataan daerah aliran sungai, pantai, serta wilayah rawan bencana alam;
24. Pelibatan peran serta masyarakat dalam penentuan risiko bencana alam, mitigasi bencana; dan penyusunan rencana kontijensi berbasis masyarakat;

25. Penataan daerah aliran sungai, pantai, serta wilayah rawan bencana alam;
26. Pelibatan peran masyarakat ditiap penyelenggaraan PKP;
27. Konsolidasi tanah dalam penyelenggaraan PKP;
28. Koordinasi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan PKP;
29. Pembangunan PKP di kawasan agropolitan untuk mendukung peningkatan nilai aktivitas pertanian;
30. Pembangunan PKP di kawasan industri yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi;
31. Pembangunan PKP yang mampu menciptakan iklim investasi;
32. Pengembangan PKP di kawasan sosial budaya dalam rangka meningkatkan kelestarian kawasan cagar budaya yang menjadi warisan budaya dunia;
33. Pengembangan PKP di kawasan sosial budaya untuk mendukung kecintaan masyarakat anak nilai budaya;
34. Pengembangan PKP di kawasan sosial budaya untuk mengembangkan penerapan nilai budaya bangsa dalam kehidupan bermasyarakat;
35. Pembangunan dan pengembangan PKP yang mendukung pencegahan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
36. Pembangunan dan pengembangan PKP yang mendorong pembatasan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
37. Pembangunan dan pengembangan PKP yang membatasi pengembangan prasarana dan sarana yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
38. Pembangunan dan pengembangan PKP yang mendukung rehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatam ruang yang berkembang;
39. Pelibatan peran masyarakat ditiap penyelenggaraan PKP;
40. Konsolidasi tanah dalam penyelenggaraan PKP;
41. Koordinasi pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan PKP.

Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Jawa Tengah dibagi dalam kewenangan provinsi dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

RP3KP pada KSP Provinsi

1. Pengendalian dan Pengembangan PKP Perkotaan dan Perdesaan.
   a. Evaluasi dan Monitoring perumahan dan permukiman kumuh.
   b. Penataan bangunan dan lingkungan.
   c. Relokasi permukiman di kawasan rawan bencana.
2. Pengembangan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan.
   a. Peremajaan permukiman kumuh.

b. Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni.

c. Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman di kawasan perdesaan.

d. Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana permukiman di kawasan perkotaan.

e. Pengembangan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan dan kawasan industri.

3. Pengendalian dan pengembangan PKP di kawasan sosial budaya.

4. Pengembangan PSU di kawasan sosial budaya.

5. Pembangunan dan pengembangan PKP yang mendukung pencegahan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan.

6. Pembangunan dan pengembangan PKP yang mendorong pembatasan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan.

7. Pembangunan dan pengembangan PKP yang mendukung rehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang.

RP3KP pada PKP di lintas batas

1. Koordinasi dan kerjasama pembangunan dan pengembangan PKP, terkait dengan penyediaan lahan, penyediaan hunian, penyediaan PSU regional.

2. Penyediaan rumah layak huni di lintas daerah kabupaten/kota.

RP3KP pada PKP Kabupaten/Kota

1. Penyusunan rencana peningkatan efisiensi potensi PKP perkotaan atau perdesaan dengan memperhatikan fungsi dan peranan perkotaan melalui:

   a. kajian fungsi dan peranan PKP sesuai arahan rencana tata ruang;

   b. identifikasi potensi PKP perkotaan atau perdesaan yang meliputi potensi potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, potensi ekonomi, potensi sosial dan potensi budaya;

   c. kajian kebijakan peningkatan efisiensi potensi PKP perkotaan atau perdesaan dalam mendukung fungsi dan peranan perdesasan dan perkotaan, yang memanfaatkan sumber daya dan kegiatan sosial ekonomi setempat.

2. Rencana peningkatan pelayanan PKP perkotaan atau perdesaan berisi:

   a. identifikasi pelayanan PKP perkotaan atau perdesaan yang ada;

   b. identifikasi kebutuhan pelayanan PKP perkotaan atau perdesaan sesuai alokasi rencana tata ruang Kawasan dan standar teknis;

   c. peningkatan pelayanan PKP perkotaan atau perdesaan yang ada;

   d. arahan penyediaan pelayanan PKP perkotaan atau perdesaan yang belum ada;

3. Rencana peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PKP perkotaan atau perdesaan berisi:

a. identifikasi kinerja kapasitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PKP perkotaan atau perdesaan yang ada;

b. kajian keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Lingkungan Hunian PKP perkotaan atau perdesaan rencana tata ruang Kawasan Perkotaan dan standar teknis;

c. arahan peningkatan keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PKP perkotaan atau perdesaan yang ada; dan

4. Rencana pencegahan terhadap tumbuhnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh berisi:

a. arahan pencegahan tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh pada lokasi tidak kumuh;

b. pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan, standar teknis, dan kelayakan fungsi; dan

c. pendampingan dan pelayanan informasi.

5. Rencana pencegahan tumbuh dan berkembangnya PKP perkotaan atau perdesaan yang tidak terencana dan tidak teratur dilakukan melalui pemberian arahan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

6. Perencanaan pembangunan PKP baru dengan

a. rencana penyediaan lokasi Permukiman;

b. rencana penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman; dan

c. rencana lokasi pelayanan jasa Pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

d. Rencana pengembangan PKP dengan pola hunian berimbang

7. Penetapan wilayah yang dilarang untuk PKP sesuai dengan rencana pola ruang kabupaten/ kota

8. Pelaksanaannya sesuai dengan kewenangan dan SPM

9. Penyusunannya berpedoman pada Pedoman Penyusunan RP3KP daerah kabupaten/ kota serta memperhatikan dokumen RP3KP provinsi.

RP3KP pada PKP Kumuh

1. Pendampingan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui fasilitasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas Kelompok Swadaya Masyarakat dengan:

a. Penyuluhan

b. Pembimbingan

c. Bantuan teknis meliputi fasilitasi:

1) penyusunan perencanaan;

2) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

3) penguatan kapasitas kelembagaan;

4) pengembangan alternatif pembiayaan; dan/atau

5) persiapan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan swasta.

2. Membuka akses informasi bagi masyarakat dalam bentuk pemberitaan dan pemberian informasi hal-hal terkait upaya Pencegahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
3. Pemantauan ulang lokasi perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk menilai pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan, serta pengurangan tingkat kekumuhan
4. Peninjauan, pemantauan dan penegasan izin pemanfaatan ruang permukiman pada kawasan peruntukan permukiman dan mengacu pada peraturan zonasi yang berlaku
5. Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
6. Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
7. Pengendalian perumahan kumuh dan permukiman kumuh
8. Penetapan rencana peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dalam bentuk peraturan bupati/walikota
9. Pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas Perumahan dan Permukiman secara berkelanjutan pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh
10. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengelola Perumahan dan Permukiman layak huni dan berkelanjutan serta untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
11. Pemeliharaan dan Perbaikan untuk menjaga kondisi Perumahan dan Permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Rencana PKP Kawasan Rawan Bencana

1. Identifikasi mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman, mencakup jenis bahaya alam; jenis kerentanan; dan jenis ketahanan.
2. Penyusunan roadmap penanganan, pengelolaan serta rencana pengembangan atau relokasi PKP pada kawasan rawan bencana.
3. Penyusunan juklak dan juknis perencanaan pembangunan kembali (rehabilitasi, rekonstruksi, peremajaan).
4. Pelibatan masyarakat sesuai dengan budaya dan pelatihan.
5. Pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana gempa bumi:
    a. perencanaan penempatan perumahan dan kawasan permukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana;

b. pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dengan perkuatan struktur dan konstruksi bangunan tahan getaran/gempa;

c. pemanfaatan penerapan zonasi daerah rawan bencana dan pengaturan penggunaan lahan; dan

d. pemeliharaan perumahan dan kawasan permukiman dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam pelatihan program penyelamatan dan kewaspadaan terhadap gempa bumi.

6. Pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana tsunami bidang perumahan dan kawasan permukiman dilakukan terhadap rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum, melalui pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses, serta aman di sekitar daerah permukiman.

7. Pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana gunung meletus terhadap perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan sekurang-kurangnya:

   a. Perencanaan perumahan dan kawasan permukiman menghindari kawasan rawan bencana gunung meletus terutama yang masih aktif serta lokasi yang cenderung dialiri lava;

   b. Menyediakan lokasi evakuasi dan pengungsian prasarana jalan yang memadai menuju lokasi pengungsian, serta alat transportasi.

8. Pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana tanah longsor bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui :

   a. Identifikasi dan pemanfaatan peta mikrozonasi kerawanan bencana tanah longsor;

   b. Mengembangkan lokasi penyangga antara lokasi rawan longsor dengan lokasi yang akan dikembangkan sebagai perumahan dan kawasan permukiman;

   c. Rekonstruksi terhadap bangunan dan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai;

   d. Relokasi perumahan dan kawasan permukiman yang sudah tidak layak huni ke lokasi yang lebih aman.

9. Pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana banjir bidang perumahan dan kawasan permukiman, meliputi:

   a. Sesuai tata ruang wilayah serta tata bangunan dan lingkungan;

   b. Pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman secara swadaya melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala;

   c. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum berbasis mitigasi bencana banjir.

10. Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan Rawan Bencana

   a. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penyusunan Rencana Penanganan dan Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Kota/Kabupaten.

b. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penyusunan Model Penataan Ruang Berbasis Mitigasi.

c. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Penyusunan DED Kawasan dan Shelter sebagai Tempat Evakuasi Mitigasi Bencana.

d. Pemantapan Fungsi Kawasan melalui Rehabilitasi/Penataan Kawasan Lindung yang Rusak.

e. Rehabiltasi Kawasan Rawan Longosr dan Patahan melalui Penetapan Kawasan Sempadan Bencana sebagai Jalur Hijau.

11. Pengendalian dan pengelolaan kawasan.

a. Penataan dan relokasi kawasan permukiman yang berada dalam kawasan zona bahaya.

b. Pengendalian Kawasan rawan bencana melalui Penguatan Sistem Informasi dan Kelembagaan.

c. Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana melalui Penguatan dan penataan Kelembagaan.

d. Pengelolaan Kawasan melalui Penataan Jalur Evakuasi, Area Penyelamatan dan Jalur Bantuan.

12. Peningkatan kualitas prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai kebutuhan mitigasi bencana;

13. Pembatasan intensitas penggunaan lahan melalui pengaturan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB) Koefisien Daerah Hijau (KDH), ketinggian bangunan, dan kepadatan bangunan terutama wilayah rentan bencana;

14. Sosialisasi mengenai lokasi rawan gempa bumi, cara penyelamatan; dan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi gempa bumi;

15. Memberikan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan;

16. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat untuk mengetahui tanda-tanda bencana.

17. Penataan dan relokasi kawasan permukiman yang berada dalam kawasan zona bencana.

18. Rencana PKP yang berada di kawasan yang dilarang

19. Kawasan kepentingan strategis

Rencana Kemitraan Pembangunan dan Pengembangan PKP Jawa Tengah meliputi:

1. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian.
2. Pembangunan permukiman perkotaan dan perdesaan yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
3. Pemberdayaan masyarakat untuk mencegah tumbuh kumuh baru dan menjaga kualitas PKP.

4. Konsolidasi tanah melalui peningkatan efisiensi dan produktifitas tanah.
5. Pembentukan forum/ lembaga/ badan yang mengkoordinasikan pemerintah, masyarakat, dan swasta dalam penyelenggaraan PKP.

Implikasi Rencana Induk SPAM (RI-SPAM) Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2033

Rencana induk SPAM Kabupaten Purbalingga akan berbengaruh terhadap rencana penyediaan jaringan prasarana pendukung kawasan permukiman, khususnya rencana jaringan air minum. Rencana induk SPAM Kabupaten Purbalingga mencakup wilayah pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan dalam dua wilayah pelayanan yang sebagian besar berupa kawasan permukiman, yaitu wilayah pelayanan perkotaan dan wilayah pelayanan perdesaan. SPAM jaringan perpipaan di Kabupaten Purbalingga dikelola oleh PDAM dan Badan/Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP/KP SPAMS) masing-masing desa yang pernah mendapatkan Program Pamsimas. Secara keseluruhan Kota Purbalingga belum terjangkau pelayanan air minum oleh PDAM. Ketersediaan pelayanan air minum saat ini hanya terdapat di jalan-jalan utama kota. Sedangkan pada daerah di luar perkotaan untuk mendapatkan air bersih dapat diperoleh dari sumur dangkal, sumur artesis maupun mata air. Berikut ini rencana pengembangan SPAM Jaringan Perpipaan dikelompokan sesuai dengan masing-masing pengelola.

Tabel IV.6.
Rencana Pengembangan SPAM untuk Mendukung Kawasan Permukiman di Kabupaten Purbalingga

No	Rencana Pengembangan SPAM PDAM	Rencana Pengembangan SPAM Non PDAM
Tahun 2022		
1	Penggabungan pengambilan debit air bersih/ air minum dari sumber Mata Air Naga Gombang dan Situ 2 Desa Kajongan ke reservoar Bendung Kemusuk Kabupaten Purbalingga	HAMP Perdesaan
2	Pengembangan jaringan pelayanan lokasi Bendung Kemusuk s/d Bandara Jenderal Besar Sudirman	DAK air minum perluasan jaringan perpipaan untuk Desa Kutabawa, Panunggalan, Larangan, Bedagas, Karangjoho, Tumanggal, Karanganyar, Pekiringan, Pekalongan, Brakas, Jambudesa, Kabuderan, Bungkanel, Maribaya, Banjarkerta, Lumpang, Ponjen, Bumisari, Wlahar, dan Sumilir
3	**Pengadaan dan pemasangan pipa distribusi dan aksesoris IKK Kaligondang IKK Kaligondang (Desa Kaligondang dan Desa Selanegara)**	DAK air minum peningkatan jaringan perpipaan untuk Desa Karanggedang, Pagedangan, Nangkod, Metenggeng, Gumiwang, Nangkasawit, Pandansari, Sokanegara, Kedarpan, Slinga, Bandingan, Timbang, Tangkisan, Langgar, Binangun, Krenceng, Sindang, Pangempon, Kejobong, dan Majatengah
4	SR MBR / HAMP Perkotaan	
5	Pemanfaatan sumber air baku dari sumur bor dalam eksisting yang ada di Kec. Kejobong, Kec. Bukateja dan Kec. Kemangkon	
6	**Optimalisasi pelayanan dengan penambahan debit dari MA Watu Tumpang yang terletak di Desa Karangcegak Kec Kutasari**	

No	Rencana Pengembangan SPAM PDAM	Rencana Pengembangan SPAM Non PDAM
7	**Pembangunan sumur bor dalam di wilayah Kecamatan Kalimanah, Purbalingga dan Padamara (3 titik)**	
Tahun 2023		
1	**Optimalisasi IKK Kaligondang**, IKK Mrebet, dan **IKK Padamara**	HAMP Perdesaan
2	Pembangunan SPAM IKK Rembang dari sumber air baku Curug Panyatan	Perluasan SPAM jaringan perpipaan - tematik penanggulangan kemiskinan DAK di Kecamatan Rembang, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Karangreja, dan Kecamatan Kertanegara
3	**Pembangunan sumur bor dalam di wilayah Kecamatan Kalimanah, Purbalingga dan Padamara (3 titik)**	
4	Penambahan sambungan rumah dari sumber Mata Air Nagagombang, pengembangan jaringan Bendung Kemusuk - Desa Bedagas, jaringan Bendung Kemusuk - Bandara Jenderal Besar Sudirman, dan optimalisasi sumber mata Air Watutumpang	
Tahun 2024		
1	**SPAM** Kota Pengadegan, Kejobong, dan **Kaligondang**	HAMP Perdesaan
2	Pembangunan SPAMS dengan memanfaatkan sumber air baku dari Mudal Teleng yang terletak di Desa Tlagayasa Kec Bobotsari	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum pada daerah rawan kekeringan
3	Pemanfaatan sumber air dari Curug Ciputut yang terletak di Desa Talagening Kec Bobotsari	
4	**Pembangunan sumur bor dalam di wilayah Kecamatan Kalimanah, Purbalingga dan Padamara (3 titik)**	
5	Penambahan sambungan rumah dari sumber Mata Air Nagagombang, pengembangan jaringan Bendung Kemusuk - Desa Bedagas, jaringan Bendung Kemusuk - Bandara Jenderal Besar Sudirman, dan optimalisasi sumber mata Air Watutumpang	
Tahun 2025		
1	Pembangunan SPAMS dengan memanfaatkan sumber air baku dari MA Cilongan yang terletak di Desa Cipaku Kec Mrebet	HAMP Perdesaan
2	**Penambahan Sambungan Rumah dari Sumur Bor di Wilayah Kecamatan Kalimanah, Purbalingga dan Padamara**, dari Curug Ciputut, sumber Mata Air Nagagombang, pengembangan jaringan Bendung Kemusuk - Desa Bedagas, jaringan	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum pada daerah rawan kekeringan

No	Rencana Pengembangan SPAM PDAM	Rencana Pengembangan SPAM Non PDAM
	Bendung Kemusuk - Bandara Jenderal Besar Sudirman, serta optimalisasi sumber mata Air Watutumpang	
Tahun 2026		
1	Pemanfaatan sumber air permukaan dari rencana Bendung Purbanegara	HAMP Perdesaan
2	Penambahan sambungan rumah dari sumber Mata Air Nagagombang, pengembangan jaringan Bendung Kemusuk - Desa Bedagas, jaringan Bendung Kemusuk - Bandara Jenderal Besar Sudirman, dan optimalisasi sumber mata Air Watutumpang	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum pada daerah rawan kekeringan

Sumber: RI-SPAM Kabupaten Purbalingga Tahun 2013-2033

Implikasi Strategi Sanitasi Kabupaten Purbalingga (SSK) Tahun 2021-2026

Implikasi adanya dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Purbalingga akan mendukung pada percepatan rencana pembangunan prasarana pendukung kawasan permukiman, khususnya di rencana pengelolaan air limbah, rencana pengelolaan persampahan dan rencana jaringan drainase.

Tabel IV.7.
Strategi Sanitasi untuk Mendukung Kawasan Permukiman di Kabupaten Purbalingga

Sektor	Strategi
Air Limbah Domestik	a. Mengoptimalkan akses layanan fasilitas pengolahan air limbah dan melakukan peningkatan pada sistem setempat (*on-site*) maupun sistem terpusat (*off-site*). b. Menyediakan Sarana dan Prasarana Air Limbah yang layak bagi Masyarakat MBR/Miskin. c. Peningkatan Kapasitas dan Rencana Pembangunan IPLT. d. Penyiapan rencana Induk Outline Plan Air Limbah Skala Kawasan. e. Penguatan kelembagaan. f. Peningkatan kapasitas SDM terkait Pengelolaan Air Limbah Permukiman. g. Pengembangan dan Penguatan Kebijakan Pemerintah Daerah Terkait Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Permukiman. h. Peningkatan Peran serta masyarakat dan dunia usaha/pihak swasta dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah. i. Peningkatan dan Pengembangan alternatif sumber pendanaan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah permukiman.
Pengelolaan Persampahan	a. Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana sesuai dengan Volume timbulan sampah yang ada. b. Meningkatkan Kemampuan Manajemen dan Kelembagaan Dalam Sistem Pengelolaan Persampahan dan SDM. c. Melakukan Optimalisasi Pendanaan Sub Sektor Persampahan. d. Melakukan peningkatan kepedulian dan partisipasi swasta/dunia usaha dalam pengelolaan persampahan. e. Peningkatan Implementasi Produk Pengaturan. f. Melakukan peningkatan keahlian dan SDM di Masyarakat terkait kesadaran pengelolaan persampahan. g. Melakukan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengelolaan sampah.

Sektor	Strategi
Drainase Lingkungan	a. Pemantapan keterpaduan penanganan pengendalian banjir dengan sektor/ sub sektor terkait lainnya berdasarkan pertimbangan faktor Klimatologi dan kebencanaan. b. Pemantapan Keterpaduan penanganan pengendalian banjir dan sektor/sub sektor terkait lainnya berdasarkan Keseimbangan Tata air. c. Meningkatkan kerjasama dari para stakeholder pembangunan drainase (pemerintah, masyarakat, NGO, swasta/dunia usaha). d. Penetapan Regulasi dan Pengembangan sistem drainase yang efektif, efisien, dan berkelanjutan dan meminimalkan genangan, polutan dan banjir yang berdampak negatif. e. Mengembangkan perencanaan sistem drainase kota yang terintegrasi dan komprehensif. f. Peningkatan pembiayaan untuk penyelenggaraan sistem drainase perkotaan.

Sumber: SSK Kab Purbalingga Tahun 2021-2026

Rencana pengembangan sistem pengolahan air limbah di Kabupaten Purbalingga diarahkan untuk dapat menerapkan pembangunan instalasi pengolahan limbah dan bahan berbahaya beracun (B3), pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah industri, pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja dari WC umum terminal, pasar, lokasi sanitasi masyarakat dan rumah tangga perkotaan serta pemantauan ketat terhadap masyarakat yang melakukan pencemaran lingkungan perkotaan dengan limbah tinja. Perencanaan ke depan perlu diantisipasi dengan pembangunan instalasi pengolahan limbah dan bahan berbahaya beracun (B3) khususnya pada Kawasan Perkotaan Purbalingga, Kawasan Perkotaan Bobotsari, Kawasan Perkotaan Bukateja dan Kawasan Perkotaan Rembang serta kawasan ibukota kecamatan lain yang berkembang menjadi kawasan perkotaan. Arahan pengelolaan limbah permukiman perkotaan berupa pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja, WC/ jamban umum dan limbah rumah tangga perkotaan dilakukan dengan pengembangan dan peningkatan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) secara komunal, pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja dari WC/ jamban umum terminal, pasar, lokasi sanitasi masyarakat dan rumah tangga perkotaan; dan pemantauan ketat terhadap masyarakat yang melakukan pencemaran lingkungan perkotaan dengan limbah tinja.

Rencana Program dan kegiatan pengelolaan air limbah domestik tahun 2020 berupa program pengelolaan persampahan dan limbah B3 dalam bentuk cakupan pengelolaan air limbah rumah tangga, Cakupan industri yang memiliki TPS B3, dan Persentase pengurangan timbulan sampah melalui bank sampah. Pengelolaan sistem persampahan di wilayah Kabupaten Purbalingga pada saat ini dibagi ke dalam 2 (dua) sistem, yaitu pengelolaan sampah oleh masyarakat dan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Rencana kedepannya pengelolaan sampah diarahkan dengan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di setiap wilayah secara komunal. Kawasan perkotaan sudah terdapat tempat sampah yang membedakan sampah kering dan basah. Hal ini sangat membantu dalam pemilihan sampah yang kemudian bisa didaur ulang sesuai pemanfaatannya, tetapi pembedaan sampah tersebut hanya terdapat di kecamatan Kota sedangkan di tempat lain belum terdapat. Pembedaan sampah ini harus diterapkan di semua kecamatan agar sampah lebih mudah dalam pemilahannya, juga membantu dalam pengelolaan sampahnya karena sudah adanya pembagian jenis sampahnya. Sedangkan untuk

persampahan di pedesaan direncanakan juga dengan sistem 3R secara komunal untuk setiap wilayah (RT/RW).

4.1.4. Kajian Kedudukan dan Peran Satuan Perumahan dalam Rencana Pembangunan Kabupaten

Kedudukan dan Peran Perumahan sesuai Arahan Rencana Struktur Ruang

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Purbalingga (dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Revisi RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031) adalah "mewujudkan ruang Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah di bagian Barat-Selatan Jawa Tengah berbasis agrobisnis, industri dan pariwisata yang berkelanjutan". Dari tujuan penataan ruang wilayah tersebut dapat diketahui bahwa sektor unggulan yang dijadikan sebagai potensi pengembangan wilayah adalah sektor pertanian yang didukung perdagangan jasa, industri dan pariwisata.

Dalam rencana struktur ruang, berupa sistem perkotaan untuk Kabupaten Purbalingga terdiri dari:

1. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), pada Kawasan Perkotaan Purbalingga dan Kawasan Perkotaan Bobotsari. Pengembangan Pusat Perkotaan Purbalingga didorong menjadi PKW.
2. Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), pada Kecamatan Bukateja, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kertanegara, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Kemangkon, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Padamara, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Pengadegan, dan Kecamatan Karangjambu.

Sedangkan, sistem perdesaan berupa pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), yakni meliputi Pengembangan PPL, pada PPL Kutawis Kecamatan Bukateja, PPL Makam Kecamatan Rembang, PPL Kutabawa Kecamatan Karangreja, PPL Purbayasa Kecamatan Padamara, PPL Picung Desa Krangean Kecamatan Kertanegara, PPL Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol, PPL Bedagas Kecamatan Pangadegan, dan PPL Bandingan Kecamatan Kejobong.

Wilayah kajian RP3 Kawasan Perkotaan Purbalingga berfungsi sebagai PKL (hirarki tertinggi sistem perkotaan) yang meliputi Kecamatan Purbalingga, sebagian Kecamatan Kalimanah, sebagian Kecamatan Kaligondang, sebagian Kecamatan Padamara, dan sebagian Kecamatan Bojongsari. PKL Kawasan Perkotaan Purbalingga berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan di sekitar kawasan perkotaan Purbalingga. Pusat pelayanan ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, serta pusat pelayanan umum lainnya. Fungsi pelayanan dan kegiatan yang dikembangkan di pusat perkotaan skala kabupaten ini mendorong pertumbuhan kebutuhan perumahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan sekitarnya, mengingat kedekatan dengan pusat aktivitas dan lokasi pekerjaan masyarakat menjadi salah satu pertimbangan pemilihan hunian.

Kawasan permukiman di perkotaan Purbalingga yang ditetapkan sebagai PKL diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:

1. Diperbolehkan kegiatan permukiman, jasa keuangan, pendidikan, kesehatan, pemerintahan dan jasa lainnya, wisata alam, buatan dan budaya, perdagangan dan prasarana transportasi, serta kegiatan ekonomi dan sosial lainnya yang sesuai dengan skala pelayanannya (skala kabupaten atau beberapa kecamatan),
2. Diperbolehkan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah sampai dengan tinggi,
3. Tidak diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan atau menurunnya fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana.

Kedudukan dan Peran Perumahan sesuai Arahan Rencana Pola Ruang

Dalam rencana pola ruang Kabupaten Purbalingga sudah dialokasikan kawasan permukiman seluas kurang lebih 20.379 ha yang terdiri atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan permukiman perkotaan seluas 6102 ha meliputi Kecamatan Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Padamara, Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karangjambu, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, dan Rembang. Sedangkan kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 14.277 ha meliputi Kecamatan Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, Kaligondang, Purbalingga, Kalimanah, Padamara, Kutasari, Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Karangreja, Karangjambu, Karanganyar, Kertanegara, Karangmoncol, dan Rembang.

Perwujudan kawasan permukiman perkotaan dilaksanakan melalui program:

1. Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni,
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur penunjang kawasan permukiman perkotaan,
3. Penyediaan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota,
4. Penyediaan prasarana sosial dan ekonomi dalam rangka mendorong perkembangan kawasan perkotaan, dan
5. Pengembangan kawasan untuk permukiman vertikal.

Perwujudan kawasan permukiman perdesaan dilaksanakan melalui program:

1. Pembangunan perumahan baru diluar kawasan pertanian pangan berkelanjutan,
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur penunjang kawasan permukiman perdesaan, dan
3. Penyediaan prasarana sosial dan ekonomi dalam rangka mendorong perkembangan kawasan perdesaan.

Pemanfaatan kawasan permukiman di Kabupaten Purbalingga diatur dan dikendalikan melalui ketentuan umum peraturan zonasi yang mengatur kegiatan yang diperbolehkan dan dilarang. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Diperbolehkan pengembangan permukiman dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah sampai dengan tinggi dan bangunan vertikal dengan syarat:
   a. Menyediakan ruang terbuka hijau, fasilitas umum dan fasilitas sosial,
   b. Menyediakan jaringan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan, dan
   c. Mematuhi ketentuan teknis bangunan, tema rsitektur bangunan, kelengkapan bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
2. Diperbolehkan pembangunan perumahan baru pada lahan yang sesuai dengan kriteria fisik meliputi:
   a. Kemiringan lereng relatif datar,
   b. Ketersediaan dan mutu sumber air bersih, dan
   c. Bebas dari potensi banjir/genangan.
3. Diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya.
4. Diperbolehkan pengembangan prasarana pemerintahan, prasarana transportasi, fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan syarat sesuai skalanya.
5. Diperbolehkan bangunan sesuai dengan aturan tata bangunan, ketinggian maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan KKOP.
6. Diperbolehkan bersyarat pembangunan permukiman di kawasan resapan air dengan syarat harus menyediakan sumur resapan atau biopori untuk menjaga kualitas resapan air.
7. Diperbolehkan terbatas kegiatan permukiman pada kawasan rawan bencana rendah hingga sedang berbasis mitigasi bencana.
8. Diperbolehkan terbatas hanya untuk kegiatan industri kecil yang tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan/atau menghasilkan limbah berkategori Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).
9. Diperbolehkan terbatas kegiatan pergudangan dengan syarat tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.
10. Diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan di kawasan permukiman di luar kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi.
11. Luas RTH pada kawasan permukiman sektor privat paling sedikit 10%.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan permukiman perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Diperbolehkan pengembangan permukiman dengan intensitas bangunan berkepadatan rendah sampai dengan sedang dengan syarat:

a. Menyediakan ruang terbuka hijau, fasilitas umum dan fasilitas sosial,
b. Menyediakan jaringan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan, dan
c. Mematuhi ketentuan teknis bangunan, tema rsitektur bangunan, kelengkapan bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.
d. Khusus kawasan resapan air harus menyediakan sumur resapan atau biopori untuk menjaga kualitas resapan air.

2. Diperbolehkan pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan syarat sesuai dengan skalanya.
3. Diperbolehkan pengembangan prasarana pemerintahan, prasarana transportasi, fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan syarat sesuai skalanya.
4. Diperbolehkan bangunan sesuai dengan aturan tata bangunan, ketinggian maksimum dibatasi kemampuan daya dukung struktur tanah dan KKOP.
5. Diperbolehkan bersyarat pembangunan permukiman di kawasan resapan air dengan syarat harus menyediakan sumur resapan atau biopori untuk menjaga kualitas resapan air.
6. Diperbolehkan terbatas kegiatan permukiman pada kawasan rawan bencana rendah hingga sedang berbasis mitigasi bencana.
7. Diperbolehkan terbatas hanya untuk kegiatan industri kecil yang tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan dan/atau menghasilkan limbah berkategori Bahan Beracun dan Berbahaya (B3).
8. Diperbolehkan terbatas kegiatan peternakan rakyat yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, pada permukiman kepadatan rendah dan hanya dilakukan dalam skala kecil.
9. Diperbolehkan terbatas kegiatan pergudangan dengan syarat tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan.
10. Diperbolehkan terbatas kegiatan pertambangan di kawasan permukiman di luar kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertambangan dan energi.

Kedudukan dan Peran Perumahan sesuai Arahan Rencana Kawasan Strategis

Perkembangan kawasan strategis di wilayah kabupaten juga menjadi salah satu pendorong permintaan kebutuhan hunian, mengingat pada kawasan strategis tersebut berkembang berbagai kegiatan produktif yang didukung dengan penyediaan infrastruktur. Kawasan strategis wilayah di Kabupaten Purbalingga terdiri atas kawasan strategis provinsi di wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten. Kawasan Strategis Provinsi yang berada di wilayah Kabupaten berupa Kawasan Agropolitan Mangga Emas (Purbalingga, Purbalingga, Tegal, Brebes, Banyumas), yang terdiri atas:

1. Kawasan agropolitan Bungakondang di Kecamatan Bukateja, Pengadegan, Kejobong dan Kaligondang.
2. Kawasan Agropolitan Lereng Gunung Slamet di Kecamatan Karangreja, Mrebet, Bojongsari dan Kutasari.

Kawasan agropolitan akan berkembang menjadi kawasan strategis dengan potensi pengembangan pertanian, perdagangan jasa, industri, dan pariwisata. Pengembangan kawasan strategis agropolitan melalui:

1. Pengembangan komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
2. Peningkatan efisiensi produksi pertanian,
3. Pengembagan kawasan produksi pertanian.
4. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan pasca panen dan pengolahan produksi pertanian, dan
5. Peningkatan penyediaan prasarana pemasaran produksi pertanian.

Peningkatan dan keberagaman aktivitas yang terjadi di kawasan agropolitan akan meningkatkan permintaan akan hunian pendukung. Sedangkan Kawasan Strategis Kabupaten meliputi Kawasan Agropolitan Mangga Emas dan Kawasan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba. Kawasan Bandar Udara Jenderal Besar Soedirman Wirasaba berada di sebagian wilayah Desa Wirasaba Kecamatan Bukateja. Pengembangan kawasan bandar udara akan menjadi pendorong permintaan kebutuhan hunian karena umumnya sekitar kawasan bandara akan tumbuh kegiatan pendukung seperti perdagangan jasa, pergudangan, dan pendukung lainnya.

Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis diwujudkan melalui:

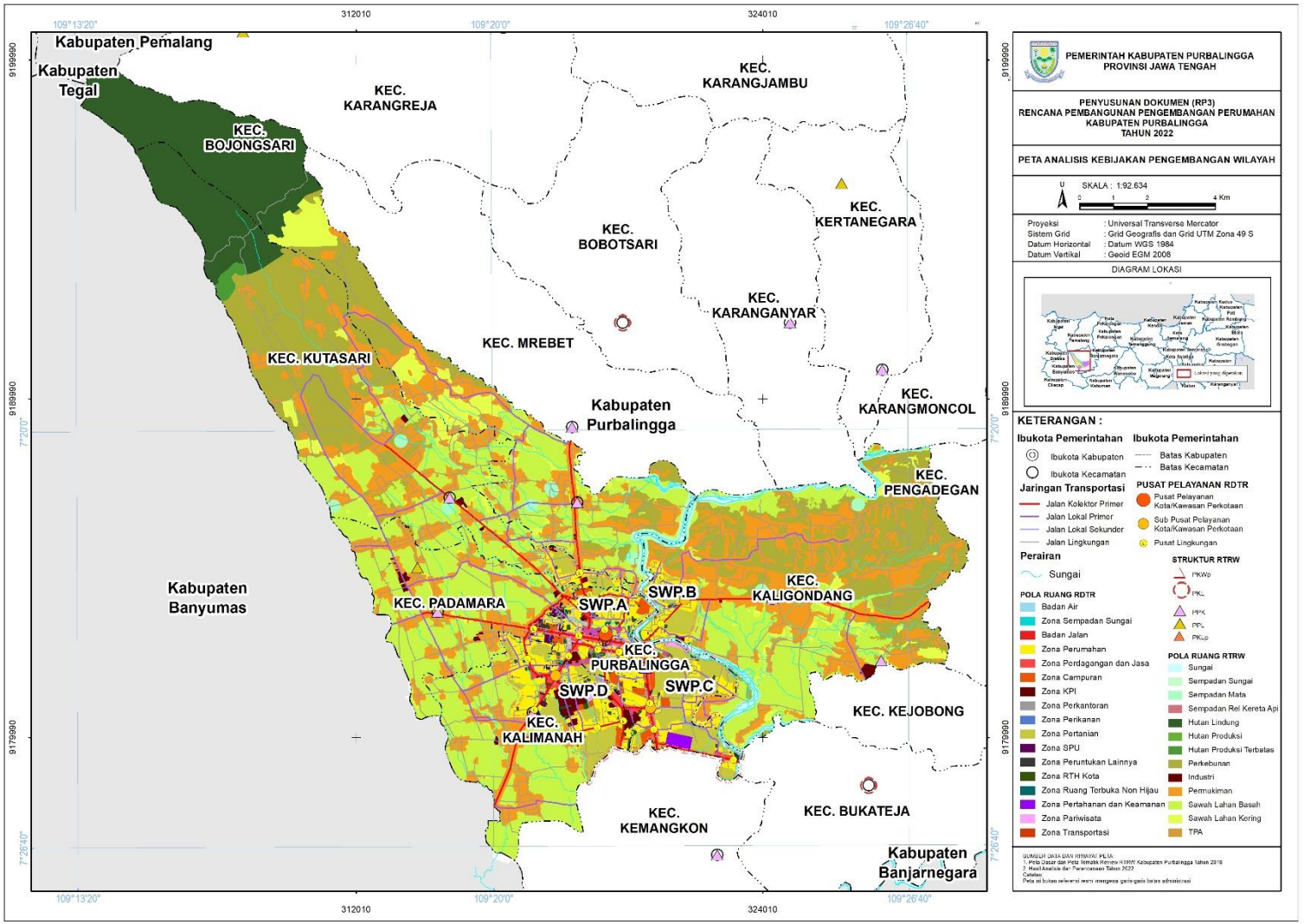
1. Diperbolehkan pemanfaatan ruang sebagai kawasan penunjang ekonomi dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk untuk kawasan permukiman.
2. Diperbolehkan pemanfaatan ruang dengan intensitas tinggi sesuai dengan aturan tata bangunan, mempertimbangkan KKOP, serta dilengkapi dengan ruang terbuka hijau yang cukup.
3. Tidak diperbolehkan perubahan fungsi pemanfaatan ruang pada zona yang dinilai penting untuk mendukung aktivitas kawasan strategis pertumbuhan ekonomi.

4.1.5. Identifikasi Isu Strategis dan Tantangan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Isu strategis dan tantangan pembangunan dan pengembangan perumahan di Kabupaten Purbalingga adalah:

1. Peningkatan kebutuhan rumah disebabkan karena faktor alami (peningkatan jumlah penduduk) dan faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, pengembangan aktivitas baru, permintaan kebutuhan rumah dari kabupaten sekitar.
2. Masih terdapat backlog/ kekurangan rumah.
3. Perumahan di kawasan rawan bencana.

4. Masih terdapat masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah atau belum dapat memenuhi rumah layak huni.
5. Masih terdapat rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum tertangani.
6. Perumahan kumuh.
7. Pengembang perumahan membangun hunian tanpa menyediakan PSU pendukung sesuai standar.
8. Belum optimalnya peran swasta dan lembaga jasa keuangan dalam pembangunan perumahan.
9. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengembangan perumahan yang nyaman dan layak huni, terutama karena keterbatasan kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
10. Terbatasnya dukungan pembiayaan pembangunan perumahan dari sisi pemerintah akibat adanya skala prioritas sektor pembangunan lain, sehingga penanganan pembangunan perumahan dan penyediaan prasarana dasar, pengaturan lahan dalam skala besar serta rehabilitasi kawasan kumuh menjadi sulit direalisasikan.



Gambar 4.1.
Peta Analisis Kebijakan Pengembangan Wilayah

4.2. Analisis Delineasi Satuan Perumahan

4.2.1. Pendekatan dan Dasar Penentuan Delineasi

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

Perumahan adalah salah satu sarana hunian yang sangat erat kaitannya dengan tata cara kehidupan manusia. Kawasan perumahan merupakan suatu lingkungan hunian yang perlu dilindungi dari gangguan–gangguan, misalnya gangguan suara, kotoran udara dan bau, selain itu harus aman dan mudah mencapai pusat–pusat pelayanan serta tempat kerja. Dengan demikian dalam kawasan perumahan harus disediakan sarana–sarana lain yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, yaitu sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, perbelanjaan, rekreasi dan lain-lain. Sedangkan permukiman merupakan satu kesatuan fungsional, dimana terdiri dari aspek fisik maupun non fisik, sehingga pembangunan permukiman harus berlandaskan pada pola permukiman yang menyeluruh, yang tidak hanya membangun fisik rumah saja tetapi juga mampu menyediakan sarana prasarana umum serta fasilitas-fasilitas sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya.



Gambar 4.2.
Skema Satuan Kawasan Permukiman

Penentuan sebaran Lingkungan Hunian berfungsi sebagai:

1. Arahan alokasi ruang perwujudan rencana pengembangan dan pembangunan lingkungan hunian;
2. Dasar penyusunan rencana pengembangan dan pembangunan PSU sesuai hirarki kawasan permukiman; dan
3. Dasar penyusunan rencana teknis lainnya.

Pendelineasian kawasan permukiman dilakukan dengan:

(1) pendekatan secara formal (keseragaman/homogenitas) dimana suatu wilayah geografik yang seragam menurut kriteria tertentu, seperti kondisi fisik geografi, administratif, ekonomi, sosial dan politik;
(2) pendekatan fungsional (koherensi dan interdependensi) saling hubungan antar bagian-bagian dalam wilayah yang terdiri dari satuan-satuan yang heterogen, seperti desa-kota yang secara fungsional saling berkaitan.

Dalam pendelineasian LH Kabupaten Purbalingga, digunakan pendekatan administrasi dengan mempertimbangkan fungsi pelayanan kawasan, sehingga satu kecamatan akan memiliki satu lingkungan hunian.

Dasar pendelineasian lingkungan hunian Kabupaten Purbalingga dilakukan dengan melihat:

1. Sebaran permukiman dan perumahan
2. Mengacu pada perwujudan Pusat Pelayanan Kota (PPK) pada RTRW Kabupaten Purbalingga
3. Pendekatan administrasi kecamatan
4. Pertimbangan jangkauan pelayanan PSU

Dasar pendelineasian satuan permukiman di Kabupaten Purbalingga dilakukan dengan melihat:

1. Sebaran permukiman dan perumahan
2. Mengacu pada perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) pada RTRW Kabupaten Purbalingga
3. Pendekatan administrasi desa/ kelurahan
4. Pertimbangan jangkauan pelayanan PSU

Dalam pendelineasian Satuan Perumahan (P) Kabupaten Purbalingga, digunakan pendekatan administrasi, delineasi satuan perumahan dalam lingkup delineasi kelurahan/desa.

Sedangkan, dasar pendelineasian satuan permukiman di Kabupaten Purbalingga dilakukan dengan melihat:

1. Identifikasi struktur dan pola ruang (pusat-pusat kegiatan, land use, kawasan strategis)
2. Identifikasi klasifikasi ruang berdasarkan administrasi dan kegiatan kawasan (perkotaan dan perdesaan)
3. Identifikasi Konsentrasi Penduduk (kepadatan, jumlah, sebaran permukiman dan perumahan)
4. Analisis superimpose untuk mengetahui delineasi sebaran permukiman dan perumahan dengan melakukan overlay beberapa peta sehingga terlihat pola dan karakteristik sebaran.

4.2.2. Analisis Pembagian Satuan Perumahan

Rencana sebaran satuan permukiman (SP) didasarkan tipologi dan aglomerasi kawasan permukiman pada Lingkungan Hunian (LH), sehingga masing-masing Lingkungan Hunian akan terdiri dari beberapa Satuan Permukiman (SP). Tiap Satuan Permukiman akan terdiri dari beberapa perumahan yang didasarkan pada sebaran perumahan yang dibangun oleh pengembang maupun perumahan yang berkembang secara swadaya. Satuan Perumahan (P) Kabupaten Purbalingga menggunakan pendekatan administrasi dengan delineasi kelurahan/desa.

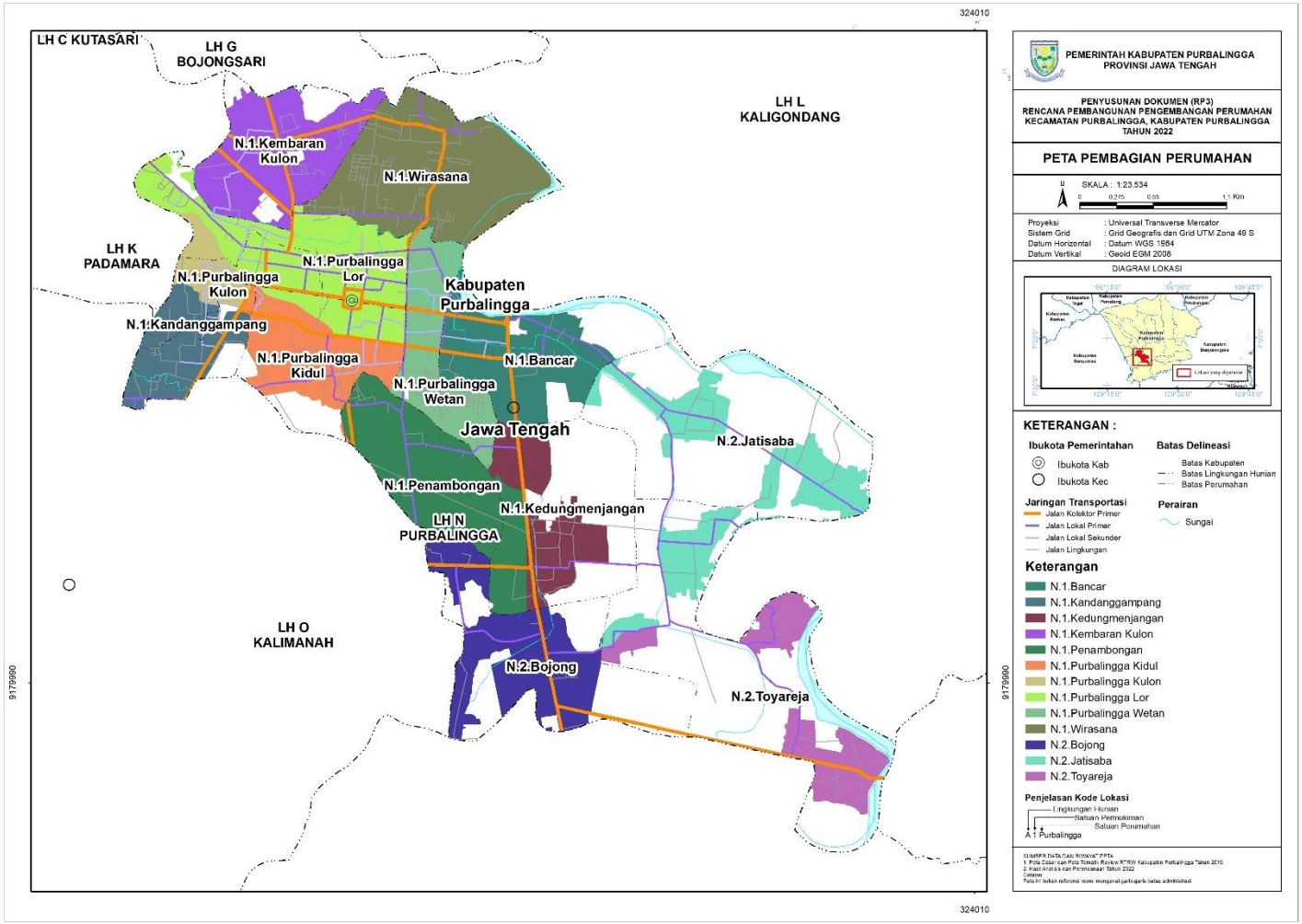
Tabel IV.8.
Deliniasi Satuan Perumahan Kabupaten Purbalingga

LH	SP	P	Luas (Ha)
Purbalingga	1	Bancar	76,63
		Kandanggampang	48,20
		Kedungmenjangan	50,78
		Kembaran Kulon	82,37
		Penambongan	105,30
		Purbalingga Kidul	60,95
		Purbalingga Kulon	21,79
		Purbalingga Lor	110,87
		Purbalingga Wetan	60,65
		Wirasana	127,09

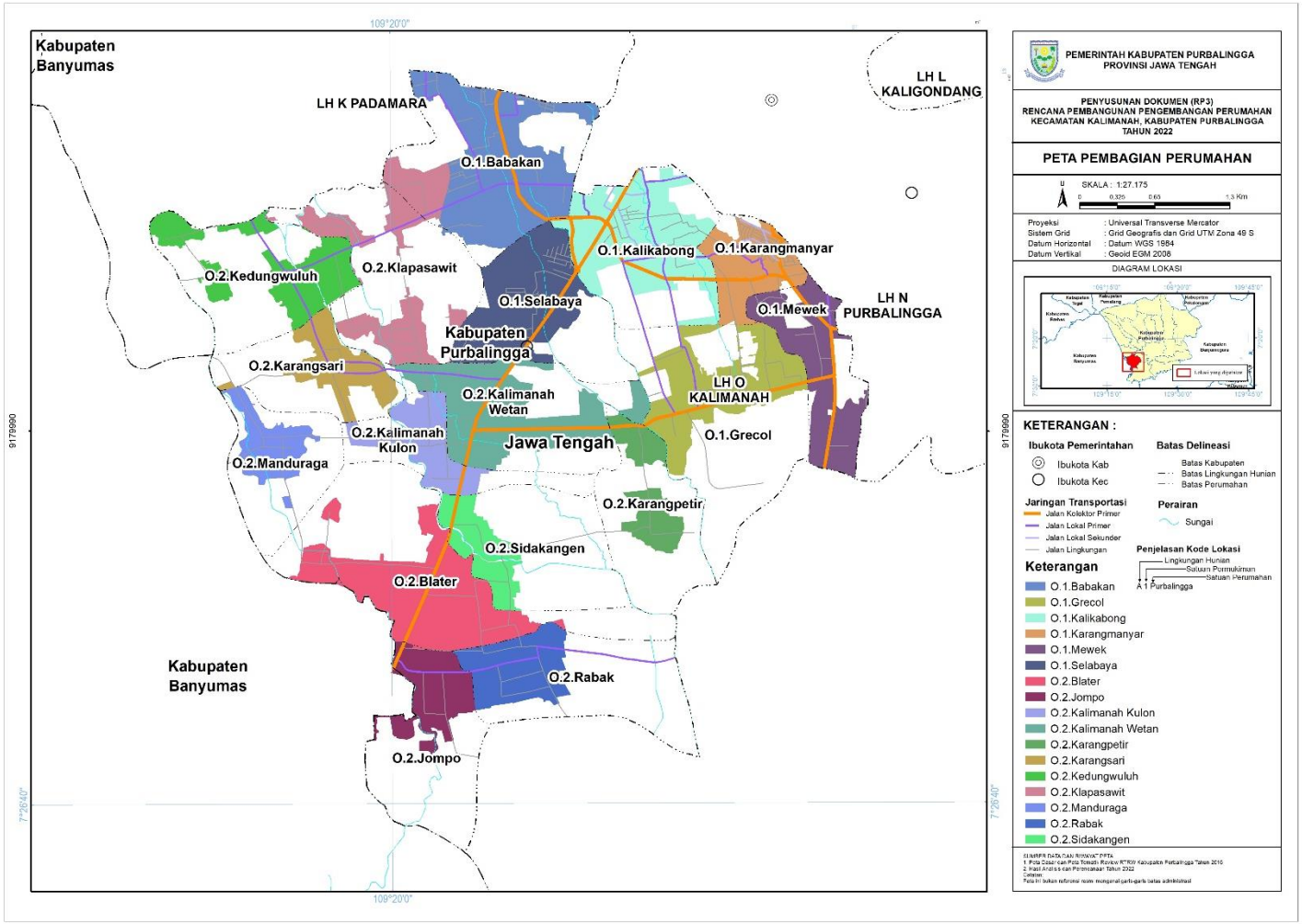
LH	SP	P	Luas (Ha)
	SP 1 Total		744,63
	2	Bojong	81,90
		Jatisaba	85,09
		Toyareja	52,10
	SP 2 Total		219,09
Purbalingga Total			963,72
Kalimanah	1	Babakan	125,28
		Grecol	78,08
		Kalikabong	100,90
		Karangmanyar	47,89
		Mewek	66,92
		Selabaya	86,30
	SP 1 Total		505,37
	2	Blater	109,39
		Jompo	42,56
		Kalimanah Kulon	42,12
		Kalimanah Wetan	97,76
		Karangpetir	32,10
		Karangsari	38,42
		Kedungwuluh	57,78
		Klapasawit	67,19
		Manduraga	30,03
		Rabak	48,51
		Sidakangen	34,47
	SP 2 Total		600,34
Kalimanah Total			1.105,71
Padamara	1	Karangsentul	64,19
	SP 1 Total		64,19
	2	Bojanegara	135,86
		Dawuhan	57,37
		Gemuruh	84,97
		Karangjambe	66,77
		Karangpule	60,55
		Sokawera	55,08
	SP 2 Total		460,60
	3	Kalitinggar	49,52
		Kalitinggar Kidul	31,18
		Karanggambas	73,44
		Mipiran	34,53
		Padamara	69,47
		Prigi	44,55
		Purbayasa	30,99
	SP 3 Total		333,69
Padamara Total			858,48
Bojongsari	1	Banjaran	115,54
		Beji	40,00
		Bojongsari	133,72
		Brobot	70,50
		Galuh	34,74
		Gembong	61,62

LH	SP	P	Luas (Ha)
		Kajongan	76,63
		Karangbanjar	62,68
		Patemon	63,24
	SP 1 Total		658,67
	2	Bumisari	186,78
		Metenggeng	61,64
		Pagedangan	45,95
		Pekalongan	117,62
	SP 2 Total		411,99
Bojongsari Total			1.070,66
Kutasari	1	Karangaren	22,31
		Karangklesem	46,61
		Karanglewas	32,53
		Karangreja	137,81
		Kutasari	88,83
		Limbangan	81,42
		Meri	83,88
		Munjul	49,79
		Sumingkir	114,98
	SP 1 Total		658,16
	2	Candinata	138,21
		Candiwulan	137,80
		Cendana	121,48
		Karangcegak	112,54
		Karangjengkol	96,18
	SP 2 Total		606,20
Kutasari Total			1.264,36
Kaligondang	1	Kalikajar	110,51
		Penaruban	61,37
	SP 1 Total		171,88
	2	Arenan	123,09
		Brecek	30,18
		Kaligondang	160,18
		Kembaran Wetan	123,66
		Sempor Lor	24,14
		Slinga	145,74
	SP 2 Total		606,99
	3	Cilapar	50,03
		Lamongan	45,86
		Pagerandong	43,85
		Penolih	148,75
		Selakambang	191,04
		Selanegara	117,55
		Sidanegara	128,14
		Sidareja	124,18
		Sinduraja	106,02
		Tejasari	47,62
	SP 3 Total		1.003,05
Kaligondang Total			1.781,92
Jumlah			7.044,85

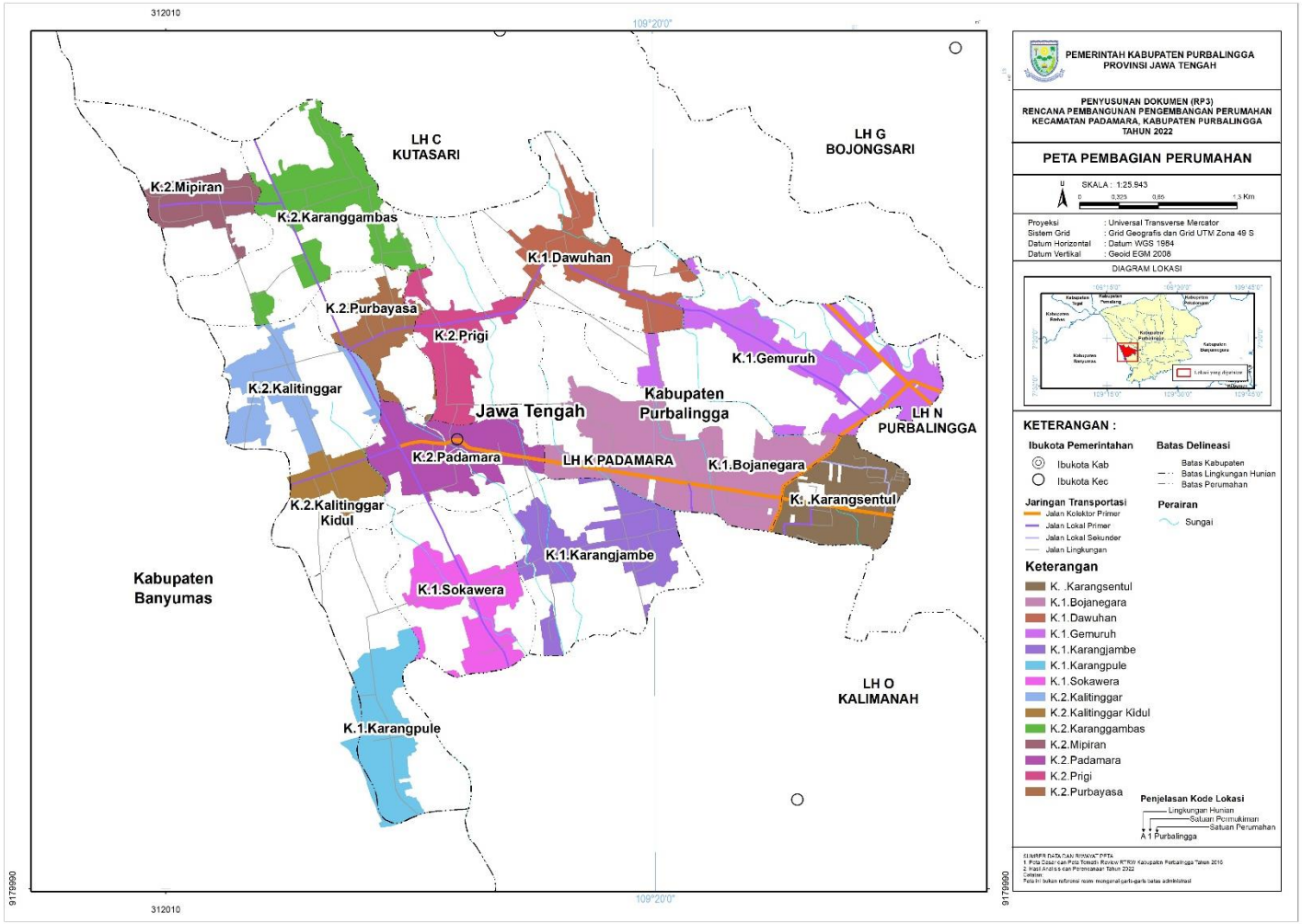
Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022



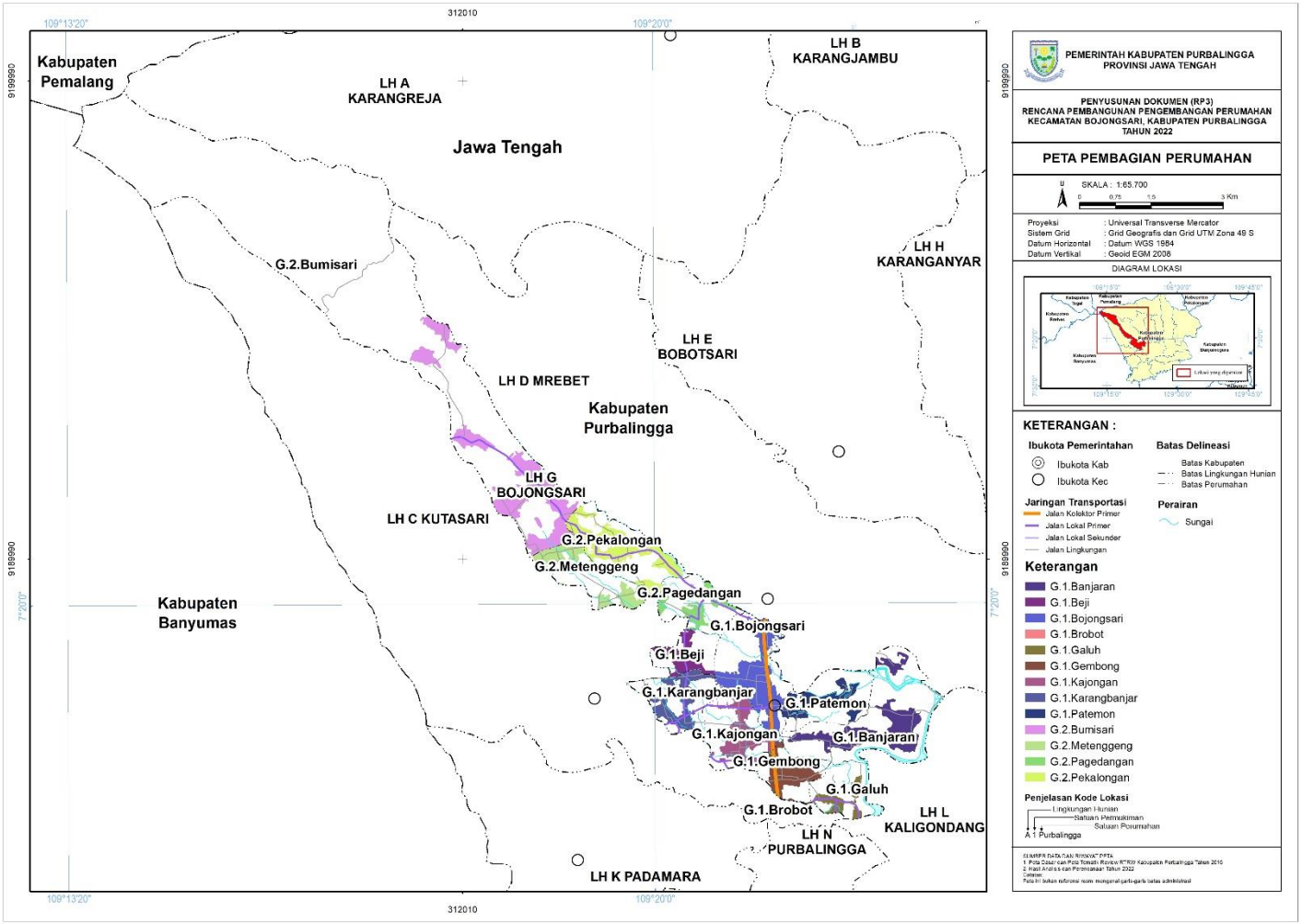
Gambar 4.3.
Peta Pembagian Perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga



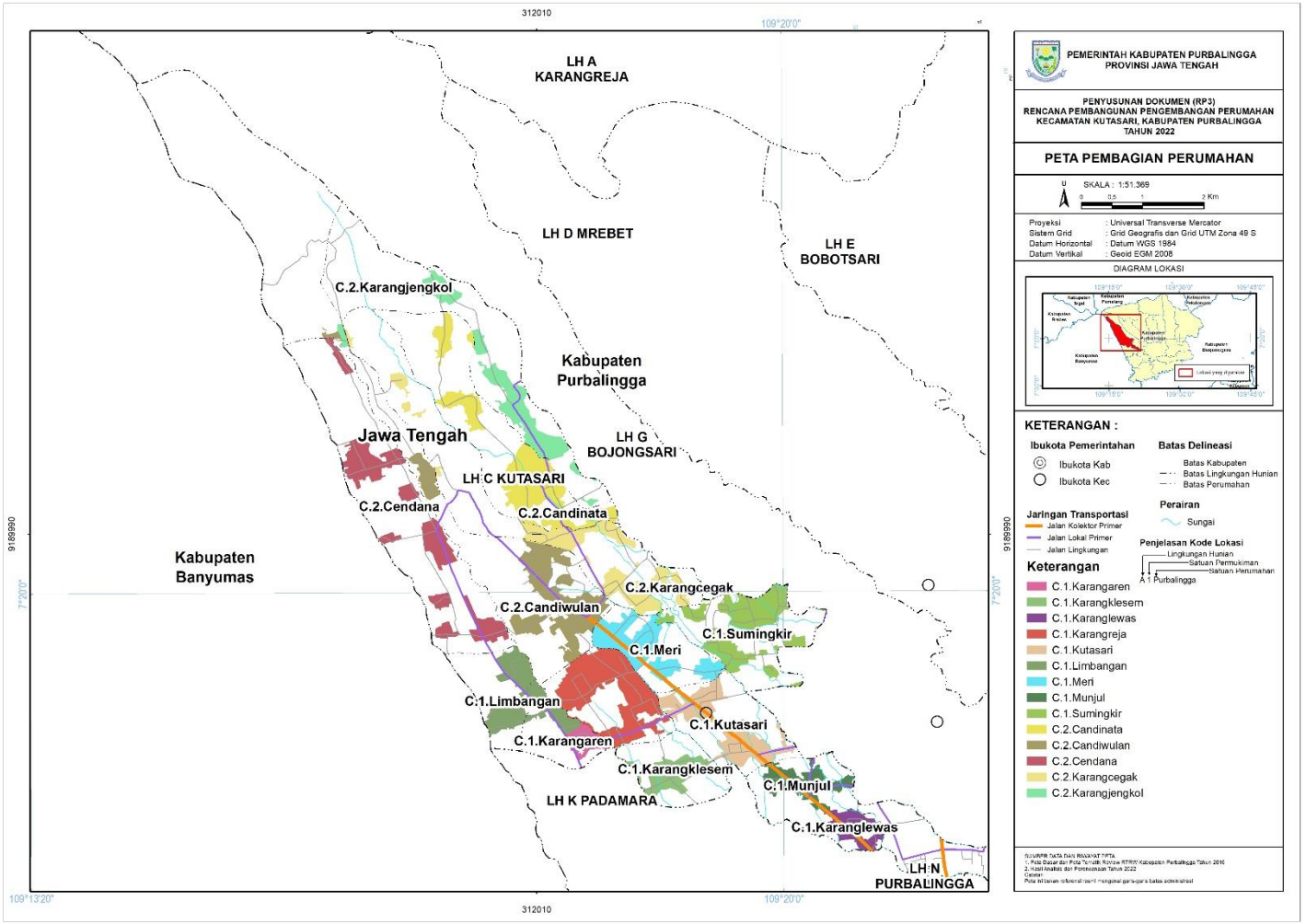
Gambar 4.4.
Peta Pembagian Perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah



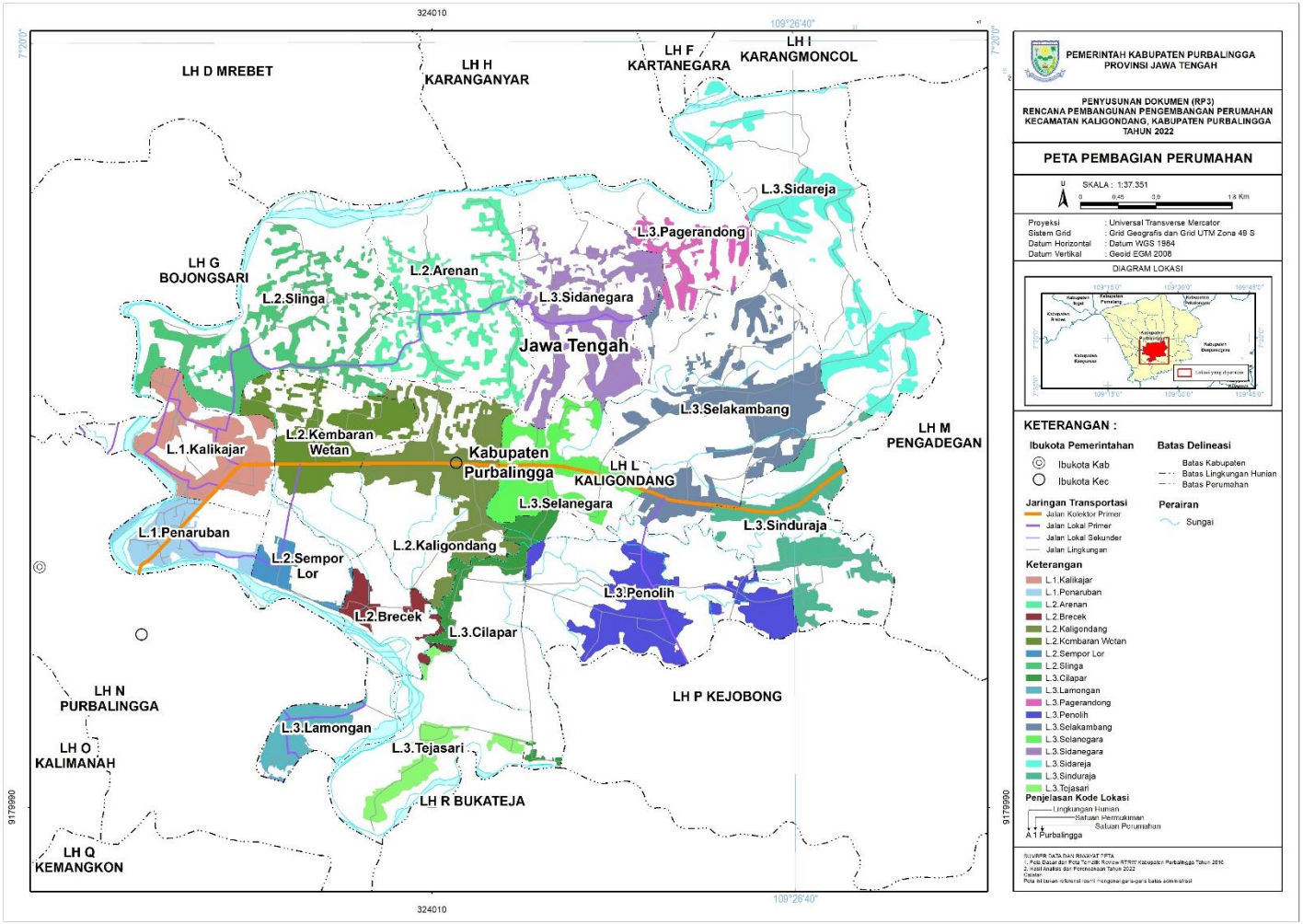
Gambar 4.5.
Peta Pembagian Perumahan di Lingkungan Hunian Padamara



Gambar 4.6.
Peta Pembagian Perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari



Gambar 4.7.
Peta Pembagian Perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari



Gambar 4.8.
Peta Pembagian Perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang

4.3. Analisis Fisik Dasar

4.3.1. Analisis Kemampuan Lahan

Analisis kemampuan lahan digunakan untuk menganalisis pengendalian perkembangan perumahan dan pemanfaatannya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan, serta berfungsi sebagai penunjang dan pengendali program-program pembangunan secara keseluruhan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna. Analisis ini didasarkan pada kondisi topografi, kondisi hidrologi, kondisi rawan bencana, kondisi penggunaan lahan, dan kesesuaian lahan.

Kondisi wilayah perencanaan dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu daerah dataran rendah, daerah dataran tinggi, dan daerah pegunungan. Kondisi topografi berada pada 0-8% (datar) hingga 15-25% (agak curam). Kondisi topografi yang baik untuk dikembangkan sebagai area perumahan adalah lahan yang relatif landai, memiliki kemiringan lereng yang kecil, sehingga mempunyai potensi pengembangan yang besar. Oleh karena itu, pengembangan perumahan sebaiknya diarahkan pada wilayah dengan topografi datar-landai. Perumahan eksisting yang sudah berada di wilayah topografi agak curam, maka sebaiknya dilakukan pengendalian pembatasan pengembangan perumahan.

Kondisi topografi di Lingkungan Hunian Purbalingga didominasi oleh topografi 0-8% (datar). Pada kondisi topografi tersebut, satuan perumahan yang memiliki luas paling besar di Lingkungan Hunian Purbalingga adalah Perumahan Wirasana yaitu sebesar 127,09 Ha. Sementara itu, satuan perumahan yang memiliki luas paling kecil adalah Perumahan Purbalingga Kulon sebesar 21,79 Ha. Maka dari itu, Lingkungan Hunian Purbalingga memiliki potensi pengembangan perumahan yang besar karena adanya karakteristik kemiringan lereng yang datar.

Tabel IV.9.
Luas Perumahan Terhadap Kondisi Topografi di Lingkungan Hunian Purbalingga

Topografi	Perumahan	Luas (Ha)	Arahan
Datar (0 - 8 %)	Bojong	81,9	Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebaiknya diarahkan pada wilayah dengan topografi datar-landai
	Toyareja	52,1	
	Kedungmenjangan	50,78	
	Jatisaba	85,09	
	Bancar	76,63	
	Purbalingga Wetan	60,65	
	Penambongan	105,3	
	Purbalingga Kidul	60,95	
	Kandanggampang	48,2	
	Purbalingga Kulon	21,79	
	Purbalingga Lor	110,87	
	Kembaran Kulon	82,37	
	Wirasana	127,09	

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Kondisi topografi di Lingkungan Hunian Kalimanah didominasi oleh topografi 0-8% (datar). Pada kondisi topografi tersebut, satuan perumahan yang memiliki luas paling besar di Lingkungan Hunian Kalimanah adalah Perumahan Babakan yaitu sebesar 125,28 Ha. Sementara itu, satuan perumahan yang memiliki luas paling kecil adalah Perumahan Manduraga sebesar 30,03 Ha. Maka dari itu, Lingkungan Hunian Kalimanah memiliki

potensi pengembangan perumahan yang besar karena adanya karakteristik kemiringan lereng yang datar.

Tabel IV.10.
Luas Perumahan Terhadap Kondisi Topografi di Lingkungan Hunian Kalimanah

Topografi	Perumahan	Luas (Ha)	Arahan
Datar (0 - 8 %)	Jompo	42,56	Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebaiknya diarahkan pada wilayah dengan topografi datar-landai
	Rabak	48,51	
	Blater	109,39	
	Sidakangen	34,47	
	Karangpetir	32,10	
	Grecol	78,08	
	Mewek	66,92	
	Karangmanyar	47,89	
	Kalikabong	100,90	
	Selabaya	86,30	
	Kalimanah Wetan	97,76	
	Kalimanah Kulon	42,12	
	Manduraga	30,03	
	Karangsari	38,42	
	Kedungwuluh	57,78	
	Klapasawit	67,19	
	Babakan	125,28	

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Kondisi topografi di Lingkungan Hunian Padamara didominasi oleh topografi 0-8% (datar). Pada kondisi topografi tersebut, satuan perumahan yang memiliki luas paling besar di Lingkungan Hunian Padamara adalah Perumahan Bojanegara yaitu sebesar 135,86 Ha. Sementara itu, satuan perumahan yang memiliki luas paling kecil adalah Perumahan Purbayasa sebesar 30,99 Ha. Maka dari itu, Lingkungan Hunian Padamara memiliki potensi pengembangan perumahan yang besar karena adanya karakteristik kemiringan lereng yang datar.

Tabel IV.11.
Luas Perumahan Terhadap Kondisi Topografi di Lingkungan Hunian Padamara

Topografi	Perumahan	Luas (Ha)	Arahan
Datar (0 - 8 %)	Karangpule	60,55	Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebaiknya diarahkan pada wilayah dengan topografi datar-landai
	Kalitinggar	49,52	
	Sokawera	55,08	
	Padamara	69,47	
	Karangjambe	66,77	
	Bojanegara	135,86	
	Karangsentul	64,19	
	Gemuruh	84,97	
	Dawuhan	57,37	
	Prigi	44,55	
	Purbayasa	30,99	
	Karanggambas	73,44	
	Mipiran	34,53	
	Kalitinggar Kidul	31,18	

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Kondisi topografi di Lingkungan Hunian Bojongsari sangat beragam, yaitu berada pada kemiringan lereng 0% hingga 15-25%. Namun secara keseluruhan, perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari didominasi oleh kemiringan lereng 0-8% yang menjangkau hingga 13 perumahan. Sementara itu, terdapat beberapa perumahan yang berada di kemiringan lereng 15 – 25% (agak curam), yaitu Perumahan Banjaran dan Perumahan Patemon yang diarahkan untuk dilakukan pengendalian pembatasan pengembangan kawasan perumahan.

Tabel IV.12.
Luas Perumahan Terhadap Kondisi Topografi di Lingkungan Hunian Bojongsari

Topografi	Perumahan	Luas (Ha)	Arahan
Datar (0 - 8 %)	Banjaran	22,12	Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebaiknya diarahkan pada wilayah dengan topografi datar-landai
	Beji	40,00	
	Bojongsari	133,72	
	Brobot	70,50	
	Bumisari	152,11	
	Galuh	34,74	
	Gembong	61,62	
	Kajongan	76,63	
	Karang Banjar	62,68	
	Matenggeng	61,64	
	Pagedangan	45,95	
	Patemon	49,35	
	Pekalongan	117,62	
Landai (8 - 15 %)	Bumisari	34,67	
Agak Curam (15 - 25 %)	Banjaran	93,42	Topografi agak curam, dilakukan pengendalian pembatasan pengembangan kawasan permukiman
	Patemon	13,89	

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Kondisi topografi di Lingkungan Hunian Kutasari sangat beragam, yaitu berada pada kemiringan lereng 0% hingga 15-25%. Namun secara keseluruhan, perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari didominasi oleh kemiringan lereng 0-8% yang menjangkau hingga 14 perumahan. Sementara itu, terdapat beberapa perumahan yang berada di kemiringan lereng 15 – 25% (agak curam), yaitu Perumahan Candiwulan dan Perumahan Cendana yang diarahkan untuk dilakukan pengendalian pembatasan pengembangan kawasan perumahan.

Tabel IV.13.
Luas Perumahan Terhadap Kondisi Topografi di Lingkungan Hunian Kutasari

Topografi	Perumahan	Luas (Ha)	Arahan
Datar (0 - 8 %)	Candinata	123,78	Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebaiknya diarahkan pada wilayah dengan topografi datar-landai
	Candiwulan	135,13	
	Cendana	113,98	
	Karangaren	22,31	
	Karangcegak	105,40	
	Karangjengkol	66,83	
	Karangklesem	46,61	
	Karanglewas	32,53	
	Karangreja	137,81	

Topografi	Perumahan	Luas (Ha)	Arahan
	Kutasari	88,83	
	Limbangan	81,42	
	Meri	83,88	
	Munjul	49,79	
	Sumingkir	114,98	
Landai (8 - 15 %)	Candinata	14,43	
	Candiwulan	1,78	
	Cendana	7,24	
	Karangcegak	7,14	
	Karangjengkol	29,34	
Agak Curam (15 - 25 %)	Candiwulan	0,90	Topografi agak curam, dilakukan pengendalian pembatasan pengembangan kawasan permukiman
	Cendana	0,26	

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Kondisi topografi di Lingkungan Hunian Kaligondang sangat beragam, yaitu berada pada kemiringan lereng 0% hingga 15-25%. Namun secara keseluruhan, perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang didominasi oleh kemiringan lereng 0-8% yang menjangkau hingga 17 perumahan. Sementara itu, terdapat 11 perumahan yang berada di kemiringan lereng 15 – 25% (agak curam) yang diarahkan untuk dilakukan pengendalian pembatasan pengembangan kawasan perumahan. Hal ini dikarenakan, sebaiknya pengembangan perumahan diarahkan pada wilayah perumahan yang memiliki kondisi topografi datar hingga landai.

Tabel IV.14.
Luas Perumahan Terhadap Kondisi Topografi di Lingkungan Hunian Kaligondang

Topografi	Perumahan	Luas (Ha)	Arahan
Datar (0 - 8 %)	Arenan	50,84	Pengembangan perumahan dan kawasan permukiman sebaiknya diarahkan pada wilayah dengan topografi datar-landai
	Brecek	115,10	
	Cilapar	227,02	
	Kaligondang	244,37	
	Kalikajar	204,02	
	Kembaran Wetan	162,11	
	Lamongan	112,69	
	Penaruban	133,21	
	Penolih	390,77	
	Selakambang	201,20	
	Selanegara	158,99	
	Sempor Lor	112,93	
	Sidanegara	17,20	
	Sidareja	44,15	
	Sinduraja	200,76	
	Slinga	132,46	
	Tejasari	273,03	
Landai (8 - 15 %)	Selakambang	4,27	
	Sinduraja	24,73	
Agak Curam (15 - 25 %)	Arenan	119,40	Topografi agak curam, dilakukan pengendalian pembatasan pengembangan kawasan permukiman
	Kaligondang	37,21	
	Kalikajar	0,94	
	Kembaran Wetan	47,22	
	Pagerandong	43,85	

Topografi	Perumahan	Luas (Ha)	Arahan
	Selakambang	119,53	
	Selanegara	23,70	
	Sidanegara	128,14	
	Sidareja	119,02	
	Sinduraja	1,45	
	Slinga	121,48	

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Kondisi hidrologi di wilayah perencanaan berupa akuifer produktivitas tinggi dengan penyebaran luas, akuifer lebih dalam dengan produktif tinggi, produktivitas sedang dengan penyebaran luas, produktivitas tinggi dengan penyebaran luas, dan setempat berproduktif sedang. Kondisi hidrologi pada kajian ini erat kaitannya dengan pengendalian dan pemanfaatan perumahan pada wilayah aliran sungai, sumber mata air, dan cekungan air tanah. Sehingga, perlu adanya pembatasan pengembangan perumahan yang berada pada wilayah sekitar sumber air baku. Hal ini dikarenakan untuk dapat menjaga dan melestarikan ketersediaan sumber air baku yang ada. Pengembangan perumahan yang berada pada wilayah aliran sungai juga berpotensi timbulnya kawasan kumuh.

Kondisi hidrologi di Lingkungan Hunian Purbalingga didominasi oleh produktivitas tinggi dan penyebaran yang luas. Terdapat 13 perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga yang dilalui oleh sumber air dengan produktivitas yang tinggi dan penyebarannya yang luas. Pengembangan perumahan pada produktivitas tinggi dan penyebaran luas dapat diindikasikan memiliki potensi air tanah yang melimpah. Sehingga pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diarahkan pada lokasi dengan kondisi hidrologi ini.

Tabel IV.15.
Luas Perumahan Terhadap Kondisi Hidrologi di Lingkungan Hunian Purbalingga

Topografi	Perumahan	Luas (Ha)
Produktivitas tinggi & penyebaran luas	Bancar	76,63
	Bojong	81,90
	Jatisaba	85,09
	Kandanggampang	48,20
	Kedungmenjangan	50,78
	Kembaran Kulon	82,37
	Penambongan	105,30
	Purbalingga Kidul	60,95
	Purbalingga Kulon	21,79
	Purbalingga Lor	110,87
	Purbalingga Wetan	60,65
	Toyareja	52,10
	Wirasana	127,09

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Kondisi hidrologi di Lingkungan Hunian Kalimanah didominasi oleh produktivitas tinggi dan penyebaran yang luas. Terdapat 17 perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah yang dilalui oleh sumber air dengan produktivitas yang tinggi dan penyebarannya yang luas. Pengembangan perumahan pada produktivitas tinggi dan penyebaran luas dapat diindikasikan memiliki potensi air tanah yang melimpah. Sehingga

pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diarahkan pada lokasi dengan kondisi hidrologi ini.

Tabel IV.16.
Luas Perumahan Terhadap Kondisi Hidrologi di Lingkungan Hunian Kalimanah

Topografi	Perumahan	Luas (Ha)
Produktivitas tinggi & penyebaran luas	Babakan	125,28
	Blater	109,39
	Grecol	78,08
	Jompo	42,56
	Kalikabong	100,90
	Kalimanah Kulon	42,12
	Kalimanah Wetan	97,76
	Karangmanyar	47,89
	Karangpetir	32,10
	Karangsari	38,42
	Kedungwuluh	57,78
	Klapasawit	67,19
	Manduraga	30,03
	Mewek	66,92
	Rabak	48,51
	Selabaya	86,30
	Sidakangen	34,47

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Kondisi hidrologi di Lingkungan Hunian Padamara didominasi oleh produktivitas tinggi dan penyebaran yang luas. Terdapat 14 perumahan di Lingkungan Hunian Padamara yang dilalui oleh sumber air dengan produktivitas yang tinggi dan penyebarannya yang luas. Pengembangan perumahan pada produktivitas tinggi dan penyebaran luas dapat diindikasikan memiliki potensi air tanah yang melimpah. Sehingga pengembangan perumahan dan kawasan permukiman diarahkan pada lokasi dengan kondisi hidrologi ini.

Tabel IV.17.
Luas Perumahan Terhadap Kondisi Hidrologi di Lingkungan Hunian Padamara

Topografi	Perumahan	Luas (Ha)
Produktivitas tinggi & penyebaran luas	Bojanegara	135,86
	Dawuhan	57,37
	Gemuruh	84,97
	Kalitinggar	49,52
	Kalitinggar Kidul	31,18
	Karanggambas	73,44
	Karangjambe	66,77
	Karangpule	60,55
	Karangsentul	64,19
	Mipiran	34,53
	Padamara	69,47
	Prigi	44,55
	Purbayasa	30,99
	Sokawera	55,08

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Kondisi hidrologi di Lingkungan Hunian Bojongsari terdiri dari akuifer lebih dalam dengan produktif tinggi, produktivitas sedang dengan penyebaran luas, dan produktivitas tinggi dengan penyebaran luas. Namun secara keseluruhan, kondisi hidrologi di Lingkungan Hunian Bojongsari didominasi oleh produktivitas tinggi dengan penyebaran yang luas, sebanyak 12 perumahan. Sementara itu terdapat kondisi hidrologi dengan akuifer kecil lebih dalam yang melalui Perumahan Bumisari, Perumahan Matenggeng, dan Perumahan Pekalongan yang harus diarahkan pada pembatasan pengembangan perumahan karena dapat berpotensi mengganggu penyimpanan dan pengaliran air. Pada kondisi hidrologi tersebut, sebaiknya dilakukan pelarangan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman karena dapat berpotensi terjadinya permukiman kumuh atau karena karakteristik daerah air tanah langka tersebut biasanya sering terjadi kekurangan air bersih karena minimnya sumber mata air.

Tabel IV.18.
Luas Perumahan Terhadap Kondisi Hidrologi di Lingkungan Hunian Bojongsari

Topografi	Perumahan	Luas (Ha)
Kecil, akifer lebih dalam, produktif tinggi	Bumisari	134,37
	Metenggeng	36,67
	Pekalongan	82,04
Produktif sedang dengan penyebaran luas	Bumisari	52,41
Produktivitas tinggi & penyebaran luas	Banjaran	115,54
	Beji	40,00
	Bojongsari	133,72
	Brobot	70,50
	Galuh	34,74
	Gembong	61,62
	Kajongan	76,63
	Karangbanjar	62,68
	Metenggeng	24,97
	Pagedangan	45,95
	Patemon	63,24
	Pekalongan	35,58

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Kondisi hidrologi di Lingkungan Hunian Kutasari terdiri dari akuifer lebih dalam dengan produktif tinggi, produktivitas sedang dengan penyebaran luas, dan produktivitas tinggi dengan penyebaran luas. Namun secara keseluruhan, kondisi hidrologi di Lingkungan Hunian Kutasari didominasi oleh produktivitas tinggi dengan penyebaran yang luas, sebanyak 12 perumahan. Sementara itu terdapat kondisi hidrologi dengan akuifer kecil lebih dalam yang melalui Perumahan Candinata, Perumahan Candiwulan, Perumahan Cendana, Perumahan Karangcegak, dan Perumahan Karangjengkol yang harus diarahkan pada pembatasan pengembangan perumahan karena dapat berpotensi mengganggu penyimpanan dan pengaliran air. Pada kondisi hidrologi tersebut, sebaiknya dilakukan pelarangan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman karena dapat berpotensi terjadinya permukiman kumuh atau karena karakteristik daerah air tanah langka tersebut biasanya sering terjadi kekurangan air bersih karena minimnya sumber mata air.

Tabel IV.19.
Luas Perumahan Terhadap Kondisi Hidrologi di Lingkungan Hunian Kutasari

Topografi	Perumahan	Luas (Ha)
Kecil, akifer lebih dalam, produktif tinggi	Candinata	98,03
	Candiwulan	44,93
	Cendana	43,31
	Karangcegak	57,71
	Karangjengkol	33,36
Produktif sedang dengan penyebaran luas	Candinata	40,17
	Candiwulan	12,66
	Cendana	52,10
	Karangcegak	11,65
	Karangjengkol	62,81
Produktivitas tinggi & penyebaran luas	Candiwulan	80,21
	Cendana	26,07
	Karangaren	22,31
	Karangcegak	43,18
	Karangklesem	46,61
	Karanglewas	32,53
	Karangreja	137,81
	Kutasari	88,83
	Limbangan	81,42
	Meri	83,88
	Munjul	49,79
	Sumingkir	114,98

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Kondisi hidrologi di Lingkungan Hunian Kaligondang terdiri dari akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas, produktivitas tinggi dengan penyebaran luas, serta setempat berproduktif sedang. Namun secara keseluruhan, kondisi hidrologi di Lingkungan Hunian Kaligondang didominasi oleh produktivitas tinggi dengan penyebaran yang luas, sebanyak 16 perumahan. Sementara itu terdapat kondisi hidrologi setempat berproduktif sedang yang melalui Perumahan Penolih, Perumahan Selakambang, Perumahan Sidareja, dan Perumahan Sinduraja. Dapat disimpulkan bahwa kondisi hidrologi di Lingkungan Hunian Kaligondang sangat baik untuk diarahkan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, karena memiliki potensi air yang melimpah dengan persebaran yang luas.

Tabel IV.20.
Luas Perumahan Terhadap Kondisi Hidrologi di Lingkungan Hunian Kaligondang

Topografi	Perumahan	Luas (Ha)
Akuifer dg prodtvs sdg dg penybr luas	Arenan	117,68
	Kaligondang	5,78
	Pagerandong	43,85
	Selakambang	73,91
	Sidanegara	106,26
	Sidareja	93,93
	Slinga	53,48
Produktivitas tinggi & penyebaran luas	Arenan	5,41

Topografi	Perumahan	Luas (Ha)
	Brecek	30,18
	Cilapar	50,03
	Kaligondang	154,40
	Kalikajar	110,51
	Kembaran Wetan	123,66
	Lamongan	45,86
	Penaruban	61,37
	Penolih	115,71
	Selakambang	47,48
	Selanegara	117,55
	Sempor Lor	24,14
	Sidanegara	21,88
	Sinduraja	5,22
	Slinga	92,27
	Tejasari	47,62
Setempat berproduktif sedang	Penolih	33,04
	Selakambang	69,66
	Sidareja	30,25
	Sinduraja	100,80

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Potensi rawan bencana yang ada di wilayah perencanaan meliputi rawan bencana letusan gunung api, gempa bumi, gerakan tanah, angin topan, dan banjir. Perumahan yang berada di bantaran sungai berpotensi rawan bencana banjir, sehingga perlu dilakukan normalisasi sungai dan pengendalian pemanfaatan sempadan sungai. Sementara itu, terdapat juga permukiman di kawasan rawan bencana gunung berapi, yaitu permukiman di Lingkungan Hunian Padamara, Lingkungan Hunian Bojongsari, dan Lingkungan Hunian Kutasari. Sehingga, pada kawasan permukiman tersebut sebaiknya dilengkapi dengan jalur evakuasi dan tempat evakuasi.

Tabel IV.21.
Luas Perumahan Terhadap Potensi Rawan Bencana di Lingkungan Hunian Purbalingga

Rawan Bencana	Perumahan	Luas (Ha)
KRB Gempabumi Menengah, Gerakan Tanah Sangat Rendah dan Angin Topan	Bojong	4,44
KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	Kembaran Kulon	7,70
	Wirasana	2,01
KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Sangat Rendah dan Angin Topan	Bancar	76,63
	Bojong	77,45
	Jatisaba	85,09
	Kembaran Kulon	74,67
	Penambongan	105,30
	Purbalingga Kidul	60,95
	Purbalingga Lor	110,87
	Purbalingga Wetan	60,65
	Wirasana	125,08
KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Sangat Rendah, Angin Topan dan Banjir	Kandanggampang	48,20
	Kedungmenjangan	50,78
	Purbalingga Kulon	21,79
	Toyareja	52,10

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Tabel IV.22.
Luas Perumahan Terhadap Potensi Rawan Bencana di Lingkungan Hunian Kalimanah

Rawan Bencana	Perumahan	Luas (Ha)
KRB Gempabumi Menengah, Gerakan Tanah Sangat Rendah dan Angin Topan	Mewek	3,86
KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan	Blater	0,05
	Jompo	0,01
KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Sangat Rendah dan Angin Topan	Babakan	125,28
	Blater	109,34
	Grecol	78,08
	Jompo	42,55
	Kalikabong	100,90
	Kalimanah Kulon	42,12
	Kalimanah Wetan	97,76
	Karangmanyar	47,89
	Karangpetir	32,10
	Karangsari	38,42
	Kedungwuluh	57,78
	Klapasawit	67,19
	Manduraga	30,03
	Mewek	63,06
	Rabak	48,51
	Selabaya	86,30
	Sidakangen	34,47

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Tabel IV.23.
Luas Perumahan Terhadap Potensi Rawan Bencana di Lingkungan Hunian Padamara

Rawan Bencana	Perumahan	Luas (Ha)
KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	Dawuhan	54,01
	Gemuruh	47,08
	Kalitinggar	47,53
	Kalitinggar Kidul	27,73
	Karanggambas	58,86
	Mipiran	34,53
	Padamara	12,59
	Prigi	21,41
	Purbayasa	27,79
KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Sangat Rendah dan Angin Topan	Bojanegara	135,86
	Dawuhan	3,36
	Gemuruh	37,89
	Kalitinggar	0,00
	Kalitinggar Kidul	3,46
	Karangjambe	52,23
	Karangpule	60,55
	Karangsentul	64,19
	Padamara	38,44
	Sokawera	55,08

Rawan Bencana	Perumahan	Luas (Ha)
KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Tinggi dan Angin Topan	Kalitinggar	2,00
KRB I Letusan Gunung Api, Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	Karanggambas	14,58
	Padamara	0,62
	Prigi	22,69
	Purbayasa	2,99
KRB I Letusan Gunung Api, Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Sangat Rendah dan Angin Topan	Karangjambe	14,54
	Padamara	17,82
	Prigi	0,45
	Purbayasa	0,21

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Tabel IV.24.
Luas Perumahan Terhadap Potensi Rawan Bencana di Lingkungan Hunian Bojongsari

Rawan Bencana	Perumahan	Luas (Ha)
KRB Gempabumi Menengah, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan	Bumisari	8,82
	Pekalongan	12,72
KRB Gempabumi Menengah, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	Beji	0,06
	Bumisari	112,47
	Metenggeng	61,64
	Pagedangan	36,11
	Pekalongan	98,13
KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan	Banjaran	71,68
	Patemon	38,68
KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	Banjaran	43,86
	Beji	39,93
	Bojongsari	124,55
	Brobot	69,68
	Galuh	26,41
	Gembong	61,62
	Kajongan	76,63
	Karangbanjar	62,68
	Pagedangan	0,73
	Patemon	8,18
KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Sangat Rendah dan Angin Topan	Brobot	0,82
	Galuh	8,32
KRB Gempabumi Tinggi, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan	Bumisari	33,70
KRB Gempabumi Tinggi, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	Bumisari	17,74
KRB I Letusan Gunung Api, Gempabumi Menengah, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan	Pekalongan	1,72
KRB I Letusan Gunung Api, Gempabumi Menengah, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	Bojongsari	0,62
	Bumisari	8,52
	Pagedangan	9,11
	Pekalongan	5,05
KRB I Letusan Gunung Api, Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan	Patemon	14,59
KRB I Letusan Gunung Api, Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	Bojongsari	8,55
	Patemon	1,80

Rawan Bencana	Perumahan	Luas (Ha)
KRB I Letusan Gunung Api, Gempabumi Tinggi, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan	Bumisari	5,53

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Tabel IV.25.
Luas Perumahan Terhadap Potensi Rawan Bencana di Lingkungan Hunian Kutasari

Rawan Bencana	Perumahan	Luas (Ha)
KRB Gempabumi Menengah, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan	Candinata	12,08
	Cendana	2,20
	Karangjengkol	21,62
	Limbangan	2,27
KRB Gempabumi Menengah, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	Candinata	87,19
	Candiwulan	125,26
	Cendana	105,56
	Karangcegak	101,45
	Karangjengkol	12,83
	Karangreja	25,97
	Limbangan	17,90
	Meri	56,72
	Sumingkir	80,70
KRB Gempabumi Menengah, Gerakan Tanah Tinggi dan Angin Topan	Cendana	0,18
KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan	Karangaren	1,64
	Limbangan	1,66
KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	Karangaren	17,53
	Karangklesem	38,66
	Karanglewas	32,53
	Karangreja	96,65
	Limbangan	49,38
	Meri	27,16
	Sumingkir	34,28
KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Rendah, Angin Topan dan Banjir	Kutasari	88,83
	Munjul	49,79
KRB Gempabumi Tinggi, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan	Candinata	25,84
	Candiwulan	0,98
	Cendana	6,67
	Karangcegak	10,71
	Karangjengkol	39,41
KRB Gempabumi Tinggi, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	Candinata	13,09
	Cendana	1,00
	Karangcegak	0,38
	Karangjengkol	20,45
KRB I Letusan Gunung Api, Gempabumi Menengah, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan	Candiwulan	1,06
	Cendana	2,79
	Limbangan	3,88
KRB I Letusan Gunung Api, Gempabumi Menengah, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	Candiwulan	8,81
	Cendana	2,24
	Limbangan	0,05
	Karangaren	0,39

Rawan Bencana	Perumahan	Luas (Ha)
KRB I Letusan Gunung Api, Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan	Karangreja	3,01
	Limbangan	5,75
KRB I Letusan Gunung Api, Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	Karangaren	2,76
	Karangklesem	7,96
	Karangreja	12,18
	Limbangan	0,53
KRB I Letusan Gunung Api, Gempabumi Tinggi, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan	Candiwulan	1,70
	Cendana	0,82
	Karangjengkol	1,86

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Tabel IV.26.
Luas Perumahan Terhadap Potensi Rawan Bencana di Lingkungan Hunian Kaligondang

Rawan Bencana	Perumahan	Luas (Ha)
KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Menengah dan Angin Topan	Kembaran Wetan	44,07
	Pagerandong	32,91
	Selakambang	158,86
	Sidanegara	124,11
	Sinduraja	57,06
	Slinga	85,14
KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Menengah, Angin Topan dan Banjir	Arenan	103,07
	Kaligondang	48,39
	Penolih	16,70
	Selanegara	18,90
	Sidareja	90,52
KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Rendah dan Angin Topan	Brecek	12,96
	Kalikajar	16,70
	Kembaran Wetan	67,98
	Selakambang	32,18
	Sempor Lor	0,03
	Sidanegara	4,03
	Sinduraja	48,96
	Slinga	58,23
	Tejasari	2,43
KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Rendah, Angin Topan dan Banjir	Arenan	20,02
	Cilapar	43,67
	Kaligondang	111,79
	Penolih	81,89
	Selanegara	98,66
	Sidareja	4,03
KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Sangat Rendah dan Angin Topan	Brecek	17,21
	Kalikajar	93,81
	Kembaran Wetan	11,61
	Lamongan	45,86
	Penaruban	61,37
	Sempor Lor	24,11
	Slinga	2,37
	Tejasari	45,19
	Cilapar	6,36

Rawan Bencana	Perumahan	Luas (Ha)
KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Sangat Rendah, Angin Topan dan Banjir	Penolih	50,16
KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Tinggi dan Angin Topan	Pagerandong	10,95
KRB Gempabumi Rendah, Gerakan Tanah Tinggi, Angin Topan dan Banjir	Sidareja	29,63

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Kondisi penggunaan lahan dilakukan untuk mengendalikan dan memanfaatkan perumahan melalui pendekatan isu tata guna lahan yang dominan. Dalam analisis ini, dihitung simpangan antara rencana pola ruang dengan penggunaan lahan eksisting yang dilakukan dengan cara overlay peta penggunaan lahan dengan peta rencana pola ruang.

Tabel IV.27.
Ketidaksesuaian Penggunaan Lahan dengan Rencana Pola Ruang

LH	Pola Ruang	Simpangan	Luas (Ha)
Bojongsari	Hutan Lindung	-	1.413,90
	Industri	-	3,99
	Perkebunan	-	555,18
	Permukiman	-	887,83
	Sawah Lahan Basah	Permukiman	0,26
	Sawah Lahan Kering	Permukiman	0,01
	Sempadan Mata Air	Permukiman	21,55
	Sempadan Sungai	Permukiman	3,97
	Sungai	-	37,20
Kaligondang	Industri	-	18,58
	Perkebunan	-	1.533,16
	Permukiman	-	1.790,59
	Sawah Lahan Basah	-	1.202,77
	Sawah Lahan Kering	-	256,25
	Sempadan Mata Air	Permukiman	13,42
	Sempadan Sungai	Permukiman	33,15
	Sungai	-	156,88
Kalimanah	Industri	-	70,57
	Permukiman	-	847,94
	Sawah Lahan Basah	-	1.137,41
	Sawah Lahan Kering	-	181,21
Kutasari	Perkebunan	-	1.479,13
	Permukiman	-	1.033,21
	Sawah Lahan Basah	-	934,45
	Sawah Lahan Kering	-	172,49
	Sempadan Mata Air	Permukiman	9,47
	Hutan Lindung	-	72,00
	Hutan Produksi	-	13,98
	Hutan Produksi Terbatas	-	141,08
Padamara	Sawah Lahan Basah	-	1.218,25
	Sawah Lahan Kering	-	24,02
	Perkebunan	-	2.709,63

LH	Pola Ruang	Simpangan	Luas (Ha)
	Permukiman	-	945,61
	Sawah Lahan Basah	-	1,61
Purbalingga	Sawah Lahan Basah	-	497,53
	Sawah Lahan Kering	-	14,55
	Sempadan Sungai	Permukiman	5,40
	Sungai	-	32,19
	Hutan Lindung	-	2.979,17
	Hutan Produksi Terbatas	-	927,86
	Perkebunan	-	4.091,25

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Secara ringkas, ketidaksesuaian rencana pola ruang wilayah diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel IV.28.
Ketidaksesuaian Pola Ruang

Pola Ruang	Simpangan	Luas (Ha)
Sawah Lahan Basah	Permukiman	0,26
Sawah Lahan Kering	Permukiman	0,01
Sempadan Mata Air	Permukiman	44,44
Sempadan Sungai	Permukiman	42,52
Jumlah		87,23

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas, diketahui terdapat permasalahan simpangan penggunaan lahan berupa adanya permukiman di lahan sawah, sempadan mata air, dan sempadan sungai. Kententuan untuk situasi tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031. Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan sungai diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:

a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH);
b. diperbolehkan pemanfaatan untuk jembatan dan dermaga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
c. diperbolehkan pendirian bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan kegiatan wisata;
d. diperbolehkan kegiatan pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pengamanan;
e. diperbolehkan kegiatan pemasangan jaringan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
f. diperbolehkan terbatas untuk permukiman dan kegiatan eksiting lainnya yang sudah memiliki izin pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan dan tidak diperbolehkan untuk pembangunan baru atau perluasan;
g. diperbolehkan bersyarat aktivitas wisata alam yang tidak mengganggu kualitas air sungai dan fungsi kawasan; dan
h. tidak diperbolehkan semua kegiatan yang mengancam fungsi kawasan dan menurunkan kualitas sungai.

Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan mata air diwujudkan melalui ketentuan umum peraturan zonasi sebagai berikut:

a. radius mata air adalah 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air dan mengelilingi mata air;
b. diperbolehkan kegiatan rehabilitasi vegetasi di sekitar radius mata air;
c. diperbolehkan kegiatan preservasi dan konservasi seperti reboisasi lahan;
d. diperbolehkan untuk permukiman dan kegiatan lainnya dengan batasan permukiman dan kegiatan tersebut sudah memiliki izin pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan;
e. diperbolehkan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk pariwisata maupun kegiatan lainnya dengan syarat tidak mengganggu keberlanjutan mata air dan mengurangi kualitas tata air;
f. diperbolehkan bersyarat melakukan pemanfaatan air dari mata air;
g. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budidaya pertanian tanaman semusim dan/atau tanaman tahunan yang produksinya dilakukan dengan cara penebangan pohon; dan
h. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan kerusakan sumber mata air.

Berdasarkan uraian di atas didapatkan kesimpulam bahwa permukiman eksisting yang sudah ada saat RTRW terbaru ditetapkan masih dapat dipertahankan.

4.3.2. Analisis Daya Tampung Perumahan

Daya tampung perumahan sangat berkaitan dengan alokasi penggunaan lahan perumahan yaitu dengan mempertimbangkan kondisi eksisting persebaran kawasan perumahan dan alokasi rencana perumahan dalam rencana polar uang wilayah. Daya tampung ini untuk melihat jumlah kebutuhan ruang untuk perumahan. Asumsi yang digunakan sebagai berikut:

a. Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pembangunan perumahan wajib mewujudkan perumahan dengan hunian berimbang. Oleh karena itu perumahan harus dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah. Berdasarkan ketentuan hunian berimbang maka perkiraan jumlah dan tipe rumah dilakukan dengan komposisi 3 : 2 : 1 (kavling sederhana : menengah : mewah).
b. Luas kavling untuk rumah sederhana 60 m^2, luas kavling untuk rumah menengah 90 m^2, dan luas kavling untuk rumah mewah 150 m^2.
c. Rata – rata tiap rumah diperkirakan dihuni oleh 3 jiwa.
d. Kebutuhan untuk sarana pendukung perumahan sebesar 20% dari luas perumahan, untuk prasarana jalan sebesar 10% dari luas perumahan, dan untuk ruang terbuka hijau sebesar 10% dari luas perumahan.

Berikut ini adalah perhitungan analisis daya tampung perumahan pada setiap lingkungan hunian di wilayah perencanaan.

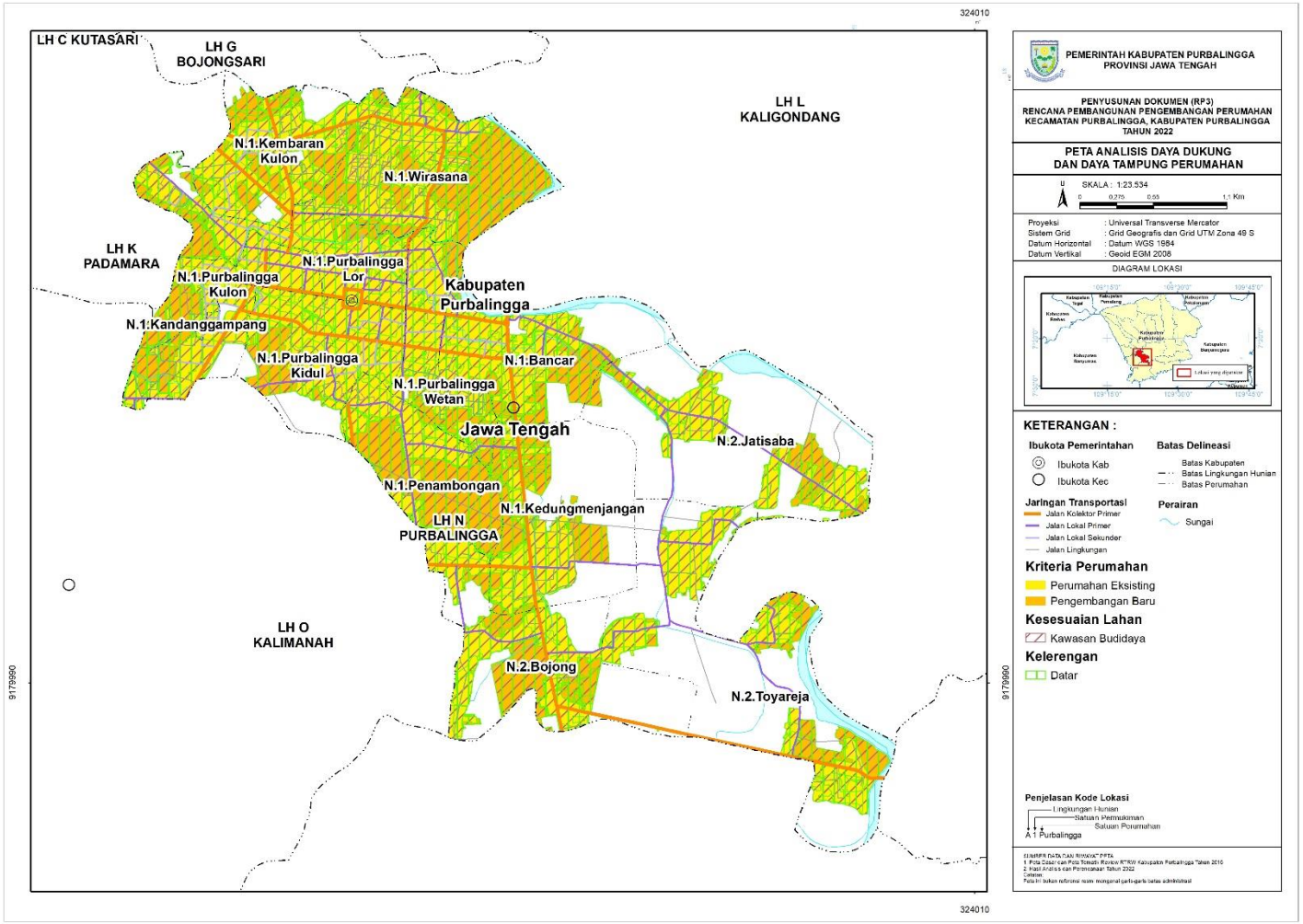
4.3.2.1. Lingkungan Hunian Purbalingga

Berdasarkan hasil analisis daya tampung lahan perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga, diketahui luas alokasi rencana perumahan dapat menampung 16.200 unit rumah sederhana, 7.200 unit rumah menengah, dan 2.160 unit rumah mewah. Luas yang tersedia dapat untuk menampung penduduk maksimum sebesar 76.681 jiwa.

Tabel IV.29.
Daya Tampung Perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga

No	Perumahan	Rencana Perumahan		Kebutuhan PSU	Rasio Hunian Berimbang			Jumlah Rumah			Daya Tampung
		Ha	m2		Rumah Sederhana	Rumah Sedang	Rumah Mewah	Rumah Sederhana	Rumah Sedang	Rumah Mewah	
1	Bojong	30,89	308.928,01	123.571,20	92.678,40	61.785,60	30.892,80	1.545	687	206	7.311
2	Toyareja	18,69	186.935,67	74.774,27	56.080,70	37.387,13	18.693,57	935	415	125	4.424
3	Kedung Menjangan	23,76	237.641,75	95.056,70	71.292,53	47.528,35	23.764,18	1.188	528	158	5.624
4	Jatisaba	20,10	201.000,69	80.400,28	60.300,21	40.200,14	20.100,07	1.005	447	134	4.757
5	Bancar	22,18	221.843,26	88.737,30	66.552,98	44.368,65	22.184,33	1.109	493	148	5.250
6	Purbalingga Wetan	14,92	149.158,62	59.663,45	44.747,59	29.831,72	14.915,86	746	331	99	3.530
7	Penambongan	58,42	584.200,00	233.680,00	175.260,00	116.840,00	58.420,00	2.921	1.298	389	13.826
8	Purbalingga Kidul	14,36	143.559,23	57.423,69	43.067,77	28.711,85	14.355,92	718	319	96	3.398
9	Kandang Gampang	20,67	206.688,31	82.675,32	62.006,49	41.337,66	20.668,83	1.033	459	138	4.892
10	Purbalingga Kulon	6,12	61.225,90	24.490,36	18.367,77	12.245,18	6.122,59	306	136	41	1.449
11	Purbalingga Lor	9,94	99.408,80	39.763,52	29.822,64	19.881,76	9.940,88	497	221	66	2.353
12	Kembaran Kulon	24,22	242.228,40	96.891,36	72.668,52	48.445,68	24.222,84	1.211	538	161	5.733
13	Wirasana	59,72	597.211,13	238.884,45	179.163,34	119.442,23	59.721,11	2.986	1.327	398	14.134
Jumlah		324,00	3.240.029,76	1.296.011,90	972.008,93	648.005,95	324.002,98	16.200	7.200	2.160	76.681

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022



Gambar 4.9.
Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga

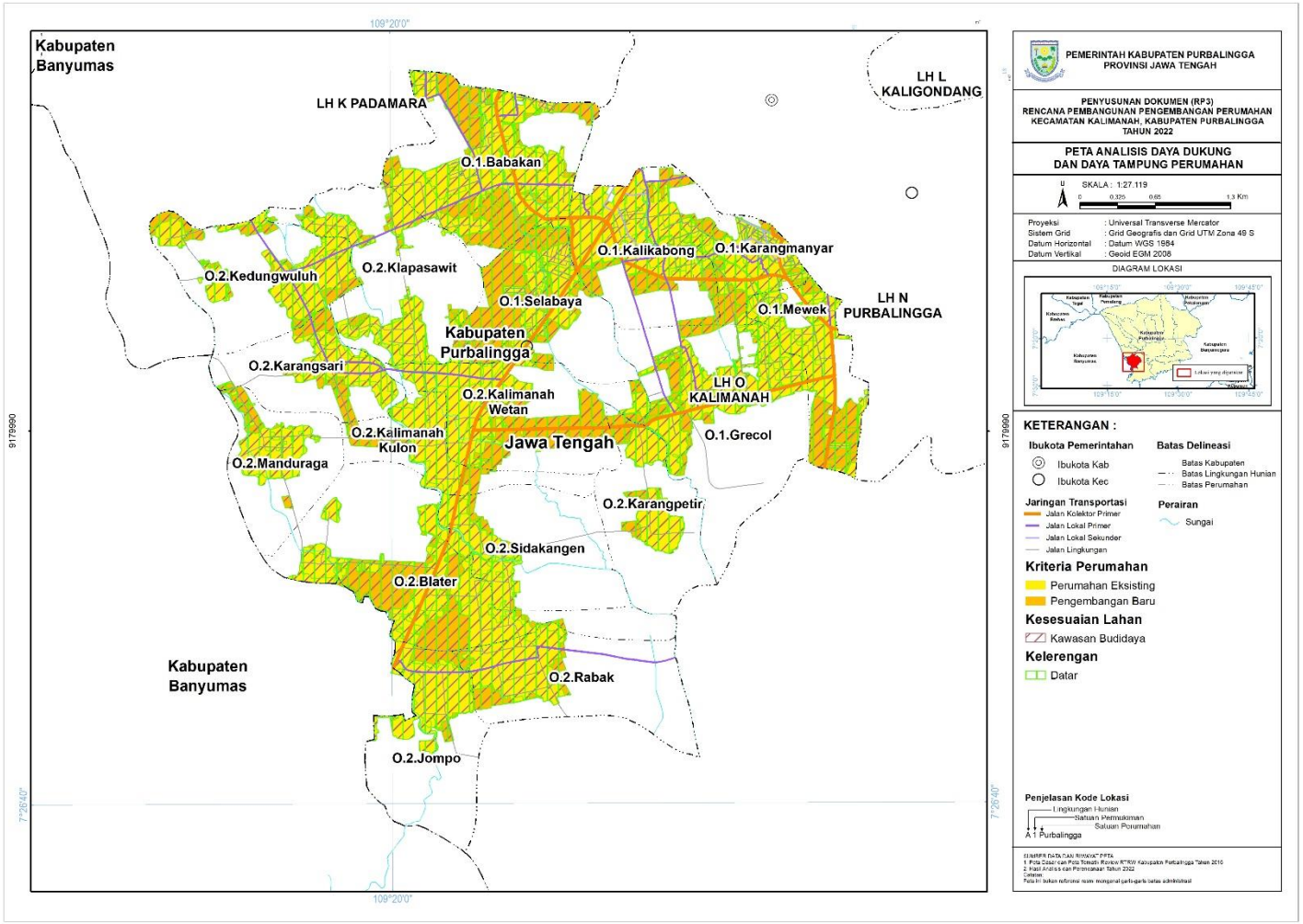
4.3.2.2. Lingkungan Hunian Kalimanah

Berdasarkan hasil analisis daya tampung lahan perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah, diketahui luas alokasi rencana perumahan dapat menampung 16.894 unit rumah sederhana, 7.509 unit rumah menengah, dan 2.253 unit rumah mewah. Luas yang tersedia dapat untuk menampung penduduk maksimum sebesar 79.967 jiwa.

Tabel IV.30.
Daya Tampung Perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah

No	Perumahan	Rencana Perumahan		Kebutuhan PSU	Rasio Hunian Berimbang			Jumlah Rumah			Daya Tampung
		Ha	m2		Rumah Sederhana	Rumah Sedang	Rumah Mewah	Rumah Sederhana	Rumah Sedang	Rumah Mewah	
1	Jompo	6,20	62.017,17	24.806,87	18.605,15	12.403,43	6.201,72	310	138	41	1.468
2	Rabak	9,62	96.179,98	38.471,99	28.853,99	19.236,00	9.618,00	481	214	64	2.276
3	Blater	44,49	444.891,00	177.956,40	133.467,30	88.978,20	44.489,10	2.224	989	297	10.529
4	Sidakangen	4,15	41.481,82	16.592,73	12.444,55	8.296,36	4.148,18	207	92	28	982
5	Karangpetir	8,80	87.954,01	35.181,60	26.386,20	17.590,80	8.795,40	440	195	59	2.082
6	Grecol	16,39	163.873,14	65.549,26	49.161,94	32.774,63	16.387,31	819	364	109	3.878
7	Mewek	24,01	240.148,56	96.059,43	72.044,57	48.029,71	24.014,86	1.201	534	160	5.684
8	Karangmanyar	11,66	116.562,42	46.624,97	34.968,73	23.312,48	11.656,24	583	259	78	2.759
9	Kalikabong	23,66	236.560,32	94.624,13	70.968,10	47.312,06	23.656,03	1.183	526	158	5.599
10	Selabaya	48,11	481.139,87	192.455,95	144.341,96	96.227,97	48.113,99	2.406	1.069	321	11.387
11	Kalimanah Wetan	42,89	428.853,80	171.541,52	128.656,14	85.770,76	42.885,38	2.144	953	286	10.150
12	Kalimanah Kulon	10,88	108.804,40	43.521,76	32.641,32	21.760,88	10.880,44	544	242	73	2.575
13	Manduraga	6,38	63.785,13	25.514,05	19.135,54	12.757,03	6.378,51	319	142	43	1.510
14	Karangsari	11,11	111.128,65	44.451,46	33.338,60	22.225,73	11.112,87	556	247	74	2.630
15	Kedungwuluh	14,04	140.437,80	56.175,12	42.131,34	28.087,56	14.043,78	702	312	94	3.324
16	Klapasawit	9,91	99.064,28	39.625,71	29.719,28	19.812,86	9.906,43	495	220	66	2.345
17	Babakan	45,60	455.990,21	182.396,08	136.797,06	91.198,04	45.599,02	2.280	1.013	304	10.792
Jumlah		337,89	3.378.872,58	1.351.549,03	1.013.661,77	675.774,52	337.887,26	16.894	7.509	2.253	79.967

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022



Gambar 4.10.
Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah

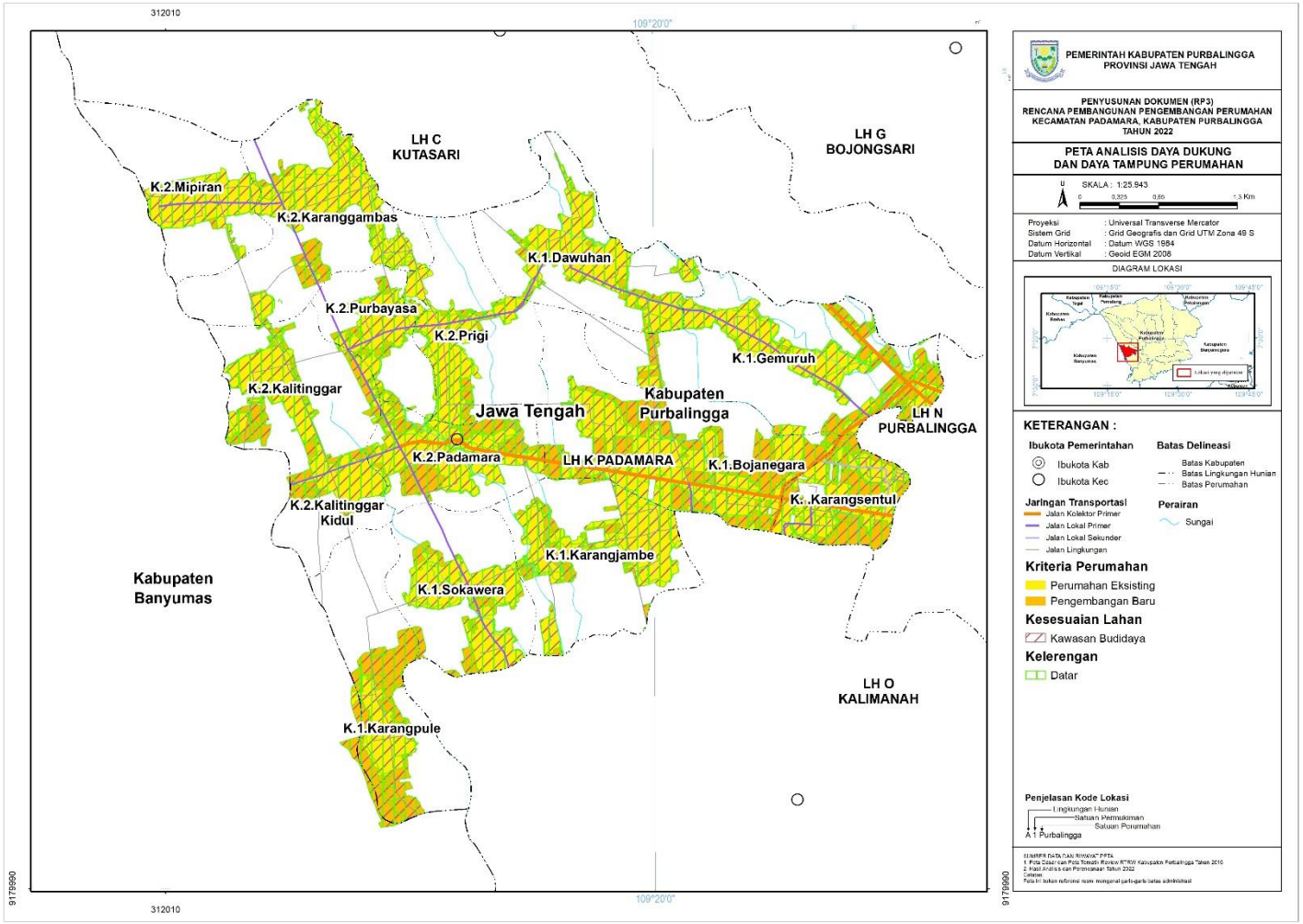
4.3.2.3. Lingkungan Hunian Padamara

Berdasarkan hasil analisis daya tampung lahan perumahan di Lingkungan Hunian Padamara, diketahui luas alokasi rencana perumahan dapat menampung 12.818 unit rumah sederhana, 5.697 unit rumah menengah, dan 1.709 unit rumah mewah. Luas yang tersedia dapat untuk menampung penduduk maksimum sebesar 60.671 jiwa.

Tabel IV.31.
Daya Tampung Perumahan di Lingkungan Hunian Padamara

No	Perumahan	Rencana Perumahan		Kebutuhan PSU	Rasio Hunian Berimbang			Jumlah Rumah			Daya Tampung
		Ha	m2		Rumah Sederhana	Rumah Sedang	Rumah Mewah	Rumah Sederhana	Rumah Sedang	Rumah Mewah	
1	Karangpule	40,91	409.121,79	163.648,72	122.736,54	81.824,36	40.912,18	2.046	909	273	9.683
2	Kalitinggar	17,18	171.848,86	68.739,54	51.554,66	34.369,77	17.184,89	859	382	115	4.067
3	Sokawera	10,49	104.942,06	41.976,83	31.482,62	20.988,41	10.494,21	525	233	70	2.484
4	Padamara	23,25	232.506,11	93.002,44	69.751,83	46.501,22	23.250,61	1.163	517	155	5.503
5	Karangjambe	12,40	124.004,95	49.601,98	37.201,48	24.800,99	12.400,49	620	276	83	2.935
6	Bojanegara	55,90	559.005,67	223.602,27	167.701,70	111.801,13	55.900,57	2.795	1.242	373	13.230
7	Karangsentul	24,86	248.607,11	99.442,84	74.582,13	49.721,42	24.860,71	1.243	552	166	5.884
8	Gemuruh	32,86	328.628,60	131.451,44	98.588,58	65.725,72	32.862,86	1.643	730	219	7.778
9	Dawuhan	6,54	65.448,51	26.179,40	19.634,55	13.089,70	6.544,85	327	145	44	1.549
10	Prigi	5,88	58.773,39	23.509,36	17.632,02	11.754,68	5.877,34	294	131	39	1.391
11	Purbayasa	6,23	62.341,96	24.936,78	18.702,59	12.468,39	6.234,20	312	139	42	1.475
12	Karanggambas	10,00	100.029,64	40.011,86	30.008,89	20.005,93	10.002,96	500	222	67	2.367
13	Mipiran	1,04	10.376,76	4.150,70	3.113,03	2.075,35	1.037,68	52	23	7	246
14	Kalitinggar Kidul	8,79	87.918,50	35.167,40	26.375,55	17.583,70	8.791,85	440	195	59	2.081
Jumlah		256,36	2.563.553,91	1.025.421,57	769.066,17	512.710,78	256.355,39	12.818	5.697	1.709	60.671

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022



Gambar 4.11.
Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Perumahan di Lingkungan Hunian Padamara

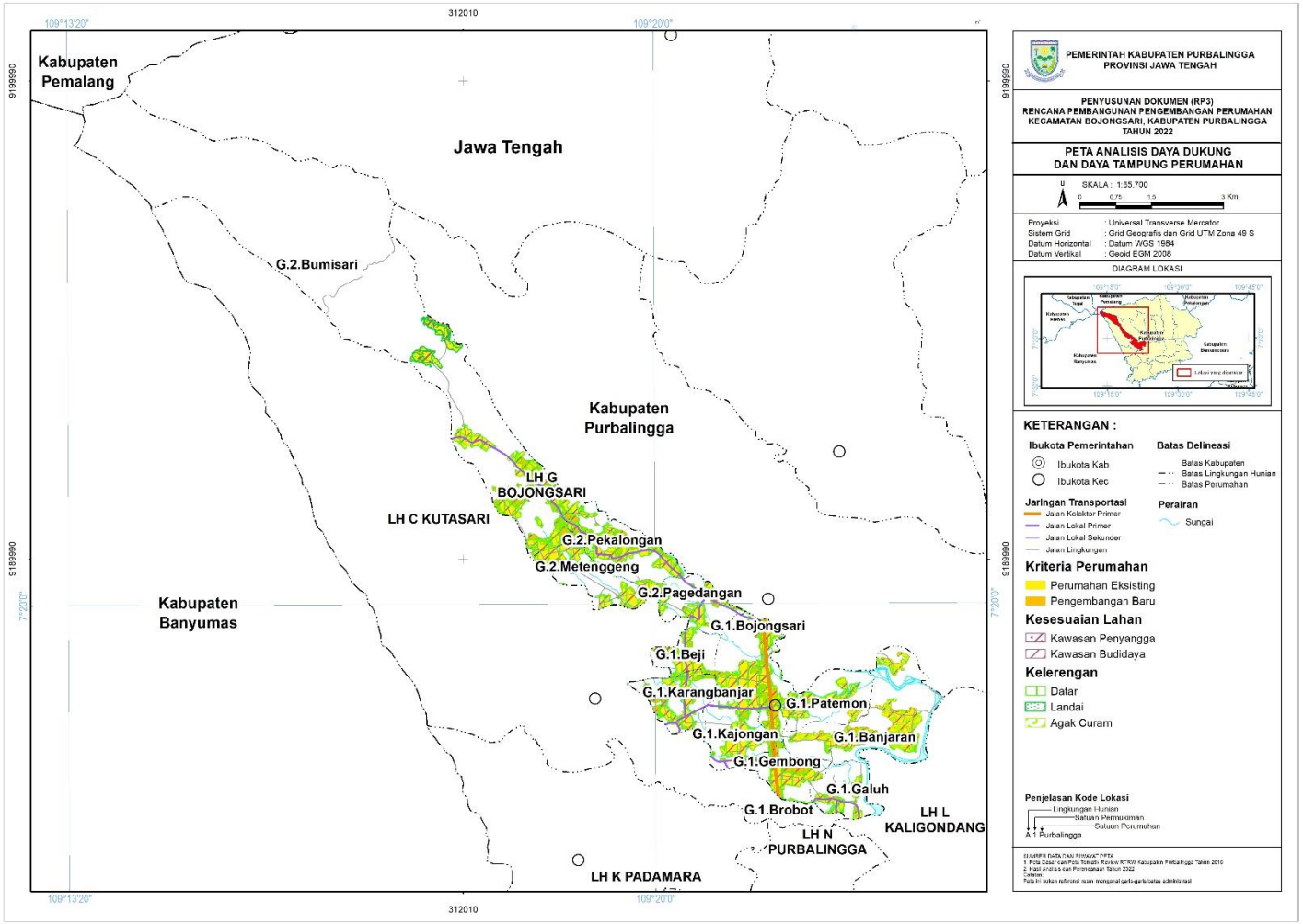
4.3.2.4. Lingkungan Hunian Bojongsari

Berdasarkan hasil analisis daya tampung lahan perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari, diketahui luas alokasi rencana perumahan dapat menampung 11.711 unit rumah sederhana, 5.205 unit rumah menengah, dan 1.561 unit rumah mewah. Luas yang tersedia dapat untuk menampung penduduk maksimum sebesar 55.432 jiwa.

Tabel IV.32.
Daya Tampung Perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari

No	Perumahan	Rencana Perumahan		Kebutuhan PSU	Rasio Hunian Berimbang			Jumlah Rumah			Daya Tampung
		Ha	m2		Rumah Sederhana	Rumah Sedang	Rumah Mewah	Rumah Sederhana	Rumah Sedang	Rumah Mewah	
1	Brobot	29,86	298.576,04	119.430,42	89.572,81	59.715,21	29.857,60	1.493	664	199	7.066
2	Gembong	24,71	247.068,73	98.827,49	74.120,62	49.413,75	24.706,87	1.235	549	165	5.847
3	Galuh	7,28	72.822,00	29.128,80	21.846,60	14.564,40	7.282,20	364	162	49	1.723
4	Banjaran	7,71	77.053,24	30.821,30	23.115,97	15.410,65	7.705,32	385	171	51	1.824
5	Patemon	5,49	54.925,14	21.970,06	16.477,54	10.985,03	5.492,51	275	122	37	1.300
6	Bojongsari	32,82	328.228,21	131.291,28	98.468,46	65.645,64	32.822,82	1.641	729	219	7.768
7	Kajongan	19,41	194.135,11	77.654,05	58.240,53	38.827,02	19.413,51	971	431	129	4.595
8	Karangbanjar	16,13	161.318,70	64.527,48	48.395,61	32.263,74	16.131,87	807	358	108	3.818
9	Beji	8,06	80.574,62	32.229,85	24.172,39	16.114,92	8.057,46	403	179	54	1.907
10	Pagedangan	6,30	63.027,94	25.211,18	18.908,38	12.605,59	6.302,79	315	140	42	1.492
11	Pekalongan	26,03	260.280,37	104.112,15	78.084,11	52.056,07	26.028,04	1.301	578	174	6.160
12	Matenggeng	6,49	64.859,41	25.943,76	19.457,82	12.971,88	6.485,94	324	144	43	1.535
13	Bumisari	43,93	439.302,85	175.721,14	131.790,85	87.860,57	43.930,28	2.197	976	293	10.397
Jumlah		234,22	2.342.172,38	936.868,95	702.651,72	468.434,48	234.217,24	11.711	5.205	1.561	55.431

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022



Gambar 4.12.
Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari

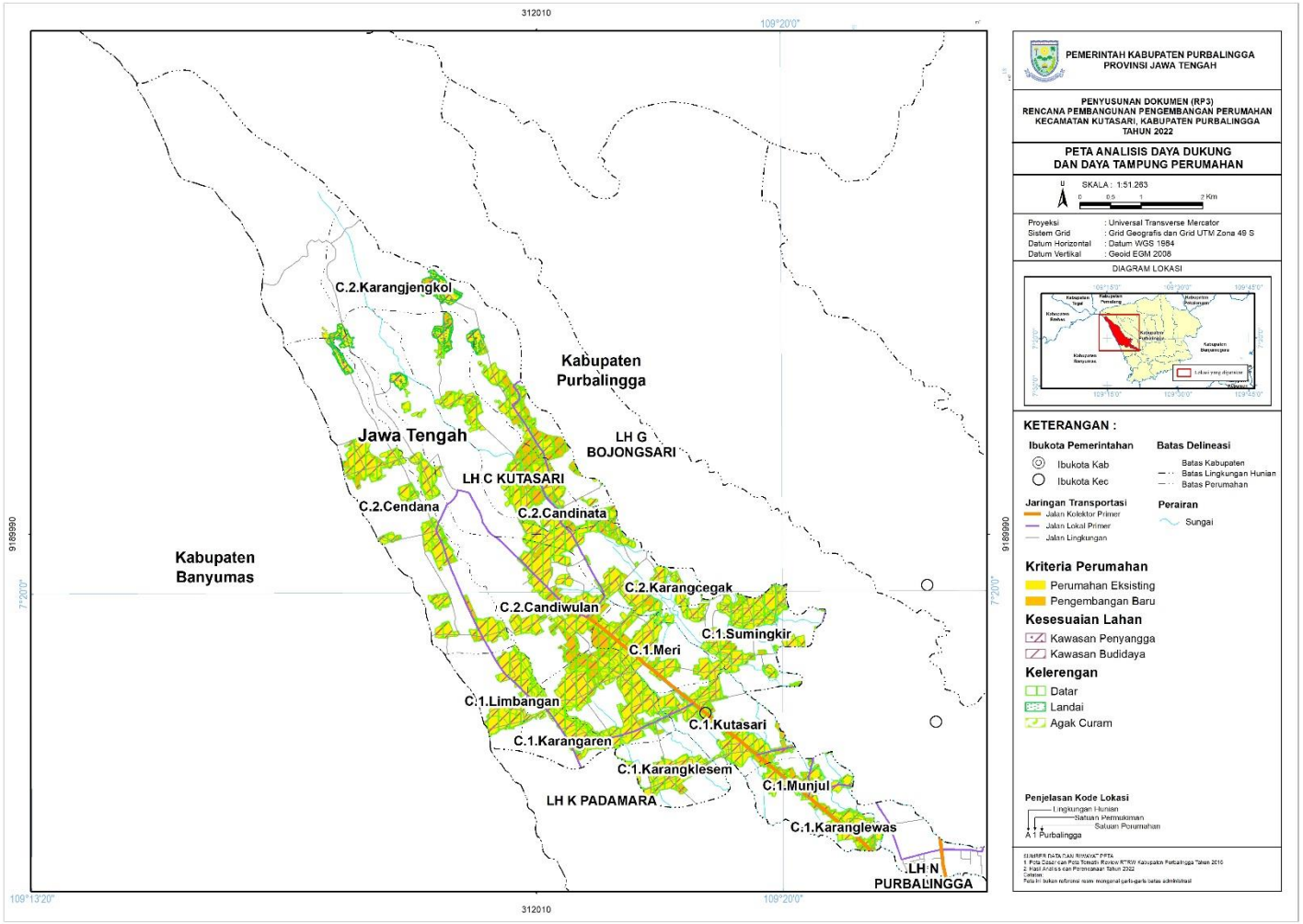
4.3.2.5. Lingkungan Hunian Kutasari

Berdasarkan hasil analisis daya tampung lahan perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari, diketahui luas alokasi rencana perumahan dapat menampung 12.641 unit rumah sederhana, 5.618 unit rumah menengah, dan 1.685 unit rumah mewah. Luas yang tersedia dapat untuk menampung penduduk maksimum sebesar 59.833 jiwa.

Tabel IV.33.
Daya Tampung Perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari

No	Perumahan	Rencana Perumahan		Kebutuhan PSU	Rasio Hunian Berimbang			Jumlah Rumah			Daya Tampung
		Ha	m2		Rumah Sederhana	Rumah Sedang	Rumah Mewah	Rumah Sederhana	Rumah Sedang	Rumah Mewah	
1	Karanglewas	8,14	81.404,43	32.561,77	24.421,33	16.280,89	8.140,44	407	181	54	1.927
2	Munjul	11,47	114.684,84	45.873,94	34.405,45	22.936,97	11.468,48	573	255	76	2.714
3	Karangklesem	2,63	26.306,40	10.522,56	7.891,92	5.261,28	2.630,64	132	58	18	623
4	Kutasari	19,43	194.320,49	77.728,20	58.296,15	38.864,10	19.432,05	972	432	130	4.599
5	Sumingkir	10,93	109.319,79	43.727,91	32.795,94	21.863,96	10.931,98	547	243	73	2.587
6	Meri	16,04	160.374,59	64.149,84	48.112,38	32.074,92	16.037,46	802	356	107	3.796
7	Karangreja	21,55	215.492,28	86.196,91	64.647,68	43.098,46	21.549,23	1.077	479	144	5.100
8	Karangaren	1,64	16.374,60	6.549,84	4.912,38	3.274,92	1.637,46	82	36	11	388
9	Limbangan	2,35	23.509,81	9.403,93	7.052,94	4.701,96	2.350,98	118	52	16	556
10	Cendana	19,80	198.039,97	79.215,99	59.411,99	39.607,99	19.804,00	990	440	132	4.687
11	Candiwulan	31,67	316.711,86	126.684,74	95.013,56	63.342,37	31.671,19	1.584	704	211	7.496
12	Karangcegak	17,00	170.011,72	68.004,69	51.003,52	34.002,34	17.001,17	850	378	113	4.024
13	Candinata	54,82	548.234,79	219.293,91	164.470,44	109.646,96	54.823,48	2.741	1.218	365	12.975
14	Karangjengkol	35,34	353.371,74	141.348,70	106.011,52	70.674,35	35.337,17	1.767	785	236	8.363
Jumlah		252,82	2.528.157,31	1.011.262,92	758.447,19	505.631,46	252.815,73	12.641	5.618	1.685	59.833

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022



Gambar 4.13.
Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari

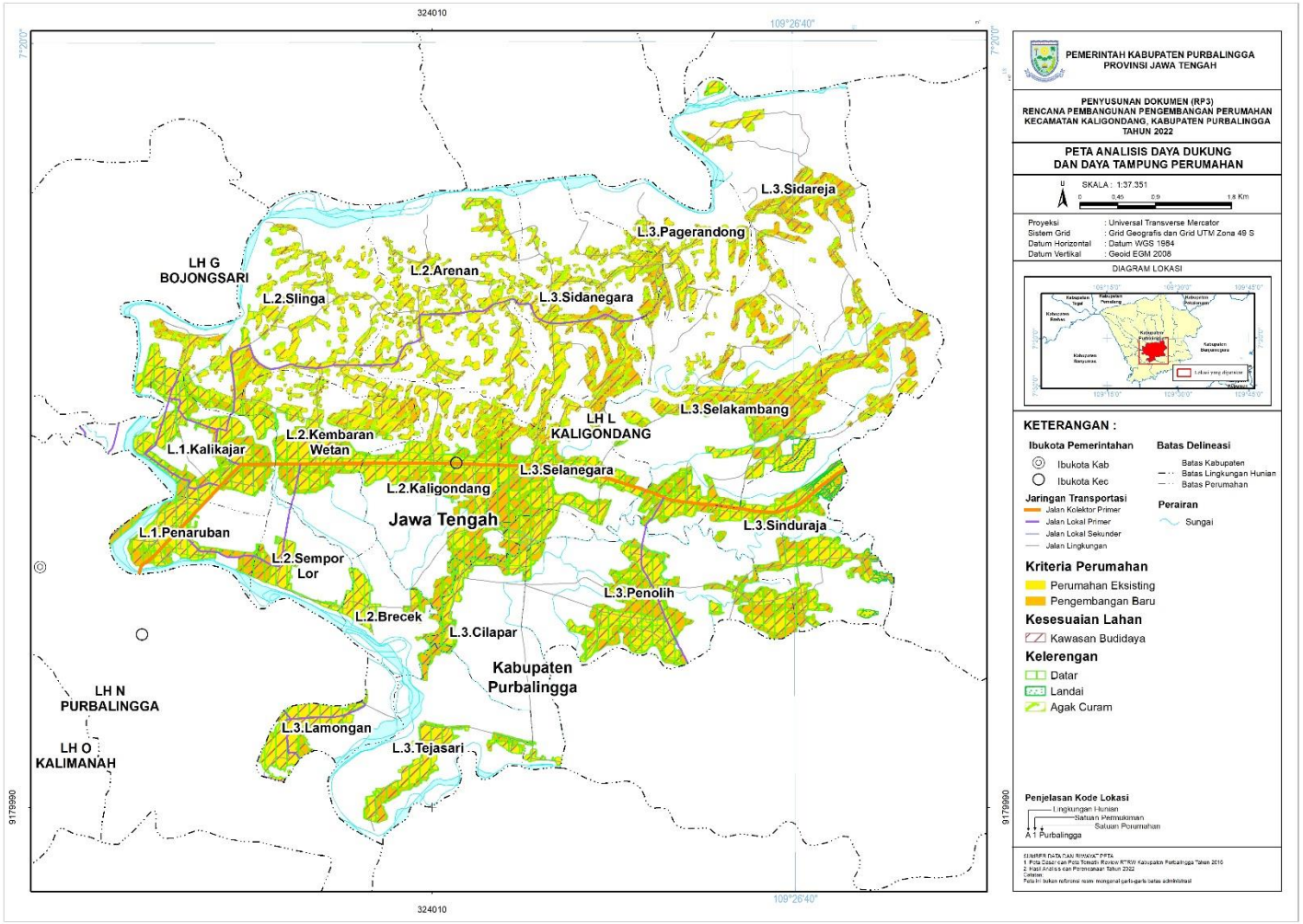
4.3.2.6. Lingkungan Hunian Kaligondang

Berdasarkan hasil analisis daya tampung lahan perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang, diketahui luas alokasi rencana perumahan dapat menampung 30.627 unit rumah sederhana, 13.612 unit rumah menengah, dan 4.084 unit rumah mewah. Luas yang tersedia dapat untuk menampung penduduk maksimum sebesar 144.966 jiwa.

Tabel IV.34.
Daya Tampung Perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang

No	Perumahan	Rencana Perumahan		Kebutuhan PSU	Rasio Hunian Berimbang			Jumlah Rumah			Daya Tampung
		Ha	m2		Rumah Sederhana	Rumah Sedang	Rumah Mewah	Rumah Sederhana	Rumah Sedang	Rumah Mewah	
1	Lamongan	4,62	46.222,56	18.489,02	13.866,77	9.244,51	4.622,26	231	103	31	1.094
2	Tejasari	17,70	177.040,78	70.816,31	53.112,23	35.408,16	17.704,08	885	393	118	4.190
3	Cilapar	20,28	202.789,75	81.115,90	60.836,93	40.557,95	20.278,98	1.014	451	135	4.799
4	Penolih	68,54	685.403,93	274.161,57	205.621,18	137.080,79	68.540,39	3.427	1.523	457	16.221
5	Sinduraja	38,62	386.244,37	154.497,75	115.873,31	77.248,87	38.624,44	1.931	858	257	9.141
6	Selakambang	96,35	963.471,85	385.388,74	289.041,56	192.694,37	96.347,19	4.817	2.141	642	22.802
7	Selanegara	45,17	451.650,64	180.660,26	135.495,19	90.330,13	45.165,06	2.258	1.004	301	10.689
8	Kaligondang	67,13	671.310,50	268.524,20	201.393,15	134.262,10	67.131,05	3.357	1.492	448	15.888
9	Brecek	9,62	96.188,46	38.475,38	28.856,54	19.237,69	9.618,85	481	214	64	2.276
10	Sempor Lor	7,65	76.518,10	30.607,24	22.955,43	15.303,62	7.651,81	383	170	51	1.811
11	Penaruban	20,53	205.349,52	82.139,81	61.604,85	41.069,90	20.534,95	1.027	456	137	4.860
12	Kalikajar	27,37	273.740,22	109.496,09	82.122,07	54.748,04	27.374,02	1.369	608	182	6.479
13	Kembaran Wetan	26,90	268.961,85	107.584,74	80.688,56	53.792,37	26.896,19	1.345	598	179	6.365
14	Slinga	21,22	212.154,29	84.861,71	63.646,29	42.430,86	21.215,43	1.061	471	141	5.021
15	Arenan	3,31	33.126,62	13.250,65	9.937,99	6.625,32	3.312,66	166	74	22	784
16	Sidanegara	48,60	485.997,15	194.398,86	145.799,15	97.199,43	48.599,72	2.430	1.080	324	11.502
17	Pagerandong	8,17	81.666,60	32.666,64	24.499,98	16.333,32	8.166,66	408	181	54	1.933
18	Sidareja	80,75	807.504,71	323.001,88	242.251,41	161.500,94	80.750,47	4.038	1.794	538	19.111
Jumlah		612,53	6.125.341,91	2.450.136,77	1.837.602,57	1.225.068,38	612.534,19	30.627	13.612	4.084	144.966

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022



Gambar 4.14.
Peta Daya Dukung dan Daya Tampung Perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang

4.4. Analisis Kepadatan dan Proyeksi Penduduk

4.4.1. Analisis Distribusi dan Kepadatan Penduduk

4.4.2.1. Lingkungan Hunian Purbalingga

Perkembangan jumlah penduduk Lingkungan Hunian Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun terakhir tepatnya tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi. Jumlah penduduk Lingkungan Hunian Purbalingga tahun 2016 sebanyak 59.344 jiwa menurun pada tahun 2017 menjadi sebanyak 56.914 jiwa. Kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi sebanyak 61.658 jiwa. Hingga kembali menurun hingga pada tahun 2020 menjadi sebesar 57.580 jiwa. Distribusi penduduk Lingkungan Hunian Purbalingga tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.35.
Distibusi Penduduk Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2016-2020

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Bojong	5.286	4.996	4.628	5.085	4.915
2	Toyareja	2.558	2.740	2.825	2.845	2.851
3	Kedung Menjangan	3.053	3.083	3.400	3.232	3.144
4	Jatisaba	3.183	3.382	4.114	3.572	3.500
5	Bancar	4.032	3.999	4.365	4.092	3.790
6	Purbalingga Wetan	5.022	4.744	5.006	5.111	5.119
7	Penambongan	4.674	4.631	5.440	4.815	4.774
8	Purbalingga Kidul	6.360	5.927	6.919	6.044	5.539
9	Kandang Gampang	3.873	2.958	3.172	3.054	2.944
10	Purbalingga Kulon	2.634	2.620	2.996	2.685	2.575
11	Purbalingga Lor	6.390	6.033	6.039	6.354	5.994
12	Kembaran Kulon	5.178	4.721	4.762	4.866	4.660
13	Wirasana	7.101	7.080	7.992	7.431	7.775
Jumlah		59.344	56.914	61.658	59.186	57.580

Sumber: Kecamatan Purbalingga Dalam Angka Tahun 2017-2021

Kepadatan penduduk menjadi salah satu indikator penyediaan perumahan, karena semakin padat penduduk di suatu kawasan akan membutuhkan rumah yang lebih banyak dibandingkan dengan kawasan lain yang kepadatan penduduknya lebih rendah. Pada perhitungan kepadatan penduduk di Lingkungan Hunian Purbalingga menggunakan kepadatan penduduk bruto, karena hanya menghitung dengan membandingkan dengan luas wilayahnya saja. Kepadatan penduduk di Lingkungan Hunian Purbalingga pada tahun 2020 sebesar 39,17 jiwa/Ha. Kepadatan penduduk terbesar di Lingkungan Hunian Purbalingga berada di Perumahan Purbalingga Wetan dengan kepadatan penduduk sebesar 83,68 jiwa/Ha. Seiring bertambahnya waktu, Perumahan Purbalingga Wetan akan semakin padat penduduk. Sehingga di Perumahan Purbalingga Wetan akan membutuhkan jumlah rumah yang lebih banyak dibandingkan dengan perumahan lainnya.

Tabel IV.36.
Kepadatan Penduduk Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2020

No	Perumahan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk Tahun 2020	Kepadatan per Ha
1	Bojong	146,47	4.915	33,56
2	Toyareja	233,62	2.851	12,20
3	Kedung Menjangan	141,02	3.144	22,29
4	Jatisaba	199,02	3.500	17,59
5	Bancar	113,55	3.790	33,38
6	Purbalingga Wetan	61,17	5.119	83,68
7	Penambongan	83,28	4.774	57,32
8	Purbalingga Kidul	94,85	5.539	58,40
9	Kandang Gampang	44,21	2.944	66,59
10	Purbalingga Kulon	46,54	2.575	55,33
11	Purbalingga Lor	79,79	5.994	75,12
12	Kembaran Kulon	96,01	4.660	48,54
13	Wirasana	130,44	7.775	59,61
Jumlah		1.469,98	57.580	39,17

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

4.4.2.2. Lingkungan Hunian Kalimanah

Perkembangan jumlah penduduk Lingkungan Hunian Kalimanah dalam kurun waktu lima tahun terakhir tepatnya tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Lingkungan Hunian Kalimanah tahun 2016 sebanyak 53.643 jiwa dan terus meningkat hingga pada tahun 2020 menjadi sebesar 57.677 jiwa. Distribusi penduduk Lingkungan Hunian Kalimanah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.37.
Distibusi Penduduk Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2016-2020

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Jompo	1.987	2.112	2.239	2.240	2.102
2	Rabak	2.868	2.956	3.092	3.157	2.971
3	Blater	3.924	3.627	3.770	3.823	3.717
4	Sidakangen	2.397	2.417	2.549	2.581	2.504
5	Karangpetir	1.324	1.351	1.397	1.435	1.454
6	Grecol	3.700	3.836	3.998	4.087	4.140
7	Mewek	2.125	2.174	2.258	2.324	2.585
8	Karangmanyar	2.594	2.418	2.528	2.547	2.635
9	Kalikabong	6.322	5.856	6.020	6.085	6.268
10	Selabaya	3.868	3.825	3.964	4.093	4.146
11	Kalimanah Wetan	3.287	3.202	3.323	3.427	3.379
12	Kalimanah Kulon	2.036	2.111	2.237	2.282	2.194
13	Manduraga	1.688	1.839	1.898	1.918	1.855
14	Karangsari	1.673	1.728	1.794	1.837	1.833
15	Kedungwuluh	2.878	3.173	3.265	3.362	3.251
16	Klapasawit	4.258	4.423	4.699	4.883	5.155
17	Babakan	6.714	6.652	6.875	7.094	7.478
Jumlah		53.643	53.700	55.906	57.175	57.667

Sumber: Kecamatan Kalimanah Dalam Angka Tahun 2017-2021

Kepadatan penduduk menjadi salah satu indikator penyediaan perumahan, karena semakin padat penduduk di suatu kawasan akan membutuhkan rumah yang lebih banyak dibandingkan dengan kawasan lain yang kepadatan penduduknya lebih rendah. Pada perhitungan kepadatan penduduk di Lingkungan Hunian Kalimanah menggunakan kepadatan penduduk bruto, karena hanya menghitung dengan membandingkan dengan luas wilayahnya saja. Kepadatan penduduk di Lingkungan Hunian Kalimanah pada tahun 2020 sebesar 25,78 jiwa/Ha. Kepadatan penduduk terbesar di Lingkungan Hunian Kalimanah berada di Perumahan Karangmanyar dengan kepadatan penduduk sebesar 50,18 jiwa/Ha. Seiring bertambahnya waktu, Perumahan Karangmanyar akan semakin padat penduduk. Sehingga di Perumahan Karangmanyar akan membutuhkan jumlah rumah yang lebih banyak dibandingkan dengan perumahan lainnya.

Tabel IV.38.
Kepadatan Penduduk Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2020

No	Perumahan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk Tahun 2020	Kepadatan per Ha
1	Jompo	124,43	2.102	16,89
2	Rabak	139,45	2.971	21,30
3	Blater	218,17	3.717	17,04
4	Sidakangen	132,86	2.504	18,85
5	Karangpetir	111,04	1.454	13,09
6	Grecol	212,30	4.140	19,50
7	Mewek	83,47	2.585	30,97
8	Karangmanyar	52,51	2.635	50,18
9	Kalikabong	145,57	6.268	43,06
10	Selabaya	124,25	4.146	33,37
11	Kalimanah Wetan	149,48	3.379	22,60
12	Kalimanah Kulon	71,81	2.194	30,55
13	Manduraga	94,41	1.855	19,65
14	Karangsari	92,55	1.833	19,81
15	Kedungwuluh	136,15	3.251	23,88
16	Klapasawit	159,46	5.155	32,33
17	Babakan	189,21	7.478	39,52
Jumlah		2.237,13	57.667	25,78

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

4.4.2.3. Lingkungan Hunian Padamara

Perkembangan jumlah penduduk Lingkungan Hunian Padamara dalam kurun waktu lima tahun terakhir tepatnya tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Lingkungan Hunian Padamara tahun 2016 sebanyak 42.725 jiwa dan terus meningkat hingga pada tahun 2020 menjadi sebesar 46.533 jiwa. Distribusi penduduk Lingkungan Hunian Padamara tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.39.
Distibusi Penduduk Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2016-2020

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Karangpule	1.331	1.381	1.443	1.491	1.546
2	Kalitinggar	2.342	2.559	2.644	2.661	2.664
3	Sokawera	2.315	2.428	2.504	2.567	2.612

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
4	Padamara	2.669	2.808	2.929	2.933	2.920
5	Karangjambe	4.012	3.842	3.961	4.008	4.170
6	Bojanegara	6.587	6.049	6.260	6.281	6.689
7	Karangsentul	2.640	2.529	2.588	2.647	2.759
8	Gemuruh	3.719	3.834	4.011	4.106	4.341
9	Dawuhan	3.695	3.939	3.102	4.128	4.267
10	Prigi	2.781	2.976	3.066	3.118	3.156
11	Purbayasa	2.047	2.142	2.195	2.233	2.237
12	Karanggambas	3.896	3.982	4.142	4.235	4.296
13	Mipiran	3.151	3.155	3.300	3.352	3.242
14	Kalitinggar Kidul	1.540	1.658	1.732	1.752	1.634
Jumlah		42.725	43.282	43.877	45.512	46.533

Sumber: Kecamatan Padamara Dalam Angka Tahun 2017-2021

Kepadatan penduduk menjadi salah satu indikator penyediaan perumahan, karena semakin padat penduduk di suatu kawasan akan membutuhkan rumah yang lebih banyak dibandingkan dengan kawasan lain yang kepadatan penduduknya lebih rendah. Pada perhitungan kepadatan penduduk di Lingkungan Hunian Padamara menggunakan kepadatan penduduk bruto, karena hanya menghitung dengan membandingkan dengan luas wilayahnya saja. Kepadatan penduduk di Lingkungan Hunian Padamara pada tahun 2020 sebesar 20,8 jiwa/Ha. Kepadatan penduduk terbesar di Lingkungan Hunian Padamara berada di Perumahan Karangsentul dengan kepadatan penduduk sebesar 40,1 jiwa/Ha. Seiring bertambahnya waktu, Perumahan Karangsentul akan semakin padat penduduk. Sehingga di Perumahan Karangsentul akan membutuhkan jumlah rumah yang lebih banyak dibandingkan dengan perumahan lainnya.

Tabel IV.40.
Kepadatan Penduduk Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2020

No	Perumahan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk Tahun 2020	Kepadatan per Ha
1	Karangpule	145,24	1.546	10,64
2	Kalitinggar	121,58	2.664	21,91
3	Sokawera	133,40	2.612	19,58
4	Padamara	103,51	2.920	28,21
5	Karangjambe	161,36	4.170	25,84
6	Bojanegara	215,01	6.689	31,11
7	Karangsentul	68,79	2.759	40,10
8	Gemuruh	233,21	4.341	18,61
9	Dawuhan	151,25	4.267	28,21
10	Prigi	126,98	3.156	24,85
11	Purbayasa	74,18	2.237	30,15
12	Karanggambas	187,51	4.296	22,91
13	Mipiran	124,00	3.242	26,14
14	Kalitinggar Kidul	66,67	1.634	24,51
Jumlah		2.237,13	46.533	20,80

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

4.4.2.4. Lingkungan Hunian Bojongsari

Perkembangan jumlah penduduk Lingkungan Hunian Bojongsari dalam kurun waktu lima tahun terakhir tepatnya tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Lingkungan Hunian Bojongsari tahun 2016 sebanyak 58.751 jiwa dan terus meningkat hingga pada tahun 2020 menjadi sebesar 63.095 jiwa. Distribusi penduduk Lingkungan Hunian Bojongsari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.41.
Distibusi Penduduk Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2016-2020

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Brobot	3.776	3.856	3.884	3.986	4.043
2	Gembong	3.408	3.565	3.584	3.658	3.600
3	Galuh	2.922	3.005	2.991	3.068	3.199
4	Banjaran	5.563	5.640	5.741	5.985	6.027
5	Patemon	3.980	3.761	4.211	4.334	4.399
6	Bojongsari	5.901	5.985	6.105	6.190	6.357
7	Kajongan	5.060	5.068	5.251	5.403	5.366
8	Karangbanjar	4.109	4.370	4.350	4.396	4.308
9	Beji	3.735	3.527	3.902	3.974	3.969
10	Pagedangan	3.803	3.680	3.877	3.930	3.984
11	Pekalongan	5.354	5.188	5.535	5.658	5.736
12	Matenggeng	3.882	4.353	4.070	4.253	4.244
13	Bumisari	7.258	7.465	7.460	7.731	7.863
Jumlah		58.751	59.463	60.961	62.566	63.095

Sumber: Kecamatan Bojongsari Dalam Angka Tahun 2017-2021

Kepadatan penduduk menjadi salah satu indikator penyediaan perumahan, karena semakin padat penduduk di suatu kawasan akan membutuhkan rumah yang lebih banyak dibandingkan dengan kawasan lain yang kepadatan penduduknya lebih rendah. Pada perhitungan kepadatan penduduk di Lingkungan Hunian Bojongsari menggunakan kepadatan penduduk bruto, karena hanya menghitung dengan membandingkan dengan luas wilayahnya saja. Kepadatan penduduk di Lingkungan Hunian Bojongsari pada tahun 2020 sebesar 14,47 jiwa/Ha. Kepadatan penduduk terbesar di Lingkungan Hunian Bojongsari berada di Perumahan Beji dengan kepadatan penduduk sebesar 41,53 jiwa/Ha. Seiring bertambahnya waktu, Perumahan Beji akan semakin padat penduduk. Sehingga di Perumahan Beji akan membutuhkan jumlah rumah yang lebih banyak dibandingkan dengan perumahan lainnya.

Tabel IV.42.
Kepadatan Penduduk Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2020

No	Perumahan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk Tahun 2020	Kepadatan per Ha
1	Brobot	153,18	4.043	26,39
2	Gembong	111,53	3.600	32,28
3	Galuh	124,33	3.199	25,73
4	Banjaran	398,75	6.027	15,11
5	Patemon	172,16	4.399	25,55
6	Bojongsari	255,79	6.357	24,85
7	Kajongan	181,19	5.366	29,62
8	Karangbanjar	152,61	4.308	28,23

No	Perumahan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk Tahun 2020	Kepadatan per Ha
9	Beji	95,58	3.969	41,53
10	Pagedangan	143,37	3.984	27,79
11	Pekalongan	227,49	5.736	25,21
12	Matenggeng	156,28	4.244	27,16
13	Bumisari	2.187,29	7.863	3,59
Jumlah		4.359,54	63.095	14,47

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

4.4.2.5. Lingkungan Hunian Kutasari

Perkembangan jumlah penduduk Lingkungan Hunian Kutasari dalam kurun waktu lima tahun terakhir tepatnya tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Lingkungan Hunian Kutasari tahun 2016 sebanyak 58.832 jiwa dan terus meningkat hingga pada tahun 2020 menjadi sebesar 65.253 jiwa. Distribusi penduduk Lingkungan Hunian Kutasari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.43.
Distibusi Penduduk Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2016-2020

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Karanglewas	2.463	2.547	2.645	2.686	2.781
2	Munjul	3.460	3.538	3.679	3.767	3.716
3	Karangklesem	2.943	3.203	3.340	3.363	3.361
4	Kutasari	4.747	4.939	5.151	5.211	5.149
5	Sumingkir	4.555	4.938	5.099	5.143	5.163
6	Meri	3.537	3.790	3.949	4.026	3.997
7	Karangreja	6.005	6.097	6.293	6.504	6.597
8	Karangaren	1.468	1.438	1.502	1.494	1.597
9	Limbangan	3.987	4.245	4.389	4.437	4.488
10	Cendana	4.819	4.840	5.087	5.167	5.253
11	Candiwulan	5.253	5.340	5.524	5.643	5.732
12	Karangcegak	6.185	6.479	6.673	6.883	7.020
13	Candinata	5.470	5.604	5.681	5.864	6.025
14	Karangjengkol	3.940	4.103	4.226	4.300	4.374
Jumlah		58.832	61.101	63.238	64.488	65.253

Sumber: Kecamatan Kutasari Dalam Angka Tahun 2017-2021

Kepadatan penduduk menjadi salah satu indikator penyediaan perumahan, karena semakin padat penduduk di suatu kawasan akan membutuhkan rumah yang lebih banyak dibandingkan dengan kawasan lain yang kepadatan penduduknya lebih rendah. Pada perhitungan kepadatan penduduk di Lingkungan Hunian Kutasari menggunakan kepadatan penduduk bruto, karena hanya menghitung dengan membandingkan dengan luas wilayahnya saja. Kepadatan penduduk di Lingkungan Hunian Kutasari pada tahun 2020 sebesar 14,79 jiwa/Ha. Kepadatan penduduk terbesar di Lingkungan Hunian Kutasari berada di Perumahan Karanglewas dengan kepadatan penduduk sebesar 35,82 jiwa/Ha. Seiring bertambahnya waktu, Perumahan Karanglewas akan semakin padat penduduk. Sehingga di Perumahan Karanglewas akan membutuhkan jumlah rumah yang lebih banyak dibandingkan dengan perumahan lainnya.

Tabel IV.44.
Kepadatan Penduduk Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2020

No	Perumahan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk Tahun 2020	Kepadatan per Ha
1	Karanglewas	77,63	2.781	35,82
2	Munjul	132,09	3.716	28,13
3	Karangklesem	147,19	3.361	22,83
4	Kutasari	211,82	5.149	24,31
5	Sumingkir	251,62	5.163	20,52
6	Meri	165,51	3.997	24,15
7	Karangreja	210,96	6.597	31,27
8	Karangaren	108,93	1.597	14,66
9	Limbangan	141,57	4.488	31,70
10	Cendana	548,95	5.253	9,57
11	Candiwulan	1.049,07	5.732	5,46
12	Karangcegak	496,09	7.020	14,15
13	Candinata	400,46	6.025	15,05
14	Karangjengkol	468,71	4.374	9,33
Jumlah		4.410,60	65.253	14,79

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

4.4.2.6. Lingkungan Hunian Kaligondang

Perkembangan jumlah penduduk Lingkungan Hunian Kaligondang dalam kurun waktu lima tahun terakhir tepatnya tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Lingkungan Hunian Kaligondang tahun 2016 sebanyak 59.118 jiwa dan terus meningkat hingga pada tahun 2020 menjadi sebesar 66.840 jiwa. Distribusi penduduk Lingkungan Hunian Kaligondang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.45.
Distibusi Penduduk Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2016-2020

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Lamongan	2.394	2.479	2.603	2.664	2.669
2	Tejasari	2.301	2.490	2.591	2.581	2.614
3	Cilapar	1.762	1.883	2.016	2.033	2.022
4	Penolih	3.289	3.607	3.790	3.876	3.844
5	Sinduraja	4.509	4.782	4.934	4.992	5.048
6	Selakambang	7.140	7.954	8.179	8.456	8.600
7	Selanegara	2.955	3.224	3.346	3.417	3.408
8	Kaligondang	2.810	3.065	3.167	3.239	3.227
9	Brecek	1.291	1.351	1.422	1.434	1.432
10	Sempor Lor	1.145	1.181	1.268	1.285	1.272
11	Penaruban	4.860	4.773	4.968	4.997	4.951
12	Kalikajar	4.339	4.340	4.536	4.624	4.680
13	Kembaran Wetan	2.721	2.935	3.062	3.199	3.207
14	Slinga	4.943	5.088	5.317	5.407	5.472
15	Arenan	3.634	3.695	3.790	3.878	3.961
16	Sidanegara	2.784	3.138	3.255	3.261	3.307
17	Pagerandong	1.735	2.037	2.091	2.124	2.139
18	Sidareja	4.506	4.684	4.811	4.874	4.987

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Jumlah		59.118	62.706	65.146	66.341	66.840

Sumber: Kecamatan Kaligondang Dalam Angka Tahun 2017-2021

Kepadatan penduduk menjadi salah satu indikator penyediaan perumahan, karena semakin padat penduduk di suatu kawasan akan membutuhkan rumah yang lebih banyak dibandingkan dengan kawasan lain yang kepadatan penduduknya lebih rendah. Pada perhitungan kepadatan penduduk di Lingkungan Hunian Kaligondang menggunakan kepadatan penduduk bruto, karena hanya menghitung dengan membandingkan dengan luas wilayahnya saja. Kepadatan penduduk di Lingkungan Hunian Kaligondang pada tahun 2020 sebesar 12,59 jiwa/Ha. Kepadatan penduduk terbesar di Lingkungan Hunian Kaligondang berada di Perumahan Penaruban dengan kepadatan penduduk sebesar 37,17 jiwa/Ha. Seiring bertambahnya waktu, Perumahan Penaruban akan semakin padat penduduk. Sehingga di Perumahan Penaruban akan membutuhkan jumlah rumah yang lebih banyak dibandingkan dengan perumahan lainnya.

Tabel IV.46.
Kepadatan Penduduk Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2020

No	Perumahan	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk Tahun 2020	Kepadatan per Ha
1	Lamongan	112,69	2.669	23,68
2	Tejasari	273,03	2.614	9,57
3	Cilapar	227,02	2.022	8,91
4	Penolih	390,77	3.844	9,84
5	Sinduraja	285,76	5.048	17,67
6	Selakambang	558,37	8.600	15,40
7	Selanegara	204,84	3.408	16,64
8	Kaligondang	316,68	3.227	10,19
9	Brecek	115,10	1.432	12,44
10	Sempor Lor	112,93	1.272	11,26
11	Penaruban	133,21	4.951	37,17
12	Kalikajar	204,95	4.680	22,83
13	Kembaran Wetan	248,66	3.207	12,90
14	Slinga	465,53	5.472	11,75
15	Arenan	408,24	3.961	9,70
16	Sidanegara	348,54	3.307	9,49
17	Pagerandong	189,42	2.139	11,29
18	Sidareja	563,83	4.987	8,84
Jumlah		5.159,58	66.840	12,95

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

4.4.2. Analisis Proyeksi Penduduk

Perencanaan yang dilakukan di wilayah perencanaan selama 20 tahun ke depan, memerlukan analisis proyeksi penduduk 20 tahun ke depan. Proyeksi penduduk dilihat dari data pertumbuhan penduduk di masa lampau yang kemudian digunakan untuk mengetahui kecenderungan pertumbuhan penduduk yang terjadi di masa mendatang. Agar dapat mengetahui kecenderungan pertumbuhan penduduk tersebut digunakan nilai rasio (R) sehingga diketahui tingkat pertumbuhannya. Dengan nilai R tersebut maka dapat dilakukan proyeksi jumlah penduduk sampai dengan akhir tahun perencanaan. Berdasarkan data tiap

lingkungan hunian tahun 2016-2020, pertumbuhan di setiap lingkungan hunian mengalami fluktuasi. Maka untuk proyeksi jumlah penduduk 20 tahun ke depan, dihitung dengan menggunakan Metode Geometrik dimana angka pertumbuhan penduduk dianggap sama setiap tahunnya. Metode ini sering dipakai karena mudah, dan mendekati kebenaran. Metode geometrik dihitung dengan menggunakan rumus:

$$Pt = Po(1 + r)^n$$

Keterangan:

Pt = Jumlah penduduk pada tahun ke-n

Po = Jumlah penduduk pada tahun awal

r = Rata-rata pertumbuhan penduduk

n = Jumlah tahun yang diproyeksi

Berikut ini merupakan tabel hasil analisis perhitungan proyeksi penduduk selama 20 tahun mendatang di setiap lingkungan hunian.

Tabel IV.47.
Proyeksi Penduduk di Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Laju Pertumbuhan (r)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			Tahun 2021	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Bojong	0,315	4.930	5.009	5.088	5.168	5.250
2	Toyareja	0,938	2.584	2.921	3.035	3.105	3.156
3	Kedung Menjangan	0,249	3.077	3.274	3.340	3.381	3.411
4	Jatisaba	0,262	3.282	3.784	3.953	4.058	4.134
5	Bancar	0,021	3.791	3.795	3.799	3.799	3.803
6	Purbalingga Wetan	0,199	4.898	5.090	5.154	5.194	5.223
7	Penambongan	0,086	4.722	4.993	5.085	5.142	5.183
8	Purbalingga Kidul	0,132	5.546	5.583	5.620	5.657	5.694
9	Kandang Gampang	0,684	2.964	3.067	3.173	3.283	3.397
10	Purbalingga Kulon	0,008	2.679	2.722	2.736	2.745	2.751
11	Purbalingga Lor	0,218	6.007	6.007	6.073	6.139	6.206
12	Kembaran Kulon	0,619	4.689	4.836	4.987	5.144	5.305
13	Wirasana	0,479	7.054	7.844	8.111	8.276	8.396
Jumlah		0,003	56.224	58.923	60.155	61.093	61.912

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Tabel IV.48.
Proyeksi Penduduk di Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Laju Pertumbuhan (r)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			Tahun 2021	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Jompo	0,472	2.026	2.232	2.302	2.345	2.376
2	Rabak	0,465	2.891	3.112	3.187	3.233	3.266
3	Blater	0,184	3.724	3.758	3.793	3.828	3.615
4	Sidakangen	0,648	2.392	2.575	2.637	2.675	2.703

No	Perumahan	Laju Pertumbuhan (r)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			Tahun 2021	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
5	Karangpetir	0,946	1.312	1.462	1.513	1.544	1.567
6	Grecol	0,983	3.680	4.189	4.361	4.468	4.545
7	Mewek	0,729	2.061	2.495	2.642	2.733	2.798
8	Karangmanyar	0,044	2.636	2.642	2.648	2.654	2.660
9	Kalikabong	0,014	6.354	6.358	6.363	6.367	6.371
10	Selabaya	0,735	3.800	4.135	4.249	4.319	4.370
11	Kalimanah Wetan	0,451	3.236	3.400	3.455	3.489	3.514
12	Kalimanah Kulon	0,747	2.043	2.284	2.366	2.416	2.452
13	Manduraga	0,735	1.723	1.941	2.015	2.061	2.094
14	Karangsari	0,964	1.668	1.865	1.931	1.972	2.002
15	Kedungwuluh	0,828	2.933	3.406	3.567	3.666	3.738
16	Klapasawit	0,919	4.167	5.134	5.461	5.663	5.809
17	Babakan	0,676	6.548	7.324	7.587	7.749	7.867
Jumlah		0,855	53.193	58.313	60.075	61.181	61.749

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Tabel IV.49.
Proyeksi Penduduk di Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Laju Pertumbuhan (r)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			Tahun 2021	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Karangpule	0,947	1.313	1.548	1.627	1.676	1.711
2	Kalitinggar	0,914	2.377	2.745	2.870	2.947	3.003
3	Sokawera	0,996	2.308	2.639	2.751	2.821	2.871
4	Padamara	0,903	2.688	2.995	3.099	3.163	3.209
5	Karangjambe	0,215	3.916	4.070	4.123	4.155	4.178
6	Bojanegara	0,002	6.355	6.389	6.401	6.408	6.414
7	Karangsentul	0,225	2.572	2.686	2.724	2.748	2.765
8	Gemuruh	0,896	3.657	4.303	4.521	4.656	4.754
9	Dawuhan	0,124	3.583	4.038	4.192	4.287	4.356
10	Prigi	0,989	2.796	3.214	3.356	3.444	3.507
11	Purbayasa	0,985	2.053	2.274	2.349	2.395	2.428
12	Karanggambas	0,954	3.862	4.326	4.483	4.580	4.650
13	Mipiran	0,542	3.142	3.325	3.388	3.426	3.454
14	Kalitinggar Kidul	0,473	1.575	1.740	1.795	1.830	1.854
Jumlah		0,835	42.197	46.293	47.679	48.535	49.157

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Tabel IV.50.
Proyeksi Penduduk di Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Laju Pertumbuhan (r)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			Tahun 2021	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Brobot	0,917	3.756	4.042	4.139	4.199	4.243
2	Gembong	0,826	3.435	3.674	3.755	3.805	3.842

No	Perumahan	Laju Pertumbuhan (r)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			Tahun 2021	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
3	Galuh	0,758	2.900	3.156	3.243	3.297	3.335
4	Banjaran	0,865	5.502	6.043	6.226	6.340	6.422
5	Patemon	0,590	3.832	4.403	4.597	4.716	4.803
6	Bojongsari	0,894	5.854	6.329	6.489	6.588	6.660
7	Kajongan	0,821	5.010	5.421	5.561	5.647	5.709
8	Karangbanjar	0,555	4.178	4.419	4.501	4.551	4.588
9	Beji	0,473	3.624	3.994	4.119	4.196	4.252
10	Pagedangan	0,512	3.727	3.966	4.047	4.097	4.133
11	Pekalongan	0,622	5.228	5.726	5.894	5.998	6.074
12	Matenggeng	0,395	3.984	4.314	4.425	4.494	4.544
13	Bumisari	0,873	7.217	7.850	8.065	8.197	8.293
Jumlah		0,915	58.246	63.338	65.061	66.126	66.899

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Tabel IV.51.
Proyeksi Penduduk di Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Laju Pertumbuhan (r)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			Tahun 2021	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Karanglewas	0,956	2.443	2.783	2.898	2.969	3.020
2	Munjul	0,896	3.449	3.792	3.907	3.979	4.031
3	Karangklesem	0,926	2.981	3.469	3.634	3.736	3.810
4	Kutasari	0,904	4.762	5.281	5.456	5.564	5.643
5	Sumingkir	0,939	4.610	5.302	5.536	5.681	5.786
6	Meri	0,950	3.563	4.118	4.306	4.423	4.507
7	Karangreja	0,911	5.934	6.617	6.849	6.992	7.095
8	Karangaren	0,504	1.436	1.556	1.596	1.621	1.639
9	Limbangan	0,983	4.008	4.572	4.762	4.880	4.966
10	Cendana	0,877	4.758	5.273	5.447	5.555	5.633
11	Candiwulan	0,939	5.205	5.754	5.940	6.054	6.138
12	Karangcegak	0,987	6.153	7.079	7.392	7.586	7.726
13	Candinata	0,894	5.418	6.000	6.197	6.319	6.407
14	Karangjengkol	0,997	3.931	4.413	4.576	4.677	4.750
Jumlah		0,992	58.651	66.008	68.497	70.035	71.152

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Tabel IV.52.
Proyeksi Penduduk di Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Laju Pertumbuhan (r)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			Tahun 2021	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Lamongan	0,963	2.383	2.718	2.831	2.901	2.952
2	Tejasari	0,926	2.329	2.678	2.796	2.869	2.923
3	Cilapar	0,926	1.772	2.093	2.201	2.269	2.317
4	Penolih	0,946	3.326	3.991	4.216	4.356	4.457
5	Sinduraja	0,986	4.529	5.135	5.340	5.467	5.559

No	Perumahan	Laju Pertumbuhan (r)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
			Tahun 2021	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
6	Selakambang	0,983	7.208	8.813	9.356	9.692	9.936
7	Selanegara	0,955	2.987	3.517	3.696	3.806	3.887
8	Kaligondang	0,952	2.842	3.328	3.493	3.595	3.668
9	Brecek	0,942	1.294	1.466	1.525	1.561	1.587
10	Sempor Lor	0,886	1.141	1.308	1.365	1.399	1.425
11	Penaruban	0,446	4.817	4.991	5.049	5.085	5.112
12	Kalikajar	0,852	4.283	4.696	4.836	4.922	4.984
13	Kembaran Wetan	0,987	2.721	3.290	3.482	3.602	3.688
14	Slinga	0,970	4.915	5.534	5.743	5.873	5.967
15	Arenan	0,922	3.600	3.959	4.080	4.155	4.210
16	Sidanegara	0,914	2.842	3.417	3.611	3.731	3.819
17	Pagerandong	0,892	1.788	2.232	2.382	2.475	2.543
18	Sidareja	0,990	4.495	5.014	5.189	5.298	5.376
Jumlah		0,990	59.269	68.179	71.193	73.056	74.409

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

4.4.3. Analisis Potensi Sosial Budaya Masyarakat

Hubungan antar warga masyarakat di wilayah perencanaan masih memiliki karakteristik guyub ditunjukkan apabila warga mengadakan acara hajatan, misalnya pernikahan, khitanan, membangun rumah atau ada yang meninggal dunia, maka masyarakat akan berkunjung dan membantu ke tempat warga tersebut. Disamping itu pula terdapat interaksi sosial yang berbentuk kerjasama yaitu kegiatan gotong-royong, bentuk kerjasama ini dapat diwujudkan berupa tenaga, bahan material ataupun uang. Sedangkan gotong-royong dalam bentuk kerja bakti seperti membersihkan lingkungan dan memperbaiki jalan.

Perlu adanya peningkatan struktur sosial budaya masyarakat, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi masyarakat, sehingga seluruh masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Peningkatan sosial dan budaya dapat dilakukan dengan:

a. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, memperkuat peranan dan status wanita, melindungi hak anak, melindungi kelompok rentan, serta meningkatkan kualitas lingkungan keluarga.
b. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, dengan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi maupun kesenjangan wilayah. Keberlanjutan pembangunan tidak mungkin tercapai bila terjadi kesenjangan pada distribusi kemakmuran atau adanya kelas sosial. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapat akses pendidikan yang merata, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya.
c. Mempertahankan keanekaragaman budaya, dengan mengakui dan menghargai sistem sosial dan kebudayaan yang ada, dan dengan memahami dan menggunakan pengetahuan tradisional untuk kemanfaatan bagi masyarakat dan pembangunan ekonomi.
d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dalam kegiatan pembangunan, pemeliharaan, evaluasi.

e. Pembentukan karakter manusia yang berkualitas.

4.4.4. Analisis Pola Budaya Bermukim Masyarakat

Persebaran perumahan di wilayah perencanaan tersebar di seluruh perumahan dan terdiri dari perumahan kawasan perdesaan dan perumahan kawasan perkotaan. Perumahan kawasan perkotaan berada di sekitar pusat kota dan di kawasan perkotaan di masing-masing lingkungan hunian. Karakteristik perumahan perkotaan lebih modern dengan ketersediaan sarana prasarana pendukung yang lebih lengkap. Sedangkan perumahan yang berada diluar kawasan perkotaan di setiap lingkungan hunian yaitu perumahan kawasan perdesaan, umumnya karakteristik hunian dan lingkungan masih bersifat pedesaan. Sehingga pola perumahan kawasan perdesaan yang terbentuk adalah perumahan dengan kepadatan rendah dan sedang. Sedangkan pada perumahan perkotaan membentuk pola perumahan padat.

Aktivitas bermukim (*dwellings*) masyarakat yang mencerminkan budaya dan peradaban masyarakat dengan berbagai jenis mata pencaharian (*livelihood*) secara lokal. Masyarakat pada perumahan kawasan perkotaan mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dikarenakan sebagian besar lahan di kawasan perkotaan merupakan lahan terbangun. Sehingga, mayoritas mata pencaharian masyarakat yang tinggal di perumahan kawasan perkotaan adalah pekerjaan dalam bidang industri pengolahan dan pekerjaan dalam bidang jasa. Sedangkan, masyarakat pada perumahan kawasan perdesaan sebagian besar mempunyai kegiatan utama dalam bidang pertanian, karena masih terdapat banyak lahan pertanian. Sehingga, mayoritas mata pencaharian masyarakat yang tinggal di perumahan kawasan perdesaan adalah petani. Masyarakat petani tersebut terdiri dari beberapa status pekerjaan, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh, atau buruh.

4.5. Analisis Perekonomian

4.5.1. Analisis Potensi Ekonomi Dominan dan Unggulan

LH Purbalingga memiliki potensi ekonomi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa. Sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan hampir berada di seluruh Satuan Perumahan. Kegiatan industri dan perdagangan jasa cukup potensial berkembang di kawasan perkotaan Purbalingga.

Tabel IV.53.
Potensi Ekonomi di LH Purbalingga

No	LH	Potensi Ekonomi	Lokasi
1	Purbalingga	Pertanian	seluruh Satuan Perumahan
		Perkebunan	seluruh Satuan Perumahan
		Peternakan	seluruh Satuan Perumahan
		Perikanan	seluruh Satuan Perumahan

No	LH	Potensi Ekonomi	Lokasi
		Pariwisata	Usman Janatin City Park.
		Industri	SP Kandang Gampang, Bojong, Kedung Menjangan, Purbalingga Wetan, Purbalingga Kidul, Purbalingga Kulon, Purbalingga Lor, Kembaran Kulon, Wirasana
		Perdagangan dan jasa	SP Bojong, Kedung Menjangan, Bancar, Purbalingga Wetan, Purbalingga Kidul, Kandang Gampang, Purbalingga Kulon, Purbalingga Lor, Kembaran Kulon
2	Kalimanah	Pertanian	seluruh Satuan Perumahan
		Perkebunan	SP Blater
		Peternakan	seluruh Satuan Perumahan
		Perikanan	seluruh Satuan Perumahan
		Industri	SP Grecol, Mewek, Kalikabong, Selabaya, Kalimanah Wetan, dan Babakan
		Perdagangan dan jasa	SP Jompo, Rabak, Sidokangen, Karangpetir, Grecol, Mewek, Kalikabang, Selabaya, Kalimanah Kulon, Manduraga, Karangsari, Babakan
3	Padamara	Pertanian	seluruh Satuan Perumahan
		Perkebunan	seluruh Satuan Perumahan
		Peternakan	seluruh Satuan Perumahan
		Perikanan	seluruh Satuan Perumahan
		Pariwisata	Pancuran Mas (River World) di SP Purbayasa.
		Industri	SP Kalitinggar, Karangjambe, Bojanegara, Karangsentul, Gemuruh, Purbayasa, dan Karanggambas
		Perdagangan dan jasa	SP Karangpule, Padamara, Karangjambe, Bojanegara, Karangsentul, Gemuruh, Mipiran, Kalitinggar Kidul
4	Bojongsari	Pertanian	seluruh Satuan Perumahan
		Perkebunan	seluruh Satuan Perumahan
		Peternakan	seluruh Satuan Perumahan
		Perikanan	seluruh Satuan Perumahan
		Pariwisata	Desa Wisata Karangbanjar dan Obyek Wisata Air Bojongsari (Owabong) di SP Bojongsari
		Industri	SP Brobot dan SP Patemon
		Perdagangan dan jasa	SP Gembong, Bojongsari, Kajongan, Beji
5	Kutasari	Pertanian	seluruh Satuan Perumahan, kecuali SP Cendana dan Karangjengkol
		Perkebunan	seluruh Satuan Perumahan
		Peternakan	seluruh Satuan Perumahan
		Perikanan	seluruh Satuan Perumahan, kecuali SP Cendana dan Karangjengkol
		Pariwisata	Situ Tirta Marta (Sitama), Sanggaluri Park, dan Kolam Pemandian Walik Tirto Asri
		Industri	SP Kutasari
		Perdagangan dan jasa	SP Karanglewas, Karangklesem, Kutasari, Meri, Karangreja, Cendana, Candiwulan, Karangjengkol
6	Kaligondang	Pertanian	seluruh Satuan Perumahan, kecuali SP Sinduraja, Selakambang
		Perkebunan	seluruh Satuan Perumahan
		Peternakan	seluruh Satuan Perumahan

No	LH	Potensi Ekonomi	Lokasi
		Perikanan	seluruh Satuan Perumahan
		Pariwisata	seluruh Satuan Perumahan
		Industri	SP Penolih
		Perdagangan dan jasa	SP Sinduraja, Selanegara, Kaligondang, Kalikajar

Sumber: BPS, 2021

Pengembangan potensi ekonomi lokal di LH Purbalingga dapat diwujudkan dengan mendorong berkembangnya kawasan-kawasan ekonomi produktif dengan mengoptimalkan sumber daya kawasan yang berdaya saing dengan tetap menekankan kepada inisiatif dan partisipasi masyarakat lokal yang kreatif dan produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia lokal, pemanfaatan sumber daya ekonomi, sosial, teknologi, dan kelembagaan lokal, serta penciptaan lapangan pekerjaan bagi penduduk dan masyarakat setempat. Dalam hal ini peranan pemerintah daerah dan atau kelompok-kelompok berbasis masyarakat (*community based-groups*) dalam mengelola sumber daya adalah berupaya untuk mengembangkan usaha kemitraan baru dengan pihak swasta, atau dengan pihak lain, untuk menciptakan pekerjaan baru dan mendorong berkembangnya berbagai kegiatan ekonomi daerah. Harapannya dengan adanya pengembangan potensi ekonomi lokal dapat meningkatkan perekonomian masyarakat untuk memperbaiki kualitas ekonomi dan kualitas hidup di masa yang akan datang. Ini adalah proses dimana masyarakat, swasta dan pemerintah bekerja sama untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penghidupan yang layak.

4.5.2. Analisis Keterkaitan Kegiatan Ekonomi dengan Penyediaan Perumahan

Adanya kegiatan ekonomi yang berkembang akan menarik atau meningkatkan kebutuhan akan penyediaan perumahan. Mengingat pertimbangan memilih hunian bagi masyarakat salah satunya adalah kedekatan ke sarana pelayanan umum, kedekatan ke tempat bekerja, kelengkapan infrastruktur dan kemudahan aksesibilitas menuju pusat aktivitas.

Tabel IV.54.
Keterkaitan Kegiatan Ekonomi dengan Penyediaan Perumahan

Kegiatan Ekonomi	Dampak terhadap Penyediaan Perumahan
Pertanian	peningkatan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, dapat dioptimalkan dengan pengembangan kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian, industri dan perdagangan jasa. Meningkatnya aktivitas ekonomi dan pendukungnya akan meningkatkan kebutuhan hunian bagi para pelaku ekonomi
Perkebunan	
Peternakan	
Perikanan	
Pariwisata	kegiatan pariwisata akan meningkatkan hunian untuk wisatawan dan kebutuhan hunian untuk para pelaku pariwisata
Industri	peningkatan kebutuhan hunian untuk pekerja industri
Perdagangan dan jasa	peningkatan kebutuhan hunian dengan karakteristik permukiman perkotaan

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

4.5.3. Analisis *Supply* dan *Demand* Perumahan

Supply dan *demand* perumahan di LH Purbalingga dipengaruhi oleh faktor alami dan faktor eksternal.

1. Faktor alami berupa peningkatan laju pertumbuhan penduduk per tahun yang menyebabkan peningkatan jumlah penduduk per tahun. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan akan hunian.
2. Faktor eksternal berupa perkembangan kegiatan ekonomi seperti perkembangan kegiatan industri, pariwisata, perdagangan, pertanian dan sebagainya. Adanya perkembangan kegiatan ekonomi akan menjadi daya tarik masyarakat untuk memiliki hunian yang dekat dengan pusat aktivitas.
3. Faktor eksternal berupa permintaan kebutuhan hunian dari kabupaten yang berbatasan langsung dengan LH Purbalingga, yaitu daerah Purwokerto, yang letaknya cukup dekat dan didukung dengan ketersediaan akses transportasi yang baik. Sehingga ada sebagian permintaan hunian dari masyarakat Purwokerto.

Faktor tersebut mempengaruhi dalam perhitungan kebutuhan rumah di LH Purbalingga ke depan. Untuk pertambangan dari faktor alami dihitung berdasarkan pada laju pertumbuhan penduduk yaitu sekitar 0,2-0,8% per tahun, sedangkan pertambahan dari faktor eksternal dipertimbangkan berdasarkan pada angka migrasi masuk dari kabupaten sekitarnya ke Kabupaten Purbalingga, termasuk dari Kabupaten Banyumas. Angka migrasi masuk (migrasi in) ke Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 (berdasarkan data BPS, 2021) adalah 1123 jiwa, sedangkan sebelumnya di tahun 2019 sebanyak 7944 jiwa. Jika dirata-rata maka prosentasi angka migrasi masuk sebesar 0,45% per tahun.

4.6. Analisis Penyediaan dan Kebutuhan Pengembangan Perumahan

4.6.1. Analisis Kondisi dan Karakteristik Satuan Perumahan

Perumahan di seluruh Lingkungan Hunian Purbalingga tersebar di seluruh satuan perumahan, dengan penyebaran mengikuti pola jalan dan pola perkampungan eksisting di masing-masing desa.

Berdasarkan fungsi rumahnya, perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga memiliki fungsi:

1. Hunian seluruhnya, umumnya berada di satuan perumahan eksisting, diluar kawasan perkotaan.
2. Sebagian non hunian, umumnya berada di kawasan campuran antara perumahan dengan aktivitas lain seperti perdagangan dan jasa. Bentuk rumah sebagian non hunian ini berupa rumah toko.
3. Non hunian (perdagangan, jasa, kantor, industri, SPU) umumnya berada di pusat aktivitas kawasan perkotaan Purbalingga.

Berdasarkan jenis rumah, perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga memiliki fungsi:

1. Rumah komersial, berupa rumah non hunian (perdagangan, jasa, kantor, industri, SPU).

2. Rumah umum, berupa rumah bagi MBR.
3. Rumah swadaya, diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok. Sebagian besar rumah di Lingkungan Hunian Purbalingga merupakan rumah swadaya.
4. Rumah negara adalah rumah yang dimiliki negara, berupa rumah dinas.

Berdasarkan bentuk rumah, perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga memiliki fungsi:

1. Rumah tunggal adalah adalah rumah yang berdiri sendiri di suatu tempat dan lokasinya berjauhan dengan rumah-rumah di sekitarnya. Rumah swadaya umumnya berbentuk rumah tunggal.
2. Rumah deret adalah rumah yang masing-masing unit bangunannya saling menempel satu sama lain. Rumah deret biasanya terlihat di perumahan yang dibangun oleh developer, atau di perkampungan.
3. Rumah susun adalah rumah yang berada di dalam sebuah bangunan besar bertingkat yang memuat beberapa unit rumah sekaligus. Rumah susun di Lingkungan Hunian Purbalingga hanya terdapat di Perumahan Kembaran Kulon. Selain itu, terdapat juga rencana pembangunan rumah susun yang berada di Perumahan Kandang Gampang dan Perumahan Bojong.

Berdasarkan kualitas bangunannya, perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga umumnya terdiri atas:

1. Rumah layak huni adalah kondisi dimana rumah beserta lingkungannya telah memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal, baik secara fisik, kesehatan maupun sosial. Sebagian besar rumah di Lingkungan Hunian Purbalingga termasuk dalam rumah layak huni.
2. Rumah tidak layak huni, adalah kondisi dimana rumah beserta lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal, baik secara fisik, kesehatan maupun sosial. Rumah tidak layak huni masih tersebar di seluruh Satuan Perumahan. Umumnya RTLH dimiliki/ dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah, yang terbatas kemampuannya untuk memperbaiki rumah sendiri.

Berdasarkan pelaku pembangunannya, perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga umumnya terdiri atas:

a. Perumahan swadaya

   Perumahan swadaya adalah perumahan yang dibangun oleh masyarakat sendiri, umumnya dalam lingkungan perumahan eksisting yang terbentuk secara alami.

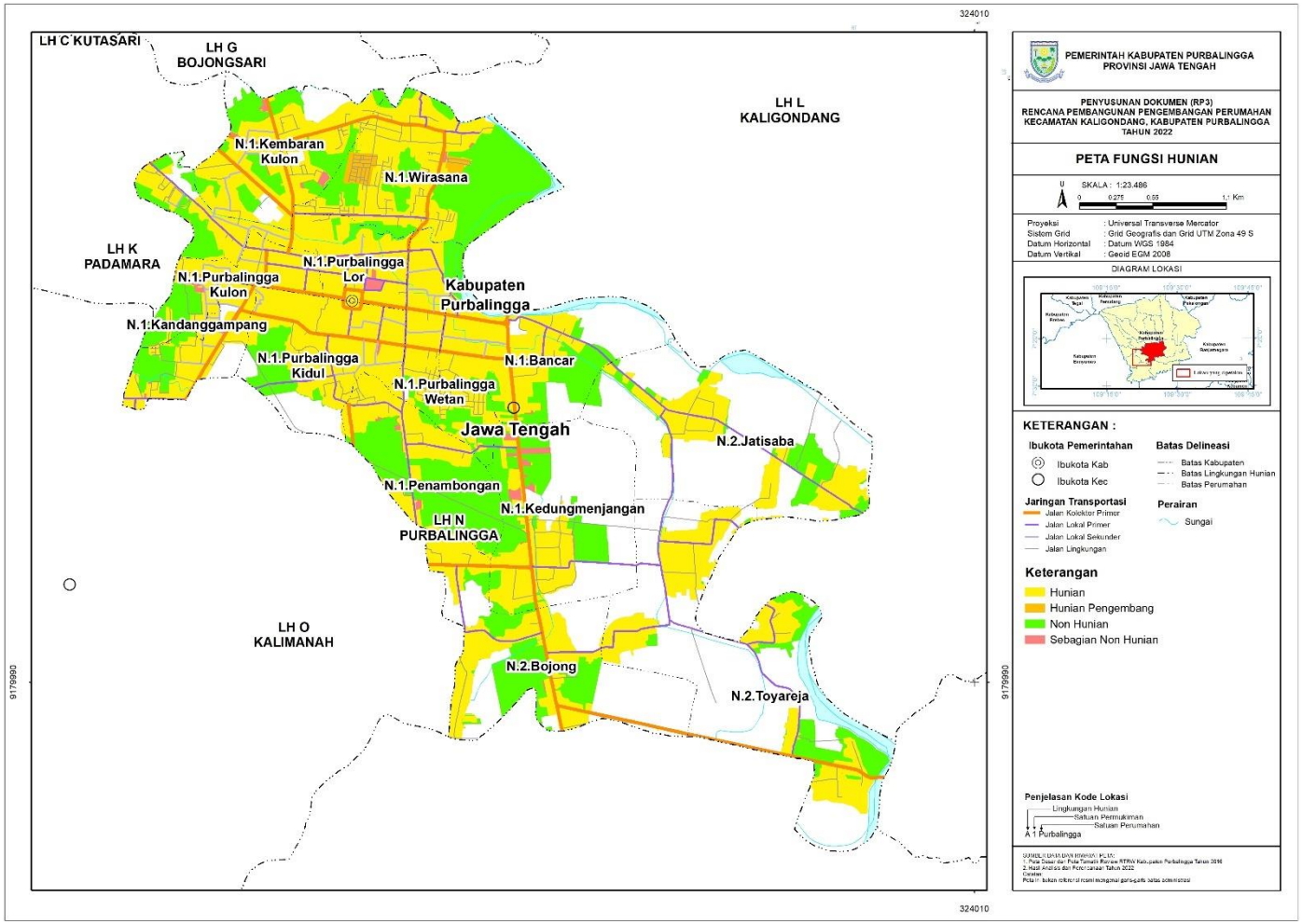
b. Perumahan pengembang/ developer

   Perumahan pengembang/ developer adalah bentuk perumahan yang dikembangkan oleh swasta, umumnya dalam lingkungan tertata, sudah tersedia prasarana dan utilitas pendukung.

Tabel IV.55.
Karakteristik Satuan Perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga

No	Perumahan	Jml Rumah (unit)	Jml Rusun (unit)	Jml Perumahan Developer (unit)	Jml RTLH (unit)	Jml RTLH di Kaw Kumuh (unit)	Perumahan Kumuh (Ha)	Perumahan di Kaw Rawan Bencana (Ha)	Perumahan di Kaw strategis (Ha)
1	Bojong	892	0	132	133	33	4,14	81,90	0
2	Toyareja	479	0	54	131	64	19,38	52,10	0
3	Kedung Menjangan	561	0	0	87	36	9,19	50,78	0
4	Jatisaba	626	0	27	170	90	11,28	85,09	0
5	Bancar	725	0	0	76	27	6,55	76,63	0
6	Purbalingga Wetan	883	0	28	86	8	2,62	60,65	0
7	Penambongan	809	0	0	138	77	9,89	105,30	0
8	Purbalingga Kidul	1.074	0	0	181	36	10,98	60,95	0
9	Kandang Gampang	535	0	0	104	31	5,83	48,20	0
10	Purbalingga Kulon	480	0	0	30	15	8,46	21,79	0
11	Purbalingga Lor	1.089	0	43	149	62	8,77	110,87	0
12	Kembaran Kulon	808	58	0	146	38	5,46	82,37	0
13	Wirasana	1.248	0	172	172	119	30,57	127,09	0
Jumlah		**10.209**	**58**	**456**	**1.603**	**636**	**133,12**	**963,72**	**0**

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022



Gambar 4.15.
Peta Fungsi Hunian di Lingkungan Hunian Purbalingga

Perumahan di seluruh Lingkungan Hunian Kalimanah tersebar di seluruh satuan perumahan, dengan penyebaran mengikuti pola jalan dan pola perkampungan eksisting di masing-masing desa.

Berdasarkan fungsi rumahnya, perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah memiliki fungsi:

1. Hunian seluruhnya, umumnya berada di satuan perumahan eksisting, di luar kawasan perkotaan.
2. Sebagian non hunian, umumnya berada di kawasan campuran antara perumahan dengan aktivitas lain seperti perdagangan dan jasa. Bentuk rumah sebagian non hunian ini berupa rumah toko.
3. Non hunian (perdagangan, jasa, kantor, industri, SPU) umumnya berada di pusat aktivitas kawasan perkotaan Kalimanah.

Berdasarkan jenis rumah, perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah memiliki fungsi:

1. Rumah komersial, berupa rumah non hunian (perdagangan, jasa, kantor, industri, SPU).
2. Rumah umum, berupa rumah bagi MBR.
3. Rumah swadaya, diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok. Sebagian besar rumah di Lingkungan Hunian Kalimanah merupakan rumah swadaya.

Berdasarkan bentuk rumah, perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah memiliki fungsi:

1. Rumah tunggal adalah adalah rumah yang berdiri sendiri di suatu tempat dan lokasinya berjauhan dengan rumah-rumah di sekitarnya. Rumah swadaya umumnya berbentuk rumah tunggal.
2. Rumah deret adalah rumah yang masing-masing unit bangunannya saling menempel satu sama lain. Rumah deret biasanya terlihat di perumahan yang dibangun oleh developer, atau di perkampungan.
3. Rumah susun adalah rumah yang berada di dalam sebuah bangunan besar bertingkat yang memuat beberapa unit rumah sekaligus. Rumah susun di Lingkungan Hunian Kalimanah masih berupa rencana pembangunan rumah susun yang berada di Perumahan Kalikabong dan Perumahan Mewek.

Berdasarkan kualitas bangunannya, perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah umumnya terdiri atas:

1. Rumah layak huni adalah kondisi dimana rumah beserta lingkungannya telah memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal, baik secara fisik, kesehatan maupun sosial. Sebagian besar rumah di Lingkungan Hunian Kalimanah termasuk dalam rumah layak huni.
2. Rumah tidak layak huni, adalah kondisi dimana rumah beserta lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal, baik secara fisik, kesehatan maupun sosial. Rumah tidak layak huni masih tersebar di seluruh Satuan Perumahan.

Umumnya RTLH dimiliki/ dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah, yang terbatas kemampuannya untuk memperbaiki rumah sendiri.

Berdasarkan pelaku pembangunannya, perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah umumnya terdiri atas:

a. Perumahan swadaya

Perumahan swadaya adalah perumahan yang dibangun oleh masyarakat sendiri, umumnya dalam lingkungan perumahan eksisting yang terbentuk secara alami.

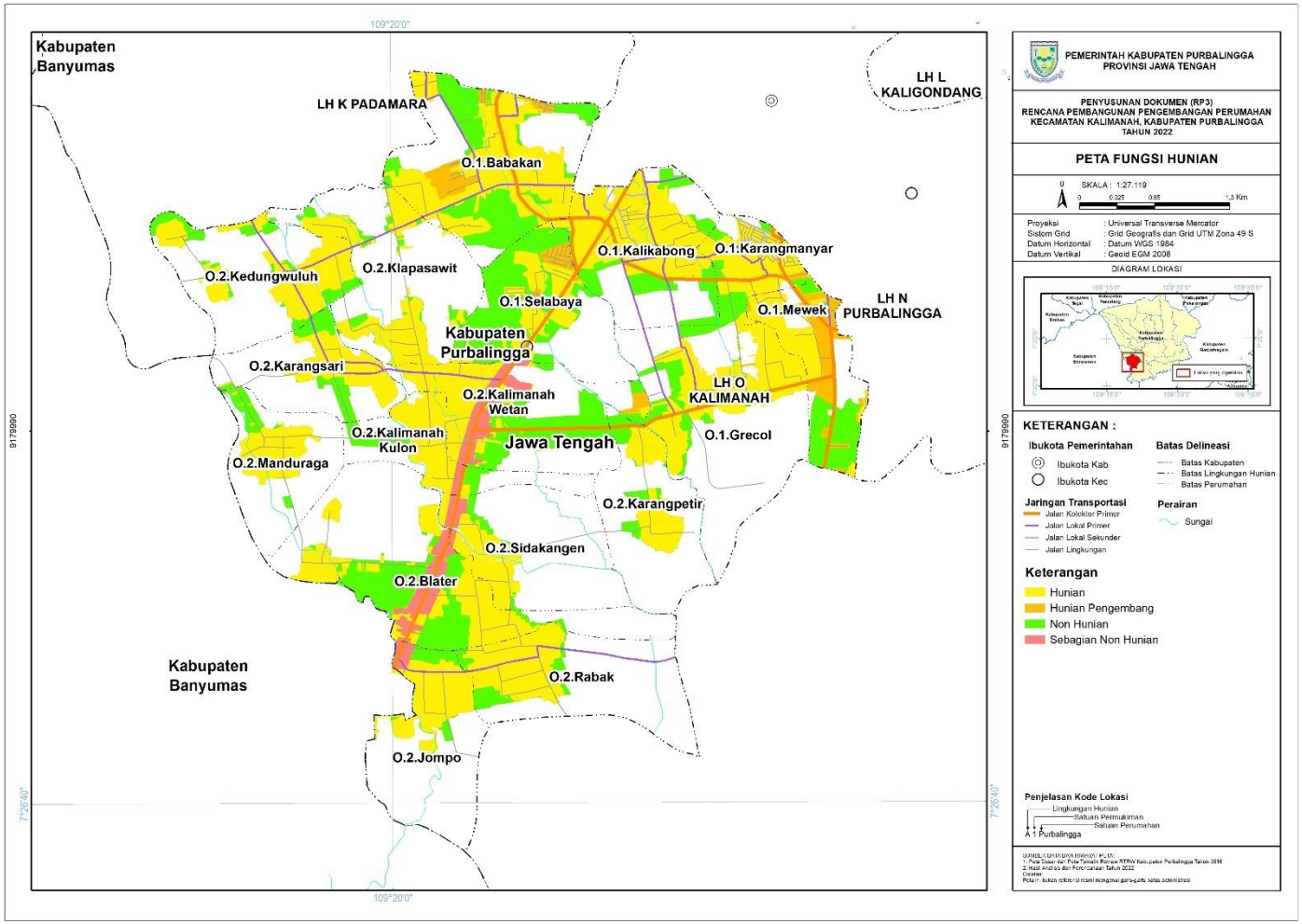
b. Perumahan pengembang/ developer

Perumahan pengembang/ developer adalah bentuk perumahan yang dikembangkan oleh swasta, umumnya dalam lingkungan tertata, sudah tersedia prasarana dan utilitas pendukung.

Tabel IV.56.
Karakteristik Satuan Perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah

No	Perumahan	Jml Rumah (unit)	Jml Rusun (unit)	Jml Perumahan Developer (unit)	Jml RTLH (unit)	Jml RTLH di Kaw Kumuh (unit)	Perumahan Kumuh (Ha)	Perumahan di Kaw Rawan Bencana (Ha)	Perumahan di Kaw strategis (Ha)
1	Jompo	266	0	0	104	0	0	42,56	0
2	Rabak	366	0	0	101	0	0	48,51	0
3	Blater	449	0	0	153	0	0	109,39	0
4	Sidakangen	298	0	0	118	0	0	34,47	0
5	Karangpetir	173	0	0	100	0	0	32,10	0
6	Grecol	463	0	0	141	39	11,25	78,08	0
7	Mewek	261	0	0	53	26	10,63	66,92	0
8	Karangmanyar	273	0	0	42	10	6,18	47,89	0
9	Kalikabong	682	0	0	227	53	12,86	100,90	0
10	Selabaya	455	0	41	65	19	4,14	86,30	0
11	Kalimanah Wetan	401	0	131	98	0	11,38	97,76	0
12	Kalimanah Kulon	258	0	0	70	0	0,01	42,12	0
13	Manduraga	227	0	0	55	0	0	30,03	0
14	Karangsari	218	0	0	59	0	0	38,42	0
15	Kedungwuluh	385	0	0	138	0	0	57,78	0
16	Klapasawit	547	0	61	182	0	0,76	67,19	0
17	Babakan	776	0	13	289	76	11,63	125,28	0
Jumlah		**6.497**	**0**	**246**	**1.995**	**223**	**68,84**	**1.105,71**	**0**

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022



Gambar 4.16.
Peta Fungsi Hunian di Lingkungan Hunian Kalimanah

Perumahan di seluruh Lingkungan Hunian Padamara tersebar di seluruh satuan perumahan, dengan penyebaran mengikuti pola jalan dan pola perkampungan eksisting di masing-masing desa.

Berdasarkan fungsi rumahnya, perumahan di Lingkungan Hunian Padamara memiliki fungsi:

1. Hunian seluruhnya, umumnya berada di satuan perumahan eksisting, di luar kawasan perkotaan.
2. Sebagian non hunian, umumnya berada di kawasan campuran antara perumahan dengan aktivitas lain seperti perdagangan dan jasa. Bentuk rumah sebagian non hunian ini berupa rumah toko.
3. Non hunian (perdagangan, jasa, kantor, industri, SPU) umumnya berada di pusat aktivitas kawasan perkotaan Padamara.

Berdasarkan jenis rumah, perumahan di Lingkungan Hunian Padamara memiliki fungsi:

1. Rumah komersial, berupa rumah non hunian (perdagangan, jasa, kantor, industri, SPU).
2. Rumah umum, berupa rumah bagi MBR.
3. Rumah swadaya, diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok. Sebagian besar rumah di Lingkungan Hunian Padamara merupakan rumah swadaya.

Berdasarkan bentuk rumah, perumahan di Lingkungan Hunian Padamara memiliki fungsi:

1. Rumah tunggal adalah adalah rumah yang berdiri sendiri di suatu tempat dan lokasinya berjauhan dengan rumah-rumah di sekitarnya. Rumah swadaya umumnya berbentuk rumah tunggal.
2. Rumah deret adalah rumah yang masing-masing unit bangunannya saling menempel satu sama lain. Rumah deret biasanya terlihat di perumahan yang dibangun oleh developer, atau di perkampungan.
3. Rumah susun adalah rumah yang berada di dalam sebuah bangunan besar bertingkat yang memuat beberapa unit rumah sekaligus. Rumah susun di Lingkungan Hunian Padamara masih berupa rencana pembangunan rumah susun yang berada di Perumahan Karangsentul.

Berdasarkan kualitas bangunannya, perumahan di Lingkungan Hunian Padamara umumnya terdiri atas:

1. Rumah layak huni adalah kondisi dimana rumah beserta lingkungannya telah memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal, baik secara fisik, kesehatan maupun sosial. Sebagian besar rumah di Lingkungan Hunian Padamara termasuk dalam rumah layak huni.
2. Rumah tidak layak huni, adalah kondisi dimana rumah beserta lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal, baik secara fisik, kesehatan maupun sosial. Rumah tidak layak huni masih tersebar di seluruh Satuan Perumahan. Umumnya RTLH dimiliki/ dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah, yang terbatas kemampuannya untuk memperbaiki rumah sendiri.

Berdasarkan pelaku pembangunannya, perumahan di Lingkungan Hunian Padamara umumnya terdiri atas:

a. Perumahan swadaya

   Perumahan swadaya adalah perumahan yang dibangun oleh masyarakat sendiri, umumnya dalam lingkungan perumahan eksisting yang terbentuk secara alami.

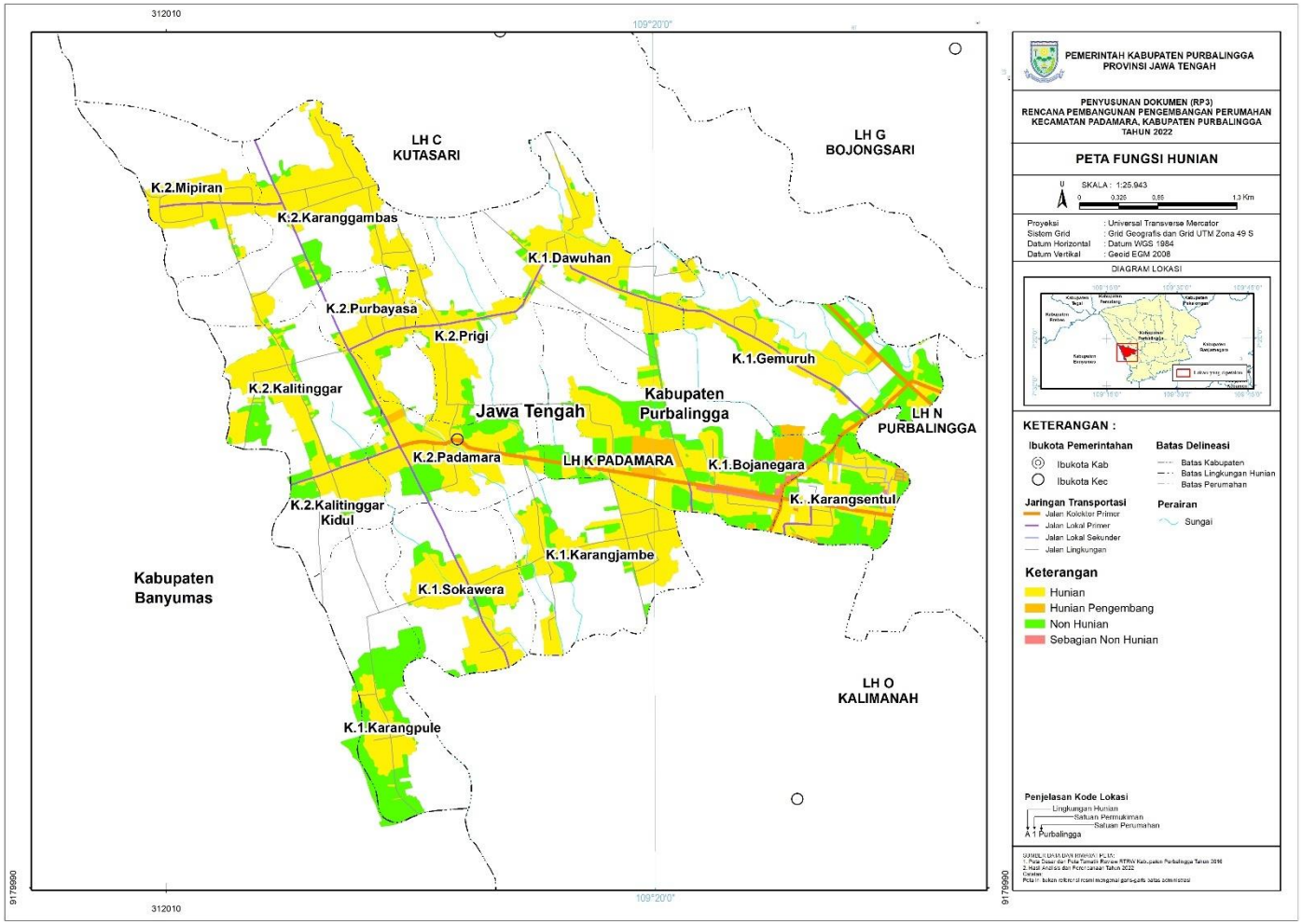
b. Perumahan pengembang/ developer

   Perumahan pengembang/ developer adalah bentuk perumahan yang dikembangkan oleh swasta, umumnya dalam lingkungan tertata, sudah tersedia prasarana dan utilitas pendukung.

Tabel IV.57.
Karakteristik Satuan Perumahan di Lingkungan Hunian Padamara

No	Perumahan	Jml Rumah (unit)	Jml Rusun (unit)	Jml Perumahan Developer (unit)	Jml RTLH (unit)	Jml RTLH di Kaw Kumuh (unit)	Perumahan Kumuh (Ha)	Perumahan di Kaw Rawan Bencana (Ha)	Perumahan di Kaw strategis (Ha)
1	Karangpule	397	0	0	79	0	0	60,55	0
2	Kalitinggar	687	0	0	84	0	0	49,52	0
3	Sokawera	650	0	0	140	0	0	55,08	0
4	Padamara	787	0	0	106	0	0	69,47	0
5	Karangjambe	1.002	0	0	147	0	0,0016	66,77	0
6	Bojanegara	1.552	0	66	251	0	0,19	135,86	0
7	Karangsentul	677	0	30	84	38	6,52	64,19	0
8	Gemuruh	1.045	0	190	242	0	0,11	84,97	0
9	Dawuhan	1.034	0	0	261	0	0	57,37	0
10	Prigi	809	0	0	148	0	0	44,55	0
11	Purbayasa	589	0	0	87	0	0	30,99	0
12	Karanggambas	1.058	0	0	341	0	0	73,44	0
13	Mipiran	864	0	0	449	0	0	34,53	0
14	Kalitinggar Kidul	459	0	0	61	0	0	31,18	0
Jumlah		**11.610**	**0**	**286**	**2.480**	**38**	**6,82**	**858,48**	**0**

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022



Gambar 4.17.
Peta Fungsi Hunian di Lingkungan Hunian Padamara

Perumahan di seluruh Lingkungan Hunian Bojongsari tersebar di seluruh satuan perumahan, dengan penyebaran mengikuti pola jalan dan pola perkampungan eksisting di masing-masing desa.

Berdasarkan fungsi rumahnya, perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari memiliki fungsi:

1. Hunian seluruhnya, umumnya berada di satuan perumahan eksisting, di luar kawasan perkotaan.
2. Sebagian non hunian, umumnya berada di kawasan campuran antara perumahan dengan aktivitas lain seperti perdagangan dan jasa. Bentuk rumah sebagian non hunian ini berupa rumah toko.
3. Non hunian (perdagangan, jasa, kantor, industri, SPU) umumnya berada di pusat aktivitas kawasan Bojongsari.

Berdasarkan jenis rumah, perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari memiliki fungsi:

1. Rumah komersial, berupa rumah non hunian (perdagangan, jasa, kantor, industri, SPU).
2. Rumah umum, berupa rumah bagi MBR.
3. Rumah swadaya, diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok. Sebagian besar rumah di Lingkungan Hunian Bojongsari merupakan rumah swadaya.

Berdasarkan bentuk rumah, perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari memiliki fungsi:

1. Rumah tunggal adalah adalah rumah yang berdiri sendiri di suatu tempat dan lokasinya berjauhan dengan rumah-rumah di sekitarnya. Rumah swadaya umumnya berbentuk rumah tunggal.
2. Rumah deret adalah rumah yang masing-masing unit bangunannya saling menempel satu sama lain. Rumah deret biasanya terlihat di perumahan yang dibangun oleh developer, atau di perkampungan.

Berdasarkan kualitas bangunannya, perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari umumnya terdiri atas:

1. Rumah layak huni adalah kondisi dimana rumah beserta lingkungannya telah memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal, baik secara fisik, kesehatan maupun sosial. Sebagian besar rumah di Lingkungan Hunian Bojongsari termasuk dalam rumah layak huni.
2. Rumah tidak layak huni, adalah kondisi dimana rumah beserta lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal, baik secara fisik, kesehatan maupun sosial. Rumah tidak layak huni masih tersebar di seluruh Satuan Perumahan. Umumnya RTLH dimiliki/ dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah, yang terbatas kemampuannya untuk memperbaiki rumah sendiri.

Berdasarkan pelaku pembangunannya, perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari umumnya terdiri atas:

a. Perumahan swadaya

   Perumahan swadaya adalah perumahan yang dibangun oleh masyarakat sendiri, umumnya dalam lingkungan perumahan eksisting yang terbentuk secara alami.

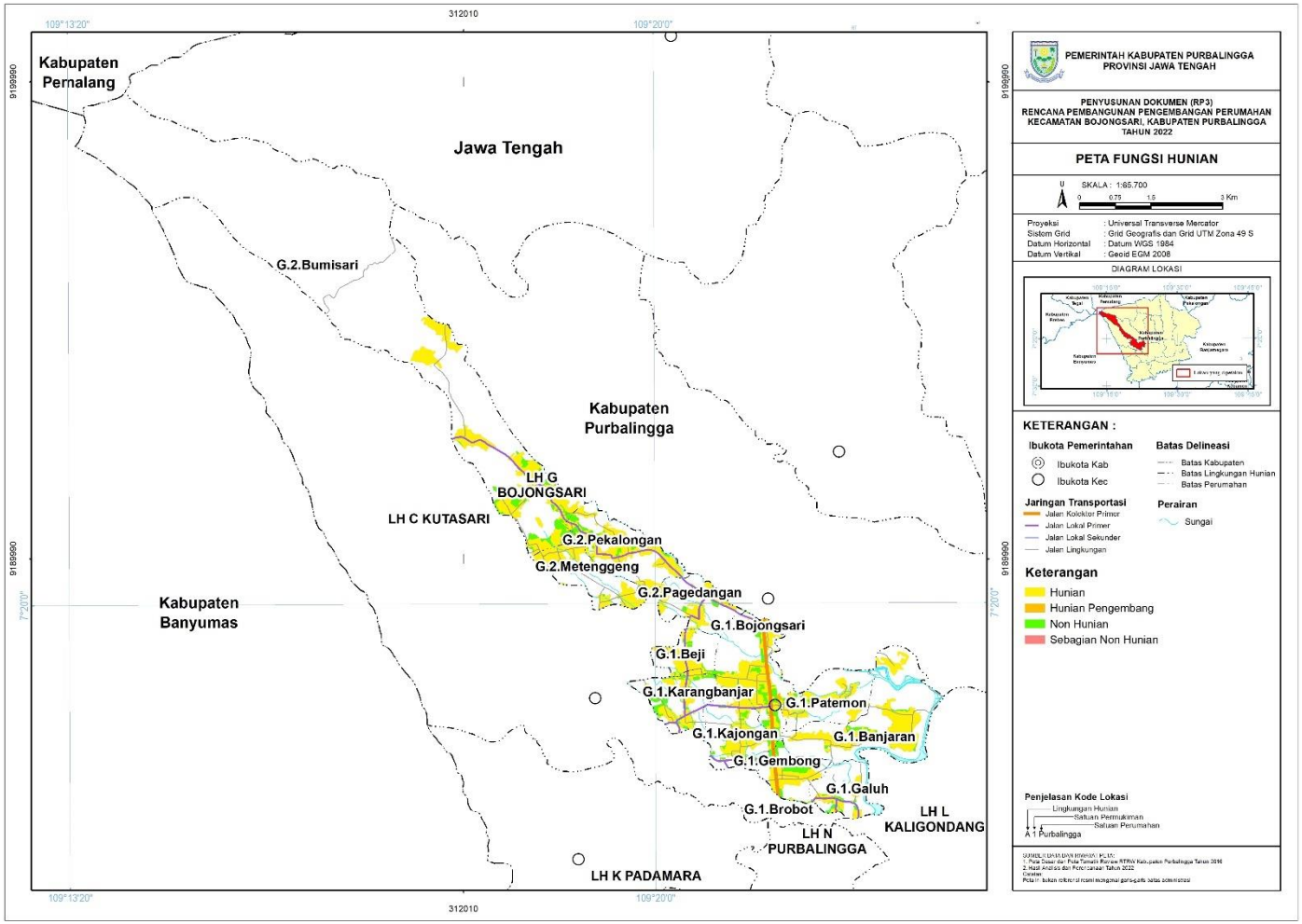
b. Perumahan pengembang/ developer

   Perumahan pengembang/ developer adalah bentuk perumahan yang dikembangkan oleh swasta, umumnya dalam lingkungan tertata, sudah tersedia prasarana dan utilitas pendukung

Tabel IV.58.
Karakteristik Satuan Perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari

No	Perumahan	Jml Rumah (unit)	Jml Rusun (unit)	Jml Perumahan Developer (unit)	Jml RTLH (unit)	Jml RTLH di Kaw Kumuh (unit)	Perumahan Kumuh (Ha)	Perumahan di Kaw Rawan Bencana (Ha)	Perumahan di Kaw strategis (Ha)
1	Brobot	835	0	0	144	26	7,63	70,50	70,50
2	Gembong	790	0	0	150	0	0	61,62	61,62
3	Galuh	624	0	0	137	0	0	34,74	34,74
4	Banjaran	1.226	0	0	362	0	0	115,54	115,54
5	Patemon	905	0	81	375	0	0	63,24	117,62
6	Bojongsari	1.334	0	0	320	0	0	133,72	133,72
7	Kajongan	1.116	0	0	392	0	0	76,63	0
8	Karangbanjar	935	0	0	285	0	0	62,68	62,68
9	Beji	877	0	0	385	0	0	40,00	40,00
10	Pagedangan	824	0	0	221	0	0	45,95	45,95
11	Pekalongan	1.209	0	0	406	0	0	117,62	0
12	Matenggeng	853	0	0	401	0	0	61,64	61,64
13	Bumisari	1.653	0	0	826	0	0	186,78	186,78
Jumlah		**13.181**	**0**	**81**	**4.404**	**26**	**7,63**	**1.070,66**	**930,79**

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022



Gambar 4.18.
Peta Fungsi Hunian di Lingkungan Hunian Bojongsari

Perumahan di seluruh Lingkungan Hunian Kutasari tersebar di seluruh satuan perumahan, dengan penyebaran mengikuti pola jalan dan pola perkampungan eksisting di masing-masing desa.

Berdasarkan fungsi rumahnya, perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari memiliki fungsi:

1. Hunian seluruhnya, umumnya berada di satuan perumahan eksisting, di luar kawasan perkotaan.
2. Sebagian non hunian, umumnya berada di kawasan campuran antara perumahan dengan aktivitas lain seperti perdagangan dan jasa. Bentuk rumah sebagian non hunian ini berupa rumah toko.
3. Non hunian (perdagangan, jasa, kantor, industri, SPU) umumnya berada di pusat aktivitas kawasan Kutasari.

Berdasarkan jenis rumah, perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari memiliki fungsi:

1. Rumah komersial, berupa rumah non hunian (perdagangan, jasa, kantor, industri, SPU).
2. Rumah umum, berupa rumah bagi MBR.
3. Rumah swadaya, diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok. Sebagian besar rumah di Lingkungan Hunian Kutasari merupakan rumah swadaya.

Berdasarkan bentuk rumah, perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari memiliki fungsi:

1. Rumah tunggal adalah adalah rumah yang berdiri sendiri di suatu tempat dan lokasinya berjauhan dengan rumah-rumah di sekitarnya. Rumah swadaya umumnya berbentuk rumah tunggal.
2. Rumah deret adalah rumah yang masing-masing unit bangunannya saling menempel satu sama lain. Rumah deret biasanya terlihat di perumahan yang dibangun oleh developer, atau di perkampungan.

Berdasarkan kualitas bangunannya, perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari umumnya terdiri atas:

1. Rumah layak huni adalah kondisi dimana rumah beserta lingkungannya telah memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal, baik secara fisik, kesehatan maupun sosial. Sebagian besar rumah di Lingkungan Hunian Kutasari termasuk dalam rumah layak huni.
2. Rumah tidak layak huni, adalah kondisi dimana rumah beserta lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal, baik secara fisik, kesehatan maupun sosial. Rumah tidak layak huni masih tersebar di seluruh Satuan Perumahan. Umumnya RTLH dimiliki/ dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah, yang terbatas kemampuannya untuk memperbaiki rumah sendiri.

Berdasarkan pelaku pembangunannya, perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari umumnya terdiri atas:

a. Perumahan swadaya

   Perumahan swadaya adalah perumahan yang dibangun oleh masyarakat sendiri, umumnya dalam lingkungan perumahan eksisting yang terbentuk secara alami.

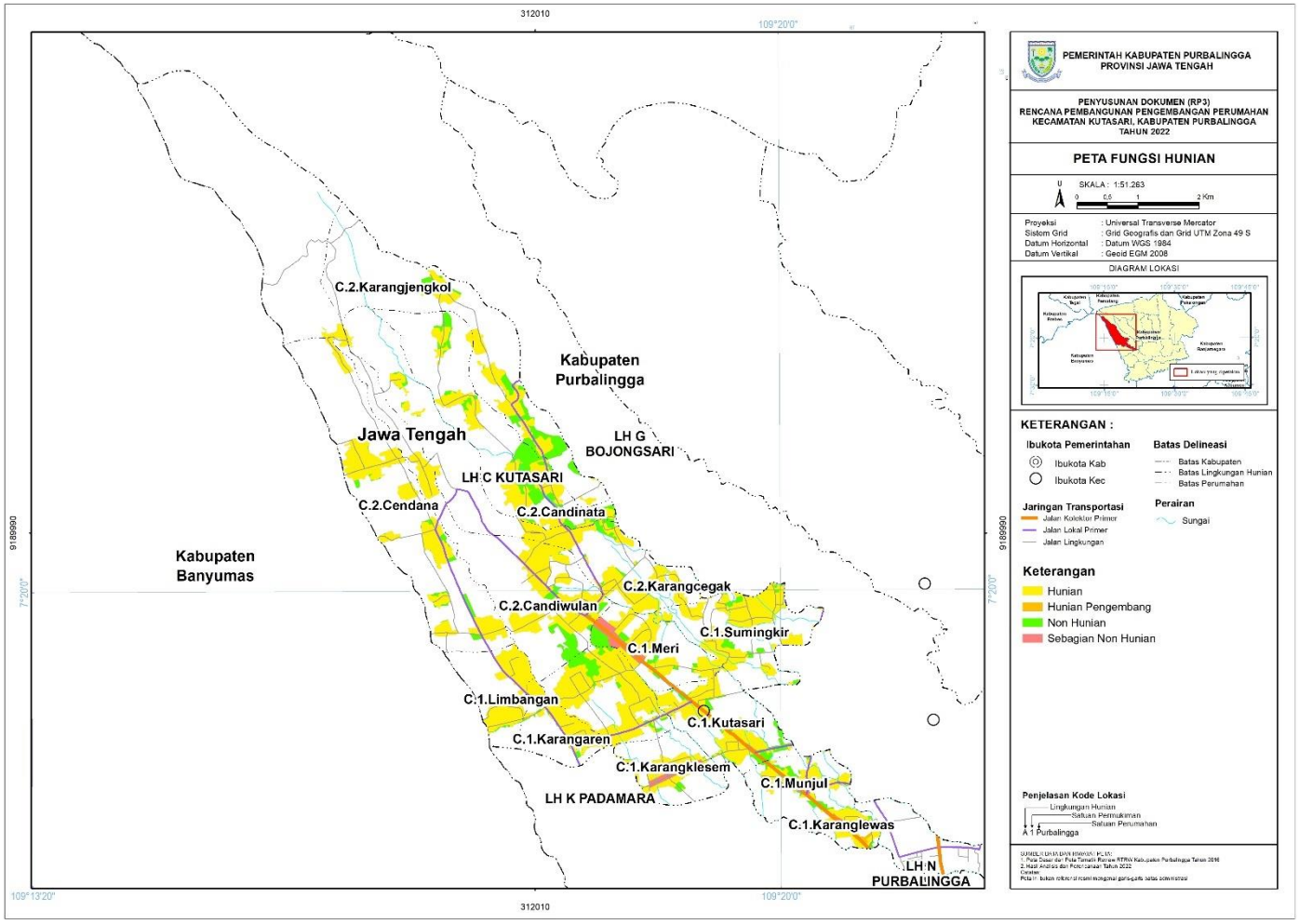
b. Perumahan pengembang/ developer

   Perumahan pengembang/ developer adalah bentuk perumahan yang dikembangkan oleh swasta, umumnya dalam lingkungan tertata, sudah tersedia prasarana dan utilitas pendukung

Tabel IV.59.
Karakteristik Satuan Perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari

No	Perumahan	Jml Rumah (unit)	Jml Rusun (unit)	Jml Perumahan Developer (unit)	Jml RTLH (unit)	Jml RTLH di Kaw Kumuh (unit)	Perumahan Kumuh (Ha)	Perumahan di Kaw Rawan Bencana (Ha)	Perumahan di Kaw strategis (Ha)
1	Karanglewas	441	0	0	170	0	0	32,53	31,53
2	Munjul	597	0	0	227	0	0	49,79	49,79
3	Karangklesem	541	0	0	166	0	0	46,61	46,61
4	Kutasari	838	0	0	379	0	0	88,83	0
5	Sumingkir	821	0	0	467	0	0	114,98	114,98
6	Meri	641	0	54	407	0	0	83,88	83,88
7	Karangreja	1.003	0	0	677	0	0	137,81	137,81
8	Karangaren	249	0	0	127	0	0	22,31	22,31
9	Limbangan	688	0	0	434	0	0	81,42	81,41
10	Cendana	822	0	0	706	0	0	121,48	121,48
11	Candiwulan	882	0	0	551	0	0	137,80	137,80
12	Karangcegak	1.066	0	0	574	0	0	112,54	112,54
13	Candinata	947	0	0	635	0	0	138,21	138,21
14	Karangjengkol	697	0	0	412	0	0	96,18	96,18
Jumlah		**10.233**	**0**	**54**	**5.932**	**0**	**0**	**1.264,36**	**1.174,53**

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022



Gambar 4.19.
Peta Fungsi Hunian di Lingkungan Hunian Kutasari

Perumahan di seluruh Lingkungan Hunian Kaligondang tersebar di seluruh satuan perumahan, dengan penyebaran mengikuti pola jalan dan pola perkampungan eksisting di masing-masing desa.

Berdasarkan fungsi rumahnya, perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang memiliki fungsi:

1. Hunian seluruhnya, umumnya berada di satuan perumahan eksisting, di luar kawasan perkotaan.
2. Sebagian non hunian, umumnya berada di kawasan campuran antara perumahan dengan aktivitas lain seperti perdagangan dan jasa. Bentuk rumah sebagian non hunian ini berupa rumah toko.
3. Non hunian (perdagangan, jasa, kantor, industri, SPU) umumnya berada di pusat aktivitas kawasan Kaligondang.

Berdasarkan jenis rumah, perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang memiliki fungsi:

1. Rumah komersial, berupa rumah non hunian (perdagangan, jasa, kantor, industri, SPU).
2. Rumah umum, berupa rumah bagi MBR.
3. Rumah swadaya, diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri maupun berkelompok. Sebagian besar rumah di Lingkungan Hunian Kaligondang merupakan rumah swadaya.

Berdasarkan bentuk rumah, perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang memiliki fungsi:

1. Rumah tunggal adalah adalah rumah yang berdiri sendiri di suatu tempat dan lokasinya berjauhan dengan rumah-rumah di sekitarnya. Rumah swadaya umumnya berbentuk rumah tunggal.
2. Rumah deret adalah rumah yang masing-masing unit bangunannya saling menempel satu sama lain. Rumah deret biasanya terlihat di perumahan yang dibangun oleh developer, atau di perkampungan.

Berdasarkan kualitas bangunannya, perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang umumnya terdiri atas:

1. Rumah layak huni adalah kondisi dimana rumah beserta lingkungannya telah memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal, baik secara fisik, kesehatan maupun sosial. Sebagian besar rumah di Lingkungan Hunian Kaligondang termasuk dalam rumah layak huni.
2. Rumah tidak layak huni, adalah kondisi dimana rumah beserta lingkungannya tidak memenuhi persyaratan yang layak untuk tempat tinggal, baik secara fisik, kesehatan maupun sosial. Rumah tidak layak huni masih tersebar di seluruh Satuan Perumahan. Umumnya RTLH dimiliki/ dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah, yang terbatas kemampuannya untuk memperbaiki rumah sendiri.

Berdasarkan pelaku pembangunannya, perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang umumnya terdiri atas:

a. Perumahan swadaya

   Perumahan swadaya adalah perumahan yang dibangun oleh masyarakat sendiri, umumnya dalam lingkungan perumahan eksisting yang terbentuk secara alami.

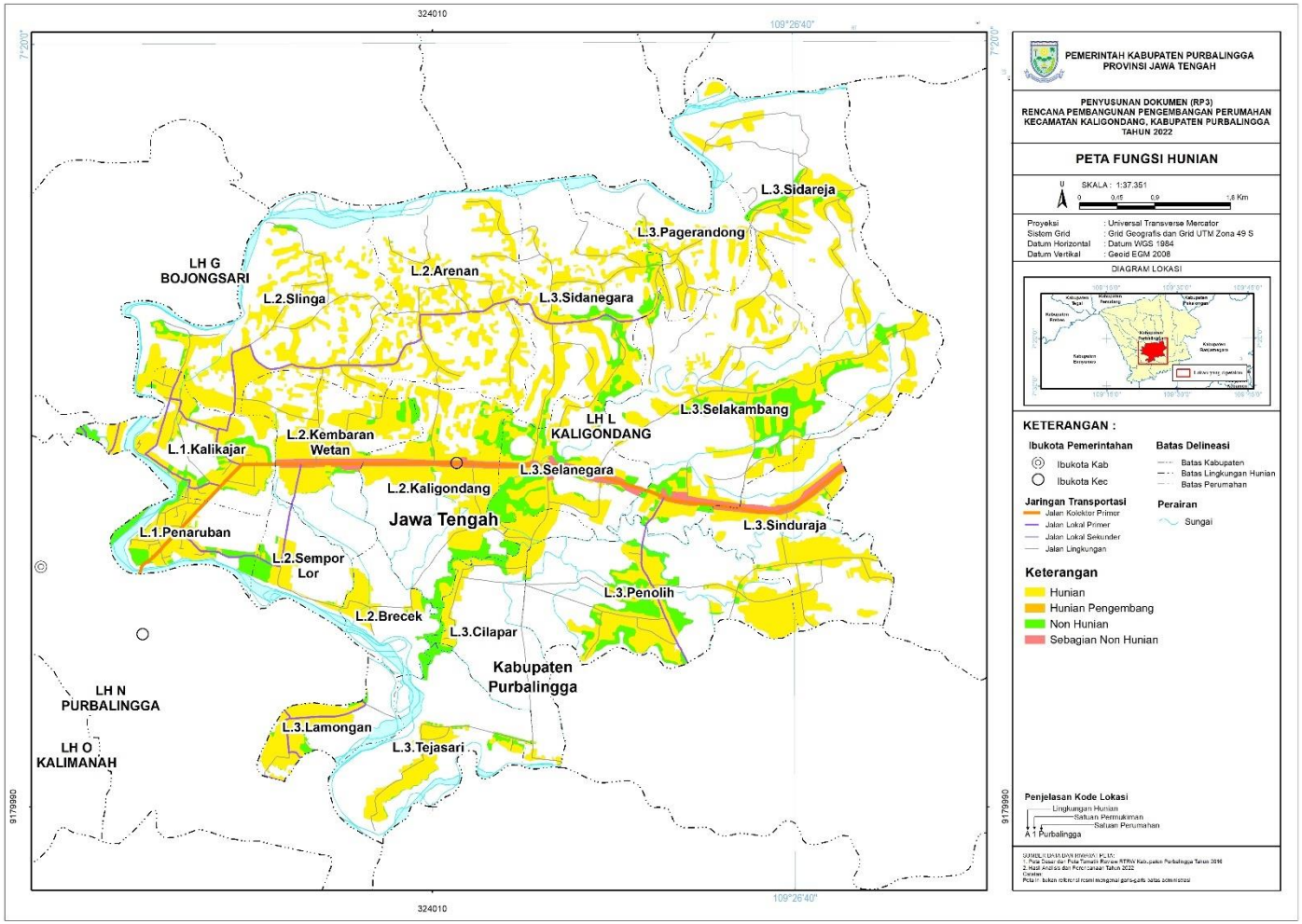
b. Perumahan pengembang/ developer

   Perumahan pengembang/ developer adalah bentuk perumahan yang dikembangkan oleh swasta, umumnya dalam lingkungan tertata, sudah tersedia prasarana dan utilitas pendukung

Tabel IV.60.
Karakteristik Satuan Perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang

No	Perumahan	Jml Rumah (unit)	Jml Rusun (unit)	Jml Perumahan Developer (unit)	Jml RTLH (unit)	Jml RTLH di Kaw Kumuh (unit)	Perumahan Kumuh (Ha)	Perumahan di Kaw Rawan Bencana (Ha)	Perumahan di Kaw strategis (Ha)
1	Lamongan	726	0	0	170	0	0,4	45,86	45,86
2	Tejasari	727	0	0	81	0	0	47,62	47,62
3	Cilapar	576	0	0	123	0	0	50,03	50,03
4	Penolih	1.039	0	0	238	0	0	148,75	148,75
5	Sinduraja	1.364	0	0	283	0	0	106,02	0
6	Selakambang	2.183	0	0	689	0	0	191,04	191,04
7	Selanegara	912	0	0	239	0	0	117,55	117,55
8	Kaligondang	902	0	0	174	0	0	160,18	160,18
9	Brecek	398	0	0	84	0	0	30,18	30,18
10	Sempor Lor	358	0	0	41	0	0	24,14	24,14
11	Penaruban	1.365	0	0	145	23	6,95	61,37	61,37
12	Kalikajar	1.231	0	26	210	52	18,52	110,51	110,51
13	Kembaran Wetan	853	0	36	223	0	0	123,66	123,66
14	Slinga	1.438	0	0	300	0	6,88	145,74	145,74
15	Arenan	1.069	0	0	272	0	0	123,09	123,09
16	Sidanegara	850	0	0	235	0	0	128,14	124,18
17	Pagerandong	545	0	0	173	0	0	124,18	43,85
18	Sidareja	1.267	0	0	299	0	0	43,85	124,18
Jumlah		**17.803**	**0**	**62**	**3.979**	**75**	**32,75**	**1.781,92**	**1.671,93**

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022



Gambar 4.20.
Peta Fungsi Hunian di Lingkungan Hunian Kaligondang

4.6.2. Analisis Peran dan Fungsi Satuan Perumahan Berdasarkan Karakteristik Kegiatan Kawasan

Rencana pengembangan pusat pelayanan di kawasan perkotaan Purbalingga merupakan distribusi pusat-pusat pelayanan di dalam wilayah perencanan (WP) yang akan melayani sub bagian wilayah perencanaan. Rencana pusat pelayanan kegiatan ekonomi dan sosial di Kawasan Perkotaan Purbalingga secara hirarkhis terdiri dari:

1. Pusat Pelayanan Kota (Pusat Pelayanan kabupaten dan WP)
2. Sub Pusat Pelayanan Kota (Pusat Pelayanan Sub WP dan kecamatan)
3. Pusat Lingkungan (Pusat desa/kelurahan dan blok)

Tabel IV.61.
Peran dan Fungsi Satuan Perumahan

No	LH	P	Peran
1	Purbalingga	Bojong	PL
		Toyareja	PL
		Kedung Menjangan	SPPK
		Jatisaba	PL
		Bancar	PL
		Purbalingga Wetan	PL
		Penambongan	PL
		Purbalingga Kidul	PL
		Kandang Gampang	PL
		Purbalingga Kulon	PL
		Purbalingga Lor	PL
		Kembaran Kulon	SPPK
		Wirasana	PL
2	Kalimanah	Jompo	Pendukung WP
		Rabak	Pendukung WP
		Blater	Pendukung WP
		Sidakangen	Pendukung WP
		Karangpetir	Pendukung WP
		Grecol	PL
		Mewek	PL
		Karangmanyar	PL
		Kalikabong	SPPK
		Selabaya	PL
		Kalimanah Wetan	Pendukung WP
		Kalimanah Kulon	Pendukung WP
		Manduraga	Pendukung WP
		Karangsari	Pendukung WP
		Kedungwuluh	Pendukung WP
		Klapasawit	Pendukung WP
		Babakan	PL
3	Padamara	Karangpule	Pendukung WP

No	LH	P	Peran
		Kalitinggar	Pendukung WP
		Sokawera	Pendukung WP
		Padamara	Pendukung WP
		Karangjambe	Pendukung WP
		Bojanegara	Pendukung WP
		Karangsentul	PL
		Gemuruh	Pendukung WP
		Dawuhan	Pendukung WP
		Prigi	Pendukung WP
		Purbayasa	Pendukung WP
		Karanggambas	Pendukung WP
		Mipiran	Pendukung WP
		Kalitinggar Kidul	Pendukung WP
4	Bojongsari	Brobot	PL
		Gembong	Pendukung WP
		Galuh	Pendukung WP
		Banjaran	Pendukung WP
		Patemon	Pendukung WP
		Bojongsari	Pendukung WP
		Kajongan	Pendukung WP
		Karangbanjar	Pendukung WP
		Beji	Pendukung WP
		Pagedangan	Pendukung WP
		Pekalongan	Pendukung WP
		Metenggeng	Pendukung WP
		Bumisari	Pendukung WP
5	Kutasari	Karanglewas	Pendukung WP
		Munjul	Pendukung WP
		Karangklesem	Pendukung WP
		Kutasari	Pendukung WP
		Sumingkir	Pendukung WP
		Meri	Pendukung WP
		Karangreja	Pendukung WP
		Karangaren	Pendukung WP
		Limbangan	Pendukung WP
		Cendana	Pendukung WP
		Candiwulan	Pendukung WP
		Karangcegak	Pendukung WP
		Candinata	Pendukung WP
		Karangjengkol	Pendukung WP
6	Kaligondang	Lamongan	Pendukung WP
		Tejasari	Pendukung WP
		Cilapar	Pendukung WP
		Penolih	Pendukung WP

No	LH	P	Peran
		Sinduraja	Pendukung WP
		Selakambang	Pendukung WP
		Selanegara	Pendukung WP
		Kaligondang	Pendukung WP
		Brecek	Pendukung WP
		Sempor Lor	Pendukung WP
		Penaruban	PL
		Kalikajar	SPPK
		Kembaran Wetan	Pendukung WP
		Slinga	Pendukung WP
		Arenan	Pendukung WP
		Sidanegara	Pendukung WP
		Pagerandong	Pendukung WP
		Sidareja	Pendukung WP

Sumber: RTRW Kab Purbalingga, 2019

Pusat Pelayanan Kota berfungsi melayani kebutuhan ekonomi sosial masyarakat Kabupaten Purbalingga umumnya, dan masyarakat Perkotaan Purbalingga dan sekitarnya khususnya. Pusat Pelayanan Kota ini juga merupakan kawasan Pusat Bisnis (Central Business District), berupa perdagangan perkantoran swasta untuk melayani kebutuhan Kabupaten Purbalingga di masa mendatang. Dengan adanya Bandara Jenderal Besar Soedirman, dibukanya pintu tol Pemalang serta pengembangan pariwisata Goa Lawa oleh beberapa BUMN, maupun rencana pengembangan pariwisata Klawing Riverside di Kelurahan Bancar, kegiatan perdagangan dan jasa di Kawasan Perkotaan Purbalingga sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) akan semakin meningkat di masa mendatang. Pusat Pelayanan Kota ini diharapkan akan dapat melayani kebutuhan bagi 184.884 penduduk di Kawasan Perkotaan Purbalingga. Berdasarkan SNI 03-1733-2004, Pusat Pelayanan Kota minimal terdiri dari: pusat perbelanjaan, SMA, SMP, pos pemadam kebakaran, gedung serba guna, parkir umum, tempat pembuangan sampah, lapangan olahraga, dan puskesmas.

Sub Pusat Pelayaan Kota merupakan pusat pelayaan kegiatan ekonomi sosial budaya yang akan melayani seluruh masyarakat di sub kawasan perkotaan Purbalingga. Sub Pusat Pelayanan Kota ini berdasarkan SNI-03-1733-2004 minimal akan terlayani sarana berupa pusat pertokoan/pasar, SMA/SMK, SMP, masjid, puskesmas, pos kamtib, pemadam kebakaran, agen pos, bis surat, bak sampah, dan parkir umum.

Pusat Lingkungan pada prinsipnya merupakan pusat pelayanan kegiatan ekonomi dan sosial yang melayani masyarakat di tingkat desa. Pusat Pelayanan Lingkungan ini tersebar merata di setiap desa dalam Kawasan Perkotaan Purbalingga. Pusat Lingkungan tingkat desa ini berdasarkan SNI 03 1733 2004 minimal akan terdiri dari: SD, warung/minimarket, pos hansip, balai warga, dan masjid.

4.6.3. Analisis Pengembangan Satuan Perumahan Berdasarkan Proyeksi Penduduk

Peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan rumah di wilayah tersebut. Untuk mengetahui kebutuhan rumah baik saat ini maupun 20 tahun ke depan perlu dilakukan proyeksi. Kebutuhan pengembangan satuan perumahan dihitung berdasarkan proyeksi penduduk alami maupun penambahan penduduk karena faktor eksternal. Dari proyeksi penduduk diasumsikan menjadi jumlah keluarga, dimana satu keluarga harus terpenuhi satu rumah supaya tidak muncul permasalahan backlog kepemilikan rumah.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Lingkungan Hunian Purbalingga tahun 2041 memiliki jumlah penduduk alami dan eksternal sebesar 89.772 jiwa. Dari total keseluruhan penduduk tersebut, diasumsikan menjadi jumlah keluarga (KK) yang terdiri dari 3-4 orang, sehingga menghasilkan proyeksi KK alami dan eksternal sebesar 31.423 KK. Untuk memenuhi kebutuhan rumah yang didasarkan pada satu KK, Lingkungan Hunian Purbalingga membutuhkan penambahan rumah baru sebanyak 11.251 unit. Perlunya penambahan rumah baru alami dan eksternal tersebut bertujuan untuk mencegah permasalahan backlog perumahan. Sementara itu, satuan perumahan yang membutuhkan penambahan rumah paling besar adalah Perumahan Wirasarana sebesar 1.395 unit.

Tabel IV.62.
Kebutuhan Rumah di Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2041

No	Perumahan	Proyeksi Penduduk Alami dan Eksternal 2041 (jw)	Proyeksi KK Alami dan Eksternal 2014 (KK)	Kebutuhan Penambahan Rmh Baru Alami dan Eksternal 2041 (unit)
1	Bojong	7.613	2.731	968
2	Toyareja	4.576	1.520	573
3	Kedung Menjangan	4.946	1.745	636
4	Jatisaba	5.995	2.117	881
5	Bancar	5.514	2.083	651
6	Purbalingga Wetan	7.574	2.580	836
7	Penambongan	7.516	2.516	918
8	Purbalingga Kidul	8.257	3.165	1.042
9	Kandang Gampang	4.926	1.770	712
10	Purbalingga Kulon	3.989	1.470	521
11	Purbalingga Lor	8.999	3.231	1.079
12	Kembaran Kulon	7.692	2.635	1.039
13	Wirasana	12.174	3.860	1.395
Jumlah		89.772	31.423	11.251

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Lingkungan Hunian Kalimanah tahun 2041 memiliki jumlah penduduk alami dan eksternal sebesar 89.536 jiwa. Dari total keseluruhan penduduk tersebut, diasumsikan menjadi jumlah keluarga (KK) yang terdiri dari 3-4 orang, sehingga menghasilkan proyeksi KK alami dan eksternal sebesar 30.108 KK. Untuk memenuhi kebutuhan rumah yang didasarkan pada satu KK, Lingkungan Hunian Kalimanah membutuhkan penambahan rumah baru sebanyak 10.729 unit. Perlunya penambahan rumah baru alami dan eksternal tersebut bertujuan untuk mencegah permasalahan backlog perumahan. Sementara itu, satuan perumahan yang membutuhkan penambahan rumah paling besar adalah Perumahan Babakan sebesar 1.216 unit.

Tabel IV.63.
Kebutuhan Rumah di Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2041

No	Perumahan	Proyeksi Penduduk Alami dan Eksternal 2041 (jw)	Proyeksi KK Alami dan Eksternal 2014 (KK)	Kebutuhan Penambahan Rmh Baru Alami dan Eksternal 2041 (unit)
1	Jompo	3.446	1.300	507
2	Rabak	4.736	1.741	649
3	Blater	5.242	1.890	550
4	Sidakangen	3.919	1.391	502
5	Karangpetir	2.273	805	290
6	Grecol	6.590	2.197	817
7	Mewek	4.058	1.223	444
8	Karangmanyar	3.856	1.191	377
9	Kalikabong	9.238	2.996	963
10	Selabaya	6.337	2.076	718
11	Kalimanah Wetan	5.096	1.804	608
12	Kalimanah Kulon	3.556	1.250	479
13	Manduraga	3.037	1.107	431
14	Karangsari	2.903	1.028	379
15	Kedungwuluh	5.420	1.914	766
16	Klapasawit	8.424	2.667	1.035
17	Babakan	11.407	3.530	1.216
Jumlah		89.536	30.108	10.729

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Lingkungan Hunian Padamara tahun 2041 memiliki jumlah penduduk alami dan eksternal sebesar 71.277 jiwa. Dari total keseluruhan penduduk tersebut, diasumsikan menjadi jumlah keluarga (KK) yang terdiri dari 3-4 orang, sehingga menghasilkan proyeksi KK alami dan eksternal sebesar 23.358 KK. Untuk memenuhi kebutuhan rumah yang didasarkan pada satu KK, Lingkungan Hunian Padamara membutuhkan penambahan rumah baru sebanyak 8.139 unit. Perlunya penambahan rumah baru alami dan eksternal tersebut bertujuan untuk mencegah permasalahan backlog perumahan. Sementara itu, satuan perumahan yang membutuhkan penambahan rumah paling besar adalah Perumahan Gemuruh sebesar 806 unit.

Tabel IV.64.
Kebutuhan Rumah di Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2041

No	Perumahan	Proyeksi Penduduk Alami dan Eksternal 2041 (jw)	Proyeksi KK Alami dan Eksternal 2014 (KK)	Kebutuhan Penambahan Rmh Baru Alami dan Eksternal 2041 (unit)
1	Karangpule	2.482	835	315
2	Kalitinggar	4.354	1.473	572
3	Sokawera	4.163	1.358	506
4	Padamara	4.654	1.643	612
5	Karangjambe	6.058	1.909	595
6	Bojanegara	9.300	2.828	794
7	Karangsentul	4.009	1.290	402
8	Gemuruh	6.894	2.176	806
9	Dawuhan	6.317	2.006	651
10	Prigi	5.086	1.708	648

No	Perumahan	Proyeksi Penduduk Alami dan Eksternal 2041 (jw)	Proyeksi KK Alami dan Eksternal 2014 (KK)	Kebutuhan Penambahan Rmh Baru Alami dan Eksternal 2041 (unit)
11	Purbayasa	3.521	1.215	443
12	Karanggambas	6.743	2.177	790
13	Mipiran	5.008	1.750	617
14	Kalitinggar Kidul	2.689	991	389
Jumlah		71.277	23.358	8.139

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Lingkungan Hunian Bojongsari tahun 2041 memiliki jumlah penduduk alami dan eksternal sebesar 97.004 jiwa. Dari total keseluruhan penduduk tersebut, diasumsikan menjadi jumlah keluarga (KK) yang terdiri dari 3-4 orang, sehingga menghasilkan proyeksi KK alami dan eksternal sebesar 31.959 KK. Untuk memenuhi kebutuhan rumah yang didasarkan pada satu KK, LH Bojongsari membutuhkan penambahan rumah baru sebanyak 11.173 unit. Perlunya penambahan rumah baru alami dan eksternal tersebut bertujuan untuk mencegah permasalahan backlog perumahan. Sementara itu, satuan perumahan yang membutuhkan penambahan rumah paling besar adalah Perumahan Bumisari sebesar 1.379 unit.

Tabel IV.65.
Kebutuhan Rumah di LH Bojongsari Tahun 2041

No	Perumahan	Proyeksi Penduduk Alami dan Eksternal 2041 (jw)	Proyeksi KK Alami dan Eksternal 2014 (KK)	Kebutuhan Penambahan Rmh Baru Alami dan Eksternal 2041 (unit)
1	Brobot	6.152	2.004	687
2	Gembong	5.570	1.928	682
3	Galuh	4.836	1.488	504
4	Banjaran	9.312	2.988	1.054
5	Patemon	6.964	2.259	832
6	Bojongsari	9.657	3.196	1.092
7	Kajongan	8.279	2.714	955
8	Karangbanjar	6.653	2.276	802
9	Beji	6.166	2.149	766
10	Pagedangan	5.993	1.956	656
11	Pekalongan	8.807	2.928	1.021
12	Matenggeng	6.589	2.088	743
13	Bumisari	12.025	3.985	1.379
Jumlah		97.004	31.959	11.173

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Lingkungan Hunian Kutasari tahun 2041 memiliki jumlah penduduk alami dan eksternal sebesar 103.170 jiwa. Dari total keseluruhan penduduk tersebut, diasumsikan menjadi jumlah keluarga (KK) yang terdiri dari 3-4 orang, sehingga menghasilkan proyeksi KK alami dan eksternal sebesar 33.736 KK. Untuk memenuhi kebutuhan rumah yang didasarkan pada satu KK, Lingkungan Hunian Kutasari membutuhkan penambahan rumah baru sebanyak 12.402 unit. Perlunya penambahan rumah baru alami dan eksternal tersebut bertujuan untuk mencegah permasalahan backlog perumahan. Sementara itu, satuan perumahan yang membutuhkan penambahan rumah paling besar adalah Perumahan Karangcegak sebesar 1.324 unit.

Tabel IV.66.
Kebutuhan Rumah di LH Kutasari Tahun 2041

No	Perumahan	Proyeksi Penduduk Alami dan Eksternal 2041 (jw)	Proyeksi KK Alami dan Eksternal 2014 (KK)	Kebutuhan Penambahan Rmh Baru Alami dan Eksternal 2041 (unit)
1	Karanglewas	4.379	1.447	528
2	Munjul	5.845	1.957	713
3	Karangklesem	5.525	1.854	726
4	Kutasari	8.182	2.776	1.029
5	Sumingkir	8.389	2.780	1.069
6	Meri	6.535	2.184	848
7	Karangreja	10.288	3.261	1.170
8	Karangaren	2.377	774	254
9	Limbangan	7.200	2.302	867
10	Cendana	8.168	2.665	951
11	Candiwulan	8.900	2.855	1.016
12	Karangcegak	11.203	3.546	1.324
13	Candinata	9.291	3.045	1.070
14	Karangjengkol	6.888	2.288	835
Jumlah		103.170	33.736	12.402

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Lingkungan Hunian Kaligondang tahun 2041 memiliki jumlah penduduk alami dan eksternal sebesar 107.893 jiwa. Dari total keseluruhan penduduk tersebut, diasumsikan menjadi jumlah keluarga (KK) yang terdiri dari 3-4 orang, sehingga menghasilkan proyeksi KK alami dan eksternal sebesar 36.589 KK. Untuk memenuhi kebutuhan rumah yang didasarkan pada satu KK, Lingkungan Hunian Kaligondang membutuhkan penambahan rumah baru sebanyak 13.915 unit. Perlunya penambahan rumah baru alami dan eksternal tersebut bertujuan untuk mencegah permasalahan backlog perumahan. Sementara itu, satuan perumahan yang membutuhkan penambahan rumah paling besar adalah Perumahan Selakambang sebesar 1.877 unit. Lingkungan Hunian Kaligondang merupakan salah satu lingkungan hunian yang paling banyak membutuhkan penambahan rumah dibanding lingkungan hunian lainnya.

Tabel IV.67.
Kebutuhan Rumah di LH Kaligondang Tahun 2041

No	Perumahan	Proyeksi Penduduk Alami dan Eksternal 2041 (jw)	Proyeksi KK Alami dan Eksternal 2014 (KK)	Kebutuhan Penambahan Rmh Baru Alami dan Eksternal 2041 (unit)
1	Lamongan	4.281	1.484	559
2	Tejasari	4.238	1.501	575
3	Cilapar	3.360	1.218	485
4	Penolih	6.462	2.224	901
5	Sinduraja	8.060	2.773	1.036
6	Selakambang	14.407	4.657	1.877
7	Selanegara	5.636	1.922	760
8	Kaligondang	5.319	1.894	745
9	Brecek	2.302	815	308
10	Sempor Lor	2.066	741	285
11	Penaruban	7.412	2.602	864
12	Kalikajar	7.227	2.422	854

No	Perumahan	Proyeksi Penduduk Alami dan Eksternal 2041 (jw)	Proyeksi KK Alami dan Eksternal 2014 (KK)	Kebutuhan Penambahan Rmh Baru Alami dan Eksternal 2041 (unit)
13	Kembaran Wetan	5.348	1.813	726
14	Slinga	8.652	2.895	1.064
15	Arenan	6.104	2.099	737
16	Sidanegara	5.537	1.812	730
17	Pagerandong	3.687	1.196	502
18	Sidareja	7.795	2.523	909
Jumlah		107.893	36.589	13.915

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

4.6.4. Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan (Backlog) Rumah

Backlog perumahan dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan penduduk. Backlog dihitung berdasarkan ketersediaan rumah dan kebutuhan eksisting rumah saat ini (diasumsikan dengan jumlah keluarga). Angka backlog menunjukkan jumlah keluarga yang belum memiliki rumah sendiri. Salah satu penyebab tingginya angka backlog perumahan dapat disebabkan rendahnya pembiayaan sector perumahan dari pemerintah maupun swasta, jumlah pasokan hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah sangat terbatas, kemampuan rumah tangga membeli hunian masih rendah, hingga masih banyaknya jumlah rumah yang tidak layak huni.

Berdasarkan kondisi eksisting, Lingkungan Hunian Purbalingga memiliki jumlah KK sebesar 20.172 KK yang diasumsikan terdiri dari 3-4 orang. Sementara itu, ketersediaan rumah di Lingkungan Hunian Purbalingga hanya sebesar 10.209 unit. Sehingga, dari adanya kesenjangan tersebut terjadi backlog perumahan atau keluarga yang belum memiliki rumah sendiri sebesar 9.963 unit. Backlog perumahan terbesar berada di Perumahan Wirasana sebanyak 1.217 unit. Maka dari itu, perlu adanya peran aktif dari stakeholder di bidang perumahan agar kebutuhan rumah sesuai dengan jumlah keluarga, sehingga tidak menimbulkan terjadinya backlog.

Tabel IV.68.
Backlog Kepemilikan Rumah di Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2020

No	Perumahan	Jml KK 2020	Jml Rmh 2020 (unit)	Backlog Rmh 2020 (Unit)
1	Bojong	1.763	892	871
2	Toyareja	947	479	468
3	Kedung Menjangan	1.109	561	548
4	Jatisaba	1.236	626	610
5	Bancar	1.432	725	707
6	Purbalingga Wetan	1.744	883	861
7	Penambongan	1.598	809	789
8	Purbalingga Kidul	2.123	1.074	1.049
9	Kandang Gampang	1.058	535	523
10	Purbalingga Kulon	949	480	469
11	Purbalingga Lor	2.152	1.089	1.063
12	Kembaran Kulon	1.596	808	788
13	Wirasana	2.465	1.248	1.217

No	Perumahan	Jml KK 2020	Jml Rmh 2020 (unit)	Backlog Rmh 2020 (Unit)
Jumlah		20.172	10.209	9.963

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Berdasarkan kondisi eksisting, Lingkungan Hunian Kalimanah memiliki jumlah KK sebesar 19.379 KK yang diasumsikan terdiri dari 3-4 orang. Sementara itu, ketersediaan rumah di Lingkungan Hunian Kalimanah hanya sebesar 6.497 unit. Sehingga, dari adanya kesenjangan tersebut terjadi backlog perumahan atau keluarga yang belum memiliki rumah sendiri sebesar 12.882 unit. Backlog perumahan terbesar berada di Perumahan Babakan sebanyak 1.538 unit. Lingkungan Hunian Kalimanah merupakan satu-satunya lingkungan hunian yang memiliki backlog rumah terbesar dibanding lingkungan hunian lainnya. Maka dari itu, perlu adanya peran aktif dari stakeholder di bidang perumahan agar kebutuhan rumah sesuai dengan jumlah keluarga, sehingga tidak menimbulkan terjadinya backlog.

Tabel IV.69.
Backlog Kepemilikan Rumah di Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2020

No	Perumahan	Jml KK 2020	Jml Rmh 2020 (unit)	Backlog Rmh 2020 (Unit)
1	Jompo	793	266	527
2	Rabak	1.092	366	726
3	Blater	1.340	449	891
4	Sidakangen	889	298	591
5	Karangpetir	515	173	342
6	Grecol	1.380	463	917
7	Mewek	779	261	518
8	Karangmanyar	814	273	541
9	Kalikabong	2.033	682	1.351
10	Selabaya	1.358	455	903
11	Kalimanah Wetan	1.196	401	795
12	Kalimanah Kulon	771	258	513
13	Manduraga	676	227	449
14	Karangsari	649	218	431
15	Kedungwuluh	1.148	385	763
16	Klapasawit	1.632	547	1.085
17	Babakan	2.314	776	1.538
Jumlah		19.379	6.497	12.882

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Berdasarkan kondisi eksisting, Lingkungan Hunian Padamara memiliki jumlah KK sebesar 15.219 KK yang diasumsikan terdiri dari 3-4 orang. Sementara itu, ketersediaan rumah di Lingkungan Hunian Padamara hanya sebesar 11.611 unit. Sehingga, dari adanya kesenjangan tersebut terjadi backlog perumahan atau keluarga yang belum memiliki rumah sendiri sebesar 3.608 unit. Backlog perumahan terbesar berada di Perumahan Bojanegara sebanyak 482 unit. Maka dari itu, perlu adanya peran aktif dari stakeholder di bidang perumahan agar kebutuhan rumah sesuai dengan jumlah keluarga, sehingga tidak menimbulkan terjadinya backlog.

Tabel IV.70.
Backlog Kepemilikan Rumah di Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2020

No	Perumahan	Jml KK 2020	Jml Rmh 2020 (unit)	Backlog Rmh 2020 (Unit)
1	Karangpule	520	397	123
2	Kalitinggar	901	687	214
3	Sokawera	852	650	202
4	Padamara	1.031	787	244
5	Karangjambe	1.314	1.002	312
6	Bojanegara	2.034	1.552	482
7	Karangsentul	888	677	211
8	Gemuruh	1.370	1.045	325
9	Dawuhan	1.355	1.034	321
10	Prigi	1.060	809	251
11	Purbayasa	772	589	183
12	Karanggambas	1.387	1.058	329
13	Mipiran	1.133	864	269
14	Kalitinggar Kidul	602	459	143
Jumlah		15.219	11.611	3.608

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Berdasarkan kondisi eksisting, Lingkungan Hunian Bojongsari memiliki jumlah KK sebesar 20.786 KK yang diasumsikan terdiri dari 3-4 orang. Sementara itu, ketersediaan rumah di Lingkungan Hunian Bojongsari hanya sebesar 13.182 unit. Sehingga, dari adanya kesenjangan tersebut terjadi backlog perumahan atau keluarga yang belum memiliki rumah sendiri sebesar 7.604 unit. Backlog perumahan terbesar berada di Perumahan Bumisari sebanyak 953 unit. Maka dari itu, perlu adanya peran aktif dari stakeholder di bidang perumahan agar kebutuhan rumah sesuai dengan jumlah keluarga, sehingga tidak menimbulkan terjadinya backlog.

Tabel IV.71.
Backlog Kepemilikan Rumah di Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2020

No	Perumahan	Jml KK 2020	Jml Rmh 2020 (unit)	Backlog Rmh 2020 (Unit)
1	Brobot	1.317	835	482
2	Gembong	1.246	790	456
3	Galuh	984	624	360
4	Banjaran	1.934	1.226	708
5	Patemon	1.427	905	522
6	Bojongsari	2.104	1.334	770
7	Kajongan	1.759	1.116	643
8	Karangbanjar	1.474	935	539
9	Beji	1.383	877	506
10	Pagedangan	1.300	824	476
11	Pekalongan	1.907	1.209	698
12	Matenggeng	1.345	853	492
13	Bumisari	2.606	1.653	953
Jumlah		20.786	13.182	7.604

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Berdasarkan kondisi eksisting, Lingkungan Hunian Kutasari memiliki jumlah KK sebesar 21.334 KK yang diasumsikan terdiri dari 3-4 orang. Sementara itu, ketersediaan

rumah di Lingkungan Hunian Kutasari hanya sebesar 10.233 unit. Sehingga, dari adanya kesenjangan tersebut terjadi backlog perumahan atau keluarga yang belum memiliki rumah sendiri sebesar 11.101 unit. Backlog perumahan terbesar berada di Perumahan Karangcegak sebanyak 1.156 unit. Maka dari itu, perlu adanya peran aktif dari stakeholder di bidang perumahan agar kebutuhan rumah sesuai dengan jumlah keluarga, sehingga tidak menimbulkan terjadinya backlog.

Tabel IV.72.
Backlog Kepemilikan Rumah di Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2020

No	Perumahan	Jml KK 2020	Jml Rmh 2020 (unit)	Backlog Rmh 2020 (Unit)
1	Karanglewas	919	441	478
2	Munjul	1.244	597	647
3	Karangklesem	1.128	541	587
4	Kutasari	1.747	838	909
5	Sumingkir	1.711	821	890
6	Meri	1.336	641	695
7	Karangreja	2.091	1.003	1.088
8	Karangaren	520	249	271
9	Limbangan	1.435	688	747
10	Cendana	1.714	822	892
11	Candiwulan	1.839	882	957
12	Karangcegak	2.222	1.066	1.156
13	Candinata	1.975	947	1.028
14	Karangjengkol	1.453	697	756
Jumlah		21.334	10.233	11.101

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Berdasarkan kondisi eksisting, Lingkungan Hunian Kaligondang memiliki jumlah KK sebesar 22.674 KK yang diasumsikan terdiri dari 3-4 orang. Sementara itu, ketersediaan rumah di Lingkungan Hunian Kaligondang hanya sebesar 17.803 unit. Sehingga, dari adanya kesenjangan tersebut terjadi backlog perumahan atau keluarga yang belum memiliki rumah sendiri sebesar 4.871 unit. Backlog perumahan terbesar berada di Perumahan Selakambang sebanyak 597 unit. Maka dari itu, perlu adanya peran aktif dari stakeholder di bidang perumahan agar kebutuhan rumah sesuai dengan jumlah keluarga, sehingga tidak menimbulkan terjadinya backlog.

Tabel IV.73.
Backlog Kepemilikan Rumah di Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2020

No	Perumahan	Jml KK 2020	Jml Rmh 2020 (unit)	Backlog Rmh 2020 (Unit)
1	Lamongan	925	726	199
2	Tejasari	926	727	199
3	Cilapar	733	576	157
4	Penolih	1.323	1.039	284
5	Sinduraja	1.737	1.364	373
6	Selakambang	2.780	2.183	597
7	Selanegara	1.162	912	250
8	Kaligondang	1.149	902	247
9	Brecek	507	398	109
10	Sempor Lor	456	358	98
11	Penaruban	1.738	1.365	373

No	Perumahan	Jml KK 2020	Jml Rmh 2020 (unit)	Backlog Rmh 2020 (Unit)
12	Kalikajar	1.568	1.231	337
13	Kembaran Wetan	1.087	853	234
14	Slinga	1.831	1.438	393
15	Arenan	1.362	1.069	293
16	Sidanegara	1.082	850	232
17	Pagerandong	694	545	149
18	Sidareja	1.614	1.267	347
Jumlah		22.674	17.803	4.871

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Salah satu penyebab tingginya angka backlog perumahan Ini disebabkan rendahnya pembiayaan sektor perumahan dari pemerintah maupun swasta. Peningkatan alokasi anggaran pemerintah untuk sektor perumahan dan perlunya skema–skema pembiayaan yang tepat merupakan salah satu cara untuk mengurangi backlog rumah. Diperlukan peran aktif seluruh stakeholder di bidang perumahan untuk menyelesaikan backlog tersebut, antara lain pemda dalam hal perijinan dan penetapan tata ruang, pengembang untuk meningkatkan pembangunan rumah dengan harga yang terjangkau, serta dari kemampuan masyarakat itu sendiri untuk membangun rumah yang layak huni secara swadaya.

4.6.5. Analisis Pencegahan Perumahan Kumuh

Program penanganan dan kegiatan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dirumuskan berdasarkan kondisi faktual dan isu strategis serta kebijakan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh hasil overview yang telah teridentifikasi pada tahap sebelumnya. Penataan lingkungan/kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui revitalisasi, konsolidasi, peremajaan kawasan ini untuk kawasan perumahan dan permukiman kumuh legal dan relokasi untuk kawasan kumuh ilegal.

Penyusunan program penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh ini dilakukan dengan model pembangunan berbasis kawasan dan lingkungan melalui pendekatan perencanaan partisipatif pada kawasan prioritas.Program dan kegiatan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh disusun sesuai dengan indikator kekumuhan berdasarkan strategi penanganan kumuh dan target yang ingin dicapai dari penanganan kawasan kumuh prioritas akan dibahas oleh pemangku kepentingan yang ada di daerah dan disepakati dalam suatu memorandum keterpaduanProgram baik skala kota dan kawasan. Program penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh skala kota di kawasan perkotaan Purbalingga, adalah sebagai berikut.

Tabel IV.74.
Kebutuhan Program Penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Terkait Pencegahan Serta Pola Kontribusi Penanganan

No	Program dan Kegiatan Penanganan		Skema Program	Pelaksanaan Kegiatan
	Program	Program		
1	Program Kawasan Permukiman	1. Kerja sama perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU	APBD Kabupaten, Kotaku,	BAPPEDA, DPU, DINRUMKIM, DINKES

No	Program dan Kegiatan Penanganan		Skema Program	Pelaksanaan Kegiatan
	Program	Program		
		2. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman 3. Penyusunan dan/atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh 4. Koordinasi dan skinronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dna permukiman kumuh 5. Penyusunan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh 6. Pembentukan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh 7. Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan pemugaran peremajaan permukiman kumuh 8. Penyusunan rencana tapak (*site plan*) dan *detail engineering desain* (DED) peremajaan pemugaran permukiman kumuh	CSR, Swadaya	
2	Program Penyelenggaraan Jalan	1. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan jembatan 2. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan 3. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan jembatan 4. Pengawasan teknis penyelenggaraan jalan jembatan	APBD Kabupaten, Kotaku, CSR, Swadaya	BAPPEDA, DPU, DINRUMKIM, DINKES
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Pembinaan teknik sistem drainase lingkungan, supervise pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi sistem drainase lingkungan	APBD Kabupaten, Kotaku, CSR, Swadaya	BAPPEDA, DPU, DINRUMKIM, DINKES
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	APBD Kabupaten, Kotaku, CSR, Swadaya	BAPPEDA, DPU, DINRUMKIM, DINKES
5	Program Pengelolaan Persampahan	1. Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 3. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten Kota	APBD Kabupaten, Kotaku, CSR, Swadaya	BAPPEDA, DPU, DINRUMKIM, DINKES
6	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik	APBD Kabupaten, Kotaku,	BAPPEDA, DPU, DINRUMKIM, DINKES

No	Program dan Kegiatan Penanganan		Skema Program	Pelaksanaan Kegiatan
	Program	Program		
		2. Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik	CSR, Swadaya	
7	Program Pencegahan, Penanggulanggan, Penyelematan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran	1. Pemberdayaan masyarakat dan pencegahan kebakaran 2. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat 3. Dukungan pemberdayaan masyarakat relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	APBD Kabupaten, Kotaku, CSR, Swadaya	BAPPEDA, DPU, DINRUMKIM, DINKES
8	Program Pengembangan Permukiman	1. Pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/ kota 2. Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah kabupaten/ kota	APBD Kabupaten, Kotaku, CSR, Swadaya	BAPPEDA, DPU, DINRUMKIM, DINKES
9	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	1. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/ kota 2. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di kabupaten/ kota 3. Pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan 4. Monitoring penataan pemeliharaan bangunan dan lingkungan	APBD Kabupaten, Kotaku, CSR, Swadaya	BAPPEDA, DPU, DINRUMKIM, DINKES
10	Program Pengembangan Perumahan	1. Pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/ kota 2. Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten/ kota 3. Sosialisasi standar teknis penyediaan dan rehabilitasi rumah kepada masyarakat sukarelawan tanggap bencana	APBD Kabupaten, Kotaku, CSR, Swadaya	BAPPEDA, DPU, DINRUMKIM, DINKES
11	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/ kota 2. Kerja sama perbaikan rumah tidak layak buni beserta PSU di luar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha 3. Program peremajaan permukiman kumuh di luar permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha	APBD Kabupaten, Kotaku, CSR, Swadaya	BAPPEDA, DPU, DINRUMKIM, DINKES
12	Program Peningkatan Prasarana, Sarana	1. Perencanaan penyediaan PSU perumahan	APBD Kabupaten, Kotaku,	BAPPEDA, DPU,

No	Program dan Kegiatan Penanganan		Skema Program	Pelaksanaan Kegiatan
	Program	Program		
	dan Utilitas Umum (PSU)	2. Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU perumahan 3. Kerja sama penyedia pengelolaan PSU perumahan	CSR, Swadaya	DINRUMKIM, DINKES
13	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Regristrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1. Sertifikasi dan regritasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkay kemampuan kecil 2. Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembangan perumahan dengan kualifikasi kecil	APBD Kabupaten, Kotaku, CSR, Swadaya	BAPPEDA, DPU, DINRUMKIM, DINKES

Sumber: RP2KPKPK Kab Purbalingga, 2021

Program pencegahan dilaksanakan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang baru. Adapun pencegahan ini dilakukan dimana terjadi beberapa faktor misalnya terjadi penurunan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman.Program pencegahan dilakukan dengan cara seperti pengawasan dan pengendalian (dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan), serta pemberdayaan masyarakat (dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui pendampingan dan pelayanan informasi.

Tabel IV.75.
Program Pencegahan Permukiman Kumuh Baru

Permasalahan	Program	No	Kegiatan	Lokasi
Makin pesatnya pertumbuhan permukiman baru dengan kelengkapan sarana prasarana	Program pencegahan permukiman kumuh baru	1	Sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya rumah layak huni dan sehat	Kawasan Perkotaan Kabupaten Purbalingga
Permukiman yang kurang memadai dan dapat menyebabkan kekumuhan baru		2	Pengendalian dan pengawasan terhadap pertumbuhan permukiman baru	Kawasan Perkotaan Kabupaten Purbalingga
		3	Pemberdayaan masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan huniannya agar tetap sehat dan nyaman (layak huni)	Kawasan Perkotaan Kabupaten Purbalingga

Sumber: RP2KPKPK Kab Purbalingga, 2021

4.6.6. Analisis Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh

Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas dilakukan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh

dengan luasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan luasan di atas 10 (sepuluh) hektar menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.

Pola penanganan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat. Pola penanganan untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat. Pola penanganan untuk perumahan dan permukiman formal dilakukan oleh pemerintah daerah, dan/atau pelaku pembangunan lainnya sesuai dengan kewenangannya.

Pola penanganan meliputi pemugaran, peremajaan, dan pemukiman kembali. Pemugaran dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan kumuh dan permukiman kumuh menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni. Peremajaan dan pemukiman kembali dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.

1. Pemugaran

   Pemugaran, merupakan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan atau/utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula. Pemugaran dilakukan dengan memperhatikan keaslian bentuk, bahan, pengerjaan dan tata letak, serta nilai sejarah kawasan. Pemugaran dilakukan melalui tahap:

   a. pra konstruksi;

      Pemugaran pada tahap pra konstruksi, meliputi:

      1) identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
      2) sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
      3) pendataan masyarakat terdampak;
      4) penyusunan rencana pemugaran; dan
      5) musyawarah untuk penyepakatan.

   b. konstruksi;

      Pemugaran pada tahap konstruksi, meliputi:

      1) proses pelaksanaan konstruksi; dan
      2) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.

   c. pasca konstruksi.

      Pemugaran pada tahap pasca konstruksi, meliputi:

      1) pemanfaatan; dan
      2) pemeliharaan dan perbaikan.

2. Peremajaan

Peremajaan, dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum. Peremajaan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan arahan peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan. Peremajaan harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak. Peremajaan dilakukan melalui tahap:

a. pra konstruksi;

Peremajaan pada tahap pra konstruksi, meliputi:

1) identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan;
2) penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;
3) sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
4) pendataan masyarakat terdampak;
5) penyusunan rencana peremajaan; dan
6) musyawarah dan diskusi penyepakatan.

b. konstruksi;

Peremajaan pada tahap konstruksi, meliputi:

1) proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;
2) penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;
3) proses pelaksanaan konstruksi peremajaan pada lokasi permukiman eksisting;
4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan
5) proses penghunian kembali masyarakat terdampak.

c. pasca konstruksi.

Peremajaan pada tahap pasca konstruksi, meliputi:

1) pemanfaatan; dan
2) pemeliharaan dan perbaikan.

3. Pemukiman Kembali

Pemukiman kembali, dilakukan melalui pembangunan dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum pada lokasi baru yang sesuai dengan rencana tata ruang. Pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan arahan peningkatan pelayanan lingkungan hunian perkotaan. Pemukiman kembali dilakukan melalui tahap:

a. pra konstruksi;

Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi, meliputi:

1) kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas tanah;

2) penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;

3) sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;

4) pendataan masyarakat terdampak;

5) penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kembali;

6) musyawarah dan diskusi penyepakatan.

b. konstruksi;

Pemukiman kembali pada tahap konstruksi, meliputi:

1) proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil kesepakatan;

2) proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;

3) proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan permukiman baru;

4) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman kembali;

5) proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan

6) proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.

c. pasca konstruksi.

Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi, meliputi:

1) pemanfaatan; dan

2) pemeliharaan dan perbaikan.

Pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain:

- hak keperdataan masyarakat terdampak;
- kondisi ekologis lokasi; dan
- kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.

Pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah. Pola penanganan tersebut akan diatur dengan ketentuan:

a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;

b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dan sedang dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;

c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran; dan/atau

d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

Pola penanganan direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mempertimbangkan tipologi diatur dengan ketentuan:

a. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta kelestarian air;
b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air serta kelestarian air dan tanah;
c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah;
e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah.

Dukungan Kegiatan Non Fisik

Dalam mendukung keberhasilan pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dilaksanakan penanganan non fisik yang terkait. Penanganan non fisik, diidentifikasi sesuai kebutuhan sebagai rekomendasi bagi instansi yang berwenang dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya. Pengelolaan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dengan pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni.

Pengelolaan terdiri atas:

1. pembentukan kelompok swadaya masyarakat;

   Pembentukan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Pembentukan kelompok swadaya masyarakat dilakukan pada tingkat komunitas sampai pada tingkat kabupaten sebagai fasilitator pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni. Pembentukan kelompok swadaya masyarakat disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan kelompok swadaya masyarakat dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Fasilitasi dilakukan dalam bentuk:

a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;

b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, supervisi, dan konsultasi; dan

c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan.

Kelompok swadaya masyarakat dibiayai secara swadaya oleh masyarakat. Pembiayaan kelompok swadaya masyarakat selain secara swadaya oleh masyarakat, dapat diperoleh melalui kontribusi setiap orang.

Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau atas prakarsa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Pembentukan tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat yang sejenis. Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. pemeliharaan dan perbaikan.

Pemeliharaan dan perbaikan merupakan upaya menjaga kondisi perumahan dan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

a. Pemeliharaan

Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala. Pemeliharaan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang. Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan, dan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang. Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum. Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum.

b. Perbaikan

Perbaikan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran. Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang. Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dilakukan terhadap prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas umum yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah maka perbaikan merupakan kewajiban penyelenggara pembangunan.

Pemerintah Daerah dapat menunjuk atau bekerjasama dengan Badan Hukum untuk melakukan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel IV.76.
Program Peningkatan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

No	Nama Kawasan	Aspek	Permasalahan	Program Peningkatan
1	Kawasan Kali Gemuruh	Bangunan Gedung	300 bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	1200 jalan dengan permukaan rusak	Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan
				Pemeliharaan secara berkala
				Melakukan pembangunan jalan paving/ beton lingkungan
		Air Minum	61 KK tidak terakses air minum aman	Pembangunan jaringan air minum baru
				Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih
				Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air bersih
		Drainase	806 m saluran drainase rusak	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/ kontruksi saluran yang ada
		Air Limbah	344 KK dengan sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	Pembangunan jamban keluarga
				Pembangunan septick tank komunal
		Persampahan	656 KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis	Pengadaan alat pengolah sampah
				Pembangunan bank sampah
				Pembangunan TPS terpadu
		Proteksi Kebakaran	458 bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Pembangunan/ pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting
				Penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
2	Kawasan Gringsing	Bangunan Gedung	169 bangunan tidak memenuhi persyaratan	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	2370 jalan dengan permukaan rusak	Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan
				Pemeliharaan secara berkala
				Melakukan pembangunan jalan paving/ beton lingkungan
		Air Minum	48 KK tidak terakses air minum aman	Pembangunan jaringan air minum baru
			2 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih
				Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air bersih
		Drainase	1420 m saluran drainase rusak	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/ kontruksi saluran yang ada

No	Nama Kawasan	Aspek	Permasalahan	Program Peningkatan
		Air Limbah	172 KK dengan sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	Pembangunan jamban keluarga
				Pembangunan septick tank komunal
		Persampahan	557 KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis	Pengadaan alat pengolah sampah
				Pembangunan bank sampah
				Pembangunan TPS terpadu
		Proteksi Kebakaran	324 bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Pembangunan/ pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting
			583 bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	Penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
3	Kawasan Kandanggampang	Bangunan Gedung	38 bangunan tidak memenuhi persyaratan	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	1562 jalan dengan permukaan rusak	Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan
				Pemeliharaan secara berkala
				Melakukan pembangunan jalan paving/ beton lingkungan
		Air Minum	34 KK tidak terakses air minum aman	Pembangunan jaringan air minum baru
				Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih
				Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air bersih
			23 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	Pembangunan jaringan air minum baru
				Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih
				Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air bersih
		Drainase	730 m saluran drainase rusak	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/ konstruksi saluran yang ada
		Air Limbah	69 KK dengan sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	Pembangunan jamban keluarga
				Pembangunan septick tank komunal
		Persampahan	208 KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis	Pengadaan alat pengolah sampah
				Pembangunan bank sampah
				Pembangunan TPS terpadu
4	Kawasan Wirasana	Bangunan Gedung	262 bangunan tidak memiliki keteraturan	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
			129 bangunan tidak memenuhi persyaratan	Rahabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	2874 jalan dengan permukaan rusak	Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan

No	Nama Kawasan	Aspek	Permasalahan	Program Peningkatan
				Pemeliharaan secara berkala
				Melakukan pembangunan jalan paving/ beton lingkungan
		Air Minum	98 KK tidak terakses air minum aman	Pembangunan jaringan air minum baru
			73 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih
				Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air bersih
		Drainase	631 m saluran drainase rusak	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/ kontruksi saluran yang ada
		Air Limbah	150 KK dengan sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	Pembangunan jamban keluarga
				Pembangunan septick tank komunal
		Persampahan	204 KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis	Pengadaan alat pengolah sampah
				Pembangunan bank sampah
				Pembangunan TPS terpadu
		Proteksi Kebakaran	324 bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Pembangunan/ pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting
				Penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
5	Kawasan Bojong	Bangunan Gedung	7 bangunan tidak memenuhi persyaratan	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	425 jalan dengan permukaan rusak	Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan
				Pemeliharaan secara berkala
				Melakukan pembangunan jalan paving/ beton lingkungan
		Air Minum	59 KK tidak terakses air minum aman	Pembangunan jaringan air minum baru
				Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih
				Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air bersih
		Drainase	525 m saluran drainase rusak	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/ kontruksi saluran yang ada
		Air Limbah	9 KK dengan sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	Pembangunan jamban keluarga
				Pembangunan septick tank komunal
		Persampahan	257 KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis	Pengadaan alat pengolah sampah
				Pembangunan bank sampah
				Pembangunan TPS terpadu

No	Nama Kawasan	Aspek	Permasalahan	Program Peningkatan
		Proteksi Kebakaran	33 bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Pembangunan/ pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting
				Penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
6	Kawasan Toyareja	Bangunan Gedung	41 bangunan tidak memenuhi persyaratan	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	879 jalan dengan permukaan rusak	Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan
				Pemeliharaan secara berkala
				Melakukan pembangunan jalan paving/ beton lingkungan
		Air Minum	46 KK tidak terakses air minum aman	Pembangunan jaringan air minum baru
				Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih
				Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air bersih
			11 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	Pembangunan jaringan air minum baru
				Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih
				Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air bersih
		Drainase	247 m saluran drainase rusak	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/ kontruksi saluran yang ada
		Air Limbah	40 KK dengan sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	Pembangunan jamban keluarga
				Pembangunan septick tank komunal
		Persampahan	302 KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis	Pengadaan alat pengolah sampah
				Pembangunan bank sampah
				Pembangunan TPS terpadu
		Proteksi Kebakaran	85 bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Pembangunan/ pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting
				Penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
7	Kawasan Kedungmenjangan	Bangunan Gedung	5 bangunan tidak memenuhi persyaratan	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	1288 jalan dengan permukaan rusak	Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan
				Pemeliharaan secara berkala
				Melakukan pembangunan jalan paving/ beton lingkungan

No	Nama Kawasan	Aspek	Permasalahan	Program Peningkatan
		Air Minum	31 KK tidak terakses air minum aman	Pembangunan jaringan air minum baru
				Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih
				Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air bersih
		Drainase	170 m saluran drainase rusak	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/ kontruksi saluran yang ada
		Air Limbah	31 KK dengan sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	Pembangunan jamban keluarga
				Pembangunan septick tank komunal
		Persampahan	255 KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis	Pengadaan alat pengolah sampah
				Pembangunan bank sampah
				Pembangunan TPS terpadu
		Proteksi Kebakaran	247 bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Pembangunan/ pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting
				Penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
8	Kawasan Jatisaba	Bangunan Gedung	94 bangunan tidak memenuhi persyaratan	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	950 jalan dengan permukaan rusak	Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan
				Pemeliharaan secara berkala
				Melakukan pembangunan jalan paving/ beton lingkungan
		Air Minum	41 KK tidak terakses air minum aman	Pembangunan jaringan air minum baru
				Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih
				Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air bersih
		Air Limbah	93 KK dengan sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	Pembangunan jamban keluarga
				Pembangunan septick tank komunal
		Persampahan	387 KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis	Pengadaan alat pengolah sampah
				Pembangunan bank sampah
				Pembangunan TPS terpadu
		Proteksi Kebakaran	313 bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Pembangunan/ pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting
				Penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran

No	Nama Kawasan	Aspek	Permasalahan	Program Peningkatan
9	Kawasan Bancar	Bangunan Gedung	72 bangunan tidak memenuhi persyaratan	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	840 jalan dengan permukaan rusak	Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan
				Pemeliharaan secara berkala
				Melakukan pembangunan jalan paving/ beton lingkungan
		Air Minum	50 KK tidak terakses air minum aman	Pembangunan jaringan air minum baru
				Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih
				Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air bersih
		Drainase	200 m saluran drainase rusak	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/ kontruksi saluran yang ada
		Air Limbah	122 KK dengan sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	Pembangunan jamban keluarga
				Pembangunan septick tank komunal
		Persampahan	29 KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis	Pengadaan alat pengolah sampah
				Pembangunan bank sampah
				Pembangunan TPS terpadu
		Proteksi Kebakaran	151 bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Pembangunan/ pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting
				Penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
10	Kawasan Keramean	Bangunan Gedung	276 bangunan tidak memenuhi persyaratan	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	2718 jalan dengan permukaan rusak	Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan
				Pemeliharaan secara berkala
				Melakukan pembangunan jalan paving/ beton lingkungan
		Air Minum	172 KK tidak terakses air minum aman	Pembangunan jaringan air minum baru
			8 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih
				Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air bersih
		Drainase	1999 m saluran drainase rusak	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/ kontruksi saluran yang ada
		Air Limbah	293 KK dengan sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	Pembangunan jamban keluarga
				Pembangunan septick tank komunal

No	Nama Kawasan	Aspek	Permasalahan	Program Peningkatan
		Persampahan	1098 KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis	Pengadaan alat pengolah sampah
				Pembangunan bank sampah
				Pembangunan TPS terpadu
		Proteksi Kebakaran	387 bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Pembangunan/ pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting
				Penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
11	Kawasan Babakan	Bangunan Gedung	35 bangunan tidak memenuhi persyaratan	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	738 jalan dengan permukaan rusak	Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan
				Pemeliharaan secara berkala
				Melakukan pembangunan jalan paving/ beton lingkungan
		Air Minum	169 KK tidak terakses air minum aman	Pembangunan jaringan air minum baru
			2 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih
				Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air bersih
		Drainase	480 m saluran drainase rusak	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/ kontruksi saluran yang ada
		Air Limbah	154 KK dengan sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	Pembangunan jamban keluarga
				Pembangunan septick tank komunal
		Persampahan	382 KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis	Pengadaan alat pengolah sampah
				Pembangunan bank sampah
				Pembangunan TPS terpadu
		Proteksi Kebakaran	141 bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Pembangunan/ pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting
				Penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
12	Kawasan Selabaya	Bangunan Gedung	33 bangunan tidak memenuhi persyaratan	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	1900 jalan dengan permukaan rusak	Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan
				Pemeliharaan secara berkala
				Melakukan pembangunan jalan paving/ beton lingkungan
		Air Minum	36 KK tidak terakses air minum aman	Pembangunan jaringan air minum baru
				Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih

No	Nama Kawasan	Aspek	Permasalahan	Program Peningkatan
				Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air bersih
		Drainase	795 m saluran drainase rusak	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/ kontruksi saluran yang ada
		Air Limbah	36 KK dengan sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	Pembangunan jamban keluarga
				Pembangunan septick tank komunal
		Persampahan	404 KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis	Pengadaan alat pengolah sampah
				Pembangunan bank sampah
				Pembangunan TPS terpadu
13	Kawasan Karangsentul	Bangunan Gedung	78 bangunan tidak memenuhi persyaratan	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	308 jalan dengan permukaan rusak	Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan
				Pemeliharaan secara berkala
				Melakukan pembangunan jalan paving/ beton lingkungan
		Air Minum	21 KK tidak terakses air minum aman	Pembangunan jaringan air minum baru
				Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih
				Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air bersih
		Drainase	190 m saluran drainase rusak	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/ kontruksi saluran yang ada
		Air Limbah	55 KK dengan sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	Pembangunan jamban keluarga
				Pembangunan septick tank komunal
		Persampahan	10 KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis	Pengadaan alat pengolah sampah
				Pembangunan bank sampah
				Pembangunan TPS terpadu
		Proteksi Kebakaran	155 bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Pembangunan/ pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting
				Penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
14	Kawasan Brobot	Bangunan Gedung	15 bangunan tidak memenuhi persyaratan	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	750 jalan dengan permukaan rusak	Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan
				Pemeliharaan secara berkala
				Melakukan pembangunan jalan paving/ beton lingkungan

No	Nama Kawasan	Aspek	Permasalahan	Program Peningkatan
		Air Minum	100 KK tidak terakses air minum aman	Pembangunan jaringan air minum baru
				Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih
				Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air bersih
			170 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	Pembangunan jaringan air minum baru
				Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih
				Melibatkan peran swasta dalam peneydiaan dan pembangunan jaringan air bersih
		Drainase	200 m saluran drainase rusak	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/ kontruksi saluran yang ada
		Air Limbah	75 KK dengan sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	Pembangunan jamban keluarga
				Pembangunan septick tank komunal
		Persampahan	190 KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis	Pengadaan alat pengolah sampah
				Pembangunan bank sampah
				Pembangunan TPS terpadu
		Proteksi Kebakaran	270 bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Pembangunan/ pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting
				Penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
15	Kawasan Kaligondang	Bangunan Gedung	36 bangunan tidak memenuhi persyaratan	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	1962 jalan dengan permukaan rusak	Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan
				Pemeliharaan secara berkala
				Melakukan pembangunan jalan paving/ beton lingkungan
		Air Minum	100 KK tidak terakses air minum aman	Pembangunan jaringan air minum baru
				Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih
				Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air bersih
			170 KK tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya	Pembangunan jaringan air minum baru
				Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih

No	Nama Kawasan	Aspek	Permasalahan	Program Peningkatan
				Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air bersih
		Drainase	518 m saluran drainase rusak	Pembangunan saluran yang rusak dan peningkatan struktur/ kontruksi saluran yang ada
		Air Limbah	225 KK dengan sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	Pembangunan jamban keluarga
				Pembangunan septick tank komunal
		Persampahan	530 KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis	Pengadaan alat pengolah sampah
				Pembangunan bank sampah
				Pembangunan TPS terpadu
		Proteksi Kebakaran	495 bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Pembangunan/ pengadaan alat proteksi kebakaran di titik penting
				Penyediaan jaringan perpipaan air bersih yang dapat berfungsi untuk pemadam kebakaran
16	Kawasan Bobotsari	Bangunan Gedung	32 bangunan tidak memenuhi persyaratan	Rehabilitasi RTLH menjadi rumah layak huni
		Jalan Lingkungan	70 jalan dengan permukaan rusak	Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan
				Pemeliharaan secara berkala
				Melakukan pembangunan jalan paving/ beton lingkungan
		Air Minum	89 KK tidak terakses air minum aman	Pembangunan jaringan air minum baru
				Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih
				Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air bersih

Tabel IV.77.
Perumusan Program Peningkatan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kawasan Prioritas 1

No	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan	Program
				Peningkatan	Peningkatan	
1	Kawasan Kali Gemuruh (Luas Kawasan Kumuh 20,30 Ha) Purbalingga Kulon Purbalingga Lor	Purbalingga	300 bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pemugaran Peremajaan	· Pembuatan site plan konsep penataan permukiman yang layak · Sosialisasi tentang rumah layak huni/ rumah sehat · Melakukan pemugaran dan pembangunan RTLH	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN · Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
					· Perbaikan/ pembangunan	

No	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan	Program
				Peningkatan	Peningkatan	
	Kembaran Kulon Wirasana				kualitas jalan · Pemeliharaan secara berkala · Melakukan pembangunan jalan paving/beton lingkungan	
			1200 m jalan dengan permukaan rusak	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN · Pembangunan Jalan	
			61 KK tidak terakses air minum aman	Peningkatan penyediaan air minum dan jaringan distribusi	· Melakukan pembangunan jaringan air minum baru · Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
					· Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air bersih	· Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			806 m saluran drainase rusak	Peningkatan kualitas drainase lingkungan	· Perbaikan/ pembangunan kualitas drainase · Pemeliharaan secara barkala · Melakukan pembangunan jaringan drainase · Melakukan pemeliharaan jaringan drainase · Menganggarkan kegiatan pemeliharaan dan pembangunan drainase	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE · Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
			344 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	Pengembangan pengolahan limbah rumah tangga	· Melakukan pembangunan jamban keluarga · Melakukan pembangunan septick tank komunal · Memberikan bantuan jamban keluarga · Melakukan program septick tank plus · Menyediakan IPAL · Menyediakan sarpras pendukung	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH · Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

No	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan	Program
				Peningkatan	Peningkatan	
			656 KK dg sistem penglahan sampah tdk sesuai standar teknis	Pengelolaan persampahan	· Melakukan pengadaan alat pengolah sampah · Melakukan pembangunan Bank Sampah · Melakukan pembangunan TPS Terpadu · Melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak 3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL · Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS3R/ TPS
			458 bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Penyediaan system proteksi kebakaran	· Pembangunan pos pemadam kebakaran skala lingkungan · Penyediaan APAR	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN , PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN · Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
2	Kawasan Gringsing (Luas Kawasan Kumuh 26,30 Ha) Purbalingga Wetan Purbalingga Kidul Purbalingga Kulon Penambangan	Purbalingga	169 bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pemugaran Peremajaan	· Pembuatan site plan konsep penataan permukiman yang layak · Sosialisasi tentang rumah layak huni/ rumah sehat · Melakukan pemugaran dan pembangunan RTLH	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN · Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
			2370 jalan dengan permukaan rusak	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	· Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan · Pemeliharaan secara berkala · Melakukan perbangunan jalan paving/beton lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN · Pembangunan Jalan
			48 KK tidak terakses air minum aman 2 KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya	Peningkatan penyediaan air minum dan jaringan distribusi	· Melakukan pembangunan jaringan air minum baru · Memanfaatkan sumber- sumber mata air sebagai sumber air bersih · Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air berih	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM · Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan

No	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan	Program
				Peningkatan	Peningkatan	
			1420 m saluran drainase rusak	Peningkatan kualitas drainase lingkungan	· Perbaikan/ pembangunan kualitas drainase · Pemeliharaan secara barkala · Melakukan pembangunan jaringan drainase · Melakukan pemeliharaan jaringan drainase · Menganggarkan kegiatan pemeliharaan dan pembangunan drainase	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE · Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
			172 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	Pengembangan pengolahan limbah rumah tangga	· Melakukan pembangunan jamban keluarga · Melakukan pembangunan septick tank komunal · Memberikan bantuan jamban keluarga · Melakukan program septick tank plus · Menyediakan IPAL · Menyediakan sapras pendukung	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH · Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
			557 KK dg sistem penglahan sampah tdk sesuai standar teknis	Pengelolaan persampahan	· Melakukan pengadaan alat pengolah sampah · Melakukan pembangunan Bank Sampah · Melakukan pembangunan TPS Terpadu · Melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak 3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL · Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS3R/ TPS
			324 bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Penyediaan system proteksi kebakaran	· Pembangunan pos pemadam kebakaran skala lingkungan	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN
			583 bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran		· Penyediaan APAR	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN · Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Sumber: RP2KPKPK Kab Purbalingga, 2021

Tabel IV.78.
Perumusan Program Peningkatan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kawasan Prioritas 2

No	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan	Program
				Peningkatan	Peningkatan	
1	Kembaran Kulon Wirasana	Purbalingga	262 bangunan tidak memiliki keteraturan 129 bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pemugaran Peremajaan	· Pembuatan site plan konsep penataan permukiman yang layak · Sosialisasi tentang rumah layak huni/ rumah sehat · Melakukan pemugaran dan pembangunan RTLH	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN · Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
			2874 jalan dengan permukaan rusak	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	· Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan · Pemeliharaan secara barkala · Melakukan perbangunan jalan paving/beton lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN · Pembangunan Jalan
			98 KK tidak terakses air minum aman 73 KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya	Peningkatan penyediaan air minum dan jaringan distribusi	· Melakukan pembangunan jaringan air minum baru · Memanfaatkan sumber- sumber mata air sebagai sumber air bersih · Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air berih	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM · Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			631 m saluran drainase rusak	Peningkatan kualitas drainase lingkungan	· Perbaikan/ pembangunan kualitas drainase · Pemeliharaan secara barkala · Melakukan pembangunan jaringan drainase · Melakukan pemeliharaan jaringan drainase · Menganggarkan kegiatan pemeliharaan dan pembangunan drainase	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE · Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
			150 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	Pengembangan pengolahan limbah rumah tangga	· Melakukan pembangunan jamban keluarga · Melakukan pembangunan septick tank komunal · Memberikan bantuan jamban keluarga	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH · Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

No	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan	Program
				Peningkatan	Peningkatan	
					· Melakukan program septick tank plus · Menyediakan IPAL · Menyediakan sapras pendukung	
			204 KK dg sistem penglahan sampah tdk sesuai standar teknis	Pengelolaan persampahan	· Melakukan pengadaan alat pengolah sampah · Melakukan pembangunan Bank Sampah · Melakukan pembangunan TPS Terpadu · Melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak 3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL · Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS
			636 bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Penyediaan system proteksi kebakaran	· Pembangunan pos pemadam kebakaran skala lingkungan · Penyediaan APAR	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN · Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
2	**Kawasan Keramean Mewek** Karangmanyar Kalikabong Grecol	Kalimanah	276 bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pemugaran Peremajaan	· Pembuatan site plan konsep penataan permukiman yang layak	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
					· Sosialisasi tentang rumah layak huni/ rumah sehat · Melakukan pemugaran dan pembangunan RTLH	· Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
			2718 jalan dengan permukaan rusak	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	· Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan · Pemeliharaan secara barkala · Melakukan perbangunan jalan paving/beton lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN · Pembangunan Jalan
			172 KK tidak terakses air minum aman	Peningkatan penyediaan air minum dan jaringan distribusi	· Melakukan pembangunan jaringan air minum baru · Memanfaatkan sumber- sumber mata air sebagai sumber air bersih · Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM · Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			8 KK tidak terpenuhi kebutuhan Air			

No	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan	Program
				Peningkatan	Peningkatan	
			Minum minimalnya		air berih	
			1999 m saluran drainase rusak	Peningkatan kualitas drainase lingkungan	· Perbaikan/ pembangunan kualitas drainase · Pemeliharaan secara barkala · Melakukan pembangunan jaringan drainase · Melakukan pemeliharaan jaringan drainase · Menganggarkan kegiatan pemeliharaan dan pembangunan drainase	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE · Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
			293 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	Pengembangan pengolahan limbah rumah tangga	· Melakukan pembangunan jamban keluarga · Melakukan pembangunan septick tank komunal · Memberikan bantuan jamban keluarga · Melakukan program septick tank plus · Menyediakan IPAL · Menyediakan sapras pendukung	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH · Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
			1098 KK dg sistem penglahan sampah tdk sesuai standar teknis	Pengelolaan persampahan	· Melakukan pengadaan alat pengolah sampah · Melakukan pembangunan Bank Sampah · Melakukan pembangunan TPS Terpadu · Melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak 3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL · Pembangunan TPA/TPST/SPA/ TPS3R/TPS
			387 bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Penyediaan system proteksi kebakaran	· Pembangunan pos pemadam kebakaran skala lingkungan · Penyediaan APAR	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN · Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Sumber: RP2KPKPK Kab Purbalingga, 2021

Tabel IV.79.
Perumusan Program Peningkatan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kawasan Prioritas 3

No	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan	Program
				Peningkatan	Peningkatan	
1	**Kawasan Kandanggampang (Luas Kawasan Kumuh 26,30 Ha** **Kandang gampang**	Purbalingga	38 bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pemugaran Peremajaan	· Pembuatan site plan konsep penataan permukiman yang layak · Sosialisasi tentang rumah layak huni/ rumah sehat · Melakukan pemugaran dan pembangunan RTLH	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN · Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
			1562 jalan dengan permukaan rusak	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	· Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan · Pemeliharaan secara barkala · Melakukan perbangunan jalan paving/beton lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN · Pembangunan Jalan
			34 KK tidak terakses air minum aman 23 KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya	Peningkatan penyediaan air minum dan jaringan distribusi	· Melakukan pembangunan jaringan air minum baru · Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih · Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air berih	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM · Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			730 m saluran drainase rusak	Peningkatan kualitas drainase lingkungan	· Perbaikan/ pembangunan kualitas drainase · Pemeliharaan secara barkala · Melakukan pembangunan jaringan drainase · Melakukan pemeliharaan jaringan drainase · Menganggarkan kegiatan pemeliharaan dan pembangunan drainase	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE · Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

No	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan	Program
				Peningkatan	Peningkatan	
			69 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	Pengembangan pengolahan limbah rumah tangga	· Melakukan pembangunan jamban keluarga · Melakukan pembangunan septick tank komunal · Memberikan bantuan jamban keluarga · Melakukan program septick tank plus · Menyediakan IPAL · Menyediakan sapras pendukung	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH · Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
			208 KK dg sistem sampah tdk sesuai standar teknis	Pengelolaan persampahan	· Melakukan pengadaan alat pengolah sampah · Melakukan pembangunan Bank Sampah · Melakukan pembangunan TPS Terpadu	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL · Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS3 R/TPS
					· Melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak 3	
2	Kawasan Babakan	Kalimanah	35 bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pemugaran Peremajaan	· Pembuatan site plan konsep penataan permukiman yang layak · Sosialisasi tentang rumah layak huni/ rumah sehat · Melakukan pemugaran dan pembangunan RTLH	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN · Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
			738 jalan dengan permukaan rusak	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	· Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan · Pemeliharaan secara barkala · Melakukan perbangunan jalan paving/beton lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN · Pembangunan Jalan
			169 KK tidak terakses air minum aman 2 KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya	Peningkatan penyediaan air minum dan jaringan distribusi	· Melakukan pembangunan jaringan air minum baru · Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih · Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air berih	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM · Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			480 m saluran drainase rusak	Peningkatan kualitas drainase lingkungan	· Perbaikan/ pembangunan kualitas drainase	PROGRAM PENGELOLAAN DAN

No	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan	Program
				Peningkatan	Peningkatan	
					· Pemeliharaan secara barkala	PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
					· Melakukan pembangunan jaringan drainase · Melakukan pemeliharaan jaringan drainase · Menganggarkan kegiatan pemeliharaan dan pembangunan drainase	· Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
			154 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	Pengembangan pengolahan limbah rumah tangga	· Melakukan pembangunan jamban keluarga · Melakukan pembangunan septick tank komunal · Memberikan bantuan jamban keluarga · Melakukan program septick tank plus · Menyediakan IPAL · Menyediakan sapras pendukung	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH · Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
			382 KK dg sistem penglahan sampah tdk sesuai standar teknis	Pengelolaan persampahan	· Melakukan pengadaan alat pengolah sampah · Melakukan pembangunan Bank Sampah · Melakukan pembangunan TPS Terpadu · Melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak 3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL · Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS3 R/TPS
			141 bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Penyediaan system proteksi kebakaran	· Pembangunan pos pemadam kebakaran skala lingkungan · Penyediaan APAR	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN · Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
3	**Kawasan Selabaya**	**Kalimanah**	33 bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pemugaran Peremajaan	· Pembuatan site plan konsep penataan permukiman yang layak · Sosialisasi tentang rumah layak huni/ rumah sehat · Melakukan	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN · Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

No	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan	Program
				Peningkatan	Peningkatan	
					pemugaran dan pembangunan RTLH	
			1900 jalan dengan permukaan rusak	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	· Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan · Pemeliharaan secara barkala · Melakukan perbangunan jalan paving/beton lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN · Pembangunan Jalan
			36 KK tidak terakses air minum aman	Peningkatan penyediaan air	· Melakukan pembangunan jaringan air minum baru	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
				minum dan jaringan distribusi	· Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih · Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air berih	SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM · Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			795 m saluran drainase rusak	Peningkatan kualitas drainase lingkungan	· Perbaikan/ pembangunan kualitas drainase · Pemeliharaan secara barkala · Melakukan pembangunan jaringan drainase · Melakukan pemeliharaan jaringan drainase · Menganggarkan kegiatan pemeliharaan dan pembangunan drainase	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE · Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
			36 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	Pengembangan pengolahan limbah rumah tangga	· Melakukan pembangunan jamban keluarga · Melakukan pembangunan septick tank komunal · Memberikan bantuan jamban keluarga · Melakukan program septick tank plus · Menyediakan IPAL · Menyediakan sapras pendukung	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH · Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
			404 KK dg sistem penglahan sampah tdk sesuai standar teknis	Pengelolaan persampahan	· Melakukan pengadaan alat pengolah sampah · Melakukan pembangunan Bank Sampah · Melakukan pembangunan TPS	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL · Pembangunan

No	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan	Program
				Peningkatan	Peningkatan	
					Terpadu · Melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak 3	TPA/TPST/SPA/TPS3 R/TPS
4	Kawasan Karangsentul	Padamara	78 bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pemugaran Peremajaan	· Pembuatan site plan konsep penataan permukiman yang layak · Sosialisasi tentang rumah layak huni/ rumah sehat · Melakukan pemugaran dan pembangunan RTLH	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN · Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
			308 jalan dengan permukaan rusak	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	· Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan · Pemeliharaan secara barkala · Melakukan perbangunan jalan paving/beton lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN · Pembangunan Jalan
			21 KK tidak terakses air minum aman	Peningkatan penyediaan air minum dan jaringan distribusi	· Melakukan pembangunan jaringan air minum baru · Memanfaatkan sumber-sumber mata air sebagai sumber air bersih	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
					· Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air berih	· Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			190 m saluran drainase rusak	Peningkatan kualitas drainase lingkungan	· Perbaikan/ pembangunan kualitas drainase · Pemeliharaan secara barkala · Melakukan pembangunan jaringan drainase · Melakukan pemeliharaan jaringan drainase · Menganggarkan kegiatan pemeliharaan dan pembangunan drainase	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE · Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

No	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan	Program
				Peningkatan	Peningkatan	
			55 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	Pengembangan pengolahan limbah rumah tangga	· Melakukan pembangunan jamban keluarga · Melakukan pembangunan septick tank komunal · Memberikan bantuan jamban keluarga · Melakukan program septick tank plus · Menyediakan IPAL · Menyediakan sapras pendukung	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH · Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
			10 KK dg sistem penglahan sampah tdk sesuai standar teknis	Pengelolaan persampahan	· Melakukan pengadaan alat pengolah sampah · Melakukan pembangunan Bank Sampah · Melakukan pembangunan TPS Terpadu · Melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak 3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL · Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS3 R/TPS
			155 bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Penyediaan system proteksi kebakaran	· Pembangunan pos pemadam kebakaran skala lingkungan · Penyediaan APAR	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN · Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Sumber: RP2KPKPK Kab Purbalingga, 2021

Tabel IV.80.
Perumusan Program Peningkatan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kawasan Prioritas 4

No	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan	Program
				Peningkatan	Peningkatan	
1	**Kawasan Toyareja**	**Purbalingga**	41 bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pemugaran Peremajaan	· Pembuatan site plan konsep penataan permukiman yang layak · Sosialisasi tentang rumah layak huni/ rumah sehat · Melakukan pemugaran dan pembangunan RTLH	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN · Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

No	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan	Program
				Peningkatan	Peningkatan	
			879 jalan dengan permukaan rusak	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	· Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan · Pemeliharaan secara barkala · Melakukan perbangunan jalan paving/beton lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN · Pembangunan Jalan
			46 KK tidak terakses air minum aman 11 KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya	Peningkatan penyediaan air minum dan jaringan distribusi	· Melakukan pembangunan jaringan air minum baru · Memanfaatkan sumber- sumber mata air sebagai sumber air bersih · Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air berih	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM · Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			247 m saluran drainase rusak	Peningkatan kualitas drainase lingkungan	· Perbaikan/ pembangunan kualitas drainase · Pemeliharaan secara barkala · Melakukan pembangunan jaringan drainase · Melakukan pemeliharaan jaringan drainase · Menganggarkan kegiatan pemeliharaan dan pembangunan drainase	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE · Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
			40 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	Pengembangan pengolahan limbah rumah tangga	· Melakukan pembangunan jamban keluarga · Melakukan pembangunan septick tank komunal · Memberikan bantuan jamban keluarga · Melakukan program septick tank plus · Menyediakan IPAL · Menyediakan sapras pendukung	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH · Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
			302 KK dg sistem pengolahan sampah tdk sesuai standar teknis	Pengelolaan persampahan	· Melakukan pengadaan alat pengolah sampah · Melakukan pembangunan Bank Sampah	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
					· Melakukan pembangunan TPS Terpadu · Melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak 3	· Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS3R/ TPS

No	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan	Program
				Peningkatan	Peningkatan	
			85 bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Penyediaan system proteksi kebakaran	· Pembangunan pos pemadam kebakaran skala lingkungan · Penyediaan APAR	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN , PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN · Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
2	Kawasan Bancar		72 bangunan tidak memiliki keteraturan	Pemugaran Peremajaan	· Pembuatan site plan konsep penataan permukiman yang layak · Sosialisasi tentang rumah layak huni/ rumah sehat · Melakukan pemugaran dan pembangunan RTLH	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN · Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
			840 jalan dengan permukaan rusak	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	· Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan · Pemeliharaan secara barkala	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
					· Melakukan perbangunan jalan paving/beton lingkungan	· Pembangunan Jalan
			50 KK tidak terakses air minum aman	Peningkatan penyediaan air minum dan jaringan distribusi	· Melakukan pembangunan jaringan air minum baru · Memanfaatkan sumber- sumber mata air sebagai sumber air bersih · Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air berih	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM · Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			200 m saluran drainase rusak	Peningkatan kualitas drainase lingkungan	· Perbaikan/ pembangunan kualitas drainase · Pemeliharaan secara barkala · Melakukan pembangunan jaringan drainase · Melakukan pemeliharaan jaringan drainase · Menganggarkan kegiatan pemeliharaan dan pembangunan drainase	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE · Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan

No	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan	Program
				Peningkatan	Peningkatan	
			122 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	Pengembangan pengolahan limbah rumah tangga	· Melakukan pembangunan jamban keluarga · Melakukan pembangunan septick tank komunal	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
					· Memberikan bantuan jamban keluarga · Melakukan program septick tank plus · Menyediakan IPAL · Menyediakan sapras pendukung	· Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
			29 KK dg sistem penglahan sampah tdk sesuai standar teknis	Pengelolaan persampahan	· Melakukan pengadaan alat pengolah sampah · Melakukan pembangunan Bank Sampah · Melakukan pembangunan TPS Terpadu · Melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak 3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL · Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS3R/ TPS
			151 bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Penyediaan system proteksi kebakaran	· Pembangunan pos pemadam kebakaran skala lingkungan · Penyediaan APAR	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN , PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN · Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan
						Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
3	Kawasan Jatisaba	**Purbalingga**	94 bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pemugaran Peremajaan	· Pembuatan site plan konsep penataan permukiman yang layak · Sosialisasi tentang rumah layak huni/ rumah sehat · Melakukan pemugaran dan pembangunan RTLH	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN · Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
			950 jalan dengan permukaan rusak	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	· Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan · Pemeliharaan secara barkala · Melakukan perbangunan jalan paving/beton lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN · Pembangunan Jalan
			41 KK tidak terakses air minum aman	Peningkatan penyediaan air minum dan jaringan distribusi	· Melakukan pembangunan jaringan air minum baru · Memanfaatkan sumber- sumber mata air	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

No	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan	Program
				Peningkatan	Peningkatan	
					sebagai sumber air bersih · Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air berih	· Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			93 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	Pengembangan pengolahan limbah rumah tangga	· Melakukan pembangunan jamban keluarga · Melakukan pembangunan septick tank komunal · Memberikan bantuan jamban keluarga · Melakukan program septick tank plus · Menyediakan IPAL · Menyediakan sapras pendukung	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH · Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
			387 KK dg sistem penglahan sampah tdk sesuai standar teknis	Pengelolaan persampahan	· Melakukan pengadaan alat pengolah sampah · Melakukan pembangunan Bank Sampah · Melakukan pembangunan TPS Terpadu · Melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak 3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL · Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS3R/ TPS
			313 bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Penyediaan system proteksi kebakaran	· Pembangunan pos pemadam kebakaran skala lingkungan · Penyediaan APAR	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN , PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN · Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
4	Kawasan Bojong	Purbalingga	7 bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pemugaran Peremajaan	· Pembuatan site plan konsep penataan permukiman yang layak · Sosialisasi tentang rumah layak huni/ rumah sehat · Melakukan pemugaran dan pembangunan RTLH	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN · Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
			425 jalan dengan permukaan rusak	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	· Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan · Pemeliharaan secara barkala · Melakukan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN · Pembangunan Jalan

No	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan	Program
				Peningkatan	Peningkatan	
					perbangunan jalan paving/beton lingkungan	
			59 KK tidak terakses air minum aman	Peningkatan penyediaan air minum dan jaringan distribusi	· Melakukan pembangunan jaringan air minum baru · Memanfaatkan sumber- sumber mata air sebagai sumber air bersih · Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air berih	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM · Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			525 m saluran drainase rusak	Peningkatan kualitas drainase lingkungan	· Perbaikan/ pembangunan kualitas drainase · Pemeliharaan secara barkala · Melakukan pembangunan jaringan drainase · Melakukan pemeliharaan jaringan drainase · Menganggarkan kegiatan pemeliharaan dan pembangunan drainase	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE · Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
			9 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	Pengembangan pengolahan limbah rumah tangga	· Melakukan pembangunan jamban keluarga · Melakukan pembangunan septick tank komunal · Memberikan bantuan jamban keluarga · Melakukan program septick tank plus · Menyediakan IPAL · Menyediakan sapras pendukung	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH · Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
			257 KK dg sistem penglahan sampah tdk sesuai standar teknis	Pengelolaan persampahan	· Melakukan pengadaan alat pengolah sampah · Melakukan pembangunan Bank Sampah · Melakukan pembangunan TPS Terpadu · Melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak 3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL · Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS3R/ TPS

No	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan	Program
				Peningkatan	Peningkatan	
			33 bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Penyediaan system proteksi kebakaran	· Pembangunan pos pemadam kebakaran skala lingkungan · Penyediaan APAR	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN , PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN · Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
5	Kawasan Kedung menjangan	**Purbalinggga**	5 bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pemugaran Peremajaan	· Pembuatan site plan konsep penataan permukiman yang layak · Sosialisasi tentang rumah layak huni/ rumah sehat · Melakukan pemugaran dan pembangunan RTLH	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN · Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
			1288 jalan dengan permukaan rusak	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	· Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan · Pemeliharaan secara barkala · Melakukan perbangunan jalan paving/beton lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN · Pembangunan Jalan
			31 KK tidak terakses air minum aman	Peningkatan penyediaan air minum dan jaringan distribusi	· Melakukan pembangunan jaringan air minum baru · Memanfaatkan sumber- sumber mata air sebagai sumber air bersih · Melibatkan peran swasta dalam penyediaan dan pembangunan jaringan air berih	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM · Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			170 m saluran drainase rusak	Peningkatan kualitas drainase lingkungan	· Perbaikan/ pembangunan kualitas drainase · Pemeliharaan secara barkala · Melakukan pembangunan jaringan drainase · Melakukan pemeliharaan jaringan drainase · Menganggarkan kegiatan pemeliharaan dan pembangunan drainase	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE · Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
			31 KK dengan sarpras air	Pengembangan pengolahan	· Melakukan pembangunan jamban	PROGRAM PENGELOLAAN DAN

No	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan	Program
				Peningkatan	Peningkatan	
			limbah tdk sesuai persyaratan teknis	limbah rumah tangga	keluarga · Melakukan pembangunan septick tank komunal · Memberikan bantuan jamban keluarga · Melakukan program septick tank plus · Menyediakan IPAL · Menyediakan sapras pendukung	PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH · Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
			255 KK dg sistem penglahan sampah tdk sesuai standar teknis	Pengelolaan persampahan	· Melakukan pengadaan alat pengolah sampah · Melakukan pembangunan Bank Sampah · Melakukan pembangunan TPS Terpadu · Melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak 3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL · Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS3R/ TPS
			247 bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Penyediaan system proteksi kebakaran	· Pembangunan pos pemadam kebakaran skala lingkungan · Penyediaan APAR	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN , PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN · Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
6	Kalikajar Penaruban	**Kaligondang**	36 bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	Pemugaran Peremajaan	· Pembuatan site plan konsep penataan permukiman yang layak · Sosialisasi tentang rumah layak huni/ rumah sehat · Melakukan pemugaran dan pembangunan RTLH	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN · Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
			1962 jalan dengan permukaan rusak	Peningkatan kualitas jalan lingkungan	· Perbaikan/ pembangunan kualitas jalan · Pemeliharaan secara barkala · Melakukan perbangunan jalan paving/beton lingkungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN · Pembangunan Jalan
			100 KK tidak terakses air minum aman 170 KK tidak terpenuhi kebutuhan Air Minum minimalnya	Peningkatan penyediaan air minum dan jaringan distribusi	· Melakukan pembangunan jaringan air minum baru · Memanfaatkan sumber- sumber mata air sebagai sumber air bersih · Melibatkan peran swasta dalam penyediaan	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM · Pembangunan SPAM Jaringan

No	Kelurahan /Desa	Kecamatan	Permasalahan	Konsep Penanganan	Strategi Penanganan	Program
				Peningkatan	Peningkatan	
					dan pembangunan jaringan air berih	Perpipaan di Kawasan Perdesaan
			518 saluran drainase rusak	Peningkatan kualitas drainase lingkungan	· Perbaikan/ pembangunan kualitas drainase · Pemeliharaan secara barkala · Melakukan pembangunan jaringan drainase · Melakukan pemeliharaan jaringan drainase · Menganggarkan kegiatan pemeliharaan dan pembangunan drainase	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE · Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
			225 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis	Pengembangan pengolahan limbah rumah tangga	· Melakukan pembangunan jamban keluarga · Melakukan pembangunan septick tank komunal · Memberikan bantuan jamban keluarga · Melakukan program septick tank plus · Menyediakan IPAL · Menyediakan sapras pendukung	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH · Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
			530 KK dg sistem penglahan sampah tdk sesuai standar teknis	Pengelolaan persampahan	· Melakukan pengadaan alat pengolah sampah · Melakukan pembangunan Bank Sampah · Melakukan pembangunan TPS Terpadu · Melakukan kerjasama pengelolaan sampah dengan pihak 3	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL · Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS3R/ TPS
			495 bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	Penyediaan system proteksi kebakaran	· Pembangunan pos pemadam kebakaran skala lingkungan · Penyediaan APAR	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN , PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN · Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri

Sumber: RP2KPKPK Kab Purbalingga, 2021

4.6.7. Analisis Pembangunan Perumahan Baru

Dengan mengetahui jumlah kebutuhan perumahan di masa mendatang, pemerintah dapat mengambil kebijakan atau perencanaan dalam menyediakan lahan untuk permukiman sehingga perkembangan permukiman di masa mendatang tidak menyalahi peruntukannya dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten. Menurut Permenpera No 10 Tahun 2012, Setiap orang yang membangun perumahan dan kawasan permukiman wajib dengan hunian berimbang, kecuali seluruhnya diperuntukkan bagi rumah sederhana dan/atau rumah susun umum. Hunian Berimbang adalah perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam bentuk rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam bentuk rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial, atau dalam bentuk rumah tapak dan rumah susun umum.

Menurut Permenpera No 7 Tahun 2013, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan hunian berimbang dilaksanakan di perumahan, permukiman, lingkungan hunian dan kawasan permukiman. Perumahan, permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman dengan skala sebagai berikut :

a. perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) sampai dengan 1.000 (seribu) rumah;
b. permukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah;
c. lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurangkurangnya 3.000 (tiga ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) rumah; dan
d. kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) rumah.

Pembangunan hunian berimbang dilaksanakan bersamaan secara proporsional antara rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana. Dalam hal hanya membangun rumah mewah, setiap orang wajib membangun sekurang-kurangnya rumah menengah 2 (dua) kali dan rumah sederhana 3 (tiga) kali jumlah rumah mewah yang akan dibangun. Dalam hal hanya membangun rumah menengah, setiap orang wajib membangun rumah sederhana sekurang-kurangnya 1 ½ (satu setengah) kali jumlah rumah menengah yang akan dibangun. Dalam hal Pelaku pembangunan perumahan tidak dapat membangun rumah sederhana, Pelaku pembangunan perumahan dapat membangun Rumah Susun Umum yang jumlahnya senilai dengan harga kewajiban membangun Rumah Sederhana. Pelaku pembangunan rumah susun komersial wajib membangun rumah susun umum sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun. Rumah susun komersial dapat terdiri dari rumah susun hunian dan campuran.

Pembangunan hunian berimbang dilaksanakan bersamaan secara proporsional antara rumah mewah, rumah menengah, dan rumah sederhana. Perhitungan kebutuhan rumah total (kebutuhan rumah karena pertambahan alami maupun faktor eksternal, plus bakclog), kemudian dibagi sesuai dengan rasio hunian berimbang. Setelah diketahui jumlah kebutuhan rumah mewah, rumah menengah dan rumah sederhana, selanjutnya masih-masing jumlah kebutuhan rumah tersebut dikalikan dengan rata-rata luas kaveling untuk rumah mewah (digunakan pendekatan perhitungan seluas 150 m^2/ kaveling), rumah

menengah (90 m^2) dan rumah sederhana (60 m^2). Perhitungan kebutuhan lahan untuk perumahan baru sudah memperhitungkan kebutuhan lahan untuk prasarana, sarana, utilitas sebesar 40% dari luas kebutuhan kaveling perumahan. Kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan baru dengan konsep hunian berimbang di kawasan perkotaan Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Berdasarkan perhitungan kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan baru hingga tahun 2041 di Lingkungan Hunian Purbalingga mencapai 180,32 Ha (belum termasuk sarana prasarana, jalan dan RTH). Dengan memperhitungkan kebutuhan sarana prasarana 25%, jalan 10% dan RTH 10% dari luas kebutuhan tersebut, maka luas kebutuhan lahan permukiman di Lingkungan Hunian Purbalingga mencapai 252,44 Ha. Dari adanya luas kebutuhan perumahan tersebut dapat diperhitungkan menjadi kebutuhan penambahan rumah baru pada tahun 2041 sebanyak 10.607 unit rumah sederhana, 7.071 unit rumah sedang, dan 3.536 unit rumah mewah. Sementara itu, dari luas rencana kawasan permukiman dengan luas kebutuhan perumahan terdapat beberapa satuan perumahan yang mengalami kesenjangan atau selisih lahan, sebagai berikut:

a. Perumahan Purbalingga Wetan memiliki selisih lahan antara kebutuhan perumahan dengan kawasan permukiman sebesar -5,28 Ha. Maka dari itu diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara penyediaan dari rencana kawasan permukiman di Perumahan Bancar;
b. Perumahan Purbalingga Kidul memiliki selisih lahan antara kebutuhan perumahan dengan kawasan permukiman sebesar -10,51 Ha. Maka dari itu diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara penyediaan dari rencana kawasan permukiman di Perumahan Penambongan;
c. Perumahan Purbalingga Kulon memiliki selisih lahan antara kebutuhan perumahan dengan kawasan permukiman sebesar -5,66 Ha. Maka dari itu diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara penyediaan dari rencana kawasan permukiman di Perumahan Kandanggampang;
d. Perumahan Purbalingga Lor memiliki selisih lahan antara kebutuhan perumahan dengan kawasan permukiman sebesar -15,55 Ha. Maka dari itu diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara penyediaan dari rencana kawasan permukiman di Perumahan Wirasana.

Tabel IV.81.
Kebutuhan Pembangunan Perumahan Baru di Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2041

No	Perumahan	Jml Rmh	Backlog Rmh	Kebutuhan Penambahan Rmh Baru (unit)	Jml Kebutuhan Rumah (unit)			Total Luas Kebt Perumahan (Ha)	Luas Rencana Kaw Perkim (ha)	Selisih Lahan (Ha)	Rencana Pengadaan Lahan untuk Kawasan Permukiman Baru (ha)
		2020	2020	Tahun 2041	Rumah Sederhana	Rumah Sedang	Rumah Mewah				
1	Bojong	892	871	1.839	919	613	306	21,88	30,89	9,01	
2	Toyareja	479	468	1.041	520	347	173	12,39	18,69	6,30	
3	Kedung Menjangan	561	548	1.183	592	394	197	14,08	23,76	9,68	
4	Jatisaba	626	610	1.492	746	497	249	17,75	20,10	2,35	
5	Bancar	725	707	1.359	679	453	226	16,17	22,18	6,01	
6	Purbalingga Wetan	883	861	1.698	849	566	283	20,20	14,92	-5,28	penyediaan lahan di Ds Bancar
7	Penambongan	809	789	1.707	854	569	285	20,31	58,42	38,11	
8	Purbalingga Kidul	1.074	1.049	2.090	1.045	697	348	24,87	14,36	-10,51	penyediaan lahan di Ds Penambongan
9	Kandang Gampang	535	523	1.235	617	412	206	14,70	20,67	5,97	
10	Purbalingga Kulon	480	469	990	495	330	165	11,78	6,12	-5,66	penyediaan lahan di Ds Kandanggampang
11	Purbalingga Lor	1.089	1.063	2.142	1.071	714	357	25,49	9,94	-15,55	penyediaan lahan di Ds Wirasana
12	Kembaran Kulon	808	788	1.827	913	609	304	21,74	24,22	2,48	
13	Wirasana	1.248	1.217	2.612	1.306	871	435	31,08	59,72	28,64	
Jumlah		10.209	9.963	21.214	10.607	7.071	3.536	252,44	323,99	71,55	

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Berdasarkan perhitungan kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan baru hingga tahun 2041 di Lingkungan Hunian Kalimanah mencapai 200,69 Ha (belum termasuk sarana prasarana, jalan dan RTH). Dengan memperhitungkan kebutuhan sarana prasarana 25%, jalan 10% dan RTH 10% dari luas kebutuhan tersebut, maka luas kebutuhan lahan permukiman di LH Kalimanah mencapai 280,97 Ha. Dari adanya luas kebutuhan perumahan tersebut dapat diperhitungkan menjadi kebutuhan penambahan rumah baru pada tahun 2041 sebanyak 11.805 unit rumah sederhana, 7.870 unit rumah sedang, dan 3.935 unit rumah mewah. Sementara itu, dari luas rencana kawasan permukiman dengan luas kebutuhan perumahan terdapat beberapa satuan perumahan yang mengalami kesenjangan atau selisih lahan, sebagai berikut:

a. Perumahan Jampo, Perumahan Rabak, Perumahan Sidokangen, dan Perumahan Manduraga diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara penyediaan dari rencana kawasan permukiman di Perumahan Blater;
b. Perumahan Grecol diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara alihfungsi sawah lahan kering, jika tidak diperbolehkan maka penyediaan dari rencana kawasan permukiman di Perumahan Mewek;
c. Perumahan Kalikabong diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara alihfungsi sawah lahan kering, jika tidak diperbolehkan maka penyediaan dari rencana kawasan permukiman di Perumahan Selabaya;
d. Perumahan Kalimanah Kulon dan Perumahan Klapasawit diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara alihfungsi sawah lahan kering, jika tidak diperbolehkan maka penyediaan dari rencana kawasan permukiman di Perumahan Kalimanah Wetan;
e. Perumahan Kedungwuluh diarahkan pada rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman dengan cara alihfungsi sawah lahan kering, jika tidak diperbolehkan maka penyediaan dari rencana kawasan permukiman di Perumahan Karangsari.

Tabel IV.82.
Kebutuhan Pembangunan Perumahan Baru di Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2041

No	Perumahan	Jml Rmh (unit)	Backlog Rmh (unit)	Kebutuhan Penambahan Rmh Baru (unit)	Jml Kebutuhan Rumah (unit)			Total Luas Kebt Perumahan (Ha)	Luas Rencana Kaw Perkim (ha)	Rencana Pengadaan Lahan untuk Kawasan Permukiman Baru (ha)
		2020	2020	Tahun 2041	Rumah Sederhana	Rumah Sedang	Rumah Mewah			
1	Jompo	266	527	1.034	517	345	172	12,30	6,20	penyediaan lahan di Ds Blater
2	Rabak	366	726	1.375	687	458	229	16,36	9,62	penyediaan lahan di Ds Blater
3	Blater	449	891	1.441	720	480	240	17,14	44,49	
4	Sidakangen	298	591	1.093	547	364	182	13,01	4,15	penyediaan lahan di Ds Blater
5	Karangpetir	173	342	632	316	211	105	7,52	8,80	
6	Grecol	463	917	1.734	867	578	289	20,64	16,39	penyediaan lahan di Ds Mewek
7	Mewek	261	518	962	481	321	160	11,44	24,01	
8	Karangmanyar	273	541	918	459	306	153	10,93	11,66	
9	Kalikabong	682	1.351	2.315	1.157	772	386	27,55	23,66	penyediaan lahan di Ds Selabaya
10	Selabaya	455	903	1.620	810	540	270	19,28	48,11	
11	Kalimanah Wetan	401	795	1.403	701	468	234	16,69	42,98	
12	Kalimanah Kulon	258	513	991	496	330	165	11,79	10,88	penyediaan lahan di Ds Kalimanah Wetan
13	Manduraga	227	449	880	440	293	147	10,47	6,38	penyediaan lahan di Ds Blater
14	Karangsari	218	431	810	405	270	135	9,64	11,11	
15	Kedungwuluh	385	763	1.529	765	510	255	18,20	14,04	penyediaan lahan di Ds Karangsari, Klapasawit
16	Klapasawit	547	1.085	2.120	1.060	707	353	25,22	9,91	penyediaan lahan di Ds Kalimanah Wetan
17	Babakan	776	1.538	2.754	1.377	918	459	32,77	45,60	
Jumlah		6.497	12.882	23.611	11.805	7.870	3.935	280,97	337,99	

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Berdasarkan perhitungan kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan baru hingga tahun 2041 di Lingkungan Hunian Padamara mencapai 99,85 Ha (belum termasuk sarana prasarana, jalan dan RTH). Dengan memperhitungkan kebutuhan sarana prasarana 25%, jalan 10% dan RTH 10% dari luas kebutuhan tersebut, maka luas kebutuhan lahan permukiman di Lingkungan Hunian Padamara mencapai 139,79 Ha. Dari adanya luas kebutuhan perumahan tersebut dapat diperhitungkan menjadi kebutuhan penambahan rumah baru pada tahun 2041 sebanyak 5.874 unit rumah sederhana, 3.916 unit rumah sedang, dan 1.958 unit rumah mewah. Sementara itu, dari luas rencana kawasan permukiman dengan luas kebutuhan perumahan terdapat beberapa satuan perumahan yang mengalami kesenjangan atau selisih lahan, sebagai berikut:

a. Perumahan Dawuhan diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara penyediaan dari rencana kawasan permukiman di Perumahan Gemuruh;
b. Perumahan Prigi diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara penyediaan dari rencana kawasan permukiman di Perumahan Padamara;
c. Perumahan Purbayasa diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara alihfungsi ladang;
d. Perumahan Karanggambas diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara alihfungsi kebun dan ladang, serta penyediaan dari rencana kawasan permukiman di Perumahan Kalitinggar;
e. Perumahan Mipiran diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara penyediaan dari rencana kawasan permukiman di Perumahan Kalitinggar dan Perumahan Kalitinggar Kidul.

Tabel IV.83.
Kebutuhan Pembangunan Perumahan Baru di Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2041

No	Perumahan	Jml Rmh (unit)	Backlog Rmh (unit)	Kebutuhan Penambahan Rmh Baru (unit)	Jml Kebutuhan Rumah (unit)			Total Luas Kebt Perumahan (Ha)	Luas Rencana Kaw Perkim (ha)	Rencana Pengadaan Lahan untuk Kawasan Permukiman Baru (ha)
		2020	2020	Tahun 2041	Rumah Sederhana	Rumah Sedang	Rumah Mewah			
1	Karangpule	397	123	438	219	146	73	5,21	40,91	
2	Kalitinggar	687	214	785	393	262	131	9,34	17,18	
3	Sokawera	650	202	708	354	236	118	8,42	10,49	
4	Padamara	787	244	857	428	286	143	10,19	23,25	
5	Karangjambe	1.002	312	907	453	302	151	10,79	12,40	
6	Bojanegara	1.552	482	1.276	638	425	213	15,19	55,90	
7	Karangsentul	677	211	613	306	204	102	7,29	24,86	
8	Gemuruh	1.045	325	1.130	565	377	188	13,45	32,86	
9	Dawuhan	1.034	321	972	486	324	162	11,57	6,54	penyediaan lahan di Ds Gemuruh
10	Prigi	809	251	899	450	300	150	10,70	5,88	penyediaan lahan di Ds Padamara
11	Purbayasa	589	183	626	313	209	104	7,45	6,23	Alihfungsi ladang
12	Karanggambas	1.058	329	1.119	559	373	186	13,31	10,00	Alihfungsi kebun, ladang, penyediaan lahan di Ds Kalitinggar
13	Mipiran	864	269	886	443	295	148	10,54	1,04	penyediaan lahan di Ds Kalitinggar, Kalitinggar Kidul
14	Kalitinggar Kidul	459	143	531	266	177	89	6,32	8,79	
Jumlah		11.611	3.608	11.747	5.874	3.916	1.958	139,79	256,33	

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Berdasarkan perhitungan kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan baru hingga tahun 2041 di Lingkungan Hunian Bojongsari mencapai 159,60 Ha (belum termasuk sarana prasarana, jalan dan RTH). Dengan memperhitungkan kebutuhan sarana prasarana 25%, jalan 10% dan RTH 10% dari luas kebutuhan tersebut, maka luas kebutuhan lahan permukiman di LH Bojongsari mencapai 223,44 Ha. Dari adanya luas kebutuhan perumahan tersebut dapat diperhitungkan menjadi kebutuhan penambahan rumah baru pada tahun 2041 sebanyak 9.388 unit rumah sederhana, 6.259 unit rumah sedang, dan 3.129 unit rumah mewah. Sementara itu, dari luas rencana kawasan permukiman dengan luas kebutuhan perumahan terdapat beberapa satuan perumahan yang mengalami kesenjangan atau selisih lahan, sebagai berikut:

a. Perumahan Galuh diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara penyediaan dari rencana kawasan permukiman di Perumahan Gembong;
b. Perumahan Banjaran diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara penyediaan dari rencana kawasan permukiman di Perumahan Gembong dan alihfungsi lahan perkebunan;
c. Perumahan Patemon diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara penyediaan dari rencana kawasan permukiman di Perumahan Bojongsari dan alihfungsi lahan perkebunan;
d. Perumahan Beji dan Perumahan Pagedangan diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara alihfungsi lahan tegalan;
e. Perumahan Matenggeng diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara penyediaan dari rencana kawasan permukiman di Perumahan Pekalongan dan alihfungsi lahan perkebunan.

Tabel IV.84.
Kebutuhan Pembangunan Perumahan Baru di Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2041

No	Perumahan	Jml Rmh (unit)	Backlog Rmh (unit)	Kebutuhan Penambahan Rmh Baru (unit)	Jml Kebutuhan Rumah (unit)			Total Luas Kebt Perumahan (Ha)	Luas Rencana Kaw Perkim (ha)	Rencana Pengadaan Lahan untuk Kawasan Permukiman Baru (ha)
		2020	2020	Tahun 2041	Rumah Sederhana	Rumah Sedang	Rumah Mewah			
1	Brobot	835	482	1.169	584	390	195	13,91	29,86	
2	Gembong	790	456	1.138	569	379	190	13,54	24,71	
3	Galuh	624	360	864	432	288	144	10,28	7,28	penyediaan lahan di Ds Gembong
4	Banjaran	1.226	708	1.762	881	587	294	20,96	7,71	penyediaan lahan di Ds Gembong, Alihfungsi perkebunan
5	Patemon	905	522	1.354	677	451	226	16,11	5,49	penyediaan lahan di Ds Bojongsari, Alihfungsi perkebunan
6	Bojongsari	1.334	770	1.862	931	621	310	22,16	32,82	
7	Kajongan	1.116	643	1.598	799	533	266	19,02	19,41	
8	Karangbanjar	935	539	1.341	671	447	224	15,96	16,13	
9	Beji	877	506	1.271	636	424	212	15,13	8,06	Alihfungsi lahan tegalan
10	Pagedangan	824	476	1.131	566	377	189	13,46	6,30	Alihfungsi lahan tegalan
11	Pekalongan	1.209	698	1.719	859	573	286	20,45	26,03	
12	Matenggeng	853	492	1.235	618	412	206	14,70	6,49	penyediaan lahan di Ds Pekalongan, Alihfungsi lahan perkebunan
13	Bumisari	1.653	953	2.333	1.166	778	389	27,76	43,93	
Jumlah		13.182	7.604	18.777	9.388	6.259	3.129	223,44	234,22	

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Berdasarkan perhitungan kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan baru hingga tahun 2041 di Lingkungan Hunian Kutasari mencapai 199,77 Ha (belum termasuk sarana prasarana, jalan dan RTH). Dengan memperhitungkan kebutuhan sarana prasarana 25%, jalan 10% dan RTH 10% dari luas kebutuhan tersebut, maka luas kebutuhan lahan permukiman di LH Kutasari mencapai 279,69 Ha. Dari adanya luas kebutuhan perumahan tersebut dapat diperhitungkan menjadi kebutuhan penambahan rumah baru pada tahun 2041 sebanyak 11.751 unit rumah sederhana, 7.834 unit rumah sedang, dan 3.917 unit rumah mewah. Sementara itu, dari luas rencana kawasan permukiman dengan luas kebutuhan perumahan terdapat beberapa satuan perumahan yang mengalami kesenjangan atau selisih lahan, sebagai berikut:

a. Perumahan Karanglewas diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara alihfungsi lahan kebun dan ladang;
b. Perumahan Munjul diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara alihfungsi lahan kebun dan ladang, serta penyediaan dari rencana kawasan permukiman di Perumahan Kembaran Kulon, Lingkungan Hunian Purbalingga;
c. Perumahan Karangklesem diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara penyediaan dari rencana kawasan permukiman di Perumahan Gemuruh, Lingkungan Hunian Padamara;
d. Perumahan Kutasari diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara alihfungsi ladang;
e. Perumahan Sumingkir diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara penyediaan dari rencana kawasan permukiman di Lingkungan Hunian Bojongsari;
f. Perumahan Meri dan Perumahan Karangreja diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara alihfungsi lahan kebun;
g. Perumahan Karangaren diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara penyediaan dari rencana kawasan permukiman di Perumahan Gemuruh, Lingkungan Hunian Padamara;
h. Perumahan Limbangan diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara penyediaan dari rencana kawasan permukiman di Perumahan Padamara atau Perumahan Karangsentul, Lingkungan Hunian Padamara;
i. Perumahan Cendana diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara penyediaan dari rencana kawasan permukiman di Perumahan Candiwulan;
j. Perumahan Karangcegak diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara penyediaan dari rencana kawasan permukiman di Perumahan Candinata.

Tabel IV.85.
Kebutuhan Pembangunan Perumahan Baru di Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2041

No	Perumahan	Jml Rmh (unit)	Backlog Rmh (unit)	Kebutuhan Penambahan Rmh Baru (unit)	Jml Kebutuhan Rumah (unit)			Total Luas Kebt Perumahan (Ha)	Luas Rencana Kaw Perkim (ha)	Rencana Pengadaan Lahan untuk Kawasan Permukiman Baru (ha)
		2020	2020	Tahun 2041	Rumah Sederhana	Rumah Sedang	Rumah Mewah			
1	Karanglewas	441	478	1.006	503	335	168	11,98	8,14	Alihfungsi kebun dan ladang
2	Munjul	597	647	1.360	680	453	227	16,18	11,47	Alihfungsi kebun dan ladang, penyediaan lahan di Ds Kembaran Kulon, Kec Purbalingga
3	Karangklesem	541	587	1.313	657	438	219	15,63	2,63	penyediaan lahan di Ds Gemuruh Kec Padamara
4	Kutasari	838	909	1.938	969	646	323	23,07	19,43	Alihfungsi ladang
5	Sumingkir	821	890	1.959	980	653	327	23,32	10,93	kec bojongsari
6	Meri	641	695	1.543	772	514	257	18,37	16,04	Alihfungsi kebun
7	Karangreja	1.003	1.088	2.258	1.129	753	376	26,87	21,55	Alihfungsi kebun
8	Karangaren	249	271	525	262	175	87	6,24	1,64	penyediaan lahan di Ds Gemuruh Kec Padamara
9	Limbangan	688	747	1.614	807	538	269	19,20	2,35	penyediaan lahan di Ds Padamara/Karangsentul Kec Padamara
10	Cendana	822	892	1.843	922	614	307	21,93	19,80	Penyediaan lahan di Ds Candiwulan
11	Candiwulan	882	957	1.973	987	658	329	23,48	31,67	
12	Karangcegak	1.066	1.156	2.480	1.240	827	413	29,52	17,00	Penyediaan lahan di Ds Candinata
13	Candinata	947	1.028	2.098	1.049	699	350	24,97	54,82	
14	Karangjengkol	697	756	1.591	796	530	265	18,93	35,34	
Jumlah		10.233	11.101	23.503	11.751	7.834	3.917	279,69	252,81	

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Berdasarkan perhitungan kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan baru hingga tahun 2041 di Lingkungan Hunian Kaligondang mencapai 159,68 Ha (belum termasuk sarana prasarana, jalan dan RTH). Dengan memperhitungkan kebutuhan sarana prasarana 25%, jalan 10% dan RTH 10% dari luas kebutuhan tersebut, maka luas kebutuhan lahan permukiman di Lingkungan Hunian Kaligondang mencapai 223,56 Ha. Dari adanya luas kebutuhan perumahan tersebut dapat diperhitungkan menjadi kebutuhan penambahan rumah baru pada tahun 2041 sebanyak 9.393 unit rumah sederhana, 6.262 unit rumah sedang, dan 3.131 unit rumah mewah. Sementara itu, dari luas rencana kawasan permukiman dengan luas kebutuhan perumahan terdapat beberapa satuan perumahan yang mengalami kesenjangan atau selisih lahan, sebagai berikut:

a. Perumahan Lamongan diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara penyediaan dari rencana kawasan permukiman di Perumahan Tejasari;
b. Perumahan Arenan diarahkan rencana pengadaan lahan untuk kawasan permukiman baru dengan cara penyediaan dari rencana kawasan permukiman di Perumahan Sidanegara.

Tabel IV.86.
Kebutuhan Pembangunan Perumahan Baru di Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2041

No	Perumahan	Jml Rmh (unit)	Backlog Rmh (unit)	Kebutuhan Penambahan Rmh Baru (unit)	Jml Kebutuhan Rumah (unit)			Total Luas Kebt Perumahan (Ha)	Luas Rencana Kaw Perkim (ha)	Rencana Pengadaan Lahan untuk Kawasan Permukiman Baru (ha)
		2020	2020	Tahun 2041	Rumah Sederhana	Rumah Sedang	Rumah Mewah			
1	Lamongan	726	199	757	379	252	126	9,01	4,62	penyediaan lahan di Ds Tejasari
2	Tejasari	727	199	774	387	258	129	9,21	17,70	
3	Cilapar	576	157	643	321	214	107	7,65	20,28	
4	Penolih	1.039	284	1.185	593	395	198	14,10	68,54	
5	Sinduraja	1.364	373	1.410	705	470	235	16,77	38,62	
6	Selakambang	2.183	597	2.474	1.237	825	412	29,44	96,35	
7	Selanegara	912	250	1.009	505	336	168	12,01	45,17	
8	Kaligondang	902	247	992	496	331	165	11,80	67,13	
9	Brecek	398	109	417	208	139	69	4,96	9,62	
10	Sempor Lor	358	98	383	191	128	64	4,55	7,65	
11	Penaruban	1.365	373	1.237	619	412	206	14,72	20,53	
12	Kalikajar	1.231	337	1.190	595	397	198	14,17	27,37	
13	Kembaran Wetan	853	234	959	480	320	160	11,41	26,90	
14	Slinga	1.438	393	1.457	729	486	243	17,34	21,22	
15	Arenan	1.069	293	1.030	515	343	172	12,25	3,31	penyediaan lahan di Ds Sidanegara
16	Sidanegara	850	232	962	481	321	160	11,45	48,60	
17	Pagerandong	545	149	651	326	217	109	7,75	8,17	
18	Sidareja	1.267	347	1.256	628	419	209	14,94	80,75	
Jumlah		17.803	4.871	18.786	9.393	6.262	3.131	223,56	612,53	

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Setiap satuan perumahan diarahkan untuk pengembangan perumahan, baik di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan dengan pertimbangan pemerataan pelayanan perumahan di seluruh wilayah. Beberapa persyaratan yang dapat menjadi arahan detail lokasi pembangunan perumahan baru adalah sebagai berikut:

1. Tanah relatif datar dengan kemiringan tidak lebih dari 40%.
2. Bukan merupakan kawasan rawan bencana tinggi.
3. Tidak mengalihfungsikan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
4. Lokasinya mempunyai akses transportasi yang dapat dijangkau dengan mudah.
5. Tidak berlokasi pada kawasan lindung.
6. Tidak berlokasi pada kawasan yang masih dalam sengketa.
7. Mempunyai sumber air baku yang memadai (kualitas dan kuantitas) atau terhubungkan dengan jaringan pelayanan air bersih serta jaringan sanitasi dan pematusan berskala kota.
8. Terletak pada hamparan dengan luasan yang cukup, yang memungkinkan terselenggarakannya pola hunian yang berimbang.
9. Memiliki pola permukiman yang kompak.
10. Memiliki kemudahan mencapai sarana umum.

Selain pertimbangan diatas, kriteria lain dalam hal penentuan lokasi perumahan yang dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu sebagai berikut:

1. Lokasi tidak terlalu jauh dari tempat-tempat usaha/ bekerja.
2. Status kepemilikan lahan dan rumah jelas, sehingga tidak ada rasa ketakutan penghuni untuk digusur.
3. Bentuk dan kualitas bangunan memenuhi standar layak huni.
4. Harga atau biaya pembangunan rumah harus sesuai dengan tingkat pendapatan.

Dalam rencana pola ruang RTRW Kabupaten Purbalingga telah dialokasikan luasan untuk kawasan permukiman, namun berdasarkan perhitungan kebutuhan lahan untuk perumahan baru masih terdapat beberapa desa yang kurang tercukup, oleh sebab itu perlu penambahan alih fungsi peruntukan pola ruang lain yang relatif kurang produktif, seperti kawasan perkebunan. Jika tidak ada lahan yang dapat dialihfungsi maka penyediaan lahan untuk perumahan baru diarahkan ke desa atau kecamatan sekitarya yang masih memiliki potensi lahan yang melebihi proyeksi kebutuhan.

Ketersediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Ketersediaan tanah termasuk penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggung jawab pemerintahan kabupaten. Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman dapat dilakukan melalui:

1. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara.

   Tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang digunakan untuk pembangunan rumah, perumahan, dan/atau kawasan permukiman diserahkan melalui pemberian hak atas tanah kepada setiap orang yang melakukan pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman. Pemberian hak atas tanah didasarkan pada keputusan gubernur atau bupati/walikota tentang penetapan lokasi atau izin lokasi. Dalam hal tanah yang langsung dikuasai negara terdapat garapan masyarakat, hak atas tanah diberikan setelah pelaku pembangunan perumahan dan permukiman selaku pemohon hak atas tanah menyelesaikan ganti rugi atas seluruh garapan masyarakat berdasarkan kesepakatan. Jika tidak ada kesepakatan tentang ganti rugi maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah.

   Konsolidasi tanah dapat dilakukan di atas tanah milik pemegang hak atas tanah dan/atau di atas tanah negara yang digarap oleh masyarakat. Konsolidasi tanah dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antar pemegang hak atas tanah; antar penggarap tanah negara; atau antara penggarap tanah negara dan pemegang hak atas tanah.

   Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan apabila paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari pemilik tanah yang luas tanahnya meliputi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasi menyatakan persetujuannya. Kesepakatan paling sedikit 60% (enam puluh persen) tidak mengurangi hak masyarakat sebesar 40% (empat puluh persen) untuk mendapatkan aksesibilitas.

   Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan bagi pembangunan rumah tunggal, rumah deret, atau rumah susun. Penetapan lokasi konsolidasi tanah dilakukan oleh bupati. Lokasi konsolidasi tanah yang sudah ditetapkan oleh bupati tidak memerlukan izin lokasi. Dalam pembangunan rumah umum dan rumah swadaya yang didirikan di atas tanah hasil konsolidasi, Pemerintah wajib memberikan kemudahan berupa:

   a. sertifikasi hak atas tanah;

   b. penetapan lokasi;

   c. desain konsolidasi; dan

   d. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

   Sertifikasi terhadap pemilik tanah hasil konsolidasi tidak dikenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sertifikasi terhadap penggarap tanah negara hasil konsolidasi dikenai bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

   Konsolidasi tanah dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan badan hukum. Kerja sama dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara penggarap tanah negara dan/atau pemegang hak atas tanah dan badan hukum dengan prinsip kesetaraan yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang.

3. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah.

   Peralihan atau pelepasan hak atas tanah dilakukan setelah badan hukum memperoleh izin lokasi. Peralihan hak atas tanah dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah

setelah ada kesepakatan bersama. Pelepasan hak atas tanah dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang. Peralihan hak atau pelepasan hak atas tanah wajib didaftarkan pada kantor pertanahan kabupaten.

4. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah bagi pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman diperuntukkan bagi pembangunan rumah umum dan/atau rumah khusus.

5. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.

   Pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar bagi pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman diperuntukkan pembangunan rumah umum, rumah khusus, dan penataan permukiman kumuh.

6. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum bagi pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman diperuntukkan pembangunan rumah umum, rumah khusus, dan penataan permukiman kumuh. Aturan mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, dimana pada Pasal 10 disebutkan bahwa salah satu pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah digunakan untuk penataan permukiman kumuh perkotaan dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk MBR dengan status sewa. Dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 3 disebutkan bahwa setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum perlu membuat rencana pengadaan tanah yang didasarkan pada:

   1. Rencana Tata Ruang Wilayah.
   2. Prioritas pembangunan yang tercantum dalam:
      - Rencana Pembangunan Jangka Menengah,
      - Rencana strategis,
   3. Rencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan.

Land Banking

Land banking (pencadangan tanah) adalah upaya-upaya dalam rangka praktek perolehan tanah dan menyimpan tanah yang sudah diperoleh/ dibebaskan untuk penggunaan pada masa yang akan datang. *Land banking* merupakan konsep pengadaan tanah dengan cara "menabung" tanah dengan luasan tertentu dan pada daerah tertentu dengan konsep menyerupai bank. Konsep ini belum memiliki dasar hukum namun dapat dijadikan alternatif dalam pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Tujuan pelaksanaan kebijakan pencadangan tanah adalah:

1. Memberikan jaminan ketersediaan tanah melalui upaya peningkatan daya guna dan hasil guna tanah, dengan mengutamakan fungsi sosial tanah dalam konteks

pembangunan yang berkelanjutan.

2. Mendukung pengembangan kota baru dan penerapan kebijakan hunianberimbang.
3. Mengendalikan pengadaan, penguasaan, dan pemanfaatan tanah secara adil dan wajar dalam pelaksanaan pembangunan.
4. Menyediakan tanah siap bangun (secara fisik maupun administrasi).
5. Mengendalikan harga tanah (tidak terpengaruh dengan mekanisme pasar yang diakibatkan pembangunan sektor properti oleh swasta, tidak terpengaruh dengan spekulasi, dll) sehingga wajar untuk dibangun rumah bagi MBR dengan harga yang terjangkau.

4.6.8. Analisis Penataan Perumahan Pada Kawasan Strategis

Sebagian perumahan pada LH Purbalingga masuk dalam kawasan strategis kabupaten yaitu kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yang berada di Kecamatan Kutasari, Bojongsari dan Kaligondang dengan luas total 3.951,49 Ha. Arahan penataan perumahan pada kawasan strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel IV.87.
Arahan Penataan Perumahan pada Kawasan Strategis

Kaw Strategis	Lokasi	Arahan
Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi	a. Kec Kutasari (1.175,53 Ha): Perumahan Candinata, Candiwulan, Cendana, Karangaren, Karangcegak, Karangjengkol, Karangklesem, Karanglewas, Karangreja, Limbangan, Meri, Munjul, Sumingkir. b. Kec Bojongsari (4,03 Ha): Perumahan Banjaran, Beji, Bojongsari, Brobot, Bumisari, Galuh, Gembong, Karangbanjar, Metenggeng, Pagedangan, Patemon, Pekalongan. c. Kec Kaligondang (1.781,92 Ha): Perumahan Arenan, Brecek, Cilapar, Kaligondang, Kalikajar, Kembaran Wetan, Lamongan, Pagerandong, Penaruban, Penolih, Selakambang, Selanegara, Sempor Lor, Sidanegara, Sidareja, Sinduraja, Slinga, Tejasari.	1. pengaturan dan pengendalian tata bangunan perumahan dan kawasan permukiman, 2. menyediakan sarana dan prasarana penunjang, 3. menyediakan kemudahan akses menuju pusat kegiatan, 4. menyediakan ruang-ruang untuk golongan usaha skala kecil termasuk sektor informal. 5. menyediakan ruang terbuka hijau. 6. menyediakan buffer antara kawasan industri dengan perumahan dan kawasan permukiman, 7. menyediakan pengolahan limbah padat, cair, maupun udara di sekitar kegiatan industri

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

4.6.9. Analisis Penanganan Rumah Korban Terdampak Bencana

Mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam perencanaannya harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jenis bahaya alam yang berada pada lokasi atau di sekitar perumahan dan kawasan permukiman.

2. Lokasi perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
3. Sesuai standar kualitas lingkungan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
4. Rencana dan rancangan perumahan dan kawasan permukiman tanggap terhadap bencana alam terutama yang berlokasi di rawan bencana.
5. Melibatkan peran serta masyarakat.
6. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan kemandirian masyarakat dalam mengelola risiko bencana alam.

Mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus memperhatikan beberapa hal yaitu:

1. Pemilihan lokasi relokasi, dilakukan melalui:
   a. Sesuai dengan RTRW kabupaten dan/atau rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
   b. Bukan kawasan lindung
   c. Tidak pada zona dengan tingkat kerawanan bencana tinggi.
2. Pembatasan intensitas penggunaan lahan melalui koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien dasar hijau (KDH), ketinggian bangunan dan kepadatan bangunan.
3. Peta mikro zonasi bencana alam pada lokasi perumahan dan kawasan permukiman.
4. Struktur konstruksi bangunan, bahan bangunan sesuai dengan kearifan lokal.
5. Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai cakupan layanan yang mendukung tindakan mitigasi dan tanggap darurat terhadap bencana alam, dan
6. Pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sesuai perizinan.

Dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah daerah dapat meminta masukan dari masyarakat sekitar lokasi.

Mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman yang telah terbangun dilaksanakan melalui upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum sesuai kebutuhan mitigasi bencana alam.
2. Pembatasan intensitas penggunaan lahan melalui koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien dasar hijau (KDH), ketinggian bangunan dan kepadatan bangunan terutama wilayah rencata bencana alam.
3. Perlibatan peran serta masyarakat dalam penentuan risiko bencana alam, mitigasi bencana, dan penyusunan rencana kontijensi berbasis masyarakat, dan
4. Penataan daerah aliran sungai, pantai serta wilayah rawan bencana alam.

Mitigasi bencana alam bidang perumahan dan kawasan permukiman dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Identifikasi potensi bencana alam ayng mengancam perumahan dan kawasan permukiman sekurang-kurangnya meliputi:
   a. Jenis bencana alam,
   b. sejarah dan potensi kejadian bencana alam, serta
   c. Kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam.
2. Identifikasi tingkat kerentanan bencana alam, sekurang-kurangnya melakukan penilaian terhadap:
   a. Rumah penduduk,
   b. Prasarana, sarana dan utilitas umum yang mendukung evakuasi,
   c. Kapasitas struktural bangunan mencakup rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
3. Identifikasi kapasitas perumahan dan kawasan permukiman dalam menghadapi dan menanggulangi bencana alam.
4. Penyusunan prioritas mitigasi bencana yang dilakukan berdasarkan analisis biaya dan efektivitas mitigasi.
5. Penyusunan rencana tindak, sekurang-kurangnya meliputi:
   a. Kajian risiko bencana,
   b. Tujuan mitigasi bencana,
   c. Mitigasi yang akan dilakukan,
   d. Perencanaan teknis,
   e. skema pembiayaan.
   f. Jadwal pelaksanaan,
   g. Pelaksana/ penanggung jawab pelaksanaan mitigasi,
   h. Pemantauan dan evaluasi.
6. Mekanisme pengawasan dan pengendalian.

Mitigasi bencana tanah longsor

Mitigasi bencana tanah longsor di kawasan permukiman dilakukan terhadap rumah serta prasarana, sarana dan utilitas umum. Upaya yang dapat dilakukan meliputi:

1. Membangun struktur bangunan dengan pondasi yang kuat.
2. Membangun sengkedan-sengkedan lahan pada wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi untuk memperlandai lereng.
3. Membangun prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai.

4. Menempatkan konstruksi penahan tanah konvensional.
5. Memberi beban penyeimbang
6. Pembuatan jangkar untuk memperkuat tanah.

Pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor pada perumahan dan kawasan permukiman dilakukan melalui beberapa upaya yaitu:

1. Identifikasi dan pemanfaatan peta mikrozonasi kerawanan bencana tanah longsor.
2. Mengembangkan lokasi penyangga antara lokasi rawan longsor dengan lokasi yang akan dikembangkan sebagai perumahan dan kawasan permukiman.
3. Rekonstruksi terhadap bangunan dan prasarana, sarana dan utilitas umum yang memadai.
4. Relokasi perumahan dan kawasan permukiman yang sudah tidak layak huni ke lokasi yang aman.

Pelaksanaan mitigasi bencana tanah longsor melalui pembangunan prasarana, sarana dan utilitas dilakukan dengan memperhatikan:

1. Perencanaan lokasi evakuasi dan penampungan.
2. Perencanaan jaringan jalan yang digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi.
3. Menstabilkan tanah lereng yang rawan longsor.
4. Penyediaan drainase bawah tanah.
5. Ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan.

Pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat yang berlokasi rawan gempa bumi melalui beberapa kegiatan yaitu:

1. Sosialisasi terhadap kondisi tanah dan tindakan antisipasi terhadap bencana tanah longsor.
2. Memberikan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan.
3. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat untuk mengetahui tanda-tanda tanah longsor.

Mitigasi bencana banjir

Pelaksanaan mitigasi bencana banjir bidang perumahan dna kawasan permukiman dilakukan untuk mencegah dan mengurangi dampak terjadinya bencana banjir melalui identifikasi dan pemetaan zonasi kerawanan banjir. Identifikasi dilakukan terhadap penentuan alternatif pengurangan resiko kerusakan bencana banjir, sedangkan pemetaan zonasi kerawanan banjir dilakukan terhadap kemiringan lokasi perumahan dan kawasan permukiman sehingga dapat mengurangi dampak bencana banjir. Prinsip mitigasi bencana banjir untuk perumahan dan kawasan permukiman adalah:

a. Menghindari kawasan rawan banjir,

b. Menghindari limpahan air,

c. Mengalihkan aliran banjir,

d. Pengendalian aliran air.

Pelaksanaan mitigasi bencana banjir pada perumahan dan kawasan permukiman meliputi:

1. Sesuai tata ruang wilayah serta tata bangunan dan lingkungan.
2. Penentuan lokasi melalui identifikasi dan pemanfaatan peta mikrozonasi kerawanan bencana banjir.
3. Pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman secara swadaya melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala.

Pelaksanaan mitgasi bencana banjir terhadap pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum di kawasan permukiman harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

1. Lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir.
2. Jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi.
3. Drainase dengan ukuran yang memadai berdasarkan data jenis dan daya serap tanah.
4. Pembuatan sumur resapan.
5. Pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati perumahan dan kawasan permukiman.
6. Ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi.
7. Pembuatan tempat pembuangan sampah sementara.

Pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat di lokasi banjir melalui:

1. Sosialisasi terhadap bencana banjir dan tindakan evakuasi.
2. Memberikan bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan.
3. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat untuk mengetahui tanda-tanda banjir.

Mitigasi Bencana Gunung Berapi

Mitigasi bencana gunung berapi terhadap perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan sekurang-kurangnya meliputi:

1. Perencanaan perumahan dan kawasan permukiman menghindari kawasan rawan bencana gunung meletus terutama yang masih aktof serta lokasi yang cenderung dialiri lava.
2. Desain rumah serta sarana dan utilitas umum yang tahan terhadap beban dan bahaya akibat letusan gunung,
3. Menyediakan lokasi evakuasi dan pengungsian prasarana jalan yang memadai menuju lokasi pengungsian, serta alat transportasi.

Mitigasi Bencana Kebakaran

Pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran pada perumahan dan kawasan permukiman dilakukan melalui:

1. Identifikasi dan pemanfaatan peta mikrozonasi kerawanan bencana kebakaran.
2. Penataan bangunan dengan pengaturan jarak minimal antar rumah.
3. Pembangunan jalan lingkungan yang mampu diakses oleh kendaraan pemadam kebakaran.
4. Penyediaan alat pemadam api ringan (APAR) pada bangunan sarana umum.
5. Penyediaan hidran kebakaran.
6. Pembangunan penampungan air hujan sebagai sumber pemadam kebakaran.
7. Sosialisasi penggunaan peralatan listrik dan gas yang mudah terbakar.
8. Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

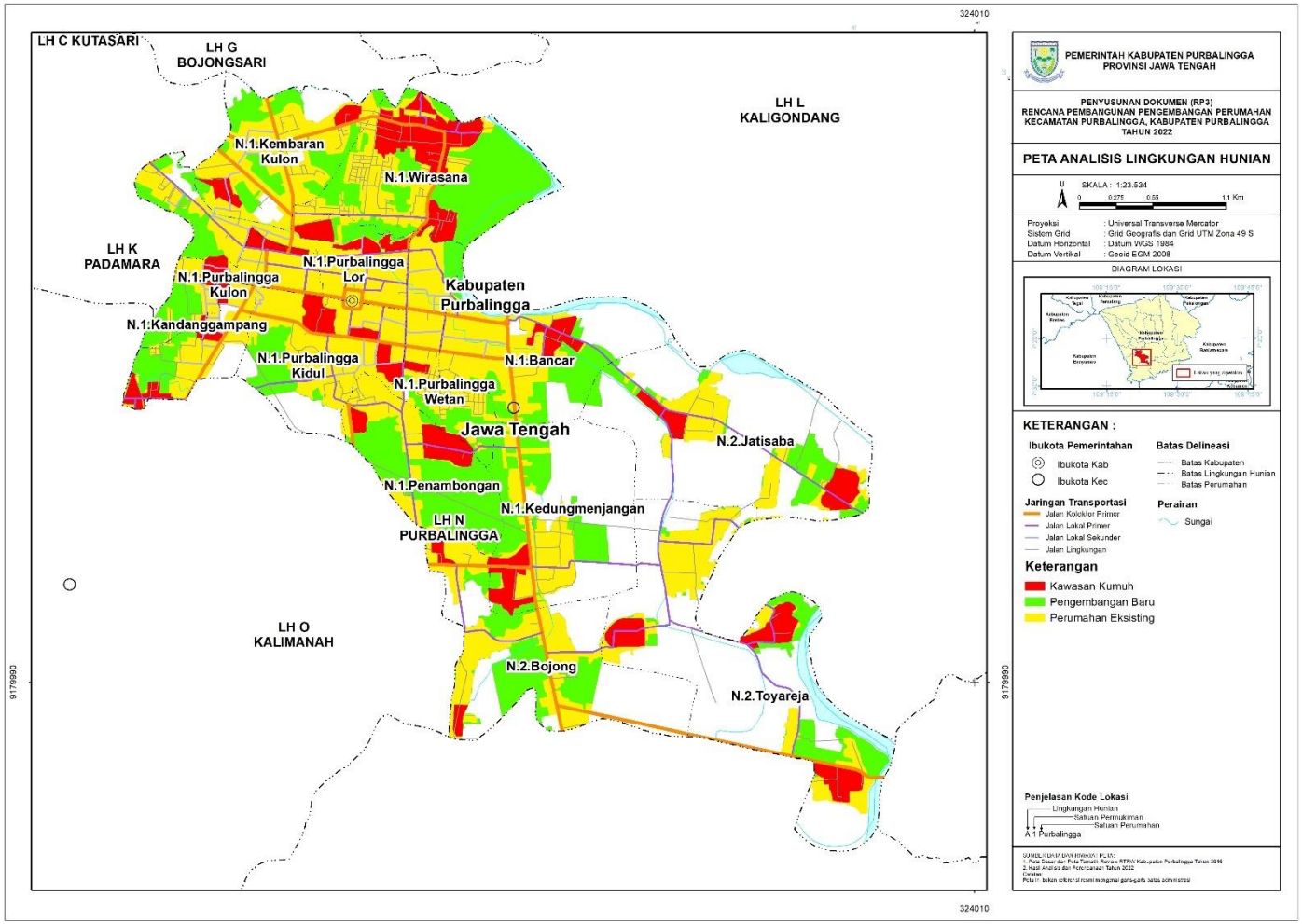
4.6.10.Analisis Penanganan Rumah Terkena Relokasi Program Pemerintah

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas fasilitasi dalam penyediaan tanah bagi rumah yang terkena relokasi program pemerintah. Penyediaan tanah untuk rumah yang terkena relokasi program pemerintah merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.

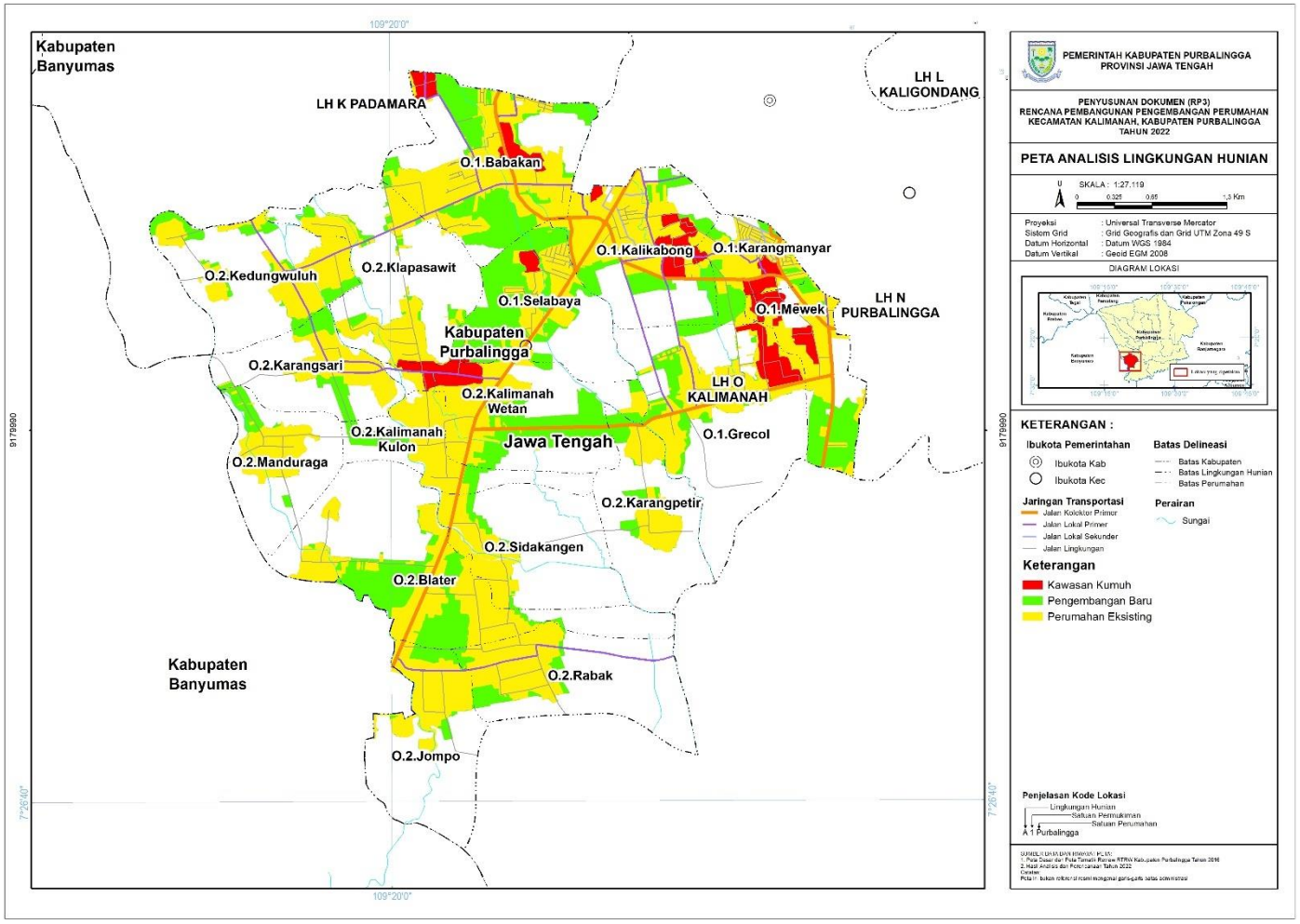
Penyediaan tanah untuk rumah yang terkena relokasi program pemerintah dapat dilakukan melalui:

a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
b. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan/atau
d. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

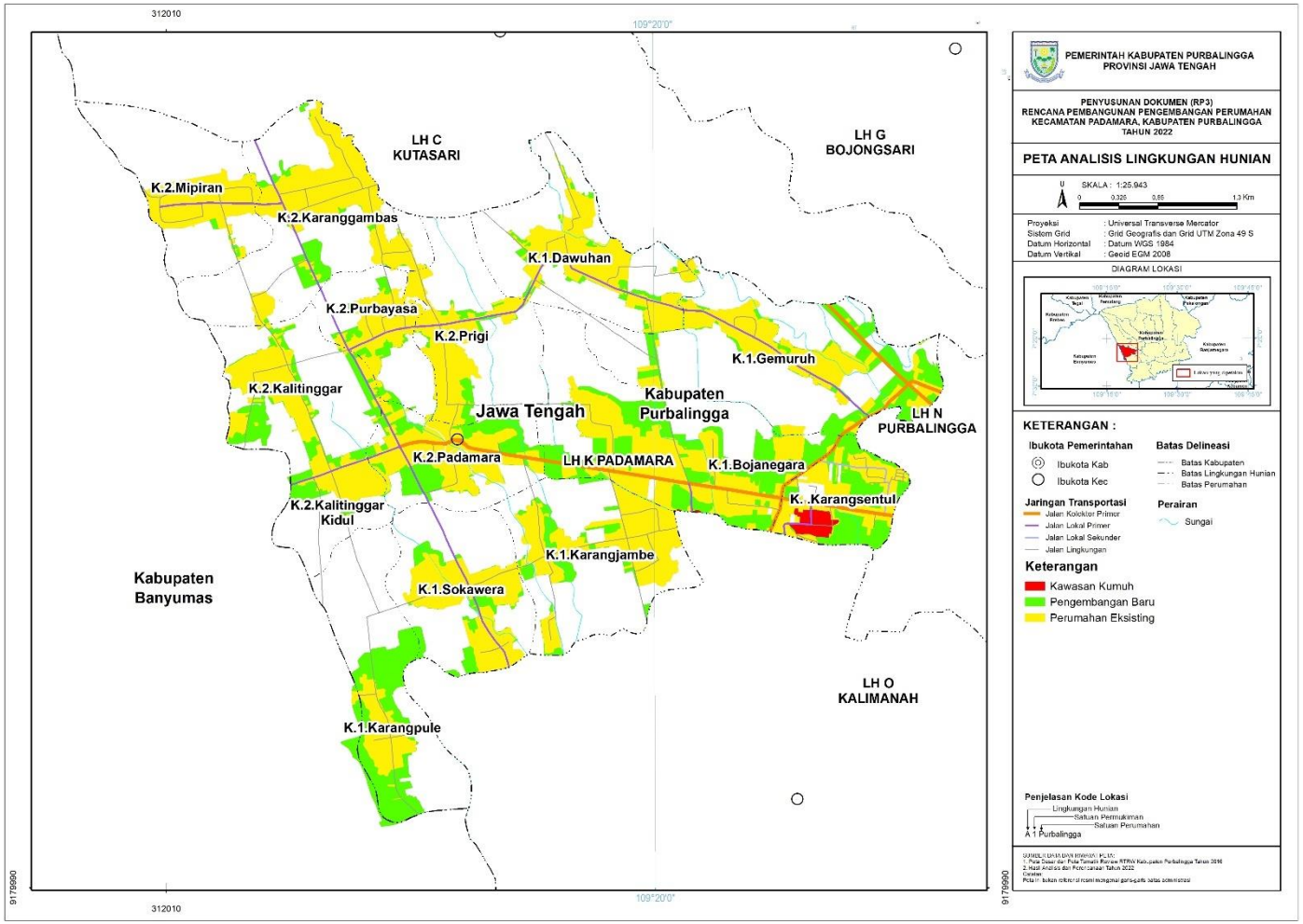
Penyediaan tanah tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyediaan tanah bagi rumah yang terkena relokasi program pemerintah harus sesuai dengan rencana tata ruang, dan sesuai dengan aturan tata bangunan dan lingkungan.



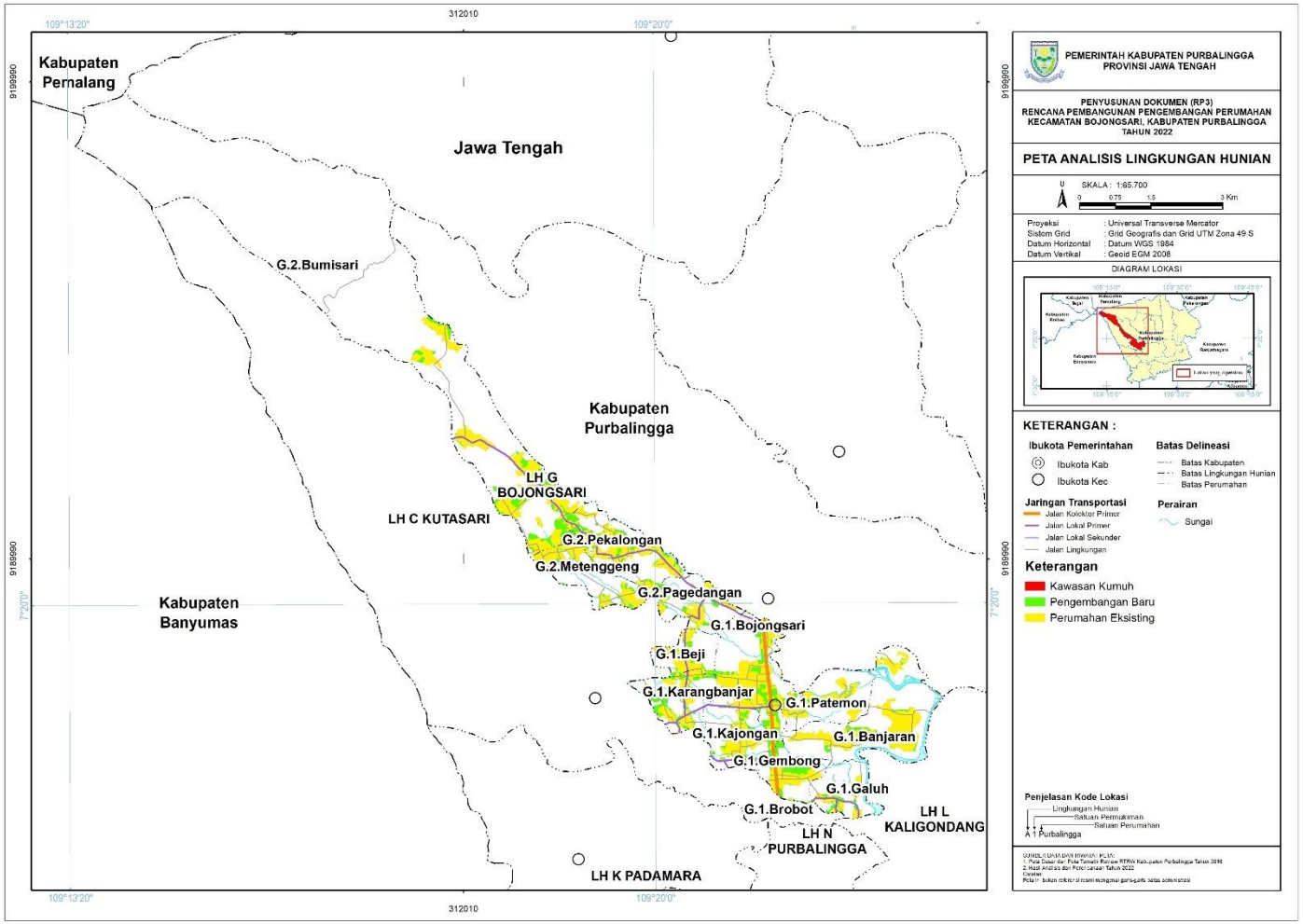
Gambar 4.21.
Peta Penyediaan dan Kebutuhan Pengembangan Perumahan Lingkungan Hunian Purbalingga



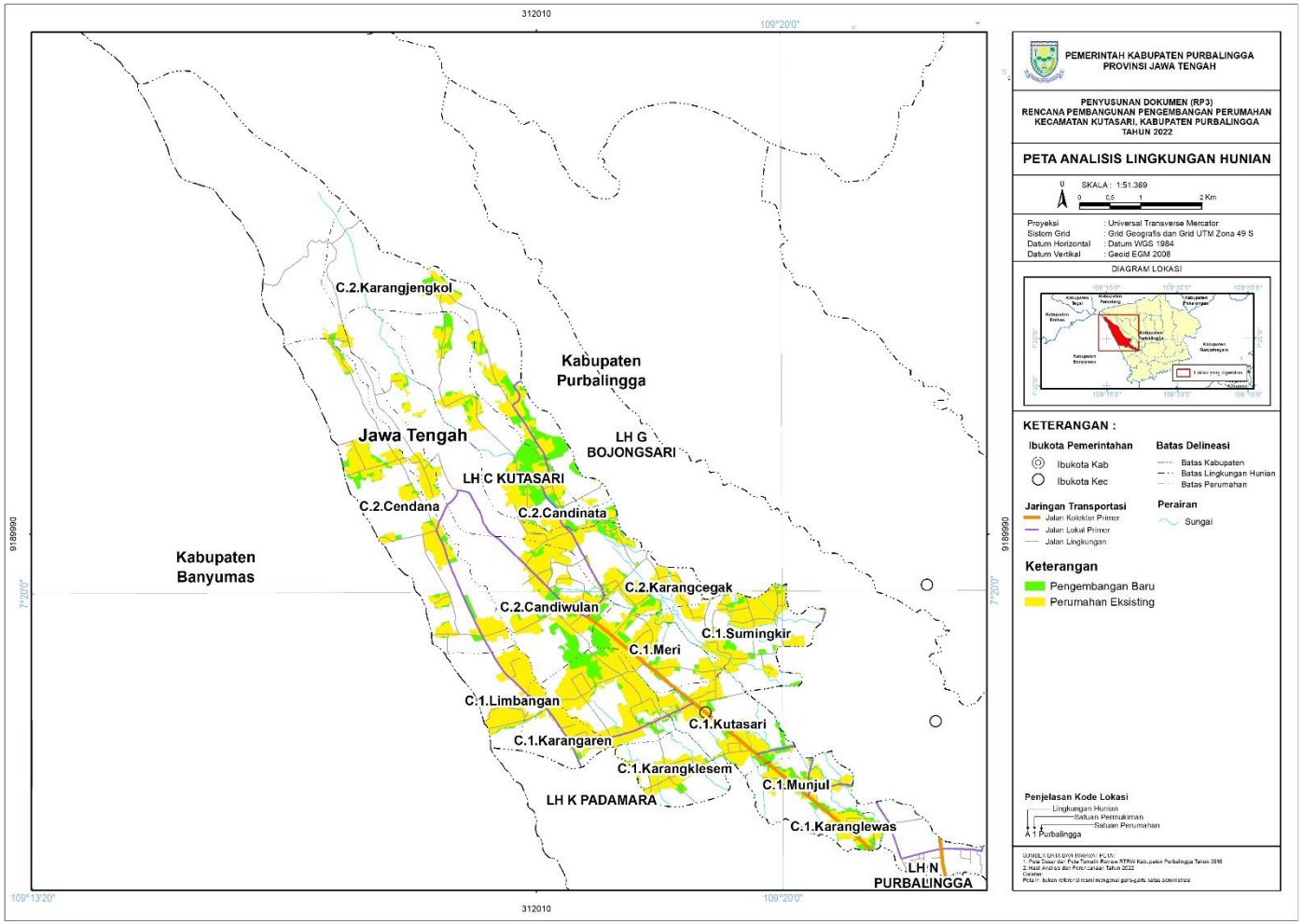
Gambar 4.22.
Peta Penyediaan dan Kebutuhan Pengembangan Perumahan Lingkungan Hunian Kalimanah



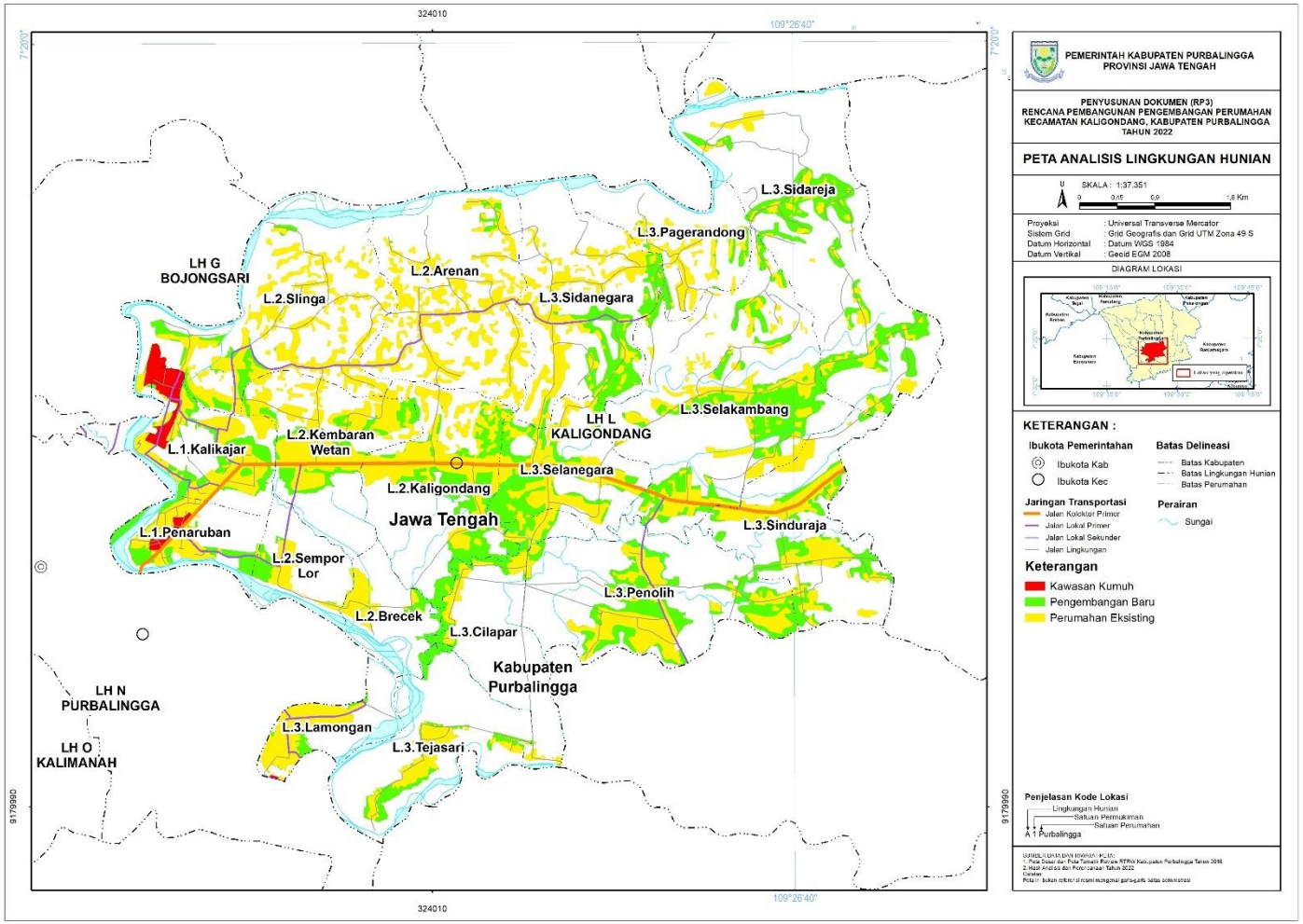
Gambar 4.23.
Peta Penyediaan dan Kebutuhan Pengembangan Perumahan Lingkungan Hunian Padamara



Gambar 4.24.
Peta Penyediaan dan Kebutuhan Pengembangan Perumahan Lingkungan Hunian Bojongsari



Gambar 4.25.
Peta Penyediaan dan Kebutuhan Pengembangan Perumahan Lingkungan Hunian Kutasari



Gambar 4.26.
Peta Penyediaan dan Kebutuhan Pengembangan Perumahan Lingkungan Hunian Kaligondang

4.7. Analisis Ketersediaan dan Kebutuhan PSU Perumahan

4.7.1. Analisis Kebutuhan Penyediaan PSU Perumahan

4.7.1.1. Lingkungan Hunian Purbalingga

A. Prasarana

1. Jaringan Jalan

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 mengatur jalan menurut statusnya yaitu jalan umum dikelompokan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Insfrastruktur jalan yang terdapat di Lingkungan Hunian Purbalingga terdiri atas fungsi jalan kabupaten. Fungsi jalan atau status jalan tersebut memiliki jenis permukaan jalan berupa aspal/ beton dan dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Kondisi fisik jalan di Lingkungan Hunian Purbalingga sebagian besar dalam kondisi baik. Akan tetapi di Perumahan Toyareja dan Perumahan Jatisaba terdapat jalan berlubang dan terdapat genangan saat terjadi hujan. Penyebab kerusakan jaringan jalan dapat diakibatkan oleh cuaca, seperti intensitas hujan yang ekstrem, waktu atau umur perkerasan jalan yang sudah tua, maupun beban lalu lintas yang tidak sesuai dengan badan jalan.

Dari adanya kebutuhan penanganan terkait pembuatan jalan baru, penyesuaian kekuatan struktur jalan, dan penyesuaian lebar jalan diperlukan analisis program/ kegiatan peningkatan jalan eksisting yang dilakukan dengan menghitung kebutuhan peningkatan jalan pada ruas jalan yang memiliki derajat kejenuhan yang tinggi. Sedangkan untuk pembangunan jalan baru, analisis yang perlu dilakukan nantinya mengacu pada kebutuhan pengembangan jalan baru sesuai arahan dan rencana pengembangan lingkungan hunian.

2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pelayanan sumber air atau air minum sudah terlayani sumber air oleh PDAM dengan menggunakan ledeng/ meteran. Kebutuhan air bersih di Lingkungan Hunian Purbalingga tahun 2020 mencapai 4.836.720 liter/hari. Pelayanan air bersih tersebut menjangkau 57.580 jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan penyediaan air minum. Oleh karena itu diperlukan proyeksi kebutuhan jaringan prasarana di masa yang akan datang untuk melakukan perencanaan terkait jaringan prasarana yang efisien. Kebutuhan air minum di Lingkungan Hunian Purbalingga terus bertambah hingga pada tahun 2041 dengan total kebutuhan air minum sebesar 5.200.604 liter/hari. Dalam mengidentifikasi dan mengembangkan sistem penyediaan air minum di Lingkungan Hunian Purbalingga terdiri dari kebutuhan domestik, kebutuhan non domestik (industri, fasilitas umum, dan hidran), serta kebocoran. Dimana kebutuhan domestik tahun 2041 pada sambungan rumah lebih banyak digunakan di Lingkungan Hunian Purbalingga, yaitu sebesar 3.741.717 liter/hari dibanding dengan kebutuhan domestik. Sedangkan, kebutuhan non domestik di Lingkungan Hunian Purbalingga sebesar 742.943 liter/hari.

Tabel IV.88.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Domestik		Industri		Fasum		Hidran		Kebocoran		Total Kebutuhan
			Standar	Kebutuhan	Standar	Kebutuhan	Standar	Kebutuhan	Standar	Kebutuhan	Standar	Kebocoran	
1	Bojong	5.250	60 lt/ jiwa/ hari	315.021	10 % dari Domestik	31.502	5 % dari Domestik	15.751	5 % dari Domestik	15.751	20 % dari Domestik	63.004	441.030
2	Toyareja	3.156		189.363		18.936		9.468		9.468		37.873	265.108
3	Kedung Menjangan	3.411		204.672		20.467		10.234		10.234		40.934	286.541
4	Jatisaba	4.134		248.069		24.807		12.403		12.403		49.614	347.297
5	Bancar	3.803		228.165		22.817		11.408		11.408		45.633	319.431
6	Purbalingga Wetan	5.223		313.406		31.341		15.670		15.670		62.681	438.769
7	Penambongan	5.183		311.008		31.101		15.550		15.550		62.202	435.411
8	Purbalingga Kidul	5.694		341.668		34.167		17.083		17.083		68.334	478.335
9	Kandang Gampang	3.397		203.843		20.384		10.192		10.192		40.769	285.380
10	Purbalingga Kulon	2.751		165.082		16.508		8.254		8.254		33.016	231.115
11	Purbalingga Lor	6.206		372.368		37.237		18.618		18.618		74.474	521.315
12	Kembaran Kulon	5.305		318.299		31.830		15.915		15.915		63.660	445.619
13	Wirasana	8.396		503.753		50.375		25.188		25.188		100.751	705.254
Jumlah		61.912		3.714.717		371.472		185.736		185.736		742.943	5.200.604

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Air limbah domestik yang terdapat di Lingkungan Hunian Purbalingga berasal dari air cucian, mandi dan dapur (*grey water*). Rantai layanan pengolahan air limbah domestik pada Lingkungan Hunian Purbalingga belum melakukan sistem pengolahan air limbah domestik secara terpusat (SPALD-T), akan tetapi sudah melakukan sistem pengolahan air limbah domestik secara setempat (SPALD-S). Lingkungan Hunian Purbalingga terdapat IPAL komunal di Perumahan Kembaran Kulon yang melayani kurang lebih pada RT 1 dan RT 2. Namun, rata-rata masih menggunakan pengelolaan sistem setempat (*onsite sistem*) yaitu membuang limbah rumah tangga langsung ke saluran drainase atau di sekitar rumah, dan permukiman yang berdekatan dengan sungai membuang air limbah langsung ke sungai.

Dari adanya sistem pengolahan air limbah domestik yang belum memadai dan terpadu, diperlukan proyeksi kebutuhan sistem pengolahan air limbah domestik di Lingkungan Hunian Purbalingga hingga 20 tahun mendatang. Proyeksi air limbah yang dihasilkan di Lingkungan Hunian Purbalingga pada tahun 2041 mencapai 4.160.483 liter/hari. Hal tersebut maka diperlukan sarana penampungan dan pengolahan tinja, perlunya keterpaduan antara sarana sanitasi tersebut agar menciptakan praktik sanitasi yang terpadu dan tidak mencemari lingkungan.

Tabel IV.89.
Proyeksi Air Limbah di Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Total Kebutuhan	Standar	Proyeksi Air Limbah
1	Bojong	5.250	441.030	80 % dari Air Bersih	352.824
2	Toyareja	3.156	265.108		212.086
3	Kedung Menjangan	3.411	286.541		229.233
4	Jatisaba	4.134	347.297		277.837
5	Bancar	3.803	319.431		255.545
6	Purbalingga Wetan	5.223	438.769		351.015
7	Penambongan	5.183	435.411		348.329
8	Purbalingga Kidul	5.694	478.335		382.668
9	Kandang Gampang	3.397	285.380		228.304
10	Purbalingga Kulon	2.751	231.115		184.892
11	Purbalingga Lor	6.206	521.315		417.052
12	Kembaran Kulon	5.305	445.619		356.495
13	Wirasana	8.396	705.254		564.203
Jumlah		61.912	5.200.604		4.160.483

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

4. Sistem Persampahan

Kabupaten Purbalingga berada memiliki satu tempat pemrosesan akhir (TPA) persampahan yang berlokasi di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan. Lingkungan Hunian Purbalingga memiliki prasarana pengurangan persampahan yaitu berupa TPS sebanyak 11 unit, TPS 3R sebanyak 2 unit, dan Bank Sampah sebanyak 10 unit.

Pada umumnya jaringan persampahan di Lingkungan Hunian Purbalingga sudah memadai dan melayani setiap penduduk. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase, tegalan, maupun di sungai. Sehingga adanya jaringan persampahan tersebut dirasa kurang optimal, karena mayoritas masyarakat masih

membuang sampah tidak pada tempatnya. Maka dari itu perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, serta perluasan jangkauan pelayanan pengangkutan sampah, baik dari pemerintah maupun secara swadaya. Berikut ini merupakan proyeksi timbulan sampah di Lingkungan Hunian Purbalingga tahun 2041 berdasarkan analisis perhitungan SNI.

Tabel IV.90.
Proyeksi Timbulan Sampah Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah Domestik (m3)	Timbulan Sampah Non Domestik (m3)	Total Timbulan Sampah
1	Bojong	5.250	10,50	2,10	12,60
2	Toyareja	3.156	6,31	1,26	7,57
3	Kedung Menjangan	3.411	6,82	1,36	8,19
4	Jatisaba	4.134	8,27	1,65	9,92
5	Bancar	3.803	7,61	1,52	9,13
6	Purbalingga Wetan	5.223	10,45	2,09	12,54
7	Penambongan	5.183	10,37	2,07	12,44
8	Purbalingga Kidul	5.694	11,39	2,28	13,67
9	Kandang Gampang	3.397	6,79	1,36	8,15
10	Purbalingga Kulon	2.751	5,50	1,10	6,60
11	Purbalingga Lor	6.206	12,41	2,48	14,89
12	Kembaran Kulon	5.305	10,61	2,12	12,73
13	Wirasana	8.396	16,79	3,36	20,15

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

5. Jaringan Drainase

Jaringan drainase di Lingkungan Hunian Purbalingga terdiri dari jaringan drainase primer berupa sungai, drainase sekunder berupa drainase di jalan utama, dan jaringan drainase tersier di lingkungan permukiman. Jaringan drainase di Lingkungan Hunian Purbalingga berupa drainase terbuka dan drainase tertutup. Jaringan drainase di Lingkungan Hunian Purbalingga di beberapa wilayah belum berfungsi optimal, karena sebagian tersumbat oleh sampah. Hal ini dapat dilihat dari munculnya genangan di beberapa wilayah terutama saat hujan. Selain itu beberapa sungai yang ada di Lingkungan Hunian Purbalingga mengalami pendangkalan.

Jaringan drainase di Lingkungan Hunian Purbalingga terdiri dari jaringan drainase primer, drainase sekunder, dan jaringan drainase tersier. Saluran primer adalah saluran yang menerima masukan aliran dari saluran-saluran sekunder, dimana aliran dari saluran primer ini langsung dialirkan ke badan air, yaitu berupa sungai. Saluran sekunder adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran dari saluran-saluran tersier dan meneruskan aliran ke saluran primer. Sedangkan saluran tersier adalah saluran yang menerima aliran air langsung dari saluran-saluran pembuangan rumah, umumnya saluran tersier ini adalah saluran kiri kanan jalan perumahan.

Penanganan drainase selama ini masih belum menyentuh drainase yang berbasis lingkungan. Drainase yang telah terbangun sementara hanya difungsikan sebagai pengering jalan badan jalan. Adapun penanganan drainase lingkungan dilaksanakan secara gotong royong tanpa adanya perencanaan yang kongkrit. Melihat kondisi tersebut, maka kebutuhan akan perda tentang pengelolaan drainase lingkungan sangat diperlukan

dalam rangka meraih komitmen semua stakeholder tentang pentingnya pengelolaan drainase lingkungan.

Dengan melihat peta rawan banjir dari SSK Kabupaten Purbalingga 2021 dapat diketahui wilayah yang rawan terhadap banjir, dimana terdapat 3 perumahan yang berlokasi di daerah rawan banjir. Luas daerah rawan banjir yang terdapat di Lingkungan Hunian Purbalingga sebesar 206,45 Ha.

Tabel IV.91.
Sebaran Daerah Rawan Banjir Lingkungan Hunian Purbalingga

LH	Perumahan	Luas (Ha)
Purbalingga	Jatisaba	79,2
	Toyareja	55,23
	Bancar	72,02

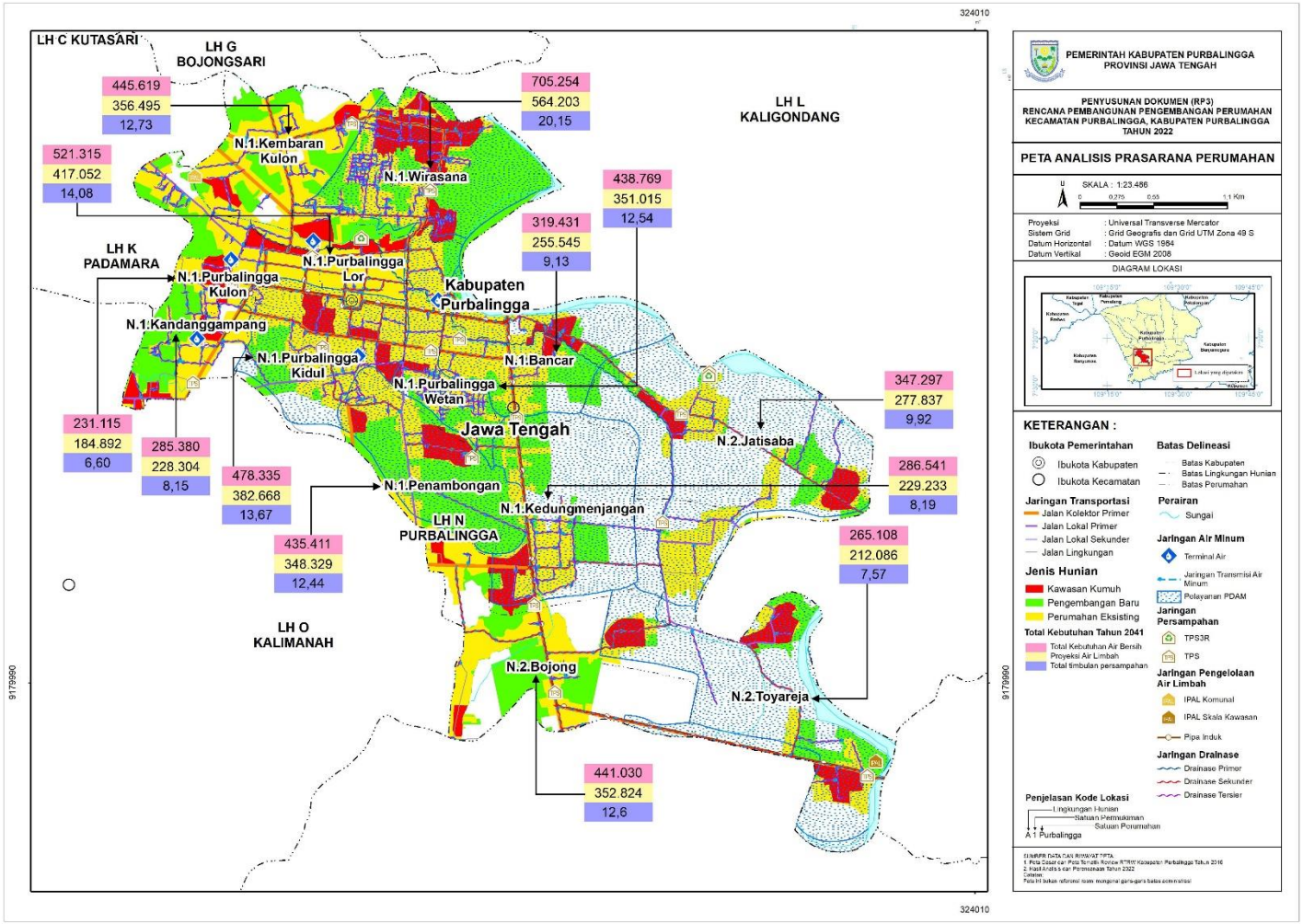
Sumber: SSK Kabupaten Purbalingga, 2021

Dari adanya permasalahan drainase pada kondisi eksisting, perlu adanya kegiatan penanganan khusus untuk mengoptimalkan drainase di perkotaan. Pengembangan sistem drainase disusun untuk meningkatkan pelayanan sistem drainase dan keterpaduan sistem drainase. Kebutuhan pengembangan dan keterpaduan sistem drainase dapat mengacu pada Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Drainase Perkotaan. Dimana kebutuhan sistem drainase terpadu dapat ditinjau dari beberapa tahapan dan aspek, seperti topografi, hidrologi, tataguna tanah, debit rencana masing-masing saluran, hingga penetapan garis sempadan.

6. Sistem Proteksi Kebakaran

Berdasarkan Permen PU Nomor 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknik Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, terdapat beberapa kebutuhan untuk penanganan sistem proteksi kebakaran yang terpadu, diantaranya adalah sarana penyelamatan, sistem proteksi pasif, sistem proteksi aktif. Dimana dalam pemenuhan kebutuhan sistem proteksi kebakaran yang terpadu, pemerintah daerah ataupun instansi teknis yang berwenang dapat merencanakan sistem proteksi kebakaran dengan beberapa komponen yang dibutuhkan, seperti rencana tapak, seluruh sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif kebakaran, serta sarana menuju jalan ke luar yang aman.

Sistem proteksi kebakaran di Kabupaten Purbalingga berupa wilayah manajemen kebakaran (WMK) serta sarana dan prasarana proteksi kebakaran yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga. Wilayah manajemen kebakaran (WMK) yang terdapat di Kabupaten Purbalingga berada di Lingkungan Hunian Purbalingga. Selain itu, di Lingkunagn Hunian Purbalingga terdapat hidran kebakaran yang berada di sekitar Alun-Alun Purbalingga.



Gambar 4.27.
Peta Analisis Prasarana Perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga

B. Sarana

1. Sarana Pemerintahan

Sarana pemerintahan yang terdapat di Lingkungan Hunian Purbalingga meliputi balai desa, balai kelurahan, kantor desa, dan kantor kelurahan. Sarana pemerintahan yang terdapat di Lingkungan Hunian Purbalingga berupa balai desa, balai kelurahan, kantor desa, dan kantor kelurahan. Jumlah kelurahan di Lingkungan Hunian Purbalingga berjumlah 11 kelurahan, sedangan sisanya adalah desa. Perlunya penambahan kebutuhan sarana pemerintahan di Lingkungan Hunian Purbalingga untuk meningkatkan keterpaduan antar hirarki sarana pemerintahan yang dapat berupa balai pertemuan.

2. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di Lingkungan Hunian Purbalingga terdiri dari sekolah dasar (SD) sederajat, sekolah menengah pertama (SMP) sederajat, sekolah menengah akhir (SMA) sederajat, dan perguruan tinggi.

Permasalahan sarana pendidikan di Lingkungan Hunian Purbalingga yaitu masih minimnya jumlah sarana pendidikan. Tentunya sarana pendidikan diperlukan pada suatu wilayah. Maka dari itu perlunya penambahan sarana pendidikan berupa SD hingga perguruan tinggi di Lingkungan Hunian Purbalingga agar dapat menjangkau ke seluruh wilayah dan tidak terpusat di pusat perkotaan saja.

Proyeksi kebutuhan sarana pendidikan pada tahun 2041 di Lingkungan Hunian Purbalingga diperlukan untuk mengembangkan keterpaduan antar hirarki sarana pendidikan. Terlebih lagi saat ini di Indonesia mewajibkan wajib belajar 12 tahun bagi penduduknya. Kebutuhan sarana pendidikan di Lingkungan Hunian Purbalingga tahun 2041 berupa SD sebanyak 17 unit, SMP sebanyak 2 unit, dan SMA sebanyak 1 unit. Perlunya penambahan sarana pendidikan ini agar kebutuhan pendidikan masyarakat Lingkungan Hunian Purbalingga dapat terpenuhi.

Tabel IV.92.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	TK			SD				SMP			
			Jumlah Eksisting	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Bojong	5.250	2	1	-1	3	1.200	4	1	0	4.800	1	1
2	Toyareja	3.156	1	1	0	2	1.200	3	1	0	4.800	1	1
3	Kedung Menjangan	3.411	1	1	0	2	1.200	3	1	0	4.800	1	1
4	Jatisaba	4.134	3	1	-2	3	1.200	3	0	0	4.800	1	1
5	Bancar	3.803	3	1	-2	3	1.200	3	0	3	4.800	1	-2
6	Purbalingga Wetan	5.223	4	1	-3	4	1.200	4	0	1	4.800	1	0
7	Penambongan	5.183	3	1	-2	2	1.200	4	2	1	4.800	1	0
8	Purbalingga Kidul	5.694	4	1	-3	1	1.200	5	4	1	4.800	1	0
9	Kandang Gampang	3.397	1	1	0	1	1.200	3	2	0	4.800	1	1
10	Purbalingga Kulon	2.751	3	1	-2	1	1.200	2	1	0	4.800	1	1
11	Purbalingga Lor	6.206	4	1	-3	6	1.200	5	-1	3	4.800	1	-2
12	Kembaran Kulon	5.305	3	1	-2	4	1.200	4	0	2	4.800	1	-1
13	Wirasana	8.396	3	1	-2	3	1.200	7	4	0	4.800	2	2
Jumlah		61.912	35	13	-22	35		52	17	11		13	2

Lanjutan…

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	SMA				PT			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Bojong	5.250	1	6.000	1	0	0	70.000	0	0
2	Toyareja	3.156	0	6.000	1	1	0	70.000	0	0
3	Kedung Menjangan	3.411	0	6.000	1	1	0	70.000	0	0
4	Jatisaba	4.134	0	6.000	1	1	0	70.000	0	0
5	Bancar	3.803	1	6.000	1	0	1	70.000	0	-1
6	Purbalingga Wetan	5.223	3	6.000	1	-2	0	70.000	0	0
7	Penambongan	5.183	1	6.000	1	0	1	70.000	0	-1
8	Purbalingga Kidul	5.694	1	6.000	1	0	0	70.000	0	0
9	Kandang Gampang	3.397	0	6.000	1	1	0	70.000	0	0
10	Purbalingga Kulon	2.751	1	6.000	0	-1	0	70.000	0	0
11	Purbalingga Lor	6.206	1	6.000	1	0	0	70.000	0	0
12	Kembaran Kulon	5.305	0	6.000	1	1	0	70.000	0	0
13	Wirasana	8.396	0	6.000	1	1	0	70.000	0	0
Jumlah		61.912	9	6.000	10	1	2	70.000	1	-1

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

3. Sarana Peribadatan

Mayoritas sarana peribadatan yang terdapat di Lingkungan Hunian Purbalingga adalah masjid dan mushola. Permasalahan tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap masyarakat penganut agama lain yang ingin beribadah di tempat ibadahnya tetapi belum terjangkau ke semua wilayah di Lingkungan Hunian Purbalingga. Oleh karena itu, perlunya pemerataan jangkauan sarana peribadatan berupa gereja, vihara, dan klenteng di Lingkungan Hunian Purbalingga. Sebaran ketersediaan sarana peribadatan di Lingkungan Hunian Purbalingga terdiri dari masjid, mushola, gereja, dan vihara. Sebaran masjid dan mushola sudah menjangkau ketersediaannya di seluruh wilayah di Lingkungan Hunian Purbalingga.

Proyeksi kebutuhan sarana peribadatan di Lingkungan Hunian Purbalingga pada tahun 2041 berupa 121 unit mushola. Meskipun pada kondisi eksisting di Lingkungan Hunian Purbalingga ketersediaan mushola dapat dikatakan banyak, tetapi kebutuhan mushola harus disesuaikan setiap perumahan. Tidak hanya memerlukan penambahan kebutuhan mushola dan masjid, perlunya penambahan sarana peribadatan lain agar keterpaduan sarana peribadatan di Lingkungan Hunian Purbalingga dapat berlangsung.

4. Sarana Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan di Lingkungan Hunian Purbalingga terdiri dari rumah sakit, puskesmas, klinik, praktek dokter, dan apotek. Dimana sebaran sarana kesehatan yang dapat menjangkau seluruh wilayah Lingkungan Hunian Purbalingga hanya berupa klinik, praktek dokter, dan apotek. Proyeksi kebutuhan sarana kesehatan di Lingkungan Hunian Purbalingga pada tahun 2041 sudah mencukupi untuk semua jenis sarana kesehatan.

Tabel IV.93.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Masjid				Musholla			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Bojong	5.250	6	2.500	2	-4	9	250	21	12
2	Toyareja	3.156	4	2.500	1	-3	11	250	13	2
3	Kedung Menjangan	3.411	2	2.500	1	-1	11	250	14	3
4	Jatisaba	4.134	4	2.500	2	-2	7	250	17	10
5	Bancar	3.803	4	2.500	2	-2	11	250	15	4
6	Purbalingga Wetan	5.223	6	2.500	2	-4	9	250	21	12
7	Penambongan	5.183	7	2.500	2	-5	12	250	21	9
8	Purbalingga Kidul	5.694	10	2.500	2	-8	11	250	23	12
9	Kandang Gampang	3.397	6	2.500	1	-5	3	250	14	11
10	Purbalingga Kulon	2.751	2	2.500	1	-1	6	250	11	5
11	Purbalingga Lor	6.206	5	2.500	2	-3	7	250	25	18
12	Kembaran Kulon	5.305	7	2.500	2	-5	12	250	21	9
13	Wirasana	8.396	8	2.500	3	-5	18	250	34	16
Jumlah		61.912	71	2.500	25	-46	127	250	248	121

Lanjutan…

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Gereja			Vihara		
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan
1	Bojong	4.537	0	Mengikuti paroki	Mengikuti paroki	0	Mengikuti sistem kekerabatan atau hirarki lembaga	Mengikuti sistem kekerabatan atau hirarki lembaga
2	Toyareja	3.156	0			0		
3	Kedung Menjangan	3.411	0			0		
4	Jatisaba	4.134	0			0		
5	Bancar	3.803	1			0		
6	Purbalingga Wetan	5.223	1			0		

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Gereja			Vihara		
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan
7	Penambongan	5.183	0			0		
8	Purbalingga Kidul	5.694	1			0		
9	Kandang Gampang	3.397	3			0		
10	Purbalingga Kulon	2.751	2			1		
11	Purbalingga Lor	5.866	2			0		
12	Kembaran Kulon	5.305	0			0		
13	Wirasana	8.396	0			0		
Jumlah		60.859	10			1		

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Tabel IV.94.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rumah Sakit				Puskesmas			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Bojong	5.250	0	120.000	0	0	1	120.000	0	-1
2	Toyareja	3.156	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
3	Kedung Menjangan	3.411	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
4	Jatisaba	4.134	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
5	Bancar	3.803	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
6	Purbalingga Wetan	5.223	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
7	Penambongan	5.183	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
8	Purbalingga Kidul	5.694	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
9	Kandang Gampang	3.397	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
10	Purbalingga Kulon	2.751	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
11	Purbalingga Lor	6.206	1	120.000	0	-1	0	120.000	0	0
12	Kembaran Kulon	5.305	1	120.000	0	-1	1	120.000	0	-1
13	Wirasana	8.396	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
Jumlah		61.912	2	120.000	1	-1	2	120.000	1	-1

Lanjutan…

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Poliklinik				Praktik Dokter			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Bojong	5.250	1	30.000	0	-1	1	5.000	1	0
2	Toyareja	3.156	0	30.000	0	0	0	5.000	1	1
3	Kedung Menjangan	3.411	0	30.000	0	0	0	5.000	1	1
4	Jatisaba	4.134	0	30.000	0	0	0	5.000	1	1
5	Bancar	3.803	1	30.000	0	-1	1	5.000	1	0
6	Purbalingga Wetan	5.223	0	30.000	0	0	2	5.000	1	-1
7	Penambongan	5.183	0	30.000	0	0	1	5.000	1	0

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Poliklinik				Praktik Dokter			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
8	Purbalingga Kidul	5.694	3	30.000	0	-3	3	5.000	1	-2
9	Kandang Gampang	3.397	2	30.000	0	-2	0	5.000	1	1
10	Purbalingga Kulon	2.751	2	30.000	0	-2	2	5.000	1	-1
11	Purbalingga Lor	6.206	0	30.000	0	0	2	5.000	1	-1
12	Kembaran Kulon	5.305	0	30.000	0	0	3	5.000	1	-2
13	Wirasana	8.396	0	30.000	0	0	2	5.000	2	0
Jumlah		61.912	9	30.000	0	-9	17	5.000	12	-5

Lanjutan…

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Apotek			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Bojong	5.250	1	30.000	0	-1
2	Toyareja	3.156	0	30.000	0	0
3	Kedung Menjangan	3.411	1	30.000	0	-1
4	Jatisaba	4.134	0	30.000	0	0
5	Bancar	3.803	2	30.000	0	-2
6	Purbalingga Wetan	5.223	2	30.000	0	-2
7	Penambongan	5.183	0	30.000	0	0
8	Purbalingga Kidul	5.694	3	30.000	0	-3
9	Kandang Gampang	3.397	2	30.000	0	-2
10	Purbalingga Kulon	2.751	2	30.000	0	-2
11	Purbalingga Lor	6.206	3	30.000	0	-3
12	Kembaran Kulon	5.305	2	30.000	0	-2
13	Wirasana	8.396	1	30.000	0	-1
Jumlah		61.912	19	30.000	2	-17

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

5. Sarana Perdagangan dan Jasa

Sarana perdagangan yang terdapat di Lingkungan Hunian Purbalingga tahun 2020 berupa pasar, pertokoan, dan toko/warung. Jika dilihat dari cakupan pelayanannya, sarana perdagangan di Lingkungan Hunian Purbalingga terutama pasar sudah cukup melayani dan menjangkau pelayanannya ke seluruh wilayah. Dari adanya ketersediaan sarana perdagangan tersebut, pemerintah maupun masyarakat dapat mengembangkan sarana perdagangan agar lebih optimal, seperti penambahan jaringan persampahan disekitar pasar ataupun pengadaan ruang terbuka hijau agar terdapat sirkulasi udara yang baik dalam pasar tersebut.

Selain tersedianya pasar, di Lingkungan Hunian Purbalingga saat ini sudah cukup melayani dan menjangkau pelayanannya untuk kebutuhan sarana perdagangan lain seperti pertokoan dan toko/warung. Hal ini diharapkan ketersediaan toko dapat melayani setiap lingkungan permukiman, agar kebutuhan penduduk sehari-hari dapat terpenuhi walaupun akses dari tempat tinggal ke pasar atau toko swalayan terlalu jauh.

Tabel IV.95.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2041

No	Jenis	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Pasar	61.912	7	30.000	2	-5
2	Pertokoan	61.912	43	6.000	10	-33
3	Toko/ Warung	61.912	576	250	248	-328

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

6. Sarana Kebudayaan dan Rekreasi

Kebudayaan di Lingkungan Hunian Purbalingga beraneka ragam, meliputi ujungan, suran, begalan, angguk, aplang/ dames, calung, ebeg/ kuda lumping, lengger, dan lainnya. Kebudayaan tersebut di dukung oleh beberapa organisasi kesenian yang terdapat di Lingkungan Hunian Purbalingga. Sarana rekreasi yang terdapat di Lingkungan Hunian Purbalingga yaitu Usman Janatin City Park. Selain itu, Lingkungan Hunian Purbalingga memiliki bangunan/ situs cagar budaya.

Beragamnya sarana kebudayaan dan rekreasi di Lingkungan Hunian Purbalingga menjadikan banyaknya faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mendukung kebudayaan dan rekreasi. Jika faktor pendukung kebudayaan dan rekreasi tersebut tidak dapat dipenuhi, maka akan timbul permasalahan. Permasalahan pada sarana kebudayaan dan rekreasi di Lingkungan Hunian Purbalingga seperti aksesibilitas menuju tempat wisata yang belum memadai, kurangnya dukungan infrastruktur seperti jalan, parkir, terminal, drainase, dan persampahan serta minimnya sarana penginapan untuk pengunjung atau wisatawan luar kabupaten. Maka dari itu isu strategis pada sarana kebudayaan dan rekreasi di Lingkungan Hunian Purbalingga yaitu belum optimalnya sistem kepariwisataan.

Selain ketersediaan sarana kebudayaan dan rekreasi yang telah terdapat di Lingkungan Hunian Purbalingga, perlunya kebutuhan sarana kebudayaan berupa balai warga, balai serbaguna, dan gedung serbaguna untuk mendukung sarana kebudayaan dan rekreasi yang terpadu. Hal ini dikarenakan pentingnya balai warga sebagai tempat

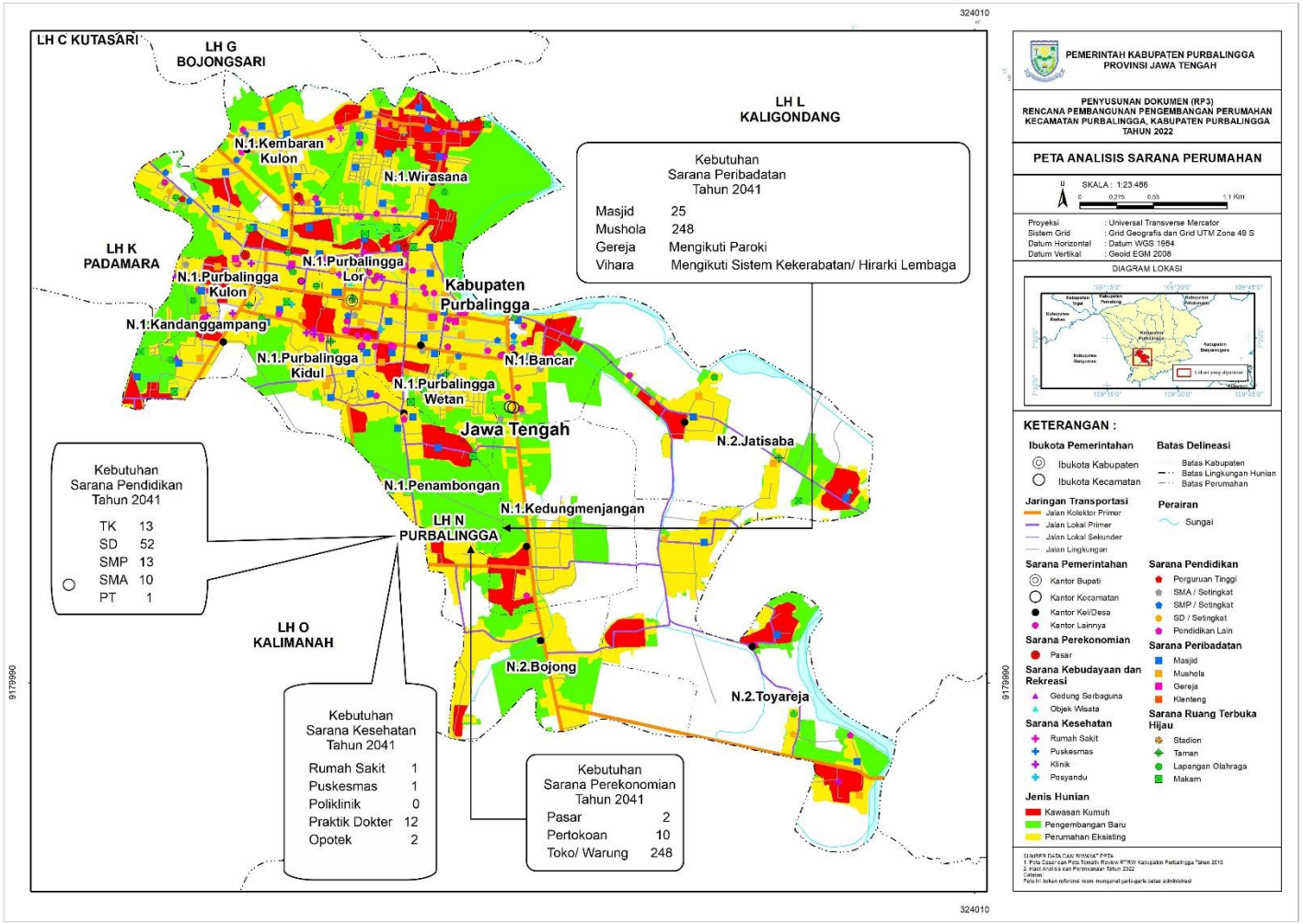
berkumpul untuk mengadakan kegiatan-kegiatan umum pada cakupan lingkungan permukiman. Sementara itu, kebutuhan balai serbaguna juga untuk mendukung kegiatan masyarakat yang umumnya bersifat komersial ataupun kepentingan umum.

7. Sarana Ruang Terbuka Hijau

Sarana ruang terbuka hijau sangat penting bagi penghijauan dan sirkulasi suatu kota/ kawasan. Namun saat ini umumnya mayoritas wilayah banyak lahan RTH yang dialihfungsikan menjadi lahan terbangun untuk meningkatkan perekonomian wilayahnya. Sama halnya pada permasalahan RTH di Lingkungan Hunian Purbalingga yang berubah fungsi menjadi kawasan perekonomian dan ruang komersial lainnya. Akibatnya banyak lahan RTH yang berkurang luasannya. Maka dari itu perlunya penambahan proporsi RTH agar terpenuhi 30% untuk seluruh wilayah.

Sarana ruang terbuka hijau yang terdapat di Lingkungan Hunian Purbalingga meliputi ruang terbuka hijau perkotaan, ruang terbuka hijau jalur hijau jalan, dan ruang terbuka hijau fungsi tertentu. Ruang terbuka hijau perkotaan di Kecamatan Purbalingga berupa taman kota, hutan kota, dan taman lingkungan.

Selain untuk mendukung pengoptimalan proporsi RTH sebesar 30%, perlunya penambahan kebutuhan sarana RTH berupa taman lingkungan untuk mendukung keterpaduan antar hirarki sarana RTH. Hal ini dikarenakan, kebutuhan taman lingkungan harus disesuaikan dengan cakupan lingkungan permukiman.



Gambar 4.28.
Peta Analisis Sarana Perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga

C. Utilitas

Jangkauan pelayanan jaringan listrik yang disediakan oleh PLN di Lingkungan Hunian Purbalingga sudah mampu melayani hingga cakupan penduduk kabupaten. Dimana setiap penduduk kecamatan sudah menjadi pelanggan dari adanya listrik PLN.

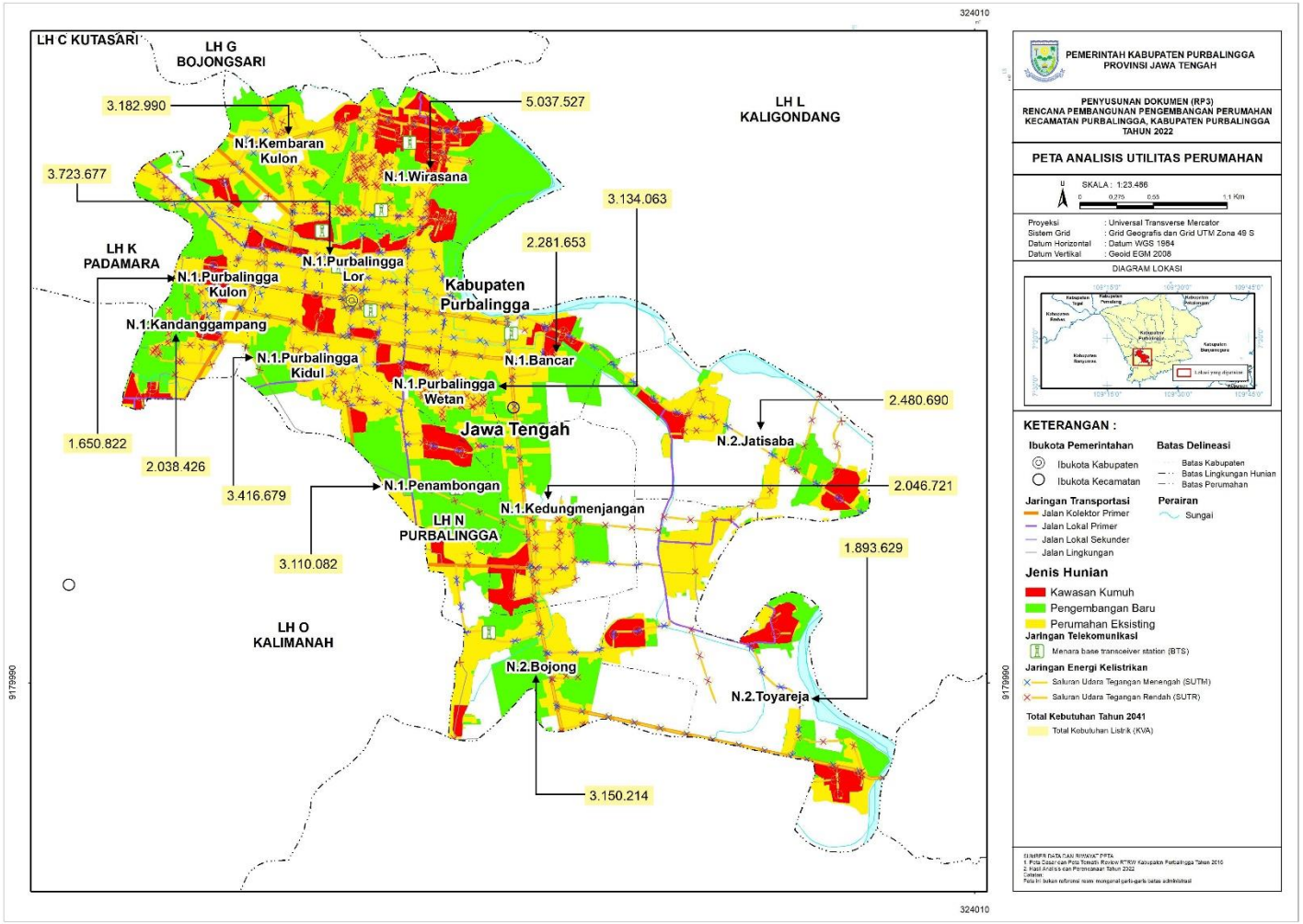
Selain ketersediaan jaringan listrik eksisting, perlu adanya penambahan kebutuhan listrik domestik dan non domestik agar menciptakan keterpaduan antar hirarki jaringan listrik. Proyeksi kebutuhan listrik di Lingkungan Hunian Purbalingga pada tahun 2041 sebesar 37.147.171 KVA terdiri dari kebutuhan listrik domestik sebesar 18.573.585 KVA dan kebutuhan listrik non domestik sebesar 18.573.585 KVA. Kebutuhan listrik domestik ini untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sedangkan, kebutuhan listrik non domestik di Lingkungan Hunian Purbalingga berupa industri, fasilitas umum, penerangan jalan, dan cadangan.

Tabel IV.96.
Proyeksi Kebutuhan Jaringan Listrik Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah KK	Domestik	Non Domestik				Total Kebutuhan Listrik (KVA)
				Industri 25% x Domestik	Fasilitas 25% x Domestik	Penerangan Jalan 40% x Domestik	Cadangan 10% x Domestik	
1	Bojong	1.750	1.575.107	393.777	393.777	630.043	157.511	3.150.214
2	Toyareja	1.052	946.815	236.704	236.704	378.726	94.681	1.893.629
3	Kedung Menjangan	1.137	1.023.360	255.840	255.840	409.344	102.336	2.046.721
4	Jatisaba	1.378	1.240.345	310.086	310.086	496.138	124.035	2.480.690
5	Bancar	1.268	1.140.826	285.207	285.207	456.331	114.083	2.281.653
6	Purbalingga Wetan	1.741	1.567.031	391.758	391.758	626.813	156.703	3.134.063
7	Penambongan	1.728	1.555.041	388.760	388.760	622.016	155.504	3.110.082
8	Purbalingga Kidul	1.898	1.708.340	427.085	427.085	683.336	170.834	3.416.679
9	Kandang Gampang	1.132	1.019.213	254.803	254.803	407.685	101.921	2.038.426
10	Purbalingga Kulon	917	825.411	206.353	206.353	330.164	82.541	1.650.822
11	Purbalingga Lor	2.069	1.861.838	465.460	465.460	744.735	186.184	3.723.677
12	Kembaran Kulon	1.768	1.591.495	397.874	397.874	636.598	159.149	3.182.990
13	Wirasana	2.799	2.518.763	629.691	629.691	1.007.505	251.876	5.037.527
Jumlah		20.637	18.573.585	4.643.396	4.643.396	7.429.434	1.857.359	37.147.171

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Sebaran dan ketersediaan Menara telekomunikasi di Lingkungan Hunian Purbalingga sudah memadai dan merata. Selain menjadi pusat perkotaan, Lingkungan Hunian Purbalingga juga lebih banyak membutuhkan menara telekomunikasi untuk mendukung kelangsungan kegiatan perkotaan dibanding kecamatan lain. Namun, pada saat ini kebutuhan akan telekomunikasi maupun jaringan seluler tidak hanya dibutuhkan pada pusat kota saja, tetapi pada wilayah terpencil juga sangat dibutuhkan.



Gambar 4.29.
Peta Analisis Utilitas Perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga

4.7.1.2. Lingkungan Hunian Kalimanah

A. Prasarana

1. Jaringan Jalan

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 mengatur jalan menurut statusnya yaitu jalan umum dikelompokan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Insfrastruktur jalan yang terdapat di Lingkungan Hunian Kalimanah terdiri atas fungsi jalan kabupaten. Fungsi jalan atau status jalan tersebut memiliki jenis permukaan jalan berupa aspal/ beton dan dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Kondisi fisik jalan di Lingkungan Hunian Kalimanah sebagian besar dalam kondisi baik. Akan tetapi terdapat jalan berlubang dan terdapat genangan saat terjadi hujan. Penyebab kerusakan jaringan jalan dapat diakibatkan oleh cuaca, seperti intensitas hujan yang ekstrem, waktu atau umur perkerasan jalan yang sudah tua, maupun beban lalu lintas yang tidak sesuai dengan badan jalan. Selain itu, di Lingkungan Hunian Kalimanah terdapat sarana transportasi berupa terminal bus yang berada di Perumahan Kalikabong. Terminal tersebut merupakan terminal tipe B yang melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), dan angkutan pedesaan (ADES).

Dari adanya kebutuhan penanganan terkait pembuatan jalan baru, penyesuaian kekuatan struktur jalan, dan penyesuaian lebar jalan diperlukan analisis program/ kegiatan peningkatan jalan eksisting yang dilakukan dengan menghitung kebutuhan peningkatan jalan pada ruas jalan yang memiliki derajat kejenuhan yang tinggi. Sedangkan untuk pembangunan jalan baru, analisis yang perlu dilakukan nantinya mengacu pada kebutuhan pengembangan jalan baru sesuai arahan dan rencana pengembangan lingkungan hunian.

2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pelayanan sumber air atau air minum sudah terlayani sumber air oleh PDAM dengan menggunakan ledeng/ meteran. Namun, masih terdapat beberapa rumah tangga yang menggunakan sumur sebagai alternatif saat terjadi pemadaman listrik. Kebutuhan air bersih di Lingkungan Hunian Kalimanah tahun 2020 mencapai 4.844.028 liter/hari. Pelayanan air bersih tersebut menjangkau 57.667 jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan penyediaan air minum. Oleh karena itu diperlukan proyeksi kebutuhan jaringan prasarana di masa yang akan datang untuk melakukan perencanaan terkait jaringan prasarana yang efisien. Kebutuhan air minum di Lingkungan Hunian Kalimanah terus bertambah hingga pada tahun 2041 dengan total kebutuhan air minum sebesar 5.186.931 liter/hari. Dalam mengidentifikasi dan mengembangkan sistem penyediaan air minum di Lingkungan Hunian Kalimanah terdiri dari kebutuhan domestik, kebutuhan non domestik (industri, fasilitas umum, dan hidran), serta kebocoran. Dimana kebutuhan domestik tahun 2041 pada sambungan rumah lebih banyak digunakan di Lingkungan Hunian Kalimanah, yaitu sebesar 3.704.951 liter/hari dibanding dengan kebutuhan non domestik. Sedangkan, kebutuhan non domestik di Lingkungan Hunian Kalimanah sebesar 740.990 liter/hari.

Tabel IV.97.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Domestik		Industri		Fasum		Hidran		Kebocoran		Total Kebutuhan
			Standar	Kebutuhan	Standar	Kebutuhan	Standar	Kebutuhan	Standar	Kebutuhan	Standar	Kebocoran	
1	Jompo	2.376	60 lt/ jiwa/ hari	142.577	10 % dari Domestik	14.258	5 % dari Domestik	7.129	5 % dari Domestik	7.129	20 % dari Domestik	28.515	199.608
2	Rabak	3.266		195.985		19.598		9.799		9.799		39.197	274.379
3	Blater	3.615		216.915		21.692		10.846		10.846		43.383	303.681
4	Sidakangen	2.703		162.150		16.215		8.108		8.108		32.430	227.010
5	Karangpetir	1.567		94.037		9.404		4.702		4.702		18.807	131.652
6	Grecol	4.545		272.702		27.270		13.635		13.635		54.540	381.782
7	Mewek	2.798		167.901		16.790		8.395		8.395		33.580	235.062
8	Karangmanyar	2.660		159.571		15.957		7.979		7.979		31.914	223.399
9	Kalikabong	6.371		382.278		38.228		19.114		19.114		76.456	535.190
10	Selabaya	4.370		262.208		26.221		13.110		13.110		52.442	367.091
11	Kalimanah Wetan	3.514		210.851		21.085		10.543		10.543		42.170	295.192
12	Kalimanah Kulon	2.452		147.144		14.714		7.357		7.357		29.429	206.002
13	Manduraga	2.094		125.663		12.566		6.283		6.283		25.133	175.928
14	Karangsari	2.002		120.114		12.011		6.006		6.006		24.023	168.159
15	Kedungwuluh	3.738		224.272		22.427		11.214		11.214		44.854	313.981
16	Klapasawit	5.809		348.559		34.856		17.428		17.428		69.712	487.982
17	Babakan	7.867		472.024		47.202		23.601		23.601		94.405	660.834
Jumlah		61.749		3.704.951		370.495		185.248		185.248		740.990	5.186.931

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Air limbah domestik yang terdapat di Lingkungan Hunian Kalimanah berasal dari air cucian, mandi dan dapur (*grey water*). Rantai layanan pengolahan air limbah domestik pada Lingkungan Hunian Kalimanah belum melakukan sistem pengolahan air limbah domestik secara terpusat (SPALD-T), akan tetapi sudah melakukan sistem pengolahan air limbah domestik secara setempat (SPALD-S). Lingkungan Hunian Kalimanah terdapat IPAL komunal di Perumahan Kalikabong yang melayani sebanyak kurang lebih 50 rumah tangga di RT 1. Namun, rata-rata masih menggunakan pengelolaan sistem setempat (*onsite sistem*) yaitu membuang limbah rumah tangga langsung ke saluran drainase atau di sekitar rumah, dan permukiman yang berdekatan dengan sungai membuang air limbah langsung ke sungai.

Dari adanya sistem pengolahan air limbah domestik yang belum memadai dan terpadu, diperlukan proyeksi kebutuhan sistem pengolahan air limbah domestik di Lingkungan Hunian Kalimanah hingga 20 tahun mendatang. Proyeksi air limbah yang dihasilkan di Lingkungan Hunian Kalimanah pada tahun 2041 mencapai 4.149.545 liter/hari. Hal tersebut maka diperlukan sarana penampungan dan pengolahan tinja, perlunya keterpaduan antara sarana sanitasi tersebut agar menciptakan praktik sanitasi yang terpadu dan tidak mencemari lingkungan.

Tabel IV.98.
Proyeksi Air Limbah di Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Total Kebutuhan	Standar	Proyeksi Air Limbah
1	Jompo	2.376	199.608	80 % dari Air Bersih	159.686
2	Rabak	3.266	274.379		219.503
3	Blater	3.615	303.681		242.945
4	Sidakangen	2.703	227.010		181.608
5	Karangpetir	1.567	131.652		105.321
6	Grecol	4.545	381.782		305.426
7	Mewek	2.798	235.062		188.050
8	Karangmanyar	2.660	223.399		178.719
9	Kalikabong	6.371	535.190		428.152
10	Selabaya	4.370	367.091		293.673
11	Kalimanah Wetan	3.514	295.192		236.154
12	Kalimanah Kulon	2.452	206.002		164.801
13	Manduraga	2.094	175.928		140.742
14	Karangsari	2.002	168.159		134.527
15	Kedungwuluh	3.738	313.981		251.185
16	Klapasawit	5.809	487.982		390.386
17	Babakan	7.867	660.834		528.667
Jumlah		61.749	5.186.931		4.149.545

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

4. Sistem Persampahan

Kabupaten Purbalingga berada memiliki satu tempat pemrosesan akhir (TPA) persampahan yang berlokasi di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan. Lingkungan Hunian Kalimanah memiliki prasarana pengurangan persampahan yaitu berupa TPS sebanyak 9 unit, TPS 3R sebanyak 1 unit, dan Bank Sampah sebanyak 10 unit.

Pada umumnya jaringan persampahan di Lingkungan Hunian Kalimanah sudah memadai dan melayani setiap penduduk. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase, tegalan, maupun di sungai. Sehingga adanya jaringan persampahan tersebut dirasa kurang optimal, karena mayoritas masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Maka dari itu perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, serta perluasan jangkauan pelayanan pengangkutan sampah, baik dari pemerintah maupun secara swadaya. Berikut ini merupakan proyeksi timbulan sampah di Lingkungan Hunian Kalimanah tahun 2041 berdasarkan analisis perhitungan SNI.

Tabel IV.99.
Proyeksi Timbulan Sampah Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah Domestik (m3)	Timbulan Sampah Non Domestik (m3)	Total Timbulan Sampah
1	Jompo	2.376	4,75	0,95	5,70
2	Rabak	3.266	6,53	1,31	7,84
3	Blater	3.615	7,23	1,45	8,68
4	Sidakangen	2.703	5,41	1,08	6,49
5	Karangpetir	1.567	3,13	0,63	3,76
6	Grecol	4.545	9,09	1,82	10,91
7	Mewek	2.798	5,60	1,12	6,72
8	Karangmanyar	2.660	5,32	1,06	6,38
9	Kalikabong	6.371	12,74	2,55	15,29
10	Selabaya	4.370	8,74	1,75	10,49
11	Kalimanah Wetan	3.514	7,03	1,41	8,43
12	Kalimanah Kulon	2.452	4,90	0,98	5,89
13	Manduraga	2.094	4,19	0,84	5,03
14	Karangsari	2.002	4,00	0,80	4,80
15	Kedungwuluh	3.738	7,48	1,50	8,97
16	Klapasawit	5.809	11,62	2,32	13,94
17	Babakan	7.867	15,73	3,15	18,88

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

5. Jaringan Drainase

Jaringan drainase di Lingkungan Hunian Kalimanah terdiri dari jaringan drainase primer berupa sungai, drainase sekunder berupa drainase di jalan utama, dan jaringan drainase tersier di lingkungan permukiman. Jaringan drainase di Lingkungan Hunian Kalimanah berupa drainase terbuka dan drainase tertutup. Jaringan drainase di Lingkungan Hunian Kalimanah di beberapa wilayah belum berfungsi optimal, karena sebagian tersumbat oleh sampah. Hal ini dapat dilihat dari munculnya genangan di beberapa wilayah terutama saat hujan. Selain itu beberapa sungai yang ada di Lingkungan Hunian Kalimanah mengalami pendangkalan.

Jaringan drainase di Lingkungan Hunian Kalimanah terdiri dari jaringan drainase primer, drainase sekunder, dan jaringan drainase tersier. Saluran primer adalah saluran yang menerima masukan aliran dari saluran-saluran sekunder, dimana aliran dari saluran primer ini langsung dialirkan ke badan air, yaitu berupa sungai. Saluran sekunder adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran dari saluran-saluran tersier dan meneruskan aliran ke saluran primer. Sedangkan saluran tersier adalah saluran yang

menerima aliran air langsung dari saluran-saluran pembuangan rumah, umumnya saluran tersier ini adalah saluran kiri kanan jalan perumahan.

Penanganan drainase selama ini masih belum menyentuh drainase yang berbasis lingkungan. Drainase yang telah terbangun sementara hanya difungsikan sebagai pengering jalan badan jalan. Adapun penanganan drainase lingkungan dilaksanakan secara gotong royong tanpa adanya perencanaan yang kongkrit. Melihat kondisi tersebut, maka kebutuhan akan perda tentang pengelolaan drainase lingkungan sangat diperlukan dalam rangka meraih komitmen semua stakeholder tentang pentingnya pengelolaan drainase lingkungan.

Dengan melihat peta rawan banjir dari SSK Kabupaten Purbalingga 2021 dapat diketahui wilayah yang rawan terhadap banjir, dimana terdapat 2 perumahan yang berlokasi di daerah rawan banjir. Luas daerah rawan banjir yang terdapat di Lingkungan Hunian Kalimanah sebesar 103,55 Ha.

Tabel IV.100.
Sebaran Daerah Rawan Banjir Lingkungan Hunian Kalimanah

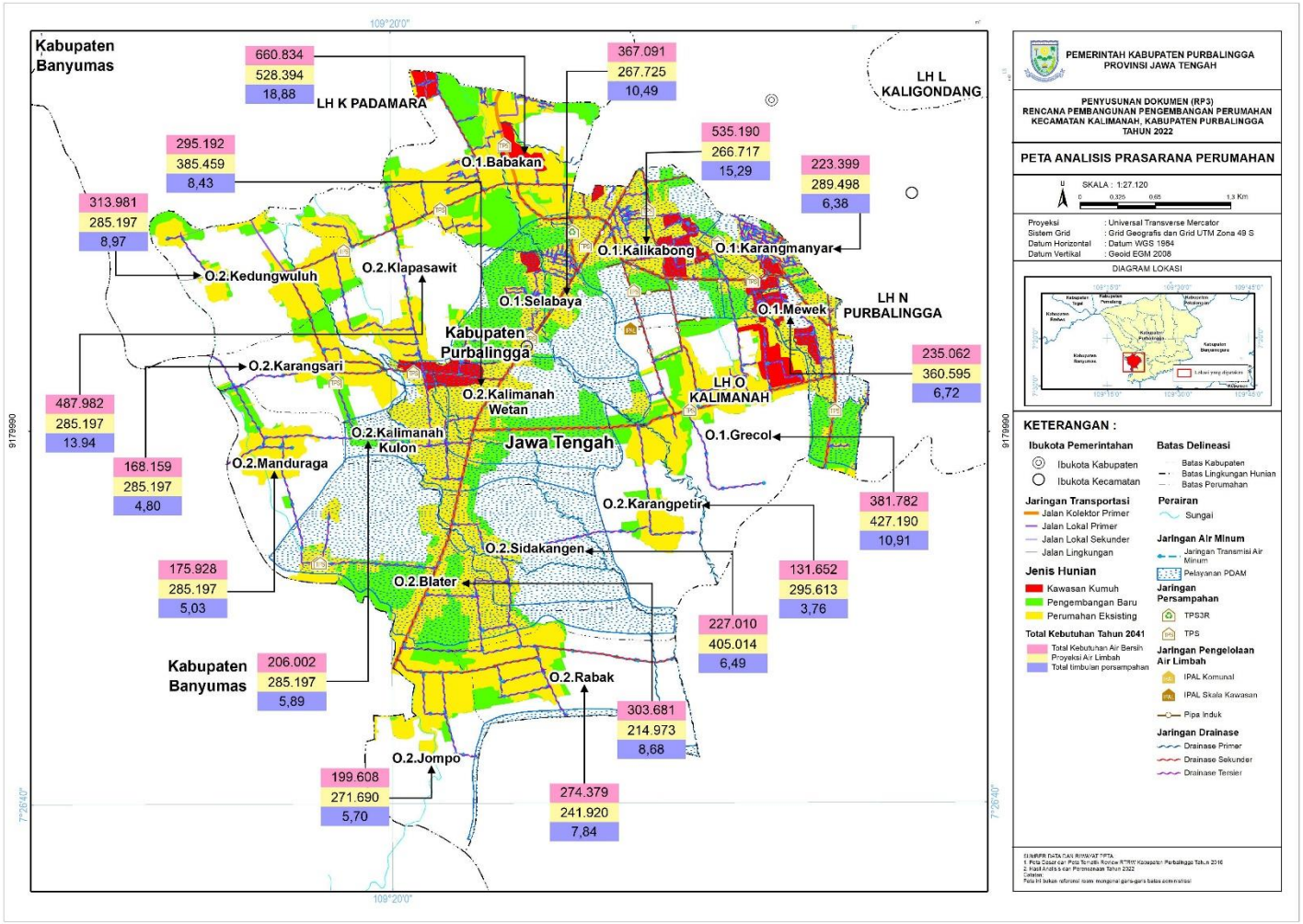
LH	Perumahan	Luas (Ha)
Kalimanah	Blater	98,87
	Sidakangen	31,68

Sumber: SSK Kabupaten Purbalingga, 2021

Dari adanya permasalahan drainase pada kondisi eksisting, perlu adanya kegiatan penanganan khusus untuk mengoptimalkan drainase di perkotaan. Pengembangan sistem drainase disusun untuk meningkatkan pelayanan sistem drainase dan keterpaduan sistem drainase. Kebutuhan pengembangan dan keterpaduan sistem drainase dapat mengacu pada Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Drainase Perkotaan. Dimana kebutuhan sistem drainase terpadu dapat ditinjau dari beberapa tahapan dan aspek, seperti topografi, hidrologi, tataguna tanah, debit rencana masing-masing saluran, hingga penetapan garis sempadan.

6. Sistem Proteksi Kebakaran

Berdasarkan Permen PU Nomor 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknik Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, terdapat beberapa kebutuhan untuk penanganan sistem proteksi kebakaran yang terpadu, diantaranya adalah sarana penyelamatan, sistem proteksi pasif, sistem proteksi aktif. Dimana dalam pemenuhan kebutuhan sistem proteksi kebakaran yang terpadu, pemerintah daerah ataupun instansi teknis yang berwenang dapat merencanakan sistem proteksi kebakaran dengan beberapa komponen yang dibutuhkan, seperti rencana tapak, seluruh sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif kebakaran, serta sarana menuju jalan ke luar yang aman.



Gambar 4.30.
Peta Analisis Prasarana Perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah

B. Sarana

1. Sarana Pemerintahan

Sarana pemerintahan yang terdapat di Lingkungan Hunian Kalimanah meliputi balai desa, balai kelurahan, kantor desa, dan kantor kelurahan. Sarana pemerintahan yang terdapat di Lingkungan Hunian Kalimanah berupa balai desa, balai kelurahan, kantor desa, dan kantor kelurahan. Jumlah kelurahan di Lingkungan Hunian Kalimanah berjumlah 3 kelurahan, sedangan sisanya adalah desa. Perlunya penambahan kebutuhan sarana pemerintahan di Lingkungan Hunian Kalimanah untuk meningkatkan keterpaduan antar hirarki sarana pemerintahan yang dapat berupa balai pertemuan.

2. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di Lingkungan Hunian Kalimanah terdiri dari sekolah dasar (SD) sederajat, sekolah menengah pertama (SMP) sederajat, sekolah menengah akhir (SMA) sederajat, dan perguruan tinggi.

Permasalahan sarana pendidikan di Lingkungan Hunian Kalimanah yaitu masih minimnya jumlah sarana pendidikan. Tentunya sarana pendidikan diperlukan pada suatu wilayah. Maka dari itu perlunya penambahan sarana pendidikan berupa SD hingga perguruan tinggi di Lingkungan Hunian Kalimanah agar dapat menjangkau ke seluruh wilayah dan tidak terpusat di pusat perkotaan saja.

Proyeksi kebutuhan sarana pendidikan pada tahun 2041 di Lingkungan Hunian Kalimanah diperlukan untuk mengembangkan keterpaduan antar hirarki sarana pendidikan. Terlebih lagi saat ini di Indonesia mewajibkan wajib belajar 12 tahun bagi penduduknya. Kebutuhan sarana pendidikan di Lingkungan Hunian Kalimanah tahun 2041 berupa SD sebanyak 18 unit, SMP sebanyak 9 unit, dan SMA sebanyak 5 unit. Perlunya penambahan sarana pendidikan ini agar kebutuhan pendidikan masyarakat Lingkungan Hunian Kalimanah dapat terpenuhi.

Tabel IV.101.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	TK			SD				SMP			
			Jumlah Eksisting	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Jompo	2.376	1	1	0	2	1.200	2	0	0	4.800	0	0
2	Rabak	3.266	2	1	-1	3	1.200	3	0	0	4.800	1	1
3	Blater	3.615	2	1	-1	3	1.200	3	0	0	4.800	1	1
4	Sidakangen	2.703	2	1	-1	1	1.200	2	1	0	4.800	1	1
5	Karangpetir	1.567	1	1	0	1	1.200	1	0	0	4.800	0	0
6	Grecol	4.545	1	1	0	3	1.200	4	1	0	4.800	1	1
7	Mewek	2.798	1	1	0	1	1.200	2	1	0	4.800	1	1
8	Karangmanyar	2.660	1	1	0	1	1.200	2	1	0	4.800	1	1
9	Kalikabong	6.371	2	1	-1	3	1.200	5	2	1	4.800	1	0
10	Selabaya	4.370	1	1	0	2	1.200	4	2	1	4.800	1	0
11	Kalimanah Wetan	3.514	2	1	-1	3	1.200	3	0	1	4.800	1	0
12	Kalimanah Kulon	2.452	1	1	0	1	1.200	2	1	0	4.800	1	1
13	Manduraga	2.094	1	1	0	1	1.200	2	1	0	4.800	0	0
14	Karangsari	2.002	2	1	-1	2	1.200	2	0	0	4.800	0	0
15	Kedungwuluh	3.738	1	1	0	1	1.200	3	2	1	4.800	1	0
16	Klapasawit	5.809	1	1	0	2	1.200	5	3	0	4.800	1	1
17	Babakan	7.867	3	1	-2	3	1.200	7	4	0	4.800	2	2
Jumlah		61.749	25	17	-8	33		51	18	4		13	9

Lanjutan…

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	SMA				PT			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Jompo	2.376	0	6.000	0	0	0	70.000	0	0
2	Rabak	3.266	0	6.000	1	1	0	70.000	0	0

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	SMA				PT			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
3	Blater	3.615	0	6.000	1	1	1	70.000	0	-1
4	Sidakangen	2.703	0	6.000	0	0	0	70.000	0	0
5	Karangpetir	1.567	0	6.000	0	0	0	70.000	0	0
6	Grecol	4.545	0	6.000	1	1	0	70.000	0	0
7	Mewek	2.798	0	6.000	0	0	0	70.000	0	0
8	Karangmanyar	2.660	0	6.000	0	0	0	70.000	0	0
9	Kalikabong	6.371	0	6.000	1	1	0	70.000	0	0
10	Selabaya	4.370	4	6.000	1	-3	0	70.000	0	0
11	Kalimanah Wetan	3.514	1	6.000	1	0	0	70.000	0	0
12	Kalimanah Kulon	2.452	0	6.000	0	0	0	70.000	0	0
13	Manduraga	2.094	0	6.000	0	0	0	70.000	0	0
14	Karangsari	2.002	0	6.000	0	0	0	70.000	0	0
15	Kedungwuluh	3.738	0	6.000	1	1	0	70.000	0	0
16	Klapasawit	5.809	0	6.000	1	1	0	70.000	0	0
17	Babakan	7.867	0	6.000	1	1	0	70.000	0	0
Jumlah		61.749	5	6.000	10	5	1	70.000	1	0

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

3. Sarana Peribadatan

Mayoritas sarana peribadatan yang terdapat di Lingkungan Hunian Kalimanah adalah masjid dan mushola. Permasalahan tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap masyarakat penganut agama lain yang ingin beribadah di tempat ibadahnya tetapi belum terjangkau ke semua wilayah di Lingkungan Hunian Kalimanah. Oleh karena itu, perlunya pemerataan jangkauan sarana peribadatan berupa gereja di Lingkungan Hunian Kalimanah. Sebaran ketersediaan sarana peribadatan di Lingkungan Hunian Kalimanah terdiri dari masjid, mushola, dan gereja. Sebaran masjid dan mushola sudah menjangkau ketersediaannya di seluruh wilayah di Lingkungan Hunian Kalimanah.

Proyeksi kebutuhan sarana peribadatan di Lingkungan Hunian Kalimanah pada tahun 2041 berupa 63 unit mushola. Meskipun pada kondisi eksisting di Lingkungan Hunian Kalimanah ketersediaan mushola dapat dikatakan banyak, tetapi kebutuhan mushola harus disesuaikan setiap perumahan. Tidak hanya memerlukan penambahan kebutuhan mushola dan masjid, perlunya penambahan sarana peribadatan lain agar keterpaduan sarana peribadatan di Lingkungan Hunian Kalimanah dapat berlangsung.

4. Sarana Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan di Lingkungan Hunian Kalimanah terdiri dari rumah sakit, puskesmas, klinik, puskesmas pembantu, praktek dokter, dan apotek. Dimana sebaran sarana kesehatan yang dapat menjangkau seluruh wilayah Lingkungan Hunian Kalimanah hanya berupa klinik, praktek dokter, dan apotek. Proyeksi kebutuhan sarana kesehatan di Lingkungan Hunian Kalimanah pada tahun 2041 sudah mencukupi untuk semua jenis sarana kesehatan.

Tabel IV.102.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Masjid				Musholla				Gereja		
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan
1	Jompo	2.376	2	2.500	1	-1	11	250	10	-1	0	Mengikuti paroki	Mengikuti paroki
2	Rabak	3.266	2	2.500	1	-1	13	250	13	0	0		
3	Blater	3.615	5	2.500	1	-4	19	250	14	-5	1		
4	Sidakangen	2.703	5	2.500	1	-4	5	250	11	6	0		
5	Karangpetir	1.567	3	2.500	1	-2	3	250	6	3	0		
6	Grecol	4.545	3	2.500	2	-1	18	250	18	0	0		
7	Mewek	2.798	3	2.500	1	-2	7	250	11	4	0		
8	Karangmanyar	2.660	3	2.500	1	-2	5	250	11	6	0		
9	Kalikabong	6.371	5	2.500	3	-2	16	250	25	9	1		
10	Selabaya	4.370	8	2.500	2	-6	12	250	17	5	0		
11	Kalimanah Wetan	3.514	2	2.500	1	-1	17	250	14	-3	0		
12	Kalimanah Kulon	2.452	5	2.500	1	-4	6	250	10	4	0		
13	Manduraga	2.094	1	2.500	1	0	7	250	8	1	0		
14	Karangsari	2.002	2	2.500	1	-1	7	250	8	1	0		
15	Kedungwuluh	3.738	6	2.500	1	-5	5	250	15	10	0		
16	Klapasawit	5.809	5	2.500	2	-3	12	250	23	11	0		
17	Babakan	7.867	6	2.500	3	-3	21	250	31	10	0		
Jumlah		61.749	66	2.500	25	-41	184	250	247	63	2		

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Tabel IV.103.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rumah Sakit				Puskesmas			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Jompo	2.376	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
2	Rabak	3.266	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
3	Blater	3.615	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
4	Sidakangen	2.703	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
5	Karangpetir	1.567	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
6	Grecol	4.545	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
7	Mewek	2.798	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
8	Karangmanyar	2.660	1	120.000	0	-1	0	120.000	0	0
9	Kalikabong	6.371	1	120.000	0	-1	0	120.000	0	0
10	Selabaya	4.370	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
11	Kalimanah Wetan	3.514	0	120.000	0	0	1	120.000	0	-1
12	Kalimanah Kulon	2.452	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
13	Manduraga	2.094	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
14	Karangsari	2.002	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
15	Kedungwuluh	3.738	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
16	Klapasawit	5.809	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
17	Babakan	7.867	1	120.000	0	-1	0	120.000	0	0
Jumlah		61.749	3	120.000	1	-2	1	120.000	1	0

Lanjutan…

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Poliklinik				Puskesmas Pembantu			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Jompo	2.376	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
2	Rabak	3.266	0	30.000	0	0	1	30.000	0	-1
3	Blater	3.615	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Poliklinik				Puskesmas Pembantu			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
4	Sidakangen	2.703	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
5	Karangpetir	1.567	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
6	Grecol	4.545	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
7	Mewek	2.798	0	30.000	0	0	1	30.000	0	-1
8	Karangmanyar	2.660	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
9	Kalikabong	6.371	3	30.000	0	-3	0	30.000	0	0
10	Selabaya	4.370	1	30.000	0	-1	0	30.000	0	0
11	Kalimanah Wetan	3.514	1	30.000	0	-1	0	30.000	0	0
12	Kalimanah Kulon	2.452	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
13	Manduraga	2.094	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
14	Karangsari	2.002	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
15	Kedungwuluh	3.738	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
16	Klapasawit	5.809	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
17	Babakan	7.867	0	30.000	0	0	1	30.000	0	-1
Jumlah		61.749	5	30.000	0	-5	3	30.000	2	-1

Lanjutan…

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Praktik Dokter				Apotek			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Jompo	2.376	1	5.000	0	-1	0	30.000	0	0
2	Rabak	3.266	0	5.000	1	1	0	30.000	0	0
3	Blater	3.615	1	5.000	1	0	1	30.000	0	-1
4	Sidakangen	2.703	0	5.000	1	1	0	30.000	0	0
5	Karangpetir	1.567	0	5.000	0	0	0	30.000	0	0
6	Grecol	4.545	1	5.000	1	0	0	30.000	0	0
7	Mewek	2.798	1	5.000	1	0	1	30.000	0	-1
8	Karangmanyar	2.660	0	5.000	1	1	0	30.000	0	0
9	Kalikabong	6.371	2	5.000	1	-1	4	30.000	0	-4

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Praktik Dokter				Apotek			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
10	Selabaya	4.370	2	5.000	1	-1	0	30.000	0	0
11	Kalimanah Wetan	3.514	4	5.000	1	-3	2	30.000	0	-2
12	Kalimanah Kulon	2.452	0	5.000	0	0	0	30.000	0	0
13	Manduraga	2.094	0	5.000	0	0	0	30.000	0	0
14	Karangsari	2.002	0	5.000	0	0	0	30.000	0	0
15	Kedungwuluh	3.738	0	5.000	1	1	0	30.000	0	0
16	Klapasawit	5.809	1	5.000	1	0	0	30.000	0	0
17	Babakan	7.867	1	5.000	2	1	1	30.000	0	-1
Jumlah		61.749	14	5.000	12	-2	9	30.000	2	-7

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

5. Sarana Perdagangan dan Jasa

Sarana perdagangan yang terdapat di Lingkungan Hunian Kalimanah tahun 2020 berupa pasar, pertokoan, dan toko/warung. Jika dilihat dari cakupan pelayanannya, sarana perdagangan di Lingkungan Hunian Kalimanah terutama pasar sudah cukup melayani dan menjangkau pelayanannya ke seluruh wilayah. Dari adanya ketersediaan sarana perdagangan tersebut, pemerintah maupun masyarakat dapat mengembangkan sarana perdagangan agar lebih optimal, seperti penambahan jaringan persampahan disekitar pasar ataupun pengadaan ruang terbuka hijau agar terdapat sirkulasi udara yang baik dalam pasar tersebut.

Selain tersedianya pasar, di Lingkungan Hunian Kalimanah saat ini sudah cukup melayani dan menjangkau pelayanannya untuk kebutuhan sarana perdagangan lain seperti pertokoan dan toko/warung. Hal ini diharapkan ketersediaan toko dapat melayani setiap lingkungan permukiman, agar kebutuhan penduduk sehari-hari dapat terpenuhi walaupun akses dari tempat tinggal ke pasar atau toko swalayan terlalu jauh.

Tabel IV.104.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2041

No	Jenis	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Pasar	61.749	9	30.000	2	-7
2	Pertokoan	61.749	26	6.000	10	-16
3	Toko/ Warung	61.749	483	250	247	-236

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

6. Sarana Kebudayaan dan Rekreasi

Kebudayaan di Lingkungan Hunian Kalimanah beraneka ragam, meliputi ujungan, suran, begalan, angguk, aplang/ dames, calung, ebeg/ kuda lumping, lengger, dan lainnya. Kebudayaan tersebut di dukung oleh beberapa organisasi kesenian yang terdapat di Lingkungan Hunian Kalimanah. Lingkungan Hunian Kalimanah juga memiliki desa wisata budaya yang berada di Perumahan Karangpetir. Hal ini dikarenakan setiap tahunnya desa tersebut mengadakan pertunjukan kesenian dan terdapat juga beberapa sanggar seni di Perumahan Karangpetir. Selain itu, Lingkungan Hunian Kalimanah memiliki bangunan/ situs cagar budaya yaitu SMA Santo Agustinus.

Beragamnya sarana kebudayaan dan rekreasi di Lingkungan Hunian Kalimanah menjadikan banyaknya faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mendukung kebudayaan dan rekreasi. Jika faktor pendukung kebudayaan dan rekreasi tersebut tidak dapat dipenuhi, maka akan timbul permasalahan. Permasalahan pada sarana kebudayaan dan rekreasi di Lingkungan Hunian Kalimanah seperti aksesibilitas menuju tempat wisata yang belum memadai, kurangnya dukungan infrastruktur seperti jalan, parkir, terminal, drainase, dan persampahan serta minimnya sarana penginapan untuk pengunjung atau wisatawan luar kabupaten. Maka dari itu isu strategis pada sarana kebudayaan dan rekreasi di Lingkungan Hunian Kalimanah yaitu belum optimalnya sistem kepariwisataan.

Selain ketersediaan sarana kebudayaan dan rekreasi yang telah terdapat di Lingkungan Hunian Kalimanah, perlunya kebutuhan sarana kebudayaan berupa balai

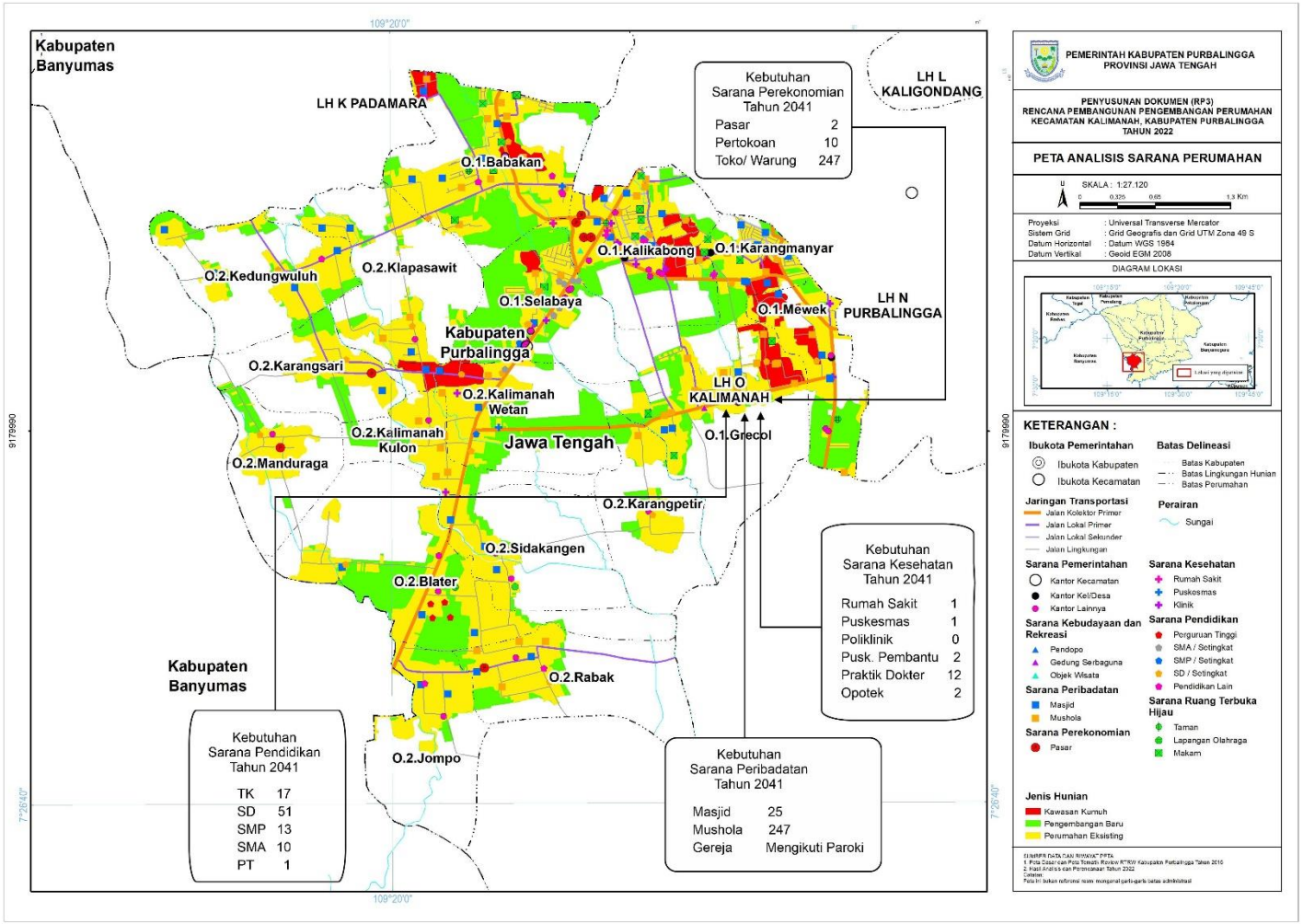
warga, balai serbaguna, dan gedung serbaguna untuk mendukung sarana kebudayaan dan rekreasi yang terpadu. Hal ini dikarenakan pentingnya balai warga sebagai tempat berkumpul untuk mengadakan kegiatan-kegiatan umum pada cakupan lingkungan permukiman. Sementara itu, kebutuhan balai serbaguna juga untuk mendukung kegiatan masyarakat yang umumnya bersifat komersial ataupun kepentingan umum.

7. Sarana Ruang Terbuka Hijau

Sarana ruang terbuka hijau sangat penting bagi penghijauan dan sirkulasi suatu kota/ kawasan. Namun saat ini umumnya mayoritas wilayah banyak lahan RTH yang dialihfungsikan menjadi lahan terbangun untuk meningkatkan perekonomian wilayahnya. Sama halnya pada permasalahan RTH di Lingkungan Hunian Kalimanah yang berubah fungsi menjadi kawasan perekonomian dan ruang komersial lainnya. Akibatnya banyak lahan RTH yang berkurang luasannya. Maka dari itu perlunya penambahan proporsi RTH agar terpenuhi 30% untuk seluruh wilayah.

Sarana ruang terbuka hijau yang terdapat di Lingkungan Hunian Kalimanah meliputi ruang terbuka hijau perkotaan, ruang terbuka hijau jalur hijau jalan, dan ruang terbuka hijau fungsi tertentu. Ruang terbuka hijau perkotaan di Lingkungan Hunian Kalimanah berupa taman kota, hutan kota, dan taman lingkungan.

Selain untuk mendukung pengoptimalan proporsi RTH sebesar 30%, perlunya penambahan kebutuhan sarana RTH berupa taman lingkungan untuk mendukung keterpaduan antar hirarki sarana RTH. Hal ini dikarenakan, kebutuhan taman lingkungan harus disesuaikan dengan cakupan lingkungan permukiman.



Gambar 4.31.
Peta Analisis Sarana Perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah

C. Utilitas

Jangkauan pelayanan jaringan listrik yang disediakan oleh PLN di Lingkungan Hunian Kalimanah sudah mampu melayani hingga cakupan penduduk kabupaten. Dimana setiap penduduk kecamatan sudah menjadi pelanggan dari adanya listrik PLN.

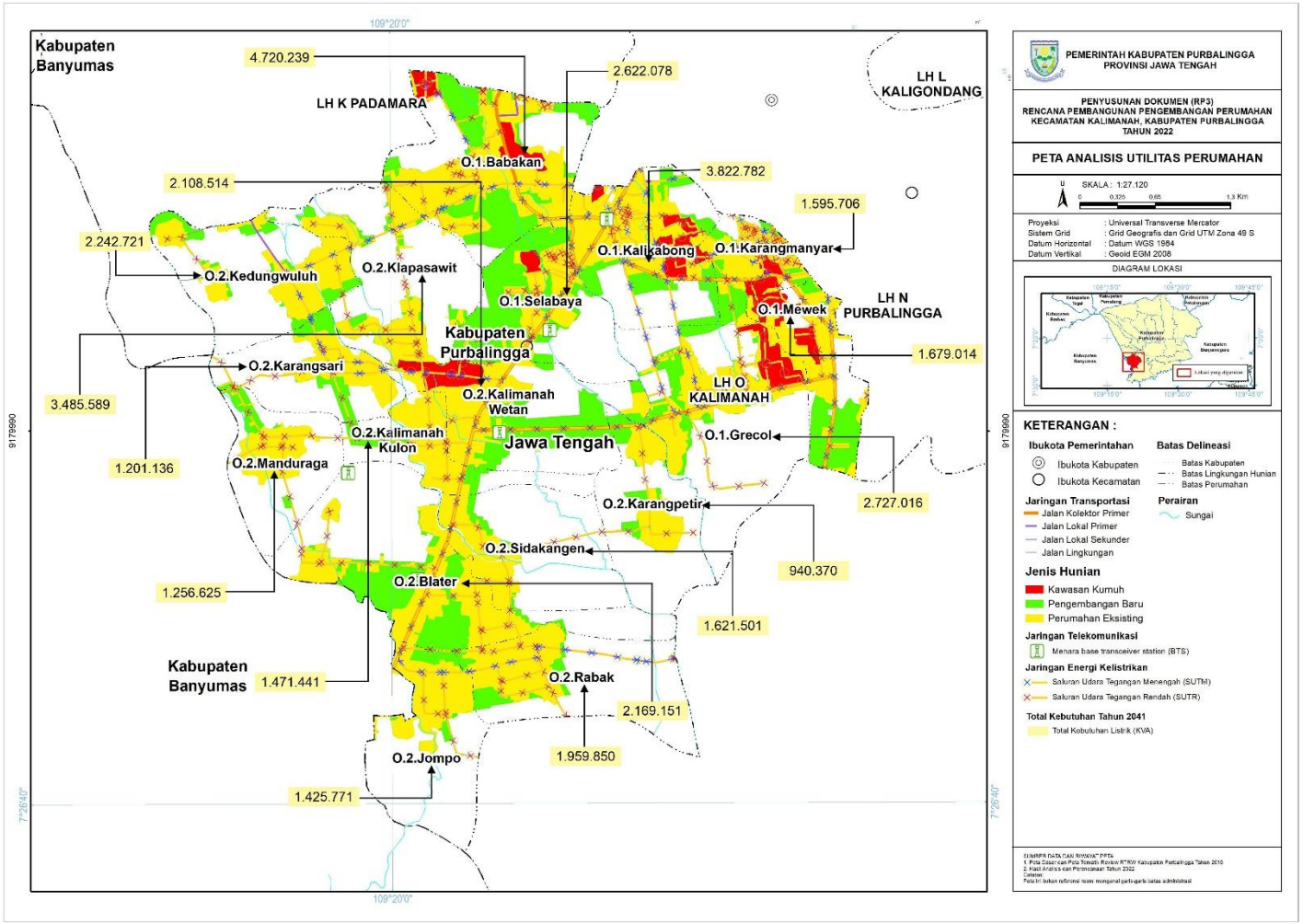
Selain ketersediaan jaringan listrik eksisting, perlu adanya penambahan kebutuhan listrik domestik dan non domestik agar menciptakan keterpaduan antar hirarki jaringan listrik. Proyeksi kebutuhan listrik di Lingkungan Hunian Kalimanah pada tahun 2041 sebesar 37.049.505 KVA terdiri dari kebutuhan listrik domestik sebesar 18.524.753 KVA dan kebutuhan listrik non domestik sebesar 18.524.753 KVA. Kebutuhan listrik domestik ini untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sedangkan, kebutuhan listrik non domestik di Lingkungan Hunian Kalimanah berupa industri, fasilitas umum, penerangan jalan, dan cadangan.

Tabel IV.105.
Proyeksi Kebutuhan Jaringan Listrik Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah KK	Domestik	Non Domestik				Total Kebutuhan Listrik (KVA)
				Industri 25% x Domestik	Fasilitas 25% x Domestik	Penerangan Jalan 40% x Domestik	Cadangan 10% x Domestik	
1	Jompo	792	712.886	178.221	178.221	285.154	71.289	1.425.771
2	Rabak	1.089	979.925	244.981	244.981	391.970	97.992	1.959.850
3	Blater	1.205	1.084.576	271.144	271.144	433.830	108.458	2.169.151
4	Sidakangen	901	810.751	202.688	202.688	324.300	81.075	1.621.501
5	Karangpetir	522	470.185	117.546	117.546	188.074	47.019	940.370
6	Grecol	1.515	1.363.508	340.877	340.877	545.403	136.351	2.727.016
7	Mewek	933	839.507	209.877	209.877	335.803	83.951	1.679.014
8	Karangmanyar	887	797.853	199.463	199.463	319.141	79.785	1.595.706
9	Kalikabong	2.124	1.911.391	477.848	477.848	764.556	191.139	3.822.782
10	Selabaya	1.457	1.311.039	327.760	327.760	524.416	131.104	2.622.078
11	Kalimanah Wetan	1.171	1.054.257	263.564	263.564	421.703	105.426	2.108.514
12	Kalimanah Kulon	817	735.720	183.930	183.930	294.288	73.572	1.471.441
13	Manduraga	698	628.313	157.078	157.078	251.325	62.831	1.256.625
14	Karangsari	667	600.568	150.142	150.142	240.227	60.057	1.201.136
15	Kedungwuluh	1.246	1.121.360	280.340	280.340	448.544	112.136	2.242.721
16	Klapasawit	1.936	1.742.795	435.699	435.699	697.118	174.279	3.485.589
17	Babakan	2.622	2.360.120	590.030	590.030	944.048	236.012	4.720.239
Jumlah		20.583	18.524.753	4.631.188	4.631.188	7.409.901	1.852.475	37.049.505

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Sebaran dan ketersediaan Menara telekomunikasi di Lingkungan Hunian Kalimanah sudah memadai dan merata. Selain menjadi pusat perkotaan, Lingkungan Hunian Kalimanah juga lebih banyak membutuhkan menara telekomunikasi untuk mendukung kelangsungan kegiatan perkotaan dibanding kecamatan lain. Namun, pada saat ini kebutuhan akan telekomunikasi maupun jaringan seluler tidak hanya dibutuhkan pada pusat kota saja, tetapi pada wilayah terpencil juga sangat dibutuhkan.



Gambar 4.32.
Peta Analisis Utilitas Perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah

4.7.1.3. Lingkungan Hunian Padamara

A. Prasarana

1. Jaringan Jalan

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 mengatur jalan menurut statusnya yaitu jalan umum dikelompokan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Insfrastruktur jalan yang terdapat di Lingkungan Hunian Padamara terdiri atas fungsi jalan kabupaten. Fungsi jalan atau status jalan tersebut memiliki jenis permukaan jalan berupa aspal/ beton dan dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Kondisi fisik jalan di Lingkungan Hunian Padamara sebagian besar dalam kondisi baik. Akan tetapi terdapat jalan berlubang dan terdapat genangan saat terjadi hujan. Penyebab kerusakan jaringan jalan dapat diakibatkan oleh cuaca, seperti intensitas hujan yang ekstrem, waktu atau umur perkerasan jalan yang sudah tua, maupun beban lalu lintas yang tidak sesuai dengan badan jalan.

Dari adanya kebutuhan penanganan terkait pembuatan jalan baru, penyesuaian kekuatan struktur jalan, dan penyesuaian lebar jalan diperlukan analisis program/ kegiatan peningkatan jalan eksisting yang dilakukan dengan menghitung kebutuhan peningkatan jalan pada ruas jalan yang memiliki derajat kejenuhan yang tinggi. Sedangkan untuk pembangunan jalan baru, analisis yang perlu dilakukan nantinya mengacu pada kebutuhan pengembangan jalan baru sesuai arahan dan rencana pengembangan lingkungan hunian.

2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pelayanan sumber air atau air minum sudah terlayani sumber air oleh PDAM dengan menggunakan ledeng/ meteran. Wilayah perdesaan atau bagian utara Lingkungan Hunian Padamara menggunakan sistem air bersih perpipaan yang bersumber dari PAMSIMAS. PAMSIMAS yang terdapat di Lingkungan Hunian Padamara dapat mengalirkan kurang lebih 2-3 desa. Terdapat juga wilayah yang menggunakan sumur di Lingkungan Hunian Padamara yaitu berada di Perumahan Karangpule. Kebutuhan air bersih di Lingkungan Hunian Padamara tahun 2020 mencapai 3.908.772 liter/hari. Pelayanan air bersih tersebut menjangkau 46.533 jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan penyediaan air minum. Oleh karena itu diperlukan proyeksi kebutuhan jaringan prasarana di masa yang akan datang untuk melakukan perencanaan terkait jaringan prasarana yang efisien. Kebutuhan air minum di Lingkungan Hunian Padamara terus bertambah hingga pada tahun 2041 dengan total kebutuhan air minum sebesar 4.129.163 liter/hari. Dalam mengidentifikasi dan mengembangkan sistem penyediaan air minum di Lingkungan Hunian Padamara terdiri dari kebutuhan domestik, kebutuhan non domestik (industri, fasilitas umum, dan hidran), serta kebocoran. Dimana kebutuhan domestik tahun 2041 pada sambungan rumah lebih banyak digunakan di Lingkungan Hunian Padamara, yaitu sebesar 2.949.402 liter/hari dibanding dengan kebutuhan non domestik. Sedangkan, kebutuhan non domestik di Lingkungan Hunian Padamara sebesar 589.880 liter/hari.

Tabel IV.106.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Domestik		Industri		Fasum		Hidran		Kebocoran		Total Kebutuhan
			Standar	Kebutuhan	Standar	Kebutuhan	Standar	Kebutuhan	Standar	Kebutuhan	Standar	Kebocoran	
1	Karangpule	1.711	60 lt/ jiwa/ hari	102.685	10 % dari Domestik	10.268	5 % dari Domestik	5.134	5 % dari Domestik	5.134	20 % dari Domestik	20.537	143.759
2	Kalitinggar	3.003		180.169		18.017		9.008		9.008		36.034	252.237
3	Sokawera	2.871		172.248		17.225		8.612		8.612		34.450	241.148
4	Padamara	3.209		192.565		19.257		9.628		9.628		38.513	269.591
5	Karangjambe	4.178		250.693		25.069		12.535		12.535		50.139	350.971
6	Bojanegara	6.414		384.822		38.482		19.241		19.241		76.964	538.751
7	Karangsentul	2.765		165.908		16.591		8.295		8.295		33.182	232.271
8	Gemuruh	4.754		285.264		28.526		14.263		14.263		57.053	399.370
9	Dawuhan	4.356		261.386		26.139		13.069		13.069		52.277	365.940
10	Prigi	3.507		210.439		21.044		10.522		10.522		42.088	294.615
11	Purbayasa	2.428		145.703		14.570		7.285		7.285		29.141	203.984
12	Karanggambas	4.650		279.023		27.902		13.951		13.951		55.805	390.632
13	Mipiran	3.454		207.227		20.723		10.361		10.361		41.445	290.118
14	Kalitinggar Kidul	1.854		111.269		11.127		5.563		5.563		22.254	155.777
Jumlah		49.157		2.949.402		294.940		147.470		147.470		589.880	4.129.163

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Air limbah domestik yang terdapat di Lingkungan Hunian Padamara berasal dari air cucian, mandi dan dapur (*grey water*). Rantai layanan pengolahan air limbah domestik pada Lingkungan Hunian Padamara belum melakukan sistem pengolahan air limbah domestik secara terpusat (SPALD-T), akan tetapi sudah melakukan sistem pengolahan air limbah domestik secara setempat (SPALD-S). Terdapat rumah tangga di Lingkungan Hunian Padamara yang memiliki IPAL domestik di setiap rumah tangganya. Namun, rata-rata masih menggunakan pengelolaan sistem setempat (*onsite sistem*) yaitu membuang limbah rumah tangga langsung ke saluran drainase atau di sekitar rumah, dan permukiman yang berdekatan dengan sungai membuang air limbah langsung ke sungai.

Dari adanya sistem pengolahan air limbah domestik yang belum memadai dan terpadu, diperlukan proyeksi kebutuhan sistem pengolahan air limbah domestik di Lingkungan Hunian Padamara hingga 20 tahun mendatang. Proyeksi air limbah yang dihasilkan di Lingkungan Hunian Padamara pada tahun 2041 mencapai 3.303.331 liter/hari. Hal tersebut maka diperlukan sarana penampungan dan pengolahan tinja, perlunya keterpaduan antara sarana sanitasi tersebut agar menciptakan praktik sanitasi yang terpadu dan tidak mencemari lingkungan.

Tabel IV.107.
Proyeksi Air Limbah di Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Total Kebutuhan	Standar	Proyeksi Air Limbah
1	Karangpule	1.711	143.759	80 % dari Air Bersih	115.007
2	Kalitinggar	3.003	252.237		201.789
3	Sokawera	2.871	241.148		192.918
4	Padamara	3.209	269.591		215.673
5	Karangjambe	4.178	350.971		280.776
6	Bojanegara	6.414	538.751		431.001
7	Karangsentul	2.765	232.271		185.817
8	Gemuruh	4.754	399.370		319.496
9	Dawuhan	4.356	365.940		292.752
10	Prigi	3.507	294.615		235.692
11	Purbayasa	2.428	203.984		163.187
12	Karanggambas	4.650	390.632		312.506
13	Mipiran	3.454	290.118		232.094
14	Kalitinggar Kidul	1.854	155.777		124.621
Jumlah		49.157	4.129.163		3.303.331

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

4. Sistem Persampahan

Kabupaten Purbalingga berada memiliki satu tempat pemrosesan akhir (TPA) persampahan yang berlokasi di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan. Lingkungan Hunian Padamara memiliki prasarana pengurangan persampahan yaitu berupa TPS sebanyak 1 unit, TPS 3R sebanyak 1 unit, dan Bank Sampah sebanyak 5 unit.

Pada umumnya jaringan persampahan di Lingkungan Hunian Padamara sudah memadai dan melayani setiap penduduk. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase, tegalan, maupun di sungai. Sehingga adanya

jaringan persampahan tersebut dirasa kurang optimal, karena mayoritas masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Maka dari itu perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, serta perluasan jangkauan pelayanan pengangkutan sampah, baik dari pemerintah maupun secara swadaya. Berikut ini merupakan proyeksi timbulan sampah di Lingkungan Hunian Padamara tahun 2041 berdasarkan analisis perhitungan SNI.

Tabel IV.108.
Proyeksi Timbulan Sampah Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah Domestik (m3)	Timbulan Sampah Non Domestik (m3)	Total Timbulan Sampah
1	Karangpule	1.711	3,42	0,68	4,11
2	Kalitinggar	3.003	6,01	1,20	7,21
3	Sokawera	2.871	5,74	1,15	6,89
4	Padamara	3.209	6,42	1,28	7,70
5	Karangjambe	4.178	8,36	1,67	10,03
6	Bojanegara	6.414	12,83	2,57	15,39
7	Karangsentul	2.765	5,53	1,11	6,64
8	Gemuruh	4.754	9,51	1,90	11,41
9	Dawuhan	4.356	8,71	1,74	10,46
10	Prigi	3.507	7,01	1,40	8,42
11	Purbayasa	2.428	4,86	0,97	5,83
12	Karanggambas	4.650	9,30	1,86	11,16
13	Mipiran	3.454	6,91	1,38	8,29
14	Kalitinggar Kidul	1.854	3,71	0,74	4,45

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

5. Jaringan Drainase

Jaringan drainase di Lingkungan Hunian Padamara terdiri dari jaringan drainase primer berupa sungai, drainase sekunder berupa drainase di jalan utama, dan jaringan drainase tersier di lingkungan permukiman. Jaringan drainase di Lingkungan Hunian Padamara berupa drainase terbuka dan drainase tertutup. Jaringan drainase di Lingkungan Hunian Padamara di beberapa wilayah belum berfungsi optimal, karena sebagian tersumbat oleh sampah. Hal ini dapat dilihat dari munculnya genangan di beberapa wilayah terutama saat hujan. Selain itu beberapa sungai yang ada di Lingkungan Hunian Padamara mengalami pendangkalan.

Jaringan drainase di Lingkungan Hunian Padamara terdiri dari jaringan drainase primer, drainase sekunder, dan jaringan drainase tersier. Saluran primer adalah saluran yang menerima masukan aliran dari saluran-saluran sekunder, dimana aliran dari saluran primer ini langsung dialirkan ke badan air, yaitu berupa sungai. Saluran sekunder adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran dari saluran-saluran tersier dan meneruskan aliran ke saluran primer. Sedangkan saluran tersier adalah saluran yang menerima aliran air langsung dari saluran-saluran pembuangan rumah, umumnya saluran tersier ini adalah saluran kiri kanan jalan perumahan.

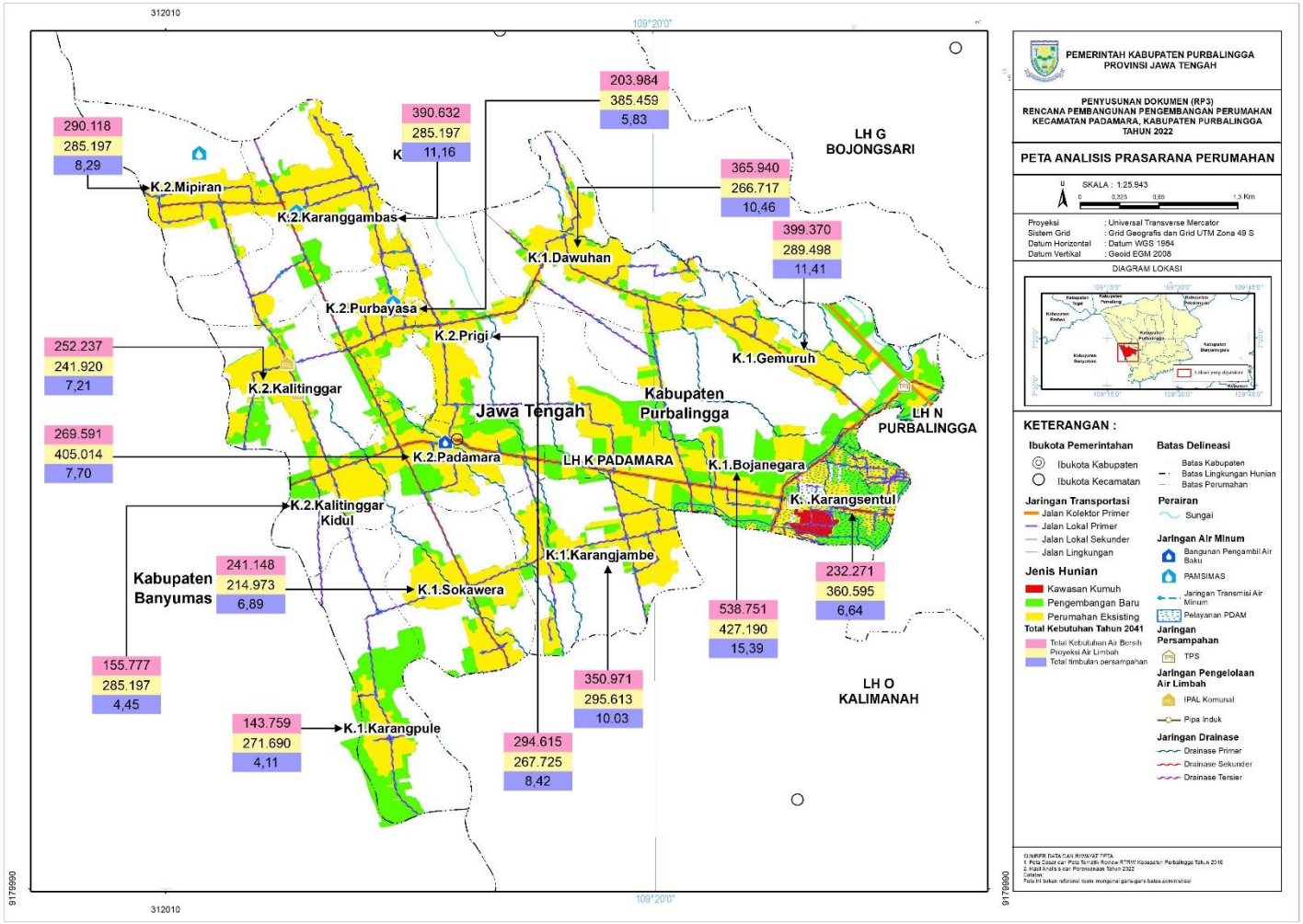
Penanganan drainase selama ini masih belum menyentuh drainase yang berbasis lingkungan. Drainase yang telah terbangun sementara hanya difungsikan sebagai

pengering jalan badan jalan. Adapun penanganan drainase lingkungan dilaksanakan secara gotong royong tanpa adanya perencanaan yang kongkrit. Melihat kondisi tersebut, maka kebutuhan akan perda tentang pengelolaan drainase lingkungan sangat diperlukan dalam rangka meraih komitmen semua stakeholder tentang pentingnya pengelolaan drainase lingkungan.

Dari adanya permasalahan drainase pada kondisi eksisting, perlu adanya kegiatan penanganan khusus untuk mengoptimalkan drainase di perkotaan. Pengembangan sistem drainase disusun untuk meningkatkan pelayanan sistem drainase dan keterpaduan sistem drainase. Kebutuhan pengembangan dan keterpaduan sistem drainase dapat mengacu pada Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Drainase Perkotaan. Dimana kebutuhan sistem drainase terpadu dapat ditinjau dari beberapa tahapan dan aspek, seperti topografi, hidrologi, tataguna tanah, debit rencana masing-masing saluran, hingga penetapan garis sempadan.

6. Sistem Proteksi Kebakaran

Berdasarkan Permen PU Nomor 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknik Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, terdapat beberapa kebutuhan untuk penanganan sistem proteksi kebakaran yang terpadu, diantaranya adalah sarana penyelamatan, sistem proteksi pasif, sistem proteksi aktif. Dimana dalam pemenuhan kebutuhan sistem proteksi kebakaran yang terpadu, pemerintah daerah ataupun instansi teknis yang berwenang dapat merencanakan sistem proteksi kebakaran dengan beberapa komponen yang dibutuhkan, seperti rencana tapak, seluruh sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif kebakaran, serta sarana menuju jalan ke luar yang aman.



Gambar 4.33.
Peta Analisis Prasarana Perumahan di Lingkungan Hunian Padamara

B. Sarana

1. Sarana Pemerintahan

Sarana pemerintahan yang terdapat di Lingkungan Hunian Padamara meliputi balai desa, balai kelurahan, kantor desa, dan kantor kelurahan. Sarana pemerintahan yang terdapat di Lingkungan Hunian Padamara berupa balai desa, balai kelurahan, kantor desa, dan kantor kelurahan. Jumlah kelurahan di Lingkungan Hunian Padamara berjumlah 1 kelurahan, sedangan sisanya adalah desa. Perlunya penambahan kebutuhan sarana pemerintahan di Lingkungan Hunian Padamara untuk meningkatkan keterpaduan antar hirarki sarana pemerintahan yang dapat berupa balai pertemuan.

2. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di Lingkungan Hunian Padamara terdiri dari sekolah dasar (SD) sederajat, sekolah menengah pertama (SMP) sederajat, sekolah menengah akhir (SMA) sederajat, dan perguruan tinggi.

Permasalahan sarana pendidikan di Lingkungan Hunian Padamara yaitu masih minimnya jumlah sarana pendidikan. Tentunya sarana pendidikan diperlukan pada suatu wilayah. Maka dari itu perlunya penambahan sarana pendidikan berupa SD hingga perguruan tinggi di Lingkungan Hunian Padamara agar dapat menjangkau ke seluruh wilayah dan tidak terpusat di pusat perkotaan saja.

Proyeksi kebutuhan sarana pendidikan pada tahun 2041 di Lingkungan Hunian Padamara diperlukan untuk mengembangkan keterpaduan antar hirarki sarana pendidikan. Terlebih lagi saat ini di Indonesia mewajibkan wajib belajar 12 tahun bagi penduduknya. Kebutuhan sarana pendidikan di Lingkungan Hunian Padamara tahun 2041 berupa SD sebanyak 16 unit, SMP sebanyak 7 unit, dan SMA sebanyak 5 unit. Perlunya penambahan sarana pendidikan ini agar kebutuhan pendidikan masyarakat Lingkungan Hunian Padamara dapat terpenuhi.

Tabel IV.109.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	TK			SD				SMP			
			Jumlah Eksisting	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Karangpule	1.711	1	1	0	1	1.200	1	0	0	4.800	0	0
2	Kalitinggar	3.003	1	1	0	2	1.200	3	1	0	4.800	1	1
3	Sokawera	2.871	2	1	-1	2	1.200	2	0	0	4.800	1	1
4	Padamara	3.209	2	1	-1	2	1.200	3	1	1	4.800	1	0
5	Karangjambe	4.178	1	1	0	2	1.200	3	1	0	4.800	1	1
6	Bojanegara	6.414	2	1	-1	2	1.200	5	3	1	4.800	1	0
7	Karangsentul	2.765	1	1	0	2	1.200	2	0	0	4.800	1	1
8	Gemuruh	4.754	1	1	0	2	1.200	4	2	0	4.800	1	1
9	Dawuhan	4.356	2	1	-1	2	1.200	4	2	1	4.800	1	0
10	Prigi	3.507	1	1	0	1	1.200	3	2	0	4.800	1	1
11	Purbayasa	2.428	1	1	0	2	1.200	2	0	0	4.800	1	1
12	Karanggambas	4.650	1	1	0	3	1.200	4	1	0	4.800	1	1
13	Mipiran	3.454	1	1	0	1	1.200	3	2	0	4.800	1	1
14	Kalitinggar Kidul	1.854	0	1	1	1	1.200	2	1	0	4.800	0	0
Jumlah		49.157	17	14	-3	25		41	16	3		10	7

Lanjutan…

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	SMA				PT			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Karangpule	1.711	0	6.000	0	0	0	70.000	0	0
2	Kalitinggar	3.003	0	6.000	1	1	0	70.000	0	0
3	Sokawera	2.871	0	6.000	0	0	0	70.000	0	0
4	Padamara	3.209	1	6.000	1	0	0	70.000	0	0
5	Karangjambe	4.178	0	6.000	1	1	0	70.000	0	0

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	SMA				PT			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
6	Bojanegara	6.414	1	6.000	1	0	0	70.000	0	0
7	Karangsentul	2.765	0	6.000	0	0	1	70.000	0	-1
8	Gemuruh	4.754	1	6.000	1	0	0	70.000	0	0
9	Dawuhan	4.356	0	6.000	1	1	0	70.000	0	0
10	Prigi	3.507	0	6.000	1	1	0	70.000	0	0
11	Purbayasa	2.428	0	6.000	0	0	0	70.000	0	0
12	Karanggambas	4.650	0	6.000	1	1	0	70.000	0	0
13	Mipiran	3.454	0	6.000	1	1	0	70.000	0	0
14	Kalitinggar Kidul	1.854	0	6.000	0	0	0	70.000	0	0
Jumlah		49.157	3		8	5	1		1	0

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

3. Sarana Peribadatan

Mayoritas sarana peribadatan yang terdapat di Lingkungan Hunian Padamara adalah masjid dan mushola. Sebaran masjid dan mushola sudah menjangkau ketersediaannya di seluruh wilayah di Lingkungan Hunian Padamara.

Proyeksi kebutuhan sarana peribadatan di Lingkungan Hunian Padamara pada tahun 2041 berupa 82 unit mushola. Meskipun pada kondisi eksisting di Lingkungan Hunian Padamara ketersediaan mushola dapat dikatakan banyak, tetapi kebutuhan mushola harus disesuaikan setiap perumahan. Tidak hanya memerlukan penambahan kebutuhan mushola dan masjid, perlunya penambahan sarana peribadatan lain agar keterpaduan sarana peribadatan di Lingkungan Hunian Padamara dapat berlangsung.

Tabel IV.110.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Masjid				Musholla			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Karangpule	1.711	1	2.500	1	0	6	250	7	1
2	Kalitinggar	3.003	1	2.500	1	0	11	250	12	1
3	Sokawera	2.871	3	2.500	1	-2	5	250	11	6
4	Padamara	3.209	3	2.500	1	-2	11	250	13	2
5	Karangjambe	4.178	2	2.500	2	0	7	250	17	10
6	Bojanegara	6.414	3	2.500	3	0	12	250	26	14
7	Karangsentul	2.765	4	2.500	1	-3	8	250	11	3
8	Gemuruh	4.754	2	2.500	2	0	10	250	19	9
9	Dawuhan	4.356	4	2.500	2	-2	6	250	17	11
10	Prigi	3.507	1	2.500	1	0	6	250	14	8
11	Purbayasa	2.428	2	2.500	1	-1	7	250	10	3
12	Karanggambas	4.650	3	2.500	2	-1	13	250	19	6
13	Mipiran	3.454	2	2.500	1	-1	7	250	14	7
14	Kalitinggar Kidul	1.854	1	2.500	1	0	6	250	7	1
Jumlah		49.157	32	2.500	20	-12	115	250	197	82

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

4. Sarana Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan di Lingkungan Hunian Padamara terdiri dari rumah sakit, puskesmas, klinik, puskesmas pembantu, praktek dokter, dan apotek. Dimana sebaran sarana kesehatan yang dapat menjangkau seluruh wilayah Lingkungan Hunian Padamara hanya berupa klinik, praktek dokter, dan apotek. Kebutuhan sarana kesehatan di Lingkungan Hunian Padamara perlu diadakan penambahan sarana agar dapat menciptakan keterpaduan antar hirarki sarana kesehatan. Proyeksi kebutuhan sarana kesehatan di Lingkungan Hunian Padamara pada tahun 2041 yaitu berupa praktek dokter sebanyak 6 unit. Sementara itu, kebutuhan rumah sakit dan puskesmas sudah dapat menjangkau pelayanan kesehatan di Lingkungan Hunian Padamara hingga tahun 2041. Namun, seiring dengan pertambahan penduduk maka nantinya akan diperlukan penambahan sarana kesehatan baik berupa rumah sakit maupun klinik, agar dapat menjangkau dan melayani penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan.

Tabel IV.111.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rumah Sakit				Puskesmas			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Karangpule	1.711	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
2	Kalitinggar	3.003	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
3	Sokawera	2.871	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
4	Padamara	3.209	0	120.000	0	0	1	120.000	0	-1
5	Karangjambe	4.178	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
6	Bojanegara	6.414	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
7	Karangsentul	2.765	1	120.000	0	-1	0	120.000	0	0
8	Gemuruh	4.754	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
9	Dawuhan	4.356	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
10	Prigi	3.507	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
11	Purbayasa	2.428	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
12	Karanggambas	4.650	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
13	Mipiran	3.454	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
14	Kalitinggar Kidul	1.854	0	120.000	0	0	0	120.000	0	0
Jumlah		49.157	1	120.000	0	-1	1	120.000	0	-1

Lanjutan…

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Poliklinik				Puskesmas Pembantu			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Karangpule	1.711	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
2	Kalitinggar	3.003	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
3	Sokawera	2.871	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
4	Padamara	3.209	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
5	Karangjambe	4.178	0	30.000	0	0	1	30.000	0	-1
6	Bojanegara	6.414	2	30.000	0	-2	0	30.000	0	0
7	Karangsentul	2.765	0	30.000	0	0	1	30.000	0	-1

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Poliklinik				Puskesmas Pembantu			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
8	Gemuruh	4.754	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
9	Dawuhan	4.356	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
10	Prigi	3.507	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
11	Purbayasa	2.428	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
12	Karanggambas	4.650	0	30.000	0	0	1	30.000	0	-1
13	Mipiran	3.454	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
14	Kalitinggar Kidul	1.854	0	30.000	0	0	0	30.000	0	0
Jumlah		49.157	2	30.000	0	-2	3	30.000	2	-1

Lanjutan…

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Praktik Dokter				Apotek			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Karangpule	1.711	0	5.000	0	0	0	30.000	0	0
2	Kalitinggar	3.003	0	5.000	1	1	0	30.000	0	0
3	Sokawera	2.871	0	5.000	1	1	0	30.000	0	0
4	Padamara	3.209	0	5.000	1	1	2	30.000	0	-2
5	Karangjambe	4.178	0	5.000	1	1	1	30.000	0	-1
6	Bojanegara	6.414	3	5.000	1	-2	1	30.000	0	-1
7	Karangsentul	2.765	1	5.000	1	0	1	30.000	0	-1
8	Gemuruh	4.754	0	5.000	1	1	0	30.000	0	0
9	Dawuhan	4.356	0	5.000	1	1	0	30.000	0	0
10	Prigi	3.507	0	5.000	1	1	0	30.000	0	0
11	Purbayasa	2.428	0	5.000	0	0	0	30.000	0	0
12	Karanggambas	4.650	0	5.000	1	1	0	30.000	0	0
13	Mipiran	3.454	0	5.000	1	1	1	30.000	0	-1
14	Kalitinggar Kidul	1.854	0	5.000	0	0	0	30.000	0	0
Jumlah		49.157	4	5.000	10	6	6	30.000	2	-4

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

5. Sarana Perdagangan dan Jasa

Sarana perdagangan yang terdapat di Lingkungan Hunian Padamara tahun 2020 berupa pasar, pertokoan, dan toko/warung. Jika dilihat dari cakupan pelayanannya, sarana perdagangan di Lingkungan Hunian Padamara terutama pasar sudah cukup melayani dan menjangkau pelayanannya ke seluruh wilayah. Dari adanya ketersediaan sarana perdagangan tersebut, pemerintah maupun masyarakat dapat mengembangkan sarana perdagangan agar lebih optimal, seperti penambahan jaringan persampahan disekitar pasar ataupun pengadaan ruang terbuka hijau agar terdapat sirkulasi udara yang baik dalam pasar tersebut.

Selain tersedianya pasar, di Lingkungan Hunian Padamara saat ini sudah cukup melayani dan menjangkau pelayanannya untuk kebutuhan sarana perdagangan lain seperti pertokoan dan toko/warung. Hal ini diharapkan ketersediaan toko dapat melayani setiap lingkungan permukiman, agar kebutuhan penduduk sehari-hari dapat terpenuhi walaupun akses dari tempat tinggal ke pasar atau toko swalayan terlalu jauh.

Tabel IV.112.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2041

No	Jenis	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Pasar	49.157	5	30.000	2	-3
2	Pertokoan	49.157	20	6.000	8	-12
3	Toko/ Warung	49.157	305	250	197	-108

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

6. Sarana Kebudayaan dan Rekreasi

Kebudayaan di Lingkungan Hunian Padamara beraneka ragam, meliputi ujungan, suran, begalan, angguk, aplang/ dames, calung, ebeg/ kuda lumping, lengger, dan lainnya. Kebudayaan tersebut di dukung oleh beberapa organisasi kesenian yang terdapat di Lingkungan Hunian Padamara.

Beragamnya sarana kebudayaan dan rekreasi di Lingkungan Hunian Padamara menjadikan banyaknya faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mendukung kebudayaan dan rekreasi. Jika faktor pendukung kebudayaan dan rekreasi tersebut tidak dapat dipenuhi, maka akan timbul permasalahan. Permasalahan pada sarana kebudayaan dan rekreasi di Lingkungan Hunian Padamara seperti aksesibilitas menuju tempat wisata yang belum memadai, kurangnya dukungan infrastruktur seperti jalan, parkir, terminal, drainase, dan persampahan serta minimnya sarana penginapan untuk pengunjung atau wisatawan luar kabupaten. Maka dari itu isu strategis pada sarana kebudayaan dan rekreasi di Lingkungan Hunian Padamara yaitu belum optimalnya sistem kepariwisataan.

Selain ketersediaan sarana kebudayaan dan rekreasi yang telah terdapat di Lingkungan Hunian Padamara, perlunya kebutuhan sarana kebudayaan berupa balai warga, balai serbaguna, dan gedung serbaguna untuk mendukung sarana kebudayaan dan rekreasi yang terpadu. Hal ini dikarenakan pentingnya balai warga sebagai tempat berkumpul untuk mengadakan kegiatan-kegiatan umum pada cakupan lingkungan

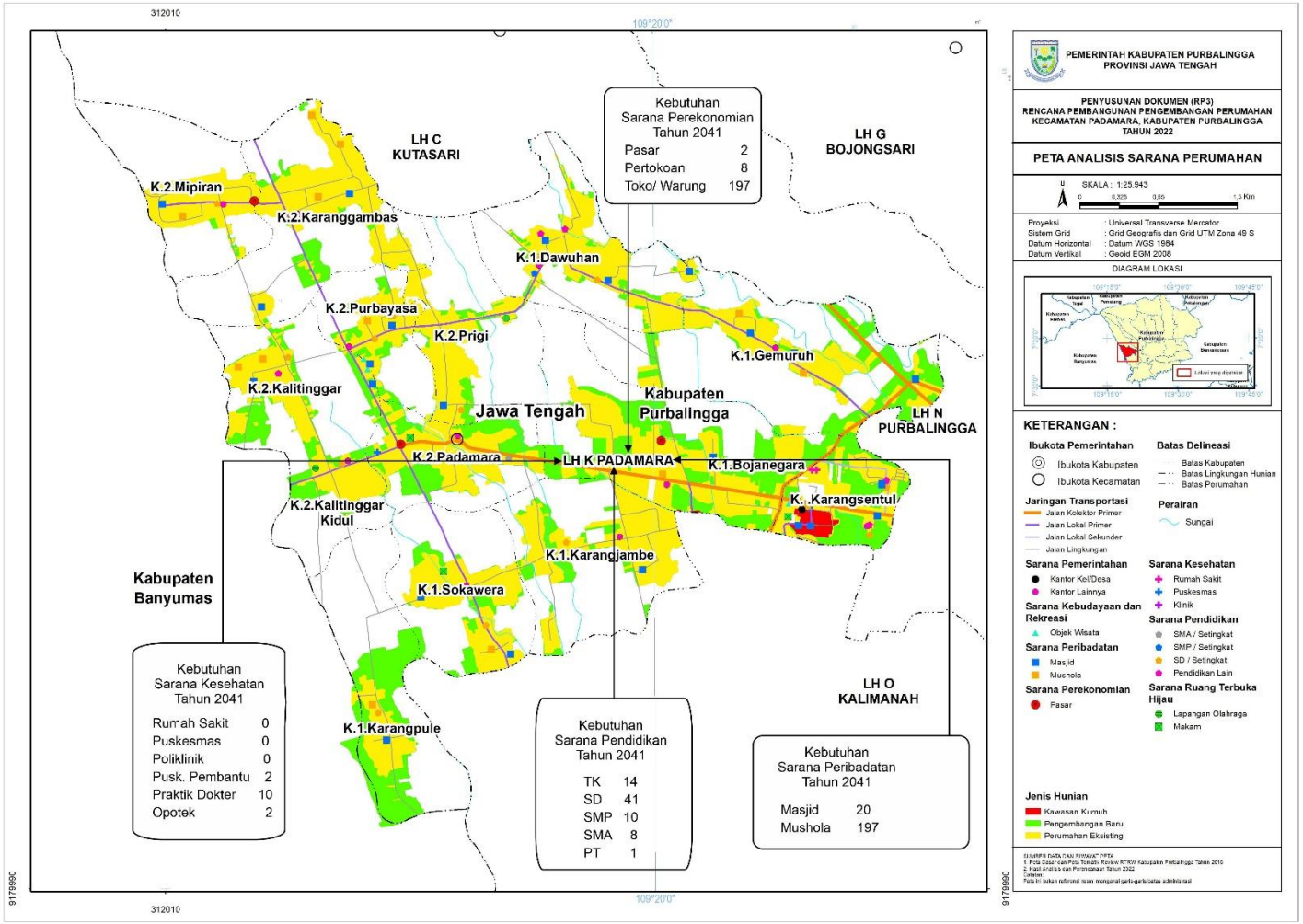
permukiman. Sementara itu, kebutuhan balai serbaguna juga untuk mendukung kegiatan masyarakat yang umumnya bersifat komersial ataupun kepentingan umum.

7. Sarana Ruang Terbuka Hijau

Sarana ruang terbuka hijau sangat penting bagi penghijauan dan sirkulasi suatu kota/ kawasan. Namun saat ini umumnya mayoritas wilayah banyak lahan RTH yang dialihfungsikan menjadi lahan terbangun untuk meningkatkan perekonomian wilayahnya. Sama halnya pada permasalahan RTH di Lingkungan Hunian Padamara yang berubah fungsi menjadi kawasan perekonomian dan ruang komersial lainnya. Akibatnya banyak lahan RTH yang berkurang luasannya. Maka dari itu perlunya penambahan proporsi RTH agar terpenuhi 30% untuk seluruh wilayah.

Sarana ruang terbuka hijau yang terdapat di Lingkungan Hunian Padamara meliputi ruang terbuka hijau perkotaan, ruang terbuka hijau jalur hijau jalan, dan ruang terbuka hijau fungsi tertentu. Ruang terbuka hijau perkotaan di Lingkungan Hunian Padamara berupa taman kota dan hutan kota.

Selain untuk mendukung pengoptimalan proporsi RTH sebesar 30%, perlunya penambahan kebutuhan sarana RTH berupa taman lingkungan untuk mendukung keterpaduan antar hirarki sarana RTH. Hal ini dikarenakan, kebutuhan taman lingkungan harus disesuaikan dengan cakupan lingkungan permukiman.



Gambar 4.34.
Peta Analisis Sarana Perumahan di Lingkungan Hunian Padamara

C. Utilitas

Jangkauan pelayanan jaringan listrik yang disediakan oleh PLN di Lingkungan Hunian Padamara sudah mampu melayani hingga cakupan penduduk kabupaten. Dimana setiap penduduk kecamatan sudah menjadi pelanggan dari adanya listrik PLN.

Selain ketersediaan jaringan listrik eksisting, perlu adanya penambahan kebutuhan listrik domestik dan non domestik agar menciptakan keterpaduan antar hirarki jaringan listrik. Proyeksi kebutuhan listrik di Lingkungan Hunian Padamara pada tahun 2041 sebesar 29.494.023 KVA terdiri dari kebutuhan listrik domestik sebesar 14.747.012 KVA dan kebutuhan listrik non domestik sebesar 14.747.012 KVA. Kebutuhan listrik domestik ini untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sedangkan, kebutuhan listrik non domestik di Lingkungan Hunian Padamara berupa industri, fasilitas umum, penerangan jalan, dan cadangan.

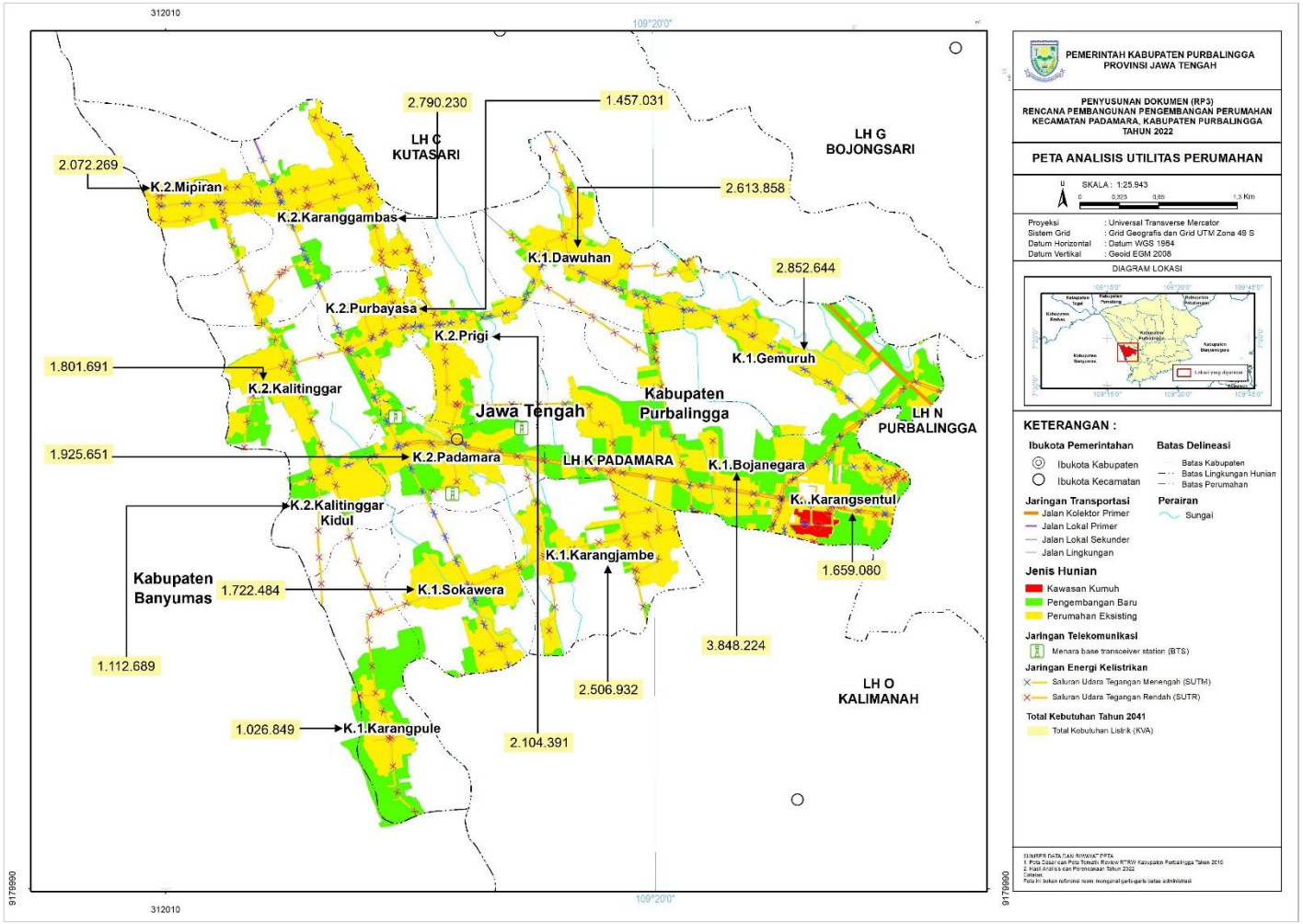
Permasalahan jaringan telekomunikasi di Lingkungan Hunian Padamara masih terdapat beberapa daerahwilayah yang tidak dijangkau oleh layanan sinyal seluler, sehingga daerah tersebut dapat disebut *blank spot*. Hal ini dikarenakan belum meratanya persebaran Menara BTS di beberapa daerah, terutama daerah yang terpecil atau daerah perbukitan yang aksesibilitasnya terhambat oleh kemiringan lereng. Maka dari itu perlunya penambahan dan pemerataan jangkauan Menara BTS di Lingkungan Hunian Padamara, agar masyarakat dapat terlayani dengan sinyal seluler. Terlebih lagi pada zaman dengan teknologi yang berkembang pesat, menjadikan internet sebagai kebutuhan primer saat ini.

Sebaran dan ketersediaan Menara telekomunikasi di Lingkungan Hunian Padamara sudah memadai dan merata. Namun, masih terdapat beberapa wilayah yang minim dalam pengadaan Menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi jarang ditemukan di Lingkungan Hunian Padamara. Namun, pada saat ini kebutuhan akan telekomunikasi maupun jaringan seluler tidak hanya dibutuhkan pada pusat kota saja, tetapi pada wilayah terpencil juga sangat dibutuhkan. Untuk itu perlunya penambahan Menara telekomunikasi agar tidak terjadi *blank spot* sinyal seluler di wilayah tertentu.

Tabel IV.113.
Proyeksi Kebutuhan Jaringan Listrik Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah KK	Domestik	Non Domestik				Total Kebutuhan Listrik (KVA)
				Industri 25% x Domestik	Fasilitas 25% x Domestik	Penerangan Jalan 40% x Domestik	Cadangan 10% x Domestik	
1	Karangpule	570	513.424	128.356	128.356	205.370	51.342	1.026.849
2	Kalitinggar	1.001	900.846	225.211	225.211	360.338	90.085	1.801.691
3	Sokawera	957	861.242	215.310	215.310	344.497	86.124	1.722.484
4	Padamara	1.070	962.825	240.706	240.706	385.130	96.283	1.925.651
5	Karangjambe	1.393	1.253.466	313.367	313.367	501.386	125.347	2.506.932
6	Bojanegara	2.138	1.924.112	481.028	481.028	769.645	192.411	3.848.224
7	Karangsentul	922	829.540	207.385	207.385	331.816	82.954	1.659.080
8	Gemuruh	1.585	1.426.322	356.581	356.581	570.529	142.632	2.852.644
9	Dawuhan	1.452	1.306.929	326.732	326.732	522.772	130.693	2.613.858
10	Prigi	1.169	1.052.195	263.049	263.049	420.878	105.220	2.104.391
11	Purbayasa	809	728.516	182.129	182.129	291.406	72.852	1.457.031
12	Karanggambas	1.550	1.395.115	348.779	348.779	558.046	139.511	2.790.230
13	Mipiran	1.151	1.036.134	259.034	259.034	414.454	103.613	2.072.269
14	Kalitinggar Kidul	618	556.345	139.086	139.086	222.538	55.634	1.112.689
Jumlah		16.386	14.747.012	3.686.753	3.686.753	5.898.805	1.474.701	29.494.023

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022



Gambar 4.35.
Peta Analisis Utilitas Perumahan di Lingkungan Hunian Padamara

4.7.1.4. Lingkungan Hunian Bojongsari

A. Prasarana

1. Jaringan Jalan

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 mengatur jalan menurut statusnya yaitu jalan umum dikelompokan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Insfrastruktur jalan yang terdapat di Lingkungan Hunian Bojongsari terdiri atas fungsi jalan kabupaten. Fungsi jalan atau status jalan tersebut memiliki jenis permukaan jalan berupa aspal/ beton dan dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Kondisi fisik jalan di Lingkungan Hunian Bojongsari sebagian besar dalam kondisi baik. Akan tetapi terdapat jalan berlubang dan terdapat genangan saat terjadi hujan. Penyebab kerusakan jaringan jalan dapat diakibatkan oleh cuaca, seperti intensitas hujan yang ekstrem, waktu atau umur perkerasan jalan yang sudah tua, maupun beban lalu lintas yang tidak sesuai dengan badan jalan.

Dari adanya kebutuhan penanganan terkait pembuatan jalan baru, penyesuaian kekuatan struktur jalan, dan penyesuaian lebar jalan diperlukan analisis program/ kegiatan peningkatan jalan eksisting yang dilakukan dengan menghitung kebutuhan peningkatan jalan pada ruas jalan yang memiliki derajat kejenuhan yang tinggi. Sedangkan untuk pembangunan jalan baru, analisis yang perlu dilakukan nantinya mengacu pada kebutuhan pengembangan jalan baru sesuai arahan dan rencana pengembangan lingkungan hunian.

2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pelayanan sumber air atau air minum sudah terlayani sumber air oleh PDAM dengan menggunakan ledeng/ meteran. Wilayah perdesaan atau bagian utara Lingkungan Hunian Bojongsari menggunakan sistem air bersih perpipaan yang bersumber dari PAMSIMAS. Terdapat juga wilayah yang menggunakan sumur di Lingkungan Hunian Bojongsari. Kebutuhan air bersih di Lingkungan Hunian Bojongsari tahun 2020 mencapai 5.299.980 liter/hari. Pelayanan air bersih tersebut menjangkau 63.095 jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan penyediaan air minum. Oleh karena itu diperlukan proyeksi kebutuhan jaringan prasarana di masa yang akan datang untuk melakukan perencanaan terkait jaringan prasarana yang efisien. Kebutuhan air minum di Lingkungan Hunian Bojongsari terus bertambah hingga pada tahun 2041 dengan total kebutuhan air minum sebesar 5.619.520 liter/hari. Dalam mengidentifikasi dan mengembangkan sistem penyediaan air minum di Lingkungan Hunian Bojongsari terdiri dari kebutuhan domestik, kebutuhan non domestik (industri, fasilitas umum, dan hidran), serta kebocoran. Dimana kebutuhan domestik tahun 2041 pada sambungan rumah lebih banyak digunakan di Lingkungan Hunian Bojongsari, yaitu sebesar 4.013.943 liter/hari dibanding dengan kebutuhan non domestik. Sedangkan, kebutuhan non domestik di Lingkungan Hunian Bojongsari sebesar 802.789 liter/hari.

Tabel IV.114.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Domestik		Industri		Fasum		Hidran		Kebocoran		Total Kebutuhan
			Standar	Kebutuhan	Standar	Kebutuhan	Standar	Kebutuhan	Standar	Kebutuhan	Standar	Kebocoran	
1	Brobot	4.243	60 lt/ jiwa/ hari	254.556	10 % dari Domestik	25.456	5 % dari Domestik	12.728	5 % dari Domestik	12.728	20 % dari Domestik	50.911	356.379
2	Gembong	3.842		230.502		23.050		11.525		11.525		46.100	322.703
3	Galuh	3.335		200.124		20.012		10.006		10.006		40.025	280.174
4	Banjaran	6.422		385.313		38.531		19.266		19.266		77.063	539.438
5	Patemon	4.803		288.175		28.817		14.409		14.409		57.635	403.445
6	Bojongsari	6.660		399.617		39.962		19.981		19.981		79.923	559.464
7	Kajongan	5.709		342.566		34.257		17.128		17.128		68.513	479.593
8	Karangbanjar	4.588		275.280		27.528		13.764		13.764		55.056	385.391
9	Beji	4.252		255.142		25.514		12.757		12.757		51.028	357.199
10	Pagedangan	4.133		247.983		24.798		12.399		12.399		49.597	347.177
11	Pekalongan	6.074		364.442		36.444		18.222		18.222		72.888	510.218
12	Matenggeng	4.544		272.653		27.265		13.633		13.633		54.531	381.714
13	Bumisari	8.293		497.589		49.759		24.879		24.879		99.518	696.624
Jumlah		66.899		4.013.943		401.394		200.697		200.697		802.789	5.619.520

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Air limbah domestik yang terdapat di Lingkungan Hunian Bojongsari berasal dari air cucian, mandi dan dapur (*grey water*). Rantai layanan pengolahan air limbah domestik pada Lingkungan Hunian Bojongsari belum melakukan sistem pengolahan air limbah domestik secara terpusat (SPALD-T), akan tetapi sudah melakukan sistem pengolahan air limbah domestik secara setempat (SPALD-S). Rata-rata rumah tangga masih menggunakan pengelolaan sistem setempat (*onsite sistem*) yaitu membuang limbah rumah tangga langsung ke saluran drainase atau di sekitar rumah, dan permukiman yang berdekatan dengan sungai membuang air limbah langsung ke sungai.

Dari adanya sistem pengolahan air limbah domestik yang belum memadai dan terpadu, diperlukan proyeksi kebutuhan sistem pengolahan air limbah domestik di Lingkungan Hunian Bojongsari hingga 20 tahun mendatang. Proyeksi air limbah yang dihasilkan di Lingkungan Hunian Bojongsari pada tahun 2041 mencapai 4.495.616 liter/hari. Hal tersebut maka diperlukan sarana penampungan dan pengolahan tinja, perlunya keterpaduan antara sarana sanitasi tersebut agar menciptakan praktik sanitasi yang terpadu dan tidak mencemari lingkungan.

Tabel IV.115.
Proyeksi Air Limbah di Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Total Kebutuhan	Standar	Proyeksi Air Limbah
1	Brobot	4.243	356.379	80 % dari Air Bersih	285.103
2	Gembong	3.842	322.703		258.163
3	Galuh	3.335	280.174		224.139
4	Banjaran	6.422	539.438		431.551
5	Patemon	4.803	403.445		322.756
6	Bojongsari	6.660	559.464		447.571
7	Kajongan	5.709	479.593		383.674
8	Karangbanjar	4.588	385.391		308.313
9	Beji	4.252	357.199		285.759
10	Pagedangan	4.133	347.177		277.741
11	Pekalongan	6.074	510.218		408.175
12	Matenggeng	4.544	381.714		305.371
13	Bumisari	8.293	696.624		557.300
Jumlah		66.899	5.619.520		4.495.616

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

4. Sistem Persampahan

Kabupaten Purbalingga berada memiliki satu tempat pemrosesan akhir (TPA) persampahan yang berlokasi di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan. Lingkungan Hunian Bojongsari memiliki prasarana pengurangan persampahan yaitu berupa TPS sebanyak 1 unit dan Bank Sampah sebanyak 1 unit.

Pada umumnya jaringan persampahan di Lingkungan Hunian Bojongsari sudah memadai dan melayani setiap penduduk. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase, tegalan, maupun di sungai. Sehingga adanya jaringan persampahan tersebut dirasa kurang optimal, karena mayoritas masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Maka dari itu perlunya peningkatan kesadaran

masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, serta perluasan jangkauan pelayanan pengangkutan sampah, baik dari pemerintah maupun secara swadaya. Berikut ini merupakan proyeksi timbulan sampah di Lingkungan Hunian Bojongsari tahun 2041 berdasarkan analisis perhitungan SNI.

Tabel IV.116.
Proyeksi Timbulan Sampah Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah Domestik (m3)	Timbulan Sampah Non Domestik (m3)	Total Timbulan Sampah
1	Brobot	4.243	8,49	1,70	10,18
2	Gembong	3.842	7,68	1,54	9,22
3	Galuh	3.335	6,67	1,33	8,00
4	Banjaran	6.422	12,84	2,57	15,41
5	Patemon	4.803	9,61	1,92	11,53
6	Bojongsari	6.660	13,32	2,66	15,98
7	Kajongan	5.709	11,42	2,28	13,70
8	Karangbanjar	4.588	9,18	1,84	11,01
9	Beji	4.252	8,50	1,70	10,21
10	Pagedangan	4.133	8,27	1,65	9,92
11	Pekalongan	6.074	12,15	2,43	14,58
12	Matenggeng	4.544	9,09	1,82	10,91
13	Bumisari	8.293	16,59	3,32	19,90

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

5. Jaringan Drainase

Jaringan drainase di Lingkungan Hunian Bojongsari terdiri dari jaringan drainase primer berupa sungai, drainase sekunder berupa drainase di jalan utama, dan jaringan drainase tersier di lingkungan permukiman. Jaringan drainase di Lingkungan Hunian Bojongsari berupa drainase terbuka dan drainase tertutup. Jaringan drainase di Lingkungan Hunian Bojongsari di beberapa wilayah belum berfungsi optimal, karena sebagian tersumbat oleh sampah. Hal ini dapat dilihat dari munculnya genangan di beberapa wilayah terutama saat hujan. Selain itu beberapa sungai yang ada di Lingkungan Hunian Bojongsari mengalami pendangkalan.

Jaringan drainase di Lingkungan Hunian Bojongsari terdiri dari jaringan drainase primer, drainase sekunder, dan jaringan drainase tersier. Saluran primer adalah saluran yang menerima masukan aliran dari saluran-saluran sekunder, dimana aliran dari saluran primer ini langsung dialirkan ke badan air, yaitu berupa sungai. Saluran sekunder adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran dari saluran-saluran tersier dan meneruskan aliran ke saluran primer. Sedangkan saluran tersier adalah saluran yang menerima aliran air langsung dari saluran-saluran pembuangan rumah, umumnya saluran tersier ini adalah saluran kiri kanan jalan perumahan.

Penanganan drainase selama ini masih belum menyentuh drainase yang berbasis lingkungan. Drainase yang telah terbangun sementara hanya difungsikan sebagai pengering jalan badan jalan. Adapun penanganan drainase lingkungan dilaksanakan secara gotong royong tanpa adanya perencanaan yang kongkrit. Melihat kondisi tersebut, maka kebutuhan akan perda tentang pengelolaan drainase lingkungan sangat diperlukan

dalam rangka meraih komitmen semua stakeholder tentang pentingnya pengelolaan drainase lingkungan.

Dengan melihat peta rawan banjir dari SSK Kabupaten Purbalingga 2021 dapat diketahui wilayah yang rawan terhadap banjir, dimana terdapat 2 perumahan yang berlokasi di daerah rawan banjir. Luas daerah rawan banjir yang terdapat di Lingkungan Hunian Bojongsari sebesar 149,63 Ha.

Tabel IV.117.
Sebaran Daerah Rawan Banjir Lingkungan Hunian Bojongsari

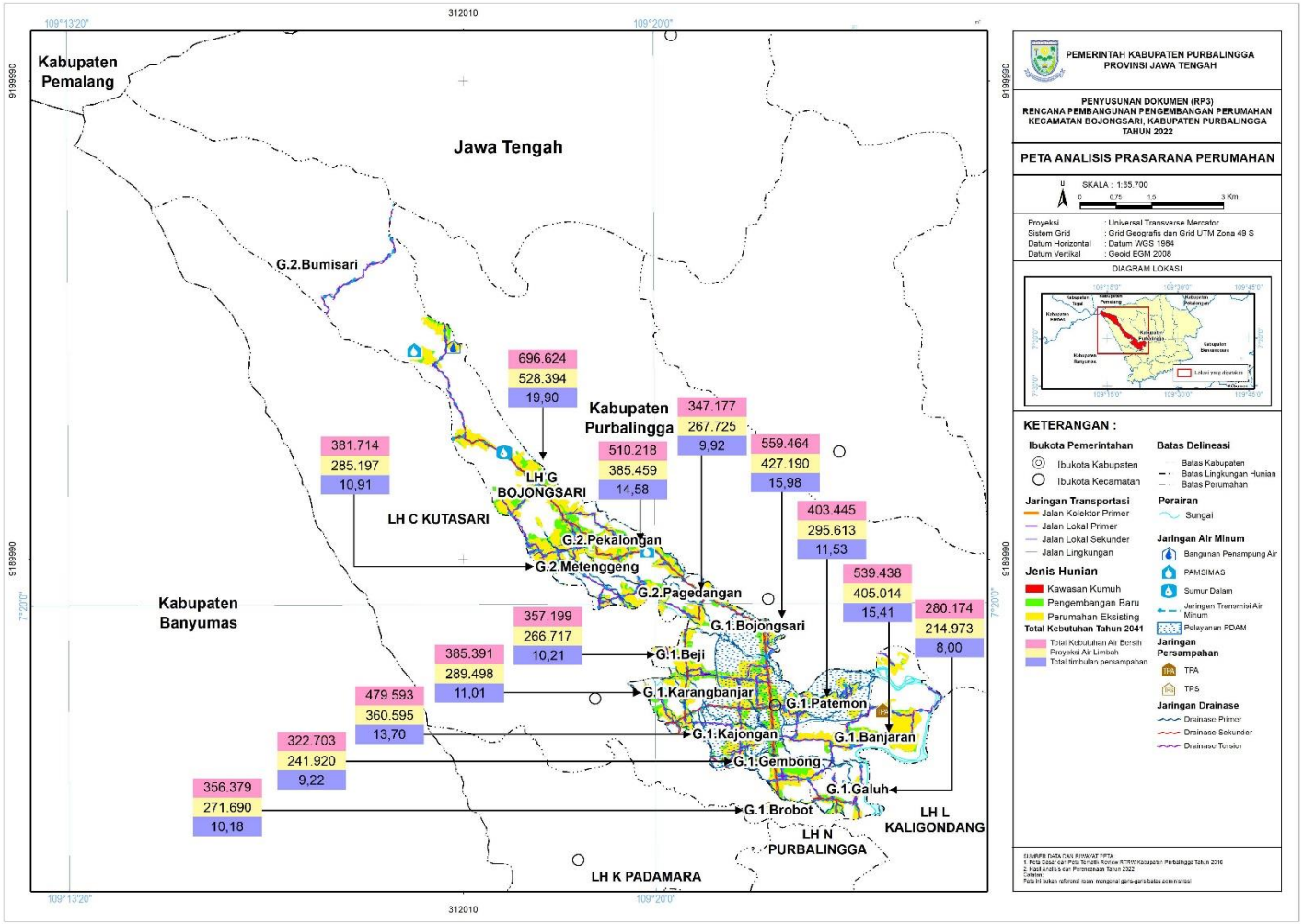
LH	Perumahan	Luas (Ha)
Bojongsari	Banjaran	116,6
	Galuh	33,03

Sumber: SSK Kabupaten Purbalingga, 2021

Dari adanya permasalahan drainase pada kondisi eksisting, perlu adanya kegiatan penanganan khusus untuk mengoptimalkan drainase di perkotaan. Pengembangan sistem drainase disusun untuk meningkatkan pelayanan sistem drainase dan keterpaduan sistem drainase. Kebutuhan pengembangan dan keterpaduan sistem drainase dapat mengacu pada Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Drainase Perkotaan. Dimana kebutuhan sistem drainase terpadu dapat ditinjau dari beberapa tahapan dan aspek, seperti topografi, hidrologi, tataguna tanah, debit rencana masing-masing saluran, hingga penetapan garis sempadan.

6. Sistem Proteksi Kebakaran

Berdasarkan Permen PU Nomor 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknik Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, terdapat beberapa kebutuhan untuk penanganan sistem proteksi kebakaran yang terpadu, diantaranya adalah sarana penyelamatan, sistem proteksi pasif, sistem proteksi aktif. Dimana dalam pemenuhan kebutuhan sistem proteksi kebakaran yang terpadu, pemerintah daerah ataupun instansi teknis yang berwenang dapat merencanakan sistem proteksi kebakaran dengan beberapa komponen yang dibutuhkan, seperti rencana tapak, seluruh sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif kebakaran, serta sarana menuju jalan ke luar yang aman.



Gambar 4.36.
Peta Analisis Prasarana Perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari

B. Sarana

1. Sarana Pemerintahan

Sarana pemerintahan yang terdapat di Lingkungan Hunian Bojongsari meliputi balai desa, balai kelurahan, kantor desa, dan kantor kelurahan. Sarana pemerintahan yang terdapat di Lingkungan Hunian Bojongsari berupa balai desa, balai kelurahan, kantor desa, dan kantor kelurahan. Seluruh wilayah di Lingkungan Hunian Bojongsari merupakan desa sejumlah 13 desa. Perlunya penambahan kebutuhan sarana pemerintahan di Lingkungan Hunian Bojongsari untuk meningkatkan keterpaduan antar hirarki sarana pemerintahan yang dapat berupa balai pertemuan.

2. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di Lingkungan Hunian Bojongsari terdiri dari sekolah dasar (SD) sederajat, sekolah menengah pertama (SMP) sederajat, dan sekolah menengah akhir (SMA) sederajat.

Permasalahan sarana pendidikan di Lingkungan Hunian Bojongsari yaitu masih minimnya jumlah sarana pendidikan. Tentunya sarana pendidikan diperlukan pada suatu wilayah. Maka dari itu perlunya penambahan sarana pendidikan berupa SD hingga perguruan tinggi di Lingkungan Hunian Bojongsari agar dapat menjangkau ke seluruh wilayah dan tidak terpusat di pusat perkotaan saja.

Proyeksi kebutuhan sarana pendidikan pada tahun 2041 di Lingkungan Hunian Bojongsari diperlukan untuk mengembangkan keterpaduan antar hirarki sarana pendidikan. Terlebih lagi saat ini di Indonesia mewajibkan wajib belajar 12 tahun bagi penduduknya. Kebutuhan sarana pendidikan di Lingkungan Hunian Bojongsari tahun 2041 berupa SD sebanyak 23 unit, SMP sebanyak 9 unit, dan SMA sebanyak 8 unit. Perlunya penambahan sarana pendidikan ini agar kebutuhan pendidikan masyarakat Lingkungan Hunian Bojongsari dapat terpenuhi.

Tabel IV.118.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	TK			SD			
			Jumlah Eksisting	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Brobot	4.243	2	1	-1	2	1.200	4	2
2	Gembong	3.842	2	1	-1	2	1.200	3	1
3	Galuh	3.335	2	1	-1	1	1.200	3	2
4	Banjaran	6.422	3	1	-2	4	1.200	5	1
5	Patemon	4.803	1	1	0	2	1.200	4	2
6	Bojongsari	6.660	1	1	0	3	1.200	6	3
7	Kajongan	5.709	3	1	-2	3	1.200	5	2
8	Karangbanjar	4.588	1	1	0	1	1.200	4	3
9	Beji	4.252	2	1	-1	2	1.200	4	2
10	Pagedangan	4.133	2	1	-1	3	1.200	3	0
11	Pekalongan	6.074	2	1	-1	3	1.200	5	2
12	Matenggeng	4.544	2	1	-1	3	1.200	4	1
13	Bumisari	8.293	1	1	0	4	1.200	7	3
Jumlah		66.899	24	13	-11	33		56	23

Lanjutan…

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	SMP				SMA			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Brobot	4.243	0	4.800	1	1	0	6.000	1	1
2	Gembong	3.842	1	4.800	1	0	0	6.000	1	1
3	Galuh	3.335	0	4.800	1	1	0	6.000	1	1
4	Banjaran	6.422	0	4.800	1	1	0	6.000	1	1
5	Patemon	4.803	0	4.800	1	1	0	6.000	1	1
6	Bojongsari	6.660	2	4.800	1	-1	1	6.000	1	0
7	Kajongan	5.709	0	4.800	1	1	0	6.000	1	1

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	SMP				SMA			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
8	Karangbanjar	4.588	0	4.800	1	1	0	6.000	1	1
9	Beji	4.252	1	4.800	1	0	2	6.000	1	-1
10	Pagedangan	4.133	0	4.800	1	1	0	6.000	1	1
11	Pekalongan	6.074	0	4.800	1	1	0	6.000	1	1
12	Matenggeng	4.544	1	4.800	1	0	0	6.000	1	1
13	Bumisari	8.293	0	4.800	2	2	0	6.000	1	1
Jumlah		66.899	5		14	9	3	6.000	11	8

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

3. Sarana Peribadatan

Mayoritas sarana peribadatan yang terdapat di Lingkungan Hunian Bojongsari adalah masjid dan mushola. Sebaran masjid dan mushola sudah menjangkau ketersediaannya di seluruh wilayah di Lingkungan Hunian Bojongsari.

Proyeksi kebutuhan sarana peribadatan di Lingkungan Hunian Bojongsari pada tahun 2041 berupa 67 unit mushola. Meskipun pada kondisi eksisting di Lingkungan Hunian Bojongsari ketersediaan mushola dapat dikatakan banyak, tetapi kebutuhan mushola harus disesuaikan setiap perumahan. Tidak hanya memerlukan penambahan kebutuhan mushola dan masjid, perlunya penambahan sarana peribadatan lain agar keterpaduan sarana peribadatan di Lingkungan Hunian Bojongsari dapat berlangsung.

Tabel IV.119.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Masjid				Musholla			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Brobot	4.243	6	2.500	2	-4	12	250	17	5
2	Gembong	3.842	3	2.500	2	-1	13	250	15	2
3	Galuh	3.335	3	2.500	1	-2	10	250	13	3
4	Banjaran	6.422	5	2.500	3	-2	28	250	26	-2
5	Patemon	4.803	6	2.500	2	-4	13	250	19	6
6	Bojongsari	6.660	7	2.500	3	-4	20	250	27	7
7	Kajongan	5.709	4	2.500	2	-2	19	250	23	4
8	Karangbanjar	4.588	7	2.500	2	-5	3	250	18	15
9	Beji	4.252	3	2.500	2	-1	13	250	17	4
10	Pagedangan	4.133	4	2.500	2	-2	8	250	17	9
11	Pekalongan	6.074	6	2.500	2	-4	23	250	24	1
12	Matenggeng	4.544	6	2.500	2	-4	14	250	18	4
13	Bumisari	8.293	8	2.500	3	-5	25	250	33	8
	Jumlah	66.899	68	2.500	27	-41	201	250	268	67

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

4. Sarana Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan di Lingkungan Hunian Bojongsari terdiri dari puskesmas, puskesmas pembantu, praktek dokter, dan apotek. Dimana sebaran sarana kesehatan yang dapat menjangkau seluruh wilayah Lingkungan Hunian Bojongsari hanya berupa praktek dokter dan apotek. Kebutuhan sarana kesehatan di Lingkungan Hunian Bojongsari perlu diadakan penambahan sarana agar dapat menciptakan keterpaduan antar hirarki sarana kesehatan. Proyeksi kebutuhan sarana kesehatan di Lingkungan Hunian Bojongsari pada tahun 2041 yaitu berupa praktek dokter sebanyak 8 unit. Sementara itu, kebutuhan rumah sakit dan puskesmas sudah dapat menjangkau pelayanan kesehatan di Lingkungan Hunian Bojongsari hingga tahun 2041. Namun, seiring dengan pertambahan penduduk maka nantinya akan diperlukan penambahan sarana kesehatan baik berupa rumah sakit maupun klinik, agar dapat menjangkau dan melayani penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan.

Tabel IV.120.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Puskesmas				Puskesmas Pembantu			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Brobot	4.243	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
2	Gembong	3.842	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
3	Galuh	3.335	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
4	Banjaran	6.422	0	120.000	0	0	1	30.000	0	-1
5	Patemon	4.803	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
6	Bojongsari	6.660	1	120.000	0	-1	0	30.000	0	0
7	Kajongan	5.709	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
8	Karangbanjar	4.588	0	120.000	0	0	1	30.000	0	-1
9	Beji	4.252	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
10	Pagedangan	4.133	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
11	Pekalongan	6.074	0	120.000	0	0	1	30.000	0	-1
12	Matenggeng	4.544	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
13	Bumisari	8.293	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
Jumlah		66.899	1	120.000	1	0	3	30.000	2	-1

Lanjutan…

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Praktik Dokter				Apotek			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Brobot	4.243	1	5.000	1	0	0	30.000	0	0
2	Gembong	3.842	2	5.000	1	-1	0	30.000	0	0
3	Galuh	3.335	0	5.000	1	1	0	30.000	0	0
4	Banjaran	6.422	0	5.000	1	1	0	30.000	0	0
5	Patemon	4.803	0	5.000	1	1	0	30.000	0	0

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Praktik Dokter				Apotek			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
6	Bojongsari	6.660	2	5.000	1	-1	3	30.000	0	-3
7	Kajongan	5.709	0	5.000	1	1	0	30.000	0	0
8	Karangbanjar	4.588	0	5.000	1	1	0	30.000	0	0
9	Beji	4.252	0	5.000	1	1	0	30.000	0	0
10	Pagedangan	4.133	0	5.000	1	1	0	30.000	0	0
11	Pekalongan	6.074	0	5.000	1	1	0	30.000	0	0
12	Matenggeng	4.544	0	5.000	1	1	0	30.000	0	0
13	Bumisari	8.293	0	5.000	2	2	0	30.000	0	0
Jumlah		66.899	5	5.000	13	8	3	30.000	2	-1

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

5. Sarana Perdagangan dan Jasa

Sarana perdagangan yang terdapat di Lingkungan Hunian Bojongsari tahun 2020 berupa pasar, pertokoan, dan toko/warung. Jika dilihat dari cakupan pelayanannya, sarana perdagangan di Lingkungan Hunian Bojongsari terutama pasar sudah cukup melayani dan menjangkau pelayanannya ke seluruh wilayah. Dari adanya ketersediaan sarana perdagangan tersebut, pemerintah maupun masyarakat dapat mengembangkan sarana perdagangan agar lebih optimal, seperti penambahan jaringan persampahan disekitar pasar ataupun pengadaan ruang terbuka hijau agar terdapat sirkulasi udara yang baik dalam pasar tersebut.

Selain tersedianya pasar, di Lingkungan Hunian Bojongsari saat ini sudah cukup melayani dan menjangkau pelayanannya untuk kebutuhan sarana perdagangan lain seperti pertokoan dan toko/warung. Hal ini diharapkan ketersediaan toko dapat melayani setiap lingkungan permukiman, agar kebutuhan penduduk sehari-hari dapat terpenuhi walaupun akses dari tempat tinggal ke pasar atau toko swalayan terlalu jauh.

Tabel IV.121.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2041

No	Jenis	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Pasar	66.899	3	30.000	2	-1
2	Pertokoan	66.899	12	6.000	11	-1
3	Toko/ Warung	66.899	606	250	268	-338

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

6. Sarana Kebudayaan dan Rekreasi

Kebudayaan di Lingkungan Hunian Bojongsari beraneka ragam, meliputi ujungan, suran, begalan, angguk, aplang/ dames, calung, ebeg/ kuda lumping, lengger, dan lainnya. Kebudayaan tersebut di dukung oleh beberapa organisasi kesenian yang terdapat di Lingkungan Hunian Bojongsari. Sarana rekreasi yang terdapat di Lingkungan Hunian Bojongsari, yaitu Desa Wisata Karangbanjar dan Obyek Wisata Air Bojongsari (Owabong) yang berada di Perumahan Bojongsari.

Beragamnya sarana kebudayaan dan rekreasi di Lingkungan Hunian Bojongsari menjadikan banyaknya faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mendukung kebudayaan dan rekreasi. Jika faktor pendukung kebudayaan dan rekreasi tersebut tidak dapat dipenuhi, maka akan timbul permasalahan. Permasalahan pada sarana kebudayaan dan rekreasi di Lingkungan Hunian Bojongsari seperti aksesibilitas menuju tempat wisata yang belum memadai, kurangnya dukungan infrastruktur seperti jalan, parkir, terminal, drainase, dan persampahan serta minimnya sarana penginapan untuk pengunjung atau wisatawan luar kabupaten. Maka dari itu isu strategis pada sarana kebudayaan dan rekreasi di Lingkungan Hunian Bojongsari yaitu belum optimalnya sistem kepariwisataan.

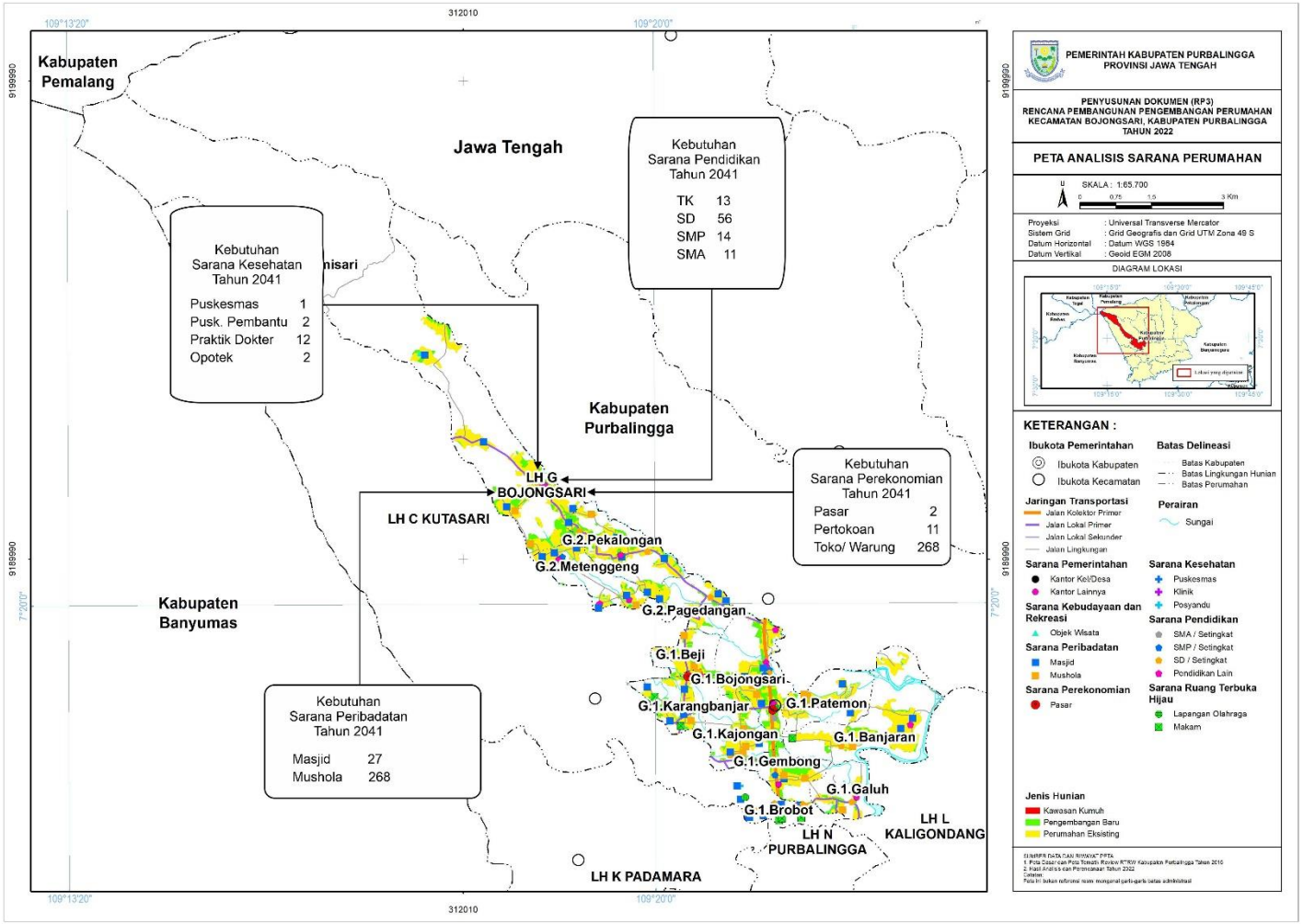
Selain ketersediaan sarana kebudayaan dan rekreasi yang telah terdapat di Lingkungan Hunian Bojongsari, perlunya kebutuhan sarana kebudayaan berupa balai warga, balai serbaguna, dan gedung serbaguna untuk mendukung sarana kebudayaan dan rekreasi yang terpadu. Hal ini dikarenakan pentingnya balai warga sebagai tempat

berkumpul untuk mengadakan kegiatan-kegiatan umum pada cakupan lingkungan permukiman. Sementara itu, kebutuhan balai serbaguna juga untuk mendukung kegiatan masyarakat yang umumnya bersifat komersial ataupun kepentingan umum.

7. Sarana Ruang Terbuka Hijau

Sarana ruang terbuka hijau sangat penting bagi penghijauan dan sirkulasi suatu kota/ kawasan. Namun saat ini umumnya mayoritas wilayah banyak lahan RTH yang dialihfungsikan menjadi lahan terbangun untuk meningkatkan perekonomian wilayahnya. Sama halnya pada permasalahan RTH di Lingkungan Hunian Bojongsari yang berubah fungsi menjadi kawasan perekonomian dan ruang komersial lainnya. Akibatnya banyak lahan RTH yang berkurang luasannya. Maka dari itu perlunya penambahan proporsi RTH agar terpenuhi 30% untuk seluruh wilayah.

Sarana ruang terbuka hijau yang terdapat di Lingkungan Hunian Bojongsari meliputi ruang terbuka hijau jalur hijau jalan dan ruang terbuka hijau fungsi tertentu. Selain untuk mendukung pengoptimalan proporsi RTH sebesar 30%, perlunya penambahan kebutuhan sarana RTH berupa taman lingkungan untuk mendukung keterpaduan antar hirarki sarana RTH. Hal ini dikarenakan, kebutuhan taman lingkungan harus disesuaikan dengan cakupan lingkungan permukiman.



Gambar 4.37.
Peta Analisis Sarana Perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari

C. Utilitas

Jangkauan pelayanan jaringan listrik yang disediakan oleh PLN di Lingkungan Hunian Bojongsari sudah mampu melayani hingga cakupan penduduk kabupaten. Dimana setiap penduduk kecamatan sudah menjadi pelanggan dari adanya listrik PLN.

Selain ketersediaan jaringan listrik eksisting, perlu adanya penambahan kebutuhan listrik domestik dan non domestik agar menciptakan keterpaduan antar hirarki jaringan listrik. Proyeksi kebutuhan listrik di Lingkungan Hunian Bojongsari pada tahun 2041 sebesar 40.139.430 KVA terdiri dari kebutuhan listrik domestik sebesar 20.069.715 KVA dan kebutuhan listrik non domestik sebesar 20.069.715 KVA. Kebutuhan listrik domestik ini untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sedangkan, kebutuhan listrik non domestik di Lingkungan Hunian Bojongsari berupa industri, fasilitas umum, penerangan jalan, dan cadangan.

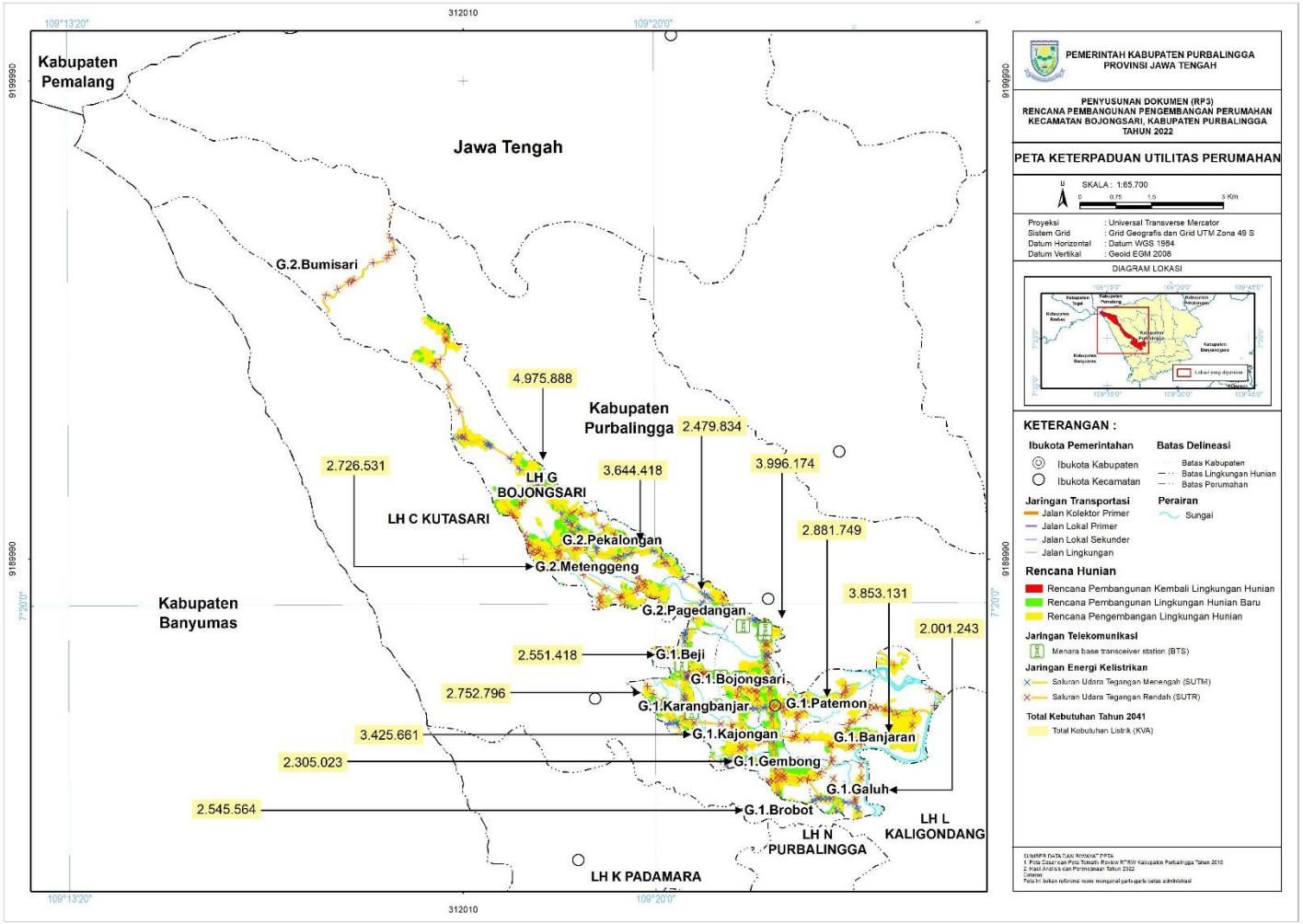
Permasalahan jaringan telekomunikasi di Lingkungan Hunian Bojongsari masih terdapat beberapa daerahwilayah yang tidak dijangkau oleh layanan sinyal seluler, sehingga daerah tersebut dapat disebut *blank spot*. Hal ini dikarenakan belum meratanya persebaran Menara BTS di beberapa daerah, terutama daerah yang terpecil atau daerah perbukitan yang aksesibilitasnya terhambat oleh kemiringan lereng. Maka dari itu perlunya penambahan dan pemerataan jangkauan Menara BTS di Lingkungan Hunian Bojongsari, agar masyarakat dapat terlayani dengan sinyal seluler. Terlebih lagi pada zaman dengan teknologi yang berkembang pesat, menjadikan internet sebagai kebutuhan primer saat ini.

Sebaran dan ketersediaan Menara telekomunikasi di Lingkungan Hunian Bojongsari sudah memadai dan merata. Namun, masih terdapat beberapa wilayah yang minim dalam pengadaan Menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi jarang ditemukan di Lingkungan Hunian Bojongsari. Namun, pada saat ini kebutuhan akan telekomunikasi maupun jaringan seluler tidak hanya dibutuhkan pada pusat kota saja, tetapi pada wilayah terpencil juga sangat dibutuhkan. Untuk itu perlunya penambahan Menara telekomunikasi agar tidak terjadi *blank spot* sinyal seluler di wilayah tertentu.

Tabel IV.122.
Proyeksi Kebutuhan Jaringan Listrik Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah KK	Domestik	Non Domestik				Total Kebutuhan Listrik (KVA)
				Industri 25% x Domestik	Fasilitas 25% x Domestik	Penerangan Jalan 40% x Domestik	Cadangan 10% x Domestik	
1	Brobot	1.414	1.272.782	318.195	318.195	509.113	127.278	2.545.564
2	Gembong	1.281	1.152.511	288.128	288.128	461.005	115.251	2.305.023
3	Galuh	1.112	1.000.622	250.155	250.155	400.249	100.062	2.001.243
4	Banjaran	2.141	1.926.566	481.641	481.641	770.626	192.657	3.853.131
5	Patemon	1.601	1.440.875	360.219	360.219	576.350	144.087	2.881.749
6	Bojongsari	2.220	1.998.087	499.522	499.522	799.235	199.809	3.996.174
7	Kajongan	1.903	1.712.831	428.208	428.208	685.132	171.283	3.425.661
8	Karangbanjar	1.529	1.376.398	344.099	344.099	550.559	137.640	2.752.796
9	Beji	1.417	1.275.709	318.927	318.927	510.284	127.571	2.551.418
10	Pagedangan	1.378	1.239.917	309.979	309.979	495.967	123.992	2.479.834
11	Pekalongan	2.025	1.822.209	455.552	455.552	728.884	182.221	3.644.418
12	Matenggeng	1.515	1.363.265	340.816	340.816	545.306	136.327	2.726.531
13	Bumisari	2.764	2.487.944	621.986	621.986	995.178	248.794	4.975.888
Jumlah		22.300	20.069.715	5.017.429	5.017.429	8.027.886	2.006.972	40.139.430

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022



Gambar 4.38.
Peta Analisis Utilitas Perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari

4.7.1.5. Lingkungan Hunian Kutasari

A. Prasarana

1. Jaringan Jalan

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 mengatur jalan menurut statusnya yaitu jalan umum dikelompokan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Insfrastruktur jalan yang terdapat di Lingkungan Hunian Kutasari terdiri atas fungsi jalan kabupaten. Fungsi jalan atau status jalan tersebut memiliki jenis permukaan jalan berupa aspal/ beton dan dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Kondisi fisik jalan di Lingkungan Hunian Kutasari sebagian besar dalam kondisi baik. Akan tetapi terdapat jalan berlubang dan terdapat genangan saat terjadi hujan. Penyebab kerusakan jaringan jalan dapat diakibatkan oleh cuaca, seperti intensitas hujan yang ekstrem, waktu atau umur perkerasan jalan yang sudah tua, maupun beban lalu lintas yang tidak sesuai dengan badan jalan.

Dari adanya kebutuhan penanganan terkait pembuatan jalan baru, penyesuaian kekuatan struktur jalan, dan penyesuaian lebar jalan diperlukan analisis program/ kegiatan peningkatan jalan eksisting yang dilakukan dengan menghitung kebutuhan peningkatan jalan pada ruas jalan yang memiliki derajat kejenuhan yang tinggi. Sedangkan untuk pembangunan jalan baru, analisis yang perlu dilakukan nantinya mengacu pada kebutuhan pengembangan jalan baru sesuai arahan dan rencana pengembangan lingkungan hunian.

2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pelayanan sumber air atau air minum sudah terlayani sumber air oleh PDAM dengan menggunakan ledeng/ meteran. Wilayah perdesaan atau bagian utara Lingkungan Hunian Kutasari menggunakan sistem air bersih perpipaan yang bersumber dari mata air. Terdapat juga wilayah yang menggunakan sumur di Lingkungan Hunian Kutasari. Kebutuhan air bersih di Lingkungan Hunian Kutasari tahun 2020 mencapai 5.481.252 liter/hari. Pelayanan air bersih tersebut menjangkau 65.253 jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan penyediaan air minum. Oleh karena itu diperlukan proyeksi kebutuhan jaringan prasarana di masa yang akan datang untuk melakukan perencanaan terkait jaringan prasarana yang efisien. Kebutuhan air minum di Lingkungan Hunian Kutasari terus bertambah hingga pada tahun 2041 dengan total kebutuhan air minum sebesar 5.976.766 liter/hari. Dalam mengidentifikasi dan mengembangkan sistem penyediaan air minum di Lingkungan Hunian Bojongsari terdiri dari kebutuhan domestik, kebutuhan non domestik (industri, fasilitas umum, dan hidran), serta kebocoran. Dimana kebutuhan domestik tahun 2041 pada sambungan rumah lebih banyak digunakan di Lingkungan Hunian Kutasari, yaitu sebesar 4.269.119 liter/hari dibanding dengan kebutuhan non domestik. Sedangkan, kebutuhan non domestik di Lingkungan Hunian Kutasari sebesar 853.824 liter/hari.

Tabel IV.123.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Domestik		Industri		Fasum		Hidran		Kebocoran		Total Kebutuhan
			Standar	Kebutuhan	Standar	Kebutuhan	Standar	Kebutuhan	Standar	Kebutuhan	Standar	Kebocoran	
1	Karanglewas	3.020	60 lt/ jiwa/ hari	181.215	10 % dari Domestik	18.122	5 % dari Domestik	9.061	5 % dari Domestik	9.061	20 % dari Domestik	36.243	253.701
2	Munjul	4.031		241.859		24.186		12.093		12.093		48.372	338.603
3	Karangklesem	3.810		228.619		22.862		11.431		11.431		45.724	320.067
4	Kutasari	5.643		338.584		33.858		16.929		16.929		67.717	474.017
5	Sumingkir	5.786		347.144		34.714		17.357		17.357		69.429	486.002
6	Meri	4.507		270.412		27.041		13.521		13.521		54.082	378.576
7	Karangreja	7.095		425.722		42.572		21.286		21.286		85.144	596.011
8	Karangaren	1.639		98.358		9.836		4.918		4.918		19.672	137.701
9	Limbangan	4.966		297.934		29.793		14.897		14.897		59.587	417.107
10	Cendana	5.633		337.990		33.799		16.900		16.900		67.598	473.186
11	Candiwulan	6.138		368.257		36.826		18.413		18.413		73.651	515.560
12	Karangcegak	7.726		463.589		46.359		23.179		23.179		92.718	649.025
13	Candinata	6.407		384.435		38.444		19.222		19.222		76.887	538.209
14	Karangjengkol	4.750		285.000		28.500		14.250		14.250		57.000	399.001
Jumlah		71.152		4.269.119		426.912		213.456		213.456		853.824	5.976.766

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Air limbah domestik yang terdapat di Lingkungan Hunian Kutasari berasal dari air cucian, mandi dan dapur (*grey water*). Rantai layanan pengolahan air limbah domestik pada Lingkungan Hunian Kutasari belum melakukan sistem pengolahan air limbah domestik secara terpusat (SPALD-T), akan tetapi sudah melakukan sistem pengolahan air limbah domestik secara setempat (SPALD-S). Rata-rata rumah tangga masih menggunakan pengelolaan sistem setempat (*onsite sistem*) yaitu membuang limbah rumah tangga langsung ke saluran drainase atau di sekitar rumah, dan permukiman yang berdekatan dengan sungai membuang air limbah langsung ke sungai.

Dari adanya sistem pengolahan air limbah domestik yang belum memadai dan terpadu, diperlukan proyeksi kebutuhan sistem pengolahan air limbah domestik di Lingkungan Hunian Kutasari hingga 20 tahun mendatang. Proyeksi air limbah yang dihasilkan di Lingkungan Hunian Kutasari pada tahun 2041 mencapai 4.781.413 liter/hari. Hal tersebut maka diperlukan sarana penampungan dan pengolahan tinja, perlunya keterpaduan antara sarana sanitasi tersebut agar menciptakan praktik sanitasi yang terpadu dan tidak mencemari lingkungan.

Tabel IV.124.
Proyeksi Air Limbah di Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Total Kebutuhan	Standar	Proyeksi Air Limbah
1	Karanglewas	3.020	253.701	80 % dari Air Bersih	202.961
2	Munjul	4.031	338.603		270.883
3	Karangklesem	3.810	320.067		256.054
4	Kutasari	5.643	474.017		379.214
5	Sumingkir	5.786	486.002		388.802
6	Meri	4.507	378.576		302.861
7	Karangreja	7.095	596.011		476.808
8	Karangaren	1.639	137.701		110.160
9	Limbangan	4.966	417.107		333.686
10	Cendana	5.633	473.186		378.549
11	Candiwulan	6.138	515.560		412.448
12	Karangcegak	7.726	649.025		519.220
13	Candinata	6.407	538.209		430.567
14	Karangjengkol	4.750	399.001		319.200
Jumlah		71.152	5.976.766		4.781.413

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

4. Sistem Persampahan

Kabupaten Purbalingga berada memiliki satu tempat pemrosesan akhir (TPA) persampahan yang berlokasi di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan. Lingkungan Hunian Kutasari memiliki prasarana pengurangan persampahan yaitu berupa TPS sebanyak 1 unit dan Bank Sampah sebanyak 6 unit.

Pada umumnya jaringan persampahan di Lingkungan Hunian Kutasari sudah memadai dan melayani setiap penduduk. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase, tegalan, maupun di sungai. Sehingga adanya jaringan persampahan tersebut dirasa kurang optimal, karena mayoritas masyarakat masih

membuang sampah tidak pada tempatnya. Maka dari itu perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, serta perluasan jangkauan pelayanan pengangkutan sampah, baik dari pemerintah maupun secara swadaya. Berikut ini merupakan proyeksi timbulan sampah di Lingkungan Hunian Kutasari tahun 2041 berdasarkan analisis perhitungan SNI.

Tabel IV.125.
Proyeksi Timbulan Sampah Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah Domestik (m3)	Timbulan Sampah Non Domestik (m3)	Total Timbulan Sampah
1	Karanglewas	3.020	6,04	1,21	7,25
2	Munjul	4.031	8,06	1,61	9,67
3	Karangklesem	3.810	7,62	1,52	9,14
4	Kutasari	5.643	11,29	2,26	13,54
5	Sumingkir	5.786	11,57	2,31	13,89
6	Meri	4.507	9,01	1,80	10,82
7	Karangreja	7.095	14,19	2,84	17,03
8	Karangaren	1.639	3,28	0,66	3,93
9	Limbangan	4.966	9,93	1,99	11,92
10	Cendana	5.633	11,27	2,25	13,52
11	Candiwulan	6.138	12,28	2,46	14,73
12	Karangcegak	7.726	15,45	3,09	18,54
13	Candinata	6.407	12,81	2,56	15,38
14	Karangjengkol	4.750	9,50	1,90	11,40

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

5. Jaringan Drainase

Jaringan drainase di Lingkungan Hunian Kutasari terdiri dari jaringan drainase primer berupa sungai, drainase sekunder berupa drainase di jalan utama, dan jaringan drainase tersier di lingkungan permukiman. Jaringan drainase di Lingkungan Hunian Kutasari berupa drainase terbuka dan drainase tertutup. Jaringan drainase di Lingkungan Hunian Kutasari di beberapa wilayah belum berfungsi optimal, karena sebagian tersumbat oleh sampah. Hal ini dapat dilihat dari munculnya genangan di beberapa wilayah terutama saat hujan. Selain itu beberapa sungai yang ada di Lingkungan Hunian Kutasari mengalami pendangkalan.

Jaringan drainase di Lingkungan Hunian Kutasari terdiri dari jaringan drainase primer, drainase sekunder, dan jaringan drainase tersier. Saluran primer adalah saluran yang menerima masukan aliran dari saluran-saluran sekunder, dimana aliran dari saluran primer ini langsung dialirkan ke badan air, yaitu berupa sungai. Saluran sekunder adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran dari saluran-saluran tersier dan meneruskan aliran ke saluran primer. Sedangkan saluran tersier adalah saluran yang menerima aliran air langsung dari saluran-saluran pembuangan rumah, umumnya saluran tersier ini adalah saluran kiri kanan jalan perumahan.

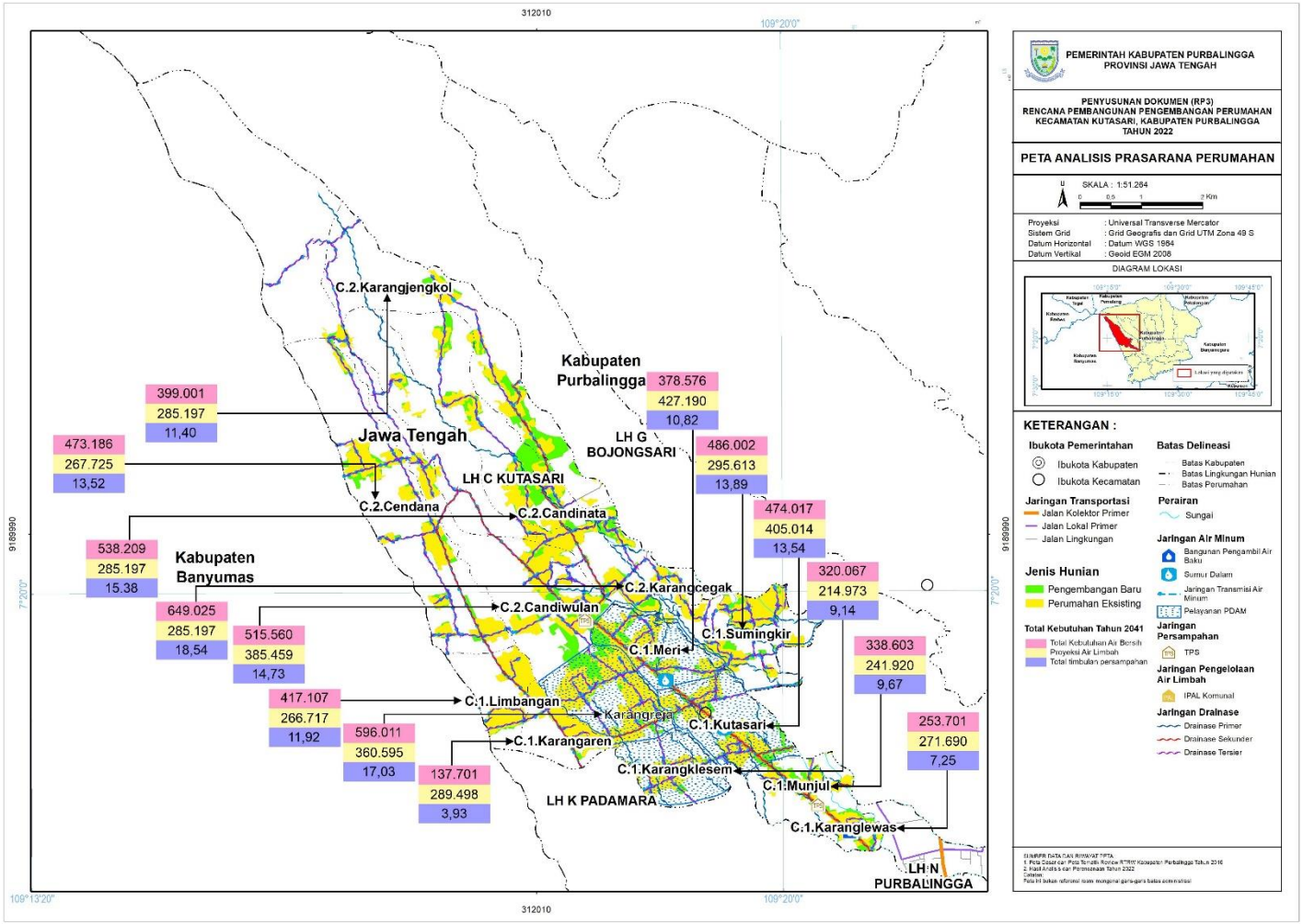
Penanganan drainase selama ini masih belum menyentuh drainase yang berbasis lingkungan. Drainase yang telah terbangun sementara hanya difungsikan sebagai pengering jalan badan jalan. Adapun penanganan drainase lingkungan dilaksanakan secara gotong royong tanpa adanya perencanaan yang kongkrit. Melihat kondisi tersebut,

maka kebutuhan akan perda tentang pengelolaan drainase lingkungan sangat diperlukan dalam rangka meraih komitmen semua stakeholder tentang pentingnya pengelolaan drainase lingkungan.

Dari adanya permasalahan drainase pada kondisi eksisting, perlu adanya kegiatan penanganan khusus untuk mengoptimalkan drainase di perkotaan. Pengembangan sistem drainase disusun untuk meningkatkan pelayanan sistem drainase dan keterpaduan sistem drainase. Kebutuhan pengembangan dan keterpaduan sistem drainase dapat mengacu pada Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Drainase Perkotaan. Dimana kebutuhan sistem drainase terpadu dapat ditinjau dari beberapa tahapan dan aspek, seperti topografi, hidrologi, tataguna tanah, debit rencana masing-masing saluran, hingga penetapan garis sempadan.

6. Sistem Proteksi Kebakaran

Berdasarkan Permen PU Nomor 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknik Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, terdapat beberapa kebutuhan untuk penanganan sistem proteksi kebakaran yang terpadu, diantaranya adalah sarana penyelamatan, sistem proteksi pasif, sistem proteksi aktif. Dimana dalam pemenuhan kebutuhan sistem proteksi kebakaran yang terpadu, pemerintah daerah ataupun instansi teknis yang berwenang dapat merencanakan sistem proteksi kebakaran dengan beberapa komponen yang dibutuhkan, seperti rencana tapak, seluruh sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif kebakaran, serta sarana menuju jalan ke luar yang aman.



Gambar 4.39.
Peta Analisis Prasarana Perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari

B. Sarana

1. Sarana Pemerintahan

Sarana pemerintahan yang terdapat di Lingkungan Hunian Kutasari meliputi balai desa, balai kelurahan, kantor desa, dan kantor kelurahan. Sarana pemerintahan yang terdapat di Lingkungan Hunian Kutasari berupa balai desa, balai kelurahan, kantor desa, dan kantor kelurahan. Seluruh wilayah di Lingkungan Hunian Kutasari merupakan desa sejumlah 14 desa. Perlunya penambahan kebutuhan sarana pemerintahan di Lingkungan Hunian Kutasari untuk meningkatkan keterpaduan antar hirarki sarana pemerintahan yang dapat berupa balai pertemuan.

2. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di Lingkungan Hunian Kutasari terdiri dari sekolah dasar (SD) sederajat, sekolah menengah pertama (SMP) sederajat, dan sekolah menengah akhir (SMA) sederajat.

Permasalahan sarana pendidikan di Lingkungan Hunian Kutasari yaitu masih minimnya jumlah sarana pendidikan. Tentunya sarana pendidikan diperlukan pada suatu wilayah. Maka dari itu perlunya penambahan sarana pendidikan berupa SD hingga perguruan tinggi di Lingkungan Hunian Kutasari agar dapat menjangkau ke seluruh wilayah dan tidak terpusat di pusat perkotaan saja.

Proyeksi kebutuhan sarana pendidikan pada tahun 2041 di Lingkungan Hunian Kutasari diperlukan untuk mengembangkan keterpaduan antar hirarki sarana pendidikan. Terlebih lagi saat ini di Indonesia mewajibkan wajib belajar 12 tahun bagi penduduknya. Kebutuhan sarana pendidikan di Lingkungan Hunian Kutasari tahun 2041 berupa SD sebanyak 19 unit, SMP sebanyak 9 unit, dan SMA sebanyak 10 unit. Perlunya penambahan sarana pendidikan ini agar kebutuhan pendidikan masyarakat Lingkungan Hunian Kutasari dapat terpenuhi.

Tabel IV.126.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	TK			SD			
			Jumlah Eksisting	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Karanglewas	3.020	1	1	0	2	1.200	3	1
2	Munjul	4.031	2	1	-1	2	1.200	3	1
3	Karangklesem	3.810	2	1	-1	3	1.200	3	0
4	Kutasari	5.643	2	1	-1	4	1.200	5	1
5	Sumingkir	5.786	1	1	0	3	1.200	5	2
6	Meri	4.507	1	1	0	2	1.200	4	2
7	Karangreja	7.095	4	1	-3	5	1.200	6	1
8	Karangaren	1.639	1	1	0	1	1.200	1	0
9	Limbangan	4.966	3	1	-2	3	1.200	4	1
10	Cendana	5.633	2	1	-1	3	1.200	5	2
11	Candiwulan	6.138	3	1	-2	4	1.200	5	1
12	Karangcegak	7.726	1	1	0	2	1.200	6	4
13	Candinata	6.407	2	1	-1	3	1.200	5	2
14	Karangjengkol	4.750	1	1	0	3	1.200	4	1
Jumlah		71.152	26	14	-12	40		59	19

Lanjutan…

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	SMP				SMA			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Karanglewas	3.020	0	4.800	1	1	0	6.000	1	1
2	Munjul	4.031	1	4.800	1	0	0	6.000	1	1
3	Karangklesem	3.810	1	4.800	1	0	0	6.000	1	1
4	Kutasari	5.643	0	4.800	1	1	0	6.000	1	1
5	Sumingkir	5.786	0	4.800	1	1	0	6.000	1	1
6	Meri	4.507	1	4.800	1	0	2	6.000	1	-1

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	SMP				SMA			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
7	Karangreja	7.095	1	4.800	1	0	0	6.000	1	1
8	Karangaren	1.639	0	4.800	0	0	0	6.000	0	0
9	Limbangan	4.966	0	4.800	1	1	0	6.000	1	1
10	Cendana	5.633	1	4.800	1	0	0	6.000	1	1
11	Candiwulan	6.138	0	4.800	1	1	0	6.000	1	1
12	Karangcegak	7.726	0	4.800	2	2	0	6.000	1	1
13	Candinata	6.407	0	4.800	1	1	0	6.000	1	1
14	Karangjengkol	4.750	1	4.800	1	0	0	6.000	1	1
Jumlah		71.152	6		15	9	2	6.000	12	10

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

3. Sarana Peribadatan

Mayoritas sarana peribadatan yang terdapat di Lingkungan Hunian Kutasari adalah masjid dan mushola. Sebaran masjid dan mushola sudah menjangkau ketersediaannya di seluruh wilayah di Lingkungan Hunian Kutasari.

Proyeksi kebutuhan sarana peribadatan di Lingkungan Hunian Kutasari pada tahun 2041 berupa 134 unit mushola. Meskipun pada kondisi eksisting di Lingkungan Hunian Kutasari ketersediaan mushola dapat dikatakan banyak, tetapi kebutuhan mushola harus disesuaikan setiap perumahan. Tidak hanya memerlukan penambahan kebutuhan mushola dan masjid, perlunya penambahan sarana peribadatan lain agar keterpaduan sarana peribadatan di Lingkungan Hunian Kutasari dapat berlangsung.

Tabel IV.127.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Masjid				Musholla				Gereja		
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan
1	Karanglewas	3.020	4	2.500	1	-3	4	250	12	8	0	Mengikuti paroki	Mengikuti paroki
2	Munjul	4.031	5	2.500	2	-3	9	250	16	7	0		
3	Karangklesem	3.810	2	2.500	2	0	8	250	15	7	0		
4	Kutasari	5.643	4	2.500	2	-2	14	250	23	9	0		
5	Sumingkir	5.786	6	2.500	2	-4	12	250	23	11	0		
6	Meri	4.507	6	2.500	2	-4	7	250	18	11	0		
7	Karangreja	7.095	8	2.500	3	-5	24	250	28	4	0		
8	Karangaren	1.639	1	2.500	1	0	5	250	7	2	0		
9	Limbangan	4.966	7	2.500	2	-5	10	250	20	10	0		
10	Cendana	5.633	10	2.500	2	-8	7	250	23	16	0		
11	Candiwulan	6.138	8	2.500	2	-6	12	250	25	13	0		
12	Karangcegak	7.726	13	2.500	3	-10	16	250	31	15	0		
13	Candinata	6.407	11	2.500	3	-8	12	250	26	14	1		
14	Karangjengkol	4.750	10	2.500	2	-8	11	250	19	8	0		
Jumlah		71.152	95	2.500	28	-67	151	250	285	134	1		

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

4. Sarana Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan di Lingkungan Hunian Kutasari terdiri dari puskesmas, klinik, puskesmas pembantu, praktek dokter, dan apotek. Dimana sebaran sarana kesehatan yang dapat menjangkau seluruh wilayah Lingkungan Hunian Kutasari hanya berupa klinik, praktek dokter, dan apotek. Kebutuhan sarana kesehatan di Lingkungan Hunian Kutasari perlu diadakan penambahan sarana agar dapat menciptakan keterpaduan antar hirarki sarana kesehatan. Proyeksi kebutuhan sarana kesehatan di Lingkungan Hunian Kutasari pada tahun 2041 yaitu berupa puskesmas pembantu sebanyak 1 unit dan praktek dokter sebanyak 9 unit. Sementara itu, kebutuhan rumah sakit dan puskesmas sudah dapat menjangkau pelayanan kesehatan di Lingkungan Hunian Kutasari hingga tahun 2041. Namun, seiring dengan pertambahan penduduk maka nantinya akan diperlukan penambahan sarana kesehatan baik berupa rumah sakit maupun klinik, agar dapat menjangkau dan melayani penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan.

Tabel IV.128.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Puskesmas				Poliklinik			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Karanglewas	3.020	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
2	Munjul	4.031	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
3	Karangklesem	3.810	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
4	Kutasari	5.643	1	120.000	0	-1	0	30.000	0	0
5	Sumingkir	5.786	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
6	Meri	4.507	0	120.000	0	0	1	30.000	0	-1
7	Karangreja	7.095	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
8	Karangaren	1.639	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
9	Limbangan	4.966	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
10	Cendana	5.633	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
11	Candiwulan	6.138	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
12	Karangcegak	7.726	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
13	Candinata	6.407	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
14	Karangjengkol	4.750	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
Jumlah		71.152	1	120.000	1	0	1	30.000	0	-1

Lanjutan…

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Puskesmas Pembantu				Praktik Dokter			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Karanglewas	3.020	0	30.000	0	0	2	5.000	1	-1
2	Munjul	4.031	0	30.000	0	0	0	5.000	1	1
3	Karangklesem	3.810	0	30.000	0	0	0	5.000	1	1
4	Kutasari	5.643	0	30.000	0	0	1	5.000	1	0
5	Sumingkir	5.786	0	30.000	0	0	0	5.000	1	1
6	Meri	4.507	0	30.000	0	0	0	5.000	1	1

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Puskesmas Pembantu				Praktik Dokter			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
7	Karangreja	7.095	0	30.000	0	0	0	5.000	1	1
8	Karangaren	1.639	0	30.000	0	0	0	5.000	0	0
9	Limbangan	4.966	0	30.000	0	0	1	5.000	1	0
10	Cendana	5.633	0	30.000	0	0	0	5.000	1	1
11	Candiwulan	6.138	0	30.000	0	0	1	5.000	1	0
12	Karangcegak	7.726	1	30.000	0	-1	0	5.000	2	2
13	Candinata	6.407	0	30.000	0	0	0	5.000	1	1
14	Karangjengkol	4.750	0	30.000	0	0	0	5.000	1	1
Jumlah		71.152	1	30.000	2	1	5	5.000	14	9

Lanjutan…

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Apotek			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Karanglewas	3.020	0	30.000	0	0
2	Munjul	4.031	0	30.000	0	0
3	Karangklesem	3.810	0	30.000	0	0
4	Kutasari	5.643	2	30.000	0	-2
5	Sumingkir	5.786	0	30.000	0	0
6	Meri	4.507	0	30.000	0	0
7	Karangreja	7.095	0	30.000	0	0
8	Karangaren	1.639	0	30.000	0	0
9	Limbangan	4.966	0	30.000	0	0
10	Cendana	5.633	0	30.000	0	0
11	Candiwulan	6.138	1	30.000	0	-1
12	Karangcegak	7.726	0	30.000	0	0
13	Candinata	6.407	0	30.000	0	0
14	Karangjengkol	4.750	0	30.000	0	0
Jumlah		71.152	3	30.000	2	-1

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

5. Sarana Perdagangan dan Jasa

Sarana perdagangan yang terdapat di Lingkungan Hunian Kutasari tahun 2020 berupa pasar, pertokoan, dan toko/warung. Jika dilihat dari cakupan pelayanannya, sarana perdagangan di Lingkungan Hunian Kutasari terutama pasar sudah cukup melayani dan menjangkau pelayanannya ke seluruh wilayah. Dari adanya ketersediaan sarana perdagangan tersebut, pemerintah maupun masyarakat dapat mengembangkan sarana perdagangan agar lebih optimal, seperti penambahan jaringan persampahan disekitar pasar ataupun pengadaan ruang terbuka hijau agar terdapat sirkulasi udara yang baik dalam pasar tersebut.

Selain tersedianya pasar, di Lingkungan Hunian Kutasari saat ini sudah cukup melayani dan menjangkau pelayanannya untuk kebutuhan sarana perdagangan lain seperti pertokoan dan toko/warung. Hal ini diharapkan ketersediaan toko dapat melayani setiap lingkungan permukiman, agar kebutuhan penduduk sehari-hari dapat terpenuhi walaupun akses dari tempat tinggal ke pasar atau toko swalayan terlalu jauh.

Tabel IV.129.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2041

No	Jenis	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Pasar	71.152	9	30.000	2	-7
2	Pertokoan	71.152	18	6.000	12	-6
3	Toko/ Warung	71.152	394	250	285	-109

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

6. Sarana Kebudayaan dan Rekreasi

Kebudayaan di Lingkungan Hunian Kutasari beraneka ragam, meliputi ujungan, suran, begalan, angguk, aplang/ dames, calung, ebeg/ kuda lumping, lengger, dan lainnya. Kebudayaan tersebut di dukung oleh beberapa organisasi kesenian yang terdapat di Lingkungan Hunian Kutasari. Sarana rekreasi yang terdapat di Lingkungan Hunian Kutasari, yaitu Situ Tirta Marta (Sitama), Sanggaluri Park, dan Kolam Pemandian Walik Tirto Asri.

Beragamnya sarana kebudayaan dan rekreasi di Lingkungan Hunian Kutasari menjadikan banyaknya faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mendukung kebudayaan dan rekreasi. Jika faktor pendukung kebudayaan dan rekreasi tersebut tidak dapat dipenuhi, maka akan timbul permasalahan. Permasalahan pada sarana kebudayaan dan rekreasi di Lingkungan Hunian Kutasari seperti aksesibilitas menuju tempat wisata yang belum memadai, kurangnya dukungan infrastruktur seperti jalan, parkir, terminal, drainase, dan persampahan serta minimnya sarana penginapan untuk pengunjung atau wisatawan luar kabupaten. Maka dari itu isu strategis pada sarana kebudayaan dan rekreasi di Lingkungan Hunian Kutasari yaitu belum optimalnya sistem kepariwisataan.

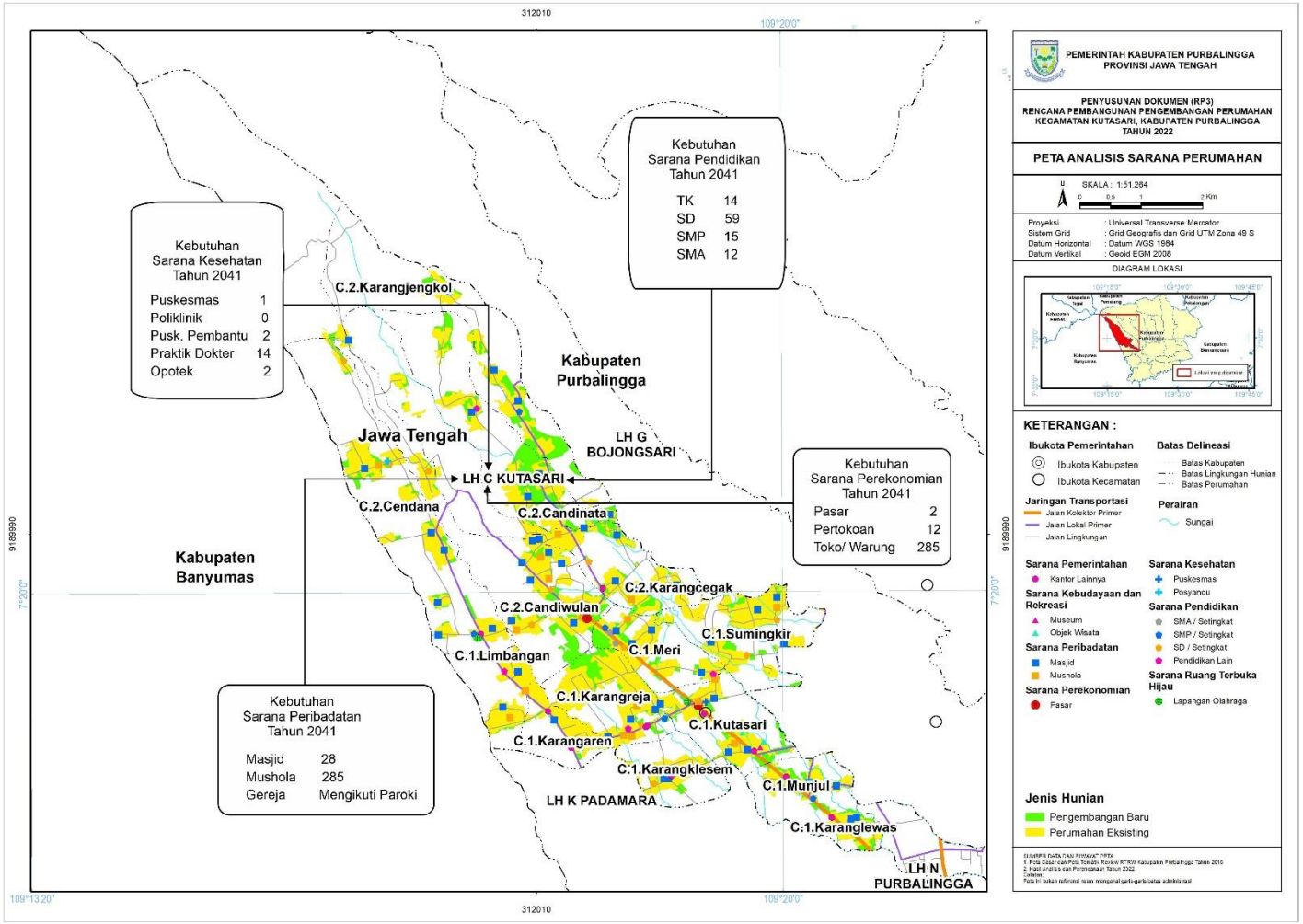
Selain ketersediaan sarana kebudayaan dan rekreasi yang telah terdapat di Lingkungan Hunian Kutasari, perlunya kebutuhan sarana kebudayaan berupa balai warga, balai serbaguna, dan gedung serbaguna untuk mendukung sarana kebudayaan dan rekreasi yang terpadu. Hal ini dikarenakan pentingnya balai warga sebagai tempat

berkumpul untuk mengadakan kegiatan-kegiatan umum pada cakupan lingkungan permukiman. Sementara itu, kebutuhan balai serbaguna juga untuk mendukung kegiatan masyarakat yang umumnya bersifat komersial ataupun kepentingan umum.

7. Sarana Ruang Terbuka Hijau

Sarana ruang terbuka hijau sangat penting bagi penghijauan dan sirkulasi suatu kota/ kawasan. Namun saat ini umumnya mayoritas wilayah banyak lahan RTH yang dialihfungsikan menjadi lahan terbangun untuk meningkatkan perekonomian wilayahnya. Sama halnya pada permasalahan RTH di Lingkungan Hunian Kutasari yang berubah fungsi menjadi kawasan perekonomian dan ruang komersial lainnya. Akibatnya banyak lahan RTH yang berkurang luasannya. Maka dari itu perlunya penambahan proporsi RTH agar terpenuhi 30% untuk seluruh wilayah.

Sarana ruang terbuka hijau yang terdapat di Lingkungan Hunian Kutasari meliputi ruang terbuka hijau jalur hijau jalan dan ruang terbuka hijau fungsi tertentu. Selain untuk mendukung pengoptimalan proporsi RTH sebesar 30%, perlunya penambahan kebutuhan sarana RTH berupa taman lingkungan untuk mendukung keterpaduan antar hirarki sarana RTH. Hal ini dikarenakan, kebutuhan taman lingkungan harus disesuaikan dengan cakupan lingkungan permukiman.



Gambar 4.40.
Peta Analisis Sarana Perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari

C. Utilitas

Jangkauan pelayanan jaringan listrik yang disediakan oleh PLN di Lingkungan Hunian Kutasari sudah mampu melayani hingga cakupan penduduk kabupaten. Dimana setiap penduduk kecamatan sudah menjadi pelanggan dari adanya listrik PLN.

Selain ketersediaan jaringan listrik eksisting, perlu adanya penambahan kebutuhan listrik domestik dan non domestik agar menciptakan keterpaduan antar hirarki jaringan listrik. Proyeksi kebutuhan listrik di Lingkungan Hunian Kutasari pada tahun 2041 sebesar 42.691.188 KVA terdiri dari kebutuhan listrik domestik sebesar 21.345.594 KVA dan kebutuhan listrik non domestik sebesar 21.345.594 KVA. Kebutuhan listrik domestik ini untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sedangkan, kebutuhan listrik non domestik di Lingkungan Hunian Kutasari berupa industri, fasilitas umum, penerangan jalan, dan cadangan.

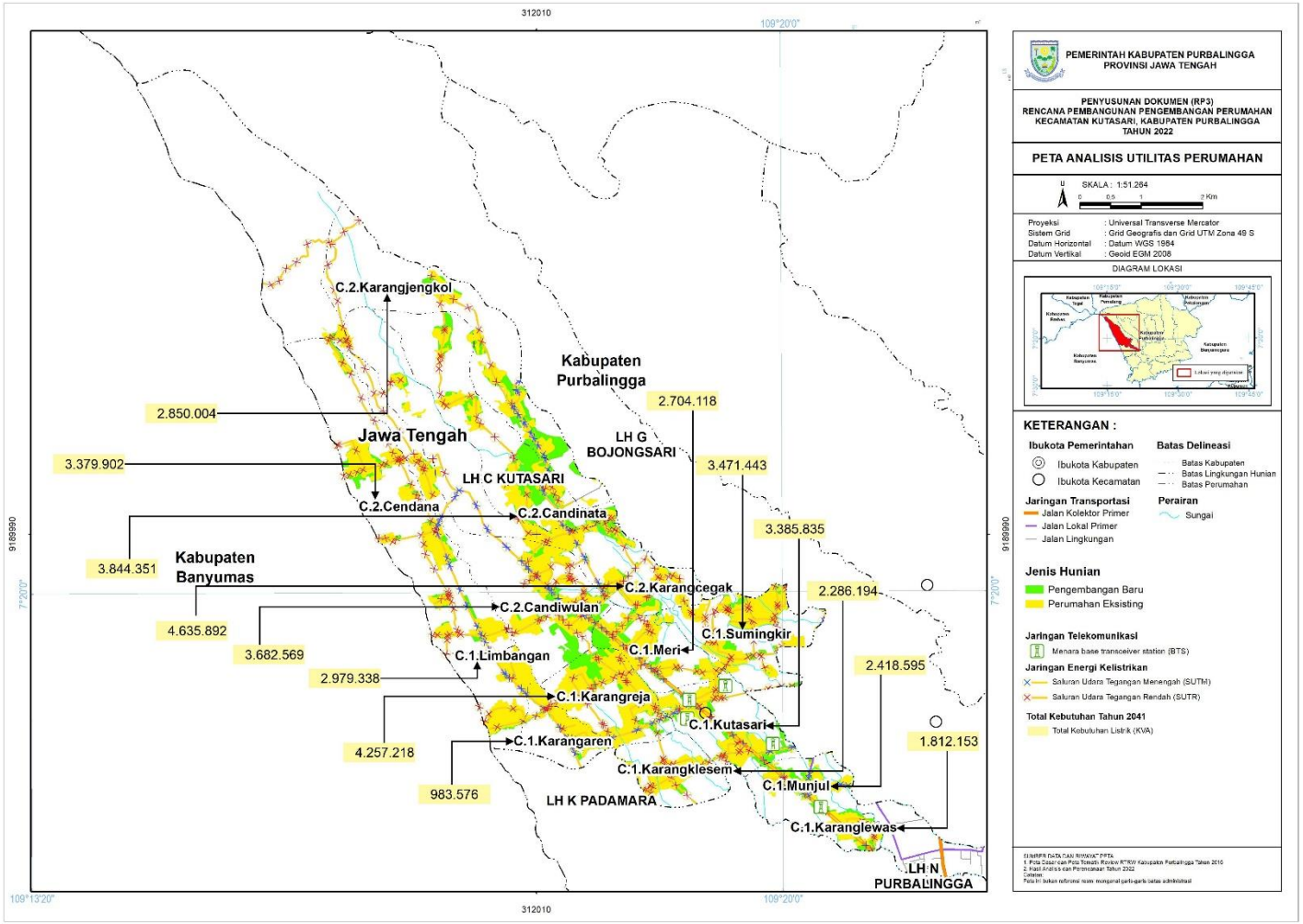
Permasalahan jaringan telekomunikasi di Lingkungan Hunian Kutasari masih terdapat beberapa daerahwilayah yang tidak dijangkau oleh layanan sinyal seluler, sehingga daerah tersebut dapat disebut *blank spot*. Hal ini dikarenakan belum meratanya persebaran Menara BTS di beberapa daerah, terutama daerah yang terpecil atau daerah perbukitan yang aksesibilitasnya terhambat oleh kemiringan lereng. Maka dari itu perlunya penambahan dan pemerataan jangkauan Menara BTS di Lingkungan Hunian Kutasari, agar masyarakat dapat terlayani dengan sinyal seluler. Terlebih lagi pada zaman dengan teknologi yang berkembang pesat, menjadikan internet sebagai kebutuhan primer saat ini.

Sebaran dan ketersediaan Menara telekomunikasi di Lingkungan Hunian Kutasari sudah memadai dan merata. Namun, masih terdapat beberapa wilayah yang minim dalam pengadaan Menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi jarang ditemukan di Lingkungan Hunian Kutasari. Namun, pada saat ini kebutuhan akan telekomunikasi maupun jaringan seluler tidak hanya dibutuhkan pada pusat kota saja, tetapi pada wilayah terpencil juga sangat dibutuhkan. Untuk itu perlunya penambahan Menara telekomunikasi agar tidak terjadi *blank spot* sinyal seluler di wilayah tertentu.

Tabel IV.130.
Proyeksi Kebutuhan Jaringan Listrik Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah KK	Domestik	Non Domestik				Total Kebutuhan Listrik (KVA)
				Industri 25% x Domestik	Fasilitas 25% x Domestik	Penerangan Jalan 40% x Domestik	Cadangan 10% x Domestik	
1	Karanglewas	1.007	906.076	226.519	226.519	362.431	90.608	1.812.153
2	Munjul	1.344	1.209.297	302.324	302.324	483.719	120.930	2.418.595
3	Karangklesem	1.270	1.143.097	285.774	285.774	457.239	114.310	2.286.194
4	Kutasari	1.881	1.692.918	423.229	423.229	677.167	169.292	3.385.835
5	Sumingkir	1.929	1.735.721	433.930	433.930	694.289	173.572	3.471.443
6	Meri	1.502	1.352.059	338.015	338.015	540.824	135.206	2.704.118
7	Karangreja	2.365	2.128.609	532.152	532.152	851.444	212.861	4.257.218
8	Karangaren	546	491.788	122.947	122.947	196.715	49.179	983.576
9	Limbangan	1.655	1.489.669	372.417	372.417	595.868	148.967	2.979.338
10	Cendana	1.878	1.689.951	422.488	422.488	675.980	168.995	3.379.902
11	Candiwulan	2.046	1.841.285	460.321	460.321	736.514	184.128	3.682.569
12	Karangcegak	2.575	2.317.946	579.487	579.487	927.178	231.795	4.635.892
13	Candinata	2.136	1.922.176	480.544	480.544	768.870	192.218	3.844.351
14	Karangjengkol	1.583	1.425.002	356.251	356.251	570.001	142.500	2.850.004
Jumlah		23.717	21.345.594	5.336.399	5.336.399	8.538.238	2.134.559	42.691.188

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022



Gambar 4.41.
Peta Analisis Utilitas Perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari

4.7.1.6. Lingkungan Hunian Kaligondang

A. Prasarana

1. Jaringan Jalan

Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 mengatur jalan menurut statusnya yaitu jalan umum dikelompokan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Insfrastruktur jalan yang terdapat di Lingkungan Hunian Kaligondang terdiri atas fungsi jalan kabupaten. Fungsi jalan atau status jalan tersebut memiliki jenis permukaan jalan berupa aspal/ beton dan dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Kondisi fisik jalan di Lingkungan Hunian Kaligondang sebagian besar dalam kondisi baik. Akan tetapi terdapat jalan berlubang dan terdapat genangan saat terjadi hujan. Penyebab kerusakan jaringan jalan dapat diakibatkan oleh cuaca, seperti intensitas hujan yang ekstrem, waktu atau umur perkerasan jalan yang sudah tua, maupun beban lalu lintas yang tidak sesuai dengan badan jalan.

Dari adanya kebutuhan penanganan terkait pembuatan jalan baru, penyesuaian kekuatan struktur jalan, dan penyesuaian lebar jalan diperlukan analisis program/ kegiatan peningkatan jalan eksisting yang dilakukan dengan menghitung kebutuhan peningkatan jalan pada ruas jalan yang memiliki derajat kejenuhan yang tinggi. Sedangkan untuk pembangunan jalan baru, analisis yang perlu dilakukan nantinya mengacu pada kebutuhan pengembangan jalan baru sesuai arahan dan rencana pengembangan lingkungan hunian.

2. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pelayanan sumber air atau air minum sudah terlayani sumber air oleh PDAM dengan menggunakan ledeng/ meteran. Terdapat juga wilayah yang menggunakan sumur di Lingkungan Hunian Kaligondang. Kebutuhan air bersih di Lingkungan Hunian Kaligondang tahun 2020 mencapai 5.614.560 liter/hari. Pelayanan air bersih tersebut menjangkau 66.840 jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk akan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan penyediaan air minum. Oleh karena itu diperlukan proyeksi kebutuhan jaringan prasarana di masa yang akan datang untuk melakukan perencanaan terkait jaringan prasarana yang efisien. Kebutuhan air minum di Lingkungan Hunian Kaligondang terus bertambah hingga pada tahun 2041 dengan total kebutuhan air minum sebesar 6.250.336 liter/hari. Dalam mengidentifikasi dan mengembangkan sistem penyediaan air minum di Lingkungan Hunian Kaligondang terdiri dari kebutuhan domestik, kebutuhan non domestik (industri, fasilitas umum, dan hidran), serta kebocoran. Dimana kebutuhan domestik tahun 2041 pada sambungan rumah lebih banyak digunakan di Lingkungan Hunian Kaligondang, yaitu sebesar 4.464.526 liter/hari dibanding dengan kebutuhan non domestik. Sedangkan, kebutuhan non domestik di Lingkungan Hunian Kaligondang sebesar 892.905 liter/hari.

Tabel IV.131.
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Domestik		Industri		Fasum		Hidran		Kebocoran		Total Kebutuhan
			Standar	Kebutuhan	Standar	Kebutuhan	Standar	Kebutuhan	Standar	Kebutuhan	Standar	Kebocoran	
1	Lamongan	2.952	60 lt/ jiwa/ hari	177.126	10 % dari Domestik	17.713	5 % dari Domestik	8.856	5 % dari Domestik	8.856	20 % dari Domestik	35.425	247.976
2	Tejasari	2.923		175.350		17.535		8.768		8.768		35.070	245.490
3	Cilapar	2.317		139.038		13.904		6.952		6.952		27.808	194.653
4	Penolih	4.457		267.394		26.739		13.370		13.370		53.479	374.352
5	Sinduraja	5.559		333.526		33.353		16.676		16.676		66.705	466.936
6	Selakambang	9.936		596.151		59.615		29.808		29.808		119.230	834.611
7	Selanegara	3.887		233.212		23.321		11.661		11.661		46.642	326.497
8	Kaligondang	3.668		220.105		22.011		11.005		11.005		44.021	308.148
9	Brecek	1.587		95.240		9.524		4.762		4.762		19.048	133.337
10	Sempor Lor	1.425		85.491		8.549		4.275		4.275		17.098	119.687
11	Penaruban	5.112		306.707		30.671		15.335		15.335		61.341	429.389
12	Kalikajar	4.984		299.067		29.907		14.953		14.953		59.813	418.694
13	Kembaran Wetan	3.688		221.277		22.128		11.064		11.064		44.255	309.788
14	Slinga	5.967		357.998		35.800		17.900		17.900		71.600	501.197
15	Arenan	4.210		252.584		25.258		12.629		12.629		50.517	353.617
16	Sidanegara	3.819		229.124		22.912		11.456		11.456		45.825	320.773
17	Pagerandong	2.543		152.565		15.257		7.628		7.628		30.513	213.591
18	Sidareja	5.376		322.571		32.257		16.129		16.129		64.514	451.599
Jumlah		74.409		4.464.526		446.453		223.226		223.226		892.905	6.250.336

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

3. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Air limbah domestik yang terdapat di Lingkungan Hunian Kaligondang berasal dari air cucian, mandi dan dapur (*grey water*). Rantai layanan pengolahan air limbah domestik pada Lingkungan Hunian Kaligondang belum melakukan sistem pengolahan air limbah domestik secara terpusat (SPALD-T), akan tetapi sudah melakukan sistem pengolahan air limbah domestik secara setempat (SPALD-S). Rata-rata rumah tangga masih menggunakan pengelolaan sistem setempat (*onsite sistem*) yaitu membuang limbah rumah tangga langsung ke saluran drainase atau di sekitar rumah, dan permukiman yang berdekatan dengan sungai membuang air limbah langsung ke sungai.

Dari adanya sistem pengolahan air limbah domestik yang belum memadai dan terpadu, diperlukan proyeksi kebutuhan sistem pengolahan air limbah domestik di Lingkungan Hunian Kaligondang hingga 20 tahun mendatang. Proyeksi air limbah yang dihasilkan di Lingkungan Hunian Kaligondang pada tahun 2041 mencapai 5.000.269 liter/hari. Hal tersebut maka diperlukan sarana penampungan dan pengolahan tinja, perlunya keterpaduan antara sarana sanitasi tersebut agar menciptakan praktik sanitasi yang terpadu dan tidak mencemari lingkungan.

Tabel IV.132.
Proyeksi Air Limbah di Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Total Kebutuhan	Standar	Proyeksi Air Limbah
1	Lamongan	2.952	247.976	80 % dari Air Bersih	198.381
2	Tejasari	2.923	245.490		196.392
3	Cilapar	2.317	194.653		155.723
4	Penolih	4.457	374.352		299.482
5	Sinduraja	5.559	466.936		373.549
6	Selakambang	9.936	834.611		667.689
7	Selanegara	3.887	326.497		261.198
8	Kaligondang	3.668	308.148		246.518
9	Brecek	1.587	133.337		106.669
10	Sempor Lor	1.425	119.687		95.750
11	Penaruban	5.112	429.389		343.512
12	Kalikajar	4.984	418.694		334.955
13	Kembaran Wetan	3.688	309.788		247.831
14	Slinga	5.967	501.197		400.957
15	Arenan	4.210	353.617		282.894
16	Sidanegara	3.819	320.773		256.618
17	Pagerandong	2.543	213.591		170.873
18	Sidareja	5.376	451.599		361.279
Jumlah		74.409	6.250.336		5.000.269

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

4. Sistem Persampahan

Kabupaten Purbalingga berada memiliki satu tempat pemrosesan akhir (TPA) persampahan yang berlokasi di Desa Bedagas, Kecamatan Pengadegan. Lingkungan Hunian Kaligondang memiliki prasarana pengurangan persampahan yaitu berupa Bank Sampah sebanyak 3 unit.

Pada umumnya jaringan persampahan di Lingkungan Hunian Kaligondang sudah memadai dan melayani setiap penduduk. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase, tegalan, maupun di sungai. Sehingga adanya jaringan persampahan tersebut dirasa kurang optimal, karena mayoritas masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Maka dari itu perlunya peningkatan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, serta perluasan jangkauan pelayanan pengangkutan sampah, baik dari pemerintah maupun secara swadaya. Berikut ini merupakan proyeksi timbulan sampah di Lingkungan Hunian Kaligondang tahun 2041 berdasarkan analisis perhitungan SNI.

Tabel IV.133.
Proyeksi Timbulan Sampah Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah Domestik (m3)	Timbulan Sampah Non Domestik (m3)	Total Timbulan Sampah
1	Lamongan	2.952	5,90	1,18	7,09
2	Tejasari	2.923	5,85	1,17	7,01
3	Cilapar	2.317	4,63	0,93	5,56
4	Penolih	4.457	8,91	1,78	10,70
5	Sinduraja	5.559	11,12	2,22	13,34
6	Selakambang	9.936	19,87	3,97	23,85
7	Selanegara	3.887	7,77	1,55	9,33
8	Kaligondang	3.668	7,34	1,47	8,80
9	Brecek	1.587	3,17	0,63	3,81
10	Sempor Lor	1.425	2,85	0,57	3,42
11	Penaruban	5.112	10,22	2,04	12,27
12	Kalikajar	4.984	9,97	1,99	11,96
13	Kembaran Wetan	3.688	7,38	1,48	8,85
14	Slinga	5.967	11,93	2,39	14,32
15	Arenan	4.210	8,42	1,68	10,10
16	Sidanegara	3.819	7,64	1,53	9,16
17	Pagerandong	2.543	5,09	1,02	6,10
18	Sidareja	5.376	10,75	2,15	12,90

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

5. Jaringan Drainase

Jaringan drainase di Lingkungan Hunian Kaligondang terdiri dari jaringan drainase primer berupa sungai, drainase sekunder berupa drainase di jalan utama, dan jaringan drainase tersier di lingkungan permukiman. Jaringan drainase di Lingkungan Hunian Kaligondang berupa drainase terbuka dan drainase tertutup. Jaringan drainase di Lingkungan Hunian Kaligondang di beberapa wilayah belum berfungsi optimal, karena sebagian tersumbat oleh sampah. Hal ini dapat dilihat dari munculnya genangan di beberapa wilayah terutama saat hujan. Selain itu beberapa sungai yang ada di Lingkungan Hunian Kaligondang mengalami pendangkalan.

Jaringan drainase di Lingkungan Hunian Kaligondang terdiri dari jaringan drainase primer, drainase sekunder, dan jaringan drainase tersier. Saluran primer adalah saluran yang menerima masukan aliran dari saluran-saluran sekunder, dimana aliran dari saluran primer ini langsung dialirkan ke badan air, yaitu berupa sungai. Saluran sekunder adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran dari saluran-saluran tersier

dan meneruskan aliran ke saluran primer. Sedangkan saluran tersier adalah saluran yang menerima aliran air langsung dari saluran-saluran pembuangan rumah, umumnya saluran tersier ini adalah saluran kiri kanan jalan perumahan.

Penanganan drainase selama ini masih belum menyentuh drainase yang berbasis lingkungan. Drainase yang telah terbangun sementara hanya difungsikan sebagai pengering jalan badan jalan. Adapun penanganan drainase lingkungan dilaksanakan secara gotong royong tanpa adanya perencanaan yang kongkrit. Melihat kondisi tersebut, maka kebutuhan akan perda tentang pengelolaan drainase lingkungan sangat diperlukan dalam rangka meraih komitmen semua stakeholder tentang pentingnya pengelolaan drainase lingkungan.

Dengan melihat peta rawan banjir dari SSK Kabupaten Purbalingga 2021 dapat diketahui wilayah yang rawan terhadap banjir, dimana terdapat 3 perumahan yang berlokasi di daerah rawan banjir. Luas daerah rawan banjir yang terdapat di Lingkungan Hunian Kaligondang sebesar 151,29 Ha.

Tabel IV.134.
Sebaran Daerah Rawan Banjir Lingkungan Hunian Kaligondang

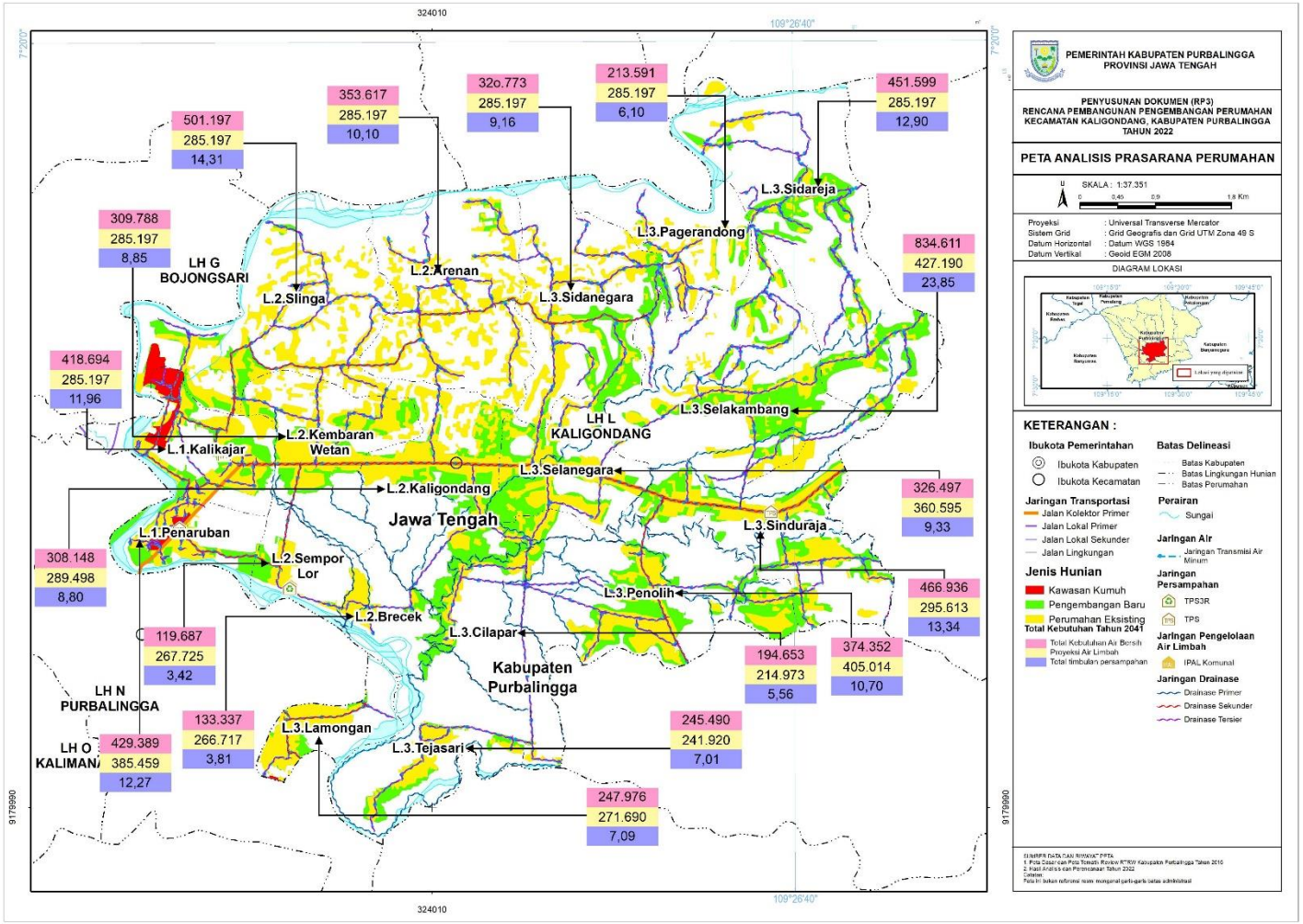
LH	Perumahan	Luas (Ha)
Kaligondang	Cilapar	57,62
	Lamongan	45,38
	Tejasari	48,29

Sumber: SSK Kabupaten Purbalingga, 2021

Dari adanya permasalahan drainase pada kondisi eksisting, perlu adanya kegiatan penanganan khusus untuk mengoptimalkan drainase di perkotaan. Pengembangan sistem drainase disusun untuk meningkatkan pelayanan sistem drainase dan keterpaduan sistem drainase. Kebutuhan pengembangan dan keterpaduan sistem drainase dapat mengacu pada Tata Cara Penyusunan Rencana Induk Drainase Perkotaan. Dimana kebutuhan sistem drainase terpadu dapat ditinjau dari beberapa tahapan dan aspek, seperti topografi, hidrologi, tataguna tanah, debit rencana masing-masing saluran, hingga penetapan garis sempadan.

6. Sistem Proteksi Kebakaran

Berdasarkan Permen PU Nomor 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknik Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan, terdapat beberapa kebutuhan untuk penanganan sistem proteksi kebakaran yang terpadu, diantaranya adalah sarana penyelamatan, sistem proteksi pasif, sistem proteksi aktif. Dimana dalam pemenuhan kebutuhan sistem proteksi kebakaran yang terpadu, pemerintah daerah ataupun instansi teknis yang berwenang dapat merencanakan sistem proteksi kebakaran dengan beberapa komponen yang dibutuhkan, seperti rencana tapak, seluruh sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif kebakaran, serta sarana menuju jalan ke luar yang aman.



Gambar 4.42.
Peta Analisis Prasarana Perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang

B. Sarana

1. Sarana Pemerintahan

Sarana pemerintahan yang terdapat di Lingkungan Hunian Kaligondang meliputi balai desa, balai kelurahan, kantor desa, dan kantor kelurahan. Sarana pemerintahan yang terdapat di Lingkungan Hunian Kaligondang berupa balai desa, balai kelurahan, kantor desa, dan kantor kelurahan. Seluruh wilayah di Lingkungan Hunian Kaligondang merupakan desa sejumlah 18 desa. Perlunya penambahan kebutuhan sarana pemerintahan di Lingkungan Hunian Kaligondang untuk meningkatkan keterpaduan antar hirarki sarana pemerintahan yang dapat berupa balai pertemuan.

2. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang terdapat di Lingkungan Hunian Kaligondang terdiri dari sekolah dasar (SD) sederajat, sekolah menengah pertama (SMP) sederajat, dan sekolah menengah akhir (SMA) sederajat.

Permasalahan sarana pendidikan di Lingkungan Hunian Kaligondang yaitu masih minimnya jumlah sarana pendidikan. Tentunya sarana pendidikan diperlukan pada suatu wilayah. Maka dari itu perlunya penambahan sarana pendidikan berupa SD hingga perguruan tinggi di Lingkungan Hunian Kaligondang agar dapat menjangkau ke seluruh wilayah dan tidak terpusat di pusat perkotaan saja.

Proyeksi kebutuhan sarana pendidikan pada tahun 2041 di Lingkungan Hunian Kaligondang diperlukan untuk mengembangkan keterpaduan antar hirarki sarana pendidikan. Terlebih lagi saat ini di Indonesia mewajibkan wajib belajar 12 tahun bagi penduduknya. Kebutuhan sarana pendidikan di Lingkungan Hunian Kaligondang tahun 2041 berupa SD sebanyak 13 unit, SMP sebanyak 9 unit, dan SMA sebanyak 11 unit. Perlunya penambahan sarana pendidikan ini agar kebutuhan pendidikan masyarakat Lingkungan Hunian Kaligondang dapat terpenuhi.

Tabel IV.135.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	TK			SD			
			Jumlah Eksisting	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Lamongan	2.952	2	1	-1	2	1.200	2	0
2	Tejasari	2.923	1	1	0	2	1.200	2	0
3	Cilapar	2.317	0	1	1	1	1.200	2	1
4	Penolih	4.457	4	1	-3	4	1.200	4	0
5	Sinduraja	5.559	2	1	-1	3	1.200	5	2
6	Selakambang	9.936	4	1	-3	5	1.200	8	3
7	Selanegara	3.887	2	1	-1	2	1.200	3	1
8	Kaligondang	3.668	1	1	0	3	1.200	3	0
9	Brecek	1.587	1	1	0	1	1.200	1	0
10	Sempor Lor	1.425	1	1	0	1	1.200	1	0
11	Penaruban	5.112	3	1	-2	3	1.200	4	1
12	Kalikajar	4.984	2	1	-1	2	1.200	4	2
13	Kembaran Wetan	3.688	1	1	0	4	1.200	3	-1
14	Slinga	5.967	4	1	-3	5	1.200	5	0
15	Arenan	4.210	3	1	-2	3	1.200	4	1
16	Sidanegara	3.819	1	1	0	3	1.200	3	0
17	Pagerandong	2.543	1	1	0	2	1.200	2	0
18	Sidareja	5.376	2	1	-1	3	1.200	4	1
Jumlah		74.409	35	18	-17	49		62	13

Lanjutan…

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	SMP				SMA			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Lamongan	2.952	0	4.800	1	1	0	6.000	0	0
2	Tejasari	2.923	0	4.800	1	1	0	6.000	0	0

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	SMP				SMA			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
3	Cilapar	2.317	0	4.800	0	0	0	6.000	0	0
4	Penolih	4.457	0	4.800	1	1	0	6.000	1	1
5	Sinduraja	5.559	0	4.800	1	1	0	6.000	1	1
6	Selakambang	9.936	1	4.800	2	1	0	6.000	2	2
7	Selanegara	3.887	1	4.800	1	0	1	6.000	1	0
8	Kaligondang	3.668	1	4.800	1	0	0	6.000	1	1
9	Brecek	1.587	0	4.800	0	0	0	6.000	0	0
10	Sempor Lor	1.425	0	4.800	0	0	0	6.000	0	0
11	Penaruban	5.112	1	4.800	1	0	0	6.000	1	1
12	Kalikajar	4.984	0	4.800	1	1	0	6.000	1	1
13	Kembaran Wetan	3.688	0	4.800	1	1	0	6.000	1	1
14	Slinga	5.967	1	4.800	1	0	0	6.000	1	1
15	Arenan	4.210	1	4.800	1	0	0	6.000	1	1
16	Sidanegara	3.819	1	4.800	1	0	0	6.000	1	1
17	Pagerandong	2.543	0	4.800	1	1	0	6.000	0	0
18	Sidareja	5.376	0	4.800	1	1	0	6.000	1	1
Jumlah		74.409	7		16	9	1	6.000	12	11

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

3. Sarana Peribadatan

Mayoritas sarana peribadatan yang terdapat di Lingkungan Hunian Kaligondang adalah masjid dan mushola. Sebaran masjid dan mushola sudah menjangkau ketersediaannya di seluruh wilayah di Lingkungan Hunian Kaligondang.

Proyeksi kebutuhan sarana peribadatan di Lingkungan Hunian Kaligondang pada tahun 2041 berupa 94 unit mushola. Meskipun pada kondisi eksisting di Lingkungan Hunian Kaligondang ketersediaan mushola dapat dikatakan banyak, tetapi kebutuhan mushola harus disesuaikan setiap perumahan. Tidak hanya memerlukan penambahan kebutuhan mushola dan masjid, perlunya penambahan sarana peribadatan lain agar keterpaduan sarana peribadatan di Lingkungan Hunian Kaligondang dapat berlangsung.

Tabel IV.136.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Masjid				Musholla				Gereja		
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan
1	Lamongan	2.952	4	2.500	1	-3	3	250	12	9	0	Mengikuti paroki	Mengikuti paroki
2	Tejasari	2.923	4	2.500	1	-3	9	250	12	3	0		
3	Cilapar	2.317	5	2.500	1	-4	10	250	9	-1	0		
4	Penolih	4.457	4	2.500	2	-2	21	250	18	-3	0		
5	Sinduraja	5.559	7	2.500	2	-5	4	250	22	18	0		
6	Selakambang	9.936	10	2.500	4	-6	14	250	40	26	0		
7	Selanegara	3.887	5	2.500	2	-3	13	250	16	3	0		
8	Kaligondang	3.668	4	2.500	1	-3	13	250	15	2	0		
9	Brecek	1.587	3	2.500	1	-2	6	250	6	0	0		
10	Sempor Lor	1.425	1	2.500	1	0	5	250	6	1	0		
11	Penaruban	5.112	3	2.500	2	-1	13	250	20	7	1		
12	Kalikajar	4.984	7	2.500	2	-5	12	250	20	8	0		
13	Kembaran Wetan	3.688	4	2.500	1	-3	15	250	15	0	0		
14	Slinga	5.967	12	2.500	2	-10	10	250	24	14	0		
15	Arenan	4.210	7	2.500	2	-5	13	250	17	4	0		
16	Sidanegara	3.819	3	2.500	2	-1	11	250	15	4	0		
17	Pagerandong	2.543	2	2.500	1	-1	11	250	10	-1	0		
18	Sidareja	5.376	7	2.500	2	-5	21	250	22	1	0		
Jumlah		74.409	92	2.500	30	-62	204	250	298	94	1		

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

4. Sarana Kesehatan

Ketersediaan sarana kesehatan di Lingkungan Hunian Kaligondang terdiri dari puskesmas, puskesmas pembantu, praktek dokter, dan apotek. Dimana sebaran sarana kesehatan yang dapat menjangkau seluruh wilayah Lingkungan Hunian Kaligondang hanya berupa praktek dokter dan apotek. Kebutuhan sarana kesehatan di Lingkungan Hunian Kaligondang perlu diadakan penambahan sarana agar dapat menciptakan keterpaduan antar hirarki sarana kesehatan. Proyeksi kebutuhan sarana kesehatan di Lingkungan Hunian Kaligondang pada tahun 2041 yaitu berupa praktek dokter sebanyak 8 unit. Sementara itu, kebutuhan rumah sakit dan puskesmas sudah dapat menjangkau pelayanan kesehatan di Lingkungan Hunian Kaligondang hingga tahun 2041. Namun, seiring dengan pertambahan penduduk maka nantinya akan diperlukan penambahan sarana kesehatan baik berupa rumah sakit maupun klinik, agar dapat menjangkau dan melayani penduduk yang tinggal di wilayah perbatasan.

Tabel IV.137.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Puskesmas				Poliklinik			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Lamongan	2.952	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
2	Tejasari	2.923	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
3	Cilapar	2.317	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
4	Penolih	4.457	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
5	Sinduraja	5.559	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
6	Selakambang	9.936	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
7	Selanegara	3.887	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
8	Kaligondang	3.668	1	120.000	0	-1	0	30.000	0	0
9	Brecek	1.587	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
10	Sempor Lor	1.425	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
11	Penaruban	5.112	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
12	Kalikajar	4.984	1	120.000	0	-1	1	30.000	0	-1
13	Kembaran Wetan	3.688	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
14	Slinga	5.967	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
15	Arenan	4.210	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
16	Sidanegara	3.819	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
17	Pagerandong	2.543	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
18	Sidareja	5.376	0	120.000	0	0	0	30.000	0	0
Jumlah		74.409	2	120.000	1	-1	1	30.000	0	-1

Lanjutan…

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Puskesmas Pembantu				Praktik Dokter			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Lamongan	2.952	0	30.000	0	0	0	5.000	1	1

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Puskesmas Pembantu				Praktik Dokter			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
2	Tejasari	2.923	0	30.000	0	0	0	5.000	1	1
3	Cilapar	2.317	0	30.000	0	0	0	5.000	0	0
4	Penolih	4.457	0	30.000	0	0	0	5.000	1	1
5	Sinduraja	5.559	0	30.000	0	0	1	5.000	1	0
6	Selakambang	9.936	1	30.000	0	-1	0	5.000	2	2
7	Selanegara	3.887	0	30.000	0	0	0	5.000	1	1
8	Kaligondang	3.668	0	30.000	0	0	3	5.000	1	-2
9	Brecek	1.587	0	30.000	0	0	0	5.000	0	0
10	Sempor Lor	1.425	0	30.000	0	0	0	5.000	0	0
11	Penaruban	5.112	0	30.000	0	0	2	5.000	1	-1
12	Kalikajar	4.984	0	30.000	0	0	1	5.000	1	0
13	Kembaran Wetan	3.688	0	30.000	0	0	0	5.000	1	1
14	Slinga	5.967	0	30.000	0	0	0	5.000	1	1
15	Arenan	4.210	0	30.000	0	0	0	5.000	1	1
16	Sidanegara	3.819	1	30.000	0	-1	0	5.000	1	1
17	Pagerandong	2.543	0	30.000	0	0	0	5.000	1	1
18	Sidareja	5.376	1	30.000	0	-1	0	5.000	1	1
Jumlah		74.409	3	30.000	2	-1	7	5.000	15	8

Lanjutan…

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Apotek			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Lamongan	2.952	0	30.000	0	0
2	Tejasari	2.923	0	30.000	0	0
3	Cilapar	2.317	0	30.000	0	0
4	Penolih	4.457	0	30.000	0	0
5	Sinduraja	5.559	2	30.000	0	-2
6	Selakambang	9.936	0	30.000	0	0

No	Perumahan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Apotek			
			Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
7	Selanegara	3.887	0	30.000	0	0
8	Kaligondang	3.668	1	30.000	0	-1
9	Brecek	1.587	0	30.000	0	0
10	Sempor Lor	1.425	0	30.000	0	0
11	Penaruban	5.112	1	30.000	0	-1
12	Kalikajar	4.984	1	30.000	0	-1
13	Kembaran Wetan	3.688	0	30.000	0	0
14	Slinga	5.967	0	30.000	0	0
15	Arenan	4.210	0	30.000	0	0
16	Sidanegara	3.819	0	30.000	0	0
17	Pagerandong	2.543	0	30.000	0	0
18	Sidareja	5.376	0	30.000	0	0
Jumlah		74.409	5	30.000	2	-3

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

5. Sarana Perdagangan dan Jasa

Sarana perdagangan yang terdapat di Lingkungan Hunian Kaligondang tahun 2020 berupa pasar, pertokoan, dan toko/warung. Jika dilihat dari cakupan pelayanannya, sarana perdagangan di Lingkungan Hunian Kaligondang terutama pasar sudah cukup melayani dan menjangkau pelayanannya ke seluruh wilayah. Dari adanya ketersediaan sarana perdagangan tersebut, pemerintah maupun masyarakat dapat mengembangkan sarana perdagangan agar lebih optimal, seperti penambahan jaringan persampahan disekitar pasar ataupun pengadaan ruang terbuka hijau agar terdapat sirkulasi udara yang baik dalam pasar tersebut.

Selain tersedianya pasar, di Lingkungan Hunian Kaligondang saat ini sudah cukup melayani dan menjangkau pelayanannya untuk kebutuhan sarana perdagangan lain seperti pertokoan dan toko/warung. Hal ini diharapkan ketersediaan toko dapat melayani setiap lingkungan permukiman, agar kebutuhan penduduk sehari-hari dapat terpenuhi walaupun akses dari tempat tinggal ke pasar atau toko swalayan terlalu jauh.

Tabel IV.138.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan dan Jasa Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2041

No	Jenis	Jumlah Penduduk (jiwa)	Jumlah Eksisting	Standar Kebutuhan	Jumlah Kebutuhan	Deviasi
1	Pasar	74.409	3	30.000	2	-1
2	Pertokoan	74.409	16	6.000	12	-4
3	Toko/ Warung	74.409	508	250	298	-210

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

6. Sarana Kebudayaan dan Rekreasi

Kebudayaan di Lingkungan Hunian Kaligondang beraneka ragam, meliputi ujungan, suran, begalan, angguk, aplang/ dames, calung, ebeg/ kuda lumping, lengger, dan lainnya. Kebudayaan tersebut di dukung oleh beberapa organisasi kesenian yang terdapat di Lingkungan Hunian Kaligondang.

Beragamnya sarana kebudayaan dan rekreasi di Lingkungan Hunian Kaligondang menjadikan banyaknya faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam mendukung kebudayaan dan rekreasi. Jika faktor pendukung kebudayaan dan rekreasi tersebut tidak dapat dipenuhi, maka akan timbul permasalahan. Permasalahan pada sarana kebudayaan dan rekreasi di Lingkungan Hunian Kaligondang seperti aksesibilitas menuju tempat wisata yang belum memadai, kurangnya dukungan infrastruktur seperti jalan, parkir, terminal, drainase, dan persampahan serta minimnya sarana penginapan untuk pengunjung atau wisatawan luar kabupaten. Maka dari itu isu strategis pada sarana kebudayaan dan rekreasi di Lingkungan Hunian Kaligondang yaitu belum optimalnya sistem kepariwisataan.

Selain ketersediaan sarana kebudayaan dan rekreasi yang telah terdapat di Lingkungan Hunian Kaligondang, perlunya kebutuhan sarana kebudayaan berupa balai warga, balai serbaguna, dan gedung serbaguna untuk mendukung sarana kebudayaan dan rekreasi yang terpadu. Hal ini dikarenakan pentingnya balai warga sebagai tempat berkumpul untuk mengadakan kegiatan-kegiatan umum pada cakupan lingkungan

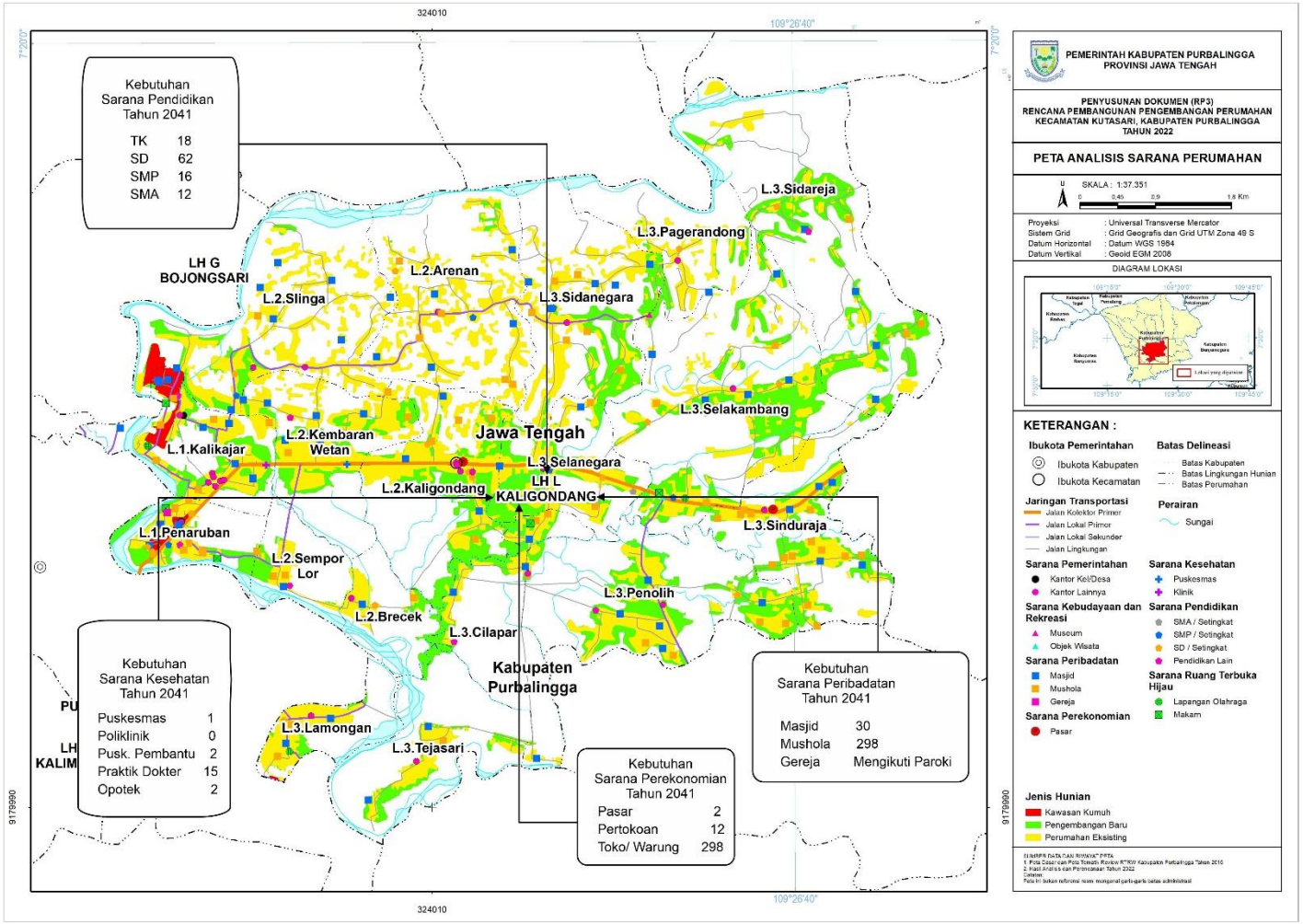
permukiman. Sementara itu, kebutuhan balai serbaguna juga untuk mendukung kegiatan masyarakat yang umumnya bersifat komersial ataupun kepentingan umum.

7. Sarana Ruang Terbuka Hijau

Sarana ruang terbuka hijau sangat penting bagi penghijauan dan sirkulasi suatu kota/ kawasan. Namun saat ini umumnya mayoritas wilayah banyak lahan RTH yang dialihfungsikan menjadi lahan terbangun untuk meningkatkan perekonomian wilayahnya. Sama halnya pada permasalahan RTH di Lingkungan Hunian Kaligondang yang berubah fungsi menjadi kawasan perekonomian dan ruang komersial lainnya. Akibatnya banyak lahan RTH yang berkurang luasannya. Maka dari itu perlunya penambahan proporsi RTH agar terpenuhi 30% untuk seluruh wilayah.

Sarana ruang terbuka hijau yang terdapat di Lingkungan Hunian Kaligondang meliputi ruang terbuka hijau perkotaan, ruang terbuka hijau jalur hijau jalan, dan ruang terbuka hijau fungsi tertentu. Ruang terbuka hijau perkotaan di Lingkungan Hunian Kaligondang berupa hutan kota dan taman lingkungan.

Selain untuk mendukung pengoptimalan proporsi RTH sebesar 30%, perlunya penambahan kebutuhan sarana RTH berupa taman lingkungan untuk mendukung keterpaduan antar hirarki sarana RTH. Hal ini dikarenakan, kebutuhan taman lingkungan harus disesuaikan dengan cakupan lingkungan permukiman.



Gambar 4.43.
Peta Analisis Sarana Perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang

C. Utilitas

Jangkauan pelayanan jaringan listrik yang disediakan oleh PLN di Lingkungan Hunian Kaligondang sudah mampu melayani hingga cakupan penduduk kabupaten. Dimana setiap penduduk kecamatan sudah menjadi pelanggan dari adanya listrik PLN.

Selain ketersediaan jaringan listrik eksisting, perlu adanya penambahan kebutuhan listrik domestik dan non domestik agar menciptakan keterpaduan antar hirarki jaringan listrik. Proyeksi kebutuhan listrik di Lingkungan Hunian Kaligondang pada tahun 2041 sebesar 44.645.259 KVA terdiri dari kebutuhan listrik domestik sebesar 22.322.630 KVA dan kebutuhan listrik non domestik sebesar 22.322.630 KVA. Kebutuhan listrik domestik ini untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sedangkan, kebutuhan listrik non domestik di Lingkungan Hunian Kaligondang berupa industri, fasilitas umum, penerangan jalan, dan cadangan.

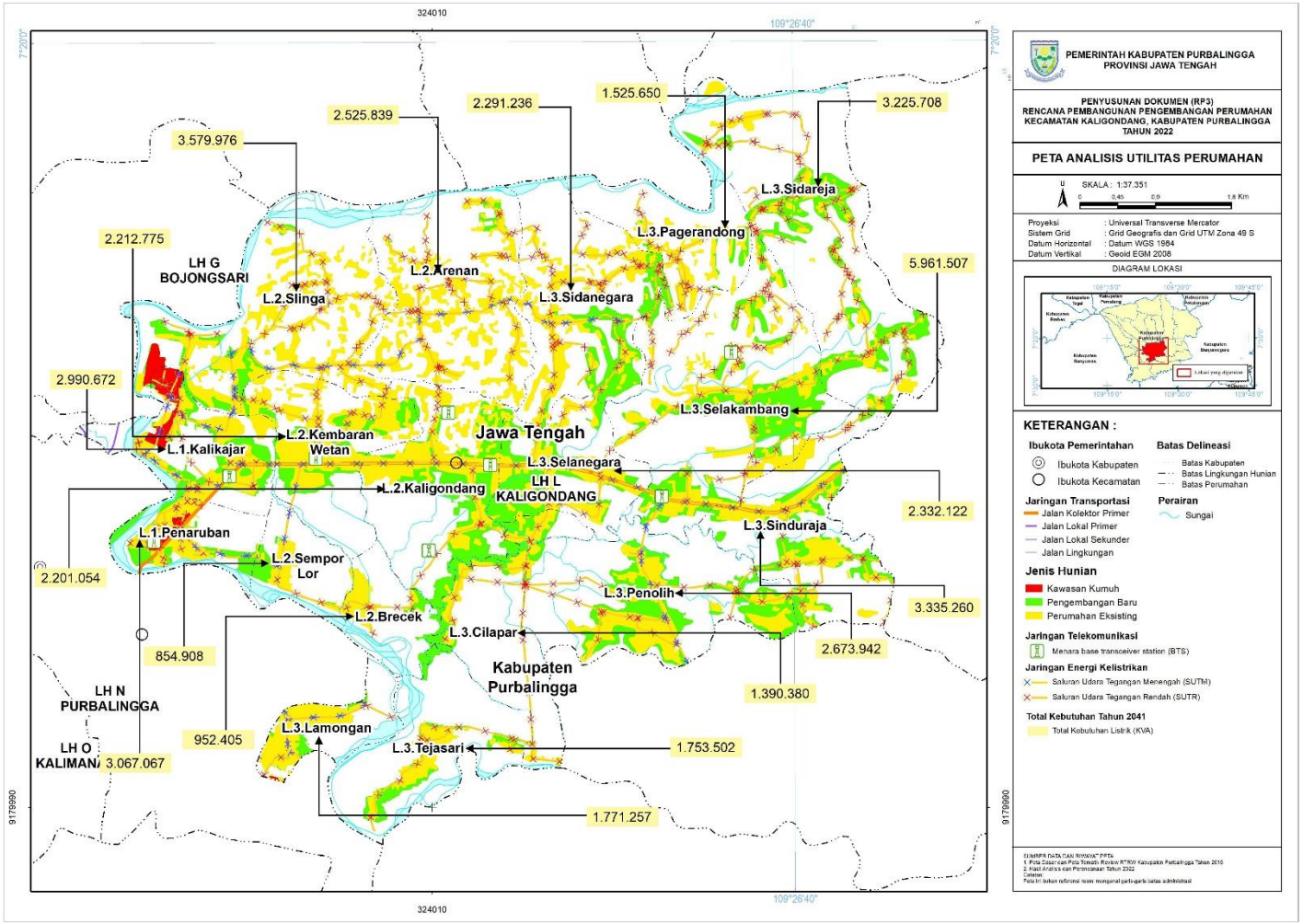
Tabel IV.139.
Proyeksi Kebutuhan Jaringan Listrik Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2041

No	Perumahan	Jumlah KK	Domestik	Non Domestik				Total Kebutuhan Listrik (KVA)
				Industri 25% x Domestik	Fasilitas 25% x Domestik	Penerangan Jalan 40% x Domestik	Cadangan 10% x Domestik	
1	Lamongan	984	885.629	221.407	221.407	354.251	88.563	1.771.257
2	Tejasari	974	876.751	219.188	219.188	350.700	87.675	1.753.502
3	Cilapar	772	695.190	173.798	173.798	278.076	69.519	1.390.380
4	Penolih	1.486	1.336.971	334.243	334.243	534.788	133.697	2.673.942
5	Sinduraja	1.853	1.667.630	416.907	416.907	667.052	166.763	3.335.260
6	Selakambang	3.312	2.980.753	745.188	745.188	1.192.301	298.075	5.961.507
7	Selanegara	1.296	1.166.061	291.515	291.515	466.424	116.606	2.332.122
8	Kaligondang	1.223	1.100.527	275.132	275.132	440.211	110.053	2.201.054
9	Brecek	529	476.202	119.051	119.051	190.481	47.620	952.405
10	Sempor Lor	475	427.454	106.864	106.864	170.982	42.745	854.908
11	Penaruban	1.704	1.533.534	383.383	383.383	613.413	153.353	3.067.067
12	Kalikajar	1.661	1.495.336	373.834	373.834	598.134	149.534	2.990.672
13	Kembaran Wetan	1.229	1.106.387	276.597	276.597	442.555	110.639	2.212.775
14	Slinga	1.989	1.789.988	447.497	447.497	715.995	178.999	3.579.976
15	Arenan	1.403	1.262.919	315.730	315.730	505.168	126.292	2.525.839
16	Sidanegara	1.273	1.145.618	286.404	286.404	458.247	114.562	2.291.236
17	Pagerandong	848	762.825	190.706	190.706	305.130	76.283	1.525.650
18	Sidareja	1.792	1.612.854	403.214	403.214	645.142	161.285	3.225.708
Jumlah		24.803	22.322.630	5.580.657	5.580.657	8.929.052	2.232.263	44.645.259

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Permasalahan jaringan telekomunikasi di Lingkungan Hunian Kaligondang masih terdapat beberapa daerahwilayah yang tidak dijangkau oleh layanan sinyal seluler, sehingga daerah tersebut dapat disebut *blank spot*. Hal ini dikarenakan belum meratanya persebaran Menara BTS di beberapa daerah, terutama daerah yang terpecil atau daerah perbukitan yang aksesibilitasnya terhambat oleh kemiringan lereng. Maka dari itu perlunya penambahan dan pemerataan jangkauan Menara BTS di Lingkungan Hunian Kaligondang, agar masyarakat dapat terlayani dengan sinyal seluler. Terlebih lagi pada zaman dengan teknologi yang berkembang pesat, menjadikan internet sebagai kebutuhan primer saat ini.

Sebaran dan ketersediaan Menara telekomunikasi di Lingkungan Hunian Kaligondang sudah memadai dan merata. Namun, masih terdapat beberapa wilayah yang minim dalam pengadaan Menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi jarang ditemukan di Lingkungan Hunian Kaligondang. Namun, pada saat ini kebutuhan akan telekomunikasi maupun jaringan seluler tidak hanya dibutuhkan pada pusat kota saja, tetapi pada wilayah terpencil juga sangat dibutuhkan. Untuk itu perlunya penambahan Menara telekomunikasi agar tidak terjadi *blank spot* sinyal seluler di wilayah tertentu.



Gambar 4.44.
Peta Analisis Utilitas Perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang

4.7.2. Analisis Keterpaduan PSU Perumahan

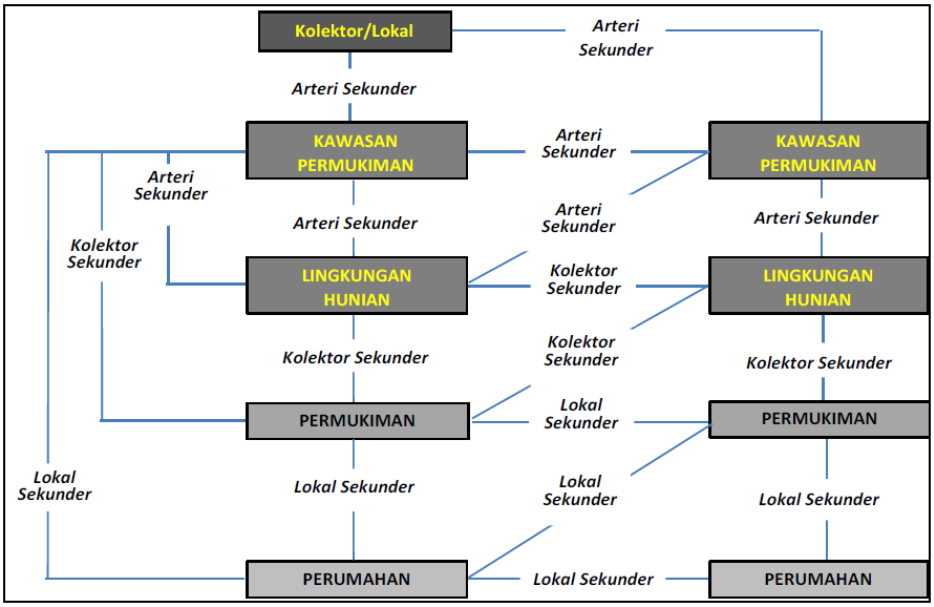
4.7.2.1. Rencana Keterpaduan Penyediaan Prasarana Lingkungan Hunian

A. Rencana Keterpaduan Sistem Jaringan Jalan

Sistem jaringan jalan pada perumahan merupakan sistem jaringan jalan sekunder dengan fungsi jalan lokal dan jalan lingkungan untuk kawasan perkotaan dan jaringan jalan primer dengan fungsi jalan lingkungan untuk kawasan perdesaan yang terintegrasi dengan jaringan drainase dan jaringan utilitas umum. Keterpaduan jaringan jalan pada hirarki perumahan dilaksanakan dengan penyediaan:

a. Jalan lokal sekunder I dengan jalan kelas III a pada Kawasan Permukiman;
b. Jalan lokal sekunder II dengan jalan kelas III b pada Lingkungan Hunian;
c. Jalan lingkungan primer I atau lingkungan sekunder I dengan jalan kelas IIIc pada Permukiman; dan
d. Jalan lingkungan primer II atau lingkungan sekunder II dengan jalan kelas III c pada Perumahan.

Keterpaduan sistem jaringan jalan dilakukan dengan mengidentifikasi sistem hirarki dan standar teknis pada kawasan permukiman. Keterpaduan sistem jaringan jalan pada lingkungan hunian mengacu kepada sistem di bawah ini.



Gambar 4.45.
Sistem Keterpaduan Jaringan Jalan

Tabel IV.140.
Rencana Keterpaduan Jaringan Jalan

PRASARANA JALAN	HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN					SISTEM	KRITERIA	KOMPONEN
	RUMAH	PERUMAHAN	PERMUKIMAN	LINGKUNGAN HUNIAN	KAWASAN PERMUKIMAN			
JALAN ARTERI SEKUNDER (JAS)					√	• Menghubungkan kawasan permukiman dengan Jalan Arteri Sekunder menuju Kawasan Primer	• Jalan Kelas I • Muatan sumbu terberat 10 ton • Lebar jalan ≥ 11 m • RUWASJA 15 m	• Memiliki bahu jalan • Memiliki saluran dainase • Memiliki jalur pejalan kaki / pedestrian • Memiliki jalur hijau
JALAN ARTERI SEKUNDER (JAS)				√		• Menghubungkan kawasan permukiman dengan lingkungan hunian	• Jalan Kelas I • Muatan sumbu terberat 10 ton • Lebar jalan ≥ 11 m • RUWASJA 15 m	• Memiliki bahu jalan • Memiliki saluran dainase • Memiliki jalur pejalan kaki / pedestrian • Memiliki jalur hijau
JALAN KOLEKTOR SEKUNDER (JKS)			√			• Menghubungkan lingkungan hunian dengan permukiman	• Jalan Kelas II • Muatan sumbu terberat 8 ton • Lebar jalan 9 m • RUWASJA 5 m	• Memiliki bahu jalan • Memiliki saluran dainase • Memiliki jalur pejalan kaki / pedestrian • Memiliki jalur hijau
JALAN LOKAL SEKUNDER (JLS)		√				• Menghubungkan permukiman dengan perumahan	• Jalan Kelas III • Muatan sumbu terberat 5 ton • Lebar jalan 7,5 m • RUWASJA 3 m	• Memiliki bahu jalan • Memiliki saluran dainase
JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER (JLING-S)	√					• Menghubungkan antar rumah	• Jalan Kelas III • Muatan sumbu terberat 5 ton • Lebar jalan 6,5 m • RUWASJA 2 m	• Memiliki bahu jalan • Memiliki saluran dainase

B. Rencana Keterpaduan Sistem Jaringan Drainase

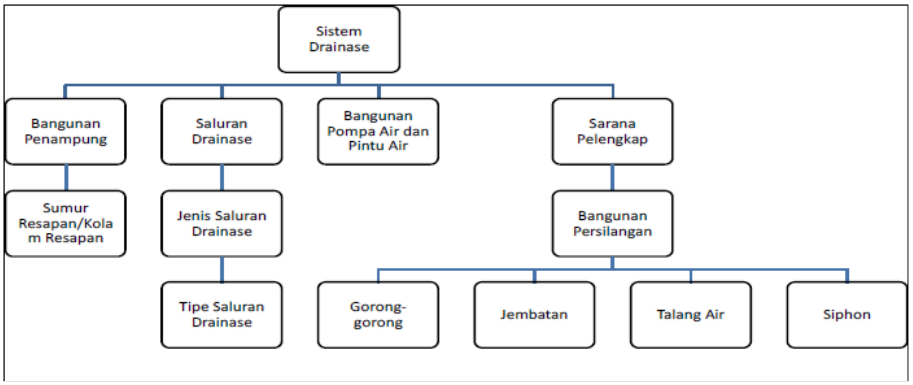
Sistem jaringan drainase terpadu dengan sistem jaringan jalan dan jaringan utilitas umum. Sistem teknis drainase perkotaan merupakan jaringan drainase yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, saluran lokal, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya. Pembangunan sistem drainase meliputi:

a. Sistem jaringan drainase;
b. Sistem penampungan; dan
c. Sistem peresapan.

Keterpaduan sistem jaringan drainase dilaksanakan dengan penyediaan:

a. Saluran induk pada Kawasan Permukiman;
b. Saluran sekunder pada Lingkungan Hunian;
c. Saluran tersier pada Permukiman; dan
d. Saluran lokal pada Perumahan.

Keterpaduan sistem jaringan drainase dilakukan dengan mengidentifikasi sistem hirarki dan standar teknis pada perumahan. Keterpaduan sistem jaringan drainase pada perumahan mengacu kepada sistem di bawah ini.



Gambar 4.46.
Sistem Keterpaduan Jaringan Drainase

Tabel IV.141.
Rencana Keterpaduan Jaringan Drainase

PRASARANA DRAINASE	HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN					SISTEM	KRITERIA	KOMPONEN
	RUMAH	PERUMAHAN	PERMUKIMAN	LINGKUNGAN HUNIAN	KAWASAN PERMUKIMAN			
SALURAN PRIMER					√	• Sistem Teknis Drainase Perkotaan • Sistem Drainase Utama • saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima	• Terbuka/ tertutup • Lebar saluran sesuai saluran primer skala Kabupaten/ Kota	• Man hole jika saluran tertutup • Bangunan persilangan (Gorong-gorong, Siphon Drainase)
SALURAN SEKUNDER				√		• Sistem Teknis Drainase Perkotaan • Sistem Drainase Utama • saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer	• Terbuka/ tertutup • Lebar saluran sesuai saluran sekunder skala Kabupaten/ Kota	• Man hole jika saluran tertutup • Bangunan persilangan (Gorong-gorong, Siphon Drainase)
SALURAN TERSIER			√			• Sistem Teknis Drainase Perkotaan • Sistem Drainase Utama • saluran drainase yang menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke saluran sekunder	• Terbuka/ tertutup • Lebar saluran sesuai saluran tersier skala Kabupaten/Kota	• Bangunan persilangan (Gorong-gorong, Siphon Drainase)
SALURAN LOKAL		√				• Sistem Teknis Drainase Perkotaan • Sistem Drainase Lokal	• Terbuka/ tertutup • Lebar saluran ≥ 1,0 m	• Bangunan persilangan (Gorong-gorong, Siphon Drainase)
BANGUNAN PERESAPAN	√					• Sistem Teknis Drainase Perkotaan	• Sumur resapan	
BANGUNAN TAMPUNGAN					√	• Sistem Teknis Drainase Perkotaan	• Kolam retensi/ tandon • Kolam detensi	

C. Rencana Keterpaduan Sistem Penyediaan Air Minum

Sistem penyediaan air minum (SPAM) dapat berupa jaringan perpipaan yang terintegrasi dengan sumber air baku atau bukan jaringan perpipaan yang terlindungi dengan mempertimbangkan kondisi ekologis setempat. Keterpaduan jaringan sistem penyediaan air minum dilaksanakan dengan penyediaan:

a. Unit air baku untuk SPAM jaringan perpipaan pada kawasan permukiman;

b. Unit produksi dan unit pengolahan untuk SPAM jaringan perpipaan pada lingkungan hunian;

c. Unit distribusi untuk SPAM jaringan perpipaan atau penampungan air hujan untuk SPAM bukan jaringan perpipaan pada Permukiman;

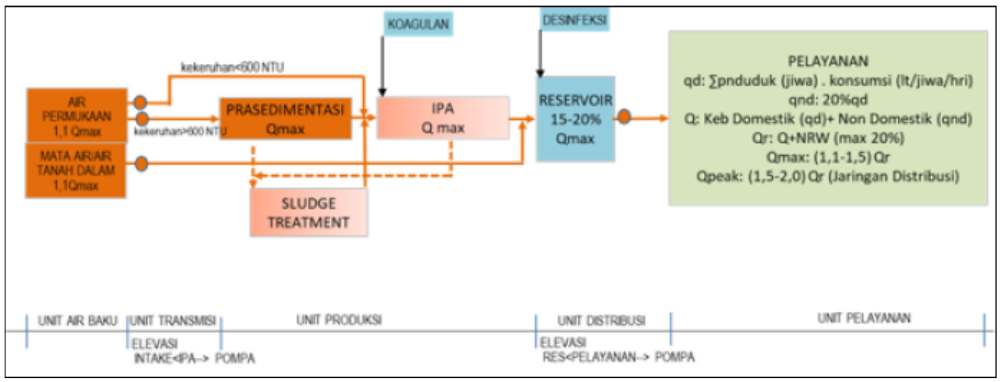
d. Unit distribusi untuk SPAM jaringan perpipaan atau penampungan air hujan, reverse osmosis, sumur dalam, instalasi pengolahan air sederhana, bangunan perlindungan

mata air, dan hidran umum untuk SPAM bukan jaringan perpipaan pada Perumahan; dan

e. Unit pelayanan untuk SPAM jaringan perpipaan atau sumur gali, sumur pompa tangan, penampungan air hujan, saringan rumah tangga, destilator surya atap kaca, reverse osmosis, dan sumur dalam untuk SPAM bukan jaringan perpipaan pada setiap rumah.

Keterpaduan sistem penyediaan air minum dilakukan dengan mengidentifikasi sistem hirarki dan standar teknis pada perumahan. Keterpaduan sistem penyediaan air minum pada perumahan mengacu kepada sistem di bawah ini.

A. Sistem Perpipaan



Gambar 4.47.
Sistem Keterpaduan Penyediaan Air Minum Perpipaan

B. Sistem Bukan Perpipaan

Tabel IV.142.
Sistem Keterpaduan Penyediaan Air Minum Bukan Perpipaan

Komponen	Persyaratan	Acuan
SPAM BJP skala individu: sumur gali terlindungi, sumur pompa penamoungan air hujan (PAH), saringan rumah tangga (SARUT), destilator surya atap kaca (DSAK)	Sesuai dengan peraturan atau pedoman teknis untuk SPAM BJP yang terlindungi	Permen PU No 01/PRT/M/2009
Untuk skala komunal dapat berupa sumur gali terlindungi, sumur pompa, sumur dalam, penampungan air hujan (PAH), perlindungan mata air (PMA), terminal air (TA)/ mobil tangka air, hidran umum (HU)	SPAM non perpipaan sesuai dengan peraturan atau pedoman teknis untuk SPAM BJP yang terlindungi	Permen PU No 01/PRT/M/2009

Tabel IV.143.
Rencana Keterpaduan Sistem Penyediaan Air Minum

PRASARANA AIR MINUM	HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN					SISTEM	KRITERIA	KOMPONEN
	RUMAH	PERUMAHAN	PERMUKIMAN	LINGKUNGAN HUNIAN	KAWASAN PERMUKIMAN			
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM JARINGAN PERPIPAAN (SPAM JP)					√	• Unit Air Baku	Sumber air baku terdiri dari: ✓ mata air; ✓ air tanah; dan ✓ air permukaan (sungai, danau, air laut, waduk, embung)	• bangunan penampungan air • bangunan pengambilan/ penyadapan • alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, • sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya
				√		• Unit Produksi		• bangunan pengolahan dan perlengkapannya • perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan • bangunan penampungan air minum
			√			• Unit Air Baku	Sumber air baku terdiri dari: ✓ mata air; ✓ air tanah; dan ✓ air permukaan (sungai, danau, air laut, waduk, embung)	• bangunan penampungan air • bangunan pengambilan/ penyadapan • alat pengukuran, dan peralatan pemantauan, • sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya
		√				• Unit Distribusi		• jaringan distribusi dan perlengkapannya • bangunan penampungan • alat pengukuran dan peralatan pemantauan
	√					• Unit Pelayanan	• Untuk permukiman dengan kepadatan 300 orang/Ha atau lebih	• Sambungan langsung
					√	• Unit Distribusi		• jaringan distribusi dan perlengkapannya • bangunan penampungan • alat pengukuran dan peralatan pemantauan

D. Rencana Keterpaduan Sistem Pengelolaan Air Limbah

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dapat berupa SPALD Setempat (SPALD-S) dan/atau SPALD Terpusat (SPALD-T) yang diterapkan sesuai dengan kondisi setempat dengan mempertimbangkan diantaranya kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah, permeabilitas tanah, dan kemampuan pembiayaan. Keterpaduan pengelolaan air limbah domestik dilaksanakan dengan penyediaan:

a. Komponen SPALD-S yang terdiri dari:

   1) Sub-sistem Pengolahan Setempat, untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber dalam skala individual dan/atau skala komunal;

   2) Sub-sistem Pengangkutan Lumpur Tinja, yang merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengoalah Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja; dan

   3) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja, yang merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

b. Komponen SPALD-T yang terdiri dari:

   1) Sub-sistem Pelayanan, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan;

   2) Sub-sistem Pengumpulan, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Subsistem Pengolahan Terpusat; dan

   3) Sub-sistem Pengolahan Terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan.

Keterpaduan sistem pengelolaan air limbah dilakukan dengan mengidentifikasi sistem hirarki dan standar teknis pada perumahan. Keterpaduan sistem pengelolaan air limbah pada perumahan mengacu kepada sistem di bawah ini.

A. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

Tabel IV.144.
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

KEGIATAN	KOMPONEN		RUJUKAN
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)	Sub-sistem Pelayanan	a) Pipa tinja; b) Pipa non tinja; c) Bak perangkap lemak dan minyak dari dapur; d) Pipa persil; e) Bak kontrol.	Lampiran I. PERMENPUPR No. 04/PRT/M/2017 Tentang Jenis dan Komponen SPALD
	Sub-sistem Pengumpulan	a) Pipa retikulasi; b) Pipa induk; c) Prasarana dan sarana pelengkap	Lampiran I. PERMENPUPR No. 04/PRT/M/2017 Tentang Jenis dan Komponen SPALD
	Sub-sistem Pengolahan Terpusat	Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPLD) : a) Prasarana utama, yang meliputi :	Lampiran I. PERMENPUPR No. 04/PRT/M/2017 Tentang Jenis dan Komponen SPALD
		Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPLD) : a) Prasarana dan sarana pendukung, yang meliputi :	Lampiran I. PERMENPUPR No. 04/PRT/M/2017 Tentang Jenis dan Komponen SPALD

B. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

Tabel IV.145.
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

KEGIATAN	KOMPONEN		RUJUKAN
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)	Sub-sistem Pengolahan Setempat	Skala Individual	Lampiran I. PERMENPUPR No. 04/PRT/M/2017 Tentang Jenis dan Komponen SPALD Lampiran
		Skala Komunal	
	Sub-sistem Pengangkutan	Sarana pengangkut lumpur tinja	
	Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja	Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) : a) Prasarana utama yang berfungsi untuk mengolah lumpur tinja, yang meliputi :	Lampiran I. PERMENPUPR No. 04/PRT/M/2017 Tentang Jenis dan Komponen SPALD
		Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT): a) Prasarana dan sarana pendukung yang berfungsi untuk menunjang pengoperasian, pemeliharaan dan evaluasi IPLT yang berada di satu area dengan IPLT	Lampiran I. PERMENPUPR No. 04/PRT/M/2017 Tentang Jenis dan Komponen SPALD

Tabel IV.146.
Rencana Keterpaduan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

PRASARANA AIR LIMBAH DOMESTIK	HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN					SISTEM	KRITERIA	KOMPONEN
	RUMAH	PERUMAHAN	PERMUKIMAN	LINGKUNGAN HUNIAN	KAWASAN PERMUKIMAN			
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK – TERPUSAT (SPALD-T)			√	√		• Sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestic dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan	• Kepadatan penduduk • Kedalaman muka air tanah lebih kecil dari 2 (dua) meter atau air tanah tercemar • Kemiringan tanah • Permeabilitas tanah • Kemampuan pembiayaan Pemda	• Sub-sistem Pelayanan • Sub-sistem Pengumpulan • Sub-sistem Pengolahan Terpusat, berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) •
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK – SETEMPAT (SPALD-S)	√	√				• Sistem pengelolaaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestic dilokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumput Tinja	• Kepadatan penduduk • Kedalaman muka air tanah lebih besar dari 2 (dua) meter atau air tanah belum tercemar • Kemiringan tanah • Permeabilitas tanah • Ketidakmampuan pembiayaan Pemda	• Pengolahan Setempat (Individual & Komunal) • Pengangkutan • Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) •

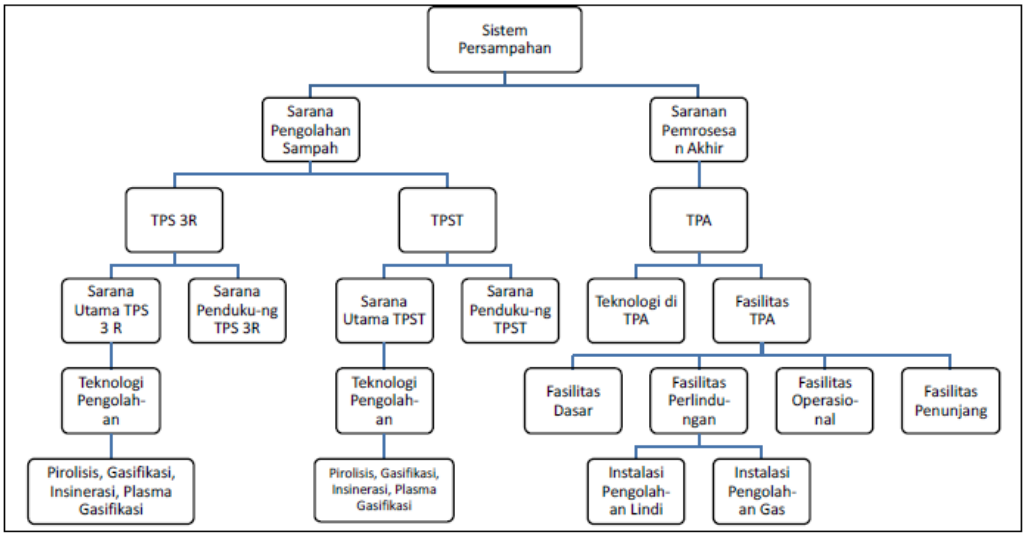
E. Rencana Keterpaduan Sistem Pengolahan Persampahan

Penyelenggaraan pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah yang terintegrasi. Keterpaduan penyelenggaraan Pengelolaan Persampahan dilaksanakan dengan penyediaan sarana dan prasarana:

a. Pengurangan sampah, meliputi kegiatan:
   1) Pembatasan timbulan sampah;
   2) Pendauran ulang sampah; dan
   3) Pemanfaatan kembali sampah.

b. Penanganan sampah, meliputi:
   1) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
   2) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
   3) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
   4) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
   5) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Keterpaduan sistem pengolahan persampahan dilakukan dengan mengidentifikasi sistem hirarki dan standar teknis pada perumahan. Keterpaduan sistem pengolahan persampahan pada perumahan mengacu kepada sistem di bawah ini.



Gambar 4.48.
Sistem Keterpaduan Pengolahan Persampahan

Tabel IV.147.
Rencana Keterpaduan Sistem Pengolahan Persampahan

PRASARANA PERSAMPAHAN	HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN					SISTEM	KRITERIA	KOMPONEN
	RUMAH	PERUMAHAN	PERMUKIMAN	LINGKUNGAN HUNIAN	KAWASAN PERMUKIMAN			
PEMILAHAN	√	√				Pengelompokan sampah menjadi 5 (lima) jenis sampah: • Sampah berbahaya & beracun • Sampah mudah terurai • Sampah dapat digunakan kembali • Sampah dapat didaur ulang • Sampah lainnya	• Volume sampah • Jenis sampah • Penempatan • Jadwal pengumpulan • Jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan	• Pewadahan individual, berupa bin atau wadah lain • TPS Komunal
PENGUMPULAN		√				• Individual langusng • Individual tidak langsung • Komunal langsung • Komunal tidak langsung • Penyapuan jalan	• Pengaturan jadwal pengumpulan sesuai dengan jenis sampah terpilah dan sumber sampah • Penyediaan sarana pengumpul sampah terpilah	• Motor sampah • Gerobak sampah • Sepeda sampah
PENGANGKUTAN SAMPAH		√	√	√	√	• Pola pengangkutan • Sarana pengangkutan • Rute pengangkutan	• Memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut • Rute pengangkutan sependek mungkin • Frekuensi pengangkutan • Ritasi untuk efisiensi dan efektifitas	• Mobil angkut sampah
PENGOLAHAN SAMPAH		√	√	√	√	• Pemadatan • Pengomposan • Daur ulang materi • Mengubah sampah menjadi sumber energi	• Karakteristik sampah • Teknologi pengolahan yang ramah lingkungan • Keselamatan kerja • Kondisi sosial masyarakat	• TPS 3R • SPA • TPA • TPST
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH					√	Pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA dengan : • Penimbunan/ pemadatan • Penutupan tanah • Pengolahan lindi • Penanganan gas	• Metode lahan urug terkendali • Metode lahan urug saniter • Teknologi ramah lingkungan	• Fasiltas dasar • Fasilitas perlindungan lingkungan • Fasilitas opersional • Fasilitas penunjang

F. Rencana Keterpaduan Sistem Proteksi Kebakaran

Sistem proteksi kebakaran terdiri dari sistem proteksi pasif dan sistem proteksi aktif yang terintegrasi. Sistem proteksi pasif merupakan sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan melakukan pengaturan terhadap komponen bangunan gedung dari aspek arsitektur dan struktur sedemikian rupa sehingga dapat melindungi penghuni dan benda dari kerusakan fisik saat terjadi kebakaran. Sistem proteksi aktif merupakan sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan mempergunakan

peralatan yang dapat bekerja secara otomatis maupun manual. Keterpaduan jaringan sistem proteksi kebakaran dilaksanakan dengan penyediaan:

a. Kantor wilayah pemadam kebakaran beserta peralatan operasional dan mobil pemadam kebakaran besar pada Kawasan Permukiman;

b. Kantor sektor pemadam kebakaran beserta peralatan operasional dan mobil pemadam kebakaran sedang pada Lingkungan Hunian;

c. Pos pemadam kebakaran beserta peralatan operasional, mobil pemadam kebakaran ringan, dan motor pemadam kebakaran pada Permukiman; dan

d. Sarana evakuasi, alat pemadam api ringan, hidran atau keran kebakaran, motor pemadam kebakaran pada Perumahan.

Keterpaduan sistem proteksi kebakaran dilakukan dengan mengidentifikasi sistem hirarki dan standar teknis pada perumahan. Keterpaduan sistem proteksi kebakaran pada perumahan mengacu kepada sistem di bawah ini.

Tabel IV.148.
Rencana Keterpaduan Sistem Proteksi Kebakaran

PRASARANA PROTEKSI KEBAKARAN	HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN					SISTEM	KRITERIA	KOMPONEN
	RUMAH	PERUMAHAN	PERMUKIMAN	LINGKUNGAN HUNIAN	KAWASAN PERMUKIMAN			
POS PEMADAM KEBAKARAN		√	√			• Waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran (selanjutnya disebut waktu tanggap) adalah total waktu dari saat menerima berita/ pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan pemadam kebakaran	• Pos pemadam kebakaran minimal membutuhkan lahan 200m2	• Ruang siaga untuk 2 regu (1 regu = 6 orang), Ruang administrasi, Ruang tunggu, Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker), • Gudang peralatan, yang mampu menampung: Garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter, • Tandon air 12.000 liter, • Halaman untuk latihan rutin.
SEKTOR PEMADAM KEBAKARAN				√			• Pos pemadam kebakaran minimal membutuhkan lahan 400m2	• Ruang siaga untuk 4 regu, Ruang administrasi, Ruang tunggu, Ruang rapat, Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker) • Gudang peralatan dan bahan pemadam kebakaran yang mampu menampung garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter, 1 mobil tangga 17 m, 2 mobil tangga >30m, 2 mobil rescue/ambulans, 1 mobil pemadam khusus, 1 mobil alat bantu pernafasan, 2 perahu karet. • Tendon air 24.000 liter • Halaman tempat latihan rutin
WILAYAH PEMADAM KEBAKARAN					√		• Pos pemadam kebakaran minimal membutuhkan lahan 1.600m2	• Ruang siaga untuk 4 regu, Ruang administrasi, Ruang tunggu, Ruang rapat, Ruang komando, Ruang ganti pakaian dan kotak penitipan (locker), • Gudang peralatan dan bahan pemadam yang mampu menampung: Garasi untuk 2 mobil pompa 4.000 liter, 1 mobil tangga 17 m, 3 mobil tangga > 30 m, 2 mobil rescue/ambulans, 2 mobil pemadam khusus, 2 mobil alat bantu pernafasan, 2 perahu karet, • Tandon air 24.000 liter, • Halaman tempat latihan rutin.

4.7.2.2. Rencana Keterpaduan Penyediaan Sarana Lingkungan Hunian

A. Rencana Keterpaduan Penyediaan Sarana Pemerintahan

Sarana pemerintahan meliputi sarana pemerintahan dan pelayanan umum. Keterpaduan pelayanan sarana pemerintahan dilaksanakan dengan penyediaan:

a. Pos-pos pelayanan keamanan dan keselamatan; seperti pos keamanan dan pos pemadam kebakaran pada kawasan permukiman.

b. Kantor pelayanan utilitas umum dan jasa; seperti layanan air bersih (PAM), listrik (PLN), telepon, dan pos pada lingkungan hunian; dan

c. Kantor-kantor pelayanan/administrasi pemerintahan dan administrasi kependudukan pada permukiman.

Keterpaduan sarana pemerintahan dilakukan dengan mengidentifikasi sistem hirarki dan standar teknis pada perumahan. Keterpaduan sarana pemerintahan pada perumahan mengacu kepada sistem di bawah ini.

Tabel IV.149.
Rencana Keterpaduan Penyediaan Sarana Pemerintahan

SARANA PEMERINTAHAN	HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN					SISTEM	KRITERIA	KOMPONEN
	RUMAH	PERUMAHAN	PERMUKIMAN	LINGKUNGAN HUNIAN	KAWASAN PERMUKIMAN			
BALAI PERTEMUAN		√				• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Perumahan • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet	• Balai Pertemuan
POS KEAMANAN WARGA		√				• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Perumahan • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi air bersih, tempat sampah dan toilet	• Pos Keamanan Warga
KANTOR KELURAHAN / DESA			√			• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Permukiman • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet	• Kantor Kelurahan / Desa
KANTOR KECAMATAN				√		• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Lingkungan Hunian • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet	• Kantor Kelurahan / Desa
KANTOR POLISI				√		• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Lingkungan Hunian • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet • Fasilitas khusus kantor polisi	• Kantor Kelurahan / Desa
KANTOR BUPATI/WALIKOTA					√	• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Kawasan Permukiman • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet	• Kantor Kelurahan / Desa
KANTOR POLISI SKALA KABUPATEN/KOTA					√	• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Kawasan Permukiman • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet • Fasilitas khusus kantor polisi skala Kabupaten/Kota	• Kantor Kelurahan / Desa

B. Rencana Keterpaduan Penyediaan Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan meliputi sarana pendidikan dan pembelajaran. Keterpaduan sarana pendidikan dilaksanakan dengan penyediaan:

a. Pendidikan anak usia dini (PAUD) pada permukiman;

b. Sekolah dasar (SD) pada permukiman;

c. Sekolah menengah pertama (SMP) pada lingkungan hunian;

d. Sekolah menengah akhir (SMA) pada lingkungan hunian; dan

e. Perguruan tinggi pada Kawasan Permukiman.

Keterpaduan sarana pendidikan dilakukan dengan mengidentifikasi sistem hirarki dan standar teknis pada perumahan. Keterpaduan sarana pendidikan pada perumahan mengacu kepada sistem di bawah ini.

Tabel IV.150.
Rencana Keterpaduan Penyediaan Sarana Pendidikan

SARANA PENDIDIKAN	HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN					SISTEM	KRITERIA	KOMPONEN
	RUMAH	PERUMAHAN	PERMUKIMAN	LINGKUNGAN HUNIAN	KAWASAN PERMUKIMAN			
PAUD		√				• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Perumahan • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet	• Taman Kanak-Kanak
SD/MI			√			• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Permukiman • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet	• SD/MI
SMP/MTS			√			• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Permukiman • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet	• SMP/MTs
SMA/SMK/MA			√	√		• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Permukiman dan Lingkungan Hunian • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet	• SMU/SMK/MA
PERGURUAN TINGGI					√	• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Kawasan Pemukiman • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi area parkir, mess, air bersih, tempat sampah dan toilet	• Perguruan Tinggi

C. Rencana Keterpaduan Penyediaan Sarana Kesehatan

Keterpaduan pelayanan sarana kesehatan dilaksanakan dengan penyediaan:

a. Posyandu, praktek dokter, dan toko obat pada Perumahan.
b. Puskesmas pembantu, klinik, dan apotik pada Permukiman;
c. Pusat kesehatan masyarakat dan klinik bersalin pada Lingkungan Hunian; dan
d. Rumah sakit pada Kawasan Permukiman.

Keterpaduan sarana kesehatan dilakukan dengan mengidentifikasi sistem hirarki dan standar teknis pada perumahan. Keterpaduan sarana kesehatan pada perumahan mengacu kepada sistem di bawah ini.

Tabel IV.151.
Rencana Keterpaduan Penyediaan Sarana Kesehatan

SARANA KESEHATAN	HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN					SISTEM	KRITERIA	KOMPONEN
	RUMAH	PERUMAHAN	PERMUKIMAN	LINGKUNGAN HUNIAN	KAWASAN PERMUKIMAN			
POSYANDU		√				• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Perumahan • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet	• Posyandu
TEMPAT PRAKTIK MANDIRI TENAGA KESEHATAN		√	√			• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Perumahan dan Permukiman • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi air bersih, tempat sampah, tempat sampah medikal dan toilet	• Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT			√			• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Permukiman • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi air bersih, tempat sampah, tempat sampah medikal dan toilet • Instalasi rawat inap	• Pusat Kesehatan Masyarakat
KLINIK			√	√		• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Permukiman dan Lingkungan Hunian • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi air bersih, tempat sampah, tempat sampah medikal dan toilet • Instalasi rawat inap	• Klinik
RUMAH SAKIT					√	• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Kawasan Permukiman • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi air bersih, tempat sampah, tempat sampah medikal, instalasi pengolahan limbah rumah sakit dan toilet • Instalasi rawat inap	• Rumah Sakit
APOTEK		√	√	√	√	• Wajib tersedia minimal 1 unit mepertimbangkan ketersediaan Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Rumah Sakit	• Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet	• Apotek
UNIT TRANSFUSI DARAH					√	• Wajib tersedia minimal 1 unit pada Rumah Sakit pada tingkat Kawasan Permukiman	• Dilengkapi air bersih, tempat sampah, tempat sampah medikal dan toilet	
LABORATORIUM KESEHATAN			√	√	√	• Wajib tersedia minimal 1 unit mepertimbangkan ketersediaan Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Rumah Sakit	• Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah, tempat sampah medikal dan toilet	

D. Rencana Keterpaduan Penyediaan Sarana Perdagangan

Sarana perdagangan meliputi sarana perdagangan dan niaga. Keterpaduan sarana perdagangan dilaksanakan dengan penyediaan:

a. Pusat perbelanjaan dan niaga pada Kawasan permukiman.
b. Pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan pada Lingkungan Hunian;
c. Pertokoan pada Permukiman; dan
d. Toko/warung pada Perumahan.

Keterpaduan sarana perdagangan dilakukan dengan mengidentifikasi sistem hirarki dan standar teknis pada perumahan. Keterpaduan sarana perdagangan pada perumahan mengacu kepada sistem di bawah ini.

Tabel IV.152.
Rencana Keterpaduan Penyediaan Sarana Perdagangan

SARANA PERDAGANGAN	HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN					SISTEM	KRITERIA	KOMPONEN
	RUMAH	PERUMAHAN	PERMUKIMAN	LINGKUNGAN HUNIAN	KAWASAN PERMUKIMAN			
PERTOKOAN			√			• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Permukiman • Jumlah penduduk pendukung 2.500 – 30.000 jiwa (Kelurahan/Desa) • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi minimal kantor pengelola, area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet	• Pertokoan
PASAR RAKYAT TIPE D/PASAR LINGKUNGAN			√			• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Perumahan dan Permukiman • Jumlah penduduk pendukung 2.500 – 30.000 jiwa (Kelurahan/Desa) • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi minimal kantor pengelola, area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet	• Pasar Lingkungan
PASAR RAKYAT TIPE B, TIPE C/ PASAR WILAYAH				√		• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Lingkungan Hunian • Jumlah penduduk pendukung 30.000 – 120.000 jiwa (Kecamatan) • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi minimal kantor pengelola, area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet	• Pasar Wilayah
PASAR RAKYAT TIPE A/ PUSAT PERBELANJAAN/PASAR KOTA					√	• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Kawasan Permukiman • Jumlah penduduk pendukung > 120.000 jiwa (Kabupaten/Kota) • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi minimal kantor pengelola, area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet	• Pusat Perbelanjaan/Pasar Kota

E. Rencana Keterpaduan Penyediaan Sarana Peribadatan

Keterpaduan pelayanan sarana peribadatan dilaksanakan dengan penyediaan:

a. Masjid, gereja, pura, dan vihara atau klenteng pada Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hunian;

b. Masjid pada Permukiman; dan

c. Musholla atau langgar pada Perumahan.Keterpaduan sarana peribadatan dilakukan dengan mengidentifikasi sistem hirarki dan standar teknis pada kawasan permukiman. Keterpaduan sarana peribadatan pada lingkungan hunian mengacu kepada sistem di bawah ini.

Tabel IV.153.
Rencana Keterpaduan Penyediaan Sarana Peribadatan

SARANA PERIBADATAN	HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN					SISTEM	KRITERIA	KOMPONEN
	RUMAH	PERUMAHAN	PERMUKIMAN	LINGKUNGAN HUNIAN	KAWASAN PERMUKIMAN			
MUSHOLLA		√				• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Perumahan • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet	• Musholla
MASJID WARGA		√	√			• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Perumahan dan Permukiman • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet	• Masjid Warga
MASJID LINGKUNGAN			√			• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Permukiman • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi minimal area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet	• Masjid Lingkungan
MASJID KECAMATAN				√		• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Lingkungan Hunian • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi minimal area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet	• Masjid Kecamatan
SARANA IBADAH AGAMA LAIN			√	√		• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Permukiman dan Lingkungan Hunian • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi minimal area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet	• Sarana Ibadah Agama Lain

F. Rencana Keterpaduan Penyediaan Sarana Budaya dan Rekreasi

Keterpaduan pelayanan Sarana Kebudayaan dan Rekreasi dilaksanakan dengan penyediaan:

a. Bioskop pada Lingkungan Hunian dan Kawasan Permukiman;

b. Gedung pertemuan/gedung serbaguna pada Lingkungan Hunian;

c. Balai serbaguna pada Permukiman; dan

d. Balai warga/balai pertemuan pada Perumahan.

Keterpaduan sarana budaya dan rekreasi dilakukan dengan mengidentifikasi sistem hirarki dan standar teknis pada perumahan. Keterpaduan sarana budaya dan rekreasi pada perumahan mengacu kepada sistem di bawah ini.

Tabel IV.154.
Rencana Keterpaduan Penyediaan Sarana Budaya dan Rekreasi

SARANA BUDAYA	HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN					SISTEM	KRITERIA	KOMPONEN
	RUMAH	PERUMAHAN	PERMUKIMAN	LINGKUNGAN HUNIAN	KAWASAN PERMUKIMAN			
BALAI PERTEMUAN WARGA		√				• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Perumahan • Jumlah penduduk pendukung 2.500 jiwa (RW) • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi minimal area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet	• Balai Pertemuan Warga
BALAI SERBAGUNA			√	√		• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Permukiman dan Lingkungan Hunian • Jumlah penduduk pendukung 2.500 – 30.000 jiwa (Kelurahan/Desa) Jumlah penduduk pendukung 30.000 – 120.000 jiwa (Kecamatan) • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi minimal kantor pengelola, area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet	• Balai Serbaguna
GEDUNG SERBAGUNA					√	• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Kawasan Permukiman • Jumlah penduduk pendukung > 120.000 jiwa (Kabupaten/Kota) • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi minimal kantor pengelola, area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet	• Gedung Serbaguna
GEDUNG BIOSKOP					√	• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Kawasan Permukiman • Jumlah penduduk pendukung > 120.000 jiwa (Kabupaten/Kota) • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi minimal kantor pengelola, area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet	• Gedung Bioskop

G. Rencana Keterpaduan Penyediaan Sarana Ruang Terbuka Hijau

Sarana ruang terbuka hijau meliputi sarana ruang terbuka, taman dan lapangan olah raga. Keterpaduan pelayanan Sarana Ruang Terbuka Hijau dilaksanakan dengan penyediaan:

a. Taman kota, dan hutan kota pada Kawasan Permukiman;

b. Kuburan/pemakaman umum pada Lingkungan Hunian.

c. Lapangan hijau terbuka tempat pertandingan olah raga (tenis lapangan, bola basket dan lain-lain), upacara serta kegiatan lainnya pada Lingkungan Hunian;

d. Taman dan lapangan olahraga untuk pertandingan olah raga, upacara serta kegiatan lainnya pada Permukiman;

e. Taman sekaligus tempat bermain anak-anak dan lapangan olah raga pada Permukiman; dan

f. Taman sekaligus tempat bermain anak-anak pada perumahan.

Keterpaduan sarana ruang terbuka hijau (RTH) dilakukan dengan mengidentifikasi sistem hirarki dan standar teknis pada perumahan. Keterpaduan sarana ruang terbuka hijau (RTH) pada perumahan mengacu kepada sistem di bawah ini.

Tabel IV.155.
Rencana Keterpaduan Penyediaan Sarana Ruang Terbuka Hijau

SARANA RTH	HIRARKI KAWASAN PERMUKIMAN					SISTEM	KRITERIA	KOMPONEN
	RUMAH	PERUMAHAN	PERMUKIMAN	LINGKUNGAN HUNIAN	KAWASAN PERMUKIMAN			
TAMAN LINGKUNGAN		√	√			• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Perumahan dan Permukiman • Jumlah penduduk pendukung 2.500 jiwa (RW) • Jumlah penduduk pendukung 2.500 – 30.000 jiwa (Kelurahan/Desa) • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi minimal area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet	• Taman Lingkungan
TAMAN DAN LAPANGAN OLAH RAGA				√		• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Lingkungan Hunian • Jumlah penduduk pendukung 30.000 – 120.000 jiwa (Kecamatan) • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi minimal kantor pengelola, area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet	• Taman dan Lapangan Olah Raga
TAMAN DAN LAPANGAN OLAH RAGA SKALA KAB/KOTA					√	• Wajib tersedia 1 unit pada tingkat Kawasan Permukiman • Jumlah penduduk pendukung > 120.000 jiwa (Kabupaten/Kota) • Penambahan unit berdasarkan jumlah penduduk pendukung	• Dilengkapi minimal kantor pengelola, area parkir, air bersih, tempat sampah dan toilet	• Taman dan Lapangan Olah Raga skala Kab/Kota

4.7.2.3. Rencana Keterpaduan Jaringan Utilitas Lingkungan Hunian

A. Rencana Keterpaduan Jaringan Listrik

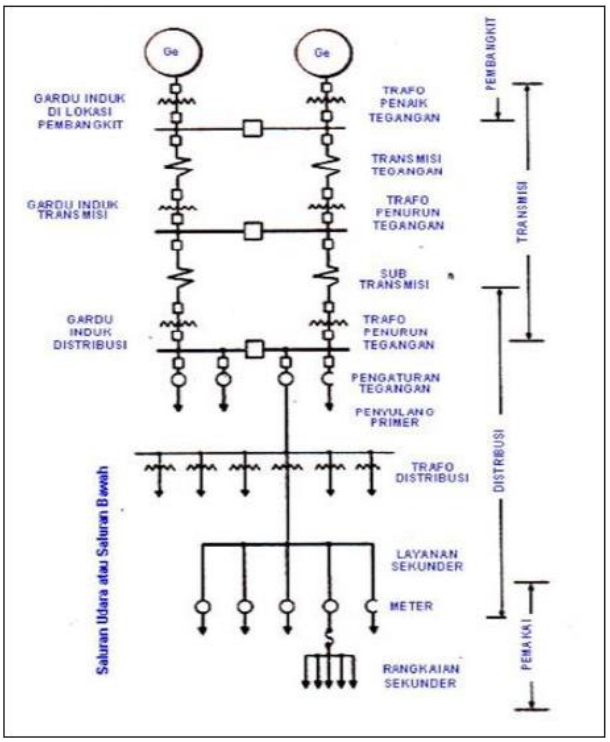
Keterpaduan Jaringan Listrik dilaksanakan dengan penyediaan:

a. Kantor pelayanan perusahaan listrik negara, gardu distribusi dan tiang listrik atau saluran utilitas terpadu pada Lingkungan Hunian, dan Kawasan Permukiman;

b. Gardu distribusi, tiang listrik atau saluran utiltias terpadu pada Perumahan dan Permukiman; dan

c. Sambungan instalasi pada setiap rumah.

Keterpaduan jaringan listrik dilakukan dengan mengidentifikasi sistem hirarki dan standar teknis pada perumahan. Keterpaduan jaringan listrik pada perumahan mengacu kepada sistem di bawah ini.



Gambar 4.49.
Sistem Keterpaduan Jaringan Listrik

B. Rencana Keterpaduan Jaringan Telekomunikasi

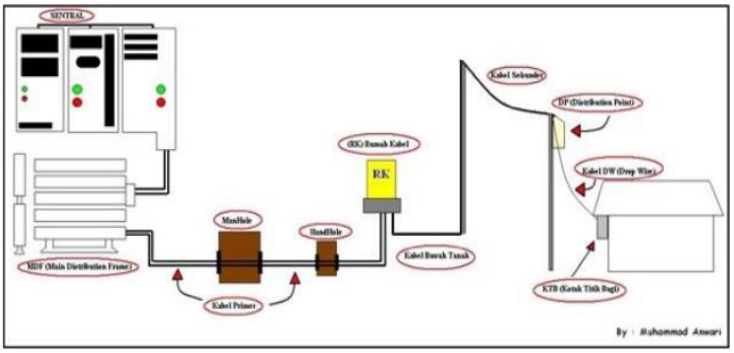
Keterpaduan Jaringan Telekomunikasi dilaksanakan dengan penyediaan:

a. BTS, fiber optik, STO, dan jaringan UTP pada Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hunian;

b. Jaringan UTP, fiber optik, jaringan telepon dan kamera CCTV pada perumahan dan permukiman; dan

c. Jaringan UTP, fiber optik, sambungan telepon pada Rumah.

Keterpaduan jaringan telekomunikasi dilakukan dengan mengidentifikasi sistem hirarki dan standar teknis pada perumahan. Keterpaduan jaringan telekomunikasi pada perumahan mengacu kepada sistem di bawah ini.



Gambar 4.50.
Sistem Keterpaduan Jaringan Telekomunikasi

4.8. Analisis Kelembagaan dan Pembiayaan Pembangunan Perumahan

4.8.1. Analisis Kapasitas Kelembagaan dan Peran Pelaku Pembangunan Perumahan

Dalam pembangunan perumahan rakyat terdapat 4 pilar yang saling terkait yaitu:

1. Pilar I : Pemerintah sebagai Regulator

   Fungsi regulator adalah membuat kebijakan, baik di bidang perumahan maupun kebijakan di bidang pertanahan.

2. Pilar II : Supplier

   Supplier adalah pihak penyedia rumah dan sarana prasarananya. Peran ini dilakukan oleh para pengembang/ developer, baik swasta maupun BUMN/Perumnas.

3. Pilar III: Lembaga Pembiayaan atau Lembaga Jasa Keuangan

   Lembaga pembiayaan bidang perumahan memberikan dukungan pembiayaan mulai dari pengadaan lahan, pembangunan proyek/konstruksi dan kepada konsumen pembeli rumah atau kelompok sasaran.

4. Pilar IV: Kelompok Sasaran

   Kelompok sasaran adalah pihak yang menjadi obyek pemenuhan kebutuhan akan rumah.

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pembagian kewenangan dalam urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel IV.156.
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten
1	Perumahan	a. penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) b. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana nasional. c. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah pusat d. pengembangan sistem pembiayaan perumahan bagi MBR	a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi	a. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana kabupaten, b. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten, c. penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan, d. penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG)
2	Kawasan permukiman	Penetapan sistem kawasan permukiman, penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10-dibawah 15 ha	a.Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman, b.Penataan dan peningkatan kualitas

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten
		kumuh dengan luas 15 ha atau lebih		kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 ha
3	Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	-	-	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten
4	Prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU di lingkungan hunian dan kawasan permukiman	Penyelenggaraan PSU permukiman	Penyelenggaraan PSU perumahan
5	Sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dna registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan besar	sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dna registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah	sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dna registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil

Sumber: UU Nomor 23 Tahun 2014

Dalam UU perumahan dan kawasan permukiman ditegaskan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman meliputi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pembangunan rumah umum, rumah khusus, dan rumah negara. Pembangunan rumah khusus dan rumah negara dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dalam melaksanakan tanggung jawab, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunanperumahan dan permukiman. Lembaga atau badan bertanggung jawab:

1) membangun rumah umum, rumah khusus, dan rumah negara;
2) menyediakan tanah bagi perumahan; dan
3) melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. Peran masyarakat dilakukan dengan memberikan masukan dalam:

1. penyusunan rencana pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
2. pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
3. pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman;
4. pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau

5. pengendalian penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;

Peran masyarakat dilakukan dengan membentuk forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Forum mempunyai fungsi dan tugas:

1. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
3. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;
4. memberikan masukan kepada Pemerintah; dan/atau
5. melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Forum, terdiri dari unsur:

a. instansi pemerintah yang terkait dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman;
b. asosiasi perusahaan penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
c. asosiasi profesi penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
d. asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;
e. pakar di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
f. lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Pemerintah daerah menugasi dan/atau membentuk lembaga atau badan yang menangani pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga atau badan tersebut memiliki tanggung jawab:

a. Membangun rumah umum, rumah khusus, dan rumah negara.
b. Menyediakan tanah bagi perumahan.
c. Melakukan koordinasi dalam proses perizinan dan pemastian kelayakan hunian.

Berdasarkan ketentuan diatas diketahui bahwa kelembagaan yang harus ada selain satuan kerja/instansi pemerintah meliputi:

1) Lembaga atau badan yang menangani pembangunan perumahan dan permukiman.
2) Badan hukum pembiayaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, dapat dilakukan lembaga keuangan bank swasta/pemerintah dan lembaga keuangan bukan bank.
3) Forum pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Forum tersebut dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat; memberikan masukan kepada Pemerintah; dan/atau melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan oleh aparat pemerintah yang berwenang sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing seperti tertuang dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Perlu adanya konsep peningkatan kualitas SDM dan etos kerja dalam setiap lembaga pemerintahan. Peningkatan kualitas dan etos kerja diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja masing-masing personil antar lembaga. Meningkatnya motivasi kerja akan mendorong peningkatan kinerja kelembagaan. Lembaga dengan kinerja baik akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing. Bukan hanya sekedar susunan organisasi, struktur organisasi dan kedudukan tetapi bagaimana mengoptimallkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut. Kinerja yang baik akan menciptakan pelayanan publik yang berkualitas sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat apat dimaksimalkan.

Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan etos kerja personil dalam lembaga di Kabupaten Purbalingga antara lain melalui 3 strategi, yaitu:

1. Peningkatan efektivitas kelembagaan,
2. Penguatan kapasitas kelembagaan,
3. Peningkatan SDM kelembagaan.

Kelembagaan harus memperhatikan prinsip deregulasi tanpa meninggalkan efektivitas dan keberadaan rencana. Oleh karena ketentuan yang ada dalam rencana tata ruang masih bersifat arahan perlu disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada di lapangan. Untuk menyesuaikan diperlukan interprestasi arahan rencana secara tepat, maka agar interprestasi tersebut tidak keluar dari sasaran perlu ada pembinaan kemampuan personil yang secara terus menerus dan dapat menjadi bagian dari pembinaan kemampuan dari karier pegawai negeri, yang secara rutin dilaksanakan. Selanjutnya agar pembangunan daerah berhasil guna dan berdaya guna serta mencapai sasaran menurut arah yang telah digariskan, maka rencana pembangunan yang ada perlu didukung dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna memperoleh kekuatan hukum.

Sejalan dengan era pemberdayaan (*empowerment*), pola-pola kerjasama antar stakeholder pembangunan semakin dikembangkan. Pemberdayaan dapat diartikan sebagai implementasi yang lebih nyata dari model pendekatan pembangunan dari bawah (*bottom up approachment*). Unsur-unsur masyarakat dan swasta yang pada masa lalu tidak dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan hasil pembangunan, pada masa kini didorong aktif untuk terlibat dalam aspek perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan.

Dalam permasalahan yang melibatkan dua daerah atau lebih, sangat dibutuhkan suatu kondisi saling pengertian antara daerah yang terlibat. Kerjasama yang saling menguntungkan harus terus diusahakan untuk mencapai suatu kesepakatan bersama yang sifatnya saling menguntungkan (*win - win solution*). Pengertian kerjasama disini bukan hanya kerjasama antar daerah tetapi bisa juga melibatkan pihak lain (swasta, masyarakat, kelompok masyarakat, akademisi).

Tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya bergantung kepada pemerintah saja. Dalam konsep *good governance*, konsep tersebut dapat diterapkan kepada pihak swasta dan masyarakat. Dalam sudut pandang pemerintah, pelaksanaan *good governance*

untuk memastikan bahwa tata pemerintahan yang bersih dan transparan telah terlaksana dengan baik dengan memperhatikan prinsip-prinsip *good governance*. Pemerintah berperan sebagai regulator dan memastikan bahwa praktek tata pemerintahan yang dilakukan sesuai dengan prinsip–prinsip *good governance*, baik yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dan pihak lainnya. Pemerintah juga harus dapat memastikan bahwa penegakan hukum dan penghormatan kepada HAM telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kaidah yang benar. Sedangkan pihak swasta berusaha bagaimana perusahaannya bekerja melayani sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yang telah ditentukan. Pihak swasta dalam konteks ini mempunyai tanggung jawab untuk dapat melakukan usaha-usaha ekonomi produktif secara benar dan *fair* sehingga tercipta pasar yang kompetitif. Masyarakat dalam kaitan dengan konsep *good governance* mempunyai peran penting karena keterlibatannya dalam praktek tata kelola pemerintahan yang dianggap paling baik. Peran masyarakat disini adalah bagaimana mereka mempunyai daya kontrol yang tangguh dalam tata pelaksanaan pemerintahan berkaitan dengan pelayanan publik, kemandirian yang menonjol sehingga dapat bekerja secara independen dan tidak mudah dipengaruhi, serta bagaimana meningkatkan tingkat partisipasi mereka dalam pelaksanaan pemerintahan. Pada intinya adalah bagaimana meningkatkan akses masyarakat sipil terhadap pelayanan publik yang lebih baik sesuai dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai.

Tiga aktor *good governance* tersebut diatas mempunyai hubungan yang saling mendukung dan tidak dapat satu berdiri lebih kuat daripada yang lain. Dalam kerangka *good governance*, masing–masing pihak mempunyai tanggung jawab untuk memperkuat dirinya dan *stakeholder* lainnya. Masing-masing *stakeholder* mempunyai peran masing-masing sebagai fungsi kontrol untuk stakeholder lainnya. Dalam konteks praktek di dunia usaha, pihak swasta/ korporasi mempunyai tanggungjawab moral untuk mendukung bagaimana *good governance* dapat berjalan dengan baik dimasing-masing lembaganya. Pelaksanaan *good governance* secara benar dan konsisten bagi dunia usaha adalah perwujudan dari pelaksanaan etika bisnis yang seharusnya dimiliki oleh setiap lembaga swasta/ korporasi yang ada didunia. Dalam lingkup tertentu etika bisnis berperan sebagai elemen mendasar dari konsep CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang dimiliki oleh perusahaan. Pihak perusahaan mempunyai kewajiban sebagai bagian masyarakat yang lebih luas untuk memberikan kontribusinya. Praktek *good governance* menjadi panduan untuk operasional perusahaan, baik yang dilakukan dalam kegiatan internal maupun eksternal perusahaan. Internal berkaitan dengan operasional perusahaan dan bagaimana perusahaan tersebut bekerja, sedangkan eksternal lebih kepada bagaimana perusahaan tersebut bekerja dengan stakeholder lainnya, termasuk kaitannya dengan publik.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat memberdayakan para pihak untuk berperan aktif membangun Kabupaten Purbalingga secara berkelanjutan dengan cara memberikan arahan program dan kegiatan untuk membantu Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam upaya pelaksanaan dan pencapaian indikator pembangunan. Beberapa upaya peningkatan partisipasi/ peran para pihak adalah:

1. Peningkatan peran kelembagaan pemerintah maupun non pemerintah,
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia,
3. Peningkatan partisipasi masyarakat,

4. Kolaborasi atau kerjasama antar stakeholder, antar lintas sektor,
5. Fokus pada peningkatan kelompok perempuan, kelompok rentan, kelompok tertinggal.

Salah satu rencana kerja Pokja PKP adalah memfasilitasi pembentukan Forum PKP. Pembentukan Forum PKP kabupaten ditetapkan oleh Ketua Pokja PKP kabupaten. Tugas Forum PKP adalah:

1. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Membahas dan merumuskan arah pemikiran penyelenggara PKP.
3. Meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat.
4. Memberikan masukan kepada pemerintah.
5. Melakukan peran arbitrase dan mediasi.

Pokja PKP merupakan bagian dari Forum PKP. Unsur keanggotaan Forum PKP meliputi:

1. Instansi pemerintah yang terkait dalam bidang PKP.
2. Asosiasi perusahaan penyelenggara PKP.
3. Asosiasi profesi penyelenggara PKP.
4. Asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara PKP.
5. Pakar di bidang PKP, dan/atau
6. Lembaga swadaya masyarakat dan/atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan PKP.

Arahan Penguatan Regulasi

1. Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui:
    a. Penyusunan regulasi mengenai penyelenggaraan perumahan dan permukiman skala daerah
    b. Pengawasan, pemantauan dan penegakan hukum
2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas aparatur pemerintahan daerah dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi kinerja penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Langkah yang dilakukan pemerintah dengan menyempurnakan regulasi yang ada sehingga diharapkan lebih mempercepat pencapaian tujuan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.

Mekanisme regulasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman tingkat kabupaten dapat dilakukan melalui :

1. Proses Perijinan

    Proses perijinan terhadap upaya pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang dan pengelolaan lahan yang ada.

2. Proses Pengawasan

   Proses pengendalian penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan lahan yang dilaksanakan melalui pengawasan yang diwujudkan melalui supervisi dan penertiban yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan melibatkan kelembagaan pada tingkat terendah, serta peran aktif masyarakat, yang kesemuanya diatur melalui suatu mekanisme pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan. Ketentuan teknis penertiban pada lahan ilegal melalui melibatkan pengenaan sanksi maupun penerapan sistem disinsentif jika ternyata penggunaan lahan tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan dan perencanaan ruang perumahan dan kawasan permukiman.

3. Pelaporan Penyelenggaran

   Laporan pendirian perumahan akan berisikan:

   - Perkembangan perolehan izin mendirikan bangunan (IMB)
   - Perkembangan pembangunan rumah
   - Catatan mengenai permasalahan yang perlu segera diatasi serta potensi masalah yang perlu diantisipasi.

4. Proses Penertiban

   Proses penertiban langsung dan tidak langsung yang melibatkan pengenaan sanksi maupun penerapan sistem disinsentif jika ternyata penggunaan lahan tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan dan perencanaan ruang perumahan dan kawasan permukiman. Proses penertiban pembangunan perumahan dan kawasan permukiman disusun sesuai dengan prosedural berikut:

   - Diawali melalui proses pemeriksaan lapangan oleh aparat instansi / kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman daerah terkait terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan. Hasil pemeriksaan lapangan ini selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui instansi/kelembagaan perumahan dan kawasan permukiman terkait.
   - Proses konfirmasi temuan lapangan dengan berbagai dokumen / hasil instrumentasi pengawasan yang ada seperti laporan pelaksanaan pembangunan dari penyelenggaran perumahan, laporan-laporan pengaduan, serta produk perencanaan yang menjadi acuan pembangunan.
   - Perumusan dan penentuan kebijakan tindak lanjut berupa tindakan penertiban yang perludilakukan melalui instrumentasi pengendalian yang ada, serta penyiapan rencana penanganan masalah terkait.

4.8.2. Analisis Kinerja Pembiayaan Pembangunan Perumahan

Pembangunan dan pengembangan perumahan memerlukan biaya yang cukup tinggi mengingat kebutuhan bahan baku pembangunan perumahan masih sangat tingi. Oleh sebab itu perlu kolaborasi dari seluruh pelaku yang terkait dengan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman supaya target penyediaan rumah dan peningkatan

kualitas perumahan dapat tercapai. Sumber pembiayaan yang dapat digunakan berasal dari dana pemerintah, swasta maupun dari dana swadaya masyarakat.

Sumber Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dari Pemerintah

Sumber pembiayaan perumahan dari pemerintah berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Beberapa rencana pembiayaan yang bersumber dari APBD adalah sebagai berikut:

a. Bantuan Keuangan

Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten dapat menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya dan kepada desa. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah/desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan (Lampiran Permendagri Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013).

b. Hibah

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah, dan bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Hibah dari pemerintah daerah ke pemerintah daerah lainnya, yaitu diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan (Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pasal 6 ayat 2).

c. Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Yang dimaksud dengan resiko sosial tersebut adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar (Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pasal 1 ayat 15 dan 16).

Pembiayaan yang dilakukan dengan APBD dapat digunakan untuk:

1. Kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan perumahan;
2. Kegiatan pembangunan PSU perumahan;

3. Kegiatan peningkatan kualitas hunian perumahan;

4. Kegiatan penigkatan kualitas SDM;

5. Kegiatan peningkatan ekonomi penunjang perumahan.

Dalam UU No. 1 tahun 2011 Pasal 121 menyatakan Pemerintah dan/atau pemerintah daerah harus melakukan upaya pengembangan sistem pembiayaan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Sistem pembiayaan adalah sistem yang mengatur pengerahan, pemupukan, penyaluran, dan pemanfaatan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan dengan atau tanpa kemudahan dan/atau bantuan. Pengembangan sistem pembiayaan meliputi:

1. lembaga pembiayaan;
2. pengerahan dan pemupukan dana;
3. pemanfaatan sumber biaya; dan
4. kemudahan atau bantuan pembiayaan.

Lembaga pembiayaan pemerintah atau pemerintah daerah dapat menugasi atau membentuk badan hukum pembiayaan di bidang perumahan dan kawasan permukiman. Badan hukum pembiayaan bertugas menjamin ketersediaan dana murah jangka panjang untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Dalam pembangunan dan pemilikan rumah umum dan swadaya, badan hukum pembiayaan wajib menjamin:

a. ketersediaan dana murah jangka panjang;
b. kemudahan dalam mendapatkan akses kredit atau pembiayaan; dan
c. keterjangkauan dalam membangun, memperbaiki, atau memiliki rumah.

Pasal 123 dinyatakan pemerintah dan pemerintah daerah mendorong pemberdayaan lembaga keuangan bukan bank dalam pengerahan dan pemupukan dana tabungan perumahan dan dana lainnya, khusus untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Pengerahan dan pemupukan dana meliputi:

1. Dana masyarakat;

   Dana masyarakat adalah dana yang berasal dari masyarakat yang disimpan di lembaga keuangan dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Dana tabungan perumahan termasuk hasil investasi atas kelebihan likuiditas;

   Dana tabungan perumahan adalah simpanan yang dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati sesuai dengan perjanjian, dan digunakan untuk mendapatkan akses kredit atau pembiayaan untuk pembangunan dan perbaikan rumah, serta pemilikan rumah dari lembaga keuangan. Apabila tabungan perumahan telah melembaga, dana APBN untuk pembiayaan murah jangka panjang dapat dihentikan. Yang dimaksud dengan "hasil investasi" adalah hasil investasi atas kelebihan likuiditas pada instrumen investasi yang aman, berupa deposito dan surat utang negara.

3. Dana lainnya.

   Dana lainnya adalah dana yang sah sesuai peraturan perundangan, yang antara lain dapat berupa dana investor institusional (seperti perusahaan asuransi dan perusahaan pengelola dana pensiun) di pasar modal; dan dana APBN pos pembiayaan khusus untuk perumahan.

Yang dimaksud dengan "lembaga keuangan bukan bank" adalah lembaga keuangan yang mengelola tabungan perumahan seperti Tapera-ASN dan tabungan perumahan untuk TNI/Polri .

Sumber Pembiayaan Perumahan dan Kawasan Permukiman dari Swasta

Pembiayaan perumahan dapat berasal dari lembaga/stakeholder swasta. Sumber pembiayaan yang berasal dari swasta berupa *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR merupakan program dari suatu perusahaan sebagai perwujudan tanggung jawab sosial dalam bentuk kegiatan. Tanggung jawab sosial tersebut hanya ditujukan bagi badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam (UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Tidak ada ketentuan besaran dana yang harus dialokasikan dan jenis kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Perseroan untuk tanggungjawab sosial tersebut, hal ini tergantung dari kebijakan Perseroan. Khusus untuk perusahaan milik negara (BUMN), tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dimana Program Bina Lingkungan dapat membiayai pembangunan infrastruktur pendukung perumahan dan permukiman. Pemanfaatan dana PKBL BUMN diatur melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi dapat langsung berkoordinasi dengan asosiasi perusahaan yang mempunyai kegiatan CSR didaerahnya masing-masing.

Skema Pembiayaan Perumahan MBR

Secara umum sistem pembiayaan perumahan melibatkan pihak penjual/pengembang rumah (developer) yang menyediakan pasokan rumah, pihak pembeli yang membutuhkan rumah, lembaga keuangan yang menyediakan pembiayaan, dan pemerintah selaku regulator dan pendukung. Pembangunan perumahan bagi MBR mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah antara lain berupa:

1. bantuan pembangunan rumah untuk masyarakat miskin.
2. subsidi perolehan rumah;
3. stimulan rumah swadaya.

BAB V
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN

5.1. Isu Strategis Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Isu strategis pembangunan dan pengembangan perumahan di 6 (enam) lingkungan hunian adalah:

1. Peran dan fungsi yang strategis untuk mendukung pengembangan Kawasan Perkotaan Purbalingga sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) di dalam wilayah Kabupaten Purbalingga maupun mendukung perkembangan Kawasan Perkotaan Purwokerto.
2. Daya tampung lahan untuk pengembangan perumahan baru yang cukup tersedia di setiap lingkungan hunian.
3. Kebutuhan penyediaan perumahan selain mempertimbangkan perkembangan jumlah penduduk di tiap lingkungan hunian, juga harus mempertimbangkan kebutuhan perumahan dari penduduk di luar wilayah Kabupaten Purbalingga (Kawasan Perkotaan Purwokerto).
4. Masih besarnya angka backlog perumahan di setiap perumahan pada 6 (enam) lingkungan hunian.
5. Masih banyaknya jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di semua satuan perumahan pada 6 (enam) lingkungan hunian.
6. Masih luasnya lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang tersebar di beberapa satuan perumahan pada 5 (lima) lingkungan hunian.
7. Masih belum optimalnya kinerja pelayanan PSU perumahan dan permukiman karena kondisi PSU maupun jumlah PSU yang belum sesuai dengan standar pelayanan minimalnya.

5.2. Kebijakan dan Strategi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan di 6 (enam) lingkungan hunian adalah:

1. Pengembangan perumahan yang layak dan ramah lingkungan untuk mendukung fungsi-fungsi kegiatan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan
   Strategi yang akan dilakukan untuk mewujudkan kebijakan tersebut adalah:
   a. Optimalisasi potensi tiap satuan perumahan
   b. Peningkatan pelayanan PSU
   c. Peningkatan keterpaduan PSU
   d. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru
   e. Pencegahan satuan perumahan yang tidak terencana

f. Pengawasan dan pemantauan pada satuan perumahan yang dibatasi maupun didorong pengembangannya
g. Pengawasan dan pemantauan pelestarian alam dan potensi sumberdaya pada satuan perumahan.

2. Pembangunan perumahan baru dengan konsep hunian berimbang dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
   Strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kebijakan tersebut adalah:
   a. Penyediaan perumahan bersubsidi untuk MBR
   b. Penyediaan perumahan susun sewa
   c. Penyediaan PSU yang terpadu
   d. Pemenuhan pelayanan jasa, pemerintahan, sosial, dan ekonomi
3. Pembangunan kembali perumahan pada lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
   Strategi yang akan dilakukan untuk mewujudkan kebijakan tersebut adalah meningkatkan kualitas lingkungan melalui rehabilitasi bangunan rumah tidak layak huni maupun PSU pendukungnya.

5.3. Arahan Pengembangan Kebutuhan Penyediaan Perumahan

5.3.1. Lingkungan Hunian Purbalingga

Arahan pengembangan kebutuhan penyediaan perumahan di lingkungan hunian Purbalingga mengacu pada dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Proyeksi penduduk
   - Kepadatan sedang sampai dengan tinggi
   - Kapasitas ruang tersedia
   - Koefisien dasar bangunan (KDB) antara 70% sampai dengan 90%
   - Koefisien lantai bangunan (KLB) antara 1,8 sampai dengan 2,4
   - Koefisien dasar hijau (KDH) antara 10% sampai dengan 30%
2. Karakteristik kegiatan
   - Fungsi dan peran lingkungan hunian sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan jasa skala kecamatan, pusat pelayanan umum skala kecamatan, pusat kebudayaan dan rekreasi dan peruntukan industri
   - Sistem perkotaan menurut RTRW Kabupaten Purbalingga ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
   - Rencana pola ruang menurut RTRW Kabupaten Purbalingga ditetapkan untuk peruntukan pariwisata, industri, perdagangan jasa, sarana pelayanan umum, dan peruntukan permukiman

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka arahan pengembangan penyediaan perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

1. Pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal terbatas (rusun) pada permukiman kepadatan tinggi
2. Pengembangan perumahan non skala besar
3. Penembangan permukiman yang mendukung pusat pemerintahan dan pusat perdagangan skala kecamatan

4. Pengembangan permukiman dengan bangunan vertikal terbatas (rusun) yang mendukung peruntukan industri
5. Pengembangan permukiman yang mendukung fungsi budidaya lainnya
6. Peningkatan PSU dalam rangka mendorong pengembangan perumahan dan permukiman perkotaan dan perdesaan
7. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
8. Pencegahan perumahan dan permukiman yang tidak terencana
9. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh

5.3.2. Lingkungan Hunian Kalimanah

Arahan pengembangan kebutuhan penyediaan perumahan di lingkungan hunian Kalimanah mengacu pada dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Proyeksi penduduk
   - Kepadatan sangat rendah sampai dengan sedang
   - Kapasitas ruang tersedia
   - Koefisien dasar bangunan (KDB) antara 50% sampai dengan 80%
   - Koefisien lantai bangunan (KLB) antara 0,5 sampai dengan 1,8
   - Koefisien dasar hijau (KDH) antara 20% sampai dengan 50%
2. Karakteristik kegiatan
   - Fungsi dan peran lingkungan hunian sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan jasa skala kecamatan, pusat pelayanan umum skala kecamatan, dan peruntukan industri
   - Sistem perkotaan menurut RTRW Kabupaten Purbalingga ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
   - Rencana pola ruang menurut RTRW Kabupaten Purbalingga ditetapkan untuk peruntukan pertanian, peruntukan industri, sarana pelayanan umum, dan peruntukan permukiman

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka arahan pengembangan penyediaan perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

1. Pengembangan perumahan dan permukiman *landed*
2. Pengembangan perumahan non skala besar
3. Pengembangan permukiman yang mendukung pusat pemerintahan dan pusat perdagangan skala kecamatan
4. Pengembangan permukiman dengan bangunan vertikal terbatas (rusun) yang mendukung peruntukan industri
5. Pengembangan permukiman yang mendukung fungsi budidaya lainnya
6. Peningkatan PSU dalam rangka mendorong pengembangan perumahan dan permukiman perkotaan dan perdesaan
7. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
8. Pencegahan perumahan dan permukiman yang tidak terencana
9. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh

5.3.3. Lingkungan Hunian Padamara

Arahan pengembangan kebutuhan penyediaan perumahan di lingkungan hunian Padamara mengacu pada dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Proyeksi penduduk
   - Kepadatan sangat rendah sampai dengan sedang
   - Kapasitas ruang tersedia
   - Koefisien dasar bangunan (KDB) antara 50% sampai dengan 80%
   - Koefisien lantai bangunan (KLB) antara 0,5 sampai dengan 1,8
   - Koefisien dasar hijau (KDH) antara 20% sampai dengan 50%
2. Karakteristik kegiatan
   - Fungsi dan peran lingkungan hunian sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan jasa skala kecamatan, pusat pelayanan umum skala kecamatan, dan peruntukan industri
   - Sistem perkotaan menurut RTRW Kabupaten Purbalingga ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
   - Rencana pola ruang menurut RTRW Kabupaten Purbalingga ditetapkan untuk peruntukan pertanian, industri, sarana pelayanan umum, dan peruntukan permukiman

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka arahan pengembangan penyediaan perumahan di Lingkungan Hunian Padamara adalah:

1. Pengembangan perumahan dan permukiman *landed*
2. Pengembangan perumahan non skala besar
3. Penembangan permukiman yang mendukung pusat pemerintahan dan pusat perdagangan skala kecamatan
4. Pengembangan permukiman dengan bangunan vertikal terbatas (rusun) yang mendukung peruntukan industri
5. Pengembangan permukiman yang mendukung pariwisata
6. Pengembangan permukiman yang mendukung fungsi budidaya lainnya
7. Peningkatan PSU dalam rangka mendorong pengembangan perumahan dan permukiman perkotaan dan perdesaan
8. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
9. Pencegahan perumahan dan permukiman yang tidak terencana
10. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh

5.3.4. Lingkungan Hunian Bojongsari

Arahan pengembangan kebutuhan penyediaan perumahan di lingkungan hunian Bojongsari mengacu pada dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Proyeksi penduduk
   - Kepadatan sangat rendah sampai dengan sedang
   - Kapasitas ruang tersedia
   - Koefisien dasar bangunan (KDB) antara 50% sampai dengan 80%
   - Koefisien lantai bangunan (KLB) antara 0,5 sampai dengan 1,8

- Koefisien dasar hijau (KDH) antara 20% sampai dengan 50%

2. Karakteristik kegiatan
   - Fungsi dan peran lingkungan hunian sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan jasa skala kecamatan, pusat pelayanan umum skala kecamatan, pariwisata, dan peruntukan industri
   - Sistem perkotaan menurut RTRW Kabupaten Purbalingga ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
   - Rencana pola ruang menurut RTRW Kabupaten Purbalingga ditetapkan untuk peruntukan pertanian, peruntukan industri, pariwisata, sarana pelayanan umum, dan peruntukan permukiman

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka arahan pengembangan penyediaan perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

1. Pengembangan perumahan dan permukiman *landed*
2. Pengembangan perumahan non skala besar
3. Pengembangan permukiman yang mendukung pusat pemerintahan dan pusat perdagangan skala kecamatan
4. Pengembangan permukiman yang mendukung pariwisata
5. Pengembangan permukiman yang mendukung fungsi budidaya lainnya
6. Peningkatan PSU dalam rangka mendorong pengembangan perumahan dan permukiman perkotaan dan perdesaan
7. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
8. Pencegahan perumahan dan permukiman yang tidak terencana
9. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh

5.3.5. Lingkungan Hunian Kutasari

Arahan pengembangan kebutuhan penyediaan perumahan di lingkungan hunian Kutasari mengacu pada dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Proyeksi penduduk
   - Kepadatan sangat rendah sampai dengan rendah
   - Kapasitas ruang tersedia
   - Koefisien dasar bangunan (KDB) antara 50% sampai dengan 70%
   - Koefisien lantai bangunan (KLB) antara 0,5 sampai dengan 1,0
   - Koefisien dasar hijau (KDH) antara 30% sampai dengan 50%
2. Karakteristik kegiatan
   - Fungsi dan peran lingkungan hunian sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan jasa skala kecamatan, pusat pelayanan umum skala kecamatan, dan peruntukan industri
   - Sistem perkotaan menurut RTRW Kabupaten Purbalingga ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
   - Rencana pola ruang menurut RTRW Kabupaten Purbalingga ditetapkan untuk peruntukan pertanian, industri, sarana pelayanan umum, dan peruntukan permukiman
   - Rencana kawasan strategis ditetapkan kawasan Agropolitan Lereng Gunung Slamet

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka arahan pengembangan penyediaan perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

1. Pengembangan perumahan dan permukiman yang mendukung kawasan strategis Agropolitan Lereng Gunung Slamet
2. Pengembangan perumahan non skala besar
3. Penembangan permukiman yang mendukung pusat pemerintahan dan pusat perdagangan skala kecamatan
4. Pengembangan permukiman yang mendukung fungsi budidaya lainnya
5. Peningkatan PSU dalam rangka mendorong pengembangan perumahan dan permukiman perkotaan dan perdesaan
6. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
7. Pencegahan perumahan dan permukiman yang tidak terencana
8. Pengembangan permukiman yang mendukung peruntukan industri dan pariwisata

5.3.6. Lingkungan Hunian Kaligondang

Arahan pengembangan kebutuhan penyediaan perumahan di lingkungan hunian Kaligondang mengacu pada dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Proyeksi penduduk
   - Kepadatan sangat rendah sampai dengan sedang
   - Kapasitas ruang tersedia
   - Koefisien dasar bangunan (KDB) antara 50% sampai dengan 80%
   - Koefisien lantai bangunan (KLB) antara 0,5 sampai dengan 1,8
   - Koefisien dasar hijau (KDH) antara 20% sampai dengan 50%
2. Karakteristik kegiatan
   - Fungsi dan peran lingkungan hunian sebagai pusat pemerintahan kecamatan, pusat perdagangan jasa skala kecamatan, pusat pelayanan umum skala kecamatan, dan peruntukan industri
   - Sistem perkotaan menurut RTRW Kabupaten Purbalingga ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
   - Rencana pola ruang menurut RTRW Kabupaten Purbalingga ditetapkan untuk peruntukan pertanian, peruntukan industri, sarana pelayanan umum, dan peruntukan permukiman
   - Rencana kawasan strategis menurut RTRW Kabupaten Purbalingga ditetapkan sebagai Kawasan Agropolitan Bungakondang

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka arahan pengembangan penyediaan perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

1. Pengembangan perumahan dan permukiman *landed*
2. Pengembangan perumahan non skala besar
3. Pengembangan permukiman yang mendukung pusat pemerintahan dan pusat perdagangan skala kecamatan
10. Pengembangan permukiman dengan bangunan vertikal terbatas (rusun) yang mendukung peruntukan industri
4. yang mendukung peruntukan industri

5. Pengembangan permukiman yang mendukung fungsi budidaya lainnya
6. Peningkatan PSU dalam rangka mendorong pengembangan perumahan dan permukiman perkotaan dan perdesaan
7. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
8. Pencegahan perumahan dan permukiman yang tidak terencana
9. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh

5.4. Arahan Pengembangan Keterpaduan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Perumahan

5.4.1. Arahan Pengembangan Keterpaduan Prasarana Perumahan

Prasarana perumahan meliputi jaringan jalan, jaringan drainase, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengolahan persampahan, dan sistem proteksi kebakaran. Pengembangan keterpaduan prasarana perumahan dimaksudkan agar terwujud efisiensi dan efektifitas pelayanan prasarana pada lingkup satuan perumahan, prasarana antar satuan perumahan, maupun prasarana antara satuan perumahan dengan prasarana di lingkup satuan permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman.

1. Pengembangan Pelayanan Jaringan Jalan
   Arahan pengembangan jaringan jalan untuk pelayanan perumahan di 6 (enam) lingkungan hunian adalah :
   - memantapkan sistem dan fungsi jaringan jalan
   - meningkatkan kualitas jaringan jalan
   - meningkatkan akses dan konektivitas antar perumahan
   - menyediakan sarana angkutan umum
   - menyediakan terminal dan halte yang memadai
   - menyediakan ruang pejalan kaki yang ramah difabel

   Di lingkungan hunian Kalimanah, Padamara, dan Purbalingga, pengembangan jaringan jalan untuk satuan perumahan dapat ditambahkan dengan menyediakan ruang pesepeda yang aman dan layak.
2. Pengembangan Pelayanan Jaringan Drainase
   Arahan pengembangan jaringan drainase untuk pelayanan perumahan di 6 (enam) Lingkungan Hunian adalah :
   - memantapkan sistem dan fungsi jaringan drainase
   - meningkatkan kualitas jaringan drainase
   - meningkatkan cakupan pelayanan drainase
3. Pengembangan Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum
   Arahan pengembangan sistem penyediaan air minum untuk pelayanan perumahan di 6 (enam) Lingkungan Hunian adalah :
   - meningkatkan kualitas SPAM Non Perpipaan
   - mengembangkan sistem pemanenan air hujan sebagai sumber air baku alternatif
   - meningkatkan unit air produksi dan distribusi berupa Instalasi Pengolah Air (IPA) pada SPAM IKK
   - meningkatkan fasilitas penampungan air minum

- meningkatkan kualitas jaringan perpipaan PDAM

Di lingkungan hunian Bojongsari, Kalimanah, Kaligondang, Kutasari, dan Padamara, pengembangan sistem penyediaan air minum untuk satuan perumahan dapat ditambahkan dengan mengembangkan jaringan perpipaan non PDAM berbasis masyarakat.

4. Pengembangan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah
   Arahan pengembangan sistem pengelolaan air limbah untuk pelayanan perumahan di 6 (enam) Lingkungan Hunian adalah :
   - meningkatkan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik setempat sesuai persyaratan teknis
   - meningkatkan cakupan pelayanan air limbah layak dan aman

   Di lingkungan hunian Bojongsari, Kalimanah, Kaligondang, Purbalingga, dan Padamara, pengembangan sistem pengelolaan air limbah untuk satuan perumahan dapat ditambahkan dengan mengembangkan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik terpusat skala lingkungan.
5. Pengembangan Pelayanan Sistem Pengolahan Persampahan
   Arahan pengembangan sistem pengolahan persampahan untuk pelayanan perumahan di 6 (enam) Lingkungan Hunian adalah :
   - memantapkan sistem pengelolaan persampahan sesuai persyaratan teknis
   - meningkatkan sarana dan prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis
   - mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat
6. Pengembangan Pelayanan Sistem Proteksi Kebakaran
   Arahan pengembangan sistem proteksi kebakaran untuk pelayanan perumahan di 6 (enam) Lingkungan Hunian adalah:
   - mengembangkan prasarana proteksi kebakaran sesuai persyaratan teknis
   - mengembangkan sarana proteksi kebakaran sesuai persyaratan teknis

5.4.2. Arahan Pengembangan Keterpaduan Sarana Perumahan

Sarana perumahan meliputi sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perdagangan, sarana peribadatan, sarana budaya dan rekreasi, serta sarana ruang terbuka hijau. Pengembangan keterpaduan Sarana perumahan dimaksudkan agar terwujud efisiensi dan efektifitas pelayanan sarana pada lingkup satuan perumahan, sarana antar satuan perumahan, maupun sarana antara satuan perumahan dengan sarana di lingkup satuan permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman.

1. Rencana Pelayanan Sarana Pemerintahan
   Arahan pengembangan sarana pemerintahan untuk pelayanan perumahan di 6 (enam) Lingkungan Hunian adalah :
   - meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana pemerintahan sesuai standar
   - mengembangkan sarana pemerintahan sesuai skala pelayanan
2. Rencana Pelayanan Sarana Pendidikan
   Arahan pengembangan sarana pendidikan untuk pelayanan perumahan di 6 (enam) Lingkungan Hunian adalah :

- meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana pendidikan sesuai standar
- mengembangkan sarana pendidikan sesuai skala pelayanan

3. Rencana Pelayanan Sarana Kesehatan
   Arahan pengembangan sarana kesehatan untuk pelayanan perumahan di 6 (enam) Lingkungan Hunian adalah :
   - meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana kesehatan sesuai standar
   - mengembangkan sarana kesehatan sesuai skala pelayanan
4. Rencana Pelayanan Sarana Perdagangan
   Arahan pengembangan sarana perdagangan untuk pelayanan perumahan di 6 (enam) Lingkungan Hunian adalah :
   - meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana perdagangan sesuai standar
   - mengembangkan sarana perdagangan sesuai skala pelayanan
5. Rencana Pelayanan Sarana Peribadatan
   Arahan pengembangan sarana peribadatan untuk pelayanan perumahan di 6 (enam) Lingkungan Hunian adalah :
   - meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana peribadatan sesuai standar
   - mengembangkan sarana peribadatan sesuai skala pelayanan
6. Rencana Pelayanan Sarana Budaya dan Rekreasi
   Arahan pengembangan sarana budaya dan rekreasi untuk pelayanan perumahan di 6 (enam) Lingkungan Hunian adalah :
   - meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana budaya dan rekreasi sesuai standar
   - mengembangkan sarana budaya dan rekreasi sesuai skala pelayanan
7. Rencana Pelayanan Sarana Ruang Terbuka Hijau
   Arahan pengembangan sarana ruang terbuka hijau untuk pelayanan perumahan di 6 (enam) Lingkungan Hunian adalah :
   - meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana ruang terbuka hijau sesuai standar
   - mengembangkan sarana ruang terbuka hijau sesuai skala pelayanan

5.4.3. Arahan Pengembangan Keterpaduan Utilitas Perumahan

Utilitas perumahan meliputi jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi. Pengembangan keterpaduan utilitas perumahan dimaksudkan agar terwujud efisiensi dan efektifitas pelayanan utilitas pada lingkup satuan perumahan, utilitas antar satuan perumahan, maupun utilitas antara satuan perumahan dengan utilitas di lingkup satuan permukiman, lingkungan hunian, dan kawasan permukiman.

1. Rencana Pelayanan Jaringan Listrik
   Arahan pengembangan jaringan listrik untuk pelayanan perumahan di 6 (enam) Lingkungan Hunian adalah :
   - memantapkan sistem dan fungsi jaringan listrik
   - meningkatkan kualitas jaringan listrik

- meningkatkan akses dan cakupan pelayanan listrik
- mengembangkan sumber energi listrik terbarukan

2. Rencana Pelayanan Jaringan Telekomunikasi
   Arahan pengembangan jaringan telekomunikasi untuk pelayanan perumahan di 6 (enam) Lingkungan Hunian adalah :
   - mengembangkan jaringan tetap telekomunikasi
   - mengembangkan jaringan bergerak seluler

BAB VI
RENCANA PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH

6.1. RENCANA LINGKUNGAN HUNIAN PURBALINGGA

Rencana pengembangan dan pembangunan perumahan pada lingkungan hunian Purbalingga ditetapkan dengan mempertimbangkan sebaran permukiman eksisting, rencana kawasan permukiman pada RTRW Kabupaten Purbalingga, dan sebaran lokasi yang ditetapkan sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Rencana pengembangan dan pembangunan perumahan pada lingkungan hunian Purbalingga meliputi:

1. Rencana pengembangan perumahan

   Rencana pengembangan perumahan ditetapkan seluas 506,75 Ha (53% dari luas rencana kawasan permukiman). Rencana pengembangan perumahan di lingkungan hunian Purbalingga meliputi:

   a. Peningkatan efisiensi potensi perumahan, melalui:
      - peningkatan kualitas perumahan yang mendukung pariwisata, Industri, dan fungsi budidaya lainnya.
      - Pengembangan permukiman dengan bangunan vertikal terbatas (rusun) yang mendukung peruntukan industri.
      - peningkatan kualitas perumahan pada kawasan strategis.
   b. Peningkatan kualitas bangunan rumah berupa perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 1603 unit rumah.
   c. Peningkatan pelayanan perumahan melalui pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan.
   d. Peningkatan keterpaduan PSU perumahan melalui peningkatan PSU sesuai standar pelayanan minimal.
   e. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh melalui penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian, serta pemberdayaan masyarakat supaya dapat menjaga kualitas perumahannya.
   f. Pencegahan perumahan tidak terencana melalui pelaksanaan aturan dan standar perumahan dan permukiman sesuai tata ruang.
   g. Satuan perumahan yang dibatasi dan didorong, dengan:
      - mengendalikan perumahan pada kawasan rawan bencana.
      - Mendorong perumahan yang mendukung peran LH dan mendukung fungsi budidaya lainnya, yang sesuai dengan tata ruang.

h. Peningkatan pelestarian alam dan potensi sumberdaya melalui peningkatan kualitas perumahan yang ramah lingkungan.

2. Rencana pembangunan perumahan baru

Rencana pembangunan perumahan baru di lingkungan hunian Purbalingga ditetapkan seluas 324,00 Ha (34% dari luas rencana kawasan permukiman). Rencana pembangunan perumahan baru di lingkungan hunian Purbalingga meliputi:

- penyediaan lokasi perumahan baru melalui kegiatan Kasiba dan Lisiba.
- pembangunan rumah baru sebanyak 21.214 unit rumah.
- penyediaan PSU melalui pembangunan PSU sesuai standar pelayanan minimalnya
- pelayanan jasa, pemerintahan, sosial, ekonomi melalui pemenuhan pelayanan jasa, pemerintahan, sosial dan ekonomi pada lokasi pembangunan baru

3. Rencana pembangunan kembali perumahan

Rencana pembangunan kembali perumahan di lingkungan hunian Purbalingga ditetapkan seluas 132,96 Ha (14% dari luas rencana peruntukan permukiman). Rencana pembangunan kembali perumahan di lingkungan hunian Purbalingga dengan rehabilitasi melalui peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui rehabilitasi pada lokasi yang mengalami kerusakan, kemunduran, atau degradasi lingkungan. Rencana pembangunan kembali perumahan termasuk perbaikan RTLH di kawasan kumuh sebanyak 636 unit tersebar di seluruh perumahan. Penanganan melalui rekonstruksi dan peremajaan tidak dilakukan untuk pembangunan kembali lingkungan hunian Purbalingga.

4. Rencana Pelayanan Prasarana Perumahan

a. Jaringan Jalan

- peningkatan jalan kolektor,
- peningkatan jalan lokal, dan lingkungan.
- pemeliharaan dan perbaikan jalan secara berkala.
- pembangunan jaringan jalan baru.
- peningkatan pelayanan angkutan umum.
- pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan terminal dan halte.
- peningkatan dan pembangunan jalur pejalan kaki (pedestrian) di pusat-pusat pelayanan.
- pembangunan jalur atau lajur pesepeda sesuai dimensi jalan.

b. Jaringan Drainase

- peningkatan sistem jaringan drainase terintegrasi.
- pemeliharaan berkala dan perbaikan/peningkatan konstruksi jaringan drainase.

- pembangunan jaringan drainase baru.

c. Jaringan Air Minum.
   - sosialisasi pola hidup bersih sehat (PHBS) dan standar teknis sumur dangkal.
   - Peningkatan kapasitas produksi air minum.
   - pemeliharaan dan perbaikan jaringan air minum secara berkala.
   - pembangunan jaringan distribusi baru dan penambahan sambungan rumah (SR).
   - peningkatan pelayanan air minum.
   - pengembangan jaringan perpipaan perdesaan/Non PDAM berbasis masyarakat.

d. Pengelolaan Air Limbah
   - Peningkatan SPAL Domestik setempat layak dan aman.
   - Pembangunan SPAL Domestik terpusat skala lingkungan.
   - Peningkatan sarana dan prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis.

e. Pengolahan Sampah
   - peningkatan keterpaduan sistem pewadahan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.
   - Pengembangan pewadahan sampah terpilah.
   - pembangunan TPS dan TPS3R di skala lingkungan.
   - pengembangan sarana pengangkut sampah sesuai persyaratan teknis.
   - pengembangan bank sampah.
   - pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) skala kawasan.

f. Sistem Proteksi Kebakaran
   - peningkatan kualitas pos pemadam kebakaran,
   - pengembangan pos satuan relawan kebakaran (Satlakar).
   - peningkatan sarana komunikasi dan data proteksi kebakaran yang handal.
   - pengadaan alat pemadam api ringan (APAR).
   - pengadaan alat pemadam api berat (APAB).
   - pemeliharaan kendaraan pemadam kebakaran.
   - pemeliharaan berkala dan peningkatan kualitas sarana proteksi kebakaran.
   - Pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan dini kebakaran.

5. Rencana Pelayanan Sarana Perumahan
   a. Sarana Pemerintahan
      - peningkatan kualitas sarana pemerintahan.
      - pemeliharaan berkala sarana pemerintahan.
      - pembangunan sarana pemerintahan.
   b. Sarana Pendidikan
      - peningkatan kualitas sarana pendidikan.
      - pemeliharaan berkala sarana pendidikan.
      - pembangunan sarana pendidikan.
   c. Sarana Kesehatan
      - peningkatan kualitas sarana kesehatan.
      - pemeliharaan berkala sarana kesehatan.
      - pembangunan sarana kesehatan.
   d. Sarana Perdagangan
      - peningkatan kualitas sarana perdagangan.
      - pemeliharaan berkala sarana perdagangan.
      - pembangunan sarana perdagangan.
   e. Sarana Peribadatan
      - peningkatan kualitas sarana peribadatan.
      - pemeliharaan berkala sarana peribadatan.
      - pembangunan sarana peribadatan.
   f. Sarana Budaya dan Rekreasi
      - peningkatan kualitas sarana budaya dan rekreasi.
      - pemeliharaan berkala sarana budaya dan rekreasi.
      - pembangunan sarana budaya dan rekreasi.
   g. Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH)
      - peningkatan kualitas sarana RTH.
      - pemeliharaan berkala sarana RTH.
      - pembangunan sarana RTH.
6. Rencana Pelayanan Utiltas Perumahan
   a. Jaringan Listrik
      - peningkatan jaringan dan sarana prasarana pendukung.

- pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala.
- pembangunan jaringan distribusi baru.
- fasilitasi pengembangan panel surya di fasilitas umum dan sosial.

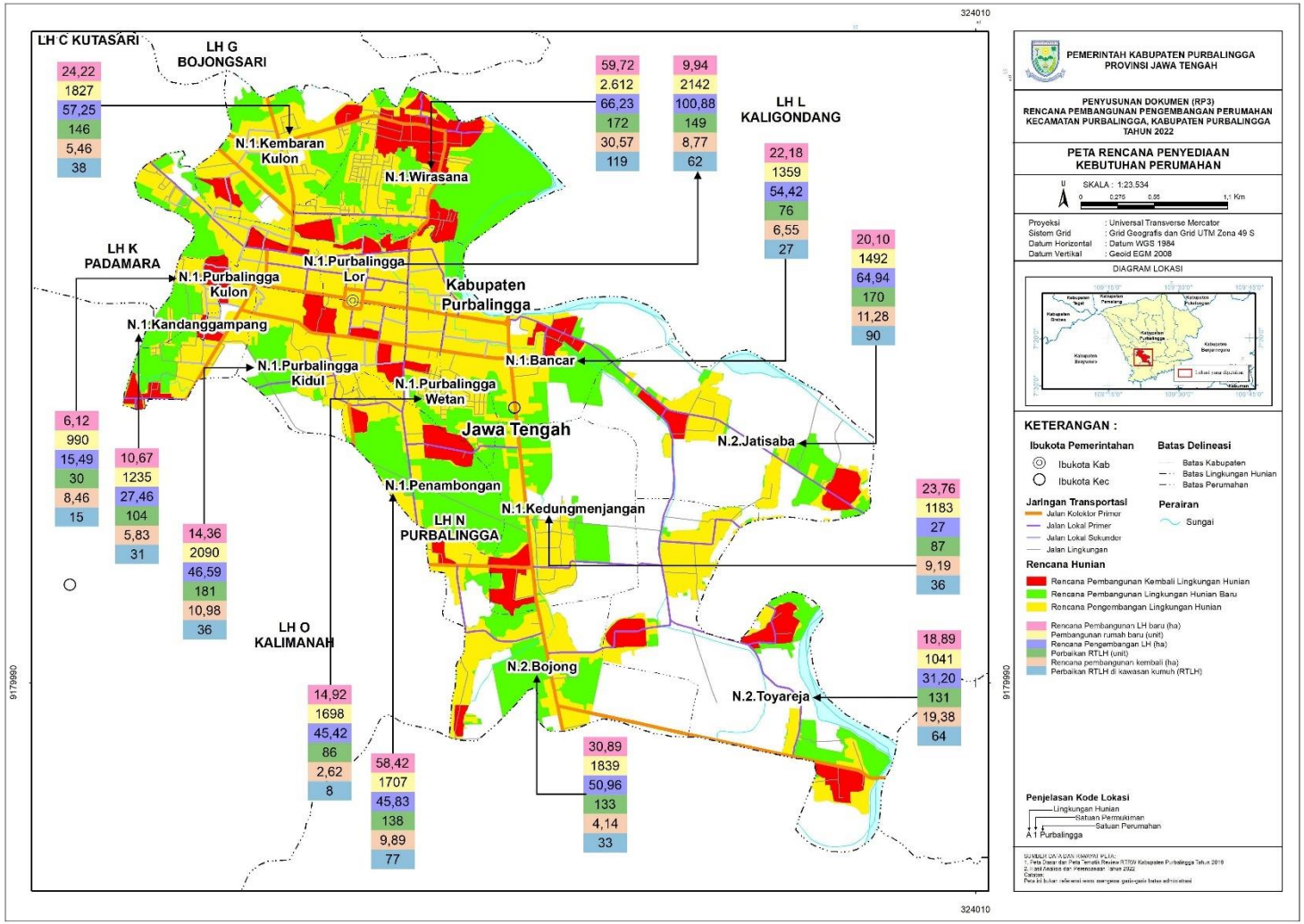
b. Jaringan Telekomunikasi

- peningkatan kualitas jaringan.
- pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala.
- pengembangan cakupan pelayanan jaringan fiber optik.
- peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan tetap telekomunikasi.
- pengaturan pelayanan menara bersama seluler.
- pengembangan cakupan pelayanan jaringan bergerak seluler.
- peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan bergerak seluler.

Tabel VI.1.
Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan Lingkungan Hunian Purbalingga

Perumahan	Rencana Pembangunan Kembali Lingkungan Hunian (Ha)	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru (Ha)	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian (Ha)	Total (Ha)
Bancar	6,54	22,18	47,91	76,63
Bojong	4,14	30,89	46,87	81,90
Jatisaba	14,40	20,10	50,59	85,09
Kandanggampang	5,90	20,67	21,63	48,20
Kedungmenjangan	1,08	23,76	25,93	50,78
Kembaran Kulon	5,46	24,22	52,69	82,37
Penambongan	18,00	58,42	28,87	105,30
Purbalingga Kidul	5,59	14,36	41,01	60,95
Purbalingga Kulon	5,24	6,12	10,43	21,79
Purbalingga Lor	17,21	9,94	83,72	110,87
Purbalingga Wetan	2,60	14,92	43,13	60,65
Toyareja	16,24	18,69	17,16	52,10
Wirasana	30,56	59,72	36,81	127,09
Total	132,96	324,00	506,75	963,72

Sumber: Penyusun, 2022



Gambar 6.1.
Peta Rencana Penyediaan Kebutuhan Perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga

6.2. RENCANA LINGKUNGAN HUNIAN KALIMANAH

Rencana pengembangan dan pembangunan perumahan pada lingkungan hunian Kalimanah ditetapkan dengan mempertimbangkan sebaran permukiman eksisting, rencana kawasan permukiman pada RTRW Kabupaten Purbalingga, dan sebaran lokasi yang ditetapkan sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Rencana pengembangan dan pembangunan perumahan pada lingkungan hunian Kalimanah meliputi:

1. Rencana pengembangan perumahan

   Rencana pengembangan perumahan ditetapkan seluas 699,23 Ha (63% dari luas rencana kawasan permukiman). Rencana pengembangan perumahan di lingkungan hunian Kalimanah meliputi:

   a. Peningkatan efisiensi potensi perumahan, melalui:
      - peningkatan kualitas perumahan yang mendukung pariwisata, industri, dan fungsi budidaya lainnya.
      - Pengembangan permukiman dengan bangunan vertikal terbatas (rusun) yang mendukung peruntukan industri
      - peningkatan kualitas perumahan pada kawasan strategis.
   b. Peningkatan kualitas bangunan rumah berupa perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 1995 unit rumah.
   c. Peningkatan pelayanan perumahan melalui pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan.
   d. Peningkatan keterpaduan PSU perumahan melalui peningkatan PSU sesuai standar pelayanan minimal.
   e. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh melalui penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian, serta pemberdayaan masyarakat supaya dapat menjaga kualitas perumahannya.
   f. Pencegahan perumahan tidak terencana melalui pelaksanaan aturan dan standar perumahan dan permukiman sesuai tata ruang.
   g. Satuan perumahan yang dibatasi dan didorong, dengan:
      - mengendalikan perumahan pada kawasan rawan bencana.
      - Mendorong perumahan yang mendukung peran LH dan mendukung fungsi budidaya lainnya, yang sesuai dengan tata ruang.
   h. Peningkatan pelestarian alam dan potensi sumberdaya melalui peningkatan kualitas perumahan yang ramah lingkungan.

2. Rencana pembangunan perumahan baru

   Rencana pembangunan perumahan baru di lingkungan hunian Kalimanah ditetapkan seluas 337,89 Ha (31% dari luas rencana kawasan permukiman). Rencana pembangunan perumahan baru di lingkungan hunian Kalimanah meliputi:

- penyediaan lokasi perumahan baru melalui kegiatan Kasiba dan Lisiba.
- pembangunan rumah baru sebanyak 23.611 unit rumah.
- penyediaan PSU melalui pembangunan PSU sesuai standar pelayanan minimalnya
- pelayanan jasa, pemerintahan, sosial, ekonomi melalui pemenuhan pelayanan jasa, pemerintahan, sosial dan ekonomi pada lokasi pembangunan baru

3. Rencana pembangunan kembali perumahan

   Rencana pembangunan kembali perumahan di lingkungan hunian Kalimanah ditetapkan seluas 68,60 Ha (6% dari luas rencana peruntukan permukiman). Rencana pembangunan kembali perumahan di lingkungan hunian Kalimanah dengan rehabilitasi melalui peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui rehabilitasi pada lokasi yang mengalami kerusakan, kemunduran, atau degradasi lingkungan. Rencana pembangunan kembali perumahan termasuk perbaikan RTLH di kawasan kumuh sebanyak 223 unit tersebar di Perumahan Grecol, Mewek, Karangmanyar, Kalikabong, Selabaya dan Babakan. Penanganan melalui rekonstruksi dan peremajaan tidak dilakukan untuk pembangunan kembali lingkungan hunian Kalimanah.

4. Rencana Pelayanan Prasarana Perumahan

   a. Jaringan Jalan

      - peningkatan jalan kolektor,
      - peningkatan jalan lokal, dan lingkungan.
      - pemeliharaan dan perbaikan jalan secara berkala.
      - pembangunan jaringan jalan baru.
      - peningkatan pelayanan angkutan umum.
      - pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan terminal dan halte.
      - peningkatan dan pembangunan jalur pejalan kaki (pedestrian) di pusat-pusat pelayanan.
      - pembangunan jalur atau lajur pesepeda sesuai dimensi jalan.

   b. Jaringan Drainase

      - peningkatan sistem jaringan drainase terintegrasi.
      - pemeliharaan berkala dan perbaikan/peningkatan konstruksi jaringan drainase.
      - pembangunan jaringan drainase baru.

   c. Jaringan Air Minum.

      - sosialisasi pola hidup bersih sehat (PHBS) dan standar teknis sumur dangkal.
      - Peningkatan kapasitas produksi air minum.
      - pemeliharaan dan perbaikan jaringan air minum secara berkala.

- pembangunan jaringan distribusi baru dan penambahan sambungan rumah (SR).
- peningkatan pelayanan air minum.
- pengembangan jaringan perpipaan perdesaan/Non PDAM berbasis masyarakat.

d. Pengelolaan Air Limbah

- Peningkatan SPAL Domestik setempat layak dan aman.
- Pembangunan SPAL Domestik terpusat skala lingkungan.
- Peningkatan sarana dan prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis.

e. Pengolahan Sampah

- peningkatan keterpaduan sistem pewadahan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.
- Pengembangan pewadahan sampah terpilah.
- pembangunan TPS dan TPS3R di skala lingkungan.
- pengembangan sarana pengangkut sampah sesuai persyaratan teknis.
- pengembangan bank sampah.
- pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) skala kawasan.

f. Sistem Proteksi Kebakaran

- peningkatan kualitas pos pemadam kebakaran,
- pengembangan pos satuan relawan kebakaran (Satlakar).
- peningkatan sarana komunikasi dan data proteksi kebakaran yang handal.
- pengadaan alat pemadam api ringan (APAR).
- pengadaan alat pemadam api berat (APAB).
- pemeliharaan kendaraan pemadam kebakaran.
- pemeliharaan berkala dan peningkatan kualitas sarana proteksi kebakaran.
- Pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan dini kebakaran.

5. Rencana Pelayanan Sarana Perumahan

a. Sarana Pemerintahan

- peningkatan kualitas sarana pemerintahan.
- pemeliharaan berkala sarana pemerintahan.
- pembangunan sarana pemerintahan.

b. Sarana Pendidikan
   - peningkatan kualitas sarana pendidikan.
   - pemeliharaan berkala sarana pendidikan.
   - pembangunan sarana pendidikan.

c. Sarana Kesehatan
   - peningkatan kualitas sarana kesehatan.
   - pemeliharaan berkala sarana kesehatan.
   - pembangunan sarana kesehatan.

d. Sarana Perdagangan
   - peningkatan kualitas sarana perdagangan.
   - pemeliharaan berkala sarana perdagangan.
   - pembangunan sarana perdagangan.

e. Sarana Peribadatan
   - peningkatan kualitas sarana peribadatan.
   - pemeliharaan berkala sarana peribadatan.
   - pembangunan sarana peribadatan.

f. Sarana Budaya dan Rekreasi
   - peningkatan kualitas sarana budaya dan rekreasi.
   - pemeliharaan berkala sarana budaya dan rekreasi.
   - pembangunan sarana budaya dan rekreasi.

g. Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH)
   - peningkatan kualitas sarana RTH.
   - pemeliharaan berkala sarana RTH.
   - pembangunan sarana RTH.

6. Rencana Pelayanan Utiltas Perumahan

a. Jaringan Listrik
   - peningkatan jaringan dan sarana prasarana pendukung.
   - pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala.
   - pembangunan jaringan distribusi baru.
   - fasilitasi pengembangan panel surya di fasilitas umum dan sosial.

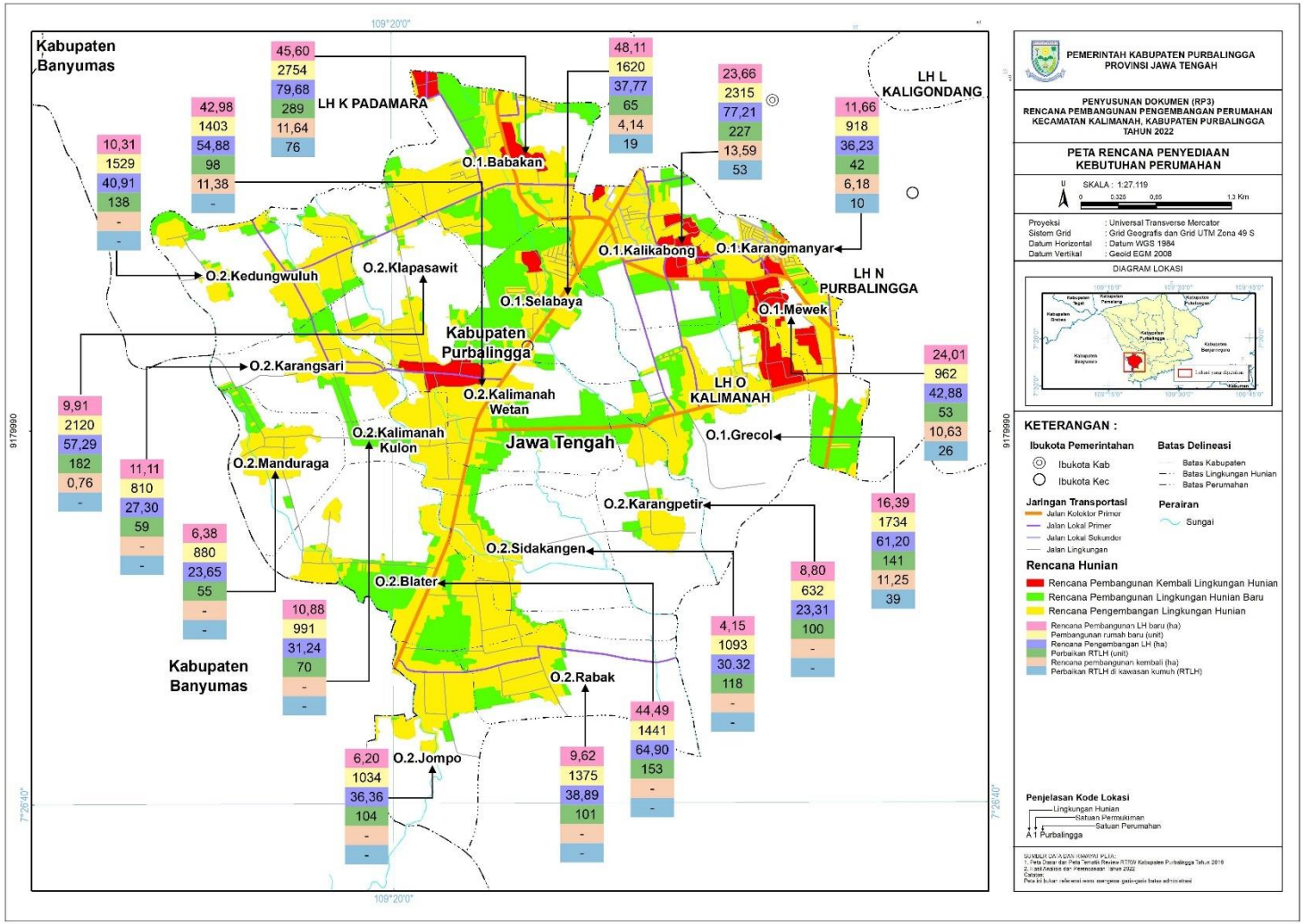
b. Jaringan Telekomunikasi
   - peningkatan kualitas jaringan.

- pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala.
- pengembangan cakupan pelayanan jaringan fiber optik.
- peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan tetap telekomunikasi.
- pengaturan pelayanan menara bersama seluler.
- pengembangan cakupan pelayanan jaringan bergerak seluler.
- peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan bergerak seluler.

Tabel VI.2.
Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan Lingkungan Hunian Kalimanah

Perumahan	Rencana Pembangunan Kembali Lingkungan Hunian (Ha)	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru (Ha)	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian (Ha)	Total (Ha)
Babakan	11,63	45,60	68,06	125,28
Blater	-	44,49	64,90	109,39
Grecol	11,23	16,39	50,46	78,08
Jompo	-	6,20	36,36	42,56
Kalikabong	12,95	23,66	64,30	100,90
Kalimanah Kulon	0,01	10,88	31,24	42,12
Kalimanah Wetan	11,39	42,89	43,48	97,76
Karangmanyar	6,20	11,66	30,03	47,89
Karangpetir	-	8,80	23,31	32,10
Karangsari	-	11,11	27,30	38,42
Kedungwuluh	-	14,04	43,74	57,78
Klapasawit	0,73	9,91	56,55	67,19
Manduraga	-	6,38	23,65	30,03
Mewek	10,31	24,01	32,60	66,92
Rabak	-	9,62	38,89	48,51
Selabaya	4,15	48,11	34,03	86,30
Sidakangen	-	4,15	30,32	34,47
Total	68,60	337,89	699,23	1.105,71

Sumber: Penyusun, 2022



Gambar 6.2.
Peta Rencana Penyediaan Kebutuhan Perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah

6.3. RENCANA LINGKUNGAN HUNIAN PADAMARA

Rencana pengembangan dan pembangunan perumahan pada lingkungan hunian Padamara ditetapkan dengan mempertimbangkan sebaran permukiman eksisting, rencana kawasan permukiman pada RTRW Kabupaten Purbalingga, dan sebaran lokasi yang ditetapkan sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Rencana pengembangan dan pembangunan perumahan pada lingkungan hunian Padamara meliputi:

1. Rencana pengembangan perumahan

   Rencana pengembangan perumahan ditetapkan seluas 595,43 Ha (69% dari luas rencana kawasan permukiman). Rencana pengembangan perumahan di lingkungan hunian Padamara meliputi:

   a. Peningkatan efisiensi potensi perumahan, melalui:
      - peningkatan kualitas perumahan yang mendukung pariwisata, industri, dan fungsi budidaya lainnya.
      - Pengembangan permukiman dengan bangunan vertikal terbatas (rusun) yang mendukung peruntukan industri
      - peningkatan kualitas perumahan pada kawasan strategis.
   b. Peningkatan kualitas bangunan rumah berupa perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 2480 unit rumah.
   c. Peningkatan pelayanan perumahan melalui pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan.
   d. Peningkatan keterpaduan PSU perumahan melalui peningkatan PSU sesuai standar pelayanan minimal.
   e. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh melalui penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian, serta pemberdayaan masyarakat supaya dapat menjaga kualitas perumahannya.
   f. Pencegahan perumahan tidak terencana melalui pelaksanaan aturan dan standar perumahan dan permukiman sesuai tata ruang.
   g. Satuan perumahan yang dibatasi dan didorong, dengan:
      - mengendalikan perumahan pada kawasan rawan bencana.
      - Mendorong perumahan yang mendukung peran LH dan mendukung fungsi budidaya lainnya, yang sesuai dengan tata ruang.
   h. Peningkatan pelestarian alam dan potensi sumberdaya melalui peningkatan kualitas perumahan yang ramah lingkungan.

2. Rencana pembangunan perumahan baru

   Rencana pembangunan perumahan baru di lingkungan hunian Padamara ditetapkan seluas 256,36 Ha (30% dari luas rencana kawasan permukiman). Rencana pembangunan perumahan baru di lingkungan hunian Padamara meliputi:

- penyediaan lokasi perumahan baru melalui kegiatan Kasiba dan Lisiba.
- pembangunan rumah baru sebanyak 11.747 unit rumah.
- penyediaan PSU melalui pembangunan PSU sesuai standar pelayanan minimalnya
- pelayanan jasa, pemerintahan, sosial, ekonomi melalui pemenuhan pelayanan jasa, pemerintahan, sosial dan ekonomi pada lokasi pembangunan baru

3. Rencana pembangunan kembali perumahan

   Rencana pembangunan kembali perumahan di lingkungan hunian Padamara ditetapkan seluas 6,69 Ha (1% dari luas rencana peruntukan permukiman). Rencana pembangunan kembali perumahan di lingkungan hunian Padamara dengan rehabilitasi melalui peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui rehabilitasi pada lokasi yang mengalami kerusakan, kemunduran, atau degradasi lingkungan. Rencana pembangunan kembali perumahan termasuk perbaikan RTLH di kawasan kumuh sebanyak 38 unit tersebar di Perumahan Karangsentul. Penanganan melalui rekonstruksi dan peremajaan tidak dilakukan untuk pembangunan kembali lingkungan hunian Padamara.

4. Rencana Pelayanan Prasarana Perumahan

   a. Jaringan Jalan

      - peningkatan jalan kolektor,
      - peningkatan jalan lokal, dan lingkungan.
      - pemeliharaan dan perbaikan jalan secara berkala.
      - pembangunan jaringan jalan baru.
      - peningkatan pelayanan angkutan umum.
      - pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan terminal dan halte.
      - peningkatan dan pembangunan jalur pejalan kaki (pedestrian) di pusat-pusat pelayanan.
      - pembangunan jalur atau lajur pesepeda sesuai dimensi jalan.

   b. Jaringan Drainase

      - peningkatan sistem jaringan drainase terintegrasi.
      - pemeliharaan berkala dan perbaikan/peningkatan konstruksi jaringan drainase.
      - pembangunan jaringan drainase baru.

   c. Jaringan Air Minum.

      - sosialisasi pola hidup bersih sehat (PHBS) dan standar teknis sumur dangkal.
      - Peningkatan kapasitas produksi air minum.
      - pemeliharaan dan perbaikan jaringan air minum secara berkala.

- pembangunan jaringan distribusi baru dan penambahan sambungan rumah (SR).
- peningkatan pelayanan air minum.
- pengembangan jaringan perpipaan perdesaan/Non PDAM berbasis masyarakat.

d. Pengelolaan Air Limbah

- Peningkatan SPAL Domestik setempat layak dan aman.
- Pembangunan SPAL Domestik terpusat skala lingkungan.
- Peningkatan sarana dan prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis.

e. Pengolahan Sampah

- peningkatan keterpaduan sistem pewadahan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.
- Pengembangan pewadahan sampah terpilah.
- pembangunan TPS dan TPS3R di skala lingkungan.
- pengembangan sarana pengangkut sampah sesuai persyaratan teknis.
- pengembangan bank sampah.
- pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) skala kawasan.

f. Sistem Proteksi Kebakaran

- peningkatan kualitas pos pemadam kebakaran,
- pengembangan pos satuan relawan kebakaran (Satlakar).
- peningkatan sarana komunikasi dan data proteksi kebakaran yang handal.
- pengadaan alat pemadam api ringan (APAR).
- pengadaan alat pemadam api berat (APAB).
- pemeliharaan kendaraan pemadam kebakaran.
- pemeliharaan berkala dan peningkatan kualitas sarana proteksi kebakaran.
- Pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan dini kebakaran.

5. Rencana Pelayanan Sarana Perumahan

a. Sarana Pemerintahan

- peningkatan kualitas sarana pemerintahan.
- pemeliharaan berkala sarana pemerintahan.
- pembangunan sarana pemerintahan.

b. Sarana Pendidikan
   - peningkatan kualitas sarana pendidikan.
   - pemeliharaan berkala sarana pendidikan.
   - pembangunan sarana pendidikan.

c. Sarana Kesehatan
   - peningkatan kualitas sarana kesehatan.
   - pemeliharaan berkala sarana kesehatan.
   - pembangunan sarana kesehatan.

d. Sarana Perdagangan
   - peningkatan kualitas sarana perdagangan.
   - pemeliharaan berkala sarana perdagangan.
   - pembangunan sarana perdagangan.

e. Sarana Peribadatan
   - peningkatan kualitas sarana peribadatan.
   - pemeliharaan berkala sarana peribadatan.
   - pembangunan sarana peribadatan.

f. Sarana Budaya dan Rekreasi
   - peningkatan kualitas sarana budaya dan rekreasi.
   - pemeliharaan berkala sarana budaya dan rekreasi.
   - pembangunan sarana budaya dan rekreasi.

g. Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH)
   - peningkatan kualitas sarana RTH.
   - pemeliharaan berkala sarana RTH.
   - pembangunan sarana RTH.

6. Rencana Pelayanan Utiltas Perumahan

a. Jaringan Listrik
   - peningkatan jaringan dan sarana prasarana pendukung.
   - pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala.
   - pembangunan jaringan distribusi baru.
   - fasilitasi pengembangan panel surya di fasilitas umum dan sosial.

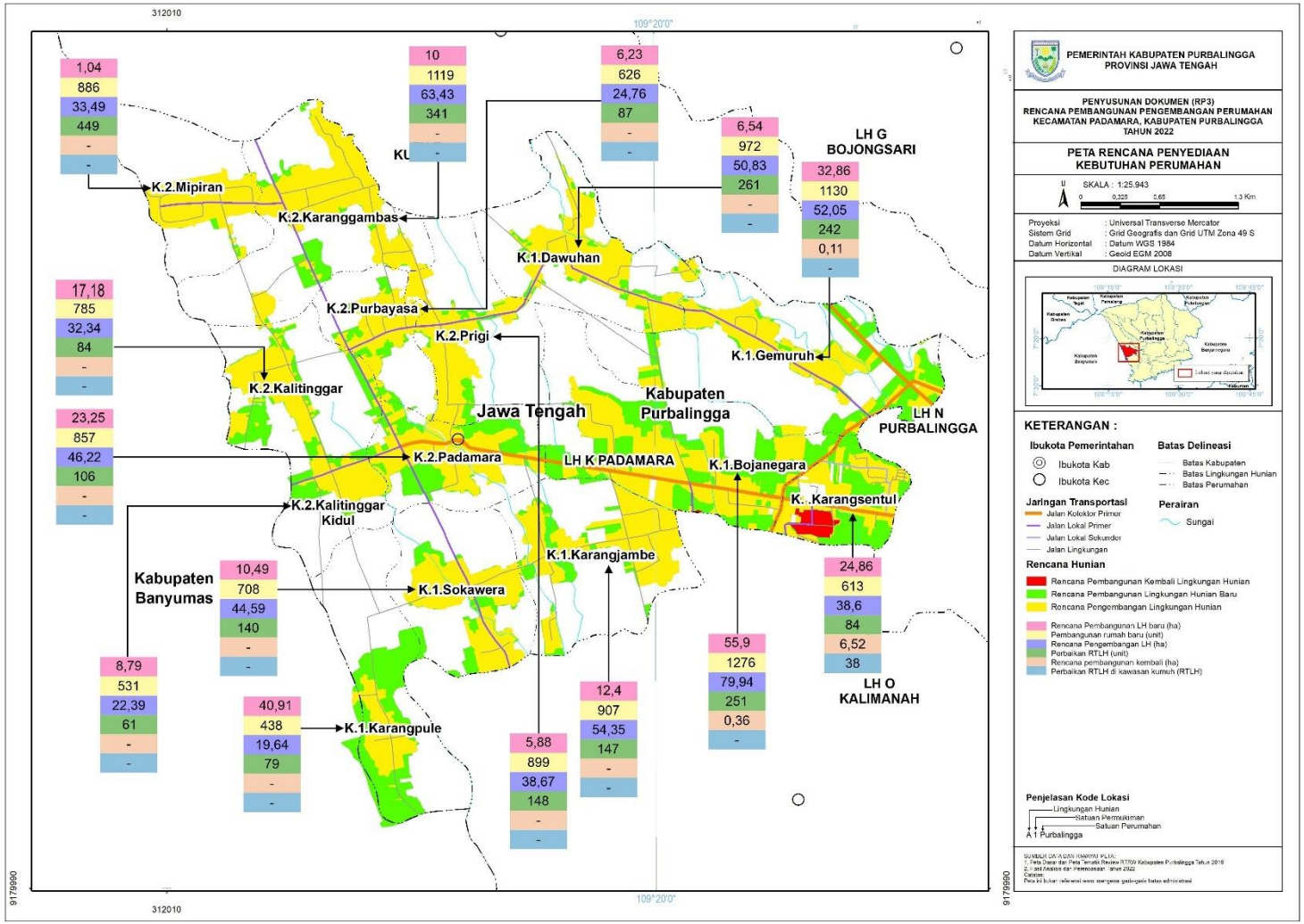
b. Jaringan Telekomunikasi
   - peningkatan kualitas jaringan.

- pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala.
- pengembangan cakupan pelayanan jaringan fiber optik.
- peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan tetap telekomunikasi.
- pengaturan pelayanan menara bersama seluler.
- pengembangan cakupan pelayanan jaringan bergerak seluler.
- peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan bergerak seluler.

Tabel VI.3.
Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan Lingkungan Hunian Padamara

Perumahan	Rencana Pembangunan Kembali Lingkungan Hunian (Ha)	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru (Ha)	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian (Ha)	Total (Ha)
Bojanegara	0,19	55,90	79,76	135,86
Dawuhan	-	6,54	50,83	57,37
Gemuruh	-	32,86	52,11	84,97
Kalitinggar	-	17,18	32,34	49,52
Kalitinggar Kidul	-	8,79	22,39	31,18
Karanggambas	-	10,00	63,43	73,44
Karangjambe	0,00	12,40	54,36	66,77
Karangpule	-	40,91	19,64	60,55
Karangsentul	6,49	24,86	32,84	64,19
Mipiran	-	1,04	33,49	34,53
Padamara	-	23,25	46,22	69,47
Prigi	-	5,88	38,67	44,55
Purbayasa	-	6,23	24,76	30,99
Sokawera	-	10,49	44,59	55,08
Total	6,69	256,36	595,43	858,48

Sumber: Penyusun, 2022



Gambar 6.3.
Peta Rencana Penyediaan Kebutuhan Perumahan di Lingkungan Hunian Padamara

6.4. RENCANA LINGKUNGAN HUNIAN BOJONGSARI

Rencana pengembangan dan pembangunan perumahan pada lingkungan hunian Bojongsari ditetapkan dengan mempertimbangkan sebaran permukiman eksisting, rencana kawasan permukiman pada RTRW Kabupaten Purbalingga, dan sebaran lokasi yang ditetapkan sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Rencana pengembangan dan pembangunan perumahan pada lingkungan hunian Bojongsari meliputi:

1. Rencana pengembangan perumahan

   Rencana pengembangan perumahan ditetapkan seluas 595,43 Ha (69% dari luas rencana kawasan permukiman). Rencana pengembangan perumahan di lingkungan hunian Bojongsari meliputi:

   a. Peningkatan efisiensi potensi perumahan, melalui:
      - peningkatan kualitas perumahan yang mendukung pariwisata, industri, dan fungsi budidaya lainnya.
      - peningkatan kualitas perumahan pada kawasan strategis.

   b. Peningkatan kualitas bangunan rumah berupa perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 4404 unit rumah.

   c. Peningkatan pelayanan perumahan melalui pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan.

   d. Peningkatan keterpaduan PSU perumahan melalui peningkatan PSU sesuai standar pelayanan minimal.

   e. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh melalui penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian, serta pemberdayaan masyarakat supaya dapat menjaga kualitas perumahannya.

   f. Pencegahan perumahan tidak terencana melalui pelaksanaan aturan dan standar perumahan dan permukiman sesuai tata ruang.

   g. Satuan perumahan yang dibatasi dan didorong, dengan:
      - mengendalikan perumahan pada kawasan rawan bencana.
      - Mendorong perumahan yang mendukung peran LH dan mendukung fungsi budidaya lainnya, yang sesuai dengan tata ruang.

   h. Peningkatan pelestarian alam dan potensi sumberdaya melalui peningkatan kualitas perumahan yang ramah lingkungan.

2. Rencana pembangunan perumahan baru

   Rencana pembangunan perumahan baru di lingkungan hunian Bojongsari ditetapkan seluas 256,36 Ha (30% dari luas rencana kawasan permukiman). Rencana pembangunan perumahan baru di lingkungan hunian Bojongsari meliputi:

   - penyediaan lokasi perumahan baru melalui kegiatan Kasiba dan Lisiba.
   - pembangunan rumah baru sebanyak 18.777 unit rumah.

- penyediaan PSU melalui pembangunan PSU sesuai standar pelayanan minimalnya
- pelayanan jasa, pemerintahan, sosial, ekonomi melalui pemenuhan pelayanan jasa, pemerintahan, sosial dan ekonomi pada lokasi pembangunan baru

3. Rencana pembangunan kembali perumahan

   Rencana pembangunan kembali perumahan di lingkungan hunian Bojongsari ditetapkan seluas 6,69 Ha (1% dari luas rencana peruntukan permukiman). Rencana pembangunan kembali perumahan di lingkungan hunian Bojongsari dengan rehabilitasi melalui peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui rehabilitasi pada lokasi yang mengalami kerusakan, kemunduran, atau degradasi lingkungan. Rencana pembangunan kembali perumahan termasuk perbaikan RTLH di kawasan kumuh sebanyak 26 unit tersebar di Perumahan Brobot. Penanganan melalui rekonstruksi dan peremajaan tidak dilakukan untuk pembangunan kembali lingkungan hunian Bojongsari.

4. Rencana Pelayanan Prasarana Perumahan

   a. Jaringan Jalan

      - peningkatan jalan kolektor,
      - peningkatan jalan lokal, dan lingkungan.
      - pemeliharaan dan perbaikan jalan secara berkala.
      - pembangunan jaringan jalan baru.
      - peningkatan pelayanan angkutan umum.
      - pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan terminal dan halte.
      - peningkatan dan pembangunan jalur pejalan kaki (pedestrian) di pusat-pusat pelayanan.
      - pembangunan jalur atau lajur pesepeda sesuai dimensi jalan.

   b. Jaringan Drainase

      - peningkatan sistem jaringan drainase terintegrasi.
      - pemeliharaan berkala dan perbaikan/peningkatan konstruksi jaringan drainase.
      - pembangunan jaringan drainase baru.

   c. Jaringan Air Minum.

      - sosialisasi pola hidup bersih sehat (PHBS) dan standar teknis sumur dangkal.
      - Peningkatan kapasitas produksi air minum.
      - pemeliharaan dan perbaikan jaringan air minum secara berkala.
      - pembangunan jaringan distribusi baru dan penambahan sambungan rumah (SR).
      - peningkatan pelayanan air minum.

- pengembangan jaringan perpipaan perdesaan/Non PDAM berbasis masyarakat.

d. Pengelolaan Air Limbah

- Peningkatan SPAL Domestik setempat layak dan aman.
- Pembangunan SPAL Domestik terpusat skala lingkungan.
- Peningkatan sarana dan prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis.

e. Pengolahan Sampah

- peningkatan keterpaduan sistem pewadahan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.
- Pengembangan pewadahan sampah terpilah.
- pembangunan TPS dan TPS3R di skala lingkungan.
- pengembangan sarana pengangkut sampah sesuai persyaratan teknis.
- pengembangan bank sampah.
- pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) skala kawasan.

f. Sistem Proteksi Kebakaran

- peningkatan kualitas pos pemadam kebakaran,
- pengembangan pos satuan relawan kebakaran (Satlakar).
- peningkatan sarana komunikasi dan data proteksi kebakaran yang handal.
- pengadaan alat pemadam api ringan (APAR).
- pengadaan alat pemadam api berat (APAB).
- pemeliharaan kendaraan pemadam kebakaran.
- pemeliharaan berkala dan peningkatan kualitas sarana proteksi kebakaran.
- Pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan dini kebakaran.

5. Rencana Pelayanan Sarana Perumahan

a. Sarana Pemerintahan

- peningkatan kualitas sarana pemerintahan.
- pemeliharaan berkala sarana pemerintahan.
- pembangunan sarana pemerintahan.

b. Sarana Pendidikan

- peningkatan kualitas sarana pendidikan.
- pemeliharaan berkala sarana pendidikan.
- pembangunan sarana pendidikan.

c. Sarana Kesehatan
   - peningkatan kualitas sarana kesehatan.
   - pemeliharaan berkala sarana kesehatan.
   - pembangunan sarana kesehatan.

d. Sarana Perdagangan
   - peningkatan kualitas sarana perdagangan.
   - pemeliharaan berkala sarana perdagangan.
   - pembangunan sarana perdagangan.

e. Sarana Peribadatan
   - peningkatan kualitas sarana peribadatan.
   - pemeliharaan berkala sarana peribadatan.
   - pembangunan sarana peribadatan.

f. Sarana Budaya dan Rekreasi
   - peningkatan kualitas sarana budaya dan rekreasi.
   - pemeliharaan berkala sarana budaya dan rekreasi.
   - pembangunan sarana budaya dan rekreasi.

g. Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH)
   - peningkatan kualitas sarana RTH.
   - pemeliharaan berkala sarana RTH.
   - pembangunan sarana RTH.

6. Rencana Pelayanan Utiltas Perumahan

a. Jaringan Listrik
   - peningkatan jaringan dan sarana prasarana pendukung.
   - pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala.
   - pembangunan jaringan distribusi baru.
   - fasilitasi pengembangan panel surya di fasilitas umum dan sosial.

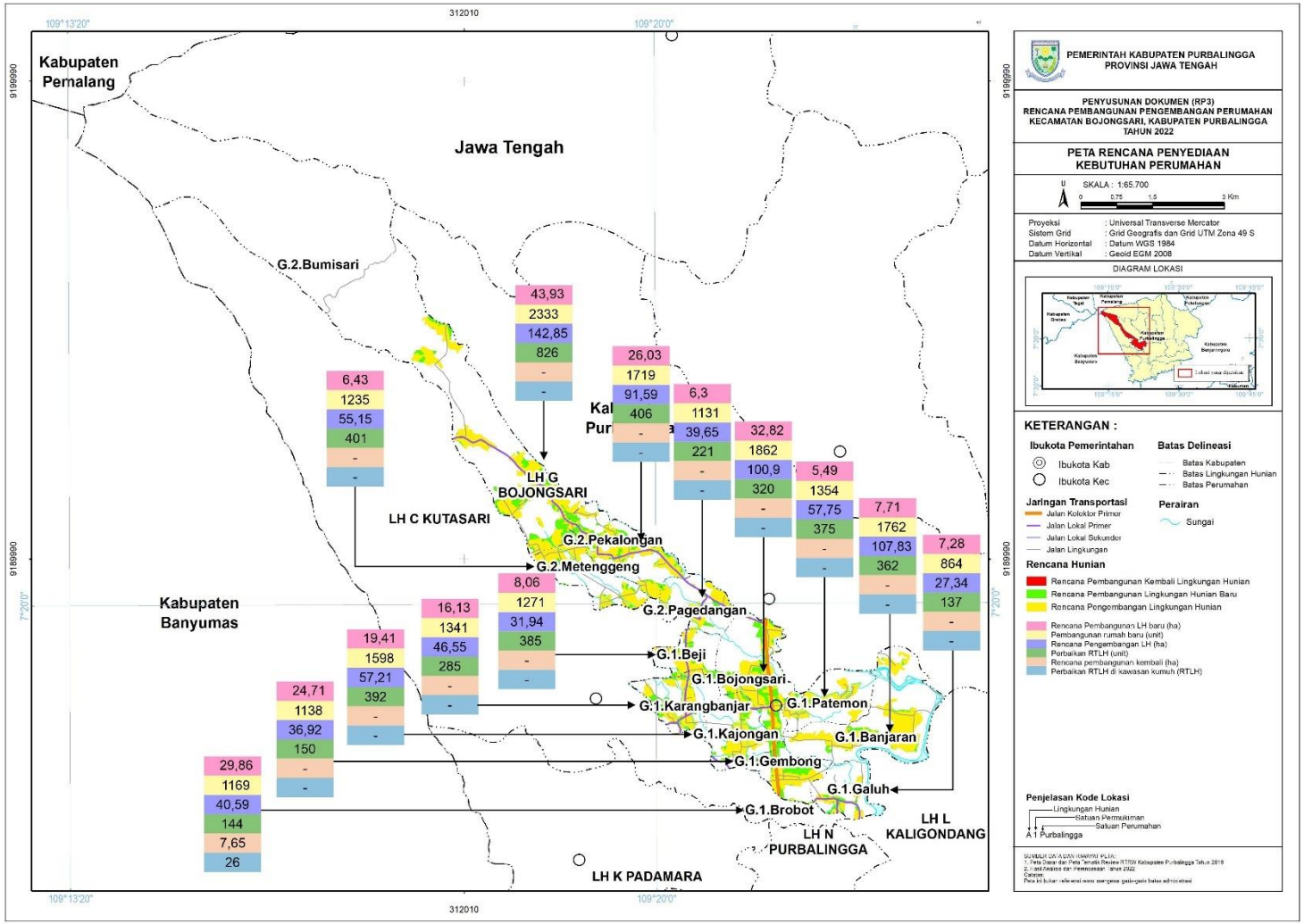
b. Jaringan Telekomunikasi
   - peningkatan kualitas jaringan.
   - pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala.
   - pengembangan cakupan pelayanan jaringan fiber optik.
   - peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan tetap telekomunikasi.

- pengaturan pelayanan menara bersama seluler.
- pengembangan cakupan pelayanan jaringan bergerak seluler.
- peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan bergerak seluler.

Tabel VI.4.
Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan Lingkungan Hunian Bojongsari

Perumahan	Rencana Pembangunan Kembali Lingkungan Hunian (Ha)	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru (Ha)	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian (Ha)	Total (Ha)
Banjaran	-	7,71	107,83	115,54
Beji	-	8,06	31,94	40,00
Bojongsari	-	32,82	100,90	133,72
Brobot	7,74	29,86	32,90	70,50
Bumisari	-	43,93	142,85	186,78
Galuh	0,12	7,28	27,33	34,74
Gembong	-	24,71	36,92	61,62
Kajongan	-	19,41	57,21	76,63
Karangbanjar	-	16,13	46,55	62,68
Metenggeng	-	6,49	55,15	61,64
Pagedangan	-	6,30	39,65	45,95
Patemon	-	5,49	57,75	63,24
Pekalongan	-	26,03	91,60	117,62
Total	7,86	234,22	828,59	1.070,66

Sumber: Penyusun, 2022



Gambar 6.4.
Peta Rencana Penyediaan Kebutuhan Perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari

6.5. RENCANA LINGKUNGAN HUNIAN KUTASARI

Rencana pengembangan dan pembangunan perumahan pada lingkungan hunian Kutasari ditetapkan dengan mempertimbangkan sebaran permukiman eksisting, rencana kawasan permukiman pada RTRW Kabupaten Purbalingga, dan sebaran lokasi yang ditetapkan sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Rencana pengembangan dan pembangunan perumahan pada lingkungan hunian Kutasari meliputi:

1. Rencana pengembangan perumahan

   Rencana pengembangan perumahan ditetapkan seluas 1011,55 Ha (80% dari luas rencana kawasan permukiman). Rencana pengembangan perumahan di lingkungan hunian Kutasari meliputi:

   a. Peningkatan efisiensi potensi perumahan, melalui:
      - peningkatan kualitas perumahan yang mendukung pariwisata, industri, dan fungsi budidaya lainnya.
      - peningkatan kualitas perumahan pada kawasan strategis.

   b. Peningkatan kualitas bangunan rumah berupa perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 5932 unit rumah.

   c. Peningkatan pelayanan perumahan melalui pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan.

   d. Peningkatan keterpaduan PSU perumahan melalui peningkatan PSU sesuai standar pelayanan minimal.

   e. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh melalui penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian, serta pemberdayaan masyarakat supaya dapat menjaga kualitas perumahannya.

   f. Pencegahan perumahan tidak terencana melalui pelaksanaan aturan dan standar perumahan dan permukiman sesuai tata ruang.

   g. Satuan perumahan yang dibatasi dan didorong, dengan:
      - mengendalikan perumahan pada kawasan rawan bencana.
      - Mendorong perumahan yang mendukung peran LH dan mendukung fungsi budidaya lainnya, yang sesuai dengan tata ruang.

   h. Peningkatan pelestarian alam dan potensi sumberdaya melalui peningkatan kualitas perumahan yang ramah lingkungan.

2. Rencana pembangunan perumahan baru

   Rencana pembangunan perumahan baru di lingkungan hunian Kutasari ditetapkan seluas 252,82 Ha (20% dari luas rencana kawasan permukiman). Rencana pembangunan perumahan baru di lingkungan hunian Kutasari meliputi:

   - penyediaan lokasi perumahan baru melalui kegiatan Kasiba dan Lisiba.
   - pembangunan rumah baru sebanyak 23.503 unit rumah.

- penyediaan PSU melalui pembangunan PSU sesuai standar pelayanan minimalnya
- pelayanan jasa, pemerintahan, sosial, ekonomi melalui pemenuhan pelayanan jasa, pemerintahan, sosial dan ekonomi pada lokasi pembangunan baru

3. Rencana Pelayanan Prasarana Perumahan

a. Jaringan Jalan

- peningkatan jalan kolektor,
- peningkatan jalan lokal, dan lingkungan.
- pemeliharaan dan perbaikan jalan secara berkala.
- pembangunan jaringan jalan baru.
- peningkatan pelayanan angkutan umum.
- pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan terminal dan halte.
- peningkatan dan pembangunan jalur pejalan kaki (pedestrian) di pusat-pusat pelayanan.
- pembangunan jalur atau lajur pesepeda sesuai dimensi jalan.

b. Jaringan Drainase

- peningkatan sistem jaringan drainase terintegrasi.
- pemeliharaan berkala dan perbaikan/peningkatan konstruksi jaringan drainase.
- pembangunan jaringan drainase baru.

c. Jaringan Air Minum.

- sosialisasi pola hidup bersih sehat (PHBS) dan standar teknis sumur dangkal.
- Peningkatan kapasitas produksi air minum.
- pemeliharaan dan perbaikan jaringan air minum secara berkala.
- pembangunan jaringan distribusi baru dan penambahan sambungan rumah (SR).
- peningkatan pelayanan air minum.
- pengembangan jaringan perpipaan perdesaan/Non PDAM berbasis masyarakat.

d. Pengelolaan Air Limbah

- Peningkatan SPAL Domestik setempat layak dan aman.
- Pembangunan SPAL Domestik terpusat skala lingkungan.
- Peningkatan sarana dan prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis.

e. Pengolahan Sampah

- peningkatan keterpaduan sistem pewadahan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.
- Pengembangan pewadahan sampah terpilah.
- pembangunan TPS dan TPS3R di skala lingkungan.
- pengembangan sarana pengangkut sampah sesuai persyaratan teknis.
- pengembangan bank sampah.
- pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) skala kawasan.

f. Sistem Proteksi Kebakaran

- peningkatan kualitas pos pemadam kebakaran,
- pengembangan pos satuan relawan kebakaran (Satlakar).
- peningkatan sarana komunikasi dan data proteksi kebakaran yang handal.
- pengadaan alat pemadam api ringan (APAR).
- pengadaan alat pemadam api berat (APAB).
- pemeliharaan kendaraan pemadam kebakaran.
- pemeliharaan berkala dan peningkatan kualitas sarana proteksi kebakaran.
- Pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan dini kebakaran.

4. Rencana Pelayanan Sarana Perumahan

a. Sarana Pemerintahan

- peningkatan kualitas sarana pemerintahan.
- pemeliharaan berkala sarana pemerintahan.
- pembangunan sarana pemerintahan.

b. Sarana Pendidikan

- peningkatan kualitas sarana pendidikan.
- pemeliharaan berkala sarana pendidikan.
- pembangunan sarana pendidikan.

c. Sarana Kesehatan

- peningkatan kualitas sarana kesehatan.
- pemeliharaan berkala sarana kesehatan.
- pembangunan sarana kesehatan.

d. Sarana Perdagangan

- peningkatan kualitas sarana perdagangan.
- pemeliharaan berkala sarana perdagangan.

- pembangunan sarana perdagangan.

e. Sarana Peribadatan

- peningkatan kualitas sarana peribadatan.
- pemeliharaan berkala sarana peribadatan.
- pembangunan sarana peribadatan.

f. Sarana Budaya dan Rekreasi

- peningkatan kualitas sarana budaya dan rekreasi.
- pemeliharaan berkala sarana budaya dan rekreasi.
- pembangunan sarana budaya dan rekreasi.

g. Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH)

- peningkatan kualitas sarana RTH.
- pemeliharaan berkala sarana RTH.
- pembangunan sarana RTH.

5. Rencana Pelayanan Utiltas Perumahan

c. Jaringan Listrik

- peningkatan jaringan dan sarana prasarana pendukung.
- pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala.
- pembangunan jaringan distribusi baru.
- fasilitasi pengembangan panel surya di fasilitas umum dan sosial.

d. Jaringan Telekomunikasi

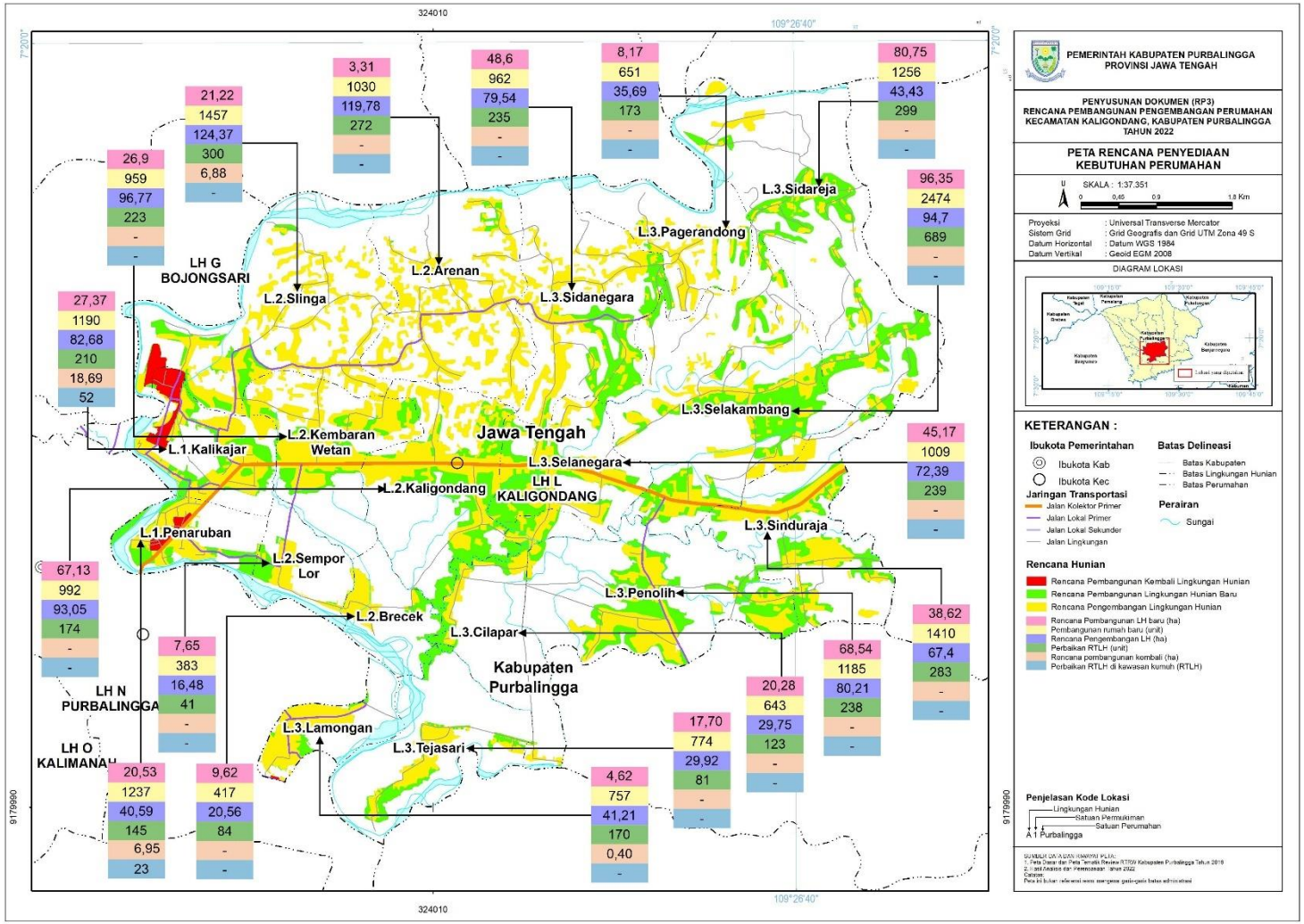
- peningkatan kualitas jaringan.
- pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala.
- pengembangan cakupan pelayanan jaringan fiber optik.
- peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan tetap telekomunikasi.
- pengaturan pelayanan menara bersama seluler.
- pengembangan cakupan pelayanan jaringan bergerak seluler.
- peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan bergerak seluler.

Tabel VI.5.
Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan Lingkungan Hunian Kutasari

Perumahan	Rencana Pembangunan Kembali Lingkungan Hunian (Ha)	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru (Ha)	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian (Ha)	Total (Ha)
Candinata	-	54,82	83,39	138,21
Candiwulan	-	31,67	106,13	137,80

Perumahan	Rencana Pembangunan Kembali Lingkungan Hunian (Ha)	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru (Ha)	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian (Ha)	Total (Ha)
Cendana	-	19,80	101,67	121,48
Karangaren	-	1,64	20,68	22,31
Karangcegak	-	17,00	95,54	112,54
Karangjengkol	-	35,34	60,84	96,18
Karangklesem	-	2,63	43,98	46,61
Karanglewas	-	8,14	24,39	32,53
Karangreja	-	21,55	116,26	137,81
Kutasari	-	19,43	69,40	88,83
Limbangan	-	2,35	79,07	81,42
Meri	-	16,04	67,85	83,88
Munjul	-	11,47	38,32	49,79
Sumingkir	-	10,93	104,05	114,98
Total	-	252,82	1.011,55	1.264,36

Sumber: Penyusun, 2022



Gambar 6.5.
Peta Rencana Penyediaan Kebutuhan Perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari

6.6. RENCANA LINGKUNGAN HUNIAN KALIGONDANG

Rencana pengembangan dan pembangunan perumahan pada lingkungan hunian Kaligondang ditetapkan dengan mempertimbangkan sebaran permukiman eksisting, rencana kawasan permukiman pada RTRW Kabupaten Purbalingga, dan sebaran lokasi yang ditetapkan sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Rencana pengembangan dan pembangunan perumahan pada lingkungan hunian Kaligondang meliputi:

1. Rencana pengembangan perumahan

   Rencana pengembangan perumahan ditetapkan seluas 1137,40 Ha (64% dari luas rencana kawasan permukiman). Rencana pengembangan perumahan di lingkungan hunian Kaligondang meliputi:

   a. Peningkatan efisiensi potensi perumahan, melalui:
      - peningkatan kualitas perumahan yang mendukung pariwisata, industri, dan fungsi budidaya lainnya.
      - Pengembangan permukiman dengan bangunan vertikal terbatas (rusun) yang mendukung peruntukan industri
      - peningkatan kualitas perumahan pada kawasan strategis.
   b. Peningkatan kualitas bangunan rumah berupa perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 3979 unit rumah.
   c. Peningkatan pelayanan perumahan melalui pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) pendukung perumahan.
   d. Peningkatan keterpaduan PSU perumahan melalui peningkatan PSU sesuai standar pelayanan minimal.
   e. Pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh melalui penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian, serta pemberdayaan masyarakat supaya dapat menjaga kualitas perumahannya.
   f. Pencegahan perumahan tidak terencana melalui pelaksanaan aturan dan standar perumahan dan permukiman sesuai tata ruang.
   g. Satuan perumahan yang dibatasi dan didorong, dengan:
      - mengendalikan perumahan pada kawasan rawan bencana.
      - Mendorong perumahan yang mendukung peran LH dan mendukung fungsi budidaya lainnya, yang sesuai dengan tata ruang.
   h. Peningkatan pelestarian alam dan potensi sumberdaya melalui peningkatan kualitas perumahan yang ramah lingkungan.

2. Rencana pembangunan perumahan baru

   Rencana pembangunan perumahan baru di lingkungan hunian Kaligondang ditetapkan seluas 612,53 Ha (34% dari luas rencana kawasan permukiman). Rencana pembangunan perumahan baru di lingkungan hunian Kaligondang meliputi:

- penyediaan lokasi perumahan baru melalui kegiatan Kasiba dan Lisiba.
- pembangunan rumah baru sebanyak 18.786 unit rumah.
- penyediaan PSU melalui pembangunan PSU sesuai standar pelayanan minimalnya
- pelayanan jasa, pemerintahan, sosial, ekonomi melalui pemenuhan pelayanan jasa, pemerintahan, sosial dan ekonomi pada lokasi pembangunan baru

3. Rencana pembangunan kembali perumahan

   Rencana pembangunan kembali perumahan di lingkungan hunian Kaligondang ditetapkan seluas 31,99 Ha (2% dari luas rencana peruntukan permukiman). Rencana pembangunan kembali perumahan di lingkungan hunian Kaligondang dengan rehabilitasi melalui peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui rehabilitasi pada lokasi yang mengalami kerusakan, kemunduran, atau degradasi lingkungan. Rencana pembangunan kembali perumahan termasuk perbaikan RTLH di kawasan kumuh sebanyak 75 unit tersebar di Perumahan Penaruban dan Kalikajar. Penanganan melalui rekonstruksi dan peremajaan tidak dilakukan untuk pembangunan kembali lingkungan hunian Kaligondang.

4. Rencana Pelayanan Prasarana Perumahan

   a. Jaringan Jalan

      - peningkatan jalan kolektor,
      - peningkatan jalan lokal, dan lingkungan.
      - pemeliharaan dan perbaikan jalan secara berkala.
      - pembangunan jaringan jalan baru.
      - peningkatan pelayanan angkutan umum.
      - pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan terminal dan halte.
      - peningkatan dan pembangunan jalur pejalan kaki (pedestrian) di pusat-pusat pelayanan.
      - pembangunan jalur atau lajur pesepeda sesuai dimensi jalan.

   b. Jaringan Drainase

      - peningkatan sistem jaringan drainase terintegrasi.
      - pemeliharaan berkala dan perbaikan/peningkatan konstruksi jaringan drainase.
      - pembangunan jaringan drainase baru.

   c. Jaringan Air Minum.

      - sosialisasi pola hidup bersih sehat (PHBS) dan standar teknis sumur dangkal.
      - Peningkatan kapasitas produksi air minum.
      - pemeliharaan dan perbaikan jaringan air minum secara berkala.

- pembangunan jaringan distribusi baru dan penambahan sambungan rumah (SR).
- peningkatan pelayanan air minum.
- pengembangan jaringan perpipaan perdesaan/Non PDAM berbasis masyarakat.

d. Pengelolaan Air Limbah

- Peningkatan SPAL Domestik setempat layak dan aman.
- Pembangunan SPAL Domestik terpusat skala lingkungan.
- Peningkatan sarana dan prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis.

e. Pengolahan Sampah

- peningkatan keterpaduan sistem pewadahan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.
- Pengembangan pewadahan sampah terpilah.
- pembangunan TPS dan TPS3R di skala lingkungan.
- pengembangan sarana pengangkut sampah sesuai persyaratan teknis.
- pengembangan bank sampah.
- pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) skala kawasan.

f. Sistem Proteksi Kebakaran

- peningkatan kualitas pos pemadam kebakaran,
- pengembangan pos satuan relawan kebakaran (Satlakar).
- peningkatan sarana komunikasi dan data proteksi kebakaran yang handal.
- pengadaan alat pemadam api ringan (APAR).
- pengadaan alat pemadam api berat (APAB).
- pemeliharaan kendaraan pemadam kebakaran.
- pemeliharaan berkala dan peningkatan kualitas sarana proteksi kebakaran.
- Pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan dini kebakaran.

5. Rencana Pelayanan Sarana Perumahan

a. Sarana Pemerintahan

- peningkatan kualitas sarana pemerintahan.
- pemeliharaan berkala sarana pemerintahan.
- pembangunan sarana pemerintahan.

b. Sarana Pendidikan

- peningkatan kualitas sarana pendidikan.
- pemeliharaan berkala sarana pendidikan.
- pembangunan sarana pendidikan.

c. Sarana Kesehatan
- peningkatan kualitas sarana kesehatan.
- pemeliharaan berkala sarana kesehatan.
- pembangunan sarana kesehatan.

d. Sarana Perdagangan
- peningkatan kualitas sarana perdagangan.
- pemeliharaan berkala sarana perdagangan.
- pembangunan sarana perdagangan.

e. Sarana Peribadatan
- peningkatan kualitas sarana peribadatan.
- pemeliharaan berkala sarana peribadatan.
- pembangunan sarana peribadatan.

f. Sarana Budaya dan Rekreasi
- peningkatan kualitas sarana budaya dan rekreasi.
- pemeliharaan berkala sarana budaya dan rekreasi.
- pembangunan sarana budaya dan rekreasi.

g. Sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- peningkatan kualitas sarana RTH.
- pemeliharaan berkala sarana RTH.
- pembangunan sarana RTH.

6. Rencana Pelayanan Utiltas Perumahan

a. Jaringan Listrik
- peningkatan jaringan dan sarana prasarana pendukung.
- pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala.
- pembangunan jaringan distribusi baru.
- fasilitasi pengembangan panel surya di fasilitas umum dan sosial.

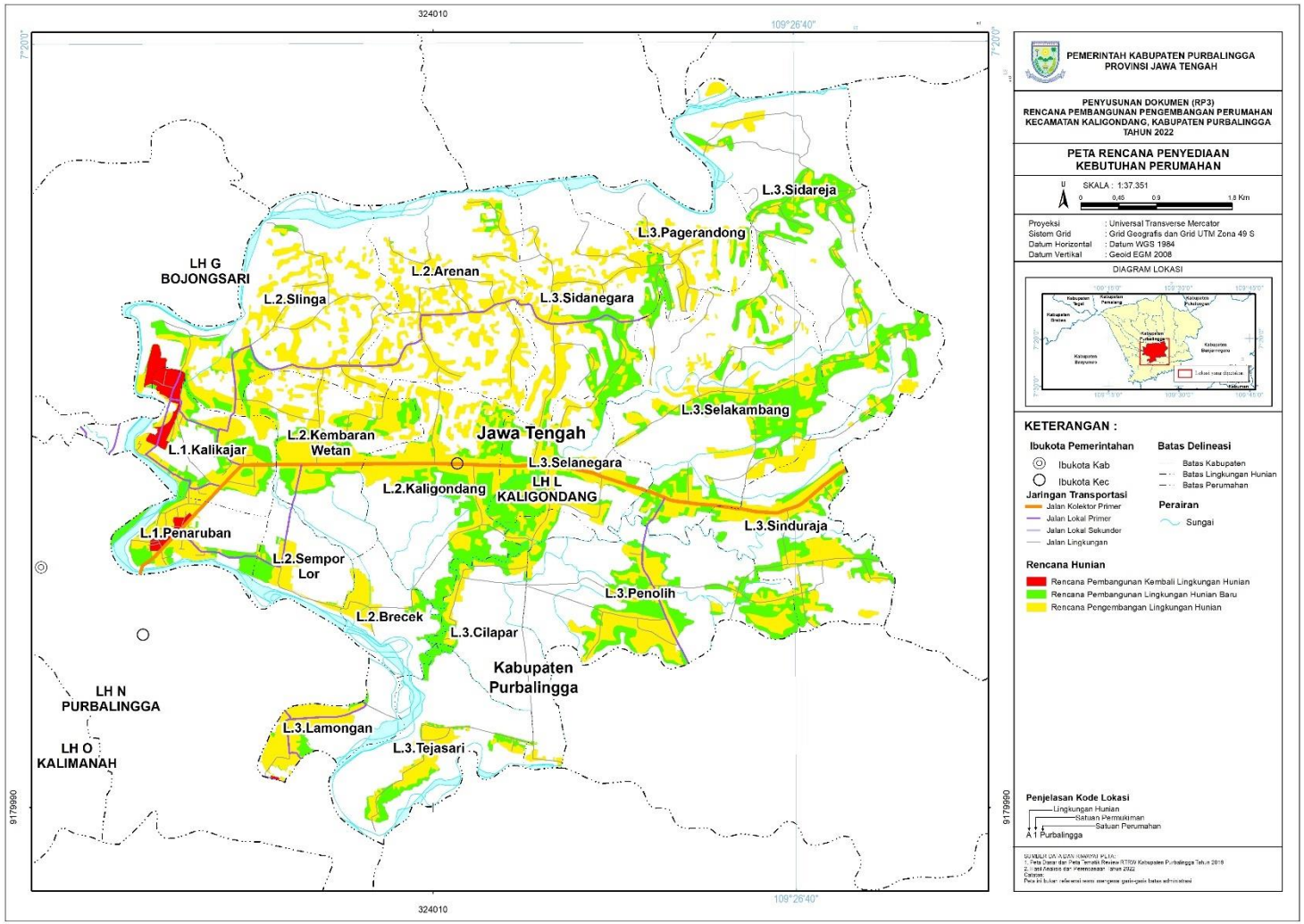
b. Jaringan Telekomunikasi
- peningkatan kualitas jaringan.
- pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala.

- pengembangan cakupan pelayanan jaringan fiber optik.
- peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan tetap telekomunikasi.
- pengaturan pelayanan menara bersama seluler.
- pengembangan cakupan pelayanan jaringan bergerak seluler.
- peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan bergerak seluler.

Tabel VI.6.
Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan Lingkungan Hunian Kaligondang

Perumahan	Rencana Pembangunan Kembali Lingkungan Hunian (Ha)	Rencana Pembangunan Lingkungan Hunian Baru (Ha)	Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian (Ha)	Total (Ha)
Arenan	-	3,31	119,78	123,09
Brecek	-	9,62	20,56	30,18
Cilapar	-	20,28	29,75	50,03
Kaligondang	-	67,13	93,05	160,18
Kalikajar	18,20	27,37	64,94	110,51
Kembaran Wetan	-	26,90	96,77	123,66
Lamongan	0,39	4,62	40,85	45,86
Pagerandong	-	8,17	35,69	43,85
Penaruban	6,95	20,53	33,88	61,37
Penolih	-	68,54	80,21	148,75
Selakambang	-	96,35	94,70	191,04
Selanegara	-	45,17	72,39	117,55
Sempor Lor	-	7,65	16,48	24,14
Sidanegara	-	48,60	79,54	128,14
Sidareja	-	80,75	43,43	124,18
Sinduraja	-	38,62	67,40	106,02
Slinga	6,45	21,22	118,08	145,74
Tejasari	-	17,70	29,92	47,62
Total	31,99	612,53	1.137,40	1.781,92

Sumber: Penyusun, 2022



Gambar 6.6.
Peta Rencana Penyediaan Kebutuhan Perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang

BAB VII
RENCANA KETERPADUAN PSU PERUMAHAN

7.1. Lingkungan Hunian Purbalingga

7.1.1. Rencana Keterpaduan Prasarana Perumahan

7.1.1.1. Rencana Pelayanan Jaringan Jalan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan jaringan jalan untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

   - Memantapkan sistem dan fungsi jaringan jalan
   - Meningkatkan kualitas jaringan jalan
   - Meningkatkan akses dan konektivitas antar permukiman
   - Menyediakan sarana angkutan umum
   - Menyediakan terminal dan halte yang memadai
   - Menyediakan ruang pejalan kaki yang ramah difabel
   - Menyediakan ruang pesepeda yang aman dan layak

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan prasarana jaringan jalan di Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

   - Meningkatkan sistem jaringan jalan yang saat ini sudah ada
   - Mengembangkan sistem jaringan jalan sesuai persyaratan teknis
   - Mengembangkan jalur pejalan kaki dan pesepeda

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan jaringan jalan untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

   - Peningkatan jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan
   - Pemeliharaan dan perbaikan jalan secara berkala
   - Pembangunan jaringan jalan baru
   - Peningkatan pelayanan angkutan umum
   - Pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan terminal dan halte
   - Peningkatan dan pembangunan jalur pejalan kaki (pedestrian) di pusat-pusat pelayanan

- Pembangunan jalur atau lajur pesepeda sesuai dimensi jalan

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan prasarana jaringan jalan di lingkungan hunian Purbalingga direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.1.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Jaringan Jalan di Lingkungan Hunian Purbalingga

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan	BMCK Prov DPUPR Kab	APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan dan perbaikan jalan secara berkala	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan jaringan jalan baru	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Peningkatan pelayanan angkutan umum	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
5	Pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan terminal dan halte	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
6	Peningkatan dan pembangunan jalur pejalan kaki (pedestrian) di pusat-pusat pelayanan	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
7	pembangunan jalur atau lajur pesepeda sesuai dimensi jalan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.1.1.2. Rencana Pelayanan Jaringan Drainase

1. Arahan Pengembangan

Arahan pengembangan jaringan drainase untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

- Memantapkan sistem dan fungsi jaringan drainase
- Meningkatkan kualitas jaringan drainase
- Meningkatkan cakupan pelayanan drainase

2. Kebutuhan Pengembangan

Kebutuhan pengembangan prasarana jaringan drainase di Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

- Meningkatkan sistem jaringan drainase yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan sistem jaringan drainase sesuai persyaratan teknis

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan jaringan drainase untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

   - Peningkatan sistem jaringan drainase terintegrasi
   - Pemeliharaan berkala dan perbaikan/peningkatan konstruksi jaringan drainase
   - Pembangunan jaringan drainase baru

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan prasarana jaringan drainase di lingkungan hunian Purbalingga direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.2.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Jaringan Drainase di Lingkungan Hunian Purbalingga

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan sistem jaringan drainase terintegrasi	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala dan perbaikan/peningkatan konstruksi jaringan drainase	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan jaringan drainase baru	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.1.1.3. Rencana Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sistem penyediaan air minum untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

   - Meningkatkan kualitas SPAM Non Perpipaan
   - Mengembangkan sistem pemanenan air hujan sebagai sumber air baku alternatif
   - Meningkatkan unit air produksi dan distribusi berupa Instalasi Pengolah Air (IPA)
   - Meningkatkan fasilitas penampungan air minum
   - Meningkatkan kualitas jaringan perpipaan PDAM

2. Kebutuhan Pengembangan

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan jaringan prasarana di lingkungan hunian Purbalingga, yang berupa kebutuhan air bersih. Oleh karena itu diperlukan proyeksi kebutuhan jaringan prasarana di masa yang akan datang untuk melakukan perencanaan terkait jaringan prasarana yang efisien.

Air bersih sebagai kebutuhan primer digunakan oleh penduduk lingkungan hunian Purbalingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan air minum di lingkungan hunian Purbalingga disalurkan oleh PDAM dan non PDAM yang mengalami peningkatan jumlah air setiap tahunnya. Proyeksi kebutuhan air bersih di lingkungan hunian Purbalingga menggunakan asumsi yang bersumber dari Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dengan standar yang ditetapkan oleh Kepmen Kimpraswil No.327/KPTS/M/2002, yaitu sebagai berikut:

- 1 orang penduduk menggunakan air bersih sebesar 60 liter/jiwa/hari
- Industri: 10 % dari kebutuhan domestik
- Fasilitas Sosial: 5 % dari kebutuhan domestik
- Fasilitas Hidran Umum: 5 % dari kebutuhan domestik
- Tingkat Kebocoran: 20 % dari kebutuhan domestik

Tabel VII.3.
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Bojong	420.720	427.384	434.153	441.030
2	Toyareja	245.329	254.899	260.815	265.108
3	Kedung Menjangan	275.003	280.586	284.036	286.541
4	Jatisaba	317.838	332.091	340.902	347.297
5	Bancar	318.761	319.096	319.096	319.431
6	Purbalingga Wetan	427.524	432.964	436.328	438.769
7	Penambongan	419.444	427.170	431.945	435.411
8	Purbalingga Kidul	468.970	472.071	475.193	478.335
9	Kandang Gampang	257.626	266.564	275.811	285.380
10	Purbalingga Kulon	228.627	229.831	230.575	231.115
11	Purbalingga Lor	504.592	510.106	515.680	521.315
12	Kembaran Kulon	406.210	418.943	432.075	445.619
13	Wirasana	658.862	681.308	695.184	705.254
Jumlah		4.949.506	5.053.012	5.131.793	5.200.604

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan prasarana sistem penyediaan air minum tersebut, maka kebutuhan pengembangan prasarana sistem penyediaan air minum di Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

- Meningkatkan pelayanan sistem penyediaan air minum yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan sistem penyediaan air minum yang layak dan aman

- Mengembangkan cakupan pelayanan penyediaan air minum

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sistem penyediaan air minum untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

- Sosialisasi pola hidup bersih sehat (PHBS) dan standar teknis sumur dangkal
- Pembangunan sarana dan prasarana pendukung Pemanenan Air Hujan (PAH)
- Peningkatan kapasitas produksi air minum
- Peningkatan dan pemeliharaan berkala bak penampung air minum
- Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala
- Pembangunan jaringan distribusi baru dan penambahan sambungan rumah (SR)
- Peningkatan pelayanan air minum

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan prasarana sistem penyediaan air minum di lingkungan hunian Purbalingga direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.4.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Penyediaan Air Minum di Lingkungan Hunian Purbalingga

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Sosialisasi pola hidup bersih sehat (PHBS) dan standar teknis sumur dangkal	Disperkim Kab Dinkes Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung Pemanenan Air Hujan (PAH)	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Peningkatan kapasitas produksi air minum	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Peningkatan dan pemeliharaan berkala bak penampung air minum	Disperkim Kab DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
5	Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala	Disperkim Kab DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
6	Pembangunan jaringan distribusi baru dan penambahan sambungan rumah (SR)	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
7	Peningkatan pelayanan air minum	Kementerian BMCK Prov	APBN, APBD Prov,				

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
		Disperkim Kab DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.1.1.4. Rencana Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sistem pengelolaan air limbah untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

   - Meningkatkan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik setempat sesuai persyaratan teknis
   - Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik terpusat skala lingkungan
   - Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah layak dan aman

2. Kebutuhan Pengembangan

   Dari adanya sistem pengolahan air limbah domestik yang belum memadai dan terpadu, diperlukan kebutuhan sistem pengolahan air limbah domestik di lingkungan hunian Purbalingga. Air limbah yang dihasilkan di lingkungan hunian Purbalingga semakin bertambah. Hal tersebut maka diperlukan sarana pengelolaan air limbah yang terpadu dan tidak mencemari lingkungan. Proyeksi air limbah di lingkungan hunian Purbalingga menggunakan asumsi sebesar 80% dari proyeksi kebutuhan air bersih.

Tabel VII.5.
Proyeksi Air Limbah Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Bojong	336.576	341.907	347.323	352.824
2	Toyareja	196.263	203.919	208.652	212.086
3	Kedung Menjangan	220.003	224.469	227.229	229.233
4	Jatisaba	254.270	265.673	272.722	277.837
5	Bancar	255.009	255.277	255.277	255.545
6	Purbalingga Wetan	342.019	346.372	349.062	351.015
7	Penambongan	335.555	341.736	345.556	348.329
8	Purbalingga Kidul	375.176	377.657	380.154	382.668
9	Kandang Gampang	206.101	213.251	220.649	228.304
10	Purbalingga Kulon	182.902	183.865	184.460	184.892
11	Purbalingga Lor	403.673	408.084	412.544	417.052
12	Kembaran Kulon	324.968	335.154	345.660	356.495
13	Wirasana	527.090	545.047	556.147	564.203
Jumlah		3.959.605	4.042.410	4.105.435	4.160.483

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan prasarana pengelolaan air limbah tersebut, maka kebutuhan pengembangan prasarana pengelolaan air limbah di Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

- Meningkatkan pelayanan pengelolaan air limbah yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik yang layak dan aman
- Mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah sesuai persyaratan teknis

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sistem pengelolaan air limbah untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

- Peningkatan SPAL Domestik setempat layak dan aman
- Pembangunan SPAL Domestik terpusat skala lingkungan
- Peningkatan sarana dan prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan prasarana sistem pengelolaan air limbah di lingkungan hunian Purbalingga direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.6.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah di Lingkungan Hunian Purbalingga

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan SPAL Domestik setempat layak dan aman	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pembangunan SPAL Domestik terpusat skala lingkungan	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Peningkatan sarana dan prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.1.1.5. Rencana Pelayanan Sistem Pengolahan Persampahan

1. Arahan Pengembangan

Arahan pengembangan sistem pengolahan persampahan untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

- Memantapkan sistem pengelolaan persampahan sesuai persyaratan teknis
- Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis
- Mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat

2. Kebutuhan Pengembangan

Pada umumnya jaringan persampahan di lingkungan hunian Purbalingga sudah memadai dan melayani setiap penduduk. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase, tegalan, maupun di sungai. Sehingga, diperlukan proyeksi timbulan sampah berdasarkan perhitungan SNI, yaitu sebagai berikut:

- Sampah domestik diasumsikan 2 liter/jiwa/hari atau 0,002 m3/jiwa/hari
- Sampah non domestik diasumsikan 20% dari sampah domestik

Tabel VII.7.
Proyeksi Timbulan Sampah Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Bojong	12,02	12,21	12,40	12,60
2	Toyareja	7,01	7,28	7,45	7,57
3	Kedung Menjangan	7,86	8,02	8,12	8,19
4	Jatisaba	9,08	9,49	9,74	9,92
5	Bancar	9,11	9,12	9,12	9,13
6	Purbalingga Wetan	12,21	12,37	12,47	12,54
7	Penambongan	11,98	12,20	12,34	12,44
8	Purbalingga Kidul	13,40	13,49	13,58	13,67
9	Kandang Gampang	7,36	7,62	7,88	8,15
10	Purbalingga Kulon	6,53	6,57	6,59	6,60
11	Purbalingga Lor	14,42	14,57	14,73	14,89
12	Kembaran Kulon	11,61	11,97	12,34	12,73
13	Wirasana	18,82	19,47	19,86	20,15

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan prasarana pengolahan sampah tersebut, maka kebutuhan pengembangan prasarana pengolahan sampah di Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

- Meningkatkan pelayanan pengolahan sampah yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan sistem pengolahan sampah ramah lingkungan
- Mengembangkan sarana dan prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis
- Mengembangkan pengolahan sampah berbasis masyarakat

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sistem pengolahan persampahan untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

- Peningkatan keterpaduan sistem pewadahan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah
- Pengembangan pewadahan sampah terpilah
- Pembangunan TPS dan TPS3R di skala lingkungan
- Pengembangan sarana pengangkut sampah sesuai persyaratan teknis
- Pengembangan bank sampah

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan prasarana sistem pengelolaan persampahan di lingkungan hunian Purbalingga direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.8.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Hunian Purbalingga

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan keterpaduan sistem pewadahan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pengembangan pewadahan sampah terpilah	Disperkim Kab DLH Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan TPS dan TPS3R di skala lingkungan	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Pengembangan sarana pengangkut sampah sesuai persyaratan teknis	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
5	Pengembangan bank sampah	Disperkim Kab DLH Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.1.1.6. Rencana Pelayanan Sistem Proteksi Kebakaran

1. Arahan Pengembangan

Arahan pengembangan sistem proteksi kebakaran untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

- Mengembangkan prasarana proteksi kebakaran sesuai persyaratan teknis
- Mengembangkan sarana proteksi kebakaran sesuai persyaratan teknis

2. Kebutuhan Pengembangan

Kebutuhan pengembangan prasarana proteksi kebakaran di Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

- Mengembangkan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
- Meningkatkan pelayanan proteksi kebakaran yang saat ini sudah ada
- Melakukan pencegahan dan penanganan dini kebakaran melalui pemberdayaan masyarakat

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sistem proteksi kebakaran untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

- Peningkatan kualitas pos pemadam kebakaran
- Peningkatan sarana komunikasi dan data proteksi kebakaran yang handal
- Pengadaan alat pemadam api ringan (APAR)
- Pengadaan alat pemadam api berat (APAB)
- Pemeliharaan kendaraan pemadam kebakaran
- Pemeliharaan berkala dan peningkatan kualitas sarana proteksi kebakaran
- Pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan dini kebakaran

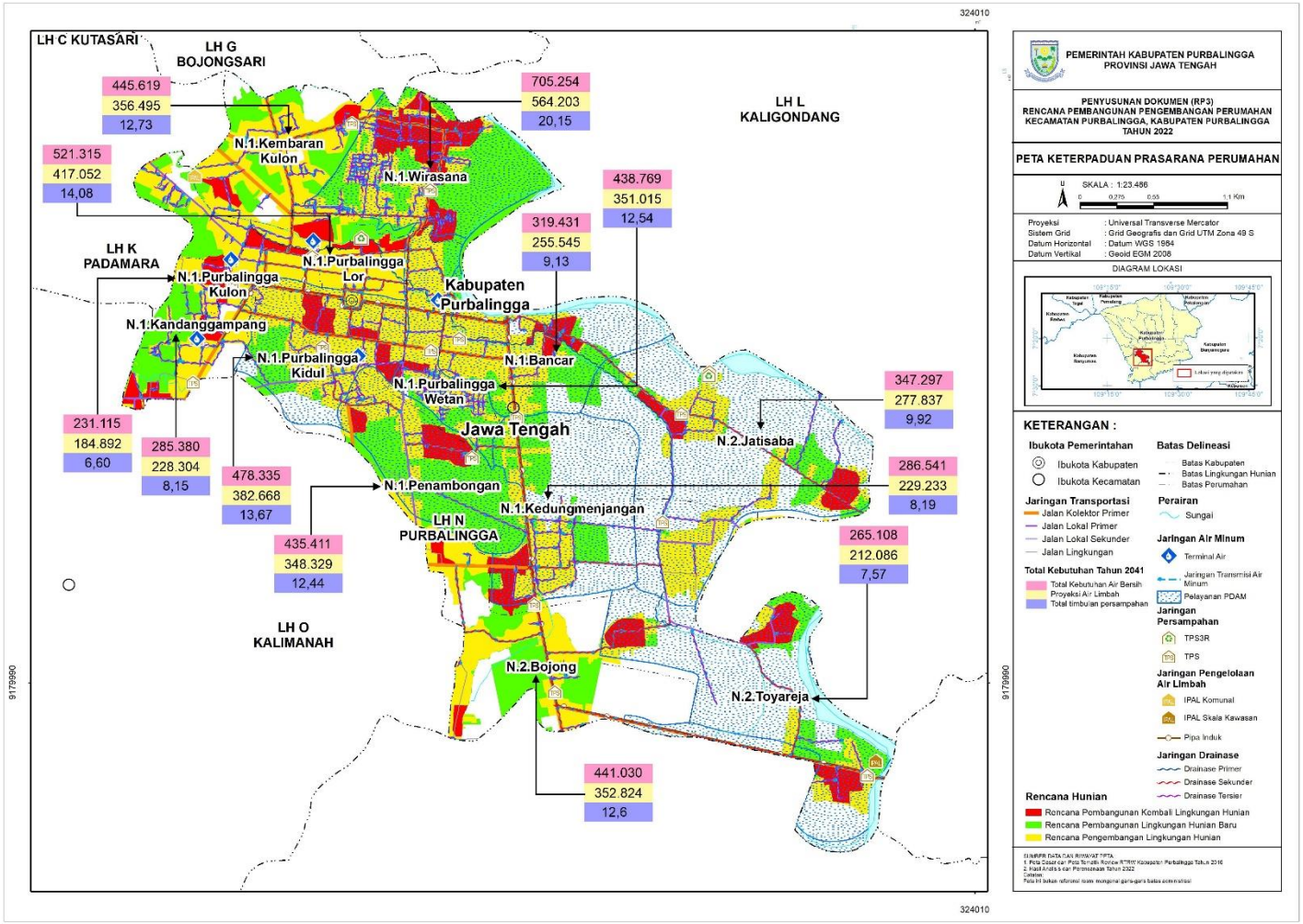
4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan prasarana sistem proteksi kebakaran di lingkungan hunian Purbalingga direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.9.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Proteksi Kebakaran di Lingkungan Hunian Purbalingga

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas pos pemadam kebakaran	Kementerian BMCK Prov Satpol PP Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Peningkatan sarana komunikasi dan data proteksi kebakaran yang handal	Satpol PP Kab BPBD Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pengadaan alat pemadam api ringan (APAR)	Kementerian BMCK Prov Satpol PP Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Pengadaan alat pemadam api berat (APAB)	Kementerian BMCK Prov	APBN, APBD Prov, APBD Kab,				

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
		Satpol PP Kab DPUPR Kab	Swasta, Masyarakat				
5	Pemeliharaan kendaraan pemadam kebakaran	Satpol PP Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
6	Pemeliharaan berkala dan peningkatan kualitas sarana proteksi kebakaran	Satpol PP Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
7	Pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan dini kebakaran	Satpol PP Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				



Gambar 7.1.
Peta Rencana Keterpaduan Prasarana Perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga

7.1.2. Rencana Keterpaduan Sarana Perumahan

7.1.2.1. Rencana Pelayanan Sarana Pemerintahan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana pemerintahan untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana pemerintahan sesuai standar
   - Mengembangkan sarana pemerintahan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan sarana pemerintahan di Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

   - Meningkatkan pelayanan dari sarana pemerintahan yang saat ini sudah ada
   - Menambah sarana pemerintahan sesuai jenisnya berdasarkan kebutuhan dan cakupan pelayanannya

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sarana pemerintahan untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

   - Peningkatan kualitas sarana pemerintahan
   - Pemeliharaan berkala sarana pemerintahan
   - Pembangunan sarana pemerintahan

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan sarana pemerintahan di lingkungan hunian Purbalingga direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.10.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Pemerintahan di Lingkungan Hunian Purbalingga

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana pemerintahan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana pemerintahan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana pemerintahan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.1.2.2. Rencana Pelayanan Sarana Pendidikan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana pendidikan untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana pendidikan sesuai standar
   - Mengembangkan sarana pendidikan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Purbalingga berupa sekolah tingkat SD hingga tingkat perguruan tinggi. Kebutuhan akan sarana pendidikan pasti akan selalu mengikuti perkembangan wilayahnya. Semakin banyak penduduk yang berada pada wilayah tersebut maka akan banyak juga sarana pendidikan yang dibutuhkan kedepannya. Adapun jenis sarana pendidikan yang direncanakan menurut SNI Nomor 03-1733-2004;

   - Kelompok penduduk 1.200 jiwa, disediakan Sekolah Dasar.
   - Kelompok penduduk 4.800 jiwa, disediakan SLTP.
   - Kelompok penduduk 6.000 jiwa, disediakan SMA.
   - Kelompok penduduk 70.000 jiwa, disediakan Perguruan Tinggi.

Tabel VII.11.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026					Tahun 2031					Tahun 2036					Tahun 2041				
		TK	SD	SMP	SMA	PT	TK	SD	SMP	SMA	PT	TK	SD	SMP	SMA	PT	TK	SD	SMP	SMA	PT
1	Bojong	-1	1	1	0	0	-1	1	1	0	0	-1	1	1	0	0	-1	1	1	0	0
2	Toyareja	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
3	Kedung Menjangan	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
4	Jatisaba	-2	0	1	1	0	-2	0	1	1	0	-2	0	1	1	0	-2	0	1	1	0
5	Bancar	-2	0	-2	0	-1	-2	0	-2	0	-1	-2	0	-2	0	-1	-2	0	-2	0	-1
6	Purbalingga Wetan	-3	0	0	-2	0	-3	0	0	-2	0	-3	0	0	-2	0	-3	0	0	-2	0
7	Penambongan	-2	2	0	0	-1	-2	2	0	0	-1	-2	2	0	0	-1	-2	2	0	0	-1
8	Purbalingga Kidul	-3	4	0	0	0	-3	4	0	0	0	-3	4	0	0	0	-3	4	0	0	0
9	Kandang Gampang	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0
10	Purbalingga Kulon	-2	1	1	-1	0	-2	1	1	-1	0	-2	1	1	-1	0	-2	1	1	-1	0
11	Purbalingga Lor	-3	-1	-2	0	0	-3	-1	-2	0	0	-3	-1	-2	0	0	-3	-1	-2	0	0
12	Kembaran Kulon	-2	0	-1	1	0	-2	0	-1	1	0	-2	0	-1	1	0	-2	0	-1	1	0
13	Wirasana	-2	4	2	1	0	-2	4	2	1	0	-2	4	2	1	0	-2	4	2	1	0
Jumlah		-22	14	1	1	-1	-22	15	2	1	-1	-22	16	2	1	-1	-22	17	2	1	-1

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan sarana pendidikan tersebut, maka kebutuhan pengembangan sarana pendidikan di Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

- Meningkatkan pelayanan dari sarana pendidikan yang saat ini sudah ada
- Menambah sarana pendidikan sesuai jenisnya berdasarkan kebutuhan dan cakupan pelayanannya

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sarana pendidikan untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

- Peningkatan kualitas sarana pendidikan
- Pemeliharaan berkala sarana pendidikan
- Pembangunan sarana pendidikan

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan sarana pendidikan di lingkungan hunian Purbalingga direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.12.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Pendidikan di Lingkungan Hunian Purbalingga

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Pendidikan	Kementerian Diknas Prov DPUPR Kab Diknas Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Pendidikan	DPUPR Kab Diknas Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Pendidikan	Kementerian Diknas Prov DPUPR Kab Diknas Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.1.2.3. Rencana Pelayanan Sarana Kesehatan

1. Arahan Pengembangan

Arahan pengembangan sarana kesehatan untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

- Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana kesehatan sesuai standar
- Mengembangkan sarana kesehatan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

Sarana kesehatan yan tersedia di Kabupaten Purbalingga meliputi rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Perhitungan analisis kebutuhan sarana kesehatan mengacu pada standar sebagai berikut:

- Rumah Sakit memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 240.000 jiwa/unit.
- Puskesmas memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 120.000 jiwa/unit.
- Klinik memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 30.000 jiwa/unit.

Tabel VII.13.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026					Tahun 2031				
		Rumah Sakit	Puskesmas	Poliklinik	Praktik Dokter	Apotek	Rumah Sakit	Puskesmas	Poliklinik	Praktik Dokter	Apotek
1	Bojong	0	-1	-1	0	-1	0	-1	-1	0	-1
2	Toyareja	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3	Kedung Menjangan	0	0	0	1	-1	0	0	0	1	-1
4	Jatisaba	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5	Bancar	0	0	-1	0	-2	0	0	-1	0	-2
6	Purbalingga Wetan	0	0	0	-1	-2	0	0	0	-1	-2
7	Penambongan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Purbalingga Kidul	0	0	-3	-2	-3	0	0	-3	-2	-3
9	Kandang Gampang	0	0	-2	1	-2	0	0	-2	1	-2
10	Purbalingga Kulon	0	0	-2	-1	-2	0	0	-2	-1	-2
11	Purbalingga Lor	-1	0	0	-1	-3	-1	0	0	-1	-3
12	Kembaran Kulon	-1	-1	0	-2	-2	-1	-1	0	-2	-2
13	Wirasana	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	-1
Jumlah		-2	-2	-9	-5	-17	-1	-1	-9	-5	-17

Lanjutan…

No	Perumahan	Tahun 2036					Tahun 2041				
		Rumah Sakit	Puskesmas	Poliklinik	Praktik Dokter	Apotek	Rumah Sakit	Puskesmas	Poliklinik	Praktik Dokter	Apotek
1	Bojong	0	-1	-1	0	-1	0	-1	-1	0	-1
2	Toyareja	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3	Kedung Menjangan	0	0	0	1	-1	0	0	0	1	-1
4	Jatisaba	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5	Bancar	0	0	-1	0	-2	0	0	-1	0	-2
6	Purbalingga Wetan	0	0	0	-1	-2	0	0	0	-1	-2
7	Penambongan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Purbalingga Kidul	0	0	-3	-2	-3	0	0	-3	-2	-3

No	Perumahan	Tahun 2036					Tahun 2041				
		Rumah Sakit	Puskesmas	Poliklinik	Praktik Dokter	Apotek	Rumah Sakit	Puskesmas	Poliklinik	Praktik Dokter	Apotek
9	Kandang Gampang	0	0	-2	1	-2	0	0	-2	1	-2
10	Purbalingga Kulon	0	0	-2	-1	-2	0	0	-2	-1	-2
11	Purbalingga Lor	-1	0	0	-1	-3	-1	0	0	-1	-3
12	Kembaran Kulon	-1	-1	0	-2	-2	-1	-1	0	-2	-2
13	Wirasana	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	-1
Jumlah		-1	-1	-9	-5	-17	-1	-1	-9	-5	-17

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan sarana kesehatan tersebut, maka kebutuhan pengembangan sarana kesehatan di Lingkungan Hunian Purbalingga adalah :

- Meningkatkan pelayanan dari sarana kesehatan yang saat ini sudah ada
- Menambah sarana kesehatan klinik berdasarkan kebutuhan dan cakupan pelayanannya

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sarana kesehatan untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

- Peningkatan kualitas sarana kesehatan
- Pemeliharaan berkala sarana kesehatan
- Pembangunan sarana kesehatan

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan sarana kesehatan di lingkungan hunian Purbalingga direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.14.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Kesehatan di Lingkungan Hunian Purbalingga

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Kesehatan	Kementerian Dinkes Prov DPUPR Kab Dinkes Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Kesehatan	DPUPR Kab Dinkes Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Kesehatan	Kementerian Dinkes Prov DPUPR Kab Dinkes Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.1.2.4. Rencana Pelayanan Sarana Perdagangan

1. Arahan Pengembangan

Arahan pengembangan sarana perdagangan untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

- Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana perdagangan sesuai standar
- Mengembangkan sarana perdagangan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

Potensi ekonomi suatu daerah, khususnya sektor perdagangan dapat diketahui dari banyaknya pasar yang ada. Sarana perdagangan selain pasar daerah, juga dapat berupa pusat pusat perkulakan baik secara grosir maupun eceran dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan barang bagi masyarakat. Perhitungan analisis kebutuhan sarana perdagangan mengacu pada standar sebagai berikut:

- Pasar memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 30.000 jiwa/unit.
- Pertokoan memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 6.000 jiwa/unit.
- Toko/ warung memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 250 jiwa/unit.

Proyeksi kebutuhan sarana perdagangan di Lingkungan Hunian Purbalingga untuk 20 tahun mendatang telah mencukupi dan melayani seluruh lingkungan hunian.

Tabel VII.15.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan di Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2026-2041

No	Jenis	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Pasar	-5	-5	-5	-5
2	Pertokoan	-33	-33	-33	-33
3	Toko/ Warung	-340	-335	-332	-328

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan sarana perdagangan tersebut, maka kebutuhan pengembangan sarana perdagangan di Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

- Meningkatkan pelayanan dari sarana perdagangan yang saat ini sudah ada
- Menambah sarana perdagangan lainnya sesuai kebutuhan dan cakupan pelayanannya

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sarana perdagangan untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

- Peningkatan kualitas sarana perdagangan
- Pemeliharaan berkala sarana perdagangan
- Pembangunan sarana perdagangan

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan sarana perdagangan di lingkungan hunian Purbalingga direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.16.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Perdagangan di Lingkungan Hunian Purbalingga

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Perdagangan	Kementerian Disdag Prov DPUPR Kab Disdag Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Perdagangan	DPUPR Kab Disdag Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Perdagangan	Kementerian Disdag Prov DPUPR Kab Disdag Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.1.2.5. Rencana Pelayanan Sarana Peribadatan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana peribadatan untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana peribadatan sesuai standar
   - Mengembangkan sarana peribadatan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Sarana peribadatan yang layak dan mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitas merupakan hak setiap orang. Jenis sarana peribadatan sangat tergantung pada kondisi setempat dengan memperhatikan struktur penduduk menurut agama yang dianut, dan tata cara atau pola masyarakat setempat dalam menjalankan ibadah agamanya. Adapun jenis sarana ibadah untuk agama Islam, direncanakan menurut SNI Nomor 03-1733-2004:

   - Kelompok penduduk 250 jiwa, diperlukan musholla/langgar.
   - Kelompok penduduk 2.500 jiwa, disediakan masjid.
   - Kebutuhan gereja dan vihara adalah dengan mengikuti sistem kekerabatan atau hirarki lembaga.

Tabel VII.17.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan di Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026				Tahun 2031			
		Masjid	Musholla	Gereja	Vihara	Masjid	Musholla	Gereja	Vihara
1	Bojong	-4	11	Mengikuti paroki	Mengikuti sistem kekerabatan atau hirarki lembaga	-4	11	Mengikuti paroki	Mengikuti sistem kekerabatan atau hirarki lembaga
2	Toyareja	-3	1			-3	1		
3	Kedung Menjangan	-1	2			-1	2		
4	Jatisaba	-2	8			-2	9		
5	Bancar	-2	4			-2	4		
6	Purbalingga Wetan	-4	11			-4	12		
7	Penambongan	-5	8			-5	8		
8	Purbalingga Kidul	-8	11			-8	11		
9	Kandang Gampang	-5	9			-5	10		
10	Purbalingga Kulon	-1	5			-1	5		
11	Purbalingga Lor	-3	17			-3	17		
12	Kembaran Kulon	-5	7			-5	8		
13	Wirasana	-5	13			-5	14		
Jumlah		-47	109			-47	114		

Lanjutan…

No	Perumahan	Tahun 2036				Tahun 2041			
		Masjid	Musholla	Gereja	Vihara	Masjid	Musholla	Gereja	Vihara
1	Bojong	-4	12	Mengikuti paroki	Mengikuti sistem kekerabatan atau hirarki lembaga	-4	12	Mengikuti paroki	Mengikuti sistem kekerabatan atau hirarki lembaga
2	Toyareja	-3	1			-3	2		
3	Kedung Menjangan	-1	3			-1	3		
4	Jatisaba	-2	9			-2	10		
5	Bancar	-2	4			-2	4		
6	Purbalingga Wetan	-4	12			-4	12		
7	Penambongan	-5	9			-5	9		
8	Purbalingga Kidul	-8	12			-8	12		

No	Perumahan	Tahun 2036				Tahun 2041			
		Masjid	Musholla	Gereja	Vihara	Masjid	Musholla	Gereja	Vihara
9	Kandang Gampang	-5	10			-5	11		
10	Purbalingga Kulon	-1	5			-1	5		
11	Purbalingga Lor	-3	18			-3	18		
12	Kembaran Kulon	-5	9			-5	9		
13	Wirasana	-5	15			-5	16		
Jumlah		-47	117			-46	121		

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan sarana peribadatan tersebut, maka kebutuhan pengembangan sarana peribadatan di Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

- Meningkatkan pelayanan dari sarana peribadatan yang saat ini sudah ada
- Menambah sarana peribadatan musholla sesuai kebutuhan dan proyeksi jumlah penduduk
- Menambah sarana peribadatan lainnya mengikuti sistem kekerabatan atau hirarki lembaga

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sarana peribadatan untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

- Peningkatan kualitas sarana peribadatan
- Pemeliharaan berkala sarana peribadatan
- Pembangunan sarana peribadatan

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan sarana peribadatan di lingkungan hunian Purbalingga direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.18.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Peribadatan di Lingkungan Hunian Purbalingga

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Peribadatan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Peribadatan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Peribadatan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.1.2.6. Rencana Pelayanan Sarana Budaya dan Rekreasi

1. Arahan Pengembangan

Arahan pengembangan sarana budaya dan rekreasi untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

- Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana budaya dan rekreasi sesuai standar
- Mengembangkan sarana budaya dan rekreasi sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan sarana budaya dan rekreasi di Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

   - Meningkatkan pelayanan dari sarana budaya dan rekreasi yang saat ini sudah ada
   - Menambah sarana budaya dan rekreasi sesuai jenisnya dengan mendasarkan pada kebutuhan dan proyeksi jumlah penduduk

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sarana budaya dan rekreasi untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

   - peningkatan kualitas sarana budaya dan rekreasi
   - pemeliharaan berkala sarana budaya dan rekreasi
   - pembangunan sarana budaya dan rekreasi

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan sarana budaya dan rekreasi di lingkungan hunian Purbalingga direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.19.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Budaya dan Rekreasi di Lingkungan Hunian Purbalingga

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Budaya dan Rekreasi	DPUPR Kab Dispar Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Budaya dan Rekreasi	DPUPR Kab Dispar Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Budaya dan Rekreasi	DPUPR Kab Dispar Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.1.2.7. Rencana Pelayanan Sarana Ruang Terbuka Hijau

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana ruang terbuka hijau untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana ruang terbuka hijau sesuai standar
   - Mengembangkan sarana ruang terbuka hijau sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menetapkan bahwa proporsi RTH pada wilayah perkotaan minimal 30% dari luas kota. Sedangkan, luas RTH di lingkungan hunian Purbalingga belum memenuhi jumlah yang ditentukan sebesar 30% dari total luas wilayah.

   Kebutuhan pengembangan sarana ruang terbuka hijau di Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

   - Melakukan pendataan ulang yang lebih rinci untuk keberadaan sarana ruang terbuka hijau
   - Meningkatkan pelayanan dari sarana ruang terbuka hijau yang saat ini sudah ada
   - Menambah sarana ruang terbuka hijau sesuai kebutuhan jenis RTH berdasarkan cakupan pelayanan dan proyeksi jumlah penduduk

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sarana ruang terbuka hijau untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

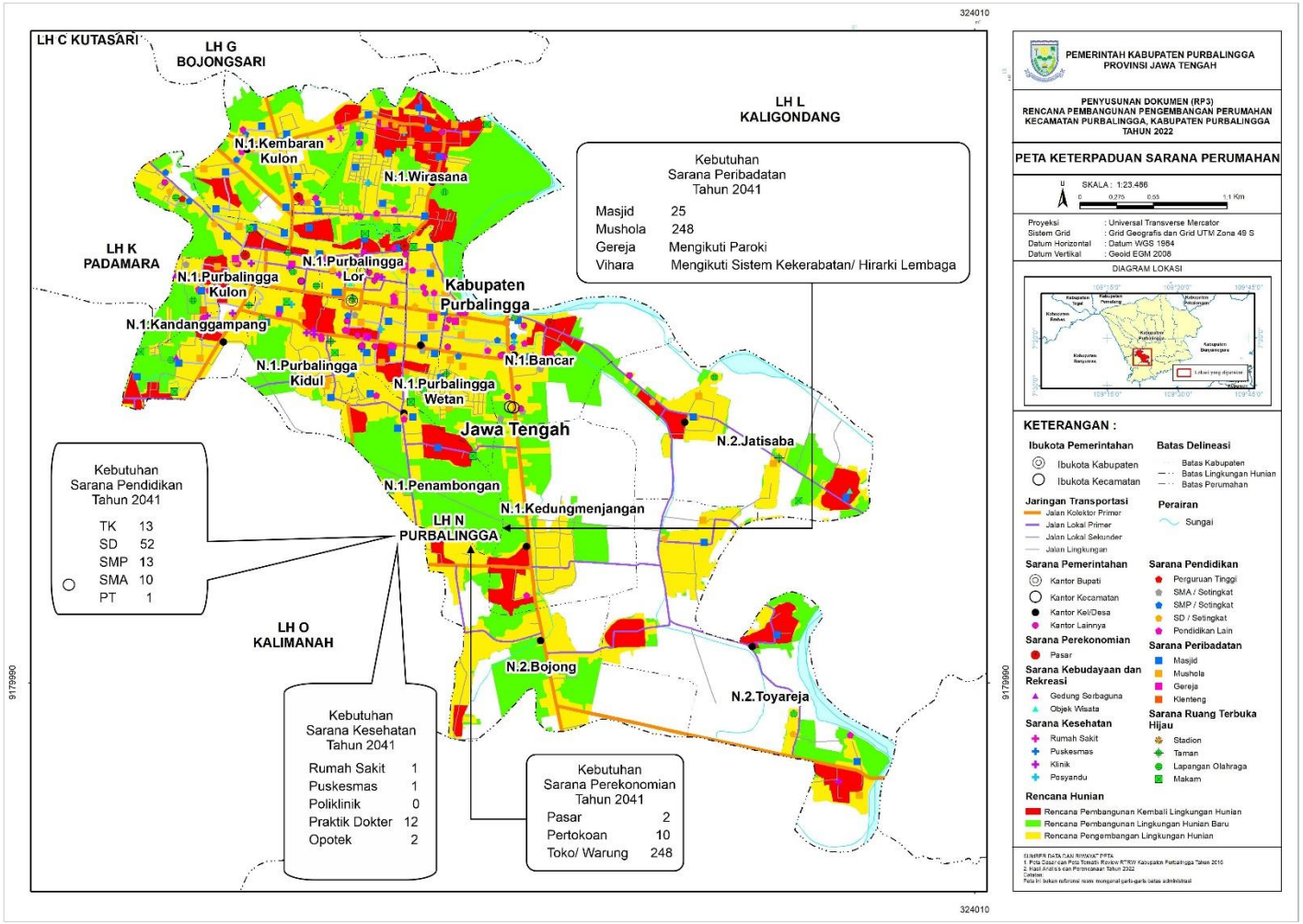
   - Peningkatan kualitas sarana ruang terbuka hijau
   - Pemeliharaan berkala sarana ruang terbuka hijau
   - Pembangunan sarana ruang terbuka hijau

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan sarana ruang terbuka hijau di lingkungan hunian Purbalingga direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.20.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan Hunian Purbalingga

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana RTH	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana RTH	DPUPR Kab DLH Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana RTH	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				



Gambar 7.2.
Peta Rencana Keterpaduan Sarana Perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga

7.1.3. Rencana Keterpaduan Utilitas Perumahan

7.1.3.1. Rencana Pelayanan Jaringan Listrik

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan jaringan listrik untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

   - Memantapkan sistem dan fungsi jaringan listrik
   - Meningkatkan kualitas jaringan listrik
   - Meningkatkan akses dan cakupan pelayanan listrik
   - Mengembangkan sumber energi listrik terbarukan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Selain itu, ketersediaan jaringan listrik eksisting perlu adanya penambahan kebutuhan listrik domestik dan non domestik agar menciptakan keterpaduan antar hirarki jaringan listrik. Kebutuhan listrik domestik ini untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sedangkan, kebutuhan listrik non domestik berupa industri, fasilitas umum, penerangan jalan, dan cadangan. Proyeksi kebutuhan listrik di lingkungan hunian Purbalingga menggunakan asumsi sesuai standar yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

   - 1 rumah tangga memerlukan listrik sebesar 900 KVA
   - Industri: 25 % dari kebutuhan domestik
   - Fasilitas Sosial: 25 % dari kebutuhan domestik
   - Penerangan Jalan: 40 % dari kebutuhan domestik
   - Cadangan: 10 % dari kebutuhan domestik

Tabel VII.21.
Proyeksi Kebutuhan Listrik Lingkungan Hunian Purbalingga Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Bojong	3.005.141	3.052.741	3.101.094	3.150.214
2	Toyareja	1.752.347	1.820.705	1.862.961	1.893.629
3	Kedung Menjangan	1.964.309	2.004.183	2.028.832	2.046.721
4	Jatisaba	2.270.271	2.372.080	2.435.015	2.480.690
5	Bancar	2.276.867	2.279.258	2.279.258	2.281.653
6	Purbalingga Wetan	3.053.740	3.092.603	3.116.627	3.134.063
7	Penambongan	2.996.027	3.051.211	3.085.324	3.110.082
8	Purbalingga Kidul	3.349.788	3.371.938	3.394.235	3.416.679
9	Kandang Gampang	1.840.188	1.904.027	1.970.081	2.038.426
10	Purbalingga Kulon	1.633.053	1.641.650	1.646.965	1.650.822
11	Purbalingga Lor	3.604.226	3.643.611	3.683.426	3.723.677
12	Kembaran Kulon	2.901.498	2.992.448	3.086.249	3.182.990
13	Wirasana	4.706.158	4.866.487	4.965.597	5.037.527
Jumlah		35.353.614	36.092.944	36.655.666	37.147.171

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan utilitas jaringan listrik tersebut, maka kebutuhan pengembangan utilitas jaringan listrik di Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

- Meningkatkan pelayanan jaringan listrik yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan jaringan listrik sesuai kebutuhan
- Mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan

3. Program Pengembangan

Program pengembangan jaringan listrik untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

- Peningkatan jaringan dan sarana prasarana pendukung
- Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala
- Pembangunan jaringan distribusi baru
- Fasilitasi pengembangan panel surya di fasilitas umum dan sosial

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan jaringan listrik di lingkungan hunian Purbalingga direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.22.
Skenario Pentahapan Pembangunan Jaringan Listrik di Lingkungan Hunian Purbalingga

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan jaringan dan sarana prasarana pendukung	DPUPR Kab PLN	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala	DPUPR Kab PLN	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan jaringan distribusi baru	DPUPR Kab PLN	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.1.3.2. Rencana Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

1. Arahan Pengembangan

Arahan pengembangan jaringan telekomunikasi untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

- Mengembangkan jaringan tetap telekomunikasi
- Mengembangkan jaringan bergerak seluler

2. Kebutuhan Pengembangan

Kebutuhan pengembangan utilitas jaringan telekomunikasi di Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

- Meningkatkan pelayanan jaringan telekomunikasi yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi tetap dan bergerak seluler

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan jaringan telekomunikasi untuk Lingkungan Hunian Purbalingga adalah:

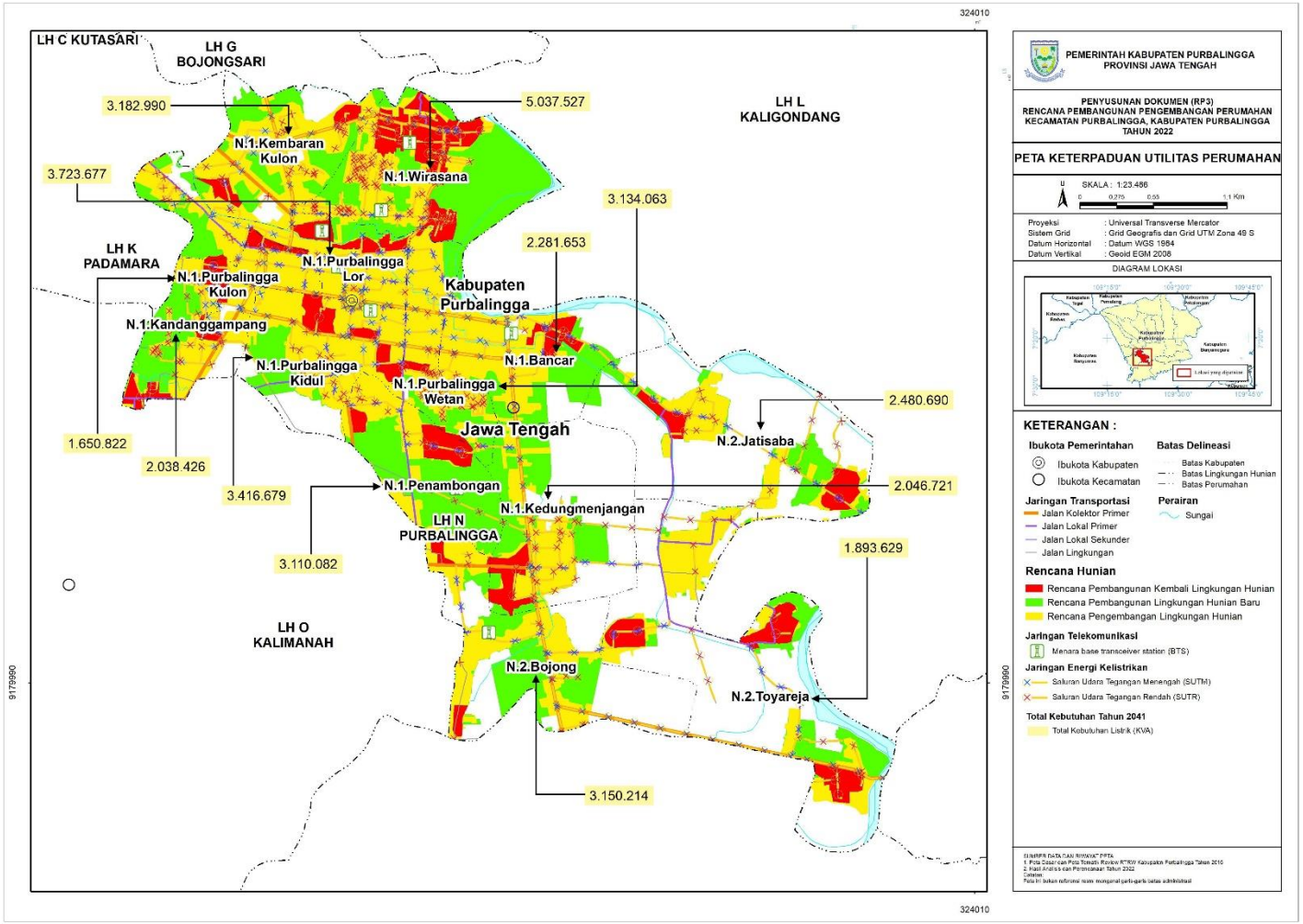
   - Peningkatan kualitas jaringan
   - Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala
   - Pengembangan cakupan pelayanan jaringan fiber optic
   - Peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan tetap telekomunikasi
   - Pengaturan pelayanan menara bersama seluler
   - Pengembangan cakupan pelayanan jaringan bergerak seluler
   - Peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan bergerak seluler

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan jaringan telekomunikasi di lingkungan hunian Purbalingga direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.23.
Skenario Pentahapan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi di Lingkungan Hunian Purbalingga

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas jaringan	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pengembangan cakupan pelayanan jaringan fiber optik	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan tetap telekomunikasi	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
5	Pengaturan pelayanan menara bersama seluler	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
6	Pengembangan cakupan pelayanan jaringan bergerak seluler	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
7	Peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan bergerak seluler	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				



Gambar 7.3.
Peta Rencana Keterpaduan Utilitas Perumahan di Lingkungan Hunian Purbalingga

7.2. Lingkungan Hunian Kalimanah

7.2.1. Rencana Pelayanan Prasarana

7.2.1.1. Rencana Pelayanan Jaringan Jalan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan jaringan jalan untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

   - Memantapkan sistem dan fungsi jaringan jalan
   - Meningkatkan kualitas jaringan jalan
   - Meningkatkan akses dan konektivitas antar permukiman
   - Menyediakan sarana angkutan umum
   - Menyediakan terminal dan halte yang memadai
   - Menyediakan ruang pejalan kaki yang ramah difabel
   - Menyediakan ruang pesepeda yang aman dan layak

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan prasarana jaringan jalan di Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

   - Meningkatkan sistem jaringan jalan yang saat ini sudah ada
   - Mengembangkan sistem jaringan jalan sesuai persyaratan teknis
   - Mengembangkan jalur pejalan kaki dan pesepeda

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan jaringan jalan untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

   - Peningkatan jalan kolektor, lokal, dan lingkungan
   - Pembangunan jaringan jalan baru
   - Pemeliharaan dan perbaikan jalan secara berkala
   - Peningkatan pelayanan angkutan umum
   - Pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan terminal dan halte
   - Peningkatan dan pembangunan jalur pejalan kaki (pedestrian) di pusat-pusat pelayanan
   - Pembangunan jalur atau lajur pesepeda sesuai dimensi jalan

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan prasarana jaringan jalan di lingkungan hunian Kalimanah direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.24.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Jaringan Jalan di Lingkungan Hunian Kalimanah

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan jalan kolektor, lokal, dan lingkungan	BMCK Prov DPUPR Kab	APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan dan perbaikan jalan secara berkala	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan jaringan jalan baru	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Peningkatan pelayanan angkutan umum	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
5	Pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan terminal dan halte	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
6	Peningkatan dan pembangunan jalur pejalan kaki (pedestrian) di pusat-pusat pelayanan	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
7	pembangunan jalur atau lajur pesepeda sesuai dimensi jalan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.2.1.2. Rencana Pelayanan Jaringan Drainase

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan jaringan drainase untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

   - Memantapkan sistem dan fungsi jaringan drainase
   - Meningkatkan kualitas jaringan drainase
   - Meningkatkan cakupan pelayanan drainase

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan prasarana jaringan drainase di Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

   - Meningkatkan sistem jaringan drainase yang saat ini sudah ada
   - Mengembangkan sistem jaringan drainase sesuai persyaratan teknis

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan jaringan drainase untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

   - Peningkatan sistem jaringan drainase terintegrasi
   - Pemeliharaan berkala dan perbaikan/peningkatan konstruksi jaringan drainase
   - Pembangunan jaringan drainase baru

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan prasarana jaringan drainase di lingkungan hunian Kalimanah direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.25.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Jaringan Drainase di Lingkungan Hunian Kalimanah

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan sistem jaringan drainase terintegrasi	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala dan perbaikan/peningkatan konstruksi jaringan drainase	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan jaringan drainase baru	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.2.1.3. Rencana Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sistem penyediaan air minum untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

   - Meningkatkan kualitas SPAM Non Perpipaan
   - Mengembangkan sistem pemanenan air hujan sebagai sumber air baku alternatif
   - Meningkatkan unit air produksi dan distribusi berupa Instalasi Pengolah Air (IPA) pada SPAM IKK
   - Meningkatkan fasilitas penampungan air minum
   - Meningkatkan kualitas jaringan perpipaan PDAM
   - Mengembangkan jaringan perpipaan non PDAM berbasis masyarakat

2. Kebutuhan Pengembangan

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan jaringan prasarana di lingkungan hunian Kalimanah, yang berupa kebutuhan air bersih. Oleh karena itu diperlukan proyeksi kebutuhan jaringan prasarana di masa yang akan datang untuk melakukan perencanaan terkait jaringan prasarana yang efisien.

Air bersih sebagai kebutuhan primer digunakan oleh penduduk lingkungan hunian Kalimanah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan air minum di lingkungan hunian Kalimanah disalurkan oleh PDAM dan non PDAM yang mengalami peningkatan jumlah air setiap tahunnya. Proyeksi kebutuhan air bersih di lingkungan hunian Kalimanah menggunakan asumsi yang bersumber dari Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dengan standar yang ditetapkan oleh Kepmen Kimpraswil No.327/KPTS/M/2002, yaitu sebagai berikut:

- 1 orang penduduk menggunakan air bersih sebesar 60 liter/jiwa/hari
- Industri: 10 % dari kebutuhan domestik
- Fasilitas Sosial: 5 % dari kebutuhan domestik
- Fasilitas Hidran Umum: 5 % dari kebutuhan domestik
- Tingkat Kebocoran: 20 % dari kebutuhan domestik

Tabel VII.26.
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Jompo	187.494	193.355	196.978	199.608
2	Rabak	261.389	267.674	271.559	274.379
3	Blater	315.683	318.592	321.527	303.681
4	Sidakangen	216.274	221.469	224.680	227.010
5	Karangpetir	122.825	127.096	129.736	131.652
6	Grecol	351.890	366.353	375.294	381.782
7	Mewek	209.590	221.914	229.533	235.062
8	Karangmanyar	221.926	222.416	222.907	223.399
9	Kalikabong	534.091	534.457	534.823	535.190
10	Selabaya	347.378	356.916	362.812	367.091
11	Kalimanah Wetan	285.580	290.231	293.105	295.192
12	Kalimanah Kulon	191.865	198.705	202.933	206.002
13	Manduraga	163.081	169.297	173.139	175.928
14	Karangsari	156.618	162.202	165.654	168.159
15	Kedungwuluh	286.144	299.612	307.938	313.981
16	Klapasawit	431.220	458.684	475.661	487.982
17	Babakan	615.227	637.293	650.934	660.834
Jumlah		4.898.275	5.046.265	5.139.214	5.186.931

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan prasarana sistem penyediaan air minum tersebut, maka kebutuhan pengembangan prasarana sistem penyediaan air minum di Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

- Meningkatkan pelayanan sistem penyediaan air minum yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan sistem penyediaan air minum yang layak dan aman
- Mengembangkan cakupan pelayanan penyediaan air minum

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sistem penyediaan air minum untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

- Sosialisasi pola hidup bersih sehat (PHBS) dan standar teknis sumur dangkal
- Pembangunan sarana dan prasarana pendukung Pemanenan Air Hujan (PAH)
- Peningkatan kapasitas produksi air minum
- Peningkatan dan pemeliharaan berkala bak penampung air minum
- Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala
- Pembangunan jaringan distribusi baru dan penambahan sambungan rumah (SR)
- Peningkatan pelayanan air minum
- Pengembangan jaringan perpipaan perdesaan

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan prasarana sistem penyediaan air minum di lingkungan hunian Kalimanah direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.27.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Penyediaan Air Minum di Lingkungan Hunian Kalimanah

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Sosialisasi pola hidup bersih sehat (PHBS) dan standar teknis sumur dangkal	Disperkim Kab Dinkes Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung Pemanenan Air Hujan (PAH)	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Peningkatan kapasitas produksi air minum	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Peningkatan dan pemeliharaan berkala bak penampung air minum	Disperkim Kab DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
5	Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala	Disperkim Kab DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
6	Pembangunan jaringan distribusi baru dan penambahan sambungan rumah (SR)	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
7	Peningkatan pelayanan air minum	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
8	Pengembangan jaringan perpipaan perdesaan	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.2.1.4. Rencana Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sistem pengelolaan air limbah untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

   - Meningkatkan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik setempat sesuai persyaratan teknis
   - Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik terpusat skala lingkungan
   - Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah layak dan aman

2. Kebutuhan Pengembangan

   Dari adanya sistem pengolahan air limbah domestik yang belum memadai dan terpadu, diperlukan kebutuhan sistem pengolahan air limbah domestik di lingkungan hunian Kalimanah. Air limbah yang dihasilkan di lingkungan hunian Kalimanah semakin bertambah. Hal tersebut maka diperlukan sarana pengelolaan air limbah yang terpadu dan tidak mencemari lingkungan. Proyeksi air limbah di lingkungan hunian Kalimanah menggunakan asumsi sebesar 80% dari proyeksi kebutuhan air bersih.

Tabel VII.28.
Proyeksi Air Limbah Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Jompo	149.995	154.684	157.583	159.686
2	Rabak	209.111	214.139	217.247	219.503
3	Blater	252.547	254.874	257.222	242.945

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
4	Sidakangen	173.020	177.175	179.744	181.608
5	Karangpetir	98.260	101.676	103.789	105.321
6	Grecol	281.512	293.082	300.235	305.426
7	Mewek	167.672	177.531	183.626	188.050
8	Karangmanyar	177.541	177.933	178.326	178.719
9	Kalikabong	427.273	427.565	427.858	428.152
10	Selabaya	277.902	285.533	290.250	293.673
11	Kalimanah Wetan	228.464	232.184	234.484	236.154
12	Kalimanah Kulon	153.492	158.964	162.346	164.801
13	Manduraga	130.465	135.437	138.511	140.742
14	Karangsari	125.295	129.762	132.523	134.527
15	Kedungwuluh	228.915	239.690	246.351	251.185
16	Klapasawit	344.976	366.947	380.529	390.386
17	Babakan	492.182	509.835	520.747	528.667
Jumlah		3.918.620	4.037.012	4.111.371	4.149.545

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan prasarana pengelolaan air limbah tersebut, maka kebutuhan pengembangan prasarana pengelolaan air limbah di Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

- Meningkatkan pelayanan pengelolaan air limbah yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik yang layak dan aman
- Mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah sesuai persyaratan teknis

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sistem pengelolaan air limbah untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

- Peningkatan SPAL Domestik setempat layak dan aman
- Pembangunan SPAL Domestik terpusat skala lingkungan
- Peningkatan sarana dan prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan prasarana sistem pengelolaan air limbah di lingkungan hunian Kalimanah direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.29.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah di Lingkungan Hunian Kalimanah

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan SPAL Domestik setempat layak dan aman	Kementerian BMCK Prov	APBN, APBD Prov,				

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
		Disperkim Kab DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pembangunan SPAL Domestik terpusat skala lingkungan	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Peningkatan sarana dan prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.2.1.5. Rencana Pelayanan Sistem Pengolahan Persampahan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sistem pengolahan persampahan untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

   - Memantapkan sistem pengelolaan persampahan sesuai persyaratan teknis
   - Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis
   - Mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat

2. Kebutuhan Pengembangan

   Pada umumnya jaringan persampahan di lingkungan hunian Kalimanah sudah memadai dan melayani setiap penduduk. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase, tegalan, maupun di sungai. Sehingga, diperlukan proyeksi timbulan sampah berdasarkan perhitungan SNI, yaitu sebagai berikut:

   - Sampah domestik diasumsikan 2 liter/jiwa/hari atau 0,002 m3/jiwa/hari
   - Sampah non domestik diasumsikan 20% dari sampah domestik

Tabel VII.30.
Proyeksi Timbulan Sampah Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Jompo	5,36	5,52	5,63	5,70
2	Rabak	7,47	7,65	7,76	7,84
3	Blater	9,02	9,10	9,19	8,68
4	Sidakangen	6,18	6,33	6,42	6,49
5	Karangpetir	3,51	3,63	3,71	3,76
6	Grecol	10,05	10,47	10,72	10,91
7	Mewek	5,99	6,34	6,56	6,72
8	Karangmanyar	6,34	6,35	6,37	6,38

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
9	Kalikabong	15,26	15,27	15,28	15,29
10	Selabaya	9,93	10,20	10,37	10,49
11	Kalimanah Wetan	8,16	8,29	8,37	8,43
12	Kalimanah Kulon	5,48	5,68	5,80	5,89
13	Manduraga	4,66	4,84	4,95	5,03
14	Karangsari	4,47	4,63	4,73	4,80
15	Kedungwuluh	8,18	8,56	8,80	8,97
16	Klapasawit	12,32	13,11	13,59	13,94
17	Babakan	17,58	18,21	18,60	18,88

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan prasarana pengolahan sampah tersebut, maka kebutuhan pengembangan prasarana pengolahan sampah di Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

- Meningkatkan pelayanan pengolahan sampah yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan sistem pengolahan sampah ramah lingkungan
- Mengembangkan sarana dan prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis
- Mengembangkan pengolahan sampah berbasis masyarakat

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sistem pengolahan persampahan untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

- Peningkatan keterpaduan sistem pewadahan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah
- Pengembangan pewadahan sampah terpilah
- Pembangunan TPS dan TPS3R di skala lingkungan
- Pengembangan sarana pengangkut sampah sesuai persyaratan teknis
- Pengembangan bank sampah

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan prasarana sistem pengelolaan persampahan di lingkungan hunian Kalimanah direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.31.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Hunian Kalimanah

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan keterpaduan sistem pewadahan dan pemilahan, pengumpulan,	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab,				

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
	pengangkutan, dan pengolahan sampah	DLH Kab	Swasta, Masyarakat				
2	Pengembangan pewadahan sampah terpilah	Disperkim Kab DLH Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan TPS dan TPS3R di skala lingkungan	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Pengembangan sarana pengangkut sampah sesuai persyaratan teknis	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
5	Pengembangan bank sampah	Disperkim Kab DLH Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.2.1.6. Rencana Pelayanan Sistem Proteksi Kebakaran

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sistem proteksi kebakaran untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

   - Mengembangkan prasarana proteksi kebakaran sesuai persyaratan teknis
   - Mengembangkan sarana proteksi kebakaran sesuai persyaratan teknis

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan prasarana proteksi kebakaran di Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

   - Mengembangkan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
   - Meningkatkan pelayanan proteksi kebakaran yang saat ini sudah ada
   - Melakukan pencegahan dan penanganan dini kebakaran melalui pemberdayaan masyarakat

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sistem proteksi kebakaran untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

   - Pembangunan pos pemadam kebakaran
   - Peningkatan sarana komunikasi dan data proteksi kebakaran yang handal
   - Pengadaan alat pemadam api ringan (APAR)
   - Pengadaan alat pemadam api berat (APAB)

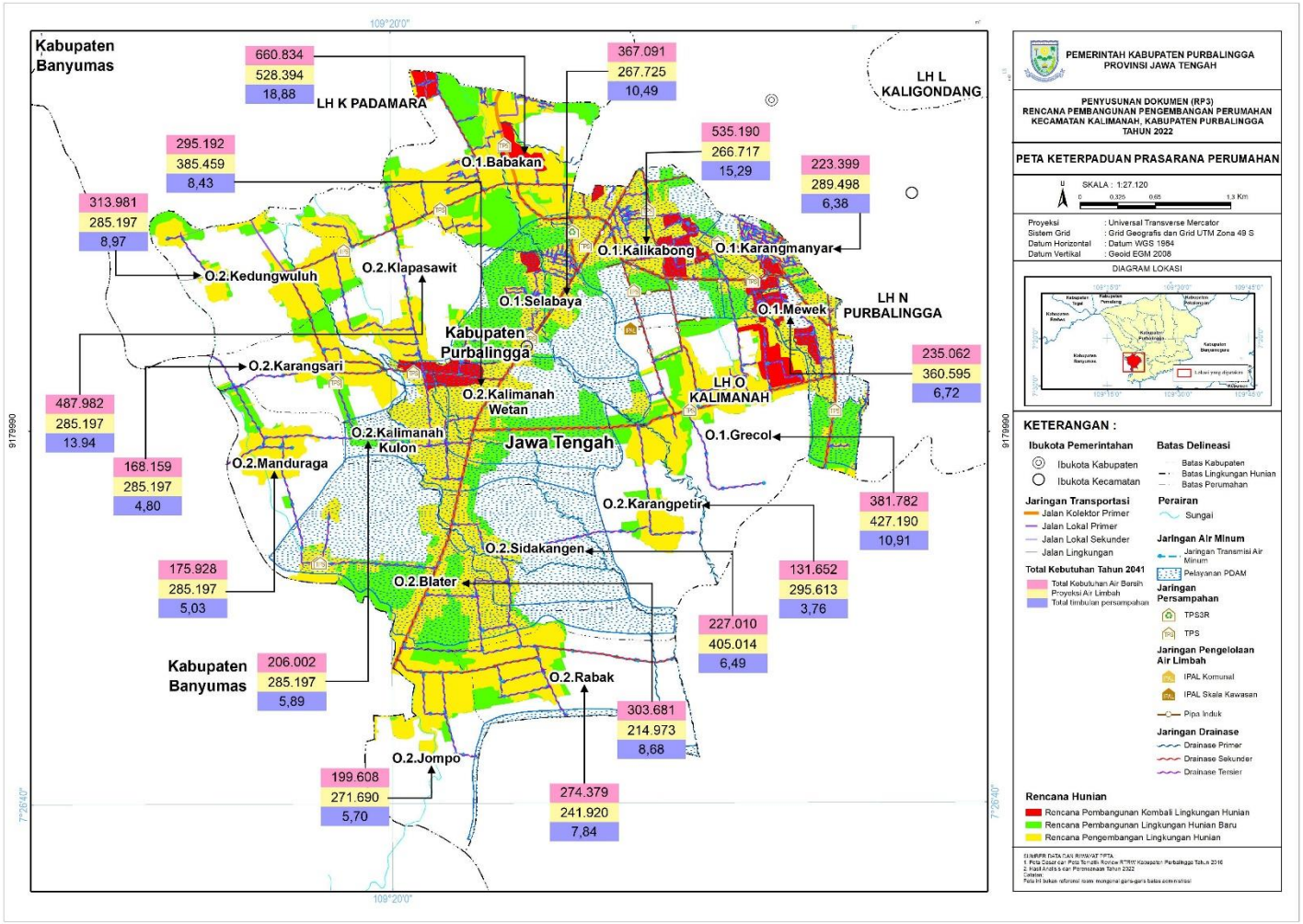
- Pengadaan kendaraan pemadam kebakaran
- Pemeliharaan berkala dan peningkatan kualitas sarana proteksi kebakaran
- Pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan dini kebakaran

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan prasarana sistem proteksi kebakaran di lingkungan hunian Kalimanah direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.32.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Proteksi Kebakaran di Lingkungan Hunian Kalimanah

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Pengembangan pos satuan relawan kebakaran (Satlakar)	Satpol PP Kab BPBD Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Peningkatan sarana komunikasi dan data proteksi kebakaran yang handal	Satpol PP Kab BPBD Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pengadaan alat pemadam api ringan (APAR)	Kementerian BMCK Prov Satpol PP Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Pengadaan alat pemadam api berat (APAB)	Kementerian BMCK Prov Satpol PP Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
5	Pemeliharaan berkala dan peningkatan kualitas sarana proteksi kebakaran	Satpol PP Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
6	Pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan dini kebakaran	Satpol PP Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				



Gambar 7.4.
Peta Rencana Keterpaduan Prasarana Perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah

7.2.2. Rencana Pelayanan Sarana

7.2.2.1. Rencana Pelayanan Sarana Pemerintahan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana pemerintahan untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana pemerintahan sesuai standar
   - Mengembangkan sarana pemerintahan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan sarana pemerintahan di Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

   - Meningkatkan pelayanan dari sarana pemerintahan yang saat ini sudah ada
   - Menambah sarana pemerintahan sesuai jenisnya berdasarkan kebutuhan dan cakupan pelayanannya

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sarana pemerintahan untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

   - Peningkatan kualitas sarana pemerintahan
   - Pemeliharaan berkala sarana pemerintahan
   - Pembangunan sarana pemerintahan

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan sarana pemerintahan di lingkungan hunian Kalimanah direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.33.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Pemerintahan di Lingkungan Hunian Kalimanah

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana pemerintahan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana pemerintahan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana pemerintahan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.2.2.2. Rencana Pelayanan Sarana Pendidikan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana pendidikan untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana pendidikan sesuai standar
   - Mengembangkan sarana pendidikan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Purbalingga berupa sekolah tingkat SD hingga tingkat perguruan tinggi. Kebutuhan akan sarana pendidikan pasti akan selalu mengikuti perkembangan wilayahnya. Semakin banyak penduduk yang berada pada wilayah tersebut maka akan banyak juga sarana pendidikan yang dibutuhkan kedepannya. Adapun jenis sarana pendidikan yang direncanakan menurut SNI Nomor 03-1733-2004;

   - Kelompok penduduk 1.200 jiwa, disediakan Sekolah Dasar.
   - Kelompok penduduk 4.800 jiwa, disediakan SLTP.
   - Kelompok penduduk 6.000 jiwa, disediakan SMA.
   - Kelompok penduduk 70.000 jiwa, disediakan Perguruan Tinggi.

Tabel VII.34.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026					Tahun 2031					Tahun 2036					Tahun 2041				
		TK	SD	SMP	SMA	PT	TK	SD	SMP	SMA	PT	TK	SD	SMP	SMA	PT	TK	SD	SMP	SMA	PT
1	Jompo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Rabak	-1	0	1	1	0	-1	0	1	1	0	-1	0	1	1	0	-1	0	1	1	0
3	Blater	-1	0	1	1	-1	-1	0	1	1	-1	-1	0	1	1	-1	-1	0	1	1	-1
4	Sidakangen	-1	1	1	0	0	-1	1	1	0	0	-1	1	1	0	0	-1	1	1	0	0
5	Karangpetir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Grecol	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
7	Mewek	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
8	Karangmanyar	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
9	Kalikabong	-1	2	0	1	0	-1	2	0	1	0	-1	2	0	1	0	-1	2	0	1	0
10	Selabaya	0	1	0	-3	0	0	2	0	-3	0	0	2	0	-3	0	0	2	0	-3	0
11	Kalimanah Wetan	-1	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
12	Kalimanah Kulon	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0
13	Manduraga	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
14	Karangsari	-1	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	-1	0	0	0	0
15	Kedungwuluh	0	2	0	1	0	0	2	0	1	0	0	2	0	1	0	0	2	0	1	0
16	Klapasawit	0	2	1	1	0	0	3	1	1	0	0	3	1	1	0	0	3	1	1	0
17	Babakan	-2	3	2	1	0	-2	3	2	1	0	-2	3	2	1	0	-2	4	2	1	0
Jumlah		-8	16	8	5	0	-8	17	9	5	0	-8	18	9	5	0	-8	18	9	5	0

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan sarana pendidikan tersebut, maka kebutuhan pengembangan sarana pendidikan di Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

- Meningkatkan pelayanan dari sarana pendidikan yang saat ini sudah ada
- Menambah sarana pendidikan sesuai jenisnya berdasarkan kebutuhan dan cakupan pelayanannya

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sarana pendidikan untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

- Peningkatan kualitas sarana pendidikan
- Pemeliharaan berkala sarana pendidikan
- Pembangunan sarana pendidikan

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan sarana pendidikan di lingkungan hunian Kalimanah direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.35.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Pendidikan di Lingkungan Hunian Kalimanah

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Pendidikan	Kementerian Diknas Prov DPUPR Kab Diknas Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Pendidikan	DPUPR Kab Diknas Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Pendidikan	Kementerian Diknas Prov DPUPR Kab Diknas Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.2.2.3. Rencana Pelayanan Sarana Kesehatan

1. Arahan Pengembangan

Arahan pengembangan sarana kesehatan untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

- Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana kesehatan sesuai standar
- Mengembangkan sarana kesehatan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

Sarana kesehatan yan tersedia di Kabupaten Purbalingga meliputi rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Perhitungan analisis kebutuhan sarana kesehatan mengacu pada standar sebagai berikut:

- Rumah Sakit memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 240.000 jiwa/unit.
- Puskesmas memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 120.000 jiwa/unit.
- Klinik memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 30.000 jiwa/unit.

Tabel VII.36.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026						Tahun 2031					
		Rumah Sakit	Puskesmas	Poliklinik	Puskesmas Pembantu	Praktik Dokter	Apotek	Rumah Sakit	Puskesmas	Poliklinik	Puskesmas Pembantu	Praktik Dokter	Apotek
1	Jompo	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0
2	Rabak	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	-1	1	0
3	Blater	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1
4	Sidakangen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5	Karangpetir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Grecol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Mewek	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	0	-1	0	-1
8	Karangmanyar	-1	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	1	0
9	Kalikabong	-1	0	-3	0	-1	-4	-1	0	-3	0	-1	-4
10	Selabaya	0	0	-1	0	-1	0	0	0	-1	0	-1	0
11	Kalimanah Wetan	0	-1	-1	0	-3	-2	0	-1	-1	0	-3	-2
12	Kalimanah Kulon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Manduraga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Karangsari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kedungwuluh	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16	Klapasawit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Babakan	-1	0	0	-1	0	-1	-1	0	0	-1	1	-1
Jumlah		-3	-1	-5	-1	-2	-7	-2	0	-5	-1	-2	-7

Lanjutan…

No	Perumahan	Tahun 2036						Tahun 2041					
		Rumah Sakit	Puskesmas	Poliklinik	Puskesmas Pembantu	Praktik Dokter	Apotek	Rumah Sakit	Puskesmas	Poliklinik	Puskesmas Pembantu	Praktik Dokter	Apotek
1	Jompo	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1	0

No	Perumahan	Tahun 2036						Tahun 2041					
		Rumah Sakit	Puskesmas	Poliklinik	Puskesmas Pembantu	Praktik Dokter	Apotek	Rumah Sakit	Puskesmas	Poliklinik	Puskesmas Pembantu	Praktik Dokter	Apotek
2	Rabak	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	-1	1	0
3	Blater	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	-1
4	Sidakangen	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
5	Karangpetir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Grecol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Mewek	0	0	0	-1	0	-1	0	0	0	-1	0	-1
8	Karangmanyar	-1	0	0	0	1	0	-1	0	0	0	1	0
9	Kalikabong	-1	0	-3	0	-1	-4	-1	0	-3	0	-1	-4
10	Selabaya	0	0	-1	0	-1	0	0	0	-1	0	-1	0
11	Kalimanah Wetan	0	-1	-1	0	-3	-2	0	-1	-1	0	-3	-2
12	Kalimanah Kulon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Manduraga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Karangsari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kedungwuluh	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
16	Klapasawit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Babakan	-1	0	0	-1	1	-1	-1	0	0	-1	1	-1
Jumlah		-2	0	-5	-1	-2	-7	-2	0	-5	-1	-2	-7

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan sarana kesehatan tersebut, maka kebutuhan pengembangan sarana kesehatan di Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

- Meningkatkan pelayanan dari sarana kesehatan yang saat ini sudah ada
- Menambah sarana kesehatan klinik berdasarkan kebutuhan dan cakupan pelayanannya

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sarana kesehatan untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

   - Peningkatan kualitas sarana kesehatan
   - Pemeliharaan berkala sarana kesehatan
   - Pembangunan sarana kesehatan

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan sarana kesehatan di lingkungan hunian Kalimanah direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.37.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Kesehatan di Lingkungan Hunian Kalimanah

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Kesehatan	Kementerian Dinkes Prov DPUPR Kab Dinkes Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Kesehatan	DPUPR Kab Dinkes Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Kesehatan	Kementerian Dinkes Prov DPUPR Kab Dinkes Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.2.2.4. Rencana Pelayanan Sarana Perdagangan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana perdagangan untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana perdagangan sesuai standar
   - Mengembangkan sarana perdagangan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

Potensi ekonomi suatu daerah, khususnya sektor perdagangan dapat diketahui dari banyaknya pasar yang ada. Sarana perdagangan selain pasar daerah, juga dapat berupa pusat pusat perkulakan baik secara grosir maupun eceran dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan barang bagi masyarakat. Perhitungan analisis kebutuhan sarana perdagangan mengacu pada standar sebagai berikut:

- Pasar memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 30.000 jiwa/unit.
- Pertokoan memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 6.000 jiwa/unit.
- Toko/ warung memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 250 jiwa/unit.

Proyeksi kebutuhan sarana perdagangan di Lingkungan Hunian Kalimanah untuk 20 tahun mendatang telah mencukupi dan melayani seluruh lingkungan hunian.

Tabel VII.38.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan di Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2026-2041

No	Jenis	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Pasar	-7	-7	-7	-7
2	Pertokoan	-16	-16	-16	-16
3	Toko/ Warung	-250	-243	-238	-236

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan sarana perdagangan tersebut, maka kebutuhan pengembangan sarana perdagangan di Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

- Meningkatkan pelayanan dari sarana perdagangan yang saat ini sudah ada
- Menambah sarana perdagangan lainnya sesuai kebutuhan dan cakupan pelayanannya

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sarana perdagangan untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

- Peningkatan kualitas sarana perdagangan
- Pemeliharaan berkala sarana perdagangan
- Pembangunan sarana perdagangan

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan sarana perdagangan di lingkungan hunian Kalimanah direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.39.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Perdagangan di Lingkungan Hunian Kalimanah

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Perdagangan	Kementerian Disdag Prov DPUPR Kab Disdag Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Perdagangan	DPUPR Kab Disdag Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Perdagangan	Kementerian Disdag Prov DPUPR Kab Disdag Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.2.2.5. Rencana Pelayanan Sarana Peribadatan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana peribadatan untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana peribadatan sesuai standar
   - Mengembangkan sarana peribadatan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Sarana peribadatan yang layak dan mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitas merupakan hak setiap orang. Jenis sarana peribadatan sangat tergantung pada kondisi setempat dengan memperhatikan struktur penduduk menurut agama yang dianut, dan tata cara atau pola masyarakat setempat dalam menjalankan ibadah agamanya. Adapun jenis sarana ibadah untuk agama Islam, direncanakan menurut SNI Nomor 03-1733-2004:

   - Kelompok penduduk 250 jiwa, diperlukan musholla/langgar.
   - Kelompok penduduk 2.500 jiwa, disediakan masjid.
   - Kebutuhan gereja dan vihara adalah dengan mengikuti sistem kekerabatan atau hirarki lembaga.

Tabel VII.40.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan di Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026			Tahun 2031			Tahun 2036			Tahun 2041		
		Masjid	Musholla	Gereja	Masjid	Musholla	Gereja	Masjid	Musholla	Gereja	Masjid	Musholla	Gereja
1	Jompo	-1	-2	Mengikuti paroki	-1	-2	Mengikuti paroki	-1	-2	Mengikuti paroki	-1	-1	Mengikuti paroki
2	Rabak	-1	-1		-1	0		-1	0		-1	0	
3	Blater	-3	-4		-3	-4		-3	-4		-4	-5	
4	Sidakangen	-4	5		-4	6		-4	6		-4	6	
5	Karangpetir	-2	3		-2	3		-2	3		-2	3	
6	Grecol	-1	-1		-1	-1		-1	0		-1	0	
7	Mewek	-2	3		-2	4		-2	4		-2	4	
8	Karangmanyar	-2	6		-2	6		-2	6		-2	6	
9	Kalikabong	-2	9		-2	9		-2	9		-2	9	
10	Selabaya	-6	5		-6	5		-6	5		-6	5	
11	Kalimanah Wetan	-1	-3		-1	-3		-1	-3		-1	-3	
12	Kalimanah Kulon	-4	3		-4	3		-4	4		-4	4	
13	Manduraga	0	1		0	1		0	1		0	1	
14	Karangsari	-1	0		-1	1		-1	1		-1	1	
15	Kedungwuluh	-5	9		-5	9		-5	10		-5	10	
16	Klapasawit	-3	9		-3	10		-3	11		-3	11	
17	Babakan	-3	8		-3	9		-3	10		-3	10	
Jumlah		-43	49		-42	56		-42	61		-41	63	

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan sarana peribadatan tersebut, maka kebutuhan pengembangan sarana peribadatan di Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

- Meningkatkan pelayanan dari sarana peribadatan yang saat ini sudah ada
- Menambah sarana peribadatan musholla sesuai kebutuhan dan proyeksi jumlah penduduk
- Menambah sarana peribadatan lainnya mengikuti sistem kekerabatan atau hirarki lembaga

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sarana peribadatan untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

- Peningkatan kualitas sarana peribadatan
- Pemeliharaan berkala sarana peribadatan
- Pembangunan sarana peribadatan

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan sarana peribadatan di lingkungan hunian Kalimanah direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.41.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Peribadatan di Lingkungan Hunian Kalimanah

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Peribadatan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Peribadatan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Peribadatan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.2.2.6. Rencana Pelayanan Sarana Budaya dan Rekreasi

1. Arahan Pengembangan

Arahan pengembangan sarana budaya dan rekreasi untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

- Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana budaya dan rekreasi sesuai standar
- Mengembangkan sarana budaya dan rekreasi sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan sarana budaya dan rekreasi di Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

   - Meningkatkan pelayanan dari sarana budaya dan rekreasi yang saat ini sudah ada
   - Menambah sarana budaya dan rekreasi sesuai jenisnya dengan mendasarkan pada kebutuhan dan proyeksi jumlah penduduk

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sarana budaya dan rekreasi untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

   - Peningkatan kualitas sarana budaya dan rekreasi
   - Pemeliharaan berkala sarana budaya dan rekreasi
   - Pembangunan sarana budaya dan rekreasi

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan sarana budaya dan rekreasi di lingkungan hunian Kalimanah direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.42.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Budaya dan Rekreasi di Lingkungan Hunian Kalimanah

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Budaya dan Rekreasi	DPUPR Kab Dispar Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Budaya dan Rekreasi	DPUPR Kab Dispar Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Budaya dan Rekreasi	DPUPR Kab Dispar Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.2.2.7. Rencana Pelayanan Sarana Ruang Terbuka Hijau

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana ruang terbuka hijau untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana ruang terbuka hijau sesuai standar
   - Mengembangkan sarana ruang terbuka hijau sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menetapkan bahwa proporsi RTH pada wilayah perkotaan minimal 30% dari luas kota. Sedangkan, luas RTH di lingkungan hunian Kalimanah belum memenuhi jumlah yang ditentukan sebesar 30% dari total luas wilayah.

   Kebutuhan pengembangan sarana ruang terbuka hijau di Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

   - Melakukan pendataan ulang yang lebih rinci untuk keberadaan sarana ruang terbuka hijau
   - Meningkatkan pelayanan dari sarana ruang terbuka hijau yang saat ini sudah ada
   - Menambah sarana ruang terbuka hijau sesuai kebutuhan jenis RTH berdasarkan cakupan pelayanan dan proyeksi jumlah penduduk

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sarana ruang terbuka hijau untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

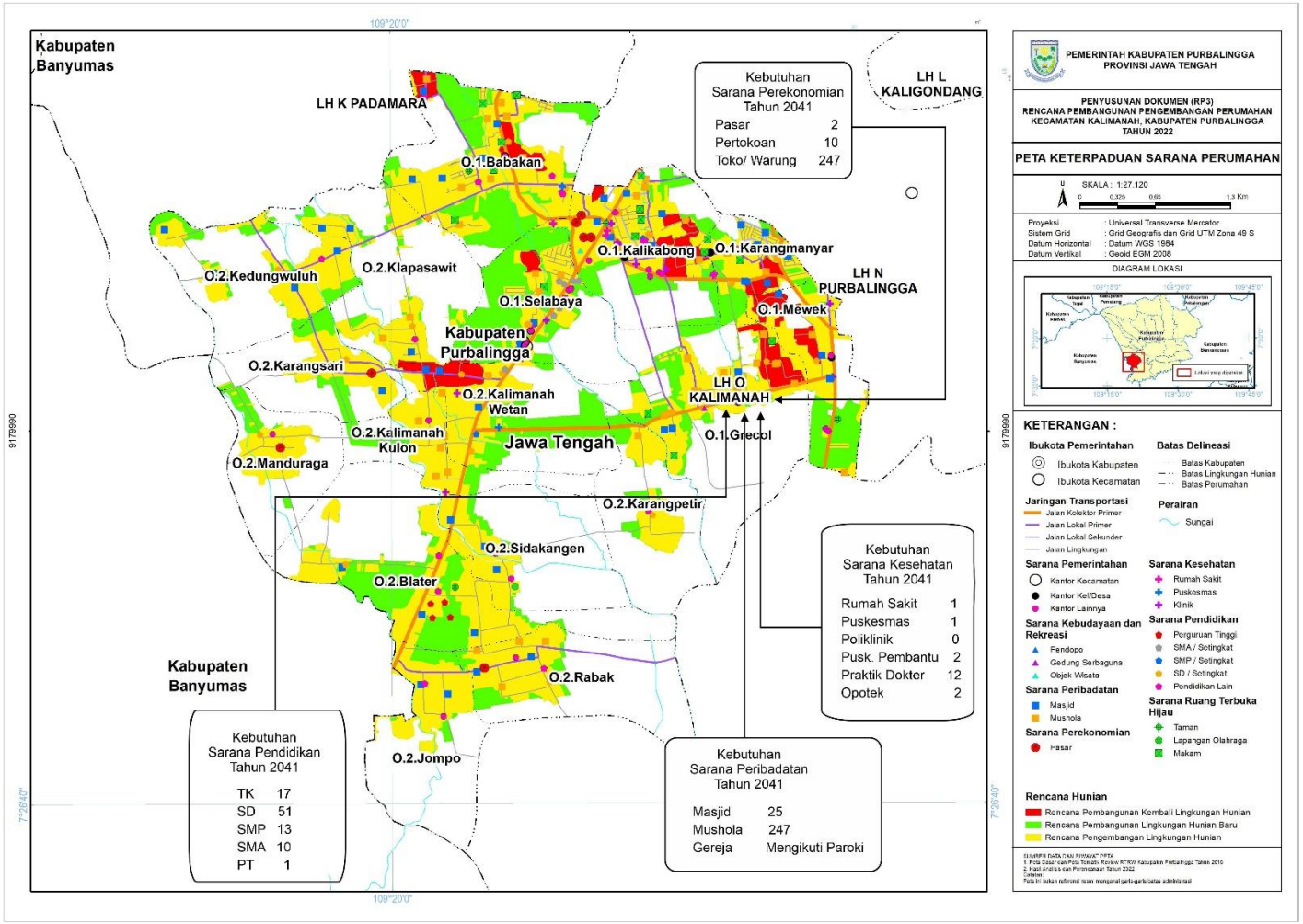
   - Peningkatan kualitas sarana ruang terbuka hijau
   - Pemeliharaan berkala sarana ruang terbuka hijau
   - Pembangunan sarana ruang terbuka hijau

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan sarana ruang terbuka hijau di lingkungan hunian Kalimanah direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.43.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan Hunian Kalimanah

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana RTH	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana RTH	DPUPR Kab DLH Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana RTH	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				



Gambar 7.5.
Peta Rencana Keterpaduan Sarana Perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah

7.2.3. Rencana Pelayanan Utilitas

7.2.3.1. Rencana Pelayanan Jaringan Listrik

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan jaringan listrik untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

   - Memantapkan sistem dan fungsi jaringan listrik
   - Meningkatkan kualitas jaringan listrik
   - Meningkatkan akses dan cakupan pelayanan listrik
   - Mengembangkan sumber energi listrik terbarukan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Selain itu, ketersediaan jaringan listrik eksisting perlu adanya penambahan kebutuhan listrik domestik dan non domestik agar menciptakan keterpaduan antar hirarki jaringan listrik. Kebutuhan listrik domestik ini untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sedangkan, kebutuhan listrik non domestik berupa industri, fasilitas umum, penerangan jalan, dan cadangan. Proyeksi kebutuhan listrik di lingkungan hunian Kalimanah menggunakan asumsi sesuai standar yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

   - 1 rumah tangga memerlukan listrik sebesar 900 KVA
   - Industri: 25 % dari kebutuhan domestik
   - Fasilitas Sosial: 25 % dari kebutuhan domestik
   - Penerangan Jalan: 40 % dari kebutuhan domestik
   - Cadangan: 10 % dari kebutuhan domestik

Tabel VII.44.
Proyeksi Kebutuhan Listrik Lingkungan Hunian Kalimanah Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Jompo	1.339.240	1.381.107	1.406.988	1.425.771
2	Rabak	1.867.065	1.911.958	1.939.709	1.959.850
3	Blater	2.254.881	2.275.657	2.296.624	2.169.151
4	Sidakangen	1.544.817	1.581.920	1.604.856	1.621.501
5	Karangpetir	877.319	907.826	926.684	940.370
6	Grecol	2.513.500	2.616.808	2.680.669	2.727.016
7	Mewek	1.497.068	1.585.101	1.639.520	1.679.014
8	Karangmanyar	1.585.188	1.588.686	1.592.193	1.595.706
9	Kalikabong	3.814.935	3.817.549	3.820.165	3.822.782
10	Selabaya	2.481.270	2.549.399	2.591.513	2.622.078
11	Kalimanah Wetan	2.039.857	2.073.076	2.093.611	2.108.514
12	Kalimanah Kulon	1.370.463	1.419.320	1.449.522	1.471.441
13	Manduraga	1.164.863	1.209.261	1.236.707	1.256.625
14	Karangsari	1.118.701	1.158.586	1.183.242	1.201.136
15	Kedungwuluh	2.043.884	2.140.089	2.199.560	2.242.721

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
16	Klapasawit	3.080.145	3.276.315	3.397.581	3.485.589
17	Babakan	4.394.478	4.552.094	4.649.527	4.720.239
Jumlah		34.987.676	36.044.751	36.708.669	37.049.505

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan utilitas jaringan listrik tersebut, maka kebutuhan pengembangan utilitas jaringan listrik di Lingkungan Hunian Kalimanah adalah :

- Meningkatkan pelayanan jaringan listrik yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan jaringan listrik sesuai kebutuhan
- Mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan

3. Program Pengembangan

Program pengembangan jaringan listrik untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

- Peningkatan jaringan dan sarana prasarana pendukung
- Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala
- Pembangunan jaringan distribusi baru
- Fasilitasi pengembangan panel surya di fasilitas umum dan sosial

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan jaringan listrik di lingkungan hunian Kalimanah direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.45.
Skenario Pentahapan Pembangunan Jaringan Listrik di Lingkungan Hunian Kalimanah

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan jaringan dan sarana prasarana pendukung	DPUPR Kab PLN	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala	DPUPR Kab PLN	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan jaringan distribusi baru	DPUPR Kab PLN	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.2.3.2. Rencana Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

1. Arahan Pengembangan

Arahan pengembangan jaringan telekomunikasi untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

- Mengembangkan jaringan tetap telekomunikasi

- Mengembangkan jaringan bergerak seluler

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan utilitas jaringan telekomunikasi di Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

   - Meningkatkan pelayanan jaringan telekomunikasi yang saat ini sudah ada
   - Mengembangkan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi tetap dan bergerak seluler

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan jaringan telekomunikasi untuk Lingkungan Hunian Kalimanah adalah:

   - Peningkatan kualitas jaringan
   - Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala
   - Pengembangan cakupan pelayanan jaringan fiber optic
   - Peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan tetap telekomunikasi
   - Pengaturan pelayanan menara bersama seluler
   - Pengembangan cakupan pelayanan jaringan bergerak seluler
   - Peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan bergerak seluler

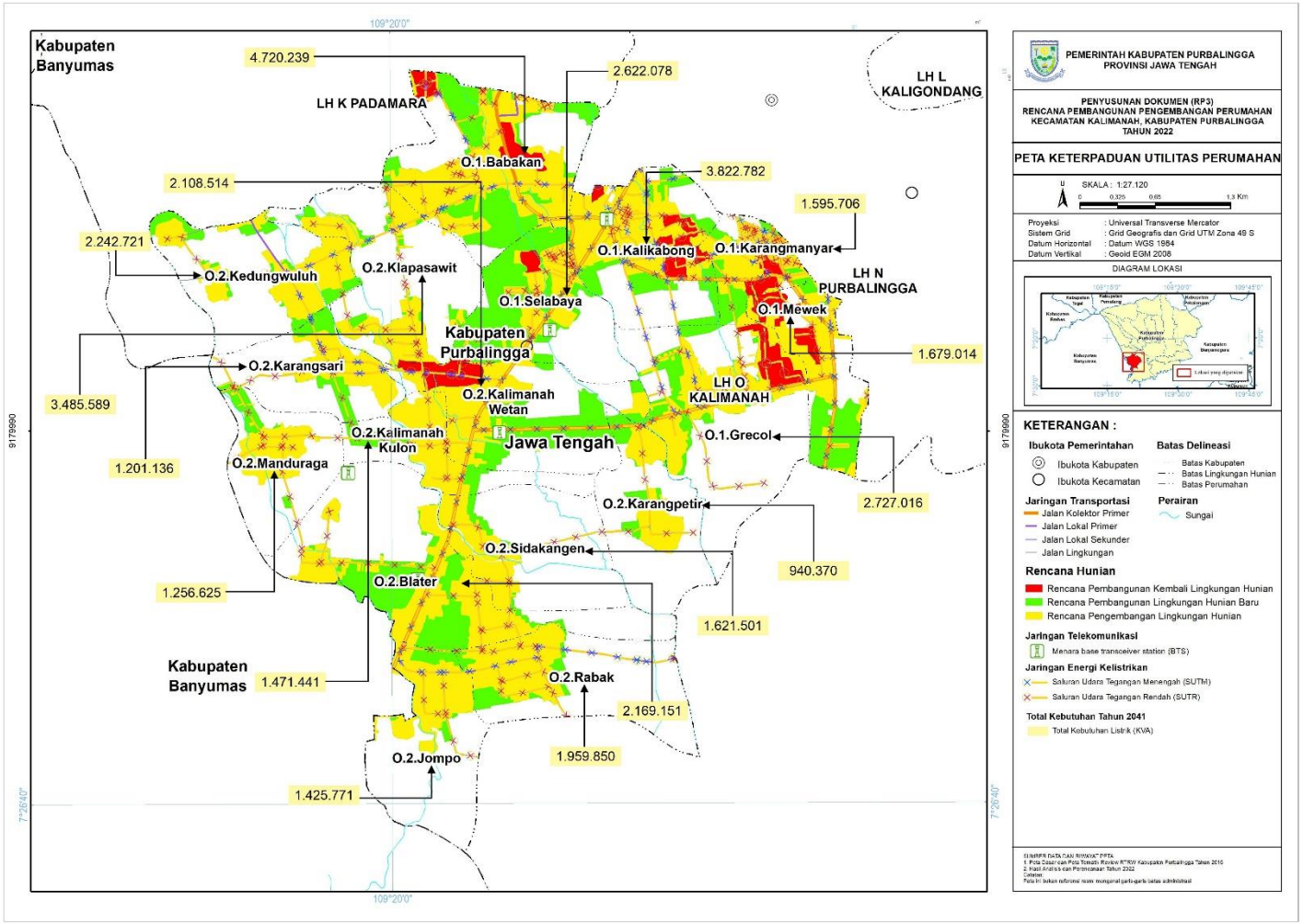
4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan jaringan telekomunikasi di lingkungan hunian Kalimanah direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.46.
Skenario Pentahapan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi di Lingkungan Hunian Kalimanah

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas jaringan	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pengembangan cakupan pelayanan jaringan fiber optik	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan tetap telekomunikasi	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
5	Pengaturan pelayanan menara bersama seluler	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
6	Pengembangan cakupan pelayanan jaringan bergerak seluler	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
7	Peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan bergerak seluler	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				



Gambar 7.6.
Peta Rencana Keterpaduan Utilitas Perumahan di Lingkungan Hunian Kalimanah

7.3. Lingkungan Hunian Padamara

7.3.1. Rencana Pelayanan Prasarana

7.3.1.1. Rencana Pelayanan Jaringan Jalan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan jaringan jalan untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

   - Memantapkan sistem dan fungsi jaringan jalan
   - Meningkatkan kualitas jaringan jalan
   - Meningkatkan akses dan konektivitas antar permukiman
   - Menyediakan sarana angkutan umum
   - Menyediakan terminal dan halte yang memadai
   - Menyediakan ruang pejalan kaki yang ramah difabel
   - Menyediakan ruang pesepeda yang aman dan layak

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan prasarana jaringan jalan di Lingkungan Hunian Padamara adalah:

   - Meningkatkan sistem jaringan jalan yang saat ini sudah ada
   - Mengembangkan sistem jaringan jalan sesuai persyaratan teknis
   - Mengembangkan jalur pejalan kaki dan pesepeda

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan jaringan jalan untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

   - Peningkatan jalan kolektor, lokal, dan lingkungan
   - Pembangunan jaringan jalan baru
   - Pemeliharaan dan perbaikan jalan secara berkala
   - Peningkatan pelayanan angkutan umum
   - Pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan terminal dan halte
   - Peningkatan dan pembangunan jalur pejalan kaki (pedestrian) di pusat-pusat pelayanan
   - Pembangunan jalur atau lajur pesepeda sesuai dimensi jalan

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan prasarana jaringan jalan di lingkungan hunian Padamara direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.47.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Jaringan Jalan di Lingkungan Hunian Padamara

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan jalan kolektor, lokal, dan lingkungan	BMCK Prov DPUPR Kab	APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan dan perbaikan jalan secara berkala	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan jaringan jalan baru	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Peningkatan pelayanan angkutan umum	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
5	Pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan terminal dan halte	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
6	Peningkatan dan pembangunan jalur pejalan kaki (pedestrian) di pusat-pusat pelayanan	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
7	pembangunan jalur atau lajur pesepeda sesuai dimensi jalan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.3.1.2. Rencana Pelayanan Jaringan Drainase

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan jaringan drainase untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

   - Memantapkan sistem dan fungsi jaringan drainase
   - Meningkatkan kualitas jaringan drainase
   - Meningkatkan cakupan pelayanan drainase

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan prasarana jaringan drainase di Lingkungan Hunian Padamara adalah:

   - Meningkatkan sistem jaringan drainase yang saat ini sudah ada
   - Mengembangkan sistem jaringan drainase sesuai persyaratan teknis

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan jaringan drainase untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

   - Peningkatan sistem jaringan drainase terintegrasi
   - Pemeliharaan berkala dan perbaikan/peningkatan konstruksi jaringan drainase
   - Pembangunan jaringan drainase baru

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan prasarana jaringan drainase di lingkungan hunian Padamara direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.48.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Jaringan Drainase di Lingkungan Hunian Padamara

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan sistem jaringan drainase terintegrasi	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala dan perbaikan/peningkatan konstruksi jaringan drainase	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan jaringan drainase baru	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.3.1.3. Rencana Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sistem penyediaan air minum untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

   - Meningkatkan kualitas SPAM Non Perpipaan
   - Mengembangkan sistem pemanenan air hujan sebagai sumber air baku alternatif
   - Meningkatkan unit air produksi dan distribusi berupa Instalasi Pengolah Air (IPA) pada SPAM IKK
   - Meningkatkan fasilitas penampungan air minum
   - Meningkatkan kualitas jaringan perpipaan PDAM
   - Mengembangkan jaringan perpipaan non PDAM berbasis masyarakat

2. Kebutuhan Pengembangan

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan jaringan prasarana di lingkungan hunian Padamara, yang berupa kebutuhan air bersih. Oleh karena itu diperlukan proyeksi kebutuhan jaringan prasarana di masa yang akan datang untuk melakukan perencanaan terkait jaringan prasarana yang efisien.

Air bersih sebagai kebutuhan primer digunakan oleh penduduk lingkungan hunian Padamara dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan air minum di lingkungan hunian Padamara disalurkan oleh PDAM dan non PDAM yang mengalami peningkatan jumlah air setiap tahunnya. Proyeksi kebutuhan air bersih di lingkungan hunian Padamara menggunakan asumsi yang bersumber dari Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dengan standar yang ditetapkan oleh Kepmen Kimpraswil No.327/KPTS/M/2002, yaitu sebagai berikut:

- 1 orang penduduk menggunakan air bersih sebesar 60 liter/jiwa/hari
- Industri: 10 % dari kebutuhan domestik
- Fasilitas Sosial: 5 % dari kebutuhan domestik
- Fasilitas Hidran Umum: 5 % dari kebutuhan domestik
- Tingkat Kebocoran: 20 % dari kebutuhan domestik

Tabel VII.49.
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Karangpule	129.991	136.653	140.770	143.759
2	Kalitinggar	230.613	241.075	247.543	252.237
3	Sokawera	221.705	231.112	236.927	241.148
4	Padamara	251.562	260.285	265.678	269.591
5	Karangjambe	341.914	346.296	349.005	350.971
6	Bojanegara	536.708	537.697	538.308	538.751
7	Karangsentul	225.589	228.822	230.821	232.271
8	Gemuruh	361.442	379.793	391.137	399.370
9	Dawuhan	339.207	352.142	360.137	365.940
10	Prigi	270.015	281.917	289.275	294.615
11	Purbayasa	190.996	197.280	201.165	203.984
12	Karanggambas	363.396	376.574	384.720	390.632
13	Mipiran	279.338	284.553	287.778	290.118
14	Kalitinggar Kidul	146.130	150.797	153.683	155.777
Jumlah		3.888.605	4.004.997	4.076.946	4.129.163

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan prasarana sistem penyediaan air minum tersebut, maka kebutuhan pengembangan prasarana sistem penyediaan air minum di Lingkungan Hunian Padamara adalah:

- Meningkatkan pelayanan sistem penyediaan air minum yang saat ini sudah ada

- Mengembangkan sistem penyediaan air minum yang layak dan aman
- Mengembangkan cakupan pelayanan penyediaan air minum

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sistem penyediaan air minum untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

   - Sosialisasi pola hidup bersih sehat (PHBS) dan standar teknis sumur dangkal
   - Pembangunan sarana dan prasarana pendukung Pemanenan Air Hujan (PAH)
   - Peningkatan kapasitas produksi air minum
   - Peningkatan dan pemeliharaan berkala bak penampung air minum
   - Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala
   - Pembangunan jaringan distribusi baru dan penambahan sambungan rumah (SR)
   - Peningkatan pelayanan air minum
   - Pengembangan jaringan perpipaan perdesaan

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan prasarana sistem penyediaan air minum di lingkungan hunian Padamara direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.50.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Penyediaan Air Minum di Lingkungan Hunian Padamara

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Sosialisasi pola hidup bersih sehat (PHBS) dan standar teknis sumur dangkal	Disperkim Kab Dinkes Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung Pemanenan Air Hujan (PAH)	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Peningkatan kapasitas produksi air minum	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Peningkatan dan pemeliharaan berkala bak penampung air minum	Disperkim Kab DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
5	Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala	Disperkim Kab DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
6	Pembangunan jaringan distribusi baru dan	Kementerian BMCK Prov	APBN, APBD Prov, APBD Kab,				

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
	penambahan sambungan rumah (SR)	Disperkim Kab DPUPR Kab	Swasta, Masyarakat				
7	Peningkatan pelayanan air minum	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
8	Pengembangan jaringan perpipaan perdesaan	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.3.1.4. Rencana Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sistem pengelolaan air limbah untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

   - Meningkatkan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik setempat sesuai persyaratan teknis
   - Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik terpusat skala lingkungan
   - Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah layak dan aman

2. Kebutuhan Pengembangan

   Dari adanya sistem pengolahan air limbah domestik yang belum memadai dan terpadu, diperlukan kebutuhan sistem pengolahan air limbah domestik di lingkungan hunian Padamara. Air limbah yang dihasilkan di lingkungan hunian Padamara semakin bertambah. Hal tersebut maka diperlukan sarana pengelolaan air limbah yang terpadu dan tidak mencemari lingkungan. Proyeksi air limbah di lingkungan hunian Padamara menggunakan asumsi sebesar 80% dari proyeksi kebutuhan air bersih.

Tabel VII.51.
Proyeksi Air Limbah Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Karangpule	103.993	109.322	112.616	115.007
2	Kalitinggar	184.490	192.860	198.034	201.789
3	Sokawera	177.364	184.890	189.542	192.918
4	Padamara	201.249	208.228	212.542	215.673
5	Karangjambe	273.531	277.037	279.204	280.776
6	Bojanegara	429.367	430.157	430.646	431.001
7	Karangsentul	180.471	183.058	184.657	185.817

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
8	Gemuruh	289.154	303.835	312.910	319.496
9	Dawuhan	271.366	281.713	288.110	292.752
10	Prigi	216.012	225.534	231.420	235.692
11	Purbayasa	152.796	157.824	160.932	163.187
12	Karanggambas	290.717	301.259	307.776	312.506
13	Mipiran	223.470	227.643	230.222	232.094
14	Kalitinggar Kidul	116.904	120.638	122.946	124.621
Jumlah		3.110.884	3.203.997	3.261.557	3.303.331

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan prasarana pengelolaan air limbah tersebut, maka kebutuhan pengembangan prasarana pengelolaan air limbah di Lingkungan Hunian Padamara adalah:

- Meningkatkan pelayanan pengelolaan air limbah yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik yang layak dan aman
- Mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah sesuai persyaratan teknis

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sistem pengelolaan air limbah untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

- Peningkatan SPAL Domestik setempat layak dan aman
- Pembangunan SPAL Domestik terpusat skala lingkungan
- Peningkatan sarana dan prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan prasarana sistem pengelolaan air limbah di lingkungan hunian Padamara direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.52.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah di Lingkungan Hunian Padamara

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan SPAL Domestik setempat layak dan aman	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pembangunan SPAL Domestik terpusat skala lingkungan	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
3	Peningkatan sarana dan prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.3.1.5. Rencana Pelayanan Sistem Pengolahan Persampahan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sistem pengolahan persampahan untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

   - Memantapkan sistem pengelolaan persampahan sesuai persyaratan teknis
   - Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis
   - Mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat

2. Kebutuhan Pengembangan

   Pada umumnya jaringan persampahan di lingkungan hunian Padamara sudah memadai dan melayani setiap penduduk. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase, tegalan, maupun di sungai. Sehingga, diperlukan proyeksi timbulan sampah berdasarkan perhitungan SNI, yaitu sebagai berikut:

   - Sampah domestik diasumsikan 2 liter/jiwa/hari atau 0,002 m3/jiwa/hari
   - Sampah non domestik diasumsikan 20% dari sampah domestik

Tabel VII.53.
Proyeksi Timbulan Sampah Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Karangpule	3,71	3,90	4,02	4,11
2	Kalitinggar	6,59	6,89	7,07	7,21
3	Sokawera	6,33	6,60	6,77	6,89
4	Padamara	7,19	7,44	7,59	7,70
5	Karangjambe	9,77	9,89	9,97	10,03
6	Bojanegara	15,33	15,36	15,38	15,39
7	Karangsentul	6,45	6,54	6,59	6,64
8	Gemuruh	10,33	10,85	11,18	11,41
9	Dawuhan	9,69	10,06	10,29	10,46
10	Prigi	7,71	8,05	8,26	8,42
11	Purbayasa	5,46	5,64	5,75	5,83
12	Karanggambas	10,38	10,76	10,99	11,16
13	Mipiran	7,98	8,13	8,22	8,29
14	Kalitinggar Kidul	4,18	4,31	4,39	4,45

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan prasarana pengolahan sampah tersebut, maka kebutuhan pengembangan prasarana pengolahan sampah di Lingkungan Hunian Padamara adalah:

- Meningkatkan pelayanan pengolahan sampah yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan sistem pengolahan sampah ramah lingkungan
- Mengembangkan sarana dan prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis
- Mengembangkan pengolahan sampah berbasis masyarakat

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sistem pengolahan persampahan untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

- Peningkatan keterpaduan sistem pewadahan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah
- Pengembangan pewadahan sampah terpilah
- Pembangunan TPS dan TPS3R di skala lingkungan
- Pengembangan sarana pengangkut sampah sesuai persyaratan teknis
- Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) skala kawasan
- Pengembangan bank sampah

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan prasarana sistem pengelolaan persampahan di lingkungan hunian Padamara direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.54.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Hunian Padamara

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan keterpaduan sistem pewadahan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pengembangan pewadahan sampah terpilah	Disperkim Kab DLH Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan TPS dan TPS3R di skala lingkungan	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Pengembangan sarana pengangkut sampah sesuai persyaratan teknis	Kementerian BMCK Prov	APBN, APBD Prov, APBD Kab,				

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
		Disperkim Kab DLH Kab	Swasta, Masyarakat				
5	Pengembangan bank sampah	Disperkim Kab DLH Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
6	Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) skala kawasan	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.3.1.6. Rencana Pelayanan Sistem Proteksi Kebakaran

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sistem proteksi kebakaran untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

   - Mengembangkan prasarana proteksi kebakaran sesuai persyaratan teknis
   - Mengembangkan sarana proteksi kebakaran sesuai persyaratan teknis

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan prasarana proteksi kebakaran di Lingkungan Hunian Padamara adalah:

   - Mengembangkan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
   - Meningkatkan pelayanan proteksi kebakaran yang saat ini sudah ada
   - Melakukan pencegahan dan penanganan dini kebakaran melalui pemberdayaan masyarakat

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sistem proteksi kebakaran untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

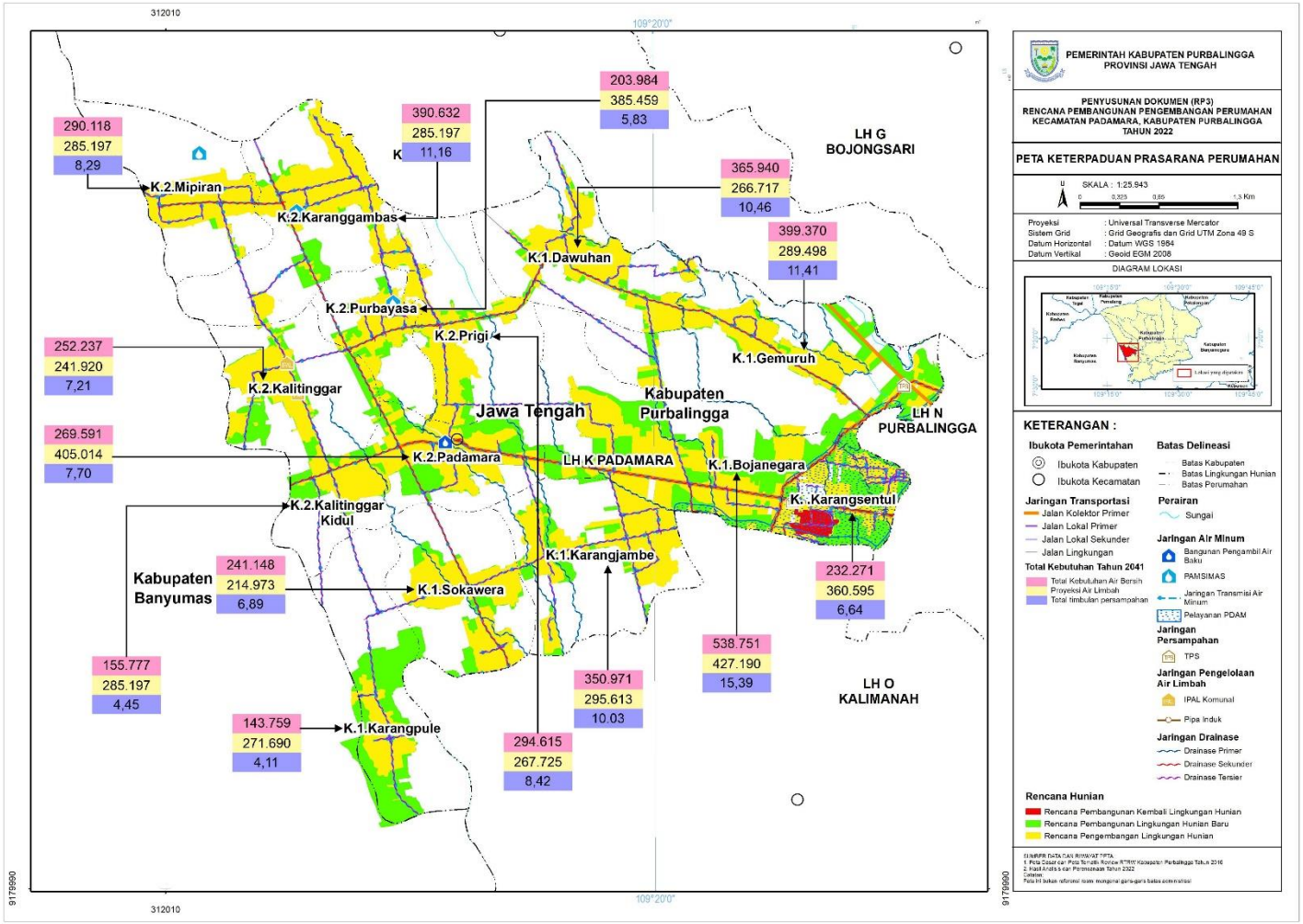
   - Pengembangan pos satuan relawan kebakaran (Satlakar)
   - Peningkatan sarana komunikasi dan data proteksi kebakaran yang handal
   - Pengadaan alat pemadam api ringan (APAR)
   - Pengadaan alat pemadam api berat (APAB)
   - Pemeliharaan berkala dan peningkatan kualitas sarana proteksi kebakaran
   - Pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan dini kebakaran

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan prasarana sistem proteksi kebakaran di lingkungan hunian Padamara direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.55.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Proteksi Kebakaran di Lingkungan Hunian Padamara

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Pengembangan pos satuan relawan kebakaran (Satlakar)	Satpol PP Kab BPBD Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Peningkatan sarana komunikasi dan data proteksi kebakaran yang handal	Satpol PP Kab BPBD Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pengadaan alat pemadam api ringan (APAR)	Kementerian BMCK Prov Satpol PP Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Pengadaan alat pemadam api berat (APAB)	Kementerian BMCK Prov Satpol PP Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
5	Pemeliharaan berkala dan peningkatan kualitas sarana proteksi kebakaran	Satpol PP Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
6	Pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan dini kebakaran	Satpol PP Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				



Gambar 7.7.
Peta Rencana Keterpaduan Prasarana Perumahan di Lingkungan Hunian Padamara

7.3.2. Rencana Pelayanan Sarana

7.3.2.1. Rencana Pelayanan Sarana Pemerintahan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana pemerintahan untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana pemerintahan sesuai standar
   - Mengembangkan sarana pemerintahan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan sarana pemerintahan di Lingkungan Hunian Padamara adalah:

   - Meningkatkan pelayanan dari sarana pemerintahan yang saat ini sudah ada
   - Menambah sarana pemerintahan sesuai jenisnya berdasarkan kebutuhan dan cakupan pelayanannya

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sarana pemerintahan untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

   - Peningkatan kualitas sarana pemerintahan
   - Pemeliharaan berkala sarana pemerintahan
   - Pembangunan sarana pemerintahan

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan sarana pemerintahan di lingkungan hunian Padamara direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.56.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Pemerintahan di Lingkungan Hunian Padamara

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana pemerintahan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana pemerintahan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana pemerintahan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.3.2.2. Rencana Pelayanan Sarana Pendidikan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana pendidikan untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana pendidikan sesuai standar
   - Mengembangkan sarana pendidikan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Purbalingga berupa sekolah tingkat SD hingga tingkat perguruan tinggi. Kebutuhan akan sarana pendidikan pasti akan selalu mengikuti perkembangan wilayahnya. Semakin banyak penduduk yang berada pada wilayah tersebut maka akan banyak juga sarana pendidikan yang dibutuhkan kedepannya. Adapun jenis sarana pendidikan yang direncanakan menurut SNI Nomor 03-1733-2004;

   - Kelompok penduduk 1.200 jiwa, disediakan Sekolah Dasar.
   - Kelompok penduduk 4.800 jiwa, disediakan SLTP.
   - Kelompok penduduk 6.000 jiwa, disediakan SMA.
   - Kelompok penduduk 70.000 jiwa, disediakan Perguruan Tinggi.

Tabel VII.57.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026					Tahun 2031					Tahun 2036					Tahun 2041				
		TK	SD	SMP	SMA	PT	TK	SD	SMP	SMA	PT	TK	SD	SMP	SMA	PT	TK	SD	SMP	SMA	PT
1	Karangpule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kalitinggar	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0
3	Sokawera	-1	0	1	0	0	-1	0	1	0	0	-1	0	1	0	0	-1	0	1	0	0
4	Padamara	-1	0	0	-1	0	-1	1	0	0	0	-1	1	0	0	0	-1	1	0	0	0
5	Karangjambe	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
6	Bojanegara	-1	3	0	0	0	-1	3	0	0	0	-1	3	0	0	0	-1	3	0	0	0
7	Karangsentul	0	0	1	0	-1	0	0	1	0	-1	0	0	1	0	-1	0	0	1	0	-1
8	Gemuruh	0	2	1	0	0	0	2	1	0	0	0	2	1	0	0	0	2	1	0	0
9	Dawuhan	-1	1	0	1	0	-1	1	0	1	0	-1	2	0	1	0	-1	2	0	1	0
10	Prigi	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0
11	Purbayasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
12	Karanggambas	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0
13	Mipiran	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	1	1	0
14	Kalitinggar Kidul	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0
Jumlah		-3	14	7	5	0	-3	15	7	5	0	-3	15	7	5	0	-3	16	7	5	0

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan sarana pendidikan tersebut, maka kebutuhan pengembangan sarana pendidikan di Lingkungan Hunian Padamara adalah:

- Meningkatkan pelayanan dari sarana pendidikan yang saat ini sudah ada
- Menambah sarana pendidikan sesuai jenisnya berdasarkan kebutuhan dan cakupan pelayanannya

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sarana pendidikan untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

- Peningkatan kualitas sarana pendidikan
- Pemeliharaan berkala sarana pendidikan
- Pembangunan sarana pendidikan

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan sarana pendidikan di lingkungan hunian Padamara direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.58.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Pendidikan di Lingkungan Hunian Padamara

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Pendidikan	Kementerian Diknas Prov DPUPR Kab Diknas Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Pendidikan	DPUPR Kab Diknas Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Pendidikan	Kementerian Diknas Prov DPUPR Kab Diknas Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.3.2.3. Rencana Pelayanan Sarana Kesehatan

1. Arahan Pengembangan

Arahan pengembangan sarana kesehatan untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

- Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana kesehatan sesuai standar
- Mengembangkan sarana kesehatan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

Sarana kesehatan yan tersedia di Kabupaten Purbalingga meliputi rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Perhitungan analisis kebutuhan sarana kesehatan mengacu pada standar sebagai berikut:

- Rumah Sakit memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 240.000 jiwa/unit.
- Puskesmas memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 120.000 jiwa/unit.
- Klinik memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 30.000 jiwa/unit.

Tabel VII.59.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026						Tahun 2031					
		Rumah Sakit	Puskesmas	Poliklinik	Puskesmas Pembantu	Praktik Dokter	Apotek	Rumah Sakit	Puskesmas	Poliklinik	Puskesmas Pembantu	Praktik Dokter	Apotek
1	Karangpule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kalitinggar	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3	Sokawera	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4	Padamara	0	-1	0	0	1	-2	0	-1	0	0	1	-2
5	Karangjambe	0	0	0	-1	1	-1	0	0	0	-1	1	-1
6	Bojanegara	0	0	-2	0	-2	-1	0	0	-2	0	-2	-1
7	Karangsentul	-1	0	0	-1	0	-1	-1	0	0	-1	0	-1
8	Gemuruh	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9	Dawuhan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10	Prigi	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11	Purbayasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Karanggambas	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	-1	1	0
13	Mipiran	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	1	-1
14	Kalitinggar Kidul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		-1	-1	-2	-1	5	-4	-1	-1	-2	-1	6	-4

Lanjutan…

No	Perumahan	Tahun 2036						Tahun 2041					
		Rumah Sakit	Puskesmas	Poliklinik	Puskesmas Pembantu	Praktik Dokter	Apotek	Rumah Sakit	Puskesmas	Poliklinik	Puskesmas Pembantu	Praktik Dokter	Apotek
1	Karangpule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Kalitinggar	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
3	Sokawera	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4	Padamara	0	-1	0	0	1	-2	0	-1	0	0	1	-2
5	Karangjambe	0	0	0	-1	1	-1	0	0	0	-1	1	-1

No	Perumahan	Tahun 2036						Tahun 2041					
		Rumah Sakit	Puskesmas	Poliklinik	Puskesmas Pembantu	Praktik Dokter	Apotek	Rumah Sakit	Puskesmas	Poliklinik	Puskesmas Pembantu	Praktik Dokter	Apotek
6	Bojanegara	0	0	-2	0	-2	-1	0	0	-2	0	-2	-1
7	Karangsentul	-1	0	0	-1	0	-1	-1	0	0	-1	0	-1
8	Gemuruh	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9	Dawuhan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
10	Prigi	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
11	Purbayasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Karanggambas	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	-1	1	0
13	Mipiran	0	0	0	0	1	-1	0	0	0	0	1	-1
14	Kalitinggar Kidul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah		-1	-1	-2	-1	6	-4	-1	-1	-2	-1	6	-4

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan sarana kesehatan tersebut, maka kebutuhan pengembangan sarana kesehatan di Lingkungan Hunian Padamara adalah :

- Meningkatkan pelayanan dari sarana kesehatan yang saat ini sudah ada
- Menambah sarana kesehatan klinik berdasarkan kebutuhan dan cakupan pelayanannya

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sarana kesehatan untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

- Peningkatan kualitas sarana kesehatan
- Pemeliharaan berkala sarana kesehatan
- Pembangunan sarana kesehatan

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan sarana kesehatan di lingkungan hunian Padamara direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.60.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Kesehatan di Lingkungan Hunian Padamara

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Kesehatan	Kementerian Dinkes Prov DPUPR Kab Dinkes Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Kesehatan	DPUPR Kab Dinkes Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Kesehatan	Kementerian Dinkes Prov DPUPR Kab Dinkes Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.3.2.4. Rencana Pelayanan Sarana Perdagangan

1. Arahan Pengembangan

Arahan pengembangan sarana perdagangan untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

- Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana perdagangan sesuai standar
- Mengembangkan sarana perdagangan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

Potensi ekonomi suatu daerah, khususnya sektor perdagangan dapat diketahui dari banyaknya pasar yang ada. Sarana perdagangan selain pasar daerah, juga dapat berupa pusat pusat perkulakan baik secara grosir maupun eceran dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan barang bagi masyarakat. Perhitungan analisis kebutuhan sarana perdagangan mengacu pada standar sebagai berikut:

- Pasar memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 30.000 jiwa/unit.
- Pertokoan memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 6.000 jiwa/unit.
- Toko/ warung memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 250 jiwa/unit.

Proyeksi kebutuhan sarana perdagangan di Lingkungan Hunian Padamara untuk 20 tahun mendatang telah mencukupi dan melayani seluruh lingkungan hunian.

Tabel VII.61.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan di Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2026-2041

No	Jenis	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Pasar	-3	-3	-3	-3
2	Pertokoan	-12	-12	-12	-12
3	Toko/ Warung	-120	-114	-111	-108

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan sarana perdagangan tersebut, maka kebutuhan pengembangan sarana perdagangan di Lingkungan Hunian Padamara adalah:

- Meningkatkan pelayanan dari sarana perdagangan yang saat ini sudah ada
- Menambah sarana perdagangan lainnya sesuai kebutuhan dan cakupan pelayanannya

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sarana perdagangan untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

- Peningkatan kualitas sarana perdagangan
- Pemeliharaan berkala sarana perdagangan
- Pembangunan sarana perdagangan

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan sarana perdagangan di lingkungan hunian Padamara direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.62.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Perdagangan di Lingkungan Hunian Padamara

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Perdagangan	Kementerian Disdag Prov DPUPR Kab Disdag Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Perdagangan	DPUPR Kab Disdag Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Perdagangan	Kementerian Disdag Prov DPUPR Kab Disdag Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.3.2.5. Rencana Pelayanan Sarana Peribadatan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana peribadatan untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana peribadatan sesuai standar
   - Mengembangkan sarana peribadatan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Sarana peribadatan yang layak dan mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitas merupakan hak setiap orang. Jenis sarana peribadatan sangat tergantung pada kondisi setempat dengan memperhatikan struktur penduduk menurut agama yang dianut, dan tata cara atau pola masyarakat setempat dalam menjalankan ibadah agamanya. Adapun jenis sarana ibadah untuk agama Islam, direncanakan menurut SNI Nomor 03-1733-2004:

   - Kelompok penduduk 250 jiwa, diperlukan musholla/langgar.
   - Kelompok penduduk 2.500 jiwa, disediakan masjid.
   - Kebutuhan gereja dan vihara adalah dengan mengikuti sistem kekerabatan atau hirarki lembaga.

Tabel VII.63.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan di Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026		Tahun 2031		Tahun 2036		Tahun 2041	
		Masjid	Musholla	Masjid	Musholla	Masjid	Musholla	Masjid	Musholla
1	Karangpule	0	0	0	1	0	1	0	1
2	Kalitinggar	0	0	0	0	0	1	0	1
3	Sokawera	-2	6	-2	6	-2	6	-2	6
4	Padamara	-2	1	-2	1	-2	2	-2	2
5	Karangjambe	0	9	0	9	0	10	0	10
6	Bojanegara	0	14	0	14	0	14	0	14
7	Karangsentul	-3	3	-3	3	-3	3	-3	3
8	Gemuruh	0	7	0	8	0	9	0	9
9	Dawuhan	-2	10	-2	11	-2	11	-2	11
10	Prigi	0	7	0	7	0	8	0	8
11	Purbayasa	-1	2	-1	2	-1	3	-1	3
12	Karanggambas	-1	4	-1	5	-1	5	-1	6
13	Mipiran	-1	6	-1	7	-1	7	-1	7
14	Kalitinggar Kidul	0	1	0	1	0	1	0	1
Jumlah		-13	70	-13	76	-13	79	-12	82

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan sarana peribadatan tersebut, maka kebutuhan pengembangan sarana peribadatan di Lingkungan Hunian Padamara adalah:

- Meningkatkan pelayanan dari sarana peribadatan yang saat ini sudah ada
- Menambah sarana peribadatan musholla sesuai kebutuhan dan proyeksi jumlah penduduk
- Menambah sarana peribadatan lainnya mengikuti sistem kekerabatan atau hirarki lembaga

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sarana peribadatan untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

- Peningkatan kualitas sarana peribadatan
- Pemeliharaan berkala sarana peribadatan
- Pembangunan sarana peribadatan

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan sarana peribadatan di lingkungan hunian Padamara direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.64.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Peribadatan di Lingkungan Hunian Padamara

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Peribadatan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Peribadatan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Peribadatan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.3.2.6. Rencana Pelayanan Sarana Budaya dan Rekreasi

1. Arahan Pengembangan

Arahan pengembangan sarana budaya dan rekreasi untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

- Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana budaya dan rekreasi sesuai standar
- Mengembangkan sarana budaya dan rekreasi sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan sarana budaya dan rekreasi di Lingkungan Hunian Padamara adalah:

   - Meningkatkan pelayanan dari sarana budaya dan rekreasi yang saat ini sudah ada
   - Menambah sarana budaya dan rekreasi sesuai jenisnya dengan mendasarkan pada kebutuhan dan proyeksi jumlah penduduk

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sarana budaya dan rekreasi untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

   - Peningkatan kualitas sarana budaya dan rekreasi
   - Pemeliharaan berkala sarana budaya dan rekreasi
   - Pembangunan sarana budaya dan rekreasi

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan sarana budaya dan rekreasi di lingkungan hunian Padamara direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.65.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Budaya dan Rekreasi di Lingkungan Hunian Padamara

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Budaya dan Rekreasi	DPUPR Kab Dispar Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Budaya dan Rekreasi	DPUPR Kab Dispar Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Budaya dan Rekreasi	DPUPR Kab Dispar Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.3.2.7. Rencana Pelayanan Sarana Ruang Terbuka Hijau

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana ruang terbuka hijau untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana ruang terbuka hijau sesuai standar
   - Mengembangkan sarana ruang terbuka hijau sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menetapkan bahwa proporsi RTH pada wilayah perkotaan minimal 30% dari luas kota. Sedangkan, luas RTH di lingkungan hunian Padamara belum memenuhi jumlah yang ditentukan sebesar 30% dari total luas wilayah.

   Kebutuhan pengembangan sarana ruang terbuka hijau di Lingkungan Hunian Padamara adalah:

   - Melakukan pendataan ulang yang lebih rinci untuk keberadaan sarana ruang terbuka hijau
   - Meningkatkan pelayanan dari sarana ruang terbuka hijau yang saat ini sudah ada
   - Menambah sarana ruang terbuka hijau sesuai kebutuhan jenis RTH berdasarkan cakupan pelayanan dan proyeksi jumlah penduduk

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sarana ruang terbuka hijau untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

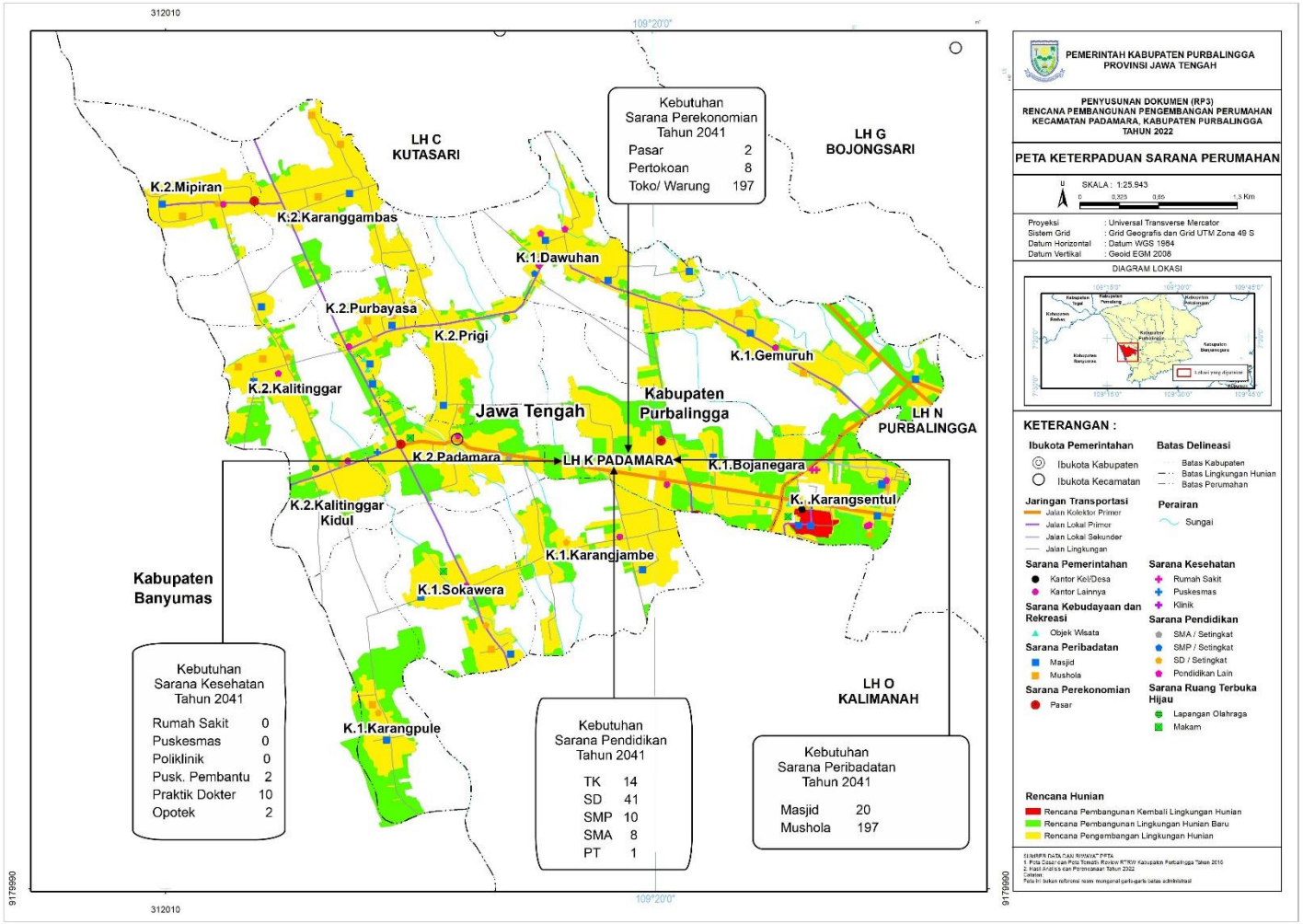
   - Peningkatan kualitas sarana ruang terbuka hijau
   - Pemeliharaan berkala sarana ruang terbuka hijau
   - Pembangunan sarana ruang terbuka hijau

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan sarana ruang terbuka hijau di lingkungan hunian Padamara direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.66.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan Hunian Padamara

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana RTH	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana RTH	DPUPR Kab DLH Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana RTH	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				



Gambar 7.8.
Peta Rencana Keterpaduan Sarana Perumahan di Lingkungan Hunian Padamara

7.3.3. Rencana Pelayanan Utilitas

7.3.3.1. Rencana Pelayanan Jaringan Listrik

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan jaringan listrik untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

   - Memantapkan sistem dan fungsi jaringan listrik
   - Meningkatkan kualitas jaringan listrik
   - Meningkatkan akses dan cakupan pelayanan listrik
   - Mengembangkan sumber energi listrik terbarukan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Selain itu, ketersediaan jaringan listrik eksisting perlu adanya penambahan kebutuhan listrik domestik dan non domestik agar menciptakan keterpaduan antar hirarki jaringan listrik. Kebutuhan listrik domestik ini untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sedangkan, kebutuhan listrik non domestik berupa industri, fasilitas umum, penerangan jalan, dan cadangan. Proyeksi kebutuhan listrik di lingkungan hunian Padamara menggunakan asumsi sesuai standar yang ditetapkan, yaitu:

   - 1 rumah tangga memerlukan listrik sebesar 900 KVA
   - Industri: 25 % dari kebutuhan domestik
   - Fasilitas Sosial: 25 % dari kebutuhan domestik
   - Penerangan Jalan: 40 % dari kebutuhan domestik
   - Cadangan: 10 % dari kebutuhan domestik

Tabel VII.67.
Proyeksi Kebutuhan Listrik Lingkungan Hunian Padamara Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Karangpule	928.510	976.090	1.005.503	1.026.849
2	Kalitinggar	1.647.233	1.721.966	1.768.164	1.801.691
3	Sokawera	1.583.607	1.650.801	1.692.338	1.722.484
4	Padamara	1.796.869	1.859.179	1.897.697	1.925.651
5	Karangjambe	2.442.243	2.473.542	2.492.890	2.506.932
6	Bojanegara	3.833.631	3.840.692	3.845.056	3.848.224
7	Karangsentul	1.611.348	1.634.443	1.648.719	1.659.080
8	Gemuruh	2.581.732	2.712.810	2.793.838	2.852.644
9	Dawuhan	2.422.907	2.515.297	2.572.409	2.613.858
10	Prigi	1.928.676	2.013.694	2.066.249	2.104.391
11	Purbayasa	1.364.254	1.409.143	1.436.892	1.457.031
12	Karanggambas	2.595.686	2.689.814	2.748.001	2.790.230
13	Mipiran	1.995.269	2.032.524	2.055.554	2.072.269
14	Kalitinggar Kidul	1.043.787	1.077.125	1.097.733	1.112.689
Jumlah		27.775.751	28.607.119	29.121.043	29.494.023

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan utilitas jaringan listrik tersebut, maka kebutuhan pengembangan utilitas jaringan listrik di Lingkungan Hunian Padamara adalah:

- Meningkatkan pelayanan jaringan listrik yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan jaringan listrik sesuai kebutuhan
- Mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan

3. Program Pengembangan

Program pengembangan jaringan listrik untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

- Peningkatan jaringan dan sarana prasarana pendukung
- Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala
- Pembangunan jaringan distribusi baru
- Fasilitasi pengembangan panel surya di fasilitas umum dan sosial

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan jaringan listrik di lingkungan hunian Padamara direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.68.
Skenario Pentahapan Pembangunan Jaringan Listrik di Lingkungan Hunian Padamara

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan jaringan dan sarana prasarana pendukung	DPUPR Kab PLN	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala	DPUPR Kab PLN	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan jaringan distribusi baru	DPUPR Kab PLN	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.3.3.2. Rencana Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

1. Arahan Pengembangan

Arahan pengembangan jaringan telekomunikasi untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

- Mengembangkan jaringan tetap telekomunikasi
- Mengembangkan jaringan bergerak seluler

2. Kebutuhan Pengembangan

Kebutuhan pengembangan utilitas jaringan telekomunikasi di Lingkungan Hunian Padamara adalah:

- Meningkatkan pelayanan jaringan telekomunikasi yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi tetap dan bergerak seluler

3. Program Pengembangan

Program pengembangan jaringan telekomunikasi untuk Lingkungan Hunian Padamara adalah:

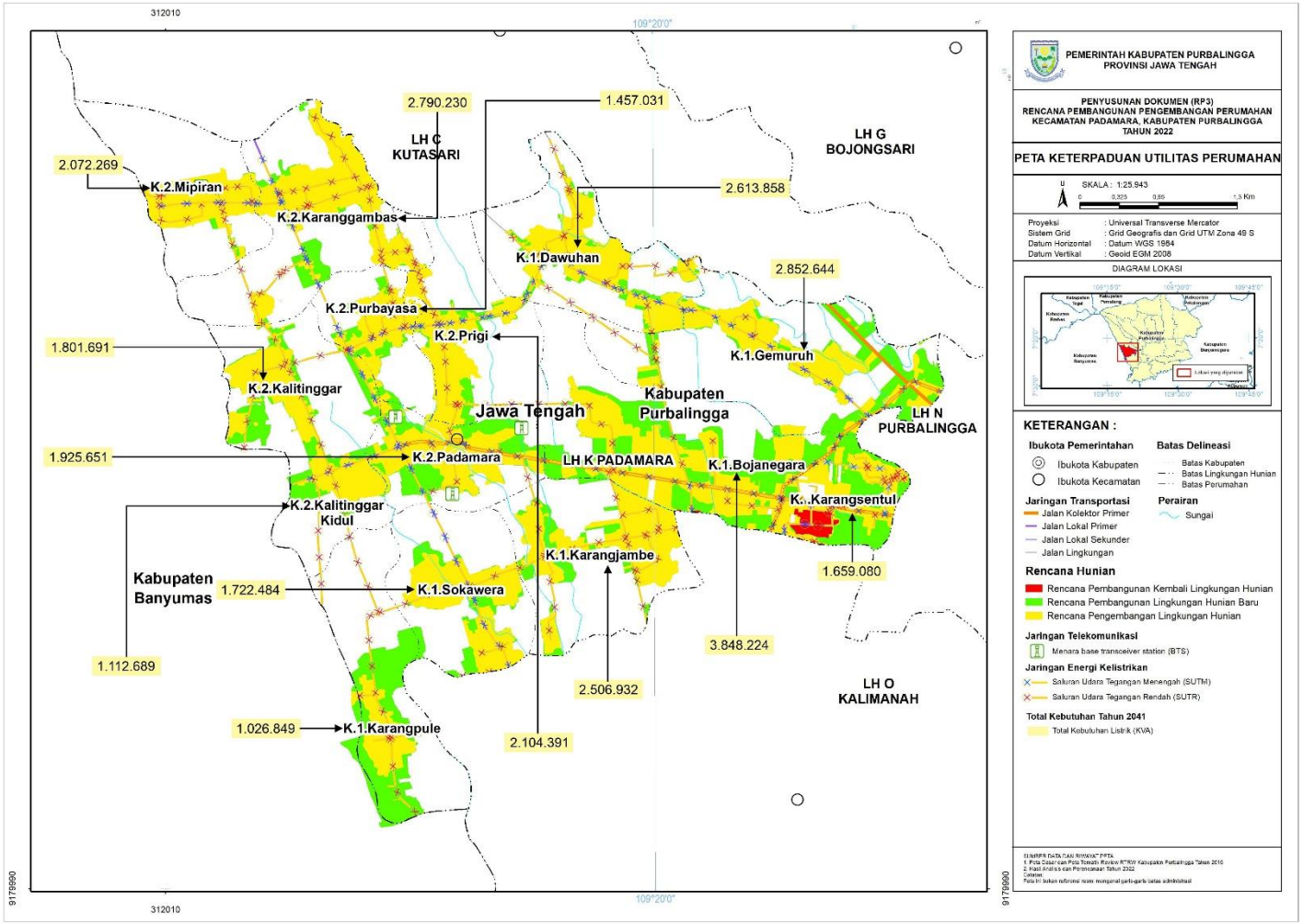
- Peningkatan kualitas jaringan
- Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala
- Pengembangan cakupan pelayanan jaringan fiber optic
- Peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan tetap telekomunikasi
- Pengaturan pelayanan menara bersama seluler
- Pengembangan cakupan pelayanan jaringan bergerak seluler
- Peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan bergerak seluler

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan jaringan telekomunikasi di lingkungan hunian Padamara direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.69.
Skenario Pentahapan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi di Lingkungan Hunian Padamara

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas jaringan	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pengembangan cakupan pelayanan jaringan fiber optik	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan tetap telekomunikasi	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
5	Pengaturan pelayanan menara bersama seluler	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
6	Pengembangan cakupan pelayanan jaringan bergerak seluler	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
7	Peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan bergerak seluler	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				



Gambar 7.9.
Peta Rencana Keterpaduan Utilitas Perumahan di Lingkungan Hunian Padamara

7.4. Lingkungan Hunian Bojongsari

7.4.1. Rencana Pelayanan Prasarana

7.4.1.1. Rencana Pelayanan Jaringan Jalan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan jaringan jalan untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Memantapkan sistem dan fungsi jaringan jalan
   - Meningkatkan kualitas jaringan jalan
   - Meningkatkan akses dan konektivitas antar permukiman
   - Menyediakan sarana angkutan umum
   - Menyediakan terminal dan halte yang memadai
   - Menyediakan ruang pejalan kaki yang ramah difabel

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan prasarana jaringan jalan di Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Meningkatkan sistem jaringan jalan yang saat ini sudah ada
   - Mengembangkan sistem jaringan jalan sesuai persyaratan teknis
   - Mengembangkan jalur pejalan kaki

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan jaringan jalan untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Peningkatan jalan kolektor, lokal, dan lingkungan
   - Pembangunan jaringan jalan baru
   - Pemeliharaan dan perbaikan jalan secara berkala
   - Peningkatan pelayanan angkutan umum
   - Pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan terminal dan halte
   - Peningkatan dan pembangunan jalur pejalan kaki (pedestrian) di pusat-pusat pelayanan

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan prasarana jaringan jalan di lingkungan hunian Bojongsari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.70.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Jaringan Jalan di Lingkungan Hunian Bojongsari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan jalan kolektor, lokal, dan lingkungan	BMCK Prov DPUPR Kab	APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan dan perbaikan jalan secara berkala	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan jaringan jalan baru	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Peningkatan pelayanan angkutan umum	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
5	Pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan terminal dan halte	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
6	Peningkatan dan pembangunan jalur pejalan kaki (pedestrian) di pusat-pusat pelayanan	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
7	pembangunan jalur atau lajur pesepeda sesuai dimensi jalan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.4.1.2. Rencana Pelayanan Jaringan Drainase

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan jaringan drainase untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Memantapkan sistem dan fungsi jaringan drainase
   - Meningkatkan kualitas jaringan drainase
   - Meningkatkan cakupan pelayanan drainase

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan prasarana jaringan drainase di Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Meningkatkan sistem jaringan drainase yang saat ini sudah ada
   - Mengembangkan sistem jaringan drainase sesuai persyaratan teknis

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan jaringan drainase untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Peningkatan sistem jaringan drainase terintegrasi
   - Pemeliharaan berkala dan perbaikan/peningkatan konstruksi jaringan drainase
   - Pembangunan jaringan drainase baru

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan prasarana jaringan drainase di lingkungan hunian Bojongari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.71.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Jaringan Drainase di Lingkungan Hunian Bojongsari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan sistem jaringan drainase terintegrasi	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala dan perbaikan/peningkatan konstruksi jaringan drainase	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan jaringan drainase baru	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.4.1.3. Rencana Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sistem penyediaan air minum untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Meningkatkan kualitas SPAM Non Perpipaan
   - Mengembangkan sistem pemanenan air hujan sebagai sumber air baku alternatif
   - Meningkatkan unit air produksi dan distribusi berupa Instalasi Pengolah Air (IPA) pada SPAM IKK
   - Meningkatkan fasilitas penampungan air minum
   - Meningkatkan kualitas jaringan perpipaan PDAM
   - Mengembangkan jaringan perpipaan non PDAM berbasis masyarakat

2. Kebutuhan Pengembangan

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan jaringan prasarana di lingkungan hunian Bojongsari, yang berupa kebutuhan air bersih. Oleh karena itu diperlukan proyeksi kebutuhan jaringan prasarana di masa yang akan datang untuk melakukan perencanaan terkait jaringan prasarana yang efisien.

Air bersih sebagai kebutuhan primer digunakan oleh penduduk lingkungan hunian Bojongsari dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan air minum di lingkungan hunian Bojongsari disalurkan oleh PDAM dan non PDAM yang mengalami peningkatan jumlah air setiap tahunnya. Proyeksi kebutuhan air bersih di lingkungan hunian Bojongsari menggunakan asumsi yang bersumber dari Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dengan standar yang ditetapkan oleh Kepmen Kimpraswil No.327/KPTS/M/2002, yaitu sebagai berikut:

- 1 orang penduduk menggunakan air bersih sebesar 60 liter/jiwa/hari
- Industri: 10 % dari kebutuhan domestik
- Fasilitas Sosial: 5 % dari kebutuhan domestik
- Fasilitas Hidran Umum: 5 % dari kebutuhan domestik
- Tingkat Kebocoran: 20 % dari kebutuhan domestik

Tabel VII.72.
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Limngkungan Hunian Bojongsari Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Brobot	339.560	347.697	352.728	356.379
2	Gembong	308.653	315.451	319.653	322.703
3	Galuh	265.128	272.408	276.908	280.174
4	Banjaran	507.636	523.023	532.535	539.438
5	Patemon	369.869	386.114	396.157	403.445
6	Bojongsari	531.599	545.081	553.416	559.464
7	Kajongan	455.400	467.105	474.341	479.593
8	Karangbanjar	371.203	378.068	382.312	385.391
9	Beji	335.469	345.983	352.482	357.199
10	Pagedangan	333.145	339.934	344.131	347.177
11	Pekalongan	480.983	495.128	503.872	510.218
12	Matenggeng	362.361	371.725	377.513	381.714
13	Bumisari	659.428	677.425	688.550	696.624
Jumlah		5.320.433	5.465.143	5.554.598	5.619.520

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan prasarana sistem penyediaan air minum tersebut, maka kebutuhan pengembangan prasarana sistem penyediaan air minum di Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

- Meningkatkan pelayanan sistem penyediaan air minum yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan sistem penyediaan air minum yang layak dan aman

- Mengembangkan cakupan pelayanan penyediaan air minum

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sistem penyediaan air minum untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

- Sosialisasi pola hidup bersih sehat (PHBS) dan standar teknis sumur dangkal
- Pembangunan sarana dan prasarana pendukung Pemanenan Air Hujan (PAH)
- Peningkatan kapasitas produksi air minum
- Peningkatan dan pemeliharaan berkala bak penampung air minum
- Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala
- Pembangunan jaringan distribusi baru dan penambahan sambungan rumah (SR)
- Peningkatan pelayanan air minum
- Pengembangan jaringan perpipaan perdesaan

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan prasarana sistem penyediaan air minum di lingkungan hunian Bojongsari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.73.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Penyediaan Air Minum di Lingkungan Hunian Bojongsari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Sosialisasi pola hidup bersih sehat (PHBS) dan standar teknis sumur dangkal	Disperkim Kab Dinkes Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung Pemanenan Air Hujan (PAH)	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Peningkatan kapasitas produksi air minum	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Peningkatan dan pemeliharaan berkala bak penampung air minum	Disperkim Kab DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
5	Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala	Disperkim Kab DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
6	Pembangunan jaringan distribusi baru dan penambahan sambungan rumah (SR)	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
7	Peningkatan pelayanan air minum	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
8	Pengembangan jaringan perpipaan perdesaan	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.4.1.4. Rencana Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sistem pengelolaan air limbah untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Meningkatkan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik setempat sesuai persyaratan teknis
   - Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik terpusat skala lingkungan
   - Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah layak dan aman

2. Kebutuhan Pengembangan

   Dari adanya sistem pengolahan air limbah domestik yang belum memadai dan terpadu, diperlukan kebutuhan sistem pengolahan air limbah domestik di lingkungan hunian Bojongsari. Air limbah yang dihasilkan di lingkungan hunian Bojongsari semakin bertambah. Hal tersebut maka diperlukan sarana pengelolaan air limbah yang terpadu dan tidak mencemari lingkungan. Proyeksi air limbah di lingkungan hunian Bojongsari menggunakan asumsi sebesar 80% dari proyeksi kebutuhan air bersih.

Tabel VII.74.
Proyeksi Air Limbah Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Brobot	271.648	278.158	282.182	285.103
2	Gembong	246.922	252.361	255.723	258.163
3	Galuh	212.102	217.926	221.526	224.139
4	Banjaran	406.109	418.419	426.028	431.551
5	Patemon	295.895	308.891	316.925	322.756
6	Bojongsari	425.279	436.065	442.733	447.571
7	Kajongan	364.320	373.684	379.473	383.674
8	Karangbanjar	296.962	302.454	305.849	308.313
9	Beji	268.375	276.786	281.985	285.759

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
10	Pagedangan	266.516	271.947	275.305	277.741
11	Pekalongan	384.786	396.103	403.098	408.175
12	Matenggeng	289.889	297.380	302.011	305.371
13	Bumisari	527.542	541.940	550.840	557.300
Jumlah		4.256.346	4.372.114	4.443.679	4.495.616

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan prasarana pengelolaan air limbah tersebut, maka kebutuhan pengembangan prasarana pengelolaan air limbah di Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

- Meningkatkan pelayanan pengelolaan air limbah yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik yang layak dan aman
- Mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah sesuai persyaratan teknis

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sistem pengelolaan air limbah untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Peningkatan SPAL Domestik setempat layak dan aman
   - Pembangunan SPAL Domestik terpusat skala lingkungan
   - Peningkatan sarana dan prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan prasarana sistem pengelolaan air limbah di lingkungan hunian Bojongtsari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.75.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah di Lingkungan Hunian Bojongsari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan SPAL Domestik setempat layak dan aman	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Peningkatan sarana dan prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.4.1.5. Rencana Pelayanan Sistem Pengolahan Persampahan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sistem pengolahan persampahan untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Memantapkan sistem pengelolaan persampahan sesuai persyaratan teknis
   - Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis
   - Mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat

2. Kebutuhan Pengembangan

   Pada umumnya jaringan persampahan di lingkungan hunian Bojongsari sudah memadai dan melayani setiap penduduk. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase, tegalan, maupun di sungai. Sehingga, diperlukan proyeksi timbulan sampah berdasarkan perhitungan SNI, yaitu sebagai berikut:

   - Sampah domestik diasumsikan 2 liter/jiwa/hari atau 0,002 m3/jiwa/hari
   - Sampah non domestik diasumsikan 20% dari sampah domestik

Tabel VII.76.
Proyeksi Timbulan Sampah Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Brobot	9,70	9,93	10,08	10,18
2	Gembong	8,82	9,01	9,13	9,22
3	Galuh	7,58	7,78	7,91	8,00
4	Banjaran	14,50	14,94	15,22	15,41
5	Patemon	10,57	11,03	11,32	11,53
6	Bojongsari	15,19	15,57	15,81	15,98
7	Kajongan	13,01	13,35	13,55	13,70
8	Karangbanjar	10,61	10,80	10,92	11,01
9	Beji	9,58	9,89	10,07	10,21
10	Pagedangan	9,52	9,71	9,83	9,92
11	Pekalongan	13,74	14,15	14,40	14,58
12	Matenggeng	10,35	10,62	10,79	10,91
13	Bumisari	18,84	19,36	19,67	19,90

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan prasarana pengolahan sampah tersebut, maka kebutuhan pengembangan prasarana pengolahan sampah di Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

- Meningkatkan pelayanan pengolahan sampah yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan sistem pengolahan sampah ramah lingkungan
- Mengembangkan sarana dan prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis
- Mengembangkan pengolahan sampah berbasis masyarakat

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sistem pengolahan persampahan untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Peningkatan keterpaduan sistem pewadahan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah
   - Pengembangan pewadahan sampah terpilah
   - Pembangunan TPS dan TPS3R di skala lingkungan
   - Pengembangan sarana pengangkut sampah sesuai persyaratan teknis
   - Pengembangan bank sampah

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan prasarana sistem pengelolaan persampahan di lingkungan hunian Bojongsari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.77.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Hunian Bojongsari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan keterpaduan sistem pewadahan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pengembangan pewadahan sampah terpilah	Disperkim Kab DLH Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan TPS dan TPS3R di skala lingkungan	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Pengembangan sarana pengangkut sampah sesuai persyaratan teknis	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
5	Pengembangan bank sampah	Disperkim Kab DLH Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.4.1.6. Rencana Pelayanan Sistem Proteksi Kebakaran

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sistem proteksi kebakaran untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Mengembangkan prasarana proteksi kebakaran sesuai persyaratan teknis
   - Mengembangkan sarana proteksi kebakaran sesuai persyaratan teknis

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan prasarana proteksi kebakaran di Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Mengembangkan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
   - Meningkatkan pelayanan proteksi kebakaran yang saat ini sudah ada
   - Melakukan pencegahan dan penanganan dini kebakaran melalui pemberdayaan masyarakat

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sistem proteksi kebakaran untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Pengembangan pos satuan relawan kebakaran (Satlakar)
   - Peningkatan sarana komunikasi dan data proteksi kebakaran yang handal
   - Pengadaan alat pemadam api ringan (APAR)
   - Pengadaan alat pemadam api berat (APAB)
   - Pemeliharaan berkala dan peningkatan kualitas sarana proteksi kebakaran
   - Pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan dini kebakaran

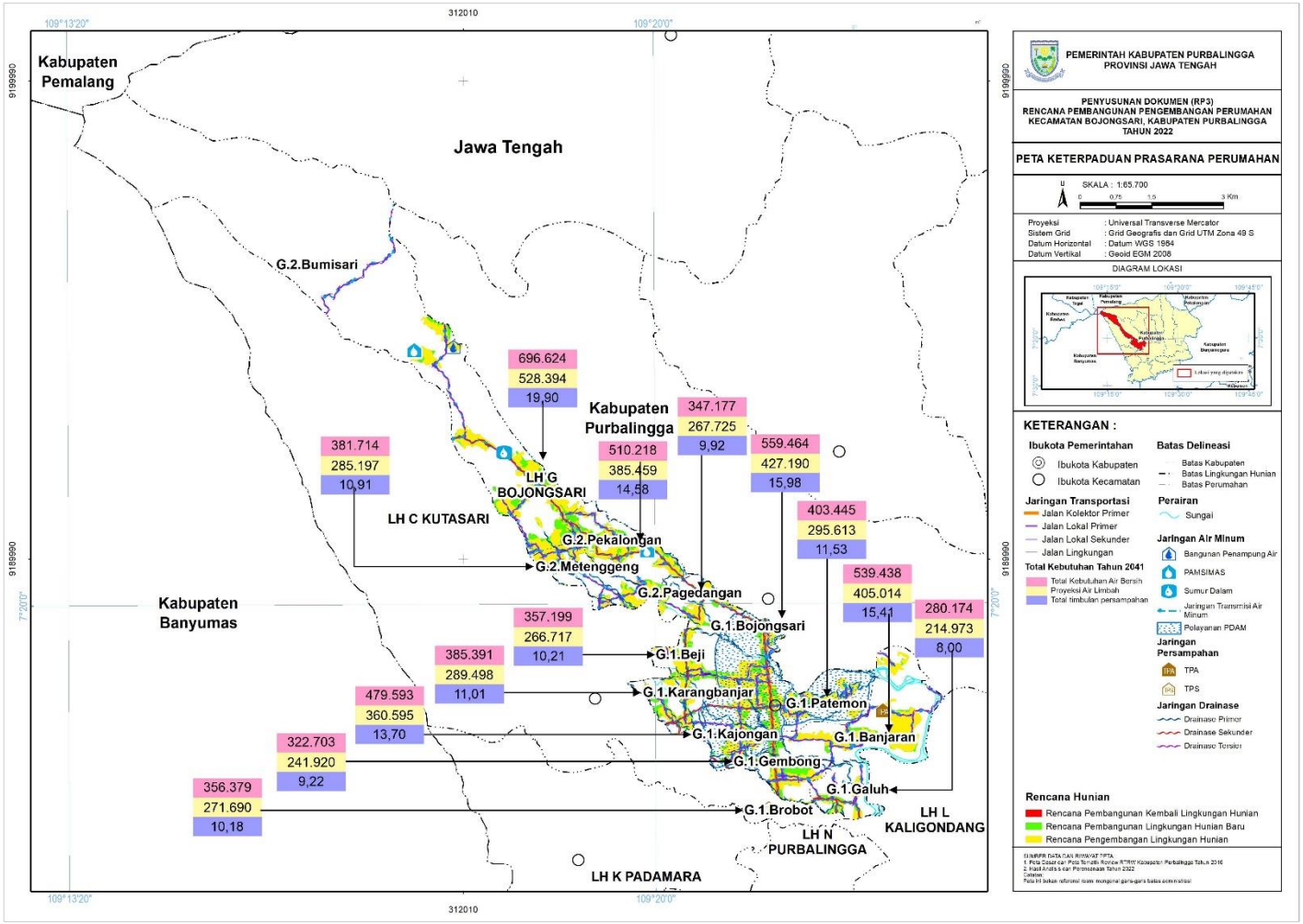
4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan prasarana sistem proteksi kebakaran di lingkungan hunian Bojongsari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.78.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Proteksi Kebakaran di Lingkungan Hunian Bojongsari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Pengembangan pos satuan relawan kebakaran (Satlakar)	Satpol PP Kab BPBD Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Peningkatan sarana komunikasi dan data proteksi kebakaran yang handal	Satpol PP Kab BPBD Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
3	Pengadaan alat pemadam api ringan (APAR)	Kementerian BMCK Prov Satpol PP Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Pengadaan alat pemadam api berat (APAB)	Kementerian BMCK Prov Satpol PP Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
5	Pemeliharaan berkala dan peningkatan kualitas sarana proteksi kebakaran	Satpol PP Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
6	Pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan dini kebakaran	Satpol PP Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				



Gambar 7.10.
Peta Rencana Keterpaduan Prasarana Perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari

7.4.2. Rencana Pelayanan Sarana

7.4.2.1. Rencana Pelayanan Sarana Pemerintahan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana pemerintahan untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana pemerintahan sesuai standar
   - Mengembangkan sarana pemerintahan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   kebutuhan pengembangan sarana pemerintahan di Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Meningkatkan pelayanan dari sarana pemerintahan yang saat ini sudah ada
   - Menambah sarana pemerintahan sesuai jenisnya berdasarkan kebutuhan dan cakupan pelayanannya

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sarana pemerintahan untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Peningkatan kualitas sarana pemerintahan
   - Pemeliharaan berkala sarana pemerintahan
   - Pembangunan sarana pemerintahan

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan sarana pemerintahan di lingkungan hunian Bojongsari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.79.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Pemerintahan di Lingkungan Hunian Bojongsari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana pemerintahan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana pemerintahan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
	Pembangunan sarana pemerintahan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.4.2.2. Rencana Pelayanan Sarana Pendidikan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana pendidikan untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana pendidikan sesuai standar
   - Mengembangkan sarana pendidikan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Purbalingga berupa sekolah tingkat SD hingga tingkat perguruan tinggi. Kebutuhan akan sarana pendidikan pasti akan selalu mengikuti perkembangan wilayahnya. Semakin banyak penduduk yang berada pada wilayah tersebut maka akan banyak juga sarana pendidikan yang dibutuhkan kedepannya. Adapun jenis sarana pendidikan yang direncanakan menurut SNI Nomor 03-1733-2004;

   - Kelompok penduduk 1.200 jiwa, disediakan Sekolah Dasar.
   - Kelompok penduduk 4.800 jiwa, disediakan SLTP.
   - Kelompok penduduk 6.000 jiwa, disediakan SMA.
   - Kelompok penduduk 70.000 jiwa, disediakan Perguruan Tinggi.

Tabel VII.80.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026				Tahun 2031				Tahun 2036				Tahun 2041			
		TK	SD	SMP	SMA	TK	SD	SMP	SMA	TK	SD	SMP	SMA	TK	SD	SMP	SMA
1	Brobot	-1	1	1	1	-1	1	1	1	-1	1	1	1	-1	2	1	1
2	Gembong	-1	1	0	1	-1	1	0	1	-1	1	0	1	-1	1	0	1
3	Galuh	-1	2	1	1	-1	2	1	1	-1	2	1	1	-1	2	1	1
4	Banjaran	-2	1	1	1	-2	1	1	1	-2	1	1	1	-2	1	1	1
5	Patemon	0	2	1	1	0	2	1	1	0	2	1	1	0	2	1	1
6	Bojongsari	0	2	-1	0	0	2	-1	0	0	2	-1	0	0	3	-1	0
7	Kajongan	-2	2	1	1	-2	2	1	1	-2	2	1	1	-2	2	1	1
8	Karangbanjar	0	3	1	1	0	3	1	1	0	3	1	1	0	3	1	1
9	Beji	-1	1	0	-1	-1	1	0	-1	-1	1	0	-1	-1	2	0	-1
10	Pagedangan	-1	0	1	1	-1	0	1	1	-1	0	1	1	-1	0	1	1
11	Pekalongan	-1	2	1	1	-1	2	1	1	-1	2	1	1	-1	2	1	1
12	Matenggeng	-1	1	0	1	-1	1	0	1	-1	1	0	1	-1	1	0	1
13	Bumisari	0	3	2	1	0	3	2	1	0	3	2	1	0	3	2	1
Jumlah		-11	20	8	8	-11	21	9	8	-11	22	9	8	-11	23	9	8

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan sarana pendidikan tersebut, maka kebutuhan pengembangan sarana pendidikan di Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

- Meningkatkan pelayanan dari sarana pendidikan yang saat ini sudah ada
- Menambah sarana pendidikan sesuai jenisnya berdasarkan kebutuhan dan cakupan pelayanannya

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sarana pendidikan untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

- Peningkatan kualitas sarana pendidikan
- Pemeliharaan berkala sarana pendidikan
- Pembangunan sarana pendidikan

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan sarana pendidikan di lingkungan hunian Bojongsari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.81.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Pendidikan di Lingkungan Hunian Bojongsari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Pendidikan	Kementerian Diknas Prov DPUPR Kab Diknas Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Pendidikan	DPUPR Kab Diknas Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Pendidikan	Kementerian Diknas Prov DPUPR Kab Diknas Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.4.2.3. Rencana Pelayanan Sarana Kesehatan

1. Arahan Pengembangan

Arahan pengembangan sarana kesehatan untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

- Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana kesehatan sesuai standar
- Mengembangkan sarana kesehatan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

Sarana kesehatan yan tersedia di Kabupaten Purbalingga meliputi rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Perhitungan analisis kebutuhan sarana kesehatan mengacu pada standar sebagai berikut:

- Rumah Sakit memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 240.000 jiwa/unit.
- Puskesmas memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 120.000 jiwa/unit.
- Klinik memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 30.000 jiwa/unit.

Tabel VII.82.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026				Tahun 2031			
		Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Praktik Dokter	Apotek	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Praktik Dokter	Apotek
1	Brobot	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gembong	0	0	-1	0	0	0	-1	0
3	Galuh	0	0	1	0	0	0	1	0
4	Banjaran	0	-1	1	0	0	-1	1	0
5	Patemon	0	0	1	0	0	0	1	0
6	Bojongsari	-1	0	-1	-3	-1	0	-1	-3
7	Kajongan	0	0	1	0	0	0	1	0
8	Karangbanjar	0	-1	1	0	0	-1	1	0
9	Beji	0	0	1	0	0	0	1	0
10	Pagedangan	0	0	1	0	0	0	1	0
11	Pekalongan	0	-1	1	0	0	-1	1	0
12	Matenggeng	0	0	1	0	0	0	1	0
13	Bumisari	0	0	2	0	0	0	2	0
Jumlah		0	-1	8	-1	0	-1	8	-1

Lanjutan…

No	Perumahan	Tahun 2036				Tahun 2041			
		Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Praktik Dokter	Apotek	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Praktik Dokter	Apotek
1	Brobot	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Gembong	0	0	-1	0	0	0	-1	0
3	Galuh	0	0	1	0	0	0	1	0
4	Banjaran	0	-1	1	0	0	-1	1	0
5	Patemon	0	0	1	0	0	0	1	0
6	Bojongsari	-1	0	-1	-3	-1	0	-1	-3
7	Kajongan	0	0	1	0	0	0	1	0

No	Perumahan	Tahun 2036				Tahun 2041			
		Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Praktik Dokter	Apotek	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Praktik Dokter	Apotek
8	Karangbanjar	0	-1	1	0	0	-1	1	0
9	Beji	0	0	1	0	0	0	1	0
10	Pagedangan	0	0	1	0	0	0	1	0
11	Pekalongan	0	-1	1	0	0	-1	1	0
12	Matenggeng	0	0	1	0	0	0	1	0
13	Bumisari	0	0	2	0	0	0	2	0
Jumlah		0	-1	8	-1	0	-1	8	-1

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan sarana kesehatan tersebut, maka kebutuhan pengembangan sarana kesehatan di Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

- Meningkatkan pelayanan dari sarana kesehatan yang saat ini sudah ada
- Menambah sarana kesehatan klinik berdasarkan kebutuhan dan cakupan pelayanannya

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sarana kesehatan untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Peningkatan kualitas sarana kesehatan
   - Pemeliharaan berkala sarana kesehatan
   - Pembangunan sarana kesehatan

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan sarana kesehatan di lingkungan hunian Bojongsari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.83.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Kesehatan di Lingkungan Hunian Bojongsari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Kesehatan	Kementerian Dinkes Prov DPUPR Kab Dinkes Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Kesehatan	DPUPR Kab Dinkes Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Kesehatan	Kementerian Dinkes Prov DPUPR Kab Dinkes Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.4.2.4. Rencana Pelayanan Sarana Perdagangan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana perdagangan untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana perdagangan sesuai standar
   - Mengembangkan sarana perdagangan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

Potensi ekonomi suatu daerah, khususnya sektor perdagangan dapat diketahui dari banyaknya pasar yang ada. Sarana perdagangan selain pasar daerah, juga dapat berupa pusat pusat perkulakan baik secara grosir maupun eceran dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan barang bagi masyarakat. Perhitungan analisis kebutuhan sarana perdagangan mengacu pada standar sebagai berikut:

- Pasar memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 30.000 jiwa/unit.
- Pertokoan memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 6.000 jiwa/unit.
- Toko/ warung memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 250 jiwa/unit.

Proyeksi kebutuhan sarana perdagangan di Lingkungan Hunian Bojongsari untuk 20 tahun mendatang telah mencukupi dan melayani seluruh lingkungan hunian.

Tabel VII.84.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan di Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2026-2041

No	Jenis	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Pasar	-1	-1	-1	-1
2	Pertokoan	-1	-1	-1	-1
3	Toko/ Warung	-353	-346	-341	-338

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan sarana perdagangan tersebut, maka kebutuhan pengembangan sarana perdagangan di Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

- Meningkatkan pelayanan dari sarana perdagangan yang saat ini sudah ada
- Menambah sarana perdagangan lainnya sesuai kebutuhan dan cakupan pelayanannya

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sarana perdagangan untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

- Peningkatan kualitas sarana perdagangan
- Pemeliharaan berkala sarana perdagangan
- Pembangunan sarana perdagangan

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan sarana perdagangan di lingkungan hunian Bojongsari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.85.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Perdagangan di Lingkungan Hunian Bojongsari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Perdagangan	Kementerian Disdag Prov DPUPR Kab Disdag Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Perdagangan	DPUPR Kab Disdag Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Perdagangan	Kementerian Disdag Prov DPUPR Kab Disdag Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.4.2.5. Rencana Pelayanan Sarana Peribadatan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana peribadatan untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana peribadatan sesuai standar
   - Mengembangkan sarana peribadatan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Sarana peribadatan yang layak dan mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitas merupakan hak setiap orang. Jenis sarana peribadatan sangat tergantung pada kondisi setempat dengan memperhatikan struktur penduduk menurut agama yang dianut, dan tata cara atau pola masyarakat setempat dalam menjalankan ibadah agamanya. Adapun jenis sarana ibadah untuk agama Islam, direncanakan menurut SNI Nomor 03-1733-2004:

   - Kelompok penduduk 250 jiwa, diperlukan musholla/langgar.
   - Kelompok penduduk 2.500 jiwa, disediakan masjid.
   - Kebutuhan gereja dan vihara adalah dengan mengikuti sistem kekerabatan atau hirarki lembaga.

Tabel VII.86.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan di Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026		Tahun 2031		Tahun 2036		Tahun 2041	
		Masjid	Musholla	Masjid	Musholla	Masjid	Musholla	Masjid	Musholla
1	Brobot	-4	4	-4	5	-4	5	-4	5
2	Gembong	-2	2	-1	2	-1	2	-1	2
3	Galuh	-2	3	-2	3	-2	3	-2	3
4	Banjaran	-3	-4	-3	-3	-2	-3	-2	-2
5	Patemon	-4	5	-4	5	-4	6	-4	6
6	Bojongsari	-4	5	-4	6	-4	6	-4	7
7	Kajongan	-2	3	-2	3	-2	4	-2	4
8	Karangbanjar	-5	15	-5	15	-5	15	-5	15
9	Beji	-1	3	-1	3	-1	4	-1	4
10	Pagedangan	-2	8	-2	8	-2	8	-2	9
11	Pekalongan	-4	0	-4	1	-4	1	-4	1
12	Matenggeng	-4	3	-4	4	-4	4	-4	4
13	Bumisari	-5	6	-5	7	-5	8	-5	8
Jumlah		-43	52	-42	59	-42	64	-41	67

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan sarana peribadatan tersebut, maka kebutuhan pengembangan sarana peribadatan di Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

- Meningkatkan pelayanan dari sarana peribadatan yang saat ini sudah ada
- Menambah sarana peribadatan musholla sesuai kebutuhan dan proyeksi jumlah penduduk
- Menambah sarana peribadatan lainnya mengikuti sistem kekerabatan atau hirarki lembaga

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sarana peribadatan untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

- Peningkatan kualitas sarana peribadatan
- Pemeliharaan berkala sarana peribadatan
- Pembangunan sarana peribadatan

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan sarana peribadatan di lingkungan hunian Bojongsari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.87.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Peribadatan di Lingkungan Hunian Bojongsari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Peribadatan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Peribadatan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Peribadatan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.4.2.6. Rencana Pelayanan Sarana Budaya dan Rekreasi

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana budaya dan rekreasi untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana budaya dan rekreasi sesuai standar
   - Mengembangkan sarana budaya dan rekreasi sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan sarana budaya dan rekreasi di Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Meningkatkan pelayanan dari sarana budaya dan rekreasi yang saat ini sudah ada
   - Menambah sarana budaya dan rekreasi sesuai jenisnya dengan mendasarkan pada kebutuhan dan proyeksi jumlah penduduk

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sarana budaya dan rekreasi untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Peningkatan kualitas sarana budaya dan rekreasi
   - Pemeliharaan berkala sarana budaya dan rekreasi
   - Pembangunan sarana budaya dan rekreasi

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan sarana budaya dan rekreasi di lingkungan hunian Bojongsari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.88.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Budaya dan Rekreasi di Lingkungan Hunian Bojongsari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Budaya dan Rekreasi	DPUPR Kab Dispar Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Budaya dan Rekreasi	DPUPR Kab Dispar Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Budaya dan Rekreasi	DPUPR Kab Dispar Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.4.2.7. Rencana Pelayanan Sarana Ruang Terbuka Hijau

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana ruang terbuka hijau untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana ruang terbuka hijau sesuai standar
   - Mengembangkan sarana ruang terbuka hijau sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menetapkan bahwa proporsi RTH pada wilayah perkotaan minimal 30% dari luas kota. Sedangkan, luas RTH di lingkungan hunian Bojongsari belum memenuhi jumlah yang ditentukan sebesar 30% dari total luas wilayah.

   Kebutuhan pengembangan sarana ruang terbuka hijau di Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Melakukan pendataan ulang yang lebih rinci untuk keberadaan sarana ruang terbuka hijau
   - Meningkatkan pelayanan dari sarana ruang terbuka hijau yang saat ini sudah ada
   - Menambah sarana ruang terbuka hijau sesuai kebutuhan jenis RTH berdasarkan cakupan pelayanan dan proyeksi jumlah penduduk

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sarana ruang terbuka hijau untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Peningkatan kualitas sarana ruang terbuka hijau

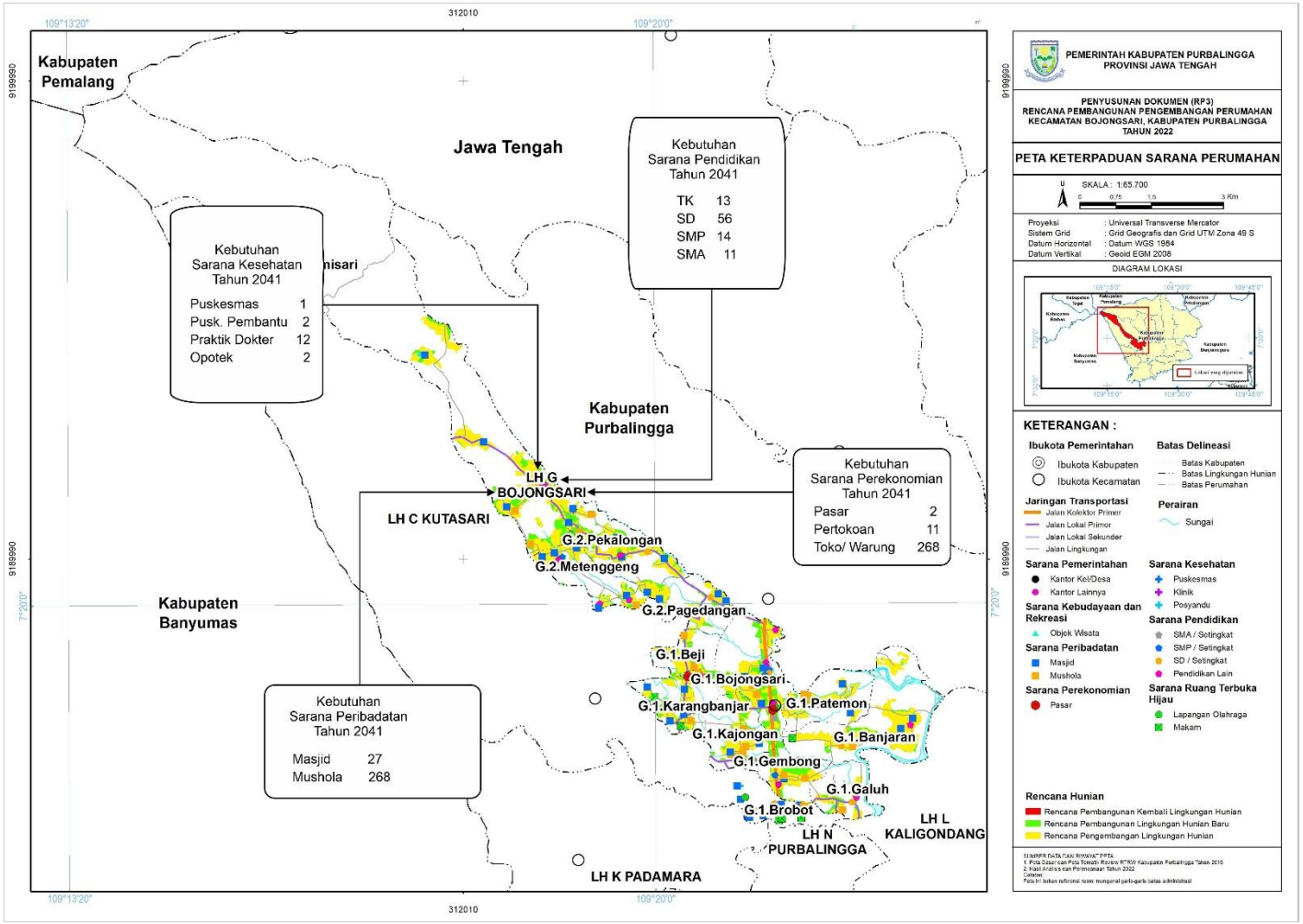
- Pemeliharaan berkala sarana ruang terbuka hijau
- Pembangunan sarana ruang terbuka hijau

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan sarana ruang terbuka hijau di lingkungan hunian Bojongsari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.89.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan Hunian Bojongsari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana RTH	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana RTH	DPUPR Kab DLH Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana RTH	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				



Gambar 7.11.
Peta Rencana Keterpaduan Sarana Perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari

7.4.3. Rencana Pelayanan Utilitas

7.4.3.1. Rencana Pelayanan Jaringan Listrik

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan jaringan listrik untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Memantapkan sistem dan fungsi jaringan listrik
   - Meningkatkan kualitas jaringan listrik
   - Meningkatkan akses dan cakupan pelayanan listrik
   - Mengembangkan sumber energi listrik terbarukan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Selain itu, ketersediaan jaringan listrik eksisting perlu adanya penambahan kebutuhan listrik domestik dan non domestik agar menciptakan keterpaduan antar hirarki jaringan listrik. Kebutuhan listrik domestik ini untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sedangkan, kebutuhan listrik non domestik berupa industri, fasilitas umum, penerangan jalan, dan cadangan. Proyeksi kebutuhan listrik di lingkungan hunian Bojongsari menggunakan asumsi sesuai standar yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

   - 1 rumah tangga memerlukan listrik sebesar 900 KVA
   - Industri: 25 % dari kebutuhan domestik
   - Fasilitas Sosial: 25 % dari kebutuhan domestik
   - Penerangan Jalan: 40 % dari kebutuhan domestik
   - Cadangan: 10 % dari kebutuhan domestik

Tabel VII.90.
Proyeksi Kebutuhan Listrik Lingkungan Hunian Bojongsari Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Brobot	2.425.426	2.483.553	2.519.486	2.545.564
2	Gembong	2.204.661	2.253.220	2.283.238	2.305.023
3	Galuh	1.893.771	1.945.771	1.977.915	2.001.243
4	Banjaran	3.625.973	3.735.881	3.803.822	3.853.131
5	Patemon	2.641.918	2.757.958	2.829.690	2.881.749
6	Bojongsari	3.797.135	3.893.438	3.952.969	3.996.174
7	Kajongan	3.252.855	3.336.466	3.388.151	3.425.661
8	Karangbanjar	2.651.450	2.700.485	2.730.797	2.752.796
9	Beji	2.396.208	2.471.305	2.517.727	2.551.418
10	Pagedangan	2.379.608	2.428.101	2.458.078	2.479.834
11	Pekalongan	3.435.592	3.536.630	3.599.088	3.644.418
12	Matenggeng	2.588.293	2.655.178	2.696.524	2.726.531
13	Bumisari	4.710.200	4.838.750	4.918.216	4.975.888
Jumlah		38.003.091	39.036.736	39.675.701	40.139.430

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan utilitas jaringan listrik tersebut, maka kebutuhan pengembangan utilitas jaringan listrik di Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

- Meningkatkan pelayanan jaringan listrik yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan jaringan listrik sesuai kebutuhan
- Mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan

3. Program Pengembangan

Program pengembangan jaringan listrik untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

- Peningkatan jaringan dan sarana prasarana pendukung
- Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala
- Pembangunan jaringan distribusi baru
- Fasilitasi pengembangan panel surya di fasilitas umum dan sosial

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan jaringan listrik di lingkungan hunian Bojongsari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.91.
Skenario Pentahapan Pembangunan Jaringan Listrik di Lingkungan Hunian Bojongsari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan jaringan dan sarana prasarana pendukung	DPUPR Kab PLN	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala	DPUPR Kab PLN	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan jaringan distribusi baru	DPUPR Kab PLN	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Fasilitasi pengembangan panel surya di fasilitas umum dan sosial	DPUPR Kab PLN	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.4.3.2. Rencana Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

1. Arahan Pengembangan

Arahan pengembangan jaringan telekomunikasi untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

- Mengembangkan jaringan tetap telekomunikasi
- Mengembangkan jaringan bergerak seluler

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan utilitas jaringan telekomunikasi di Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Meningkatkan pelayanan jaringan telekomunikasi yang saat ini sudah ada
   - Mengembangkan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi tetap dan bergerak seluler

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan jaringan telekomunikasi untuk Lingkungan Hunian Bojongsari adalah:

   - Peningkatan kualitas jaringan
   - Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala
   - Pengembangan cakupan pelayanan jaringan fiber optic
   - Peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan tetap telekomunikasi
   - Pengaturan pelayanan menara bersama seluler
   - Pengembangan cakupan pelayanan jaringan bergerak seluler
   - Peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan bergerak seluler

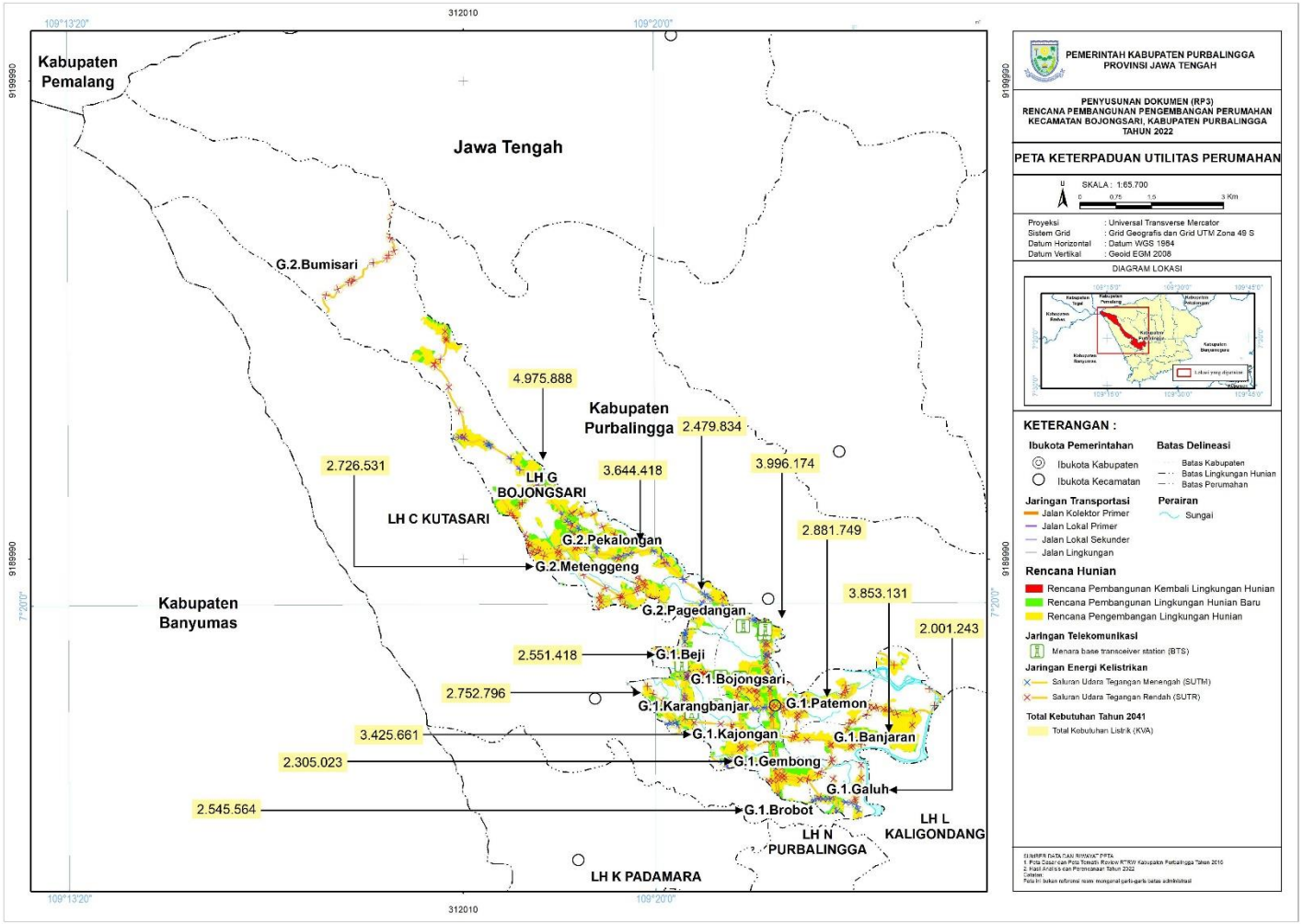
4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan jaringan telekomunikasi di lingkungan hunian Bojongsari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.92.
Skenario Pentahapan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi di Lingkungan Hunian Bojongsari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas jaringan	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pengembangan cakupan pelayanan jaringan fiber optik	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan tetap telekomunikasi	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
5	Pengaturan pelayanan menara bersama seluler	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
6	Pengembangan cakupan pelayanan jaringan bergerak seluler	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
7	Peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan bergerak seluler	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				



Gambar 7.12.
Peta Rencana Keterpaduan Utilitas Perumahan di Lingkungan Hunian Bojongsari

7.5. Lingkungan Hunian Kutasari

7.5.1. Rencana Pelayanan Prasarana

7.5.1.1. Rencana Pelayanan Jaringan Jalan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan jaringan jalan untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

   - Memantapkan sistem dan fungsi jaringan jalan
   - Meningkatkan kualitas jaringan jalan
   - Meningkatkan akses dan konektivitas antar permukiman
   - Menyediakan sarana angkutan umum
   - Menyediakan terminal dan halte yang memadai
   - Menyediakan ruang pejalan kaki yang ramah difabel

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan prasarana jaringan jalan di Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

   - Meningkatkan sistem jaringan jalan yang saat ini sudah ada
   - Mengembangkan sistem jaringan jalan sesuai persyaratan teknis
   - Mengembangkan jalur pejalan kaki

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan jaringan jalan untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

   - Peningkatan jalan lokal, dan lingkungan
   - Pemeliharaan dan perbaikan jalan secara berkala
   - Pembangunan jaringan jalan baru
   - Peningkatan pelayanan angkutan umum
   - Pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan terminal dan halte
   - Peningkatan dan pembangunan jalur pejalan kaki (pedestrian) di pusat-pusat pelayanan

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan prasarana jaringan jalan di lingkungan hunian Kutasari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.93.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Jaringan Jalan di Lingkungan Hunian Kutasari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan jalan lokal dan lingkungan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan dan perbaikan jalan secara berkala	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan jaringan jalan baru	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Peningkatan pelayanan angkutan umum	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
5	Pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan terminal dan halte	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
6	Peningkatan dan pembangunan jalur pejalan kaki (pedestrian) di pusat-pusat pelayanan	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
7	pembangunan jalur atau lajur pesepeda sesuai dimensi jalan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.5.1.2. Rencana Pelayanan Jaringan Drainase

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan jaringan drainase untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

   - Memantapkan sistem dan fungsi jaringan drainase
   - Meningkatkan kualitas jaringan drainase
   - Meningkatkan cakupan pelayanan drainase

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan prasarana jaringan drainase di Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

   - Meningkatkan sistem jaringan drainase yang saat ini sudah ada
   - Mengembangkan sistem jaringan drainase sesuai persyaratan teknis

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan jaringan drainase untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

- Peningkatan sistem jaringan drainase terintegrasi
- Pemeliharaan berkala dan perbaikan/peningkatan konstruksi jaringan drainase
- Pembangunan jaringan drainase baru

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan prasarana jaringan drainase di lingkungan hunian Kutasari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.94.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Jaringan Drainase di Lingkungan Hunian Kutasari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan sistem jaringan drainase terintegrasi	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala dan perbaikan/peningkatan konstruksi jaringan drainase	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan jaringan drainase baru	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.5.1.3. Rencana Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum

1. Arahan Pengembangan

Arahan pengembangan sistem penyediaan air minum untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

- Meningkatkan kualitas SPAM Non Perpipaan
- Mengembangkan sistem pemanenan air hujan sebagai sumber air baku alternatif
- Meningkatkan unit air produksi dan distribusi berupa Instalasi Pengolah Air (IPA) pada SPAM IKK
- Meningkatkan fasilitas penampungan air minum
- Meningkatkan kualitas jaringan perpipaan PDAM
- Mengembangkan jaringan perpipaan non PDAM berbasis masyarakat

2. Kebutuhan Pengembangan

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan jaringan prasarana di lingkungan hunian Kutasari, yang berupa kebutuhan air bersih.

Oleh karena itu diperlukan proyeksi kebutuhan jaringan prasarana di masa yang akan datang untuk melakukan perencanaan terkait jaringan prasarana yang efisien.

Air bersih sebagai kebutuhan primer digunakan oleh penduduk lingkungan hunian Kutasari dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan air minum di lingkungan hunian Kutasari disalurkan oleh PDAM dan non PDAM yang mengalami peningkatan jumlah air setiap tahunnya. Proyeksi kebutuhan air bersih di lingkungan hunian Kutasari menggunakan asumsi yang bersumber dari Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dengan standar yang ditetapkan oleh Kepmen Kimpraswil No.327/KPTS/M/2002, yaitu sebagai berikut:

- 1 orang penduduk menggunakan air bersih sebesar 60 liter/jiwa/hari
- Industri: 10 % dari kebutuhan domestik
- Fasilitas Sosial: 5 % dari kebutuhan domestik
- Fasilitas Hidran Umum: 5 % dari kebutuhan domestik
- Tingkat Kebocoran: 20 % dari kebutuhan domestik

Tabel VII.95.
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Karanglewas	233.742	243.399	249.369	253.701
2	Munjul	318.487	328.220	334.237	338.603
3	Karangklesem	291.412	305.277	313.847	320.067
4	Kutasari	443.577	458.305	467.410	474.017
5	Sumingkir	445.353	465.021	477.178	486.002
6	Meri	345.952	361.737	371.495	378.576
7	Karangreja	555.869	575.291	587.297	596.011
8	Karangaren	130.667	134.070	136.174	137.701
9	Limbangan	384.010	400.024	409.923	417.107
10	Cendana	442.933	457.571	466.619	473.186
11	Candiwulan	483.331	498.925	508.564	515.560
12	Karangcegak	594.645	620.956	637.221	649.025
13	Candinata	504.002	520.553	530.784	538.209
14	Karangjengkol	370.692	384.389	392.856	399.001
Jumlah		5.544.674	5.753.737	5.882.973	5.976.766

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan prasarana sistem penyediaan air minum tersebut, maka kebutuhan pengembangan prasarana sistem penyediaan air minum di Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

- Meningkatkan pelayanan sistem penyediaan air minum yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan sistem penyediaan air minum yang layak dan aman
- Mengembangkan cakupan pelayanan penyediaan air minum

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sistem penyediaan air minum untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

- Sosialisasi pola hidup bersih sehat (PHBS) dan standar teknis sumur dangkal
- Pembangunan sarana dan prasarana pendukung Pemanenan Air Hujan (PAH)
- Peningkatan kapasitas produksi air minum
- Peningkatan dan pemeliharaan berkala bak penampung air minum
- Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala
- Pembangunan jaringan distribusi baru dan penambahan sambungan rumah (SR)
- Peningkatan pelayanan air minum
- Pengembangan jaringan perpipaan perdesaan

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan prasarana sistem penyediaan air minum di lingkungan hunian Kutasari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.96.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Penyediaan Air Minum di Lingkungan Hunian Kutasari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Sosialisasi pola hidup bersih sehat (PHBS) dan standar teknis sumur dangkal	Disperkim Kab Dinkes Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung Pemanenan Air Hujan (PAH)	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Peningkatan kapasitas produksi air minum	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Peningkatan dan pemeliharaan berkala bak penampung air minum	Disperkim Kab DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
5	Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala	Disperkim Kab DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
6	Pembangunan jaringan distribusi baru dan penambahan sambungan rumah (SR)	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
7	Peningkatan pelayanan air minum	Kementerian BMCK Prov	APBN, APBD Prov, APBD Kab,				

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
		Disperkim Kab DPUPR Kab	Swasta, Masyarakat				
8	Pengembangan jaringan perpipaan perdesaan	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.5.1.4. Rencana Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sistem pengelolaan air limbah untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

   - Meningkatkan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik setempat sesuai persyaratan teknis
   - Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah layak dan aman

2. Kebutuhan Pengembangan

   Dari adanya sistem pengolahan air limbah domestik yang belum memadai dan terpadu, diperlukan kebutuhan sistem pengolahan air limbah domestik di lingkungan hunian Kutasari. Air limbah yang dihasilkan di lingkungan hunian Kutasari semakin bertambah. Hal tersebut maka diperlukan sarana pengelolaan air limbah yang terpadu dan tidak mencemari lingkungan. Proyeksi air limbah di lingkungan hunian Kutasari menggunakan asumsi sebesar 80% dari proyeksi kebutuhan air bersih.

Tabel VII.97.
Proyeksi Air Limbah Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Karanglewas	186.994	194.719	199.495	202.961
2	Munjul	254.790	262.576	267.389	270.883
3	Karangklesem	233.130	244.221	251.078	256.054
4	Kutasari	354.862	366.644	373.928	379.214
5	Sumingkir	356.282	372.016	381.743	388.802
6	Meri	276.762	289.390	297.196	302.861
7	Karangreja	444.695	460.233	469.838	476.808
8	Karangaren	104.534	107.256	108.939	110.160
9	Limbangan	307.208	320.019	327.938	333.686
10	Cendana	354.346	366.057	373.295	378.549
11	Candiwulan	386.665	399.140	406.851	412.448
12	Karangcegak	475.716	496.765	509.777	519.220
13	Candinata	403.202	416.442	424.627	430.567
14	Karangjengkol	296.554	307.511	314.285	319.200

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
Jumlah		4.435.739	4.602.990	4.706.379	4.781.413

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan prasarana pengelolaan air limbah tersebut, maka kebutuhan pengembangan prasarana pengelolaan air limbah di Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

- Meningkatkan pelayanan pengelolaan air limbah yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik yang layak dan aman
- Mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah sesuai persyaratan teknis

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sistem pengelolaan air limbah untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

- Peningkatan SPAL Domestik setempat layak dan aman
- Peningkatan sarana dan prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan prasarana sistem pengelolaan air limbah di lingkungan hunian Kutasari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.98.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah di Lingkungan Hunian Kutasari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan SPAL Domestik setempat layak dan aman	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Peningkatan sarana dan prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.5.1.5. Rencana Pelayanan Sistem Pengolahan Persampahan

1. Arahan Pengembangan

Arahan pengembangan sistem pengolahan persampahan untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

- Memantapkan sistem pengelolaan persampahan sesuai persyaratan teknis

- Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis
- Mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat

2. Kebutuhan Pengembangan

Pada umumnya jaringan persampahan di lingkungan hunian Kutasari sudah memadai dan melayani setiap penduduk. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase, tegalan, maupun di sungai. Sehingga, diperlukan proyeksi timbulan sampah berdasarkan perhitungan SNI, yaitu sebagai berikut:

- Sampah domestik diasumsikan 2 liter/jiwa/hari atau 0,002 m3/jiwa/hari
- Sampah non domestik diasumsikan 20% dari sampah domestik

Tabel VII.99.
Proyeksi Timbulan Sampah Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Karanglewas	6,68	6,95	7,12	7,25
2	Munjul	9,10	9,38	9,55	9,67
3	Karangklesem	8,33	8,72	8,97	9,14
4	Kutasari	12,67	13,09	13,35	13,54
5	Sumingkir	12,72	13,29	13,63	13,89
6	Meri	9,88	10,34	10,61	10,82
7	Karangreja	15,88	16,44	16,78	17,03
8	Karangaren	3,73	3,83	3,89	3,93
9	Limbangan	10,97	11,43	11,71	11,92
10	Cendana	12,66	13,07	13,33	13,52
11	Candiwulan	13,81	14,25	14,53	14,73
12	Karangcegak	16,99	17,74	18,21	18,54
13	Candinata	14,40	14,87	15,17	15,38
14	Karangjengkol	10,59	10,98	11,22	11,40

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan prasarana pengolahan sampah tersebut, maka kebutuhan pengembangan prasarana pengolahan sampah di Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

- Meningkatkan pelayanan pengolahan sampah yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan sistem pengolahan sampah ramah lingkungan
- Mengembangkan sarana dan prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis
- Mengembangkan pengolahan sampah berbasis masyarakat

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sistem pengolahan persampahan untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

- Peningkatan keterpaduan sistem pewadahan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah

- Pengembangan pewadahan sampah terpilah
- Pembangunan TPS dan TPS3R di skala lingkungan
- Pengembangan sarana pengangkut sampah sesuai persyaratan teknis
- Pengembangan bank sampah

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan prasarana sistem pengelolaan persampahan di lingkungan hunian Kutasari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.100.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Hunian Kutasari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan keterpaduan sistem pewadahan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pengembangan pewadahan sampah terpilah	Disperkim Kab DLH Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan TPS dan TPS3R di skala lingkungan	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Pengembangan sarana pengangkut sampah sesuai persyaratan teknis	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
5	Pengembangan bank sampah	Disperkim Kab DLH Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.5.1.6. Rencana Pelayanan Sistem Proteksi Kebakaran

1. Arahan Pengembangan

Arahan pengembangan sistem proteksi kebakaran untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

- Mengembangkan prasarana proteksi kebakaran sesuai persyaratan teknis
- Mengembangkan sarana proteksi kebakaran sesuai persyaratan teknis

2. Kebutuhan Pengembangan

Kebutuhan pengembangan prasarana proteksi kebakaran di Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

- Mengembangkan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
- Meningkatkan pelayanan proteksi kebakaran yang saat ini sudah ada
- Melakukan pencegahan dan penanganan dini kebakaran melalui pemberdayaan masyarakat

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sistem proteksi kebakaran untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

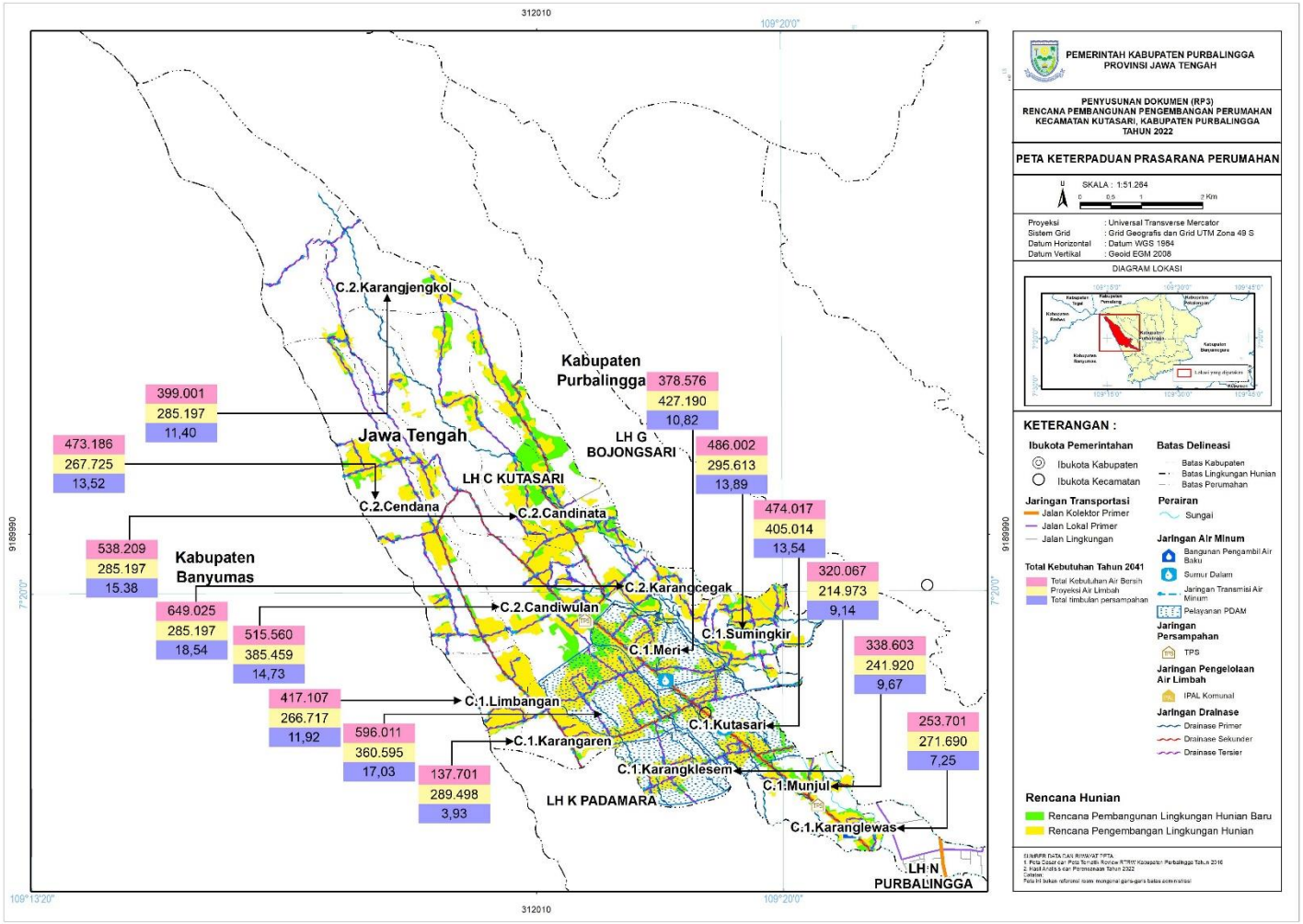
   - Pengembangan pos satuan relawan kebakaran (Satlakar)
   - Peningkatan sarana komunikasi dan data proteksi kebakaran yang handal
   - Pengadaan alat pemadam api ringan (APAR)
   - Pengadaan alat pemadam api berat (APAB)
   - Pemeliharaan berkala dan peningkatan kualitas sarana proteksi kebakaran
   - Pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan dini kebakaran

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan prasarana sistem proteksi kebakaran di lingkungan hunian Kutasari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.101.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Proteksi Kebakaran di Lingkungan Hunian Kutasari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan sarana komunikasi dan data proteksi kebakaran yang handal	Satpol PP Kab BPBD Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pengadaan alat pemadam api ringan (APAR)	Kementerian BMCK Prov Satpol PP Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pengadaan alat pemadam api berat (APAB)	Kementerian BMCK Prov Satpol PP Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Pemeliharaan berkala dan peningkatan kualitas sarana proteksi kebakaran	Satpol PP Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
5	Pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan dini kebakaran	Satpol PP Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				



Gambar 7.13.
Peta Rencana Keterpaduan Prasarana Perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari

7.5.2. Rencana Pelayanan Sarana

7.5.2.1. Rencana Pelayanan Sarana Pemerintahan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana pemerintahan untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana pemerintahan sesuai standar
   - Mengembangkan sarana pemerintahan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan sarana pemerintahan di Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

   - Meningkatkan pelayanan dari sarana pemerintahan yang saat ini sudah ada
   - Menambah sarana pemerintahan sesuai jenisnya berdasarkan kebutuhan dan cakupan pelayanannya

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sarana pemerintahan untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

   - Peningkatan kualitas sarana pemerintahan
   - Pemeliharaan berkala sarana pemerintahan
   - Pembangunan sarana pemerintahan

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan sarana pemerintahan di lingkungan hunian Kutasari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.102.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Pemerintahan di Lingkungan Hunian Kutasari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana pemerintahan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana pemerintahan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana pemerintahan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.5.2.2. Rencana Pelayanan Sarana Pendidikan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana pendidikan untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana pendidikan sesuai standar
   - Mengembangkan sarana pendidikan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Purbalingga berupa sekolah tingkat SD hingga tingkat perguruan tinggi. Kebutuhan akan sarana pendidikan pasti akan selalu mengikuti perkembangan wilayahnya. Semakin banyak penduduk yang berada pada wilayah tersebut maka akan banyak juga sarana pendidikan yang dibutuhkan kedepannya. Adapun jenis sarana pendidikan yang direncanakan menurut SNI Nomor 03-1733-2004;

   - Kelompok penduduk 1.200 jiwa, disediakan Sekolah Dasar.
   - Kelompok penduduk 4.800 jiwa, disediakan SLTP.
   - Kelompok penduduk 6.000 jiwa, disediakan SMA.
   - Kelompok penduduk 70.000 jiwa, disediakan Perguruan Tinggi.

Tabel VII. 103.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026				Tahun 2031				Tahun 2036				Tahun 2041			
		TK	SD	SMP	SMA	TK	SD	SMP	SMA	TK	SD	SMP	SMA	TK	SD	SMP	SMA
1	Karanglewas	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1
2	Munjul	-1	1	0	1	-1	1	0	1	-1	1	0	1	-1	1	0	1
3	Karangklesem	-1	0	0	1	-1	0	0	1	-1	0	0	1	-1	0	0	1
4	Kutasari	-1	0	1	1	-1	1	1	1	-1	1	1	1	-1	1	1	1
5	Sumingkir	0	1	1	1	0	2	1	1	0	2	1	1	0	2	1	1
6	Meri	0	1	0	-1	0	2	0	-1	0	2	0	-1	0	2	0	-1
7	Karangreja	-3	1	0	1	-3	1	0	1	-3	1	0	1	-3	1	0	1
8	Karangaren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Limbangan	-2	1	1	1	-2	1	1	1	-2	1	1	1	-2	1	1	1
10	Cendana	-1	1	0	1	-1	2	0	1	-1	2	0	1	-1	2	0	1
11	Candiwulan	-2	1	1	1	-2	1	1	1	-2	1	1	1	-2	1	1	1
12	Karangcegak	0	4	1	1	0	4	2	1	0	4	2	1	0	4	2	1
13	Candinata	-1	2	1	1	-1	2	1	1	-1	2	1	1	-1	2	1	1
14	Karangjengkol	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Jumlah		-12	15	8	9	-12	17	8	9	-12	18	9	10	-12	19	9	10

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan sarana pendidikan tersebut, maka kebutuhan pengembangan sarana pendidikan di Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

- Meningkatkan pelayanan dari sarana pendidikan yang saat ini sudah ada
- Menambah sarana pendidikan sesuai jenisnya berdasarkan kebutuhan dan cakupan pelayanannya

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sarana pendidikan untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

- Peningkatan kualitas sarana pendidikan
- Pemeliharaan berkala sarana pendidikan
- Pembangunan sarana pendidikan

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan sarana pendidikan di lingkungan hunian Kutasari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.104.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Pendidikan di Lingkungan Hunian Kutasari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Pendidikan	Kementerian Diknas Prov DPUPR Kab Diknas Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Pendidikan	DPUPR Kab Diknas Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Pendidikan	Kementerian Diknas Prov DPUPR Kab Diknas Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.5.2.3. Rencana Pelayanan Sarana Kesehatan

1. Arahan Pengembangan

Arahan pengembangan sarana kesehatan untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

- Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana kesehatan sesuai standar
- Mengembangkan sarana kesehatan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

Sarana kesehatan yan tersedia di Kabupaten Purbalingga meliputi rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Perhitungan analisis kebutuhan sarana kesehatan mengacu pada standar sebagai berikut:

- Rumah Sakit memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 240.000 jiwa/unit.
- Puskesmas memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 120.000 jiwa/unit.
- Klinik memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 30.000 jiwa/unit.

Tabel VII.105.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026					Tahun 2031				
		Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poliklinik	Praktik Dokter	Apotek	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poliklinik	Praktik Dokter	Apotek
1	Karanglewas	0	0	0	-1	0	0	0	0	-1	0
2	Munjul	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3	Karangklesem	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4	Kutasari	-1	0	0	0	-2	-1	0	0	0	-2
5	Sumingkir	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
6	Meri	0	-1	0	1	0	0	-1	0	1	0
7	Karangreja	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8	Karangaren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Limbangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Cendana	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11	Candiwulan	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	-1
12	Karangcegak	0	0	-1	1	0	0	0	-1	1	0
13	Candinata	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14	Karangjengkol	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Jumlah		0	-1	1	8	-1	0	-1	1	9	-1

Lanjutan…

No	Perumahan	Tahun 2036					Tahun 2041				
		Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poliklinik	Praktik Dokter	Apotek	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poliklinik	Praktik Dokter	Apotek
1	Karanglewas	0	0	0	-1	0	0	0	0	-1	0
2	Munjul	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3	Karangklesem	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
4	Kutasari	-1	0	0	0	-2	-1	0	0	0	-2
5	Sumingkir	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

No	Perumahan	Tahun 2036					Tahun 2041				
		Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poliklinik	Praktik Dokter	Apotek	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Poliklinik	Praktik Dokter	Apotek
6	Meri	0	-1	0	1	0	0	-1	0	1	0
7	Karangreja	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8	Karangaren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Limbangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Cendana	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
11	Candiwulan	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	-1
12	Karangcegak	0	0	-1	2	0	0	0	-1	2	0
13	Candinata	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14	Karangjengkol	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Jumlah		0	-1	1	9	-1	0	-1	1	9	-1

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan sarana kesehatan tersebut, maka kebutuhan pengembangan sarana kesehatan di Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

- Meningkatkan pelayanan dari sarana kesehatan yang saat ini sudah ada
- Menambah sarana kesehatan klinik berdasarkan kebutuhan dan cakupan pelayanannya

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sarana kesehatan untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

   - Peningkatan kualitas sarana kesehatan
   - Pemeliharaan berkala sarana kesehatan
   - Pembangunan sarana kesehatan

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan sarana kesehatan di lingkungan hunian Kutasari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.106.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Kesehatan di Lingkungan Hunian Kutasari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Kesehatan	Kementerian Dinkes Prov DPUPR Kab Dinkes Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Kesehatan	DPUPR Kab Dinkes Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Kesehatan	Kementerian Dinkes Prov DPUPR Kab Dinkes Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.5.2.4. Rencana Pelayanan Sarana Perdagangan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana perdagangan untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana perdagangan sesuai standar
   - Mengembangkan sarana perdagangan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

Potensi ekonomi suatu daerah, khususnya sektor perdagangan dapat diketahui dari banyaknya pasar yang ada. Sarana perdagangan selain pasar daerah, juga dapat berupa pusat pusat perkulakan baik secara grosir maupun eceran dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan barang bagi masyarakat. Perhitungan analisis kebutuhan sarana perdagangan mengacu pada standar sebagai berikut:

- Pasar memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 30.000 jiwa/unit.
- Pertokoan memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 6.000 jiwa/unit.
- Toko/ warung memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 250 jiwa/unit.

Proyeksi kebutuhan sarana perdagangan di Lingkungan Hunian Kutasari untuk 20 tahun mendatang telah mencukupi dan melayani seluruh lingkungan hunian.

Tabel VII.107.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan di Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2026-2041

No	Jenis	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Pasar	-7	-7	-7	-7
2	Pertokoan	-7	-7	-6	-6
3	Toko/ Warung	-130	-120	-114	-109

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan sarana perdagangan tersebut, maka kebutuhan pengembangan sarana perdagangan di Lingkungan Hunian Kutasari adalah :

- Meningkatkan pelayanan dari sarana perdagangan yang saat ini sudah ada
- Menambah sarana perdagangan lainnya sesuai kebutuhan dan cakupan pelayanannya

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sarana perdagangan untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

- Peningkatan kualitas sarana perdagangan
- Pemeliharaan berkala sarana perdagangan
- Pembangunan sarana perdagangan

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan sarana perdagangan di lingkungan hunian Kutasari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.108.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Perdagangan di Lingkungan Hunian Kutasari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Perdagangan	Kementerian Disdag Prov DPUPR Kab Disdag Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Perdagangan	DPUPR Kab Disdag Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Perdagangan	Kementerian Disdag Prov DPUPR Kab Disdag Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.5.2.5. Rencana Pelayanan Sarana Peribadatan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana peribadatan untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana peribadatan sesuai standar
   - Mengembangkan sarana peribadatan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Sarana peribadatan yang layak dan mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitas merupakan hak setiap orang. Jenis sarana peribadatan sangat tergantung pada kondisi setempat dengan memperhatikan struktur penduduk menurut agama yang dianut, dan tata cara atau pola masyarakat setempat dalam menjalankan ibadah agamanya. Adapun jenis sarana ibadah untuk agama Islam, direncanakan menurut SNI Nomor 03-1733-2004:

   - Kelompok penduduk 250 jiwa, diperlukan musholla/langgar.
   - Kelompok penduduk 2.500 jiwa, disediakan masjid.
   - Kebutuhan gereja dan vihara adalah dengan mengikuti sistem kekerabatan atau hirarki lembaga.

Tabel VII.109.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan di Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026			Tahun 2031			Tahun 2036			Tahun 2041		
		Masjid	Musholla	Gereja	Masjid	Musholla	Gereja	Masjid	Musholla	Gereja	Masjid	Musholla	Gereja
1	Karanglewas	-3	7		-3	8		-3	8		-3	8	
2	Munjul	-3	6		-3	7		-3	7		-3	7	
3	Karangklesem	-1	6		-1	7		-1	7		0	7	
4	Kutasari	-2	7		-2	8		-2	8		-2	9	
5	Sumingkir	-4	9		-4	10		-4	11		-4	11	
6	Meri	-4	9		-4	10		-4	11		-4	11	
7	Karangreja	-5	2		-5	3		-5	4		-5	4	
8	Karangaren	0	1	Mengikuti paroki	0	1	Mengikuti paroki	0	1	Mengikuti paroki	0	2	Mengikuti paroki
9	Limbangan	-5	8		-5	9		-5	10		-5	10	
10	Cendana	-8	14		-8	15		-8	15		-8	16	
11	Candiwulan	-6	11		-6	12		-6	12		-6	13	
12	Karangcegak	-10	12		-10	14		-10	14		-10	15	
13	Candinata	-9	12		-9	13		-8	13		-8	14	
14	Karangjengkol	-8	7		-8	7		-8	8		-8	8	
Jumlah		-69	113		-68	123		-67	129		-67	134	

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan sarana peribadatan tersebut, maka kebutuhan pengembangan sarana peribadatan di Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

- Meningkatkan pelayanan dari sarana peribadatan yang saat ini sudah ada
- Menambah sarana peribadatan musholla sesuai kebutuhan dan proyeksi jumlah penduduk
- Menambah sarana peribadatan lainnya mengikuti sistem kekerabatan atau hirarki lembaga

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sarana peribadatan untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

- Peningkatan kualitas sarana peribadatan
- Pemeliharaan berkala sarana peribadatan
- Pembangunan sarana peribadatan

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan sarana peribadatan di lingkungan hunian Kutasari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.110.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Peribadatan di Lingkungan Hunian Kutasari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Peribadatan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Peribadatan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Peribadatan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.5.2.6. Rencana Pelayanan Sarana Budaya dan Rekreasi

1. Arahan Pengembangan

Arahan pengembangan sarana budaya dan rekreasi untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

- Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana budaya dan rekreasi sesuai standar
- Mengembangkan sarana budaya dan rekreasi sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan sarana budaya dan rekreasi di Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

   - Meningkatkan pelayanan dari sarana budaya dan rekreasi yang saat ini sudah ada
   - Menambah sarana budaya dan rekreasi sesuai jenisnya dengan mendasarkan pada kebutuhan dan proyeksi jumlah penduduk

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sarana budaya dan rekreasi untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

   - Peningkatan kualitas sarana budaya dan rekreasi
   - Pemeliharaan berkala sarana budaya dan rekreasi
   - Pembangunan sarana budaya dan rekreasi

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan sarana budaya dan rekreasi di lingkungan hunian Kutasari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.111.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Budaya dan Rekreasi di Lingkungan Hunian Kutasari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Budaya dan Rekreasi	DPUPR Kab Dispar Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Budaya dan Rekreasi	DPUPR Kab Dispar Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Budaya dan Rekreasi	DPUPR Kab Dispar Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.5.2.7. Rencana Pelayanan Sarana Ruang Terbuka Hijau

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana ruang terbuka hijau untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana ruang terbuka hijau sesuai standar
   - Mengembangkan sarana ruang terbuka hijau sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menetapkan bahwa proporsi RTH pada wilayah perkotaan minimal 30% dari luas kota. Sedangkan, luas RTH di lingkungan hunian Kutasari belum memenuhi jumlah yang ditentukan sebesar 30% dari total luas wilayah.

   Kebutuhan pengembangan sarana ruang terbuka hijau di Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

   - Melakukan pendataan ulang yang lebih rinci untuk keberadaan sarana ruang terbuka hijau
   - Meningkatkan pelayanan dari sarana ruang terbuka hijau yang saat ini sudah ada
   - Menambah sarana ruang terbuka hijau sesuai kebutuhan jenis RTH berdasarkan cakupan pelayanan dan proyeksi jumlah penduduk

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sarana ruang terbuka hijau untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

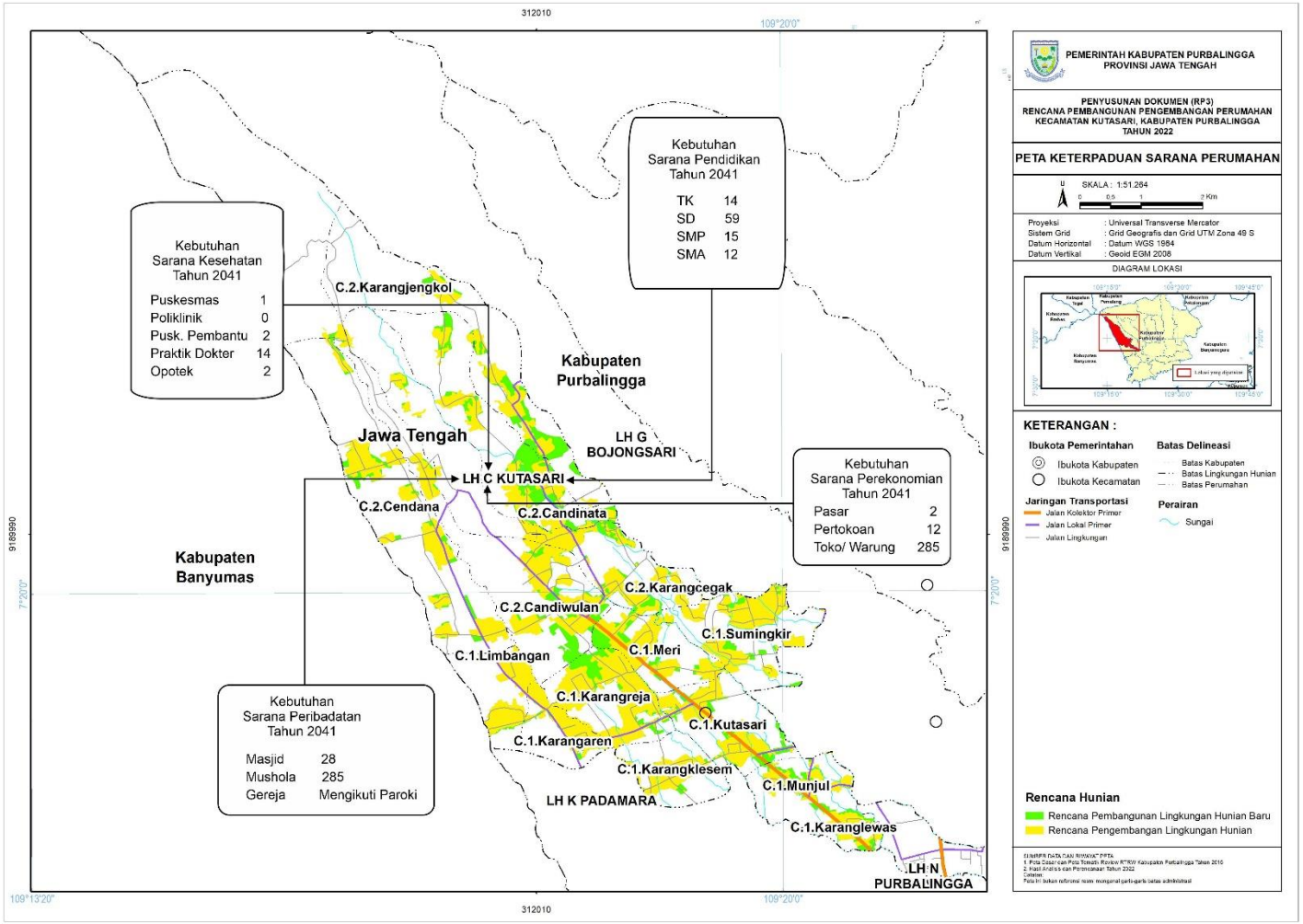
   - Peningkatan kualitas sarana ruang terbuka hijau
   - Pemeliharaan berkala sarana ruang terbuka hijau
   - Pembangunan sarana ruang terbuka hijau

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan sarana ruang terbuka hijau di lingkungan hunian Kutasari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.112.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan Hunian Kutasari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana RTH	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana RTH	DPUPR Kab DLH Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana RTH	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				



Gambar 7.14.
Peta Rencana Keterpaduan Sarana Perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari

7.5.3. Rencana Pelayanan Utilitas

7.5.3.1. Rencana Pelayanan Jaringan Listrik

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan jaringan listrik untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

   - Memantapkan sistem dan fungsi jaringan listrik
   - Meningkatkan kualitas jaringan listrik
   - Meningkatkan akses dan cakupan pelayanan listrik
   - Mengembangkan sumber energi listrik terbarukan

2. Kebutuhan Pengembangan

   - Ketersediaan jaringan listrik eksisting perlu adanya penambahan kebutuhan listrik domestik dan non domestik agar menciptakan keterpaduan antar hirarki jaringan listrik. Kebutuhan listrik domestik ini untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sedangkan, kebutuhan listrik non domestik berupa industri, fasilitas umum, penerangan jalan, dan cadangan. Proyeksi kebutuhan listrik di lingkungan hunian Kutasari menggunakan asumsi sesuai standar yang ditetapkan, yaitu:
   - 1 rumah tangga memerlukan listrik sebesar 900 KVA
   - Industri: 25 % dari kebutuhan domestik
   - Fasilitas Sosial: 25 % dari kebutuhan domestik
   - Penerangan Jalan: 40 % dari kebutuhan domestik
   - Cadangan: 10 % dari kebutuhan domestik

Tabel VII.113.
Proyeksi Kebutuhan Listrik Lingkungan Hunian Kutasari Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Karanglewas	1.669.586	1.738.565	1.781.206	1.812.153
2	Munjul	2.274.908	2.344.429	2.387.405	2.418.595
3	Karangklesem	2.081.518	2.180.548	2.241.766	2.286.194
4	Kutasari	3.168.411	3.273.609	3.338.639	3.385.835
5	Sumingkir	3.181.093	3.321.575	3.408.417	3.471.443
6	Meri	2.471.089	2.583.837	2.653.535	2.704.118
7	Karangreja	3.970.491	4.109.221	4.194.979	4.257.218
8	Karangaren	933.336	957.644	972.670	983.576
9	Limbangan	2.742.927	2.857.312	2.928.021	2.979.338
10	Cendana	3.163.808	3.268.363	3.332.995	3.379.902
11	Candiwulan	3.452.367	3.563.748	3.632.600	3.682.569
12	Karangcegak	4.247.466	4.435.402	4.551.578	4.635.892
13	Candinata	3.600.018	3.718.236	3.791.315	3.844.351
14	Karangjengkol	2.647.801	2.745.635	2.806.112	2.850.004
Jumlah		39.604.814	41.098.123	42.021.238	42.691.188

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan utilitas jaringan listrik tersebut, maka kebutuhan pengembangan utilitas jaringan listrik di Lingkungan Hunian Kutasari adalah :

- Meningkatkan pelayanan jaringan listrik yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan jaringan listrik sesuai kebutuhan
- Mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan

3. Program Pengembangan

Program pengembangan jaringan listrik untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

- Peningkatan jaringan dan sarana prasarana pendukung
- Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala
- Pembangunan jaringan distribusi baru
- Fasilitasi pengembangan panel surya di fasilitas umum dan sosial

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan jaringan listrik di lingkungan hunian Kutasari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.114.
Skenario Pentahapan Pembangunan Jaringan Listrik di Lingkungan Hunian Kutasari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan jaringan dan sarana prasarana pendukung	DPUPR Kab PLN	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala	DPUPR Kab PLN	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan jaringan distribusi baru	DPUPR Kab PLN	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.5.3.2. Rencana Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

1. Arahan Pengembangan

Arahan pengembangan jaringan telekomunikasi untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

- Mengembangkan jaringan tetap telekomunikasi
- Mengembangkan jaringan bergerak seluler

2. Kebutuhan Pengembangan

Kebutuhan pengembangan utilitas jaringan telekomunikasi di Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

- Meningkatkan pelayanan jaringan telekomunikasi yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi tetap dan bergerak seluler

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan jaringan telekomunikasi untuk Lingkungan Hunian Kutasari adalah:

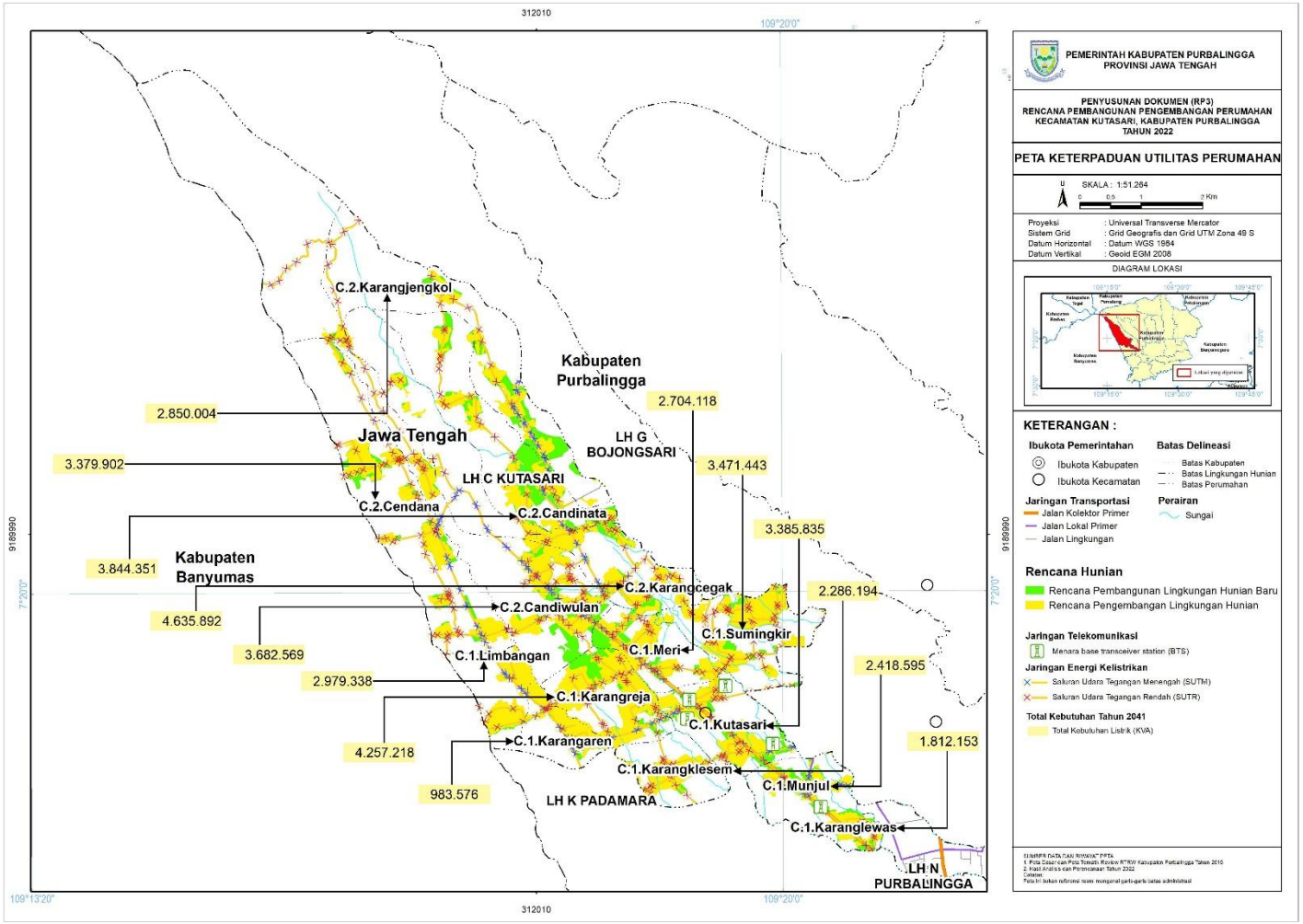
   - Peningkatan kualitas jaringan
   - Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala
   - Pengembangan cakupan pelayanan jaringan fiber optic
   - Peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan tetap telekomunikasi
   - Pengaturan pelayanan menara bersama seluler
   - Pengembangan cakupan pelayanan jaringan bergerak seluler
   - Peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan bergerak seluler

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan jaringan telekomunikasi di lingkungan hunian Kutasari direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.115.
Skenario Pentahapan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi di Lingkungan Hunian Kutasari

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas jaringan	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pengembangan cakupan pelayanan jaringan fiber optik	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan tetap telekomunikasi	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
5	Pengaturan pelayanan menara bersama seluler	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
6	Pengembangan cakupan pelayanan jaringan bergerak seluler	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
7	Peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan bergerak seluler	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				



Gambar 7.15.
Peta Rencana Keterpaduan Utilitas Perumahan di Lingkungan Hunian Kutasari

7.6. Lingkungan Hunian Kaligondang

7.6.1. Rencana Pelayanan Prasarana

7.6.1.1. Rencana Pelayanan Jaringan Jalan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan jaringan jalan untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

   - Memantapkan sistem dan fungsi jaringan jalan
   - Meningkatkan kualitas jaringan jalan
   - Meningkatkan akses dan konektivitas antar permukiman
   - Menyediakan sarana angkutan umum
   - Menyediakan terminal dan halte yang memadai
   - Menyediakan ruang pejalan kaki yang ramah difabel

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan prasarana jaringan jalan di Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

   - Meningkatkan sistem jaringan jalan yang saat ini sudah ada
   - Mengembangkan sistem jaringan jalan sesuai persyaratan teknis
   - Mengembangkan jalur pejalan kaki

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan jaringan jalan untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

   - Peningkatan jalan kolektor, lokal, dan lingkungan
   - Pembangunan jaringan jalan baru
   - Pemeliharaan dan perbaikan jalan secara berkala
   - Peningkatan pelayanan angkutan umum
   - Pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan terminal dan halte
   - Peningkatan dan pembangunan jalur pejalan kaki (pedestrian) di pusat-pusat pelayanan
   - Pembangunan jalur atau lajur pesepeda sesuai dimensi jalan

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan prasarana jaringan jalan di lingkungan hunian Kaligondang direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.116.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Jaringan Jalan di Lingkungan Hunian Kaligondang

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan jalan kolektor, lokal, dan lingkungan	BMCK Prov DPUPR Kab	APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan dan perbaikan jalan secara berkala	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan jaringan jalan baru	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Peningkatan pelayanan angkutan umum	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
5	Pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan terminal dan halte	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
6	Peningkatan dan pembangunan jalur pejalan kaki (pedestrian) di pusat-pusat pelayanan	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
7	pembangunan jalur atau lajur pesepeda sesuai dimensi jalan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.6.1.2. Rencana Pelayanan Jaringan Drainase

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan jaringan drainase untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

   - Memantapkan sistem dan fungsi jaringan drainase
   - Meningkatkan kualitas jaringan drainase
   - Meningkatkan cakupan pelayanan drainase

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan prasarana jaringan drainase di Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

   - Meningkatkan sistem jaringan drainase yang saat ini sudah ada
   - Mengembangkan sistem jaringan drainase sesuai persyaratan teknis

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan jaringan drainase untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

   - Peningkatan sistem jaringan drainase terintegrasi
   - Pemeliharaan berkala dan perbaikan/peningkatan konstruksi jaringan drainase
   - Pembangunan jaringan drainase baru

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan prasarana jaringan drainase di lingkungan hunian Kaligondang direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.117.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Jaringan Drainase di Lingkungan Hunian Kaligondang

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan sistem jaringan drainase terintegrasi	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala dan perbaikan/peningkatan konstruksi jaringan drainase	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan jaringan drainase baru	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.6.1.3. Rencana Pelayanan Sistem Penyediaan Air Minum

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sistem penyediaan air minum untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

   - Meningkatkan kualitas SPAM Non Perpipaan
   - Mengembangkan sistem pemanenan air hujan sebagai sumber air baku alternatif
   - Meningkatkan unit air produksi dan distribusi berupa Instalasi Pengolah Air (IPA) pada SPAM IKK
   - Meningkatkan fasilitas penampungan air minum
   - Meningkatkan kualitas jaringan perpipaan PDAM
   - Mengembangkan jaringan perpipaan non PDAM berbasis masyarakat

2. Kebutuhan Pengembangan

Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan jaringan prasarana di lingkungan hunian Kaligondang, yang berupa kebutuhan air bersih. Oleh karena itu diperlukan proyeksi kebutuhan jaringan prasarana di masa yang akan datang untuk melakukan perencanaan terkait jaringan prasarana yang efisien.

Air bersih sebagai kebutuhan primer digunakan oleh penduduk lingkungan hunian Kaligondang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan air minum di lingkungan hunian Kaligondang disalurkan oleh PDAM dan non PDAM yang mengalami peningkatan jumlah air setiap tahunnya. Proyeksi kebutuhan air bersih di lingkungan hunian Kaligondang menggunakan asumsi yang bersumber dari Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dengan standar yang ditetapkan oleh Kepmen Kimpraswil No.327/KPTS/M/2002, yaitu sebagai berikut:

- 1 orang penduduk menggunakan air bersih sebesar 60 liter/jiwa/hari
- Industri: 10 % dari kebutuhan domestik
- Fasilitas Sosial: 5 % dari kebutuhan domestik
- Fasilitas Hidran Umum: 5 % dari kebutuhan domestik
- Tingkat Kebocoran: 20 % dari kebutuhan domestik

Tabel VII.118.
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Lamongan	228.299	237.819	243.705	247.976
2	Tejasari	224.966	234.896	241.035	245.490
3	Cilapar	175.791	184.917	190.559	194.653
4	Penolih	335.257	354.173	365.866	374.352
5	Sinduraja	431.350	448.568	459.212	466.936
6	Selakambang	740.318	785.940	814.143	834.611
7	Selanegara	295.394	310.443	319.746	326.497
8	Kaligondang	279.565	293.395	301.943	308.148
9	Brecek	123.184	128.096	131.133	133.337
10	Sempor Lor	109.873	114.621	117.557	119.687
11	Penaruban	419.207	424.134	427.179	429.389
12	Kalikajar	394.459	406.185	413.433	418.694
13	Kembaran Wetan	276.349	292.528	302.530	309.788
14	Slinga	464.830	482.426	493.303	501.197
15	Arenan	332.532	342.734	349.040	353.617
16	Sidanegara	287.006	303.344	313.443	320.773
17	Pagerandong	187.497	200.122	207.927	213.591
18	Sidareja	421.156	435.885	444.991	451.599
Jumlah		5.727.032	5.980.227	6.136.744	6.250.336

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan prasarana sistem penyediaan air minum tersebut, maka kebutuhan pengembangan prasarana sistem penyediaan air minum di Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

- Meningkatkan pelayanan sistem penyediaan air minum yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan sistem penyediaan air minum yang layak dan aman
- Mengembangkan cakupan pelayanan penyediaan air minum

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sistem penyediaan air minum untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

- Sosialisasi pola hidup bersih sehat (PHBS) dan standar teknis sumur dangkal
- Pembangunan sarana dan prasarana pendukung Pemanenan Air Hujan (PAH)
- Peningkatan kapasitas produksi air minum
- Peningkatan dan pemeliharaan berkala bak penampung air minum
- Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala
- Pembangunan jaringan distribusi baru dan penambahan sambungan rumah (SR)
- Peningkatan pelayanan air minum
- Pengembangan jaringan perpipaan perdesaan

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan prasarana sistem penyediaan air minum di lingkungan hunian Kaligondang direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.119.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Penyediaan Air Minum di Lingkungan Hunian Kaligondang

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Sosialisasi pola hidup bersih sehat (PHBS) dan standar teknis sumur dangkal	Disperkim Kab Dinkes Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pembangunan sarana dan prasarana pendukung Pemanenan Air Hujan (PAH)	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Peningkatan kapasitas produksi air minum	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Peningkatan dan pemeliharaan berkala bak penampung air minum	Disperkim Kab DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
5	Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala	Disperkim Kab DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
6	Pembangunan jaringan distribusi baru dan penambahan sambungan rumah (SR)	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
7	Peningkatan pelayanan air minum	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
8	Pengembangan jaringan perpipaan perdesaan	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.6.1.4. Rencana Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sistem pengelolaan air limbah untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

   - Meningkatkan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik setempat sesuai persyaratan teknis
   - Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik terpusat skala lingkungan
   - Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah layak dan aman

2. Kebutuhan Pengembangan

   Dari adanya sistem pengolahan air limbah domestik yang belum memadai dan terpadu, diperlukan kebutuhan sistem pengolahan air limbah domestik di lingkungan hunian Kaligondang. Air limbah yang dihasilkan di lingkungan hunian Kaligondang semakin bertambah. Hal tersebut maka diperlukan sarana pengelolaan air limbah yang terpadu dan tidak mencemari lingkungan. Proyeksi air limbah di lingkungan hunian Kaligondang menggunakan asumsi sebesar 80% dari proyeksi kebutuhan air bersih.

Tabel VII.120.
Proyeksi Air Limbah Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Lamongan	182.639	190.255	194.964	198.381
2	Tejasari	179.973	187.917	192.828	196.392
3	Cilapar	140.633	147.934	152.447	155.723

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
4	Penolih	268.206	283.338	292.693	299.482
5	Sinduraja	345.080	358.854	367.369	373.549
6	Selakambang	592.254	628.752	651.314	667.689
7	Selanegara	236.315	248.354	255.796	261.198
8	Kaligondang	223.652	234.716	241.555	246.518
9	Brecek	98.547	102.477	104.906	106.669
10	Sempor Lor	87.898	91.697	94.045	95.750
11	Penaruban	335.366	339.307	341.743	343.512
12	Kalikajar	315.567	324.948	330.747	334.955
13	Kembaran Wetan	221.079	234.023	242.024	247.831
14	Slinga	371.864	385.941	394.642	400.957
15	Arenan	266.026	274.187	279.232	282.894
16	Sidanegara	229.605	242.675	250.755	256.618
17	Pagerandong	149.997	160.098	166.341	170.873
18	Sidareja	336.924	348.708	355.993	361.279
Jumlah		4.581.626	4.784.182	4.909.395	5.000.269

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan prasarana pengelolaan air limbah tersebut, maka kebutuhan pengembangan prasarana pengelolaan air limbah di Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

- Meningkatkan pelayanan pengelolaan air limbah yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik yang layak dan aman
- Mengembangkan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah sesuai persyaratan teknis

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sistem pengelolaan air limbah untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

- Peningkatan SPAL Domestik setempat layak dan aman
- Pembangunan SPAL Domestik terpusat skala lingkungan
- Peningkatan sarana dan prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan prasarana sistem pengelolaan air limbah di lingkungan hunian Kaligondang direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.121.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Pengelolaan Air Limbah di Lingkungan Hunian Kaligondang

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan SPAL Domestik setempat layak dan aman	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pembangunan SPAL Domestik terpusat skala lingkungan	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Peningkatan sarana dan prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.6.1.5. Rencana Pelayanan Sistem Pengolahan Persampahan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sistem pengolahan persampahan untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

   - Memantapkan sistem pengelolaan persampahan sesuai persyaratan teknis
   - Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis
   - Mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat

2. Kebutuhan Pengembangan

   Pada umumnya jaringan persampahan di lingkungan hunian Kaligondang sudah memadai dan melayani setiap penduduk. Namun, masih terdapat beberapa masyarakat yang membuang sampah di saluran drainase, tegalan, maupun di sungai. Sehingga, diperlukan proyeksi timbulan sampah berdasarkan perhitungan SNI, yaitu sebagai berikut:

   - Sampah domestik diasumsikan 2 liter/jiwa/hari atau 0,002 m3/jiwa/hari
   - Sampah non domestik diasumsikan 20% dari sampah domestik

Tabel VII.122.
Proyeksi Timbulan Sampah Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Lamongan	6,52	6,79	6,96	7,09
2	Tejasari	6,43	6,71	6,89	7,01
3	Cilapar	5,02	5,28	5,44	5,56

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
4	Penolih	9,58	10,12	10,45	10,70
5	Sinduraja	12,32	12,82	13,12	13,34
6	Selakambang	21,15	22,46	23,26	23,85
7	Selanegara	8,44	8,87	9,14	9,33
8	Kaligondang	7,99	8,38	8,63	8,80
9	Brecek	3,52	3,66	3,75	3,81
10	Sempor Lor	3,14	3,27	3,36	3,42
11	Penaruban	11,98	12,12	12,21	12,27
12	Kalikajar	11,27	11,61	11,81	11,96
13	Kembaran Wetan	7,90	8,36	8,64	8,85
14	Slinga	13,28	13,78	14,09	14,32
15	Arenan	9,50	9,79	9,97	10,10
16	Sidanegara	8,20	8,67	8,96	9,16
17	Pagerandong	5,36	5,72	5,94	6,10
18	Sidareja	12,03	12,45	12,71	12,90

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan prasarana pengolahan sampah tersebut, maka kebutuhan pengembangan prasarana pengolahan sampah di Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

- Meningkatkan pelayanan pengolahan sampah yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan sistem pengolahan sampah ramah lingkungan
- Mengembangkan sarana dan prasarana persampahan sesuai persyaratan teknis
- Mengembangkan pengolahan sampah berbasis masyarakat

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sistem pengolahan persampahan untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

- Peningkatan keterpaduan sistem pewadahan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah
- Pengembangan pewadahan sampah terpilah
- Pembangunan TPS dan TPS3R di skala lingkungan
- Pengembangan sarana pengangkut sampah sesuai persyaratan teknis
- Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (tpst) skala kawasan
- Pengembangan bank sampah

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan prasarana sistem pengelolaan persampahan di lingkungan hunian Kaligondang direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.123.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Pengelolaan Persampahan di Lingkungan Hunian Kaligondang

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan keterpaduan sistem pewadahan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pengembangan pewadahan sampah terpilah	Disperkim Kab DLH Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan TPS dan TPS3R di skala lingkungan	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Pengembangan sarana pengangkut sampah sesuai persyaratan teknis	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
5	Pengembangan bank sampah	Disperkim Kab DLH Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
6	Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) skala kawasan	Kementerian BMCK Prov Disperkim Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.6.1.6. Rencana Pelayanan Sistem Proteksi Kebakaran

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sistem proteksi kebakaran untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

   - Mengembangkan prasarana proteksi kebakaran sesuai persyaratan teknis
   - Mengembangkan sarana proteksi kebakaran sesuai persyaratan teknis

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan prasarana proteksi kebakaran di Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

   - Mengembangkan sarana dan prasarana proteksi kebakaran
   - Meningkatkan pelayanan proteksi kebakaran yang saat ini sudah ada
   - Melakukan pencegahan dan penanganan dini kebakaran melalui pemberdayaan masyarakat

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sistem proteksi kebakaran untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

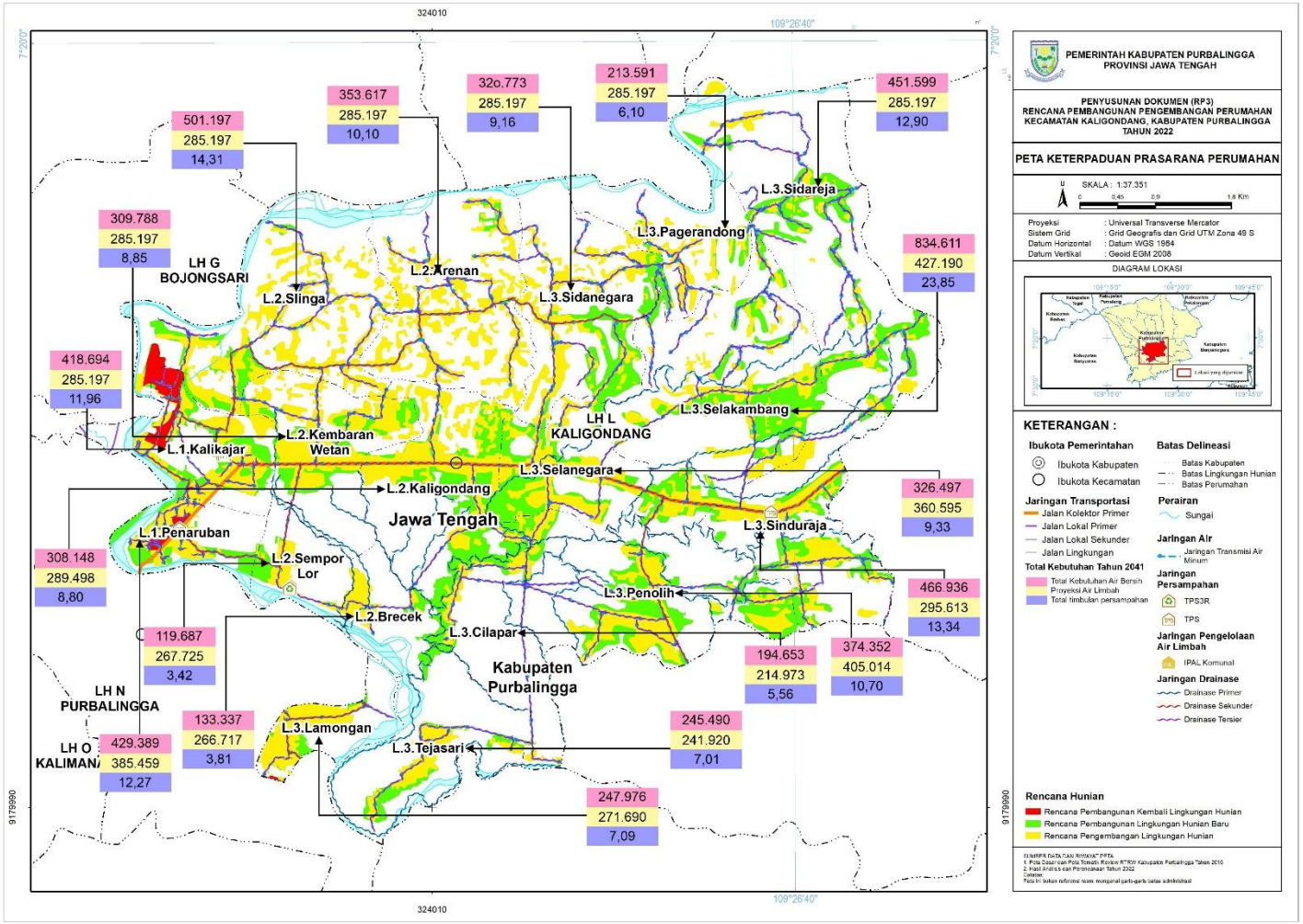
   - Pengembangan pos satuan relawan kebakaran (Satlakar)
   - Peningkatan sarana komunikasi dan data proteksi kebakaran yang handal
   - Pengadaan alat pemadam api ringan (APAR)
   - Pengadaan alat pemadam api berat (APAB)
   - Pemeliharaan berkala dan peningkatan kualitas sarana proteksi kebakaran
   - Pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan dini kebakaran

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan prasarana sistem proteksi kebakaran di lingkungan hunian Kaligondang direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.124.
Skenario Pentahapan Pembangunan Prasarana Sistem Proteksi Kebakaran di Lingkungan Hunian Kaligondang

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Pengembangan pos satuan relawan kebakaran (Satlakar)	Satpol PP Kab BPBD Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Peningkatan sarana komunikasi dan data proteksi kebakaran yang handal	Satpol PP Kab BPBD Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pengadaan alat pemadam api ringan (APAR)	Kementerian BMCK Prov Satpol PP Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Pengadaan alat pemadam api berat (APAB)	Kementerian BMCK Prov Satpol PP Kab DPUPR Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
5	Pemeliharaan berkala dan peningkatan kualitas sarana proteksi kebakaran	Satpol PP Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
6	Pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan dini kebakaran	Satpol PP Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				



Gambar 7.16.
Peta Rencana Keterpaduan Prasarana Perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang

7.6.2. Rencana Pelayanan Sarana

7.6.2.1. Rencana Pelayanan Sarana Pemerintahan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana pemerintahan untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana pemerintahan sesuai standar
   - Mengembangkan sarana pemerintahan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan sarana pemerintahan di Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

   - Meningkatkan pelayanan dari sarana pemerintahan yang saat ini sudah ada
   - Menambah sarana pemerintahan sesuai jenisnya berdasarkan kebutuhan dan cakupan pelayanannya

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sarana pemerintahan untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

   - Peningkatan kualitas sarana pemerintahan
   - Pemeliharaan berkala sarana pemerintahan
   - Pembangunan sarana pemerintahan

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan sarana pemerintahan di lingkungan hunian Kaligondang direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.125.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Pemerintahan di Lingkungan Hunian Kaligondang

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana pemerintahan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana pemerintahan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana pemerintahan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.6.2.2. Rencana Pelayanan Sarana Pendidikan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana pendidikan untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana pendidikan sesuai standar
   - Mengembangkan sarana pendidikan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Sarana pendidikan yang ada di Kabupaten Purbalingga berupa sekolah tingkat SD hingga tingkat perguruan tinggi. Kebutuhan akan sarana pendidikan pasti akan selalu mengikuti perkembangan wilayahnya. Semakin banyak penduduk yang berada pada wilayah tersebut maka akan banyak juga sarana pendidikan yang dibutuhkan kedepannya. Adapun jenis sarana pendidikan yang direncanakan menurut SNI Nomor 03-1733-2004;

   - Kelompok penduduk 1.200 jiwa, disediakan Sekolah Dasar.
   - Kelompok penduduk 4.800 jiwa, disediakan SLTP.
   - Kelompok penduduk 6.000 jiwa, disediakan SMA.
   - Kelompok penduduk 70.000 jiwa, disediakan Perguruan Tinggi.

Tabel VII.126.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan di Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026				Tahun 2031				Tahun 2036				Tahun 2041			
		TK	SD	SMP	SMA	TK	SD	SMP	SMA	TK	SD	SMP	SMA	TK	SD	SMP	SMA
1	Lamongan	-1	0	1	0	-1	0	1	0	-1	0	1	0	-1	0	1	0
2	Tejasari	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
3	Cilapar	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
4	Penolih	-3	-1	1	1	-3	0	1	1	-3	0	1	1	-3	0	1	1
5	Sinduraja	-1	1	1	1	-1	1	1	1	-1	2	1	1	-1	2	1	1
6	Selakambang	-3	2	1	1	-3	3	1	2	-3	3	1	2	-3	3	1	2
7	Selanegara	-1	1	0	0	-1	1	0	0	-1	1	0	0	-1	1	0	0
8	Kaligondang	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
9	Brecek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sempor Lor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Penaruban	-2	1	0	1	-2	1	0	1	-2	1	0	1	-2	1	0	1
12	Kalikajar	-1	2	1	1	-1	2	1	1	-1	2	1	1	-1	2	1	1
13	Kembaran Wetan	0	-1	1	1	0	-1	1	1	0	-1	1	1	0	-1	1	1
14	Slinga	-3	0	0	1	-3	0	0	1	-3	0	0	1	-3	0	0	1
15	Arenan	-2	0	0	1	-2	0	0	1	-2	0	0	1	-2	1	0	1
16	Sidanegara	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1
17	Pagerandong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
18	Sidareja	-1	1	1	1	-1	1	1	1	-1	1	1	1	-1	1	1	1
Jumlah		-17	8	7	10	-17	10	8	11	-17	12	8	11	-17	13	9	11

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan sarana pendidikan tersebut, maka kebutuhan pengembangan sarana pendidikan di Lingkungan Hunian Kaligondang adalah :

- Meningkatkan pelayanan dari sarana pendidikan yang saat ini sudah ada
- Menambah sarana pendidikan sesuai jenisnya berdasarkan kebutuhan dan cakupan pelayanannya

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sarana pendidikan untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

- Peningkatan kualitas sarana pendidikan
- Pemeliharaan berkala sarana pendidikan
- Pembangunan sarana pendidikan

1. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan sarana pendidikan di lingkungan hunian Kaligondang direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.127.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Pendidikan di Lingkungan Hunian Kaligondang

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Pendidikan	Kementerian Diknas Prov DPUPR Kab Diknas Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Pendidikan	DPUPR Kab Diknas Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Pendidikan	Kementerian Diknas Prov DPUPR Kab Diknas Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.6.2.3. Rencana Pelayanan Sarana Kesehatan

1. Arahan Pengembangan

Arahan pengembangan sarana kesehatan untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

- Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana kesehatan sesuai standar
- Mengembangkan sarana kesehatan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

Sarana kesehatan yan tersedia di Kabupaten Purbalingga meliputi rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Perhitungan analisis kebutuhan sarana kesehatan mengacu pada standar sebagai berikut:

- Rumah Sakit memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 240.000 jiwa/unit.
- Puskesmas memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 120.000 jiwa/unit.
- Klinik memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 30.000 jiwa/unit.

Tabel VII.128.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026					Tahun 2031				
		Puskesmas	Poliklinik	Puskesmas Pembantu	Praktik Dokter	Apotek	Puskesmas	Poliklinik	Puskesmas Pembantu	Praktik Dokter	Apotek
1	Lamongan	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2	Tejasari	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
3	Cilapar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Penolih	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5	Sinduraja	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	-2
6	Selakambang	0	0	-1	2	0	0	0	-1	2	0
7	Selanegara	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8	Kaligondang	-1	0	0	-2	-1	-1	0	0	-2	-1
9	Brecek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sempor Lor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Penaruban	0	0	0	-1	-1	0	0	0	-1	-1
12	Kalikajar	-1	-1	0	0	-1	-1	-1	0	0	-1
13	Kembaran Wetan	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14	Slinga	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15	Arenan	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16	Sidanegara	0	0	-1	1	0	0	0	-1	1	0
17	Pagerandong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Sidareja	0	0	-1	1	0	0	0	-1	1	0
Jumlah		-1	-1	-1	7	-3	-1	-1	-1	7	-3

Lanjutan…

No	Perumahan	Tahun 2036					Tahun 2041				
		Puskesmas	Poliklinik	Puskesmas Pembantu	Praktik Dokter	Apotek	Puskesmas	Poliklinik	Puskesmas Pembantu	Praktik Dokter	Apotek
1	Lamongan	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
2	Tejasari	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

No	Perumahan	Tahun 2036					Tahun 2041				
		Puskesmas	Poliklinik	Puskesmas Pembantu	Praktik Dokter	Apotek	Puskesmas	Poliklinik	Puskesmas Pembantu	Praktik Dokter	Apotek
3	Cilapar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Penolih	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5	Sinduraja	0	0	0	0	-2	0	0	0	0	-2
6	Selakambang	0	0	-1	2	0	0	0	-1	2	0
7	Selanegara	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
8	Kaligondang	-1	0	0	-2	-1	-1	0	0	-2	-1
9	Brecek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Sempor Lor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Penaruban	0	0	0	-1	-1	0	0	0	-1	-1
12	Kalikajar	-1	-1	0	0	-1	-1	-1	0	0	-1
13	Kembaran Wetan	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
14	Slinga	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
15	Arenan	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
16	Sidanegara	0	0	-1	1	0	0	0	-1	1	0
17	Pagerandong	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
18	Sidareja	0	0	-1	1	0	0	0	-1	1	0
Jumlah		-1	-1	-1	8	-3	-1	-1	-1	8	-3

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan sarana kesehatan tersebut, maka kebutuhan pengembangan sarana kesehatan di Lingkungan Hunian Kaligondang adalah :

- Meningkatkan pelayanan dari sarana kesehatan yang saat ini sudah ada
- Menambah sarana kesehatan klinik berdasarkan kebutuhan dan cakupan pelayanannya

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sarana kesehatan untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

- Peningkatan kualitas sarana kesehatan
- Pemeliharaan berkala sarana kesehatan
- Pembangunan sarana kesehatan

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan sarana kesehatan di lingkungan hunian Kaligondang direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.129.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Kesehatan di Lingkungan Hunian Kaligondang

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Kesehatan	Kementerian Dinkes Prov DPUPR Kab Dinkes Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Kesehatan	DPUPR Kab Dinkes Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Kesehatan	Kementerian Dinkes Prov DPUPR Kab Dinkes Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.6.2.4. Rencana Pelayanan Sarana Perdagangan

1. Arahan Pengembangan

Arahan pengembangan sarana perdagangan untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

- Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana perdagangan sesuai standar
- Mengembangkan sarana perdagangan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

Potensi ekonomi suatu daerah, khususnya sektor perdagangan dapat diketahui dari banyaknya pasar yang ada. Sarana perdagangan selain pasar daerah, juga dapat berupa pusat pusat perkulakan baik secara grosir maupun eceran dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan barang bagi masyarakat. Perhitungan analisis kebutuhan sarana perdagangan mengacu pada standar sebagai berikut:

- Pasar memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 30.000 jiwa/unit.
- Pertokoan memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 6.000 jiwa/unit.
- Toko/ warung memiliki standar jumlah penduduk pendukung sebesar 250 jiwa/unit.

Proyeksi kebutuhan sarana perdagangan di Lingkungan Hunian Kaligondang untuk 20 tahun mendatang telah mencukupi dan melayani seluruh lingkungan hunian.

Tabel VII.130.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Perdagangan di Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2026-2041

No	Jenis	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Pasar	-1	-1	-1	-1
2	Pertokoan	-5	-4	-4	-4
3	Toko/ Warung	-235	-223	-216	-210

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan sarana perdagangan tersebut, maka kebutuhan pengembangan sarana perdagangan di Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

- Meningkatkan pelayanan dari sarana perdagangan yang saat ini sudah ada
- Menambah sarana perdagangan lainnya sesuai kebutuhan dan cakupan pelayanannya

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sarana perdagangan untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

- Peningkatan kualitas sarana perdagangan
- Pemeliharaan berkala sarana perdagangan
- Pembangunan sarana perdagangan

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan sarana perdagangan di lingkungan hunian Kaligondang direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.131.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Perdagangan di Lingkungan Hunian Kaligondang

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Perdagangan	Kementerian Disdag Prov DPUPR Kab Disdag Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Perdagangan	DPUPR Kab Disdag Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Perdagangan	Kementerian Disdag Prov DPUPR Kab Disdag Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.6.2.5. Rencana Pelayanan Sarana Peribadatan

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana peribadatan untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana peribadatan sesuai standar
   - Mengembangkan sarana peribadatan sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Sarana peribadatan yang layak dan mencukupi baik dari segi kuantitas maupun kualitas merupakan hak setiap orang. Jenis sarana peribadatan sangat tergantung pada kondisi setempat dengan memperhatikan struktur penduduk menurut agama yang dianut, dan tata cara atau pola masyarakat setempat dalam menjalankan ibadah agamanya. Adapun jenis sarana ibadah untuk agama Islam, direncanakan menurut SNI Nomor 03-1733-2004:

   - Kelompok penduduk 250 jiwa, diperlukan musholla/langgar.
   - Kelompok penduduk 2.500 jiwa, disediakan masjid.
   - Kebutuhan gereja dan vihara adalah dengan mengikuti sistem kekerabatan atau hirarki lembaga.

Tabel VII.132.
Proyeksi Kebutuhan Sarana Peribadatan di Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026			Tahun 2031			Tahun 2036			Tahun 2041		
		Masjid	Musholla	Gereja	Masjid	Musholla	Gereja	Masjid	Musholla	Gereja	Masjid	Musholla	Gereja
1	Lamongan	-3	8	Mengikuti paroki	-3	8	Mengikuti paroki	-3	9	Mengikuti paroki	-3	9	Mengikuti paroki
2	Tejasari	-3	2		-3	2		-3	2		-3	3	
3	Cilapar	-4	-2		-4	-1		-4	-1		-4	-1	
4	Penolih	-2	-5		-2	-4		-2	-4		-2	-3	
5	Sinduraja	-5	17		-5	17		-5	18		-5	18	
6	Selakambang	-6	21		-6	23		-6	25		-6	26	
7	Selanegara	-4	1		-4	2		-3	2		-3	3	
8	Kaligondang	-3	0		-3	1		-3	1		-3	2	
9	Brecek	-2	0		-2	0		-2	0		-2	0	
10	Sempor Lor	0	0		0	0		0	1		0	1	
11	Penaruban	-1	7		-1	7		-1	7		-1	7	
12	Kalikajar	-5	7		-5	7		-5	8		-5	8	
13	Kembaran Wetan	-3	-2		-3	-1		-3	-1		-3	0	
14	Slinga	-10	12		-10	13		-10	13		-10	14	
15	Arenan	-5	3		-5	3		-5	4		-5	4	
16	Sidanegara	-2	3		-2	3		-2	4		-1	4	
17	Pagerandong	-1	-2		-1	-1		-1	-1		-1	-1	
18	Sidareja	-5	-1		-5	0		-5	0		-5	1	
Jumlah		-65	69		-64	81		-63	88		-62	94	

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan sarana peribadatan tersebut, maka kebutuhan pengembangan sarana peribadatan di Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

- Meningkatkan pelayanan dari sarana peribadatan yang saat ini sudah ada
- Menambah sarana peribadatan musholla sesuai kebutuhan dan proyeksi jumlah penduduk
- Menambah sarana peribadatan lainnya mengikuti sistem kekerabatan atau hirarki lembaga

3. Program Pengembangan

Program pengembangan sarana peribadatan untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

- Peningkatan kualitas sarana peribadatan
- Pemeliharaan berkala sarana peribadatan
- Pembangunan sarana peribadatan

4. Tahapan Pembangunan

Skenario pentahapan pembangunan sarana peribadatan di lingkungan hunian Kaligondang direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.133.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Peribadatan di Lingkungan Hunian Kaligondang

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Peribadatan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Peribadatan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Peribadatan	DPUPR Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.6.2.6. Rencana Pelayanan Sarana Budaya dan Rekreasi

1. Arahan Pengembangan

Arahan pengembangan sarana budaya dan rekreasi untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

- Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana budaya dan rekreasi sesuai standar
- Mengembangkan sarana budaya dan rekreasi sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan sarana budaya dan rekreasi di Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

   - Meningkatkan pelayanan dari sarana budaya dan rekreasi yang saat ini sudah ada
   - Menambah sarana budaya dan rekreasi sesuai jenisnya dengan mendasarkan pada kebutuhan dan proyeksi jumlah penduduk

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sarana budaya dan rekreasi untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

   - Peningkatan kualitas sarana budaya dan rekreasi
   - Pemeliharaan berkala sarana budaya dan rekreasi
   - Pembangunan sarana budaya dan rekreasi

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan sarana budaya dan rekreasi di lingkungan hunian Kaligondang direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.134.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Budaya dan Rekreasi di Lingkungan Hunian Kaligondang

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana Budaya dan Rekreasi	DPUPR Kab Dispar Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana Budaya dan Rekreasi	DPUPR Kab Dispar Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana Budaya dan Rekreasi	DPUPR Kab Dispar Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.6.2.7. Rencana Pelayanan Sarana Ruang Terbuka Hijau

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan sarana ruang terbuka hijau untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

   - Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan sarana ruang terbuka hijau sesuai standar
   - Mengembangkan sarana ruang terbuka hijau sesuai skala pelayanan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan ruang terbuka hijau berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menetapkan bahwa proporsi RTH pada wilayah perkotaan minimal 30% dari luas kota. Sedangkan, luas RTH di lingkungan hunian Kaligondang belum memenuhi jumlah yang ditentukan sebesar 30% dari total luas wilayah.

   Kebutuhan pengembangan sarana ruang terbuka hijau di Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

   - Melakukan pendataan ulang yang lebih rinci untuk keberadaan sarana ruang terbuka hijau
   - Meningkatkan pelayanan dari sarana ruang terbuka hijau yang saat ini sudah ada
   - Menambah sarana ruang terbuka hijau sesuai kebutuhan jenis RTH berdasarkan cakupan pelayanan dan proyeksi jumlah penduduk

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan sarana ruang terbuka hijau untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

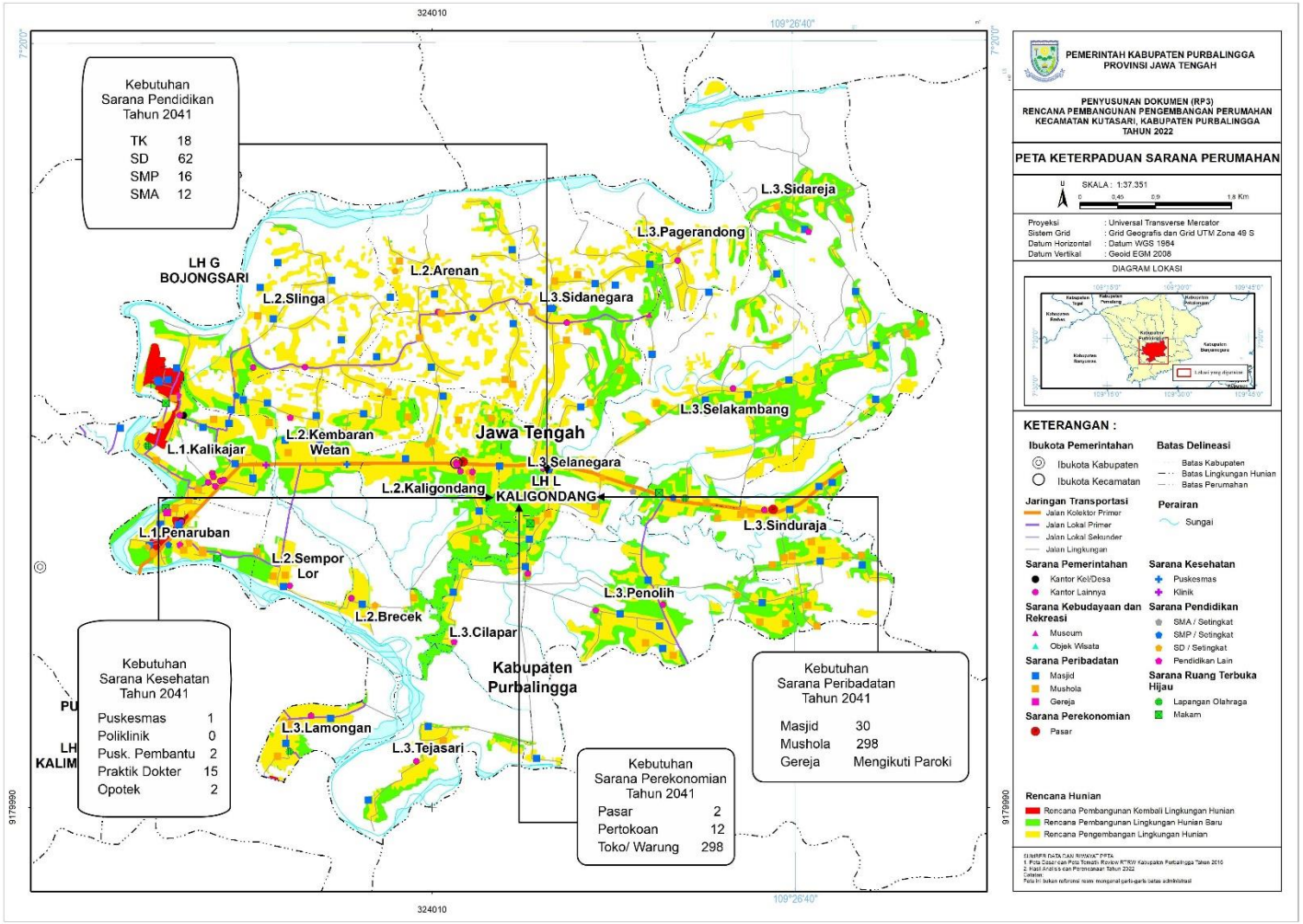
   - Peningkatan kualitas sarana ruang terbuka hijau
   - Pemeliharaan berkala sarana ruang terbuka hijau
   - Pembangunan sarana ruang terbuka hijau

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan sarana ruang terbuka hijau di lingkungan hunian Kaligondang direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.135.
Skenario Pentahapan Pembangunan Sarana Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan Hunian Kaligondang

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas sarana RTH	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan berkala sarana RTH	DPUPR Kab DLH Kab	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan sarana RTH	Kementerian BMCK Prov DPUPR Kab DLH Kab	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat				



Gambar 7.17.
Peta Rencana Keterpaduan Sarana Perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang

7.6.3. Rencana Pelayanan Utilitas

7.6.3.1. Rencana Pelayanan Jaringan Listrik

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan jaringan listrik untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

   - Memantapkan sistem dan fungsi jaringan listrik
   - Meningkatkan kualitas jaringan listrik
   - Meningkatkan akses dan cakupan pelayanan listrik
   - Mengembangkan sumber energi listrik terbarukan

2. Kebutuhan Pengembangan

   Selain itu, ketersediaan jaringan listrik eksisting perlu adanya penambahan kebutuhan listrik domestik dan non domestik agar menciptakan keterpaduan antar hirarki jaringan listrik. Kebutuhan listrik domestik ini untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Sedangkan, kebutuhan listrik non domestik berupa industri, fasilitas umum, penerangan jalan, dan cadangan. Proyeksi kebutuhan listrik di lingkungan hunian Kaligondang menggunakan asumsi sesuai standar yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

   - 1 rumah tangga memerlukan listrik sebesar 900 KVA
   - Industri: 25 % dari kebutuhan domestik
   - Fasilitas Sosial: 25 % dari kebutuhan domestik
   - Penerangan Jalan: 40 % dari kebutuhan domestik
   - Cadangan: 10 % dari kebutuhan domestik

Tabel VII.136.
Proyeksi Kebutuhan Listrik Lingkungan Hunian Kaligondang Tahun 2026-2041

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
1	Lamongan	1.630.705	1.698.709	1.740.748	1.771.257
2	Tejasari	1.606.899	1.677.831	1.721.679	1.753.502
3	Cilapar	1.255.653	1.320.839	1.361.135	1.390.380
4	Penolih	2.394.694	2.529.805	2.613.327	2.673.942
5	Sinduraja	3.081.072	3.204.058	3.280.084	3.335.260
6	Selakambang	5.287.984	5.613.860	5.815.307	5.961.507
7	Selanegara	2.109.954	2.217.448	2.283.896	2.332.122
8	Kaligondang	1.996.896	2.095.675	2.156.738	2.201.054
9	Brecek	879.884	914.972	936.663	952.405
10	Sempor Lor	784.805	818.724	839.691	854.908
11	Penaruban	2.994.339	3.029.528	3.051.280	3.067.067
12	Kalikajar	2.817.565	2.901.321	2.953.096	2.990.672
13	Kembaran Wetan	1.973.920	2.089.488	2.160.927	2.212.775
14	Slinga	3.320.218	3.445.899	3.523.591	3.579.976

No	Perumahan	Tahun 2026	Tahun 2031	Tahun 2036	Tahun 2041
15	Arenan	2.375.229	2.448.100	2.493.146	2.525.839
16	Sidanegara	2.050.044	2.166.742	2.238.881	2.291.236
17	Pagerandong	1.339.262	1.429.444	1.485.191	1.525.650
18	Sidareja	3.008.254	3.113.467	3.178.506	3.225.708
Jumlah		40.907.375	42.715.910	43.833.887	44.645.259

Sumber: Hasil Analisis Penyusun, 2022

Dari proyeksi kebutuhan utilitas jaringan listrik tersebut, maka kebutuhan pengembangan utilitas jaringan listrik di Lingkungan Hunian Kaligondang adalah :

- Meningkatkan pelayanan jaringan listrik yang saat ini sudah ada
- Mengembangkan jaringan listrik sesuai kebutuhan
- Mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan jaringan listrik untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

   - Peningkatan jaringan dan sarana prasarana pendukung
   - Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala
   - Pembangunan jaringan distribusi baru
   - Fasilitasi pengembangan panel surya di fasilitas umum dan sosial

4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan jaringan listrik di lingkungan hunian Kaligondang direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.137.
Skenario Pentahapan Pembangunan Jaringan Listrik di Lingkungan Hunian Kaligondang

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan jaringan dan sarana prasarana pendukung	DPUPR Kab PLN	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala	DPUPR Kab PLN	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
3	Pembangunan jaringan distribusi baru	DPUPR Kab PLN	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

7.6.3.2. Rencana Pelayanan Jaringan Telekomunikasi

1. Arahan Pengembangan

   Arahan pengembangan jaringan telekomunikasi untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

   - Mengembangkan jaringan tetap telekomunikasi
   - Mengembangkan jaringan bergerak seluler

2. Kebutuhan Pengembangan

   Kebutuhan pengembangan utilitas jaringan telekomunikasi di Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

   - Meningkatkan pelayanan jaringan telekomunikasi yang saat ini sudah ada
   - Mengembangkan cakupan pelayanan jaringan telekomunikasi tetap dan bergerak seluler

3. Program Pengembangan

   Program pengembangan jaringan telekomunikasi untuk Lingkungan Hunian Kaligondang adalah:

   - Peningkatan kualitas jaringan
   - Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala
   - Pengembangan cakupan pelayanan jaringan fiber optic
   - Peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan tetap telekomunikasi
   - Pengaturan pelayanan menara bersama seluler
   - Pengembangan cakupan pelayanan jaringan bergerak seluler
   - Peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan bergerak seluler

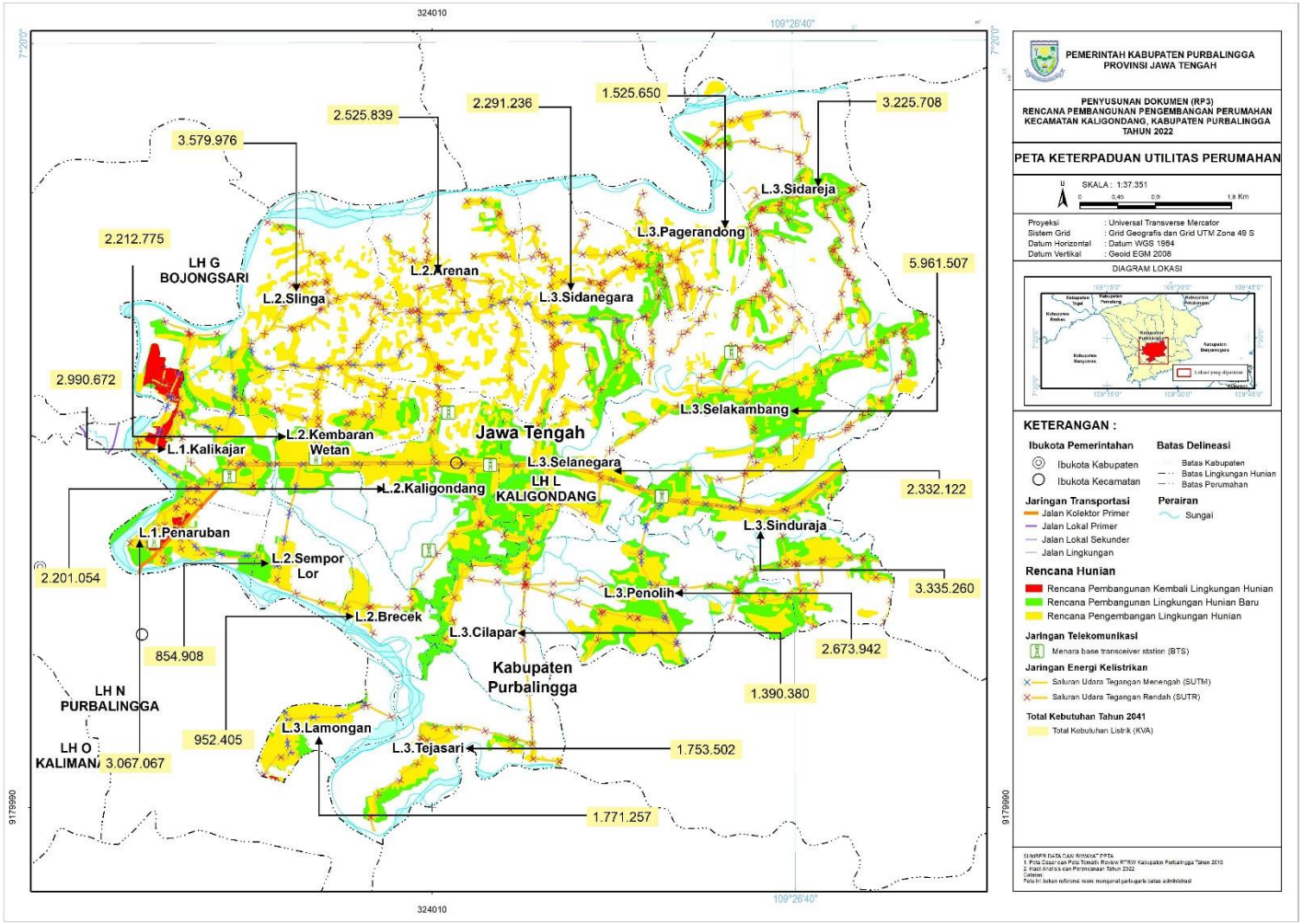
4. Tahapan Pembangunan

   Skenario pentahapan pembangunan jaringan telekomunikasi di lingkungan hunian Kaligondang direncanakan sebagai berikut:

Tabel VII.138.
Skenario Pentahapan Pembangunan Jaringan Telekomunikasi di Lingkungan Hunian Kaligondang

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
1	Peningkatan kualitas jaringan	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
2	Pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				

No	Program	Instansi	Sumber Dana	20 Tahun			
				5 Tahun I	5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV
3	Pengembangan cakupan pelayanan jaringan fiber optik	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
4	Peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan tetap telekomunikasi	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
5	Pengaturan pelayanan menara bersama seluler	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
6	Pengembangan cakupan pelayanan jaringan bergerak seluler	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				
7	Peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan bergerak seluler	DPUPR Kab PT. Telkom	APBD Kab, Swasta, Masyarakat				



Gambar 7.18.
Peta Rencana Keterpaduan Utilitas Perumahan di Lingkungan Hunian Kaligondang

BAB VIII
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN

8.1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum dalam Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan (RP3) merupakan upaya mewujudkan rencana penyediaan kebutuhan perumahan dan rencana pelayanan PSU dalam bentuk program pengembangan dan pembangunan selama jangka waktu perencanaan 5 (lima) Tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan 20 tahun.

Ketentuan umum program berfungsi sebagai:

a. Dasar pemerintah dan masyarakat dalam pemrograman investasi pengembangan satuan perumahan;
b. Arahan untuk sektor dalam penyusunan program;
c. Dasar estimasi kebutuhan pembiayaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan dan penyusunan program tahunan untuk setiap jangka 5 (lima) tahun; dan
d. Acuan bagi masyarakat dalam melakukan investasi.

Ketentuan umum program disusun berdasarkan:

a. Rencana penyediaan kebutuhan perumahan;
b. Rencana pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas;
c. Ketersediaan sumber daya dan sumber dana pembangunan;
d. Kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan; dan
e. Prioritas pengembangan dan pentahapan rencana pelaksanaan program yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah, serta rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah.

Ketentuan umum program disusun dengan kriteria:

a. Mendukung perwujudan rencana penyediaan kebutuhan perumahan dan rencana pelayanan PSU;
b. Mendukung program penataan ruang wilayah kabupaten;
c. Realistis, objektif, terukur, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu perencanaan;
d. Konsisten dan berkesinambungan terhadap program yang disusun, baik dalam jangka waktu tahunan maupun lima tahunan; dan

e. Terjaganya sinkronisasi antar program dalam satu kerangka program terpadu pengembangan wilayah kabupaten.

8.2. Program Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

Penyusunan program pengembangan dan pembangunan perumahan dilakukan berdasarkan rencana penyediaan kebutuhan perumahan dan rencana penyediaan PSU, selanjutnya diwujudkan menjadi program dan kegiatan yang bersifat komprehensif, melibatkan berbagai sektor, baik itu instansi pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Pengembangan dan Pembangunan Perumahan sendiri pada hakekatnya merupakan pembangunan yang berlangsung terus-menerus sejalan dengan dinamika perkembangan wilayah, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial budaya. Pembangunan tidak hanya berarti membangun sesuatu yang baru atau merombak yang lama dan kemudian menggantinya dengan yang baru, tetapi juga merupakan proses memperbaiki kondisi yang lama sehingga dapat dimanfaatkan secara lebih optimal.

Rumusan program pengembangan dan pembangunan perumahan dapat dibedakan atas kebutuhan wilayah, yakni program pembangunan yang situasional dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan program yang dilakukan secara berkala (seperti program-program peningkatan kemampuan kelembagaan). Rumusan program pengembangan dan pembangunan perumahan direncanakan dapat terealisasi dalam kurun waktu 20 tahun sesuai berlakunya Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan (RP3), dimana tahapan pembangunan yang mendesak untuk diprioritaskan dapat dilakukan pada 5 hingga 10 tahun pertama. Pentahapan pembangunan berdasarkan program prioritas ini perlu dilakukan karena keterbatasan modal pembangunan, sumber daya manusia, maupun ketersediaan sarana prasarana.

Beberapa aspek yang penting dan prioritas dalam program pembangunan dan pengembangan perumahan adalah:

1) **Rencana pengembangan perumahan,** yaitu dilakukan pada kawasan yang peruntukannya dalam RTRW sesuai dengan kondisi eksisting yang telah ada sebagai perumahan dan permukiman untuk dilakukan pengembangan dan peningkatan kualitas menuju perumahan yang layak huni dan berkelanjutan (tidak dalam kategori mengalami kerusakan, kemunduran atau degradasi lingkungan).
2) **Rencana pembangunan perumahan baru,** yaitu dilakukan pada kawasan yang peruntukannya dalam RTRW sebagai perumahan/permukiman namun kondisi eksistingnya belum terbangun (lahan kosong) dan direncanakan sebagai perumahan baru skala besar atau bukan skala besar dengan PSU pendukungnya.
3) **Rencana pembangunan kembali perumahan,** yaitu dilakukan pada kawasan yang peruntukannya dalam RTRW sebagai perumahan/permukiman yang mengalami kerusakan, kemunduran atau degradasi lingkungan sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas lingkungan baik berupa pemugaran, peremajaan, maupun pemindahan (relokasi ke kawasan budidaya atau relokasi ke kawasan yang lebih aman dari bencana).
4) **Rencana pelayanan prasarana,** yaitu pelayanan prasarana jalan, prasarana drainase, prasarana sistem penyediaan air minum, prasarana pengelolaan air

limbah, prasarana pengolahan persampahan, dan prasarana sistem proteksi kebakaran.

5) **Rencana pelayanan sarana,** yaitu pelayanan sarana pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana perdagangan, sarana peribadatan, sarana budaya dan rekreasi, serta sarana ruang terbuka hijau
6) **Rencana pelayanan utilitas,** yaitu pelayanan jaringan utilitas listrik, dan jaringan utilitas telekomunikasi.

8.3. Skenario Pelaksanaan Program

Indikasi program adalah bagian yang memuat rincian tahapan dan program pembangunan yang dibutuhkan untuk mewujudkan perumahan yang telah direncanakan dalam RP3. Program pengembangan dan pembangunan perumahan disusun sebagai penjabaran operasional dari kebijakan dan rencana yang telah disusun sebelumnya. Indikasi program pengembangan dan pembangunan perumahan yang disusun setidaknya memuat 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Lokasi dan Volume Anggaran. Mengindikasikan lokasi dan volume program yang disusun dalam pengembangan dan pembangunan perumahan di 6 (enam) LH yang ada di Kabupaten Purbalingga. Lokasi dan volume ini disusun berdasarkan tingkat kebutuhan program pembangunan pada masing-masing satuan perumahan maupun pada tingkat satuan permukiman.
2. Rencana Anggaran Program. Merupakan perkiraan rencana biaya pada masing-masing program pengembangan dan pembangunan perumahan.
3. Sumber Pembiayaan Program. Penyusunan program pembangunan dan pengembangan perumahan memerlukan pendanaan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan dan keberlanjutan program akan terkait dengan ketersediaan biaya yang ada. Sementara itu, kemampuan pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga memiliki keterbatasan. Oleh karenanya, pendanaan memerlukan sumber-sumber pembiayaan lainnya baik konvensional maupun non-konvensional. Sumber pembiayaan yang dapat digali antara lain sumber dana APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Purbalingga, sumber dana swadaya masyarakat, sumber dana perbankan, sumber dana swasta berupa CSR dan lainnya.
4. Jangka Waktu Pelaksanaan Program. Jangka waktu pelaksanaan program adalah 20 (dua puluh) Tahun. Indikasi program akan dijabarkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Pentahapan program pembangunan disusun untuk menghasilkan program yang efektif sesuai dengan tujuan pembangunan. Disamping itu, dilakukan berdasarkan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah. Dengan dasar pemikiran tersebut dilakukan penyaringan terhadap usulan program dengan berbagai kriteria, sehingga diperoleh usulan program yang dikelompokkan berdasarkan tahapan waktu pembangunannya. Beberapa kriteria yang dipergunakan dalam penetapan pentahapan program adalah:
   a. Kemendesakan Penanganan (Urgenitas)
      Dilakukan dengan mempertimbangkan seberapa besar tingkat kemendesakan program untuk dilakukan. Antara lain mempertimbangkan besarnya pengaruh

lanjutan apabila tidak dilakukan penanganan dan pentingnya program bagi sistem perumahan dan kawasan permukiman (PKP) yang lebih luas.

b. Dukungan Sumberdaya
   Beberapa aspek yang dipertimbangkan antara lain adalah terkait status dan stakeholders yang terlibat, partisipasi dan kontribusi stakeholders, dan kesesuaian (sinergitas) dengan rencana program pembangunan sektoral yang ada di tingkat kabupaten maupun skenario pengembangan perumahan dan kawasan permukiman dalam arahan rencana tata ruang.
c. Keberlanjutan Kegiatan
   Yaitu penentuan lokasi-lokasi prioritas yang diperkirakan akan menjadi stimulan bagi kegiatan sejenis atau kegiatan lanjutan oleh masyarakat atau stakeholder lain. Dalam hal ini, program yang dialokasikan dapat bersifat penanganan sebagian (mendorong masyarakat untuk melanjutkan) dan bersifat percontohan (pilot project) yang bernuansa pembelajaran kepada masyarakat dan stakeholder terkait.
d. Aspek Manfaat
   Prioritas program disusun dengan melihat manfaat secara luas, baik pada satuan perumahan, maupun satuan permukiman secara luas. Mengalokasikan program-program prioritas agar tersebar merata secara maksimal.
e. Pelaksana Program
   Pelaksana program merupakan penanggungjawab dalam pelaksanaan program pengembangan dan pembangunan perumahan yang telah disusun. Pelaksana program dapat terdiri dari multi-stakeholders yang terlibat dalam terlaksananya program. Pelaksana dapat terdiri atas Instansi, Badan atau Lembaga Pemerintah, Swasta maupun Masyarakat.

Adapun indikasi program pengembangan dan pembangunan perumahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Indikasi Program Pengembangan dan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 – 2041

Program				Lokasi	Vol		RAB (Rp. Jutaan)	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan 20 Tahun								Pelaksana
									5 Tahun I					5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV	
									1	2	3	4	5				
I.	Rencana Pengembangan Perumahan																
	1.	Peningkatan Efisiensi Potensi Perumahan															
		-	peningkatan kualitas perumahan yang mendukung pariwisata, Industri, dan fungsi budidaya lainnya	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	12.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat									Kementerian, Disperakim Prov Jateng, Dinperkim Kab Purbalingga, swasta, masyarakat
		-	Pengembangan permukiman dengan bangunan vertikal terbatas (rusun) yang mendukung peruntukan industri	LH Purbalingga, LH Kalimanah, LH Padamara, LH Kaligondang	4	Ls	12.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat									Kementerian, Disperakim Prov Jateng, Dinperkim Kab Purbalingga, swasta, masyarakat
		-	peningkatan kualitas perumahan pada kawasan strategis	LH Kutasari, LH Bojongsari, LH Kaligondang	3	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta, Masyarakat									Dinperkim Kab Purbalingga, swasta, masyarakat
	2.	Peningkatan Kualitas Bangunan Rumah															
		-	Perbaikan rumah tidak layak huni	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	12.000	APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat									Disperakim Prov Jateng, Dinperkim Kab Purbalingga, swasta, masyarakat

Program			Lokasi	Vol		RAB (Rp. Jutaan)	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan 20 Tahun								Pelaksana
								5 Tahun I					5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV	
								1	2	3	4	5				
	3.	Peningkatan Pelayanan Perumahan														
		- pemeliharaan PSU	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta, Masyarakat									Dinperkim Kab Purbalingga, DLH Kab Purbalingga, masyarakat
	4.	Peningkatan Keterpaduan PSU Perumahan														
		- peningkatan PSU sesuai standar pelayanan minimal	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta, Masyarakat									Dinperkim Kab Purbalingga, DLH Kab Purbalingga, swasta, masyarakat
	5.	Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh														
		- Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian, serta pemberdayaan masyarakat	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta, Masyarakat									Dinperkim Kab Purbalingga, DLH Kab Purbalingga, swasta, masyarakat
	6.	Pencegahan Perumahan Tidak Terencana														
		- pelaksanaan aturan dan standar perumahan dan permukiman sesuai tata ruang	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab									Dinperkim Kab Purbalingga, DPUPR Kab Purbalingga, DPMPTSP Kab Purbalingga

Program				Lokasi	Vol		RAB (Rp. Jutaan)	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan 20 Tahun								Pelaksana
									5 Tahun I					5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV	
									1	2	3	4	5				
	7.	Satuan Perumahan yang Dibatasi dan Didorong															
		-	mengendalikan perumahan pada kawasan rawan bencana	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab									Dinperkim Kab Purbalingga, DPUPR Kab Purbalingga, DPMPTSP Kab Purbalingga
		-	Mendorong perumahan yang mendukung peran LH dan mendukung fungsi budidaya lainnya, yang sesuai dengan tata ruang	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab									Dinperkim Kab Purbalingga, DPUPR Kab Purbalingga, DPMPTSP Kab Purbalingga
	8.	Peningkatan Pelestarian Alam dan Potensi Sumberdaya															
		-	peningkatan kualitas perumahan yang ramah lingkungan	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat									Disperakim Prov Jateng, Dinperkim Kab Purbalingga, DLH Kab Purbalingga, swasta, masyarakat
II.	**Rencana Pembangunan Baru Perumahan**																
	1.	Penyediaan Lokasi															
		-	penyediaan lokasi perumahan baru melalui kegiatan Kasiba dan Lisiba	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta, Masyarakat									Dinperkim Kab Purbalingga, DPUPR Kab Purbalingga, DPMPTSP Kab

Program				Lokasi	Vol		RAB (Rp. Jutaan)	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan 20 Tahun								Pelaksana
									5 Tahun I					5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV	
									1	2	3	4	5				
																	Purbalingga, swasta, masyarakat
	2.	Pembangunan rumah baru															
		-	pembangunan rumah baru yang layak huni dan sesuai tata ruang	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta, Masyarakat									Dinperkim Kab Purbalingga, swasta, masyarakat
	3.	Penyediaan PSU															
		-	pembangunan PSU sesuai standar pelayanan minimalnya	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat									Disperakim Prov Jateng, Dinperkim Kab Purbalingga, DLH Kab Purbalingga, swasta, masyarakat
	4.	Pelayanan Jasa, Pemerintahan, Sosial, Ekonomi															
		-	Pemenuhan pelayanan jasa, pemerintahan, sosial dan ekonomi pada lokasi pembangunan baru	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta, Masyarakat									Dinperkim Kab Purbalingga, swasta, masyarakat
III.	Rencana Pembangunan Kembali Perumahan																
	1.	Rehabilitasi															
		-	peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui pola rehabilitasi pada lokasi yang mengalami kerusakan,	LH Purbalingga, LH Kalimanah, LH Padamara, LH Kaligondang, LH Bobotsari	5	Ls	5.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat									Kementerian, Disperakim Prov Jateng Dinperkim Kab Purbalingga

Program				Lokasi	Vol		RAB (Rp. Jutaan)	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan 20 Tahun								Pelaksana
									5 Tahun I					5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV	
									1	2	3	4	5				
			kemunduran, atau degradasi lingkungan														
IV.	Rencana Pelayanan Prasarana Perumahan																
	1.	Jaringan Jalan															
		-	peningkatan jalan kolektor	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Prov, APBD Kab									BMCK Prov Jateng, DPUPR Kab Purbalingga
		-	peningkatan jalan lokal, dan lingkungan	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab									Dinperkim Kab Purbalingga
		-	pemeliharaan dan perbaikan jalan secara berkala	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta, Masyarakat									Dinperkim Kab Purbalingga, DPUPR Kab Purbalingga, swasta, masyarakat
		-	pembangunan jaringan jalan baru	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab,									DPUPR Kab Purbalingga, Dinperkim Kab Purbalingga
		-	peningkatan pelayanan angkutan umum	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta, Masyarakat									Dishub Kab Purbalingga, swasta, masyarakat
		-	pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan terminal dan halte	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta									Dishub Kab Purbalingga, swasta
		-	peningkatan dan pembangunan jalur pejalan kaki (pedestrian) di pusat-	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Prov, APBD Kab, Swasta									BMCK Prov Jateng, Dinperkim Kab

Program				Lokasi	Vol		RAB (Rp. Jutaan)	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan 20 Tahun								Pelaksana
									5 Tahun I					5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV	
									1	2	3	4	5				
			pusat pelayanan														Purbalingga, swasta
		-	pembangunan jalur atau lajur pesepeda sesuai dimensi jalan	Satuan perumahan di LH Purbalingga, LH Kalimanah, dan LH Padamara	3	Ls	3.000	APBD Kab, Swasta									Dinas Perhubungan Kab Purbalingga, swasta
	2.	Jaringan Drainase															
		-	peningkatan sistem jaringan drainase terintegrasi	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Prov, APBD Kab									BMCK Prov Jateng, DPUPR Kab Purbalingga
		-	pemeliharaan berkala dan perbaikan/peningkatan konstruksi jaringan drainase	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta, Masyarakat									DPUPR Kab Purbalingga, swasta, masyarakat
		-	pembangunan jaringan drainase baru	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Prov, APBD Kab									BMCK Prov Jateng, DPUPR Kab Purbalingga
	3.	Jaringan Air Minum															
		-	sosialisasi pola hidup bersih sehat (PHBS) dan standar teknis sumur dangkal	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta, Masyarakat									DLH Kab Purbalingga, Dinkes Kab Purbalingga
		-	Peningkatan kapasitas produksi air minum	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab									PDAM
		-	pemeliharaan dan perbaikan jaringan air minum secara berkala	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab									PDAM

Program				Lokasi	Vol		RAB (Rp. Jutaan)	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan 20 Tahun								Pelaksana
									5 Tahun I					5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV	
									1	2	3	4	5				
		-	pembangunan jaringan distribusi baru dan penambahan sambungan rumah (SR)	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab,									PDAM
		-	peningkatan pelayanan air minum	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab,									PDAM
		-	pengembangan jaringan perpipaan perdesaan/Non PDAM berbasis masyarakat	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta, Masyarakat									Dinperkim Kab Purbalingga, swasta, masyarakat
	4.	Pengelolaan Air Limbah															
		-	Peningkatan SPAL Domestik setempat layak dan aman	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Masyarakat									Dinperkim Kab Purbalingga, masyarakat
		-	Pembangunan SPAL Domestik terpusat skala lingkungan	LH Purbalingga, LH Padamara, LH Kaligondang, LH Kalimanah, LH Bojongsari	5	Ls	5.000	APBD Kab,									DLH Kab Purbalingga
		-	Peningkatan sarana dan prasarana air limbah sesuai persyaratan teknis	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat									DLH Kab Purbalingga
	5.	Pengolahan Sampah															
		-	peningkatan keterpaduan sistem pewadahan dan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta, Masyarakat									DLH Kab Purbalingga, swasta, masyarakat
		-	Pengembangan pewadahan sampah terpilah	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta, Masyarakat									DLH Kab Purbalingga, swasta,

Program				Lokasi	Vol		RAB (Rp. Jutaan)	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan 20 Tahun								Pelaksana
									5 Tahun I					5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV	
									1	2	3	4	5				
																	masyarakat
		-	pembangunan TPS dan TPS3R di skala lingkungan	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta,									DLH Kab Purbalingga, swasta
		-	pengembangan sarana pengangkut sampah sesuai persyaratan teknis	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab									DLH Kab Purbalingga
		-	pengembangan bank sampah	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta, Masyarakat									DLH Kab Purbalingga, swasta, masyarakat
		-	pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) skala kawasan	LH Padamara, dan LH Kaligondang	2	Ls	2.000	APBD Kab									DLH Kab Purbalingga
	6.	Sistem Proteksi Kebakaran															
		-	peningkatan kualitas pos pemadam kebakaran	LH Purbalingga	1	Ls	1.000	APBD Kab									Satpol PP Kab Purbalingga
		-	pengembangan pos satuan relawan kebakaran (Satlakar)	LH Kaligondang, LH Padamara, LH Kalimanah, LH Kutasari, dan LH Bojongsari	5	Ls	5.000	APBD Kab									Satpol PP Kab Purbalingga, BPBD Kab Purbalingga
		-	peningkatan sarana komunikasi dan data proteksi kebakaran yang handal	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab									Satpol PP Kab Purbalingga
		-	pengadaan alat pemadam api ringan (APAR)	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab									Satpol PP Kab Purbalingga
		-	pengadaan alat pemadam api berat (APAB)	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab									Satpol PP Kab Purbalingga
		-	pemeliharaan kendaraan pemadam kebakaran	LH Purbalingga	1	Ls	1.000	APBD Kab									Satpol PP Kab Purbalingga

Program				Lokasi	Vol		RAB (Rp. Jutaan)	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan 20 Tahun								Pelaksana
									5 Tahun I					5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV	
									1	2	3	4	5				
		-	pemeliharaan berkala dan peningkatan kualitas sarana proteksi kebakaran	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab									Satpol PP Kab Purbalingga
		-	Pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan dan penanganan dini kebakaran	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab									Satpol PP Kab Purbalingga
V.	Rencana Pelayanan Sarana Perumahan																
	1.	Sarana Pemerintahan															
		-	peningkatan kualitas sarana pemerintahan	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab									DPUPR Kab Purbalingga
		-	pemeliharaan berkala sarana pemerintahan	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab									DPUPR Kab Purbalingga
		-	pembangunan sarana pemerintahan	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab									DPUPR Kab Purbalingga
	2.	Sarana Pendidikan															
		-	peningkatan kualitas sarana Pendidikan	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab									Dinas Pendidikan Kab Purbalingga
		-	pemeliharaan berkala sarana Pendidikan	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab									Dinas Pendidikan Kab Purbalingga
		-	pembangunan sarana Pendidikan	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, swasta									Dinas Pendidikan Kab Purbalingga, swasta
	3.	Sarana Kesehatan															
		-	peningkatan kualitas sarana Kesehatan	Seluruh satuan perumahan di 6	6	Ls	6.000	APBD Kab									Dinas Kesehatan Kab

Program				Lokasi	Vol		RAB (Rp. Jutaan)	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan 20 Tahun								Pelaksana
									5 Tahun I					5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV	
									1	2	3	4	5				
				(enam) LH													Purbalingga
		-	pemeliharaan berkala sarana Kesehatan	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab									Dinas Kesehatan Kab Purbalingga
		-	pembangunan sarana Kesehatan	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, swasta									Dinas Kesehatan Kab Purbalingga, swasta
	4.	Sarana Perdagangan															
		-	peningkatan kualitas sarana Perdagangan	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat									Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Purbalingga, swasta, masyarakat
		-	pemeliharaan berkala sarana Perdagangan	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta, Masyarakat									Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Purbalingga, swasta, masyarakat
		-	pembangunan sarana Perdagangan	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBN, APBD Prov, APBD Kab, Swasta, Masyarakat									Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab Purbalingga, swasta, masyarakat

Program			Lokasi	Vol		RAB (Rp. Jutaan)	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan 20 Tahun								Pelaksana
								5 Tahun I					5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV	
								1	2	3	4	5				
	5.	Sarana Peribadatan														
		- peningkatan kualitas sarana Peribadatan	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	Swasta, Masyarakat									Swasta, masyarakat
		- pemeliharaan berkala sarana Peribadatan	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	Swasta, Masyarakat									Swasta, masyarakat
		- pembangunan sarana Peribadatan	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta, Masyarakat									DPUPR Kab Purbalingga, Swasta, masyarakat
	6.	Sarana Budaya dan Rekreasi														
		- peningkatan kualitas sarana Budaya dan Rekreasi	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta, Masyarakat									Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab Purbalingga, swasta, masyarakat
		- pemeliharaan berkala sarana Budaya dan Rekreasi	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta, Masyarakat									Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab Purbalingga, swasta, masyarakat
		- pembangunan sarana Budaya dan Rekreasi	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta, Masyarakat									Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kab Purbalingga, swasta, masyarakat
	7.	Sarana RTH														
		- peningkatan kualitas sarana RTH	Seluruh satuan perumahan di 6	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta,									DLH Kab Purbalingga

Program				Lokasi	Vol		RAB (Rp. Jutaan)	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan 20 Tahun								Pelaksana
									5 Tahun I					5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV	
									1	2	3	4	5				
				(enam) LH				Masyarakat									
		-	pemeliharaan berkala sarana RTH	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta, Masyarakat									DLH Kab Purbalingga, swasta, masyarakat
		-	pembangunan sarana RTH	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta, Masyarakat									DLH Kab Purbalingga, swasta, masyarakat
VI.	Rencana Pelayanan Utiltas Perumahan																
	1.	Jaringan Listrik															
		-	peningkatan jaringan dan sarana prasarana pendukung	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab									PLN
		-	pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab									PLN
		-	pembangunan jaringan distribusi baru	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab									PLN
		-	fasilitasi pengembangan panel surya di fasilitas umum dan sosial	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta									DPUPR Kab Purbalingga, PLN
	2.	Jaringan Telekomunikasi															
		-	peningkatan kualitas jaringan	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta									PT. Telkom, swasta
		-	pemeliharaan dan perbaikan jaringan secara berkala	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta									PT. Telkom, swasta

Program				Lokasi	Vol		RAB (Rp. Jutaan)	Sumber Pendanaan	Waktu Pelaksanaan 20 Tahun								Pelaksana
									5 Tahun I					5 Tahun II	5 Tahun III	5 Tahun IV	
									1	2	3	4	5				
		-	pengembangan cakupan pelayanan jaringan fiber optik	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta									PT. Telkom, swasta
		-	peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan tetap telekomunikasi	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab									PT. Telkom
		-	pengaturan pelayanan menara bersama seluler	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta									DPUPR Kab Purbalingga, PT. Telkom, swasta
		-	pengembangan cakupan pelayanan jaringan bergerak seluler	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta									PT. Telkom, swasta
		-	peningkatan sarana prasarana pendukung sistem jaringan bergerak seluler	Seluruh satuan perumahan di 6 (enam) LH	6	Ls	6.000	APBD Kab, Swasta									PT. Telkom, swasta

Sumber: Penyusun, 2022